SALINAN

BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 53 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu menyusun rencana kerja perangkat daerah yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan;
b. bahwa dalam rangka untuk memastikan pembangunan daerah yang berkelanjutan, maka dibutuhkan pedoman kegiatan bagi perangkat daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya;
c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Tahun Anggaran adalah tahun pelaksanaan anggaran selama kurun waktu 12 (dua belas) bulan, mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 ini sebagai:
a. pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Daftar Rencana Pelaksanaan Anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026, yang dalam penyusunannya didahului dengan menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2026; dan
b. instrumen evaluasi dan pengendalian program/kegiatan/sub kegiatan Tahun 2026.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB III
SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
a. bab I : pendahuluan;
b. bab II : hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
c. bab III : tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
d. bab IV : Renja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
e. bab V : penutup.

Pasal 4

Dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 21-11-2025

BUPATI BANJARNEGARA,

ttd

AMALIA DESIANA

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 21-11-2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

ttd

TURSIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2025 NOMOR 53

Mengetahui sesuai dengan aslinya,

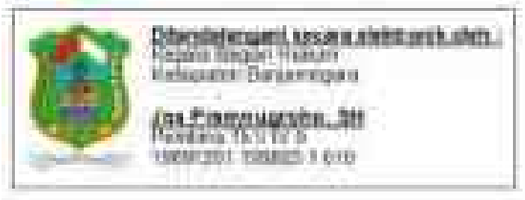

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 53 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan yang diatur melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan pembentukan tim penyusun, penelaahan rancangan awal RKPD, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, hingga pada penyempurnaan berdasarkan

pada Peraturan Bupati tentang RKPD. Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, penyusunan Renja Perangkat Daerah juga mengacu pada Renja Kementerian/Lembaga terkait, serta Renja Perangkat Daerah Provinsi terkait.

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2. Landasan Hukum

Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 77 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun dengan maksud untuk:

a. Menjabarkan RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 ke dalam rencana program kegiatan prioritas Tahun 2026 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Renja K/L Tahun 2026 dan Renja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;
b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerapan anggaran berbasis kinerja.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

a. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA-DPA dalam Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2026, yang dalam penyusunannya didahului dengan menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026;
b. Sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Tahun 2026;
c. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun berdasarkan sistematika yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah.

BAB 2 : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dan atau pokok-pokok DPRD.

BAB 3 : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan tahun 2026.

BAB 4 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran RKPD.

BAB 5 : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 disusun untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah meliputi unsur Pendukung Urusan Pemerintahan.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 pada anggaran murni terdiri dari 3 (Tiga) Program, 18 (Delapan Belas) Kegiatan, dan 58 (Lima Puluh Delapan) Sub Kegiatan dengan total anggaran murni sebesar Rp. 30.280.095.910,- (Tiga Puluh Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah), dan pada anggaran perubahan sebesar Rp. 32.818.424.999,- (Tiga Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Delapan Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) dengan fokus utama pada Nilai Akuntabilitas Pelayanan. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah yang meliputi:

1. Perlunya pemantapan reformasi birokrasi pada seluruh area perubahan;
2. Kurangnya pemahaman pada Perangkat Daerah dan kecamatan terkait pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat;
3. Masih adanya MOU yang disusun namun belum ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS);
4. Masih kurangnya pemahaman Perangkat Daerah terhadap definisi operasional IKK Outcome LPPD;
5. Dokumentasi produk hukum pada website resmi masih belum optimal;
6. Masih adanya harga elpiji 3 kg diatas harga eceran tertinggi di tingkat konsumen;
7. Pembinaan Industri kecil belum optimal;
8. Masih adanya program pembangunan yang belum terpublikasi kepada Masyarakat secara berkala;

9. Pelaksanaan Penyusunan laporan akuntabilitas Kinerja Setda masih belum optimal baik secara kualitas maupun kuantitas;
10. Pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran masih menumpuk di Triwulan IV;
11. Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan belum didukung aplikasi sistem informasi yang berbasis website;
12. Penggunaan produk dalam negeri pada proses pengadaan barang dan jasa masih belum optimal;
13. Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap Standar Pelayanan Publik masih belum optimal;
14. Penyusunan data dukung pengukuran kematangan kelembagaan, evaluasi pelayanan publik belum optimal;
15. Kebijakan penataan kelembagaan yang sangat dinamis;
16. Kurangnya SDM dalam rangka melaksanakan evaluasi dan pembinaan ke perangkat daerah terkait dengan kelembagaan, pelayanan publik dan tata laksana, kinerja perangkat daerah dan implementasi reformasi birokrasi di perangkat daerah;

Dari 3 (Tiga) Program, 18 (Delapan Belas) Kegiatan, dan 58 (Lima Puluh Delapan) Sub Kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah tersebut, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang disetujui untuk dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024 dengan total anggaran sebesar Rp. 32.818.424.999,-

Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024, terjadi beberapa perubahan yang meliputi penambahan atau pengurangan pagu anggaran dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang didukung oleh 10 (sepuluh) Kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) Sub. Kegiatan dengan total anggaran yang semula Rp. 24.878.016.410,- menjadi Rp. 27.251.945.499,-
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

   Pada Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang didukung oleh 4 (empat) Kegiatan dan 11 (sebelas) Sub. Kegiatan dengan

total anggaran yang semula Rp. 4.441.378.200,- menjadi Rp. 4.590.778.200,-

3. Program Perekonomian dan Pembangunan

   Pada Program Perekonomian dan Pembangunan yang didukung oleh 4 (empat) kegiatan dan 12 (dua belas) Sub. Kegiatan dengan total anggaran yang semula Rp. 960.701.300,- menjadi Rp. 975.701.300,-.

Dinamika yang terjadi selama tahun 2024 turut mempengaruhi keberhasilan pencapaian Renja Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2024, tercatat adanya hasil yang baik dikarenakan adanya pencapaian maupun pelampauan target maupun yang tidak memenuhi target.

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

   Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi :

   1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan : Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Faktor yang mempengaruhi ketidaktercapaian tersebut antara lain adalah adanya kekosongan posisi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

   Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi :

   1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat meliputi Kegiatan: Administrasi Tata Pemerintahan, Fasilitasi Kerja Sama Daerah, Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat.
   2. Program Perekonomian dan Pembangunan meliputi Kegiatan: Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian, Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam, Pelaksanaan Administrasi Pembangunan dan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa .

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan : Penataan Organisasi, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Kepemimpinan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja organisasi di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara;
2. Komitmen pimpinan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan;
3. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan sumber daya aparatur dibidang pemerintahan dan pembangunan;
4. Terwujudnya tertib laporan pelaksanaan tugas kedinasan;
5. Tersedianya sarana logistik yang mendukung pelayanan administrasi perkantoran;
6. Perencanaan dan target kegiatan yang tepat;
7. Koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait;
8. Tersedianya sistem LPSE;
9. Sarana prasarana dan anggaran yang cukup memadai;
10. Dukungan jaringan banjarnegara *online*.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian pada indikator kinerja Sekretariat Daerah sangat dipengaruhi faktor Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana yang memadai khususnya di bidang inovasi teknologi. Pada tahun perencanaan selanjutnya, perlu diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, diantaranya:

1. Perencanaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan seawal mungkin sesuai dengan rencana kegiatan operasional yang sudah disusun;
2. Dukungan jaringan online untuk meningkatkan pelayanan dan kreatifitas dalam memanfaatkan teknologi informasi;
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan dilakukan secara intensif dan berkala;
4. Meningkatkan mutu pelayanan publik melalui pembinaan intensif terhadap SKPD pelaksana pelayanan publik;
5. Mendorong kegiatan yang bersifat inovatif.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=(5+7+9)/3	(11)=10/4
	URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
1	**BAGIAN PEMERINTAHAN**									
4.01.02	**Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan Kesra	100%	100%	100%	279	278,95%	100%	100%	100%
4.01.02.2.01.	**Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan**	Persentase fasilitasi dan koordinasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	100%
4.01.02.2.01.01	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	100%	4 dok	4 dok	100%
4.01.02.2.01.02	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Administrasi Kewilayahan	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	1 dok	100%
4.01.02.2.01.03	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	100%	2 dok	2 dok	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=(5+7+9)/3	(11)=10/4
		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah								
4.01.02.2.04	**Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	**Persentase fasilitasi Kerja sama Daerah**	**100 %**	**100%**	**100%**	**146,67**	**146,67%**	**100%**	**100%**	**100%**
4.01.02.2.04.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	10 dok	10 dok	30 dok	44 dok	147%	10 dok	10 dok	100%
4.01.02.2.04.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 dok	-	-	-	-	-	-	-
4.01.02.2.04.03	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	2 lap	2 lap	2 lap	2 lap	100%	2 lap	2 lap	100%
02	**BAGIAN KESRA**									
4.01.02.2.01	**Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Prosentase terlaksanany a kegiatan mental spiritual dan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=(5+7+9)/3	(11)=10/4
		kesejahteraan rakyat								
4.01.02.2.02.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	7 dok	4 dok	7 dok	7 dok	100%	7 dok	7 dok	100%
4.01.02.2.02.02	Sub Kegiatan Kebijakan, Evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan Sosial.	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	3 dok	1 dok	3 dok	3 dok	100%	3 dok	3 dok	100%
4.01.02.2.02.03	Sub Kegiatan Kebijakan, Evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan,	3 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	3 dok	3 dok	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=(5+7+9)/3	(11)=10/4
		Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat								
02	**BAGIAN HUKUM**									
4.01.02.2.03	**Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Persentase produk hukum daerah yang diundangkan, dipublikasikan dan bantuan hukum yang diselesaikan**	**100%**	**100%**	**100%**	**106,60**	**107%**	**100%**	**100%**	**100%**
4.01.02.2.03.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	220 dok	220 dok	500 dok	533 dok	107%	220 dok	220 dok	100%
4.01.02.2.03.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	31 kasus	31 kasus	31 kasus	31 kasus	100%	31 kasus	31 kasus	100%
		Jumlah laporan hak asasi	4 lap	4 lap	4 lap	4 lap	100%	4 lap	4 lap	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=(5+7+9)/3	(11)=10/4
		manusia yang disusun								
4.01.02.2.03.03	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	220 dok	220 dok	220 dok	200 lap	91%	220 dok	220 dok	100%
		Jumlah jenis buku peraturan perundang-undangan yang dihimpun	15 dok	15 dok	15 dok	15 dok	100%	15 dok	15 dok	100%
		Jumlah produk hukum daerah yang disosialisasikan	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	100%	2 dok	2 dok	100%
04	**BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM**									
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	Persentase engkoordinasian perumusan kebijakan bidang perekonomian	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=(5+7+9)/3	(11)=10/4
		dan pembangunan								
4.01.03.2.01	**Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Prosentase pelaksanaan kebijakan perekonomian untuk pengelolaan BUMD dan BLUD, Monev untuk pengendalian dan distribusi perekonomian, tersusunnya perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil**	**100 %**	**100%**	**100%**	**100**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
4.01.03.2.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	100%	5 dok	5 dok	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=(5+7+9)/3	(11)=10/4
4.01.03.2.01.02	Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	100%	12 lap	12 lap	100%
4.01.03.2.01.03	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	100%	4 dok	4 dok	100%
4.01.03.2.04	**Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**Prosentase pelaksanaan fasilitasi dan pemantauan pelaksanaan kebijakan Sumber Daya Alam bidang Pertanian arti luas, pertambangan dan lingkungan hidup, kebijakan pengelolaan energi dan air**	**100%**	**100%**	**100%**	**100**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=(5+7+9)/3	(11)=10/4
4.01.03.2.04.01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian , KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	100%	4 dok	4 dok	100%
4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan LH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo,	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	100%	4 dok	4 dok	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=(5+7+9)/3	(11)=10/4
		Perhubungan, Statistik, Persandian								
4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	100%	4 dok	4 dok	100%
05	**BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**									
4.01.03.2.02	**Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Persentase pelaksanaan fasilitasi penyusunan pengendalian, monev dan pelaporan program pembangunan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=(5+7+9)/3	(11)=10/4
4.01 .03 .2.02 . 01	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	8 dok	8 dok	12 dok	12 dok	100%	12 dok	12 dok	100%
4.01 .03 .2.02 . 02	Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	100%	12 lap	12 lap	100%
4.01 .03 .2.02 . 03	Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi danPelaporan Pelaksanaan Pembangunan	13 lap	14 lap	13 lap	13 lap	100%	13 lap	13 lap	100%
06	**BAGIAN PENGADAAN BARANG JASA**									
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	**Persentase Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**92,5%**	**-**	**91,50%**	**95,90**	**105%**	**92%**	**92%**	**100%**
4.01.03.02.03.	**Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Prosentase fasilitasi pengadaan barang dan**	**98 %**	**98 %**	**98%**	**93,33**	**95,23%**	**98 %**	**98 %**	**100%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=(5+7+9)/3	(11)=10/4
		jasa secara elektronik								
4.01.03.02.03.01	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok	100%	12 dok	12 dok	100%
4.01.03.02.03.02	Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah dokumen hasil yanan pengadaan secara elektronik	250 dok	150 dok	250 dok	485 dok	194%	250 dok	250 dok	100%
4.01.03.02.03.03	Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100%	100 orang	100 orang	100%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	**1. Persentase Penunjang urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana** **2. Persentase dokumen perencanaan, evaluasi**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**104%**	**100%**	**100%**	**100%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=(5+7+9)/3	(11)=10/4
		dan pelaporan PD yang ditetapkan tepat waktu								
07	**BAGIAN UMUM**									
4.01.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Prosentase Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah**	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	100%
4.01.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/ Bulan	100 Orang/ Bulan	125 Orang/ Bulan	125 Orang/ Bulan	100%	100 Orang/ Bulan	100 Orang/ Bulan	100%
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dok	1 dok	12 dok	12 dok	100%	12 dok	12 dok	100%
4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan	2 lap	2 lap	2 lap	2 lap	100%	2 lap	2 lap	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=(5+7+9)/3	(11)=10/4
		Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD								
4.01.01.2.05	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan layanan administrasi Kepegawaian Setda	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	100%
4.01.01.2.05.01	Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	100%	3 unit	3 unit	100%
4.01.01.2.05.03	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	1 dok	100%
4.01.01.2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase pemenuhan kebutuhan pelayanan dan jasa kantor**	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=(5+7+9)/3	(11)=10/4
4.01.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	12 Paket	100%
4.01.01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	12 Paket	100%
4.01.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	12 Paket	100%
4.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	12 Paket	100%
4.01.01.2.06.06	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
4.01.01.2.07	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Terlayaninya Kebutuhan Peralatan dan**	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=(5+7+9)/3	(11)=10/4
		perlengkapan pada Rumah Jabatan dan Sekretariat								
4.01.01.2.07.01	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100%	12 paket	12 paket	100%
4.01.01.2.07.02	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100%	12 paket	12 paket	100%
4.01.01.2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Presentase terpenuhinya jasa kantor**	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	100%
4.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
4.01.01.2.08.03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor yg disediakan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=(5+7+9)/3	(11)=10/4
4.01.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	26 Laporan	26 Laporan	26 Laporan	26 Laporan	100%	26 Laporan	26 Laporan	100%
4.01.01.2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Terlayaninya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang pada Rumah Dinas dan Sekretariat	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	100%
4.01.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	100%	6 Unit	6 Unit	100%
4.01.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	33 Unit	33 Unit	33 Unit	33 Unit	100%	33 Unit	33 Unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=(5+7+9)/3	(11)=10/4
		Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya								
4.01.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit	15 Unit	20 Unit	20 Unit	100%	25 Unit	25 Unit	100%
4.01.01.2.09.010	Sub. Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	20 Unit	5 Unit	10 Unit	10 Unit	100%	15 Unit	15 Unit	100%
4.01.01.2.09.11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit	3 Unit	4 Unit	4 Unit	100%	4 Unit	4 Unit	100%
4.01.01.2.09.12	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	20 Unit	25 Unit	25 Unit	100%	27 Unit	27 Unit	100%
4.01.01.2.11	**Kegiatan Administrasi Keuangan dan**	Prosentase pemenuhan kebutuhan	100%	38%	100%	37,50	38%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=(5+7+9)/3	(11)=10/4
	Operasional Kepala dan Wakil Kepala Daerah	keuangan dan Sarana prasarana Kepala dan Wakil Kepala Daerah								
4.01.01.2.11.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala	2 Orang/ Bulan	-	2 Orang / Bulan	-	-	2 Orang / Bulan	2 Orang / Bulan	100%
4.01.01.2.11.02	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yg disediakan	2 Paket	1 Paket	2 Paket	1 Paket	50%	2 Paket	2 Paket	100%
4.01.01.2.11.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	1 orang	2 Orang	1 orang	50%	2 Orang	2 Orang	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=(5+7+9)/3	(11)=10/4
4.01.01.2.11.04	Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang	2 Orang/ Bulan	1 Orang/ Bulan	2 Orang/ Bulan	1 Orang/ Bulan	50%	2 Orang/ Bulan	2 Orang/ Bulan	100%
4.01.01.2.12	**Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Prosentase pemenuhan kebutuhan keuangan dan Sarana prasarana Kepala dan Wakil Kepala Daerah**	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	100%
4.01.01.2.12.01	Sub Keg. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100%	12 paket	12 paket	100%
4.01.01.2.12.02	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil KDH yang disediakan	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100%	12 paket	12 paket	100%
4.01.01.2.12.03	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100%	12 paket	12 paket	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=(5+7+9)/3	(11)=10/4
4.01.01.2.14	**Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Prosentase pemenuhan Pelayanan keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
4.01.01.2.14.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	100%	12 lap	12 lap	100%
4.01.01.2.14.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	100%	12 lap	12 lap	100%
4.01.01.2.14.03	Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	100%	12 lap	12 lap	100%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Penataan Organisasi	49,7	-	48,70	53,54	-	49,2	49,2	100%
08	**BAGIAN ORGANISASI**									
4.01 .01 .2.13	**Kegiatan Penataan Organisasi**	Prosentase dokumen kelembagaan dan analisis jabatan pelayanan publik dan tata laksana kinerja dan	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=(5+7+9)/3	(11)=10/4
		implementasi reformasi birokrasi								
4.01 .01 .2.13 . 01	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Anjab	Jumlah Dokumen Kelembagaan dan Analisis Jabatan yang disusun	44 dok	44 dok	44 dok	44 dok	100%	44 dok	44 dok	100%
4.01 .01 .2.13 . 02	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata LaksanaJumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	44 lap	44 lap	44 lap	44 lap	100%	44 lap	44 lap	100%
4.01 .01 .2.13 . 03	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	49 dok	49 dok	49 dok	49 dok	100%	49 dok	49 dok	100%

1.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara mengacu kepada Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dimana pelaksanaan tahun ketiga dari penjabaran Rencana pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026 yang kemudian dijabarkan kembali secara rinci dalam Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara tahun 2023-2026.

Dalam pelaksanaan urusan penunjang urusan pemerintahan, Sekretariat Daerah Banjarnegara tahun mengampu 3 (tiga) Indikator, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.2 Capaian Indikator Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024

No	Indikator	Target RPJMD	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024			Status	PD Penanggung Jawab
					Target 2024	Capaian 2024	Tingkat Capaian RKPD (%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan Kesra	100%	persen	100%	100%	278,95%	100%	●	Setda Banjarnegara
2	Persentase engkoordinasian perumusan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan	100%	persen	100%	100%	100%	100%	●	Setda Banjarnegara
3	Persentase peningkatan nilai evaluasi kelembagaan, pelayanan publik dan kinerja	100%	persen	100%	100%	100%	100%	●	Setda Banjarnegara

Sumber: Sekretariat Daerah Kab. Banjarnegara

Keterangan
● : Sesuai target
▶ : belum sesuai target
▼ : tidak tercapai

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara

No	Indikator Kinerja	SPM/ Standar Nasional	IKK (PP8/'08)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	
1	2	3	4	7	8	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Nilai LPPD	-	-	3,10	3,31	3,32	3,33	3,31	3,3059	3,31	3,31	
2	Nilai SAKIP Setda	-	-	64,2	67	68	70,2	67	74,4	74,40	74,40	
3	Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	-	5%	5%	5%	5%	5%	-6,22	5%	5%	
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Setda)	-	-	82,56%	84,44%	84,66%	84,70%	84,44%	81,60%	84,44%	84,44%	

*) Kolom 3 diisi berdasarkan IKK outcome dalam lampiran Permendagri 18/2020

1.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan urusan pemerintahan dalam satu urusan, yaitu pendukung urusan pemerintahan berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan berdasarkan hasil evaluasi, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk tahun 2025 mencakup satu urusan tersebut. Permasalahan dan / hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah diantaranya adalah:

1. Penyusunan data dukung pengukuran kematangan kelembagaan, evaluasi pelayanan publik, pengukuran kinerja perangkat daerah dan implementasi reformasi birokrasi belum maksimal;
2. Kebijakan Penataan Kelembagaan yang sangat dinamis.
3. Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) belum berjalan secara maksimal
4. Pemahaman yang kurang bagi OPD dan kecamatan terkait pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat.
5. Adanya peraturan baru terkait penyusunan LPPD dan LKPJ sehingga perlu penyesuaian OPD teknis dengan menyiapkan data dukung IKK dan isian LKPJ.
6. Terlalu banyak Mou yang disusun dan tidak ditindaklanjuti dengan penyusunan perjanjian kerja sama;
7. Belum optimalnya koordinasi terhadap penanganan masalah kesejahteraan sosial, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
8. Implementasi kebijakan bidang perekonomian belum optimal;
9. Pengendalian dan monitoring kegiatan pembangunan belum optimal dan belum didukung sistem informasi berbasis website yang mudah diakses seluruh perangkat daerah.

Permasalahan tersebut, jika tidak diselesaikan dapat menjadi *constraint* dalam pencapaian visi dan misi Bupati maupun capaian indikator lainnya. Beberapa dampak dari adanya permasalahan dan hambatan tersebut meliputi:

1. Hasil Pengukuran kematangan kelembagaan, evaluasi pelayanan publik, pengukuran kinerja perangkat daerah dan implementasi reformasi birokrasi belum maksimal;
2. Dokumen analisis jabatan sering mengalami perubahan;
3. Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) tidak bisa berjalan maksimal, sehingga konsep memudahkan pelayanan masyarakat yang cukup hanya ditingkat kecamatan sulit dicapai;
4. Pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat belum dapat dilaksanakan sepenuhnya terutama terkait dengan perizinan;
5. Data dukung IKK dan isian LKPJ yang tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 menyulitkan bagi Tim Penyusun, sehingga Tim Penyusun harus menyampaikan informasi kembali untuk memperoleh data yang valid sesuai dengan yang dibutuhkan;
6. MOU yang tidak ditindaklanjuti dengan PKS, kedua belah pihak tidak bisa melaksanakan program secara optimal sehingga beberapa Perangkat Daerah belum bisa memanfaatkan hasil dari kerjasama tersebut;
7. Kurangnya pelayanan kesehatan masyarakat khususnya untuk keluarga/masyarakat kurang mampu;
8. Peningkatan perekonomian lambat.
9. Pelaksanaan kegiatan pembangunan kurang tepat waktu, tepat mutu, tepat jumlah dan tepat administrasi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi, peningkatan kualitas birokrasi, dan meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan pengguna layanan akan meningkatkan kebutuhan akan adanya penyediaan produk layanan yang semakin baik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi-inovasi dalam menunjang peningkatan pelayanan publik secara kontinyu. Beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, yaitu:

1 Belum semua unit-unit pelayanan perangkat daerah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar pelayanan publik (SPP).

2 Belum optimalnya kualitas pelaporan kinerja pemerintah. Laporan kinerja yang disajikan OPD belum menggambarkan

kinerja PD, tetapi masih sebatas menceritakan proses ataupun aktifitas yang dilaksanakan.

3 Masih lemahnya pengendalian intern yang disertai pemantauan secara rutin.

4 Masih belum optimalnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.

5 Masih belum optimalnya keterlibatan peran masyarakat dalam proses-proses penyusunan perencanaan.

6 Tuntutan adanya SDM yang pekerja keras,dinamis, terampil dan menguasai IPTEK.

7 Tantangan pada proses Pengadaan barang dan jasa:

- Kurangnya SDM fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa di UKPBJ;
- Trend pengajuan tender di triwulan 2 dan triwulan 3 masih tinggi dan masih banyak dokumen perencanaan pengadaan yang perlu kaji ulang.
- Belum meratanya kompetensi penyedia barang dan jasa terutama pada tenaga administrasi pengadaan barang dan jasa.

8 Belum termanfaatkannya website Setda sebagai media informasi online tentang produk layanan;

9 Belum optimalnya pembinaan bagi organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan dan lembaga swadaya masyarakat.

Berikut ini adalah hasil analisis peluang bagi pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah :

1. Adanya penyederhanaan birokrasi dan peralihan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional;
2. Tersedianya regulasi kebijakan pelayanan publik yang mendukung inovasi untuk memberikan pelayanan prima;
3. Adanya aplikasi e-Perda dari kementerian untuk membangun sinergi dan akselerasi pembentukan produk hukum daerah berbasis digital sesuai perkembangan aturan dari pusat,
4. Peluang diklat peningkatan kualitas SDM;
5. Peluang untuk pengembangan pengembangan PAD masih cukup terbuka;

6. Pembinaan kapasitas barang/jasa kepada penyedia barang dan jasa;

Berdasarkan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan tersebut, dapat diinventarisasi beberapa isu strategis. Inventarisasi isu-isu strategis tahun 2026 didapatkan dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara sampai dengan tahun 2024. Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan pembangunan. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat aerah pada tahun 2025, sebagai berikut:

1. Isu terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah
    a) Budaya kerja pegawai antara lain disiplin dan inovasi pegawai yang kurang;
    b) Perubahan Peraturan ditingkat pusat yang terlalu cepat sehingga butuh waktu bagi Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan;
    c) Penyusunan Laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintah belum maksimal;
2. Isu terkait perekonomian dan pembangunan
    a) Perlambatan perekonomian daerah secara makro;
    b) Ketidaksesuaian realisasi fisik kegiatan dengan target yang telah direncanakan;
    c) Tuntutan masyarakat semakin tinggi terhadap kinerja hasil pembangunan dan informasi pelaksanaan kegiatan pembangunan;
    d) Pengadaan barang/jasa yang memenuhi standar kinerja pengadaan e procurement bertujuan untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
    e) Ketersediaan informasi pembangunan melalui media
3. Isu terkait pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.
    a) Pemahaman ASN terkait gratifikasi masih kurang;
    b) Belum optimalnya kordinasi terhadap penanganan masalah kesejahteraan sosial, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
    c) Reformasi birokrasi di lingkungan Setda;

d) Kualitas pelayanan administrasi umum, keuangan Sekretariat Daerah,kerumahtanggaan dan penatausahaan masih perlu ditingkatkan.

4. Isu terkait Implementasi Reformasi Birokrasi dan Kinerja Perangkat Daerah
   a) Implementasi Reformasi Birokrasi dan ketersediaan data pendukung ;
   b) Kinerja Perangkat Daerah dapat dievaluasi secara periodik (triwulanan).

4.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Tahun 2005-2025 dan mengacu pada RPD Kabupaten Banjarnegara 2023-2026. Berdasarkan hal tersebut, prioritas arah kebijakan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2026 meliputi tiga Program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kab./Kota
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
3. Program Perekonomian dan Pembangunan

Tabel 2.5
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 Kabupaten Banjarnegara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A	**URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	**SETDA**				**URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	**SETDA**				
1	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**		**Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan Kesra**	**100%**	**4.609.579.350**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**		**Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan Kesra**	**100%**	**5.909.112.300**	
	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan		**Persentase fasilitasi dan koordinasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah**	**100%**	**1.967.962.500**	**Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan**		**Persentase fasilitasi dan koordinasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah**	**100%**	**1.850.000.000**	
	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan		Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi	4 dok	520.931.250	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan		Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi	4 dok	300.000.000	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		Jumlah Dokumen Administrasi Kewilayahan	1 dok	405.168.750	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		Jumlah Dokumen Administrasi Kewilayahan	1 dok	200.000.000	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 dok	1.041.862.500	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 dok	1.350.000.000	
	Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah		**Persentase fasilitasi Kerja sama Daerah**	**100%**	**34.728.750**	**Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah**		**Persentase fasilitasi Kerja sama Daerah**	**100%**	**150.000.000**	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	10 dok	28.940.625	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	10 dok	50.000.000	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 dok	-	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 dok	50.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	3 lap	5.788.125	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	2 lap	50.000.000	
	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		**Prosentase terlaksananya kegiatan mental spiritual dan kesejahteraan rakyat**	**100%**	**2.149.626.300**	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**		**Prosentase terlaksananya kegiatan mental spiritual dan kesejahteraan rakyat**	**100%**	**3.234.112.300**	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4 dok	1.979.455.350	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	7 dok	3.041.112.300	
	Sub Kegiatan Kebijakan, Evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan Sosial.		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 dok	112.289.700	Sub Kegiatan Kebijakan, Evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan Sosial.		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	3 dok	113.000.000	
	Sub Kegiatan Kebijakan, Evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	2 dok	57.881.250	Sub Kegiatan Kebijakan, Evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	3 dok	80.000.000	
	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		**Persentase produk hukum daerah yang diundangkan, dipublikasikan dan bantuan hukum yang diselesaikan**	**100%**	**457.261.800**	**Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**		**Persentase produk hukum daerah yang diundangkan, dipublikasikan dan bantuan hukum yang diselesaikan**	**100%**	**675.000.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	220 dok	173.643.750	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	220 dok	225.000.000	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum		Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	31 kasus	196.796.250	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum		Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	31 kasus	200.000.000	
			Jumlah laporan hak asasi manusia yang disusun	4 lap				Jumlah laporan hak asasi manusia yang disusun	4 lap		
	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	220 dok	86.821.800	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	220 dok	250.000.000	
			Jumlah jenis buku peraturan perundang-undangan yang dihimpun	15 dok				Jumlah jenis buku peraturan perundang-undangan yang dihimpun	15 dok		
			Jumlah produk hukum daerah yang disosialisasikan	2 dok				Jumlah produk hukum daerah yang disosialisasikan	2 dok		
2	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**		**Persentase engkoordinasian perumusan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan**	**100%**	**1.622.762.500**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**		**Persentase engkoordinasian perumusan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan**	**100%**	**2.551.607.000**	
	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		**Prosentase pelaksanaan kebijakan perekonomian untuk pengelolaan BUMD dan BLUD, Monev untuk pengendalian dan distribusi perekonomian, tersusunnya perencanaan dan**	**100%**	**798.762.000**	**Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**		**Prosentase pelaksanaan kebijakan perekonomian untuk pengelolaan BUMD dan BLUD, Monev untuk pengendalian dan distribusi perekonomian, tersusunnya perencanaan dan**	**100%**	**960.000.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			pengawasan ekonomi mikro kecil					**pengawasan ekonomi mikro kecil**			
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	5 dok	526.719.000	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	5 dok	500.000.000	
	Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	12 lap	202.585.500	Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	12 lap	285.000.000	
	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 dok	69.457.500	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 dok	175.000.000	
	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		**Prosentase pelaksanaan fasilitasi dan pemantauan pelaksanaan kebijakan Sumber Daya Alam bidang Pertanian arti luas, pertambangan dan lingkungan hidup, kebijakan pengelolaan energi dan air**	**100%**	**98.398.000**	**Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**		**Prosentase pelaksanaan fasilitasi dan pemantauan pelaksanaan kebijakan Sumber Daya Alam bidang Pertanian arti luas, pertambangan dan lingkungan hidup, kebijakan pengelolaan energi dan air**	**100%**	**140.000.000**	
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM,	4 dok	69.457.500	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM,	4 dok	85.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Penanaman Modal, Tenaga Kerja					Penanaman Modal, Tenaga Kerja			
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	4 dok	17.364.250	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	4 dok	20.000.000	
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	4 dok	11.576.250	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	4 dok	35.000.000	
	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		**Persentase pelaksanaan fasilitasi penyusunan pengendalian , monev dan pelaporan program pembangunan**	**100%**	**81.033.750**	**Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**		**Persentase pelaksanaan fasilitasi penyusunan pengendalian , monev dan pelaporan program pembangunan**	**100%**	**401.607.000**	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	12 dok	17.364.375	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	12 dok	102.500.000	
	Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 lap	23.152.500	Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 lap	175.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi danPelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 lap	40.516.875	Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi danPelaporan Pelaksanaan Pembangunan	13 lap	124.107.000	
	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		**Prosentase fasilitasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik**	**98 %**	**644.588.750**	**Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**		**Prosentase fasilitasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik**	**98 %**	**1.050.000.000**	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 dok	555.660.000	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 dok	350.000.000	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik		Jumlah dokumen hasil yanan pengadaan secara elektronik	150 dok	28.732.250	Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik		Jumlah dokumen hasil yanan pengadaan secara elektronik	250 dok	200.000.000	
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	100 orang	60.196.500	Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	100 orang	500.000.000	
3	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA**		**1. Persentase Penunjang urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana 2. Persentase dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan PD yang ditetapkan tepat waktu**	**100%**	**27.971.461.325**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA**		**1. Persentase Penunjang urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana 2. Persentase dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan PD yang ditetapkan tepat waktu**	**100%**	**34.684.448.196**	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Prosentase Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah**	**100%**	**14.363.579.500**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Prosentase Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah**	**100%**	**16.988.868.446**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.)**	
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang / Bulan	13.917.893.900	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang / Bulan	16.627.358.346	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dok	405.168.750	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dok	175.788.000	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 lap	40.516.850	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 lap	185.722.100	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Persentase pemenuhan layanan administrasi Kepegawaian Setda**	**100%**	**57.881.250**	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase pemenuhan layanan administrasi Kepegawaian Setda**	**100%**	**50.000.000**	
	Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	3 unit	28.940.625	Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	3 unit	25.000.000	
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dok	28.940.625	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dok	25.000.000	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Presentase pemenuhan kebutuhan pelayanan dan jasa kantor**	**100%**	**5.041.456.900**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Presentase pemenuhan kebutuhan pelayanan dan jasa kantor**	**100%**	**5.022.500.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	75.245.700	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	75.000.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	1 Paket	173.643.750	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	12 Paket	150.000.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	57.881.250	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	60.000.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.445.280.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	3.500.000.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	86.821.850	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	87.500.000	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	202.584.350	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	1.150.000.000	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Persentase Terlayaninya Kebutuhan Peralatan dan perlengkapan pada Rumah Jabatan dan Sekretariat**	**100%**	**549.871.800**	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Terlayaninya Kebutuhan Peralatan dan perlengkapan pada Rumah Jabatan dan Sekretariat**	**100%**	**3.658.200.000**	
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit	3.058.200.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	60 paket	144.703.100	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 paket	200.000.000	
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Paket Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	30 paket	405.168.700	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Paket Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	12 paket	400.000.000	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Presentase terpenuhinya jasa kantor**	**100%**	**3.993.806.250**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Presentase terpenuhinya jasa kantor**	**100%**	**3.359.280.230**	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	694.575.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	834.000.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor yg disediakan	12 Laporan	405.168.750	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor yg disediakan	12 Laporan	198.896.600	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	26 Laporan	2.894.062.500	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	26 Laporan	2.326.383.630	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Terlayaninya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang pada Rumah Dinas dan Sekretariat**	**100%**	**2.025.843.750**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Terlayaninya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang pada Rumah Dinas dan Sekretariat**	**100%**	**2.325.630.900**	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	6 Unit	578.812.500	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	6 Unit	500.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit	520.931.250	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit	1.000.000.000	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	57.881.250	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit	49.496.600	
	Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 Unit	115.762.500	Sub. Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	20 Unit	48.741.400	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit	463.050.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit	463.050.000	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	25 Unit	289.406.250	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	27 Unit	264.342.900	
	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah		**Prosentase pemenuhan kebutuhan keuangan dan sarana prasarana**	**100%**	**1.041.862.500**	**Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah**		**Prosentase pemenuhan kebutuhan keuangan dan sarana prasarana**	**100%**	**881.707.920**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	dan Wakil Kepala Daerah		**Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**			**dan Wakil Kepala Daerah**		**Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**			
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala	2 Orang / Bulan	115.762.500	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala	2 Orang / Bulan	105.000.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yg disediakan	1 Paket	115.762.500	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yg disediakan	2 Paket	145.080.000	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	115.762.500	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	31.627.920	
	Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil		Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang	2 Orang / Bulan	694.575.000	Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil		Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang	2 Orang / Bulan	600.000.000	
	Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		**Prosentase pemenuhan kebutuhan keuangan dan Sarana prasarana Kepala dan Wakil Kepala Daerah**	**100%**	**150.491.250**	**Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**		**Prosentase pemenuhan kebutuhan keuangan dan Sarana prasarana Kepala dan Wakil Kepala Daerah**	**100%**	**1.570.000.000**	
	Sub Keg. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1 paket	57.881.250	Sub Keg. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	12 paket	770.000.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah	1 paket	5.788.125	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah	12 paket	550.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah		Tangga Wakil KDH yang disediakan			Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah		Tangga Wakil KDH yang disediakan			
	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 paket	86.821.875	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 paket	250.000.000	
	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		**Prosentase pemenuhan Pelayanan keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan**	**100%**	**578.812.500**	**Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**		**Prosentase pemenuhan Pelayanan keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan**	**100%**	**422.260.700**	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 lap	347.287.500	Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 lap	165.825.600	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi	12 lap	173.643.750	Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi	12 lap	99.096.500	
	Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan		Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas	12 lap	57.881.250	Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan		Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas	12 lap	157.338.600	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		**Nilai Penataan Organisasi**	**49,7**		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**Nilai Penataan Organisasi**	**49,7**		
	Kegiatan Penataan Organisasi		**Prosentase dokumen kelembagaan dan analisis jabatan pelayanan publik dan tata laksana kinerja dan implementasi reformasi birokrasi**	**100%**	**167.855.625**	**Kegiatan Penataan Organisasi**		**Prosentase dokumen kelembagaan dan analisis jabatan pelayanan publik dan tata laksana kinerja dan implementasi reformasi birokrasi**	**100%**	**406.000.000**	
	Sub Kegiatan Pengelolaan		Jumlah Dokumen Kelembagaan dan	44 dok	52.093.125	Sub Kegiatan Pengelolaan		Jumlah Dokumen Kelembagaan dan	44 dok	100.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Analisis Jabatan yang disusun			Kelembagaan dan Anjab		Analisis Jabatan yang disusun			
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	44 lap	57.881.250	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	44 lap	136.000.000	
	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	49 dok	57.881.250	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	49 dok	170.000.000	
	JUMLAH				**34.203.823.175**					**43.145.167.496**	

Berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2026, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan yaitu:

1. Mewujudkan organisaasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran paska penyederhanaan birokrasi;
2. Meningkatnya kinerja instansi pemerintah dan implementasi reformasi birokrasi sempai dengan unit kerja;
3. Monitoring kegiatan pembangunan perlu ditingkatkan;
4. Penyusunan Dokumen dan expos program pembangunan Daerah secara lengkap;
5. Untuk segera menyusun Raperda Penyertaan Modal dan Perubahan Kelembagaan BUMD, serta menyelenggarakan seleksi 2 (dua) Dewan Pengawas BUMD;
6. Kebijakan Perekonomian diarahkan pada Pameran UMKM fisik dan Virtual, Implementasi digitalisasi UMK, data profil potensi pertambangan, LH, Sumber daya energi dan air untuk penyusunan rekomendasi kebijakan.

2.2 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan musrenbang kecamatan dan forum konsultasi publik telah disampaikan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui aplikasi SIPD. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2026 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	NIHIL				

2.3 Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan hasil reses anggota DPRD, melalui aplikasi SIPD telah disampaikan usulan program dan kegiatan. Usulan

program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2026 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Validasi
	NIHIL				

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan agar perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integral dengan perencanaan pembangunan nasional. Tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional serta program strategis nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024.

Tema Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yaitu "**Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"**. Perencanaan Pembangunan Tahun 2024 diharapkan dapat dijadikan sebagai momentum bangkit dari masa pandemi dengan mewujudkan transformasi ekonomi sekaligus sebagai landasan menuju Indonesia Maju pada 2045.

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Tahun 2024 dituangkan dalam 7 Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2024. Tujuh PN tersebut merupakan Agenda Pembangunan yang terkandung dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan tetap dilanjutkan pada RKP Tahun 2024, antara lain : (1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan (7) Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

RKP Tahun 2024 juga menetapkan sejumlah sasaran dalam Pembangunan Nasional. Sasaran Pembangunan Tahun 2024 adalah percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan dan peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia

sebagai manifestasi pembangunan inklusif. Target sasaran dan indikator pembangunan tahun 2024 antara lain yakni Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,0 – 5,4 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT sebesar 4,26 – 4,96 persen, Tingkat Kemiskinan 9,50 – 10,00 persen, Rasio Gini 0,374 – 0,477, Indeks Pembangunan Manusia/IPM 73,99 – 74,02, Penurunan Emisi Gas Kaca/GRK sebesar 27,27 persen. Untuk mencapai sasaran tersebut, transformasi ekonomi akan dilaksanakan secara inklusif dan terpadu dengan meningkatkan daya beli dan usaha. Transformasi ekonomi juga dilakukan dengan diversifikasi ekonomi yang dilakukan dengan peningkatan nilai tambah, penguatan ketahanan pangan, pembangunan rendah karbon, dan peningkatan pemerataan infrastruktur serta kualitas layanan digital.

Lebih lanjut, Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 yang tercantum dalam RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 diarahkan pada tema **"Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Merata didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas"**. Keselarasan kebijakan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 dengan RKP Tahun 2024 ditunjukkan dengan keselarasan tema pembangunan, prioritas, sasaran dan indikator sasaran, target pengembangan wilayah dan dukungan program prioritas daerah. Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang tercantum dalam RKPD Tahun 2024, diantaranya; (1) Peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata, didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas; (2) Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas; (3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar dan adaptif secara inklusif dan merata; (6) Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung; dan (7) **Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif**.

Perumusan strategi dan arah kebijakan merupakan pendekatan komprehensif untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama pelaksanaan periode pembangunan jangka menengah. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah tahun ketiga (2025) yang tercantum dalam RPD (Rencana Pembangunan Daerah) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 yakni **"Penguatan Perekonomian Daerah dengan Peningkatan Pemanfaatan Potensi Daerah",** meliputi : (1) Peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing; (2) Penguatan perekonomian daerah; (3) Peningkatan kualitas infrastruktur daerah; (3) Pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran; (5) **Peningkatan tata kelola pemerintahan**; dan (6) Peningkatan kondusivitas wilayah.

Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Sekretariat Daerah maupun dalam hubungan antar instansi tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun pusat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara

Dengan telah berakhirnya masa perencanaan dalam Renstra 2017 – 2022 dan belum disusunnya dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode berikutnya, maka dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 – 2026.

Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Banjarnegara, maka tujuan dan sasaran Rencana

Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 dirumuskan sebagai berikut:

3.2.1. Tujuan

1. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.

3.2.2. Sasaran

Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan Visi, Misi, dan Tujuan. Dalam upaya untuk mewujudkan tujuan, maka Sasaran yang akan dicapai adalah sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 3.2. Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Skor LPPD Kabupaten Banjarnegara	Angka	3,33
		Nilai SAKIP Setda	Nilai	70,2
		Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persen	5
2.	Meningkatnya Efektifitas dan Transparansi Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Setda)	Angka	84,70

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program pada perangkat daerah merupakan program prioritas dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 - 2026. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD selanjutnya dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan.

Program dan Kegiatan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat bertujuan mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, meningkatnya pelayanan terhadap penduduk miskin, meningkatnya sarana dan prasarana ibadah.

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat didukung dengan Kegiatan :

1.1 Administrasi Tata Pemerintahan, dengan Sub Kegiatan:
   a. Penataan Administrasi Pemerintahan
   b. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
   c. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah

1.2 Fasilitasi Kerja Sama Daerah, dengan Sub Kegiatan:
   a. Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
   b. Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri
   c. Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama

1.3 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, dengan Sub Kegiatan:
   a. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
   b. Fasilitasi Bantuan Hukum
   c. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum

1.4 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, dengan Sub Kegiatan:
   a. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

b. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
c. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat

2. Program Perekonomian dan Pembangunan

Program Perekonomian dan Pembangunan bertujuan meningkatkan koordinasi dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing, efektif dan efesien melalui pengembangan produksi, industri, perdagangan, koperasi dan UMKM; meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; meningkatkan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pengendalian program, evaluasi dan laporan yang tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran serta pengadaan barang dan jasa melalui LPSE.

Program Perekonomian dan Pembangunan didukung dengan Kegiatan:

2.1 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian, dengan Sub Kegiatan:
   a. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
   b. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
   c. Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil

2.2 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam, dengan Sub Kegiatan:
   a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
   b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
   c. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air

2.3 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan, dengan Sub Kegiatan:
   a. Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
   b. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan

c. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

2.4 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, dengan Sub Kegiatan:

a. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
b. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
c. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota bertujuan meningkatkan kinerja apatur pemerintah daerah yang kompeten melalui mekanisme kerja/prosedur yang transparan, efisien dan efektif serta mewujudkan organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran, meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran serta sarana dan prasarana kerja serta mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota didukung dengan Kegiatan:

3.1 Penataan Organisasi, dengan Sub Kegiatan:

a. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
b. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
c. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

3.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD

3.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:

a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
b. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

3.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:
a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
f. Fasilitasi Kunjungan Tamu

3.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Sub Kegiatan:
a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
b. Pengadaan Mebel
c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

3.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan:
a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

3.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan:
a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
c. Pemeliharaan Mebel
d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
f. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

3.8 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan Sub Kegiatan:
a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
b. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
c. Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
d. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3.9 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah, dengan Sub Kegiatan:
a. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
b. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
c. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah

3.10 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan, dengan Sub Kegiatan:
a. Fasilitasi Keprotokolan
b. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
c. Pendokumentasian Tugas Pimpinan

Tabel 4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran Perangkat Daerah

Sekretariat Kabupaten Banjarnegara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Tahun 2027
									Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target		
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**														
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**														
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**														
Bagian Pemerintahan																			
4	**01**	**02**	**2.01**		**Administrasi Tata Pemerintahan**								**1.436.500.000**					**1.850.000.000**	**3.160.300.000**
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Persentase Pengkoordinasian Perumusan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesra	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan dan Otda	Kab. Banjarnegara	100 %	4 Dokumen	100 %	259.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100 %	300.000.000	569.800.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Tahun 2027
									Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target		
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Persentase Pengkoordinasian Perumusan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesra	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan dan Otda	Kab. Banjarnegara	100 %	1 Dokumen	100 %	126.370.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100 %	200.000.000	278.014.000
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Pengkoordinasian Perumusan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesra	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan dan Otda	Kab. Banjarnegara	100 %	2 Dokumen	100 %	1.051.130.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100 %	1.350.000.000	2.312.486.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Tahun 2027
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target		
4	**01**	**02**	**2.04**		**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**								**57.557.400**					**150.000.000**	**236.626.280**
4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Persentase Pengkoordinasian Perumusan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesra	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Persentase Fasilitasi Kerja sama Daerah	Kab. Banjarnegara	100 %	10 Dokumen	100 %	38.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100 %	50.000.000	84.700.000
4	01	02	2.04	02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Persentase Pengkoordinasian Perumusan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesra	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Persentase Fasilitasi Kerja sama Daerah	Kab. Banjarnegara	100 %	1 Dokumen	100 %	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100 %	50.000.000	110.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Tahun 2027
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target		
4	01	02	2.04	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Persentase Pengkoordinasian Perumusan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesra	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Persentase Fasilitasi Kerja sama Daerah	Kab. Banjarnegara	100 %	2 Laporan	100 %	19.057.400	Dana Alokasi Umum (DAU)		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100 %	50.000.000	41.926.280
Bagian Hukum																			
4	**01**	**02**	**2.03**		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**								**399.776.000**					**675.000.000**	**481.800.000**
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Persentase Pengkoordinasian Perumusan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesra	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Persentase produk hukum daerah yang diundangkan ,dipublikasikan dan bantuan hukum yang diselesaikan	Kab. Banjarnegara	100 %	220 Dokumen	100 %	194.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100 %	225.000.000	240.040.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Tahun 2027
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target		
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Pengkoordinasian Perumusan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesra	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase produk hukum daerah yang diundangkan ,dipublikasikan dan bantuan hukum yang diselesaikan	Kab. Banjarnegara	100 %	31 Kasus	100 %	138.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100 %	200.000.000	156.000.000
							Jumlah laporan hak asasi manusia yang disusun				4 Laporan								
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Persentase Pengkoordinasian Perumusan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesra	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Persentase produk hukum daerah yang diundangkan, dipublikasikan dan bantuan hukum yang diselesaikan	Kab. Banjarnegara	100 %	220 Dokumen	100 %	67.776.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100%	250.000.000	85.760.000
							Jumlah jenis buku peraturan perundang-undangan yang dihimpun				15 Dokumen								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Tahun 2027
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target		
							Jumlah produk hukum daerah yang disosialisasikan				2 Dokumen								
Bagian Kesejahteraan Rakyat																			
4	**01**	**02**	**2.02**		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**								**3.194.102.300**					**3.234.112.300**	**3.610.000.000**
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Persentase Pengkoordinasian Perumusan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesra	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Prosentase terlaksananya kegiatan bina mental spiritual dan kesejahteraan rakyat	Kab. Banjarnegara	100 %	7 Dokumen	100 %	3.041.112.300	Dana Alokasi Umum (DAU)		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100%	3.041.112.300	3.200.000.000
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja	Persentase Pengkoordinasian Perumusan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesra	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja	Prosentase terlaksananya kegiatan bina mental spiritual dan kesejahteraan rakyat	Kab. Banjarnegara	100 %	3 Dokumen	100 %	76.150.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		Meningkatnya Kinerja Penyelengg	100%	113.000.000	250.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Tahun 2027
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target		
					Terkait Kesejahteraan Sosial		Terkait Kesejahteraan Sosial									araan Pemerintahan Daerah			
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Pengkoordinasian Perumusan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesra	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Prosentase terlaksananya kegiatan bina mental spiritual dan kesejahteraan rakyat	Kab. Banjarnegara	100 %	3 Dokumen	100 %	76.840.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100%	80.000.000	160.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Tahun 2027
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target		
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**														
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**														
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**														
Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam																			
4	**01**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**								**794.781.600**					**960.000.000**	**950.000.000**
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Persentase Pengkoordinasian Perumusan Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Prosentase pelaksanaan kebijakan perekonomian untuk pengelolaan BUMD dan BLUD, Monev untuk pengendalian dan distribusi perekonomian, tersusunnya perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil	Kab. Banjarnegara	100 %	5 Dokumen	100 %	417.579.800	Dana Alokasi Umum (DAU)		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100%	500.000.000	485.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Tahun 2027
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target		
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Persentase Pengkoordinasian Perumusan Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Prosentase pelaksanaan kebijakan perekonomian untuk pengelolaan BUMD dan BLUD, Monev untuk pengendalian dan distribusi perekonomian, tersusunnya perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil	Kab. Banjarnegara	100 %	12 Laporan	100 %	257.001.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100%	285.000.000	315.000.000
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Persentase Pengkoordinasian Perumusan Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Prosentase pelaksanaan kebijakan perekonomian untuk pengelolaan BUMD dan BLUD, Monev untuk pengendalian dan	Kab. Banjarnegara	100 %	4 Dokumen	100 %	120.200.800	Dana Alokasi Umum (DAU)		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	100%	175.000.000	150.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Tahun 2027
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target		
								distribusi perekonomian, tersusunnya perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil								Daerah			
4	**01**	**03**	**2.04**		**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**								**424.870.000**					**140.000.000**	**608.550.000**
4	01	03	2.04	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dn Perikanan	Persentase Pengkoordinasian Perumusan Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan ,Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Prosentase pelaksanaan fasilitasi dan pemantauan pelaksanaan kebijakan Sumber Daya Alam bidang Pertanian arti luas, pertambangan dan lingkungan hidup, kebijakan pengelolaan energi dan Air	Kab. Banjarnegara	100 %	4 Dokumen	100 %	378.950.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100%	85.000.000	551.050.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Tahun 2027
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target		
4	01	03	2.04	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Persentase Pengkoordinasian Perumusan Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Prosentase pelaksanaan fasilitasi dan pemantauan pelaksanaan kebijakan Sumber Daya Alam bidang Pertanian arti luas, pertambangan dan lingkungan hidup, kebijakan pengelolaan energi dan Air	Kab. Banjarnegara	100 %	4 Dokumen	100 %	19.980.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100%	20.000.000	25.000.000
4	01	03	2.04	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Persentase Pengkoordinasian Perumusan Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan	Prosentase pelaksanaan fasilitasi dan pemantauan pelaksanaan kebijakan Sumber Daya Alam bidang Pertanian arti luas, pertambanga	Kab. Banjarnegara	100 %	4 Dokumen	100 %	25.940.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	100%	35.000.000	32.500.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Tahun 2027
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target		
							Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	n dan lingkungan hidup, kebijakan pengelolaan energi dan Air								Daerah			
Bagian Administrasi Pembangunan																			
4	**01**	**03**	**2.02**		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**								**351.607.000**					**401.607.000**	**392.500.000**
4	01	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Persentase Pengkoordinasian Perumusan Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan fasilitasi penyusunan pengendalian, monev dan pelaporan program pembangunan	Kab. Banjarnegara	100 %	12 Dokumen	100 %	87.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100%	102.500.000	97.500.000
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Persentase Pengkoordinasian Perumusan Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Persentase pelaksanaan fasilitasi penyusunan pengendalian, monev dan pelaporan program	Kab. Banjarnegara	100 %	12 Laporan	100 %	155.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan	100%	175.000.000	173.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Tahun 2027
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target		
								pembangunan								Pemerintahan Daerah			
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase Pengkoordinasian Perumusan Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase pelaksanaan fasilitasi penyusunan pengendalian, monev dan pelaporan program pembangunan	Kab. Banjarnegara	100 %	13 Laporan	100 %	109.700.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100%	124.107.000	122.000.000
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa																			
4	**01**	**03**	**2.03**		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**								**740.820.000**					**1.050.000.000**	**1.000.000.000**
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase capaian penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Presentase Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik	Kab. Banjarnegara	92,5 %	12 Dokumen	98 %	318.090.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	100%	350.000.000	400.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Tahun 2027
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target		
																an Daerah			
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase capaian penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Presentase Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik	Kab. Banjarnegara	92,5 %	250 Dokumen	98 %	111.790.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100%	200.000.000	250.000.000
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase capaian penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Presentase Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik	Kab. Banjarnegara	92,5 %	100 orang	98 %	310.940.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100%	500.000.000	350.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Tahun 2027
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target		
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**														
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**														
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**														
Bagian Organisasi																			
4	**01**	**01**	**2.13**		**Penataan Organisasi**								**366.000.000**					**406.000.000**	**368.000.000**
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Nilai Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase dokumen kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, kinerja dan implementasi reformasi birokrasi	Kab. Banjarnegara	49,7	44 Dokumen	100 %	100.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	100%	100.000.000	104.040.000
4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Nilai Penataan Organisasi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase dokumen kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, kinerja dan implementasi reformasi birokrasi	Kab. Banjarnegara	49,7	44 Laporan	100 %	121.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	100%	136.000.000	128.260.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Tahun 2027
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target		
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Nilai Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Persentase dokumen kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, kinerja dan implementasi reformasi birokrasi	Kab. Banjarnegara	49,7	49 Dokumen	100 %	145.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	100%	170.000.000	153.700.000
Bagian Umum																			
4	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**16.988.868.446**					**16.988.868.446**	**20.556.530.820**
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1. Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) 2. Persentase dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan PD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Prosentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah	Kab. Banjarnegara	100 %	100 orang /bulan	100 %	16.627.358.346	Dana Alokasi Umum (DAU)		Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	100%	16.627.358.346	20.119.103.599

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Tahun 2027
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target		
						yang ditetapkan tepat waktu (Indikator untuk mendukung SAKIP)													
4	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	1. Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) 2. Persentase dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan PD yang ditetapkan tepat waktu (Indikator untuk mendukung SAKIP)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Prosentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah	Kab. Banjarnegara	100 %	12 Dokumen	100 %	175.788.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	100%	175.788.000	212.703.480

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Tahun 2027
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target		
4	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1. Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) 2. Persentase dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan PD yang ditetapkan tepat waktu (Indikator untuk mendukung SAKIP)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Prosentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah	Kab. Banjarnegara	100 %	2 Laporan	100 %	185.722.100	Dana Alokasi Umum (DAU)		Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	100%	185.722.100	224.723.741
4	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**0**					**50.000.000**	**0**
4	01	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1. Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Setda	Kab. Banjarnegara	100 %	3 Unit	100 %	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		Meningkatkan Kualitas Layanan	100%	25.000.000	0

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Tahun 2027
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolak Ukur	Target		
						mendukung SKM) 2. Persentase dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan PD yang ditetapkan tepat waktu (Indikator untuk mendukung SAKIP)										Publik			
4	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1. Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) 2. Persentase dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan PD yang ditetapkan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Setda	Kab. Banjarnegara	100 %	1 Dokumen	100 %	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	100%	25.000.000	0

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Tahun 2027
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target		
						tepat waktu (Indikator untuk mendukung SAKIP)													
4	**01**	**01**	**2.06**		**Admnistrasi Umum Perangkat Daerah**								**3.969.483.850**					**5.022.500.000**	**4.803.075.459**
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1. Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) 2. Persentase dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan PD yang ditetapkan tepat waktu (Indikator untuk mendukung SAKIP)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan dan Jasa Kantor	Kab. Banjarnegara	100 %	12 Paket	100 %	65.409.500	Dana Alokasi Umum (DAU)		Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	100%	75.000.000	79.145.495

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Tahun 2027
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target		
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) 2. Persentase dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan PD yang ditetapkan tepat waktu (Indikator untuk mendukung SAKIP)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan dan Jasa Kantor	Kab. Banjarnegara	100 %	12 Paket	100 %	93.831.900	Dana Alokasi Umum (DAU)		Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	100%	150.000.000	113.536.599
4	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1. Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan dan Jasa Kantor	Kab. Banjarnegara	100 %	12 Paket	100 %	57.090.850	Dana Alokasi Umum (DAU)		Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	100%	60.000.000	69.079.929

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Tahun 2027
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target		
						mendukung SKM) 2. Persentase dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan PD yang ditetapkan tepat waktu (Indikator untuk mendukung SAKIP)													
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1. Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) 2. Persentase dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan PD yang ditetapkan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan dan Jasa Kantor	Kab. Banjarnegara	100 %	12 Paket	100 %	2.538.662.800	Dana Alokasi Umum (DAU)		Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	100%	3.500.000.000	3.071.781.988

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Tahun 2027
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target		
						tepat waktu (Indikator untuk mendukung SAKIP)													
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1. Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) 2. Persentase dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan PD yang ditetapkan tepat waktu (Indikator untuk mendukung SAKIP)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan dan Jasa Kantor	Kab. Banjarnegara	100 %	12 Paket	100 %	84.113.800	Dana Alokasi Umum (DAU)		Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	100%	87.500.000	101.777.698
4	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1. Persentase penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Laporan Fasilitasi	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan	Kab. Banjarnegara	100 %	12 Laporan	100 %	1.130.375.000	Dana Alokasi Umu		Meningkatkan Kualit	100%	1.150.000.000	1.367.753.750

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Tahun 2027
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target		
						daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) 2. Persentase dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan PD yang ditetapkan tepat waktu (Indikator untuk mendukung SAKIP)	Kunjungan Tamu	dan Jasa Kantor							m (DAU)		as Layanan Publik			
4	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**4.699.322.400**					**3.658.200.000**	**1.985.758.104**
4	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) 2. Persentase dokumen	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Prosentase terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan pada Rumah Jabatan dan Sekretariat	Kab. Banjarnegara	100 %	7 Unit	100 %	3.058.200.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	100%	3.058.200.000	0

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Tahun 2027
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target		
						perencanaan, evaluasi dan pelaporan PD yang ditetapkan tepat waktu (Indikator untuk mendukung SAKIP)													
4	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	1. Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) 2. Persentase dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan PD yang ditetapkan tepat waktu (Indikator untuk	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Prosentase terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan pada Rumah Jabatan dan Sekretariat	Kab. Banjarnegara	100 %	12 Paket	100 %	903.004.400	Dana Alokasi Umum (DAU)		Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	100%	200.000.000	1.092.635.324

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Tahun 2027
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target		
						mendukung SAKIP)													
4	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1. Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) 2. Persentase dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan PD yang ditetapkan tepat waktu (Indikator untuk mendukung SAKIP)	Jumlah Paket Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Prosentase terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan pada Rumah Jabatan dan Sekretariat	Kab. Banjarnegara	100 %	12 Paket	100 %	738.118.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	100%	400.000.000	893.122.780

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Tahun 2027
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target		
4	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**3.359.280.230**					**3.359.280.230**	**3.490.664.886**
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) 2. Persentase dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan PD yang ditetapkan tepat waktu (Indikator untuk mendukung SAKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Prosentase Terpenuhinya Jasa Kantor	Kab. Banjarnegara	100 %	12 Laporan	100 %	834.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	100%	834.000.000	880.000.000
4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase Terpenuhinya Jasa Kantor	Kab. Banjarnegara	100 %	12 Laporan	100 %	198.896.600	Dana Alokasi Umum (DAU)		Meningkatkan Kualitas Layanan	100%	198.896.600	240.664.886

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Tahun 2027
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target		
						mendukung SKM) 2. Persentase dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan PD yang ditetapkan tepat waktu (Indikator untuk mendukung SAKIP)	yang Disediakan									Publik			
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) 2. Persentase dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan PD yang ditetapkan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Prosentase Terpenuhinya Jasa Kantor	Kab. Banjarnegara	100 %	26 Laporan	100 %	2.326.383.630	Dana Alokasi Umum (DAU)		Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	100%	2.326.383.630	2.370.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Tahun 2027
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target		
						tepat waktu (Indikator untuk mendukung SAKIP)													
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**2.679.963.134**					**2.325.630.900**	**3.242.755.392**
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1. Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) 2. Persentase dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan PD yang ditetapkan tepat waktu (Indikator untuk mendukung SAKIP)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terlayaninya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang pada Rumah Dinas dan Sekretariat	Kab. Banjarnegara	100 %	6 Unit	100 %	207.874.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	100%	500.000.000	251.527.540

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Tahun 2027
									Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target		
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) 2. Persentase dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan PD yang ditetapkan tepat waktu (Indikator untuk mendukung SAKIP)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terlayaninya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang pada Rumah Dinas dan Sekretariat	Kab. Banjarnegara	100 %	33 Unit	100 %	837.134.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	100%	1.000.000.000	1.012.932.140
4	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	1. Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Terlayaninya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang pada Rumah	Kab. Banjarnegara	100 %	30 Unit	100 %	49.496.600	Dana Alokasi Umum (DAU)		Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	100%	49.496.600	59.890.886

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Tahun 2027
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target		
						mendukung SKM) 2. Persentase dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan PD yang ditetapkan tepat waktu (Indikator untuk mendukung SAKIP)		Dinas dan Sekretariat											
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1. Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) 2. Persentase dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan PD yang ditetapkan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlayaninya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang pada Rumah Dinas dan Sekretariat	Kab. Banjarnegara	100 %	20 Unit	100 %	48.741.400	Dana Alokasi Umum (DAU)		Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	100%	48.741.400	58.977.094

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Tahun 2027
									Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target		
						tepat waktu (Indikator untuk mendukung SAKIP)													
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1. Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) 2. Persentase dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan PD yang ditetapkan tepat waktu (Indikator untuk mendukung SAKIP)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Terlayaninya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang pada Rumah Dinas dan Sekretariat	Kab. Banjarnegara	100 %	4 Unit	100 %	1.272.374.234	Dana Alokasi Umum (DAU)		Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	100%	463.050.000	1.539.572.823
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan	1. Persentase penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung	Terlayaninya Kebutuhan Jasa Pemeliharaa	Kab. Banjarnegara	100 %	30 Unit	100 %	264.342.900	Dana Alokasi Umu		Meningkatkan Kualit	100%	264.342.900	319.854.909

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Tahun 2027
									Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target		
					Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) 2. Persentase dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan PD yang ditetapkan tepat waktu (Indikator untuk mendukung SAKIP)	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	n Barang Milik Daerah Penunjang pada Rumah Dinas dan Sekretariat							m (DAU)		as Layanan Publik			
4	**01**	**01**	**2.11**		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**								**881.707.920**					**881.707.920**	**1.066.866.583**
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1. Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) 2. Persentase dokumen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Keuangan dan Sarana Prasarana Kepala dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Banjarnegara	100 %	2 Orang / Bulan	100 %	105.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	100%	105.000.000	127.050.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Tahun 2027
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target		
						perencanaan, evaluasi dan pelaporan PD yang ditetapkan tepat waktu (Indikator untuk mendukung SAKIP)													
4	01	01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1. Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) 2. Persentase dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan PD yang ditetapkan tepat waktu (Indikator untuk	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Keuangan dan Sarana Prasarana Kepala dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Banjarnegara	100 %	2 Paket	100 %	145.080.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	100%	145.080.000	175.546.800

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Tahun 2027
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target		
						mendukung SAKIP)													
4	01	01	2.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1. Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) 2. Persentase dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan PD yang ditetapkan tepat waktu (Indikator untuk mendukung SAKIP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Keuangan dan Sarana Prasarana Kepala dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Banjarnegara	100 %	2 Orang	100 %	31.627.920	Dana Alokasi Umum (DAU)		Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	100%	31.627.920	38.269.783
4	01	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala	1. Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Keuangan dan Sarana	Kab. Banjarnegara	100 %	2 Orang / Bulan	100 %	600.000.000	Dana Alokasi Umu		Meningkatkan Kualitas	100%	600.000.000	726.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Tahun 2027
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target		
					Daerah dan Wakil Kepala Daerah	terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) 2. Persentase dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan PD yang ditetapkan tepat waktu (Indikator untuk mendukung SAKIP)	Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Prasarana Kepala dan Wakil Kepala Daerah						m (DAU)		Layanan Publik				
4	**01**	**01**	**2.12**		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**								**1.529.603.000**					**1.570.000.000**	**1.850.819.630**
4	01	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1. Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) 2. Persentase dokumen	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Keuangan dan Sarana Prasarana Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Banjarnegara	100 %	12 Paket	100 %	770.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	100%	770.000.000	931.700.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Tahun 2027
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target		
						perencanaan, evaluasi dan pelaporan PD yang ditetapkan tepat waktu (Indikator untuk mendukung SAKIP)													
4	01	01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	1. Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) 2. Persentase dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan PD yang ditetapkan tepat waktu (Indikator untuk	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Keuangan dan Sarana Prasarana Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Banjarnegara	100 %	12 Paket	100 %	531.771.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	100%	550.000.000	643.442.910

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Tahun 2027
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target		
						mendukung SAKIP)													
4	01	01	2.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1. Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) 2. Persentase dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan PD yang ditetapkan tepat waktu (Indikator untuk mendukung SAKIP)	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Keuangan dan Sarana Prasarana Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Banjarnegara	100 %	12 Paket	100 %	227.832.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	100%	250.000.000	275.676.720

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Tahun 2027
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target		
4	**01**	**01**	**2.14**		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**								**422.260.700**					**422.260.700**	**510.935.447**
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	1. Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) 2. Persentase dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan PD yang ditetapkan tepat waktu (Indikator untuk mendukung SAKIP)	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	Kab. Banjarnegara	100 %	12 Laporan	100 %	165.825.600	Dana Alokasi Umum (DAU)		Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	100%	165.825.600	200.648.976
4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1. Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	Kab. Banjarnegara	100 %	12 Laporan	100 %	99.096.500	Dana Alokasi Umum (DAU)		Meningkatkan Kualitas Layanan	100%	99.096.500	119.906.765

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Tahun 2027
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target		
						mendukung SKM) 2. Persentase dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan PD yang ditetapkan tepat waktu (Indikator untuk mendukung SAKIP)										Publik			
4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1. Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) 2. Persentase dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan PD yang ditetapkan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	Kab. Banjarnegara	100 %	12 Laporan	100 %	157.338.600	Dana Alokasi Umum (DAU)		Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	100%	157.338.600	190.379.706

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Tahun 2027
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target		
						tepat waktu (Indikator untuk mendukung SAKIP)													
												JUMLAH :	**42.296.503.980**					**43.145.167.496**	**48.333.182.601**

BAB V
PENUTUP

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 merupakan penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. Renja Perangkat Daerah selanjutnya menjadi rencana kerja operasional bagi Perangkat Daerah untuk menjalankan programnya guna menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan daerah tahun 2026.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026 dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disepakati.
2. Kerangka pendanaan dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah masih bersifat sementara, sehingga masih dimungkinkan terjadi perubahan pagu yang disebabkan oleh pengurangan, penambahan, dan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan maupun antar sub kegiatan dalam kerangka penyusunan anggaran secara terpadu dan berbasis kinerja.
3. Rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi acuan bagi Kepala Perangkat Daerah dan segenap jajarannya serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, serta menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Akhirnya, untuk mencapai target sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara yang telah ditetapkan pada tahun 2025, selain perlu didukung dengan program dan kegiatan juga diperlukan sinergitas melalui koordinasi lintas Unit Kerja/Perangkat Daerah.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal : 2025

SEKRETARIS DAERAH

Drs. INDARTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19651003 198607 1 001

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) Kabupaten Banjarnegara merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilaksanakan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mewajibkan setiap Perangkat Daerah menyusun Renja sebagai pedoman kerja tahunan. Dokumen ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang bersifat lima tahunan, ke dalam rencana tahunan yang bersifat lebih operasional.

Sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah, Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara memiliki kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjarnegara. Renja berfungsi sebagai instrumen implementasi pelaksanaan arah strategis yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Renstra Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

a. Persiapan penyusunan;
b. Penyusunan rancangan awal;
c. Penyusunan rancangan Renja;
d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
e. Perumusan rancangan akhir; dan

f. Penetapan dokumen Renja.

Dalam penyusunannya, rancangan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara berpedoman pada arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang termuat dalam rancangan awal RKPD Kabupaten Banjarnegara. Selain itu, penyusunan Renja juga didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya serta capaian kinerja Renstra Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah kemudian dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, yang selanjutnya menjadi bagian dari proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banjarnegara.

Mengingat pentingnya peran strategis dokumen Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, maka seluruh proses penyusunan hingga penetapan dokumen Renja harus dilaksanakan sesuai ketentuan dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Ketentuan tersebut antara lain meliputi:

1. Renja disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD tahun berjalan;
2. Program dan kegiatan dalam Renja harus sejalan dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banjarnegara;
3. Program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Renja harus selaras dengan hasil kesepakatan seluruh pemangku kepentingan melalui Forum Perangkat Daerah maupun Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang); dan
4. Setiap program dan kegiatan dalam Renja harus dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output), serta dilengkapi dengan perkiraan kebutuhan pendanaan yang menunjukkan proyeksi ke depan

1.2 Landasan Hukum

Renja BPBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun dengan berlandaskan pada :

1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
7) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
11) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);
12) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
13) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara;
14) Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fugsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Perubahan BPBD Kabupaten Banjarnegara tahun 2025 adalah :

1. Sebagai pedoman pelaksanaan penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjarnegara, yang memuat arah kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan dalam urusan ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat khususnya pada suburusan kebencanaan tahun 2025;
2. Mempermudah proses pengendalian, koordinasi, serta pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana di lingkungan BPBD Kabupaten Banjarnegara, termasuk dalam hal koordinasi lintas instansi, serta pelaksanaan monitoring, analisis, dan evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;

3. Menyediakan informasi yang komprehensif bagi para pemangku kepentingan (stakeholders) mengenai arah dan rencana pembangunan tahunan di bidang penanggulangan bencana;
4. Menyelaraskan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 dengan program, kegiatan, dan anggaran yang dirumuskan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2025.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Mengintegrasikan program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja ke dalam Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025;
2. Mewujudkan tersusunnya dokumen Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan bencana di lingkungan BPBD;
3. Menciptakan kepastian arah dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan penanggulangan bencana antarbidang di BPBD serta dengan perangkat daerah dan instansi terkait lainnya;
4. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan, alokasi sumber daya, dan peningkatan produktivitas guna mendukung peningkatan kinerja pelayanan penanggulangan bencana di Kabupaten Banjarnegara.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, PengendaliandanEvaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RancanganPeraturanDaerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyajian dokumen Renja Perangkat Daerah terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Bab I memuat Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Bab II memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun 2025 sampai dengan Triwulan II tahun 2025.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DARERAH

Pada Bab III dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, serta Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB IV PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja BPBD Tahun Lalu dan Capaian Renstra BPBD Kabupaten Banjarnegara

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun 2025 mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya capaian tersebut dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/ atau realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/ kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui dari :

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya ataumelebihi target kinerja program/ kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian programRenstraPerangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yangperludiambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2023 s/d 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiataan s/d Tahun 2023	Target dan Relisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/Kegiatan PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Urusan Pemerintah Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat									
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 laporan	6 laporan	6 laporan	6 laporan	100%	6 laporan	6 laporan	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2023 s/d 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiataan s/d Tahun 2023	Target dan Relisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/Kegiatan PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Administrasi Keuangan Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang	25 Orang	26 Orang	26 Orang	100%	33 orang	33 orang	100%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verivikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	100%	7 dokumen	7 dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan	2 laporan	100%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya.	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 paket	60 paket	28 paket	28 paket	100%	1 paket	1 paket	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2023 s/d 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiataan s/d Tahun 2023	Target dan Relisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/Kegiatan PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Administrasi Umum perangkat Daerah Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	2 paket	13 paket	13 paket	100%	13 paket	13 paket	100%
	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	13 paket	13 paket	12 paket	12 paket	100%	12 paket	12 paket	100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 unit	2 unit	10 unit	10 unit	100%	10 unit	10 unit	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2023 s/d 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiataan s/d Tahun 2023	Target dan Relisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/Kegiatan PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%
	Penyediaan jasa Pemeliharaan .Biaya Pemeliharaan, Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 unit	24 unit	24 unit	24 unit	100%	24 unit	24 unit	100%
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	100%	10 unit	10 unit	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	100%	3 unit	3 unit	100%
	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Cakupan Penanggulangan Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2023 s/d 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiataan s/d Tahun 2023	Target dan Relisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/Kegiatan PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Presentase Layanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di Kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di Kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	600 orang	600 orang	120 orang	120 orang	100%	120 orang	120 orang	100%
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan Kesiap-siagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan apasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	10 kawasan	10 kawasan	10 kawasan	10 kawasan	100%	4 kawasan	4 kawasan	100%
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiap-	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara,	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	100%	6 unit	6 unit	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2023 s/d 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiataan s/d Tahun 2023	Target dan Relisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/Kegiatan PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	siagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya								
	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kab/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di Kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	290 orang	290 orang	450 orang	450 orang	100%	30 orang	30 orang	100%
	Pengendalian operasi dan penyediaan Sarana dan Prasarana kesiap-siagaan terhadap Bencana Kabupaten Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupoaten/Kota	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	250 orang	250 orang	-	-	-	160 rang	160 orang	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2023 s/d 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiataan s/d Tahun 2023	Target dan Relisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/Kegiatan PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	-	-	-	-	-			
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	-	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Kurban Bencana Kabupaten/Kta	Presentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	1574 orang	1574 orang	100 orang	100 orang	100%	50 orang	50 orang	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2023 s/d 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiataan s/d Tahun 2023	Target dan Relisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/Kegiatan PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Penyediaan Logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kab/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1525 orang	1535 orang	100 orang	100 orang	100%	100 orang	100 orang	100%
	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi /wabah Penyakit	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Presentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	5 dokumen	5 dokumen	100%
	Kerja sama antar lembaga dan Kemitraan Dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2023 s/d 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiataan s/d Tahun 2023	Target dan Relisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/Kegiatan PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sector sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	-	-	-	-	-	50 kegiatan	50 kegiatan	100%

Berdasarkan Tabel diatas, secara garis besar tingkat capaian indikator program dan kegiatan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara di tahun 2024 dengan rata-rata capaian sebesar 100% (sangat berhasil), hal ini bisa dilihat dari semua target capaian indikator program dan kegiatan yang dilaksanakan semuanya memenuhi target yang ditetapkan. Faktor-faktor yang mendukung tercapainya target kinerja antara lain:

1. Kegiatan edukasi dan pelatihan serta peningkatan kapasitas penanggulangan bencana tetap berjalan secara terus-menerus.
2. Pelaksanaan penanganan bencana berjalan cukup cepat dan tepat karena didukung sumberdaya yang selalu siap dalam waktu 24 jam/hari serta kesiapsiagaan relawan yang tersebar di masing-masing wilayah;
3. Sinergi lintas sektor yang baik sehingga penanganan kejadian bencana antar wilayah dapat ditanggulangi secara cepat dan tepat sasaran;
4. Ketersediaan sarana dan prasarana yang cukup memadai sehingga mendukung percepatan pelaksanaan penanganan bencana.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan BPBD Kabupaten Banjarnegara berdasarkan Indikator Capaian Kinerja BPBD. Indikator Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara tahun 2024 adalah Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan target 8,96%, Persentase warga negara yang memperoleh layanan kedaruratan bencana dengan target 100% dan Persentase layanan pasca bencana dengan target 100%.

Terkait dengan pemenuhan Standart Pelayanan Minimal sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 yang dilengkapi dengan Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten Kota (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor101tahun 2018) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, pelayanan yang diberikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara sebagai berikut:

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana yang meliputi :
   a. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi rawan bencana;
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana meliputi :
   a. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
   b. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi;
   c. Pengendalian Operasi dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
   d. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi yang meliputi :
   a. Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis;
   b. Respon Cepat Darurat Bencana;
   c. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
   d. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana.

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal diatas (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021), Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara di tahun 2024 sebagian besar telah melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut secara berkelanjutan. Mulai dari kegiatan pelayanan informasi rawan bencana yang berhasil menjangkau masyarakat sebanyak 1.067 orang, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan realisasi sebanyak 7.544 orang dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi dengan jumlah warga yang mendapatkan layanan penyelamatan dan evakuasi sebanyak 259 orang. Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara secara detail dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2026	2027	
1	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			34,53%	8,96%,				10,85%			
2	Persentase warga negara yang memperoleh layanan kedaruratan bencana				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase layanan pasca bencana				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan urusan pemerintahan dalam satu urusan, yaitu Ketentraman ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan berdasarkan hasil evaluasi, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk tahun 2026 mencakup satu urusan tersebut.

Rumusan permasalahan pembangunan daerah menjadi rujukan dalam perumusan visi, misi, dan program kepala daerah selama 5 tahun ke depan. Permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Banjarnegara yang berdasarkan aspek penanggulangan bencana sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029 yaitu :

1. Kerawanan Bencana. Sebagai daerah yang terletak di daerah dataran tinggi, Kabupaten Banjarnegara termasuk daerah yang memiliki kerawanan bencana yang cukup tinggi. Hal ini terlihat dari indeks risiko bencana 103,28, meski masih termasuk pada skala sedang, namun beberapa daerah di Kabupaten Banjarnegara memiliki potensi bencana yang tinggi.
2. Perubahan cuaca ekstrem/anomali cuaca akibat el nino dan la nina yang perlu mendapatkan perhatian. Hal ini ditandai musim penghujan yang berkepanjangan berpotensi menimbulkan banjir dan longsor yang sangat parah, namun kemarau yang berkepanjangan mengakibatkan kekeringan yang parah. Pemanasan global dan perubahan iklim akibat peningkatan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) juga menjadi permasalahan yang perlu diantisipasi karena tidak jarang menimbulkan bencana tersendiri atau memperparah bencana yang sedang terjadi.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPD Tahun 2023-2026 dan tahun pertama pentahapan RPJMD Tahun 2025-2029 dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2045. Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 saat ini sedang disusun sampai tahap rancangan. Selain itu, RKPD Tahun 2026 juga disusun berpedoman pada RPJPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2045, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, RKP Tahun 2026, dan program strategis nasional.

Sebagai bagian dari pelaksanaan tahun pertama dalam rangkaian RPJMD Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2026 juga perlu memperhatikan visi, misi dan program kepala daerah terpilih. Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 saat ini sedang disusun. Berdasarkan rancangan RPJMD Tahun 2025-2029 terdapat visi, misi, tujuan, dan sasaran. Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut adalah sebagai berikut: “Mewujudkan Banjarnegara yang Maju dan Sejahtera”.

Dalam upaya mewujudkan visi “Mewujudkan Banjarnegara yang Maju dan Sejahtera” BPBD Kabupaten Banjarnegara, akan melaksanakan kebijakan melalui misi yaitu Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan. Seiring semakin tertekannya daya dukung dan daya tampung lingkungan karena pertumbuhan penduduk, perubahan iklim, pemanfaatan sumber daya alam maupun aktivitas perekonomian lainnya maka diperlukan konsep pembangunan yang memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian alam, dan kesejahteraan masyarakat. Misi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap langkah pembangunan dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan, keberlanjutan sumber daya, serta mitigasi terhadap bencana dan dampak perubahan iklim.

Kelestarian sumber daya alam menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan menjamin kehidupan generasi mendatang. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan sumber daya alam akan diarahkan pada praktik yang berkelanjutan, seperti pemanfaatan energi terbarukan, konservasi lahan, penggunaan teknologi ramah lingkungan, serta berketahanan terhadap bencana. Hal ini juga selaras dengan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang mendorong pembangunan rendah karbon dan peningkatan efisiensi energi.

Tahun 2026 merupakan tahun pertama periode RPJMD Tahun 2025-2029, arah pembangunan akan diarahkan pada pembangunan pondasi dan perencanaan strategis dalam mewujudkan Banjarnegara yang Maju dan Sejahtera. Prioritas pembangunan pada tahun 2026 ditujukan untuk :

a. Peningkatan akses masyarakat pada layanan dasar yang berkualitas
b. Pengembangan sektor unggulan potensial dan penguatan ekosistem ekonomi kreatif secara berkelanjutan

c. Revitalisasi jalan, jembatan, dan sistem transportasi yang mendukung konektivitas ekonomi, serta pengembangan infrastruktur digital untuk menunjang perekonomian
d. Peningkatan kapasitas SDM aparatur dan digitalisasi pelayanan.

Target sasaran makro pembangunan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 yang akan dicapai antara lain meliputi :

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,25% - 6,00%;
2. Angka Kemiskinan sebesar 13,92% - 13,77%;
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,50% - 5,00%;
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 70,98%

Adapun BPBD Kabupaten Banjarnegara, mempunyai prioritas pembangunan pendukung untuk mewujudkan ketercapaian target pembangunan RPJMD sebagaimana berikut :

1. Meningkatkan upaya pelayanan informasi, komunikasi dan edukasi bencana serta pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
2. Meningkatkan upaya pelayanan respon cepat darurat bencana;
3. Meningkatkan upaya pemulihan pasca bencana.

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	100%	Rp. 4.945.060.818	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**		Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	100%	Rp. 4.951.697.609	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Persentase Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan dan evaluasi kinerja OPD yang akuntabel.**	100%	Rp. 2.146.000	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan dan evaluasi kinerja OPD yang akuntabel.**	100%	Rp. 2.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPBD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 dokumen	Rp. 2.146.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPBD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 dokumen	Rp. 2.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Persentase tersusunnya administrasi keuangan Perangkat**	**100%**	**Rp. 4.029.879.036**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase tersusunnya administrasi keuangan Perangkat**	**100%**	**Rp. 4.263.906.525**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPBD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 orang	Rp. 3.780.332.118	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPBD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 orang	Rp. 4.231.730.525	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BPBD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7 dokumen	Rp. 38.095.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BPBD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7 dokumen	Rp. 30.176.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	BPBD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 laporan	Rp. 2.462.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	BPBD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 laporan	Rp. 2.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Persentase terlaksananya administrasi perangkat daerah**	**100%**	**Rp. 7.974.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase terlaksananya administrasi perangkat daerah**	**100%**	**Rp.**	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	BPBD	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	32 paket	Rp. 7.974.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	BPBD	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	Rp.	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**Rp. 512.251.700**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah**		**Rp. 205.219.000**	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPBD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 paket	Rp. 15.626.700	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPBD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 paket	Rp. 5.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BPBD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	Rp. 496.625.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BPBD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	Rp. 200.219.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang **Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**Rp. 46.765.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**Rp.**	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPBD	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	10 unit	Rp. 46.765.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPBD	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	10 unit	Rp.	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan**	**100%**	**Rp. 335.485.200**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan**	**100%**	**Rp. 325.572.084**	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPBD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	Rp. 86.400.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPBD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	Rp. 68.400.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPBD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	Rp. 249.085.200	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPBD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	Rp. 257.172.084	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**Rp. 219.549.800**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**Rp. 155.000.000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BPBD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	Rp. 16.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BPBD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	Rp. 11.250.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPBD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan perizinannya	24 unit	Rp. 122.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPBD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan perizinannya	24 unit	Rp. 100.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPBD	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	Rp. 30.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPBD	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	Rp. 23.750.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BPBD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Rp. 50.549.800	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BPBD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	Rp. 20.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Penanggulangan Bencana		**Persenatse Cakupan Penanggulangan Bencana**	**100%**	**Rp. 2.491.872.500**	**Penanggulangan Bencana**		**Persenatse Cakupan Penanggulangan Bencana**	100%	Rp. 1.253.150.000	
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		**Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**100%**	**56.000.000,-**	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**		**Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	100%	Rp. 29.850.000	
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Kab. Banjarnegara	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	120 orang	Rp. 56.000.000	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Kab. Banjarnegara	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	120 orang	Rp. 29.850.000	
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		**Persenatse Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**	**100%**	**Rp. 1.024.535.300**	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**		**Persenatse Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**		Rp. 511.675.000	
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kab. Banjarnegara	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan apasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	4 kawasan	Rp. 250.000.000	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kab. Banjarnegara	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan apasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	4 kawasan	Rp. 124.875.000	
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Banjarnegara	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	-	Rp. 101.999.500	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Banjarnegara	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya		Rp. 58.150.000	
	Penyusunan Rencana Kontijensi	Kab. Banjarnegara	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 dokmen	Rp. 100.000.000	Penyusunan Rencana Kontijensi	Kab. Banjarnegara	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 dokumen	Rp. 28.900.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab. Banjar negara	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	160 orang	Rp. 49.800.000	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab. Banjarn egara	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	160 orang	Rp. 25.000.000	
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Kab. Banjar negara		-	-	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Kab. Banjarn egara			Rp. -	
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kab. Banjar negara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	-	-	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kab. Banjarn egara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		Rp. -	
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Kab. Banjar negara	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	50 unit	Rp. 45.000.000	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Kab. Banjarn egara	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	6 unit	Rp. 30.000.000	
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Banjar negara	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	90 orang	Rp. 100.000.000	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Banjarn egara	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	30 orang	Rp. 69.750.000	
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Banjar negara	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12 laporan	Rp. 377.735.800	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Banjarn egara	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana	12 laporan	Rp. 175.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
								yang ada di kawasan tempat tinggalnya			
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	**Kab. Banjar negara**	**Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**100%**	**Rp. 887.874.600**	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Kab. Banjar negara**	**Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**100%**	**Rp. 547.500.000**	
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Banjar negara	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 dokumen	Rp. 307.991.600	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Banjarnegara	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 dokumen	Rp. 200.000.000	
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Banjar negara	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	100 orang	Rp. 76.250.000	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Banjarnegara	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	50 orang	Rp. 35.000.000	
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Banjar negara	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	200 orang	Rp. 476.778.000	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Banjarnegara	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 orang	Rp. 300.000.000	
	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Kab. Banjar negara	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	1 dokumen	Rp. 3.750.000	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Kab. Banjarnegara	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	1 dokumen	Rp. 2.500.000	
	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Kab. Banjar negara			Rp. 23.105.000	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Kab. Banjarnegara			Rp. 10.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		**Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**100%**	**Rp. 523.462.600**	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**		**Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	100%	Rp. 164..125.000	
	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Banjarnegara	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	2 dokumen		Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Banjarnegara	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	5 dokumen	Rp.	
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Banjarnegara	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	10 dokumen	Rp. 35.701.600	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Banjarnegara	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	2 dokumen	Rp. 17.375.000	
	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kab. Banjarnegara	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sector sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	1 kegiatan	Rp. 210.000.000	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kab. Banjarnegara	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sector sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	50 kegiatan	Rp. 99.000.000	
	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Kab. Banjarnegara			75.261.000	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Kab. Banjarnegara			Rp. 47.750.000	
	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Banjarnegara			198.000.000	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Banjarnegara				
	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pasca	Kab. Banjarnegara			4.500.000	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pasca	Kab. Banjarnegara				

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	bencana Kabupaten/Kota					bencana Kabupaten/Kota					
	JUMLAH				**Rp. 7.436.933.318**					**Rp. 6.204.847.609**	

2.5 Penelaahan Usulan Masyarakat

Berdasarkan hasil reses anggota DPRD, melalui aplikasi SIPD telah disampaikan usulan program dan kegiatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Masalah	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume
-	-	-	-	-	-

2.6 Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan hasil reses anggota DPRD, melalui aplikasi SIPD telah disampaikan usulan program dan kegiatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Masalah	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume
-	-	-	-	-	-

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah Kebijakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Renas PB Tahun 2025-2029 :

KEBIJAKAN	STRATGI
1. Penguatan peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien	a. Meningkatkan kualitas perangkat peraturan perundang-undangan dan implementasi dalam penanggulangan bencana yang adaptif dan berkelanjutan. b. Meningkatkan kualitas NSPK penanggulangan bencana
2. Peningkatan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana	a. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, akademisi, lembaga usaha, masyarakat, media, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan bencana. b. Mewujudkan dan meningkatkan sistem peringatan dini, data, dan layanan informasi kebencanaan yang terpadu dan berkesinambungan berdasarkan prinsipprinsip kebijakan satu peta dan satu data.
3. Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana dengan memperhatikan	a. Melaksanakan dan mengembangkan program kesiapsiagaan dan pengelolaan risiko bencana dengan

KEBIJAKAN	STRATGI
tata ruang dan penataan Kawasan	memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan. b. Meningkatkan investasi dan pemanfaatan berbagai skema pendanaan inovatif termasuk transfer risiko untuk penanggulangan bencana. c. Mengoptimalkan pendanaan secara terpadu untuk penanggulangan bencana.
4. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel	a. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme para penyelenggaraan dan pelaku penanggulangan bencana. b. Mengoptimalkan pelaksanaan standar pelayanan minimal penanggulangan bencana. c. Meningkatkan keterbukaan informasi dan komunikasi, kualitas sistem perencanaan, serta pemantauan dan evaluasi dalam penanggulangan bencana. d. Mendorong pelibatan pemangku kepentingan dalam tata kelola penanggulangan bencana untuk meningkatkan akuntabilitas. e. Mewujudkan kabupaten/kota, desa/kelurahan, dan masyarakat tangguh bencana. f. Mewujudkan sarana dan prasarana yang tangguh terhadap bencana. g. Meningkatkan edukasi kebencanaan dan pengelolaan

KEBIJAKAN	STRATGI
	pengetahuan penanggulangan bencana kepada masyarakat dan pemangku kepentingan
5. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal.	a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam penanganan darurat bencana. b. Meningkatkan kesiapan dan keandalan logistik dan peralatanan penanganan darurat bencana. c. Mengoptimalkan pengelolaan bantuan masyarakat dalam penanganan darurat bencana. d. Menguatkan kualitas kelembagaan dan penggunaan ilmu pengetahuan & teknologi. e. Mempercepat pemulihan sarana dan prasarana vital.
6. Percepatan pemulihan pascabencana pada daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik.	a. Mengoptimalkan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berdasarkan tata ruang yang peka risiko bencana. b. Meningkatkan kualitas penghidupan masyarakat terdampak bencana yang lebih baik. c. Mewujudkan infrastruktur, perumahan, dan permukiman berketahanan bencana. d. Meningkatkan kualitas pemulihan sosial ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan hidup.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tujuan dari Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 adalah, “Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana”. Adapun sasaran BPBD Kabupaten Banjarnegara adalah Meningkatnya Ketagguhan Masyarakat Banjarnegara dalam Penanggulangan Bencana :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2026
1	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana		Persentase Desa Tangguh Bencana	44%
		Meningkatnya Ketagguhan Masyarakat Banjarnegara dalam Penanggulangan Bencana	Presentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana	11,76%
			Persenase warga negara yang memperoleh layanan kedaruratan bencana	100%
			Persentase layanan pasca bencana	100%

3.3 Program dan Kegiatan

Adapun Program dan Kegiatan Usulan Rencana Kerja Tahun 2026 BPBD Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota
   1. Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

B. Program Penanggulangan Bencana
   1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
   2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
   3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
   4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DARERAH

Program pada perangkat daerah merupakan program prioritas dalam Renstra 2025-2029. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Pemilihan untuk masing-masing program/ kegiatan di sebagai berikut:

TUJUAN OPD/ SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN SASARAN SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				LOKASI	SUMBER ANGGARAN	CATATAN PENTING
					2026		PERKIRAAN 2027				
					Target	Rp.	Target	Rp.			
Meningkatkan Ketangguhan Daerah dalam Penanggulangan Bencana		Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,79	0,82		0,83				
Terwujudnya Kesiapsiagaan Daerah dalam Penanggulangan Bencana		Persentasse Kecamatan Tangguh Bencana dengan Predikat Pratama	Persenase	NA	0,10		0,15				
	Penanggulangan Bencana	Persentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	Persentase	54,35	41,73	Rp. 1.253.150.000	45,53				
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Presentase Layanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kota	Persentase	100%	100%	Rp. 29.850.000	100%	Rp. 66.300.000			
	"Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di Kawasan rawan bencana bencana	Orang	120	120	Rp. 29.850.000	300	Rp. 66.300.000			

TUJUAN OPD/ SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN SASARAN SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				LOKASI	SUMBER ANGGARAN	CATATAN PENTING
					2026		PERKIRAAN 2027				
					Target	Rp.	Target	Rp.			
	Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)"	Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di Kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun									
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase	100%	100%	Rp. 511.675.000	100%				
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Unit			Rp. 30.000.000	6	Rp. 76.500.000			
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Orang			Rp. 25.000.000					

TUJUAN OPD/ SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN SASARAN SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				LOKASI	SUMBER ANGGARAN	CATATAN PENTING
					2026		PERKIRAAN 2027				
					Target	Rp.	Target	Rp.			
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan apasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan			Rp. 124.875.000					
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Orang			Rp. 58.150.000					
	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Dokumen			Rp. 28.900.000					
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Laporan			Rp. 175.000.000					

TUJUAN OPD/ SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN SASARAN SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				LOKASI	SUMBER ANGGARAN	CATATAN PENTING
					2026		PERKIRAAN 2027				
					Target	Rp.	Target	Rp.			
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Orang			Rp. 69.750.000					
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Presentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase	100%	100%	Rp. 547.500.000	100%				
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Laporan			Rp. 200.000.000					
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang			Rp. 35.000.000					

TUJUAN OPD/ SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN SASARAN SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				LOKASI	SUMBER ANGGARAN	CATATAN PENTING
					2026		PERKIRAAN 2027				
					Target	Rp.	Target	Rp.			
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang			Rp. 300.000.000					
	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	Dokumen			Rp. 2.500.000					
	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	Laporan			Rp. 10.000.000					
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Presentase Penataan Sistem Dasar	Persentase	100%	100%	Rp. 164.125.000	100%				

TUJUAN OPD/ SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN SASARAN SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				LOKASI	SUMBER ANGGARAN	CATATAN PENTING
					2026		PERKIRAAN 2027				
					Target	Rp.	Target	Rp.			
		Penanggulangan Bencana									
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen			Rp. 17.375.000					
	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	Kegiatan			Rp. 99.000.000					
	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca bencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal	Dokumen			Rp. 47.750.000					

TUJUAN OPD/ SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN SASARAN SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				LOKASI	SUMBER ANGGARAN	CATATAN PENTING
					2026		PERKIRAAN 2027				
					Target	Rp.	Target	Rp.			
		paling lama dalam 1 (satu) tahun									
Meningkatkan Kinerja Penyelenggraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah									
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dan Pelayanan Publik PD		Nilai SAKIP	Angka								
		Indeks Pelayanan Publik									
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase	100%	100%	Rp. 4.951.697.609	100%				
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan dan evaluasi kinerja OPD yang akuntabel	Persentase			Rp. 2.000.000					
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan	Laporan			Rp. 2.000.000					

TUJUAN OPD/ SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN SASARAN SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				LOKASI	SUMBER ANGGARAN	CATATAN PENTING
					2026		PERKIRAAN 2027				
					Target	Rp.	Target	Rp.			
	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya administrasi keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Persentase	100%	100%	Rp. 4.263.906.525	100%				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang			Rp. 4.231.730.525					
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen			Rp. 30.176.000					
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	Laporan			Rp. 2.000.000					

TUJUAN OPD/ SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN SASARAN SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				LOKASI	SUMBER ANGGARAN	CATATAN PENTING
					2026		PERKIRAAN 2027				
					Target	Rp.	Target	Rp.			
		Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD									
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Persentase	100%	100%	Rp. 205.219.000	100%				
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket			Rp. 5.000.000					
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket			Rp. 200.219.000					
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	Persentase	100%	100%	Rp. 325.572.084	100%				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan			Rp. 68.400.000					
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan			Rp. 257.172.084					

TUJUAN OPD/ SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN SASARAN SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				LOKASI	SUMBER ANGGARAN	CATATAN PENTING
					2026		PERKIRAAN 2027				
					Target	Rp.	Target	Rp.			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase	100%	100%	Rp. 155.000.000	100%				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit			Rp. 11.250.000					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit			Rp. 100.000.000					
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit			Rp. 23.750.000					
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit			Rp. 20.000.000					

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. Renja Perangkat Daerah selanjutnya menjadi platform operasional bagi Perangkat Daerah dalam menjalankan programnya dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka sasaran pembangunan daerah tahun 2026. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026 dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disepakati;
2. Kerangka pendanaan dalam Renja Perangkat Daerah masih bersifat sementara, sehingga masih dimungkinkan terjadi perubahan pagu yang disebabkan oleh pengurangan, penambahan, dan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan maupun antar sub kegiatan dalam kerangka penyusunan anggaran secara teradu dan berbasis kinerja.
3. Renja Perangkat Daerah menjadi acuan bagi Kepala Perangkat Daerah dan segenap jajarannya serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, serta menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Banjarnegara, September 2025

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Banjarnegara

AJI PILUROSO, S.STP
Pembina Tingkat I
NIP. 19820415 200112 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

RENCANA KERJA(RENJA) AWAL
TAHUN ANGGARAN 2026

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kabupaten Banjarnegara

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rakhmat dan hidayahNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026.

Rancangan Awal Rencana Kerja Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun berdasarkan amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rancangan Pembangunan, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana pembangunan Jangka Menegah Daerah, dan rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Rancangan Renja Bakesbanggpol Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 mencakup analisa hasil renja dan hasil evaluasi Renja tahun lalu. Perumusannya terdiri dari Pendahuluan, hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, tujuan dan sasaran Bakesbanggpol dan Rencana Kerja dan pendanaan serta penutup. Penyusunan Rancangan Renja Perubahan tersebut berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2050 dan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026.

Kami menyadari dalam penyusunan Rancangan Awal Renja ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan rancangan renrana kerja dimaksud.

Banjarnegara, 10 Agustus 2025
KEPALA BAKESBANGPOL
KABUPATEN BANJARNEGARA

IZAK DANIAL ALOY, S.STP., M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19800830 199810 1 002

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangonan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 wajib dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan yang diatur melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan pembentukan tim penyusun, penelaahan rancangan awal RKPD, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, hingga pada penyempurnaan berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang RKPD. Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, penyusunan Renja Perangkat Daerah juga mengacu pada Renja Kementerian/Lembaga terkait, serta Renja Perangkat Daerah Provinsi terkait. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan

konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2 Landasan Hukum

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan;
8. Undang Undang Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
9. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
10. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
11. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah

Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 24);
30. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjarnegara, (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 2).

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun dengan maksud untuk :

a. Menjabarkan RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 ke dalam rencana program kegiatan prioritas Tahun 2026 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Renja K/L Tahun 2026 dan Renja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;
b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerapan anggaran berbasis kinerja.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

a. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA-DPA dalam Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2026, yang dalam penyusunannya didahului dengan menyusun Kebijakan Umum

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026;

b. Sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Tahun 2026;

c. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

I.4. Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun berdasarkan sistematika yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah.

BAB 2 : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dan atau pokok-pokok DPRD.

BAB 3 : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan tahun 2026.

BAB 4 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran RKPD.

BAB 5 : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Awal Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Urusan yang menjadi kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 terdiri dari 6 program, 11 kegiatan, dan 23 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 50.534.245.091-, dengan fokus utama pada Pembangunan manusia melalui peningkatan SDM dan peningkatan pelayanan dasar yaitu dengan meningatkan pendidikan budi pekerti dan wawasan kebangsaan sejak dini. Program/kegiatan/sub kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah yang meliputi:

1. Keterbatasan personil yang belum memadahi dan Sumber Daya Manusia yang belum sesuai dengan kompetensinya dalam pelaksanaan tugas.
2. Perlu penguatan dukungan Kebijakan dan anggaran khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pencapaian target dan realisasi program dan kegiatan.
3. Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam ikut menjaga kondusivitas wilayah dan ketentraman dan keamanan lingkungan.
4. Masih kurangnya pemahaman masyarakat di bidang wawasan kebangsaan.
5. Masih rendahnya pemahaman masyarakat di bidang politik terutama bagi pemilih pemula dan pekerja sektor informal.
6. Masih maraknya pergaulan bebas dan minuman keras di masyarakat yang bisa membahayakan bagi remaja/pelajar dan sulitnya mengidentifikasi komunitas penyalahgunaan narkoba.

Dalam Renja Perangkat Daerah tersebut, program/kegiatan/sub kegiatan yang disetujui untuk dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024 terdiri dari 6 program, 11 kegiatan, dan 23 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 50.534.245.091-,

Dinamika yang terjadi selama tahun 2024 turut mempengaruhi keberhasilan pencapaian Renja Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2024, tercatat adanya hasil yang baik yang dikarenakan adanya pencapaian maupun pelampauan target maupun yang tidak memenuhi target.

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

   Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan di Bakesbanggol Banjarnegara semuanya memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang telag di rencanakan.

b. Realisasi program/kegiatan yang telah **memenuhi target** kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi:

   1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah mempunyai 1 (satu) indikator keluaran, yaitu Jumlah Dokumen Rencana dan pelaporan yang tersusun (Aksi Renstra, RKT, KAK, DPA, RKA, IKK, Renja, LKPJ, LKJIP, PK) dengan target 10 dokumen dan terealisasi 10 dokumen sehingga mempunyai capaian kinerja 100%.
   2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD mempunyai 1 (satu) indikator keluaran, yaitu Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan target 2 Laporan dan terealisasi 2 Laporan sehingga mempunyai capaian kinerja 100%.
   3) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN mempunyai 1 (satu) indikator keluaran yaitu jumlah gaji dan tunjangan ASN yang terbayarkan dengan target 15 ASN terealisasi 15 ASN mempunyai capaian kinerja 100%.

4) Sub kegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengajian verifikasi keuangan mempunyai 1 (satu) indikator yaitu jumlah jasa administrasi keuangan yang terpenuhi dengan target 12 bulan terealisasi 12 bulan mempunyai target kinerja sebesar 100%.

5) Sub Kegiatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor mempunyai 1 (satu) indikator keluaran, yaitu jumlah peralatan kebersihan yang terpenuhi dengan target 3 paket terealisasi 3 paket mempunyai capaian kinerja target 100%.

6) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor mempunyai 1 (satu) indikator keluaran yaitu jumlah bahan logistik kantor yang tersedia dengan target 16 paket terealisasi 16 paket, sehingga mempunyai capaian kinerja 100%.

7) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya mempunyai 1 (satu) indikator keluaran yaitu Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang disediakan dengan target 8 unit terealisasi 8 unit, sehingga mempunyai capaian kinerja 100%.

8) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik mempunyai 1 (satu) indikator keluaran yaitu jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik yang disediakan dengan target 12 bulan terealisasi 12 bulan, sehingga mempunyai capaian kinerja 100%.

9) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor mempunyai 1 (satu) indikator keluaran yaitu jumlah honor PTT/THL yang terbayarkan dengan target 12 bulan terealisasi 12 bulan sehingga capaian kinerja 100%.

10) Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan mempunyai 1 (satu) indikator keluaran yaitu Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dengan target 10 unit terealisasi 10 unit, sehingga mempunyai capaian kinerja 100%.

11) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya mempunyai 1 (satu) indikator keluaran yaitu Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi dengan target 1 unit dan terealisasi 1 unit, sehingga mempunyai capaian kinerja 100%.

12) Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah kebangsaan (Peningkatan Bela Negara) mempunyai 1 (satu) indikator keluaran yaitu Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan target 75 orang terealisasi 75 orang, sehingga mempunyai capaian kinerja 100%.

13) Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Bantuan Parpol / Hibah Parpol) mempunyai 1 (satu) indikator keluaran yaitu Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/Pemilu Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan target 10 dokumen terealisasi 10 dokumen, sehingga mempunyai capaian kinerja 100%.

14) Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Rakor Money Penerimaan Banparpol). Mempunyai 1 (satu) indikator keluaran yaitu Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan

target 10 laporan terealisasi 10 laporan, sehingga mempunyai capaian kinerja 100%.

15) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Bantuan Hibah Ormas) mempunyai 1 (satu) indikator keluaran yaitu Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah, dengan target 4 Laporan terealisasi 4 Laporan, sehingga mempunyai capaian kinerja 100%.

16) Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Fasilitasi Ormas) mempunyai 1 (satu) indikator keluaran yaitu Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dengan target 100 Orang terealisasi 100 Orang, sehingga mempunyai capaian kinerja 100%.

17) Sub Kegatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (P4GN) mempunyai 1 satu indikator keluaran, yaitu Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan target 2.500 orang realisasi 2.500 orang, sehingga mempunyai capaian kinerja 100 %.

18) Sub Kegatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (FKUB) mempunyai 1 (satu) indikator keluaran, yaitu Jumlah laporan hasil Monitoring,

Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan target 2 Laporan terealisasi 2 Laporan, sehingga mempunyai capaian kinerja 100%.

19) Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat/FKDM) mempunyai 1 (satu) indikator, yaitu Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Serta Penanganan Konflik di Daerah dengan target 2 Laporan terealisasi 2 Laporan, sehingga mempunyai capaian kinerja 100%.

20) Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Kewaspadaan Dini Daerah/Wasdinda), dengan target 12 dokumen terealisasi 12 dokumen, sehingga mempunyai capaian kinerja 100%.

21) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Penanganan Konflik Sosial/PKS) mempunyai 1 (satu) indikator keluaran yaitu Jumlah Orang yang mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang

Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah dari target 150 Orang terealisasi 150 Orang, sehingga mempunyai capaian kinerja 100 %.

22) Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Forkompinda), mempunyai 1 (satu) indikator yaitu Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dengan target 12 Laporan terealisasi 12 Laporan, sehingga mempunyai capaian kinerja 100%.

c. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang **melebihi target** kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah:

1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Pendidikan Politik/Dikpol) mempunyai 1 (satu) indikator keluaran yaitu Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Pendidikan Politik dengan target 2.500 Orang terealisasi 2.819 Orang, sehingga mempunyai capaian kinerja 112,8%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah:

1) Perencanaan kegiatan tepat waktu, dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang dijadwalkan.
2) Pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota tim kegiatan, sehingga pelaksanaan menjadi lebih efektif.
3) Pengendalian berjenjang atas pelaksanaan kegiatan sehingga kekurangan didalam persiapan dan pelaksanaan dapat diantisipasi.
4) Efektivitas kerja tim untuk pencapaian kegiatan yang lebih baik.
5) Kerjasama yang harmonis dan koordinasi yang baik antara Tim pengelola kegiatan dan Penggguna Anggaran.
6) Terciptanya hubungan yang baik antara masyarakat dan pemerintah/Instansi terkait dalam ikut serta menjaga keamanan dan

kenyamanan lingkungan, sehingga situasi kondusif di wilayah Kabupaten Banjarnegara dapat terjaga.

7) Terbangunnya komunikasi yang baik antara pemeluk agama dengan masyarakat dan pemerintah serta dengan dibentuknya Forum Kurukunan Umat Beragama./FKUB dalam upaya menghindari konflik agama, sehingga bisa mendukung kondusivitas wilayah Kabupaten Banjarnegara.

8) Upaya peningkatan pemahaman masyarakat tentang keamanan lingkungan kepada masyarakat dan kelompok masyarakat.

9) Anggaran bamparpol dipertanggungjawabkan sesuai dengan rincian anggaran dan belanja berdasar permohonan /proposal yang diajukan oleh penerima bamparpol.

10) Monitoring/pemantauan dan koordinasi dengan pihak –pihak terkait dalam upaya menjaga keamanan dan ketentraman.

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024 disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
s.d. Tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Anggaran Tahun 2024		
			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Urusan Pemerintahan Umum							
8.01.01	**Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kab/kota**	**Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan**	100%	100%	100%	**3.022.904.241**	**2.873.760,571**	**95,07**

		Nilai SAKIP	66,53	62,41	93,88			
8.01.2.01	*Kegiatan Penyusunan penyimpangan dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	Presentase penyampaian laporan dan dokumen capaian SKPD	100%	100%	100%	10.000.000	9.530.800	95,31
8.01.2.01.01	Sub Kegiatan.Penyusunan dokumen Perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen penyusunan laporan capaian kinerja yg disusun	100%	100%	100%	1.000.000	990.000	99,4
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	100%	100%	9.000.000	8.540.800	94,85
8.01.2.02	*Kegiatan Administrasi keuangan Perangkat*	**Prosentase terlaksananya**	100%	100%	100%	2.486.156.041	2.382.218.641	95,86

	daerah	**administrasi keuangan perangkat daerah**						
8.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang terbayarkan	100%	100%	100%	2.946.313.941	2.946.083.941	99,99
8.01.2.01.03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah jasa administrasi keuangan yang terpenuhi	100%	100%	100%	38.872.500	36.135.000	92,96
8.01.2.06	*Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah*	**Nilai SKM**	80	88,97	104,67			
8.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan Kebersihan yang terpenuhi	100%	100%	100%	11.000.000	10.837.000	98,52
8.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	100%	100%	100%	209.000.800	191.401.792	91,58
8.01.2.08	***Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan***	**Prosentase terpenuhinya sarana dan**	100%	100%	100%	**126.614.000**	**118.213.138**	**91**

	pemerintahan daerah	**prasarana aparatur**						
8.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah tagihan jasa pemakaian dan pemeliharaan kantor yang terbayar	100%	100%	100%	24.000.000	17.075.798	69,68
8.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Honor PTT THL yang terbayar	100%	100%	100%	100.614.000	98.136.340	97,54
8.01.2.09	***Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah***	**Prosentase Sarana dan Prasarana yang tersedia**	100%	100%	100%	**60.680.000**	**38.220.000**	**95,95**
8.01.0 8.09.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Pengadaan pemeliharaan gedung kantor	100%	100%	100%	60.680.000	58.220.000	95,95
8.01.	***Kegiatan***	**Prosentase**	100%	100%	100%	**120.421.400**	**106.339.000**	**88,31**

2.10	***Pemeliharaan Barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.***	**Sarana dan Prasarana yang dipelihara**						
8.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	100%	100%	100%	102.950.000	89.372.500	86,81
8.01.2.09.02	Sub Kegiatan pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	100%	100%	100%	17.465.400	16,946,300	97,14
8.01.02	**Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Persentase Kelompok yang mendapat pembinaan Bela negara**	**100%**	**100%**	**100%**	**819.891.500**	**702.995.200**	**85,74**

8.01.02.2.01	***Keg Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan***		100%	100%	100%	**819.891.500**	**702.595.200**	**85,74**
8.01.02.2.01.04	Output Keg:Pelaksanaan Komunikasi di Bidang ideologi wawasan kebangsaan,bela negara, karakter bangsa, pembiasaan kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan **(Pemikiman Bela Negara)**	jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti kegiatan bela Negara	100%	100%	100%	819.891.500	702.595.200	85,74
8.01.03	**Program Peningkatan Peran Partai dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta Budaya politik**	**Presentase Pemilih dalam pemilu**	**100%**	**100%**	**100%**	**28.111.158.930**	**28.107.291.350**	**99,99**
8.01.	***Keg: Perumusan kebijakan teknik***		100%	100%	105,4%	**28.111.158.930**	**28.107.291.350**	**99,99**

03.01	***dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan, perwakilan dan partaipolitik, pemilu/pemilu Kepala Daerah serta pemahaman situasi politik.***							
8.01.03.01.02	Bidang Keg.Penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang Pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilu/Pemilu Kepala Daerah serta pemantapan situasi	Jumlah Bahan yang mengikuti Pendidikan Politik	100%	60%	105,4%	27.606.115.950	27.605.957.950	99,99

	politik di daerah. (**Penyuluhan kepada masyarakat**)							
8.01.02.01.04	Sub Keg. Pelaksanaan koordinasi dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, penungkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilu/pemilu Kepala Daerah pemerintahan situasi politik didaerah (***Koordinasi forum forum diskusi politik***)	Jumlah masyarakat yang mengikuti diskusi politik	100%	112,8%	112,8%	490.000.000	486.728.400	99,33
8.01.02.01.05	Sub Keg-Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik , etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan,	Jumlah partai politik yang difasilitasi memdapat bantuan	100%	100%	100%	15.000.000	14.630.000	97,53

	perwakilan dan partai politik, pemilu/pemilu kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah ***(Verifikasi dan pemeriksaan persyaratan Bangpol)***							
8.01.04	**Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi kemasyarakatan**	**Persentase Peningkatan Jumlah Ormas/LSM yang diberikan SKT**	**100%**	**100%**	**100%**	**17.942.833.400**	**17.804.209.300**	**99,23**
8.01.04.2.01	***Keg penyusunan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan***		100%	100%	100%	**17.942.833.400**	**17.804.209.300**	**99,23**
8.01.04.2.01.03	Sub Keg.Pelaksanaan kebijakan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan monitori pengelola ormas ,	Jumlah Ormas/LSM yang menerima bantuan hibah uang	250%	100%	100%	17.910.740.200	17.775.710.200	99,25

	jangkauan dan ormas yang didaerah (***Hibah kepada ormas,LSM***							
8.01.04.2.01.05	Sub Keg Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan dibidang pembinaan ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan medinasi pengelola ormas , pengawasan dan ormas yang didaerah (***Fasilitasi Ormas, LSM,perpol dan OKP*** Bantuan Hibah kepada Ormas/LSM	Jumlah Pengurus Ormas yang difasilitasi Hibah	100%	100%	100%	32.133.200	28.509.000	88,72
8.01.05	**Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama**	**Persentase sekolah yang mendapatkan pembinaan P4GN**	**100%**	**100%**	**100%**	**125.000.000**	**105.858.200**	**84,96**

8.01.05.3	***Keg: Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya***					**135.000.000**	**100.558.200**	**84,96**
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama, dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (PAGN)	Jumlah sekolah yang mendapat penyuluhan PAGN	100%	100%	100%	25.000.000	23.429.000	93,72
8.01.05.3.21.05	Sub Keg Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, Sosial , Budaya, dan Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di	Jumlah Peksima yang mendapat pembinaan kerukunan beragama	100%	100%	100%	100.000.000	82.429.200	82,43

	Daerah (**Peningatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama/FKUB**							
8.01.06	**Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial**	**Berkurangnya jumlah konflik masyarakat**	**100%**	**100%**	**100%**	**512.450.000**	**404.591.400**	**79,01**
8.01.06.	**Keg Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial**		100%	100%	100%	**512.450.000**	**404.591.400**	**79,01**
8.01.06.2.01.02	Sub Keg. Penyusunan bahan pertimbangan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, kerjasama intelegen, pemanfaatan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga	Jumlah potensi dan konflik yang tertangani dari 17 konflik	100%	100%	100%	40.000.000	31.074.400	77,36

	uang, kewaspadaan serta penanganan konflik didaerah (penanggar. konflik)							
8.01.0 6.2.01 .05	Sub Keg Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan dini, kerjasama intelegen, pemantauan orang asing, Tenaga kerja asing dan lembaga asing kewaspadaan perlindungan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik didaerah (Pembinaan Kesbangpol/wasbinbang)	Jumlah Laporan Informasi Harian (LIH) yang terverifikasi wasdinda	100%	100%	100%	181.300.000	178.558.500	97,49
8.01.0 6.2.01 .04	Sub Keg Pelaksanaan kewaspadaan di Bidang Kewaspadaan dini, kerjasama intelegen, pemantauan orang asing, Tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan	Jumlah fasilitasi FKDM	100%	100%	100%	30.000.000	17.082.000	56,94

	pertahanan antar negara, fasilitasi kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta pengangaran komlek daerah (PKDM)							
8.01.0 6.2.04 .05	Forum Komunikasi Pimpinan Daerah	Terfasilitasinya pelaksanaan tugas Forum koordinasi pimpinan daerah	100%	100%	100%	229,150,000	178,229,500	68,77

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan pelayanannya, Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum, Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik mengampu 4 Indikator. Dari 4 indikator tersebut, berstatus tercapai pada Tahun 2024.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian/ketidaktercapaian tersebut antara lain adalah :

1. Berkurangnya jumlah konflik masyarakat dari target Persentase Penanganan Konflik Sosial Th 2024 100%, dan konflik yang berhasil ditangani atau relasasi 100%, sehingga capaian dalam mencegah terjadinya konflik adalah 100%.
2. Persentase sekolah yang telah mendapat pembinaan tentang Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), dari target yang mendapat penyuluhan P4GN 2.500 orang, dapat terealisasi 2.500 orang sehingga mempunyai capaian kinerja 100%.
3. Jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti kegiatan bela negara dengan target 75 orang realisasi 75 orang, sehingga mempunyai capaian kinerja 100%.
4. Jumlah masyarakat yang mengikuti pendidikan politik. Dengan target 2.500 orang realisasi 2.819 orang, sehingga mempunyai capaian kinerja 112,18%.
5. Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan (Rakor Monev Penerimaan Bangsarpol) dengan target 10 laporan terealisasi 10 laporan, sehinga mempunyai capaian kinerja 100%.
6. Jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan target 2 Laporan terealisasi 2 Laporan, sehingga mempunyai capaian kinerja 100%.
7. Jumlah laporan Informasi harian yang termonitor Wasdinda, dari target 12 dokumen terealisasi 12 dokumen, sehingga mempunyai capaian kinerja 100%.

8. Kegiatan Rapat koordinasi anggota Forkopimda dan terlaksana sesuai target.
9. Kerjasama yang harmonis dan koordinasi yang baik antara Tim pengelola kegiatan dan Pengguna Anggaran.
10. Terciptanya hubungan yang baik antara masyarakat dan pemerintah/Instansi terkait dalam ikut serta menjaga keamanan dan ketyamanan lingkungan, sehingga situasi kondusif di wilayah Kabupaten Banjarnegara dapat terjaga.
11. Terbangunnya komunikasi yang baik antara pemeluk agama dengan masyarakat dan pemerintah serta dengan dibentuknya Forum Kerukunan Umat Beragama./FKUB dalam upaya menghindari konflik agama, sehingga bisa mendukung kondusivitas wilayah Kabupaten Banjarnegara.
12. Upaya peningkatan pemahaman masyarakat tentang keamanan lingkungan kepada masyarakat dan kelompok masyarakat.
13. Anggaran banpurpol dipertanggungjawabkan sesuai dengan rincian anggaran dan belanja berdasar permohonan /proposal yang diajukan oleh penerima banpurpol.
14. Monitoring/pemantauan dan koordinasi dengan pihak –pihak terkait dalam upaya menjaga keamanan dan ketentraman.

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK (IPD)	Target Renstra Perangkat Daerah Th ke				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Persentase peningkatan jumlah ormas/LSM yang diberikan SKT	-		25%	50%	75%	100%	106%	100%	100%	100%	Tahun 2023 Realisasi melebihi target dikarenakan Banyaknya Ormas / Yayasan yang mendaftarakan ke Bidan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai syarat untuk diterbitkannya rekomendasi penerimaan bantuan hibah dari Provinsi. Sedangkan, mulai Tahun 2024

												Bakesbangpol sudah tidak menerbitkan SKT, Berdasar UU No 7 Tahun 2023 yang menyatakan keberadaan ormas hanya sebatas pelaporan dan tidak mewajibkan Ormas/LSM untuk membuat SKT
2	Persentase penanganan konflik sosial			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase Ormas terdaftar dilembang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan/ Idiologi Pancasila (Bela negara)			30 org	40 org	50 org	50 org	100 org	75 peskib raka	75 peskib raka	75 peskib raka	Sejak Tahun Anggaran 2024 Sub Kegiatan Bela Negara di alokasikan untuk kegiatan persiapan dan pelatihan Peskibaraka dalam rangka

												Upacara HUT RI
4	Persentase sekolah yang telah mendapat pembinaan tentang Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	-		150 org	150 org	150 org	150 org	20 sekolah	20 sekolah	200 orang	200 orang	
5	Persentase Pemilih dalam Pemilu			-	Pilbup 70-75%	-	Pilpres, pileg, pilbup pilgub	0	79,57 %	0	0	
	Persentase Masyarakat yang mendapatkan			200 org	200 org	200 org	200 org	4 pekan as	2.819 org	5.000 org	5.000 org	

	n pendidikan politik											
6	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah			1 th	1 th	1 th	1 th	1 th	1 th	1 th	1 th	Kegiatan Rapat koordinasi anggota Forkopimda terlaksana sesuai target 1 th atau 100%.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan urusan pemerintahan umum Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan berdasarkan hasil evaluasi, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk tahun 2024 diantaranya adalah:

1. Keterbatasan Jumlah personil dan Kompetensi Sumber Daya Manusia.
2. Perlu penguatan dukungan Kebijakan dan anggaran khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pencapaian target dan realisasi program dan kegiatan.
3. Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam ikut menjaga kondusivitas wilayah dan ketentraman dan keamanan lingkungan.
4. Masih kurangnya pemahaman masyarakat di bidang wawasan kebangsaan.
5. Masih rendahnya pemahaman masyarakat di bidang politik terutama bagi pemilih pemula dan pekerja sektor informal.
6. Masih maraknya pergaulan bebas dan minuman keras di masyarakat yang bisa membahayakan bagi remaja/pelajar dan sulitnya mengidentifikasi komunitas penyalahgunaan narkoba.
7. Perlu penguatan Dukungan Kebijakan dan anggaran khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pencapaian target dan rfealisasi program dan kegiatan.

Permasalahan tersebut, jika tidak diselesaikan dapat menjadi *constraint* dalam pencapaian visi dan misi Bupati maupun capaian indikator lainnya. Beberapa dampak dari adanya permasalahan dan hambatan tersebut meliputi:

1. Situasi wilayah tidak kondusif.
2. Munculnya konflik di masyarakat.
3. Kecenderungan terjadinya degradasi nilai-nilai kebangsaan di masyarakat.

4. Potensi berkembangnya paham-paham ideologi diluar pancasila (paham radikal).
5. Pendirian tempat ibadah yang terindikasi aliran garis keras yang menjadi pemicu konflik agama dimasyarakat .

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi, peningkatan kualitas birokrasi, dan meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan pengguna layanan akan meningkatkan kebutuhan akan adanya penyediaan produk layanan yang semakin baik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi-inovasi dalam menunjang peningkatan pelayanan publik secara kontinu.

Beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, yaitu:

Peluang Eksternal.

a. Adanya nilai nilai luhur dari personil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

1. Terbitnya Undang Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah terahir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah lebih memperkuat keberadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tetang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016, sebagaimanan telah dirubah beberapa kali terahir dengan Peraturan daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 24 lebih memperkuat keberadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai Perangkat Daerah sebagaimana Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara

Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Peluang Internal

a. adanya nilai nilai luhur dari personil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
   1. Kerjasama, artinya komitmen diantara personil yang diperlukan untuk mendukung satu sama lain dalam mewujudkan visi, misi dan juga menghindari ego sektoral dan mementingkan bidangnya sendiri dengan mengorbankan tujuan bersama, dengan kata lain diperlakukan kerjasama yang harmonis antara bidang dengan sekretariat untuk mewujudkan visi misi.
   2. Disiplin, artinya bahwa setiap personil Bakesbanggol Kabupaten Banjarnegara harus memegang komitmen untuk mempunyai sikap dan perilaku mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku yaitu senantiasa melaksanakan tugas dengan sebaik baiknya.
   3. Tanggung jawab, artinya didalam melaksanakan pekerjaan dilakukan dengan sebaik baiknya dan selalu dibarengi dengan rasa penuh tanggungjawab dengan kata lain sikap bersedia dan untuk menanggung akibat atas perilaku dan perbuatan yang dilakukan.
   4. Pengabdian, artinya sebagai unit pelayanan maka dalam melaksanakan pekerjaan tidak semata mata didasarkan penghargaan imbalan materi, namun harus diutamakan pengabdian, rela berkorban tenaga, waktu dan biaya sekalipun.

b. Adanya 12 (dua belas) Etika Budaya mahi yang digalakan oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.

Berdasarkan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan tersebut, dapat diinventarisasi beberapa isu strategis. Inventarisasi isu-isu strategis didapatkan dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal Kabupaten Banjarnegara sampai dengan tahun 2024. Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan pembangunan. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2026, sebagai berikut :

1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.
2. Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap bahayanya pemakaian/pengguna maupun pengedar narkoba dan sejenisnya.
3. Peningkatan pemahaman masyarakat dalam pendidikan politik bagi pemilih pemula dan pekerja sektor informal.
4. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap wawasan dan idiologi kebangsaan.
5. Peningkatan cakupan wilayah kawasan tertib wilayah kabupaten dan kecamatan untuk meminimalisir terjadinya konflik;
6. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat serta pelaku usaha untuk mematuhi peraturan perundangundangan serta ikut menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum;
7. Penanganan pengaduan masyarakat pelanggaran Peraturan Daerah dan Kepala Daerah, secara cepat komprehensif dan tuntas;

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPD Tahun 2025-2030. Berdasarkan hal tersebut, prioritas arah kebijakan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2026 meliputi:

1. Meningkatnya ketentraman dan keamanan wilayah
2. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam politik dan fasilitasi Organisasi kemasyarakatan.
3. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (Nilai SAKIP).
4. Meningkatnya efektifitas transparasi pelayanan publik (Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM Bakesbangpol).

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 Kabupaten Banjarnegara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (ex. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I.	**Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**	**Kabupaten Banjarnegara**	**Persentase konflik sosial yang tertangani**	**100 %**	**Rp. 650.000.000**	**Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**	**Kabupaten Banjarnegara**	**Persentase konflik sosial yang tertangani**	**100 %**	**Rp. 489.150.000**	
a.	***Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan***		***Jumlah Dokumen Kegiatan Pemantapan Kewaspadaan nasional dan***	**4 dok**	**Rp. 650.000.000**	***Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan***		***Jumlah Dokumen Kegiatan Pemantapan Kewaspadaan nasional dan***	**4 dok**	**Rp. 489.150.000**	

	Penanganan Konflik Sosial		***penanganan konflik sosial yang dilaksanakan***			***Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial***		***penanganan konflik sosial yang dilaksanakan***			
1.	Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteligen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perataan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Serta Penanganan Konflik di		Jumlah Laporan Deteksi dini di masyarakat	12 lap	Rp. 100.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteligen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perataan Antar Negara,		Jumlah Laporan Deteksi dini di masyarakat	12 lap	Rp. 50.000.000	

	Daerah (FKDM)					Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Serta Penanganan Konflik di Daerah (FKDM)					
2.	Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang		*Jumlah Laporan Deteksi dini*	12 dok	Rp. 200.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspada		*Jumlah Laporan Deteksi dini*	12 dok	Rp. 150.000.000	

	kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah (Kominda)					an Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspada an serta Penanggana n Konflik di Daerah (Kominda)					
3.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan: Dini, Kerjasama Inteligen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan		Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Penanganan Konflik Sosial	100 org	Rp. 50.000. 000	Pelaksanaa n Kebijakan di Bidang Kewaspada an Dini, Kerjasama Inteligen, Pemantaua n Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspada		Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Penanganan Konflik Sosial	100 org	Rp. 30.000.000	

	Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah (Konflik)					an Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah (Konflik)					
4.	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah		Jumlah laporan hasil Rakor Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	12 lap	Rp. 300.000.000	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah		Jumlah laporan hasil Rakor Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	12 lap	Rp. 259.150.000	
II	**Program Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**		**Persentase masyarakat dan Ormas yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan**	**100 %**	**Rp. 820.000.000**	**Program Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**		**Persentase masyarakat dan Ormas yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan**	**100 %**	**Rp. 850.000.000**	

			/ Ideologi Pancasila					/ Ideologi Pancasila			
a.	***Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang idiologi pancasila dan karakter kebangsaan***		***Jumlah Dokumen Pemantapan pelaksanaan bidang idiologi pancasila dan karakter kebangsaan yang di laksanakan***	***2 dok***	***Rp. 820.000.000***	***Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang idiologi pancasila dan karakter kebangsaan***		***Jumlah Dokumen Pemantapan pelaksanaan bidang idiologi pancasila dan karakter kebangsaan yang di laksanakan***	***2 dok***	***Rp. 850.000.000***	
1.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan		Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,	75 org	Rp. 820.000.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,		Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Idpologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,	75 org	Rp. 820.000.000	

	Sejarah Kebangsaan (Bela Negara)		Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			Pembarcaan Kebangsaan , Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Bela Negara)		Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			
III .	**Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**		**Persentase masyarakat dan Ormas yang mengikuti pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial dan budaya**	**100 %**	**Rp. 300.000.000**	**Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**		**Persentase masyarakat dan Ormas yang mengikuti pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial dan budaya**	**100 %**	**Rp. 150.000.000**	
a.	***Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Ketahanan Ekonomi,***		***Jumlah Dokumen kegiatan pemantapan di bidang ekonomi, sosial dan budaya***	***2 dok***	**Rp. 250.000.000**	***Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan***		***Jumlah Dokumen kegiatan pemantapan di bidang ekonomi, sosial dan budaya***	***2 dok***	***Rp. 150.000.000***	

	Sosial Budaya		***yang dilaksanakan***			***Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya***		***yang dilaksanakan***			
1.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (P4GN)		Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi	200 org	Rp. 100.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (P4GN)		Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi	200 org	Rp. 20.000.000	
2.	Sub Kegiatan Pelaksanaan		Laporan Kegiatan	2 lap	Rp. 150.000	Sub Kegiatan		Laporan Kegiatan	2 lap	Rp. 130.000.000	

	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Fasilitasi Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (FKUB)				.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Fasilitasi Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (FKUB)					
IV.	**Peningkatan Peran Partai**		**Persentase masyarakat**	**100%**	**Rp. 1.865.**	**Peningkatan Peran**		**Persentase masyarakat**	**100%**	**Rp. 1.865.132.**	

	Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik		**yang mendapat pendidikan politik**		**132.000**	**Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik**		**yang mendapat pendidikan politik**		**000**	
a.	***Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan politik, Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan***		***Jumlah Dokumen pemantapan kegiatan Bidang Pendidikan Politik yang dilaksanakan***	***3 dok***	**Rp. 1.865.132.000**	***Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan politik, Etika Budaya Politik Peningkat***		***Jumlah Dokumen pemantapan kegiatan Bidang Pendidikan Politik yang dilaksanakan***	***3 dok***	**Rp. 1.865.132.000**	

	dan Partai Politik, Pemilu/Pemilu Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik					***an Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/Pemilu Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik***					
1.	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan		Jumlah Fasilitasi Banperpol yang dilaksanakan	10 parpol	Rp. 1.750.132.000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya		Jumlah Fasilitasi Banperpol yang dilaksanakan	10 parpol	Rp. 1.750.132.000	

	Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/Pemilu Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/Pemilu Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					
2.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan		Jumlah orang yang mengikuti Pendidikan politik	5.000 org	Rp. 100.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika		Jumlah orang yang mengikuti Pendidikan politik	5.000 org	Rp. 100.000.000	

	Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					
3.	Pelaksanaan Monitoring,		Jumlah pendamping	10 lap	Rp. 15.000.	Pelaksanaan		Jumlah pendamping	10 lap	Rp. 15.000.000	

	Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik , Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/Pemilu Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		an pengelolaan benparpol yang dilaksanakan		000	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik , Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/Pemilu Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi		an pengelolaan bmpar pol yang dilaksanakan			

						Politik di Daerah					
V.	**Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**		**Persentase cakupan Ormas yang diberdayakandan diawasi**	**100 %**	**Rp. 1.190.000.000**	**Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**		**Persentase cakupan Ormas yang diberdayakandan diawasi**	**100 %**	**Rp. 1.165.000.000**	
a.	**Kegiatan Perumusan Kebijakan Tehnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**		**Prosentase ormas yang terfasilitasi (Jumlah ormas yang mengikuti pembinaan /Jumlah ormas yang direncanakan mengikuti pembinaan* 100)**	**100 %**	**Rp. 1.190.000.000**	**Kegiatan Perumusan Kebijakan Tehnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**		**Prosentase ormas yang terfasilitasi (Jumlah ormas yang mengikuti pembinaan /Jumlah ormas yang direncanakan mengikuti pembinaan**	**100 %**	**Rp. 1.165.000.000**	
1.	Sub Kegiatan Pelaksanaan		Jumlah laporan	1 Lap	Rp. 1.125.0	Sub Kegiatan		Jumlah laporan	1 Lap	Rp. 1.125.000.0	

	Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Hibah Ormas)		fasilitasi pemberdayaan ormas		00.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Hibah Ormas)		fasilitasi pemberdayaan ormas		00	
2.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas,		Persentase ormas yang mendapat fasilitasi	20%	Rp. 65.000.000,-	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas,		Persentase ormas yang mendapat fasilitasi	20%	Rp. 40.000.000,-	

	Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Fasilitasi Ormas)					Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Fasilitasi Ormas)					
VI.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**		**Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan**	**100 %**	**Rp. 4.148.771.925**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**		**Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan**	**100 %**	**Rp. 3.446.268.108**	
a.	***Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat***		***Jumlah kegiatan perencanaan, penganggaran dan***	***2 dok***	***Rp. 12.000.000***	***Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi***		***Jumlah kegiatan perencanaan, penganggaran dan***	***2 dok***	***Rp. 12.000.000***	

	Daerah		***evaluasi perangkat daerah yang dilaksanakan***			***Kinerja Perangkat Daerah***		***evaluasi perangkat daerah yang dilaksanakan***			
1.	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah laporan perencanaan dan pelaporan yang tersusun	10 lap	Rp. 3.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan Doktimen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah laporan perencanaan dan pelaporan yang tersusun	10 lap	Rp. 3.000.000	
2.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SEPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	8 lap	Rp. 9.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	8 lap	Rp. 9.000.000	

			Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun					Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun			
b.	***Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***		***Jumlah kegiatan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang dilaporkan***	**2 dok**	Rp. 2.841.157.925	***Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***		***Jumlah kegiatan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang dilaporkan***	**2 dok**	Rp. 2.772.809.500	
1.	Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	20 org/bln	Rp. 2.802.285.425	Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	20 org/bln	Rp. 2.733.937.000	
2.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian / verifikasi		Jumlah laporan penata usahaan dan	12 lap	Rp. 38.872.500	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausah		Jumlah laporan penata usahaan dan	12 lap	Rp. 38.872.500	

	keuangan		pengujian/verifikasi keuangan			sian dan pengujian / verifikasi keuangan		pengujian/verifikasi keuangan			
c.	***Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah***		***Jumlah kegiatan administrasi umum dan perangkat daerah***	***2 dok***	Rp. 311.000.000	***Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah***		***Jumlah laporan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan***	***2 dok***	Rp. 180,747,300	
1.	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	3 paket	Rp. 11.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	3 paket	Rp. 11.000.000	
2.	Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	16 paket	Rp. 300.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	16 paket	Rp. 169,747,300	
d.	***Pengadaan***		***Jumlah***	***1 dok***	Rp.	***Pengadaa***		***Jumlah***	***1 dok***	Rp. 0	

	Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Kab/Kota		***kegiatan administrasi umum perangkat daerah***		450.000.000	***n Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Kab/Kota***		***kegiatan administrasi umum perangkat daerah***			
1.	Sub Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	3 Unit	Rp. 450.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	3 Unit	Rp. 0	
e	***Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***		***Jumlah kegiatan jasa penunjang urusan pemerintah daerah***	**2 dok**	Rp. 126.614.000	***Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***		***Jumlah kegiatan jasa penunjang urusan pemerintah daerah***	**2 dok**	Rp. 122.711.308	
1.	Sub Kegiatan Penyediaan jasa		Jumlah laporan	12 lap	Rp. 26.000.000	Sub Kegiatan		Jumlah laporan	12 lap	Rp. 26.000.000	

	komunikasi, sumber daya air, dan listrik		penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik		penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			
2.	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	13 lap	Rp. 100.614.000	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	13 lap	Rp. 96.711.309	
f.	***Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		***Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah***	***100 %***	***Rp. 408.000.000***	***Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		***Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah***	***100 %***	***Rp. 358.000.000***	
1.	Sub Kegiatan Penyediaan jasa		Jumlah kendaraan	11 unit	Rp. 200.00	Sub Kegiatan		Jumlah kendaraan	11 unit	Rp. 50.000.000	

	pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan		dinas yang dipelihara		0.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan		dinas yang dipelihara			
2.	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	13 unit	Rp. 208.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	13 unit	Rp. 258.000.000	

Berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2026, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan yaitu:

1. Masih kurangnya ketersediaan Sumber Daya Manusia yang profesional untuk mendukung percepatan kinerja yang optimal.
2. Ketersediaan sumberdaya anggaran belum optimal untuk mendukung pencapaian program kegiatan yang menyangkut program prioritas.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan musrenbang kecamatan dan forum konsultasi publik telah disampaikan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui aplikasi SIPD. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Nihil				

2.6. Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan hasil reses anggota DPRD, melalui aplikasi SIPD telah disampaikan usulan program dan kegiatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Validasi
1	**Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik**	Kab.Banjarnegara	**Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik**	Suara sah Parpol DPRD x besaran nilai per suara sah (527.266 suara x Rp.3000,-= Rp.1.581.798.000	Mengacu pada Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 yaitu bedasarkan suara sah hasil pemilu parpol yang mendapat kursi DPRD dikalikan besaran nilai Banpolpol / per suara sah sesuai SK Penetapan Gubernur Jawa Tengah Nomor 211/2/2021, tanggal 27 Januari 2021
	Keg: Penyusunan kebijakan teknis in pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilu pemilu Kepala Daerah serta penanganan konflik politik				
	Sub Keg: Penyelenggaran kebijakan di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Penanganan Konflik Politik di Daerah **(Bantuan tihah parpol**				
2	**Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	Kab.Banjarnegara	Jumlah Ormas yang/LSM mendapat bantuan bihah uang	Jumlah bantuan untuk Ormas di Kab. Banjarnegara sebesar: Rp ..... dengan rincian	Masukan dari usulan setiap pokok pikiran anggota legislatif menjadi acuan dasar program/kegiatan Th.2026

				Rp._____ berupa uang. Rp. _____untuk biaya operasional, Monitoring dan evaluasi	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional.

Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia; terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari ancaman, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kondisi itu didukung oleh mantapnya kemampuan pertahanan dan keamanan negara yang ditandai oleh terwujudnya TNI yang profesional dengan komponen cadangan dan pendukung pertahanan yang kuat; terwujudnya sinergi kinerja antara POLRI dan partisipasi masyarakat dalam bidang keamanan, intelijen, dan kontra intelijen yang efektif yang disertai kemampuan industri pertahanan yang handal; terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam mendorong supremasi hukum; terwujudnya tata kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum, serta birokrasi yang profesional dan netral; terwujudnya masyarakat sipil, masyarakat politik, dan masyarakat ekonomi yang mandiri, serta terwujudnya kemandirian nasional dalam konstelasi global.

Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat ditunjukkan oleh makin tinggi dan meratanya tingkat pendapatan masyarakat dengan jangkauan lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh. Mantapnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, antara lain ditandai oleh meningkat dan meratanya akses, tingkat kualitas, dan relevansi pendidikan seiring dengan makin efisien dan efektifnya manajemen pelayanan pendidikan; meningkatnya kemampuan Iptek; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak; dan terwujudnya kesetaraan gender; bertahannya kondisi dan penduduk tumbuh seimbang. Sejalan dengan tingkat kemajuan bangsa, sumber daya manusia Indonesia diharapkan berkarakter cerdas, tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beragama, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran terhadap keberagaman, bergotong royong, patriotik, dinamis dan berorientasi Iptek. Kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat makin mantap dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan sehingga masyarakat mampu berperan sebagai penggerak bagi konsep pembangunan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.

Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri, pertanian, kelautan dan sumber daya alam, dan sektor jasa. Lembaga dan pranata ekonomi telah tersusun, tertata, serta berfungsi dengan baik. Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan, dan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang efisien dan produktivitas yang tinggi; serta berkembangnya usaha dan investasi dari perusahaan-perusahaan Indonesia di luar negeri termasuk di zona ekonomi eksklusif dan landas benua dalam rangka peningkatan perekonomian nasional.

Sejalan dengan itu, pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2026 mencapai kesejahteraan setara dengan negara-negara berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin yang makin rendah. Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya jaringan transportasi pos dan telematika yang andal bagi seluruh masyarakat yang menjangkau seluruh wilayah NKRI; tercapainya elektrifikasi perdesaan dan elektrifikasi rumah tangga; serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel sehingga terwujud kota tanpa permukiman kumuh.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjarnegara merupakan lembaga teknis yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan **urusan pemerintahan Bidang kesatuan bangsa dan politik** agar dapat berjalan secara sinergi dan selaras dengan kebijakan nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjarnegara :

1. **Tujuan** disusunnya Renja Bakebangpol Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 adalah untuk memberikan arah gambaran dan pedoman mengenai program, kegiatan dan Sub kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsi pada tahun 2025.

   Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan tujuan jangka menengah yang akan dicapai antara lain :

   1. Meningkatnya ketentraman dan keamanan wilayah.
   2. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam politik dan fasilitasi Organisasi kemasyarakatan.
   3. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (Nilai SAKIP).

4. Meningkatnya efektifitas transparasi pelayanan publik (Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM Bakesbenggpol).

2. **Sasaran** yang dicapai pada Tahun 2026 :

1. Meningkatnya ketentraman dan keamanan masyarakat
2. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan Politik
3. Meningkatnya efektivitas dan transparasi layanan publik di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
4. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah di Bidang Kesbanggpol

3.3 Program, Kegiatan dan Sub kegiatan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjaregara Tahun 2026 dan prakiraan maju tahun 2027 sebagai berikut :

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Tahun 2027	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	**Persentase konflik sosial yang tertangani**	**100 %**	**Rp. 489.150.000**	**Kabupaten Banjarnegara**	**APBD**		**Rp. 467.500.000**	

		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	***Jumlah Dokumen Kegiatan Pemantapan Kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial yang dilaksanakan***	***4 dok***	**Rp. 489.150.000**				**Rp. 467.500.000**	
		Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewasp	Jumlah Laporan Deteksi dini di masyarakat	12 lap	Rp. 50.000.000				Rp. 35.000.000,-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

		adaan Diri, Kerjasama Intelige n, Permant auan Orang Asing, Tenaga Asing, dan Lembag a Asing, Kewasp adaan Perstas an Antar Negara, Fasilitas i Kelemb agaan Ilalang Kewasp adaan Serta									

		Penanganan Konflik di Daerah (PKDM)								
		Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga	*Jumlah Laporan Deteksi dini*	12 dok	Rp. 150,000,000				Rp. 165,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

		Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbedaan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah (Konsinda)								
		Pelaksanaan Kebijak	Jumlah orang yang	100 org	Rp. 30.000.000				Rp. 22.000.0	Badan Kesatuan Bangsa dan

		an di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan	mengikuti Sosialisasi Penanganan Konflik Sosial						00	Politik

		Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah (Konflik)								
		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	Jumlah laporan hasil Rakor Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	12 lap	Rp. 259.150.000				Rp. 247.500.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter	**Persentase masyarakat dan Ormas yang mendapatkan pembin**	**100 %**	**Rp. 350.000.000**				**Rp. 825.000.000**	

		Kebangsaan	san wawasan kebangsaan/ Ideologi Pancasila							
		Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang idiologi pancasila dan karakter kebangsaan	*Jumlah Dokumen Pemantapan pelaksanaan bidang idiologi pancasila dan karakter kebangsaan yang di laksanakan*	*2 dok*	*Rp. 650.000.000*				Rp. 825.000.000	

		Sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembinaan Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Bela	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembinaan Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	75 org	Rp. 820.000.000				Rp. 825.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

		Negara							
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	**Persentase masyarakat dan Ormas yang mengikuti pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial dan budaya**	**100 %**	**Rp. 150.000.000**				***Rp. 132.000.000***
		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan	***Jumlah Dokumen kegiatan pemantapan di bidang ekonomi, sosial***	***2 dok***	***Rp. 150.000.000***				***Rp. 132.000.000***

		Pelaksanaan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya	***dan budaya yang dilaksanakan***							
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi	300 org	Rp. 20.000.000				Rp. 22.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

		Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (PKDB)								
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial	Laporan Kegiatan	2 lap	Rp. 130.000.000				Rp. 110.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

		Budaya, Agama dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (FKUB)								
		Peningkatan Peran	**Persentase masyar**	**100%**	**Rp. 1.865.132.00**				**Rp. 2.029.6**	

		Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	akat yang mendapat pendidikan politik		0				48.200	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan	*Jumlah Dokumen pemantapan kegiatan Bidang Pendidikan*	*3 dok*	Rp. 1.865.132.000				Rp. 2.029.648.200	

		Bidang Pendidikan politik, Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Fartai Politik, Pemilu/ Pemilu Kepala Daerah	*Politik yang dilaksanakan*							

		Serta Pemantauan Situasi Politik								
		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerin	Jumlah Fasilitasi Ranpar pol yang diluncurkan	10 parpol	Rp. 1.750.132.000				Rp. 1.925.145.200	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

		tuhan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/ Pemilu Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah								
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningk	Jumlah orang yang mengikuti Pendidikan politik	5.000 org	Rp. 100.000.000				Rp. 88.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

		atan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah									

		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik , Etika Budaya Politik, Penmgkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakil	Jumlah pendam pingan pengelolaan banpargpol yang dilaksanakan	10 lap	Rp. 15.000.000				Rp. 16,500.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

		lan dan Partai Politik, Pemilu/ Pemilu Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah								
		Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	**Persentase cakupan Ormas yang diberdayakan dan diawasi**	**100 %**	**Rp. 1.165.000.000**					
		Kegiatan Perumusan	**Prosentase ormas yang**	**100 %**	**Rp. 1.165.000.000**					

		Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	**terfasilitasi (Jumlah ormas yang mengikuti pembinaan/Jumlah ormas yang direncanakan mengikuti pembinaan**							
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaft	Jumlah laporan fasilitasi pemberdayaan ormas	1 Lap	Rp. 1.125.000.000				Rp. 1.237.500.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

		aran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Bidang Ormas)								
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang	Persentase ormas yang mendapat fasilitasi	20%	Rp. 40.000.000,-				Rp. 33.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

		Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Fasilitasi Ormas)								
		Program Penunjang Urusan Pemeri	**Persentase Penunjang Urusan Pemeri**	100 %	**Rp. 3,446,268.108**					

		ntahan Daerah Kabupaten / Kota	ntahan Daerah yang dilaksanakan							
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***Jumlah kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah yang dilaksanakan***	***2 dok***	***Rp. 12.000.000***				***Rp. 13.200.000***	
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen	Jumlah laporan perencanaan dan pelaporan yang	10 lap	Rp. 3.000.000				Rp. 3.300.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

		Perencanaan Perangkat Daerah	tersusun							
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	8 lap	Rp. 9.000.000				Rp. 9.900.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

			SKPD yang dilaporkan							
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Jumlah kegiatan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang dilaporkan***	***2 dok***	**Rp. 2.772.809.500**				**Rp. 3.021.575.541**	
		Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	20 org/bln	Rp. 2,733,937,000				Rp. 2,978,815,791	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Sub	Jumlah	12 lap	Rp.				Rp.	Badan

		Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan dan pengujian / verifikasi keuangan	laporan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan		38.872.500				42.759.750	Kesatuan Bangsa dan Politik
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Jumlah laporan penatausahaan dan pengu/lian/verifikasi keuangan***	***2 dok***	Rp. 180.747.300				Rp 28.545.000	
		Sub Kegiatan Penyedi	Jumlah paket peralatan dan	3 paket	Rp. 11.000.000				Rp. 12.100.000	Badan Kesatuan Bangsa dan

		aan peralatan dan perleng kapan kantor	perleng kapan kantor yang tersedia							Politik
		Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	16 paket	Rp. 169.747.300				Rp. 164,450,000	Bakan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Kab/Kota	***Jumlah kegiatan administrasi umum perangkat daerah***	***1 dok***	**Rp. 0**				**Rp. 350.000.000**	
		Sub	Jumlah	3 Unit	Rp. 0				Rp.	Badan

		Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan						350.000.000	Kesatuan Bangsa dan Politik
		Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	***Jumlah kegiatan jasa penunjang urusan pemerintah daerah***	***2 dok***	**Rp. 122.711.308**				**Rp. 151.311.308**	
		Sub Kegiatan	Jumlah laporan penyedi	12 lap	Rp. 26.000.000				Rp. 28.600.0	Badan Kesatuan

		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	aan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik						00	Bangsa dan Politik
		Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	13 lap	Rp. 96.711.308				Rp. 80.262.127	
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunj	***Persentase terpeliharanya barang milik daerah***	***100 %***	***Rp. 358.000.000***				***Rp. 192.500.000***	

		ang Urusan Pemerintahan Daerah	***penun/ang urusan pemerintahan Daerah***							
		Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	11 unit	Rp. 50.000.000				Rp. 82.500.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

		n								
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	13 unit	Rp. 258.000.000				Rp. 110.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas pembangunan tahun 2026 dijabarkan ke dalam semua urusan yang menjadi kewenangannya Kabupaten Banjarnegara, yang akan dilaksanakan.

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota terdiri dari 6 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi umum Perangkat daerah;
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
5. Penyediaan Jasa urusan Pemerintahan Daerah;
6. Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah.

Dengan 11 Sub Kegiatan yaitu :

1. Penyusunan Dokumen perencianaan perangkat daerah;
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
3. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN;
4. Pelaksanaan penatausahaan dampengujian/verifikasi keuangan SKPD;
5. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
6. Penyediaan bahan logistik kantor;

7. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
8. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik;
9. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor;
10. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
11. Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.

Berdasarkan Tugas dan Fungsi ; Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyelenggaraan Pengelolaan keuangan; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Pengadaan laptop, meja kursi tamu Ruang Kepala, Korden; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional.

Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Pada Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada *Kegiatan Penumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan*. Dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.

3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik terdiri dari 1 Kegiatan yang diarahkan pada *Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.* Dengan sub kegiatan yaitu :

a. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah;
b. Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah;
c. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada *Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.* Dengan 2 sub kegiatan yaitu :

a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada *Kegiatan Jumlah Dokumen kegiatan pemantapan di bidang ekonomi, sosial dan budaya yang dilaksanakan*. Dengan 2 sub kegiatan yaitu :

a. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah;

b. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada *Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial*. Dengan 4 sub kegiatan yaitu :

a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intéligen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perataan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Serta Penanganan Konflik di Daerah.

b. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteligen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah.
c. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteligen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah.
d. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Awal Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. Renja Awal Perangkat Daerah selanjutnya menjadi platform operasional bagi Perangkat Daerah dalam menjalankan programnya dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka sasaran pembangunan daerah tahun 2026. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026 dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disepakati.
2. Kerangka pendanaan dalam Renja Perangkat Daerah masih bersifat sementara, sehingga masih dimungkinkan terjadi perubahan pagu yang disebabkan oleh pengurangan, penambahan, dan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan maupun antar sub kegiatan dalam kerangka penyusunan anggaran secara terpadu dan berbasis kinerja.
3. Renja Perangkat Daerah menjadi acuan bagi Kepala Perangkat Daerah dan segenap jajarannya serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, serta menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal : 10 Agustus 2025
Kepala Bakesbanggpol
Kabupaten Banjarnegara

IZAK DANIAL ALOYS, S.STP., M.Si
Pembina Tingkat I/IVb
NIP. 19680530 199810 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah Nya, sehingga kita dapat menyusun Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026. Penyusunan Renja ini mengacu pada Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029 dan Visi Misi Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029 yaitu : Mewujudkan Banjarnegara yang maju dan sejahtera, dan misi untuk mencapainya mencakup penguatan infrastruktur, peningkatan ekonomi lokal, peningkatan kualitas dan akses pendidikan serta kesehatan, pembangunan berkelanjutan, dan pemerintahan yang baik dan transparan.

Dalam RPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara mendukung dalam pencapaian meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar yang berkualitas. Dengan tercukupinya pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar yang berkualitas, diharapkan mampu meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, dan mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia khususnya di Kabupaten Banjarnegara, melalui peningkatan capaian Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-rata Lama Sekolah.

Beberapa keterbatasan sumber daya manusia, sumber daya keuangan dan sumber daya asset serta kondisi geografis yang cukup variatif, tidak menjadikan hal tersebut sebagai kendala namun merupakan sebuah tantangan yang harus dihadapi serta dicarikan upaya pemecahannya agar target tujuan dan sasaran yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik. Saran, pendapat, kritik yang membangun diharapkan dari semua pihak dalam rangka penyempurnaan penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) penyelarasan ini di waktu yang akan datang.

Kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan program kerja pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara tidak hanya tergantung pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga semata, tetapi berkat dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu kami harapkan dukungan dari stakeholder terkait, satuan pendidikan ataupun berbagai pihak agar target Rencana

Kerja Tahun 2026 bisa tercapai sebagaimana yang ditetapkan.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 ini, sehingga dapat diselesaikan dengan baik.

Banjarnegara, 10 Agustus 2025

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Banjarnegara,

TEGUH HANDOKO, S.Sos.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710131 199003 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 6
1.4. Sistematika Penulisan 6

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 32
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 39
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 44
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 59
2.6. Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD .. 61

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 63
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 64
3.3. Program dan Kegiatan 64

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 66

BAB V PENUTUP 74

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan yang diatur melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan pembentukan tim penyusun, penelaahan rancangan awal RKPD, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, hingga pada penyempurnaan berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang RKPD. Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, penyusunan Renja Perangkat Daerah juga mengacu pada Renja Kementerian/Lembaga terkait, serta Renja Perangkat Daerah Provinsi terkait. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni

sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2. Landasan Hukum

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan;
18. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan Indikator Prioritas Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan;

19. Surat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 5676/MPK.A/PR.07.05/2023, tanggal 18 Februari 2023 tentang Indikator Kinerja Urusan Pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
31. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 14);
32. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 15);
33. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun dengan maksud untuk :

a. Menjabarkan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 ke dalam rencana program kegiatan prioritas Tahun 2026 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Renja K/L Tahun 2026 dan Renja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;
b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerapan anggaran berbasis kinerja.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

a. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA-DPA dalam Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2026, yang dalam penyusunannya didahului dengan menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026;
b. Sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Tahun 2026;
c. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun berdasarkan sistematika yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah.

BAB 2 : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan

usulan program dan kegiatan masyarakat dan atau pokok-pokok DPRD.

BAB 3 : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan Tahun 2026.

BAB 4 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran RKPD.

BAB 5 : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 disusun untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah meliputi urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 terdiri dari 7 program, 18 kegiatan, dan 69 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 787.735.055.231,-, dengan fokus utama pada peningkatan angka partisipasi anak sekolah baik jenjang PAUD, SD, SMP, dan non formal, serta pemenuhan sarana prasarana pendidikan untuk mendorong meningkatnya Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah sebagai tolak ukur peningkatan kualitas dan akses layanan pendidikan. Untuk Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini mengampu 2 (dua) urusan, yaitu Urusan Pendidikan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga. Program/kegiatan/sub kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah di 2 (dua) urusan tersebut, yang meliputi:

1. Potensi tingginya anak putus sekolah / anak tidak sekolah, terutama untuk jenjang SMP yang akan melanjutkan ke jenjang SMA/SMK, akibat keterbatasan ekonomi ataupun imbas pandemi covid-19 yang melanda dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022.
2. Masih tingginya anak tidak sekolah (ATS) yang tersebar di masing-masing kecamatan;
3. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan;
4. Berkurangnya kualitas dan layanan pendidikan di lembaga pendidikan negeri, sehingga masyarakat lebih cenderung menyekolahkan anaknya ke lembaga pendidikan swasta;
5. Sarana prasarana pendidikan, baik berupa fisik maupun non fisik yang belum terpenuhi secara menyeluruh, merata dan belum sesuai standar;

6. Kebutuhan antara jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang belum seimbang dengan jumlah siswa di masing-masing satuan pendidikan;
7. Rendahnya minat guru untuk menjadi Kepala Sekolah, terutama di jenjang Sekolah Dasar, dikarenakan tugas dan tanggung jawab yang semakin berat, tidak seimbang dengan tunjangan Kepala Sekolah yang diterimakan;
8. Belum meratanya kesempatan pendidikan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Kondisi geografis, sosial, dan budaya masyarakat Banjarnegara yang beragam berkontribusi dalam pencapaian angka partisipasi sekolah di Kabupaten Banjarnegara. Ada yang mudah mengakses pendidikan, sebaliknya ada pula yang mengalami kesulitan mengakses pendidikan disebabkan berbagai kendala yang dihadapinya, terlebih-lebih dikaitkan dengan pemerataan mutu dan kualitasnya;
9. Masih banyak satuan pendidikan yang belum tercukupi pemenuhan sarana dan prasarana pembelajarannya, sehingga mengakibatkan proses kegiatan belajar mengajar belum dapat berjalan optimal;
10. Belum meratanya sebaran jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan standar kompetensinya;
11. Belum meratanya penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan di masing-masing satuan pendidikan;
12. Belum optimalnya peran pendidikan non formal di masyarakat;
13. Kualitas layanan dan akses pendidikan masih perlu ditingkatkan
14. Masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah menunjukkan belum optimalnya kualitas dan akses layanan pendidikan;
15. Belum optimalnya sarana prasarana dan pengembangan pembibitan atlet olahraga;
16. Lunturnya nilai-nilai sosial dan rasa nasionalisme pemuda;
17. Masih rendahnya partisipasi pemuda pelopor dan kewirausahaan yang menyebabkan minat masyarakat untuk berwirausaha rendah.

Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025, terjadi beberapa perubahan yang meliputi penambahan atau pengurangan pagu, penghapusan, penambahan atau pengurangan program/kegiatan/sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Perubahan tersebut mengubah rincian dalam Renja Perangkat Daerah menjadi 7 program, 19 kegiatan, dan 81 sub kegiatan dengan total

anggaran sebesar Rp. 787.735.055.231,-, Angka tersebut berkurang dari Renja Awal yaitu sebesar Rp. 782.608.740.758 .Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2025, total program/kegiatan/sub kegiatan yang **berkurang** (alokasi anggarannya berkurang) meliputi Kegiatan/Sub Kegiatan sebagai berikut :

Uraian	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	664,606,466.00	578,084,695.00	-86,521,771.00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	664,606,466.00	578,084,695.00	-86,521,771.00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	622,914,961,436.00	622,851,093,936.00	-63,867,500.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	150,000,000.00	86,132,500.00	-63,867,500.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	703,499,000.00	568,930,900.00	-134,568,100.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29,999,000.00	25,000,000.00	-4,999,000.00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15,000,000.00	13,000,000.00	-2,000,000.00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	643,500,000.00	515,930,900.00	-127,569,100.00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	951,362,000.00	921,661,000.00	-29,701,000.00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	301,362,000.00	271,661,000.00	-29,701,000.00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	990,661,249.00	727,198,515.00	-263,462,734.00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	749,999,784.00	486,537,050.00	-263,462,734.00
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	72,718,800,900.00	72,267,194,000.00	-451,606,900.00

Uraian	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	523,590,000.00	456,590,000.00	-67,000,000.00
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	350,000,000.00	323,929,000.00	-26,071,000.00
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	274,805,000.00	208,355,000.00	-66,450,000.00
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan	773,000,000.00	679,260,000.00	-93,740,000.00
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	100,000,000.00	60,000,000.00	-40,000,000.00
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	236,375,000.00	160,500,000.00	-75,875,000.00
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	210,000,000.00	60,000,000.00	-150,000,000.00
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	38,664,324,800.00	37,516,012,100.00	-1,148,312,700.00
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1,220,225,800.00	395,000,000.00	-825,225,800.00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	130,000,000.00	110,000,000.00	-20,000,000.00
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	425,000,000.00	340,026,100.00	-84,973,900.00
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	80,000,000.00	50,000,000.00	-30,000,000.00
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	150,000,000.00	140,000,000.00	-10,000,000.00
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	110,000,000.00	59,287,000.00	-50,713,000.00
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	497,400,000.00	285,000,000.00	-212,400,000.00

Uraian	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	18,340,557,000.00	18,030,557,000.00	-310,000,000.00
Pengadaan Perlengkapan PAUD	669,957,000.00	609,957,000.00	-60,000,000.00
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	235,000,000.00	95,000,000.00	-140,000,000.00
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk	225,000,000.00	175,000,000.00	-50,000,000.00
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	345,000,000.00	285,000,000.00	-60,000,000.00
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	7,074,800,000.00	6,874,800,000.00	-200,000,000.00
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	680,000,000.00	580,000,000.00	-100,000,000.00
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	50,000,000.00	0	-50,000,000.00
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	150,000,000.00	100,000,000.00	-50,000,000.00
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	13,871,482,380.00	13,238,200,000.00	-633,282,380.00
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4,873,200,000.00	4,573,200,000.00	-300,000,000.00
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	8,998,282,380.00	8,665,000,000.00	-333,282,380.00
Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	20,000,000.00	0	-20,000,000.00
Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	20,000,000.00	0	-20,000,000.00

Uraian	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	105,000,000.00	80,000,000.00	-25,000,000.00
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	75,000,000.00	50,000,000.00	-25,000,000.00
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	175,000,000.00	160,000,000.00	-15,000,000.00
Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	175,000,000.00	160,000,000.00	-15,000,000.00
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	700,000,000.00	450,000,000.00	-250,000,000.00
Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	700,000,000.00	450,000,000.00	-250,000,000.00
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	150,000,000.00	105,000,000.00	-45,000,000.00
Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	150,000,000.00	105,000,000.00	-45,000,000.00
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	8,030,000,000.00	6,550,000,000.00	-1,480,000,000.00
Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	7,970,000,000.00	6,470,000,000.00	-1,500,000,000.00

Sedangkan Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2025, total program/kegiatan/sub kegiatan yang **bertambah** (alokasi anggarannya bertambah) meliputi Kegiatan/Sub Kegiatan sebagai berikut :

Uraian	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,460,000,000.00	1,490,008,612.00	30,008,612.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	740,000,000.00	750,000,000.00	10,000,000.00

Uraian	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	720,000,000.00	740,008,612.00	20,008,612.00
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	32,470,900.00	100,000,000.00	67,529,100.00
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	50,000,000.00	135,000,000.00	85,000,000.00
Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	60,000,000.00	80,000,000.00	20,000,000.00

Dinamika yang terjadi selama tahun 2024 juga turut mempengaruhi keberhasilan pencapaian Renja Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2024, tercatat adanya hasil yang baik yang dikarenakan adanya pencapaian maupun pelampauan target maupun yang tidak memenuhi target.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2....
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
s.d. Tahun 2024* Kabupaten Banjarnegara

Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja			TW IV		
		Target	Realisasi %			Target	Realisasi	Realisasi %	Target TW IV(Rp)	Realisasi TW IV (Rp)	% (TW IV)
10	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi kasar (APK) PAUD 4-6 tahun	76	98.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	5	11	220.00	408,326,000	408,326,000	100.00
				Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	1	100.00	25,000,000	24,453,600	97.81
				Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3	22	733.33	1,165,000,000	1,160,023,100	99.57
				Pengadaan Perlengkapan PAUD	"Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang tersedia	12	5	41.67	50,000,000	49,500,000	99.00
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	10	3	30.00	150,000,000	148,157,450	98.77
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi,	200	1162	581.00	2,900,000,000	2,872,176,800	99.04

Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja			TW IV		
		Target	Realisasi %			Target	Realisasi	Realisasi %	Target TW IV(Rp)	Realisasi TW IV (Rp)	% (TW IV)
					Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi						
				Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	719	710	98.75	13,974,600,000	13,880,789,898	99.33
				Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1	3	300.00	125,000,000	119,731,850	95.79
				Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	719	90	12.52	50,000,000	49,427,500	98.86
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Prosentase Angka Kelulusan Pendidikan Kesetaraan	100 %	100%	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1	0	-	600,000,000	-	-
	Prosentase Jumlah PKBM yang terakreditasi	100 %	81,82	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	21	7	33.33	925,000,000	925,000,000	100.00
				Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	21	21	100.00	5,135,000,000	5,007,904,275	97.52
				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang tersedia	1	1	100.00	50,000,000	50,000,000	100.00

Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja			TW IV		
		Target	Realisasi %			Target	Realisasi	Realisasi %	Target TW IV(Rp)	Realisasi TW IV (Rp)	% (TW IV)
				Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	4298	6132	142.67	100,000,000	98,954,800	98.95
				Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah non formal yang direhabilitasi	1	1	100.00	49,995,000	49,626,500	99.26
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase Jumlah anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	100 %	94.32 %	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah dibangun	2	9	450.00	1,390,104,450	1,388,322,300	99.87
	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	65,9	87,34	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah dibangun	2	5	250.00	1,406,786,200	1,404,157,767	99.81
	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarakn asesmen nasional	48,63	78,1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolahnyang telah dibangun	6	19	316.67	4,833,771,250	4,822,207,829	99.76
	Indeks Iklim Keamanan SD	79,02	73,75	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang telah di rehabilitasi sedang/berat	2	8	400.00	1,116,227,700	1,114,698,990	99.86
	Indeks Iklim Kebhinekaan SD	75,89	74,21	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah direhabilitasi sedang/berat	3	9	300.00	1,150,308,350	1,072,923,850	93.27
	Indeks Iklim Inklusivitas SD	63,54	56,27	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	15	257	1,713.33	20,817,000,000	20,755,577,000	99.70

Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja			TW IV		
		Target	Realisasi %			Target	Realisasi	Realisasi %	Target TW IV(Rp)	Realisasi TW IV (Rp)	% (TW IV)
	Prosentase Sekolah SD/MI kondisi bangunan baik	0.75	92,55	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sekolah yang terpelihara sarana, prasarana dan utilitasnya	30	58	193.33	1,325,676,043	981,810,900	74.06
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	325	175	53.85	75,000,000	74,937,500	99.92
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	30	13	43.33	1,264,000,000	1,248,232,000	98.75
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1250	340	27.20	330,000,000	329,719,700	99.92
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi,Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	2400	1288	53.67	1,521,200,000	1,405,846,150	92.42

Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja			TW IV		
		Target	Realisasi %			Target	Realisasi	Realisasi %	Target TW IV(Rp)	Realisasi TW IV (Rp)	% (TW IV)
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	70	36	51.43	25,000,000	22,405,200	89.62
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	617	616	99.84	66,161,339,377	66,128,498,019	99.95
				Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	7	7	100.00	370,043,000	360,564,834	97.44
				Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1	2	200.00	100,000,000	94,870,400	94.87
				Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	10	11	110.00	2,790,464,592	2,593,430,980	92.94
				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	14	26	185.71	2,705,313,750	2,600,209,340	96.11

Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja			TW IV		
		Target	Realisasi %			Target	Realisasi	Realisasi %	Target TW IV(Rp)	Realisasi TW IV (Rp)	% (TW IV)
				Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	617	617	100.00	150,000,000	149,006,100	99.34
				Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	617	616	99.84	250,000,000	240,954,563	96.38
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	40	48	120.00	10,410,659,720	10,385,658,933	99.76
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Prosentase Jumlah anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	100	92.79	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah dibangun	2	2	100.00	306,600,000	306,442,600	99.95
	Rata-rata kemampuan Literasi SMP berdasarkan asesmen nasional	76,4	90,4	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah dibangun	2	1	50.00	200,000,000	199,547,950	99.77
	Rata-rata kemampuan Numerasi SMP berdasarakn asesmen nasional	72,23	88,45	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah dibangun	4	2	50.00	655,200,000	654,856,400	99.95

Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja			TW IV		
		Target	Realisasi %			Target	Realisasi	Realisasi %	Target TW IV(Rp)	Realisasi TW IV (Rp)	% (TW IV)
	Indeks Iklim Keamanan SMP	72,71	96,02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah dibangun	6	6	100.00	1,528,300,000	1,525,887,800	99.84
	Indeks Iklim Kebhinekaan SMP	72,73	75,43	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8	31	387.50	5,819,089,349	5,794,412,774	99.58
	Indeks Iklim Inklusivitas SMP	62,03	59,1	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3	3	100.00	176,400,000	109,117,300	61.86
	Prosentase Sekolah SMP/MTs kondisi bangunan baik	0.88	97,05	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3	3	100.00	392,412,600	391,754,050	99.83
				Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	4	6	150.00	1,564,200,000	1,563,143,000	99.93
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5	2	40.00	976,302,000	923,172,000	94.56

Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja			TW IV		
		Target	Realisasi %			Target	Realisasi	Realisasi %	Target TW IV(Rp)	Realisasi TW IV (Rp)	% (TW IV)
				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4	4	100.00	526,000,000	473,413,650	90.00
				Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	15	194	1,293.33	15,633,000,000	15,605,787,000	99.83
				Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1	2	200.00	125,000,000	124,122,000	99.30
				Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sekolah yang terpelihara sarana, prasarana dan utilitasnya	7	5	71.43	212,535,085	192,671,500	90.65
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	30,287	11,300	37.31	200,000,000	199,546,500	99.77
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	7	73	1,042.86	7,367,652,000	7,294,089,600	99.00
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	30287	3647	12.04	650,000,000	600,463,720	92.38

Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja			TW IV		
		Target	Realisasi %			Target	Realisasi	Realisasi %	Target TW IV(Rp)	Realisasi TW IV (Rp)	% (TW IV)
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikas	1100	2000	181.82	315,000,000	289,688,000	91.96
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	98	65	66.33	75,000,000	74,767,540	99.69
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)untuk Pendidikan	98	100	102.04	36,331,087,636	36,306,945,097	99.93
				Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi TIK untuk Pendidikan	-	100	1	1.00	35,000,000	34,813,500	99.47

Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja			TW IV		
		Target	Realisasi %			Target	Realisasi	Realisasi %	Target TW IV(Rp)	Realisasi TW IV (Rp)	% (TW IV)
				Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	6	6	100.00	282,650,200	275,304,925	97.40
				Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1	1	100.00	75,000,000	73,871,230	98.49
				Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	98	100	102.04	126,000,000	124,425,125	98.75
				Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2	1	50.00	715,000,000	714,444,950	99.92
				Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	200	100	50.00	150,000,000	148,528,325	99.02
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang telah di rehabilitasi sedang/berat	5	2	40.00	446,617,600	446,198,000	99.91

Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja			TW IV		
		Target	Realisasi %			Target	Realisasi	Realisasi %	Target TW IV(Rp)	Realisasi TW IV (Rp)	% (TW IV)
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Guru Tersertifikasi	64%	51,32	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	1	1	100.00	4,621,158,891	4,379,543,569	94.77
				Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	1	1	100.00	12,000,023,178	8,714,789,960	72.62
Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah KewenanganKabupaten/Kota	350		Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi lomba dan apresiasi seni untuk anak anak lomba festival tunas bahasa ibu, sastra jawa sampai jenjang propinsi dan nasional	350	280	80.00	53,436,600	53,087,000	99.35

Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja			TW IV		
		Target	Realisasi %			Target	Realisasi	Realisasi %	Target TW IV(Rp)	Realisasi TW IV (Rp)	% (TW IV)
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Prosentase wirausaha muda, Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	38%	54	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	130	27	20.77	75,000,000	72,706,600	96.94
				Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh kecamatan	150	180	120.00	50,000,000	40,325,000	80.65
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Wirausaha Muda	38%	54	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	1	2	200.00	75,000,000	75,000,000	100.00

Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja			TW IV		
		Target	Realisasi %			Target	Realisasi	Realisasi %	Target TW IV(Rp)	Realisasi TW IV (Rp)	% (TW IV)
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase cakupan pembinaan olahraga	32%	100	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	320	414	129.38	972,857,600	958,704,650	98.55
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Prosentase cakupan pembinaan atlet muda	32%	98.55	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	90	80	88.89	263,000,000	201,640,000	76.67
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase jumlah kejuaraan yang meraih medali tingkat provinsi	23%	76.67	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan	1	4	400.00	2,565,000,000	2,565,000,000	100.00
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Prosentase cakupan kegiatan kepramukaan yang diselengggarakan di sekolah	40%	100	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	"Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya"	1	1	100.00	200,000,000	200,000,000	100.00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Bobot Penilaian Terhadap Dokumen Kinerja	100 %	95.51	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	7	100.00	50,708,000	48,429,500	95.51

Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja			TW IV		
		Target	Realisasi %			Target	Realisasi	Realisasi %	Target TW IV(Rp)	Realisasi TW IV (Rp)	% (TW IV)
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	survey kepuasan masyarakat	100 %	98.36	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5500	5,514	100.25	Rp 608,435,598,825	Rp 598,486,423,433	98.36
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	1	100.00	676,472,500	635,647,500	93.97
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	1	100.00	101,050,000	100,401,250	99.36
Administrasi Umum Perangkat Daerah	survey kepuasan masyarakat	82	96.97	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	100.00	10,000,000	10,000,000	100.00

Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja			TW IV		
		Target	Realisasi %			Target	Realisasi	Realisasi %	Target TW IV(Rp)	Realisasi TW IV (Rp)	% (TW IV)
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	100.00	25,000,000	22,387,600	89.55
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1	100.00	13,689,200	13,488,200	98.53
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	100.00	562,900,000	547,188,587	97.21
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	survey kepuasan masyarakat	82	96.48	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	1	100.00	672,796,337	650,304,698	96.66
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	100.00	711,275,000	685,100,300	96.32
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	survey kepuasan masyarakat	82	95.30	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	1	100.00	249,900,000	247,470,000	99.03

Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja			TW IV		
		Target	Realisasi %			Target	Realisasi	Realisasi %	Target TW IV(Rp)	Realisasi TW IV (Rp)	% (TW IV)
				Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1	1	100.00	1,666,000,000	1,569,834,750	94.23
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	1	100.00	253,594,000	250,145,000	98.64
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	survey kepuasan masyarakat	82	89.70	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	92	10	10.87	135,000,000	126,563,000	93.75
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	2	66.67	455,250,209	402,367,900	88.38
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	5	500.00	122,844,000	110,744,000	90.15
									853,802,416,242	**837,632,811,161**	**98.11**

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan pelayanannya, Perangkat Daerah mengampu 27 Indikator. Dari 27 indikator tersebut, 15 berstatus tercapai dan 12 indikator berstatus tidak tercapai. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian/ketidaktercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Akses pelayanan pendidikan yang semakin merata, tersebar di masing-masing wilayah dengan indikasi meningkatnya lembaga layanan pendidikan / satuan pendidikan baik formal ataupun nonformal yang diselenggarakan oleh pemerintah / lembaga swasta;
2. Upaya untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana baik secara fisik maupun non fisik di masing-masing satuan pendidikan.
3. Ketepatan pelaksanaan kegiatan yang mengacu kepada dokumen perencanaan.
4. Pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
5. Komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan di dalam merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaktercapaian tersebut antara lain :

1. Keterbatasan sarana dan prasarana di masing-masing satuan pendidikan, sehingga mengakibatkan proses kegiatan belajar mengajar tidak dapat berjalan optimal.
2. Masih tingginya Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Banjarnegara yang tersebar di masing-masing wilayah kecamatan. Sehingga perlu sinergitas antara pemangku kepentingan, perlu aksi nyata bagaimana mencari formulasi / strategi penurunan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) tersebut.
3. Kurangnya sarana prasarana yang memadai di masing-masing satuan pendidikan, sehingga proses pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan pelaksanaan ANBK belum berjalan optimal.
4. Tren di masyarakat yang lebih memilih sekolah swasta dibandingkan sekolah negeri, terutama di jenjang pendidikan Sekolah Dasar, sehingga perlu peningkatan kualitas pendidik melalui berbagai macam treatment untuk peningkatan kualitas dan pelayanan di masing-masing satuan pendidikan.
5. Keterbatasan jumlah guru terutama untuk jenjang Sekolah Dasar, sehingga banyak wiyata bakti yang menjadi guru dengan kualifikasi

ijasah tidak linier, dan tanggung jawab dengan peserta didik tidak maksimal.

6. Orang tua siswa lebih cenderung menyekolahkan ke MI / SD IT / lembaga pendidikan swasta yang lebih banyak pembelajaran materi agama, karena di sekolah negeri kekurangan Guru Pendidikan Agama Islam.
7. Ketercukupan sarana prasarana masih belum merata, terutama gedung sekolah yang kurang memadai.
8. Keterbatasan personil terutama di jenjang Sekolah Dasar, belum ada tenaga administrasi di masing-masing Sekolah Dasar, dampaknya tugas guru kurang optimal dalam penyampaian materi kepada peserta didik karena merangkap tugas sebagai tenaga administrasi di sekolah.

Dalam rangka mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut, telah dilakukan upaya-upaya yang meliputi :

1. Memastikan tersedianya dan terdistribusikannya sumber-sumber belajar bagi semua siswa dan guru.
2. Mengadakan pelatihan-pelatihan / seminar yang dibutuhkan oleh para Pendidik, agar mereka lebih siap dalam merencanakan, mendesain, serta mengimplementasikan kegiatan pembelajaran secara daring / online yang berkualitas.
3. Pemenuhan sarana prasarana yang mendukung kelancaran proses kegiatan belajar mengajar.
4. Koordinasi lintas sektoral dengan melibatkan berbagai unsur seperti stake holder pendidikan, OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait, pemerintahan desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan untuk berupaya mencari formulasi untuk penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS).
5. Pembukaan kelompok belajar (pokjar) di setiap desa untuk mendekatkan akses layanan pendidikan non formal.
6. Menjamin pelayanan pendidikan penduduk usia sekolah SD dan SMP dalam bentuk pemenuhan operasional siswa berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.
7. Pemenuhan sarana prasarana pendidikan yang memadai.
8. Optimalisasi peran pendidikan non formal melalui layanan pendidikan kesetaraan
9. Pembangunan ruang kelas baru (RKB) untuk menjamin keterpenuhan daya tampung siswa.
10. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk menunjang operasional sekolah.

11. Beasiswa Siswa Miskin (BSM) sebagai upaya untuk menjaga siswa rentan putus sekolah agar tetap bersekolah
12. Pemenuhan sarana prasarana pendidikan yang ada di sekolah sesuai dengan standar yang dipersyaratkan.
13. Peningkatan kompetensi guru dalam pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar (KBM).
14. peningkatan kompetensi guru melalui Program Induksi Guru Pemula (PIGP) dan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB).
15. memperkuat forum KKG (Kelompok Kerja Guru) dan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) sebagai wadah kerja sama guru – guru dan sebagai tempat mendiskusikan masalah yang berkaitan dengan kemampuan profesional, yaitu dalam hal merencanakan, melaksanakan dan menilai kemajuan peserta didik.
16. Pemenuhan sarana prasarana lembaga non formal sesuai dengan SNP untuk mendukung penilaian dalam standar sarpras. 2) Peningkatan kompetensi tutor dan penilik sekolah.

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.....
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK LPPD	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan										
1	Sekolah SD/MI kondisi bangunan baik	V	V	75%	80%	85%	70%	75%	85%		
2	Sekolah SMP/MTs kondisi bangunan baik	V	V	88%	89%	90%	86%	88%	90%		
3	PKBM terakreditasi	V	V	85%	90%	100%	80%	85%	100%		
4	Prosentase pemenuhan kebutuhan pengembangan kurikulum muatan lokal	V	V	30%	40%	50%	20%	30%	50%		
5	Guru tersertifikasi	V	V	64%	67%	70%	62%	64%	70%		
6	Ratio Guru/murid sekolah pendidikan dasar	V	V	8%	9%	10%	6%	8%	100%		

7	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	V	V	100	100	100	100	100	100		
8	Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	V	V	100	100	100	100	100	100		
9	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasionaL	V	V	2,08	2,09	3,01	2,07	2,08	2,09		
10	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasionaL	V	V	1,97	2,07	2,17	1,87	1,97	2		
11	Rata-rata kemampuan Literasi SMP berdasarkan asesmen nasional	V	V	2,01	2,05	2,11	1,91	2,01	2,05		
12	Rata-rata kemampuan Numerasi SMP berdasarkan asesmen nasional	V	V	2,01	2,05	2,11	1,91	2,01	2,05		
13	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi	V	V	73,85	73,90	73,92	73,83	73,85	73.92		
14	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/DI	V	V	82,01	82,03	82,05	81,99	82,01	82.05		

15	Rasio Pengawas dan Penilik PAUD	V	V	3,23	3,25	3,27	3,20	3,23	3.27		
	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga										
1	Persentase wirausaha muda	V	V	38%	40%	42%	35%	38%	40%		
2	Cakupan pembinaan olahraga	V	V	32%	34%	36%	30%	32%	35%		
3	Cakupan pembinaan atlet muda	V	V	32%	34%	36%	30%	32%	35%		
4	Jumlah atlet berprestasi			23 Angka	25 Angka	28 Angka	20 Angka	23 Angka	25 Angka		
5	Cakupan kegiatan kepramukaan yang diselengggarakan di sekolah	V	V	40%	50%	60%	30%	40%	70		
6	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana	V	V	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
7	Iklim Keamanan SD	V	V	92,31	-	-	87,44	92,31	94.31		

8	Iklim Kebhinekaan SD	V	V	96,26	-	-	86,12	96,26	98.26		
9	Iklim Inklusivitas SD	V	V	84,04	-	-	79,26	84,04	86.04		
10	Iklim Keamanan SMP	V	V	88,54	-	-	84,64	88,54	90.54		
11	Iklim Kebhinekaan SMP	V	V	91,06	-	-	85,66	91,06	93.06		
12	Iklim Inklusivitas SMP	V	V	82,88	-	-	78,89	82,88	84.88		

*) Kolom 3 diisi berdasarkan IKK outcome dalam lampiran Permendagri 18/2020

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pendidikan menjadi salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Hal ini berdasar pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 31 yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan wajib mengikuti pendidikan dasar serta pemerintah wajib membiayainya. Begitu pula yang temuat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia bahwa pendidikan merupakan hak dasar yang berperan penting dalam mengembangkan potensi individu sebagai salah satu elemen penting dalam pengembangan sumber daya manusia.

Kualitas sumber daya manusia inilah yang akan menentukan kemajuan pembangunan daerah yang berujung pada kemajuan perekonomian nasional dan perkembangan demokrasi di suatu negara. Kualitas pendidikan saat ini memiliki peranan dalam mewujudkan Kabupaten Banjarnegara. Bertumpu pada keyakinan pentingnya peranan pendidikan dalam pembangunan daerah, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara diberikan tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan pada 2 (dua) urusan, yaitu urusan Pendidikan serta urusan Kepemudaan dan Olahraga. Oleh karenanya Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dituntut selalu berupaya untuk terus menerus meningkatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan menjangkau semua lapisan masyarakat.

Namun dalam mewujudkan cita-cita tersebut, beberapa permasalahan bidang pendidikan tengah dihadapi dan memerlukan tindakan kolaboratif agar tidak menjadi penghalang dalam proses perwujudan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.

Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan urusan pemerintahan dalam 2 urusan, yaitu urusan Pendidikan dan Urusan Kepemudaan & Olahraga. Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPD Tahun 2023-2026, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk tahun 2025 mencakup 2 urusan tersebut. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah diantaranya adalah:

1. Pemerataan layanan pendidikan berkualitas belum optimal.
2. Belum semua warga memahami pentingnya pendidikan.

3. Pemenuhan kapasitas/ daya tampung sebagaian besar SD Negeri tidak terpenuhi, mengindikasikan berkurangnya peserta didik di SD Negeri, sehingga berpotensi adanya Regrouping dari sekolah yang terdampak tersebut.
4. Adanya Anak Tidak Sekolah (ATS). Pencegahan Anak Putus Sekolah perlu ditingkat untuk menjaga seluruh peserta didik SD lulus dan melanjutkan ke jenjang SMP/sederajat.
5. Sarana prasarana SD Negeri dengan kondisi baik menurun karena faktor usia peralatan dan gedung SD yang dimiliki.
6. Media pembelajaran yang digunakan para guru kurang variatif, sehingga cenderung membuat siswa merasa jenuh, sehingga berakibat tidak optimalnya penyerapan materi pembelajaran oleh peserta didik.
7. Sarana prasarana pendidikan di masing-masing satuan pendidikan yang belum terpenuhi secara optimal dan belum sesuai standar yang ada;
8. Upaya pengembalian Anak Tidak Sekolah (ATS) ke jalur pendidikan nonformal/ kesetaraan perlu melibatkan instansi/pihak lintas sektoral.
9. Momentum pendataan harus segera ditindaklanjuti dengan kegiatan bagi ATS tersebut.
10. Motivasi ATS untuk kembali ke jalur pendidikan masih rendah, sehingga perlu adanya pendampingan yang lebih intensif.
11. Kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang belum seimbang dan perlu pemerataan antara realita kebutuhan di masing-masing satuan pendidikan dengan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang ada;
12. Rendahnya minat masyarakat untuk menempuh pendidikan yang lebih layak, diakibatkan oleh berbagai aspek, baik aspek sosial, budaya ataupun lingkungan sekitar yang kurang mendukung untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pemerataan akses pendidikan.
13. Belum meratanya jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan standar kompetensinya;
14. Belum optimalnya peran pendidikan non formal;
15. Belum optimalnya sarana prasarana dan pengembangan pembibitan atlet olahraga;
16. Semakin memudarnya nilai-nilai sosial dan rasa nasionalisme pemuda.

Permasalahan tersebut, jika tidak diselesaikan dapat menjadi *constraint* dalam pencapaian visi dan misi Bupati maupun capaian indikator lainnya. Beberapa dampak dari adanya permasalahan dan hambatan tersebut meliputi:

1. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan, berdampak pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah, sehingga berimplikasi terhadap capaian angka Indeks Pembangunan Manusia juga rendah.
2. Sarana prasarana pendidikan yang belum terpenuhi dan belum sesuai standar, mengakibatkan proses pembelajaran bagi peserta didik tidak nyaman.
3. Rasio pembelajaran yang tidak layak diakibatkan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak seimbang, sehingga berdampak pada.
4. Rendahnya mutu lulusan, berdampak pada angka pengangguran yang cukup tinggi, karena tidak dapat memenuhi kebutuhan / lowongan pekerjaan yang sesuai kualifikasi pendidikan.
5. Belum meratanya jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan standar kompetensinya, berakibat pada kualitas peserta didik yang rendah.
6. Belum optimalnya peran pendidikan non formal, sehingga berdampak rendahnya tingkat partisipasi masyarakat yang mengenyam pendidikan non formal, padahal keberadaannya sangat dibutuhkan untuk menopang proses pembelajaran terutama bagi Anak Tidak Sekolah (ATS) yang tidak dapat menempuh pembelajaran melalui jalur pendidikan formal.
7. Belum optimalnya sarana prasarana dan pengembangan pembibitan atlet olahraga, mengakibatkan pada rendahnya jumlah capaian atlet yang berprestasi mengharumkan nama Banjarnegara, baik di level Kabupaten, Provinsi bahkan sampai level nasional.
8. Lunturnya nilai-nilai sosial dan rasa nasionalisme pemuda, sikap individualis dan cenderung apatis terhadap dinamika yang berkembang di masyarakat, sehingga mengakibatkan rendahnya semangat juang generasi penerus, mudah diintervensi oleh bangsa lain.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi, peningkatan kualitas birokrasi, dan meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan pengguna layanan akan meningkatkan kebutuhan akan adanya penyediaan produk layanan yang semakin baik. Oleh karena itu,

diperlukan inovasi-inovasi dalam menunjang peningkatan pelayanan publik secara kontinyu. Beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, yaitu:

Tantangan :

1. Laju pertumbuhan ASN guru yang tidak seimbang, antara jumlah yang pensiun dengan perekrutan ASN yang baru, sehingga pemenuhan kebutuhan guru tidak merata penyebarannya.
2. Rendahnya minat masyarakat usia sekolah untuk peningkatan Angka Partisipasi Sekolah, terutama di jenjang SMP ke SMA, sehingga berpotensi menambah jumlah angka Anak Tidak Sekolah (Anak Tidak Sekolah).
3. Kualitas layanan pendidikan di satuan pendidikan negeri, yang kurang bervariatif, inovatif, sehingga masyarakat lebih cenderung menyekolahkan anaknya ke lembaga pendidikan swasta.
4. Angka kemiskinan yang relatif tinggi, sehingga berdampak pada capaian peningkatan kualitas layanan pendidikan, terutama berakibat terhadap tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS) khususnya di Kabupaten Banjarnegara;
5. Masih terdapat perusahaan yang mempekerjakan karyawan / karyawatinya pada penduduk yang masih usia sekolah, karena keterbatasan ekonomi sehingga penduduk usia sekolah tersebut tidak dapat mengenyam pendidikan yang layak;
6. Karakter dan nilai sosial pemuda yang semakin luntur, mengakibatkan sikap individualis dan apatis, kurang peka terhadap dinamika dan arah kebijakan pembangunan.

Peluang :

1. Komitmen pemerintah pusat maupun pemimpin daerah dalam menjamin ketersediaan layanan pembangunan pada sektor pendidikan untuk semua jenjang dan jenis pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan dasar;
2. Adanya komitmen pemerintah daerah yang menetapkan pembangunan sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan lima tahun mendatang;
3. Semakin meningkatnya daya dukung anggaran dari pemerintah pusat (APBN), provinsi (APBD Provinsi), maupun kabupaten (APBD Kabupaten) dalam memenuhi perluasan daya tampung dan peningkatan mutu pendidikan, kepemudaan dan olahraga;

4. Semakin besarnya perhatian pemerintah pusat dan provinsi dalam meningkatkan kualifikasi akademik pendidik agar sesuai dengan standar nasional pendidikan (SNP);
5. Kepedulian masyarakat dalam DUDI terhadap pembangunan sector pendidikan melalui program CSR (corporate social responsibility)-nya dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik secara kualitatif maupun kuantitatif;
6. Kepedulian serta partisipasi masyarakat semakin meningkat terhadap dunia pendidikan;
7. Adanya kebijakan pemerintah pusat terhadap bantuan operasional sekolah (BOS) untuk tingkat pendidikan dasar.

Teknologi informasi berperan penting dalam mengefektifkan proses internalisasi nilai-nilai tersebut. Pemerintah daerah perlu melakukan pembinaan, berkaitan dengan kemampuan sekolah dalam melakukan pengembangan literasi digital. Selain berdampak pada daya saing siswa di masa yang akan datang, mempersiapkan siswa untuk memahami teknologi dan memilih serta memilah informasi berbasis digital akan membantu siswa untuk selalu berfikir kritis terhadap konten yang ditemui di media digital.

Berdasarkan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan tersebut, dapat diinventarisasi beberapa isu strategis. Inventarisasi isu-isu strategis tahun 2025 didapatkan dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal Kabupaten Banjarnegara sampai dengan tahun 2022. Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan pembangunan. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2024, sebagai berikut:

1. Kualitas layanan dan akses pendidikan masih perlu ditingkatkan di seluruh jenjang, dengan berupaya untuk mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana di masing-masing satuan pendidikan, serta pemerataan personil pendidik maupun tenaga kependidikan di masing-masing satuan pendidikan.
2. Masih rendahnya angka capaian Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Banjarnegara, perlu upaya bersama untuk peningkatan capaian tersebut, bagaimana upaya bersama untuk peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) bagi seluruh warga masyarakat di Kabupaten Banjarnegara.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun ketiga RPD Tahun 2023-2026. Dalam RPD Tahun 2023-2026, prioritas arah kebijakan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2026 meliputi:

1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, melalui strategi :
   a) Meningkatkan pemerataan akses dan kualitas pendidikan;
   b) Penguatan lembaga pendidikan nonformal;

   Hal tersebut dapat ditempuh, melalui program sebagai berikut :
   a) Program Pengelolaan Pendidikan;
   b) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
   c) Program Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
   d) Program pembinaan perpustakaan;
2. Penguatan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian yang Berkelanjutan, melalui Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan.
3. Penguatan penerapan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan.

Tabel 2
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Kabupaten Banjarnegara

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU USULAN RKPD AWAL 2025	OUTPUT / KELUARAN	OUTCOME /HASIL	ANALISIS KEBUTUHAN
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1,620,000,000	jumlah SD yang dibagun UKS	terpenuhinya fasilitas UKS sekolah	8 sekolah
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1,600,000,000	jumlah SD yang dibangun Perpus	Terpenuhinya gedung perpustakaan di sekolah	8 sekolah
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3,754,000,000	7 ruang guru baru, 32 unit toilet beserta sanitarynya dan talud pengaman gedung sekolah di 37 sekolah	Terpenuhinya ruang guru, tercukupinya kekurangan toilet dan sanitary di sekolah dan keamanan gedung sekolah terjaga	Pengadaan jasa Konsultansi perencanaan dan pengawasan, dan penyedia jasa konstruksi
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1,250,000,000	jumlah ruang guru /tu/ks yang dibangun	terpenuhinya fasilaitas ruang guru dan tu yang memenuhi standar	10 sekolah
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	1,500,000,000	Rehabilitasi gedung perpustakaan di 38 sekolah	Gedung perpustakaan menjadi lebih aman dan nyaman untuk digunakan	10 sekolah
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1,000,000,000	jumlah sekolah yang dipelihara secara rutin	terfasilitasi pemeliharaan rutin kerusakan ringan sekolah	untuk sekolah kecil dengan kerusakan ringan dan sekolah terkena bencana
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	850,000,000	Jumlah cabang lomba SD	Siswa berprestasi dalam bidang lomba SD	Pembinaan dan kegiatan lomba lomba SD

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU USULAN RKPD AWAL 2025	OUTPUT / KELUARAN	OUTCOME /HASIL	ANALISIS KEBUTUHAN
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1,521,200,000	Terlaksananya peningkatan kompetensi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Penilik PNF dan Tenaga Kependidikan	Tersalurkan TPG kepada 3432 orang, Terlaksana Kegiatan PPG 18 orang, terlasananya kegiatan peningkatan kapasitas 90 orang	Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Penilik dan Tenaga Kependidikan
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	300,000,000	2 kegiatan Workshop dan Pendampingan Satuan Pendidikan	Terlaksananya kegiatan Workshop Penyusunan Program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan Pendampingan Tim TPPK Satuan Pendidikan	Penyusunan Program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (200 peserta) dan Pendampingan Tim TPPK Satuan Pendidikan
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	66,154,200,000	Jumlah Sekolah penerima BOS	Angka Putus Sekolah (APS) SD	619 Sekolah
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	456,000,000	jumlah kegiatan kordinasi jenjang SD,	terfasilitasinya kordinasi dan evaluasi program perencnaan anggaran untuk jenjang SD	kordinasi rapat, evaluasi pemeliharaan rutin sekolah dasar, siswa dibawah 60, perencanaan BOS, evaluasi sarpras
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	430,000,000	2 kegiatan Pelatihan IKM dan kegiatan in house training di 10 sekolah pengerak	Terlaksananya Pelatihan IKM dan Penguatan P5 serta In House Training IKM di 10 Sekolah Penggerak	Peningkatan kompetensi Pengawas, KS dan Guru dalam implementasi kurikulum merdeka melalui pelatihan IKM (180 peserta) dan Penguatan P5 (100 peserta), dan dukungan implementasi IKM di 10 sekolah penggerak melalui kegiatan in house training di sekolah.
		2 kegiatan bagi 150 guru	Terlaksananya evaluasi satuan pendikan melalui akreditasi sekolah dan pelatihan e raport	Sosialisasi Akreditasi sekolah dan pelatihan e raport
Pembangunan Ruang Kelas Baru	6,250,000,000	Ruang kelas baru di 16 Sekolah	Tercukupinya ruang kelas di sekolah	SD Sokanandi, SD Gumiwang, SD Karangkobar, SD Plorengan ,SDN 1 Diengkulon, SDN 1 Karangkobar, SDN 1 Wanadadi, SDN 4 Kalisatkidul, SDN 1 Kalitengah, SDN 3 Gumelemkulon, SDN 2 Susukan, SDN 1 Pingit Lor, SDN 4 Glempang+SDN 1 Gumiwang, SD Leksana, SD Lebakwangi
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2,585,000,000	Rehabilitasi rehabilitasi toilet di 32 sekolah dan rehabilitasi 21 rumah dinas sekolah, 13 pagar keliling	toilet dan rumah dinas menjadi lebih aman dan nyaman saat digunakan	Pagar SDN 1 Danaraja, Pagar SDN 2 Bantarwaru, Talud SDN 4 Petir, Pagar SDN 4 Petuguran, Toilet SDN 2 Kaliajir, Pagar SDN 2 Kaliwungu, Pagar SDN 1 Ampelsari, SDN 4 Sokanandi, Pagar SDN 2 Jalatunda, Ruang Guru SDN 2 Kemranggon, RD SDN 2 Kebondalem+Toilet SDN 4 Purwasaba, Toilet SDN 2 Karangkobar, Pagar SDN 2 Paseh, Talud SDN 1 Pesangkalan+Toilet SDN 2 Sokayasa+Pagar SDN 1 Pagundungan

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU USULAN RKPD AWAL 2025	OUTPUT / KELUARAN	OUTCOME /HASIL	ANALISIS KEBUTUHAN
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	350,000,000	Jumlah sekolah penerima BOS	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pengelolaan BOS bagi Kepala Sekolah dan Bendahara BOS	Sosialiasi, Bimtek, Pemantauan dan Pengawasan Dana BOS di Sekolah
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	575,000,000	4 kegiatan asesmen dan 4 kegiatan pengembangan kurikulum bagi guru dan kepala sekolah	Terlaksananya proses belajar dan pemetaan mutu pendikan SD melalui Uji Kompetensi Literasi dan Numerasi, Asesmen Nasional, Asesmen Sumatif dan Tes Kemampuan Dasar bagi seluruh siswa Sekolah Dasar	Penyusunan soal Uji Kompetensi Literasi dan Numerasi, Asesmen Sumatif (Akhir Tahun, Akhir Semester) dan Tes Kemampuan Dasar
			Terlaksananya Bedah Soal AKM, Pelatihan Literasi dan Numerasi, Sosialisasi dan visitasi Akreditasi dan pelatihan e rapor kurikulum merdeka	Peningkatan kompetensi literasi dan numerasi guru dan kepala sekolah melalui kegiatan bedah soal AKM (80 peserta), Pelatihan Literasi dan Numerasi (80 peserta), serta terselenggaranya evaluasi mutu sekolah melalui kegiatan sosiliasasi akreditasi (100 peserta) dan pemanfataan aplikasi rapor kurikulum merdeka (80 peserta)
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	620,000,000	12.000 eksemplar sampul rapor kurikulum merdeka	Tersedianya sampul rapor kurikulum merdeka bagi 11.657 siswa kelas 1 di 617 sekolah	Pemenuhan sarana pendukung penilaian dan evaluasi hasil belajar siswa kelas 1 (11.657siswa)
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	7,500,000,000	80 paket TIK untuk 50 sekolah	Kemandirian AKM	Pengadaan TIK @ 6 unit
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	20,985,650,000	Rehabilitasi ruang kelas di 60 ruang jkelas	Ruang kelas menjadi lebih aman dan nyaman untuk digunakan	Pengadaan jasa Konsultansi perencanaan dan pengawasan, dan penyedia jasa konstruksi
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	450,000,000	Terlaksananya kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah pada 3 sekolah	Tercukupinya ruang UKS yang representatif sebagai sarana pertolongan pertama bagi siswa yang sakit sehingga penanganan siswa yang sakit lebih optimal	SMPN 1 Banjarmangu, SMPN 3 Pagentan, SMP Muhammadiyah Rakit
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	2,100,000,000	Terlaksananya kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah pada 3 sekolah	Tercukupinya Ruang Perpustakaan Sekolah yang representatif sehingga tingkat literasi siswa meningkat	SMPN 6 Satap Purwanegara, SMPN 6 Satap Banjarnegara, SMP Cokroaminoto 01 Pagedongan, SMP 5 Purwanegara

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU USULAN RKPD AWAL 2025	OUTPUT / KELUARAN	OUTCOME /HASIL	ANALISIS KEBUTUHAN
Pembangunan Laboratorium	1,440,000,000	Terlaksananya kegiatan Pembangunan Laboratorium Komputer pada 3 sekolah	Tercukupinya Ruang Laboratorium Komputer sehingga pelayanan sekolah lebih optimal	SMPN 1 Mandiraja, SMPN 1 Purwanegara, SMPN 2 Satap Pagedongan, SMPN 3 Satap Karangkobar
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2,800,000,000	Terlaksananya kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah pada 14 sekolah	Tercukupinya sarana dan prasarana sekolah yang representatif sesuai dengan kebutuhan siswa, tenaga pendidik dan kependidikan sehingga pelayanan sekolah dapat lebih optimal, serta keamanan lingkungan sekolah lebih terjaga	Pembangunan Talud dan Pagar Keliling: SMPN 1 Pagedongan, SMPN 1 Susukan, SMPN 4 Wanayasa, SMPN 1 Pandanarum, SMPN 4 Punggelan, SMPN 3 Pagedongan, SMPN 2 Karangkobar, SMPN 2 Satap Pagedongan, SMPN 5 Bawang, SMPN 3 Punggelan, SMPN 2 Pagentan, SMPN 3 Susukan, SMPN 4 Banjarnegara, SMPN 3 Purwanegara
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3,000,000,000	Terlaksananya kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah pada 15 ruang kelas	Tercukupinya ruang belajar yang representatif sesuai dengan kebutuhan siswa sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan aman, nyaman dan kondusif	SMPN 1 Banjarmangu, SMPN 1 Kalibening, SMPN 1 Pagedongan, SMPN 1 Purwanegara, SMPN 1 Rakit, SMPN 1 Wanayasa, SMPN 1 Karangkobar, SMPN 3 Bawang, SMPN 4 Kalibening, SMPN 4 Purwanegara, SMPN 4 Mandiraja, SMPN 5 Satap Punggelan, SMPN 5 Satap Kalibening, SMPN 4 Satap Pandanarum, SMPN 3 Susukan
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	300,000,000	Terlaksananya kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS) pada 3 sekolah	Tesedianya ruang UKS yang representatif sebagai sarana pertolongan pertama bagi siswa yang sakit sehingga penanganan siswa yang sakit lebih optimal	SMPN 2 Banjarmangu, SMPN 4 Pejawaran, SMPN 5 Banjarnegara
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	1,400,000,000	Terlaksananya kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Perpustakaan Sekolah pada 7 sekolah	Tersedianya Ruang Perpustakaan Sekolah yang representatif sehingga tingkat literasi siswa meningkat	SMPN 6 Satap Punggelan, SMPN 1 Pagedongan, SMPN 2 Pejawaran, SMPN 3 Mandiraja, SMP Cokroaminoto Punggelan, SMP Cokroaminoto Wanadadi, SMP Islam Darunajah Banjarmangu
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	1,000,000,000	Terlaksananya kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Sekolah pada 5 sekolah	Tersedianya Ruang Laboratorium yang representatif sehingga pelayanan sekolah lebih optimal	SMPN 1 Purwareja Klampok, SMPN 2 Batur, SMPN 2 Susukan, SMPN 2 Pagentan, SMP Taman Siswa Banjarnegara
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	850,000,000	Terlaksananya kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serbaguna/Aula pada 3 sekolah	Tersedianya Ruang Serbaguna/Aula yang representatif sehingga pelayanan sekolah lebih optimal	SMPN 1 Banjarnegara, SMPN 3 Bawang, SMPN 1 Punggelan,
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1,000,000,000	Terlaksananya kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah pada 2 sekolah	Tercukupinya sarana dan prasarana sekolah yang representatif sesuai dengan kebutuhan siswa, tenaga pendidik dan kependidikan sehingga pelayanan sekolah dapat lebih optimal, serta keamanan lingkungan sekolah lebih terjaga	Pemangunan Indoor: SMPN 3 Purwareja Klampok, SMPN 2 Wanadadi. Indoor SMP 2 Wanayasa

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU USULAN RKPD AWAL 2025	OUTPUT / KELUARAN	OUTCOME /HASIL	ANALISIS KEBUTUHAN
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	2,000,000,000	Sampul Raport K-13	Siswa Kelas VII sudah memiliki sampul raport K-13	Tersedianya sampul raport K-13 untuk semua siswa SMP kelas VII
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1,500,000,000	jumlah alat TIK untuk kegiatan Praktik Siswa pada 10 sekolah	Tersedianya alat praktik dan peraga siswa yang memadai sehingga dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam praktik dan ketrampilan	Pengadaan TIK: SMPN 2 Karangkobar, SMPN 3 Satap Karangkobar, SMP PGRI Susukan, SMPN 1 Banjarnegara, SMPN 4 Satap Susukan; SMP 2 Rakit; SMP 4 Satap Susukan; SMP 1 Kalibening; SMP 2 Banjarnegara
Pengadaan Alat Laboratorium IPA	2,000,000,000	jumlah kelompok siswa yang ideal melaksnakan praktikum IPA	terpenuhinya kegiatan praktikum IPA dengan alat laboraoriun yang repesentativ	20 SMP (@ 100juta/paket)
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	400,000,000	terlaksananya rehab ringan di sekolah	terfasilitasi pemeliharaan rutin kerusakan ringan sekolah	untuk sekolah kecil dengan kerusakan ringan dan sekolah terkena bencana
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1,200,000,000	Tersedianya biaya personil peserta didik	Prosentase biaya personil peserta didik sekolah untuk siswa miskin, PPDB Online'	Penyelenggaraan PPDB Online, Penyaluran PIP, Bantuan Siswa Miskin, Bantuan Alat Tulis Peserta Didik
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1,000,000,000	Jumlah Siswa yang mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Prosentase Prestasi Peserta Didik yang meningkat	Lomba-Lomba Kesiswaan: Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional, Olimpiade Sains Nasional, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional, Gala Siswa Indonesia, Lomba Literasi Bahasa Indonesia, Festival Tunas Bahasa Ibu, Karawitan, Lomba Liiterasi Bahasa Inggris, Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia, LCC Museum, LCC Kebangsaan, BJC, Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami.
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1,245,600,000	Terlaksananya peningkatan kompetensi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Penilik PNF dan Tenaga Kependidikan	Tersalurkan TPG kepada 3432 orang, Terlaksana Kegiatan PPG 5 orang, terlasananya kegiatan peningkatan kapasitas 40 orang	Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Penilik dan Tenaga Kependidikan, MGMP , MKKS, fasilitasi lomba lomba GTK, Upgrading GP, PMO Sekolah Penggerak
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	350,000,000	terlaksanakan oembinaan iklim kebinekaan keamanan dan inklusivitas sekolah	prosentase indikator iklim kebinekaan kemanan dan inklusivitas	jumlah sekolah yang menangani sekolah inklusi
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	36,324,000,000	Tersedianya biaya operasional peserta didik dan kegiatan di sekolah	Meningkatnya Raport Mutu di sekolah	Standar Nasional Pendidikan

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU USULAN RKPD AWAL 2025	OUTPUT / KELUARAN	OUTCOME /HASIL	ANALISIS KEBUTUHAN
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	55,000,000	jumlah aplikasi yang diupdate dan guru yang terfasilitasi	update aplikasi data tendik dan usulan kp	update data di menu aplikasi
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	425,000,000	jumlah kegiatan kordinasi jenjang SMP,	terfasilitasinya kordinasi dan evaluasi program perencnaan anggaran untuk jenjang SD	kordinasi rapat, evaluasi pemeliharaan rutin sekolah , perencanaan BOS, evaluasi sarpras; Update dapodik; SIMAK; penanganan ATS
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	150,000,000	45 SMP	Memperoleh predikat Akreditasi A, Replikasi dan Diseminasi Sekolah Penggerak	Penilaian terhadap 8 Standar Pendidikan
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	325,000,000	4 kegiatan penilaian/asesmen, 2 kegiatan pengembangan kurikulum	Terlaksananya proses belajar dan pemetaan mutu pendikan SMP melalui Asemen Sumatif, Asemen Formatif, Uji Kompetensi Literasi dan Numerasi Sekolah, Asesmen Nasional bagi seluruh siswa Sekolah Menengah Pertama	Penyusunan naskah soal Asesmen Sumatif, Asesmen Formatif, UKLN, AN dan pengembangan kurikulum sekolah menengah dalam proses pembelajaran, PMO
Pembangunan Ruang Kelas Baru	3,750,000,000	Terlaksananya kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru pada 4 sekolah	Tercukupinya ruang belajar yang representatif sesuai dengan kebutuhan siswa sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan aman, nyaman dan kondusif	Relokasi 3 ruang kelas SMPN 1 Pandanarum. SMPN 2 Purwanegara, SMPN 1 Sigaluh, SMPN 1 Mandiraja
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	350,000,000	Terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Peserta Bimtek 300 orang (KS, Bendahara, dan Operator)	Tempat Untuk pelaksanaan Bimbingan Teknis, Pelatihan untuk bendahara dan operator Sekolah. Dan Narasumber.
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1,500,000,000	Terlaksananya kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah pada 5 sekolah	Tesedianya ruang guru yang representatif sesuai dengan kebutuhan tenaga pendidik sehingga kinerja tenaga pendidik semakin meningkat	SMPN 1 Rakit, SMPN 1 Sigaluh, SMP Islam Satria Madukara, SMPN 2 Rakit, SMPN 2 Madukara; SMP 5 Banjarnegara
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1,500,000,000	Terlaksananya kegiatan pembangunan toilet beserta sanitasinya, ruang untuk APE luar bagi 20 lembaga PAUD	Terpenuhinya toilet beserta sanitasinya, tempat APE luar	Lembaga PAUD yang masih belum mempunyai toilet dan tempat APE luar

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU USULAN RKPD AWAL 2025	OUTPUT / KELUARAN	OUTCOME /HASIL	ANALISIS KEBUTUHAN
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	2,250,000,000	Terlaksananya rehab ruang kelas bagi 30 lembaga PAUD	Tercukupinya ruang belajar yang representatif sesuai dengan kebutuhan siswa sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan aman, nyaman dan kondusif	Lembaga PAUD yang ruang kelasnya rusak dan membutuhkan dana untuk rehabilitasi ruang tersebut
Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	2,250,000,000	Terlaksananya rehab toilet, talud, pagar keliling bagi 30 lembaga PAUD	Tercukupinya tempat belajar yang representatif sesuai dengan kebutuhan siswa sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan aman, nyaman dan kondusif	Lembaga PAUD yang ruang kelas, talud dan pagar keliling membutuhkan perbaikan
Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	2,000,000,000	Terlaksananya kegiatan Pembangunan Ruang Kelas/Ruang Guru pada 20 lembaga PAUD	Tercukupinya ruang kelas/ruang guru di lembaga PAUD	Lembaga PAUD yang masih kekurangan ruang kelas atau belum mempunyai ruang guru
Pengadaan Perlengkapan PAUD	750,000,000	Terlaksananya pengadaan 50 laptop untuk lembaga PAUD	Terpenuhinya laptop di lembaga PAUD sehingga administrasi lembaga berjalan dengan lancar	Masih banyak lembaga PAUD yang belum mempunyai laptop
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	2,000,000,000	40 Lembaga PAUD	Terpenuhinya APE luar bagi Lembaga PAUD	APE PAUD tercukupi sehingga kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik
Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	300,000,000	Terlaksananya pengadaan Buku Raport dan Sertifikat/Ijazah untuk 13.000 peserta didik PAUD	Terpenuhinya buku hasil laporan pembelajaran untuk peserta didik PAUD	Laporan penilaian pelaksanaan pembelajaran dan sertifikat/ijazah kelulusan peserta didik PAUD
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	4,269,600,000	1.186 Guru PAUD	Tersalurkannya honorarium/ insentif bagi Guru PAUD	Pemberian honorarium/insentif bagi guru PAUD
Pengelolaan Dana BOP PAUD	13,974,600,000			
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	1,000,000,000	Terlaksananya program PAUD HI, Kegiatan Pramuka Prasiaga	Pemahaman lembaga PAUD tentang PAUD-HI semakin meningkat; Peningkatan APS Kesetaraan; Terlaksananya Gebyar Pramuka Prasiaga	Program PAUD-HI bisa terlaksana di semua lembaga PAUD

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU USULAN RKPD AWAL 2025	OUTPUT / KELUARAN	OUTCOME /HASIL	ANALISIS KEBUTUHAN
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	1,000,000,000	Terlaksananya pelatihan/bimtek bagi 300 PTK PAUD	Kompetensi PTK PAUD meningkat sehingga kualitas pembelajaran semakin meningkat	Pelatihan/bimtek untuk menambah kompetensi PTK PAUD
Pengadaan Meubeler PAUD	1,000,000,000	Terlaksananya pengadaan meubeler untuk 20 lembaga PAUD	Tercukupinya meubeler di lembaga PAUD sehingga proses belajar mengajar lebih nyaman	Untuk mencukupi kebutuhan meubeler di lembaga PAUD
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	425,000,000	Terlaksananya pelatihan bagi operator/pengelola dana BOSP PAUD untuk 717 lembaga	Pengelolaan dana BOP PAUD berjalan dengan baik dan lancar	Kompetensi operator dan pengelola BOSP meningkat
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	4,500,000,000	4.500 Warga belajar dewasa di atas usia 24 tahun	Tersedianya bantuan operasional Sekolah bagi warga belajar di atas 24 tahun	setiap warga belajar usia 24 tahun ke atas mendapat bantuan operasional sekolah 1 juta rupiah dalam setahun
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	2,000,000,000	5 lembaga/ yayasan pendidikan	Terpenuhinya standar pelayanan Pendidikan bagi lembaga pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Operasional yayasan Dipayuda, YPLP PGRI, GOPTKI, Yayasan Dian Dharma, STIE
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	5,250,000,000	BOP Pusat	Tesalurkannya Dana BOP Kesetaraan dan terselenggaranya Pelatihan bagi PKBM dan SKB	Operasional penyaluran BOP Kesetaraan, honor narasumber, kit peserta, makan minum, sewa tempat, tarnsport peserta, ATK Penggandaan
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1,000,000,000	SKB/PKBM	Tersedianya fasilitas lembaga untuk pendidikan nonformal/kesetaraan yang layak	Rehabilitasi tempat kegiatan belajar lembaga pendidikan nonformal
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	625,000,000	20 PKBM, 8 LKP, 1 SKB	Terselenggaranya proses belajar pendidikan nonformal/kesetaraan	ATK, Saka Widya Budaya Bakti, LCC, Bimtek/Pelatihan)
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	450,000,000	1 SKB	Tersedianya Aula SKB ; ruang makan dan transit serta ruang parkir kendaraan yang layak untuk menunjang proses belajar pendidikan nonformal/kesetaraan	Revitalisasi Ruang Makan ;;Aula dan Tempat Parkir SKB

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU USULAN RKPD AWAL 2025	OUTPUT / KELUARAN	OUTCOME /HASIL	ANALISIS KEBUTUHAN
Peningkatan Kapasitas Kegiatan Pendidikan NonFormal	400,000,000	21 PKBM, 8 LKP, 1 SKB	Terselenggaranya kegiatan peningkatan kapasitas penyelenggaraan pendidikan nonformal/kesetaraan	Bimtek, Pelatihan, seremonial wisuda kesetaraan terhadap lembaga dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SKB. PKBM dan LKP
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5,848,525,400	960 orang Wiyata Bhakti Kategori 2	Tersalurkannya Dana Kesra Wiyata Bahkti Kategori 2	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Wiyata Bhakti Kategori 2
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	12,719,957,068	2043 orang Guru WB Non Kategori	Tersalurkannya Dana Kesra Wiyata Bahkti Non Kategori	Guru Wiyata Bhakti Non Kategori
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA				
Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				
Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	185,000,000	Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase Prestasi Peserta Didik yang meningkat	Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI) 300 peserta (Jenjang SD dan SMP)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU USULAN RKPD AWAL 2025	OUTPUT / KELUARAN	OUTCOME /HASIL	ANALISIS KEBUTUHAN
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	187,000,000	tersusunnya Dokumen Renja, Dokumen KAK, Dokumen RKA DPA , Dokumen BOS, Dokumen Profile Pendidikan	prosentase dokumen yang dihgunakan untuk dasar pengambilan kebijakan	penyusunan renja, RKA, DPA, Dapodik, Verifikasi BOS Sekolah, verifikasi RKA sekolah, desk KUA PPAS sekolah dan internal OPD ; 98 SMP Negeri dan Swasta; 618 SD Negeri; 20 korwil dan 4 korda wilayah kerja dindikpora
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	589,599,014,798	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1,054,000,000	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	225,000,000	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15,000,000	tersedianya kebutuhan komponen pokok listrik/ penerangan kantor selama 1 tahun.	memenuhi kebutuhan pokok komponen listrik/ penerangan kantor Dindikpora dan 20 korwilcamdikpora	memenuhi kebutuhan pokok komponen listrik/ penerangan kantor Dindikpora dan 20 korwilcamdikpora
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30,000,000	tersedianya kebutuhan pokok penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor selama satu tahun.	memenuhi pendanaan kebutuhan pokok penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Dindikpora dan 20 korwilcamdikpora	memenuhi pendanaan kebutuhan pokok penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Dindikpora dan 20 korwilcamdikpora
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15,000,000	Tersedianya dana kebutuhan pokok penyediaan peralatan rumah tangga.	memenuhi dana kebutuhan pokok penyediaan peralatan rumah tangga kantor Dindikpora dan 20 korwilcamdikpora	memenuhi dana kebutuhan pokok penyediaan peralatan rumah tangga kantor Dindikpora dan 20 korwilcamdikpora

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU USULAN RKPD AWAL 2025	OUTPUT / KELUARAN	OUTCOME /HASIL	ANALISIS KEBUTUHAN
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	776,456,000	Tersedianya dana kebutuhan pokok penyediaan Pelaksanaan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	memenuhi dana kebutuhan pokok penyediaan pelaksanaan penyediaan bahan logistik kantor Dindikpora dan 20 korwilcamdikpora	memenuhi dana kebutuhan pokok penyediaan pelaksanaan penyediaan bahan logistik kantor Dindikpora dan 20 korwilcamdikpora
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	450,000,000	jumlah kendaaraan dinas	terfasilitasinya kegiatan dinas untuk operasional	1 unit kendaraan operasional roda 4
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	1,000,000,000	tersedianya aset tanah	terpenuhinya ruasngan sekolah yang representatif	tanah untuk SMP 1 Kalibening, SMP 4 Ssatap Susukan, SMP 4 Satap Pandanarum
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	450,000,000	tersedianya sarana prasarana kantor	terfasilaitasinya kegiatan perkantoran yang nyaman	pembelian, meja rapat, lapttop untuk korwil, router modem portable, AC untuk korwil
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,025,650,200	Tersedianya dana kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	terfasilitasinya internet, listrik untuk dinas dan sekolah sekolah kecil	memnuhi pendanaan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	819,480,000	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	gaji THL PTT
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150,000,000	Tersedianya dana kebutuhan penyediaan pemeliharaan kendaraan dinas	terfasilitasinya pemeliharaan kendaraan dinas dan pajak	7 mobil dinas; 80 roda dua

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU USULAN RKPD AWAL 2025	OUTPUT / KELUARAN	OUTCOME /HASIL	ANALISIS KEBUTUHAN
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1,050,000,000	Tersedianya dana kebutuhan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	tersedianya ruangan kantor koorwil dan dinas yang representativ	lanjutan korwil wanadadi (200), rehab korwil pejawaran (200), wanayasa (200) ; banjarnegara (150); madukara (100); Mandiraja (50) ; pagedongan (50); rehab dinas (100);
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	110,000,000	Tersedianya dana kebutuhan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana perlengkapan gedung kantor	terpenuhinya sarana prasarana kantor dan optimal dalam pemanfaatannnya	servis komputer; servis printer; servis kursi kantor; pemelliharaan jaringan listrik; jaringan internet dll
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota				
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	350,000,000	Kegiatan Jambore Pemuda Tingkat Kabupaten Banjarnegara dan Jambore Pemuda Tingkat Provinsi Jawa Tengah, 6 cabang lomba dengan peserta 2 orang/cabang, total peserta 12 orang	Terlaksananya Kegiatan Seleksi Pemilihan Peserta Jambore Pemuda di Tingkat Kabupaten, untuk selanjutnya dikirimkan untuk mengikuti kegiatan Jambore Pemuda di tingkat Provinsi Jawa Tengah	Biaya Juri, Hadiah Lomba, Kit Peserta, Uang Transport Peserta dan Pendamping, Makan Minum Rapat dan Kegiatan, Akomodasi Kegiatan, Uang Hadiah Lomba, Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Kota
	150,000,000	Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Tingkat Kabupaten Banjarnegara , dengan jumlah peserta 50	Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan di Tingkat Kabupaten terkait dengan digitalisasi	Biaya Juri, Hadiah Lomba, Kit Peserta, Uang Transport Peserta dan Pendamping, Makan Minum Rapat dan Kegiatan, Akomodasi Kegiatan, Uang Hadiah Lomba, Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Kota
	150,000,000	Kegiatan Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten Banjarnegara dan Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Jawa Tengah, dengan 3 Bidang @ 1 orang peserta, total peserta terpilih 3 orang	Terlaksananya Kegiatan Seleksi Pemilihan Peserta Pemuda Pelopor di Tingkat Kabupaten, untuk selanjutnya dikirimkan untuk mengikuti kegiatan Pemuda Pelopor di tingkat Provinsi Jawa Tengah	Biaya Narasumber, Kit Peserta, Uang Transport Peserta dan Pendamping, Makan Minum Rapat dan Kegiatan, Akomodasi Kegiatan, Perjalanan Dinas Dalam Kota
Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	150,000,000	30 orang peserta Peringatan HSP, 20 petugas upacara peringatan HSP	Terlaksananya Peringatan Hari Sumpah Pemuda	Biaya Peserta, pelatih, petugas upacara, perlengkapan kegiatan, uang transport, makan minum rapat, akomodasi, perjalanan dinas dalam kota dan luar kota

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU USULAN RKPD AWAL 2025	OUTPUT / KELUARAN	OUTCOME /HASIL	ANALISIS KEBUTUHAN
	150,000,000	200 orang peserta lomba TUB-BB	Terlaksananya Lomba TUB-BB	Biaya honor dewan juri, perlengkapan peserta, uang transport, makan minum rapat, akomodasi pelaksanaan kegiatan, perjalanan dinas dalam kota dan luar kota
	100,000,000	Data Base Kepemudaan Kabupaten Banjarnegara	Terpetakannya data terkait kepemudaan di Kab. Banjarnegara	Biaya honor jasa tenaga ahli , uang transport, makan minum rapat, perlengkapan dan komodasi kegiatan, perjalanan dinas dalam kota dan luar kota
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	200,000,000	1 lembaga	Tersalurkannya Hibah Kepemudaan untuk KNPI Kab. Banjarnegara	Tersalurkannya Hibah Kepemudaan untuk KNPI Kab. Banjarnegara
	100,000,000	Kegiatan Pembinaan Organisasi Pemuda, jumlah peserta 60 orang	Terlaksananya kegiatan pembinaan organisasi pemuda tingkat Kabupaten Banjarnegara	Biaya Narasumber, Kit Peserta, Uang Transport Peserta dan Pendamping, Makan Minum Rapat dan Kegiatan, Akomodasi Kegiatan, Perjalanan Dinas Dalam Kota
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	2,000,000,000	16 Cabang Olahraga	Terlaksananya POPDA Tingkat Kabupaten, Eks Karesidenan dan Provinsi	Biaya perlengkapan perlombaan, honor juri, pelatih, petugas lapangan/kesehatan/keamanan, akomodasi, sewa kendaraan, makan minum, perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah, Pelaksasanaan Training Center Atlet, Pemberian Piala Penghargaan
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi				
Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	450,000,000	80 orang	Terlaksanya pemberian penghargaan bagi atlet berpestasi	Juara Tingkat Provinsi Perorangan Emas Rp. 5.000.000 Perak Rp.4.000.000,- Perunggu Rp.3.000.000,- Juara Tingkat Provinsi Beregu Emas Rp. 10.000.000 Perak Rp.8.000.000,- Perunggu Rp.5.000.000,-

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU USULAN RKPD AWAL 2025	OUTPUT / KELUARAN	OUTCOME /HASIL	ANALISIS KEBUTUHAN
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga				
Standardisasi Organisasi Keolahragaan	2,500,000,000	2 lembaga, 50 orang	Tersalurkannya Hibah untuk KONI dan NPCI, terlaksananya pelathan Pelatih bagi guru olahraga	Hibah untuk KONI dan NPCI, Penyusunan Radmap Kelahragaan, Biaya narasumber pelathan Pelatih, kit peserta, uang transport peserta, makan minum, akomodasi, perjalanan dinas
Pengembangan Organisasi Keolahragaan	350,000,000	2 Kegiatan	Terlaksananya pelathan Pelatih bagi guru olahraga, Pelaksanaan HAORNAS	Biaya narasumber pelathan Pelatih, kit peserta, uang transport peserta, makan minum, akomodasi, perjalanan dinas, , Gelar Festival Haornas Tingkat Kabupaten Banjarnegara
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan				
Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	150,000,000	1 lembaga	Tersalurkannya Hibah kepada Kwarcab Pramuka	Tersalurkannya Hibah kepada Kwarcab Pramuka
	100,000,000	jumlah pelatihan kepramukaan di dinas	peningkatan kapasitas pelatih pramuka mahir	50 pembina pramuka pelatihan dasar dan mahir

Berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2025, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan yaitu:

1. Arah kebijakan bidang pendidikan di tahun 2025 adalah berupaya untuk meningkatkan angka partisipasi siswa dan meningkatkan kualitas pendidikan yang merata di semua jenjang pendidikan, dengan tolak ukur melalui berbagai aspek, yaitu :
   a) Tingginya angka partisipasi siswa, melalui kesadaran/persepsi, akses, keterjangkauan dan tekanan eksternal;
   b) Hasil pembelajaran yang berkualitas;
   c) Distribusi kualitas pendidikan yang merata dan inklusif;
2. Salah satu cara transformasi adalah melalui program Perencanaan Berbasis Data dengan perbaikan pembelanjaan anggaran yang efektif dan akuntabel
3. Melalui implementasi Kurikulum Merdeka Belajar, berupaya untuk mewujudkan Pendidikan Berkualitas khususnya bagi seluruh masyarakat Banjarnegara, dimulai dari keluarga, melalui peningkatan kualitas guru, institusi pendidikan, dunia usaha/industri dan masyarakat.
4. Seluruh pemangku kepentingan pendidikan menjadi agen perubahan serta memberikan pengaruh dan dukungan sepenuhnya, dengan melalui :
   c) Upaya pemenuhan infrastruktur dan teknologi melalui platform pendidikan nasional berbasis teknologi;
   d) Pembelanjaan anggaran pendidikan yang efektif dan akuntabel;
   e) Kompetensi guru, kepala sekolah dan pemerintah daerah perlu ditingkatkan;
   f) Kolaborasi dan pembinaan antara guru, satuan pendidikan dan pihak industri;

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan musrenbang kecamatan dan forum konsultasi publik telah disampaikan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui aplikasi SIPD. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2……..
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Banjarnegara

SUB KEGIATAN	NAMA PAKET KEGIATAN	Lokus	PAGU PEKERJAAN
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Pembangunan Baru Perpustakaan Sekolah	SDN 1 Salamerta, Mandiraja	140,000,000.00
	Pavingisasi	SDN 6 Gumelem Wetan Kecamatan Susukan	45,000,000.00
	Pembangunan Talud dan Pagar Keliling	SDN 3 Wanayasa Kecamatan Wanayasa	180,000,000.00
	Pembangunan Talud	SDN 3 Sumberejo Kecamatan Batur	90,000,000.00
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	SDN 1 Pasegeran	45,000,000.00
	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	SDN 2 Mandiraja Wetan	90,000,000.00
Pembangunan Ruang Kelas Baru	Pembangunan Ruang Kelas Baru	SDN 1 Karangsari	130,000,000.00
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	SDN 1 Larangan	110,000,000.00
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	SDN 2 Jalatunda	180,000,000.00
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	SDN 1 Bawang	145,000,000.00
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	SDN Suwidak	364,000,000.00
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	SD MUHAMMADIYAH 4 BANJARNEGARA	100,000,000.00
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rehabilitasi Talud	SDN 1 Legoksayem	62,000,000.00
	Rehabilitasi Talud	SDN Susukan	90,000,000.00
	Rehabilitasi Toilet	SDN 2 Sembawa	44,000,000.00
	Rehabilitasi Pagar Keliling	SDN 2 Kebutuhduwur	135,000,000.00
	Rehabilitasi Paving	SDN 1 Kebutuhduwur	90,000,000.00
	Rehabilitasi Talud dan Pagar Keliling	SDN 3 Kebutuhduwur	180,000,000.00
	Rehabilitasi Ruang Kelas	SDN 1 Sampang	90,000,000.00
	Rehabilitasi Ruang Kelas	SDN 2 Binangun	90,000,000.00
	Rehabilitasi Ruang Kelas	SDN 2 Pekasiran	180,000,000.00
	Rehabilitasi Ruang Kelas	SDN 2 Pringamba	180,000,000.00

SUB KEGIATAN	NAMA PAKET KEGIATAN	Lokus	PAGU PEKERJAAN
	Rehabilitasi Ruang Kelas	SDN 4 Petir	180,000,000.00
	Rehabilitasi Ruang Kelas	SDN 1 Jembangan	90,000,000.00
	Rehabilitasi Ruang Kelas	SDN 1 Kubang	90,000,000.00
	Rehabilitasi Ruang Kelas	SDN 1 Panggisari	180,000,000.00
	Rehabilitasi Ruang Kelas	SDN 1 Pingitlor	90,000,000.00
	Rehabilitasi Ruang Kelas	SDN 3 Gemuruh	135,000,000.00
	Rehabilitasi Ruang Kelas	SDN 3 Kesenet	90,000,000.00
	Rehabilitasi Ruang Kelas	SDN 2 Punggelan	90,000,000.00
	Rehabilitasi Ruang Kelas	SDN 2 Tanjunganom	180,000,000.00
	Rehabilitasi Ruang Kelas	SDN Penawangan	90,000,000.00
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Pengadaan Alat TIK Laptop	SDN 1 Mantrianom	50,000,000.00
Pembangunan Laboratorium	Pembangunan Laboratorium Sekolah	SMPN 3 Satap Karangkobar	100,000,000.00
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pavingisasi Halaman	SMPN 1 Mandiraja	100,000,000.00
	Pembangunan Pagar Keliling dan Drainase	SMPN 5 Satap Purwanegara	150,000,000.00
	Pembangunan Talud dan Pagar Keliling	SMPN 6 Satap Purwanegara	100,000,000.00
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	SMPN 2 Pejawaran	150,000,000.00
	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	SMPN 3 Purwareja Klampok	100,000,000.00
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rehabilitasi Aula beserta perlengkapannya	SMPN 1 Bawang	150,000,000.00
	Rehabilitasi Koridor dan Lantai	SMPN 1 Susukan	60,000,000.00
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Rehabilitasi Ruang TU	SMPN 3 Bawang	100,000,000.00

2.6. Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan hasil reses anggota DPRD, melalui aplikasi SIPD telah disampaikan usulan program dan kegiatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.....
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Banjarnegara

SUB KEGIATAN	NAMA PAKET KEGIATAN	Lokus	PAGU PEKERJAAN
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Hibah	SD MUHAMMADIYAH 2 BANJARNEGARA	100,000,000
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	MIS MUHAMMADIYAH 03 PINGIT KECAMATAN RAKIT	100,000,000
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	MIS COKROAMINOTO PINGIT KECAMATAN RAKIT	100,000,000
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	MI AL FATAH WANADADI KECAMATAN WANADADI	75,000,000
	Rehabilitasi Ruang Kelas	MIS COKROAMINOTO 02 WANAKARSA KECAMATAN WANADADI	25,000,000
	Rehabilitasi Ruang Kelas	MIS COKROAMINOTO KANDANGWANGI KECAMATAN WANADADI	35,000,000
	Rehabilitasi Ruang Kelas	MIS NU 02 SITUWANGI KECAMATAN RAKIT	25,000,000
	Pengadaan Alat Drumb Band	MIS COKROAMINOT 04 BONDOLHARJO KECAMATAN PUNGGELAN	10,000,000
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Hibah	TK IT MUTIARA HATI KLAMPOK	80,000,000
	Hibah	KB PELITA INSANI	90,000,000
	Hibah	KB AL HIDAYAH BANDINGAN, RAKIT	50,000,000
	Hibah	TK PGRI LEKSANA	200,000,000
	Hibah	TK PERTIWI LOKASIWI KEMRANGGON	15,000,000
	Hibah	TK PERTIWI SETYORINI GUMELEM KULON	15,000,000
	Hibah	KB AN NUR, PURWAREJA KLAMPOK	20,000,000
	Hibah	KB CAHAYA PELITA, SIRKANDI	20,000,000
	Hibah	TK PERTIWI SIWI UTAMI BERTA	15,000,000
Pengadaan Perlengkapan PAUD	Hibah	TK PERTIWI HASTARINI SUSUKAN	15,000,000
	Hibah	TK PERTIWI MAKARTI HANDAYANI KEMRANGGON	15,000,000
	Hibah	TK PERTIWI PANERUSAN KULON	15,000,000
	Hibah	TK PERTIWI SASANASIWI KARANGSALAM	15,000,000
	Hibah	TK PERTIWI WIDYORINI GUMELEM WETAN	15,000,000
	Hibah	TK PGRI CIPTORINI DERIK	15,000,000
	Hibah	TK PERTIWI KALIWUNGU	20,000,000
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Hibah	TK PERTIWI MEKARPENI SUSUKAN	15,000,000
	Hibah	TK PGRI TUNAS BANGSA	20,000,000
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Hibah	TK PGRI KEDAWUNG	20,000,000
	Hibah	TK PERTIWI 1 BADAMITA	40,000,000
	Hibah	TK PERTIWI 2 LENGKONG	40,000,000
	Hibah	TK PERTIWI 3 LENGKONG	40,000,000
	Hibah	TK PGRI 2 LENGKONG	40,000,000
	Hibah	BA AISYIYAH 1 KECEPIT	45,000,000
	Hibah	KB PERDANA, MLAYA	40,000,000
	Hibah	KB TUNAS MELATI, PASURUHAN, KARANGKOBAR	20,000,000

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) merupakan komitmen internasional untuk meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, TPB/SDGs menjadi salah satu acuan dalam pembangunan nasional dan daerah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Di tingkat nasional, RPJMN 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan untuk jangka menengah 5 (lima) tahun yang menjadi acuan bagi setiap Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) dan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMN tahun 2020-2024 merupakan tahap keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Pengarusutamaan pencapaian TPB/SDGs dalam RPJMN 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dilakukan dalam bentuk rumusan kebijakan, program, kegiatan, indikator yang terukur serta sumber pembiayaannya. Gambaran umum integrasi TPB/SDGs ke dalam rencana pembangunan di tingkat nasional maupun daerah dapat dilihat lebih lanjut pada gambar berikut :

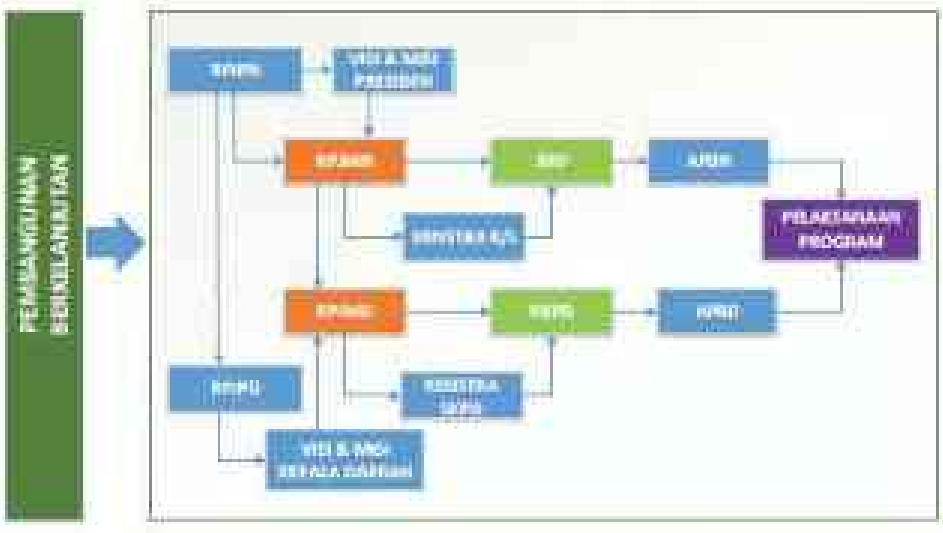

.

Adapun telaahan terkait kebijakan RPJMN 2020-2024 yang selaras dengan TPB/SDGs yang menyasar ke dalam sektor pendidikan, yaitu sesuai Tujuan 4 (Keempat) yaitu Pendidikan Berkualitas.

Kebijakan RPJMN 2020-2024 yang sesuai adalah: (1) Meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran; (2) Meningkatkan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun; (3) Meningkatkan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata; (4) Menguatkan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antarsatuan pendidikan dan antarwilayah; (5) Meningkatkan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan (6) Meningkatkan efektivitas pemanfaatan Anggaran Pendidikan.

1.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang tertuang dalam RPD Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026, adalah sebagaimana berikut :

Tujuan dan sasaran strategis :

- Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan Pendidikan Sasaran Strategis : Angka Partisipasi Kasar (APS), APM (Angka Partisipasi Menengah), SPM (Standar Pelayanan Minimal).
- Meningkatnya penghargaan masyarakat terhadap nilai-nilai kebudayaan dan kearifan local. Sasaran Strategis : Mewujudkan Pemuda yang berkarakter.
- Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan public. Sasaran Strategis : Meningkatnya nilai SKM Perangkat Daerah.
- Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sasaran Strategis : Meningkatnya nilai AKIP perangkat daerah.

1.3. Program dan Kegiatan

Adapun Program dan Kegiatan Usulan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
   1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3) Administrasi Umum Perangkat Daerah
4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Pengelolaan Pendidikan
   1) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
   2) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
   3) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
   4) Pengelolaan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan
3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
   1) Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
4. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra
   1) Pembinaan Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
5. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
   1) Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
   2) Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
6. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
   1) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
   3) Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
7. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
   1) Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan

BAB IV
RENCANA KERJA
DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program pada perangkat daerah merupakan program prioritas dalam Renstra 2025-2029. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPD selanjutnya dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Pemilihan untuk masing-masing program/ kegiatan sebagai berikut :

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KAB. BANJARNEGARATAHUN 2026

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	*Indikator*	Sumber Dana	Jumlah Anggaran (Rp)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			756,157,568,584
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			756,157,568,584
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			150,654,668,800
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			84,844,168,800
1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	*Jumlah sekolah yang mendapat pengadaan mebel*	Dana Alokasi Umum (DAU)	1,969,228,800
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	*Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik*	Dana Alokasi Umum (DAU)	327,450,000
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	*Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah*	Dana Alokasi Umum (DAU)	50,000,000
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	DAK Non Fisik-BOS Reguler	66,323,500,000
1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan*	Dana Alokasi Umum (DAU)	108,990,000
1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	*Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan*	Dana Alokasi Umum (DAU)	220,000,000

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	*Indikator*	Sumber Dana	Jumlah Anggaran (Rp)
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	*Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah*	Dana Alokasi Umum (DAU)	2,950,000,000
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*	Dana Alokasi Umum (DAU)	5,000,000,000
1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	*Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan*	Dana Alokasi Umum (DAU)	60,000,000
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar*	Dana Alokasi Umum (DAU)	165,000,000
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	*Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*	Dana Alokasi Umum (DAU)	7,000,000,000
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	*Jumlah Peserta didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	Dana Alokasi Umum (DAU)	150,000,000
1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	*Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia*	Dana Alokasi Umum (DAU)	520,000,000
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			40,885,700,000
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun*	Dana Alokasi Umum (DAU)	1,000,000,000
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	*Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*	Dana Alokasi Umum (DAU)	1,950,000,000
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	Dana Alokasi Umum (DAU)	200,000,000
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	*Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik*	Dana Alokasi Umum (DAU)	350,000,000
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	*Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah*	Dana Alokasi Umum (DAU)	50,000,000
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS*	DAK Non Fisik-BOS Reguler	35,240,700,000

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	*Indikator*	Sumber Dana	Jumlah Anggaran (Rp)
1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	*Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan*	Dana Alokasi Umum (DAU)	100,000,000
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar*	Dana Alokasi Umum (DAU)	145,000,000
1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	*Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah*	Dana Alokasi Umum (DAU)	1,500,000,000
1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	*Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan*	Dana Alokasi Umum (DAU)	50,000,000
1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	*Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia*	Dana Alokasi Umum (DAU)	300,000,000
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			17,475,000,000
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi*	Dana Alokasi Umum (DAU)	3,779,400,000
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	*Jumlah Sekolah PAUD yang Mengelola Dana BOP*	DAK Non Fisik-BOP PAUD	13,425,600,000
1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD		Dana Alokasi Umum (DAU)	50,000,000
1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	*Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan*	Dana Alokasi Umum (DAU)	120,000,000
1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	*Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan*	Dana Alokasi Umum (DAU)	100,000,000
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			7,449,800,000
1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	Dana Alokasi Umum (DAU)	1,200,000,000

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	*Indikator*	Sumber Dana	Jumlah Anggaran (Rp)
1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi*	Dana Alokasi Umum (DAU)	580,000,000
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP*	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	5,469,800,000
1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi peningkatan kapasitas*	Dana Alokasi Umum (DAU)	100,000,000
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar*	Dana Alokasi Umum (DAU)	100,000,000
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	*Ratio Guru/murid sekolah pendidikan dasar*		13,509,042,600
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			13,509,042,600
1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan*	Dana Alokasi Umum (DAU)	4,859,042,600
1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan*	Dana Alokasi Umum (DAU)	8,650,000,000
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			591,993,857,184
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			125,852,800
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun*	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50,852,600
1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun*	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50,000,200

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	*Indikator*	Sumber Dana	Jumlah Anggaran (Rp)
1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Kinerja yang terevaluasi*	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	25,000,000
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			589,315,871,250
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Gaji dan Tunjangan ASN yang tersalusrkan*	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	588,536,000,000
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang dilaksanakan*	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	679,871,250
1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD yang tersusun*	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100,000,000
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			560,553,134
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia*	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	15,520,000
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia*	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	31,764,190
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Peralatan Rumah Tangga yang tersedia*	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	13,028,944
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Bahan Logistik Kantor yang tersedia*	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	500,240,000
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,594,600,000
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia*	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1,030,600,000
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia*	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	564,000,000
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			396,980,000

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	*Indikator*	Sumber Dana	Jumlah Anggaran (Rp)
1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia*	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	125,000,000
1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara dan direhabilitasi*	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	200,000,000
1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dipelihara dan direhabilitasi*	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	71,980,000
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4,133,330,000
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	*Prosentase wirausaha muda, Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota*		4,133,330,000
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			175,010,000
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			100,010,000
2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	*Jumlah Pemuda yang terkoordinasi*	Dana Alokasi Umum (DAU)	50,000,000
2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	*Jumlah pemuda pelopor yang terkoordinasi*	Dana Alokasi Umum (DAU)	50,010,000
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			75,000,000
2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	*Organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota yang diselenggarakan*	Dana Alokasi Umum (DAU)	75,000,000
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			3,708,320,000
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			583,320,000

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	*Indikator*	Sumber Dana	Jumlah Anggaran (Rp)
2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	*Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga*	Dana Alokasi Umum (DAU)	583,320,000
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi			125,000,000
2.19.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	*Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan*	Dana Alokasi Umum (DAU)	125,000,000
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga			3,000,000,000
2.19.03.2.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan*	Dana Alokasi Umum (DAU)	3,000,000,000
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			250,000,000
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			250,000,000
2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	*Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya*	Dana Alokasi Umum (DAU)	250,000,000
	Total			**760,290,898,584**

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2026. Renja Perangkat Daerah selanjutnya menjadi platform operasional bagi Perangkat Daerah dalam menjalankan programnya dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah tahun 2026. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026 dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disepakati.
2. Kerangka pendanaan dalam Renja Perangkat Daerah masih bersifat sementara, sehingga masih dimungkinkan terjadi perubahan pagu yang disebabkan oleh pengurangan, penambahan, dan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan maupun antar sub kegiatan dalam kerangka penyusunan anggaran secara terpadu dan berbasis kinerja.
3. Renja Perangkat Daerah menjadi acuan bagi Kepala Perangkat Daerah dan segenap jajarannya serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, serta menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal : 10 Agustus 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA,

TEGUH HANDOKO, S.Sos.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710131 199003 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga **Rencana Kerja Badan Perencanaan Pengembangan Riset dan Inovasi Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2026** telah dapat diselesaikan penyusunannya. Rencana Kerja (Renja) Mempunyai arti strategis karena didalamnya memuat uraian program dan kegiatan, yang dirumuskan berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis diharapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) Bapperida merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Perencanaan Pengembangan Riset dan Inovasi yang mengacu pada Rencana Strategis Badan Perencanaan Pengembangan, Riset dan Inovasi Daerah.

Penyusunan Renja Tahun 2026 merupakan kewajiban bagi setiap Perangkat Daerah. Renja Bapperida disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, dan strategi seluruh aparat Bapperida Kabupaten Banjarnegara dalam membina, melayani dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama

peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Bapperida. Renja Bapperida Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 memuat penjabaran program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Bapperida untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pada tahun tersebut.

Berhasil dan tidaknya target yang telah ditentukan dalam Renja Bapperida tidak terlepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat. Renja yang telah tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2026 untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Selain itu juga dapat berguna bagi peningkatan kinerja Badan Perencanaan Pengembangan Riset dan Inovasi Kabupaten Banjarnegara.

Banjarnegara, 10 Agustus 2025
KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN BANJARNEGARA

YUSUF AGUNG PRABOWO, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19721030 199703 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **iv**
DAFTAR TABEL ..... **v**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang **1**
1.2 Landasan Hukum **2**
1.3 Maksud dan Tujuan **2**
1.4 Sistematika Penulisan **5**
BAB II HASIL EVALUASI RENJA BAPPERIDA TAHUN 2024 ..... **7**
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapperida Tahun 2024 dan Capaian Renstra Bapperida. **7**
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bapperida **22**
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bapperida **28**
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat **41**
BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA BAPPERIDA .. **42**
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional **42**
3.2 Program dan Kegiatan **47**
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **4**
4.1 Program Prioritas **4**
BAB V PENUTUP **7**

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 2. 1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bapperida Kabupaten Banjarnegara 23

Tabel 2. 2 Review terhadap Rancangan Awal Renja Bapperida Kabupaten Banjarnegara 37

Tabel 2. 3 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Banjarnegara 41

Tabel 2. 4 Tujuan dan Sasaran Bapperida 46

Tabel 2. 5 Program dan kegiatan pada Bapperida Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 47

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan yang

diatur melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan pembentukan tim penyusun, penelaahan rancangan awal RKPD, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, hingga pada penyempurnaan berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang RKPD. Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, penyusunan Renja Perangkat Daerah juga mengacu pada Renja Kementerian/Lembaga terkait, serta Renja Perangkat Daerah Provinsi terkait. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2 Landasan Hukum

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 302);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah

Kabupaten Banjarnegara Nomor : 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 309);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 02 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 Nomor 02 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 317);
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 29 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Bapperida Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun dengan maksud untuk:

a. Menjabarkan Renstra Bapperida Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029 ke dalam rencana program kegiatan prioritas Tahun 2026 yang diselaraskan dengan sasaran dan program RKPD Tahun 2026 Kabupaten Banjarnegara;

b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerapan anggaran berbasis kinerja.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Bapperida Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

a. menjadi pedoman dalam menyusun RKA-DPA dalam Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2026, yang dalam penyusunannya didahului dengan menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026;
b. sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Tahun 2026; dan
c. menjadikan media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Bapperida Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun berdasarkan sistematika yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah.

BAB 2 : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dan atau pokok-pokok DPRD.

BAB 3 : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan tahun 2026.

BAB 4 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran RKPD.

BAB 5 : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA BAPPERIDA TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapperida Tahun 2024 dan Capaian Renstra Bapperida.

Rencana Kerja (Renja) Bapperida Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Bapperida. Urusan yang menjadi kewenangan Bapperida adalah Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan meliputi Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan.

Renja Bapperida Tahun 2024 yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 terdiri dari 4 (empat) program, 12 (Dua belas) kegiatan, dan 23 (Dua puluh tiga) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.8.042.822.433,00,- (delapan miliar empat puluh dua juta delapan ratus dua puluh dua ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah.) dengan fokus utama pada optimalisasi pembangunan daerah diseluruh bidang/urusan pemerintahan dengan menekankan pada terbangunnya struktur kehidupan sosial budaya dan ekonomi masyarakat Banjarnegara yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing

Dari 4 (empat) program, 12 Dua belas) kegiatan, dan 23 (Dua puluh tiga) sub kegiatan dalam Renja Bapperida tersebut, program/kegiatan/sub kegiatan yang disetujui untuk dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024 terdiri

dari 4 (empat) program, 12 Dua belas) kegiatan, dan 23 (Dua puluh tiga) sub kegiatan dengan total anggaran (termasuk anggaran gaji dan tunjangan ASN) sebesar Rp.8.042.822.433,00,- (delapan miliar empat puluh dua juta delapan ratus dua puluh dua ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah.)

Pada Renja Bapperida tahun 2024, program/kegiatan/sub kegiatan yang bertambah/ berkurang, meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, meliputi kegiatan:
    a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
        1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
        2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
    b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan:

        1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;

        2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD;

    c. Administrasi Umum Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan;
        1. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
        2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
    d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

        1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau

Bangunan Lainnya

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya
    3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Saran dan Prasarana Gedung Kantor atau Bnagunan Lainnya.

2. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

a. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
    1. Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
    2. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
    3. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

b. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
   1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
   2. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

c. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
   1. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
   2. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur

4. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
   a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
      1. Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
   b. Pengembangan Inovasi dan Teknologi
      1. Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi

Dinamika yang terjadi selama tahun 2024 turut mempengaruhi keberhasilan pencapaian Renja Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2024, tercatat adanya hasil yang baik dikarenakan pencapaian target sesuai rencana, 1 (satu) indikator sasaran yang tidak tercapai yaitu indikator SAKIP dengan terget kinerja 73,5 dan realisasi kinerja 72,6, hal ini dipengaruhi oleh adanya ketidak selarasan dokumen perencaaan dan indikator yang tidak SMART.

Berdasarkan hasil evaluasi, maka tetap perlu ditingkatkan koordinasi dengan stakeholder. Pada tahun perencanaan selanjutnya, perlu diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan rencana kerja, diantaranya:

1. Menyusun perencanaan yang tepat berdasarkan permasalahan yang ada dan merupakan prioritas.
2. Meningkatkan kerjasama dengan sekolah, lembaga penelitian dan Perguruan Tinggi.
3. Mendorong inovasi dari masyarakat.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bapperida dan Pencapaian Renstra Bapperida sampai dengan Tahun 2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah

Indikator Kinerja	Kinerja		Program	Indikator Program	Kinerja		Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja		Anggaran		
	Target	Realisasi %			Target	Realisasi %			Target	Realisasi %			Target	Realisasi %	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
4	*5*	6	*7*	*8*	9	10	*11*	*12*	13	14	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	20	21
Persentase penerapan SiDA	25 %	100 %	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	25 %	100 %	1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosialdan Kependudukan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan	1 Dok	1 Dok	1. Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1 Dok	1 Dok	195,735,000	191,595,220	97.89
							2. Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Pengembangan Inovasi dan Teknologi	1 Dok	1 Dok	2. Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang	1 Dok	1 Dok	493,893,000	468,414,823	94.84

Indikator Kinerja	Kinerja		Program	Indikator Program	Kinerja		Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja		Anggaran		
	Target	Realisasi %			Target	Realisasi %			Target	Realisasi %			Target	Realisasi %	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
											Inovasi	Teknologi dan Inovasi					
Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	100 %	100 %	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan : RPJPD/RPJMD/RKPD yang telah ditetapkan	100 %	100 %	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Prosentase dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan	100 %	100 %	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Rancangan awal RPJMD/RKPD	1 Dokumen	3 Dokumen	146,500,000	142,803,200	97.48
											Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah berita acara Musrenbang Kabupaten/kota	2 Berita Acara	2 Berita Acara	97,000,000	95,973,200	98.94
											Koordinasi Penyusunan dan Penetapan	Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten	2 Dokumen	5 Dokumen	156,960,000	151,805,000	96.72

Indikator Kinerja	Kinerja		Program	Indikator Program	Kinerja		Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja		Anggaran		
	Target	Realisasi %			Target	Realisasi %			Target	Realisasi %			Target	Realisasi %	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
											Dokumen Perencanaan Pembangunan DaerahKabupaten/Kota	kota yang ditetapkan					
Penjabaran konsistensi Program dalam RPD kedalam RKPD	90 %	96.30%	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensi Program RPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia ke dalam RKPD	100 %	100 %	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Prosentase Perangkat daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Dikoordinir dalam Penyusunan dokumen perencanaan	100 %	100 %	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen perencanaan Pembangunan Daerah bidang pemerintahan (RPJPD,RPJMD, dan RKPD) (BA Hasil Desk, RAT, LP2KD 2023)	12 Dokumen	15 Dokumen	100,000,000	99,265,600.00	99.27
											Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen	5 Dok	9 Dokumen	140,000,000	135,516,300.00	96.80

Indikator Kinerja	Kinerja		Program	Indikator Program	Kinerja		Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja		Anggaran		
	Target	Realisasi %			Target	Realisasi %			Target	Realisasi %			Target	Realisasi %	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
											Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia					
							Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Prosentase Perangkat daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang Dikoordinir dalam Penyusunan dokumen perencanaan	100 %	80%	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD,RPJMD, dan RKPD)	4 Dokumen	3 Dokumen	191,500,000	186,833,490	97.56
											Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Lap	1 Lap	8,500,000	8,110,000	95.41

Indikator Kinerja	Kinerja		Program	Indikator Program	Kinerja		Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja		Anggaran		
	Target	Realisasi %			Target	Realisasi %			Target	Realisasi %			Target	Realisasi %	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
											Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD,RPJMD, dan RKPD)					
							Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Prosentase Perangkat daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang Dikoordinir dalam Penyusunan dokumen perencanaan	100 %	100 %	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Lap	1 Lap	100,000,000	98,233,200	98.2332
											Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi	1 Lap	1 Lap	108,000,000	104,237,700	96.51638889

Indikator Kinerja	Kinerja		Program	Indikator Program	Kinerja		Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja		Anggaran		
	Target	Realisasi %			Target	Realisasi %			Target	Realisasi %			Target	Realisasi %	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
											Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Infrastruktur					
Nilai SAKIP	73.50	72.60	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana	100 %	100 %	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase tersusunnya Dokumen perencanaan,penganggaran,dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dok	8 Dok	10,000,000	9,888,800	98.888
											Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	3 Dok	7 Dok	12,500,000	12,496,000	99.968

Indikator Kinerja	Kinerja		Program	Indikator Program	Kinerja		Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja		Anggaran		
	Target	Realisasi %			Target	Realisasi %			Target	Realisasi %			Target	Realisasi %	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
												Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
Nilai IKM	85.50	85.58	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana	100 %	100 %	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang	32 Orang	4,591,956,977	4,535,079,013	98.76
											Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	51,600,000	47,520,000	92.09

Indikator Kinerja	Kinerja		Program	Indikator Program	Kinerja		Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja		Anggaran		
	Target	Realisasi %			Target	Realisasi %			Target	Realisasi %			Target	Realisasi %	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	32 Unit	32 Unit	20,761,000	18,643,500	89.80
											Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	538,589,500	520,719,779	96.68
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit Gedung	1 Unit Gedung	441,206,800	419,630,000	95.11

Indikator Kinerja	Kinerja		Program	Indikator Program	Kinerja		Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja		Anggaran		
	Target	Realisasi %			Target	Realisasi %			Target	Realisasi %			Target	Realisasi %	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	110,400,000	98,683,631	89.39
											Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	3 Laporan	3 Laporan	204,346,156	182,102,465	89.11
							Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan	4 Unit	4 Unit	109,900,000	104,488,250	95.08

Indikator Kinerja	Kinerja		Program	Indikator Program	Kinerja		Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja		Anggaran		
	Target	Realisasi %			Target	Realisasi %			Target	Realisasi %			Target	Realisasi %	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
							Pemerintahan Daerah				Dinas Jabatan	Pajaknya					
											Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit Gedung	1 Unit Gedung	179,991,000	178,535,000	99.19
											Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit Gedung	1 Unit Gedung	33,483,000	31,076,000	92.81

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bapperida

Dalam pelaksanaan pelayanannya, Bapperida Kabupaten Banjarnegara mengampu 5 (lima) Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. meningkatnya pengembangan riset dan inovasi daerah;
2. meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan public;
3. meningkatnya kinerja dan kualitas dokumen perencanaan;
4. meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan ekonomi dan infrastruktur, dan sumber daya manusia;
5. meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakat.

Dari 5 (lima) indikator tersebut, 4 (empat) indikator berstatus tercapai dan 1 (satu) indikator tidak tercapai. .

Kinerja pelayanan Bapperida disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bapperida Kabupaten Banjarnegara

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja		Capaian (%)	Analisis Ketercapaian*	Solusi**
			Target	Realisasi %			
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*
1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas penelitian dan pengembangan daerah	Persentase penerapan SiDA	25%	100%	400	Penyusunan dua kajian penelitian sudah pada tahap akhir atau cetak dokumen dengan judul kajian Penyelenggaraan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Banjarnegara dan Kajian Desain Pengelolaan Sampah Berkelanjutan Mendukung Desa Mandiri Sampah telah selesai	Pengendalian kegiatan sesuai dengan KAK yang telah ditetapkan
2	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan regulasi terkait dasar Perencanaan Tersusunya dokumen Perencanaan dan regulasi 1. NA Raperda RPJPD Tahun 2025-2045 2. Rantek RPJMD Tahun 2025-2029 3. BA Forum Konsultasi Publik RKPD	1.Ketepatan waktu proses pengadaan penyedia jasa konsultasi 2. Pengendalian kegiatan melalui jadwal kegiatan sesuai amanat regulasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja		Capaian (%)	Analisis Ketercapaian*	Solusi**
			Target	Realisasi %			
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*
						Tahun 2025 4. BA Musrenbang RPJPD Tahun 2025-2045 5. BA Musrenbang RKPD Tahun 2025 6. Perbup 22/2024 tentang RKPD Tahun 2025; 7. Perbup 23/2024 tentang Perubahan RKPD Tahun 2024 8. Laporan DAK s.d. TW II 88% 9. Perda 5/2024 tentang RPJPD Tahun 2025-2045 10. Bimtek perencanaan (100%)	
3	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan SDA, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan	Penjabaran konsistensi Program dalam RPD kedalam RKPD	>90%	96.3	107	Penjabaran Konsistensi Program dalam RPD kdalam RKPD tercapai 89,58 dengan target program pada RPD Tahun 2023-2026 sebanyak 144 program dan dalam RKPD tahun 2024 sebanyak 129 program hal ini dikarenakan adanya keterbatas fiskal	Pengendalian kegiatan sesuai dengan KAK yang telah ditetapkan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja		Capaian (%)	Analisis Ketercapaian*	Solusi**
			Target	Realisasi %			
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*
						pada APBD Kabupaten Banjarnegara	
4	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai SAKIP	73.50	72.60	99	Berdasarkan penilaian SAKIP Bapperida yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Banjarnegara, bahwa untuk penilaian Tahun 2024 Bapperida memperoleh Nilai 72,60 dengan demikian target yang ditetapkan belum tercapai, adapun faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya nilai sakip adalah sebagai berikut : • Ketidakselarasan Sasaran antar dokumen perencanaan kinerja, yaitu dokumen renstra dan cascading tidak selaras dengan dokumen perjanjian kinerja	Pelaksanaan monitoring evaluasi kegiatan perencanaan didukung oleh adanya kegiatan penyelarasan dokumen perencanaan tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja		Capaian (%)	Analisis Ketercapaian*	Solusi**
			Target	Realisasi %			
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*
						• Pengukuran kinerja yang dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi belum dilaksanakan secara optimal • Laporan kinerja belum seluruhnya menyajikan informasi realisasi dan capaian kinerja • Belum seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya yang ditindaklanjuti; Evaluasi Akuntabilitas Internal yang dilakukan dengan menggunakan Teknologi Informasi belum dilaksankan secara optimal	
5	Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik BAPERTLITBANG	Nilai IKM	85.50	85.58	100	Badan Perencanaan Penelitian dan pegembangan Kabupaten Banjarnegara merupakan fasilitas pelayanan Masyarakat yang ditunjuk pemerintah untuk melayani ijin penelitian di	Pelaksanaan Pelayanan dengan Baik

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja		Capaian (%)	Analisis Ketercapaian*	Solusi**
			Target	Realisasi %			
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*
						wlayah Banjarnegara dengan penerima Layanan para Mahasiswa , Masyarakat yang memiliki kepentingan dan karyawan Bapperida	

Sumber data : Data Bapperida Tahun 2025

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bapperida

Badan Perencanaan, Pengembangan, Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, pengembangan, riset dan inovasi daerah yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 29 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Pengembangan, Riset dan Inovasi Daerah menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, serta riset dan inovasi daerah;
b. pengoordinasian kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, serta riset dan inovasi daerah;
c. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, serta riset dan inovasi daerah;
d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, serta riset dan inovasi daerah;

e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, serta riset dan inovasi daerah;
f. pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan;
g. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan berdasarkan hasil evaluasi, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk tahun 2026 mencakup 2 (dua) urusan tersebut. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Bapperida diantaranya adalah:

1. Perencanaan belum sepenuhnya berbasis riset.

   Perencanaan berbasis riset diperlukan untuk menghasilkan perencanaan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dapat diperoleh dengan mempertimbangkan hasil evaluasi dan pengendalian faktor-faktor penting yang dapat mempengaruhi keberhasilan perencanaan. Beberapa rencana pengendalian yang dapat dilakukan antara lain yaitu Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM), Penguatan database riset yang terintegrasi, Peningkatan hasil kajian yang berkualitas, Peningkatan Diseminasi hasil riset, membuat Forum Koordinasi perencana, peneliti, dan analis kebijakan.

2. Perencanaan belum berbasis risiko.

   Perencanaan belum berbasis risiko adalah proses perencanaan yang tidak mempertimbangkan secara memadai potensi risiko yang mungkin timbul dari kegiatan atau proyek yang direncanakan. hal tersebut bisa mengakibatkan tujuan yang direncanakan tidak tercapai, Ini berarti bahwa rencana tersebut mungkin tidak mencakup langkah-langkah mitigasi atau pengendalian yang memadai untuk risiko yang mungkin terjadi. Beberapa rencana pengendalian yang dapat dilakukan antara lain yaitu mengintegrasikan identifikasi risiko ke dalam proses perencanaan dan peningkatan kapasitas SDM khususnya terkait manajemen risiko

3. Ketersediaan data pembangunan belum memadai

   Kurangnya data yang akurat dan lengkap membuat perencanaan pembangunan, khususnya data infrastruktur dan kemiskinan, menjadi kurang akurat dan sulit untuk diimplementasikan dengan baik. Rencana pengendalian yang dapat dilakukan antara lain yaitu dengan peningkatan komitmen bersama semua pihak terkait dalam penyediaan data.

4. Kualitas data pembangunan belum memadai

   Data yang tidak akurat atau tidak lengkap dapat mengarah pada perencanaan pembangunan yang salah, sehingga proyek-proyek pembangunan mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau tidak efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Rencana pengendalian yang dapat dilakukan antara lain yaitu meningkatkan standarisasi dalam penyediaan data pembangunan yang berkualitas serta komitmen Bersama untuk updating data secara periodik dan peningkatan kapasitas SDM menjadi penting untuk dilaksanakan.

5. Keselarasan antar dokumen perencanaan masih kurang

   Keselarasan antar dokumen perencanaan yang kurang bisa mengarah pada beberapa masalah, seperti kegiatan yang tidak sesuai dengan sasaran dan kurangnya efektivitas pembangunan. Rencana pengendalian yang dapat dilakukan antara lain yaitu perlu ada integrasi yang lebih kuat dalam proses perencanaan dan penyusunan anggaran, Peningkatan kapasitas SDM, dan Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi dokumen perencanaan antar organisasi perangkat daerah.

6. Perencanaan belum sepenuhnya berbasis hasil evaluasi

   Hasil evaluasi seharusnya memberikan umpan balik berupa mengenai keberhasilan atau kegagalan rencana yang telah disusun, dan bagaimana prosesnya. Tanpa kegiatan ini, perencanaan selanjutnya mungkin mengulang kesalahan yang sama atau tidak memperhitungkan faktor-faktor yang penting. Rencana pengendalian yang dapat dilakukan antara lain yaitu memastikan hasil evaluasi menjadi suatu proses yang terintegrasi dalam menghasilkan dokumen perencanaan serta Peningkatan kapasitas SDM.

7. Kinerja OPD belum mendukung pencapaian kinerja Daerah

   Kinerja OPD menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pencapaian kinerja daerah. Sehingga kolaborasi Bersama seluruh pihak terkait menjadi kunci untuk bisa diterapkan. Selain itu, rencana pengendalian yang dapat dilakukan antara lain yaitu dengan peningkatan komitmen pimpinan dan peningkatan kualitas SDM.

8. Nilai SAKIP yang belum optimal

   Laporan hasil evaluasi SAKIP pada Bapperida Kabupaten Banjarnegara tahun 2024 memperoleh nilai 72,5 dengan

predikat B. Adapun yang menjadi kelemahan pada penilaian SAKIP Bapperida yaitu:

- Ketidakselarasan Sasaran antar dokumen perencanaan kinerja, yaitu dokumen renstra dan cascading tidak selaras dengan dokumen perjanjian kinerja
- Pengukuran kinerja yang dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi belum dilaksanakan secara optimal
- Laporan kinerja belum seluruhnya menyajikan informasi realisasi dan capaian kinerja
- Belum seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya yang ditindaklanjuti; Evaluasi Akuntabilitas Internal yang dilakukan dengan menggunakan Teknologi Informasi belum dilaksanakan secara optimal.

9. Struktur organisasi belum optimal
   Struktur organisasi yang belum mencerminkan pembagian tugas dan fungsi dimana Litbang masih menjadi satu dengan Perencanaan dan Evaluasi;
10. Penetapan indikator kinerja dan target belum mencerminkan kinerja Perangkat Daerah yang sesungguhnya
    Penetapan dan penempatan level indikator yang tidak sesuai berupa indikator tujuan, sasaran, program, kegiatan atau sub kegiatan yang menyebabkan pendalaman analisis input outputnya (sebab akibatnya/cascading nya) masih kurang.

Permasalahan tersebut, jika tidak diselesaikan dapat menjadi penghambat (*constraint)* dalam pencapaian visi dan misi Bupati maupun capaian indikator lainnya. Beberapa dampak dari adanya permasalahan dan hambatan tersebut meliputi:

1. Penyusunan program dan penganggaran tidak berdasarkan kajian sehingga efektivitas dan efisiensinya belum terukur.
2. Kualitas dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Banjarnegara kurang optimal.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi, peningkatan kualitas birokrasi, dan meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan pengguna layanan akan meningkatkan kebutuhan akan adanya penyediaan produk layanan yang semakin baik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi-inovasi dalam menunjang peningkatan pelayanan publik secara berkelanjutan. Beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Bapperida, yaitu:

- **Perbedaan regulasi**:
  Adanya perbedaan kebijakan pusat (antar) Kementerian/Lembaga) terkait dengan penyusunan dokumen perencanaan.
- **Komitmen**:
  Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah belum dikawal secara optimal.
- **Permasalahan Pembangunan Daerah**:
  Semakin kompleksnya permasalahan pembangunan daerah yang membutuhkan pemecahan melalui kajian penelitian dan pengembangan
- **Pedoman Kinerja**:
  Penyeragaman indikator kinerja sesuai nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan arahan regulasi Pemerintah Pusat dapat menghambat perumusan perencanaan kinerja yang berorientasi hasil.

- **Sumber Daya Manusia**:
  Belum tersedianya SDM yang profesional/memadai sesuai PERMENPAN RB No. 34 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan PERMENPANRB No. 14 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Perekayasa.

Berikut ini adalah peluang bagi pengembangan pelayanan Bapperida pada lima tahun mendatang.

- **Transformasi digital**:
  Meningkatnya Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dapat menjamin akuntabilitas, efisiensi, serta efektivitas proses perencanaan pembangunan daerah
- **Kemitraan strategis**:
  Meningkatnya kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga riset sebagai mitra penelitian dan Pengembangan.
- **Kelembagaan**:
  Terbitnya pedoman mengenai penjenjangan kinerja menjadi guide line dalam penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah.
- **Keterkaitan dengan Riset dan Inovasi**:
  Perkembangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah, sehingga memicu para perencana untuk menyusun dokumen perencanaan yang berorientasi pada pemecahan masalah atau perencanaan berbasis riset.

Semakin kompleksnya permasalahan, hambatan, tantangan dan peluang maka pembangunan daerah yang membutuhkan pemecahan melalui kajian, penelitian dan pengembangan semakin banyak. Sehingga dapat diinventarisir isu-isu strategis yang ada,

yang didapat dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal Kabupaten Banjarnegara sampai dengan tahun 2024. Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan pembangunan. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Bapperida pada tahun 2024, sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kualitas perencanaan Pembangunan daerah.
2. Belum optimalnya kualitas perencanaan multi sektor di bidang ekonomi.
3. Belum optimalnya perencanaan bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial.
4. Belum optimalnya perencanaan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.
5. Belum optimalnya penyelenggaraan bidang penelitian dan pengembangan.
6. Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM serta sarana prasarana penunjang kinerja Bapperida.
7. Belum optimalnya pemanfaatan dokumen perencanaan Bapperida dalam penyusunan program dan kegiatan.

2.1. Review Terhadap Rancangan Awal Renja Bapperida

Renja Tahun 2026 merupakan pelaksanaan tahun pertama Dalam RPJMD Tahun 2026-2029, prioritas arah kebijakan sesuai tugas dan fungsi Bapperida pada tahun 2025 meliputi:

1 Peningkatan kuantitas dan kualitas riset dan inovasi daerah;

2 Peningkatan kualitas penyusunan perencanaan dan pendanaan serta analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah;
3 Peningkatan kualitas koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah;
4 Penyederhanaan prosedur layanan publik.

Tabel 2. 3 Review terhadap Rancangan Awal Renja Bapperida Kabupaten Banjarnegara

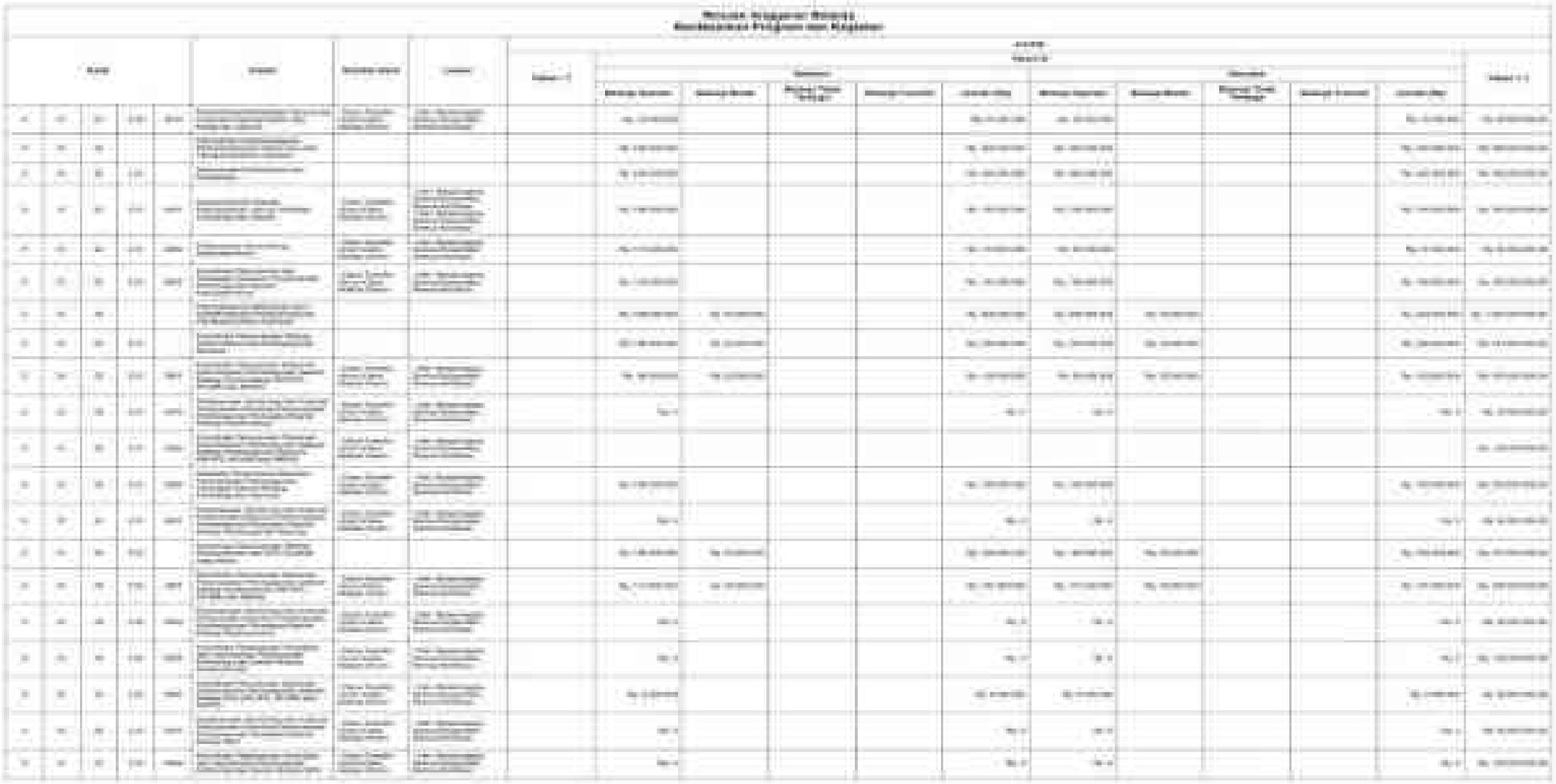

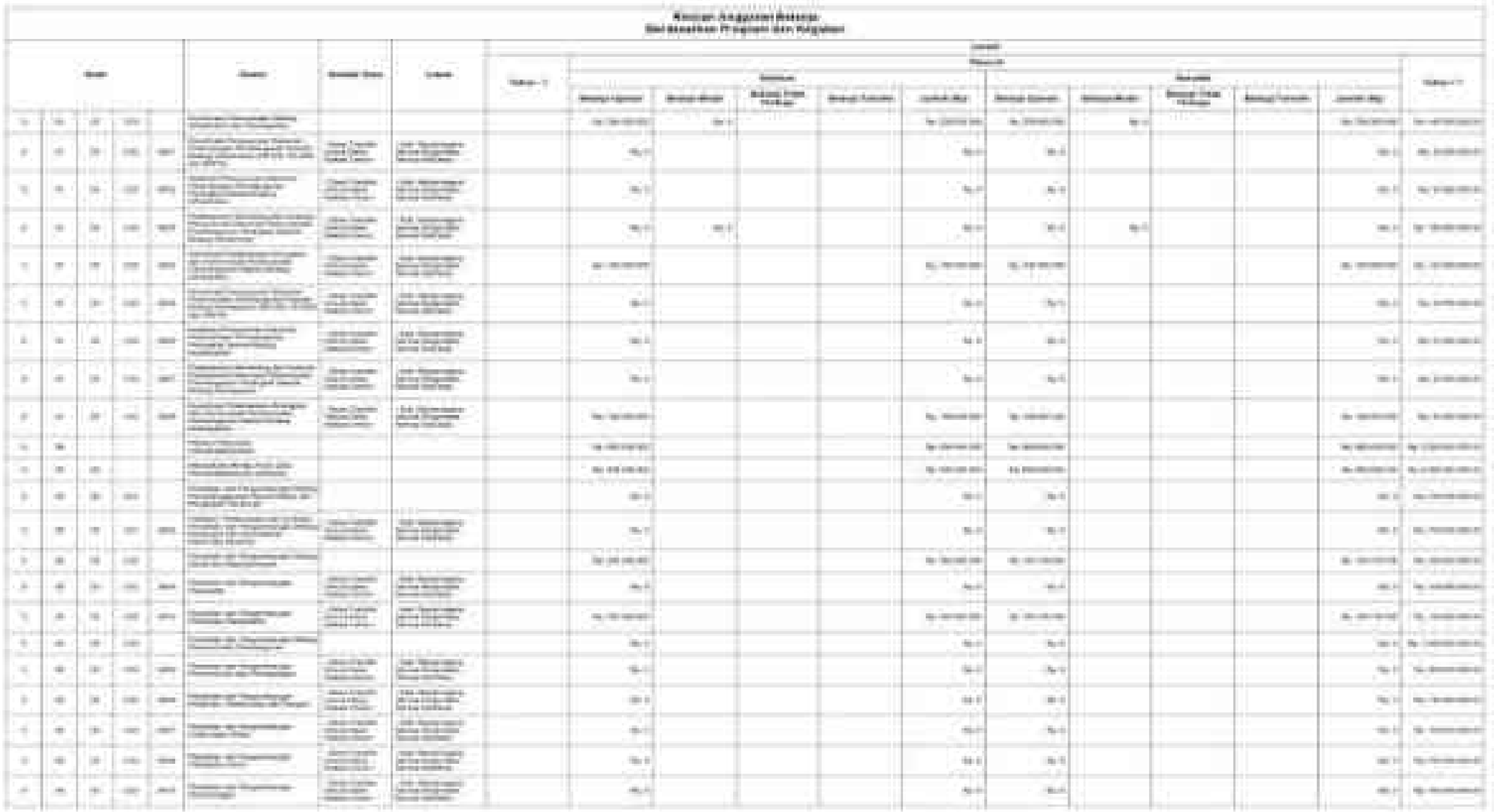

Rencana Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan

Berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2026, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan yaitu:

1. Mengevaluasi seluruh usulan kegiatan
2. Untuk lebih mempersiapkan dan mengalokasikan anggaran pinikatas SDM Pada unsur perencanaan dalam rangka meningkatkan kualitas dokumen perencanaan Kabupaten Banjarnegara
3. Perencanaan berbasis *Money follow Program.*

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan musrenbang kecamatan dan forum konsultasi publik telah disampaikan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui aplikasi SIPD. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	N I H I L				

2.5.Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan hasil reses anggota DPRD, melalui aplikasi SIPD telah disampaikan usulan program dan kegiatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA
BAPPERIDA

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional.

Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia; terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari ancaman, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kondisi itu didukung oleh mantapnya kemampuan pertahanan dan keamanan negara yang ditandai oleh terwujudnya TNI yang profesional dengan komponen cadangan dan pendukung pertahanan yang kuat; terwujudnya sinergi kinerja antara POLRI dan partisipasi masyarakat dalam bidang keamanan, intelijen, dan kontra intelijen yang efektif yang disertai kemampuan industri pertahanan yang handal; terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam mendorong supremasi hukum; terwujudnya tata kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum, serta birokrasi yang profesional dan netral; terwujudnya masyarakat sipil, masyarakat politik, dan masyarakat ekonomi yang mandiri, serta terwujudnya kemandirian nasional dalam konstelasi gobal.

Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat ditunjukkan oleh makin tinggi dan meratanya tingkat pendapatan masyarakat dengan jangkauan lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh; mantapnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, antara lain ditandai oleh meningkat dan meratanya akses, tingkat kualitas, dan relevansi pendidikan seiring dengan makin efisien dan efektifnya manajemen pelayanan pendidikan; meningkatnya kemampuan Iptek; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak; dan terwujudnya kesetaraan gender; bertahannya kondisi dan penduduk tumbuh seimbang. Sejalan dengan tingkat kemajuan bangsa, sumber daya manusia Indonesia diharapkan berkarakter cerdas, tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beragama, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran terhadap keberagaman, bergotong royong, patriotik, dinamis dan berorientasi Iptek. Kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat makin mantap dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan sehingga masyarakat mampu berperan sebagai penggerak bagi konsep pembangunan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.

Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri, pertanian, kelautan dan sumber daya alam, dan sektor jasa. Lembaga dan pranata ekonomi telah tersusun, tertata, serta berfungsi dengan baik. Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan, dan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang efisien dan produktivitas yang tinggi; serta berkembangnya usaha dan investasi dari perusahaan-perusahaan Indonesia di luar negeri termasuk di zona ekonomi eksklusif dan lautan bebas dalam rangka peningkatan perekonomian nasional.

Sejalan dengan itu, pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2026 mencapai kesejahteraan setara dengan negara-negara berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin yang makin rendah. Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya jaringan transportasi pos dan telematika yang andal bagi seluruh masyarakat yang menjangkau seluruh wilayah NKRI; tercapainya elektrifikasi perdesaan dan elektrifikasi rumah tangga; serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel sehingga terwujud kota tanpa permukiman kumuh.

Badan Perencanaan Pengembangan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Banjarnegara merupakan lembaga teknis yang bertugas membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan agar dapat berjalan secara sinergi dan selaras dengan kebijakan nasional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Bapperida

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun ke depan. (Reff. Lampiran IV Permendagri no 54 tahun 2010). Merujuk pada pengertian tersebut, maka rumusan tujuan yang akan dicapai oleh Badan Perencanaan Pengembangan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Banjarnegara mengacu pada Renstra Bapperida Kabupaten Banjarnegara 2025-2029, maka ditetapkan tujuan dan sasaran Renstra berikut:

Tabel 2. 5 Tujuan dan Sasaran Bapperida

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2026	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(8)	(13)
Meningkatnya Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berbasis Potensi Lokal yang Berkelanjutan	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang berkualitas berbasis riset dan inovasi		Skor kapabilitas inovasi	1, 40	
			Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan	98,55	
		Meningkatnya kualitas, kuantitas serta penerapan riset dan inovasi	Persentase pemanfaatan hasil penelitian, riset dan inovasi daerah	100	
		Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	Nilai komponen perencanaan pada penilaian SAKIP Pemerintah Daerah	22,75	
			Manajemen Risiko Indeks (MRI)	3	
		Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta pelayanan masyarakat	Nilai SAKIP OPD	73	
			Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3,67	

3.2 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan pada Bapperida Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 kami sajikan sebagai berikut:

Tabel 2. 6 Program dan kegiatan pada Bapperida Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	13	16	17
						Badan Perencanaan Pengembangan Riset dan Inovasi			6.978.515.000,00				7.064.000.000,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			6.978.515.000,00				7.064.000.000,00	
	5	01				PERENCANAAN			6.835.870.000,00				6.879.528.550,00	
1	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	5.925.869.900,00				6.006.828.550,00	
	5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran,	-	-	8.000.000,00			Penguatan Landasan	8.080.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	13	16	17
						dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif		
	5	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	40 Laporan	8.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegrita	8.080.000,00	BADAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	13	16	17
							Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					s Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif		
	5	0 1	0 1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.223.769.306,0 0			Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintaha	5.269.528.550,0 0	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	13	16	17
												n yang transparan, akuntabel, dan partisipatif		
	5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	5.177.434.306,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang	5.222.730.200,00	BADAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	13	16	17
												transparan, akuntabel, dan partisipatif		
	5	0 1	0 1	2.0 2	000 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	46.335.000,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintaha	46.798.350,00	BADAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	13	16	17
												n yang transparan, akuntabel, dan partisipatif		
	5	0 1	0 1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	311.205.722,00			Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan	315.120.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	13	16	17
												partisipatif		
	5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	11.995.922,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel,	12.120.000,00	BADAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	13	16	17
												dan partisipatif		
	5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	299.209.800,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang	303.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	13	16	17
												transparan, akuntabel, dan partisipatif		
	5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	262.894.872,00			Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	292.900.000,00	
	5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	13	16	17
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	134.400.000,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	141.400.000,00	BADAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI
	5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	13	16	17
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	128.494.872,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	151.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	13	16	17
	5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	120.000.000,00			Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	121.200.000,00	
	5	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	17 Unit	100.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintaha	101.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN RISET DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	13	16	17
							Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			Semua Kel/Desa		n Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif		INOVASI
	5	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	40 Unit	20.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Banjarnegara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	20.200.000,00	BADAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	13	16	17
												Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif		
2	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	180.000.100,00				181.800.000,00	
	5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	-	-	180.000.100,00			Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	181.800.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	13	16	17
												Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berbasis potensi lokal secara berkelanjutan		
	5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota								
							Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	50.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Meningkatk	50.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	13	16	17
												an perekonomian daerah yang berdaya saing dan berbasis potensi lokal secara berkelanjutan		
	5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	130.000.100,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Meningkatkan	131.300.000,00	BADAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	13	16	17
												perekonomian daerah yang berdaya saing dan berbasis potensi lokal secara berkelanjutan		
3	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	730.000.000,00				690.900.000,00	
	5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan	-	-	330.000.000,00			Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegrita	292.900.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	13	16	17
						Manusia						s Dan Dinamis Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berbasis potensi lokal secara berkelanjutan		
	5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	13	16	17
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berbasis potensi lokal secara berkelanjutan	111.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI
	5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	13	16	17
							Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berbasis potensi lokal secara berkelanjutan	30.300.000,00	BADAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI
	5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	13	16	17
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berbasis potensi lokal secara berkelanjutan	151.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI
	5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang	-	-	110.000.000,00			Penguatan Landasan Tata Kelola	105.400.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	13	16	17
						Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)						Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berbasis potensi lokal secara berkelanjutan		
	5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintaha	65.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN RISET DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	13	16	17
							yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)			Semua Kel/Desa		n Berintegritas Dan Dinamis Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berbasis potensi lokal secara berkelanjutan		INOVASI
	5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	8	9	10	11	13	16	17
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berbasis potensi lokal secara berkelanjutan	40.400.000,00	BADAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	13	16	17
	5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	-	290.000.000,00			Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berbasis potensi lokal secara berkelanjutan	292.600.000,00	
	5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	13	16	17
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	80.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berbasis potensi lokal secara berkelanjutan	80.800.000,00	BADAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI
	5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	13	16	17
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2 Laporan	80.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berbasis potensi lokal secara berkelanjutan	75.750.000,00	BADAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI
	5	01	03	2.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan								
							Jumlah Laporan Hasil	0 Laporan	30.000.000,00	Kab.	PENDAPATA	Penguatan	30.000.000,00	BADAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	13	16	17
							Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	N ASLI DAERAH (PAD)	Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Meningkatkan infrastruktur yang mendukung perekonomian dan kesejahteraan masyarakat		PERENCANAAN PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI
	5	01	03	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	13	16	17
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	2 Laporan	100.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berbasis potensi lokal secara berkelanjutan	106.050.000,00	BADAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI
	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			142.645.000,00				184.471.450,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	13	16	17
4	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	-	142.645.000,00				184.471.450,00	
	5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	-	-	42.645.000,00			Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berbasis potensi lokal secara berkelanjuta	43.071.450,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	13	16	17
												n		
	5	05	02	2.02	0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1 Dokumen	42.645.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya	43.071.450,00	BADAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	13	16	17
												saing dan berbasis potensi lokal secara berkelanjutan		
	5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-	-	100.000.000,00			Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya	141.400.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	13	16	17
												saing dan berbasis potensi lokal secara berkelanjutan		
	5	05	02	2.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi								
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Meningkatkan perekonomian daerah	141.400.000,00	BADAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	8	9	10	11	13	16	17
								yang berdaya saing dan berbasis potensi lokal secara berkelanjutan		
	J U M L A H				**6.978.515.000,00**				**7.064.000.000,00**	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program Prioritas

Program pada perangkat daerah merupakan program prioritas dalam Renstra 2025-2029. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Banjarnegara yang selanjutnya dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Pemilihan untuk masing-masing program/ kegiatan/sub kegiatan, sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, meliputi kegiatan:
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan:
      1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan :
      1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
   c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan :
      1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
   d. Administrasi Umum Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan:
      1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, meliputi sub kegiatan :

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi sub kegiatan:
   1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi sub kegiatan:
   1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
   3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, meliputi kegiatan:
   a. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, meliputi sub kegiatan :
      1. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
      2. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, meliputi kegiatan:
   a. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, meliputi sub kegiatan :
      1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
      2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
      3. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

4. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

b. Koordinasi Perencanaan Perekonomian dan SDA, meliputi sub kegiatan :
   1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
   2. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

c. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, meliputi sub kegiatan :
   1. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
   2. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Hormonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
   3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
   4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Hormonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, meliputi kegiatan :

a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan, meliputi sub kegiatan:
   1. Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat

b. Pengembangan Inovasi dan Teknologi, meliputi sub kegiatan:
   1. Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Bapperida Tahun 2026 merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Bapperida Tahun 2025-2029. Renja Bapperida selanjutnya menjadi platform operasional bagi Bapperida dalam menjalankan programnya dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka sasaran pembangunan daerah tahun 2025-2029. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja Bapperida digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bapperida setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026 dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disepakati.
2. Kerangka pendanaan dalam Renja Bapperida masih bersifat sementara, sehingga masih dimungkinkan terjadi perubahan pagu yang disebabkan oleh pengurangan, penambahan, dan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan maupun antar sub kegiatan dalam kerangka penyusunan anggaran secara terpadu dan berbasis kinerja.
3. Renja Bapperida menjadi acuan bagi Kepala Bapperida dan seluruh bidang serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, serta menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal: Agustus 2025

KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN BANJARNEGARA

YUSUF AGUNG PRABOWO, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19721030 199703 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rakhmat dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rancana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026.

Renja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renja berpedoman pada RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029, Renstra Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2025-2029, dan RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026

Kami menyadari dalam penyusunan Renja ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan rancangan rencana kerja dimaksud.

Banjarnegara, 10 Agustus 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA

ESTI WIDODO, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19771014 199703 1 006

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 21

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 24

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 27

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 37

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 39

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 40

3.3 Program dan Kegiatan 41

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 49

BAB V PENUTUP 51

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Badan Kepegawaian Daerah s/d Tahun 2020 Kabupaten Banjarnegara 11

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara 22

Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 28

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 37

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 38

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara 42

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan yang diatur melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan pembentukan tim penyusun, penelaahan rancangan awal RKPD, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, hingga pada penyempurnaan berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang RKPD. Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, penyusunan Renja Perangkat Daerah juga mengacu pada Renja Kementerian/Lembaga terkait, serta Renja Perangkat Daerah Provinsi terkait. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2. Landasan Hukum

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Nomor 19 Tahun 2025); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 309);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun dengan maksud untuk:

a. Menjabarkan RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 ke dalam rencana program kegiatan prioritas Tahun 2026 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Renja K/L Tahun 2026 dan Renja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;
b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerapan anggaran berbasis kinerja

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

a Menjadi pedoman dalam menyusun RKA-DPA dalam Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2026, yang dalam penyusunannya didahului dengan menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026;
b. Sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Tahun 2026;
c. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun berdasarkan sistematika yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah.

BAB 2 : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dan atau pokok-pokok DPRD

BAB 3 : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan tahun 2026.

BAB 4 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran RKPD.

BAB 5 : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah meliputi urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun sebelumnya yaitu Tahun 2024 yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 Tahun Anggaran 2024, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara melaksanakan 3 program, 12 kegiatan dan 27 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 7.866.789.448,- dengan fokus utama pada meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik.

Program/kegiatan/sub kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah yang meliputi:

1) Masih kurangnya jumlah aparatur dibanding dengan kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja.
2) Belum terlaksananya sistem pengembangan pola karir aparatur pemerintah daerah yang jelas dan terukur.
3) Masih kurangnya kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
4) Belum adanya sistem yang jelas dan terukur yang dijadikan tolak ukur peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah daerah.
5) Belum tersedianya sistem informasi kepegawaian secara lengkap dan terintegrasi.

Dari 3 program, 12 kegiatan dan 27 sub kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah tersebut, program/kegiatan/sub kegiatan yang disetujui untuk dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024 terdiri

dari 3 program, 12 kegiatan, dan 24 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 7.284.627.620,-.

Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024, terjadi beberapa perubahan yang meliputi penambahan atau pengurangan pagu, penghapusan, penambahan atau pengurangan program/kegiatan/sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Perubahan tersebut mengubah rincian dalam Renja Perangkat Daerah menjadi 3 program, 12 kegiatan, dan 24 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp Rp 8.249.601.793,-. Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2024, program/kegiatan/subkegiatan yang bertambah meliputi :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
2. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
3. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
4. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.
5. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
6. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
7. Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK.
8. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian.
9. Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN.
10. Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN.
11. Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN
12. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Intl, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum.

Dinamika yang terjadi selama tahun 2024 turut mempengaruhi keberhasilan pencapaian Renja Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2024, tercatat adanya hasil yang baik yang dikarenakan adanya pencapaian maupun pelampauan target maupun yang tidak memenuhi target.

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi 4 sub kegiatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaktercapaian tersebut antara lain adalah:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   a) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, terealisasi 87,63%.
      Tidak terealisasi karena selisih antara standarisasi dan realisasi pada SPPD biasa, tidak terealisasi SPPD dalam kota.
2) Program Kepegawaian Daerah
   a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK, terealisasi 79,12%.
      Tidak terealisasi karena berdasarkan jadwal tes CASN dari BKN ternyata waktunya lebih singkat dari perkiraan jumlah pelamar/peserta tes.
   b) Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN, terealisasi 85,28%.
      Tidak terealisasi karena beberapa ijin pelantikan belum turun, Pertek hasil JPT belum turun dan Pertek Pelantikan JF belum turun.
   c) Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN terealisasi 79,55%.
      Tidak terealisasi berasal dari rekening kontribusi stimulan tugas belajar S2 yang dianggarkan untuk 5 orang ternyata yang mengajukan hanya 3 orang saja.
3) Program Pengembangan SDM
   a) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum, terealisasi 88,13%.
      Tidak terealisasi berasal dari Rekening Kontribusi Kursus Singkat dan Biaya Pejalanan Dinas, dikarenakan Pelaksanaan Kursus Singkat pada TA 2024 dengan pola pengiriman sebagian bersumber pada pembiayaan APBN Kementerian/Lembaga Penyelenggara. Seperti

Diklat DTS oleh BPSDM Kemkominfo yang menyerap 200 peserta namun ternyata pembiayaan bersumber dari APBN Kemkominfo.

b) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan, terealisasi 94,61%.

Tidak terealisasi berasal dari belanja perjalan dinas peserta Diklat, dikarenakan jumlah hari pada perhitungan peserta diklat berubah menyesuaikan penyelenggara (dalam hal ini BPSDMD Provinsi Jawa tengah) dan beberapa Mentor Peserta Diklat memilih tidak menggunakan anggaran BKD pada saat hadir menjadi mentor peserta diklat.

b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi 25 indikator sub kegiatan, sedangkan realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah 5 indikator sub kegiatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah:

1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dengan tujuan menggali informasi atas kendala yang dihadapi sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
2) Sosialisasi dan pendampingan secara intens dengan para pengelola kepegawaian seluruh OPD sehingga dapat meminimalisasi permasalahan dalam proses pelayanan administrasi kepegawaian yang sebagian besar telah beralih ke sistem elektronik.
3) Koordinasi yang baik antara Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara dengan instansi terkait diantaranya dengan BKN RI, KASN, Kemendagri dan KemenPAN dan RB.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka pada tahun perencanaan selanjutnya perlu diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, diantaranya:

1) Menyusun dokumen *talent pool* dan rencana suksesi yang disusun berdasarkan profil ASN (kualifikasi, kompetensi, dan kinerja) dengan mempertimbangkan pola karir instansi.
2) Menyusun dan menetapkan kebijakan tentang pola karier.
3) Melaksanaan uji kompetensi bagi pejabat struktural agar penempatannya sesuai dengan sesuai kemampuan, kompetensi dan profesionalitas yang dimiliki.
4) Meningkatkan keikutsertaan pegawai dalam program pengembangan kompetensi ASN.
5) Membangun sistem/kebijakan perlindungan pegawai diluar dari jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, program pensiun, yang diselenggarakan secara nasional.
6) Membangun dan mengintegrasikan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis online dengan sistem kepegawaian lainnya.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
s.d. Tahun 2026 BKD Kabupaten Banjarnegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026	
					Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Tujuan OPD: Mewujudkan meritokrasi dalam manajemen ASN untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kualitas pelayanan publik	NILAI PENERAPAN SISTEM MERIT	0,72	0,70(K)	0,71 (B)	0,66 (B)	92,96%	287 (B)	287 (B)	100%
	URUSAN KEPEGAWAIAN; URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	INDEKS PROFESIONALITAS ASN	76,00	NA	-	77,63	-	79,00	79,00	100%
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase pemenuhan pegawai sesuai dengan pemetaan kebutuhan ASN	-	4,05%	-	5,72%	-	5,8%	5,8%	100
		Persentase jabatan struktural yang terisi	92%	90%	91,00%	86,84%	97,63%	91%	91%	100%

Kode	Uruaan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026	
					Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
		Persentase penanganan kasus pelanggaran disiplin pegawai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.03.02.2.01	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase formasi ASN yang terisi	100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	100%
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2 dok	2 dok	--	-	-	2 dok	2 dok	100%
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 dok	1 dok	2 dok	2 dok	100%	1 dok	1 dok	100%
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	10 dok	12 dok	10 dok	12 dok	120%	10 dok	10 dok	100%
5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi (hibah)	2 lembaga	2 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 dok	2 dok	3 dok	3 dok	100%	2 dok	2 dok	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026	
					Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
5.03.02.2.02	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Persentase usul persetujuan teknis mutasi dan promosi yang sesuai aturan	94,94%	93,41%	88,24%	88,24%	100%	88%	90%	100%
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	4 dok	4 dok	4 dok	3 dok	75%	4 dok	4 dok	100%
		Persentase ASN perempuan yang menduduki jabatan struktural	37,67%	37%	35,00%	37,67%	107,64%	38%	38%	100%
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	6 dok	100%	6 dok	6 dok	100%	6 dok	6 dok	100%
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2 dok	100%	2 dok	2 dok	100%	2 dok	2 dok	100%
5.03.02.2.03	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase hasil asesmen yang digunakan sebagai dasar dalam mutasi/promosi ASN.	94,74%	84,71%	80%	80%	100%	95%	95%	100%
5.03.02.2.03.02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan *Assessment Center*	1 dok	2 dok	2 dok	2 dok	100%	1 dok	1 dok	100%
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	5 orang	7 orang	7 orang	7 orang	100%	5 orang	5 orang	100%

Kode	Urusan/Bideng Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026	
					Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
5.03.02.2.04	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN berpredikat kinerja baik	100%	NIN	100%	99,90%	99,90%	100%	100%	100%
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian Kinerja dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12 dok	2 dok	12 dok	12 dok	100%	12 dok	12 dok	100%
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	6 orang	-	6 orang	6 orang	100%	6 orang	6 orang	100%
		Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	124 orang	60 orang	321 Orang	169 orang	52,64%	50 orang	60 orang	100%
5.03.02.2.04.04	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan	10 Orang	10 orang	10 orang	10 orang	100%	10 orang	10 orang	100%
		Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang dilayani	15 dok	12 dok	12 dok	11 dok	91,67%	15 dok	15 dok	100%
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	64,78%	40,00%	50,00%	64,78%	129,57%	70%	70%	100%
	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	34,47 jp	10 jp	20 jp	34,47 jp	172,35%	20 jp	20 jp	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026	
					Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+8	(11)=10/4
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	960 orang	1.320 orang	500 orang	647 orang	129,40%	300 orang	300 orang	100%
	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	70,00%	50%	60%	52,64%	87,74%	60%	80%	100%
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan	2 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	100%	3 laporan	3 laporan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026	
					Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Fungsional, Kepemimpinan, dan Latser	Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan								
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	NILAI SAKIP;	75,00;	73,00 (BB);	74,00 (BB);	75,30	101,76%	76,00	76,00	100%
		INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT BKD	85,34	84,34	81,76	89,87	109,93%	86,00	86,00	100%
5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100%	117,47%	100%	101,55 %	101,55%	100%	100%	100%
5.03.01. 2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja OPD tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.03.01. 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 dok	5 dok	9 dok	9 dok	100%	9 dok	9 dok	100%
5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026	
					Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Daerah Kabupaten/ Kota									
5.03.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen Administrasi Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 orang	33 orang	39 orang	39 orang	100%	36 orang	36 orang	100%
5.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 dok	9 dok	12 dok	12 dok	100%	12 dok	12 dok	100%
5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	5 lap	5 lap	5 lap	6 lap	100%	5 lap	5 lap	100%
		Jumlah dokumen laporan survey kepuasan masyarakat yang tersusun	2 lap	2 lap	2 lap	2 lap	100%	2 lap	2 lap	100%
5.03.01 2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026	
					Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	100%	3 paket	9 paket	100%
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 paket	9 paket	9 paket	9 paket	100%	9 paket	9 paket	100%
5.03.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.03.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	0 unit	-	-	-	-	-	-
5.03.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 unit	3 unit	7 unit	7 unit	100%	-	-	-
5.03.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026	
					Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	9 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
5.03.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	100%	5 unit	5 unit	100%
5.03.01 2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100%	2 unit	2 unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026	
					Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
5.03.01.2.09.11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	20 unit	7 unit	28 unit	120 unit	428,57%	20 unit	20 unit	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan pelayanannya di Tahun 2024, Perangkat Daerah mengampu 57 Indikator. Dari 57 indikator tersebut, 48 indikator berstatus tercapai dan 9 indikator berstatus belum tercapai. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian/ketidaktercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Tertundanya proses seleksi CASN. Pada akhir tahun 2024 masih dalam tahap pengajuan usul NIP CPNS, dan untuk PPPK tahap 1 sudah sampai tahap seleksi kompetensi.
2. Belum tuntasnya tahapan pelaksanaan seleksi terbuka JPT karena terhambat oleh faktor izin dari Menteri Dalam Negeri yang belum turun sehingga berdampak pula pada kegiatan mutasi ASN.

Dalam rangka mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut, telah dilakukan upaya-upaya yang meliputi:

1. Penunjukan Plt atas jabatan-jabatan yang kosong.
2. Optimalisasi fasilitasi pengembangan kompetensi pegawai di masa pendemi dengan dengan tetap mengikutsertakan ASN dalam pelatihan secara *streaming* menggunakan media *online zoom*.
3. Mengintensifkan penanganan penegakan disiplin pegawai dengan pemantauan dan monitoring sehingga beberapa kasus dapat terselesaikan di tingkat OPD.
4. Melaksanakan seleksi CASN untuk mengisi sejumlah 850 formasi (PPPK 780 formasi dan CPNS 70 formasi).

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan BKD Kabupaten Banjarnegara

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK LPPD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Sistem nilai Merit			0,70	0,71	0,72	0,73	0,66	0,66	0,72	0,73	
2.	Nilai SAKIP			73,00 (BB)	74,00 (BB)	75,00 (BB)	76,00 (BB)	73,35	75,30	75,30	75,30	
3.	Nilai SKM			84,34	85,00	85,34	86,00	85,84	89,87	89,87	89,87	
4.			Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	60%	65%	70%	75%	57,44%	59,76 %	55%	60%	
4.			Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	55%	60%	65%	70%	19,63%	25,73 %	65%	70%	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK LPPD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.			Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehalan)	50%	60%	70%	80%	46,57%	100%	100%	100%	

*) Kolom 3 diisi berdasarkan IKK outcome dalam lampiran Permendagri 18/2020

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan urusan pemerintahan dalam 2 urusan, yaitu urusan kepegawaian serta urusan Pendidikan dan pelatihan. Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan berdasarkan hasil evaluasi, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk tahun 2026 mencakup 2 urusan tersebut. Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah diantaranya adalah:

1) Kurangnya jumlah ASN sektor tertentu dibandingkan dengan kebutuhan dan beban kerja.
2) Belum terlaksananya manajemen talenta untuk pengembangan karir ASN.
3) Sistem penilaian kinerja ASN yang belum mencerminkan kinerja sebenarnya.
4) Masih kurangnya kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
5) Pelaksanaan sistem pelayanan kepegawaian secara digital dan terintegrasi, belum optimal.

Permasalahan tersebut, jika tidak diselesaikan dapat menjadi *constraint* dalam pencapaian visi dan misi Bupati maupun capaian indikator lainnya. Beberapa dampak dari adanya permasalahan dan hambatan tersebut meliputi:

1) Capaian penilaian penerapan sistem merit yang rendah terutama dalam aspek pengembangan karir, promosi dan mutasi pegawai, penghargaan dan perlindungan ASN.
2) Capaian penilaian PMPRB yang rendah terutama dalam area manajemen ASN.
3) Capaian penilaian Indeks Profesionalitas ASN yang rendah terutama dalam aspek pengembangan SDM.

4) Capaian penilaian MCP KPK yang rendah terutama dalam area manajemen SDM.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi, peningkatan kualitas birokrasi, dan meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan pengguna layanan akan meningkatkan kebutuhan akan adanya penyediaan produk layanan yang semakin baik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi-inovasi dalam menunjang peningkatan pelayanan publik secara kontinyu. Beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, yaitu:

1) Kekurangan ASN pada beberapa sektor dan distribusi pegawai yang belum merata.
2) Dinamika regulasi kebijakan pusat dan penyederhanaan organisasi yang memengaruhi pengembangan karir ASN.
3) Penilaian kinerja belum menunjukan kinerja ASN yang sesungguhnya.
4) Kompetensi ASN belum merata dalam menghadapi tuntutan teknologi dan pelayanan publik.
5) Sistem pelayanan kepegawaian belum sepenuhnya digital dan terintegrasi.
6) Proses administrasi kepegawaian yang komplek dan birokratis sering menyita waktu dan kurang sejalan dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan.

Selain tantangan-tantangan tersebut, terdapat pula potensi yang dimiliki BKD dalam pengembangan pelayanan pada empat tahun mendatang:

1) Keterbatasan jumlah ASN menjadi peluang bagi BKD Kabupaten Banjarnegara untuk mendorong transformasi birokrasi melalui optimalisasi rekrutmen, redistribusi tenaga, digitalisasi layanan, serta peningkatan kompetensi dan fleksibilitas kerja ASN.
2) Perubahan kebijakan dan struktur organisasi memberikan peluang bagi BKD Kabupaten Banjarnegara untuk membangun sistem manajemen talenta yang adaptif, berbasis meritokrasi, serta memperkuat karir fungsional dan digitalisasi pengembangan kompetensi ASN.

3) Kelemahan dalam sistem penilaian kinerja menjadi peluang untuk mengembangkan pendekatan evaluasi berbasis kinerja nyata, objektif, dan partisipatif melalui peningkatan kapasitas evaluator dan penerapan sistem penilaian modern seperti 360 derajat.
4) Kesenjangan kompetensi ASN membuka peluang untuk mengembangkan sistem pelatihan berbasis kebutuhan jabatan yang lebih relevan, digital, dan kolaboratif dengan berbegai institusi guna mendorong profesionalisme dan kinerja aparatur.
5) Belum optimalnya sistem pelayanan kepegawaian mendorong peluang untuk mempercepat digitalisasi, integrasi data, dan standarisasi proses administrasi guna mewujudkan layanan kepegawaian yang efisien, transparan, dan real-time.
6) Proses administrasi kepegawaina yang komplek dan birokratis membuka peluang adanya digitalisasi pelayanan

Berdasarkan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan tersebut, dapat diinventarisasi beberapa isu strategis. Inventarisasi isu-isu strategis tahun 2026 didapatkan dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal Kabupaten Banjarnegara sampai dengan capaian tahun 2024. Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah kebertangsungan pembangunan. Isu-isu strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2026, sebagai berikut:

1. Kesenjangan jumlah ASN pada sektor tertentu dibandingkan dengan kebutuhan dan beban kerja organisasi.
2. Belum optimalnya penerapan manajemen talenta dalam mendukung pengembangan karir ASN.
3. Sistem penilaian kinerja ASN yang belum sepenuhnya mencerminkan capaian kinerja secara objektif.
4. Masih rendahnya kompetensi dan profesionalisme ASN sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
5. Belum optimalnya implementasi sistem pelayanan kepegawaian secara digital yang terintegrasi.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Tahun 2005-2025 dan mengacu pada RPJMD Tahun 2025-2029. Berdasarkan hal tersebut, prioritas arah kebijakan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2026 meliputi:

Tabel 2 3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 Kabupaten Banjarnegara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah		100%	5.927.464.931	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah		100%	5.541.625.000
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah		100%			Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah		100%	
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja OPD tepat waktu		100%		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja OPD tepat waktu		100%	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		9 dok	4.155.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		9 dok	3.475.000
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen Administrasi Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu		100%		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen Administrasi Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu		100%	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		36 orang	5.013.416.501	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		36 org	5.020.929.507
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		12 dok	39,010,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		12 dok	39.010.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		5 dok	2.970.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		9 dok	2.565.000
		Jumlah dokumen laporan survey kepuasan masyarakat yang tersusun		2 dok			Jumlah dokumen laporan survey kepuasan masyarakat yang tersusun		2 dok	
3.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%		Kegatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 paket	10.993.800	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 paket	6.571.700

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		9 paket	370.642.430	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		9 paket	197.111.343
4.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 unit	24.142.500	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 unit	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		3 unit	139.288.500	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		5 unit	
5.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	
	Penyedaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 laporan	100.400.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 laporan	90.400.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 laporan	119.441600	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 laporan	106.691.600
6.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		5 unit	40.614.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		5 unit	40.614.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		2 unit	38.702.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		2 unit	17,538.250
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		30 unit	23.675.600	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		30 unit	14,716.600

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II.	Program Kepegawaian Daerah	Persentase pemenuhan pegawai sesuai dengan pemetaan kebutuhan ASN		5,8%		Program Kepegawaian Daerah	Persentase pemenuhan pegawai sesuai dengan pemetaan kebutuhan ASN		5,8%	908.625.000
		Persentase jabatan struktural yang terisi		93%			Persentase jabatan struktural yang terisi		93%	
		Persentase penanganan kasus pelanggaran disiplin		100%			Persentase penanganan kasus pelanggaran disiplin		100%	
1.	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase formasi ASN yang terisi		100%		Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase formasi ASN yang terisi		100%	
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		2 dok		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		-	-
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		1 dok	708.563.500	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		1 dok	225.000.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		12 dok	7.750.000	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		12 dok	7.750.000
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi (hibah)		1 lembaga	50.000.000	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi (hibah)		1 lembaga	50.000.000
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		2 dok	73.000.000	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		2 dok	75.000.000
2.	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase hasil asesmen yang digunakan sebagai dasar dalam mutasi/promosi ASN		75%		Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase hasil asesmen yang digunakan sebagai dasar dalam mutasi/promosi ASN.		75%	
	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment		1 dok			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment		--	0
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan		8 orang	78.000.000	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan		10 orang	92.000.000
3.	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN					Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN				
	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan		4 dok	43.100.000	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan		4 dok	35.000.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah					Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah			
		Persentase ASN perempuan yang menduduki jabatan struktural		38%			Persentase ASN perempuan yang menduduki jabatan struktural		38%	
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		6 dok	11.035.000	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		6 dok	11.035.000
	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN		2 dok	209.492.600	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN		2 dok	253.000.000
4.	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN berpredikat kinerja baik		100%		Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN berpredikat kinerja baik		100%	
	Pelaksanaan Penilaian Kinerja dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		12 dok	11.015.000	Pelaksanaan Penilaian Kinerja dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		12 dok	25.000.000
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan		6 orang	113.625.000	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan		6 orang	104.640.000
		Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa		124 Orang			Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa		124 orang	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan		10 orang	28.070.000	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan		10 orang	30.000.000
		Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani		10 Dok			Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani		10 Dok	
III	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		70%	1.914.432.600	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		70%	912.000.000
1.	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan		35,43jp		Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan		35,43jp	
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi JA Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, PD Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi		900 orang	651.044.200	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi JA Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, PD Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi		900 orang	400.000.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural		80%		Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural		80%	
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Latsar	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		3 laporan	1.263.388.300	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Latsar	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		3 laporan	512.000.000
					9.175.539.731					**7.362.269.000**

Berdasarkan rancangan akhir RKPD Tahun 2026, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan yaitu:

1. Sub kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK mengikuti kebijakan pemerintah pusat.
2. Sub kegiatan Pengelolaan Promosi ASN dianggarkan untuk uji kompetensi peserta seleksi terbuka JPT .
3. Sub kegiatan Pengelolaan Assessment Center untuk uji kompetensi staf potensial dan pejabat struktural.
4. Sub kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Latsar dilaksanakan untuk pengiriman Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pengawas serta latsar CASN untuk menyelenggarakan Diklat PKN, PKA dan PKP, serta Latsar CPNS.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan musrenbang kecamatan dan forum konsultasi publik telah disampaikan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui aplikasi SIPD. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kebupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	N/A				

2.6. Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan hasil reses anggota DPRD, melalui aplikasi SIPD telah disampaikan usulan program dan kegiatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Validasi
	N/A				

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional merupakan upaya untuk mengkaji arah, prioritas, serta sasaran pembangunan nasional yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menegaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus menjadi satu kesatuan dengan perencanaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, program dan kegiatan BKD Kabupaten Banjarnegara senantiasa diselaraskan dengan dokumen perencanaan nasional, khususnya RPJPN 2025–2045, RPJMN 2025–2029, serta kebijakan teknis di bidang aparatur sipil negara.

Dalam RPJPN 2025–2045, salah satu fokus utama pembangunan nasional adalah mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, profesional, dan berdaya saing global. Kebijakan ini diturunkan dalam RPJMN 2025–2029 yang menekankan pentingnya transformasi manajemen ASN melalui sistem merit, penguatan kompetensi, digitalisasi layanan, serta peningkatan produktivitas birokrasi. Selaras dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menegaskan bahwa ASN merupakan profesi yang harus dikelola secara profesional berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, serta bebas dari intervensi politik.

Di tingkat kelembagaan, kebijakan nasional juga memberikan porsi penting pada desentralisasi urusan kepegawaian, sehingga pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan manajemen ASN sesuai kebutuhan organisasi. Dengan demikian, BKD Kabupaten Banjarnegara dituntut untuk mampu melaksanakan menejemen ASN yang efektif, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karier, penilaian kinerja, disiplin, hingga pengelolaan data kepegawaian yang terintegrasi.

Sejalan dengan arah kebijakan nasional tersebut, program dan kegiatan BKD Kabupaten Banjarnegara diarahkan untuk mendukung terwujudnya birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Sinergi ini mencakup penguatan kapasitas ASN melalui pengembangan kompetensi,

peningkatan kualitas manajemen talenta, penerapan sistem merit secara konsisten, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKD

Tujuan penyusunan Renja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 adalah untuk mendukung pencapaian arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kabupaten Banjarnegara 2025–2045 dan RPJMD Kabupaten Banjarnegara 2025–2029, khususnya dalam urusan manajemen aparatur sipil negara. Tujuan ini diarahkan untuk memperkuat manajemen ASN berbasis sistem merit, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi aparatur, serta mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani.

Visi Kabupaten Banjarnegara yaitu Mewujudkan Banjarnegara Maju dan Sejahtera. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, dilaksanakan dengan 5 misi yaitu:

1. Meningkatkan infrastruktur dan pelayanan publik.
2. Mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
3. Meningkatkan kualitas dan akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
4. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
5. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan transparan.

Berdasarkan visi misi Kepala Daerah, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara merumuskan tujuan yang akan dicapai sesuai misi ke-5 yaitu : "Mewujudkan meritokrasi dalam manajemen ASN untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kualitas pelayanan publik."
Dengan Indikator tujuan: Indeks Penilaian Sistem Merit

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara mendukung sasaran kinerja kabupaten ke-4 yaitu Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dalam pencapaian tujuan tersebut, maka sasaran strategis yang akan diambil adalah:

1. Meningkatnya profesionalitas ASN.

   Dengan indikator sasaran sebagai berikut:

1. Indeks Profesionalitas ASN
2. Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah

2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik perangkat daerah.

   Dengan indikator sasaran sebagai berikut:

   a. Nilai SAKIP
   b. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

3.3 Program dan Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan instrumen untuk mewujudkan tugas pokok dan fungsi BKD. Sama dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Banjarnegara dalam rangka pelaksanaan Manajemen Kepegawaian Daerah, Badan Kepegawaian Daerah menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
5.03	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Nilai SAKIP		76,00				76,50	
		Indeks Kepuasan Masyarakat BKD		89,00				89,25	
5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah		100%	6.541.625.000	APBD		100%	5.829.893.750
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah		100%				100%	
5.03.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja OPD tepat waktu		100%				100%	
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		9 dok	3.475.000	APBD		9 dok	3.648.750
5.03.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen Administrasi Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu		100%				100%	
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		36 org	5.020.929.507	APBD		36 org	5.271.975.982

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		12 dok	39.010.000	APBD		12 dok	40.960.500
5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		9 dok	2.565.000	APBD		9 dok	2.693.250
		Jumlah dokumen laporan survey kepuasan masyarakat yang tersusun		2 dok				2 dok	
5.03.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%				100%	
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 paket	6.571.700	APBD		3 paket	6.900.285
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		9 paket	197.111.343	APBD		9 paket	206.966.910
5.03.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%				100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 unit				1 unit	
5.03.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		5 unit				5 unit	
5.03.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%				100%	
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 laporan	90.400.000	APBD		12 laporan	94.920.000
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 laporan	106.691.600	APBD		12 laporan	125.413.680
5.03.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%				100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		5 unit	40.614.000	APBD		5 unit	42.644.700
5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		2 unit	17.538.250	APBD		2 unit	18.415.163
5.03.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		30 unit	14.718.600	APBD		30 unit	15.454.530
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase pemenuhan pegawai sesuai dengan pemetaan kebutuhan ASN		5,8%	906.625.000	APBD		6.0%	1.087.406.250
		Persentase jabatan struktural yang terisi		91%				92%	
		Persentase penanganan kasus pelanggaran displin		100%				100%	
5.03.02.2.01	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase formasi ASN yang terisi		100%				100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		1 dok	225.000.000	APBD		1 dok	247.500.000
5.03.02.2.01.05	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		12 dok	7.750.000	APBD		12 dok	8.137.500
5.03.02.2.01.06	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi (hibah)		1 lembaga	50.000.000	APBD		1 lembaga	52.500.000
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		2 dok	75.000.000	APBD		2 dok	78.750.000
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase usul persetujuan teknis mutasi dan promosi yang sesuai aturan		95%				98%	
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah		4 dok	35.000.000	APBD		4 dok	36.750.000
		Persentase ASN perempuan yang menduduki jabatan struktural		38%				39%	
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		6 dok	11.036.000	APBD		12 dok	11.586.750

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN		2 dok	253.000.000	APBD		2 dok	121.800.000
5.03.02.2.03	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase hasil asesmen yang digunakan sebagai dasar dalam mutasi/promosi ASN.		75%				76%	
5.03.02.2.03.02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment		--	0			--	
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan		10 orang	92.000.000	APBD		10 orang	96.800.000
5.03.02.2.04	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN berpredikat kinerja baik		100%				100%	167.832.000
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian Kinerja dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		12 dok	25.000.000	APBD		12 dok	31.500.000
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan		6 orang	104.840.000	APBD		6 orang	110.082.000
		Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa		124 orang				50 orang	
5.03.02.2.04.04	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan		10 orang	30.000.000	APBD		10 orang	26.250.000
		Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani		10 Dok				10 Dok	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.04.01	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		65%	912.000.000			68%	957.600.000
5.04.01.1.01	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan		35,43jp				36jp	
5.04.01.1.01.04	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi JA Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, PD Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi		912 orang	400.000.000			300 orang	420.000.000
5.04.01.1.02	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural		55%				57%	
5.04.01.1.02.04	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Latsar	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		3 laporan	512.000.000	APBD		3 laporan	537.600.000
					7.500.000.000				**7.875.000.000**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program pada perangkat daerah merupakan program prioritas dalam Renstra 2023-2026. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD selanjutnya dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Pemilihan untuk masing-masing program/ kegiatan di uraikan sebagai berikut:

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
   1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
      3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
   3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
      1) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      2) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
      1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
      2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
   5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
      1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
      2) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
      3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

1. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
    1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
    2) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
    3) Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
    4) Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
2. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN
    1) Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN
    2) Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
    3) Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN
3. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN
    1) Sub Kegiatan Pengelolaan Assessment Center
    2) Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
4. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
    1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kinerja dan Evaluasi Kinerja Aparatur
    2) Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
    3) Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN

III. PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

1. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis
    1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
2. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
    1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Latser.

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. Renja Perangkat Daerah selanjutnya menjadi platform operasional bagi Perangkat Daerah dalam menjalankan programnya dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka sasaran pembangunan daerah tahun 2026. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026 dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disepakati.
2. Kerangka pendanaan dalam Renja Perangkat Daerah masih bersifat sementara, sehingga masih dimungkinkan terjadi perubahan pagu yang disebabkan oleh pengurangan, penambahan, dan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan maupun antar sub kegiatan dalam kerangka penyusunan anggaran secara terpadu dan berbasis kinerja.
3. Renja Perangkat Daerah menjadi acuan bagi Kepala Perangkat Daerah dan segenap jajarannya serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, serta menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal : 10 Agustus 2025
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA

ESTI WIDODO, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19771014 199703 1 006

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan yang diatur melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan pembentukan tim penyusun, penelaahan rancangan awal RKPD, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah,, hingga pada penyempurnaan berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang RKPD. Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, penyusunan Renja Perangkat Daerah juga mengacu pada Renja Kementerian/Lembaga terkait, serta Renja Perangkat Daerah Provinsi terkait. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni

sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2. Landasan Hukum

Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun dengan berlandaskan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 302);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 290);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 309;)
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
20. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 14);
21. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 15);
22. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 Nomor 34).

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun dengan maksud untuk:

a. Menjabarkan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029 ke dalam rencana program kegiatan prioritas Tahun 2026 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Renja K/L Tahun 2026 dan Renja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;
b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerapan anggaran berbasis kinerja.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

a. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA-DPA dalam Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2026, yang dalam penyusunannya didahului dengan menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026;
b. Sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Tahun 2026;
c. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun berdasarkan sistematika yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 : **PENDAHULUAN**
Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah.

BAB 2 : **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**
Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dan atau pokok-pokok DPRD.

BAB 3 : **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**
Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan tahun 2024.

BAB 4 : **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**
Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran RKPD.

BAB 5 : **PENUTUP**
Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah meliputi urusan Pertanahan dan Urusan Keuangan.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 terdiri dari 5 program, 15 kegiatan, dan 52 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp468.971.699.624,00 dengan lokus utama pada pemantapan sistem dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi dan keadilan serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Program/kegiatan/sub kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah yang meliputi:

1. Jumlah bidang tanah yang dimiliki Pemkab Banjarnegara setiap tahun cenderung berubah dan bertambah sehingga belum seluruhnya tanah Pemkab bersertifikat.
2. Persentase Rasio Kemandirian Daerah yang relative masih rendah sehingga diperlukan kebijakan menggali potensi pendapatan daerah yang ada pada tahun 2024.

Dari 5 program, 15 kegiatan, dan 53 sub kegiatan yang dalam Renja Perangkat Daerah tersebut, program/kegiatan/sub kegiatan yang disetujui untuk dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024 terdiri dari 5 program, 15 kegiatan, dan 53 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp493.726.277.391,00. Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024, terjadi beberapa perubahan yang meliputi penambahan atau pengurangan pagu, penghapusan, penambahan atau pengurangan program/kegiatan/sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Perubahan tersebut mengubah rincian dalam Renja Perangkat Daerah menjadi 5 program, 15 kegiatan, dan 53 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar 516.325.276.601,00.

Dinamika yang terjadi selama tahun 2024 turut mempengaruhi keberhasilan pencapaian Renja Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2024, tercatat adanya hasil yang baik yang dikarenakan adanya pencapaian maupun pelampauan target ataupun yang tidak memenuhi target.

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota untuk kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan realisasi kegiatan fisik sebesar 99,30% dan realisasi anggaran sebesar 95,68%. Hal yang menyebabkan tidak maksimal realisasinya adalah karena ada 1 unit barang yang tidak terealisasi untuk diadakan/ dibeli karena harga yang terpasang di Dokumen Penganggaran (DPA) tidak mencukupi/ harga di katalog lebih tinggi dibanding harga di DPA.
2) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah sub kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak daerah dan retribusi daerah dengan realisasi kegiatan fisik 95% dan realisasi anggaran sebesar 71,04%. Faktor yang mempengaruhi ketidaktercapaian adalah Keterbatasan waktu untuk pendistribusian SPTT.

b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi

1) Pnigram Penatagunaan Tanah dengan kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/ Kota dengan realisasi kegiatan fisik sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar 80.41%. Realisasi anggaran tidak 100% karena adanya jprogram tarif 50% pada pnigram sertifikasi tanah mulai Juli 2023.
2) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota untuk sub kegiatan
   a) Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi, dan Kinerja Perangkat Daerah dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi

anggaran sebesar 98,44% karena adanya proses nego sehingga ada selisih dengan DPA.

b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar 97,87% karena adanya perubahan pada susunan pegawai dan pejabat BPPKAD sehingga ada honor yang tidak terambil.

c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar 93,75% karena adanya perbedaan harga dengan DPA.

d) Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar 95,82% karena adanya proses nego sehingga ada selisih dengan DPA.

e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar 99,47% karena adanya proses adanya sisa tender dari proses nego sehingga selisih dengan harga DPA.

f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar 95,86% karena sesuai dengan tagihan listrik, air, dan telepon yang masuk.

g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar 97,03% karena sesuai jumlah kendaraan yang dibayar pajaknya dan jumlah kendaraan serta sarana prasarana yang dipelihara.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keterwapaian tersebut antara lain adalah:

a) Semakin meningkatnya kapasitas sumber daya manusia;

b) Monitoring dan evaluasi secara berkala telah dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ketersediaan anggaran serta perencanaan pelaksanaan kegiatan terhadap pengelolaan penatausahaan keuangan daerah serta pengelolaan pendapatan daerah sangat berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja. Pada tahun perencanaan selanjutnya, perlu diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, diantaranya:

1. Penyesuaian kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah lebih diletailkan dan dijadwalkan lebih baik.
2. Monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan pendapatan daerah
3. Pembinaan terhadap pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2023 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
s.d. Tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perbitrase Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
					Target Kinerja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Luas Tanah Pemkab yang bersertifikat	76%	64%	68%	71,71%	104,80%	72%	74,16%	100%
	Penggunaan Tanah yang Berkepanjangan dalam satu Daerah Kabupaten / Kota	Persentase dokumen perencanaan penggunaan tanah pertahun yang disusun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam satu Kabupaten/ Kota	12 Laporan	12 Dokumen	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketercapaian Target Kinerja Perangkat Daerah Perwujudan Pelayanan Sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Perumusan, Pengelenggaraan, Evaluasi, dan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja OPD yang disusun tepat waktu	55 Dokumen	100%	28 Dokumen	38 Dokumen	135,71%	32 Dokumen	35 Dokumen	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	5 Dokumen	15 Dokumen	18 Dokumen	120%	15 Dokumen	15 Dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	20 Dokumen	5 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	100%	20 Dokumen	20 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun lalu 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2026			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2026	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2026	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Kinerja dan Efektivitas Realisasi Kinerja SKPD								
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penerbitan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang tersedia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyelia Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 Orang	1 Tahun	61 Orang	62 Orang	101%	69 Orang	69 Orang	100%
	Pelaksanaan Pembayaran dan Pengisian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen pembayaran dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	150 Dokumen	150 Dokumen	150 Dokumen	248 Dokumen	165%	150 Dokumen	150 Dokumen	100%
	Pelaksanaan Pertanggungjawaban dan Pengujian/ Verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen Laporan keuangan bulanan/ triwulan dan semesteran SKPD dan Laporan Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase sumber daya aparatur pengelola keuangan yang paham pertanggungjawaban keuangan	0%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%
	Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimtek implementasi Peraturan Perundang-undangan	0 Orang	21 Orang	5 orang	5 Orang	100%	0 Orang	0 Orang	0%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Paket	12 Bulan	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	12 Paket	100%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan logistik kantor yang disediakan	12 Paket	12 Bulan	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	12 Paket	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 4 tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pengelolaan Barang Milik Daerah Penanjung Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemeliharaan jumlah BMD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	8 Unit	19 Unit	15 Unit	15 Unit	100,00%	20 unit	100%	100%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	25 Unit	89 Unit	100 Unit	100Unit	100,00%	20 Unit	20 Unit	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase jasa pelayanan umum kantor, komunikasi, jasa kebersihan, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat		1 Tahun	12 Laporan	12 Laporan	100%			100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	1 Tahun	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	1 Tahun	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penanjung Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemeliharaan mesin dan prasarana kantor yang terpelihara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	50 Unit	1 Tahun	50 Unit	56 Unit	112%	50 Unit	50 Unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Kondisi Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tiongga tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Kinerja Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
					Target Kerja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Kerja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Kinerja (%)
	Dinas atau Kecamatan Dalam Angka									
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung dan peralatan kantor yang dipelihara	30 Unit	1 Tahun	30 Unit	30 Unit	100%	30 Unit	30 Unit	100%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN KEHARGAAN DAERAH	**Persentase Penerapan APBD sesuai ketentuan**	**100%**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Kesesuaian Program dalam APBD dengan RKPD	**97%**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Belanja Daerah	**97%**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Belanja Jasa Transfer	**98,8%**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase OPD yg Bekerjama dan mempercepat layanan Sesangga SKPD sesuai standar	**98%**	>90	>90	100%	>90	>90	>90	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Rancana Anggaran Daerah	Persentase dokumen Penganggaran daerah yang disusun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen perubahan KUA dan PPAS yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	Koordinasi, Penyusunan, dan Verifikasi RKA SKPD	Jumlah RKA SKPD yang diverifikasi	44 Dokumen	44 Berita Acara	44 Dokumen	44 Berita Acara	100%	44 Dokumen	44 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d desember tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Pregram dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
					Target Kerja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Kerja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Koordinasi, Penyusunan, dan Verifikasi Penyiapan RKA SKPD	Jumlah Penyiapan RKA SKPD yang dikoordinasi	44 Dokumen	44 Dokumen Kosong	44 Dokumen	44 Dokumen Kosong	100%	44 Dokumen	44 Dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Rapertu dan Raperbup Perubahan APBD	4 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
	Pembinaan Pemerintahan Penyelenggaraan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penyelenggaraan Daerah pemerintah Kabupaten/Kota	44 Orang	44 OPD	44 Orang	44 Orang	100%	44 Orang	44 Orang	100%
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase capaian penerbitan BPD dan penyerapan belanja daerah serta pengelolaan dana transfer	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen hasil pengendalian dan Penerbitan dan SPD	4 Dokumen	44 SKPD	44 Dokumen	44 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
	Koordinasi Pasilitasi, Asistensi, Supervisi,	Jumlah dokumen hasil Koordinasi Pasilitasi, Asistensi, Supervisi,	8 Dokumen	Rp248 Miliar	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	8 Dokumen	8 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kelompok Kegiatan s/d tahun lalu 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
					Target Kinerja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya								
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Penunjukan/ Penetapan dan Penyelesaian Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Penunjukan/ Penetapan dan Penyelesaian Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka penyusunan laporan laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Penunjukan/ Penetapan dan Penyelesaian Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	12 Dokumen Acuan 12 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Penelaahan dan Pembahasan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah orang yang mengikuti Penelaahan Pembahasan Keuangan pemerintah Kabupaten/Kota	44 Orang	44 ORG	44 Orang	44 Orang	100%	44 Orang	44 Orang	100%
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang disusun dan kasus lengkap daerah yang disesuaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi dan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah laporan Hasil koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan	12 Dokumen	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026	
					Target Kinerja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan, dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran	9 Laporan	9 Dokumen	9 Laporan	9 Laporan	100%	9 Laporan	9 Laporan	100%
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi	44 Laporan	44 SKPD 44 Satker Blud	44 Laporan	44 Laporan	100%	44 Laporan	44 Laporan	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/ Kota	Jumlah Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	Koordinasi, Fasilitasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi	Jumlah dokumen hasil koordinasi, fasilitasi, dan penyelesaian Tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi daerah	4 Dokumen	4 Kasus	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
	Penunjang Urusan Pemerintah Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase belanja bantuan keuangan, dana darurat dan dana tak terduga daerah yang dialokasikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tw empat tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perbitraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Analisis Pemerataan dan Pelaksanaan Pembagian Dalam Pokok and Bunga Pinjaman Daerah	Laporan Analisis Pemerataan dan Pelaksanaan Pembagian Dalam Pokok and Bunga Pinjaman Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Analisis Perencanaan dan Pengelolaan Resiko Keuangan	Jumlah Laporan hasil analisis perencanaan dan pengelolaan risiko keuangan	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%
	Pengelolaan Data Daerah dan Membuat	Jumlah Laporan hasil Pengelolaan Data daerah dan Membuat	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%
	Pengelolaan Data Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan hasil Pengelolaan Data Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%
	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase sistem informasi keuangan daerah yang dipelihara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan sistem informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	44 Orang	1 Sistem	44 Orang	44 Orang	100%	44 Orang	44 Orang	100%
	PENGELOLAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Penyimpanan Laporan SKPD yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Bulan lalu 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Persentase Laporan SKPD yang disusun sesuai ketentuan/Laporan BMD yang disusun sesuai ketentuan - Persentase Penatausahaan BMD - Persentase luas tanah Pemkab yang bersertifikat	100% 30% 70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyusunan Standard Harga	Jumlah SSH yang disusun	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	100%			100%
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil pengamanan Barang Milik Daerah	2 Laporan	327 Bidang	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	214 Laporan	214 Laporan	100%
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian pengelolaan BMD	12 Laporan	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	100%	312 Laporan	312 Laporan	100%
	Pelaporan dalam Rangka Penyelesaian Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan hasil rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan laporan Barang Milik daerah	36 Laporan	1 Dokumen 178 Bidang	1 Laporan	1 Laporan	100%	36 Laporan	36 Laporan	100%
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pertumbuhan Pajak daerah dan Retribusi Daerah	7%	27,12%	5%	27,12%	100%	5%	5%	100%
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan	Penerimaan Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	6,05%	27,12%	5%	27,12%	100%	5%	5%	100%
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil analisa pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	5 Dokumen	5 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	130 Unit	11 Jenis Pajak Daerah 1 Dokumen	130 Unit	130 Unit	100%	130 Unit	130 Unit	100%
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	14000 OP/SP	1 Laporan	1 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan	1 Dokumen ,	1 Laporan	1 Laporan ,	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOP nya	14.000 OP	746442 Lembar	14.000 OP	14.00 OP	100,00%	14.000 OP	14.000 OP	100%
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah doldumen ketetapan pajak daerah	12 Dokumen	2650 WP	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	4000 Dokumen	4000 Dokumen	100%
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	11 Layanan	650 WP	750 Layanan	765 Layanan	102,00%	750 Layanan	750 Layanan	100%
	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	5 Dokumen	Rp171.139.000	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
	Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	3 Dokumen	Rp38.598.000.000	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
					Target Kerja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Kerja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	8 OPD	1 Laporan	1 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	-	-	-	-	4 Laporan	4 Laporan	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan pelayanannya, Perangkat Daerah mengampu 6 Indikator. Dari 6 indikator tersebut, semuanya berstatus tercapai. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian/ketidaktercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Monitoring dan Evaluasi serta penagihan pajak;
2. Penyampaian Laporan Keuangan Daerah yang tepat waktu;
3. Pembinaan pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah.

Dalam rangka mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut, telah dilakukan upaya-upaya yang meliputi:

1. Dalam hal kurangnya kesadaran wajib pajak atas kewajibannya sehingga perlu dilakukan penagihan serta monitoring dan evaluasi;
2. Bagi OPD yang penyusunan Laporan Keuangannya belum tepat waktu dilakukan pendampingan agar tersusun tepat waktu;
3. OPD yang belum tertib administrasi penatausahaan keuangan daerah dilakukan monitoring dan evaluasi ke lapangan.

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK LPPD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
URUSAN PERTANAHAN												
1	Persentase Tanah Yang Bersertifikat		IKK	43.14%	50.72%	58.30%	65.88%		68,68%	72%	76%	
2	Prosentase kepastian hukum, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah		IKK						-	-		
URUSAN KEUANGAN												
1	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah / Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD)		LPPD						15,57%			
2	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan		IKK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
3	Persentase pertumbuhan PAD		IKK	4,19%	4,24%	4,29%	4,34%		12,36%	5%	7%	
4	Persentase pertumbuhan Pajak dan Retribusi		IKK	5%	5%	5%	5%		8,38%	5%	6,55	
5	Penetapan APBD tepat waktu		IKK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Persentase Kesesuaian Program dalam APBD dengan RKPD		IKK	>90%	>90%	>90%	>90%	>90%	>90%	>90%	>90%	
7	Persentase penerbitan SP2D tepat waktu		IKK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8	Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai dengan SAP yang terselesaikan tepat waktu		IKK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
9	Tingkat penyerapan DAK dan Bantuan Keuangan Provinsi		IKK	100%	100%	100%	100%	%	93,43%	100%	100%	
10	Jumlah Pendapatan BUMD yang disetor ke Kas Daerah		IKK	NA	NA	NA	NA	18,112 miliar	18,112 miliar	-		
11	Persentase satker yang telah mengimplementasikan SIMDA BMD		IKK	100%	100%	100%	100%	100%	-	-		

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK LPPD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
12	Persentase Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan		LPPD	NA	NA	NA	NA	28%	30,06%			
13	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)		LPPD	NA	NA	NA	NA	%	61,98%			
14	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD		LPPD	NA	NA	NA	NA	%	5,00%			
15	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD		LPPD	NA	NA	NA	NA	%	1,00%			
16	Persentase SILPA		LPPD	NA	NA	NA	NA	%	2,31%			

*) Kolom 3 diisi berdasarkan IKK outcome dalam lampiran Permendagri 18/2020

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan urusan pemerintahan dalam 2 urusan, yaitu urusan Pertanahan dan Urusan Keuangan. Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2025-2029, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk tahun 2026 mencakup 2 urusan tersebut. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah diantaranya adalah:

1. Belum optimalnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah yang berimplikasi pada rendahnya kemandirian keuangan daerah;
2. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah terutama aset tanah yang bersertifikat.

Permasalahan tersebut, jika tidak diselesaikan dapat menjadi *constraint* dalam pencapaian visi dan misi Bupati maupun capaian indikator lainnya. Beberapa dampak dari adanya permasalahan dan hambatan tersebut meliputi:

1. Ketergantungan anggaran terhadap pemerintah pusat.
2. Belum ada kepastian hukum terhadap tanah Pemkab yang belum bersertifikat.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi, peningkatan kualitas birokrasi, dan meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan pengguna layanan akan meningkatkan kebutuhan akan adanya penyediaan produk layanan yang semakin baik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi-inovasi dalam menunjang peningkatan pelayanan publik secara kontinyu. Tantangan dalam meningkatkan rasio kemandirian daerah yaitu target peningkatan pendapatan daerah dalam upaya mendorong pada perwujudan kemandirian daerah memberikan motivasi besar bagi BPPKAD untuk membangun strategi yang efektif dalam meningkatkan potensi-potensi daerah. Sedangkan peluang dalam meningkatkan rasio kemandirian daerah adalah besarnya potensi-potensi pendapatan daerah yang belum terolah secara optimal memberikan peluang bagi BPPKAD untuk lebih kreatif dalam melakukan penggalian sumber-sumber pendapatan daerah.

Berdasarkan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan tersebut, dapat diinventarisasi beberapa isu strategis. Inventarisasi isu-isu strategis tahun 2025 didapatkan dari hasil analisis

kondisi internal dan eksternal Kabupaten Banjarnegara sampai dengan tahun 2023. Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan pembangunan. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2025, sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah yang berimplikasi pada rendahnya kemandirian keuangan daerah;
2. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan asset daerah terutama asset tanah yang bersertifikat.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Tahun 2026 merupakan pelaksanaan tahun pertama RPJMD Tahun 2025-2029. Dalam RPJMD Tahun 2025-2029, prioritas arah kebijakan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2026 yaitu pemantapan sistem dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan keadilan serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Program, Kegiatan dan Sub kegiatan dalam mendukung tugas dan fungsi BPPSAD adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 BPPKAD Kabupaten Banjarnegara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENATAUSAHAAN TANAH		Persentase Luas Tanah Perkotaan yang bersertifikat	75%	**100.000.000**	**PROGRAM PENATAUSAHAAN TANAH**		Persentase Luas Tanah Perkotaan yang bersertifikat	75%	**100.000.000**	
	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten / Kota		Persentase dokumen perencanaan penggunaan tanah perkotaan yang disusun	100%	**100.000.000**	**Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten / Kota**		Persentase dokumen perencanaan penggunaan tanah perkotaan yang disusun	100%	**100.000.000**	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah		Jumlah Laporan Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam satu Kabupaten/ Kota	12 Laporan	100.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah		Jumlah Laporan Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam satu Kabupaten/ Kota	12 Laporan	100.000.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	**18.941.318.624**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	**18.941.318.624**	
	Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi, dan Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja OPD yang disusun tepat waktu	10 Dokumen	**15.000.000**	**Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi, dan Kinerja Perangkat Daerah**		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja OPD yang disusun tepat waktu	10 Dokumen	**15.000.000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	7.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	7.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (LKPJ)		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja BKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (LKPJ)	10 Dokumen	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (LKPJ)		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja BKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja BKPD	10 Dokumen	7.500.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang tersedia	100%	**15.589.636.218**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang tersedia	100%	**15.589.636.218**	
	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 Orang	15.361.836.118	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 Orang	15.361.836.118	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	150 Dokumen	204.000.100	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	150 Dokumen	204.000.100	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah dokumen Laporan keuangan bulanan/ triwulan dan semesteran, SKPD dan Laporan Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Dokumen	4.200.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah dokumen Laporan keuangan bulanan/ triwulan dan semesteran SKPD dan Laporan Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Dokumen	4.200.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase sumber daya aparatur pengelola keuangan yang paham pelaksanaan keuangan	100%	**20.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		Persentase sumber daya aparatur pengelola keuangan yang paham pelaksanaan keuangan	100%	**0**	
	Mendengar Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah orang yang mengikuti bimtek implementasi Peraturan Perundang-undangan	0 Orang	20.000.000	Mendengar Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah orang yang mengikuti bimtek implementasi Peraturan Perundang-undangan	0 Orang	0	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	100%	**330.000.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	100%	**330.000.000**	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Paket	20.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Paket	20.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 Paket	280.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 Paket	280.000.000	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah		Persentase pemanfaatan barang BMD	100%		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**		Persentase pemanfaatan barang BMD	100%		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					**Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	23 Unit		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	23 Unit		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase jasa pelayanan umum kantor, surat menyurat, jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang tersedia	100%	**918.479.406**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		Persentase jasa pelayanan umum kantor, surat menyurat, jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang tersedia	100%	**918.479.406**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	349.958.906	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	349.958.906	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	568.520.500	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	568.520.500	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemeliharaan alkins dan prasaran kantor yang terlaksana	100%	**200.000.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		Persentase pemeliharaan alkins dan prasaran kantor yang terlaksana	100%	**200.000.000**	
	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	30 Unit	100.000.000	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	30 Unit	100.000.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah gedung dan peralatan kantor yang dipelihara	30 Unit	100.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah gedung dan peralatan kantor yang dipelihara	30 Unit	100.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN		**Persentase Belanja Belanja Daerah**	100%	**445.473.893.500**	**PROGRAM PENGELOLAAN**		**Persentase Belanja Belanja Daerah**	100%	**445.473.893.500**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	KEUANGAN DAERAH					**KEUANGAN DAERAH**					
			Persentase realisasi dana transfer daerah	97%				**Persentase realisasi dana transfer daerah**	97%		
			Persentase OPD yang Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan SKPD sesuai standar	33%				**Persentase OPD yang Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan SKPD sesuai standar**	33%		
			Persentase Penyelesaian APBD sesuai ketentuan	100%				**Persentase Penyelesaian Penggunaan yang tepat waktu**	100%		
			Konsistensi Program dalam APBD dg yang ada di RKPD	97				**Konsistensi Program dalam APBD dg yang ada di RKPD**	97%		
	Koordinasi dan Penyusunan Rancana Anggaran Daerah		*Persentase dokumen Penganggaran daerah yang tersusun*	100%	862.640.000	**Koordinasi dan Penyusunan Rancana Anggaran Daerah**		*Persentase dokumen Penganggaran daerah yang tersusun*	100%	862.640.000	
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		*Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun*	2 Dokumen	38.000.000	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		*Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun*	2 Dokumen	38.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		*Jumlah dokumen perubahan KUA dan PPAS yang disusun*	2 Dokumen	38.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		*Jumlah dokumen perubahan KUA dan PPAS yang disusun*	2 Dokumen	38.000.000	
	Koordinasi, Penyusunan, dan Verifikasi RKA SKPD		*Jumlah RKA SKPD yang diverifikasi*	44 Dokumen	8.000.000	Koordinasi, Penyusunan, dan Verifikasi RKA SKPD		*Jumlah RKA SKPD yang diverifikasi*	44 Dokumen	8.000.000	
	Koordinasi, Penyusunan, dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD		*Jumlah Perubahan RKA SKPD yang diverifikasi*	44 Dokumen	8.000.000	Koordinasi, Penyusunan, dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD		*Jumlah Perubahan RKA SKPD yang diverifikasi*	44 Dokumen	8.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		*Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD*	2 Dokumen	678.640.000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		*Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD*	2 Dokumen	678.640.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		Jumlah Dokumen Rapercik dan Ripperbup Perubahan APBD	4 Dokumen	72.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		Jumlah Dokumen Rapercik dan Ripperbup Perubahan APBD	4 Dokumen	72.000.000	
	Pembinaan Pelaksanaan Pengelolaan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah orang yang mengikuti pembinaan pengelolaan Daerah pemerintah Kabupaten/Kota	44 Orang	20.000.000	Pembinaan Pelaksanaan Pengelolaan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah orang yang mengikuti pembinaan pengelolaan Daerah pemerintah Kabupaten/Kota	44 Orang	20.000.000	
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Persentase capaian penerbitan SP2D dan penyerapan belanja daerah serta pengelolaan dana transfer	100%	**300.000.000**	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**		Persentase capaian penerbitan SP2D dan penyerapan belanja daerah serta pengelolaan dana transfer	100%	**300.000.000**	
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		Jumlah dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	40.320.000	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		Jumlah dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	40.320.000	
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penertiban Anggaran Kas dan BPD		Jumlah Dokumen hasil pengendalian dan Penertiban dan BPD	4 Dokumen	18.000.000	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penertiban Anggaran Kas dan BPD		Jumlah Dokumen Hasil pengendalian dan Penertiban dan BPD	4 Dokumen	18.000.000	
	Koordinasi Fasilitasi, Asistensi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		Jumlah dokumen hasil Koordinasi Fasilitasi, Asistensi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	9 Dokumen	15.000.000	Koordinasi Fasilitasi, Asistensi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		Jumlah dokumen hasil Koordinasi Fasilitasi, Asistensi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	9 Dokumen	15.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan		Jumlah laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Mutasi Kas, dan Pelaksanaan	12 Laporan	66.679.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan		Jumlah laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Mutasi Kas, dan	12 Laporan	66.679.200	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Penghitungan Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Penatausahaan/ Penerimaan dan Penyetoran Pertunjangan Pihak Ketiga (PFK)		Penerimaan/ Penerimaan dan Penyetoran Pertunjangan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka penyusunan laporan laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Penerimaan/ Penerimaan dan Penyetoran Pertunjangan Pihak Ketiga (PFK)			Penghitungan Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Penerimaan/ Penerimaan dan Penyetoran Pertunjangan Pihak Ketiga (PFK)		Pelaksanaan Penerimaan/ Penerimaan dan Penyetoran Pertunjangan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka penyusunan laporan laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Penerimaan/ Penerimaan dan Penyetoran Pertunjangan Pihak Ketiga (PFK)			
	Pembinaan dan Pengawasan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota		Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Pengawasan Keuangan pemerintah Kabupaten/Kota	44 Orang	60.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota		Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Pengawasan Keuangan pemerintah Kabupaten/Kota	44 Orang	60.000.000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Penerimaan dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang disusun dan kasie keuangan daerah yang dilaksanakan	100%	**360.000.000**	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**		Penerimaan dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang disusun dan kasie keuangan daerah yang dilaksanakan	100%	**360.000.000**	
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi dan Penyetoran dan Pengeluaran Kas Daerah		Jumlah laporan Hasil koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan	25.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi dan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah		Jumlah laporan Hasil koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan	25.000.000	
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan, dan Semesteran		Jumlah Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulan dan semesteran	4 Laporan	20.000.000	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan, dan Semesteran		Jumlah Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulan dan semesteran	4 Laporan	20.000.000	
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan		Jumlah Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi	44 Laporan	70.000.000	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan		Jumlah Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi	44 Laporan	70.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Keuangan Pemerintah Daerah					Keuangan Pemerintah Daerah					
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/ Kota		Jumlah Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	135.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/ Kota		Jumlah Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	135.000.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah		Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian Tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	4 Dokumen	10.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah		Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian Tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	4 Dokumen	10.000.000	
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase belanja bantuan keuangan, dana darurat dan dana bagi hasil daerah yang disalurkan	100%	**444.004.953.000**	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**		Persentase belanja bantuan keuangan, dana darurat dan dana bagi hasil daerah yang disalurkan	100%	**444.004.953.000**	
	Analisis Pemrosesan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Hasil Analisis Pemrosesan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	850.000.000	Analisis Pemrosesan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Hasil Analisis Pemrosesan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	850.000.000	
	Analisis Pemrosesan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		Jumlah Laporan hasil analisis pemrosesan dan penyaluran bantuan keuangan	4 Laporan	405.154.953.000	Analisis Pemrosesan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		Jumlah Laporan hasil analisis pemrosesan dan penyaluran bantuan keuangan	4 Laporan	405.154.953.000	
	Pengelolaan Dana Darurat dan Monitoring		Jumlah Laporan hasil Pengelolaan Dana darurat dan Monitoring	4 Laporan	8.000.000.000	Pengelolaan Dana Darurat dan Monitoring		Jumlah Laporan hasil Pengelolaan Dana darurat dan Monitoring	4 Laporan	8.000.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota		Jumlah Laporan hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	4 Laporan	35.000.000.000	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota		Jumlah Laporan hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	4 Laporan	35.000.000.000	
	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		Penerapan sistem informasi keuangan daerah yang dipelihara	100%	145.000.000	**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**		Penerapan sistem informasi keuangan daerah yang dipelihara	100%	145.000.000	
	Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota		Jumlah orang yang mengikuti pemeliharaan sistem informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	44 Orang	145.000.000	Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota		Jumlah orang yang mengikuti pemeliharaan sistem informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	44 Orang	145.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Penerimaan Penyusunan Laporan BMD yang tepat waktu	100%	**950.000.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**		Penyelesaian Penyusunan Laporan BMD yang tepat waktu	100%	**950.000.000**	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah		Penerimaan dokumen pengelolaan BMD yang disusun Penerimaan Pemanfaatan BMD	100% 100%	**950.000.000**	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**		Penerimaan dokumen pengelolaan BMD yang disusun	100% 100%	**950.000.000**	
	Penyusunan Standar Harga		Jumlah SSH yang disusun	2 Dokumen	25.000.000	Penyusunan Standard Harga		Jumlah SSH yang disusun	2 Dokumen	25.000.000	
	Pengamanan Barang Milik Daerah		Jumlah laporan hasil pengamanan Barang Milik Daerah	4 Laporan	250.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah		Jumlah laporan hasil pengamanan Barang Milik Daerah	4 Laporan	250.000.000	
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian pengelolaan BMD	312 Laporan	65.000.000	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian pengelolaan BMD	312 Laporan	65.000.000	
	Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan hasil rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan laporan Barang Milik daerah	36 Laporan	610.000.000	Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan hasil rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan laporan Barang Milik daerah	36 Laporan	610.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN		Penerimaan Pemutakhiran Pajak daerah dan Retribusi Daerah	6,39%	2.393.497.630	**PROGRAM PENGELOLAAN**		Penerimaan Pemutakhiran Pajak daerah dan Retribusi Daerah	6,39%	2.393.497.630	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Bebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	PENDAPATAN DAERAH					**PENDAPATAN DAERAH**					
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan		Penerbitan Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	8%	2.281.807.030	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan**		Penerbitan Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	8%	2.281.807.030	
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah dokumen hasil analisa pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah.	5 Dokumen	14.840.000	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah dokumen hasil analisa pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah.	5 Dokumen	14.840.000	
	Penyuluhan dan Pemberlakuan Kebijakan Pajak daerah		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberlakuan Kebijakan Pajak daerah	4 Laporan	1.045.349.510	Penyuluhan dan Pemberlakuan Kebijakan Pajak daerah		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberlakuan kebijakan Pajak daerah	4 Laporan	1.045.349.510	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	150 Unit	138.500.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	150 Unit	138.500.000	
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	349.414.200	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	349.414.200	
	Pengolahan, Penelitian, dan Pelayanan Basis Data Pajak Daerah		Jumlah laporan hasil Pengolahan, Penelitian, dan Pelayanan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan	60.000.000	Pengolahan, Penelitian, dan Pelayanan Basis Data Pajak Daerah		Jumlah laporan hasil Pengolahan, Penelitian, dan Pelayanan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan	60.000.000	
	Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB		Jumlah objek pajak yang dikecualikan NJOP nya	14.000 OP	25.000.000	Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB		Jumlah objek pajak yang dikecualikan NJOP nya	14.000 OP	25.000.000	
	Penetapan Wajib Pajak Daerah		Jumlah dokumen ketetapan pajak daerah	4000 Dokumen	24.998.470	Penetapan Wajib Pajak Daerah		Jumlah dokumen ketetapan pajak daerah	4000 Dokumen	24.998.470	
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	11 Layanan	302.039.250	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	11 Layanan	302.039.250	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	5 Dokumen	90.225.800	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	5 Dokumen	90.225.800	
	Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah		Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	3 Dokumen	5.000.000	Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah		Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	3 Dokumen	5.000.000	
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	66.285.700	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	66.285.700	
	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	4 Laporan	65.000.000	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	4 Laporan	65.000.000	
	JUMLAH				**465.945.756.154**					**465.810.756.154**	

Berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2024, belum terdapat hal yang menjadi catatan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan musrenbang kecamatan dan forum konsultasi publik telah disampaikan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui aplikasi SIPD. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	**Program Pengelolaan Keuangan Daerah** *Kegiatan Penunjang Urusan Keuangan* *Pengelolaan Keuangan daerah* Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Banjar negara	Persentase Penyusunan Penganggaran yang tepat waktu	-- usulan	

2.6. Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan hasil reses anggota DPRD, melalui aplikasi SIPD telah disampaikan usulan program dan kegiatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Validasi
1	**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**	Banjar negara	Persentase Penyusunan Penganggaran	433 usulan	

	Kegiatan *Penanjang Urusan* *Kewenangan* *Pengelolaan* *Keuangan daerah* Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		yang tepat waktu		

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait denga tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem pembangunan nasional menggamantikan bahwa perencanaan pembangunan disserah merupakan satu kesatuan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan nasional.

Telaah terhadap RPJMN Tahun 2025 – 2029 , arah kebijakan umum pembangunan nasional pada periode jangka menengah ke-1 (Tahun 2025 – 2029) adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang Bersatu, berdaulat, maju dan berkelanjutan. Indonesia akan menjadi negara dengan pendapatan per kapita setara dengan negara-negara maju yang disertai kemiskinan yang menurun dan ketimpangan berkurang, negara yang berdaulat dan berperan penting didunia internasional, negara yang memiliki sumber daya manusia yang unggul serta negara yang berkomitmen menempatkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan.

Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat ditunjukkan oleh makin tinggi dan meratanya tingkat pendapatan masyarakat dengan jangkauan lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh; meningkatnya kualitas sumber daya manusia untuk membentuk manusia produktif, antara lain ditandai oleh meningkat dan meratanya akses, tingkat kualitas, dan relevansi pendidikan seiring dengan makin efisien dan efektifnya manajemen pelayanan pendidikan; meningkatnya kapasitas riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja;terwujudnya kesetaraan gender; Sejalan dengan tingkat kemajuan bangsa, sumber daya manusia Indonesia diharapkan berkarakter cerdas, tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beragama, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran terhadap keberagaman, bergotong royong, dan berorientasi Iptek. Kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat makin mantap dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan sehingga

masyarakat mampu berperan sebagai penggerak bagi konsep pembangunan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.

Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri, pertanian, kelautan dan sumber daya alam, dan sektor jasa. Lembaga dan pranata ekonomi telah tersusun, tertata, serta berfungsi dengan baik. Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan, dan kemampuan iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang efisien dan produktivitas yang tinggi, serta berkembangnya usaha dan investasi dari perusahaan-perusahaan Indonesia di luar negeri termasuk di zona ekonomi eksklusif dan lautan bebas dalam rangka peningkatan perekonomian nasional. Sejalan dengan itu, pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2026 mencapai kesejahteraan setara dengan negara-negara berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin yang makin rendah. Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya jaringan transportasi pos dan telematika yang andal bagi seluruh masyarakat yang menjangkau seluruh wilayah NKRI; tercapainya elektrifikasi perdesaan dan elektrifikasi rumah tangga; serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel sehingga terwujud kota tanpa permukiman kumuh.

BPPKAD Kabupaten Banjarnegara merupakan lembaga yang bertugas membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan perencanaan Anggaran daerah secara sinergi dan selaras dengan kebijakan nasional.

1.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dengan telah ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang diikuti dengan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagai pedoman penyusunan rencana kerja. Visi pembangunan Kabupaten Banjarnegara tahun 2025-2029 adalah :

"MEWUJUDKAN BANJARNEGARA YANG MAJU DAN SEJAHTERA"

Prioritas pembangunan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 yang didukung oleh BPPKAD Kabupaten Banjarnegara sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya adalah pengelolaan keuangan daerah melalui perencanaan yang terukur dan sinergi dengan penganggaran, penanganan pertanahan, peningkatan kualitas aparatur sipil negara. Prioritas pembangunan tersebut mendukung pencapaian misi kelima RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029 yaitu Mewujudkan Pemerintahan yang baik dan transparan yang merupakan fondasi utama dalam menciptakan pelayanan publik yang efektif dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Tujuan misi ini adalah membangun tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat, menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas,transparansi dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan publik akan terus diperkuat.

Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 berupa pengelolaan keuangan daerah melalui peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian,pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah maka tujuan Renja BPPKAD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 adalah mewujudkan reformasi tata kelola keuangan, dengan indikator tujuan yaitu rasio kemandirian keuangan daerah. Untuk tujuan tersebut, maka sasaran Rencana Kerja (Renja) BPPKAD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah;
b. Meningkatnya kemandirian daerah.

1.3. Program dan Kegiatan

Program, Kegiatan dan sub kegiatan pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 kami sajikan sebagai berikut:

Tabel 3.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Anggaran BPPKAD Tahun 2026

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pilihan Daerah	Nomenklatur Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	2026	2027	
3	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
3.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN												
3.10.10	PROGRAM PENATAUSAHAAN TANAH		Meningkatnya tertibnya pengelolaan barangan dan aset daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Luas Tanah Publik yang teridentifikasi			99,50%			100.000.000		Mengerikan Kelainan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
3.10.10.01	Penggunaan Tanah yang Dimanfaatkan dalam satu Daerah Kabupaten / Kota		Meningkatnya tertibnya pengelolaan barangan dan aset Daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase kelancaran pemanfaatan penggunaan tanah, pemilik yang dimaksud			100,00%	100.000.000		Mengerikan Kelainan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
3.10.10.01.001	Koordinasi dan Pelaksanaan Pemanfaatan Penggunaan Tanah		Meningkatnya kualitas pengelolaan barangan dan aset daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah Laporan Koordinasi dan pelaksanaan Pemanfaatan Penggunaan Tanah dalam satu Kabupaten/ Kota			12 Laporan		100.000.000		Mengerikan Kelainan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
9	URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
9.01	KEUANGAN												
9.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pelayanan Administrasi Pelaksanaan			100%					Mengerikan Kelainan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
9.01.01.01	Penyusunan, Pengenggaraan, Evaluasi, dan Hasil Penegkat Daerah		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Pemenuhan dan Laporan Kinerja OPD yang disusun tepat waktu			20 Dokumen	10.000.000		Mengerikan Kelainan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
9.01.01.03.001	Pengelolaan Administrasi Penegkat Daerah		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah Dokumen Pemenuhan Penegkat Daerah			12 Dokumen		7.500.000		Mengerikan Kelainan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
9.01.01.03	Koordinasi dan Pelaporan		Meningkatnya kinerja	Semua Kabupaten/		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan			12 Dokumen		7.500.000		Mengerikan Kelainan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Misi/isu Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.) 2027	Keterangan
					Capaian Program	Kelompok Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program	Kelompok Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	2026		
01.00.4	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (ILPP)		peningkatan pemerintahan daerah	Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Dokumen Evaluasi Kinerja (EKP) dan Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (ILPP)							Biaya Untuk Perkantoran Yang Berkualitas dan Terbaudikan
5.05.01.2.01	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**Kota Bitung/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**			Persentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang tersedia			100%	12.245.826.223		Mengerluar Kebutuhan Biaya Untuk Perkantoran Yang Berkualitas dan Terbaudikan
5.05.01.2.02.0901	Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Semua Kelurahan/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN				61 Orang		2.281.826.118		Mengerluar Kebutuhan Biaya Untuk Perkantoran Yang Berkualitas dan Terbaudikan
5.05.01.2.02.0902	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pelaporan/ Verifikasi Keuangan (ILPP)		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Semua Kelurahan/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen pertanggungjawaban dan pelaporan/verifikasi keuangan SKPD				131 Dokumen		204.000.000		Mengerluar Kebutuhan Biaya Untuk Perkantoran Yang Berkualitas dan Terbaudikan
5.05.01.2.02.0903	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Semua Kelurahan/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Laporan Keuangan bulanan/ triwulan dan semesteran SKPD dan Laporan Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD				4 Dokumen		4.000.000		Mengerluar Kebutuhan Biaya Untuk Perkantoran Yang Berkualitas dan Terbaudikan
5.05.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**Semua Kelurahan/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**			**Persentase usulan data pegawai pengelola keuangan yang pilihan pemberhentian & kenaikan**			**100%**	**0**		**Mengerluar Kebutuhan Biaya Untuk Perkantoran Yang Berkualitas dan Terbaudikan**
5.05.01.2.05.01.2	Pelatihan Teknis Pengelolaan Pendapatan		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan	Semua Kelurahan/ Kota, Semua Kecamatan,	Jumlah orang yang mengikuti bimtek pengelolaan				5 Orang		0		Mengerluar Kebutuhan Biaya Untuk Perkantoran

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Perkiraan Biaya (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program	Kelompok Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program	Kelompok Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	2026	2027	
	Pemerintahan Daerah		pemerintahan daerah	Semua Kabupaten		Perangkat Perundang-undangan							Yang Berkewajiban dan Bertanggung
1.02.0 1.2.06	**Administrasi Umum Pemerintah Daerah**		**Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**			**Penyelesaian Pelayanan Administrasi Umum Pemerintah**			**100%**	**220.980.0 00**		**Mengerahkan Kekuasaan Ekonomi Untuk Pertanggungjawaban Yang Berkewajiban dan Bertanggung**
1.02.0 1.2. 06.09 3	Penyelesaian Perjalanan Dan Pertanggungan Gaktor		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah paket pekerjaan dan perlengkapan kantor yang disediakan			10 Paket		20.000.000		Mengerahkan Kekuasaan Ekonomi Untuk Pertanggungjawaban Yang Berkewajiban dan Bertanggung
1.02.0 1.2. 06.09 4	Penyediaan Jasa Tenaga Kantor		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah paket Tenaga kantor yang disediakan			12 Paket		240.000.00 0		Mengerahkan Kekuasaan Ekonomi Untuk Pertanggungjawaban Yang Berkewajiban dan Bertanggung
1.02.0 1.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			**Pemenuhan pemeliharaan jumlah BMD**			**100%**	**0**		**Mengerahkan Kekuasaan Ekonomi Untuk Pertanggungjawaban Yang Berkewajiban dan Bertanggung**
1.02.0 1.2. 07.09 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan			5 Unit		0		Mengerahkan Kekuasaan Ekonomi Untuk Pertanggungjawaban Yang Berkewajiban dan Bertanggung
1.02.0 1.2. 07.09 6	Pengadaan Perlengkapan dan Mesin Lainnya		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan			23 Unit		0		Mengerahkan Kekuasaan Ekonomi Untuk Pertanggungjawaban Yang Berkewajiban dan Bertanggung
1.02.0 1.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			**Penyediaan gaji pokoknya sesuai bulan, uang lembur, dan honorarium/j asa/uang**			**100%**	**920.675.0 00**		**Mengerahkan Kekuasaan Ekonomi Untuk Pertanggungjawaban Yang Berkewajiban dan Bertanggung**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pelaksana Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Satuan Kinerja			Target Capaian Kinerja			Data terdukung (Rp.) 2026	Realisasi Kinerja (Rp.) 2025	Keterangan
					Capaian Program	Rincian Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program	Rincian Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
							dst dan Contoh yang Lengkap						
5.02.01 1.2-08.09 2	Penyelenggaraan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nama Kabupaten/ Kota, Nama Kecamatan, Nama Kelurahan		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan			12 Laporan		[illegible]		Mengandung Kebaruan Ekonomi Untuk Perkembangan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
5.02.01 1.2-08.09 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nama Kabupaten/ Kota, Nama Kecamatan, Nama Kelurahan		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan		380.320.000		Mengandung Kebaruan Ekonomi Untuk Perkembangan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
5.02.01 1.2-09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**Nama Kabupaten/ Kota, Nama Kecamatan, Nama Kelurahan**			**Persentase pemeliharaan aset dan gedung kantor yang terfasilitasi**			**100%**	**[illegible]**		**Mengandung Kebaruan Ekonomi Untuk Perkembangan Yang Berkualitas dan Berkeadilan**
5.02.01 1.2-09.00 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nama Kabupaten/ Kota, Nama Kecamatan, Nama Kelurahan		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan biaya pajaknya			30 Unit		100.300.000		Mengandung Kebaruan Ekonomi Untuk Perkembangan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
5.02.01 1.2-09.03 0	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nama Kabupaten/ Kota, Nama Kecamatan, Nama Kelurahan		Jumlah gedung dan prasarana kantor yang dipelihara			30 Unit		150.000.000		Mengandung Kebaruan Ekonomi Untuk Perkembangan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
5.01.0 1.2	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**		**Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah**	**Nama Kabupaten/ Kota, Nama Kecamatan, Nama Kelurahan**	**Persentase Pemerintah OPD yang ingin meiliki**			**100%**					**Mengandung Kebaruan Ekonomi Untuk Perkembangan Yang Berkualitas dan Berkeadilan**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pelaksana Daerah	Rencana Hasil	Lokasi	Indikator Hasil			Target Capaian Hasil			Pagu Indikatif (Rp.)	Perkiraan Biaya (Rp.) 2027*	Keterangan
					Capaian Program	Rencana Aksi Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program	Kelurahan Aksi Kegiatan	Hasil Kegiatan	2026		
					Persentase warga desa tanpa Desa			100%					Mengetahui Kelurahan Element Untuk Pemerintahan Yang Berkualitas dan Berkualitas
					Persentase Penyelesaian Agenda Penanggung jawaban Pelaksanaan APBD yang tepat waktu			100%					Mengetahui Kelurahan Element Untuk Pemerintahan Yang Berkualitas dan Berkualitas
					Persentase Penyelesaian Penggunaan yang tepat waktu			100%					Mengetahui Kelurahan Element Untuk Pemerintahan Yang Berkualitas dan Berkualitas
					Rencana Program Belum APBD Rp yang ada di SKPD			100%					Mengetahui Kelurahan Element Untuk Pemerintahan Yang Berkualitas dan Berkualitas
X.XX.X X.X-X1	Koordinasi dan Penyelesaian Rencana Anggaran Daerah		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase Kelancaran Penggunaan daerah yang rencana			100%			Mengetahui Kelurahan Element Untuk Pemerintahan Yang Berkualitas dan Berkualitas
X.XX.X X.X-X1.XX X	Koordinasi dan Penyelesaian ECR dan PPKD		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah dokumen ECR dan PPKD yang disusun			2 Dokumen		00.000.000		Mengetahui Kelurahan Element Untuk Pemerintahan Yang Berkualitas dan Berkualitas
X.XX.X X.X-X1.XX X	Koordinasi dan Penyelesaian ECR dan Perubahan PPKD		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah dokumen perubahan ECR dan PPKD yang disusun			2 Dokumen		00.000.000		Mengetahui Kelurahan Element Untuk Pemerintahan Yang Berkualitas dan Berkualitas

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Fokus/Isu Daerah	Asumsi Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Target Output Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	2026		
5.03.0 2.2- 01.09 4	Koordinasi, Penyusunan, dan Verifikasi RKA SKPD		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah RKA SKPD yang diverifikasi			44 Dokumen		8.000.000		Menyediakan Kebutuhan Ekonomi Untuk Pemenuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
5.03.0 2.2- 01.09 4	Koordinasi, Penyusunan, dan Verifikasi Perubahan RKA SKPD		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah Perubahan RKA SKPD yang diverifikasi			44 Dokumen		8.000.000		Menyediakan Kebutuhan Ekonomi Untuk Pemenuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
5.03.0 2.2- 01.09 7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			2 Dokumen		5.000.000		Menyediakan Kebutuhan Ekonomi Untuk Pemenuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
5.03.0 2.2- 05.09 8	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Daerah tentang APBD dan Perubahan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah Dokumen Rancangan dan Rancangan Perubahan APBD			4 Dokumen		474.640.00 0		Menyediakan Kebutuhan Ekonomi Untuk Pemenuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
5.03.0 2.2- 03.09 2	Pembinaan Pelaksanaan Penggunaan Dana Komersial Kabupaten/Kota		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penggunaan Dana Komersial Kabupaten/Kota			44 Orang		10.000.000		Menyediakan Kebutuhan Ekonomi Untuk Pemenuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
5.03.0 2.2-02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			**Pemenuhan regulasi pemerintah BPKP dan pencegahan kelalaian daerah serta pengawasan dana transfer**			**100%**	**200.000.000**		**Menyediakan Kebutuhan Ekonomi Untuk Pemenuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.) 2027	Keterangan
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	2026		
6.02.02.2.02.001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah			12 Dokumen		43,320,800		Memperkuat Kelahiran Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
6.02.02.2.02.003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah Dokumen hasil pengendalian dan Penerbitan dan SPD			4 Dokumen		15.000.000		Memperkuat Kelahiran Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
6.02.02.2.02.005	Koordinasi Fasilitasi, Asistensi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah dokumen hasil Koordinasi Fasilitasi, Asistensi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya			5 Dokumen		15.000.000		Memperkuat Kelahiran Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
6.02.02.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Akhir Kas, dan Pelaksanaan Penunggung/ Penotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Akhir Kas, dan Pelaksanaan Penunggung/ Penotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka penyusunan laporan laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Akhir Kas, dan Pelaksanaan Penunggung/ Penotongan dan Penyetoran			18 Laporan		68.679.200		Memperkuat Kelahiran Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Potensi Daerah	Masalah Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Perkiraan Biaya (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	2026	2027	
						Pertanggung Hasil Lanjut (PHL)							
5.03.01.2.22.0201	Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota		Keterbatasnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Pemerintah, Semua Kelurahan		Jumlah yang yang mengikuti Perencanaan Pengelolaan Keuangan pemerintah Kabupaten/Kota			44 Orang		400.000.000		Mengerahkan Kelahiran Ekonomi Untuk Berpartisipasi Yang Berkualitas dan Berkeadilan
5.03.02.2.22.02	**Koordinasi dan Pelaksanaan Strategis dan Pelayanan Keuangan Daerah**		Keterbatasnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			**Persentase pelayanan administrasi dan pelayanan keuangan daerah yang dikelola dan kasa keuangan daerah yang dipertanggung**			**100%**	**200.000.000**		**Mengerahkan Kelahiran Ekonomi Untuk Partisipasi Yang Berkualitas dan Berkeadilan**
5.03.02.2.22.0202	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan dan Pengelolaan Aset Daerah		Keterbatasnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Pelaporan dan Pengelolaan Aset Daerah			12 Laporan		200.000.000		Mengerahkan Kelahiran Ekonomi Untuk Partisipasi Yang Berkualitas dan Berkeadilan
5.03.02.2.22.0203	Koordinasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Triwulan, dan Semesteran		Keterbatasnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD triwulan, semesteran dan semesteran			4 Laporan		200.000.000		Mengerahkan Kelahiran Ekonomi Untuk Partisipasi Yang Berkualitas dan Berkeadilan
5.03.02.2.22.0204	Koordinasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		Keterbatasnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkoordinasi			44 Laporan		200.000.000		Mengerahkan Kelahiran Ekonomi Untuk Partisipasi Yang Berkualitas dan Berkeadilan
5.03.02.2.22.0205	Koordinasi dan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan		Keterbatasnya kualitas pengelolaan	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan,		Jumlah Kebijakan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD			3 Perda/Perkada		200.000.000		Mengerahkan Kelahiran Ekonomi Untuk Partisipasi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pengam-pu/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Asumsi Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.) 2026	Prakiraan Maju (Rp.) 2027	Keterangan
					Capaian Program	Kolaborasi Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program	Kolaborasi Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
	Daerah lainnya Penanggungja-wab(1) Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan Kewenangan Perangkat Kepala Daerah lainnya Penyelaras Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota		Kewenangan dan aset daerah	Seluruh Kabupaten		Kabupaten/ Kota dan Kewenangan Perangkat Kepala daerah lainnya Penyelaras Penanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota							Yang Terkoneksi dan Terintegrasi
5.02.0 2.2-03.09 P	Kewenangan Kehutanan, dan Pengelolaan Taman Hutan Kemasyarakatan dan Taman Hutan Raya (Tahura)		Meningkatnya kualitas pengelolaan kewenangan dan aset daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah fasilitasi hasil inventarisasi, identifikasi, dan penyelesaian Tumbuhan perkembangbiakan dan Satwa dengan daerah			4 Dokumen		10.000.000		Mengembangkan Kebijakan Ekonomi Untuk Perlindungan Yang Berkualitas dan Terintegrasi
5.02.0 2.2-04	**Pengelolaan Ekonomi Kewenangan Pengelolaan Kewenangan Daerah**		Meningkatnya kualitas pengelolaan kewenangan dan aset daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			**Fasilitasi kelengkapan kualitas kewenangan, dan dokumen dan dana lagi kasih daerah yang diadakan**			**100%**	**444.264.000.000**		**Mengembangkan Kebijakan Ekonomi Untuk Perlindungan Yang Berkualitas dan Berkualitas**
5.02.0 2.2-04.03 A	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pengelolaan Cadangan Pokok dan Dengan Program Pemerintah Daerah		Meningkatnya kualitas pengelolaan kewenangan dan aset daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pengelolaan Cadangan Pokok dan Dengan Program Pemerintah Daerah			1 Laporan		400.000.000		
5.02.0 2.2-04.05 B	Analisis Perencanaan dan Pengelolaan		Meningkatnya kualitas pengelolaan	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan,		Jumlah Laporan hasil analisis perencanaan dan pelaksanaan kerjasama strategis			4 Laporan		423.154.000.000		Mengembangkan Kebijakan Ekonomi Untuk Perlindungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Asistensi Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Perkiraan Biaya (Rp.) 2027	Keterangan
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	2026		
	Bantuan Keuangan		keuangan dan aset daerah	Seluruh Kabupaten									
5.02.0 2.2-04.09 9	Pengelolaan Data Daerah dan Statistik		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua kelurahan		Jumlah Laporan hasil Pengelolaan Data Sensus dan Statistik			4 Laporan		2.500.000.000		Mengelolaan Kebutuhan Ekonomi Untuk Perkantoran Yang Berkualitas dan Berkeadilan
5.02.0 2.2-04.03 0	Pengelolaan Data Sigi Hasil Kabupaten/ Kota		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua kelurahan		Jumlah Laporan hasil Pengelolaan Data Sigi Hasil Kabupaten/ Kota			4 Laporan		85.000.000.000		Mengelolaan Kebutuhan Ekonomi Untuk Perkantoran Yang Berkualitas dan Berkeadilan
5.02.0 2.2-05	**Pengelolaan Data dan Informasi Aset Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			**Pemerintah daerah, informasi keuangan daerah yang digelolara**			**100%**	**140.000.000**		**Mengerluarkan Kebutuhan Ekonomi Untuk Perkantoran Yang Berkualitas dan Berkeadilan**
5.02.0 2.2-05.00 1	Pelaksanaan Survei, Inventasi Potensi Daerah Dalam Rangka Penyusun Daerah Kabupaten/ Kota		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah orang yang mengikuti pelatihan pada Informasi Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penyusun Daerah Kabupaten/Kota			40 Orang		140.000.000		Mengerluarkan Kebutuhan Ekonomi Untuk Perkantoran Yang Berkualitas dan Berkeadilan
5.02.0 2.2	**PENYUSUN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**		**Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah**	**Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Tersedianya Penyusunan Laporan BMD yang tepat waktu**			**100%**			**900.000.000**		**Mengerluarkan Kebutuhan Ekonomi Untuk Perkantoran Yang Berkualitas dan Berkeadilan**
5.02.0 2.2-01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**		**Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah**	**Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**			**Pemerintah daerah pengelolaan BMD yang disusun**			**100%**	**900.000.000**		**Mengerluarkan Kebutuhan Ekonomi Untuk Perkantoran Yang Berkualitas dan Berkeadilan**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Nomenklatur Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Perkiraan Maju (Rp.)	Kelompok
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	2026	2027	
5.02.0 5.0 01.09 1	Pelaksanaan Standard Harga		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah 1001 yang Rekomd			2 Dokumen		22 000 000		Mengelompokkan Kebutuhan Biaya Untuk Perlunakkan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
5.02.0 5.0- 01.09 9	Pengawasan Perang Milik Daerah		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah laporan hasil pengawasan Perang MDA Daerah			214 Laporan		200 000 000		Mengelompokkan Kebutuhan Biaya Untuk Perlunakkan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
5.02.0 5.0- 01.09 9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Perang Milik Daerah		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian pengelolaan MAD			310 Laporan		62 000 000		Mengelompokkan Kebutuhan Biaya Untuk Perlunakkan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
5.02.0 5.0- 01.01 1	Rekonsiliasi Antar Bangka Pelaporan Laporan Barang Milik Daerah		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah Laporan hasil rekonsiliasi Aset antara Pengguna Barang, Barang MDA Daerah			48 Laporan		120 000 000		Mengelompokkan Kebutuhan Biaya Untuk Perlunakkan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
5.02.0 4	**PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**		**Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Daerah**	**Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**			**8%**			**2.381.897. 020**		**Mengelompokkan Kebutuhan Biaya Untuk Perlunakkan Yang Berkualitas dan Berkeadilan**
5.02.0 4.2-01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan**		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			**Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**			**8%**	**2.381.897 .020**		**Mengelompokkan Kebutuhan Biaya Untuk Perlunakkan Yang Berkualitas dan Berkeadilan**
5.02.0 4.2- 01.09 2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Perancangan Peraturan Pajak Daerah		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah dokumen hasil analisa pajak daerah serta pengembangan pajak Daerah dan kebijakan pajak daerah.			2 Dokumen		24 000 000		Mengelompokkan Kebutuhan Biaya Untuk Perlunakkan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
5.02.0 4.2- 01.09 3	Pengelolaan dan Pengembangan		Meningkatnya kualitas pengelolaan	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan,		Jumlah Laporan Pelaporan Pengelolaan dan Pengembangan			4 Laporan		1 040 240 000		Mengelompokkan Kebutuhan Biaya Untuk Perlunakkan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.) 2027	Keterangan
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	2026		
	n Kebijakan Pajak daerah		kuangan dan set daerah	Semua Kelurahan		Kebijakan Pajak daerah							Yang Berkualitas dan Berkeadilan
5.02.04.2.01.004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan set daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah			130 Unit		136.500.000		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
5.02.04.2.01.005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan set daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah			12 Laporan		343.404.200		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
5.02.04.2.01.006	Pengelolaan, Pemeriksaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan set daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah laporan hasil Pengelolaan, Pemeriksaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah			12 Laporan		60.000.000		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
5.02.04.2.01.007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan set daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah objek pajak yang dinilai/di PBB-Nya			14.000 OP		25.000.000		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
5.02.04.2.01.008	Penetapan Wajib Pajak Daerah		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan set daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah dokumen ketetapan pajak daerah			4000 Dokumen		24.998.470		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
5.02.04.2.01.009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan set daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah			750 Layanan		602.039.250		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
5.02.04.2.01.011	Pengaduan Pajak Daerah		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan set daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengaduan pajak daerah			5 Dokumen		96.295.900		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan

Kode	Uraian/ Nilai Uraian/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Asumsi Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.) 2027	Keterangan
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	2026		
5.02.04.2.01.01.1	Pengelolaan Pemerintahan dan Pengawasan Pajak Daerah		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah			2 Dokumen		1.000.000		Mempertimbangkan Efektivitas Ekonomi Untuk Pertimbangan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
5.02.04.2.01.01.4	Pembinaan dan Pengawasan Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah			12 Laporan		65.289.700		Mempertimbangkan Efektivitas Ekonomi Untuk Pertimbangan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
5.02.04.2.01.01.5	Pelaksanaan Tugas Pemeriksaan Daerah		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Pemerintah Daerah			4 Laporan		60.000.000		Mempertimbangkan Efektivitas Ekonomi Untuk Pertimbangan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
	JUMLAH										665.849.7 66.289		

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program pada perangkat daerah merupakan program prioritas dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2023-2026 yang mengacu pada RPD Tahun 2023-2026. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah selanjutnya dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan.

Pagu yang tersedia untuk tahun anggaran 2024 sebesar Rp 482.340.000.000,00 digunakan untuk membiayai 5 program, 15 kegiatan, dan 3 sub kegiatan.

Pemilihan untuk masing-masing program/ kegiatan dapat di jabarkan sebagai berikut:

- **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

  Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 7 kegiatan yang dianalisis pada kegiatan:

  1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan;
     a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
     b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
  2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
     a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
     b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
     c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
  3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
     a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
  4) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
     a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
     b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
   a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
   b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
   a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
   b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
   c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
   b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

- **Program Pengelolaan Keuangan Daerah**

Program Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari 5 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan :

1) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, dengan sub kegiatan:
   a. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS;
   b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
   c. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD;
   d. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD;
   e. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD;
   f. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD;
   g. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
   h. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD;
   i. Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota;

2) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, dengan sub kegiatan:
   a. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah;
   b. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD;
   c. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya.
   d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
   e. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, dengan sub kegiatan :
   a. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah;
   b. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran;
   c. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
   d. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota;
   e. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah;
4) Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
   a. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah
   b. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan;
   c. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak;
   d. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota;
5) Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah.

s. Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.

- **Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dengan sub kegiatan yaitu:

a. Penyusunan Standar Harga;
b. Pengamanan Barang Milik Daerah;
c. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah;
d. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.

- **Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Dengan sub kegiatan yaitu:

a. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah;
b. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah;
c. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah;
d. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah;
e. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah;
f. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
g. Penetapan Wajib Pajak Daerah;
h. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah;
i. Penagihan Pajak Daerah;
j. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah;
k. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
l. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Kerja Perangkat Daerah selanjutnya menjadi platform operasional bagi Perangkat Daerah dalam menjalankan programnya dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah tahun 2025-2029. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026 dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disepakati.
2. Kerangka pendanaan dalam Renja Perangkat Daerah masih bersifat sementara, sehingga masih dimungkinkan terjadi perubahan pagu yang disebabkan oleh penguranagan, penambahan, dan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan maupun antar sub kegiatan dalam kerangka penyusunan anggaran secara terpadu dan berbasis kinerja.
3. Renja Perangkat Daerah menjadi acuan bagi Kepala Perangkat Daerah dan segenap jajarannya serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, serta menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal: 5 Agustus 2025

KEPALA BPPKAD
KABUPATEN BANJARNEGARA

ADITYA AGUS SATRIA, M.Ec.Dev,MA,Ak,CA
Pembina Tk.I
NIP. 198009032006011008

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Renja Dinas Komunikasi dan Informatika) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Dinas Komunikasi dan Informatika, yang disusun berpedoman kepada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dan RKPD.

Penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan yang diatur melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan pembentukan tim penyusun, penelaahan

Rancangan Akhir RKPD, pelaksanaan forum Dinas Komunikasi dan Informatika/lintas Dinas Komunikasi dan Informatika, hingga pada penyempurnaan berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang RKPD. Selain berpedoman pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dan RKPD, penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika juga mengacu pada Renja Kementerian/Lembaga terkait, serta Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi terkait. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2. Landasan Hukum

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Dinas komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Dinas komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 32);
28. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 Nomor 27).
29. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 64 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 64)

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun dengan maksud untuk:

a. Menjabarkan RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 ke dalam rencana program kegiatan prioritas Tahun 2026 yang diselaraskan dengan Sasaran dan program Renja K/L Tahun 2026 dan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;
b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerapan anggaran berbasis kinerja.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

a. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA-DPA dalam Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2026, yang dalam penyusunannya didahului dengan menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026;

b. Sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Tahun 2026;
c. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun berdasarkan sistematika yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika, serta sistematika dokumen Renja Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB 2 : HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, analisis kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, dan review terhadap Rancangan Akhir RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dan atau pokok-pokok DPRD.

BAB 3 : TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika, serta program dan kegiatan tahun 2026.

BAB 4 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dan sasaran RKPD.

BAB 5 : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 disusun untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika. Urusan yang menjadi kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika meliputi urusan Komunikasi dan informatika, Statistik dan Persandian.

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 terdiri dari 5 program, 11 kegiatan, dan 24 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 8.909.401.000,- dengan fokus utama pada Membangun infrastruktur serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta penyiaran melalui transformasi digital , sesuai dengan Visi Bupati Banjarnegara tahun 2023-2026 yaitu Banjarnegara Maju Berbasis Pertanian, untuk Misi nya, Dinkominfo melaksanakan Misi 3 yaitu Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab. Program/kegiatan/sub kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah yang meliputi :

1. Upaya integrasi antara berbagai aplikasi masih terkendala, disebabkan belum semua aplikasi atau SIM dibangun sesuai standar, lemahnya pengamanan jaringan informasi
2. Peran komunitas masyarakat sebagai mitra dalam penyebarluasan informasi seperti Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), Forum Komunikasi Media Tradisional (FK-Metra), dan Satuan Karya Pramuka Mitra Inovasi dan Literasi Teknologi Informatika (SAKA MILENIAL) yang belum optimal dalam rangka diseminasi informasi public
3. Kurangnya SDM Pengelola Data Statistik Sektoral dan Geospasial pada Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika
4. Masih kurangnya SDM di bidang Persandian

Dari 5 program, 11 kegiatan, dan 24 sub kegiatan yang dalam Renja Dinas Komunikasi dan Informatika tersebut, program/kegiatan/sub kegiatan yang disetujui untuk dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2025 terdiri dari 5 program, 11 kegiatan, dan 26 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 8.909.401.000,-

Pada Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2025, terjadi beberapa perubahan yang meliputi penambahan atau pengurangan pagu, penghapusan, penambahan atau pengurangan program/ kegiatan/ sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Perubahan pertama lebih kepada efisiensi mengubah rincian dalam Renja Dinas Komunikasi dan Informatika menjadi 5 program, 11 kegiatan, dan 24 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.8.494.320.780,-.

Perubahan yang kedua kemudian mengubah rincian dalam Renja Dinas Komunikasi dan Informatika menjadi 5 program, 11 kegiatan, dan 24 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.8.466.170.761,-.

Pada Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025, program/ kegiatan/ sub kegiatan yang berubah meliputi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik, Pelayanan Informasi Publik, Pengelolaan Media Komunikasi Publik, Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi, , Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain, Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda, Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah, Penyediaan Akses Internet untuk perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE, Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional, Pelaksanaan Keamanan informasi Pemerintah daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik.

Dinamika yang terjadi selama tahun 2025 turut mempengaruhi keberhasilan pencapaian Renja Dinas Komunikasi dan Informatika. Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2025, tercatat adanya hasil yang baik yang dikarenakan adanya pencapaian maupun pelampauan target maupun yang tidak memenuhi target.

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada.
b. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada. Meski demikian tetap ada beberapa kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan diantaranya :
    1. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM Dinas Komunikasi dan Informatika, khususnya tenaga programmer computer, sandiman ahli pertama, statistisi, pranata humas, tenaga operator layanan, perencana, peliput serta pengadministrasi kepegawaian;
    2. Kurangnya pembinaan pada pengelola WEB OPD, pembaruan maintenance jaringan dan data center;
    3. Kurang dukungan Anggaran yang memadai di tingkat OPD untuk pengadaan mesin kerja dan alat kantor sebagai sarana pendukung;
    4. Kesiapan pelaksanaan Geospasial dan E_Walidata belum maksimal;
    5. Belum terdapat anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Sandi dan Telekomunikasi, SDM Perencana dan Fungsional lainnya.

Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi Program Aplikasi Informatika, Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, dan Program Informasi dan Komunikasi Publik.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Koordinasi yang baik antara Dinas Komunikasi dan informatika dengan pihak-pihak terkait baik di daerah, provinsi maupun pusat terkait regulasi yang ada.
2. Sosialiasi, monitoring, evaluasi dan pendampingan Dinas Komunikasi dan informatika terkait kegiatan penyebarluasan informasi yan dilaksanakan.
3. Kebijakan dari Pemerintah Daerah untuk menyelengarakan kegiatan yang mendukung kegiatan di bidang pengembangan e-government untuk meningkatkan kualias layanan publik.

Pada tahun perencanaan selanjutnya perlu diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, diantaranya:

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Dinas Komunikasi dan Informatika;
2. Kerja sama dengan pihak terkait (Organisasi/lembaga TIK lain di luar Pemda);
3. Dukungan Anggaran guna pengembangan E-Government di masing-masing OPD;
4. Penguatan kembali PPID;

5. Mengupayakan kembali aktifnya media komunikasi masyarakat melalui KIM dan FK METRA;
6. Mengupayakan adanya kegiatan untuk peningkatan kapasitas bagi SDM pengelola sandi dan telekomunikasi, dan Pengelola Satu Data / Pengembangan Open data
7. Mengupayakan pemahaman kepada OPD selaku produsen dan untuk Peningkatan kualitas data statistic sectoral untuk perencanaan pembangunan.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika dan Pencapaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika sampai dengan Tahun 2025 disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika dan Pencapaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika
s.d. Tahun 2025* Kabupaten Banjarnegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target program dan kegiatan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika s/d tahun 2026	
					Target Renja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025	Realisasi Renja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
2.	**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**									
2.16	**Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika**									
2.16.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan dan laporan kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.16.01.2.01	***Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	14 dokumen	14 dokumen	14 dokumen	14 dokumen	100%	14 dokumen	14 dokumen	14 dokumen

2.16.01.2.01.01	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	100%	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen
2.16.01.2.01.06	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinas Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	100%	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen
2.16.01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	Jumlah Laporan Pelaksanaan administrasi keuangan daerah	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan	2 laporan	2 laporan
2.16.01.2.02.01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	100%	40 orang	40 orang	40 orang
2.16.01.2.02.03	*Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	110 dokumen	110 dokumen	110 dokumen	110 dokumen	100%	110 dokumen	110 dokumen	110 dokumen
2.16.01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	Jumlah Laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	100%	3 laporan	3 laporan	3 laporan
2.16.01.2.06.02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	100%	3 paket	3 paket	3 paket
2.16.01.2.06.04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100%	12 paket	12 paket	12 paket
2.16.01.2.06.06	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	264 exp	264 exp	264 exp	264 exp	100%	264 exp	264 exp	264 exp

2.16.01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	Jumlah Laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan	2 laporan	2 laporan
2.16.01.2.07.01	*Pengadaan Mebel*	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	100%	3 paket	5 paket	3 paket
2.16.01.2.07.02	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	19 unit	19 unit	12 unit	12 unit	100%	4 unit	4 unit	4 unit
2.16.01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	Jumlah Laporan Penyediaan Jas Penunjang urusan daerah	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan	2 laporan	2 laporan
2.16.01.2.08.02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	12 laporan
2.16.01.2.08.04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 laporan	13 laporan	13 laporan	13 laporan	100%	13 laporan	13 laporan	13 laporan
2.16.01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	Jumlah Laporan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	100%	3 laporan	3 laporan	3 laporan
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	100%	4 unit	4 unit	4 unit

2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	1 unit
2.16.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	53 unit	53 unit	30 unit	30 unit	100%	4 unit	4 unit	4 unit
2.16.02	**Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**	Persentase diseminasi Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.16.02.2.01	***Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota***	Jumlah informasi yang dikelola	16 informasi	16 informasi	16 informasi	16 informasi	100%	16 informasi	16 informasi	16 informasi
2.16.02.2.01.02	*Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik*	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	9 dokumen	9 dokumen	5 dokumen	9 dokumen	180%	9 dokumen	9 dokumen	9 dokumen
2.16.02.2.01.0025	*Penyusunan Konten*	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100%	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen
2.16.02.2.01.07	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers,	6 layanan	6 layanan	6 layanan	6 layanan	100%	6 layanan	6 layanan	6 layanan

		dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media								
2.16.02.2.01.010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	50 orang	50 orang	160 orang	40 orang	25%	50 orang	50 orang	50 orang
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau kebijakan	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen
2.16.03	**Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**	**1. Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo** **2. Persentase layanan public yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.16.03.2.01	***Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup***	Jumlah Perangkat Daerah dan pelayanan public yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	44 OPD	44 OPD	44 OPD	44 OPD	100%	44 OPD	44 OPD	44 OPD

	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
2.16.03.2.01.03	*Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah*	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2 sistem	2 sistem	2 sistem	2 sistem	100%	2 sistem	2 sistem	2 sistem
2.16.03.2.02	***Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota***	**Persentase perangkat daera yang terlayani pusat data pemerintah/data center**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	238 dokumen	238 dokumen	195 dokumen	238 dokumen	122%	238 dokumen	238 dokumen	238 dokumen
2.16.03.2.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	
2.16.03.2.02.07	*Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik*	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	1 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	100%	1 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi

2.16.03.2.02.10	*Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah*	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen
2.20	**Statistik**									
2.20.02	**Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**	**Persentase ketersediaan data statistic sectoral**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.20.02.01	***Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota***	**Persentase OPD yang menggunakan data statiktik daam menyusun perencanaan pembangunan**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.20.02.01.01	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral*	Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen
2.20.02.01.02	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	44 dokumen	44 dokumen	44 dokumen	44 dokumen	100%	44 dokumen	44 dokumen	44 dokumen
2.20.02.01.03	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	-	-	-	-	-	-	-	-

2.20.02.01.04	Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daera yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah Yang Terintegrasi	44 orang	44 orang	44 orang	44 orang	100%	44 orang	44 orang	44 orang
2.21	**Persandian**									
2.21.02	**Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi**	**Persentase Aplikasi yang di Asesmen KAMI**	23,41%	23,41%	23,41%	23,41%	100%	23,41%	23,41%	23,41%
2.21.02.2.01	***Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota***	**Jumlah Aplikasi yang di Asesmen keamanan informasinya**	6 aplikasi	6 aplikasi	6 aplikasi	6 aplikasi	100%	6 aplikasi	6 aplikasi	6 aplikasi
2.21.02.2.01.03	*Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik*	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan	2 laporan	2 laporan
2.21.02.2.01.04	*Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah*	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	44 OPD	44 OPD	25 OPD	44 OPD	176%	44 OPD	44 OPD	44 OPD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Dalam pelaksanaan pelayanannya, Dinas komunikasi dan Informatika mengampu 6 (enam) Indikator. Dari 6 indikator tersebut, semuanya atau 6 berstatus tercapai bahkan ada 3 indikator yang melampaui target yang sudah ditentukan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian/ ketidaktercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Kesiapan aplikasi dan data dukungnya untuk bisa diintegrasikan mengakibatkan masih sedikitnya aplikasi pelayanan publik yang terintegrasi.
2. Keterbatasan akun zoom meeting yang kapasitasnya maksimal hanya 100 peserta dan hanya memiliki satu akun, jadi ketika ada permintaan untuk melayani lebih dari 100 peserta tidak dapat difasilitasi.
3. Keterbatasan jumlah infrastruktur dan peralatan yang perlu adanya penambahan, baik fasilitas publik, kecamatan dan kelurahan yang belum terhubung.
4. Peralatan Infrastruktur radio yang rusak dan tidak memenuhi standar.
5. Banyaknya akun media sosial dan layanan aduan masyarakat yang harus dikelola, sedangkan Sumber Daya Manusia yang berkompeten sangat terbatas.

Dalam rangka mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut, telah dilakukan upaya-upaya yang meliputi:

1. Mengupayakan penyesuaian data-data pendukung aplikasi agar siap untuk diintegrasikan.
2. Aplikasi zoom apabila lebih dari 100 peserta, peserta yang lain agar mengikuti secara streaming melalui media sosial, namun tidak dapat berinteraksi dengan peserta yang lain.
3. Memaksimalkan infrastruktur yang dimiliki oleh pihak ketiga.
4. Melakukan pemeliharaan terhadap peralatan yang rusak.
5. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang sudah ada.

Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK LPPD	Target Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika				Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)			(11)	(12)			(13)	(14)	(15)
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo		IKK LPPD	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		IKK LPPD	32	90,91	90,91	73,47	33,33	90,91	71,43		75,51	77,55	
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten		IKK LPPD	80	100	100	100	89,86	100	100		100	100	
4	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah		IKK LPPD	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah		IKK LPPD	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
6	Tingkat keamanan informasi pemerintah		IKK LPPD	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

*) Kolom 3 diisi berdasarkan IKK outcome dalam lampiran Permendagri 18/2020

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan urusan pemerintahan dalam 3 urusan, yaitu Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPD Tahun 2023-2026, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika untuk tahun 2026 mencakup ketiga urusan tersebut. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika diantaranya adalah:

1. Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi dan peningkatan pelayanan Dinkominfo kepada OPD
2. Belum optimal pelaksanaan dan pengembangan e-government dalam rangka menunjang pelayanan publik dan pencapaian Indeks SPBE sesuai standard nasional.
3. Belum optimalnya pelaksanaan persandian dan penyediaan data statistik untuk menunjang pembangunan di Kabupaten Banjarnegara

Permasalahan tersebut, jika tidak diselesaikan dapat menjadi *constraint* dalam pencapaian visi dan misi Bupati maupun capaian indikator lainnya. Beberapa dampak dari adanya permasalahan dan hambatan tersebut meliputi:

1. Terhambatnya pemenuhan kebutuhan data dan informasi untuk perencanaan program
2. Belum terlaksana audit SPBE sebagai salah satu indicator dalam penilaian indeks SPBE
3. Tingkat keamanan informasi belum terukur

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi, peningkatan kualitas birokrasi, dan meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan pengguna layanan akan meningkatkan kebutuhan akan adanya penyediaan produk layanan yang semakin baik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi-inovasi dalam menunjang peningkatan pelayanan publik secara kontinyu. Beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, yaitu:

1. Perkembangan teknologi informasi yang mengharuskan pelayanan publik secara online mengakibatkan Dinas Komunikasi dan Informatika selalu meningkatkan kualitas pelayanan di bidang teknologi informasi.
2. Kemudahan masyarakat membuka akses informasi melalui medsos menuntut Dinas Komunikasi dan informatika untuk memberikan informasi yang benar dan dibutuhkan masyarakat.
3. Kebutuhan data dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan memerlukan terbangunnya system/ aplikasi data yang terintegrasi.

Berdasarkan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan tersebut, dapat diinventarisasi beberapa isu strategis. Inventarisasi isu-isu strategis tahun 2026 didapatkan dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal Kabupaten Banjarnegara sampai dengan tahun 2025. Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan pembangunan. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2026, sebagai berikut:

a. Keterbukaan informasi publik harus ditingkatkan lagi dengan meningkatkan kapasitas SDM yang menangani pengelolaan website banjarnegarakab.go.id, pelayanan informasi (PPID) dan pengaduan masyarakat.

b. Di samping itu diperlukan ketersediaan sarana prasarana yang memadai untuk membuat konten informasi.

c. Dalam rangka implementasi SPBE dari 6 dokumen arsitektur SPBE baru 2 dokumen yang tersusun, yaitu dokumen Proses Bisnis dan Arsitektur Infrastruktur. Sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk SPBE dan Peraturan Bupati Nomor 50 tahun 2020 tentang SPBE diperlukan sinergi antar perangkat daerah dalam penyelenggaraan sistem informasi dan layanan berbasisi elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik maupun non publik. Untuk itu diperlukan pengintegrasian SIM/aplikasi yang terkendala belum adanya regulasi penyusunan dan pengembangan SIM yang sesuai standar.

d. Kualitas ketersediaan data statistik guna menunjang perencanaan dan evaluasi pembangunan pada masing-masing perangkat daerah perlu ditingkatkan. Dengan adanya Peraturan Bupati tentang Satu Data Indonesia Daerah diperlukan kerjasama yang baik dari Pembina Data (BPS), Sekretaris Satu Data (Baperlitbang), Wali Data (Dinkominfo) dan produsen data di masing-masing OPD dalam menyediakan data yang berkualitas dan siap berbagi pakai.

e. Keamanan Informasi maupun aplikasi dari serangan cyber harus ditingkatkan dengan membangun Sitem Keamanan Infromasi. Di samping itu diperlukan sosialisasi tentang pentingnya keamanan informasi dan peningkatan SDM yang menangani persandian.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Tahun 2026 merupakan pelaksanaan tahun keempat RPD Tahun 2023-2026. Dalam RPD Tahun 2023-2026, prioritas arah kebijakan, prioritas arah kebijakan sesuai tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2026 meliputi:

1. Penguatan pemerintahan berbasis elektronik melalui pembangunan TIK
2. Penguatan keterbukaan informasi publik
3. Penguatan ketersediaan data sektoral
4. Penguatan persandian dan keamanan informasi

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 Kabupaten Banjarnegara

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				Catatan Penting
							Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	
2					**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**			**7.336.005.000**			
2	16	01			**Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika**			**7.173.505.000**			
2	16	01			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**			**5.195.369.300**			
2	16	01	2 0 1		***Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***			**10.000.000**			
2	16	01	2 0 1	0 0 1	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	5.000.000	Dinkominfo	APBD	
2	16	01	2 0 1	0 0 6	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Dokumen	5.000.000	Dinkominfo	APBD	
2	16	01	2 0 2		***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***			**4.586.430.782**			

2	16	01	2 0 2	0 0 0 1	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 orang	4.543.035.782	Dinkominfo	APBD	
2	16	01	2 0 2	0 0 0 3	*Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	110 dokumen	43.395.000	Dinkominfo	APBD	
2	16	01	2 0 6		***Administrasi Umum Perangkat Daerah***			**295.331.100**			
2	16	01	2 0 6	0 0 0 2	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	3 paket	6.011.100	Dinkominfo	APBD	
2	16	01	2 0 6	0 0 0 4	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	270.000.000	Dinkominfo	APBD	
2	16	01	2 0 6	0 0 0 6	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	264 eks/dokumen	19.320.000	Dinkominfo	APBD	
2	16	01	2 0 7		***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***			**0**			
2	16	01	2 0 7	0 0 0 5	*Pengadaan Mebel*	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 paket	0	Dinkominfo	APBD	
2	16	01	2 0 7	0 0 1 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 unit	0	Dinkominfo	APBD	

2	16	01	208		***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			**194.932.818**			
2	16	01	208	0002	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	60.000.000	Dinkominfo	APBD	
2	16	01	208	0004	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 laporan	118.932.818	Dinkominfo	APBD	
2	16	01	209		***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			**124.674.600**			
2	16	01	209	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	57.469.900	Dinkominfo	APBD	
2	16	01	209	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	20.000.000	Dinkominfo	APBD	
2	16	01	209	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	39 unit	47.204.700	Dinkominfo,	APBD	
2	16	02			**Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**			**1.010.165.700**			
2	16	02	201		***Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota***			**1.010.165.700**			

2	16	02	201	0019	*Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik*	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	9 dokumen	556.273.000	Dinkominfo, Kab. Banjarnegara	APBD, DBHCHT	
2	16	02	201	0023	Penyusunan Konten	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	5 dokumen	162.392.700	Dinkominfo, Kab. Banjarnegara	APBD	
2	16	02	201	0014	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	6 layanan	56.500.000	Dinkominfo, Kab. Banjarnegara	APBD	
2	16	02	201	0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	3 dokumen	40.000.000	Kab. Banjarnegara	APBD	
2	16	02	201	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12 dokumen	160.000.000	Kab. Banjarnegara	APBD	
2	16	02	201	0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	3 dokumen (DIP, DIK, Laporan Tahunan)	25.000,000	Dinkominfo, Kab. Banjarnegara	APBD	
2	16	03			**Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**			**967.970.000**			
2	16	03	201		***Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup***			**220.000.000**			

					Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						
2	16	03	2 0 1	0 0 0 4	*Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa*	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	1 dokumen	**220.000.000**	Kab. Banjarnegara	APBD	
2	16	03	2 0 2		***Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota***			**747.970.000**			
2	16	03	2 0 2	0 0 1 5	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	1 dokumen	35.000.000	Kab. Banjarnegara	APBD	
2	16	03	2 0 2	0 0 2 4	*Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Kab / Kota*	Jumlah jaringan *Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Kab / Kota*	1 aplikasi	400.000.000	Kab. Banjarnegara	APBD	
2	16	03	2 0 2	0 0 3 0	*Penyediaan akses internet untuk perangkat Daerah dalam rangka Penyelenggaraan SPBE*	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	44 OPD	312.970.000	Dinkominfo, Kab. Banjarnegara	APBD	
2	20				**Statistik**						
2	20	02			**Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**			**75.577.700**			
2	20	02	2 0 1		***Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota***			**75.577.700**	Dinkominfo	APBD	

2	20	02	2 0 1	0 0 0 8	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	100 %	75.577.700	Dinkominfo, Kab. Banjarnegara	APBD	
2	21				**Persandian**						
2	21	02			**Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi**			**86.922.300**			
2	21	02	2 0 1		***Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota***			**86.922.300**			
2	21	02	2 0 1	0 0 0 3	*Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik*	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 laporan	86.922.300	Kab. Banjarnegara	APBD	
								7.336.005.000			

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Tahun 2026, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan yaitu:

1. Masih perlunya pengembangan integrasi Satu Data Indonesia ke Open data agar diperoleh hasil data yang valid dan akurat, dapat dibagi pakaikan ke pemerintah pusat dan daerah dalam rangka perencanaan pembangunan.
2. Masih rendahnya tingkat keamanan informasi Pemerintah Daerah, dengan tingginya serangan siber
3. Perlu upaya untuk mempertahankan/meningkatkan indeks SPBE dan mempersiapkan pengelolaan indeks Pemerintah Digital

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan musrenbang kecamatan dan forum konsultasi publik telah disampaikan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui aplikasi SIPD. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2026 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	NIHIL				

2.6. Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan hasil reses anggota DPRD, melalui aplikasi SIPD telah disampaikan usulan program dan kegiatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas

Komunikasi dan Informatika. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2026 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Validasi
1.	NIHIL				

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia
2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital
3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas komunikasi dan Informatika

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2023-2026, maka Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tujuan dalam Rencana Kerja sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pelayanan Publik dan Kinerja Dinas komunikasi dan Informatika dalam rangka mewujudkan good governance.
2. Meningkatkan Pendayagunaan e-Goverment menuju Banjarnegara Smart City.
3. Meningkatkan pengelolaan informasi dan pelayanan komunikasi di lingkungan OPD Pemerintah Kab. Banjarnegara.

4. Meningkatkan penyediaan data statistik dan pelaksanaan persandian untuk menunjang pembangunan di Kabupaten Banjarnegara.
    a. Meningkatkan jumlah dan kualitas data yang dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan dan dapat dibagi pakaikan ke Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka mendukung pembangunan daerah;
    b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan system komunikasi dan Informatika berbasis teknologi informasi modern;
    c. Terlaksananya keamanan informasi di Pemerintah Kabupaten Banjarnegara untuk menunjang peningkatan pelayanan publik yang baik dan proporsional.

Untuk sasaran yang akan dicapai dalam memberikan fokus penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai dan dalam bentuk kuantitatif sehingga sasaran Renja berdasarkan Renstra yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan public dan akuntabilitas Dinas komunikasi dan Informatika.
2. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
3. Meningkatnya deseminasi informasi dan keterbukaan informasi publik.
4. Meningkatnya Ketersediaan data statistik untuk menunjang kinerja pembangunan daerah.
5. Meningkatnya kualitas pelayanan persandian :
    a. Meningkatnya pengetahuan, kemampuan Sumber Daya Manusia aparatur dan masyarakat dibidang kominfo serta terjalin kerjasama informasi dengan media massa;

b. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi untuk kesejahteraan masyarakat diberbagai bidang;
c. Meningkatnya profesionalisme dan kinerja Sumber Daya Manusia Aparatur Komunikasi dan Informatika.

3.3 Program dan Kegiatan

Terlampir

REKAPITULASI USULAN RENCANA KERJA TAHUN 2026

OPD: Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					Sumber Dana	Catatan Penting/Analisis Kebutuhan	Prakiraan Maju Tahun 2027
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)			
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
2					**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**								**7.336.005.000**			**7.702.805.250**
2	16	01			**Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika**								**7.173.505.000**			**7.532.180.250**
2	16	01			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**								**5.195.369.300**			**5.455.137.765**
2	16	01	201		***Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***								10**.000.000**			10**.500.000**
2	16	01	201	0001	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dinkominfo		7 dokumen	Renja, RKT, RKA, DPA, RTP SPIP, KAK,PK	5.000.000	APBD	7 dokumen perencanaan (Renja, RKT, RKA, DPA, RTP SPIP, KAK,PK)	5.250.000
2	16	01	201	0006	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKP		Dinkominfo		7 dokumen	7 dokumen pelaporan kinerja (LKPJ,LPPD,LKJIP, Laporan Keuangan semester I, Laporan Keuangan Akhir Tahun,	5.000.000	APBD	7 dokumen pelaporan kinerja (LKPJ,LPPD,LKJIP, Laporan Keuangan semester I, Laporan Keuangan Akhir Tahun, Pengukuran Kinerja, POK)	5.250.000

												Pengukuran Kinerja, POK)				
2	1 6	0 1	0 2		***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***								**4.586.430.782**			**4.815.752.321**
2	1 6	0 1	0 2	0 1	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Dinkom info		42 orang	Gaji dan Tunjangan ASN	4.543.035.782	APBD	Gaji dan Tunjangan ASN	4.770.187.571
2	1 6	0 1	0 2	0 3	*Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Dinkom info		110 dokumen	dokumen SPP dan SPJ (honor pengelola keuangan)	43.395.000	APBD	110 dokumen SPP dan SPJ (honor pengelola keuangan)	45.564.750
2	1 6	0 1	0 6		***Administrasi Umum Perangkat Daerah***				**Dinko minfo**				**295.331.100**			**310.097.655**
2	1 6	0 1	0 6	0 2	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan		Dinkom info		3 paket	(peralatan kebersihan dan bahan pembersih, perlengkapan kantor)	6.011.000	APBD	3 paket (peralatan kebersihan dan bahan pembersih, perlengkapan kantor)	6.311.655
2	1 6	0 1	0 6	0 4	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Dinkom info		12 paket	Logistic	270.000.000	APBD	Logistic selama 1 tahun	283.500.000
2	1 6	0 1	0 6	0 6	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Dinkom info		264 eks/dokumen	(surat kabar untuk guntingan pers, diasang di alun2)	19.320.000	APBD	264 eks/dokumen (surat kabar untuk guntingan pers, diasang di alun2)	20.286.000
2	1 6	0 1	0 7		***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***				Dinkom info				**0**			**75.000.000**
2	1 6	0 1	2 0 7	0 5	*Pengadaan Mebel*		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Dinkom info		2 Meja ruang rapat, 2 lemari arsip, 7 set meja kursi				Lemari arsip, Meja kursi rapat, tambahan 3 CPNS dan 4 org PPPK	25.000.000

2	16	01	207	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Dinkominfo		2 laptop, 2 AC,				Laptop Kadin dan sekdin, 2 unit ac untuk data center dan ruang siar radio	50.000.000
2	16	01	208		***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***								**178.932.818**			**187.879.459**
2	16	01	208	02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Dinkominfo		12 laporan		60.000.000	APBD		63.000.000
2	16	01	208	04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Dinkominfo		13 laporan	Gaji 1 PTT dan 4 THL	118.932.818	APBD	13 laporan (gaji PTT dan THL)	124.879.459
2	16	01	209		***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***								**124.674.600**			**130.908.330**
2	16	01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Dinkominfo		4 unit	Pemeliharaan kendaraan dinas dan pembayaran pajaknya	57.469.900	APBD	Pemeliharaan kendaraan dinas dan pembayaran pajaknya	60.343.395
2	16	01	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Dinkominfo		1 unit	Pemeliharaan Gedung Dinkominfo	20.000.000	APBD	Pemeliharaan Gedung Dinkominfo	21.000.000
2	16	01	209	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		Dinkominfo		9 unit AC, 12 laptop, 8 printer, 1 genset		47.204.700	APBD		49.564.935

2	16	02			**Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**								**1.010.165.700**			**1.297.567.680**
2	16	02	201		***Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota***								**1.010.165.700**			1.060.673.985
2	16	02	201	002	*Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik*		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik		Kab. Banjarnegara		9 dokumen (pengelolaan website banjarnegarakab, layanan pengaduan)		566.273.000	APBD, DBHCHT		594.586.650
2	16	02	201	002	Penyusunan Konten		Jumlah Konten Informasi Publik		Kab. Banjarnegara		5 konten		162.392.700	APBD		170.512.335
2	16	02	201	007	Relasi Media		Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media		Kab. Banjarnegara		6 layanan		56.500.000	APBD		59.325.000
2	16	02	201	015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi		Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo		Kab. Banjarnegara		2 Komunitas		40.000.000	APBD		42.000.000
2	16	02	201	021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik		Kab. Banjarnegara		12 dokumen (pengelolaan Radio Suara Banjarnegara, penggantian peralatan		160.000.000	APBD		168.000.000

											radio yang rusak),					
2	16	02	201	017	Pelayanan Informasi Publik		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik		Kab. Banjarnegara		3 dokumen (DIP, DIK, Laporan Tahunan)		25.000.000	APBD		26.250.000
2	16	03			**Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**								**967.970.000**			**1.016.368.500**
2	16	03	201		***Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota***								**220.000.000**			231.000.000
2	16	03	201	004	*Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa*		Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Dearahserta Domain Pemerintah Desa		Kab. Banjarnegara		1 Dokumen		220.000.000	APBD		231.000.000
2	16	03	202		***Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota***								**747.970.000**			**785.368.500**
2	16	03	202	015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan PEMDA		Jumlah laporan jumlah hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda		Kab. Banjarnegara		1 laporan		35.000.000	APBD	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	36.750.000

2	16	03	202	0024	*Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah KAb./ Kota*		Jumlah perangkat Daerah di Pemerintah Kab./Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab. /Kota		Kab. Banjarnegara		Tersedia lisensi pendukung pemerintah (5 Lisensi; firewall, IP address,pemeliharaan website, zoom lisence 100, VPS domain)		400.000.000	APBD	Jaringan Intra Pemerintah / spbe	420.000.000
2	16	03	202	0030	*Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah Dalam rangka Penyelenggaraan SPBE*		Jumlah perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas		Kab. Banjarnegara		44 Perangkat Daerah		312.970.000	APBD	Akses internet	328.618.500
2	20				**Statistik**											**79.356.585**
2	20	02			**Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**								**75.577.700**			**79.356.585**
2	16	02	201		***Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota***								**75.577.700**			**79.356.585**
2	16	02	201	0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional		Persentase Perangkat daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dan / atau Penyusun Kebijakan		Kab. Banjarnegara		100%		75.577.700	APBD	Persentase OPD yang menggunakan data Statistik	79.356.585
2	21				**Persandian**								**86.922.300**			**91.268.415**
2	21	02			**Program Penyelenggaraan**								**86.922.300**			**91.268.415**

					Persandian untuk Pengamanan Informasi											
2	2 1	0 2	2 0 1		***Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota***								**86.922.300**			**91.268.415**
2	2 1	0 2	2 0 1	0 0 0 3	*Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik*		Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		Kab. Banjarnegara		2 laporan		86.922.300	APBD	2 laporan pelaksanaan	91.268.415
					JUMLAH								**7.336.005.000**			**7.702.805.250**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Program pada Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan program prioritas dalam Renstra 2023-2026. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD selanjutnya dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Pemilihan untuk masing-masing program/ kegiatan/sub kegiatan sebagai berikut

1. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Rencana program, kegiatan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika di tahun 2026 pada Urusan Komunikasi dan Informatika terdiri dari 2 program, 3 kegiatan dan 8 sub kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

a. Program Informasi dan Komunikasi Publik

Program informasi dan komunikasi publik terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik. Dengan 6 sub kegiatan yaitu Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik; Penyusunan Konten; Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi; Relasi Media; Pengelolaan Media Komunikasi Publik; dan Pelayanan Informasi Publik;

b. Program Aplikasi Informatika

Program aplikasi informatika terdiri dari 2 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dengan sub kegitan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ddan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa, pada kegiatan Pengelolaan e-

government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dengan 3 sub kegiatan yaitu Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE; Penyelenggaraan Jaringan intra pemerintah daerah kabupaten/kota; dan Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Program penyelenggaraan statistik sektoral terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota. Dengan 1 sub kegiatan yaitu Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Daerah Kabupaten/Kota;

3. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi. Dengan 1 sub kegiatan yaitu Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik;

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023-2026. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika selanjutnya menjadi platform operasional bagi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menjalankan programnya dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah tahun 2023-2026. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Komunikasi dan Informatika setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026 dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disepakati.
2. Kerangka pendanaan dalam Renja Dinas Komunikasi dan Informatika masih bersifat sementara, sehingga masih dimungkinkan terjadi perubahan pagu yang disebabkan oleh pengurangan, penambahan, dan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan maupun antar sub kegiatan dalam kerangka penyusunan anggaran secara terpadu dan berbasis kinerja.

3. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika menjadi acuan bagi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dan segenap jajarannya serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, serta menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal [illegible] Agustus 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

[illegible]

[illegible], S.IP
Pembina Tingkat I/ IV.b
NIP. 19721007 199903 1 007

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan yang diatur melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan pembentukan tim penyusun, penelaahan rancangan awal RKPD, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, hingga pada penyempurnaan berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang RKPD. Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, penyusunan Renja Perangkat Daerah juga mengacu pada Renja Kementerian/Lembaga terkait, serta Renja Perangkat Daerah Provinsi terkait. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2. Landasan Hukum

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun dengan berlandaskan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan;
8. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);

27. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 14);
28. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 15);
29. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 Nomor .....).

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun dengan maksud untuk:

a. Menjabarkan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 ke dalam rencana program kegiatan prioritas Tahun 2026 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Renja K/L Tahun 2026 dan Renja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;
b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerapan anggaran berbasis kinerja.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

a. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA-DPA dalam Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2026, yang dalam penyusunannya didahului dengan menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026;
b. Sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Tahun 2026;
c. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun berdasarkan sistematika yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah.

BAB 2 : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dan atau pokok-pokok DPRD.

BAB 3 : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan tahun 2026.

BAB 4 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran RKPD.

BAB 5 : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah meliputi urusan kearsipan dan Urusan Perpustakaan.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 terdiri dari 4 program, 13 kegiatan, dan 24 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. **8.445.000.000** dengan fokus utama pada peningkatan efektifitas dan transparansi layanan public bidang kearsipan dan perpustakaan, serta peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah. (*urutkan prioritas daerah tahun 2024 yang didukung oleh Perangkat Daerah*). Program/kegiatan/sub kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah yang meliputi:

1. Belum optimalnya tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan yang pada tahun 2024 sebanyak 43.478 pengunjung;
2. Belum semua perpustakaan yang ada di masyarakat, sekolah, dan lembaga lainnya mendapatkan pembinaan. Pada tahun 2024 pembinaan dilaksanakan kepada 60 perpustakaan dari 717 perpustakaan yang ada di kab Banjarnegara;
3. Minimnya jumlah perpustakaan berprestasi dan terakreditasi karena masih banyak perpustakaan yang belum dikelola dengan baik. Hal ini juga disebabkan karena kurangnya tenaga pengelola perpustakaan. Sampai tahun 2024 jumlah perpustakaan yang terakreditasi sebanyak 53 perpustakaan.
4. Minimnya kegiatan peningkatan kapasitas pengelola perpustakaan yakni hanya cukup untuk 60 orang dari 442 orang tenaga pengelola perpustakaan di kab. Banjarnegara.

5. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pelayanaan seperti kurangnya meberlair di ruang lobi, kurangnya computer untuk ruang internet.
6. Belum adanya naskah kuno yang diakuisisi , dan dialih aksara /dialih bahasa;
7. Kegiatan promosi dan sosialisasi tentang perpusda digital masih kurang sehingga keberadaan perpusda digital belum dimasyarakat, sehingga jumlah kunjungannya pun belum maksimal yakni setahun 10.000 pengunjung ;
8. Keberadaan perpustakaan desa belum menjadi prioritas pemerintah desa , dari 266 desa yang sudah terdapat perpustakaan desa sebanyak 108 desa;
9. Belum terlaksanaanya jaringan informasi kearsipan (JIKN) ;
10. Belum dilaksanakannya pengelolaan arsip statis oleh OPD;
11. Tidak adanya kegiatan peningkatan kapasitas pengelola kearsipan untuk unit pengelola arsip;
12. Belum adanya kesadaran setiap OPD untuk menganggarkan pengelolaan arsip inaktif, dan mengusulkan jabatan arsiparis pada peta jabatannya;
13. Belum tersedianya depo arsip;
14. Belum adanya Perda tentang Kearsipan.

(*sebutkan permasalahan pembangunan sesuai urusan dalam RKPD Tahun 2024*).

Dari 4 program, 12 kegiatan, dan 23 sub kegiatan yang dalam Renja Perangkat Daerah tersebut, program/kegiatan/sub kegiatan yang disetujui untuk dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024 terdiri dari 4 program, 12 kegiatan, dan 22 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp **5.426.572.923**

Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024, terjadi beberapa perubahan yang meliputi penambahan, pengurangan atau pengurangan pagu, penghapusan, program/kegiatan/sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Perubahan tersebut mengubah rincian dalam Renja Perangkat Daerah menjadi 4 program,12 kegiatan, dan 23 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp **5.454.438.138.**

Dinamika yang terjadi selama tahun 2024 turut mempengaruhi keberhasilan pencapaian Renja Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2024, tercatat adanya hasil yang baik adanya pencapaian maupun pelampauan target maupun yang tidak memenuhi target.

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Tidak terdapat Program/kegiatan /sub kegiatan yang tidak dapat terrealisasi sesuai dengan perencanaan. Namun ada kegiatan yang tidak mendapat alokasi anggaran yaitu Kegiatan pengelolaan arsip statis , sub kegiatan akuisisi pengolahan , preservasi dan akses arsip statis. Semula kegiatan ini diusulkan dalam renja namun pada saat penetapan APBD kegiatan tidak mendapatkan alokasi anggaran, sehingga indikator pada kegiatan ini tidak dapat tercapai. Kegiatan ini akan dimanfaatkan untuk pengolahan, akuisisi, dan peruwatan arsip statis.

b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi Program penunjang urusan pemerintahan daerah kegiatan *Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* , Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Sub kegiatan Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD, *Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*, Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, *Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*, Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, *Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*, Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, *Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*, Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya , Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Program Pembinaan Perpustakaan, *Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*, Sub Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik.

Sedangkan realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah, *Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*, Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka, Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Adanya evaluasi SAKIP secara rutin tiap tahunnya
2. Ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan.
3. Kedisiplinan dan usaha yang maksimal dalam pencapaian target kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka (*pelajaran implikasi dari poin di atas*). Pada tahun perencanaan selanjutnya, perlu diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, diantaranya :

1. Ketepatan dalam penentuan target kinerja
2. Penyesuaian target dengan ketersediaan anggaran

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
s.d. Tahun 2024* Kabupaten Banjarnegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Kerja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Urusan Kearsipan **Program Pembinaan Perpustakaan**	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan ((jmlh pengunjung N-(N-1) dibagi pengunjung N-1X100))	4,27	11,11	45,16%	72,51%	160,569	6,92%	6,92% (61.000) 53.478/53.478* 100)	100

	persentase perpustakaan berstandar nasional perpustakaan (jmlh perpus ber SNP dibagi jml seluruh perpus dikali 100)	7,04	6,30	6,55	6,55	100	6,79	6,79	100
	ketercukupan koleksi perpustakaan daerah (jumlah koleksi dibagi jumlah penduduk usia 10-60)	8,78	8,45	8,45	8,51	105,19%	8,78	8,78	100
Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengunjung perpustakaan per tahun	4,50	3,71	5,39%	6,41% 53.478/ 834.328 x100	118,92%	5,69% 61.000/83 4.328	5,69% 61.000/83 4.328	100
Sub Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	100%	1 layanan	1 layanan	100

Elektronik	(ITSM : Information Technology Service Management)								
Sub Kegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	51 perpustakaan	39 perpustakaan	53 perpustakaan	53 perpustakaan	100%	55 perpustakaan	55 perpustakaan	100%
Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	4550 eksp		3000 eksemplar	3547 eksemplar	118,23%	400 eksp	400 eksp	100%

Bidi Keg Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2 60 orang	40 orang	60 orang	60 orang	100%	45 orang	45 orang	100%
Bidi Keg Pembinaan Perpustakaan pada satuan Pendidikan dasar di wilayah wilayah kabupaten /kota sesuai standar nasional perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	450 perpustakaan	60 perpustakaan	75perpustakaan	94 perpustakaan	125%	125perpustakaan	125 perpustakaan	100%

Keg. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembudaya an kegemaran membaca dan literasi yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Sub keg. Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudaya an Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	10 lokus	10 lokus	10 lokus	10 lokus	100%	10 lokus	10 lokus	100%
Sub keg. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah gedung dan sarana perpustaka an ditempat umum yang tersedia	1 unit	-	- unit	-unit	-	1 unit	1 unit	100

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketepatan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase administrasi perkantoran yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	74,25	73,00	74,00	774,00	100%	74,50	74,50	100%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 laporan	10 laporan	23 laporan	26 aporan	113%	26 laporan	26 laporan	100%

	Kegiatan Administrasi Kesekretariatan Perangkat Daerah	**Persentase administrasi kesekretariatan yang terpenuhi**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	32 orang	32 orang	**100%**
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 orang	32 orang	30 orang	30 orang	100%	31 orang	31orang	100%
	Sub kegiatan Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36 dok	36 dok	36 dok	36 dok	100%	36 dok	36 dok	100%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase administrasi umum yang terpenuhi**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	100%	2 paket	2 paket	100%
	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	11 paket	11 paket	100%	11 paket	11 paket	100%

	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase sarana prasarana Gedung kantor yang terpenuhi**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 unit	4 unit	26 unit	26 unit	100%	7 unit	7 unit	100%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan

	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	100%	12 lap	12 lap	100%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	4 lokal	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1unit	100%

	Sub kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	12 unit	12 unit	12unit	12unit	100%	12unit	12unit	100%
	Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 unit	15 unit	3 unit	3 unit	100%	3 unit	3 unit	100%
	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Tata kelola kearsipan yang baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip yang dikola dan dikelola	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	Sub kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	2350 berkas		2032	2032	100%	700 berkas	700 berkas	100%
	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan			600	600	100%	550 berkas	550 berkas	100%
	Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	persentase informasi yang dapat diakses masyarakat	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Sub kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	100%	1 lap	1 lap	100%

	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase arsip yang terlindungi dan terselamatkan	31,81 %	6,81	9,09	9,09	100%	9,09%	9,09%	100%
	Kegiatan Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Persentase Perangkat Daerah yang arsipnya dimusnahkan	31,81 %	6,81% (3/44*100%)	6,81% (3/44*100%)	6,81% (3/44*100%)	100%	9,09%	9,09%	100%
	Sub kegiatan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	-	-	2363 arsip	2363 arsip	100%	2250 arsip	2250 arsip	100%

	Keg Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/kota									
	Sub kegiatan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	2230 arsip		700 berkas	701 berkas	100%	750 berkas	750 berkas	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan pelayanannya, Perangkat Daerah menggunpu 40 Indikator (baik indicator program, kegiatan dan subkegiatan) Dari 40 indikator tersebut, seluruhnya dapat tercapai.

Meskipun seluruh indikator dapat tercapai, tapi ada juga beberapa kendala dalam pelaksanaan nya antara lain. :

1. Faktor eksternal yaitu pada system JIKN yang baru saja meluncurkan versi terbaru, sehingga kadang-kadang sistem tidak bisa dibuka karena perlu migrasi arsip-arsip berbagai daerah di Indonesia dari server lama ke server terbaru, Migrasi tersebut memerlukan proses yang panjang sehingga perlu ketelitian tinggi, mulai dari identifikasi arsip-arsip yang diunggah ke JIKN serta membuat skema organisasi dari pencipta arsip, kemudian unggah dan autentikasi arsip serta input deskripsi arsip. Selain itu sosialisasi kepada OPD dan masyarakat masih kurang terkait cara penggunaan JIKN
2. Tidak tersedianya dana pada anggaran awal,untuk pelatihan arsiparis, sehingga baru dapat dialokasikan pada anggaran perubahan, karena ada pergeseran anggaran, padahal bintek tersebut sangat diperlukan .

Dalam rangka mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut, telah dilakukan upaya-upaya yang meliputi:

1. Pencermatan dalam perencanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang paling urgen
2. Penyesuaian target dengan ketersediaan anggaran
3. Memprioritaskan arsip yang diunggah ke JIKN dan membuat jadwal personil agar fokus terhadap unggah arsip dan input deskripsi arsip di JIKN,
4. Merencanakan untuk menggelar sosialisasi kepada instansi dan masyarakat terkait portal JIKN sebagai sarana mencari arsip secara *online*

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK LPPD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2025	2025	2026	2023	2025	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban Nasional pasal 40 dan 59 Undang Undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan		IKK OUT COME	75,15				75,15	75,15	100	100	Tingkat capaian tinggi
2	Tinghat ketersediaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan		IKK OUT COME	66,67				66,67	66,7	66,7	100	Tingkat capaian IKK tinggi

	berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintah , pelayanan publik, dan kesejahteraan rakyat											
3	Nilai Tingkat kegemaran Membaca Masyarakat		IKK OUT COME	54,00	55,75	56,00	56,50	55,62	63,85	64,00	64,50	sedang
4	Indeks pembangunan literasi masyarakat		IKK OUT COME	4,28	12,79	12,81	12,87	73,11	60,84	60,87	61,00	tinggi

*) Kolom 3 diisi berdasarkan IKK outcome dalam lampiran Permendagri 18/2020

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan urusan pemerintahan dalam 2 urusan, yaitu urusan Kearsipan dan Urusan Perpustakaan. Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPD Tahun 2023-2026, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk tahun 2026 mencakup 2 urusan tersebut. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah diantaranya adalah:

a. **Permasalahan terkait bidang Kearsipan**

- Belum adanya Perda tentang Kearsipan;
- Peraturan-peraturan Bupati tentang kearsipan belum sepenuhnya dipahami dan disosialisasikan kepada OPD dan instansi-instansi lain;
- Belum dilaksanakannya pengelolaan arsip statis;
- Belum ada kesadaran dari semua OPD/ Desa/ Perusahaan/ Organisasi Politik/ Organisasi Kemasyarakatan/ Perseorangan untuk menyerahkan arsip statis ke DISARPUS;
- Belum semua pengelola arsip mendapatkan kesempatan untuk peningkatan kapasitas;
- Belum semua OPD/ Desa/ Perusahaan/ Organisasi Politik/ Organisasi Kemasyarakatan/ Perseorangan melaksanakan penataan dan pengelolaan arsip dinamis inaktif di masing-masing Unit Pencipta Arsip, serta belum adanya tenaga/ staf khusus yang menanganinya;
- Belum dilaksanakannya penyerahan arsip ke ANRI;
- Belum terlaksananya jaringan informasi kearsipan;
- Masih terbatasnya arsip yang dialih mediakan karena keterbatasan sarana pendukung;
- Belum adanya kesadaran setiap OPD untuk menganggarkan pengelolaan arsip inaktif;
- Belum adanya kesadaran setiap OPD untuk mengajukan usulan

aparatur ke Badan Kepegawaian dan Bagian Organisasi.

b. **Permasalahan terkait bidang perpustakaan**

- Belum optimalnya tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan;
- Kebutuhan masyarakat akan buku baru semakin meningkat;
- Masih ada bahan koleksi perpustakaan yang belum dilestarikan karena kondisinya rusak berat;
- Belum ada perpustakaan/lembaga yang mengikuti inter library loan (pinjam koleksi antar perpustakaan);
- Belum maksimalnya perpusda digital, antara ditandai dengan jumlah pembaca yang sedikit tidak sebanding dengan jumlah pengunjungnya.
- Belum semua perpustakaan/lembaga mengikuti program book loan (pinjam koleksi dari perpusda ke perpustakaan sekolah/desa/TBM);
- Belum semua perpustakaan yang ada di masyarakat, sekolah, dan lembaga lainnya mendapatkan pembinaan;
- Minimnya jumlah perpustakaan berprestasi karena masih banyak perpustakaan yang belum dikelola dengan baik;
- Masih rendahnya kesadaran OPD/Lembaga lain untuk menyerahkan hasil terbitannya ke perpustakaan daerah;
- Terbatasnya jumlah kegiatan peningkatan kapasitas pengelola perpustakaan;
- Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan;
- Terbatasnya pengawasan pemanfaatan layanan internet berakibat pada pemanfaatan internet di perpustakaan yang belum sesuai peruntukkanya;
- Keterbatasan sarana pendukung yaitu ruang/gedung yang memiliki kapasitas memadahi, bagi kaum disabilitas;
- Masih banyak perpustakaan yang belum mendapatkan fasilitasi sarana dan prasarana dikarenakan motivasi memajukan perpustakaan masih rendah;
- Koleksi naskah kuno belum tersedia (minimal berumur 45 tahun, masih ditulis tangan dan belum dicetak), baik yang diakuisisi maupun yang sudah dialihmedia / alih bahasa.

Permasalahan tersebut, jika tidak diselesaikan dapat menjadi constraint dalam pencapaian visi dan misi Bupati maupun capaian indikator lainnya. Beberapa dampak dari adanya permasalahan dan hambatan tersebut meliputi:

1. Tidak tercapainya target kinerja Kepala Daerah
2. Rendahnya kinerja Perangkat Daerah
3. Kebutuhan Literasi masyarakat tidak terakomodasi.
4. Penanganan Arsip yang tidak tertib;
5. Kurangnya koleksi arsip-arsip bersejarah milik daerah yang tersimpan;
6. Rendahnya minat budaya baca.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi, peningkatan kualitas birokrasi, dan meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan pengguna layanan akan meningkatkan kebutuhan akan adanya penyediaan produk layanan yang semakin baik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi inovasi dalam menunjang peningkatan pelayanan publik secara kontinyu. Beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, yaitu:

Tantangan

Kearsipan dan perpustakaan perlu terus menyesuaikan dengan perkembangan yang ada supaya tetap dibutuhkan masyarakat sehingga ada beberapa tantangan yang dihadapi, antara lain sebagai berikut:

a. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi di bidang kearsipan dan perpustakaan yang begitu pesat sehingga kearsipan dan perpustakaan perlu terus menyesuaikan dengan perkembangan yang ada;
b. Tuntutan masyarakat yang semakin komplekx dalam mengakses dan memperoleh informasi di bidang kearsipan dan perpustakaan;
c. Era Globalisasi yang mengakibatkan tuntutan akan keterbukaan dan akuntabilitas oleh masyarakat semakin kuat.

Peluang

Disamping beberapa tantangan diatas kearsipan dan perpustakaan juga memiliki beberapa peluang yang bisa dioptimalkan, antara lain sebagai berikut:

a. Terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam di mana setiap penerbit di wajibkan untuk menyerahkan hasil karyanya baik cetak maupun rekam sebagai koleksi daerah di perpustakaan;
b. Terbitnya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan dimana setiap Kepala Daerah baik Provinsi maupun Kab/Kota mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan perpustakaan umum di wilayahnya dan menjadi urusan wajib;
c. Terbitnya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan bahwa kepala daerah baik provinsi maupun Kab/Kota untuk menjamin ketersediaanya arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat, serta mendinamisasikan sistem kearsipan

Berdasarkan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangn tersebut, dapat diinventarisasi beberapa isu strategis. Inventarisasi isu-isu strategis tahun 2025 didapatkan dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal Kabupaten Banjarnegara sampai dengan tahun 2022. Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan pembangunan. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2025, sebagai berikut :

1. Perpustakaan
    a. Belum optimalnya tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan daerah;
    b. Belum optimalnya kunjungan ke perpusda digital;
    c. Belum optimalnya pembinaan dan kerjasama dalam pengelolaan dan pengembangan perpustakaan dengan lembaga lain.
    d. Tingkat kegemaran membaca masyarakat belum maksimal yaitu masih pada level sedang.
2. Kearsipan
    a. Masih belum optimalnya tata kelola kearsipan yang baik.

b. Masih rendahnya kualitas arsip yang ditandai dengan ketersediaan arsip yang autentik, utuh, aman, dan terpercaya di lingkup daerah yang masih rendah
c. Belum tersedianya payung hukum yaitu perda kearsipan;
d. Belum maksimalnya pelaksanaan audit internal dan audit eksternal kearsipan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Tahun 2026 merupakan pelaksanaan tahun keempat RPD Tahun 2023-2026. Dalam RPD Tahun 2023-2026, prioritas arah kebijakan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2026 meliputi:

Strategi Perangkat Daerah

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan jumlah kunjungan ke perpustakaan, baik offsite maupun online;
2. Menambah jumlah koleksi perpustakaan;
3. Meningkatkan pembinaan dan pendampingan pengembangan perpustakaan ber SNP;
4. Meningkatkan kapasitas tenaga pengelola perpustakaan dan kearsipan;
5. Meningkatkan jumlah OPD yang menerapkan pengelolaan arsip sesuai tata kelola arsip yang baik
6. Meningkatkan pemenuhan administrasi perkantoran.

Prioritas Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota melalui penambahan waktu operasional layanan, inovasi layanan, penambahan koleksi bahan pustaka baik konvensional maupun digital, dan promosi;
2. Melaksanakan pembudayaan gemar membaca di masyarakat melalui sosialisasi, perpustakaan keliling, pendidikan kemasyarakan, gelar

buku dan lomba lomba bidang perpustakaan;

3. Melaksanakan pengelolaan arsip dinamis dan pengelolaan arsip statis daerah;
4. Melaksanakan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota;
5. Melaksanakan Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun)
6. Melaksanakan Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota
7. Melaksanakan Pemarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang
8. Melaksanakan Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota
9. Melaksanakan pemenuhan administrasi umum, administrasi keuangan , jasa pelayanan kantor, perencanaan dan penganggaran serta pelaporan kinerja, pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana kantor.

Tabel 2.3

Rancangan Awal RKPD tahun 2026 Kabupaten Banjarnegara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Bnn**	**Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan (jmlh pengunjung N-(N-1) dibagi pengunjung N-1X100)**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Bnn**	**Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan (jmlh pengunjung N-(N-1) dibagi pengunjung N-1X100)**	6,82	**985,000,000**	
								Ketersediaan koleksi perpustakaan Daerah (jumlah	6,79		

								koleksi dibagi jumlah penduduk usia 10-69			
								Persentase perpustakaan berstandar nasional perpustakaan (jumlah perpus ber SNP dibagi jumlah seluruh perpus di wil)	8,7%		
1.1	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	hrm	Persentase pengunjung perpustakaan per tahun			Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	hrm	Persentase pengunjung perpustakaan per tahun	7,69%	**488.000.000**	

1.1.1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	bisa	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)			Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	bisa	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	1 layanan	40.000.000	
1.1.2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	bisa	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai			Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	bisa	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	56 perpus	100.000.000	

			Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya					n di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya			
1.1.3	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	bina	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan			Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	bina	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	125 perpus	75.000.000	

1.1.4	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Iran	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Memdapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Peningkatan Kejualitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Iran	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	80 orang	120.000.000	
1.1.5	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Iran	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Meningkatkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan			Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Iran	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Meningkatkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1500 eksp	150.000.000	

1.2	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	bnu	**Persentase pembudayaan kegemaran membaca dan literasi yang terlaksana**			Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	bnu	**Persentase pembudayaan kegemaran membaca dan literasi yang terlaksana**	100%	**500,000,000**	
1.2.1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	bnu	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan			Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	bnu	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	10 lokus	250.000.000	
1.2.2	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/	bnu	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota			Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	bnu	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	1 unit	250.000.000	

	Kota										
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase ketepatan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase ketepatan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	100%	5.830.000.000	
			Persentase administrasi perkantoran yang terpenuhi					Persentase administrasi perkantoran yang terpenuhi	100%		

2.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Persentase dokumen Perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersedia**			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Persentase dokumen Perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersedia**	100%	**10.000.000**	
2.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23 lap	10.000.000	
2.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Persentase administrasi keuangan yang terpenuhi**			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Persentase administrasi keuangan yang terpenuhi**	100%	3.720.000.000.000	
2.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 orng	3.680.000.000	

2.2.2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36 dok	40.000.000	
2.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Persentase administrasi umum yang terpenuhi**			Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Persentase administrasi umum yang terpenuhi**	12 bln	435.000.000	
2.3.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	50.000.000	

2.3.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	385.000.000	
2.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Persentase sarana prasarana Gedung kantor yang terpenuhi**			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Persentase sarana prasarana Gedung kantor yang terpenuhi**	100%	**550.000.000**	
2.4.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 unit	200.000.000	
						Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		tumlah unit gedung atau bangunan lainya yg disediakan	1 unit	350,000.000	

2.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase jasa pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi**			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase jasa pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi**	100%	290.000.000	
2.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 lap	110.000.000	
2.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang Disediakan	12 lap	180.000.000	
2.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	100%	**825.000.000**	

2.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 unit	60.000.000	
2.6.2	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	700.000.000	
2.6.3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 unit	65.000.000	

3	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**		**Persentase tata kelola kearsipan yang baik**			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**		**Persentase tata kelola kearsipan yang baik**	100%	**270.000.000**	
3.1	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase arsip yang dicta dan dikelola**			Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase arsip yang dicta dan dikelola**	100%	**95.000.000**	
3.1.1	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis		Jumlah naskah dinas yang diciptakan dan digunakan			Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis		Jumlah naskah dinas yang diciptakan dan digunakan	500 berkas	75.000.000	
3.1.2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis		Jumlah naskah dinas yang dilakukan pemeliharaan dan penyusutan			Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis		Jumlah naskah dinas yang dilakukan pemeliharaan dan penyusutan	700 berkas	20.000.000	
3.2	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase arsip statis yang terkelola**			Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase arsip statis yang terkelola**	**13,63% (9 OPD)**	**30.000.000**	
3.2.1	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis		Jumlah arsip statis yang dilakukan akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis			Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis		Jumlah arsip statis yang dilakukan akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis	400 arsip	15.000.000	
3.3	Pengelolaan		**Persentase**			Pengelolaan		**Persentase**	100%	**140.000.**	

	Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota		**informasi yang dapat diakses masyarakat**			Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota		**informasi yang dapat diakses masyarakat**		000	
3.3.1	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN		Jumlah layanan penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/kota melalui JIKN			Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN		Jumlah layanan penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/kota melalui JIKN	10penggun a	60.000.000	

3.3.2	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah laporan hasil pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota			Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah laporan hasil pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota	3 lap	80.000.000	
4	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**		**Persentase Arsip yang terlindungi dan terselamatkan**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**		**Persentase Arsip yang terlindungi dan terselamatkan**	**100%**	**144.000.000**	
4.1	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10		**Persentase Perangkat Daerah yang arsipnya dimusnahkan**			Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10		**Persentase Perangkat Daerah yang arsipnya dimusnahkan**	9,09%	**36.000.000**	

	(Sepuluh) Tahun					(Sepuluh) Tahun					
4.1.1	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun		Jumlah arsip yang dilakukan penilaian, penetapan, dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun			Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun		Jumlah arsip yang dilakukan penilaian, penetapan, dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun	2250 arsip	24.000.000	
4.2	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota		**Persentase arsip statis dan arsip hasil alih media yang terautentikasi**			Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota		**Persentase arsip statis dan arsip hasil alih media yang terautentikasi**	100%	**100.000.000**	

4.2.1	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keutuhan Arsip		Jumlah daftar autentisitas arsip sesuai persyaratan penjaminan keutuhan arsip yang dinilai dan ditetapkan			Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keutuhan Arsip		Jumlah daftar autentisitas arsip sesuai persyaratan penjaminan keutuhan arsip yang dinilai dan ditetapkan	1800 arsip	50.000.000	
	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keutuhan Arsip		Jumlah daftar arsip yang dilakukan penilaian dan penetapan alih media sesuai persyaratan penjaminan keutuhan arsip			Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keutuhan Arsip		Jumlah daftar arsip yang dilakukan penilaian dan penetapan alih media sesuai persyaratan penjaminan keutuhan arsip	800 arsip	80.000.000	

4.3	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang		**Persentase penetapan daftar pencarian arsip statis yang dinyatakan hilang**			Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang		**Persentase penetapan daftar pencarian arsip statis yang dinyatakan hilang**	100%	**20.000.000**	
4.3.1	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)		Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang ditetapkan penetapan dan pengumuman			Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)		Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang ditetapkan penetapan dan pengumuman	5 arsip	20.000.000	
5	**PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP**		**Persentase Penerbitan Izin Penggunaan Arsip Bersifat tertutup**			**PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP**		**Persentase Penerbitan Izin Penggunaan Arsip Bersifat tertutup**	**100%**	**35.000.000**	

	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten /Kota		**Persentase daftar pencarian arsip bersifat tertutup yang diterbitkan**			**Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten /Kota**		**Persentase daftar pencarian arsip bersifat tertutup yang diterbitkan**	**100 %**	**35.000.000**	
5.2.2	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup		Jumlah SOP penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disusun dan ditetapkan			Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup		Jumlah SOP penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disusun dan ditetapkan	3 sop	35.000.000	
	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup		Jumlah daftar arsip hasil penyediaan daftar dan penetapan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup			Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup		Jumlah daftar arsip hasil penyediaan daftar dan penetapan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup	5 arsip	10.000.000	

Berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2026, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan yaitu:

1. .....
2. .....
3. .....

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan musrenbang kecamatan dan forum konsultasi publik telah disampaikan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui aplikasi SIPD. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	-	-	-	-	-

2.6. Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan hasil reses anggota DPRD, melalui aplikasi SIPD telah disampaikan usulan program dan kegiatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Validasi
	-	-	-	-	-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

(Isikan prioritas pembangunan dalam RKP yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Lalu sajikan juga kebijakan dalam Renja K/L).

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

(Isikan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah yang mendukung penetapan RPD).

Penyusunan perencanaan kinerja Perangkat Daerah secara khusus berpedoman pada Permendagri Nomor 70 Tahun 2021 mengenai penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah yang berakhir tahun 2022. Dimana dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah tertuang dalam RPD 2023-2026 Kab. Banjarnegara dengan tetap memperhatikan RPJMN, RPJPD dan hasil evaluasi RPJMD.

Selanjutnya dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Peralihan 2023-2026 dan selanjutnya menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai acuan pelaksanaan kerja tiap tahunnya.

Disarpus sebagai salah satu perangkat daerah kabupaten Banjarnegara ikut berperan dalam penanganan isu strategis kabupaten dan pelaksanaan prioritas pembangunan daerah. Adapun isu strategis pembangunan kabupaten Banjarnegara dan prioritas pembangunan daerah telah ditetapkan dalam RPD Tahun 2023-2026 sebagai berikut:

a. Isu Strategis:
   1. **Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia;**
   2. Pemulihan perekonomian daerah yang berjalan lambat;
   3. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur;
   4. **Masih belum optimalnya tata kelola pemerintahan;**
   5. **Masih tingginya kemiskinan dan pengangguran.**
b. Prioritas Pembangunan Daerah (yang didukung OPD):

1. Penguatan literasi digital masyarakat
2. Meningkatkan kualitas budaya pelayanan public
3. Penguatan implementasi e-government
4. Peningkatan kualitas pendidikan nonformal dan kesetaraan

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah OPD

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 4 tahun ke depan. Adapun tujuan dan sasaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatkan efektifitas dan transparansi layanan publik

Sasaran :

- Meningkatnya minat baca masyarakat
- Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip daerah
- Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan
- Meningkatnya Kepuasan Masyarakat

Pernyataan tujuan dan sasaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Disarpus Tahun 2023-2026

Tujuan/Sasaran Disarpus	Indikator	Target			
		2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tujuan : Meningkatnya efektifitas dan transparansi layanan publik	Survey kepuasan masyarakat	84,34	85,00	85,34	86,00
Sasaran :					

Meningkatnya minat baca masyarakat	Indeks pembangunan literasi masyarakat	4,28	12,79	12,81	12,87
	Tingkat gemar membaca masyarakat	54,00	55,75	56,00	56,50
Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip daerah	Indeks Kearsipan	52,50	64,50	64,75	65,00
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan	Nilai Sakip OPD	73,00	73,77	74,00	74,25
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Nilai IKM	84,34	85,00	85,34	86,00

3.3. Program dan Kegiatan

(Salinkan matriks yang berasal dari SIPD)

Tabel 3.3 .

Rencana Program dan Kegiatan Disarpus Kab. Banjarnegara Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Uraian/Nama Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan kegiatan	Rencana Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
		Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kelompok Data Pagu Indikatif		APBD 2025	Hasil Desk		Target Capaian Kinerja	Kelompok Data/ Pagu Indikatif
				Sumber Data	Jumlah Pagu					
TOTAL GABUNGAN DISARPUS					**6.279.773.436**	**6.156.366.336**	**5.601.948.456**			
PERPUSTAKAAN					**985.000.000**		**375.486.000**			
PROGRAM PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN	**Peningkatan pengunjung perpustaka an**	Banyak cangkupan	6 lokasi		**985.000.000**	**1.324.886.000**	**375.486.000**		100%	**1.92 1.47 1.00 0**
	Terlaksanan ya kerja sama perpustakaan Daerah (jumlah kerja sama dibagi jumlah perpustaka an SKPD	Banyak cangkupan	6 SKPD							

	Persentase perpustakaan berstandar nasional perpustakaan (Jumlah perpus ber SNP dibagi jumlah seluruh perpus d wil)	Nasional	0,75							
Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	**Persentase pengunjung perpustakaan per tahun**	**Dinas pus**	**4,21%**	**APBD**	**480.000.000**	**1.175.691.000**	**225.496.000**		**100%**	**556.837.000**
Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Memaksimal Layanan TIK (berbasis ISO27000 (ITSM) Information Technology Service Management)	Dinas pus	1 layanan	APBD	40.000.000	0	40.000.000	Untuk pengadaan buku digital dalam rangka peningkatan literasi digital masyarakat	1 layanan	40.000.000
Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (sesuai	Dinas pus	86 perpus	APBD	100.000.000	50.496.000	50.496.000	Untuk pendampingan akreditasi perpus wilayah pilot yang	43 perpus	150.000.000

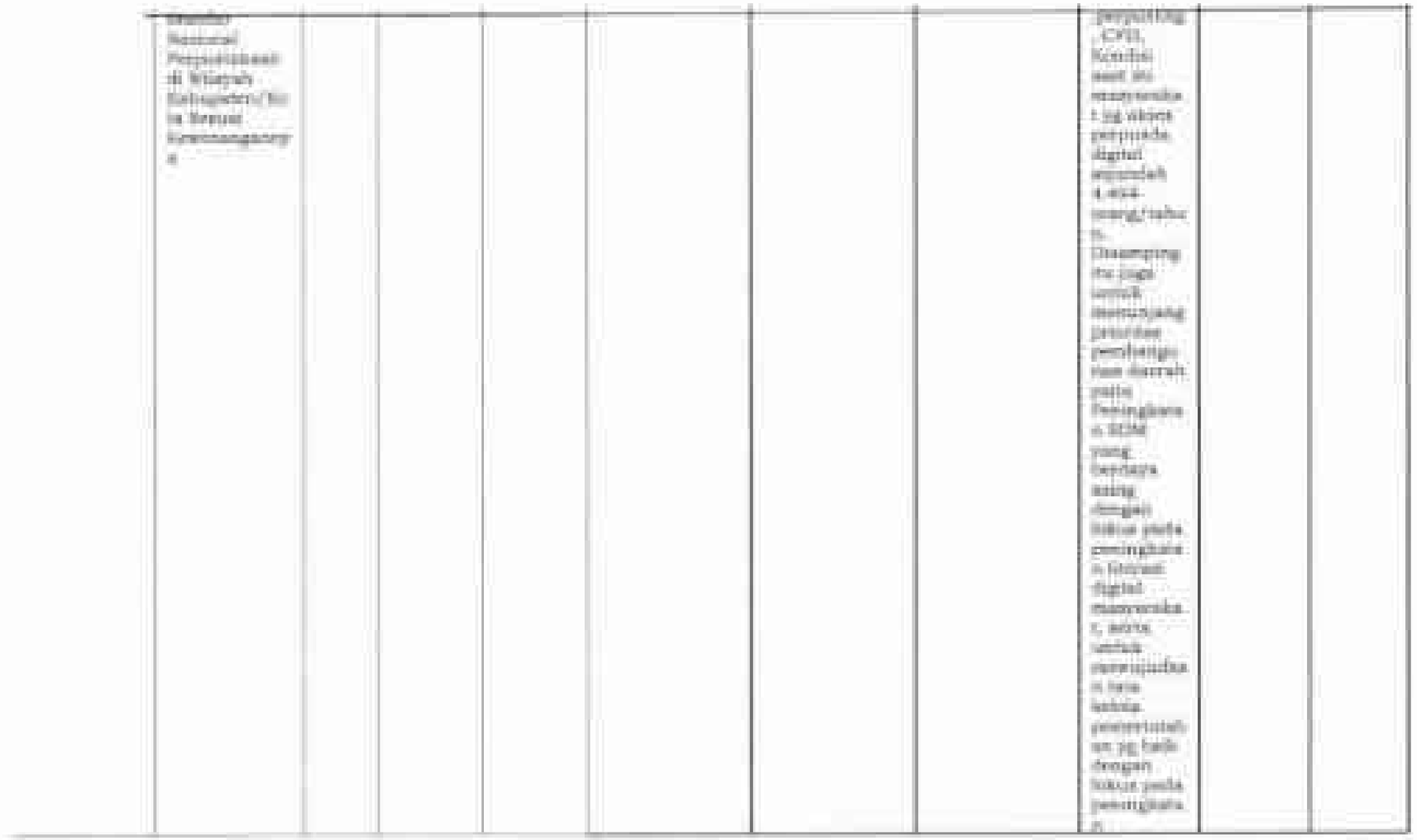

								pelayanan perlu, kit perpustaka a		
Pembinaan Perpustakaan pada sekolah Pendidikan dasar di seluruh wilayah kabupaten /kota sesuai standar nasional perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Sekolah Pendidikan Dasar dan yang Dikelolam Pembinaan dalam Memenuhi Standar Nasional Perpustakaan	1Nasional	125 perpus	APBD	75.000.000	15.309.000	15.000.000	Untuk pembinaan perpustaka perpus sdkolah TBM . Jumlah seluruh perpustakaan di kab Banjarnegara adalah 625 perpustakaan yang sdhagian besar belum terkelola dengan bajk. Sntag sehuinga Diadpus semangka kurang ichb kb perpus, maka da kurang perpustaka al Jan. Diharapkan jumlah seluruh perpus	150 perpus	62.5 00.0 00

Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pearsipan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Meningkat Kualitas Layanan Tenaga Perpustakaan dan Pearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas/ pus	80 orang	APBD	120.000.000	80.000.000	80.000.000	Sistem lenaga perpustaka an sekolah/ desa/TBM /Jumlah tenaga perpustaka an se kab Banjarnega ra sebanyak 1.201 orang . Untuk itu sangat penting untuk lata nasi@ada n perpustaka an yg baik, dan berstandar nasional perpustaka an	80 orang	80.0 27.1 00
Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan		Dinas/ pus				0				
Pengembangan Kelembagaan Kinerja Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota		Dinas/ pus				0				

Pengelolaan dan penggandaan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dialihkan Pengelolaan dan Penggandaan untuk Meningkatkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Dinas pus	400 eksemplar	APBD	140.000.000	3.000.000.000	40.000.000	Pengelolaan bahan pustaka untuk dan DOF pengalihan fulltix	1500 eksemplar	200.000.000
Keg Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	**Persentase penggelolaan sarana dan prasarana perpustakaan**	**Dinas pus**	**100%**	**APBD**	**800.000.000**	**48.998.900**	**100.000.000**		**100%**	**1.36 4.83 4.00 0**
Koordinasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Umum serta Masyarakat	Jumlah Lomba Pembudayaan Gegemarna Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Dinas pus	10 lokasi	APBD	250.000.000	48.998.900	50.000.000	Untuk lomba lomba hal perpustakaan (A Lomba) , dan Y Pelatihan kompetensi an berbasis sekolah sosial,	10 lokasi	364 .531 .900

Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat umum Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah gedung dan sarana perpustakaan ditempat umum yang tersedia	Dasar gun	1 unit	APBD	250.000.000	2024	100.000.000	Pengadaan PC Komputer untuk ruang operator sebanyak 5 unit 100.000.000 ; saat ini 5 ruang operator hanya ada 4 komputer, pengadaan rak buku anak 4 buah 40.000.000 dapat ses rak alfi yang dari kayu, dan sebelahnya kurang memadai. 1 rak display buku baru 10.000.000 pengadaan troli buku 4 buah 10.000.000 pengadaan laptop 2 buah 50.000.000	1 bangunan	1.00 0.00 0.00 0

Pemberian Penghargaan Gerakan Sudara Gotong Masyarak		Dinas pen	1 mkl	APBD		DAK				
PROGRAM PELESTARIA N BUDAYA NASIONAL DAN KAWAH EURO						0				
Pelestarian Naskah kuno utk daerah kabupaten/k ota										
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pendaftaran naskah kuno dan upaya pelestarian						DAK				
SEKRETARI AT							**5.041.027.436**			
PROGRAM PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN /KOTA	**Penetapan kebijakan pengelolaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja**	Dinas pen	**100%**	APBD	**5.880.000.000**	**4.886.775.936**	**5.041.027.436**		**100%**	
	Pemantauan administrasi	Dinas pen	**100%**						**100%**	

	perbaikannya yang terpenuhi									
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersedia**	Dinas/ pus	**100%**	APBD	**10.900.000**	**10.900.000**	**10.900.000**		**100%**	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas/ pus	23 lap	APBD	10.000.000	10.000.000	10.000.000		23 lap	15.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase administrasi keuangan yang terpenuhi**	Dinas/ pus	**100%**	APBD	**5.330.000.000**	**5.713.766.438**	**5.713.766.438**		**100%**	
Pemrosesan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas/ pus	53 orang	APBD	5.000.000.000	5.675.231.438	5.675.231.438		53 orang	5.675.000.000
Pelaksanaan Pencocokan dan Penggajian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pencocokan dan Penggajian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas/ pus	96 dok	APBD	40.000.000	38.535.000	96.535.000		96 dok	92.000.000
Administrasi Umum Perangkat	**Persentase administrasi umum yang**	Dinas/ pus	**100%**	APBD	**435.000.000**	**489.827.000**	**425.877.000**		**100%**	

Daerah	terpenuhi)									
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Disesuaikan	1 paket	APBD	93.000.000	84.090.000	80.000.000	Kebutuhan biaya kelengkapan perangkat (bersamaan gedung baru yang lebih luas	1 paket	83.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Disesuaikan	12 paket	APBD	380.000.000	385.677.000	385.677.000		12 paket	400.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase sarana prasarana Gedung kantor yang terpenuhi**	Disesuaikan	100%	APBD	500.000.000	491.868.000	490.000.000		100%	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung atau bangunan lainnya yg disediakan	Disesuaikan		APBD	200.000.000		200.000.000	Pengadaan DED Gedung Kearsipan, Perpustakaan & Pos Satpam DED Gedung lantai 10 juga untuk rencana lantai bagi pimpinan, 1/2 pos satpam lengkap + fasilitas		200.000.000

Pengadaan Barang dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Barang dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Dasar pun	7 unit	APBD	200.000.000	200.000.000	200.000.000	Untuk pengadaan kursi seminar ukuran: cm : Lebar: 50 P: 50 tebal: Kursi Tumpuk (50 kualit), Kursi Putar P, Rapat, Kursi Kulit pertualita dilabel	8 unit	232.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase jasa pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi**	Dasar pun	**100%**	APBD	**200.000.000**	**170.344.000**	**200.344.000**		**100%**	220.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dasar pun	12 bln	APBD	120.000.000	99.600.000	120.000.000		12 bln	121.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dasar pun	12 bl	APBD	180.000.000	170.344.000	170.344.000		12 bl	196.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	Dasar pun	**100%**	APBD	**825.000.000**	**126.666.000**	**812.500.000**		**100%**	

Cetakan Penerimaan Daerah										
Penyelesaian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Dinas pus	15 unit	APBD	60.000.000	52.350.000	52.350.000	beberapa motor sudah waktunya ganti ban dan servis besar saat ini dharun mengunggu kendaran inventaris berupa 7 mobil dan 8 motor	15 unit	65.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dinas pus	3 unit	APBD	350.000.000	15.750.000	350.000.000	untuk penyempurnaan gedung kelv Ruang Dewan, LED Videotron Dishub, Bandung N. Kapri B Aceh) untuk pemeliharaan rutin	3 unit	350.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dinas pus	30 unit	APBD	40.000.000	61.500.000	40.000.000	Pemeliharaan komputer /printer pemeliharaan AC 24 unit, penjilidan koran	30 unit	75.500.000

KEARSIPAN					**440.000.000**	**66.000.000**	**187.225.000**				**666.000.000**
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	**Persentase tata kelola kearsipan yang baik**	**Dinas pus**	**100%**	**APBD**	**270.000.000**	**52.378.000**	**108.000.000**		**100%**		**300.000.000**
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/ Kota	**Persentase arsip dinamis yang terkelola**	**Dinas pus**	**100%**	**APBD**	**95.000.000**	**12.450.000**	**40.000.000**		**100%**		**105.000.000**
Peningkatan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dialihkan dan Digunakan	Dinas pus	930 berkas	APBD	75.000.000	22.950.000	25.000.000	-Bimtek kearsipan ke 25 OPD tahunnya Perka ANRI	900 berkas		80.000.000
								-Dilar Pengelolaan Kearsipan Daerah Tahun 2024, Peringkat (), dari 35			
								-Bimtek Pembinaan Arsip SRIKANDI kepada seluruh OPD, UPTD, Kecamatan, Kelurahan, dan Desa dengan masing-			

								masing-masing pemerintah daerah sesuai kewenangan - Bidang/Dinas/Badan/Kantor dan DPMPTSP Prov. Jawa Tengah		
Pemeliharaan dan Perawatan Arsip Dinamis	Jumlah Satuan Unit yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	Dinas/pos	900 berkas	APBD	27.000.000	9.000.000	18.000.000	- Pengelolaan arsip fisik dan tidak dari Dinas yang sudah dilayankan - Memberi peralatan kelengkapan untuk ruangan penyimpanan arsip, seperti penyedot debu, sapu lantai, dan lain-lain	1000 berkas	35.000.000
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/ Kota	**Persentase arsip statis yang terkelola**	**Dinas/pos**	**13,63% (6 OPD)**	**APBD**	**30.000.000**	**0**	**18.000.000**		**13,63% (6 OPD)**	**40.000.000**

Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah arsip statis yang diakuisisi akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis	Dasar pos	40 arsip	APBD	35.000.000	0	15.000.000	Pelaksanaan, akuisisi dan pengolahan Akuisisi arsip statis Meningkat dari Jadi Meningkat dari yang lama ke baru	500 arsip	40.000.000
								Biaya pengolahan, preservasi dan penyusutan arsip statis untuk arsipnya mengolah nanasmin		
Pengelolaan Sistem Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/ Kota	**Penyediaan informasi arsip yang layak kepada masyarakat melalui teknologi informasi**	**Dasar pos**	**100%**	**APBD**	**140.000.000**	**19.928.000**	**25.000.000**		**100%**	**155.000.000**

Pengelolaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kab/Kota Melalui JIKD	Jumlah Layanan Pengelolaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kab/Kota Melalui JIKD	Dasar pem	Sb penggunaa	Kriteri	Indikator	Sb Satuan	ah Indikator	Petunjuk pelaksana arsip aktif yang mengel pemprov Kepala DPAD Provinsi Jawa Tengah selama 2 hari	Sb penggunaa	Indikator
								Mengelola Data arsip aktif untuk kepentingan Kepala Dinas dan Sekretaris Daerah		
								Mengelola TV dan standing fan untuk kepentingan Sekretaris Dinas dan staf ahli untuk pimpinan lainnya dan kantornya (5		

								kabkot		
								- Bimtek pengelolaan dan anggaran arsip ke OPD dengan mengundang beberapa OPD, Kelurahan, dan Desa yang memiliki arsip statis dan berpotensi		
Pembinaan/pengawasan Kepatuhan Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan/pengawasan Kepatuhan Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2 laporan	APBD	80.000.000	0	25.000.000	Bimtek pengelolaan arsip statis dan inaktif selama 3 hari dengan peserta OPD dan Kecamatan pemenang lomba arsip dan pemagang 2 hr,	4 laporan	85.000.000

								- Dapat Memperoleh Materi Kuliah/ Bengan (prosiding artikel tentang Wisata Orang atau lapangan (Dalam)		
								- Menggelar Lomba Antarpara Tingkat Kabupaten dan pemerintah kota ke Tingkat Provinsi		
								- Mendapat beasiswa DIKUR untuk kab dan Akademisi kegiatan/ciri-ciri penting Kegiatan yang dipunyai oleh pemuda kualitas pemahaman tahun 2017		

Daftar Pertelaan Arsip (DPA)	Arsip Dideskripsi Penetapan dan Penggunaannya							Legalisir ini sebenarnya (tanggal ke h Mengidentifikasi dan melaporkan arsip inaktif dan vital dan Bupati Banjarnegara yang perlunya penetapan hari jadi terbaru yang belum dibuat dan sudah		
PROGRAM PEMBINAAN PENGGUNAAN ARSIP	**Pemantauan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup**	**Dinas/ pos**	**100%**	**APBD**	**30.000.000**	**0**	**30.000.000**		**100%**	**50.000.000**
Pelayanan tata Penggunaan Arsip yang bersifat Tertutup di Kabupaten/ Kota	**Pemantauan pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup**	**Dinas/ pos**	**100%**	**APBD**	**30.000.000**	**0**	**30.000.000**		**100%**	**50.000.000**

Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	Dokumen	5 SOP	APBD	20.000.000	0	20.000.000	- Mengunakan Perbup dan SOP - Koordinasi dengan instansi terkait - Melibatkan OPD terkait, seperti Bagian Hukum, Bagian Organisasi, dan Bagian Tapem untuk pembahasan (jadi	5 SOP	20.000.000
Pemrosesan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Pemrosesan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Dokumen	5 arsip	APBD	10.000.000	0		- Identifikasi dan evaluasi penggunaan yang ingin izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup	5 arsip	10.000.000

PROGRAM PEMELIHARAAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	**Persentase Perangkat Daerah yang arsipnya terlindungi dan terselamatkan**	**Dinas pus**	**13,63% (6 OPD)**	**APBD**	**144.000.000**	**34.325.000**	**72.325.000**		**9,09%**	**110.000.000**
Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh Tahun)	**Persentase Perangkat Daerah yang arsipnya dimusnahkan**	**Dinas pus**	**9,09% (4 OPD**	**APBD**	**24.000.000**	**22.325.000**	**22.325.000**		**9,09% (4 OPD)**	**25.000.000**
Penilaian, Pertimbangan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Pertimbangan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Dinas pus	2250 arsip	APBD	24.000.000	22.325.000	22.325.000	Penilaian dan pelaksanaan pemusnahan arsip kepada 4 OPD dengan penggolongan repat dan pemilahan arsip yang benar benar akan dimusnahkan	2250 arsip	25.000.000

Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/ Kota	**Pemusnaan arsip statis dan arsip hasil alih media yang terautentikasi**	**Dinas pus**	**100%**	**APBD**	**100.000.000**	**12.300.000**	**80.000.000**		**100%**	**56.000.000**
Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Pengelolaan Keamanan Arsip	Jumlah Daftar Autentikasi Arsip Sesuai Persyaratan Pengelolaan Keamanan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	Dinas pus	1.800 arsip	APBD	80.000.000	0	30.000.000	- Termasuk implementasi bahwa arsip tersebut telah diautentikasi dan dinyatakan - Meliputi: analisis peta dan lintasan para ventikal	2.000 arsip	60.000.000
Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Pengelolaan Keamanan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dialihkan Penilaian dan Penetapan Alih Media sesuai Persyaratan Pengelolaan Keamanan Arsip	Dinas pus	800 arsip	APBD	80.000.000	12.500.000	20.000.000	- Membeli server dan harddisk eksternal untuk penyimpanan arsip-arsip yang diautentikasi	1300 arsip	6.000.000
Penerbitan Arsip Statis Kabupaten/ Kota yang Dinyatakan Hilang	**Penerbitan penetapan daftar pencarian arsip statis yang dinyatakan hilang**	**Dinas pus**	**100%**	**APBD**	**20.000.000**	**0**	**0**		**100%**	**25.000.000**
Penetapan dan Pengumuman	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Dinas pus	5 arsip	APBD	20.000.000	0	0	- Termasuk kegiatan/ bahwa arsi	10 arsip	25.000.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program pada perangkat daerah merupakan program prioritas dalam Renstra 2023-2026. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPD selanjutnya dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Pemilihan untuk masing-masing program/ kegiatan Sebagai berikut

(mengacu pada bab 5 RKPD)

1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Program Pembinaan Perpustakaan yang terdiri dari 2 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dan Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Dengan 6 sub kegiatan yaitu Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di seluruh wilayah kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional perpustakaan; Peningkatan Kapasitas tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka serta sub kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat dan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan Kegiatan dan Sub kegiatan tersebut diatas, Bidang Perpustakaan pada tahun 2026 akan melaksanakan,pengembangan Layanan Perpustakaan berupa Perpustakaan keliling, gelar Buku, Wisata Buku, Story telling , Book Loan serta melakukan survey indeks gemar membaca dan indeks literasi sebesar Rp. 50.486.000,- melaksanakan supervise ke perpustakaan desa dan sekolah, sebesar Rp. 25.000.000; melaksanakan bimtek tenaga perpustakaan sebesar

Rp. 60.000.000; melaksanakan penambahan koleksi buku umum , pengolahan buku baru serta perbaikan buku rusak sebesar Rp. 50.000.000; pengadaan buku digital 40.000.000,- dan melaksanakan sosialisasi budaya baca dan literasi , Pendidikan kemasyarakatan, Lomba -lomba bidang perpustakaan serta pengadaan sarana prasarana untuk Ruang Layanan Perpustakaan sebesar Rp. 100.000.000,-.

2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Arsip

Program pengelolaan arsip terdiri dari 3 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota, Keg Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota dan Keg Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota Dengan 5 sub kegiatan yaitu Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis; Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis, Akuisisi Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis, Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kab/Kota Melalui JIKN, dan sub kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota.

b. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Program perlindungan dan penyelamatan arsip terdiri dari 3 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun, Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota , dan kegiatan Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang. Dengan 5 sub kegiatan yaitu Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun ; Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di bawah 10 Tahun; Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis

sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip; Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip; dan sub kegiatan Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA).

c. Program Perijinan Penggunaan Arsip

Program Perijinan Penggunaan Arsip terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota Dengan 1 Sub Kegiatan yaitu Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup.

Berdasarkan Kegiatan dan Sub kegiatan tersebut diatas, Bidang Kearsipan pada tahun 2026 akan melaksanakan Audit pengawasan kearsipan internal ke 23 OPD dan mengadakan Gelar Pengawasan Kearsipan Daerah untuk pengumuman hasil guna menunjang Reformasi Birokrasi ; Bimtek SIKKANDI terkait pemberkasan arsip digital yang menyasar OPD dan Kecamatan yang bertujuan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan dengan fokus penguatan implementasi e-government sebesar Rp. 25.000.000; melaksanakan penangan arsip inaktif sebesar Rp. 15.000.000; Memperbaiki arsip-arsip statis yang disimpan DISARSUS karena sudah beberapa kali mengalami pemindahan tempat untuk meningkatkan kualitas layanan public; sebesar Rp. 15.000.000; Melaksanakan bimtek kearsipan dan lomba arsiparis sebesar Rp. 25.000.000; melaksanakan pemusnahan arsip sebesar Rp. 22.225.000; melaksanakan alih media arsip sebesar Rp. 20.000.000; pengadaan scanner peta, dan lemari peta 30.000.000,-. dan merevisi / menyusun perbup-perbup tentang kearsipan sebesar 10,.000.000,-.

Selain melaksanakan Program pada Urusan Perpustakaan dan Kearsipan OPD juga melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 6 Kegiatan dan 12 Sub Kegiatan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut difokuskan untuk pemenuhan kegiatan/operasional yang bersifat wajib dan rutin dengan biaya sebesar Rp. 5.041.037.436 ,-.

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2023-2026. Renja Perangkat Daerah selanjutnya menjadi platform operasional bagi Perangkat Daerah dalam menjalankan programnya dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah tahun 2023-2026. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026 dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disepakati.
2. Kerangka pendanaan dalam Renja Perangkat Daerah masih bersifat sementara, sehingga masih dimungkinkan terjadi perubahan pagu yang disebabkan oleh pengurangan, penambahan, dan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan maupun antar sub kegiatan dalam kerangka penyusunan anggaran secara terpadu dan berbasis kinerja.
3. Renja Perangkat Daerah menjadi acuan bagi Kepala Perangkat Daerah dan segenap jajarannya serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, serta menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal : - 2025
KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Drs. ARIEF RAHMAN, ST, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661022 198603 1 005

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi PembangunanDaerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan DaerahTentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah danRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta TataCara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan RencanaKerja Pemerintah Daerah,terminologi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah)didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat memuat program, kegiatan,lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikatorkinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsisetiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedomankepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sudah dilaksanakansesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan yang diatur melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan pembentukan tim penyusun, penelaahan rancangan awal RKPD, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, hingga pada penyempurnaan berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang RKPD. Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, penyusunan Renja Perangkat Daerah juga mengacu pada Renja Kementerian/Lembaga terkait, serta Renja Perangkat Daerah Provinsi terkait.Renja Perangkat Daerah adalah dokumen

perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2. Landasan Hukum

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Banjarnegara No. 36 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara;
8. Peraturan Bupati No. Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun dengan maksud untuk:

a. Menjabarkan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029 ke dalam rencana program kegiatan prioritas Tahun 2026 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Renja K/L Tahun 2026 dan Renja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;
b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerapan anggaran berbasis kinerja.

Sedangkan tujuan dari penyusunanRenja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

a. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA-DPA dalam Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2026, yang dalam penyusunannya didahului dengan menyusun Kebijakan Umum AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026;
b. Sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Tahun 2026;
c. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun berdasarkan sistematika yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah.

BAB 2 : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dan atau pokok-pokok DPRD.

BAB3 : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan tahun 2026.

BAB 4 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuatrencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran RKPD.

BAB 5 : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah meliputi urusan urusan wajib pelayanan dasar yaitu bidang kentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 terdiri dari 3 program, 11 kegiatan, dan 20 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 14.211.277.846-, dengan fokus utama pada peningkatan pelayanan dasar yaitu meningkatkan peran aktif masyarakat dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum serta meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kesiagaan dalam menghadapi bencana dalam rangka memperkuat stabilitas Politik, Hukum, Keamanan Ketentraman dan transformasi pelayanan pulik Program/ kegiatan/ sub kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah yang meliputi:

1. Tindak lanjut setelah dilaksanakannya kegiatan penertiban ketentraman dan ketertiban umum masih perlu mendapatkan perhatian khusus seperti penertiban PKL, WTS, PGOT dan anak jalanan agar mereka tidak kembali
2. Sumber daya manusia belum sepenuhnya tersedia pada kegiatan yang memerliukan sertefikasi dan kewenangan khusus seperti PPNS di Satpol PP baru ada 3 orang, adapun dinas yang seharusnya mengampu Perda memuat sanksi pidana belum terdapat PPPNS seperti BPPKAD, DPU, DPPKLH, Dinparbud, Dindukcapil dan Dins Kominfo. Sehingga dalam pelaksanaan tugas penyidikan masih bertumpu di Satpol PP
3. Berdasarkan data laporan kejadian kebakaran, 20% berada di WMK, 80% masih berada diluar WMK atau masuk dalam wilayah

yang belum terlindungi (unprotected area), dengan demikian pengembangan WMK menjadi kebutuhan yang perlu segera direalisasi . Ukuran dan luas WMK diatur dalam Permendagri Nomor 69 Tahun 2012. Banjarnegara minimalnya memerlukan tambahan 2 WMK beserta kelengkapan sarana dan prasaranya tiap WMK terdapat 2 mobil, 1 unit mobil pemadam kebakarn dan 1 unit cadangan.

4. Kapasitas Linmas Desa masih perlu ditingkatkan sebagai penggerak sistem keamanan lingkungan di wilayah desa.
5. Penyadaran masyarakat terhadap peraturan-peraturan yang ada denan sosialisasi, pembinaan, patroli dan penegakan perda guna meningkatkan kepatuhan dan memberikan efek jera.

Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024, terjadi beberapa perubahan yang meliputi penambahan atau pengurangan pagu, penghapusan, penambahan atau penguranganprogram/kegiatan/sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Perubahan tersebut mengubah rincian dalam Renja Perangkat Daerah menjadi 3 program, 11 kegiatan, dan 23 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 14.592.255.367,- Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2024.

Tabel. 2.1. Anggaran Perubahan tahun 2024

PROGRAM/ KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1 05 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**8,955,201,346**	**9,086,614,436**	**131,413,090**
1 05 01 2.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**6,499,600**	**6,499,600**	**-**
0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,999,800	2,999,800	-
0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD	3,499,800	3,499,800	-
1 05 01 2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5,343,442,696**	**5,628,855,856**	**285,413,160**
0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,307,855,696	5,593,268,856	285,413,160
0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	35,587,000	35,587,000	-

1 05 01 2.05	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**38,696,400**	**38,696,400**	**-**
0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	38,696,400	38,696,400	-
1 05 01 2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1,712,350,400**	**1,601,141,900**	**- 111,208,500**
0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1,712,350,400	1,601,141,900	- 111,208,500
1 05 01 2.07	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**66,209,000**	**196,209,000**	**130,000,000**
0010	Sub Kegiatan Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	66,209,000	196,209,000	130,000,000
1 05 01 2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1,497,999,980**	**1,152,999,980**	**- 345,000,000**
0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54,000,000	54,000,000	-
0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,443,999,980	1,098,999,980	- 345,000,000
1 05 01 2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**290,003,270**	**462,211,700**	**172,208,430**
0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200,002,900	281,002,700	80,999,800
0010	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75,000,370	166,209,000	91,208,630
0011	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15,000,000	15,000,000	-
1 05 02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**4,781,156,500**	**4,990,720,931**	**209,564,431**
1 05 02 2.01	**Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**4,329,211,500**	**4,463,775,931**	**134,564,431**
0015	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melaui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	980,831,500	1,019,831,501	39,000,001
0004	Sub Kegiatan Pemberdayaan Pelindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	3,348,380,000	3,373,944,430	25,564,430
0005	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	-	40,000,000	40,000,000
0018	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	30,000,000	30,000,000
1 05 02 2.02	**Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota**	**451,945,000**	**526,945,000**	**75,000,000**
0010	Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	80,204,000	124,897,600	44,693,600
0012	Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	7,550,000	7,550,000	-
0011	Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	364,191,000	394,497,400	30,306,400

1 05 04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**474,920,000**	**514,920,000**	**40,000,000**
1 05 04 2.01	**Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, Dan Penanganan Bahan Berbahaya Dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**369,920,000**	**409,920,000**	**40,000,000**
0002	Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	369,920,000	369,920,000	-
0017	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	-	40,000,000	40,000,000
1 05 04 2.04	**Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	**105,000,000**	**105,000,000**	**-**
0001	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	65,000,000	65,000,000	-
0002	Sub Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	40,000,000	40,000,000	-
				-
Jumlah		**14,211,277,846**	**14,592,255,367**	**380,977,521**

Dinamika yang terjadi selama tahun 2024 turut mempengaruhi keberhasilan pencapaian Renja Perangkat Daerah.Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2024, tercatat adanya hasil yang baik yang dikarenakan adanya pencapaian maupun pelampauan target maupun yang tidak memenuhi target.

a. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi :

1. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
   Terdapat 1 dari 5 indikator program yang belum memenuhi target kinerja yang ditetapkan. Indikator tersebut ialah ;
   - Persentase PPNS yang aktif, dari target sebesar 42.85% (6 PPNS yang aktif) baru tercapai 23.08% (baru 3 PPNS yang aktif) dari target.
2. Pencegahan,Penanggulangan,Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.
   Terdapat 1 dari 4 indikator program yang belum memenuhi target kinerja yang ditetapkan. Indikator program tersebut ialah Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Target yang ditetapkan ialah 100 %, dan pada tahun 2024 hasil yang

diraih sebesar 91.67% sehingga pencapaian yang didapatkan ialah 91.67%

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaktercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum masih kerap terjadi;
2. Belum terjangkaunya penanganan gangguan tibum tranmas dan penegakkan Perda di daerah pinggiran dan wilayah Kecamatan secara keseluruhan;
3. Terbatasnya jumlah dan kapasitas personil Satpol PP untuk melaksanakan patroli dan penegakan perda;
4. Terbatasnya sarana dan prasarana kerja untuk mendukung pelaksanaan patroli dan operasi penegakan perda;
5. Pemahaman serta kepatuhan hukum masyarakat dan pelaku usaha terhadap perda dan perkada yang memuat sanksi masih rendah;
6. Terbatasnya jumlah dan kapasitas PPNS terutama pada OPD Pengampu Perda/Perkada;
7. Kurang terkoordinasinya pelanggaran Perda/Perkada antara OPD dan Satpol PP.
8. Belum Optimalnya Pemberdayaan Pelindungan Masyarakat dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban umum;
9. Terbatasnya cakupan pelayanan pencegahan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran.

b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan/subkegiatan yang telah memenuhi target kinerja indikator hasil/keluaran yang direncanakan meliputi,

- Persentase Penanganan Gangguan Trantibum Linmas target 100%, hasil yang diraih 100%, sehingga tercapai 100 % dari target yang ditetapkan;

- Cakupan Pemberdayaan Pelindungan Masyarkat (Satlinmas) target 9.47%, hasil yang diraih 82.07%, sehingga tercapai 100 % dari target yang ditetapkan;
- Cakupan Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP target 100%, hasil yang diraih 100%, sehingga tercapai 100 % dari target yang ditetapkan;
- Cakupan Layanan Dampak Penegakan Perda/Perkada target 100%, hasil yang diraih 100%, sehingga tercapai 100 % dari target yang ditetapkan;
- Persentase Kecamatan memiliki pos pemadam kebakaran target 15%, hasil yang diraih 15%, sehingga tercapai 100 % dari target yang ditetapkan;
- Persentase terbentuknya relawan pemadam kebakaran (Redkar) didesa/ kelurahan target 35.25%, hasil yang diraih 35.25%, sehingga tercapai 100 % dari target yang ditetapkan;
- Persentase cakupan pelayanan peyelamatan non kebakaran target 100%, hasil yang diraih 100%, sehingga tercapai 100 % dari target yang ditetapkan;
- Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana target 100%, hasil yang diraih 100%, sehingga tercapai 100 % dari target yang ditetapkan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Personil yang siap menegakan Perda dan menindak pelanggaran
2. Adanya dukungan dan komitmen yang tinggi dari Pimpinan Daerah dan PPNS yang ada di Satpol PP dalam pelaksanaan penegakan Perda.
3. Adanya pembinaan bagi anggota Satpol PP serta kegiatan patroli rutin 3 kali sehari selama 24 jam dan patroli keamanan lingkungan dan optimalisasi peran Kasi Trantibum dan pelayanan masyarakat di Kecamatan sebagai penyelenggara trantibum linmas di tingkat kecamatan.
4. Keberadaan satlinmas memiliki dukungan regulasi yang kuat serta anggota Satlinmas terorganisir dari tingkat kabupaten, kecamatan sampai ke desa.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka untuk memastikan pencapaian target-target program/kegiatan/sub kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka mewujudkan kondusifitas wilayah, pengendalian, konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan harus dilaksanakan. Pada tahun perencanaan selanjutnya, perlu diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, diantaranya:

1. Meningkatkan cakupan patroli petugas Satpol PP per hari;
2. Meningkatkan jumlah operasi pengendalian keamanan lingkungan;
3. Meningkatkan jumlah pemberdayaan pelindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum;
4. Meningkatkan jumlah peningkatan kapasitas SDM Satpol PP;
5. Meningkatkan cakupan layanan dampak penegakan perda/perkada;
6. Meningkatkan jumlah operasi pengawasan dan inventarisasi pelanggaran perda/perkada;
7. Meningkatkan jumlah operasi penertiban pelangggaran perda/perkada;
8. Meningkatkan jumlah penanganan pelanggaran perda yang ditindaklnjuti dengan proses tipiring;
9. Meningkatkan jumlah PPNS yang aktif;
10. Meningkatkan cakupan operasi pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten /kota;
11. Meningkatkan jumlah inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
12. Meningkatkan persentase tercukupinya sarana dan prasarana pencegahan, penggulangan kebakaran dan alat pelindung diri yang sah dan legal sesuai standar teknis terkait;
13. Meningkatkan jumlah pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran;
14. Meningkatkan jumlah pelayanan operasi pencarian dan

pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia;

15. Meningkatkan persentase terlayaninya penyampaian laporan atau ikhtisar capaian kinerja perangkat daerah;
16. Meningkatkan persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah;
17. Meningkatkan persentase terlayaninya administrasi kepegawaian perangkat daerah
18. Meningkatkan persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah;
19. Meningkatkan persentase terpenuhinya sarana prasarana aparatur;
20. Meningkatkan persentase terlayaninya administrasi perkantoran;
21. Meningkatkan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur.

1. Meningkatkan sinergitas dan kualitas koordinasi antar lembaga/instansi terkait, PPNS penegak undang-undang yang ada di OPD perlu diaktifkan (kurangnya motivasi serta menggiatkan sekretariat PPNS.

2. Meningkatkan Kapasitas PPNS, pembekalan secara berkala kepada anggota dan mengikuti/update tehadap pembahasan peraturan perundang-undangan daerah.

3. Mengusulkan penambahan PPNS. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No16 Tahun 2018 Pasal 8 ayat 1, dalam penegakan Perda Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah. Kondisi saat ini PPNS baru ada di Satpol PP berjumlah 3 orang, Dinas yang seharusnya mengampu Perda memuat sanksi pidana belum memiliki PPNS, seperti Dinhub, BPPKAD, DPU, DPPKLH, Dinas Pariwisata, Dindukcapil dan Dinas Kominfo. Sehingga dalam pelaksanaan tugas Penyidikan masih tertumpu di Satpol PP. Seyogyanya pembuatan Perda diikuti dengan kesiapan personil

PPNS di Dinas/Instansi terkait dan Sekretariat PPNS diaktifkan.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target progra/ kegiatan Renja SKPD Tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)
01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar									
01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.01	Perencanaan Penanggaran dan Evalulasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Penyampaian Laporan atau Ikhtisar Capaian Kinerja SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dok	10 Dok	13 dok	13 dok	100%	13 dok	13 dok	100%
06	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja	8 dok	8 Dok	8 dok	8 dok	100%	8 dok	8 dok	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target progra/ kegiatan Renja SKPD Tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)
		dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD								
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase terlayaninya administrasi keuangan perangkata daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan Tunjanganya	57 Org	57 Org	42 Org	42 Org	100%	58 Org	58 Org	100%
03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	14 Org	14 Org	14 Org	14 Org	100%	11 Org	11 Org	100%
2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase terlayaninya Administrasi Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Anggota Yang Memperoleh Pakaian Dinas beserta atribut dan kelengkapannya	122 Org	122 Org	114 Org	114 Org	100%	122 Org	122 Org	100%
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target progra/ kegiatan Renja SKPD Tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Logistik Kantor yang tersedia	15 Pkt	15 Pkt	14 Pkt	14 Pkt	100%	12 Pkt	12 Pkt	100%
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase terpenuhinya sarana prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0	0	100%	0	0	100%
10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	46 jenis	46 jenis	18 pkt	18 pkt	100%	10 jenis	10 jenis	100%
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase terlayaninya administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	36 pkt	36 Pkt	36 pkt	36 pkt	100%	36 Lpr	36 Lpr	100%
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Honor PTT/THL)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang disediakan	13 Lap	13 Lap	13 Lap	13 Lap	100%	13 Lpr	13 Lpr	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target progra/ kegiatan Renja SKPD Tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase terpenuhinya sarana prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinzn Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	24 Unit	24 Unit	22 Unit	22 Unit	100%	24 Unit	24 Unit	100%
10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sapras Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	4 Unit	4 Unit	100%
11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sapras Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	33 Unit	33 Unit	100%
02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan trantibum linmas Cakupan pemberdayaan perlindungan masyarakat (satlinmas)	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target progra/ kegiatan Renja SKPD Tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)
		Cakupan peningkatan kapasitas SDM Satpol PP	9,47	82.07	3.18	30.60	100%	13.44	13.44	100%
		Cakupan Layanan Dampak Penegakan Perda/ Perkada	100	100	100	100	100%	100	100	100%
		Persentase PPNS yang aktif	100	100	100	100	100%	100	100	100%
			42,85	23.08	36	21.43	60%	50	50	
05	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3(ketentraman, Ketertiban Keindahan) di Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan	1238	1238	336	336	100%	1236 kasus	1236 kasus	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target progra/ kegiatan Renja SKPD Tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)
	Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli Pengamaan dan Pengawalan	Ketertiban Umum yang dicegah melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli Pengamaan dan Pengawalan								
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	14 Dok	14 Dok	100%
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	100%	12 Dok	12 Dok	100%
	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas termasuk Dalam	Jumlah anggota satpol PP dan Satlinmas yang	97	97	96	96	100%	123 Orang	123 Orang	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target progra/ kegiatan Renja SKPD Tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)
	Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Has Asazi Manusia	ditingkatkan kapasitasnya								
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Tibum yang tersedia	105 Unit	105 Unit	65 Unit	65 Unit	100%	-	-	100%
	Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda/Perkada yang terlayani	12	12	12	12	100%	12	12	100%
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Prosentase penegakan perda dan perkada	100	100	92.55	86.36	93%	100	100	100%
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada masyarakat/kelompok masyarakat/pelaku usaha	5 Lpr	2 Lpr	5 Lpr	5 Lpr	100%	5 Lap	5 Lap	100%
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan	20 Lpr	20 Lpr	40 Lpr	20 Lpr	50%	92 Lpr	92 Lpr	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target progra/ kegiatan Renja SKPD Tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)
	Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota								
	Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota sesuai SOP	40 Lpr	44 Lpr	92 Lpr	95 Lpr	103%	92 Lpr	92 Lpr	100%
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Persentase Jumlah PPNS yang Aktif	3 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	100%	100%	100%	100%
	Pengembangan Kapasitas dan karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta	-	-	13 Lap	13 Lap	100%	13 Lpr	13 Lpr	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target progra/ kegiatan Renja SKPD Tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	91.67	100	89.66	89.66	100	100	100%
		Persentase Kecamatan memiliki pos pemadam kebakaran								
		Persentase terbentuknya relawan pemadam kebakaran (Redkar) didesa/ kelurahan	15	15	15	15	15	15	15	100%
		Persentase cakupan pelayanan peyelamatan non kebakaran	32.25	32.25	32.25	32.25	100	73	73	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target progra/ kegiatan Renja SKPD Tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)
			100	100	100	100	100%	100	100	100%
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Cakupan Pencegahan , Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	100	98.98	100	98.25	98.25	100%	100%	100%
	Pencegahan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen NSPM yang berkaitan dengan pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten/kota setiap tahunnya	-	-	-	-	-	-	-	100%
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Dearah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian	365	365	365	365	100%	365	365	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target progra/ kegiatan Renja SKPD Tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)
		Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota.								
	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan /Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	-	-	365	365	100%	365	365	100%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah sarana dan prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang sah, dan legal sesuai standar teknis terkait	29	29	-	-	-	175	175	100%
	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi ketrampilan teknis dan analisis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	-	-	15 Org	15 Org	100%	-	-	-
	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar	Tersedianya dokumen Kerja Sama dan	0	0	4	4	100%	4	4	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target progra/ kegiatan Renja SKPD Tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)
	Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Koordinasi antar Dearah Berbatasan antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelalamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran								
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah dokumen yang memuat data bangunan/gedung/lingkungan yang dipersyaratkan harus memiliki sistem proteksi kebakaran	-		-	-	-	-	-	-
	Investigasi Kejadian Kebakaran	Prosentase kejadian kebakaranyang diinvestagasi	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi penelitian, pengujian	Jumlah dokumen yang memuat hasil investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian,	-	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target progra/ kegiatan Renja SKPD Tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)
	penyebab kejadian kebakaran	pengujian penyebab kejadian kebakaran								
	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	Prosentase masyarakat yang mengikuti pelatihan dalam pencegahan kebakaran	100	100	100	100	100%	100	100	100%
		Persentase terbentuknya relawan kebakaran di Desa/Kelurahan	32.25	32.25	32.25	32.25	100%	73	73	100%
	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang mendapatkan sosialisasi edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran setiap tahunnya.	20.000	27.013	35.000	39458	113%	20.000	20.000	100%
	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah desa/kelurahan yang terbentuk relawan pemadam kebakaran pada lingkup sistem ketahanan kebakaran	72	98	40	98	100%	72	72	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target progra/ kegiatan Renja SKPD Tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)
		lingkungan (SKKL) setiap tahunnya								
	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Dokumen yang memuat SKKL pada desa/kelurahan yang telah tersedia dukungan sarana dan prasarana pemadam kebakaran	-	-	-	-	-	-	-	-
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase tertanganinya pengaduan masyarakat untuk memperoleh layanan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	-	-	100	100	100%	100%	100%	100%
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan operasi penyelamatan yang mengancam keselamatan manusia	-	-	12 Lap	12 Lap	100%	12 Lap	12 Lap	100%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap	Jumlah Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap	-	-	-	-	-	8 Unit	8 Unit	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target progra/ kegiatan Renja SKPD Tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)
	Kondisi Membahayakan Manusia /Penyelamatan dan Evakuasi	Kondisi Membahayakan Manusia /Penyelamatan dan Evakuasi yang sah dan legal sesuai standar teknis								

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan pelayanannya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara mengampu 5 Indikator kinerja utama, 11 indikator kinerja program. Berstatus tercapai 4 indikator dan 1 indikator berstatus tidak tercapai untuk ikdikator kinerja udata dan, Indikator kinerja program 11 tercapai 2 tidak tercapai. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian/ ketidaktercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Tingkat Kesadaran Masyarakat dan dunia usaha dalam mematuhi peraturan perundang-undangan.
2. Peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum dan penanganan kebakaran.
3. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk meningkatkan kinerja masih terbatas.
4. Upaya pemberdayaan Linmas Desa masih belum optimal
5. Kapasitas anggota Satlinmas, Satpol PP dan PPNS perlu ditingkatkan.
6. Keterbatasan jangkauan 3 (tiga) pos pemadam kebakaran melayani semua wilayah kabupaten.
7. Pemahaman masyarakat tentang penanggulangan kebakaran masih terbatas.

Dalam rangka mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut, telah dilakukan upaya-upaya yang meliputi:

1. Meningkatkan kepatuhan masyarakat, aparatur dan badan usha terhadap produk hukum daerah
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
3. Mengembangkan kapasitas sarana prasarana dan profesionalisme aparatur Satlinmas, Anggota Satpol PP dan PPNS
4. Meningkatkan kualitas koordinasi dengan dinas instansi terkait.
5. Mengusulkan adanya penambahan sarana dan prasarana
6. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi penanggulangan kebakaran kepada masyarakat.

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK LPPD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Persentase penanganan gangguan trantibum linmas	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Cakupan pemberdayaan perlindungan masyarakat (satlinmas)	-	17.41%	3.18%	9.47%	13.44%	17.41%	31.03%	82.07%	13.44%	17.41%	
	Cakupan peningkatan kapasitas SDM Satpol PP		-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada kabupaten/kota	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase penanganan pelanggaran perda/perkada	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase PPNS yang Aktif	-	57.14%	35.71 %	42.86%	50.00%	57.14%	23.08%	23.08%	50.00%	57.14%	
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	89.66%	91.67%	100%	100%	
	Persentase Cakupan Pelayanan Peyelamatan Non Kebakaran	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase Kecamatan Memiliki Pos Damkar	-	30%	15%	15%	30%	30%	15%	15%	15%	30%	
	Persentase terbentuknya relawan pemadam kebakaran (Redkar) di desa/kelurahan	-	100%	21.58 %	47.48%	73.38%	100%	35.25%	35.25%	73.38%	100%	
DILAKSANAKAN OLEH SEMUA URUSAN												
1	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten yang terlaksana	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.1	Indek Kepuasan Masyarakat Satpol PP	-	-	82.50	83.00	83.50	84,00	84.08	84.20	84.50	85.00	
1.2	Nilai AKIP Satpol PP	-	-	B	B	BB	BB	BB	BB (73.75)	BB (75.00)	BB (76.00)	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan berdasarkan hasil evaluasi, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk tahun 2023 mencakup satu urusan tersebut. Permasalahan dan hambatan yang dihadap idalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah diantaranya adalah:

1. Belum terjangkaunya penanganan gangguan tibum tranmas dan penegakkan Perda di daerah pinggiran dan wilayah Kecamatan secara keseluruhan;
2. Terbatasnya jumlah dan kapasitas personil Satpol PP untuk melaksanakan patroli dan penegakan perda;
3. Terbatasnya sarana dan prasarana kerja untuk mendukung pelaksanaan patroli dan operasi penegakan perda;
4. Pemahaman serta kepatuhan hukum masyarakat dan pelaku usaha terhadap perda dan perkada yang memuat sanksi masih rendah;
5. Terbatasnya jumlah dan kapasitas PPNS terutama pada OPD Pengampu Perda/Perkada;
6. Kurang terkoordinasinya pelanggaran Perda/Perkada antara OPD dan Satpol PP.
7. Belum Optimalnya Pemberdayaan Pelindungan Masyarakat dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban umum;
8. Terbatasnya cakupan pelayanan pencegahan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran.

Permasalahan tersebut, jika tidak diselesaikan dapat menjadi *constraint* dalam pencapaian visi dan misi Bupati maupun capaian indikator lainnya. Beberapa dampak dari adanya permasalahan dan hambatan tersebut meliputi:

1. Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum masih kerap terjadi;

2. Patroli yang dilakkukan petugas Satpol PP kurang maksimal;
3. Penegakan Perda dan Perkada dalam rangka mewujudkan ketentraan dan ketertiban belum optimal;
4. Cakupan pelayanan dan tingkat waktu tanggap pada bencana kebakaran rendah.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi, peningkatan kualitas birokrasi, dan meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan pengguna layanan akan meningkatkan kebutuhan akan adanya penyediaan produk layanan yang semakin baik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi-inovasi dalam menunjang peningkatan pelayanan publik secara kontinyu. Beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, yaitu:

Tantangan Pelayanan Satpol PP

Sesuai dengan ketentuan pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Berikut ini adalah hasil analisis tantangan bagi pengembangan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegra pada empat tahun mendatang yaitu :

1. Globalisasi Informasi memberikan pengaruh pada individu dan antar kelompok dalam masyarakat akibat pengaruh dunia luar yang tanpa batas, dan informasi-informasi yang tidak tersaring, dapat memberikan dampak negatif dalam perilaku pergaulan masyarakat menjadi pemicu tumbuhnya penyakit masyarakat (premanisme, prostitusi, perjudian, minuman keras, pergaulan bebas, anak jalanan/punk), mengadu domba antar kelompok masyarakat serta mengakibatkan munculnya sikap individualisme yang menimbulkan ketidakpedulian antar perilaku sesama warga, sehingga sangat rawan terjadinya gesekan antar

masyarakat dan gangguan ketentraman ketertiban umum.

2. Proses Demokrasi Langsung dan Otonomi daerah. Pemilu Legislatif, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Kepala Daerah secara langsung mempunyai dampak dan memicu konflik sosial di masyarakat (bentrok antar pendukung).
3. Isu tentang Hak Asasi Manusia. Dalam pelaksanaan penegakan perda dan penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Satpol PP seringkali berhadapan langsung dengan masyarakat yang potensi benturannya sangat tinggi sehingga sangat riskan terhadap pelanggaran Hak Azasi Manusia.
4. Tuntutan masyarakat terhadap kualitas layanan publik. Era saat ini kecepatan dan ketepatan pelayanan sangat diharapkan oleh masyarakat sehingga Satpol PP harus merespon dengan baik tuntutan masyarakat tersebut agar tidak menimbulkan kekecewaan yang dapat mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Satpol PP ditambah dengan adanya media sosial sebagai alternatif penyampaian pengaduan.
5. Pertumbuhan daerah. Bertambahnya aset pemerintah daerah, obyek-obyek vital dan titik- titik strategis yang perlu mendapat pengamanan. Tumbuhnya pusat-pusat keramaian masyarakat, tempat hiburan seperti caffe/karaoke, hotel, rumah kost yang perlu di awasi keberadaanya, sehingga tidak mengganggu keamanan, ketertiban umum dam kenyamanan lingkungan sekitar.
6. Kondisi geologis, topografis, klimatologis, hidrologis dan letak geografis kabupaten Banjarnegara menyebabkan tedapat kawasan-kawasan yang berpotensi terdampak peristiwa yang mengancam atau mengganggu kehidupan masyarakat dan berakibat

timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dampak psikologis pada masyarakat. Situasi dan kondisi demikian sangat berpotensi menimbulkan tingkat kerawanan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta upaya dalam pelayanan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran di wilayah Kabupaten Banjarnegara.

Peluang Pelayanan Satpol PP

Berikut ini adalah hasil analisis tantangan bagi pengembangan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara pada empat tahun mendatang :

1. Satpol PP memiliki kewenangan dalam Penegakan Perda dan Perkada. Salah satu wujud pelayanan kepada masyarakat yang harus dilakukan oleh satpol PP adalah penegakan supremasi hukum terhadap para pelanggar Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta penyelenggaraaan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di Kabupaten Banjarnegara.
2. Adanya keterpaduan Satpol PP dengan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat.
3. Semakin lengkapnya regulasi penegakkan hukum baik UU, PP termasuk Perda sebagai dasar penegakkan hukum daerah;
4. Adanya kebutuhan masyarakat akan pentingnya rasa aman, tertib dan tenteram;
5. Meningkatnya pemahaman aparatur terhadap Tugas Pokok dan Fungsi;
6. Adanya dukungan yang signifikan dari Pemerintah Daerah (Kepala Daerah dan DPRD);
7. Adanya kemitraan dengan TNI/ Polri, Tokoh agama, Tokoh Masyarakat dan LSM;

8. Tekad pemerintah daerah untuk mewujudkan good governance.

Berdasarkan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangn tersebut, dapat diinventarisasi beberapa isu strategis. Inventarisasi isu-isu strategis tahun 2026 didapatkan dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal Kabupaten Banjarnegara sampai dengan tahun 2024. Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan pembangunan.Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2024, sebagai berikut:

1. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat serta pelaku usaha untuk mematuhi peraturan perundang-undangan serta ikut menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum;
2. Penanganan pengaduan masyarakat pelanggaran Peraturan Daerah dan Kepala Daerah, secara cepat komprehensif dan tuntas;
3. Peningkatan cakupan wilayah kawasan tertib keseluruh wilayah;
4. Peningkatan jumlah dan kapasitas aparat Satuan Polisi Pamong Praja (anggota Satpol dan PPNS);
5. Peningkatan jumlah dan kapasitas Linmas melalui pemberdayaan dan fasilitasi;
6. Peningkatan kualitas koordinasi dengan dinas/instansi terkait;
7. Peningkatan cakupan layanan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Tahun 2026 merupakan pelaksanaan tahun terakhir RPD Tahun 2023-2026. Dalam RPD Tahun 2023-2026, prioritas arah kebijakan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2026 meliputi:

1. Meningkatkan persentase penanganan gangguan ketentraman ketertiban umum dan pelindungan masyarakat;
2. Meningkatkan cakupan pemberdayaan pelindungan masyarakat (satlinmas(;
3. Meningkatkan cakupan peningkatan kapasitas SDM Satpol PP;
4. Meningkatkan jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada kabupaten/kota;
5. Meningkatkan persentase penanganan pelanggaran perda/perkada;
6. Meningkatkan persentase PPNS aktif;
7. Meningkatkan jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
8. Meningkatkan persentase Kecamatan memiliki pos pemadam kebakaran;
9. Meningkatkan persentase terbentuknya Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) di desa/kelurahan;
10. Meningkatkan persentase cakupan pelayanan penyelamatan non kebakaran;
11. Meningkatkan Nilai SAKIP;
12. Meningkatkan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat.

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 Kabupaten Banjarnegara

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum -	Banjarnegara	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	1,795,059	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum -	Banjarnegara	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	1,295,059	
		Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	100%				Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	100%		
		Persentase Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	100%				Persentase Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	100%		
Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Banjarnegara	Jumlah Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan , Penyuluhan. Pelaksanaan Patroli Pengamanan dan Pengawalan	12 Keg	1,000,000	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Banjarnegara	Jumlah Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan , Penyuluhan. Pelaksanaan Patroli Pengamanan dan Pengawalan	12 Keg	500,000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12 Keg				Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12 Keg		
		Jumlah Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	2 Keg				Jumlah Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	2 Keg		
		Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	2 Keg				Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	2 Keg		
		Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	2 Keg				Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	2 Keg		
		Jumlah Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2 Keg				Jumlah Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2 Keg		
Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi	Banjarnegara	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah	12 Laporan	250,000	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi	Banjarnegara	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah	12 Laporan	250,000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Dini dan Cegah Dini, Pembinaan , Penyuluhan. Pelaksanaan Patroli Pengamanan dan Pengawalan		Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan			Dini dan Cegah Dini, Pembinaan , Penyuluhan. Pelaksanaan Patroli Pengamanan dan Pengawalan		Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan			
Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Banjarnegara	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12 Dokumen	10,000	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Banjarnegara	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12 Dokumen	10,000	
Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Banjarnegara	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Dokumen	700,000	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Banjarnegara	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Dokumen	200,000	
Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Banjarnegara	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	123 Orang	40,000	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Banjarnegara	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	123 Orang	40,000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Banjarnegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	- Unit	-	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Banjarnegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	- Unit	-	
Sub Kegiatan Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Banjarnegara	Jumlah laporan penyediaan layanan dasar kepada warga yang terdampak Penegakan Perda dan Perkada	- Laporan	-	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Banjarnegara	Jumlah laporan penyediaan layanan dasar kepada warga yang terdampak Penegakan Perda dan Perkada	- Laporan	-	
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Banjarnegara	Jumlah Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Keg	790,059	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Banjarnegara	Jumlah Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Keg	790,059	
		Jumlah Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Keg				Jumlah Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Keg		
		Jumlah Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Keg				Jumlah Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Keg		

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Banjarnegara	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	15,000	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Banjarnegara	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	15,000	
Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Banjarnegara	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	7,550	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Banjarnegara	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	7,550	
Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Banjarnegara	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	12 Laporan	767,509	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Banjarnegara	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	12 Laporan	767,509	
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Banjarnegara	Jumlah Pengembangan Kapasitas dan karier PPNS	3 Keg	5,000	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Banjarnegara	Jumlah Pengembangan Kapasitas dan karier PPNS	3 Keg	5,000	
Pengembangan Kapasitas dan karier PPNS	Banjarnegara	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	3 Laporan	5,000	Pengembangan Kapasitas dan karier PPNS	Banjarnegara	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	3 Laporan	5,000	
Program Pencegahan, Penanggulangan,	Banjarnegara	Persentase Pencegahan, Pengendalian,	100%	5,923,920	Program Pencegahan, Penanggulangan,	Banjarnegara	Persentase Pencegahan, Pengendalian,	100%	5,865,920	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran		Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota			Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran		Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota			
		Persentase Peningkatan Kualitas Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	100%				Persentase Peningkatan Kualitas Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	100%		
		Persentase Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	100%				Persentase Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	100%		
		Persentase Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	100%				Persentase Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	100%		
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Banjarnegara	Jumlah Pencegahan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Keg	5,735,920	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Banjarnegara	Jumlah Pencegahan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Keg	5,735,920	
		Jumlah Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Dearah Kabupaten/Kota	12 Keg				Jumlah Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Dearah Kabupaten/Kota	12 Keg		
		Jumlah Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	12 Keg				Jumlah Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	12 Keg		

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	2 Keg				Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	2 Keg		
		Jumlah Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	2 Keg				Jumlah Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	2 Keg		
		Jumlah Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1 Keg				Jumlah Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1 Keg		
Pencegahan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Banjarnegara	Jumlah dokumen NSPM yang berkaitan dengan pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten/kota setiap tahunnya	- Dokumen	-	Pencegahan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Banjarnegara	Jumlah dokumen NSPM yang berkaitan dengan pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten/kota setiap tahunnya	- Dokumen	-	
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Dearah Kabupaten/Kota	Banjarnegara	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota.	12 Laporan	600,320	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Dearah Kabupaten/Kota	Banjarnegara	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota.	12 Laporan	600,320	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Banjarnegara	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan /Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	12 Dokumen	7,000	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Banjarnegara	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan /Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	12 Dokumen	7,000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Banjarnegara	Jumlah sarana dan prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang sah, dan legal sesuai standar teknis terkait	2 Unit	5,120,600	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Banjarnegara	Jumlah sarana dan prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang sah, dan legal sesuai standar teknis terkait	2 Unit	5,120,600	
Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Banjarnegara	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi ketrampilan teknis dan analisis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	- Orang	-	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Banjarnegara	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi ketrampilan teknis dan analisis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	- Orang	-	
Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Banjarnegara	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dokumen	8,000	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Banjarnegara	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dokumen	8,000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Banjarnegara	Jumlah Pendataan Sarana dan Prasarana Peralatan Proteksi Kebakaran	- Keg	-	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Banjarnegara	Jumlah Pendataan Sarana dan Prasarana Peralatan Proteksi Kebakaran	- Keg	-	
Pendataan Sarana dan Prasarana Peralatan Proteksi Kebakaran	Banjarnegara	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/ Gedung/ Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	- Dokumen	-	Pendataan Sarana dan Prasarana Peralatan Proteksi Kebakaran	Banjarnegara	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/ Gedung/ Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	- Dokumen	-	
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	Banjarnegara	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	2 Keg	143,000	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	Banjarnegara	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	2 Keg	85,000	
		Jumlah Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	- Keg	-			Jumlah Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	- Keg		
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Banjarnegara	Jumlah Warga Masyarakat yang mendapatkan sosialisasi edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran setiap tahunnya.	20000 Orang	65,000	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Banjarnegara	Jumlah Warga Masyarakat yang mendapatkan sosialisasi edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran setiap tahunnya.	20000 Orang	65,000	
Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Banjarnegara	Jumlah Desa/ Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran	26 Desa/ Kelurahan	78,000	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Banjarnegara	Jumlah Desa/ Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran	26 Desa/ Kelurahan	20,000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya					Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya			
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Banjarnegara	Jumlah Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	12 Keg	45,000	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Banjarnegara	Jumlah Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	12 Keg	45,000	
		Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia /Penyelamatan dan Evakuasi	2 Keg				Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia /Penyelamatan dan Evakuasi	2 Keg		
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Banjarnegara	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan operasi penyelamatan yang mengancam keselamatan manusia	12 Laporan	-	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Banjarnegara	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan operasi penyelamatan yang mengancam keselamatan manusia	12 Laporan	-	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan	Banjarnegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	2 Unit	45,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi	Banjarnegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	2 Unit	45,000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Manusia /Penyelamatan dan Evakuasi		/Penyelamatan dan Evakuasi yang sah dan legal sesuai standar teknis			Membahayakan Manusia /Penyelamatan dan Evakuasi		/Penyelamatan dan Evakuasi yang sah dan legal sesuai standar teknis			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Banjarnegara	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100%	15,300,947	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Banjarnegara	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100%	9,545,947	
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100%				Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100%		
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Banjarnegara	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Keg	6,500	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Banjarnegara	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Keg	6,500	
		Jumlah Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Keg				Jumlah Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Keg		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Banjarnegara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dok	3,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Banjarnegara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dok	3,000	
Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Banjarnegara	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8 Laporan	3,500	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Banjarnegara	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8 Laporan	3,500	
Administrasi Keuangan Daerah	Banjarnegara	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Keg	6,472,816	Administrasi Keuangan Daerah	Banjarnegara	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Keg	6,472,816	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Keg				Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Keg		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Banjarnegara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	99 Orang/bulan	6,422,359	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Banjarnegara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	99 Orang/bulan	6,422,359	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Banjarnegara	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	50,457	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Banjarnegara	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	50,457	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Banjarnegara	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanya	1 Keg	91,500	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Banjarnegara	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanya	1 Keg	91,500	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanya	Banjarnegara	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	123 Paket	91,500	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanya	Banjarnegara	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	123 Paket	91,500	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Banjarnegara	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Keg	1,548,430	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Banjarnegara	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Keg	1,498,430	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Banjarnegara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14 Paket	1,548,430	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Banjarnegara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14 Paket	1,498,430	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Banjarnegara	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Keg	5,400,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Banjarnegara	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Keg	80,000	
		Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Keg				Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Keg		

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Banjarnegara	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5,320,000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Banjarnegara	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Banjarnegara	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	80,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Banjarnegara	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	80,000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Banjarnegara	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Keg	1,003,200	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Banjarnegara	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Keg	1,003,200	
		Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Honor PTT/THL)	- Keg				Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Honor PTT/THL)	- Keg		
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Banjarnegara	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	67,200	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Banjarnegara	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	67,200	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Banjarnegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang disediakan	- Laporan	936,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Banjarnegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang disediakan	- Laporan	936,000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Banjarnegara	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Keg	778,500	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Banjarnegara	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Keg	393,500	
		Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana	1 Keg				Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana	1 Keg		

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
		Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Keg				Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Keg		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Banjarnegara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	20 Unit	283,500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Banjarnegara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	20 Unit	283,500	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Banjarnegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunnan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	475,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Banjarnegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunnan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	90,000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Banjarnegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunnan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit	20,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Banjarnegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunnan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit	20,000	

Berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2026, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan yaitu:

2.1. Optimalisasi dukungan penganggaran untuk pencapaian indikator SPM dan program prioritas lainnya,

2.2. Optimalisasi dukungan pengganggaran dalam penanggulangan kebakaran untuk penambahan pos pemadam kebakaran.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan musrenbang kecamatan dan forum konsultasi publik telah disampaikan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui aplikasi SIPD.Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 202 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	NIHIL				

2.6. Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan hasil reses anggota DPRD, melalui aplikasi SIPD telah disampaikan usulan program dan kegiatan.Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Validasi

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional.

Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia; terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari ancaman, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kondisi itu didukung oleh mantapnya kemampuan pertahanan dan keamanan negara yang ditandai oleh terwujudnya TNI yang profesional dengan komponen cadangan dan pendukung pertahanan yang kuat; terwujudnya sinergi kinerja antara POLRI dan partisipasi masyarakat dalam bidang keamanan, intelijen, dan kontra intelijen yang efektif yang disertai kemampuan industri pertahanan yang handal; terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam mendorong supremasi hukum; terwujudnya tata kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum, serta birokrasi yang profesional dan netral; terwujudnya masyarakat sipil, masyarakat politik, dan masyarakat ekonomi yang mandiri, serta terwujudnya kemandirian nasional dalam konstelasi gobal.

Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat ditunjukkan oleh makin tinggi dan meratanya tingkat pendapatan masyarakat dengan jangkauan lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh; mantapnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, antara lain ditandai oleh meningkat dan meratanya akses, tingkat kualitas, dan relevansi pendidikan

seiring dengan makin efisien dan efektifnya manajemen pelayanan pendidikan; meningkatnya kemampuan Iptek; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak; dan terwujudnya kesetaraan gender; bertahannya kondisi dan penduduk tumbuh seimbang. Sejalan dengan tingkat kemajuan bangsa, sumber daya manusia Indonesia diharapkan berkarakter cerdas, tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beragama, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran terhadap keberagaman, bergotong royong, patriotik, dinamis dan berorientasi Iptek. Kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat makin mantap dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan sehingga masyarakat mampu berperan sebagai penggerak bagi konsep pembangunan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.

Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri, pertanian, kelautan dan sumber daya alam, dan sektor jasa. Lembaga dan pranata ekonomi telah tersusun, tertata, serta berfungsi dengan baik. Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan, dan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang efisien dan produktivitas yang tinggi; serta berkembangnya usaha dan investasi dari perusahaan-perusahaan Indonesia di luar negeri termasuk di zona ekonomi eksklusif dan lautan bebas dalam rangka peningkatan perekonomian nasional. Sejalan dengan itu, pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2026 mencapai kesejahteraan setara dengan negara-negara berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin yang makin rendah. Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya jaringan transportasi pos dan telematika yang andal bagi seluruh masyarakat yang menjangkau seluruh wilayah NKRI; tercapainya elektrifikasi perdesaan dan elektrifikasi rumah tangga; serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat

yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel sehingga terwujud kota tanpa permukiman kumuh.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara merupakan lembaga teknis yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah agar dapat berjalan secara sinergi dan selaras dengan kebijakan nasional.

2.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

a) Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan setiap tahunnya. Merujuk pada pengertian tersebut, maka rumusan tujuan yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam bidang ketentraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat;
b. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan layanan publik.

b) Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakanya pada tahun 2025-2029.

a. Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban umum;
b. Meningkatnya kualitas pelayanan pencegahan, penanggulangan penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran;
c. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik perangkat daerah

2.3. Program dan Kegiatan

Terdapat 3 (tiga) program, 14 (lima belas) kegiatan dan 35 (tiga puluh enam) sub kegiatan sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran kinerja program meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah dan meningkatnya pelayanan kepada masyarakat.

Terdapat 7 (tujuh) Kegiatan dan 14 (empat belas) sub kegiatan yaitu :

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   Terdapat 2 (dua) sub kegiatan :

   a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah,
   b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capain Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

   Terdapat 2 (dua) sub kegiatan :

   a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN,
   b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Penengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD.

3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

   Terdapat 2 (dua) sub kegiatan :

   a) Pengadaan Pakaian Dinas,
   b) Sosialisassi Peraturan Perundang-undangan.

4) Administrasi Umum Perangkat Daerah

   Terdapat 1 (satu) sub kegiatan :

   a) Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

   Terdapat 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

   a) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya,
   b) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Terdapat 2 (dua) sub kegiatan :

a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik,

b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinetahan Daerah

Terdapat 2 (dua) sub kegiatan

a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan,

b) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya,

c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan PrasaranaPendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

II. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Sasaran kinerja program meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum terdapat 3 (tiga) Kegiatan dan 10 (sepuluh) Sub Kegiatan yaitu :

1) Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota

Terdapat 6 (enam) sub kegiatan

a) Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan dan patroli, pengamanan, dan pengawalan,

b) Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota,

c) Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum,

d) Peningkatan SDM Satpol PP dan Satlinmas termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak azasi manusia,

e) Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum,

f) Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada.

2) Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati /Wali kota.

Terdapat 3 sub kegiatan

a) Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota,

b) Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota,

c) Sub Kegiatan Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Bupati/Walikota.

3) Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Terdapat 1 sub kegiatan

a) Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

III. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Sasaran kinerja program meningkatnya kualitas kesiapsiagaan bencana

Terdapat 4 (empat) kegiatan dan 11 (empat belas) sub kegiatan.

1) Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota. Terdapat 6 (enam) sub kegiatan.

a) Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota,

b) Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Dearah Kabupaten/Kota,

c) Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran,

d) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri,

e) Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran.

f) Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pencegahan,Penangulangan,Penyelamatan Non Kebakaran.

2) Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran

Terdapat 1 (satu) sub kegiatan

a) Pendataan Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran

3) Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran

Terdapat 2 (dua) sub kegiatan.

a) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat,

b) Sub Kegiatan Pembentukan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Kebakaran.

4) Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia.

Terdapat 2 (dua) sub kegiatan

a) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi,

b) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia /Penyelamatan dan Evakuasi.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program pada rencana kerja perangkat daerah merupakan program prioritas dalam Renstra 2025-2029, selanjutnya dijabarkan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Rumusan program/kegiatan Rencana Kerja Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 terdapat beberapa pertimbangan yang menjadi dasar dalam penyusunan antara lain:

1) Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan;
2) Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pencapaian visi dan misi Bupati Banjarnegara untuk periode 2025 – 2029;
3) Penerapan anggaran kinerja dalam rangka peningkatan efisien dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan;
4) Ketersediaan pranata dalam perencanaan pengembangan kawasan/wilayah;
5) Adanya sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan pembangunan.

Secara garis besar rumusan program/kegiatan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1) Program/kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 merupakan program/kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, damai dan demokratis serta penyusunan perencanaan anggaran *(budgeting).*
2) Jumlah program yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 adalah sebanyak 3 (tiga) program dan 8 (delapan) kegiatan 9 (sembilan) Sub Kegiatan.
3) Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Renja Satpol PP Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 secara total sebesar Rp11.077.101.896,- yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Banjarnegara dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Program dan kegiatan Renja Satpol PP Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 yang disertai dengan indikator kegiatan serta sumber pendanaan adalah sebagaimana table 2.5.

Tabel 4.1.
Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
	Satuan Polisi Pamong Praja			11.077.101.896,-		
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			11.077.101.896,-		
1.05.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**			11.077.101.896,-		
1.05.01..	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100% 100%	9.973.494.596,-		
1.05.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14 Kegiatan 12 Kegiatan	9.457.317.126,-		
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	99 Orang/bulan	9.406.860.126,-	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	50.457.000,-	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1.05.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Kegiatan	199.999.970,-		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14 Paket	199.999.970,-	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1.05.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Kegiatan	33.000.000,-		
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	33.000.000,-	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1.05.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Kegiatan	225.000.000,-		
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	225.000.000,-	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1.05.02.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	100% 100%	757.508.900,-		
1.05.02.2.01.	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan , Penyuluhan. Pelaksanaan Patroli Pengamanan dan Pengawalan	12 Kegiatan	45.000.000,-		
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	12 laporan	45.000.000,-	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
1.05.02.2.02.	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Kegiatan	712.508.900,-		
1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12 Laporan	712.508.900,-	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1.05.04.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	100% 100%	404.276.000,-		
1.05.04.2.01.	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Dearah Kabupaten/Kota	12 Kegiatan	354.276.000,-		
1.05.04.2.01.0026	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	354.276.000,-	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1.05.04.2.04.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	2 Kegiatan	50.000.000,-		
1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	20.000 Orang	50.000.000,-	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
			TOTAL	**11.077.101.896,-**		

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Renja Perangkat Daerah selanjutnya menjadi platform operasional bagi Perangkat Daerah dalam menjalankan programnya dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah tahun 2025-2029. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerahsetelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026 dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disepakati.
2. Kerangka pendanaan dalam Renja Perangkat Daerah masih bersifat sementara, sehingga masih dimungkinkan terjadi perubahan pagu yang disebabkan oleh pengurangan, penambahan, dan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan maupun antar sub kegiatan dalam kerangka penyusunan anggaran secara terpadu dan berbasis kinerja.
3. Renja Perangkat Daerah menjadi acuan bagi Kepala Perangkat Daerah dan segenap jajarannya serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, serta menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal : 10 September 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANJARNEGARA,

FAJAR RIDA'UL SYARIFAH, AP.
Pembina Utama Muda
NIP. 19741120 199311 2 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunianya sehingga Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 dapat tersusun.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 terdiri dari pendahuluan, hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara, dan Rencana Kerja dan pendanaan serta penutup.

Kami menyadari dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja dimaksud.

Banjarnegara, Juli 2024
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BANJARNEGARA

dr.LATIFA HESTI PURWANINGTYAS, M. Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19720128 200212 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....ii
DAFTAR ISI.....iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. LATAR BELAKANG 1
1.2. LANDASAN HUKUM 2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 4
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN 4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU..... 6
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH..... 6
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 52
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH 57
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD.....58
2.5. PENELAAHAN USULAN MASYARAKAT 91
2.6. PENELAAHAN USULAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD 93
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....95
3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL 95
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH 95
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN 96
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 98
BAB V PENUTUP.....126

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renja Perangkat Daerah disusun mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Renja Dinas Kesehatan Tahun 2026 menjadi dokumen perencanaan tahunan yang menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan dan berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kesehatan di Kabupaten Banjarnegara. Penyusunan Renja ini memperhatikan arah kebijakan pembangunan kesehatan nasional, provinsi, dan prioritas pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026. Selain itu, Renja juga diselaraskan dengan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) yang menjadi dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

Dengan demikian, dokumen Renja Dinas Kesehatan Tahun 2026 diharapkan mampu menjadi instrumen perencanaan yang strategis, terukur, dan akuntabel dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara. Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara mempunyai tugas membantu Bupati dalam

melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara juga wajib menyelenggarakan fungsi sebagi berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit serta pelayanan dan sumber daya kesehatan;
2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit serta pelayanan dan sumber daya kesehatan;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit serta pelayanan dan sumber daya kesehatan;
4. Pembinaan dan fasilitasi kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit serta pelayanan dan sumber daya kesehatan;
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit serta pelayanan dan sumber daya kesehatan;
6. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
7. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
8. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2. LANDASAN HUKUM

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kab/Kota
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 -1317 Tahun 2023 Perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 309);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun dengan maksud untuk:

a. Menjabarkan RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 ke dalam rencana program kegiatan prioritas Tahun 2026;
b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerapan anggaran berbasis kinerja.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

a. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA-DPA dalam Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2026, yang dalam penyusunannya didahului dengan menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.
b. Sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Tahun 2026.
c. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun berdasarkan sistematika yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah.

BAB 2 : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dan atau pokok-pokok DPRD.

BAB 3 : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan tahun 2026.

BAB 4 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran RKPD.

BAB 5 : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah meliputi urusan Bidang Kesehatan dan tidak jauh dengan kondisi sekarang, permasalahan pembangunan daerah tersebut meliputi:

1. Bangunan, sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang belum sesuai standar
2. Keterbatasan rasio tempat tidur rumah sakit dan masalah pelayanan kesehatan rujukan khusunya wilayah utara Kabupaten Banjarnegara dengan kondisi geografis jauh memerlukan waktu penanganan kegawatdaruratan kesehatan
3. Keterbatasan kuantitas dan kompetensi sumber daya manusia baik sumber daya manusia kesehatan maupun non kesehatan
4. Pemenuhan standar mutu pelayanan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) belum optimal sesuai standar kebutuhan sasaran
5. Masalah gizi masyarakat seperti stunting, wasting, gizi buruk dipengaruhi oleh meningkatnya ibu hamil kurang energi kronik dan anemia
6. Kurangnya optimalnya deteksi dini penyakit tidak menular pada kelompok sasaran
7. Kurang maksimalnya penyuluhan dan skrining kesehatan
8. Banyak masyarakat yang tidak menyadari sudah terkena Hipertensi sehingga tidak melakukan pemeriksaan ke pelayanan kesehatan maupun nakes
9. Persepsi / Stigma negatif pada penderita HIV dan keluarga sehingga menyebabkan masayarakat malu untuk melakukan pengobatan HIV dan sering berpindah tempat tinggal /lokasi
10. Persepsi / stigma negatif kepada penderita TB sehingga masyarakat cenderung malu untuk memeriksakan penyakit TB maupun

pengobatannya serta masih kurangnya kegiatan perkesmas dari puskesmas dan pengobatan TB yang relatif lama dan pajang

11. Persepsi / stigma negatif masyarakat terhadap keluarga yang memilki ODGJ
12. Belum optimalnya koordinasi dan komunikasi stakeholder terutama pada permasalahan crosscutting dengan stakeholder terkait
13. Belum optimalnya validitas data akibat banyak variasi aplikasi, keterlambatan, ketidaklengkapan, dan ketidaksesuaian pelaporan, sehingga berpengaruh terhadap kualitas analisis situasi dan berimplikasi pada kurang optimalnya pengambilan keputusan dalam perencanaan maupun pelaksanaan program kesehatan.

Dinamika yang terjadi selama tahun 2024 turut mempengaruhi keberhasilan pencapaian Renja Perangkat Daerah. Alokasi anggaran Rp. 205.066.365.677,00 dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 200.651.479.186,00 (97,8%), Realisasi Fisik sebesar 99%, didukung Program sebanyak 5, Kegiatan sebanyak18, dan Sub Kegiatan sebanyak 65. Dalam pelaksanaan APBD tahun 2024 tercatat adanya hasil yang memenuhi target dan tidak memenuhi target.

A. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
    1. Capaian kinerja Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat:
        a. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, capaian kinerja sebesar 96%.
        b. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, capaian kinerja sebesar 99%,
        c. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, capaian kinerja sebesar 93 %.
        d. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita, capaian kinerja sebesar 96%.
        e. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif, capaian kinerja sebesar 95%.
        f. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut, capaian kinerja sebesar 99%.
        g. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis, capaian kinerja 72%.

2. Capaian kinerja Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan :
    a. Sub kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar, capaian kinerja sebesar 75,82%.

B. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
    1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:
        1) Sub KegiatanKoordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD capaian kinerja sebesar 100%.
        2) Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah capaian kinerja sebesar 100%.
        3) Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, capaian kinerja sebesar 108%.
        4) Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, capaian kinerja sebesar 100%.
        5) Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, capaian kinerja sebesar 100%.
        6) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian, capaian kinerja sebesar 100%.
        7) Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, capaian kinerja sebesar 100%.
        8) Sub kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD capaian kinerja sebesar 100%.
        9) Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan capaian kinerja sebesar 100%.
        10) Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, capaian kinerja sebesar 100%.
        11) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel capaian kinerja sebesar 100%.

12) Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya capaian kinerja sebesar 100%.
13) Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya capaian kinerja sebesar 100%.
14) Sub kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya capaian kinerja sebesar 100%.
15) Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, capaian kinerja sebesar 100%.
16) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, capaian kinerja sebesar 100%.
17) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, capaian kinerja sebesar 100%.
18) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan capaian kinerja sebesar 100%.
19) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan capaian kinerja sebesar 100%.
20) Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya diukur dengan indikator Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara, capaian kinerja sebesar 100%.
21) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya diukur dengan indikator Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi capaian kinerja sebesar 100%.
22) Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya diukur dengan indikator Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi, capaian kinerja sebesar 100%.
23) Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD, capaian kinerja sebesar 100%.

2. Capaian kinerja Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat:

1) Sub kegiatan Pembangunan Puskesmas, capaian kinerja sebesar 100%, yang dibangun UPTD Puskesmas wanadadi 2, Selain itu dalam sub kegiatan ini pula telah dilaksanakan pengadaan Jasa konsultasi DED Puskesmas Batur 1, Madukara 2, Pejawaran, Pustu Bantar Wanayasa, Pustu Binangun Karangkobar, Pustu Balun Wanayasa, DED review Wanayasa 1, DED Labkes, apraisal pengadaan tanah untuk pembangunan Puskesmas Purwareja Klampok 2, Pengadaan tanah untuk pembangunan Puskesmas Purwareja Klampok 2.
2) Sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas, capaian kinerja sebesar 100%, yaitu :
    a. Anggaran Bersumber DBHCHT yaitu Puskesmas Batur 2 (Penambahan Ruang Rawat Jalan dan Ruang Persalinan serta Ruang Gawat Darurat Puskesmas Batur 2), Puskesmas Banjarnegara 2 (Penambahan Ruang Rawat Jalan dan Ruang Persalinan serta Ruang Gawat Darurat Puskesmas Banjarnegara 2)
    b. Anggaran POKIR : Puskesmas Susukan 2 (Pembangunan Pagar Keliling Puskesmas Susukan 2), Puskesmas Susukan 1 (Pavingisasi Halaman Puskesmas Susukan 1), Puskesmas Klampok 1 (Pembangunan Pagar Keliling Puskesmas Klampok 1), Puskesmas Punggelan 1 (Pembangunan Pagar Keliling dan Pos Keamanan Puskesmas Punggelan 1), Puskesmas Sigaluh 1 (Pembangunan Talud Puskesmas Sigaluh 1), Puskesmas Pagentan 2 (Pembangunan Pagar Keliling Puskesmas Pagentan2), Puskesmas Batur 1 (Pembangunan Talud Puskesmas Batur 1), Puskesmas Karangkobar (Pembangunan Ruang Administrasi Puskesmas Karangkobar), Perubahan : Puskesmas Mandiraja 1 (Pembangunan Ruang Laboratorium Puskesmas Mandiraja 1).
3) Sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya capaian kinerja sebesar 100%, yaitu Puskesmas Pembantu Sawal Kec. Sigaluh, Puskesmas

Pembantu Kecepit Kec. Punggelan dan Puskesmas Pembantu Kebutuhduwur Kec. Pagedongan

4) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, capaian kinerja sebesar 100%, yaitu Pengadaan dental unit sebanyak 3 unit (Puskesmas Madukara 2, Pandanarum, Wanayasa 2), hematologi analyzer 13 unit, alat kimia darah 3 unit Vaksin refrigerator sebanyak 1 unit (Mandiraja 2) , IVA Kit sebanyak 32 kit dan sudah di distribusikan ke 32 puskesmas.
5) Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan capaian kinerja sebesar 100%.
6) Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit capaian kinerja sebesar 100%, pembuatan dokumen Feasibillity Study dan masterplan, Dokumen Feasibillity Study dan Master Plan Pembangunan RSUD Wanayasa
7) Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan, capaian kinerja sebesar 100%.
8) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga, capaian kinerja sebesar 104,28%.
9) Sub kegiatan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan, capaian kinerja sebesar 100%.
10) Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar, capaian kinerja sebesar 100%.
11) Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi, capaian kinerja sebesar 100%.
12) Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus, capaian kinerja sebesar 100%.
13) Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat, capaian kinerja sebesar 100%.
14) Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV, capaian kinerja sebesar 100%.

15) Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat, capaian kinerja sebesar 100%.
16) Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga, capaian kinerja sebesar 100%.
17) Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan, capaian kinerja sebesar 100%.
18) Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan, capaian kinerja sebesar 100%.
19) Sub kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan, capaian kinerja sebesar 100%.
20) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA,, capaian kinerja sebesar 100%.
21) Sub kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular, capaian kinerja sebesar 100%.
22) Sub kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat, capaian kinerja sebesar 100%.
23) Sub Kegiatan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional, capaian kinerja sebesar 100%.
24) Sub kegiatan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat, capaian kinerja sebesar 100%.
25) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas, capaian kinerja sebesar 100%.
26) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya, capaian kinerja sebesar 100%.
27) Sub kegiatan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal), capaian kinerja sebesar 100%.
28) Sub kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis, capaian kinerja sebesar 100%.
29) Sub kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV), capaian kinerja sebesar 100%.
30) Sub kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria, capaian kinerja sebesar 100%.
31) Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi, capaian kinerja sebesar 100%.

32) Sub kegiatan Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak, capaian kinerja sebesar 100%.
33) Sub kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan, capaian kinerja sebesar 100%.
34) Sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya, capaian kinerja sebesar 100%.
35) Sub kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan, capaian kinerja sebesar 100%.
36) Sub kegiatan Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan, capaian kinerja sebesar 100%.

3. Capaian kinerja Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan :
   1) Sub kegiatan Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan, capaian kinerja sebesar 100%.
   2) Sub Kegiatan Pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan, capaian kinerja sebesar 100%.
   3) Sub kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, capaian kinerja sebesar 253%.

4. Capaian kinerja Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman :
   1) Sub kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Ijin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), capaian kinerja sebesar 100%.

5. Capaian kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Didukung Oleh 3 (tiga) Kegiatan, yaitu :

1) Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat, capaian kinerja sebesar 100%.
2) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat, capaian kinerja sebesar 100%.
3) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM), capaian kinerja sebesar 100%.

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Adanya kebijakan persalinan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan minimal ditangani oleh dua orang tenaga kesehatan
2. Adanya kebijakan pelaksanaan integrasi layanan primer di masing-masing wilayah desa / kelurahan
3. Adanya peningkatan pelaksanaan Program Prolanis di FKTP maupun dokter keluarga dan Program Posbindu baik di desa, kelurahan, instansi swasata maupun instansi negeri
4. Dukungan beberapa stakeholder dalam penyusunan dan menetapkan kebijakan di tingkat Kabupaten
5. Penanganan kasus gizi buruk sesuai dengan tata laksana penanganan kasus, antara lain pemberian PMT, Pemberian PMT, pemberian suplemen gizi, juga dilaksanakan Kelas Balita Gizi Buruk, Kelas Ibu Menyusui, dan Pelatihan PMBA (Pemberian Makanan Bayi dan Anak) bagi tenaga kesehatan dan Kader Posyandu
6. Akreditasi sebagai upaya menjamin mutu dan akses pelayanan kesehatan
7. Peningkatan kompetensi SDM
8. Peran serta promosi dan pemberdayaan kesehatan

Data Capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan 2024 berikut ini menunjukkan adanya perbedaan yang cukup signifikan antar tahun.

Perbedaan tersebut bukan hanya dipengaruhi oleh dinamika capaian program dan kegiatan, namun juga secara langsung disebabkan oleh adanya masa transisi dokumen perencanaan pembangunan daerah, yaitu dari RPJMD Tahun 2017-2022, RPD Tahun 2023–2026 menuju RPJMD Tahun 2025-2030

Pada masa ini, terjadi penyesuaian indikator kinerja, baik berupa perubahan nomenklatur, redefinisi indikator, maupun reposisi indikator dari kategori IKU menjadi IKD atau IKK, maupun sebaliknya. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan keselarasan antara arah kebijakan pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan nasional serta kebutuhan spesifik masyarakat daerah.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
s.d. Tahun 2024* Kabupaten Banjarnegara

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Ket
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW 2 Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)	(11)=10/9	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	**Persentase ketercapaian target kinerja perangkat daerah**	92%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Indikator Baru
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	6 Dokumen	50%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Ket
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW 2 Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)	(11)=10/9	
		Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	6 Dokumen	50%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Persentase Administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana***	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Baru
	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.498 orang	1.309	1.309	1.418	108%	1.418	1.416	99,8%	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	6 Dokumen	50%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	6 Dokumen	50%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Ket
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW 2 Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)	(11)=10/9	
		Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	***Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun***	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	6 Dokumen	50%	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	***Persentase SDMK yang mendapatkan peningkatan kompetensinya***	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	
		Persentase ASN berpredikat kinerja baik	*92%*	*NA*	*NA*	*NA*	*NA*	*NA*	*NA*	*NA*	*Indikator Baru*
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	*NA*	*NA*	*NA*	*NA*	*NA*	*NA*	*NA*	*Indikator Baru*

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Ket
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW 2 Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target 2025	
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)=7/6**	**(9)**	**(10)**	**(11)=10/9**	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah SDMK yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal	30 SDMK	100%	30 SDMK	30 SDMK	100%	7 SDMK	7 SDMK	100%	
	Administrai Umum Perangkat Daerah	***Persentase Administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana***	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	6 Dokumen	50%	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pemenuhan bahan logistik kantor	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	6 Dokumen	50%	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Ket
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW 2 Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target 2025	
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)=7/6**	**(9)**	**(10)**	**(11)=10/9**	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%	2 paket	2 paket	2 paket	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	*100%*	1 paket	1 paket	*100%*	1 unit	1 unit	1 unit	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 paket	*100%*	1 paket	1 paket	*100%*	1 unit	1 unit	1 unit	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Persentase Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana***	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*50%*	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	6 Dokumen	50%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Ket
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW 2 Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)	(11)=10/9	
		dan Listrik yang Disediakan									
	penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	6 Dokumen	50%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	***Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah***	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	50%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100%	2 unit	2 unit	100%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14 unit	100%	14 unit	14 unit	100%	14 unit	7 unit	50%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Ket
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW 2 Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)	(11)=10/9	
	Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya									
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 unit	100%	2 unit	2 unit	100%	2 unit	2 unit	100%	
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	1 unit	0	1 unit	1 unit	100%	0	0	0%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%	1 unit	0 unit	0%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 paket	100%	1 unit	1 unit	100%	1 unit	0 unit	0%	
	Program Pemenuhan Upaya	**Persentase fasilitas pelayanan**	29,33	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Indikator Baru

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Ket
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW 2 Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)	(11)=10/9	
	Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	**kesehatan sesuai standar**									
		Rasio tempat tidur terhadap populasi	0,55	0,53	0,64	0,53	82,8%	NA	NA	NA	Indikator Baru
		Indeks Pencapaian (IP) Standar Pelayanan Masyarakat bidang Kesehatan	89	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Indikator Baru
		Prevalensi Gizi Buruk	<1%	0,24	<1%	0,32%	100%	<1%	0,17	100%	
		Angka keberhasilan pengobatan TBC (TB success rate)/IUP	93%	91,8%	90%	89,3%	99,2%	90%	33%	36,6%	
		Persentase ODHIV baru yang ditemukan dan mendapat pengobatan ARV	91%	86,5%	80%	80%	100%	90%	79,5%	88,3%	
		Persentase lanjut usia yang mandiri	77%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Indikator Baru

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Ket
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW 2 Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)	(11)=10/9	
		Kab/kota yang memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan	21%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Indikator Baru
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Paripurna	91,8%	94%	94%	94%	100%	94%	94%	100%	Indikator Baru, DO baru
		Persentase penduduk terdaftar Jaminan Kesehatan Nasional	98,1%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Indikator Baru
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	67%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Indikator Baru
		Tingkat kepuasan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan	78%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Indikator Baru

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Ket
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW 2 Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)	(11)=10/9	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas memiliki Sarana, Prasarana dan Alat kesehatan sesuai standar	65,7%	80%	80%	79%	98,7%	85%	85%	100%	DO Baru
		Persentase fasilitas kesehatan primer yang memiliki obat, vaksin, dan BMHP sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase desa/kelurahan yang memiliki unit pelayanan kesehatan	5%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Indikator Baru
	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 unit	0	0	0	0%	0	0	0%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Ket
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW 2 Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)	(11)=10/9	
	Pembangunan Puskesmas	Jumlah pembangunan puskesmas	2 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	0 unit	50%	
	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	2 unit	1 unit	0	0	0%	0	0	0%	
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 unit	0	1 unit	1 unit	100%	3 unit	0	0%	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 unit	10 unit	10 unit	10 unit	100%	3 unit	0	0%	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 unit	3 unit	3 unit	3 unit	100%	3 unit	0 unit	0 %	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Ket
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW 2 Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)	(11)=10/9	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terpenuhinya Pengadaan Alat Kesehatan/Alat penunjang medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 paket	3 paket	3 paket	3 paket	100%	1 paket	0 paket	0%	
	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasyankes	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	0 paket	0%	
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%	
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman ke	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,	35 unit	35 unit	35 unit	35 unit	100%	35 unit	35 unit	100%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Ket
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW 2 Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)	(11)=10/9	
	Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan									
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	250.469 KK	249.000 KK	250.119 KK	250.119 KK	100%	250.469 KK	250.469 KK	100%	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Audit Maternal Perinatal Surveilance dan Respon (AMPSR)	100%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
		Persentase RS melaksanakan Audit Medik/klinik kematian	90%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
		Persentase ibu hamil yang mendapatkan	100%	90,4%	100%	100%	100%	100%	96,5%	96,5%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Ket
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW 2 Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)	(11)=10/9	
		pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)									
		Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100%	99,5%	100%	100%	100%	100%	99%	99%	
		Persentase Bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100%	99,1%	100%	100%	100%	100%	71,7%	71,7%	
		Persentase Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100%	96,4%	100%	100%	100%	100%	86%	86%	
		Persentase anak usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100%	97,7%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Ket
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW 2 Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)	(11)=10/9	
		Persentase orang usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	100%	90%	100%	95%	95%	100%	100%	100%	
		Persentase Lanjut usia yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100%	95,8%	100%	99%	99%	100%	100%	100%	
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan mampu PONED dan PONEK	35,9%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Indikator Baru
		Persentase Balita Gizi Buruk mendapat tata laksana	57%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DO baru
		Jumlah pembinaan, pendampingan, monitoring dan evaluasi PMT Lokal	35%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Indikator Baru

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Ket
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW 2 Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)	(11)=10/9	
		Angka Kematian DBD	<1%	0%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Indikator Baru
		Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage/IUP)	95%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Indikator Baru/IUP
		Persentase orang terduga TB mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100%	100%	100%	66%	66%	100%	91%	91%	
		Persentase Lost To Follow Up pada ODHIV	<25%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Indikator Baru
		Persentase orang yang resiko tertular HIV mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,27%	99,27%	
		Kab/Kota dengan Positivity Rate (PR) Malaria <5%	<5%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Indikator Baru

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Ket
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW 2 Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)	(11)=10/9	
		Proporsi kasus kusta baru tanpa disabilitas	81%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Indikator Baru
		Cakupan imunisasi bayi lengkap	90%	91,3%	95%	100%	101%	95%	50,2%	53%	
		Kab/Kota dengan kesiapsiagaan penanggulangan krisis kesehatan atau KLB (SKDR)	100%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Indikator Baru
		Persentase calon jemaah haji Indonesia yang memenuhi syarat istita'ah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Ket
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW 2 Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)	(11)=10/9	
		pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)									
		Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (SPM)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase puskesmas dengan cakupan pemeriksaan Kesehatan gratis > 80%	14%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Indikator Baru
		Kab/kota sehat	100%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Indikator Baru
		Persentase puskesmas dengan minimal 10%	35%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Baru

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Ket
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW 2 Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)	(11)=10/9	
		institusi tempat kerja yang dibina									
		Persentase Masyarakat terdaftar jaminan kesehatan PBI APBD	14,04%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Indikator Baru
		Persentase tatanan kawasan tanpa rokok (KTR)	25%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Indikator Baru
		Persentase Penyehat Tradisional yang memiliki Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)	12%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Indikator Baru
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10.880	11.369	14.244	14.244	100%	15.000	4.556	30,37%	
	Pengelolaan Pelayanan	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan	10.500	11.902	13.596	13.596	100%	15.100	4.794	31,75%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Ket
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW 2 Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)	(11)=10/9	
	Kesehatan Ibu Bersalin	Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar									
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10.420	11.838	12.960	12.960	100%	14.900	8.489	56,97%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	61.438	62.502	63.048	63.048	100%	61.438	26.418	43,00%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	138.670	131.427	193.997	193.997	100%	138.670	69.335	50%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Presentase Penduduk Usia Produktif (15-59) tahun yang mendapatkan skrining sesuai standar	441.775	418.519	467.440	467.440	100%	441.775	220.887	50%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Ket
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW 2 Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)	(11)=10/9	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	137.000	131.518	137.520	137.520	100%	143.736	71.868	50%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	142.000	247.475	246.011	246.011	100%	142.000	71.000	50%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15.765	15.769	15.765	15.765	100%	15.765	7.882	50%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Penderita ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.997	2.697	2.697	2.697	100%	1.997	900	45,07%	
	Pengelolaan Pelayanan	Jumlah Orang Terduga Menderita	12.000	9.209	12.632	12.632	100%	13.000	6.500	50%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Ket
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW 2 Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)	(11)=10/9	
	Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar									
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	17.869	21.255	18.819	18.819	100%	18.869	9.485	50,2%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi	12 dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Ket
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW 2 Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)	(11)=10/9	
	Berpotensi Bencana	Bencana Sesuai Standar									
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional Akupuntur Asuhan Mandiri	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur,	12 dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Ket
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW 2 Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)	(11)=10/9	
	dan Tradisional Lainnya	Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya									
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	12 dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	
	Penyelenggaraaan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan	12 dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Ket
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW 2 Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)	(11)=10/9	
	Kabupaten/Kota Sehat	Kabupaten/Kota Sehat									
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 unit	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Usulan Baru
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1.393	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Usulan Baru
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	90	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Usulan Baru

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Ket
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW 2 Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)	(11)=10/9	
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	10	12	10	10	100%	12	12	100%	
	Pegelolaan Kawasan Tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	2 tatanan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	12 dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Indikator Baru
	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	12 dokumen	100%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	9 dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Indikator Baru

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Ket
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW 2 Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)	(11)=10/9	
		Pelayanan Kesehatan Haji									
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	*Persentase ketersediaan data dan informasi kesehatan untuk mendukung pengambilan keputusan*	100%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Indikator Baru
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	6 dokumen	50%	
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya yang berizin	98,2%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
		Persentase Pelayanan Fasilitas Kesehatan kelengkapan dan ketepatan waktu Pengukuran	98,2%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Ket
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW 2 Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)	(11)=10/9	
		Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan									
		Persentase Puskesmas berkinerja baik	52%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	69 fasyankes	58 fasyankes	58 fasyankes	44 fasyankes	76,8%	60 fasyankes	60 fasyankes	100%	
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	60 fasyankes	58 fasyankes	58 fasyankes	44 fasyankes	76,8%	60 fasyankes	60 fasyankes	100%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Ket
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW 2 Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)	(11)=10/9	
	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	6 Dokumen	50%	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	**Rasio Tenaga Kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi per 1.000 penduduk**	1,92	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Indikator Baru
		Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar	68%	70%	70%	70%	100%	75%	75%	100%	DO Baru
		Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk	*Persentase Perencanaan Kebutuhan dan pemenuhan SDM Kesehatan di fasilitas pelayanan*	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Ket
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW 2 Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)	(11)=10/9	
	UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*kesehatan Pemerintah sesuai standar*									
	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Kesehatan yang Standar di Fasilitas Kesehatan (Fasyankes)	200 Orang	82,4%	100 orang	100 orang	100%	5 orang	5 orang	100%	
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber	*Persentase SDMK yang ditingkatkan kompetensinya*	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Ket
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW 2 Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)	(11)=10/9	
	Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Kesehatan Tingkat Kabupaten/Kota Ditingkatkan Mutu Kompetensinya	215 orang	100%	100 orang	120 orang	100%	418 orang	218 orang	50%	
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	**Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat	51%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Indikator Baru

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Ket
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW 2 Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)	(11)=10/9	
		Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan	100%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Indikator Baru
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen Sertifikat Produk Pangan (SPP)-PIRT sesuai standar	100%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Indikator Baru
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	6 Dokumen	50%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Ket
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW 2 Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)	(11)=10/9	
	Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga									
	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga Rumah	Persentase sertifikasi Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	55%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%	DO baru
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	6 Dokumen	50%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Ket
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW 2 Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)	(11)=10/9	
	Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)									
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	**Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat**	28,78%	100%	25%	25%	100%	25%	25%	100%	DO Baru
		Cakupan desa/kel dengan minimal 75% posyandu siklus hidup yang aktif	50%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Indikator Baru
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/	*Persentase kecamatan dengan Forum kesehatan kecamatan (FKK) aktif*	100%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Indikator Baru

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Ket
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW 2 Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)	(11)=10/9	
	Kota										
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	6 Dokumen	50%	
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	*Persentase Kepala Keluarga yang stop buang air besar sembarangan*	100%	100%	75%	75%	100%	100%	100%	100%	
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	6 Dokumen	50%	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	*Persentase kader posyandu minimal strata madya*	3%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Indikator Baru

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Ket
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW 2 Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)	(11)=10/9	
	(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota										
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	6 Dokumen	50%	

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam pelaksanaan pelayanannya, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara mengampu 14 Indikator Kinerja Kunci dan SPM .

Tabel 2.2

Analisis Kinerja (IKK) Pelayanan Dinas Kesehatan Pada Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Pada Tahun Ke- (%)				
				2017-2022			2023-2026		2017-2022			2023-2026		2017-2022			2023-2026	
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rasio Tempat Tidur per 1.000 penduduk	V	Per 1.000 penduduk	NA	NA	NA	0,64	0,64	0,5	0,61	0,55	0,53	0,53	NA	NA	NA	82,8	82,8
2.	Persentase Rumah Sakit terakreditasi Paripurna	V	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3.	Persentase ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	V	%	100	100	100	100	100	88,6	87	87,2	90,4	96,4	88,6	87,0	87,2	90,4	96,4
4.	Persentase Ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	V	%	99	99	100	100	100	98,1	97,7	97,7	99,5	98,6	99,1	98,7	97,7	99,5	98,6
5.	Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	V	%	97	98	100	100	100	98,3	99,1	98,8	99,1	92,6	101,3	101,1	98,8	99,1	92,6
6.	Persentase balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	V	%	90	95	100	100	100	55,4	79,1	79,3	96,4	95,7	61,6	83,3	79,3	96,4	95,7
7.	Persentase anak usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	V	%	92,5	95	97	100	100	41,6	56,25	86,7	97,7	100	45,0	59,2	89,4	97,7	100,0
8.	Persentase orang usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	V	%	100	100	100	100	100	18,75	31	70	90	95	18,8	31,0	70,0	90,0	95,0

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Pada Tahun Ke- (%)				
				2017-2022			2023-2026		2017-2022			2023-2026		2017-2022			2023-2026	
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
9.	Persentase lansia yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	V	%	40	45	50	100	100	29,2	50,57	100	100	99	73,0	112,4	200,0	100,0	99,0
10.	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	V	%	100	100	100	100	100	25,86	35,17	76	100	100	25,9	35,2	76,0	100,0	100,0
11.	Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	V	%	100	100	100	100	100	102	100	100	100	100	102,0	100,0	100,0	100,0	100,0
12.	Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	V	%	100	100	100	100	100	65,23	65,2	90	100	100	65,2	65,2	90,0	100,0	100,0
13.	Persentase orang terduga TB mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	V	%	100	100	100	100	100	60,71	51,9	100	100	72	60,7	51,9	100,0	100,0	72,0
14.	Persentase orang yang resiko tertular HIV mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	V	%	80	90	100	100	100	93,83	69,2	100	100	100	117,3	76,9	100,0	100,0	100,0

Berdasarkan tabel di atas, maka indikator berstatus tercapai sesuai target renstra yaitu :

1) Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten yang terakreditasi,
2) Persentase anak usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)
3) Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa berat (ODGJ) mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)
4) Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)
5) Persentase orang dengan penyakit DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)
6) Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar (SPM)

Sedangkan indikator berstatus tidak tercapai sesuai target Renstra yaitu :

1) Rasio daya tampung rumah sakit rujukan
2) Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)
3) Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)
4) Persentase Bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)
5) Persentase Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM) Pelayanan kesehatan pada usia produktif (15–59 tahun)
6) Persentase Lanjut usia yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)
7) Pelayanan kesehatan pada orang terduga dengan tuberkulosis (TBC)

Rendahnya capaian pada indikator-indikator tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain:

1. Belum optimalnya integrasi lintas program dan lintas sektor, seperti antara program gizi, kesehatan ibu dan anak, dan promosi kesehatan, serta program imunisasi

2. Keterbatasan sumber daya manusia dan logistik kesehatan di fasilitas pelayanan terutama pada aspek barang dan jasa pemenuhan mutu
3. Kualitas pencatatan dan pelaporan yang belum optimal (misalnya pada EPPGBM, SIHA, atau PIS-PK).
4. Peran serta masyarakat khususnya laki-laki dalam skrining kesehatan rendah karena sebagian bekerja merantau dan pada saat pemeriksaan sasaran sedang bekerja dan membutuhkan waktu tunggu yang lama
5. Pencarian aktif berbasis masyarakat, multi sektor dan jejaring kesehatan yang belum optimal serta kemampuan skrining suspek TBC oleh petugas belum adekuat.

Dalam rangka mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut, telah dilakukan upaya-upaya yang meliputi:

1. Advokasi Pembangunan rumah sakit baru dan peningkatan daya tampung rumah sakit rujukan
2. Pemenuhan standar mutu SPM
3. Meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat melalui pendidikan dan pemberdayaan kesehatan
4. Melaksanakan upaya pencegahan dan penaggulangan baik penyakit menular, tidak menular, wabah dan krisis masalah kesehatan
5. Melaksanakan pembinaan atau pengawasan mutu pelayanan pada fasilitas pelayanan kesehatan
6. Melaksanakan upaya pemenuhan/pemeliharaan/perbaikan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan
7. Melaksanakan upaya pemenuhan kebutuhan obat essensial, perbekalan kesehatan dan alat kesehatan
8. Melaksanakan upaya perencanaan kebutuhan SDMK dan peningkatan kompetensi SDMK
9. Melaksanakan upaya peningkatan perencanan, evaluasi dan pengawasaan pelaksanaan program
10. Melaksanakan optimalisasi pencatatan dan pelaporan antar fasilitas pelayanan kesehatan secara terpadu

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan urusan pemerintahan dalam satu urusan, yaitu Bidang Kesehatan. Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan berdasarkan hasil evaluasi, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk tahun 2026 mencakup satu urusan tersebut.

Rumusan permasalahan pembangunan daerah menjadi rujukan dalam perumusan visi, misi, dan program kepala daerah selama 5 tahun ke depan. Permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Banjarnegara yang berdasarkan aspek kesehatan sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029 yaitu :

1. Kualitas sumber daya manusia yang masih kurang. Kondisi kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Banjarnegara dapat dilihat dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2024 hanya sebesar 69,62. Jika dibandingkan dengan wilayah aglomer asiBarlingmascakeb (Banjarnegara-Purbalingga-Banyumas-Cilacap-Kebumen), capaian IPM Kabupaten Banjarnegara merupakan yang paling rendah. Capaian IPM Kabupaten Banjarnegara juga masih berada dibawah rata-rata IPMProvinsi dan IPM Nasional. Kondisi tersebut antara lain dipengaruhi karena layanan pendidikan belum merata, pendidikan belum dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, dan layanan Kesehatan yang belum merata.
2. Layanan kesehatan yang belum sepenuhnya baik. Hal ini ditandai dengan banyak permasalahan, seperti tingginya kematian ibu dan bayi, stunting, gizi buruk serta permasalahan kesehatan lain. Permasalahan ini disebabkan karena kurangnya tenaga kesehatan belum sesuai dengan standar minimal, belum tersedianya dokter dengan pelayanan spesialis patologi anatomi, spesialis kesehatan jiwa, sub spesialis anak, sub spesialis penyakit dalam, sub spesialis obgyn serta orthopedi sangat mempengaruhi layanan kesehatan.

3. Fasilitas kesehatan juga belum baik. Keterbatasan rasio tempat tidur dan Peralatan kedokteran dan penunjang di RSUD yang tersedia saat ini masih belum dapat menjawab kebutuhan pasien.
4. Masih terdapat 18 Puskesmas dari 35 Puskesmas yang berada di tanah desa, dan sarana prasana Puskesmas yang belum sesuai standar, serta ketiadaan rumah sakit secara khusus di daerah pegunungan menyebabkan keterlambatan dalam penanganan kedaruratan pasien di daerah pegunungan karena akses yang terlalu jauh.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPD Tahun 2023-2026 dan tahun pertama pentahapan RPJMD Tahun 2025-2029 dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2045. Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 saat ini sedang disusun sampai tahap rancangan. Selain itu, RKPD Tahun 2026 juga disusun berpedoman pada RPJPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2045, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, RKP Tahun 2026, dan program strategis nasional.

Sebagai bagian dari pelaksanaan tahun pertama dalam rangkaian RPJMD Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2026 juga perlu memperhatikan visi, misi dan program kepala daerah terpilih. Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 saat ini sedang disusun. Berdasarkan rancangan RPJMD Tahun 2025-2029 terdapat visi, misi, tujuan, dan sasaran. Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut adalah sebagai berikut: “Mewujudkan Banjarnegara yang Maju dan Sejahtera”.

Dalam upaya mewujudkan visi “Mewujudkan Banjarnegara yang Maju dan Sejahtera” Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara, akan melaksanakan kebijakan melalui misi yaitu Meningkatkan Kualitas dan Akses Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan Sosial Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial merupakan pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, misi ini berfokus pada peningkatan mutu layanan, pemerataan akses,

serta penguatan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. peningkatan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas juga diperlukan. Pembangunan dan pemerataan fasilitas kesehatan akan terus dilakukan agar masyarakat dapat memperoleh layanan medis dengan lebih mudah dan cepat. Selain itu, program kesehatan preventif dan promotif akan diperkuat, termasuk kampanye hidup sehat, layanan imunisasi, serta peningkatan gizi masyarakat untuk mencegah stunting dan penyakit kronis, serta memastikan ketersediaan tenaga kesehatan yang kompeten dan fasilitas yang memadai.

Tahun 2026 merupakan tahun pertama periode RPJMD Tahun 2025-2029, arah pembangunan akan diarahkan pada pembangunan pondasi dan perencanaan strategis dalam mewujudkan Banjarnegara yang Maju dan Sejahtera. Prioritas pembangunan pada tahun 2026 ditujukan untuk :

1. Peningkatan akses masyarakat pada layanan dasar yang berkualitas;
2. Pengembangan sektor unggulan potensial dan penguatan ekosistem ekonomi kreatif;
3. Revitalisasi jalan, jembatan, dan sistem transportasi yang mendukung konektivitas ekonomi, serta pengembangan infrastruktur digital untuk menunjang perekonomian;
4. Peningkatan kapasitas SDM aparatur dan digitalisasi pelayanan.

Target sasaran makro pembangunan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 yang akan dicapai antara lain meliputi :

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,25% - 6,00%;
2. Angka Kemiskinan sebesar 13,92% - 13,77%;
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,50% - 5,00%;
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 70,98%

Adapun Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara, mempunyai prioritas pembangunan pendukung untuk mewujudkan ketercapaian target pembangunan RPJMD sebagaimana berikut:

1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan untuk menunjang pelaksanaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) di wilayah kabupaten/kota yaitu pembangunan/rehabilitasi

puskesmas, pembangunan/rehabilitasi puskesmas pembantu, dan pembangunan RS wilayah utara /atas

2. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan untuk mendukung pelaksanaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) sesuai dengan standar pelayanan minimal
3. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data
4. Meningkatkan tata kelola perizinan Rumah Sakit Tipe C dan D serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya di tingkat kabupaten/kota guna menjamin kepatuhan terhadap standar pelayanan kesehatan
5. Meningkatkan tata kelola pemberian izin praktik bagi tenaga kesehatan, perencanaan, pemenuhan dan peningkatan kompetensi SDMK
6. Meningkatkan pengawasan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman
7. Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
8. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 Kabupaten Banjarnegara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp. 000)**	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp. 000)**	
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		**Persentase ketercapaian target kinerja perangkat daerah**	92%		**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota**		**Persentase ketercapaian target kinerja perangkat daerah**	92%		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		***Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	100%		***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***		***Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	100%		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Dokumen	50.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Dokumen	50.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp. 000)**	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp. 000)**	
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dokumen	35.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dokumen	35.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		***Persentase Administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana***	100%		***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***		***Persentase Administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana***	100%		
	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.498 orang	135.233.346	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.498 orang	135.233.346	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	157.242	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	157.242	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Dokumen	30.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Dokumen	30.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		***Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun***	*100%*		***Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah***		***Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun***	*100%*		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp. 000)**	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp. 000)**	
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Dokumen	20.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Dokumen	20.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		***Persentase SDMK yang mendapatkan peningkatan kompetensinya***	*100%*		***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***		***Persentase SDMK yang mendapatkan peningkatan kompetensinya***	*100%*		
			Persentase ASN berpredikat kinerja baik	*92%*				***Persentase ASN berpredikat kinerja baik***	*92%*		
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	15.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	15.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah SDMK yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal	30 SDMK	53.141	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah SDMK yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal	30 SDMK	53.141	
	Administrai Umum Perangkat Daerah		***Persentase Administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana***	*100%*		***Administrai Umum Perangkat Daerah***		***Persentase Administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana***	*100%*		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	12 Dokumen	15.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	12 Dokumen	15.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp. 000)**	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp. 000)**	
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**
			Kantor yang Disediakan					Kantor yang Disediakan			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah pemenuhan bahan logistik kantor	12 Dokumen	300.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah pemenuhan bahan logistik kantor	12 Dokumen	250.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Persentase Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia**	**100%**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia**	**100%**		
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket	28.875	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket	0	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	100.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	0	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 paket	150.573	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 paket	0	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan		***Persentase Penyediaan jasa penunjang***	*100%*		***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan***		***Persentase Penyediaan jasa penunjang***	*100%*		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemerintahan Daerah		***urusan pemerintahan daerah yang terlaksana***			***Pemerintahan Daerah***		***urusan pemerintahan daerah yang terlaksana***			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Dokumen	200.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Dokumen	200.000	
	penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Dokumen	467.429	penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Dokumen	689.004	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		***Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah***	*100%*		***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		***Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah***	*100%*		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit	30.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit	0	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau	14 unit	150.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya		Jumlah Kendaraan Dinas	14 unit	150.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp. 000)**	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp. 000)**	
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**
	Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 unit	15.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 unit	15.000	
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	1 unit	15.000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	1 unit	15.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	1 unit	60.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	1 unit	35.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 paket	50.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 paket	50.000	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		**Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar**	29,33		**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**		**Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar**	29,33		
			Rasio tempat tidur terhadap populasi	0,55				**Rasio tempat tidur terhadap populasi**	0,55		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Indeks Pencapaian (IP) Standar Pelayanan Masyarakat bidang Kesehatan	89				**Indeks Pencapaian (IP) Standar Pelayanan Masyarakat bidang Kesehatan**	89		
			Prevalensi Gizi Buruk	<1%				**Prevalensi Gizi Buruk**	<1%		
			Angka keberhasilan pengobatan TBC (TB success rate)/IUP	93%				**Angka keberhasilan pengobatan TBC (TB success rate)/IUP**	93%		
			Persentase ODHIV baru yang ditemukan dan mendapat pengobatan ARV	91%				**Persentase ODHIV baru yang ditemukan dan mendapat pengobatan ARV**	91%		
			Persentase lanjut usia yang mandiri	77%				**Persentase lanjut usia yang mandiri**	77%		
			Kab/kota yang memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan	21%				**Kab/kota yang memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan**	21%		
			Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Paripurna	91,8%				**Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Paripurna**	91,8%		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp. 000)**	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp. 000)**	
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**
			Persentase penduduk terdaftar Jaminan Kesehatan Nasional	98,1%				**Persentase penduduk terdaftar Jaminan Kesehatan Nasional**	98,1%		
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	67%				**Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional**	67%		
			Tingkat kepuasan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan	78%				**Tingkat kepuasan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan**	78%		
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Puskesmas memiliki Sarana, Prasarana dan Alat kesehatan sesuai standar	65,7%		*Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*		Persentase Puskesmas memiliki Sarana, Prasarana dan Alat kesehatan sesuai standar	65,7%		
			Persentase fasilitas kesehatan primer yang memiliki obat, vaksin, dan BMHP sesuai standar	100%				Persentase fasilitas kesehatan primer yang memiliki obat, vaksin, dan BMHP sesuai standar	100%		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Persentase desa/kelurahan yang memiliki unit pelayanan kesehatan	5%				Persentase desa/kelurahan yang memiliki unit pelayanan kesehatan	5%		
	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya		Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 unit	32.500.000	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya		Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 unit	33.000.000	
	Pembangunan Puskesmas		Jumlah pembangunan puskesmas	2 unit	46.020.000	Pembangunan Puskesmas		Jumlah pembangunan puskesmas	2 unit	46.000.000	
	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan		Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	2 unit	1.000.000	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan		Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	2 unit	1.000.000	
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 unit	4.250.000	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 unit	5.010.317	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 unit	5.003.046	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 unit	3.307.109	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas		Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah	1 unit	5.150.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas		Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah	1 unit	6.495.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kesehatan Lainnya		Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya			Kesehatan Lainnya		Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya			
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Terpenuhinya Pengadaan Alat Kesehatan/Alat penunjang medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 paket	3.100.000	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Terpenuhinya Pengadaan Alat Kesehatan/Alat penunjang medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 paket	2.690.710	
	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasyankes		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1 paket	225.000	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasyankes		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1 paket	225.000	
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 paket	17.270.781	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 paket	17.270.781	
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta		Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,	35 unit	117.000	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta		Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis	35 unit	117.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp. 000)**	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp. 000)**	
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**
	Fasilitas Kesehatan Lainnya		Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan			Fasilitas Kesehatan Lainnya		Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga		Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	250.469 KK	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga		Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	250.469 KK	0	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Audit Maternal Perinatal Surveilance dan Respon (AMPSR)	100%		*Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*		Persentase Audit Maternal Perinatal Surveilance dan Respon (AMPSR)	100%		
			Persentase RS melaksanakan Audit Medik/klinik kematian	90%				Persentase RS melaksanakan Audit Medik/klinik kematian	90%		
			Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100%				Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100%		
			Persentase ibu bersalin yang mendapatkan	100%				Persentase ibu bersalin yang mendapatkan	100%		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)					pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)			
			Persentase Bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100%				Persentase Bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100%		
			Persentase Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100%				Persentase Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100%		
			Persentase anak usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100%				Persentase anak usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100%		
			Persentase orang usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	100%				Persentase orang usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	100%		
			Persentase Lanjut usia yang mendapatkan pelayanan	100%				Persentase Lanjut usia yang mendapatkan pelayanan	100%		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			kesehatan sesuai standar (SPM)					kesehatan sesuai standar (SPM)			
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan mampu PONED dan PONEK	35,9%				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan mampu PONED dan PONEK	35,9%		
			Persentase Balita Gizi Buruk mendapat tata laksana	57%				Persentase Balita Gizi Buruk mendapat tata laksana	57%		
			Jumlah pembinaan, pendampingan, monitoring dan evaluasi PMT Lokal	35%				Jumlah pembinaan, pendampingan, monitoring dan evaluasi PMT Lokal	35%		
			Angka Kematian DBD	<1%				Angka Kematian DBD	<1%		
			Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage/IUP)	95%				Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage/IUP)	95%		
			Persentase orang terduga TB mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100%				Persentase orang terduga TB mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100%		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Persentase Lost To Follow Up pada ODHIV	<25%				Persentase Lost To Follow Up pada ODHIV	<25%		
			Persentase orang yang resiko tertular HIV mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100%				Persentase orang yang resiko tertular HIV mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100%		
			Kab/Kota dengan Positivity Rate (PR) Malaria <5%	<5%				Kab/Kota dengan Positivity Rate (PR) Malaria <5%	<5%		
			Proporsi kasus kusta baru tanpa disabilitas	81%				Proporsi kasus kusta baru tanpa disabilitas	81%		
			Cakupan imunisasi bayi lengkap	90%				Cakupan imunisasi bayi lengkap	90%		
			Kab/Kota dengan kesiapsiagaan penanggulangan krisis kesehatan atau KLB (SKDR)	100%				Kab/Kota dengan kesiapsiagaan penanggulangan krisis kesehatan atau KLB (SKDR)	100%		
			Persentase calon jemaah haji Indonesia yang memenuhi syarat istita'ah	100%				Persentase calon jemaah haji Indonesia yang memenuhi syarat istita'ah	100%		
			Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan	100%				Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan	100%		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)					pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)			
			Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100%				Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100%		
			Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (SPM)	100%				Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (SPM)	100%		
			Persentase puskesmas dengan cakupan pemeriksaan Kesehatan gratis > 80%	14%				Persentase puskesmas dengan cakupan pemeriksaan Kesehatan gratis > 80%	14%		
			Kab/kota sehat	100%				Kab/kota sehat	100%		
			Persentase puskesmas dengan minimal 10% institusi tempat kerja yang dibina	35%				Persentase puskesmas dengan minimal 10% institusi tempat kerja yang dibina	35%		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Persentase Masyarakat terdaftar jaminan kesehatan PBI APBD	14,04%				Persentase Masyarakat terdaftar jaminan kesehatan PBI APBD	14,04%		
			Persentase tatanan kawasan tanpa rokok (KTR)	25%				Persentase tatanan kawasan tanpa rokok (KTR)	25%		
			Persentase Penyehat Tradisional yang memiliki Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)	12%				Persentase Penyehat Tradisional yang memiliki Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)	12%		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10.880	100.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10.880	100.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10.500	269.725	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10.500	269.725	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10.420	48.400	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10.420	48.400	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	61.438	46.400	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	61.438	46.400	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	138.670	345.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	138.670	345.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		Presentase Penduduk Usia Produktif (15-59) tahun yang mendapatkan skrining sesuai standar	441.775	80.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		Presentase Penduduk Usia Produktif (15-59) tahun yang mendapatkan skrining sesuai standar	441.775	80.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	137.000	74.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	137.000	74.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	142.000	70.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	142.000	70.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15.765	75.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15.765	75.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat		Jumlah Penderita ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.997	75.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat		Jumlah Penderita ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.997	75.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	12.000	680.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	12.000	680.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	17.869	191.491	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	17.869	191.491	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian	6 Dokumen	57.200	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian	6 Dokumen	57.200	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar					Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	12 dokumen	75.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	12 dokumen	75.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 dokumen	104.135	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 dokumen	104.135	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 dokumen	77.504	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 dokumen	77.504	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 dokumen	17.900	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 dokumen	17.900	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 dokumen	545.174	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	12 dokumen	545.174	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								Promosi Kesehatan			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional Akupuntur Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	12 dokumen	5.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional Akupuntur Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	12 dokumen	5.000	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 dokumen	138.557	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 dokumen	138.557	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 dokumen	175.000	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 dokumen	235.000	
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 dokumen	28.703.416	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 dokumen	28.683.100	
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	12 dokumen	365.840	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium	12 dokumen	365.840	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Rujukan/Nasional		yang Didistribusikan			Rujukan/Nasional		Rujukan/Nasional yang Didistribusikan			
	Penyelenggaraaan Kabupaten/Kota Sehat		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	12 dokumen	1.000.000	Penyelenggaraaan Kabupaten/Kota Sehat		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	12 dokumen	1.000.000	
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 unit	25.000	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 unit	25.000	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1.393	150.000	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1.393	150.000	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan	90	100.000	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan	90	100.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			kesehatan sesuai standar					kesehatan sesuai standar			
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	84.852	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	84.852	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	10	108.325	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	10	108.325	
	Pegelolaan Kawasan Tanpa rokok		Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	2 tatanan	50.000	Pegelolaan Kawasan Tanpa rokok		Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	2 tatanan	50.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	12 dokumen	15.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	12 dokumen	15.000	
	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 dokumen	468.971	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 dokumen	468.971	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp. 000)**	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp. 000)**	
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	9 dokumen	141.900	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	9 dokumen	141.900	
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		*Persentase ketersediaan data dan informasi kesehatan untuk mendukung pengambilan keputusan*	100%		*Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi*		*Persentase ketersediaan data dan informasi kesehatan untuk mendukung pengambilan keputusan*	100%		
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 dokumen	40.000	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 dokumen	40.000	
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya yang berizin	98,2%		*Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*		Persentase Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya yang berizin	98,2%		
			Persentase Pelayanan Fasilitas Kesehatan kelengkapan dan ketepatan waktu Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	98,2%				Persentase Pelayanan Fasilitas Kesehatan kelengkapan dan ketepatan waktu Pengukuran Indikator Nasional Mutu	98,2%		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp. 000)**	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp. 000)**	
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**
								(INM) Pelayanan kesehatan			
			Persentase Puskesmas berkinerja baik	52%				Persentase Puskesmas berkinerja baik	52%		
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya		Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	69 fasyankes	15.000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya		Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	69 fasyankes	15.000	
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	60 fasyankes	73.000	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	60 fasyankes	73.000	
	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan		Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	12 Dokumen	350.000	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan		Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	12 Dokumen	250.000	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya		**Rasio Tenaga Kesehatan dan tenaga medis terhadap**	1,92		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya**		**Rasio Tenaga Kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi per**	1,92		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp. 000)**	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp. 000)**	
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**
	Manusia Kesehatan		**populasi per 1.000 penduduk**			**Manusia Kesehatan**		**1.000 penduduk**			
			Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar	68%				**Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar**	68%		
			Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	100%				**Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar**	100%		
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		*Persentase Perencanaan Kebutuhan dan pemenuhan SDM Kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah sesuai standar*	100%		*Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota*		*Persentase Perencanaan Kebutuhan dan pemenuhan SDM Kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah sesuai standar*	100%		
	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	12 Dokumen	20.000	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	12 Dokumen	20.000	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar		Jumlah Sumber Daya Kesehatan yang Standar di Fasilitas Kesehatan (Fasyankes)	200 Orang	15.000	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar		Jumlah Sumber Daya Kesehatan yang Standar di Fasilitas Kesehatan (Fasyankes)	200 Orang	15.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp. 000)**	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp. 000)**	
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	12 Dokumen	10.000	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	12 Dokumen	10.000	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		*Persentase SDMK yang ditingkatkan kompetensinya*	100%		*Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*		*Persentase SDMK yang ditingkatkan kompetensinya*	100%		
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sumber Daya Kesehatan Tingkat Kabupaten/Kota Ditingkatkan Mutu Kompetensinya	215 orang	1.536.493	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sumber Daya Kesehatan Tingkat Kabupaten/Kota Ditingkatkan Mutu Kompetensinya	215 orang	1.636.493	
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman		**Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar**	100%		**Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman**		**Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar**	100%		
			Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP)	51%				**Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP)**	51%		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp. 000)**	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp. 000)**	
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**
			yang memenuhi syarat					**yang memenuhi syarat**			
			Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan	100%				**Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan**	100%		
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen Sertifikat Produk Pangan (SPP)-PIRT sesuai standar	100%		*Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga*		Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen Sertifikat Produk Pangan (SPP)-PIRT sesuai standar	100%		
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh	12 Dokumen	273.083	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman	12 Dokumen	273.083	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp. 000)**	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp. 000)**	
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**
	Industri Rumah Tangga		Industri Rumah Tangga					Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			
	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga Rumah		Persentase sertifikasi Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	55%		*Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga Rumah*		Persentase sertifikasi Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	55%		
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	12 Dokumen	40.675	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	12 Dokumen	40.675	
	Program Pemberdayaan Masyarakat		**Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total**	28,78%		**Program Pemberdayaan Masyarakat**		**Persentase Desa/Keluraha n Sanitasi Total**	28,78%		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp. 000)**	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp. 000)**	
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**
	Bidang Kesehatan		**Berbasis Masyarakat**			**Bidang Kesehatan**		**Berbasis Masyarakat**			
			Cakupan desa/kel dengan minimal 75% posyandu siklus hidup yang aktif	50%				**Cakupan desa/kel dengan minimal 75% posyandu siklus hidup yang aktif**	50%		
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		*Persentase kecamatan dengan Forum kesehatan kecamatan (FKK) aktif*	100%		*Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota*		*Persentase kecamatan dengan Forum kesehatan kecamatan (FKK) aktif*	100%		
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dokumen	399.836	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dokumen	397.604	
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		*Persentase Kepala Keluarga yang stop buang air besar sembarangan*	100%		*Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota*		*Persentase Kepala Keluarga yang stop buang air besar sembarangan*	100%		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp. 000)**	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp. 000)**	
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	12 Dokumen	57.957	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	12 Dokumen	57.957	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		*Persentase kader posyandu minimal strata madya*	3%		*Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota*		*Persentase kader posyandu minimal strata madya*	3%		
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	110.833	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	110.833	
	Jumlah				289.282.102					289.576.771	

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Tahun 2026, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan adanya kebijakan efisiensi anggaran terutama yang bersumber dari APBD Murni yaitu:

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN agar dilakukan penghitungan ulang kebutuhan gaji dan tunjangan termasuk untuk PPPK paruh waktu
2. Pengadaan Mebel dihapus
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dihapus
4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dihapus
5. Sub Kegiatan Pembangunan Rumah sakit Wanayasa total Rp. 57.000.000.000,- akan dilaksanakan pada 2 tahun penganggaran yaitu tahun 2026 dan tahun 2027, pada tahun 2026 ada penambahan anggaran sebelumnya Rp. 32.500.000.000,- bertambah Rp. 500.000.00,0 menjadi 33.000.000.000,- . sehingga untuk tahun 2027 dialokasikan sebesar Rp. 34.000.000.000,-
6. Sub Kegiatan pembangunan fisik/konstruksi agar dilakukan penghitungan ulang dan koordinasi dengan Kemenkes RI bersumber dari DAK FISIK maupun sumber lainnya

2.5. PENELAAHAN USULAN MASYARAKAT

Berdasarkan hasil reses anggota DPRD, melalui aplikasi SIPD telah disampaikan usulan program dan kegiatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai beriku:

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2026 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Masalah	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume
1	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	kurangnya lengkapnya alat kesehatan yang dikelola oleh posyandu	Dusun Pulasari,Dusun Danaraja,Dusun , Kalimendong Wetan,Dusun Kalimendong, Dusun Kalimendong Kulon, Kab. Banjarnegara	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (paket)	1 paket

No	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Masalah	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume
2	Pembangunan Puskesmas	Relokasi tanah PUSKESMAS Purwanegara I karena berada di tanah kas Desa dan luasnya sangat tidak memenuhi syarat untuk layanann rawat inap,kami mohon sangat dipertimbangkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat yang memadai dan lebih baik lagi	RT 03 RW 02 Dusun Kalipelus, Kab. Banjarnegara	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 paket
3	Pembangunan Puskesmas	Lokasi/Lahan Bangunan Puskesmas yang tersedia kurang memadai untuk pelayanan masyarakat	Kelurahan Kenteng, Kab. Banjarnegara	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 paket
4	Pembangunan Puskesmas	Pelayanan pengobatan/PKD yang semakin ramai	Desa SItuwangi, Kab. Banjarnegara	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 paket
5	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kondisi Brankar Mobil Siaga Kesehatan Desa Dermasari yang rusak sehingga menghambat evakuasi warga ke Rumah Sakit	Dermasari, RT 002 RW 01, Kab. Banjarnegara	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (paket)	1 paket
6	Pembangunan Puskesmas	untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat sehingga perlunya untuk pembangunan puskesmas pembantu	Adipasir RT 01 RW 04, Kab. Banjarnegara	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 paket
7	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Peralatan Kesehatan Untuk PKD	Desa Pesangkalan, Kab. Banjarnegara	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (paket)	1 paket
8	Pembangunan Puskesmas	Gedung Puskesmas 1 (satu) Pagentan sudah tidak layak lagi untuk pelayanan dikarenakan rusak, selain itu pengguna layanan Puskesmas 1 Pagentan harus parkir di jalan karena tidak tersedianya lahan parkir	Desa Pagentan, Kecamatan Pagentan, Kab. Banjarnegara	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 paket
9	Pembangunan Puskesmas	Butuh Tempat Rawat inap	Desa Lengkong, Kab. Banjarnegara	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 paket
10	Pembangunan Puskesmas	Sehubungan dengan rekomendasi tim surveyor penilaian akreditasi puskesmas bawang 2 untuk membuat ruang permanen dan talud di	UPTD PUSKESMAS BAWANG 2 DESA WANADRI RT 01 RW 01, Kab. Banjarnegara	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 paket

No	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Masalah	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume
		lahan belakang puskesmas yg masih tersedia			
11	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	(Dental Unit) Adanya penambahan dokter gigi baru tetapi dental unit yang sudah ada dalam kondisi sudah rusak berat	UPTD PUSKESMAS BAWANG 2, WANADRI RT 01 RW 01, Kab. Banjarnegara	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (paket)	1 paket
12	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kondisi Ambulans jenis MITS T120SSMPI CHS (SS) dalam kondisi tidak layak pakai diperoleh pada tahun 2006	UPTD PUSKESMAS BAWANG 2, WANADRI RT 01 RW 01, Kab. Banjarnegara	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (paket)	1 paket
13	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kurangnya Fasilitas Kesehatan yang kurang Memadai	Desa Grogol, Kab. Banjarnegara	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (paket)	1 paket

2.6. PENELAAHAN USULAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD

Berdasarkan hasil reses anggota DPRD, melalui aplikasi SIPD telah disampaikan usulan program dan kegiatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.7
Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2026 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Masalah	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume
1	Pengembangan Puskesmas (Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota)	Dibutuhkan pembangunan pagar keliling untuk Puskesmas 2 Pagentan	Pembangunan pagar keliling untuk Puskesmas 2 Pagentan Kecamatan Pagentan, Kab. Banjarnegara	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 paket
2	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kurangnya sosialisasi bagi masyarakat	Kegiatan Forum Group Discussion Pencegahan dan Penanggulangan penyakit menular , Kab. Banjarnegara	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 kegiatan
3	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Untuk Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat dalam Menurunkan Kejadian Penyakit Melalui Teknologi Media	Promosi Kesehatan Untuk Pembuatan Media Edukasi Berupa Film Pendek di Kabupaten Banjarnegara,	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 kegiatan

No	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Masalah	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume
			Kab. Banjarnegara		
4	Pengembangan Puskesmas (Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota)	Bantuan untuk memenuhi kebutuhan mebelair UPTD Puskesmas Wanadadi 2.	Desa Linggasari, Kec. Wanadadi, Kab. Banjarnegara	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 paket
5	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (P2MPTM)	Desa Purwonegoro, Kec. Purwanegara, Kab. Banjarnegara	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 kegiatan

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadap kebijakan nasional menunjukkan bahwa usulan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 telah diselaraskan dengan Prioritas Nasional dalam RKP 2026, antara lain peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui percepatan penurunan stunting dan perbaikan gizi, percepatan transformasi sistem kesehatan melalui penguatan layanan primer, serta pemerataan pembangunan kesehatan melalui peningkatan akses layanan dasar

Tabel 3.1

Mtariks sinkronisasi Program Prioritas Nasional Tahun 2026

Prioritas Nasional RKP 2026	**Arah Kebijakan**	**Usulan Bidang Kesehatan Kabupaten Banjarnegara 2026**
Peningkatan kualitas SDM	Penurunan stunting dan wasting, peningkatan kesehatan ibu & anak	Program percepatan penurunan stunting, peningkatan cakupan imunisasi, deteksi dini KEK dan anemia ibu hamil
Transformasi sistem kesehatan	Penguatan layanan primer, peningkatan mutu layanan rujukan, digitalisasi kesehatan	Integrasi layanan Satu Sehat, pengembangan Puskesmas sebagai gatekeeper, peningkatan kapasitas SDM kesehatan
Ketahanan pangan dan gizi	Intervensi gizi spesifik dan sensitif, pengawasan pangan	Edukasi gizi seimbang, pengawasan mutu pangan, pemberian TTD dan PMT pada sasaran
Pemerataan pembangunan wilayah	Pemerataan tenaga kesehatan, peningkatan akses layanan di daerah sulit	redistribusi tenaga kesehatan, pembangunan/rehabilitasi sarana kesehatan di wilayahsulit

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tahun 2026 merupakan tahun pertama periode RPJMD Tahun 2025-2029, arah pembangunan akan diarahkan pada pembangunan pondasi dan perencanaan strategis dalam mewujudkan Banjarnegara yang Maju dan Sejahtera. Prioritas pembangunan pada tahun 2026 ditujukan untuk Peningkatan akses

masyarakat pada layanan dasar yang berkualitas;

Tujuan Daerah Tahun 2025 – 2029 yaitu “Terwujudnya Banjarnegara Maju dan Sejahtera” dan Sasaran Daerah Tahun 2025 – 2029 yaitu “Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat”, serta mempertimbangkan kajian pohon kinerja, maka rumusan tujuan perangkat daerah yang akan dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029 adalah “Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat”, dengan indikator sebagai berikut :

a. Usia Harapan Hidup
b. Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, dan dapat dilaksanakan, maka sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029, adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 Tercapainya masyarakat yang sehat dan produktif sesuai siklus hidup, dengan indikator sebagai berikut:

a. Jumlah Kematian Ibu
b. Jumlah Kematian Balita
c. Prevalensi wasting pada balita
d. Angka Populasi Bebas Penyakit Menular
e. Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular
f. Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis
g. Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN)

Sasaran 2 Meningkatnya pembudayaan gaya hidup sehat pada masyarakat melalui penguatan kesadaran, pengetahuan, dan penerapan untuk hidup sehat, dengan indikator sebagai berikut:

a. Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat

Sasaran 3 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik perangkat daerah, dengan indikator sebagai berikut:

a. Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara
b. Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Adapun Program dan Kegiatan Usulan Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota
   1) Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   3) Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
   1) Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
   2) Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   3) Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
   4) Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia
   1) Perencanaan Kebutuhan Dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKP Dan UKM Di Wilayah Kabupaten/Kota
   2) Pengembangan Mutu Dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
   1) Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga
   2) Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran Dan Depot Air Minum (DAM)
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
   1) Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   2) Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   3) Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program pada perangkat daerah merupakan program prioritas dalam Renstra 2025-2029. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Pemilihan untuk masing-masing program/ kegiatan di sebagai berikut:

TABEL 4.1
PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KESEHATAN KAB. BANJARNEGARA TAHUN 2026

TUJUAN OPD/ SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN SASARAN SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				LOKASI	SUMBER ANGGARAN	CATATAN PENTING
					2026		Perkiraan maju 2027 (n+1)				
					TARGET	RP (000. 000)	TARGET	RP (000. 000)			
Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat		Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Nilai	39	41		43				
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik perangkat daerah		Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara	Nilai	74	74,75		75				
Meningkatnya penyelenggaraan administrasi perangkat daerah urusan kewilayahan	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase ketercapaian target kinerja perangkat daerah**	**%**	**90%**	**92**	**137.397**	**93**	**148.902**	**Banjar negara**	**APBD termasuk DAK, DBHCHT, PAJAK ROKOK, DAU TERIKAT**	
Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100%	100		100				
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	0	12 Dokumen	25			
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	35	12 Dokumen	25			
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	75	12 Dokumen	50			

TUJUAN OPD/ SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN SASARAN SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				LOKASI	SUMBER ANGGARAN	CATATAN PENTING
					2026		Perkiraan maju 2027 (n+1)				
					TARGET	RP (000. 000)	TARGET	RP (000. 000)			
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar									
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik perangkat daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara	%	83,3	86		86				
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerrah yang dipenuhi	%	100	100		100				
Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana	%	100	100		100				
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	1328 Orang	1498 Orang	135.459	1545 Orang	146.568			
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	157	12 Dokumen	157			
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	30	12 Dokumen	30			
Meningkatkan pengelolaan dan administrasi Barang Milik Daerah (BMD) secara tertib, dan akuntabel	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun	%	100%	100		100				

TUJUAN OPD/ SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN SASARAN SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				LOKASI	SUMBER ANGGARAN	CATATAN PENTING
					2026		Perkiraan maju 2027 (n+1)				
					TARGET	RP (000. 000)	TARGET	RP (000. 000)			
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	JumlahLaporan Barang Milik Daerah yang tersusun	dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	20	12 Dokumen	20			
Meningkatkan Pengelolaan pelayanan kepegawaian	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDMK yang ditingkatkan kompetensinya sesuai tugas pokok dan fungsinya	%	100	100		100				
		Persentase ASN berpredikat kinerja baik	%	NA	92		93				
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah SDMK yang ditingkatkan kompetensinya sesuai tugas pokok dan fungsinya	orang	6 orang	10 orang	53	10 orang	60			
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	0	12 Dokumen	15			
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	%	100	100		100				
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	dokumen	2 dokumen	2 Dokumen	15	2 Dokumen	15			
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pemenuhan bahan logistik kantor	dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	300	12 Dokumen	400			
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan	%	100	100		100				

TUJUAN OPD/ SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN SASARAN SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				LOKASI	SUMBER ANGGARAN	CATATAN PENTING
					2026		Perkiraan maju 2027 (n+1)				
					TARGET	RP (000. 000)	TARGET	RP (000. 000)			
		pemerintah daerah yang tersedia									
Tersedianya Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	paket	1 paket	0	29	1 paket	30			
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	1 unit	0	100	1 unit	200			
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	paket	1 paket	0	151	1 paket	200			
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana	%	100	100		100				
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	200	12 Dokumen	200			
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	467	12 Dokumen	542			
Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100		100				
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	unit	2 unit	0	30	2 unit	40			

TUJUAN OPD/ SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN SASARAN SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				LOKASI	SUMBER ANGGARAN	CATATAN PENTING
					2026		Perkiraan maju 2027 (n+1)				
					TARGET	RP (000. 000)	TARGET	RP (000. 000)			
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya									
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	11 unit	14 unit	150	14 unit	200			
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	2 unit	2 unit	15	2 unit	15			
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	unit	1 unit	1 unit	15	1 unit	15			
Terlaksananya Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	unit	1 unit	1 unit	60	1 unit	60			
Terlaksananya Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	paket	200 paket	3 paket	50	3 paket	50			
Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat		Usia Harapan Hidup	Angka	74,66	75,28		75,55				
Tercapainya masyarakat yang sehat dan produktif sesuai siklus hidup		Jumlah Kematian Ibu	kasus	16 kasus	15 kasus		14 kasus				
		Jumlah Kematian Balita	kasus	148 kasus	142 kasus		139 kasus				
		Prevalensi wasting pada balita	%	4,8	4,4		4,3				

TUJUAN OPD/ SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN SASARAN SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				LOKASI	SUMBER ANGGARAN	CATATAN PENTING
					2026		Perkiraan maju 2027 (n+1)				
					TARGET	RP (000. 000)	TARGET	RP (000. 000)			
		Angka Populasi Bebas Penyakit Menular	%	NA	91		92				
		Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular	%	NA	100		100				
		Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	%	NA	40		50				
		Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN)	%	69,64	69,99		70,09				
Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat Dan Perorangan	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	NA	29,33	160.002	34,67	161.000	**Banjar negara**	**APBD termasuk DAK, DBHCHT, PAJAK ROKOK, DAU TERIKAT**	
		Rasio tempat tidur terhadap populasi	per 1.000 penduduk	0,53	0,55		0,56				
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan untuk menunjang pelaksanaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) di wilayah kabupaten/kota	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas memiliki Sarana, Prasarana dan Alat kesehatan sesuai standar	%	80	65,7		71,4				
		Persentase fasilitas kesehatan primer yang memiliki obat, vaksin, dan BMHP sesuai standar	%	100	100		100				

TUJUAN OPD/ SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN SASARAN SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				LOKASI	SUMBER ANGGARAN	CATATAN PENTING
					2026		Perkiraan maju 2027 (n+1)				
					TARGET	RP (000. 000)	TARGET	RP (000. 000)			
		Persentase desa/kelurahan yang memiliki unit pelayanan kesehatan	%	NA	5		6,1				
Terpenuhinya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	unit	NA unit	1	33.000	1	24.000			APBD: Pembangunan RS Tipe D Wanayasa
Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	unit	2 unit	2	46.500	2	36.000			1. Pengadaan tanah Puskesmas bawang 1 2. Pemb. Puskesmas Pwj. Klampok 2 3. Pemb. Puskesmas Madukara 2 4. Pemb. Puskesmas pejawaran 5. Pemb. Puskesmas Purwonegoro 1
Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	unit	2 unit	2	5.010	2	2.000			1. pembangunan PustuJalatunda,mandiraja 2. Pembangunan PustuGumelem Kulon 3. PembangunanPustu Sidarata Punggelan 4. Pembangunan Pustu Glempang mandiraja

TUJUAN OPD/ SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN SASARAN SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				LOKASI	SUMBER ANGGARAN	CATATAN PENTING
					2026		Perkiraan maju 2027 (n+1)				
					TARGET	RP (000. 000)	TARGET	RP (000. 000)			
											5. Pembangunan Pustu Beji Banjarmangu-
Terbangunnya Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	unit	NA unit	2	1.000	1	600			1. Pembangunan Rumdin Puskesmas Sigaluh 1 2. Pembangunan Rumdin Puskesmas Punggelan 2
Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	unit	11 unit	2 unit	5.200	2 unit	6.250			Rehabilitasi Pusk. Bawang 2
Tersedianya Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	unit	3 unit	1 unit	6.495	1 unit	900			1. Rehab pustu balun - 2. Rehab Pustu Klaiwungu - 3. Rehab Pustu Gembol - 4. Rehab Pustu sawal - 5. Rehab Pustu Tlaga- 6. Rehab Pustu Panggisari- 7. Rehab Pustu parakan - 8. Rehab Pustu Kertayasa

TUJUAN OPD/ SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN SASARAN SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				LOKASI	SUMBER ANGGARAN	CATATAN PENTING
					2026		Perkiraan maju 2027 (n+1)				
					TARGET	RP (000. 000)	TARGET	RP (000. 000)			
Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	paket	NA paket	1 Paket	225	1 Paket	225			kalibrasi alkes Kesehatan Labkes dan puskesmas
Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (paket)	paket	1 paket	1 paket	3.100	1 paket	31.000			1. DBCHT : Ambulan Transport Roda 2unit , EKG 2 unit Spirometer 2. DAK Fisik IPAL 2 unit Dental 1 unit Fotometer 2 unit Sterilisator 5 unit
Tersedianya Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	paket	1 paket	1 paket	17.291	1 paket	17.500			Pengadaan obat, bmhp
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	250.469	250.469 Keluarga	5	0	0			kegiatan verval intervensi lanjutan PISPK
Terlaksananya Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin,	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin,	unit	35 unit	35 unit	117	35 unit	120			Belanja jasa pihak ketiga pengiriman obat, bmhp, vaksin dll dengan PT POS indonesia

TUJUAN OPD/ SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN SASARAN SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				LOKASI	SUMBER ANGGARAN	CATATAN PENTING
					2026		Perkiraan maju 2027 (n+1)				
					TARGET	RP (000. 000)	TARGET	RP (000. 000)			
Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Makanan ke Fasilitas Kesehatan									
Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat Dan Perorangan	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Pencapaian (IP) Standar Pelayanan Masyarakat bidang Kesehatan	%	NA	89		90				
		Prevalensi Gizi Buruk	%	<1	<1		<1				
		Angka keberhasilan pengobatan TBC (TB success rate)/IUP	%	NA	93		93				
		Persentase ODHIV baru yang ditemukan dan mendapat pengobatan ARV	%	NA	91		92				
		Persentase lanjut usia yang mandiri	%	NA	77		79				
		Kab/kota yang memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan	%	NA	21		22				
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Paripurna	%	90,1	91,8		93,4				
		Persentase penduduk terdaftar Jaminan Kesehatan Nasional	%	98	98,1		98,15				
Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan untuk mendukung pelaksanaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP)	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Audit Maternal Perinatal Surveilance dan Respon (AMPSR)	%	100	100		100				

TUJUAN OPD/ SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN SASARAN SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				LOKASI	SUMBER ANGGARAN	CATATAN PENTING
					2026		Perkiraan maju 2027 (n+1)				
					TARGET	RP (000. 000)	TARGET	RP (000. 000)			
		Persentase RS melaksanakan Audit Medik/klinik kematian	%	NA	90		90				
		Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	%	96,4	100		100				
		Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	%	98,6	100		100				
		Persentase Bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	%	92,6	100		100				
		Persentase Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	%	95,7	100		100				
		Persentase anak usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	%	100	100		100				
		Persentase orang usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	%	100	100		100				
		Persentase Lanjut usia yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	%	99	100		100				

TUJUAN OPD/ SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN SASARAN SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				LOKASI	SUMBER ANGGARAN	CATATAN PENTING
					2026		Perkiraan maju 2027 (n+1)				
					TARGET	RP (000. 000)	TARGET	RP (000. 000)			
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan mampu PONED dan PONEK	%	36	35,9		38,5				
		Persentase Balita Gizi Buruk mendapat tata laksana	%	56,03	57		57,5				
		Jumlah pembinaan, pendampingan, monitoring dan evaluasi PMT Lokal	%	N/A	35		35				
		Angka Kematian DBD	%	NA	<1		<1				
		Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage/IUP)	%	NA	95		95				
		Persentase orang terduga TB mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	%	72	100		100				
		Persentase Lost To Follow Up pada ODHIV	%	NA	<25		<25				
		Persentase orang yang resiko tertular HIV mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	%	100	100		100				
		Kab/Kota dengan Positivity Rate (PR) Malaria <5%	%	NA	<5		<5				
		Proporsi kasus kusta baru tanpa disabilitas	%	NA	81		82				
		Cakupan imunisasi bayi lengkap	%	NA	90		90				
		Kab/Kota dengan kesiapsiagaan	%	100	100		100				

TUJUAN OPD/ SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN SASARAN SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				LOKASI	SUMBER ANGGARAN	CATATAN PENTING
					2026		Perkiraan maju 2027 (n+1)				
					TARGET	RP (000. 000)	TARGET	RP (000. 000)			
		penanggulangan krisis kesehatan atau KLB (SKDR)									
		Persentase calon jemaah haji Indonesia yang memenuhi syarat istita'ah	%	100	100		100				
		Persentase Hipertensi dalam pengendalian	%	NA	35		45				
		Persentase Diabetes Miletus dalam pengendalian	%	NA	35		45				
		Persentase orang usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	%	95	100		100				
		Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	%	100	100		100				
		Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	%	100	100		100				
		Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (SPM)	%	100	100		100				
		Persentase puskesmas dengan cakupan	%	NA	14		34				

TUJUAN OPD/ SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN SASARAN SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				LOKASI	SUMBER ANGGARAN	CATATAN PENTING
					2026		Perkiraan maju 2027 (n+1)				
					TARGET	RP (000. 000)	TARGET	RP (000. 000)			
		pemeriksaan Kesehatan gratis > 80%									
		Kab/kota sehat	%	NA	100		100				
		Persentase puskesmas dengan minimal 10% institusi tempat kerja yang dibina	%	NA	35		45				
		Persentase Masyarakat terdaftar jaminan kesehatan PBI APBD	%	16,62	14,04		13,96				
		Persentase tatanan kawasan tanpa rokok (KTR)	%	NA	25		37,5				
		Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	%	NA	65		68				
		Persentase Penyehat Tradisional yang memiliki Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)	%	8,5	12		13				
Terkelolanya Kesehatan Ibu hamil Standar	Pengelolaan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	10.932 orang	10.880 orang	125	10.860 orang	100			IKK, SPM
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Pengelolaan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	11.995 orang	10.500 orang	275	10.600 orang	285			IKK, SPM
Terkelolanya Kesehatan Bayi Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	10.450 orang	10.420 orang	75	10.410 orang	75			IKK, SPM
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	58.533 orang	61.438 orang	50	61.438 orang	52			IKK, SPM

TUJUAN OPD/ SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN SASARAN SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				LOKASI	SUMBER ANGGARAN	CATATAN PENTING
					2026		Perkiraan maju 2027 (n+1)				
					TARGET	RP (000. 000)	TARGET	RP (000. 000)			
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	138.739 orang	138.670 orang	345	138.670 orang	100			IKK, SPM
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	467.440 orang	441.775 orang	80	441.775 orang	85			IKK, SPM
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	137.000 orang	137.000 orang	90	138.000 orang	100			IKK, SPM
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	142.000 orang	142.000 orang	75	142.000 orang	80			IKK, SPM
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	15.765 orang	15.765 orang	80	15.765 orang	85			IKK, SPM
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	orang	1.997 orang	1.997 orang	95	1.997 orang	100			IKK, SPM
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	10.782 orang	12.000 orang	700	11.000 orang	750			IKK, SPM

TUJUAN OPD/ SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN SASARAN SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				LOKASI	SUMBER ANGGARAN	CATATAN PENTING
					2026		Perkiraan maju 2027 (n+1)				
					TARGET	RP (000. 000)	TARGET	RP (000. 000)			
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	18.819 orang	17.869 orang	195	16.869 orang	200			IKK, SPM
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	70	12 Dokumen	75			Penyelidikan epidemiologi risiko KLB dan penanganan KLB
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	104	12 Dokumen	85			Penyelidikan epidemiologi risiko /SKDR Bencana dan penanganan Bencana segmen kesehatan
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakatt	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	104	12 Dokumen	125			Pengadaan PMT
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	75	12 Dokumen	125			
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	75	12 Dokumen	150			
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	545	12 Dokumen	90			
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional,	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional,	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	dokumen	4 dokumen	12 Dokumen	5	12 Dokumen	5			

TUJUAN OPD/ SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN SASARAN SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				LOKASI	SUMBER ANGGARAN	CATATAN PENTING
					2026		Perkiraan maju 2027 (n+1)				
					TARGET	RP (000. 000)	TARGET	RP (000. 000)			
Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya									
Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	dokumen	12 dokumen	12 dokumen	140	12 dokumen	150			
Terlaksananya Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	dokumen	12 dokumen	12 dokumen	0	12 dokumen	100			
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	dokumen	12 dokumen	12 dokumen	175	12 dokumen	175			
Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	dokumen	12 dokumen	12 dokumen	33.251	12 dokumen	33.809			
Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	sampel	115	92 sampel	366	100 sampel	74			
Terselenggaranya Kabupaten /Kota Sehat	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.000	12 Dokumen	3.000			
Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	20	12 Dokumen	20			

TUJUAN OPD/ SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN SASARAN SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				LOKASI	SUMBER ANGGARAN	CATATAN PENTING
					2026		Perkiraan maju 2027 (n+1)				
					TARGET	RP (000. 000)	TARGET	RP (000. 000)			
Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	20	12 Dokumen	20			
Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	85	12 Dokumen	20			
Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	unit	0 unit	1 unit	25	1 unit	20			
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	1.393 orang	1.393 orang	175	1.393 orang	175			
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	86 orang	90 orang	125	90 orang	150			
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	orang	10 orang	10 orang	110	10 orang	110			
Terlaksananya penerapan kawasan tanpa rokok	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	tatanan	NA	2 tatanan	50	3 tatanan	20			
Terkoordinasi Tersinkronisasinya SPM Bidang Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang	dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	35	12 Dokumen	35			

TUJUAN OPD/ SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN SASARAN SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				LOKASI	SUMBER ANGGARAN	CATATAN PENTING
					2026		Perkiraan maju 2027 (n+1)				
					TARGET	RP (000. 000)	TARGET	RP (000. 000)			
	SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Kesehatan Kabupaten/Kota									
Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	dokumen	NA	12 Dokumen	469	12 Dokumen	400			
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Pengelolaan Kesehatan Haji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	dokumen	100	9 dokumen	150	9 dokumen	150			
Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat Dan Perorangan	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	%	100	67		70				
Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase ketersediaan data dan informasi kesehatan untuk mendukung pengambilan keputusan	%	100	100		100				
Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Kesehatan	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	100			
Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat Dan Perorangan	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat kepuasan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan	%	76,6	78		79				
Meningkatkan tata kelola perizinan Rumah Sakit Tipe C dan D serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya di tingkat kabupaten/kota guna	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya yang berizin	%	98	98,2		98,5				

TUJUAN OPD/ SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN SASARAN SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				LOKASI	SUMBER ANGGARAN	CATATAN PENTING
					2026		Perkiraan maju 2027 (n+1)				
					TARGET	RP (000. 000)	TARGET	RP (000. 000)			
menjamin kepatuhan terhadap standar pelayanan kesehatan											
		Persentase Pelayanan Fasilitas Kesehatan kelengkapan dan ketepatan waktu Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	%	98	98,2		98,5				
		Persentase Puskesmas berkinerja baik	%	50	52		54				
Tersedianya Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Unit	69 Unit	69 Unit	50	70 Unit	75			
Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	unit	60 Unit	60 Unit	100	60 Unit	125			
Terlaksananya Penyiapan Perumusan dan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	350	12 Dokumen	350			
Meningkatnya Kapasitasnya Sumber Daya Manusia Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio Tenaga Kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	per 1.000 penduduk	**1,88**	**1,92**	**1.681**	**1,94**	**1.700**	**Banjar negara**	**APBD termasuk DAK, DBHCHT, PAJAK ROKOK, DAU TERIKAT**	

TUJUAN OPD/ SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN SASARAN SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				LOKASI	SUMBER ANGGARAN	CATATAN PENTING
					2026		Perkiraan maju 2027 (n+1)				
					TARGET	RP (000. 000)	TARGET	RP (000. 000)			
		Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar	%	65	68		70				
		Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	%	100	100		100				
Meningkatkan tata kelola pemberian izin praktik bagi tenaga kesehatan	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	persentase tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki izin praktik	%	80	80		82,5				
Terlaksananya Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen	12 dokumen	12 dokumen	0	12 dokumen	20			
Meningkatkan perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan Kebutuhan dan pemenuhan SDM Kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah sesuai standar	%	100	100		100				
Terlaksananya Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	12 dokumen	12 dokumen	20	12 dokumen	25			
Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Kesehatan yang Standar di Fasilitas Kesehatan (Fasyankes)	Orang	NA	NA	15	10 Orang	20			

TUJUAN OPD/ SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN SASARAN SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				LOKASI	SUMBER ANGGARAN	CATATAN PENTING
					2026		Perkiraan maju 2027 (n+1)				
					TARGET	RP (000. 000)	TARGET	RP (000. 000)			
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pembinaan Sumber Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	12 dokumen	12 dokumen	10	12 dokumen	15			
Meningkatkan mutu dan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya ManusiaKesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDMK yang ditingkatkan kompetensinya	%	100	100		100				
Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Kesehatan Tingkat Kabupaten/Kota Ditingkatkan Mutu Kompetensinya	Orang	215 Orang	215 Orang	1.636	215 Orang	1.620			- Orientasi Pembinaan Posyandu bidang Kesehatan bagi Nakes Puskesmas - Pelalatihan pelayanan Antenatal Care, persalinan, nifas dan Skrining Hipotiroid bagi bidan di FKTP - Pelatihan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim bagi Dokter di Puskesmas - Pelatihan SDM bagi Nakes dlm UBM di Fasyankes Primer - Pelatihan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal - Pelatihan Manajemen Puskesmas

TUJUAN OPD/ SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN SASARAN SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				LOKASI	SUMBER ANGGARAN	CATATAN PENTING
					2026		Perkiraan maju 2027 (n+1)				
					TARGET	RP (000. 000)	TARGET	RP (000. 000)			
											- Peltihan SDIDTK
Meningkatnya pengawasan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	%	100	**100**	**313**	**100**	**400**	**Banjar negara**	**APBD termasuk DAK, DBHCHT, PAJAK ROKOK, DAU TERIKAT**	
		Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat	%	50	51		52				
		Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan	%	100	100		100				
Meningkatkan efisiensi dan kepatuhan dalam pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, serta usaha mikro obat tradisional (UMOT)	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan	%	NA	0		100				
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen	12 Dokumen	0	15	12 Dokumen	40			
Meningkatkan penerbitan rekomendasi Sertifikat Produksi Pangan dan Nomor P-IRT bagi produk makanan dan minuman tertentu yang	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman	Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen Sertifikat Produk Pangan (SPP)-PIRT sesuai standar	%	100	100		100				

TUJUAN OPD/ SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN SASARAN SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				LOKASI	SUMBER ANGGARAN	CATATAN PENTING
					2026		Perkiraan maju 2027 (n+1)				
					TARGET	RP (000. 000)	TARGET	RP (000. 000)			
diproduksi oleh industri rumah tangga	Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga										
		Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu	%	%	100		100				
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	273	12 Dokumen	280			
Meningkatkan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi bagi tempat pengelolaan makanan, seperti jasa boga, rumah makan/restoran, dan depot air minum (DAM), untuk menjamin keamanan dan kesehatan pangan	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase sertifikasi Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	%	50	55		60				
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	15	12 Dokumen	40			

TUJUAN OPD/ SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN SASARAN SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				LOKASI	SUMBER ANGGARAN	CATATAN PENTING
					2026		Perkiraan maju 2027 (n+1)				
					TARGET	RP (000. 000)	TARGET	RP (000. 000)			
Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)									
Meningkatkan pelaksanaan pemeriksaan dan tindak lanjut hasil post market terhadap produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga guna menjamin mutu dan keamanan pangan	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang diperiksa post market	%	100	100		100				
Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	10	12 Dokumen	40			
Meningkatnya pembudayaan gaya hidup sehat pada masyarakat melalui penguatan kesadaran, pengetahuan, dan penerapan untuk hidup sehat.		**Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat**	%	NA	20		25				
Meningkatnya Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	%	25,18	28,78	**566**	30,58	**600**	**Banjar negara**	**APBD termasuk DAK, DBHCHT, PAJAK ROKOK, DAU TERIKAT**	

TUJUAN OPD/ SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN SASARAN SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				LOKASI	SUMBER ANGGARAN	CATATAN PENTING
					2026		Perkiraan maju 2027 (n+1)				
					TARGET	RP (000. 000)	TARGET	RP (000. 000)			
		Cakupan Desa/Kel Dengan Minimal 75% Posyandu Siklus Hidup Yang Aktif	%	NA	50		52				
Meningkatkan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, serta peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam pembangunan kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kecamatan dengan Forum kesehatan kecamatan (FKK) aktif	%	NA	100		100				
Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	400	12 Dokumen	425			
Meningkatkan pelaksanaan program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) sebagai upaya promotif dan preventif untuk mendorong perilaku hidup sehat	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kepala Keluarga yang stop buang air besar sembarangan	%	100	100		100				
Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	50	12 Dokumen	65			
Meningkatkan pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) untuk memperkuat peran serta	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kader posyandu minimal strata madya	%	NA	3		5				

TUJUAN OPD/ SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN SASARAN SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				LOKASI	SUMBER ANGGARAN	CATATAN PENTING
					2026		Perkiraan maju 2027 (n+1)				
					TARGET	RP (000. 000)	TARGET	RP (000. 000)			
masyarakat dalam pembangunan kesehatan											
Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	116	12 Dokumen	110			

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026merupakan penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. Renja Perangkat Daerah selanjutnya menjadi platform operasional bagi Perangkat Daerah dalam menjalankan programnya dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka sasaran pembangunan daerah tahun 2026. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026 dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disepakati
2. Kerangka pendanaan dalam Renja Perangkat Daerah masih bersifat sementara, sehingga masih dimungkinkan terjadi perubahan pagu yang disebabkan oleh pengurangan, penambahan, dan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan maupun antar sub kegiatan dalam kerangka penyusunan anggaran secara teradu dan berbasis kinerja.
3. Renja Perangkat Daerah menjadi acuan bagi Kepala Perangkat Daerah dan segenap jajarannya serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, serta menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal : Juli 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BANJARNEGARA

PEMERINTAH KABUPATEN DINKES BANJARNEGARA

LATIFA HESTI PURWANINGTYAS

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, karena atas rahmat dan karuniaNya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2026.

Rencana Kerja merupakan Dokumen Perencanaan Kinerja Kegiatan Tahunan dan Indikator Kinerja sekurang-kurangnya memuat program-program pengentasan kemiskinan, penanganan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial), PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial), TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) dan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) di lingkup Dinsos PPPA berdasarkan kemampuan anggaran dan keuangan daerah, Tujuan, sasaran dan prioritas program, arah kebijakan, rencana kegiatan dan pendanaan kinerja penyelenggaraan Dinsos PPPA yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, dan dapat selaras dengan kondisi spesifik daerah, aspirasi masyarakat serta sinergi dengan program kabupaten, provinsi dan pusat.

Kami menyadari bahwa Renja ini masih jauh dari sempurna, sebab perencanaan adalah sebuah asumsi-asumsi sehingga pada realitas pelaksanaannya kadang bisa berubah, disisi lain kami merasa terbatasnya pengetahuan dan informasi yang kami miliki dalam melengkapi dokumen penyusunan Renja.

Kerjasama dan kolaborasi berbagai pihak baik dari intern Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan juga dari Lintas Sektor serta dari peran serta masyarakat, dan untuk semua kontribusinya positifnya disampaikan terimakasih.

Semoga dokumen Renja Dinsos PPPA Kabupaten Banjarnegara tahun 2026 ini bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Banjarnegara, 2025

KEPALA DINSOS PPPA
KABUPATEN BANJARNEGARA

ADITYA AGUS SATRIA, M.Ec.Dev,MA,Ak.CA
Pembina Tk.I
NIP. 19800903 200501 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR iv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 5
1.4 Sistematika Penulisan Renja 6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINSOS PPPA TAHUN 2024 8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinsos PPPA Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinsos PPPA 8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinsos PPPA 40
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinsos PPPA 46
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 49
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 73
2.6 Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 73
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINSOS PPPA 75
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 75
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinsos PPPA 76
3.3 Program dan Kegiatan 77
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINSOS PPPA 130
BAB V PENUTUP 160

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinsos PPPA dan Pencapaian Renstra DINSOS PPPA s.d Tahun 2024 13

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinsos PPPA Kabupaten Banjarnegara 45

Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2026 51

Tabel 2.4 Usulan Program dan kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Banjarnegara 74

Tabel 2.5 Usulan Program dan kegiatan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2026 Kabupaten Banjarnegara 75

Tabel 3.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2026 79

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinsos PPPA 131

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan yang diatur melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan pembentukan tim penyusun, penelaahan rancangan awal RKPD, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, hingga pada penyempurnaan berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang RKPD. Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, penyusunan Renja Perangkat Daerah juga mengacu pada Renja Kementerian/Lembaga terkait, serta Renja Perangkat Daerah Provinsi terkait. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2. Landasan Hukum

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor.35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
30. Peraturan Bupati Nomor 97 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara;
31. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 14);
32. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 15);
33. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara tahun 2025 nomor 34)

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun dengan maksud untuk:

a. Menjabarkan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029 ke dalam rencana program kegiatan prioritas Tahun 2026 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Renja K/L Tahun 2026 dan Renja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;

b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerapan anggaran berbasis kinerja.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

a. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA-DPA dalam Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2026, yang dalam penyusunannya didahului dengan menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026;
b. Sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Tahun 2026;
c. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun berdasarkan sistematika yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah.

BAB 2 : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dan atau pokok-pokok DPRD.

BAB 3 : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan tahun 2026.

BAB 4 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran RKPD.

BAB 5 : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINSOS PPPA TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinsos PPPA Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinsos PPPA

Rencana Kerja (Renja) Dinsos PPA Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinsos PPPA. Urusan yang menjadi kewenangan Dinsos PPPA meliputi urusan sosial, urusan pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Renja Dinsos PPPA Tahun 2024 yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 terdiri dari 12 program, 25 kegiatan, dan 66 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.13.962.565.000.00,-, dengan fokus utama pada peningkatan cakupan pelayanan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), belum optimalnya pembangunan kesetaraan gender, belum optimalnya pemenuhan hak anak, ,belum terciptanya Kabupaten yang Inklusif (Ramah untuk Penyandang Disabilitas) serta memberikan pelatihan kemandirian untuk masyarakat miskin terutama anak-anak usia sekolah yang putus sekolah. Program/kegiatan/sub kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah yang meliputi:

1. Perlunya peningkatan pelayanan sosial dasar PMKS dan keterpaduan penanganan PMKS antar pemerintahan dan antar sektor.
2. Perlunya pengelolaan data dan pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) oleh seluruh pemangku kepentingan sebagai dasar penanganan kemiskinan dan PMKS lainnya.
3. Perlunya penguatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial untuk mendukung usaha pembangunan kesejahteraan sosial.
4. Belum semua infrastruktur dan lingkungan yang ada ramah lansia dan difabel.
5. Belum optimalnya kesetaraan gender di berbagai bidang.
6. Belum optimalnya pemenuhan hak anak.
7. Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta belum kuatnya sinergi layanan untuk penanganan bagi perempuan dan anak korban

kekerasan. Rendahnya cakupan anak terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial di luar lembaga.

8. Belum optimalnya peran aktif PSKS lembaga dan perorangan
9. Belum meningkatnya status Kabupaten Banjarnegara sebagai Kabupaten Layak Anak tingkat Utama.

Dari 12 program, 25 kegiatan, dan 66 sub kegiatan yang dalam Renja Dinsos PPPA tersebut, program/kegiatan/sub kegiatan yang disetujui untuk dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024 terdiri dari 12 program, 25 kegiatan, dan 65 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 12.466.408.189

Dinamika yang terjadi selama tahun 2024 turut mempengaruhi keberhasilan pencapaian Renja Dinsos PPPA. Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2024, tercatat adanya hasil yang baik yang dikarenakan adanya pencapaian maupun pelampauan target maupun yang tidak memenuhi target.

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi:

1. Kegiatan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   a) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a) Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
   b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
   a) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6. Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

b) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

7. Program Pemberdayaan Sosial

a) Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota

b) Pengempangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

8. Program Rehabilitasi Sosial

a) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar,serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

b) Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalh Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial

9. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

a) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, Sub kegiatan

a. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

b. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

c. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

d. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

10. Program Penanganan Bencana

a) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

b) Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

11. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

a) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

12. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

a) Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

b) Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik,Hukum,Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota

c) Penguatan dan Pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota

13. Program Perlindungan Perempuan
    a) Penyediaan Layanan bagi Perempuan Korban kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
14. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
    a) Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak Tingkat daerah Kabupaten/kota
    b) Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota
15. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
    a) Pengumpulan,pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data tingkat daerah kabupaten/kota
16. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
    a) Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
    b) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
17. Program Perlindungan Khusus Anak
    a) Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
    b) Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Kesiapan pemerintah daerah dalam menjalankan program peningkatan kesejahteraan sosial baik dalam bidang perlindungan sosial, rehabilitasi sosial ataupun dalam bidang penanggulangan kemiskinan. Kesiapan pemerintah daerah dilakukan dengan koordinasi dengan Kementerian Sosial dalam menjalankan program nasional.
2. Koordinasi dengan stakeholder lainnya seperti OPD terkait, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kabupaten Banjarnegara, Lembaga Kesejahteraan Sosial, TAGANA, Kecamatan dan Kelurahan/Desa dalam mempersiapkan, melaksanakan serta mengevaluasi program Dinas Sosial.

3. Peningkatan kapasitas SDM Dinas Sosial maupun SDM penunjang lainnya seperti Pendamping PKH, TKSK, Pekerja Sosial maupun penyuluh sosial baik yang dilakukan oleh Kementerian Sosial melalui Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Regional III Yogyakarta, Dinas Sosial Provinsi melalui Badan Diklat Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah serta yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Banjarnegara melalui Bimbingan Teknis, Rapat Koordinasi serta agenda lainnya.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka seluruh kegiatan dapat tercapai sesuai targetnya dengan baik dan berdampak nyata di masyarakat, khususnya untuk masyarakat pra sejahtera yang menerima bansos dan bantuan produktif lainya dengan tujuan mensejahterakan masyarakat. Dengan demikian tujuan akhir Pemerintah Kabupaten Banjarnegara untuk menurunkan angka kemiskinan pada tahun perencanaan selanjutnya, perlu mengambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengoptimalkan faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut, diantaranya:

1. Meningkatkan cakupan penanganan PMKS dengan meningkatkan koordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Sosial dalam melaksanakan program-program nasional baik dari perlindungan sosial, rehabilitasi sosial maupun penanganan kemiskinan.
2. Meningkatkan kapasitas PSKS baik dari segi manajemen kelembagaan maupun kapasitas SDM .
3. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah serta Kementerian Sosial RI

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinsos PPPA dan Pencapaian Renstra Dinsos PPPA sampai dengan Tahun 2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinsos PPPA dan Pencapaian Renstra Dinsos PPPA s.d. Tahun 2024* Kabupaten Bangkinang

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinsos PPPA) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Dinsos PPPA tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinsos PPPA s/d tahun 2029	
					Target Renja Dinsos PPPA tahun 2024	Realisasi Renja Dinsos PPPA tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2029	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Prosentase penunjang Urusan Pemerintah daerah kabupaten yang terlaksana**	**100%**	100%	**100%**	100%	**100%**	**100%**	100%	100%
	Perencanaan, Pengenggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen perencanaan,anggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun**	**17 Dok**	**17 Dok**	**17 Dok**	**17 Dok**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Penyelesaian Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100
	Koordinasi dan penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (IKPA)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (IKPA) dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (IKPA)	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Laporan	5 Laporan	100%	5 laporan	5 laporan	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah administrasi keuangan yang terlaksana**	**12 bln**	**12 bln**	**12 bln**	**12 bln**	100%	**12 bln**	**12 bln**	**100%**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	36/12	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	45 orang/12 Bulan	45 orang/12 Bulan	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinsos PPPA) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Dinsos PPPA tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinsos PPPA s/d tahun 2025	
					Target Renja Dinsos PPPA tahun 2024	Realisasi Renja Dinsos PPPA tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Pelaksanaan Penyusunan dan Pengujian/Validasi Keluaran SIPD	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/validasi keluaran SIPD	12 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Pelayanan administrasi perkantoran**	**12 Paket**	**12 Paket**	**100%**	**100%**	100%	**100%**	**100%**	**100**
	Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Perlatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	1 Paket	1 Paket	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket logistik kantor yang disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	12 Paket	100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	100%	**100%**	**100%**	**100**
	Pengadaan Barang dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Barang dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	**19 unit**	**13unit**	113 unit	113 unit	100%	48 Unit	174 Unit	100
	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah unit Gedung kantor/bangunan lainnya yg disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah penyediaan jasa penunjang kantor**	**12 Layanan**	**100%**	**100%**	**100%**	100%	**100%**	**100%**	**100**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinsos PPPA) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Dinsos PPPA tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinsos PPPA s/d tahun 2025	
					Target Renja Dinsos PPPA tahun 2024	Realisasi Renja Dinsos PPPA tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengajian/verifikasi Lembaga OKPD	Jumlah Dokumen pemberdayaan dan pengajian verifikasi lembaga OKPD	13 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	13 Dokumen	13 Dokumen	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Pelayanan administrasi perkantoran**	**14 Paket**	**14 Paket**	**100%**	**100%**	100%	**100%**	**100%**	**100**
	Penyediaan Perlengkapan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Perlengkapan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	1 Paket	1 Paket	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket logistik kantor yang disediakan	13 Paket	13 Paket	13 Paket	13 Paket	100%	12 Paket	12 Paket	100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	100%	**100%**	**100%**	**100**
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	**19 unit**	**13unit**	113 unit	113 unit	100%	66 Unit	179 Unit	100
	Pengadaan Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah unit Gedung kantor/bangunan lainnya yg disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah penyediaan jasa pelayanan kantor**	**12 Layanan**	**100%**	**100%**	**100%**	100%	**100%**	**100%**	**100**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinsos PPPA) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Dinsos PPPA tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinsos PPPA s/d tahun 2025	
					Target Renja Dinsos PPPA tahun 2024	Realisasi Renja Dinsos PPPA tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=8+7+9	(11)=10/4
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pembayaran telepon, air, dan listrik/jumlah laporan pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yg diverifikasi	**12 Laporan**	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran jasa penyediaan barang jasa THL dan Jaga Kantor//jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yg diverifikasi	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100
	Pemeliharaan RSD Panajang Dinsos Pemerintahan Daerah	**Jumlah barang milik daerah yang terpelihara dengan baik**	**08 Unit**	**08 unit**	**08 unit**	**100%**	100%	**100%**	**100%**	**100**
	Penyediaan Jasa Perkantoran, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara/jumlah kendaraan dinas operasional yg dipelihara dan dibayarkan pajak dan perlengkapan	**11 Unit**	11 Unit	11 Unit	11 Unit	100%	11 Unit	11 Unit	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah terlaksananya pemeliharaan rumah dan prasarana/jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yg dipelihara/direhabilitasi	**7 Unit**	**7 Unit**	7 Unit	7 Unit	100%	7 Unit	7 Unit	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Rumah dan Prasarana	Jumlah terlaksananya pemeliharaan rumah dan	**20 Unit**	15 Unit	15 unit	15 unit	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinsos PPPA) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Dinsos PPPA tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinsos PPPA s/d tahun 2025	
					Target Renja Dinsos PPPA tahun 2024	Realisasi Renja Dinsos PPPA tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Undang Kantor atau Bangunan Lainnya	prasarana/jumlah lainnya dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yg dipelihara/terfasilitasi						30 Unit	32 Unit	100
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	**Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial(PSKS) yang mendapatkan pemberdayaan dan fasilitasi guna peningkatan penyelesaian kesejahteraan sosial**	**14,17**	**13,76**	**14,17**	**34,83**	**195,83%**	**34,83%**	**34,83%**	100%
	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah PSKS dan masyarakat umum yang mendapatkan sosialisasi maksimasi pengumpulan sumbangan uang dan barang serta undian gratis berhadiah**	**70 orang**	**30 orang**	30 Orang	**30 Orang**	100%	30 orang	30 orang	100
	Sosialisasi dan Bimbingan Penyelesaian dan Tindakan Cepat Berhadiah dan	Jumlah dokumen hasil kreatifitas dan elektronisasi penerbitan ide undian gratis	**5 Buk**	30 orang	30 orang	30 Orang	100%	30 Orang	30 Orang	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinsos PPPA) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Dinsos PPPA tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinsos PPPA s/d tahun 2026	
					Target Renja Dinsos PPPA tahun 2024	Realisasi Renja Dinsos PPPA tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Penyandang Cacat Fisik dan Mental	Terfasilitasi dan penyandang cacat fisik dan mental								
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan guna peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial	**199 Orang**	**179**	**526**	67%	**126,01%**	67%	67%	100
	Peningkatan Kompetensi Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	**60 orang**	40 orang	**300 orang**	475 orang	158,33%	145 orang	475 orang	100%
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	**20 Orang**	20 Orang	20 Orang	20 Orang	100%	20 Orang	20 Orang	100%
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yg meningkat kapasitasnya kewenangan kab/kota	90 Keluarga	20 Orang	100 keluarga miskin dan 33 rentan dan/keluarga	75 keluarga miskin dan 33 rentan/keluarga rentan	100%	sesuai kerja 30/Jasmas kpl rentan 31	125 keluarga miskin dan 66 rentan dan/ keluarga	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya kewenangan Kabupaten/Kota	23 LKS, 1 ST KAT, 2 ST (sosial/kel,) PUSKESOS 08 SLRT, 20 Orsos Usaha	20 anggota karang taruna, 1 Rumah, 1 LKSA, 1 DUC 45, 1 Pspdn, 23 LKS, 40	7 lembaga, 1 SLRT, 80 KK dan 23 LKS	7 lembaga, 1 SLRT, 80 KK dan 23 LKS	100%	7 KESOS, 1 SLRT, 40 KARANG TARUNA 23 LKS	7 KESOS, 1 SLRT, 40 KARANG TARUNA 23 LKS	7 KESOS, 1 SLRT, 40 KARANG TARUNA 23 LKS

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinsos PPPA) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Dinsos PPPA tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinsos PPPA s/d tahun 2025	
					Target Renja Dinsos PPPA tahun 2024	Realisasi Kerja Dinsos PPPA tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
		pemasalahan yang terjadi/dialami dalam C&E		[illegible]						
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Pengelola Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Kesejahteraan Sosial(Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	100%
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya luar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan Dasar di Luar Panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta	Jumlah pemenuhan kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar,Anak Terlantar,Lanjut Usia	1405 orang	720 orang	623 orang	807 Orang	106,98%	704 orang	2131 orang	151,13%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinsos PPPA) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Dinsos PPPA tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinsos PPPA s/d tahun 2025	
					Target Renja Dinsos PPPA tahun 2024	Realisasi Renja Dinsos PPPA tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	**Terlantar/serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial**								
	Penyediaan Pemakaman	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemakaman Kelelahan Pemakaman Sesuai dengan Standar Gol Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	**830**	160 Orang	**275 orang**	662 Orang	175,27%	300 Orang	47%	100
	Penyediaan Santunan	Jumlah Orang yang Menerima Bantuan dan Santunan Lansia yang Terlantar dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	110	80 Orang	10 Orang	72 Orang	100%	100 Orang	252 Orang	251,8 0%
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	200 orang	227 Orang	50 orang	60 Orang	10%	10 orang	30 orang	100%
	Pemberian Pelayanan Rehabilitasi keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	29 orang	30 Orang	29 orang	26%	40 Orang	40 Orang	100
	Pemberian Bantuan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bantuan Fisik, Mental,Spiritual dan Sosial Kewenangan kabupaten/Kota	**835 orang**	**124 orang**	**124 orang**	**124 orang**	100%	40 orang	40 orang	100
	Pemberian Bantuan Resti Kejadian Kelompok Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak	Jumlah Pemberi Bantuan Sosial kepada Kelompok Penyandang	**40 Orang**	33 orang	20 Orang	20 Orang	100%	30 Orang	30 Orang	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinsos PPPA) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Dinsos PPPA tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinsos PPPA s/d tahun 2025	
					Target Renja Dinsos PPPA tahun 2024	Realisasi Renja Dinsos PPPA tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Terlaksana Tahanan Hak Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum dan Masyarakat	Terlaksana Tahanan Anak Terhadap Anak Hukum dan Masyarakat								
	Terlaksana Pendampingan Proses Untuk Kepemilikan Akta Kelahiran, Buku Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pendampingan Proses Untuk Kepemilikan Akta Kelahiran, Buku Nikah, dan Kartu Identitas Anak	15 orang	5 Orang	5 orang	5 Orang	100%	5 Orang	5 Orang	100
	Fasilitasi Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	20 orang	5 orang	5 orang	5 orang	100%	14 Orang	24 Orang	100
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan	10 orang	0 orang	10 orang	0 orang	0%	20 Orang	30 orang	300
	Pemberian Layanan Rehabilitasi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi	20 Orang	11 orang	10 Orang	11 orang	110%	10 Orang	29 Orang	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinsos PPPA) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Dinsos PPPA tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinsos PPPA s/d tahun 2025	
					Target Renja Dinsos PPPA tahun 2024	Realisasi Renja Dinsos PPPA tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Pemberian Pelayanan Pemberdayaan Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Pemberdayaan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	27 Orang	10 Orang	27 Orang	270%	40 Orang	40 Orang	100
	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	70 orang	32 Orang	32 orang	44 Orang	100,13%	36 orang	36 orang	100
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Jumlah penerima/ks pelayanan kesejahteraan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA	80 orang	48 orang	28 orang	48 orang	171,43	100	113	100
	Pemberian Layanan Kebutuhan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 orang	3 Orang	3 orang	3 Orang	100%	5 orang	3 Orang	100
	Penyediaan Perlindungan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Perlindungan Keluarga Pemberdayaan Bekerja Sesuai Standar Dan Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	100%	20 Orang	20 Orang	100
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	10 orang	5 Orang	5 orang	5 Orang	100%	50 Orang	50 Orang	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinsos PPPA) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Kerja Dinsos PPPA tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinsos PPPA s/d tahun 2029	
					Target Kerja Dinsos PPPA tahun 2024	Realisasi Kerja Dinsos PPPA tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
		Kewenangan Kabupaten/Kota								
	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Rekan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Piranti dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Rekan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan kabupaten	15 orang	26 Orang	6 orang	26 Orang	433,33%	30 Orang	59 Orang	393
	Pemberian Pelayanan Pendampingan Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Pendampingan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15 orang	3 orang	3 orang	3 orang	100%	30 Orang	39 Orang	260
	Pemberian Pelayanan Resosialisasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Resosialisasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15 orang	1 orang	1 orang	1 orang	100%	10 Orang	13 Orang	100
	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	100%	10 Orang	19 Orang	190
	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	6 dok	2 dok	2 dok	2 dok	100%	40 dokumen	20 dokumen	100
	PENANGANAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	**Persentase Keluarga miskin dan rentan yang**	**55,5%**	**48,11%**	**50%**	**48,11%**	**91,18%**			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinsos PPPA) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Dinsos PPPA tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinsos PPPA s/d tahun 2025	
					Target Renja Dinsos PPPA tahun 2024	Realisasi Renja Dinsos PPPA tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
		Aktivitas sesuai dengan program bantuan sosial						**48.31%**	**48.31%**	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah keluarga miskin dan rentan yang terdata**	**195.352**	**226.569**	**247.896**	**226.569**	91.39%	226.480	226.480	100
	Pemutakhiran Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Diblora	**195.203**	**172.493**	**195.203**	**172.493**	88.37%	173.759	173.759	100
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Memperoleh Pengarusutamaan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	**62.135**	61.269	**62.135**	61.269	100.19%	61.261	61.261	100
	Pemberian Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Prioritas Manfaat (KPM) yang Menerima Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	**96.861**	719	**566**	539	134.09%	1.408	1.408	100
	Pemberian Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Menerima Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	**80**	20	**50**	50	100%	40 Orang	40 Orang	100
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Penentuan Kualitas Rencana Aksi yang terpenuhi sebagaimana dipersyaratkan Pada Saat dan	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinsos PPPA) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Dinsos PPPA tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinsos PPPA s/d tahun 2025	
					Target Renja Dinsos PPPA tahun 2024	Realisasi Renja Dinsos PPPA tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
		Jumlah Tenaga Operasional Dinsos Sarana Kabupaten/Kota								100%
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	**Jumlah orang yang mendapatkan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota**	**460**	**930**	**300**	**430**	**143,33%**	**380**	**680**	**100%**
	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Penyelenggara) Kewenangan Kabupaten/Kota	300	930	300	430	143,33%	380 Orang	680 Orang	100
	Penyediaan Kesehatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Penyelenggara) dan Paska Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100	380	111	380	126,66	200 Orang	380 orang	100
	Penyediaan Tempat Penyelenggara Pengungsi	Jumlah Tempat Penyelenggara Kewenangan Kabupaten/Kota	0	-	0	-	-	0 unit	0 unit	100
	Pemenuhan Kbutuhan Dasar Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kbutuhan Dasar Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	80	975	100	275	275	100 Orang	100 orang	100
	Pemenuhan Pelayanan Pemerintah	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan	30	348	100	348	162,55	100 orang	100 orang	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinsos PPPA) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Dinsos PPPA tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinsos PPPA s/d tahun 2025	
					Target Renja Dinsos PPPA tahun 2024	Realisasi Renja Dinsos PPPA tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
		Lanjutan Ketahanan Keluarga Kabupaten/Kota								
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesetaraan Dinsos Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung siaga bencana dan kapanewon yang aktif dalam penanggulangan bencana	8 dan 88	24	88	88	100%	88	88	100
	Sub kegiatan identifikasi, penelitian, dan pelaksanaan Kampung siaga bencana	Jumlah Kampung yang Memberdayakan Kesetiakawanan Sosial dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kabupaten/Kota	8							
	Kesetiakawanan Sosial dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Terwujudnya SDM Taruna Siaga Bencana terlibat aktif dalam penanggulangan kebencanaan/jumlah orang yang memberdayakan kesetiakawanan sosial dan pelaksanaan taruna siaga bencana kewenangan kab/kota	88	88 Orang	88 Orang	88 Orang	100%	88 Orang	88 Orang	100
	PROGRAM PENGELOLAAN TARAF HARAN PASILAKSUS	Terwujudnya Tatanan Hidup Sosial Masyarakat yang Terpelihara dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinsos PPPA) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Dinsos PPPA tahun 2025	Perbilnan Realisasi Capaian Target Renstra Dinsos PPPA s/d tahun 2025	
					Target Renja Dinsos PPPA tahun 2024	Realisasi Renja Dinsos PPPA tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=8+7+9	(11)=10/4
	Pemeliharaan Tunas Mekar Pelawan Nasional Kabupaten/Kota	**Jumlah tunas mekar pelawan dan orangtua yang mendapatkan pelayanan dan pemeliharaan**	9 (1 TMP dan 8 Mekarsawit)	1 TMP dan 8 Mekarsawit	1 TMP dan 8 Mekarsawit	1 TMP dan 8 Mekarsawit	100%	1 TMP dan 8 Mekarsawit	1 TMP dan 8 Mekarsawit	100%
	Pemeliharaan Tunas Mekar Pelawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah tunas yang mendapatkan pemeliharaan pada tunas mekar pelawan kabupaten/kota	1 TMP	1 TMP dan 8 Mekarsawit	1 TMP dan 8 mekarsawit	1 TMP dan 8 mekarsawit	100%	1 TMP dan 8 mekarsawit	1 TMP dan 8 mekarsawit	100%
	URUSAN PEMERINTAHAN WANITA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	**Presentase Anggaran responsif Gender dalam APBD**	**1,27%**	**0,38%**	**1,34%**	**1,89%**	**141%**	**1,89%**	**1,89%**	**100**
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah OPD yang dianalisis PPRG**	**34**	**34**	**34**	**34**	**100**	**34**	**34**	**100**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Pelembagaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dokumen	1 dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinsos PPPA) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Dinsos PPPA tahun 2025	Perbiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinsos PPPA s/d tahun 2025	
					Target Renja Dinsos PPPA tahun 2024	Realisasi Renja Dinsos PPPA tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Koordinasi dan Perkonsultasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Perkonsultasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	24 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	24 dokumen	24 dokumen	100
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	24 OPD	24 OPD	24 OPD	24 OPD	100%	-	-	-
	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Penganggaran Responsif Gender	5 OPD	24 OPD	24 OPD	24 OPD	80%	-	-	-
	Pendayagunaan Pemangku Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku yang terlibat dalam Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Pemangku di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	**300**	300	300	320	100	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinsos PPPA) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Dinsos PPPA tahun 2025	Perbitran Realisasi Capaian Target Renstra Dinsos PPPA s/d tahun 2025	
					Target Renja Dinsos PPPA tahun 2024	Realisasi Renja Dinsos PPPA tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Terfasilitasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Fasilitasi Hasil Rekomendasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kemenpppa Kabupaten/Kota	10 DOK	2 DOK	2 DOK	2 DOK	100%	-	-	-
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kemenpppa Kabupaten/Kota	**Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan peningkatan kapasitas**	8 lembaga	1	1	1	100%	-	-	-
	Peningkatan Kapasitas Tenaga Pada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kemenpppa Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga pada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kemenpppa Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitas	24	21	18	21	117%	18	18	100%
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Lembaga Pemerintah Pusat, Lembaga Pemerintah dan Pemerintah desa/kelurahan yang mendapatkan peningkatan kapasitas sesuai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kemenpppa Kabupaten/Kota	**Jumlah perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai standar**	12	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinsos PPPA) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Dinsos PPPA tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinsos PPPA s/d tahun 2025	
					Target Renja Dinsos PPPA tahun 2024	Realisasi Renja Dinsos PPPA tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Peningkatan Ketahanan Keluarga Kemenag Kabupaten/Kota	Jumlah Pemenuhan Aduan Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	17	15	12	18	150%	13	46	383,33%
	PROGRAM PEMBINAAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Keluarga Peserta Bina yang Terfasilitasi	**30,94% 69**	**27,34%**	**30,94%**	**30,94%**	**100%**	**69,53%**	**30,94%**	**100%**
		Persentase Anak/Keluarga yang mendapatkan pembinaan kepuasan Calon	**16,91%**	**7,91%**	**15,19%**	**14,03%**	**92,38%**	16,19%	16,19%	100
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Anggota Kelompok Percontohan Bidang yang mendapatkan pelatihan peningkatan kualitas keluarga**	**100**	**30**	**30**	**30**	100%	30	30	100
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kemenag Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kemenag Kabupaten/Kota	**10**	1	1	1	100%	1	1	100
	Pengadaan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah	Jumlah Lembaga yang mendapatkan Pengadaan dan Pengembangan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	**47 lembaga**	1	1	1	**100**	1 lembaga	1 lembaga	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinsos PPPA) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Dinsos PPPA tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinsos PPPA s/d tahun 2025	
					Target Kerja Dinsos PPPA tahun 2024	Realisasi Kerja Dinsos PPPA tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Berperan dalam Daerah Kabupaten/Kota									
	Advokasi Kebijakan dan Pembangunan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	2	1	1	1	100	1 lembaga penyedia layanan tingkat kabupaten/kota	1 lembaga penyedia layanan tingkat kabupaten	100
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kabupaten/Kota	1	1	1	1	100%	1	1	100
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	**Persentase Ketersediaan data terpilah gender di perangkat daerah**	100%	100%	**100%**	100%	100%	**100%**	**100%**	100
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	**Jumlah data gender dan anak yang tersedia di masing-masing OPD**	**34**	**34**	**34**	**34**	100%	34 OPD	34 OPD	100
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak	**34**	34 (PPT) Dokumen	34 (PPT)	34 (PPT)	100%	34 orang/34 opd, 1 Dokumen	34 orang/34 opd, 1 Dokumen	100
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN ANAK (PHA)	Persentase Dinas dan Kelembaga Layak Anak	**28,42**	**27,78**	**28,42%**	**31,39%**	**110%**	**31,39%**	**31,39%**	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinsos PPPA) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja (hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Dinsos PPPA tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinsos PPPA s/d tahun 2025	
					Target Renja Dinsos PPPA tahun 2024	Realisasi Renja Dinsos PPPA tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Peningkatan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha yang mendapatkan advokasi dan koordinasi Pelembagaan PHA**	**111**	**99**	**99**	**99**	**100**	**99**	**99**	**100**
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha**	33 OPD, 55 PHA dan 33 lembaga non pemerintah	**99**	**99**	**99**	100%	**99**	**99**	100
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	**0 dok**	**1 dok**	**1 dok**	**1 dok**	100%	**1 dok**	**1 dok**	100
	Pengesahan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang memfasilitasi Pengesahan dan Pengembangan	**2 Lembaga**	**1 dok**	**1 dok**	**1 dok**	**100**	**1 dok**	**1 dok**	**100**
	Penyelesaian Layanan Pengaduan Kualitas Hidup	**Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas**	25 Orang	25 Orang	25 Orang	55 Orang	100%	25 Orang	25 Orang	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinsos PPPA) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Dinsos PPPA tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinsos PPPA s/d tahun 2025	
					Target Renja Dinsos PPPA tahun 2024	Realisasi Renja Dinsos PPPA tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	**Hidup Anak Kewenangan**								
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Pengelolaan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengelolaan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	**2 dok**	**1 dok**	**1 dok**	**1 dok**	100%	**1 dok**	**1 dok**	100
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan anak yang mendapatkan pemenuhan hak anak yang terlindungkan pemenuhannya pengaduan oleh petugas terkait di unit layanan terpadu	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100**	**100%**	**100%**	**100**
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah peserta Sosialisasi kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak**	**40**	**20**	**20**	**20**	100%	**20**	**20**	**100**
	Advokasi kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah perangkat daerah Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten /kota**	20 Orang	22 Orang	22 Orang	22 Orang	100%	30 perangkat daerah	21 perangkat daerah	100
	Penyediaan layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Rehabilitasi	**Jumlah Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang terlayani sesuai standar**	43	**65**	**43**	**67**	**155.81%**	43	172	**100**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinsos PPPA) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Dinsos PPPA tahun 2025	Perbitungan Realisasi Capaian Target Renstra Dinsos PPPA s/d tahun 2029	
					Target Renja Dinsos PPPA tahun 2024	Realisasi Renja Dinsos PPPA tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2029	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	63	68	63	67	106,35%	65 orang	272 orang	101

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinsos PPPA

Dalam pelaksanaan pelayanannya, Dinsos PPPA mengampu 8 (delapan) Indikator. Dari 8 indikator tersebut semua tercapai .Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Komitmen pimpinan dalam pelaksanaan kebijakan sosial melalui pengalokasian anggaran yang tepat;
2. Koordinasi antar instansi yang efektif dalam penanganan program kesejahteraan sosial; dan
3. Peningkatan akses pendidikan, layanan kesehatan dan partisipasi perempuan serta peningkatan kesadaran masyarakat.
4. Meningkatnya penyaluran Bansos yang tepat sasaran dan optimal sehingga PMKS yang menerima dapat tertangani dengan baik;
5. Kesiapan pemerintah daerah dalam menjalankan program peningkatan kesejahteraan sosial baik dalam bidang perlindungan sosial, rehabilitasi sosial ataupun dalam bidang penanggulangan kemiskinan. Salah satu bentuk dukungan berupa diterbitkannya Perda No.1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dilakukan diantaranya melalui sosialisasi terkait updating DTKS ke seluruh operator DTKS Desa dan Kelurahan sehingga proses pengusulan dan pentidaklayakan dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran dan mewujudkan ketepat sasaran Bantuan Sosial;
6. Koordinasi dengan stakeholder lainnya seperti OPD terkait, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pelaksana Program Keluarga Harapan Kabupaten Banjarnegara, Lembaga Kesejahteraan Sosial, TAGANA, Kecamatan dan Kelurahan/Desa dalam mempersiapkan, melaksanakan, pendampingan serta mengevaluasi program Dinas Sosial.

7. Terjadi kenaikan yang tidak terduga di sektor kebencanaan dimana layanan kepada korban bencana yang diberikan meningkat, serta dalam pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang meningkat dari targetnya 623 orang menjadi 837 orang.
8. Peningkatan kapasitas SDM Dinas Sosial maupun SDM penunjang lainnya seperti Pendamping PKH, TKSK, Pekerja Sosial maupun penyuluh sosial baik yang dilakukan oleh Kementerian Sosial melalui Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Regional III Yogyakarta, Dinas Sosial Provinsi melalui Badan Diklat Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah serta yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Banjarnegara melalui Bimbingan Teknis, Rapat Koordinasi serta agenda lainnya.
9. Adanya dukungan kebijakan Pemerintah Daerah dalam terwujudnya Kabupaten Layak Anak tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara No.2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di dalam Peraturan Daerah tersebut terdapat Rencana Aksi Daerah penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dan kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaran layanan perlindungan perempuan dan anak yang meliputi Peraturan Daerah No 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak serta Peraturan Bupati Banjarnegara No 9 tahun 2019 Tata Cara Pelayanan Penanganan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak Dari Tindak Kekerasan
10. Adanya penguatan jejaring antar lembaga layanan peduli anak baik lembaga formal maupun informal seperti lembaga swadaya masyarakat dan relawan peduli Perempuan dan anak lainnya.

11. Adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk melakukan pelaporan terhadap kasus kekerasan terhadap anak;
12. Proses penjangkauan yang efektif sehingga pelaporan kasus meningkat;
13. Kerjasama yang baik lintas sektor dan instansi dalam penanganan dan pengelolaan kasus
14. Pelaksanaan diskusi/FGD/rapat internal dalam proses perencanaan;
15. Komitmen Pimpinan dalam mendorong perbaikan kualitas akuntabilitas kinerja
16. melalui pemberian arahan maupun pemantauan berkala atas kinerja;
17. Proses pengumpulan data dukung telah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif.
18. Optimalisasi layanan online bagi masyarakat dan memaksimalkan sosialisasi terhadap masyarakat yang berimplikasi pada meningkatnya jumlah responden yang melakukan survey;
19. Koordinasi yang baik antara DINSOS PPPA dengan pihak-pihak terkait dengan pelayanan urusan sosial serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
20. Komitmen dari aparatur penyelenggara pelayanan dalam memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya capaian tersebut antara lain adalah:

1. Keterbatasan jumlah SDM, anggaran dan sarpras DINSOS PPPA.
2. Belum optimalnya peta jabatan SDM di Dinsos PPPA sehingga beberapa posisi harus belum sesuai kompetensinya.
3. Kurangnya tingkat konsultasi dan koordinasi intern OPD.

4. Terbatasnya kemampuan dan kurang cermat SDM DINSOS PPPA dalam menterjemahkan perintah dan ketentuan dalam melaksanakan kegiatan.
5. Kemauan untuk meningkatkan kompetensi tugas masih kurang.

Dalam rangka mengatasi faktor faktor penghambat tersebut, telah dilakukan upaya upaya yang meliputi:

1. Mengusulkan penambahan SDM, sesuai dengan kebutuhan peta jabatan yang masih kosong dan mendesak untuk segera diisi, mengusulkan anggaran untuk peningkatan sarana prasarana pada tahun anggaran berikutnya.
2. Meningkatkan rapat kerja, konsultasi dan koordinasi di intern dan ekstern OPD terkait.
3. Peningkatan kemampuan/kualitas SDM, dengan lebih jeli dalam mencermati setiap perintah dan ketentuan yang berlaku, dengan mengikuti bimtek/pelatihan dan sejenisnya sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Mendorong budaya belajar mandiri dalam upaya meningkatkan keterampilan, kompetensi dalam menjalankan tugas sehari hari.

Kinerja pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinsos PPPA Kabupaten Banjarnegara

No	Indikator	RPM/ Standar Nasional	IKK/ LPPD	Target Renstra Dinsos PPPA				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	Persentase PMKS /PMKS (Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya dibasr pasti.	RPM	IKU	55,49%	55,60%	55,72%	55,83%	58,60	48,60%	57,73%	57,73%	57,73 %	
2.	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif		IKU	23,49 %	24,48%	25,50 %	26,51 %	27,99 % dan 27,73%	23,46%	26,61%	26,61 %	26,61 %	
3.	Persentase perempuan di lembaga pemerintahan		IKU	2,20%	2,21%	2,22%	2,23%	2,72%	2,30%	2,22%	2,22%	2,22%	
4.	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)		IKU LPPD	2,36	2,35	2,35	2,35	100%	0,0033	0,00620	2,35	0,00620	
5.	Terwujudnya Kabupaten Layak Anak (KLA)		IKU	Pratama (57%)	Pratama (60%)	Madya (60%)	Madya (61%)	Pratama (634,45)	Madya (642,90)	Madya (642,9)	Madya (xx%)	Madya (642,90)	

6	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten		IKU LPPD	0.0138	0.0138	0.0138	0.0138	100%	0,0236	0.0138	0.0138	0,017	
7	nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		IKU	60	60,50	61,00	61,50	63,71	70,39	71,56	61,00	71,56	
8	Nilai Angka IKM		IKU	82	82	82	82	83,139	82,923	83,002	83	83	

*) Kolom 3 diisi berdasarkan IKK outcome dalam lampiran Permendagri 18/202

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan urusan pemerintahan dalam 2 urusan, yaitu urusan wajib pelayanan dasar bidang sosial, urusan wajib bukan pelayanan dasar bidang perempuan dan anak ,isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinsos PPPA untuk tahun 2024 mencakup 2 urusan tersebut. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinsos PPPA diantaranya adalah:

1. Sosial:
    - Persentase penyandang masalah sosial yang mendapatkan pelayanan sosial luar lembaga
    - Persentase anak terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial di luar Lembaga
    - Belum optimalnya peran aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) lembaga dan perorangan dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
    - Program penanganan PMKS yang dilakukan oleh pemerintah daerah sangat terbatas jika dibandingkan dengan jumlah PMKS yang ada
    - Belum optimalnya koordinasi dengan *stakeholder* terkait baik pusat maupun daerah
2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak:
    - Belum kuatnya komitmen dan pemahaman dari pemangku kepentingan (stakeholder) tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG).
    - Belum semua program dan kegiatan di masing-masing OPD responsif gender atau di PPRG kan.

Permasalahan tersebut, jika tidak diselesaikan dapat menjadi *penghalang* dalam pencapaian visi dan misi Bupati maupun capaian indikator lainnya. Beberapa dampak dari adanya permasalahan dan hambatan tersebut meliputi:

1. Program penanganan PMKS yang dilakukan oleh pemerintah daerah sangat terbatas baik dari anggaran maupun cakupan PMKS jika dibandingkan dengan jumlah PMKS yang ada
2. Belum optimalnya peran aktif PSKS dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial.
3. Meningkatnya kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan berbagai modus sehingga dibutuhkan Tenaga ahli untuk bisa memberikan penanganan kasus hingga tuntas.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi, peningkatan kualitas birokrasi, dan meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan pengguna layanan akan meningkatkan kebutuhan akan adanya penyediaan produk layanan yang semakin baik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi-inovasi dalam menunjang peningkatan pelayanan publik secara kontinyu. Beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinsos PPPA, yaitu:

1. Tantangan :
    - Masih rendahnya kompetensi perempuan di Banjarnegara dalam bidang Pendidikan, ketenagakerjaan dan politik
    - Masih tingginya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Banjarnegara
    - Angka kemiskinan relatif tinggi
    - Mental masyarakat yang *adiktif bansos*
2. Peluang:
    - Adanya bantuan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial yang

sebenarnya memiliki tujuan yang komprehensif melalui sosialisasi terkait pentingnya pendidikan dan kesehatan oleh SDM PKH sehingga diharapkan akan ada perubahan perilaku masyarakat, dan bansos Sembako yang lebih fokus untuk bagaimana menjaga keluarga miskin tidak kekurangan pangan dan juga untuk memastikan anak-anak mereka gizinya terpenuhi.

- Adanya penguatan jejaring antar lembaga layanan peduli anak baik lembaga formal maupun informal seperti lembaga swadaya masyarakat dan relawan peduli perempuan dan anak lainnya.
- Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi terkait dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan output kegiatan mensosialisasikan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) dalam APBD melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) pada pemerintahan desa
- Adanya Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak.

Berdasarkan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan tersebut, dapat diinventarisasi beberapa isu strategis. Inventarisasi isu-isu strategis tahun 2025 didapatkan dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal Kabupaten Banjarnegara sampai dengan tahun 2026 Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan pembangunan. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinsos PPPA pada tahun 2025, sebagai berikut:

1. Masing tingginya angka Penyandangan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
2. Masih rendahnya partisipasi PSKS lembaga dan Perorangan dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial
3. Masih banyaknya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai rujukan data penanganan kemiskinan yang belum valid data administrasi kependudukannya
4. Masih banyak terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Tahun 2005-2025 dan mengacu pada RPJMD Tahun 2025-2029. Berdasarkan hal tersebut, prioritas arah kebijakan sesuai tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi:

1. Meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar yang berkualitas.
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai kehidupan bermasyarakat dan berdemokrasi.
3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Meningkatnya kualitas layanan publik berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2024, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan yaitu:

1. Adanya beberapa inovasi dalam beberapa Sub Kegiatan yang fokus pada pengentasan Kemiskinan secara riil, melalui pelatihan skill dan langsung disalurkan ke perusahaan
2. PSKS sudah diperhatikan dari sisi upah dan juga perlindungan diri, ini bertujuan adalah PSKS lebih profesional dan optimal dalam melayani.

Tabel 2.3 Review terhadap RKPD Tahun 2026 Kabupaten Banjarnegara

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	Kab. Banjarnegara	**Presentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten yang terlaksana**	**100%**	**8.273.802.930,-**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	Kab. Banjarnegara	**Presentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten yang terlaksana**	**100%**	**9.303.841.000,-**	
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Banjarnegara**	**Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**44 Dokumen**	**8.273.802.930,-**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Banjarnegara**	**Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**44 Dokumen**	**6.000.000,-**	
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Banjarnegara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	3.075.200,-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Banjarnegara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	3.000.000,-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Banjarnegara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24 Laporan	2.000.000,-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Banjarnegara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24 Laporan	3.000.000,-	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kab. Banjar negara	**Jumlah administrasi keuangan yang terlayanan**	**100%**	**4.594.284.385**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kab. Banjar negara	**Jumlah administrasi keuangan yang terlayanan**	**100%**	**4.637.032.727,-**	
1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Banjar negara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 orang/ bulan	4.594.284.385,-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Banjar negara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 orang/ bulan	4594.28 2.727,-	
2)	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguijan/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Banjar negara	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penguijan/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	42.750.000,-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguijan/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Banjar negara	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penguijan/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	42.750.000,-	
3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kab. Banjar negara	**Jumlah pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**277.031.081,-**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kab. Banjar negara	**Jumlah pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**275.741.000,-**	
1)	Penyediaan Penulutan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Banjar negara	Jumlah Paket Penulutan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	Penyediaan Penulutan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Banjar negara	Jumlah Paket Penulutan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	
2)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Banjar negara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	277.031.081,-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Banjar negara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	275.741.000,-	
4	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kab. Banjar negara	**Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah**	-	-	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Banjar negara**	**Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah**	**12 unit**	**20.371.000,-**	
1)	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Kab. Banjar negara	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	-	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Kab. Banjar negara	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	12 unit	20.371.000,-	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Lainnya yang Disediakan			Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Lainnya yang Disediakan			
8	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Banjarnegara**	**Jumlah penyediaan jasa pelayanan kantor**	**12 Laporan**	**346.741.928,-**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Banjarnegara**	**Jumlah penyediaan jasa pelayanan kantor**	**12 Laporan**	**255.020.800,-**	
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Banjarnegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	92.090.000,-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Banjarnegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	92.090.000,-	
12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Banjarnegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	254.651.928,-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Banjarnegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	193.970.800,-	
9	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Banjarnegara**	**Terpeliharanya barang milik daerah**	**100%**	**88.125.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Banjarnegara**	**Terpeliharanya barang milik daerah**	**100%**	**79.675.800,-**	
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Banjarnegara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	78.838.000,-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Banjarnegara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	60.388.000,-	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3)	Penerliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Banjar negara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	Penerliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Banjar negara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	
3)	Penerliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Banjar negara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	9.287.800,-	Penerliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Banjar negara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	9.287.800,-	
II	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Kab. Banjar negara**	**Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Mendapatkan pembinaan dan fasilitasi guna peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial**	**70,84 %**	**1.003.651.012**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Kab. Banjar negara**	**Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Mendapatkan pembinaan dan fasilitasi guna peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial**	**70,84 %**	**1.031.673.120**	
1	**Pengumpulan Sumbangan dalam Derah Kabupaten/Kota**	**Kab. Banjar negara**	**Jumlah PSKS (lembaga dan perorangan) dan masyarakat umum yang mendapatkan sosialisasi mekanisme pengumpulan sumbangan uang dan barang**	-	-	**Pengumpulan Sumbangan dalam Derah Kabupaten/Kota**	**Kab. Banjar negara**	**Jumlah PSKS (lembaga dan perorangan) dan masyarakat umum yang mendapatkan sosialisasi mekanisme pengumpulan sumbangan uang dan barang**	-	-	
1)	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan	Kab. Banjar negara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan	-	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan	Kab. Banjar negara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan	-	-	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengumpulan Uang atau Barang		Pengumpulan Uang atau Barang			Pengumpulan Uang atau Barang		Pengumpulan Uang atau Barang			
2	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Banjar negara**	**Jumlah PSKS Lembaga dan Non Lembaga yang mendapatkan Pembinaan dan fasilitasi guna peningkatan pelayanan kesejahteraan**	**472**	**1.002.631.013**	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Banjar negara**	**Jumlah PSKS Lembaga dan Non Lembaga yang mendapatkan Pembinaan dan fasilitasi guna peningkatan pelayanan kesejahteraan**	**472**	**1.836.3 68.000,-**	
1)	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Banjar negara	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Keluarga	50.000.000,-	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Banjar negara	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Keluarga	417.136.000,-	
2)	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Banjar negara	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	23 LKS /Balai/ Unit/ 40,Desa/ah pada Instansi dan 9 LKS	580.000.000,-	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Banjar negara	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	23 LKS /Balai/ Unit/ 40,Desa/ah pada Instansi dan 9 LKS	350.000.000,-	
3)	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan	Kab. Banjar negara	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan	10 penyuluh sosial/ pekerja sosial/ 347 PSM,di	300.836.400,-	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan	Kab. Banjar negara	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan	10 penyuluh sosial/ pekerja sosial/ 347 PSM,di	353.836.960,-	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kewenangan Kabupaten/Kota		Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	7636 dari 7 67		Kewenangan Kabupaten/Kota		Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	7636 dari 7 67		
4)	Pengelolaan Layanan Terpadu Kewenangan Sosial	Kab. Banjarnegara	Jumlah orang/keluarga yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti	12 Laporan	31.794.5 00,-	Pengelolaan Layanan Terpadu Kewenangan Sosial	Kab. Banjarnegara	Jumlah orang/keluarga yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti	12 Laporan	30.836.5 00,-	
D t	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Kab. Banjarnegara**	**Presentase penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan dan pengemis ,yang terpenuhi kebutuhan dasar Di Luar Panti.**	**100% 100% 100% 100%**	**981.815 .644**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Kab. Banjarnegara**	**Presentase penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan dan pengemis ,yang terpenuhi kebutuhan dasar Di Luar Panti.**	**100% 100% 100% 100%**	**1.954.3 00.000,-**	
1	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Kab. Banjarnegara**	**Jumlah pemenuhan kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar,Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar,serta Gelandangan Pengemis DiLuar Panti Sosial Pengemis Di Luar Panti Sosial**	**1.405 Orang**	**872.239 .144**	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Kab. Banjarnegara**	**Jumlah pemenuhan kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar,Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar,serta Gelandangan Pengemis DiLuar Panti Sosial Pengemis Di Luar Panti Sosial**	**1.185 Orang**	**1.872.0 78.000,-**	
1)	Penyelesaian Permakaman	Kab. Banjarnegara	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakaman Sesuai dengan Standar Dan	700 Orang	842.890 .000,-	Penyelesaian Permakaman	Kab. Banjarnegara	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan kebutuhan Pemakaman Sesuai dengan Standar Dan	700 Orang	1.827.25 0.000,-	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota					Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota			
2)	Penyediaan Standing	Kab. Banjar negara	Jumlah Orang yang Menerima Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	120Orang	22.000.000,-	Penyediaan Standing	Kab. Banjar negara	Jumlah Orang yang Menerima Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Orang	22.000.000,-	
3)	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Banjar negara	Jumlah Orang yang Memelihara Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	213.380.900,-	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Banjar negara	Jumlah Orang yang Memelihara Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	203.794.000,-	
4)	Pemberian Pelayanan Penerbitan Keluarga	Kab. Banjar negara	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	11.600.000,-	Pemberian Pelayanan Penerbitan Keluarga	Kab. Banjar negara	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	11.600.000,-	
5)	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Banjar negara	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kotajenis terlantar,disabilitas	30 Orang	118.704.744,-	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Banjar negara	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kotajenis terlantar,disabilitas	30 Orang	132.096.000,-	
6)	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas	Kab. Banjar negara	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia	30 Orang	6.373.000,-	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas	Kab. Banjar negara	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia	-	-	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			
8)	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Banjar negara	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	7.746.500,-	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Banjar negara	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	4.746.500,-	
9)	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kab. Banjar negara	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	2.062.500,-	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kab. Banjar negara	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	2.062.500,-	
10)	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Banjar negara	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 orang	16.046.000,-	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Banjar negara	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 orang	16.046.000,-	
11)	Pemberian Pelayanan Penerbusan Keluarga	Kab. Banjar negara	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penerbusan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	35 orang	6.860.000,-	Pemberian Pelayanan Penerbusan Keluarga	Kab. Banjar negara	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penerbusan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	35 orang	6.860.000,-	
12)	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Banjar negara	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	75 orang	20.000.000,-	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Banjar negara	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	75 orang	40.000.000,-	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1 3	Fasilitasi Pemrosesan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Banjar negara	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemrosesan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	2.125.000,-	Fasilitasi Pemrosesan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Banjar negara	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemrosesan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	2.125.000,-	
1 9	Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan	Kab. Banjar negara	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan di Luar Pasti Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	1.548.500,-	Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan	Kab. Banjar negara	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan di Luar Pasti Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	1.548.500,-	
1 8	Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis	Kab. Banjar negara	Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	-	-	Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis	Kab. Banjar negara	Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	-		

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**Kab. Banjarnegara**	**Jumlah pemenuhan pelayanan kesejahteraan sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA**	**100 orang**	**109.879.500,-**	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**Kab. Banjarnegara**	**Jumlah pemenuhan pelayanan kesejahteraan sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA**	**100 orang**	82.121.5 00,-	
1)	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Banjarnegara	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	2.000.000,-	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Banjarnegara	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	2.000.000,-	
2)	Penyediaan Pemakaman	Kab. Banjarnegara	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakaman Sesuai dengan Standar Gar Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	38.000.000,-	Penyediaan Pemakaman	Kab. Banjarnegara	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakaman Sesuai dengan Standar Gar Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	38.000.000,-	
3)	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Banjarnegara	Jumlah Peserta Dan Sasaran Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	24.000.000,-	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Banjarnegara	Jumlah Peserta Dan Sasaran Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	24.000.000,-	
9)	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah	Kab. Banjarnegara	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan	-	-	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah	Kab. Banjarnegara	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan	-	-	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Dukun Korban HIV/AIDS dan NAPZA		Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota			Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Dukun Korban HIV/AIDS dan NAPZA		Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota			
5)	Pemberian Pelayanan Penerusan Keluarga	Kab. Banjar negara	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penerusan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	3.746.500,-	Pemberian Pelayanan Penerusan Keluarga	Kab. Banjar negara	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penerusan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	3.746.500,-	
6)	Pemberian layanan Resosialisasi Keluarga	Kab. Banjar negara	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Resosialisasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	10.675.000,-	Pemberian layanan Resosialisasi Keluarga	Kab. Banjar negara	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Resosialisasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	10.675.000,-	
7)	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Banjar negara	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 orang	3.030.000,-	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Banjar negara	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 orang	3.030.000,-	
8)	Kerjasama Antar Lembaga dan keluarga dlm pelaksanaan rehabilitasi sosial	Kab. Banjar negara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kecamatan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kab/Kota	5 Dokumen	27.455.000,-	Kerjasama Antar Lembaga dan keluarga dlm pelaksanaan rehabilitasi sosial	Kab. Banjar negara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kecamatan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kab/Kota	-	-	
IV	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN**	**Kab. Banjar negara**	**Cakupan dokumen yang diintervensi**	**3 Dok**	**3.953.813.100**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN**	**Kab. Banjar negara**	**Cakupan dokumen yang diintervensi**	**3 Dok**	**3.953.813.100**	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	JAMINAN SOSIAL					**JAMINAN SOSIAL**					
1	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Banjarnegara**	**Jumlah Dokumen Penetapan Fakir Miskin By Name By Address**	**1 Dok**	**3.953.818.100**	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Banjarnegara**	**Jumlah Dokumen Penetapan Fakir Miskin By Name By Address**	**1 Dok**	**3.953.818.100**	
1)	Penetapan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Banjarnegara	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	-		Penetapan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Banjarnegara	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	-		
2)	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Banjarnegara	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	4 Dok	65.313.000,-	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Banjarnegara	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	4 Dok	65.313.000,-	
3)	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Banjarnegara	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2.300Kk eluarga	2.868.263.100,-	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Banjarnegara	Jumlah Kelluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2.300Kk eluarga	2.868.263.100,-	
4)	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kab. Banjarnegara	Jumlah Orang Memperoleh Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	999.937.000,-	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kab. Banjarnegara	Jumlah Orang Memperoleh Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	999.937.000,-	
V	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**		**Penanganan korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi**	**100%**	**219.000.000,-**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**		**Penanganan korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi**	**100%**	**230.000.000,-**	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Kab. Banjarnegara	**kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana**				**Kab. Banjarnegara**	**kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana**			
1	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Kab. Banjarnegara**	**Jumlah orang yang mendapatkan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota**	**450**	**170.000.000,-**	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Kab. Banjarnegara**	**Jumlah orang yang mendapatkan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota**	**450**	**170.000.000,-**	
1)	Penyediaan Makanan	Kab. Banjarnegara	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	450 Orang	60.000.000,-	Penyediaan Makanan	Kab. Banjarnegara	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	450 Orang	60.000.000,-	
2)	Penyediaan Sandang	Kab. Banjarnegara	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	450 Orang	60.000.000,-	Penyediaan Sandang	Kab. Banjarnegara	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	450 Orang	60.000.000,-	
3)	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kab. Banjarnegara	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kab. Banjarnegara	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1)	Penanganan Khusus bagi kelompok rentan	Kab. Banjar negara	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	125 Orang	50.000.000,-	Penanganan Khusus bagi kelompok rentan	Kab. Banjar negara	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	50.000.000,-	
2)	pelayanan Dukungan Psikososial	Kab. Banjar negara	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan kabupaten/Kota	-	-	pelayanan Dukungan Psikososial	Kab. Banjar negara	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	
3	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**Kab. Banjar negara**	**Jumlah Kampung siaga bencana dan tagana yang aktif dalam Penanganan Bencana**	2 Kampung dan 35 Orang	**60.000.000,-**	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**Kab. Banjar negara**	**Jumlah Kampung siaga bencana dan tagana yang aktif dalam Penanganan Bencana**	2 Kampung dan 35 Orang	**60.000.000,-**	
1)	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kab. Banjar negara	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kab. Banjar negara	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	
2)	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Banjar negara	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	41 Orang	60.000.000,-	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Banjar negara	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	41 Orang	60.000.000,-	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Kewenangan Kabupaten/Kota					Kewenangan Kabupaten/Kota			
VII	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Kab. Banjarnegara**	**Persentase Implementasi Program Pengarusutamaan Gender (PPRG) pada Kabupaten Banjarnegara**	**100%**	**160.000.000,-**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Kab. Banjarnegara**	**Persentase Implementasi Program Pengarusutamaan Gender (PPRG) pada Kabupaten Banjarnegara**	**100%**	**87.000.000,-**	
1	**Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Kab. Banjarnegara**	**Jumlah OPD yang menyusun PPRG**	**44 OPD**	**15.000.000,-**	**Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Kab. Banjarnegara**	**Jumlah OPD yang menyusun PPRG**	**44 OPD**	**19.000.000,-**	
1)	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Kab. Banjarnegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	15.000.000,-	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Kab. Banjarnegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	15.000.000,-	
2)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Banjarnegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Banjarnegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3)	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Kab. Banjarnegara**	**Jumlah perempuan yang menjadi peserta Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi**	25 orang	**30.000.000,-**	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Kab. Banjarnegara**	**Jumlah perempuan yang menjadi peserta Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi**	25 orang	**50.000.000,-**	
4)	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG terintegrasi (PPG)	Kab. Banjarnegara	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang memperoleh sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	25 orang	30.000.000,-	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG terintegrasi (PPG)	Kab. Banjarnegara	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang memperoleh sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	25 orang	50.000.000,-	
VIII	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Kab. Banjarnegara**	**persentase pelayanan lembaga konsultasi keluarga yang responsive gender *Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan peningkatan kapasitas GSIB**	**11,76 % 22,37 %**	-	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Kab. Banjarnegara**	**persentase pelayanan lembaga konsultasi keluarga yang responsive gender *Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan peningkatan kapasitas GSIB**	**11,76 % 22,37 %**	-	
1	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan**	**Kab. Banjar**	**Jumlah Lembaga yang mendapatkan Penguatan dan Pengembangan Kualitas Keluarga**	**1 Lembaga**	-	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan**	**Kab. Banjar**	**Jumlah Lembaga yang mendapatkan Penguatan dan Pengembangan Kualitas Keluarga**	**1 Lembaga**	-	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**negara**	**dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak**			**Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**negara**	**dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak**			
II	Penguatan Kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Banjar negara	Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	Penguatan Kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Banjar negara	Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	
III	Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kab/Kota	Kab. Banjar negara	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan kabupaten/Kota	-	-	Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kab / Kota	Kab. Banjar negara	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	
IX	**PROGRAM PENGELOLAAN**	**Kab. Banjar**	**Prosentase ketersediaan data berbasis gender di perangkat daerah**	**100%**	-	**PROGRAM PENGELOLAAN**	**Kab. Banjar**	**Prosentase ketersediaan data berbasis gender di perangkat daerah**	**100%**	-	

No	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	SISTEM DATA GENDER ANAK	**negara**				**SISTEM DATA GENDER ANAK**	**negara**				
I	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab Banjar negara**	**Jumlah data gender dan anak yang tersedia dimasing masing OPD**	-	-	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Banjar negara**	**Jumlah data gender dan anak yang tersedia dimasing masing OPD**	-	-	
II	Penyelilaan Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kab/Kota	Kab. Banjar negara	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	-	-	Penyelilaan Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kab/Kota	Kab. Banjar negara	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	-	-	
III	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	Kab. Banjar negara	**Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di unit layanan terpadu**	**100%**	**125.000.000,-**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Kab. Banjar negara**	**Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di unit layanan terpadu**	**100%**	**156.283.400,-**	
1	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi**	Kab Banjar negara	**Jumlah perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai standar**	**12 orang**	**125.000.000,-**	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi**	**Kab. Banjar negara**	**Jumlah perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai standar**	**12 orang**	**156.283.400,-**	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kewenangan Kabupaten/Kota					**Kewenangan Kabupaten/Kota**					
II	Pemenuhan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Berwenang/di Kabupaten/Kota	Kab. Banjar negara	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	12 orang	125.000.000,-	Pemenuhan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Berwenang di Kabupaten/Kota	Kab. Banjar negara	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	12 orang	136.285.400,-	
XI	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Kab. Banjar negara**	**Presentase Desa dan Kelurahan Layak Anak**	**34,89 %**	40.000.000,-	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Kab. Banjar negara**	**Presentase Desa dan Kelurahan Layak Anak**	**34,89 %**	136.000.000,-	
1	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Kab. Banjar negara**	**Jumlah Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha yang mendapatkan advokasi dan koordinasi Pelembagaan PHA**	-	-	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Kab. Banjar negara**	**Jumlah Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha yang mendapatkan advokasi dan koordinasi Pelembagaan PHA**	-	-	
11	Pembinaan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non	Kab. Banjar negara	Jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Hak Anak pada Lembaga	-	-	Pembinaan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non	Kab. Banjar negara	Jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Hak Anak pada Lembaga	-	-	

No.	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemerintah, Media dan Dunia Usaha		Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			Pemerintah, Media dan Dunia Usaha		Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			
8	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Kab. Banjarnegara**	**jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan**	**1 Lembaga**	40.000.000,-	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Kab. Banjarnegara**	**jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan**	**1 Lembaga**	58.000.000,-	
11	Pendampingan Pengawas dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Banjarnegara	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	1 Lembaga	40.000.000,-	Pendampingan Pengawas dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Banjarnegara	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	1 Lembaga	58.000.000,-	
31	Pengawasan Kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Kab. Banjarnegara	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	Pengawasan Kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Kab. Banjarnegara	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		-	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
X	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Kab. Banjarnegara**	**Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan penegakan RTA**	**100%**	**48.952.596,-**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Kab. Banjarnegara**	**Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan penegakan RTA**	**100%**	**137.536.600,-**	
1	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Banjarnegara**	**Jumlah peserta Sosialisasi kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak.**	**40 Orang**	-	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Banjarnegara**	**Jumlah peserta Sosialisasi kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak.**	**40 Orang**	-	
2	Koordinasi dan Pembinaan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Banjarnegara	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pembinaan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	-	-	Koordinasi dan Pembinaan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Banjarnegara	jumlah dokumen hasil koordinasi dan pembinaan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	-	-	
3	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah**	**Kab. Banjarnegara**	**Jumlah anak yang memperoleh perlindungan khusus yang terlayani sesuai standar**	**43 Orang**	**48.952.596,-**	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah**	**Kab. Banjarnegara**	**Jumlah anak yang memperoleh perlindungan khusus yang terlayani sesuai standar**	**43 Orang**	**137.536.600,-**	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Perubahan
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kabupaten/Kota					**Kabupaten/Kota**					
1)	Layanan Pengaduan atau Pengaduan bagi anak korban kekerasan tingkat kab/kota	Kab. Banjar negara	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Pengaduan Korban Tingkat Kabupaten/Kota	45 Orang	48.952.595,-	Layanan Pengaduan atau Pengaduan bagi anak korban kekerasan tingkat kab/kota	Kab. Banjar negara	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Pengaduan Korban Tingkat Kabupaten/Kota	45 Orang	**137.536.600,-**	
2)	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Kab. Banjar negara**	**Presentase taman makam pahlawan dan monumen yang terpelihara dengan baik**	100%	**40.000.000,-**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Kab. Banjar negara**	**Presentase taman makam pahlawan dan monumen yang terpelihara dengan baik**	100%	**40.000.000,-**	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	**Kab. Banjar negara**	**Jumlah taman makam pahlawan dan monumen yang mendapatkan perawatan dan pemeliharaan Jumlah orang yang terlayani pada ziarah dan studi Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/ Kota**	**1 TMP & 8 Monumen Dan 330 orang**	**40.000.000,-**	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**Kab. Banjar negara**	**Jumlah taman makam pahlawan dan monumen yang mendapatkan perawatan dan pemeliharaan Jumlah orang yang terlayani pada ziarah dan studi Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/ Kota**	**1 TMP & 8 Monumen Dan 330 orang**	**40.000.000,-**	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Banjar negara	Jumlah Makam yang Terpelihara Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota Jumlah Monumen tersegarkan yang terawat	1 TMP dan 8 Monumen	20.000.000,-	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Banjar negara	Jumlah Makam yang Terpelihara Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota Jumlah Monumen tersegarkan yang terawat	1 TMP dan 8 Monumen	20.000.000,-	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penilaian Kelayakan Daerah dan Studi di Tanah Maluku Kabupaten/Kota	Kab. Ranger Negara	Penilaian Pelayanan Daerah dan Studi di Tanah Maluku Kabupaten Kota	120 Orang	20.000.000,-	Penilaian Kelayakan Daerah dan Studi di Tanah Maluku Kabupaten/Kota	Kab. Ranger Negara	Penilaian Pelayanan Daerah dan Studi di Tanah Maluku Kabupaten/Kota	120 Orang	20.000.000,-	
					11.856.500.000					**12.932.947.547**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegatan Masyarakat

Berdasarkan Musrenbang Kecamatan dan forum konsultasi publik telah disampaikan usulan program dan egiatanmasyarakat melalui aplikasi SIPD. Usulan program/kegiatan/subkegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	NIHIL				

2.6 Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan hasil reses anggota DPRD, melalui aplikasi SIPD telah disampaikan usulan program dan kegiatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan Pokok-pokok Pikiran DPRD

Tahun 2026 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	NIHIL				

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINSOS PPPA

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional menganamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional.

Berdasarkan Visi RPJMN Tahun 2025–2045 adalah Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045 untuk mendukung perwujudan Visi Indonesia Emas 2045 dengan Misi RPJMN 8 Asta cita,Prioritas nasional Kementrian Sosial mengambil 3 misi RPJMN yakni asta cita 4,6 dan 7 menghasilkan visi misi kemensos RI 2025-2029 Kesejahteraan Sosial Sepanjang Hayat yang Berkelanjutan dan Berkeadilan dalam rangka mewujudkan Indonesia maju menuju Indonesia emas 2045.

Tujuan Banjarnegara selama periode 2025-2029 adalah "Terwujudnya Banjarnegara Maju dan Sejahtera" melalui peningkatan kemampuan daerah untuk mengembangkan kapasitas sosial dan ekonominya untuk mewujudkan kondisi di mana masyarakat Banjarnegara dapat hidup dengan aman, nyaman dan berkecukupan. Langkah strategis yang diambil untuk mencapai tujuan tersebut diantaranya adalah melalui peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dinas Sosial PPPA mendukung sasaran strategis "Meningkatnya kualitas hidup

masyarakat", salah satu aspek kualitas hidup yang baik mencakup layanan kesejahteraan sosial yang baik sehingga masyarakat dapat melakukan aktivitas sosial ekonominya dengan baik. Guna mencapai sasaran ini, perlu adanya peningkatan kualitas layanan dalam aspek sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial PPPA, sehingga Tujuan Dinas Sosial PPPA adalah "Meningkatnya Kualitas Hidup PPKS serta Menguatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak".

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinsos PPPA

Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara Adalah *Meningkatnya Kualitas Hidup PPKS serta Menguatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Anak.*

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan pada tahun 2025 - 2029.

1. Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
2. Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
3. Meningkatnya Kualitas Perlindungan Bagi Anak
4. Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah
5. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat.

3.3 Program dan Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan instrument untuk mewujudkan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Banjarnegara.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

3.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2026

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Capaian Program	Rincian Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Rincian Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL,PPPA dan PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA								12.933.097.047				14.900.936.940,-
2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								5.900.841.000				5.888.936.940,-
2	08	01	2.03		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								6.000.000,-				8.500.000,-
2	08	01	2.03	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Presentase penyelenggaraan administrasi daerah kabupaten yang terlaksana	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Kab. Banyumas, semua kecamatan, semua perangkat	100 %	12 dokumen	59	1.000.000,-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya kapasitas aparatur Pemerintah	13	4.200.000
2	08	01	2.03	0002	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Presentase penyelenggaraan administrasi daerah kabupaten yang terlaksana	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi kinerja perangkat	Kab. Banyumas semua kecamatan, semua perangkat	100 %	27 laporan	59	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya kapasitas aparatur Pemerintah	27 Laporan	4.600.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Penyaluran	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
							(Unsur Indikator Kinerja SKPD)	(harus yang terukur)									
2	08	01	2.08		**Administrasi Kerangka Penyaluran Daerah**								4.437.092.727,-				4.681.092.340,-
2	08	01	2.08	2.08.1	Penyaluran Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase penyaluran gaji sesuai peraturan daerah kabupaten yang ditetapkan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah administrasi kelengkapan yang terfasilitasi	Seluruh Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, Lembaga Lainnya, Kecamatan, Kelurahan, Desa	100 %	12 bulan	100 %	4.399.092.727,-	Dana Transfer Umum-Dana Bebas Umum	Meningkatnya kapasitas aparatur Pemerintah	12 bulan	4.640.092.340,-
2	08	01	2.08	2.08.2	Pelaksanaan Pemberhentian dan Penggajian / Pemberian Kesejahteraan (ASN)	Presentase penyaluran gaji sesuai peraturan daerah kabupaten yang ditetapkan	Jumlah Dokumen Pemberhentian dan Penggajian/Pemberian Kesejahteraan ASN	Jumlah administrasi kelengkapan yang terfasilitasi	Seluruh Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, Lembaga Lainnya, Kecamatan, Kelurahan, Desa	100 %	12 Dokumen	100 %	42.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Bebas Umum	Meningkatnya kapasitas aparatur Pemerintah	12 dokumen	42.000.000,-
2	08	01	2.08		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								270.791.000,-				340.000.000,-

Kode					Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Capaian Program	Ketuasan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Ketuasan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolak Ukur	Target	
2	06	01	2.06.	0003	Penyelenggaraan Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas	Persentase peningkatan kualitas pelatihan yang terlaksana	Jumlah Peserta Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas yang Diselenggarakan	Jumlah peserta pelatihan yang terlaksana	Kab. Bengkayang, seluruh kecamatan, semua kelurahan	100 %		100 %	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya kapasitas aparatur Pemerintah	1 paket	65.000.000,-
2	06	01	2.06.	0004	Penyediaan Rehab Lagedh Kantor	Persentase peningkatan kualitas pelayanan yang terlaksana	Jumlah Peserta Rehab Lagedh Kantor yang Diselenggarakan	Jumlah pelatihan administrasi perkantoran	Kab. Bengkayang, seluruh kecamatan, semua kelurahan	100 %	12 Paket	100 %	275.711.000,-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya kapasitas aparatur Pemerintah	12 Paket	600.000.000,-
2	06	01	2.06.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								80.371.000,-				350.000.000,-
2	06	01	2.06.1	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase peningkatan sarana prasarana daerah kabupaten yang terlaksana	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	Kab. Bengkayang, seluruh kecamatan, semua kelurahan	100 %	12 Unit	100 %	20.371.000,-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah	10 Unit	130.000.000,-
2	06	01	2.06.		**Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								280.000.000,-				280.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Jumlah Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Riviu/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Penyerapan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
2	08	01	2.08	0002	Penyelaras Jasa Kebijakan, Hukum Hak dan Lainnya	Presentase pemerintah daerah kabupaten yang terfasilitasi	Jumlah Laporan Penyelaras Jasa Kebijakan, Hukum Hak dan Lainnya yang Disediakan	Jumlah penyelaras jasa pelayanan kantor	Koli Barang/orang, jenis kewenangan, jenis kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	93.000.000,-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya kapasitas aparatur Pemerintah	12 Laporan	93.000.000
4	08	01	2.08	0004	Penyelaras Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase pemerintah daerah kabupaten yang terfasilitasi	Jumlah Laporan Penyelaras Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah penyelaras jasa pelayanan kantor	Koli Barang/orang, jenis kewenangan, jenis kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	193.870.800,-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya kapasitas aparatur Pemerintah	12 Laporan	200.000.000
2	08	01	2.08		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**78.675.800,**				**113.000.000**
3	08	01	2.08	0003	Penyelaras Jasa Pemeliharaan, Garis Pemeliharaan, Pajak dan Retribusi Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase pemerintah daerah kabupaten yang terfasilitasi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Diberikan Pajak dan Perlengkapannya	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	Koli Barang/orang, jenis kewenangan, jenis kelurahan	100 %	12 Unit	100 %	69.399.800,-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya kapasitas aparatur Pemerintah	12 Unit	70.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan (Rupiah) Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
0	09	01	019	01 01	Pemeliharaan /rehabilitasi Gedung Kantor dan Tangguna Lainnya	Prosentase penurunan prevalensi stunting kabupaten yang terlaksana	Jumlah Gedung Kantor dan Tangguna Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah fasilitas publik daerah yang terpelihara dengan baik	Kab. Banjarnegara, semua kecamatan, semua kelurahan	100 %	-	100 %	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya kapasitas aparatur Pemerintah	5 Unit	25.000.000
0	09	01	019	01 01	Pemeliharaan/R ehabilitasi Rumah Jabatan/ Dinas/ Gedung Kantor dan Tangguna Lainnya	Prosentase penurunan prevalensi stunting kabupaten yang terlaksana	Jumlah Rumah dan prasarana pendukung Gedung Kantor Pemerintahan Lainnya yang di perbaiki sesuai standar	Prosentase fasilitas publik daerah yang terawat	Kab. Banjarnegara, semua kecamatan, semua kelurahan	100 %	01 Unit	100%	6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya kapasitas aparatur Pemerintah	80 Unit	12.000.000
1	09	01			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL								1.001.670.120.				1.732.500.000,-
1	09	01	3,03		Pengembalian Sosialisasi dalam Daerah Kabupaten/Kota								-				40.000.000,-
1	09	01	019	01 01	Koordinasi dan Sosialisasi Pencegahan dan Tindak Lanjut Tindak Kekerasan Berbasis Gender	Prosentase Pelayan Kesehatan Ibu Hamil (PWS-KIA) yang sesuai	Jumlah Terlaksana Hasil Koordinasi dan Sosialisasi Pencegahan dan Tindak Lanjut Tindak Kekerasan Berbasis Gender	Jumlah PPKBD dan sosialisasi yang terlaksana sesuai	Kab. Banjarnegara, semua kecamatan,	75,0 0%	-	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Pelayan Kesehatan	75	40.000.000,-

Kode					Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Data	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					n Orang atau Barang			penyelesaian sengketa dan barang milik usaha untuk grafis tertentu	wilayah administra-						(PPKS) yang aktif		
1	06	02	2.06.2		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**								1.826.000.000,-				1.446.000.000,-
1	06	02	2.06.2	0003	Peningkatan Kesejahteraan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	Jumlah kelurahan yang Mendapat Pendampingan Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang berdayakan, Pemberdayaan dan Rehabilitasi gaiss penyelesaian pelayanan kesejahteraan sosial	Kab. Banjarnegara, seluruh kecamatan, seluruh kelurahan	75,8 4 %	11 Kelurahan	912 Orang	417.116.000,-	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Persentase peran aktif PSKS kelurahan	11 Kelurahan	462.000.000,-

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pokok/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Kinerja					Tolok Ukur	Target
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kewajiban Pelayanan Dasar Kewajiban Pelayanan Minimal Pemenuhan Kebutuhan Dasar Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (PK03) sesuai standar	Jumlah Sasaran Kewajiban Ibu Hamil yang Memenuhi Kebutuhannya Kabupaten/Kota	Jumlah PK03 yang terlaksana. Prosentase dari keluaran yang pelayanan kesehatan sesuai	Kab. Bangkalan, semua kecamatan, Kelurahan	70,8 %	(1) LK3 (Belum Utama 90,26% sih pada faktor dari 'd' LK3)	463 Orang	930.000.000,-	Dana Transfer Umum-Dana Bidang Umum	Persentase pelaya sk03 PK03 kesehatan	(1) LK3 (kesehatan Utama 463,0 (kali pada kesehatan dari 'd' LK3)	1.100.000.000
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Dasar Kewajiban Pelayanan Minimal Pemenuhan Kebutuhan Dasar Kabupaten/Kota	Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (PK03) yang sesuai pelayanan kesehatan sesuai	Jumlah Rumah Sakit, Puskesmas, Rumah Sakit Swasta, Klinik Swasta, Rumah Sakit Swasta, Rumah Sakit Swasta yang Memenuhi Kebutuhannya	Jumlah PK03 yang memenuhi. Prosentase dari keluaran pelayanan kesehatan sesuai	Kab. Bangkalan, semua kecamatan, semua kelurahan	70,8 %	(1) pencapaian sesuai, 2 (dua) sesuai, 337 PK03 (3) 1956, dari 3 KC	463 Orang	980.434.000,-	Dana Transfer Umum-Dana Bidang Umum	Persentase Ibu Hamil PK03 pencegahan	(1) pencapaian sesuai 4,6 pelayanan sesuai 463 PK03 (3) 1956 K dari 3 KC	900.000.000,-

Kode					Uraian/ Hibang Uraian/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
1	0 5	0 4	2 0 1	0 0 1	Penyelenggaraan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial	Persentase Lansia Sasaran Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	Jumlah lansia/kelurahan yang dikunjungi dan/atau dibimbingkan	Jumlah PSKS yang memfasilitasi pemahaman dan kesiapan lansia peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial	Kab. Banjarnegara, semua kecamatan, seluruh kelurahan	70,8 4 %	12 lapora n	403 Orang	50.525.000,-	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Penyelenggaraan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial	12 Laporan	72.000.000
2	0 5	0 4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL								2.954.300.000,-				3.301.018.500,-
3	0 5	0 4	2 0 3		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial								1.872.078.500,-				2.073.568.500,-
4	0 5	0 4	2 0 3	0 0 1	Pelayanan Perlindungan	Persentase penyandang disabilitas intelektual, anak, orangtua, lansia, anak terlantar, dan gelandangan pengemis	Jumlah orang yang mendapatkan pendampingan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dengan disabilitas dan rehabilitasi kelembagaan/luar	Jumlah penyandang kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, yang Terlantarkan	Kab. Banjarnegara, semua kecamatan, semua kelurahan	100 % 100 % 100 % 100 %	7101 Orang	1.185 orang	1.427.210.000,-	Dana Transfer Umum - Dana Bantuan Operasi	Pemenuhan PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial luar lembaga	7101 Orang	1.496.012.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Kondisi Awal	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolak Ukur	Target	
						orang terpecah belah dan Konflik di luar pasti		a. Pengaruh Di Luar Pasti Kuasi									
x	x x	x x	x x x	x x x x	Pemerintahan Nasional	Persentase penyandang disabilitas mitranet, anak, wirausaha, lansia, dan pemulang pengemis yang terpecah belah dan konflik di luar pasti	Jumlah Orang yang Mengurus Pelayan dan Entregasi Layanan yang Tersedia dalam 1 Tahun Anggaran Kabupaten/Kota	Jumlah pemenuhan kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lansia, dan Tuna wisma Dikarenakan Pengaruh Di Luar Pasti Kuasi	Kab Banyumas, semua kecamatan, semua kelurahan	100 % 100 % 100 % 100 %	120 orang	1.185 orang	22.250.000.	Desa Tranatir Dapur Desa Rokan Dalam	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial/dalam sesuai hasil asesmen	120 orang	22.250.000
x	x x	x x	x x x	x x x x	Pemerintahan Aktif Daerah	Persentase penyandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Hak Dasar dan Hak	Jumlah pemenuhan kebutuhan dasar bagi	Kab Banyumas, semua	100 % 100 %	60 orang	1.185 orang	600.764.983.	Desa Tranatir Utama Desa	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan	60 Orang	217.000.000

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Paguasi	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
							Jumlah/Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandang pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penerima kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis	Kab. Pacitan, Kecamatan, Kelurahan	100 % 100 %				Alokasi Umum	rehabilitasi kesejahteraan sosial luar lembaga		
x	00	04	00	0001		Pelaksanaan Pelayanan Rehabilitasi Keluarga	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandang pengemis yang terpenuhi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penerima kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis	Kab. Pacitan, Kecamatan, Kelurahan	100 % 100 % 100 % 100 %	60 orang	1.180 orang	11.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemenuhan PPKS yang memperoleh pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial luar lembaga	60 orang	12.180.000

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
							Capaian Program	Rincian Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kelompok Sasar/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Rincian Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolak Ukur	Target	
							Terwujudnya masyarakat yang sejahtera (Lansia)		Lansia Hanti Sentul									
x	xx	xx	xx	xxxx		Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial, Masyarakat, Ekonomi, dan Kearsip	Persentase penyandang disabilitas terlayani, anak terlantar, lansia terlantar, dan gelandang pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah Penerima Rehabilitasi Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penerima bantuan/sosial/ Asuransi Lansia Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar, Lansia Terlantar, serta Lansia Hanti Sentul	Kab. Gorontalo, semua kecamatan, semua kelurahan	100 % 100 % 100 % 100 %	30 orang	1 (UE) orang	572.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagian Hasil	Persentase PPKS yang terlayani pelayanan rehabilitasi, pemberdayaan sosial dan bantuan	30 orang	138.000.000

Kode						Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2020						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
1	01	01	2.01	0101		Pemberian Bantuan Sosial kepada Korban Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Pemenuhan perpindahan sementara, pintu keluar, kerja sama rehabilitasi, dan pendidikan pengganti yang berpindah kebutuhannya di luar panti	Jumlah Peserta Bantuan Sosial kepada Korban Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Antarpanggung Kabupaten/Kota	Jumlah pemenuhan kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Desa/Kel.	Kab. Banjarnegara	100 %; 100 %; 100 %; 100 %;	-	1.180 orang	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemenuhan PPKS yang memperoleh pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial luar biasanya	20 Orang	7.300.000

Kode					Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Riset/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
1	0 6	0 4	0 4	0 0 0 0	Pendampingan Hukum Bagi Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	pemberian pendampingan hukum, untuk terlaksana, kasus-kasus terlapor, yang ditindaklanjuti, kesesuaian dengan peraturan yang berlaku	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemenuhan kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis (GEPENG)	Kab. Banyuwangi, semua kecamatan, semua kelurahan	100 % 100 % 100 % 100 %	40 Orang	1.282 orang	6.146.500	Dana Transfer Daerah-Dana Alokasi Umum	Persentase PPKS yang memdapatkan pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial luar panti	30 orang	6.500.500
1	0 6	0 4	0 4	0 0 0 0	Pendampingan Layanan Usaha dan Pengaduan	Pemberian pendampingan hukum, untuk terlaksana, kasus-kasus terlapor, yang ditindaklanjuti, dan gelandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Dasar dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemenuhan kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar, serta	Kab. Banyuwangi, semua kecamatan, semua kelurahan	100 % 100 % 100 % 100 %	10 orang	1.282 orang	2.082.500	Dana Transfer Daerah-Dana Alokasi Umum	Persentase PPKS yang memdapatkan pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial luar panti	10 Orang	2.500.500

Kode						Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Prog ram	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Targ et	
							pengawas yang terpenuhi kebutuhannya disekitarnya di luar panti		Terlaksananya Pengawasan Di Luar Panti Sosial									
1	02	01	2	11	11.01.1	Pemberdayaan Lanjutan Berkelanjutan	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhannya disekitarnya di luar panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial/Kabupaten/Kota	Jumlah penyandisabilitas terlantar dan Penyandisabilitas Terlantas,Anak Terlantas,Lanjut Usia Terlantar,serta Gelandangan Pengemis DiLuar Panti Sosial	Kab Banjarnegara, semua kecamatan, semua kelurahan	100 % 100 % 100 % 100 %	20 Orang	1.280 orang	141.444.000,-	Dana Transfer Umum: Dana Alokasi Umum	Perencanaan PPKS cerai meninggalkan pelayanan rehabilitasi kewajibannya sesuai hasil asesmen	20 Orang	55.840.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					Perubahan Meja Rencana Tahun 2027		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
1	0.0.	0.0.	0.0.	0.0.1	Pelayanan Pelayanan Penanganan Kelluarga	Presentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandang pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penanganan Keluarga Kerentanan Kabupaten/Kota	Jumlah penerima kebutuhan dasar bagi Penyandias Disabilitas Terlantar,Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar,serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial	Kab. Banjarnegara, semua kecamatan, semua kelurahan	100 % 100 % 100 % 100 %	35 orang	1.183 orang	6.883.000,-	Dana Transfer Umum-Dana Bagian Umum	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial luar lembaga	30 orang	7.300.000,-
1	0.0.	0.0.	0.0.	0.0.1	Pemberdayaan Layanan Rujukan	Presentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandang	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan	Jumlah penerima kebutuhan dasar bagi Penyandias Disabilitas Terlantar,Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar,serta	Kab. Banjarnegara, semua kecamatan, semua kelurahan	100 % 100 % 100 % 100 %	5% orang	1.183 orang	60.000.000,-	Dana Transfer Umum-Dana Bagian Umum	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial luar lembaga	5% orang	62.000.000

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
							Capaian Program	Sasaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Sasaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Teknis Utasi	Tuga si	
							pengamanan orang [illegible] terhadap dampak buruk pornografi	Terwujudnya Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengamanan Dilayar Pentas Nasional									
1.	1.8.	1.8.1.	1.8.1.1.	1.8.1.1.1.		Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak/Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana/Sosial/Kebudayaan/Kepemudaan dan Olahraga	Prevalensi pengamanan [illegible] terhadap dampak buruk pornografi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Perlindungan Hak Perempuan Dalam Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak Terhadap Tindakan Kekerasan, Jaminan Atas Pelayanan Dasar, Terlaksananya Pengamanan Dilayar Pentas Nasional	Jumlah pelaksanaan perlindungan dalam Rangka Pencegahan & Penanganan Terhadap Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak Cacat, Terlaksananya Pengamanan Dilayar Pentas Nasional	Kab Banjarnegara, pelaksanaan kegiatan, sasaran kelompok	100 % 100 % 100 % 100 %	15 orang	1.183 orang	2.120.000,-	Dana Transfer Daerah/ Dana Bantuan Lainnya	Terwujudnya PPRG yang berperspektif gender dan anak terhadap kesejahteraan dan perlindungan hak anak	15 orang	2.120.000,-

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Capaian Program	Rincian Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Riap/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
1	08	04	3.01	0		Penyelesaian Perkawinan Kembalian	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pencegahan Ketelantaran Perempuan Korbannya di Luar Pasti Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemenuhan kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lansia Tuna Terlantar Korban Gelandangan Pengemis Orang Dengan Masalah Sosial	Kab. Banjarnegara, semua kecamatan, semua kelurahan	100 % 100 % 100 % 100 %	30 Orang	1.380 orang	1.646.560,-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial luar panti	30 orang	1.629.000,-
1	08	04	3.01	0		Fasilitasi Pendampingan dan Pelatihan Vokasional bagi Kesejahteraan Ekonomi Penyandang Disabilitas Fisik dan Mental, Gelandangan	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, dan gelandang	Jumlah Penyandang Disabilitas Fisik dan Mental, Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Pendampingan dan Pelatihan Vokasional untuk kesejahteraan Ekonomi	Jumlah pemenuhan kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lansia Tuna Terlantar	Kab. Banjarnegara, semua kecamatan, semua kelurahan	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	-	1.380 orang	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial luar lembaga	20 Orang	100.000.000,-

Kode					Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan (Rp.) Pagu Indikatif (Rp.)
										Penguatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolak Ukur	Target	
					Dan Pengawas	pengawasan yang terpadu terhadap pelaksanaan otonomi di luar partai		Terbentuknya Pengawas Tatanan Pasti Stabil									
1	08	04	1.08.2		**Pelaksanaan Sosial Pengawasan Rawatan Kesejahteraan Sosial (PKSS) Lainnya Bidang Kurban 07F/ 4IDR dan RAPSA di Luar Panti Sosial**								**82.121.500,-**				**127.350.000,-**
1	08	04	1.08.2	0012	Pemberian Layanan Rehabilitasi	Terlaksana penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna gelandang pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Keluarga/ Kelompok/ Luar	Jumlah penerima pelayanan kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial PKSS Lainnya Bidang Kurban 07F / 4IDR dan RAPSA	Kab Deskarenge gara, wilayah kecamatan, wilayah perkotaan	100 % 100 % 100 % 100 %	10 Orang	100 orang	0.500.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Penerima PKSS yang terlaksana n perbaikan rehabilitasi kesejahteraan sosial luar lembaga	10 Orang	2.000.000

Kode					Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Capaian Program	Rincian Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Rincian Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						(1 tahun pertama)											
1	0 6	0 4	0 2	0 0 1	Perumusan Perumusan	Presentase penyandang disabilitas mental, korban napza, lansia terlantar, dan gelandangan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial (Tahun 1 dari 5 tahun pertama)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakaman Sesuai dengan Standar Dan Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemenuhan pelayanan kesejahteraan sosial dalam penanganan Nafza/Napza (lama/ bagi PMKS Lainnya Dalam Rumah) ODV / ADHP dan NAPZA	Kab. Banyuasin, semua kecamatan, semua kelurahan	(10) % (10) % (10) % (10) %	: 10 Orang	100 orang	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemenuhan PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosi dan orangn	10 Orang	40.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Capaian Program	Sasaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Kelurahan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Teknis Sibar	Tugas	
1	0 6	0 4	2 0 2 6	0 0 0 1	Pelayanan Rehabilitasi Sosial (Tuna Sosial, Napza), dan Rehsos	Presentase prosedur dan dokumen terkait anak terpenuhi, lansia terlantar dan gelandang pengemis yang terjaring terlantar, dan korban tuna sosial	Jumlah Penerima Rehabilitasi Sosial (Tuna Sosial, Napza), dan Rehsos Kabupaten/Kota	Jumlah penerima pelayanan kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kebutuhan dasar bagi PPKS Lansia Miskin Korban HIV / AIDS dan NAPZA	Kab Banyuwangi, semua kecamatan, semua kelurahan	100 % 100 % 100 % 100 %	30 Orang	100 orang	24.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagian Umum	Pelayanan PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial luar panti	30 Orang	25.200.000
1	0 6	0 4	2 0 2 6	0 0 0 2	Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar, Penyandang Disabilitas Korban Tindak Kekerasan, Anak Korban Tindak Kekerasan, Lansia Terlantar dan Korban Bencana	Presentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandang	Jumlah Penerima Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi anak Terlantar, Penyandang Disabilitas Korban Tindak Kekerasan, Anak Korban Tindak Kekerasan, Lansia Terlantar dan Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penerima pelayanan kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kebutuhan dasar bagi PPKS Lansia Miskin Korban HIV	Kab Banyuwangi, semua kecamatan, semua kelurahan	100 % 100 % 100 % 100 %	-	100 orang	-	Dana Transfer Umum-Dana Bagian Umum	Pelayanan PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial luar panti bagi	120 Orang	25.800.000

Kode					Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Capaian Program	Rencana Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Kaitan sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Vol	
					Hukum tentang HIV/AIDS dan NAPZA	pengetahuan yang terjemahkan kedalam dalam perilaku peserta		/ AIDS dan NAPZA									
1	08	01	2.02	01	Perlindungan Perempuan Perlindungan Keluarga	Persentase penyandang Disabilitas terbebas dari kekerasan, dapat akses terhadap dan gabungan pengaman yang memenuhi kebutuhan dasarnya di hari peserta	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Perlindungan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penyandang perlindungan kesejahteraan sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi PPKS Lainnya Dalam bentuk HIV / AIDS dan NAPZA	Kab. Banyuwangi, semua kecamatan, semua kelurahan	Laki % 100 % 100 % 100 %	20 Orang	100 orang	3.745.000.-	Dana Transfer Daerah / Dana Bantuan Daerah	penyandang PPKS yang memperoleh perlindungan kebutuhan kesejahteraan sosial dari lembaga	20 Orang	3.950.000.-

Kode						Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi (tetgat Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
1	08	11	2.02	0.02	0.02.1	Pemberdayaan Sosial Rehabilitasi Keluarga	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna [illegible] gelandangan pengemis yang terberdaya/ terlindungi dan [illegible] di luar panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penerima pelayanan kesejahteraan sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS (Pakai Layanan Dinkes Kurban HIV / AIDS dan NAPZA	Kab. Banjarnegara, semua kecamatan, semua kelurahan	100 % 100 % 100 % 100 %	20 Orang	100 orang	10.675.000	Desa Tratabe Dokum Desa Akuisi Desain	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial luar biologa	20 Orang	11_000.000
1	08	11	2.02	0.02	0.02.2	Pemberian Layanan Rujukan	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna [illegible] gelandangan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penerima pelayanan kesejahteraan sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS (pakai Kurban HIV	Kab. Banjarnegara, semua kecamatan, semua kelurahan	100 %/ 100 % 100 % 100 %	15 orang	100 orang	3.000.000	Desa Tratabe Dokum Desa Akuisi Desain	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial luar biologa	15 orang	3.000.000

Kode					Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						pengelolaan yang responsibel, berkualitas dan akuntabel dalam pemi		/ 5000 dari 54295									
1	0 6	0 4	0 0	0 1	Kerjasama Antar Lembaga dan antarnegara dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, dan gelandang pengemis yang memperoleh kualitas dan akuntabel	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kelembagaan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Gelandangan, Pengemis, Anak Jalanan, dan Tuna Sosial	Jumlah pemenuhan pelayanan kesejahteraan sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi PPKS Lainnya Hukum Berkasi 100 / 4000 dari 54295	Kab Banjarnegara, secara kecamatan, secara kelurahan	1.041 % 1.041 % 1.041 %	-	100 orang	-	Dana Tugas Dekon Dana Kabupaten Daerah	Persentase PPKS yang memperoleh pelayanan rehabilitasi berkualitas dan akuntabel	5 Data	10.000.000
1	0 6	0 4			PROGRAM PEMELIHARAAN DAN JAMINAN SOSIAL								2.902.9 12.100.				4.198.263.100

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Riil/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tahun Utama	Tanggal	
1	06	03	X.02		Pengelolaan Data Pakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								6.958.513.104,-				6.198.263.104
1	06	03	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan dokumen yang diinventarisasi	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Update	Jumlah Dokumen Rekapitulasi Fakir Miskin Hasil Validasi	Kab Banjarnegara, antara kecamatan, antara kelurahan	3 Dok	-	1 Dok	-	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Cakupan dokumen yang diinventarisasi	137 titik	130.000.000
1	06	03	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan dokumen yang diinventarisasi	Jumlah Kelurga s/d/ Rekapitulasi Pengelolaan Fakir Miskin Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Rekapitulasi Fakir Miskin Hasil Validasi	Kab Banjarnegara, antara kecamatan, antara kelurahan	3 Dok	6 Dok	1 Dok	65.113.000,-	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Cakupan dokumen yang diinventarisasi	4 Dok	90.000.000,-

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Biaya/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
1	06	06	2.06	06008	Fasilitasi Bantuan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Cakupan dokumen yang ditetapkan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Data Sasaran by Name By Address	Kab. Banjarnegara, semua kecamatan, semua kelurahan	2 Dok	2.000	1 Dok	2.888.263.100,-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan dokumen yang ditetapkan	2.00 0	2.888.263.100,-
1	06	06	2.06	06009	Fasilitasi Bantuan Pengentasan dan Eliminasi Masalah Sosial	Cakupan dokumen yang ditetapkan	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan pengentasan dan Eliminasi Masalah Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Data Sasaran by Name By Address	Kab. Banjarnegara, semua kecamatan, semua kelurahan	2 Dok	40 Orang	1 Dok	999.927.000,-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan dokumen yang ditetapkan	60 Org	1.110.000.000,-
1	06	06			PROGRAM PERANGKAR RESPONSE								330.000.000,-				330.000.000,-
1	06	06	2.11		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota								170.000.000,-				330.000.000,-

Kode					Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolak Ukur	Target	
1	06	06	01	0001	Pengendalian Kebakaran	Persentase Korban Bencana Alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Hak (Hak Dasar) Korban Akibat Tanggap Darurat (Pengungsian Kemanusiaan) Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang memegang ijin berbagai jenis bencana alam dan sosial kabupaten /kota	Kab. Banjarnegara, seluruh kecamatan, semua kelurahan	100 %	450 Orang	450 Orang	44.000.000,-	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Persentase Korban Bencana Alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana daerah Kabupaten/ Kota	300 Orang	79.000.000,-
1	06	06	01	0002	Penanggulangan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Pada Kedaruratan Lainnya yang Terkait pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kemanusiaan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang memegang ijin pembuangan limbah berbahaya dan sosial kabupaten /kota	Kab. Banjarnegara, seluruh kecamatan, semua kelurahan	100 %	450 Orang	450 Orang	65.000.000,-	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Persentase Korban Bencana Alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana daerah Kabupaten/ Kota	300 Orang	79.000.000,-

Kode					Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Capaian Program	Keluaran Hasil Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Riset/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Hasil Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolak Ukur	Target	
1	0	0	0	0	Penanganan Korban Hasil Kekerasan Rencana	Penanganan Korban Rencana Alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Rencana daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Korban Hasil Kekerasan Rencana alam dan Hasil kabupaten /Kota	Jumlah orang yang mendapatkan penanganan sesuai standar layanan rencana alam dan sesuai kabupaten /Kota	Kab Banjarnegara, semua kecamatan, semua kelurahan	100 %	125 Orang	900 Orang	15.000.000,-	Dana Transfer Umum-Dana Bidang Umum	Penanganan Korban Rencana Alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Rencana daerah Kabupaten/ Kota	100 %	115.000.000
1	0	0	0	0	Pelayanan Pelayanan Pelayanan	Pelayanan Korban Rencana Alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Rencana daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Korban Rencana yang Mendapatkan Layanan Pelayanan Pelayanan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan sesuai korban Rencana alam dan sesuai kabupaten /kota	Kab Banjarnegara, semua kecamatan, semua kelurahan	100 %		450 Orang		Dana Transfer Umum-Dana Bidang Umum	Pelayanan korban Rencana Alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Rencana daerah Kabupaten/ Kota	100 orang	50.000.000

Kode					Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolak Ukur	Target	
1	08	08	8.01	1 0 0 0	Penyediaan Tempat Pengaduan dan Penanganan	Persentase Korban Kekerasan Anak yang terpenuhi kebutuhannya Kekerasan Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana di wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Pengaduan Kekerasan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mendapatkan perlindungan terkait korban kekerasan akan dan sosial kabupaten/kota	Kab. Banjarnegara, semua kecamatan, semua kelurahan	100 %	-	420 Orang		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Korban Kekerasan Anak yang terpenuhi kebutuhannya dampaknya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/ Kota	8 kali	50.000.000,-
1	08	08	8.03		**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesejahteraan Bencana Kabupaten/Kota**								60.000.000,-				300.000.000,-
1	08	08	8.03	1 0 0 1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Persentase Korban Bencana Alam yang terpenuhi kebutuhannya dampaknya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kabupaten/Kota	jaringan dan pola relasi bencana yang terbentuk kampung siaga bencana dan alur logistik	Kab. Banjarnegara, semua kecamatan, semua kelurahan	100 %	-	100 %		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Korban Bencana Alam yang terpenuhi kebutuhannya dampaknya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana daerah	5 Kali	43.000.000

Kode					Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Capaian Program	Keluaran Keg. Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Renja/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Keg. Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						Jumlah Kabupaten/ Kota									Kabupaten/ Kota		
1	0 6	0 4	2 0 2	0 0 2	Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pelaksanaan Layanan Rehab Sosial	Persentase Bantuan Rehsos Alat yang terpenuhi sebelumnya Sebelum Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Jumlah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial dan Pelayanan Lanjut Bagi Korban Kekerasan Kabupaten/Kota	penerimaan dapat rawat bencana yang terdistribusi bantuan yang tepat bencana dan lain lain	Kab Kegiatan gara, sarana kesehatan, sarana tertentu	100 %	41 Orang	100 %	400.000.000,-	Dana Transfer Umum Dana Bidan Umum	Persentase Korban Bencana Alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Jumlah Kabupaten/ Kota	100 %	400.000.000
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	0 6				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK												
2	0 6	0 2			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN								97.000.000,-				120.000.000,-

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi (Nagari Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Teknik Ukur	Target	
2	08	02	2.02		Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota								17.000.000,-				60.000.000,-
2	08	02	2.02	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Persentase implementasi Program Pengarusutamaan Gender (PPRG) pada Kabupaten Banyuasin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang terkoneksi PPRG	Kab. Pelaksanaan, semua kecamatan, semua kelurahan	100 %	7 Dokumen	44 OPD	17.000.000,-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase OPD yang melaksanakan Anggaran Responsif Gender	1 Dokumen	16.000.000
2	08	02	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase implementasi Program Pengarusutamaan Gender (PPRG) pada Kabupaten Banyuasin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang terkoneksi PPRG	Kab. Banyuasin, semua kecamatan, semua kelurahan	100 %	-	44 OPD	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase OPD yang melaksanakan Anggaran Responsif Gender	44 Laporan	42.000.000
2	08	02	2.03		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota								80.000.000,-				53.000.000,-

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rancangan Tahun 2026						Perkiraan Maju Rancangan Tahun 2027		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Rincian Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolak Ukur	Pagu	
1	08	01	2.02	0102	Rencana Peningkatan Partisipasi Pemerataan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Persentase Implementasi Program Pengarusutamaan Gender (PPRG) pada Kabupaten Banjarnegara	Jumlah ASN tenaga pengendali dan pelaksana yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	Jumlah perempuan yang menjadi peserta Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Pemerataan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab. Banjarnegara, seluruh kecamatan, seluruh kelurahan	100 %	25 orang	25 orang	[illegible]	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	50, Orang	[illegible]
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA												41.000.000,-
2	08	04	2.02		Pengaturan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Pemenuhan Hak dan Anak yang Mlayah Berjaya dalam Daerah Kabupaten/Kota												41.000.000,-
2	08	04	2.02	0102	Pengaturan Kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Penyelenggaraan Kualitas Keluarga	Persentase pelayanan lembaga konseling keluarga yang responsive gender	Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang mendapatkan Pengaturan dan Pengembangan	Kab. Banjarnegara, seluruh kecamatan,	11,1 0% 11,1 0%		1 Lembaga		Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Jumlah lembaga penyedia layanan pelaksanaan pengaturan yang mendapatkan	1 Lem baga	21.000.000,-

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Teknis Sikar	Target	
					Koordinator Kabupaten/Kota	*Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan peningkatan kapasitas (IKSS)		Kualitas Keluarga dalam Menyediakan KIE dan Nilai Anak	semua lokasi						n peningkatan kapasitas		
2	0 6	0 1	2 0 2	n o t	Advokasi dan Pendidikan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kab/Kota	*persentase penanganan lembaga kesejahteraan keluarga yang mengakomodir gender *Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan peningkatan kapasitas (IKSS)	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan pendidikan pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang memberikan Pengasuhan dan Pengembangan Kualitas Keluarga dalam Menyediakan KIE dan Nilai Anak	Kab/ Kepanjen garis, alokasi kelurahan, semua kelurahan	100 %	-	1 Lembaga		Dana Transfer Umum/ Dana Bagian Umum	Jumlah lembaga penyedia layanan pendidikan pengembangan peningkatan kapasitas	1 Lembaga	17.000.000
2	0 6	0 8			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK												15.000.000

Kode					Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Riil/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Penghasilan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
2	08	03	2.02		**Penggumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Rangkaian Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**												
1	08	03	2.02	0005	Penyelenggaraan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase ketersediaan data terpilah gender di pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah data gender dan anak yang tersedia di masing-masing OPD	Kab. Bandung Barat, secara terkoordinasi, secara terintegrasi	100 %	-	24 OPD.	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketersediaan data gender di setiap OPD	24 OPD	12.000.000,-
2	08	03			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**								**156.383.400,-**				**188.000.000,-**
2	08	03	2.02		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**								**156.383.400,-**				**188.000.000,-**
1	08	03	2.02	011	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan perempuan korban kekerasan yang terlayani penanganan pengaduan, oleh petugas terlatih di unit layanan terpadu	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Jumlah perempuan korban kekerasan yang terlayani secara standar	Kab. Bandung Barat, Perangkat Kecamatan, Desa/ Kelurahan	100 %	12 Orang	12 Orang	156.383.400,-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan perempuan korban kekerasan yang memberikan pengaduan pengaduan oleh petugas terlatih di unit layanan terpadu	24	**188.000.000,-**

Kode					Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Jlh/ Vol	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Teknik Ukur	Tarif	
					Kewenangan Kabupaten/Kota			pemenuhan pemberian/ya									
2	08	01	2. 01	0001	Program Kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Penanganan Kasus Hukum Anak	Persentase Jenis Bantuan Hukum Anak	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Penanganan Kasus Hukum Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan Penanganan Kasus Hukum Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang terfasilitasi pendampingan	Kab. Hanyar mela-kukan kerjasama, antara lembaga	31,4 9%	-	1 Lembaga	-	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Kabupaten Lainnya	1 Lain nya	22.000.000
2	08	01			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**								137.830.000,-				167.000.000,-
2	08	01	2. 01		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Desadi Kabupaten/Kota**								-				22.000.000,-

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi (Output Kegiatan)	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
1	0 8	0 7	2. 0 1	0 0 0 0	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kebijakan terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH)	[Jumlah ABH yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program / kegiatan pencegahan di Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan kebijakan terhadap anak berkonflik dengan hukum/kota	Jumlah program kebijakan penyelenggaraan kebijakan terhadap anak.	Kab. Banjarnegara, semua kecamatan, semua kelurahan	100 %	-	-	20.000.000,-	Dana Transfer Umum, Dana Bokasi Umum	Persentase penanganan dan anak korban kekerasan menyasar Tersedia Pelayanan Pendampingan Orang (TPPO) yang melayani semua klasifikasi	100 %	22.000.000,-
2	0 8	0 7	2. 0 2		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Menjadi Kewenangan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								137.026.500,-				150.000.000

Kode					Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Capaian Program	Kinerja Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Kinerja Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
X	X X	X X	X . X X	X X X	Layanan Pengaduan atau Pengaduan bagi anak korban kekerasan ataupun keluarganya	Cakupan anak yang memperoleh pelayanan khusus yang membutuhkan, penanganan pengaduan dari penyalah tersedia di unit layanan tersedia	Layanan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Pengaduan Korban Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah anak yang memperoleh pendampingan khusus yang terlayani secara khusus	Kab. Banjarnegara, secara konsisten & efektif berkelanjutan	100 %	63 orang		137.500.000	Dana Transfer Umum Dana Bidang Cukai	Persentase pemenuhan dan anak korban kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang terlayani secara efektif	93 Dinas	145.000.000
X	X X	X X			**PROGRAM PENCEGAHAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**								42.000.000				42.000.000
X	X X	X X	X . X X		**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**								42.000.000				42.000.000

Kode						Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dinas/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tahun Tahun	Tanggal	
1	0 6	0 7	0 1	0 0 1	0 0 2	Pemberdayaan Tenaga Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	(50.000.000,-)	Jumlah Makam yang Dipanen/di Pemeliharaan pada Tahun Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Masyarakat Setempat yang terlibat	Jumlah lembar laporan pelaksanaan dan dokumentasi yang menunjukkan pemanenan dan pemeliharaan Jumlah, orang yang terlibat/ pada tahun dan akhir Tahun Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Belitung	100 %	1 TMP & Makam Data	1 TMP & Makam 100 orang	20.000.000,-	Dana Standar (Dana Fisik Alokasi Umum)	Pemeliharaan TMP dan Makam Pahlawan yang ingin/dapat dengan baik	1 TMP & Makam	21.000.000,-

Kode						Uraian / Nilai Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
1	08	03	2	1	0003	Pemberian Jaminan Sosial Bagi Fakir Miskin, Orang Tidak Mampu, Pelayanan Sosial Kabupaten/Kota		Pemberian Pelayanan Sosial dan Bantuan Sosial di Tempat Makam Pahlawan Nasional Kab/ Kota	Jumlah fasilitasi sarana prasarana dan kelengkapan yang memfasilitasi pemakaman dan pemberitahuan Jumlah orang yang terhadap pada makam dan situs Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/ Kota	Kab. Banjarnegara, semua kecamatan, semua kelurahan	100 %	100 orang	1 TSP dll. Masing-masing 100 orang	20.000.000.	Dana Transfer Umum-DAU Kinkan Umum	Jumlah orang yang terlayani pada makam dan situs di Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/ Kota	100 orang	21.000.000.
TOTAL														13.933.047.847				14.852.336.940

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINSOS PPPA

Program pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara merupakan program prioritas dalam Renstra 2025-2029. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Banjarnegara selanjutnya dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Pemilihan untuk masing-masing program/ kegiatan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinsos PPPA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Pagu Fisik	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	1.0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								12.932.097.547	
3	1.0	1.1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								8.303.841.000	
4	1.0	1.1	2.1 01		Penunjang, Pengelolaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								6.000.000,-	
5	1.0	1.1	2.1	1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Presentase perangkat wilayah pemerintah daerah kabupaten yang terlaksana	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Kab. Banyuwangi atau semua kecamatan , semua kelurahan	100 %	12 dokumen	30	2.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Bebas Umum
6	1.0	1.1	2.1	1.2	Penyusunan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (IKT)	Presentase perangkat wilayah pemerintah daerah kabupaten yang terlaksana	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (IKT) dan Laporan Hasil Koreksi Perangkat Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (IKT)	Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Kab. Banyuwangi atau semua kecamatan , semua kelurahan	100 %	10 laporan	30	2.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Bebas Umum
7	1.0	1.1	2.1 02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								4.027.022.727,-	

Kode					Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Penga nan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2	08	01	2.01.2	0001	Penyelenggaraan Dasar dan Tunjangan ASN	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah kabupaten yang terlaksana	Jumlah Orang yang Menerima Dasar dan Tunjangan ASN	Jumlah aparatur/aparat pemerintah yang terfasilitasi	Kab. Banjarnegara, Kota, wilayah kecamatan, , semua kelurahan	100 %	33 orang/bulan	100 %	4.264.202.717,-	Dana Transfer Umum/ Dana Alokasi Umum
4	08	01	2.01.2	0003	Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pelayanan/Verifikasi dan Rehabilitasi (BLPS)	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah kabupaten yang terlaksana	Jumlah Tersedianya Rehabilitasi/Rehabilitasi dan Pelayanan/Verifikasi Kewajiban BLPS	Jumlah administrasi/aparat pemerintah yang terfasilitasi	Kab. Banjarnegara, Kota, wilayah kecamatan, , semua kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	93.700.000,-	Dana Transfer Umum/ Dana Alokasi Umum
2	08	01	2.01		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								275.701.000,-	
2	08	01	2.01.2	0002	Penyelesaian Tindakan dan Pertanggungjawaban Bendahara	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah kabupaten yang terlaksana	Jumlah Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Bendahara yang Diverifikasi	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Banjarnegara, Kota, wilayah kecamatan, , semua kelurahan	100 %		100 %		Dana Transfer Umum/ Dana Alokasi Umum

Kode					Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2	06	01	2.06	0003	Penyediaan Sarana Logistik Pemilu	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten yang terlaksana	Jumlah Dokumen Sarana Logistik Pemilu yang Disediakan	Jumlah pelaksanaan administrasi perkantoran	Kab. Banjarnegara, semua kecamatan, semua kelurahan	100 %	15 Paket	100 %	270.141.000,-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	06	01	2.07		Pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								20.371.000,-	
4	06	01	2.07	0010	Pengelolaan Barang dan Pengamanan Barang Kantor pada Kantor Pengelola Layanan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten yang terlaksana	Jumlah Unit Barang dan Transaksi Barang Barang yang Pengelolaan Layanan yang Disediakan	Jumlah pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Banjarnegara, semua kecamatan, semua kelurahan	100 %	12 Unit	100 %	20.371.000,-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	06	01	2.08		Penyelenggaraan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								256.520.000,-	
2	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten yang terlaksana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum	Kab. Banjarnegara, semua kecamatan, semua kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	62.150.000,-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Penga	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegi-atan		
2	06	01	2.11.06	1.06.1.06.0001	Penyediaan Jasa Perkantoran Lainnya Kantor	Persentase penyelidikan tindak pidana kekerasan yang terlaksana	Jumlah Laporan Penyelidikan Jenis Pelanggaran Hukum Kantor yang Ditanganani	Jumlah penyelidikan dan (ekstensi) kantor	Kab. Banjarnegara, semua kecamatan, semua kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	143.970.800	Dana Transfer Umum: Dana Alokasi Umum
2	06	01	3.00		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								78.970.800	
2	06	01	2.11.07	1.06.1.06.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penyelidikan tindak pidana kekerasan di wilayah kabupaten yang terlaksana	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Digunakan dan Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	Kab. Banjarnegara, semua kecamatan, semua kelurahan	100 %	11 Unit	100 %	65.000.000	Dana Transfer Umum: Dana Alokasi Umum
2	06	01	2.11.09	1.06.1.06.0003	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penyelidikan tindak pidana kekerasan di wilayah kabupaten yang terlaksana	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung milik daerah yang terpelihara dengan baik	Kab. Banjarnegara, semua kecamatan, semua kelurahan	100 %		100 %		Dana Transfer Umum: Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi (Target Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	08	01	1.01	0 1 0 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Presentase penyelesaian rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara atau di rehabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara atau di rehabilitasi	Presentase barang milik daerah yang terawat	Kab. Banjarnegara, antar kecamatan, antara kabupaten	100 %	25 (unit)	100%	9.287.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	08	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL								1.031.873.100,-	
1	08	03	1.03		Pengelolaan Kesehatan dalam Gedung Kabupaten/Kota								-	
1	08	03	1.03	0 0 0 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemeliharaan dan Perlindungan Anak Terlantai dan Penyandang Tuna sosial Lainnya	Persentase Penduduk Miskin yang memperoleh Bantuan Sosial (PMKS) yang tepat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perlindungan Anak Terlantai dan Penyandang Cacat dan Tuna sosial Lainnya	Jumlah PMKS dan masyarakat umum yang memperoleh bantuan/ santunan pengentasan kemiskinan, ketelantaran dan bantuan akibat bencana dan bantuan lainnya	Kab. Banjarnegara, antar kecamatan, antara kabupaten	95,0 0%	-	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	08	03	1.03	0 0	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota								1.440.000.000,-	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	0 5	0 2	2 2 3	0 0 1 0	Peningkatan Kerjasama Pusat Sumber Kesejahteraan sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang dikoordinasikan Pembinaan dan bimtek guna peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial	Kab. Banjarnegara, semua kecamatan, semua kelurahan	70,0 4 %	13 Keluarga	403 Orang	417.130.000	Dana Transfer Umum/ Dana Alokasi Umum
1	0 5	0 2	2 2 3	0 0 1 4	Peningkatan Kerjasama Pusat Sumber kesejahteraan Sosial Kelembagaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang dikoordinasikan Pembinaan dan bimtek guna peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial	Kab. Banjarnegara, semua kecamatan, semua kelurahan	10,0 4 %	23 LKS Jiladora Dadha 40 PKSKS pada triwulan dari 5 LKS	403 Orang	320.000.000	Dana Transfer Umum/ Dana Alokasi Umum
1	0 5	0 2	2 2 3	0 0 1 4	Peningkatan Kerjasama Pusat Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	Jumlah Penyandang Sosial, Penyandu Sosial, Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat Ger./Karang Taruna Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya	Jumlah PSKS yang mendapatkan Pembinaan dan bimtek guna peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial	Kab. Banjarnegara, semua kecamatan, semua kelurahan	70,0 4 %	(1) penyandang sosial,2) pekerja sosial,317 PSM,20 TSM dan 0 KT	403 Orang	340.830.000	Dana Transfer Umum/ Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Data
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	08	04	2.03	0004	Pengelolaan Layanan Terpadu Kewajiban Sosial	Persentase Primer Sasaran Rehabilitasi Sosial (PSRS) yang aktif	Jumlah wilayah/terbatas yang dilayani dengannya (kondisi/kelayan)	Jumlah PSRS yang mendapatkan Pendampingan dan bantuan guna peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial	Kab. Banjarnegara, wilayah kerjanya/ wilayah terbatasan	71,0 4 %	Lil kegiatan	400 Orang	(0.830.000)...	Dana Transfer Umum/ Dana Khusus/ Lainnya
1	08	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL								1.994.200.000,-	
1	08	04	2.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Orbindangan Pengemis di Luar Panti Sosial								1.872.078.000,-	
1	08	04	2.03	0001	Penyaluran Pemasaran	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang memperoleh bantuan dalamnya di luar panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar dengan Standar Gizi Minimal Kemanusiaan Kabupaten/Kota	Jumlah penerima pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kab. Banjarnegara, wilayah kerjanya/ wilayah terbatasan	100 % 100 % 100 % 100 %	1169 Orang	1.165 orang	1.477.250.000,...	Dana Transfer Umum/ Dana Khusus/ Lainnya
1	08	04	2.03	0002	Penyediaan Bandang	Persentase penyandang disabilitas terlantar	Jumlah Orang yang Mendapat Pelayanan dan Rehabilitasi Lainnya yang Tersedia dalam	Jumlah penerima kebutuhan dasar bagi	Kab. Banjarnegara, wilayah	100 % 100 %	120 orang	1.161 ora ng	23.000.000,...	Dana Transfer Umum/ Dana

Kode					Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
						anak terlantar, lansia yang terlantar, dan gelandang pengemis yang terjaring kebutuhan dasarnya di luar panti	Tidak terlaksananya Kelompencil/Bina	Persentase Penyelesaian Terlantar/Anak Terlantar Luar Jam Tidak terlaksananya Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial	kecamatan , semua kelurahan	100 % 100 %				Alokasi Dana
1	0 1	0 4	2.0 1	0 0 4	Pemenuhan Alat Bantu	Pemenuhan pemberdayaan dan/atau rehabilitasi terhadap anak terlantar, anak terlantar, lansia yang terlantar, dan gelandangan pengemis yang terjaring kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah Orang yang Memanfaatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Fungsi Sosial kehidupan/ kemasyarakatan kab/panti/ kota Dewasa di luar panti	Jumlah penyandang kebutuhan dasar lagi Penyandang Disabilitas Terlantar/Anak Terlantar Luar Jam Tidak terlaksananya Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial	Kab Banjarnegara, semua kecamatan , semua kelurahan	100 % 100 % 100 % 100 %	60 orang	1.160 orang	265.754.000,-	Dana Transfer Umum/ Dana Alokasi Umum

Kode					Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	0.0.	0.4	2.0.1	0.0.0.4	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan Keluarga	Persentase pemenuhan kebutuhan anak terlantar, anak terluarnya, dan/atau anak terlantar, dan/atau anak terlantar, dan/atau penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten/Kota	Jumlah pemenuhan kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar dan/atau Terlantar Luar Jalur Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial	Kab. Banjarnegara, antar kecamatan, antara kelurahan	100 % 100 % 100 % 100 %	181 orang	1.180 orang	11.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	0.0.	0.4	2.0.1	0.0.0.5	Pemberian Bantuan Pada Gelandangan Pada Mental, Spiritual, dan Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar anak terluarnya, dan/atau anak terlantar, dan/atau penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah Pemberian Bantuan Pada Gelandangan Pada Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota Terlantar Disabilitas	Jumlah pemenuhan kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar dan/atau Terlantar Luar Jalur Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial	Kab. Banjarnegara, antar kecamatan, antara kelurahan	100 % 100 % 100 % 100 %	30 orang	1.180 orang	132.000.000,-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					
						Capaian Program	Rencana Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Rencana Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	0 5	0 4	2 0 1	0 0 0 8	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penerima Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Terwujudnya pelayanan disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandang pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penerima Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kabupaten/Kota.	Jumlah penerimaan bantuan dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar,Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar,serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial	Kab. Banjarnegara, antara kecamatan , antara kelurahan	100 % 100 % 100 % 100 %		1.000 orang		Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum
1	0 5	0 4	2 0 1	0 0 0 8	Pemberian Wawasan Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terwujudnya penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandang pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar,Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar,Anak Terlibat	Jumlah penerimaan pelayanan dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar,Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar,serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial	Kab. Banjarnegara, antara kecamatan , antara kelurahan	100 % 100 % 100 % 100 %	20 Orang	1.000 orang	4.746.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum

Kode					Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi (Target Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	0 6	0 4	2.0 1	0 0 1 0	Pelayanan Layanan Data dan Pengaduan	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandang pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah Orang yang Menyelenggarakan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandang pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Banjarnegara, semua kecamatan, semua kelurahan	100 % 100 % 100 % 100 %	13 orang	1.185 orang	2.082.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	0 6	0 4	2.0 1	0 0 1 0	Pelayanan Layanan Kedaruratan	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandang pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandang pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Banjarnegara, semua kecamatan, semua kelurahan	100 % 100 % 100 % 100 %	23 Orang	1.185 orang	(2.082.000)	Dana Transfer Umum/ Dana Alokasi Umum

Kode					Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					
						Capaian Program	Rincian Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Rincian Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	0 6	0 4	2.0 1	0 0 1	Rincian Pilanisasi Pembinaan Keluarga	Persentase pemberdaya (masyarakat terbatas oleh terbatas tersebut tersebut tersebut

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rincian Tahun 2026					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Target Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	0 6	0 4	2 0 1	0 1 6	Pemenuhan Hak Perempuan Berkualitas dan Anak Terlindungi	Prevalensi perempuan dan anak terlayani, terlindungi, dan diberdayakan	Jumlah Orang yang Terfasilitasi Keluarganya Mendapatkan Bimbingan Sosial Psikologis Terhadap Anak Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Tidak Terlantar, Lansia Terlantar, Orang dengan Kecacatan Fisik dan Mental	Jumlah perempuan korban dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan pemulihan	Dan, Dalam Lingkungan, semua kecamatan, semua kelurahan	100 %, 100 %, 100 %, 100 %	15 orang	1,183 orang	2.525.000.000	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum
1	0 6	0 4	2 0 1	0 1 7	Pemenuhan Perlindungan Kesehatan	Prevalensi perempuan, disabilitas, anak, anak terlantar, lansia tidak terlantar, lansia terlantar, dan gelandang pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah Orang yang Memenuhi Persyaratan Kebutuhan Perlindungan Kesehatan di Luar Panti Sosial	Jumlah penerima bantuan (kasus) bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, dan gelandangan pengemis	Dan, Dalam Lingkungan, semua kecamatan, semua kelurahan	100 %, 100 %, 100 %, 100 %	30 Orang	1,183 orang	1.100.000.000	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum

Kode					Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Jumlah Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Penga dam	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	0 6	0 4	2.0 1	0 0 1	Fasilitasi Pemberdayaan dan Perlindungan Ketahanan Ekonomi Perempuan, Pendidikan Miskin dan Rentan, Ketenagakerjaan dan Perlindungan	Persentase perempuan pekerja/buruh formal, pemilik usaha/pelaku usaha, serta pengelola program yang terfasilitasi pelatihan dan/atau pendampingan di luar panti	Jumlah Perempuan Pekerja/Buruh Formal, Pemilik Usaha/Pelaku Usaha, serta Pengelola yang memperoleh Fasilitasi pemberdayaan dan Perlindungan dari Pelatihan Vokasional untuk Kewirausahaan Ekonomi	Jumlah perempuan pekerja/buruh formal, pemilik usaha/pelaku usaha, serta pengelola program yang terfasilitasi pelatihan dan/atau pendampingan di luar panti	Kab. Banjarnegara, serta terlaksananya pelatihan	100 % 100 % 100 % 100 %		1.285 orang		Dana Transfer Umum-Dana Bagian Umum
1	0 6	0 4	6. 05		Subsidi/dan Sosial Perempuan Miskin Korban TPPO/ ADSH dan KAPSA di Luar Panti (PMKS)								82.131.000,-	
1	0 6	0 4	2.0 6	0 0 6	Pelayanan Lembaga Kesejahteraan	Persentase perempuan pekerja/buruh formal, pemilik usaha/pelaku usaha, serta pengelola program yang terfasilitasi pelatihan dan/atau pendampingan di luar panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesejahteraan Kemanusiaan Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan pekerja/buruh formal, pemilik usaha/pelaku usaha, serta pengelola program yang terfasilitasi pelatihan dan/atau pendampingan di luar panti (PMKS Lainnya Dalam Kantor PPT / ADSH dan KAPSA	Kab. Banjarnegara, serta terlaksananya pelatihan	100 % 100 % 100 % 100 %	10 Orang	100 orang	2.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagian Umum

Kode					Uraian / Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	06	04	2.0 2	0 0 2 3	Penyelaan Pemasyarakatan	Terwujudnya penyandang disabilitas terlayani, anak terlayani, lanjut usia terlayani, dan gelandang, pengemis serta terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemulasaran Jenazah dengan Standar Cost (Biaya) Kemanusiaan Kabupaten/Kota	Jumlah pemenuhan pelayanan kesejahteraan sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi ODGJ Lainnya Rekan Korban HIV / AIDS dan NAPZA	Kab. Gunung-ara, semua kecamatan - semua kelurahan	100 % 100 % 100 % 100 %	(3 Orang	100 orang	28.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum
1	06	04	2.0 2	0 0 2 7	Pemberian Bantuanan Duka, Mental Spiritual dan Sosial	Terwujudnya penyandang disabilitas terlayani anak terlayani, lanjut usia terlayani, dan gelandang pengemis serta terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah Peserta Bantuan Duka, Mental, Spiritual dan Sosial Kemanusiaan Kabupaten/Kota	Jumlah pemenuhan pelayanan kesejahteraan sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi ODGJ Lainnya Rekan Korban HIV / AIDS dan NAPZA	Kab. Gunung-ara, semua kecamatan - semua kelurahan	100 % 100 % 100 % 100 %	20 Orang	100 orang	24.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	08	04	2.02	0008	Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial terpadu Keluarga Pengasuhan Bermasalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Risiko Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandang pengemis yang memperoleh bantuan dasarnya di luar panti	Jumlah Penerima dalam Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial terpadu Keluarga Pengasuhan Bermasalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Risiko Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penerima pelayanan kesejahteraan sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS Lainnya Risiko Korban HIV / AIDS dan NAPZA	Kab. Banyuwangi, area, semua kecamatan, semua kelurahan	100 % 100 % 100 % 100 %	-	100 orang	-	Dana Transfer Umum-Dana Kinkom Umum
1	08	04	2.02	0011	Penyelenggaraan Pelayanan Pendukung Keluarga	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandang pengemis yang memperoleh bantuan dasarnya di luar panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Pendukung Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penerima pelayanan kesejahteraan sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS Lainnya Risiko Korban HIV / AIDS dan NAPZA	Kab. Banyuwangi, area, semua kecamatan, semua kelurahan	100 % 100 % 100 % 100 %	20 Orang	100 orang	0.746.500,	Dana Transfer Umum-Dana Kinkom Umum

Kode					Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	0 5	0 4	2 0 2	0 0 1 2	Perlindungan terhadap Perempuan dalam Keluarga	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandang pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Perlindungan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penerima pelayanan kesejahteraan sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS Lainnya Dalam Kurtas HIV / AIDS dan NAPZA	Kab. Banjarnegara, kec. wanayasa, kecamatan , wanaya kelurahan	100 % 100 % 100 % 100 %	20 Orang	100 orang	10.075.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	0 5	0 4	2 0 2	0 0 1 2	Pemberian Layanan Rujukan	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandang pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah Orang Mendapatkan layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penerima pelayanan kesejahteraan sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS Lainnya Dalam Kurtas HIV / AIDS dan NAPZA	Kab. Banjarnegara, kec. wanayasa, kecamatan , wanaya kelurahan	100 % 100 % 100 % 100 %	15 Orang	100 orang	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	06	05	05 02	0001	Ketersediaan Aktivitas Lembaga Sub kontraktor dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial	Persentase penyandang disabilitas terlayani, anak terlantar, dan gelandang pengemis yang terjaring kembali dalam lingkungan dasarnya di (per jenis)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama atau Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota(Dokumen 0%)(2021: 0% Target Minimal	Jumlah penerima/ pelayanan kesejahteraan sosial/ dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS (Lansia Rentan Korban HIV / AIDS dan NAPZA	Kab. Banjarnegara, kec. sesuai kecamatan , untuk beberapa	100 %, 100 % 100 % 100 %	-	100 orang	-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL								3.953.513.100,-	
1	06	05	05 02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								3.953.513.100,-	
1	06	05	05 02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Sasaran yang ditetapkan	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/kota yang Dicatat	Jumlah Dokumen Penyajian Fakir Miskin By Name By Address	Kab. Banjarnegara, kec. sesuai kecamatan , sesuai kelurahan	3 Dok	-	3 Dok	-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	0 1	0 1	2 0 2	0 1 0 6	Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Kabupaten/ Kota yang Responsif	Jumlah kebijakan/ Peraturan Perundang-undangan Pada Wilayah Pengarusutamaan Gender Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pada Wilayah Pengarusutamaan Gender Kabupaten/Kota	Kab. Banjarnegara, Kec. Wanayasa, Kec. Kalibening	0 Dok.	6 Dok.	1 Dok.	60.310.000,-	Dana Transfer Umum, Dana Bankeu Umum
1	0 1	0 1	2 0 2	0 1 0 6	Fasilitasi Rencana Aksi Kesejahteraan Keluarga	Cakupan kabupaten/ kota yang responsif	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencana Kesejahteraan Keluarga Pada Wilayah Pengarusutamaan Gender Kabupaten/Kota	Kab. Banjarnegara, Kec. Wanayasa, Kec. Kalibening	0 Dok.	2.000	1 Dok.	2.888.000.000,-	Dana Dekon/ Tugas Pembantuan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	0 6	0 2	2.0 1	0 0 0 1	Fasilitasi Pemrosesan Pengelolaan Dokumen Elektronik	Cakupan dokumen yang dimonitoring	Jumlah Orang Monitoring Pemrosesan Pengelolaan Dokumen Elektronik Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemrosesan Pengelolaan Dokumen Elektronik Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Banjarnegara, semua kecamatan, semua kelurahan	1 Dok	40 Orang	1 Dok	999.517.000,-	Dana Transfer Daerah, Dana Alokasi Umum
1	0 6	0 6			**PROGRAM PENANGGARAN BENCANA**								**230.000.000,-**	
1	0 6	0 6	2. 01		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**								**170.000.000,-**	
1	0 6	0 6	2.0 1	0 0 0 1	Penyediaan Makanan	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemakaman (x) Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan sosial korban bencana alam dan sosial) kabupaten/kota	Kab. Banjarnegara, semua kecamatan, semua kelurahan	100 %)	40) Orang	450 (Hari)	60.000.000,-	Dana Transfer Daerah, Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	06	06	2.01	0002	Penyelesaian Sengketa	Penyelesaian korban bencana alam dan bantuan yang terprovinsi terhadinya dapatnya pada saat dan setelah terjadinya bencana	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan dan Bantuan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang memdapatkan pelayanan dan bantuan korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	Kab. Banjarnegara, semua kecamatan, semua kelurahan	100 %	450 Orang	450 Orang	60.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum
1	06	06	2.01	0002	Penanganan Korban Bencana Sosial	Penanganan korban bencana alam dan sosial yang terprovinsi terhadinya dapatnya pada saat dan setelah terjadinya bencana	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mendapatkan penanganan dan bantuan korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	Kab. Banjarnegara, semua kecamatan, semua kelurahan	100 %	120 Orang	450 Orang	10.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum
1	06	06	2.01	0003	Pelayanan Dukungan Pelayanan	Penanganan korban bencana alam dan sosial yang terprovinsi terhadinya dapatnya pada saat dan setelah terjadinya	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Pelayanan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan dan bantuan korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	Kab. Banjarnegara, semua kecamatan, semua kelurahan	100 %	-	450 Orang	-	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum

Kode					Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
						Nomor Tercatat								
1	06	06	2.01	0001	Penyelenggaraan Tanggap Perseduluran Pengungsi	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Jumlah Tempat Pengungsian Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan hak korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	Kab. Banjarnegara, semua kecamatan, semua kelurahan	100 %	-	400 Orang	-	Dana Tropasby Untuk Dana Alokasi Umum
1	06	06	2.02		**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**								30.000.000	
1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pembentukan Kampung Siaga Bencana	Prosentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pembentukan Kampung Siaga Bencana Kabupaten/Kota	jaringan desa rawan bencana yang terpantau kampung siaga bencana dan alat lainnya	Kab. Banjarnegara, semua kecamatan, semua kelurahan	100 %	-	100 %	-	Dana Tropasby Untuk Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Dengan Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
						Persen Kinerja								
1	0 1	0 1	2.0 1	1 0 1 5	Pemberdayaan, Pelindungan dan Pengendalian Jumlah Penduduk, Keluarga Berencana	Persentase korban kekerasan yang dan anak yang mendapatkan penanganan pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemberdayaan, Pelindungan dan Pengendalian Penduduk Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jaringan dan kerja sama yang terbentuk dalam rangka pemberdayaan, pelindungan dan pengendalian penduduk	Seluruh Kecamatan dan Kelurahan	100 %	41 Orang	100 %	40.000.000,-	Dana Transfer Umum/ Dana Bidang Umum
2					URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	0 8				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
2	0 8	0 3			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN								140.000.000,-	
2	0 8	0 3	2. 01		Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota								60.000.000,-	

Kode					Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
3	08	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Persentase Implementasi Program Pengarusutamaan Gender (PPRG) pada Kabupaten Banjarnegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah (SPT) yang terkoordinasi PPRG	Kab. Banjarnegara - wilayah kecamatan - wilayah kelurahan	100 %	1 Dokumen	44 (SPT)	(1.000.000)	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum
3	08	03	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase Implementasi Program Pengarusutamaan Gender (PPRG) pada Kabupaten Banjarnegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah (SPT) yang terkoordinasi PPRG	Kab. Banjarnegara - wilayah kecamatan - wilayah kelurahan	100 %	-	44 (SPT)	-	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum
3	08	03	3.02		**Pendorongan Pemajuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**								50.000.000	
3	08	03	2.03	0004	Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Persentase Implementasi Program Pengarusutamaan Gender (PPRG) pada Kabupaten Banjarnegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peningkatan yang terjadi pasca Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Bidang Politik, Hukum, Sosial	Kab. Banjarnegara - wilayah kecamatan - wilayah kelurahan	100 %	1 Dokumen	25 orang	30.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
								dan Kinerjanya						
3	09	04			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**								140.000.000.-	
3	09	04	3.09		**Pengaturan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KU dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**								70.000.000.-	
3	09	04	3.09	0001	Pengaturan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pelayanan lembaga konsultasi keluarga yang mengelola gender *Persentase desa/kelurah an yang mendapatkan pembinaan kapasitas (100)	Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang mendapatkan Pengaturan dan Pengembangan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KU dan Hak Anak	Kab. Banjarnegara, semua kecamatan, semua kelurahan	11,7 6% 52,3 9%		1 Lembaga		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	09	04	3.09	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah	*Persentase pelayanan lembaga konsultasi keluarga yang mengelola gender *Persentase desa/kelurah	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang memfasilitasi Advokasi dan Pendampingan	Jumlah Lembaga yang memfasilitasi Pengaturan dan Pengembangan Kualitas Keluarga	Kab. Banjarnegara, semua kecamatan, semua kelurahan	11,7 6% 52,3 9%		1 Lembaga		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
					Kabupaten/Kota	ini yang mendukung pencapaian tujuannya (SPM		Dalam Meningkatkan ibu dan Data Anak						
2	0	0			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**								-	
2	0	0	2. 01		**Penyusunan, Pengelolaan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kabupaten Dalam di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								-	
2	0	0	2.0 1	0 0 0	Penyediaan Data Gender dan Anak di kabupaten/ kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan data terpilah gender di perangkat daerah	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah data gender dan anak yang tersedia di masing-masing OPD	Kab. Badung, semua kecamatan , semua kelurahan	100 %	-	01 Dok	-	Data Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	0	0			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**								**(36.383.400)**	
2	0	0	2. 02		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Kewenangan Kabupaten/Kota**								**(36.383.400)**	
2	0	0	2.0 2.	0 1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kabupaten/Kota	Cakupan penanganan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan dari	Jumlah Penanganan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan.	Jumlah penanganan korban kekerasan yang melapor secara	Kab. Badung ada Rumah Konsultasi, Balai Kelurahan	100 %	12Orang	12 Orang	36.383.400,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
						persiapan lembaga LPA di up di sekolah								
3	06	04			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)								126.000.000,-	
3	06	04	3.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota								75.000.000,-	APBD
3	06	04	3.01	0004	Meningkatnya Tinkat Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Persentase Desa dan Kelurahan Layak Anak	Jumlah SDM (OPD kota/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pelembagaan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha, yang menyelenggarakan edukasi dan sosialisasi Pelembagaan PHA	Kab. Banjarnegara, sosialisasi ... wilayah kelurahan	34,8 0%	-	-	-	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum
3	06	04	3.02		Pengadaan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota								50.000.000,-	
3	06	04	3.02	0004	Terselenggara Pengadaan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Desa dan Kelurahan Layak Anak	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak kewenangan kabupaten/kota yang mendapatkan pendampingan	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	Kab. Banjarnegara, sosialisasi ... wilayah kelurahan	34,8 0%	1 Lembaga	1 Lembaga	50.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum

Kode					Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	0 8	0 6	2.0 2.	0 0 0 6	Penyediaan Kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Persentase Data dan Informasi Layak Anak	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti perjanjian kerjasama	Kab. Banjarnegara, semua kecamatan, semua kelurahan	35,8 9%	-	1 Lembaga	-	Desa Transfer Daerah Dana Alokasi Umum
2	0 8	0 7			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK								121.536.000,-	
3	0 8	0 7	2. 01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota								-	
3	0 8	0 7	2.0 1	0 0 0 6	Koordinasi dan Kerjasama Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang perlindungan, edukasi dan Pendampingan, Admin perkembangan terupdate /pengaduan/ sosialisasi pencegahan ATS	jumlah dokumen hasil koordinasi dan kerjasama pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah peserta Terselesaikannya kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak.	Kab. Banjarnegara, semua kecamatan, semua kelurahan	310 %	1 Dok	120 Orang	-	Desa Transfer Daerah Dana Alokasi Umum
3	0 8	0 7	2. 02		Pencegahan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mencakup Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								117.536.000,-	

Kode					Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2	06	07	2.07	0008	Layanan Pengaduan atau Penyelenggaraan Bagi anak korban kekerasan (tingkat kab/kota	Cakupan anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan pelayanan pengaduan, pengaduan dan pelayanan terhadap di unit layanan terpadu	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penyelenggaraan kasus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus yang terlayani secara maksi maksimal	Kab. Banjarnegara, semua kecamatan, semua kelurahan	100 %	40 orang	100 %	330.330.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN								40.000.000	
1	06	07	2.07.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota								40.000.000	
1	06	07	2.07.1	0008	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ kota	Pemeliharaan taman makam pahlawan dan monumen yang terpelihara dengan ba	Jumlah Makam yang Terpelihara di Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota Jumlah Monumen terpelihara yang terawat	Jumlah taman makam pahlawan dan monumen yang terpelihara dan pemeliharaan /terawat orang yang terlayani pada untuk dan anak Taman Makam Pahlawan	Kab. Banjarnegara, semua kecamatan, semua kelurahan	100 %	1 TMP & Monumen	1 TMP & Monumen 150 orang	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
								Nasional/ Kab/ Kota						
1	06	07	2.21	0103	Pemberian Pelayanan Rumah dan Shelter di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Prosentase upaya makam pahlawan dan pemakam yang terpelihara dengan ba	Pemberian Pelayanan Rumah dan Shelter di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah taman makam pahlawan dan pemakam yang mendapatkan pemeliharaan dan pemeliharaan rumah yang yang terjaga pada rumah dan shelter Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/ Kota	Kab. Banjarnegara, wisma kesenian, wisma kehutanan	100 %	150 orang	1 TMP 3 Rumah 150 orang	20.000.000,-	Dana Transfer Daerah-Dana Alokasi Umum
												TOTAL	12.922.947.947,-	

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinsos PPPA Tahun 2026 merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Dinsos PPPA Tahun 2025-2029. Renja Dinsos PPPA selanjutnya menjadi platform operasional bagi Dinsos PPPA dalam menjalankan programnya dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah tahun2026. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinsos PPPA setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026 dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disepakati.
2. Kerangka pendanaan dalam Renja Dinsos PPPA masih bersifat sementara, sehingga masih dimungkinkan terjadi perubahan pagu yang disebabkan oleh pengurangan, penambahan, dan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan maupun antar sub kegiatan dalam kerangka penyusunan anggaran secara terpadu dan berbasis kinerja.
3. Renja Dinsos PPPA menjadi acuan bagi Kepala Dinsos PPPA dan segenap jajarannya serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, serta menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Banjarnegara, Agustus 2025

KEPALA DINSOS PPPA

KABUPATEN BANJARNEGARA

PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA DINSOS PPPA

ADITYA AGUS SATRIA, M.Ec.Dev,MA,AK, CA

Pembina Tk.I/IVb

NIP. 19800903 200501 1 008

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya sehingga Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 telah dapat diselesaikan penyusunannya. Rencana Kerja (Renja) DPKPLH Tahun 2026 mempunyai arti strategis karena didalamnya memuat uraian program dan kegiatan yang dirumuskan berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis diharapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Rencana kerja DPKPLH Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang harus dibuat oleh DPKPLH sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang RI No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Mentri Dalam Negri No. 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancanmgan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pmbangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 89 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penyusun renja tahun 2026 adalah sebagai dokumen perencanaan dan bahan usulan kegiatan yang akan dibahas pada forum OPD dan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026. Hasil dari Musrenbang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026. Hal ini merupakan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daaerah (PD) Kabupaten Banjarnegara tahun 2026. Dengan adanya Renja ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan DPKPLH Kabupaten Banjarnegara agar lebih terarah, tempat sasaran dan tempat waktu.

Berhasil dan tidaknya target yang telah ditentukan dalam Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup tidak terlepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk

peran serta masyarakat. Renja yang telah disusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2026 untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Selain itu juga dapat berguna bagi peningkatan kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup.

Banjarnegara, 10 Agustus 2025

KEPALA DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANJARNEGARA

HERRINA INDRIASTUTI, S.Pt.,M.Si
NIP. 19720130 200312 2 004

DAFTAR ISI

COVER i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 5
1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 27
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ... 30
2.4 Review Terhadap RKPD 32
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 54
2.6 Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 56

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 61
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 61
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 62
3.3 Program dan Kegiatan 63

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 79
4.1 Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 79
4.2 Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 80
4.3 Urusan Pemerintah Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.. 82

BAB V PENUTUP 85

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 11
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan DPKPLH 26
Tabel 2.3 Review terhadap RKPD Tahun 2024 32
Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari DPRD 53
Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan Pemangku Kepentingan 58
Table 3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan DPKPLH 67

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan Ranwal Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan pembentukan tim penyusun, penelaahan RKPD, pelaksanaan forum perangkat daerah/ lintas perangkat daerah, hingga pada penyempurnaan berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang RKPD. Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, penyusunan Renja Perangkat Daerah juga mengacu pada Renja Kementerian/Lembaga terkait, serta Renja Perangkat Daerah Provinsi terkait. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan

pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2. Landasan Hukum

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang–Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi

Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
21. Peraturan Bupati Banjarnegara No 14 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan inerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
24. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 79 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara;
25. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 14);
26. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 15);
27. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2024 tanggal 5 Juli 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.
28. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun ……..

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun dengan maksud untuk :

a. Menjabarkan RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 ke dalam rencana program kegiatan prioritas Tahun 2026 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Renja K/L Tahun 2026 dan Renja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;
b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerapan anggaran berbasis kinerja.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

a. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA-DPA dalam Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2026, yang dalam penyusunannya didahului dengan menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026;
b. Sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Tahun 2026;
c. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun berdasarkan sistematika yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah.

BAB 2 : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan review terhadap RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dan atau pokok-pokok DPRD.

BAB 3 : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan tahun 2026.

BAB 4 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran RKPD.

BAB 5 : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DPKPLH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPKPLH Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah meliputi urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 terdiri dari 13 program, 17 kegiatan, dan 35 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 36.670.581.174 sesuai dengan pagu rencana anggaran dari Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara. Fokus utama pada mewujudkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar meliputi infrsatruktur sarana air bersih dan limbah, pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), pengelolaan persampahan dan lingkungan hidup. Program/ kegiatan/ sub kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah yang meliputi :

1. Masih rendahnya rumah tinggal yang dilengkapi dengan sanitasi
2. Masih terdapat daerah yang kekurangan air bersih di Kabupaten Banjarnegara
3. Terjadinya gerakan tanah yang berpotensi longsor di wilayah Kabupaten Banjarnegara;
4. Masih tingginya rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Banjarnegara;
5. Masih terdapat kawasan kumuh perkotaan kurang dari 10 ha di Kabupaten Banjarnegara yang belum tertangani;
6. Belum tuntasnya penyediaan rumah bagi korban bencana;
7. Penyerahan aset PSU perumahan dari pengembang kepada pemerintah yang belum optimal;

8. Meningkatnya kerusakan lahan yang mengakibatkan bertambahnya lahan kritis;
9. Belum optimalnya penegakan hukum terhadap pelaku perusakan lingkungan;
10. Meningkatnya jumlah timbulan sampah seiring dengan laju pertumbuhan penduduk;
11. Penerapan 3 R (Reduce, Reuse, Recycle) Limbah domestik belum menyeluruh dan memasyarakat;
12. Belum optimalnya pengelolaan sampah di TPA.

Dari 15 program, 26 kegiatan, dan 49 sub kegiatan yang dalam Renja Perangkat Daerah tersebut, program/kegiatan/sub kegiatan yang disetujui untuk dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024 terdiri dari 15 program, 21 kegiatan, dan 36 sub kegiatan dengan total rencana anggaran sebesar Rp 46.437.718.032.

Dinamika yang terjadi selama tahun 2024 turut mempengaruhi keberhasilan pencapaian Renja Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2024 tercatat adanya hasil yang memenuhi target dan tidak memenuhi target.

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi :

1. Keterlambatan Pengesahan perubahan/ pergeseran anggaran sehingga tidak cukup waktu untuk pelaksanaan kegiatan
2. Kurangnya ketepatan penyusunan dokumen KLHS RPJMD
3. Belum semua pembebasan lahan untuk penggantian relokasi korban bencana terlaksana dikarenakan proses appraisal yang rumit
4. Belum optimalnya pengelolaan sampah di TPA dan TPS 3R

b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi:

1. Program Pengelolaan dan Pengembangan sistem penyediaan air minum (SPM)
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan sistem air limbah (SPM)

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Kawasan Permukiman
5. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
6. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
7. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
8. Progran Pengendalian Pencemaran dan / atau Kerusakan lingkungan hidup
9. Program Pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)
10. Program Peningkatan Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/ kota
11. Program Penghargaan Lingkungan hidup untuk masyarakat, Kegiatan Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten / kota

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakcapaian tersebut antara lain adalah:
    1. Penyusunan dokumen KLHS RPJMD tidak tepat waktu
    2. Kurangnya perencanaan waktu dalam proses pembebasan lahan untuk relokasi
    3. Meningkatnya volume sampah plastik baik yang dihasilkan oleh rumah tangga maupun bukan dan belum adanya inovasi pengolahan menjadi nilai tambah
    4. Belum optimalnya ketersediaan data korban bencana

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka diperlukan berbaikan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan pada tahun perencanaan selanjutnya, perlu diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran khusunya untuk program SPM dan program diluar SPM, diantaranya:

1. Alokasi pendanaan untuk penyusunan dokumen data dukung SPAM dan sanitasi menjadi satu data (SPM)
2. Perlunya percepatan pendataan rumah korban bencana baik yang sudah tertangani maupun belum (SPM)

3. Relokasi wilayah rawan bencana, sehingga perlu dianggarkan anggaran pada tahun 2026 (SPM)
4. Pengadaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah yang memiliki nilai tambah
5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dari berbagai aspek yang ada pada kegiatan di lingkungan hidup

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan akhir Tahun 2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
s.d. Tahun 2024 TW IV Kabupaten Banjarnegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**		-					-	-	-
1.03	**Pekerjaan Umum & Penataan Ruang**									
1.03.03	**Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**									
1.03.03.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**									
1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok		

		yang disusun								
1.03.03.2.01.0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	100 Orang	100 orang	100 orang	100 orang	100%	100 Orang		
1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	18,5 Liter/detik	18,5 liter/detik	28,5 liter/detik	18,5 liter/detik	64,91%	19,5 Liter/detik		
1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	27 Liter / detik	27 liter/detik	32,46 Liter/detik	27	83,18%	30 Liter / detik		
1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	20 Unit	20 Unit	10 Unit	20 unit	200%	20 Unit		
1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.200 SR	1.860 SR	1.000 SR	1.860 SR	186%	1.200 SR		
1.03.05	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah**									

1.03.05.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**									
1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	7,5 MÂ³/Hari	7,2 MÂ³/Hari	5 MÂ³/Hari	7,2 MÂ³/Hari	144%	7,5 MÂ³/Hari		
1.03.05.2.01.0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	100 Orang	80 orang	50 orang	80 orang	160%	100 orang		
1.04.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**									
1.04.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**									
1-04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	7 Dok	7 Dok	7 Dok	7 Dok	100%	7 Dok		
1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100%	6 Laporan		

1.04.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**									
1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100 oraang / bulan	125 orang / bulan	125 orang / bulan	125 orang / bulan	100%	100 oraang / bulan		
1.04.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifi-kasi Keuangan SKPD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok		
1.04.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**									
1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket		
1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah peket bahan logistik kantor yang disediakan	13 Paket	13 Paket	13 Paket	13 Paket	100%	13 Paket		
1.04.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**									
1.04.01.2.08.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	22 Unit	22 Unit	22 Unit	22 Unit	100%	22 Unit		
1.04.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**									
1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan		

		dan listrik yang disediakan								
1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	25 Laporan	25 Laporan	25 Laporan	25 Laporan	100%	25 Laporan		
1.04.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**									
1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	23 Unit	23 Unit	23 Unit	23 Unit	100%	23 Unit		
1.04.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunnya yang dipelihara / direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit		
1.04.02	**Program Pengembangan Perumahan**									
1-04.02.2.01	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**									
1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok		
1-04.02.2.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana	-		-			-		

		Kabupaten / Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani								
1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	umlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-			-		-		
1.04.02.2.02	**Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**									
1.04.02.2.02.0010	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	-			-		-		
1.04.02.2.03	**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**									
1.04.02.2.03.0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	41 Unit Rumah	62 Unit	40 Unit Rumah	65 Unit Rumah	155%	65 Unit Rumah		
1.04.02.2.06	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**									
1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian	-		-			-		

		pembangunan dan pengembangan perumahan								
1.04.03	**Program Kawasan Permukiman**									
1.04.03.2.01	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**									
1.04.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	-		-			-		
1-04.03.2.02	**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**									
1-04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review /Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Tereview/Terlegalisasi	-		-			-		
1.04.03.2.03	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**									
1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	3.000 Unit Rumah	1914 unit	2.500 Unit Rumah	1914 unit	76,56%	3.000 Unit Rumah		
1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah laporan hasil kordinasi dan sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh	-		-			-		
1-04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi	Jumlah dokumen	-		-			-		

	Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	data permukiman kumuh yang terverifikasi								
1.04.03.2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	30 Ha	28,9 Ha	27 Ha	28,59 Ha	106%	2 Ha		
1-04.04	**Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh**									
1-04.04.2.01	**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**									
1-04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha yang diperbaiki	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 unit	100%	5 Unit		
1-04.05	**Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)**									
1-04.05.2.01	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**									
1-04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	10 Lokasi	12 Lokasi	10 Lokasi	12 lokasi	100%	5 Lokasi		

1-04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan	-		-			-		
1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 laporan	100%	2 Lap		
1-04.06	**Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman**									
1-04.06.2.01	**Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil**									
1-04.06.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikasi dan registrasi penegmbang perumahan dengan kualifikasi kecil	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 laporan	100%	1 Lap		
	PROGRAM PENATAGUNAAN									

	TANAH									
	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota									
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Lap	-	-	-	-	1 Lap		
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN									
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/ Kota									
	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) kabupaten/ kota	1 Berita Acara	-	-	-	-	1 Berita Acara		
2.11.02	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**									
2.11.02.2.01	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**									
2.11.02.2.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen telaahan kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH Kabupaten / Kota	-		-			-		
2.11.02.2.01.0006	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota	-		-			-		

		yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi								
2.11.02.2.02	**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten /Kota**									
2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok		
2.11.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**									
2.11.03.2.01	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**									
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok		
2.11.03	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**									
2.11.04.2.01	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**									
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang dikelola lingkup	5,7 Ha	9,6 Ha	7 Ha	9,6 Ha	100%	5,7 Ha		

		kewenangan Kabupaten / Kota								
2.11.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**									
2.11.06.2.01	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**									
2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	5 Dok	15 Dok	20 Dok	15 Dok	75%	5 Dok		
	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundnag-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	20 Badan Usaha	-	-	-	-	20 Badan Usaha		
2.11.08	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**									
2.11.08.2.01	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan**									

	Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok		
2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	18 Lembaga	18 Lembaga	18 Lembaga	18 lembaga	100%	10 Lembaga	-	
2.11.09	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**									
2.11.09.2.01	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**									
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah masyarakat / lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan / filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	22 Entitas	18 Entitas	18 Entitas	18 Entitas	100%	22 Entitas		

2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**									
2.11.11.2.01	**Pengelolaan Sampah**									
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	20 Kelompok	20 Kelompok	20 Kelompok	10 Kelompok	50%	20 Kelompok		
2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	-	1 Dok	1 Dok	1 dok	100%	-		
2.11.11.2.01.0018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 lap	100%	1 Lap		

		sampah melalui pembatasan timbulan sampah								
2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	20.000 Ton	7200	7200 Ton	6720 ton	93,33%	20.000 Ton		
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	4 Unit	-	-	-	-	4 Unit		

NB : Untuk sub kegiatan yang tidak terdapat target kinerja dikarenakan tidak terdapat anggaran pada Tahun 2026

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan pelayanannya, Perangkat Daerah mengampu 35 Indikator. Dari 35 indikator tersebut, 30 berstatus tercapai dan 5 indikator berstatus tidak tercapai. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidak tercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Belum adanya perencanaan dan pelaksanaan penyusunan dokumen data dukung SPM (SPAM, Sanitasi, Relokasi Bencana)
2. Sumber air baku mengalami penyusutan debit air bahkan sebagian kering sehingga mempengaruhi kapasitas produksi/layanan
3. Belum digantinya lahan kas desa yang dipakai sebagai relokasi bencana
4. Penyusunan dokumen KLHS tidak selesai tepat sesuai perencanaan
5. Meningkatnya volume sampah plastik dan pengurangan sampah dari sumbernya belum optimal

Dalam rangka mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut, telah dilakukan upaya-upaya yang meliputi:

1. Melakukan evaluasi mengenai program yang akan dilanjutkan di tahun berikutnya
2. Membagi pagu anggaran sesuai dengan kebutuhan kegiatan berdasarkan urutan prioritas
3. Memenuhi ketersediaan air bersih dan sanitasi secara menyeluruh
4. Penyelesaian penggantian tanah kas desa yang digunakan untuk relokasi korban bencana
5. Mengoptimalkan pengolahan kembali / daur ulang sampah plastik sehingga tidak mengandalkan metode open dumping di TPA

Kinerja pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Kunci Pelayanan DPKPLH

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK LPPD	Target Renstra Perangkat Daerah						Capaian Kinerja Periode 2024
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase penduduk berakses air minum	SPM	IKK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96,86%
2	Persentase kepala keluarga terlayani pengelolaan air limbah	SPM	IKK	77,25	77,50	77,75	80	80,25	80,50	77,23%
3	Persentase penanganan Rumah Korban Bencana	SPM	IKK	20%	20%	30%	50%	50%	50%	15%
4	Persentase ketersediaan rumah layak huni		IKK	89,15%	89,25%	89,5%	89,75%	90%	90%	89,07%
5	Persentase penataan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha		IKK	16,5%	18,75%	37,6%	59,5%	81,3%	81,3%	15%
6	Persentase perbaikan rumah layak huni di luar kawasan permukiman kumuh		IKK	25%	30%	35%	40%	45%	45%	20%
7	Persentase lingkungan aman dan sehat yang didukung PSU		IKK	20%	20%	30%	40%	50%	50%	20%
8	Persentase urusan pertanahan yang terlayani		IKK	-	25%	30%	35%	40%	40%	-
9	IKLH		IKK	70,05	75,95	75,99	76,03	76,08	76,08	65,76
10	Indeks Kalitas Air		IKK	58,75	73,18	73,28	73,38	73,48	73,48	51,24
11	Indeks Kalitas Udara		IKK	92	86,28	86,29	86,32	86,31	86,31	92
12	Indeks Kalitas Tutupan Lahan		IKK	60,15	61,59	61,6	61,61	61,62	61,62	41,18
13	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tervalidasi		IKK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

14	Persentase Luasan RTH yang tertangani		IKK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	Persentase ketaatan terhadap izin lingkungan hidup yang dikeluarkan		IKK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	Persentase jumlah aduan lingkungan yang ditangani		IKK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
17	Persentase jumlah sampah yang tertangani		IKK	73%	73%	73,65%	74,25%	75%	75%	73,23%
18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat		IKK	81	82	83	83,5	84	84	80,03
19	Nilai AKIP		IKK	72,75	73,25	73,50	74	74,10	74,10	72,23

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan urusan pemerintahan dalam 2 urusan, yaitu Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib bukan Pelayanan Dasar yang meliputi Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Bidang Perumahan dan Permukiman serta Urusan Bidang Lingkungan Hidup. Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2025-2029, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk tahun 2024 mencakup 3 urusan dengan bidang urusan meliputi Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Bidang Perumahan dan Permukiman serta Urusan Bidang Lingkungan Hidup tersebut. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah diantaranya adalah:

1. Masih tingginya RTLH di Kabupaten Banjarnegara dimana ada penambahan rumah tidak layak huni setiap tahunnya
2. Masih terdapatnya kawasan kumuh di Kabupaten Banjarnegara, yaitu seluas 34,817 ha;
3. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar (air bersih dan sanitasi);
4. Penurunan Sumber Daya Manusia dan infrastruktur, Konflik kawasan hutan, Keanekaragaman hayati , Penurunan Kualitas Lingkungan dan daya dukung lingkungan terutama ditandai oleh: terjadinya banjir dan gerakan tanah yang berpotensi longsor, meluasnya jumlah lahan kritis, degradasi tingkat kesuburan tanah, kerusakan lahan akibat cara budidaya yang salah, bertambahnya jumlah industri yang berpotensi menghasilkan limbah, menurunnya keanekaragaman hayati akibat alih fungsi lahan, menurunnya kualitas air, meningkatnya jumlah timbulan sampah akibat pertumbuhan penduduk, rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah serta masih rendahnya budaya dan kepedulian terhadap lingkungan.
5. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yaitu peningkatan Perizinan dan pengawasan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup , peningkatan peralatan pengukuran dan pemantauan kualitas

lingkungan (air, udara, tanah dan vegetasi) serta peningkatan kualitas lingkungan dan pelestarian keanekaragaman hayati.

6. Tingkat Kesadaran Masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat (tidak memiliki akses sanitasi dan air minum / air bersih yang berstandar kesehatan)
7. Perlu Kerjasama Lintas sektor dan lintas program dalam pelaksanaan program pembangunan infrastruktur, RTLH dan Air minum, sanitasi, pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan
8. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat pentingnya lingkungan yang bersih bebas polusi, udara, air dan bagaimanamembuang sampah pada tempatnya dan bagaimana mengelola sampah dengan baik dan benar
9. Perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat maupun pihak terkait dalam mengaplikasikan petunjuk teknis dan pedoman pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya tahun selanjutnya
10. Belum optimalnya pengelolaan sampah melalui TPS 3R

Permasalahan tersebut, jika tidak diselesaikan dapat menjadi *constraint* dalam pencapaian visi dan misi Bupati maupun capaian indikator lainnya. Beberapa dampak dari adanya permasalahan dan hambatan tersebut meliputi:

1. Tidak berkurangnya RTLH, dan akan smakin bertambah
2. Menurunnya tingkat kesehatan akibat minimnya air minum/ air bersih dan akses sanitasi yang tidak memadai sesuai standar kesehatan
3. Tidak berkurangnya wilayah permukiman kumuh, dan akan smakin bertambah luas wilayah perkumuhan
4. Pencemaran kualitas air, tanah dan udara smakin meningkat
5. Berkurangnya pengawasan terhadap kajian Lingkungan Hidup
6. Penanganan sampah menjadi tidak optimal

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi, peningkatan kualitas birokrasi, dan meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan pengguna layanan akan meningkatkan kebutuhan akan adanya penyediaan produk layanan yang semakin baik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi-inovasi dalam menunjang peningkatan pelayanan

publik secara kontinyu. Beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, yaitu:

1. Perlu adanya sosialisasi dan pembinaan inovasi baru khususnya penggunaan teknologi digital pada perangkat daerah terkait untuk menunjang percepatan pengolahan data
2. Banyaknya inovasi inovasi dari masyarakat terkait sampah rumah tangga yang masih dapat dimanfaatkan , bisa menjadi kerajinan berupa sampah daur ulang hingga bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar,

Berdasarkan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan tersebut, dapat diinventarisasi beberapa isu strategis. Inventarisasi isu-isu strategis tahun 2025 didapatkan dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sampai dengan tahun 2024. Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan pembangunan. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2024, sebagai berikut:

1. Masih tingginya RTLH di Kabupaten Banjarnegara, yaitu sebesar 30.832 unit;
2. Masih terdapatnya kawasan kumuh perkotaan di Kabupaten Banjarnegara, yaitu seluas 34,82 ha;
3. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar (air bersih dan sanitasi);
4. Penurunan Sumber Daya Manusia dan infrastruktur
5. Perlu adanya Kajian Lingkungan Hidup Strategis
6. Produksi sampah yang selalu meningkat dan belum terdapat solusi untuk menanganinya

2.4 Review Terhadap RPJMD

Renja Tahun 2026 merupakan Renja peralihan masa transisi dari pelaksanaan RPD Tahun 2023-2026 dan tahun pertama periode RPJMD Tahun 2025-2029. Dalam RPJMD Tahun 2025-2029, prioritas arah kebijakan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2026 meliputi:

1) Peningkatan akses masyarakat pada layanan dasar yang

berkualitas

2) Pengembangan sektor unggulan potensial dan penguatan ekosistem ekonomi kreatif
3) Revitalisasi jalan, jembatan, dan sistem transportasi yang mendukung konektivitas ekonomi, serta pengembangan infrastruktur digital untuk menunjang perekonomian
4) Peningkatan kapasitas SDM aparatur dan digitalisasi pelayanan.

Adapun Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup mempunyai prioritas pembangunan pendukung untuk mewujudkan ketercapaian target pembangunan RPJMD sebagaimana berikut:

1) Pemenuhan ketersediaan kebutuhan air minum dan sanitasi yang aman
2) Penguatan koordinasi dan jaringan kemitraan dengan berbagai pihak mengenai bantuan RTLH
3) Memperkuat identifikasi target sasaran bantuan RTLH
4) Relokasi Rumah Layak Huni dan penyediaan lahan bagi Korban Bencana
5) Pengurangan luasan kawasan kumuh perkotaan dengan fokus pada pembangunan sarana dan prasarana dasar lingkungan permukiman
6) Penyediaan sarana, prasarana dan utilitas umum (PSU) di Kawasan perumahan pengembang
7) Pelayanan urusan pertanahan yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten
8) Pengendalian dampak lingkungan akibat pembangunan
9) Mengembangkan Ruang Terbuka Hijau di kawasan perkotaan
10) Mengembangkan penanaman pohon perlindungan mata air di kawasan perlindungan setempat dan hutan rakyat
11) Pengembangan manajemen persampahan
12) Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang memperhatikan seluruh aspek dan terintegrasi dengan berbasis data
13) Menyederhanakan prosedur layanan publik
14) Mengoptimalkan pengelolaan arsip DPKPLH.

Tabel 2.3
Review terhadap RKPD tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**					
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Kab. Banjar-negara	Persentase akses cakupan air minum	100%	6.740.000	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBAN-GAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	Kab. Banjar-negara	Persentase akses cakupan air minum	100%	5.877.709	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penduduk berakses air minum	100%	6.740.000	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**		Persentase penduduk berakses air minum	100%	5.877.709	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM		Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	1 Dok	100.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem		Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	1 Dok	14.000	

						Penyediaan Air Minum (SPAM)		yang disusun			
	Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM		Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan /Perluasan/Optimalisasi SPAM	1 Dok	110.000	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	100 Orang	15.000	
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui kegiatan padat karya/SPAM berbasis masyarakat	800 SR	3.000.000	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui kegiatan padat karya/SPAM berbasis masyarakat	Liter/ detik	2.618.709	
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	750 Liter/ detik	2.190.000	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	750 Liter/ detik	40.000	
	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan		Jumlah unit SPAM Berbasis Masyarakat yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	10 Lokasi	340.000	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	10 Lokasi	2.190.000	
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan	1.000 SR	1.000.000	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1.000 SR	1.000.000	

			penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu					Jaringan Perpipaan			
	PROGRAM PENGELOLAAN DANPENGEMBA-NGAN SISTEM AIR LIMBAH					**PROGRAM PENGELOLAAN DANPENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**				1.005.000	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase KK terlayani pengelolaan sistem air limbah	73%		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**		Persentase KK terlayani pengelolaan sistem air limbah	73%	1.005.000	
	Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi / Peningkatan /Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman		Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	1 Dok	120.000	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)		Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	100 Orang	5.000	
	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman		Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	1.200 Rumah Tangga	1.000.000	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman		Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	MÂ³/Hari	1.000.000	

	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**				13.621.324	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		SAKIP	67,25%		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**		SAKIP	67,25%		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen yang disusun	67,25%		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		Jumlah Dokumen yang disusun	67,25%	25.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dok	15.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dok	10.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	20.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	15.000	
			Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase adminstrasi Keuangan	72%		**Administrasi Keuangan Perangkat**		Persentase adminstrasi Keuangan	72%	9.546.763	

			Perangkat Daerah			**Daerah**		Perangkat Daerah			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	10.804.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	9.446.763	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dok	255.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dok	100.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Dukungan Penyediaan Administrasi Umum	14 Paket		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Jumlah Dukungan Penyediaan Administrasi Umum	14 Paket	454.969	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	13 Peket	425.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	13 Peket	424.969	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah barang milik daerah yang diediakan			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		Jumlah barang milik daerah yang diediakan		5.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	22 Unit	200.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	22 Unit	5.000	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan		2.655.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	147.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	147.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25 Laporan	2.508.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25 Laporan	2.508.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	934.591	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	1.082.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	850.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	141.000	Pemeliharaan/Rehabili-tasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	84.591	

	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Persentase MBR yang menghuni Rumah Layak Huni			**PROGRAM PENGEMBA-NGAN PERUMAHAN**		Persentase MBR yang menghuni Rumah Layak Huni		1.000.000	
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana/ Relokasi Program Kab/ Kota	3 Dok		**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**		Jumlah dokumen Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana/ Relokasi Program Kab/ Kota	3 Dok	750.000	
						Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan		Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dok	750.000	
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten / Kota	1 Dok	45.000	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	1 Dok	0	
	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani		Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dok	20.000	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani		Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten / Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dok	0	

	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Persentase Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota			**Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**		Persentase Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota			
	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	100 Orang	50.000	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	100 Orang	0	
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Persentase Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota			**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**		Persentase Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota		250.000	
	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana		Jumlah lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana kabupaten/ Kota	3 Ha	9.500.000						

	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah rumah khusus beserta PSU bagi Korban bencana atau relokasi program Kabupaten/ Kota	150 unit	1.500.000	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota	150 unit	250.000	
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		Jumlah Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan			**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**		Jumlah Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 Laporan	30.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman		Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan	1 Laporan		
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		Persentase permukiman yang tertata			**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**		Persentase permukiman yang tertata			
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman		Jumlah Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	1 Laporan		**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**		Jumlah Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	1 Laporan		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan	1 Laporan	25.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Permukiman Kumuh	1 Laporan		

			Permukiman dan Permukiman Kumuh								
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha					**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**					
	Penyusunan/Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Kab. Banjar-negara	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview /Terlegalisasi	1 Dok	50.000	Penyusunan/ Review /Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Kab. Banjar-negara	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Ter-eview/ Terlegalisasi	1 Dok		
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha					**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**					
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Hun		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaik	2.500 unit	3.000.000	Perbaikan Rumah Tidak Layak Hun		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaik	2.500 unit		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggara-an Pemugaran /Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan	120.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Pere majaan Permukiman Kumuh		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggara-an Pemugaran /Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan		

	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh		Jumlah luas pembangunan pemugaran/ peremajaan permukiman kumuh	25 Ha	2.810.000	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh		Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	25 Ha		
	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh		Jumlah Dokumen Pendataan dan Verifikasi Penyelenggara-an Kawasan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	27.000	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh		Jumlah dokumen data permukiman kumuh yang terverifikasi	1 Dokumen		
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**					
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota					**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**					
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembang-nya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	2.500 unit	2.000.000	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha yang diperbaiki	100 unit		

			yang Diperbaiki								
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**				250.000	
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan					**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**				250.000	
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	10 Lokasi	80.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	10 Lokasi	250.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan					Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan		Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan	1 Lap		
	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang		Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1 Lap	50.000	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang		Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1 Lap		

	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**					
	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Keci					**Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Keci**					
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	1 Laporan	20.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil		Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikasi dan registrasi penegmbang perumahan dengan kualifikasi kecil	1 Laporan		

	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**					
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**					
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota					**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**					
	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota		Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/ Kota yang Disusun	1 Dok	155.000	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/ kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 Dok		
	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir	3 Dok	100.000	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen telaahan kebijakan yang telah mengakomodir	3 Dok		

			RPPLH Kabupaten/ Kota					RPPLH Kabupaten / Kota			
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota		Cakupan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup yang strategis			**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**		Cakupan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup yang strategis			
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD		Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD yang disusun	1 Dokumen	150.000	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD		Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD yang disusun	1 Dokumen		
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**					
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	67,5%		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	67,5%		
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		Jumlah Doku-men Uji Kuali-tas Lingkungan Hidup Dilaksa-nakan Terha-dap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dok	260.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dok		

	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**		Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)			
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)			**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**		Persentase Pengelolaan Keanekaraga-man Hayati (KEHATI)			
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota	5,2 Ha	950.000	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota	5,2 Ha		
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		Cakupan Dokumen Lingkungan Hidup / RPPLH			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**		Cakupan Dokumen Lingkungan Hidup / RPPLH			
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan Rekomendasi Dokumen Lingkungan Hidup			**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		Cakupan Rekomendasi Dokumen Lingkungan Hidup			

	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH		Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	20 Dokumen	125.000	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH		Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	20 Dokumen		
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				446.050	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**					
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**					
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	18 Lembaga	200.000	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/kom		Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/ kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya	18 Lembaga		

						unitas/kelompok masyarakat		terkait PPLH			
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup		Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 dok	150.000	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup		Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 dok		
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat			**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**		Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat			
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan meningkatnya penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kab/ kota			**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		Cakupan meningkatnya penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kab/ kota			
	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	18 Entitass	100.000	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Jumlah masyarakat / lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan / filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	18 Entitass		
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Cakupan area pelayanan sampah			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**		Cakupan area pelayanan sampah			

	Pengelolaan Sampah		Cakupan area pelayanan sampah			**Pengelolaan Sampah**		Cakupan area pelayanan sampah			
	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali		Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	1 Laporan	600.000	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah		Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	1 Laporan		
	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST /SPA Kabupaten /Kota	270 Ton	800.000	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional		Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	270 Ton		
	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan		Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	20 Kelompok	250.000	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan		Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	20 Kelompok		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama	1 Dok	250.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama	1 Dok		

			Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/ Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada					Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/ Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada			

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan musrenbang kecamatan dan forum konsultasi publik telah disampaikan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui aplikasi SIPD. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum				
	Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah Kabupaten / Kota				
	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Dusun Karangnangka, Desa Karangnangka, Kec. Pagentan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Liter / detik	Penggunaan air bersih yang belum sesuai kiebutuhan setiap rumah tangga sehingga membutuhkan sarana yang memadai
2	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah				
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				
	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Desa Ambal, Kec. Karangkobar	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	M^3/Hari	masih banyak masyarakat desa Ambal yang belum punya jamban
3	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh				
	Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota				
	Sub kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar	Desa Dawuhan, Kec. Wanayasa	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman	Unit Rumah	masih adanya rumah tidak layak huni

	Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki		
		Desa Aribaya, Kec. Pagentan			Banyak warga masyarakat kurang mampu yang rumahnya tidak layak huni
		Desa Purwodadi, Kec. Karangkobar			Masih banyak terdapat rumah yang kurang layak huni
		Desa Karangtengah RT 002, RW 003 Kec. Wanayasa			Masih banyaknya Rumah yang Tidak Layak Huni
5	Program Pengelolaan Persampahan				
	Kegiatan Pengelolaan Sampah				
	Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Dusun I, II, III, IV dan V Desa Leksana, Kec. Karangkobar	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Ton	masalah sampah yang semakin hari semakin menghawatirkan menyebabkan tersumbatnya saluran air dikarenakan masyarakat membuang sampah disungai dikarenakan tidak memiliki tempat pembuangan sampah sehingga menyebabkan banjir saat musim penghujan

2.6 Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan hasil reses RDP anggota DPRD, melalui aplikasi SIPD telah disampaikan usulan program dan kegiatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Permasalahan	Besaran/ Volume	Validasi
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum				
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota				
	Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Desa Pandanrum, Kecamatan Pandanarum	Kurangnya sumber air bersih yang memadai		
		Desa Adipasir, Kec. Rakit	Masyarakat di desa Adipasir masih kesulitan mendapatkan air bersih yang berkualitas		
		lingkungan Masjid Al Hikmah DEsa Lemahjaya Rt o1 Rw 01 Kec.Wanadadi, Kab. Banjarnegara			
		Blok Siwinong Rt 02 Rw 01 Desa Lemahjaya Kecamatan Wanadadi, Kab. Banjarnegara			
		lingkungan Masjid Al Hikmah DEsa Lemahjaya Rt o1 Rw 01 Kecamatan Wanadadi, Kab. Banjarnegara			
		Desa Paweden Kecamatan Karangkobar, Kab. Banjarnegara			
		Dukuh Puluhan Desa Sijeruk Kecamatan Banjarmangu	Kurangnya air bersih yang memadai pada musim kemarau		
		RT. 01 sampai RT. 04 RW. 01 Dusun Situkung Desa Pandanarum, Kecamatan	Dibutuhkan air bersih terutama pada musim kemarau		

		Pandanarum			
		Desa Beji RT. 01 RW. 01 Kecamatan Pandanarum	Kurangnya air bersih yang memadai terutama pada musim kemarau		
		Dusun 1 RT. 03 RW. 01 Limbangan Desa Jlegong, Kecamatan Karangkobar	Kurangnya air bersih yang memadai terutama pada musim kemarau		
		Dusun Karangpucung Desa Kasilib Kecamatan Wanadadi	Kurangnya air bersih yang memadai		
		Dusun Kasilib Desa Kasilib Kecamatan Wanadadi	Kurangnya air bersih yang memadai		
		usun Majatengah dan Dusun Parakan Desa Majatengah Kecamatan Kalibening	Kurangnya air bersih yang memadai		
		RT. 02 RW. 02 Desa Tribuana Kecamatan Punggelan	Kurangnya air bersih yang memadai		
		Dusun Paweden, Desa Paweden, Kec. Karangkobar	Kurangnya air bersih yang memadai		
	Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	KP SPAM Tirta Sari Desa Karanganyar, Kec. Kalibening	Sarpras Tidak Memadai dan Kekurangan Anggaran untuk Pembangunan		
		Kampung Gading Rt. 03 Rw. 08 Kelurahan Kutabanjarnegara, Kecamatan Banjarnegara	Kurangnya pompa clup		
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah				
	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten / Kota				
	Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Rt 02 Rw 02 Dusun Tiparan Desa Beji Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara, Kab. Banjarnegara			
3	Program Kawasan Permukiman				
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha				
	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Dusun Pagiranja RT 01 RW 03 Desa Lawen, Kec. Pandanarum	Talud yang longsor menyebabkan adanya beberapa rumah warga mengalai keretakkan, di		

			Dusun Pagiranja RT 01 RW 03 Desa Lawen Kec. Pandanarum		
		RT 03 RW 02 Desa Dawuhan Kec. Wanayasa	Talud Pemukiman RT 03 RW 02 Desa Dawuhan Kec. Wanayasa sudah rusak		
		RT 01 & 02 RW 01 Desa Ambal Kec. Karangkobar	Pembangunan Talud Pengaman Pemukiman RT 01-02 RW 01 Desa Ambal Kec. Karangkobar		
		RW 02 Desa Sigaluh Kec. Sigaluh	Pembangunan Talud Pengaman Pemukiman RW 02 Desa Sigaluh Kec. Sigaluh		
		Dukuh Belongan RT 01 RW 04 Desa Kendaga Kec. Banjarmangu	Pembangunan Talud Pengaman Tebing Dukuh Belongan RT 01 RW 04 Desa Kendaga Kec. Banjarmangu		
		RT 04 RW 02 Kadus 2 Desa Paseh Kec. Banjarmangu	Pengaman Tebing pemukiman RT 04 RW 02 Kadus 2 Desa Paseh Kec. Banjarmangu		
4	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh				
	Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota				
	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Desa Beji Kecamatan Pandanarum	Masih ada beberapa rumah yang sudah tidak laya huni		
		Desa Karangtengah Kecamatan Wanayasa	Masih ada beberapa rumah yang sudah tidak laya huni		
		Desa Jlegong Kecamatan Karangkobar	Masih ada beberapa rumah yang sudah tidak laya huni		
		RT. 03 RW. 01 Kelurahan Sokanandi Kec. Banjarnegara	Hunian kurang layak		
4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)				
	Kegiatan Urusan				

	Penyelenggaraan PSU Perumahan				
	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	RW. 02 Gumelar Kelurahan Wangon Kecamatan Banjarnegara	Dibutuhkan pembangunan talud untuk mencegah longsor		
		RT. 02 RW. 04 Kelurahan Wangon Kecamatan Banjarnegara	Dibutuhkan pembangunan talud untuk mencegah longsor		
		RW. 02 Kelurahan Kutabanjarnegara Kecamatan Banjarnegara	Jalan sudah rusak dan butuh perbaikan		
		Dukuh Karanganyar Kelurahan Argasoka Kecamatan Banjarnegara	Jalan sudah rusak dan butuh perbaikan		
		Dukuh Igir Kelurahan Argasoka Kecamatan Banjarnegara	Jalan sudah rusak dan butuh perbaikan		
		Jalan sudah rusak dan butuh perbaikan	RT. 01 sampai RT. 06 Rw. 08 Kelurahan Kutabanjarnegara Kecamatan Banjarnegara		
		Jalan lingkungan rusak	RT 03 RW 02 Kelurahan Kutabanjarnegara Kecamatan Banjarnegara		
		Saluran irigasi perlu diperbaiki	RT. 03 RW. 02 Kelurahan Karangtengan Kecamatan Banjarnegara		
		Sarpras Tidak Memadai dan Kekurangan Anggaran Untuk Pembangunan	Lingkungan RW 03 Kelurahan Parakancanggah Kecamatan Banjarnegara		
		Sarpras Tidak Memadai dan Kekurangan Anggaran Untuk Pembangunan	RW 03 Kelurahan Semampir Kecamatan Banjarnegara		
		Sarpras Tidak Memadai dan Kekurangan Anggaran Untuk Pembangunan	RW 04 Kelurahan Semampir Kecamatan Banjarnegara		
		Peningkatan Jalan Lingkungan	RW 03 Kelurahan Sokanandi Kecamatan Banjarnegara		
		Peningkatan Jalan ruas jalan	RT 02 RW 010 kelurahan Parakancanggah Kec.		

			Banjarnegara		
		Pengaspalan Jalan Lingkungan	RT 06 RW 09 Kelurahan Parakancanggah Kec. Banjarnegara		
		Perlunya perbaikan jalan lingkungan di RT 01 dan 02 RW 3 Kelurahan Argasoka Kecamatan Banjarnegara	RT 01 dan 02 RW 03 Kelurahan Argasoka Kecamatan Banjarnegara		
		Jalan rusak dan kurang layak	RT 02 RW 01 Kelurahan Karangtengah. Kec. Banjarnegara		
		Jalan kurang layak dan rusak	RT. 03 RW. 07 Kelurahan Kutabanjarnegara Kec. Banjarnegara		
		Jalan rusak dan kurang layak	RT. 02 RW. 02 Kelurahan Karangtengah, Kec. Banjarnegara		
		Jalan rusak	RT. 03 RW. 06 Kelurahan Parakancanggah Kec. Banjarnegara		
		Jalan rusak	RT. 02/ RW. 01 (Lok Turunan Cina Mati) Kelurahan Karangtengah Kec. Banjarnegara		
		Jalan lingkungan kondisinya rusak	RT 3 RW 2 kelurahan Kutabanjarnegara, Kec. Banjarnegara		
		Jalan permukiman sering longsor jika hujan	RT 01 RW 01 dari Terminal menuju balai Desa Binorong Kec. Bawang		
		Jalan kurang layak/rusak	RT. 003 RW. 004 Kelurahan Kutabanjarnegara Kec. Banjarnegara		

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional.

Berdasarkan RPJPN Tahun 2025–2045 adalah untuk mendukung perwujudan Visi Indonesia Emas 2045 dengan 5 sasaran utama yaitu pendapatan per kapita setara Negara maju, kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat, daya saing sumber daya manusia meningkat, dan intensitas emisi GRK menurun menuju *net zero emission*.

Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri, pertanian, kelautan dan sumber daya alam, dan sektor jasa. Lembaga dan pranata ekonomi telah tersusun, tertata, serta berfungsi dengan baik. Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan, dan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang efisien dan produktivitas yang tinggi, serta berkembangnya usaha dan investasi dari perusahaan-perusahaan Indonesia di luar negeri termasuk di zona ekonomi eksklusif dan lautan bebas dalam rangka peningkatan perekonomian nasional. Sejalan dengan itu, pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai kesejahteraan setara dengan negara-negara berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin yang makin rendah. Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya jaringan transportasi pos dan telematika yang andal bagi seluruh masyarakat yang menjangkau seluruh wilayah NKRI, tercapainya elektrifikasi perdesaan dan elektrifikasi rumah

tangga, serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel sehingga terwujud kota tanpa permukiman kumuh.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara merupakan lembaga teknis yang bertugas membantu Bupati dalam mewujudkan perekonomian rakyat yang maju dan sejahtera dengan mengembangkan serta memperkuat perekonomian daerah melalui sektor pertanian yang berorientasi pada pasar dengan senantiasa menjaga kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan dalam pengelolaannya melalui regulasi yang tepat dalam mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman dan damai serta mewujudkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar secara sinergi dan selaras dengan kebijakan nasional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPKPLH

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun ke depan. (Reff. Lampiran IV Permendagri no 54 tahun 2010). Merujuk pada pengertian tersebut, maka rumusan tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Banjarnegara 2025-2029, maka ditetapkan tujuan jangka menengah adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Renja DPKPLH:
   1. Meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman
   2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan
   3. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

b. Sasaran Renja DPKPLH:

   Sasaran 1.1 : Meningkatnya Ketersediaan rumah layak huni dan

pengurangan permukiman kumuh

Sasaran 1.2 : Tertanganinya kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha

Sasaran 1.3 : Meningkatnya akses pelayanan air minum

Sasaran 1.4 : Meningkatnya kualitas sanitasi permukiman dan perumahan

Sasaran 2.1 : Meningkatnya kualitas udara, kualitas air dan kualitas tutupan lahan

Sasaran 2.2 : Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan

Sasaran 3.1 : Meningkatnya akuntabilitas pelayanan publik DPKPLH

3.3 Program dan Kegiatan

Berikut adalah tabel matriks program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara tahun 2026.

Tabel 3.1

Rencana Kerja dan Pendanaan DPKPLH Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.000) 2025	Perkiraan Maju (Rp.000) 2026	Keterangan
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**											
1	**03**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**											
1	**03**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**											
1	03	03	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)			Meningkatnya pengelolaan dan pengemba-ngan sistem penyediaan air minum	100%	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	1 Dok	Persentase cakupan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Ai Minum (SPAM) di daerah	98,90%	11.030	100.000	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
1	03	03	2.01	0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)					Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	100 Orang			15.000	15.000	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
1	03	03	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan					Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan	18,75 Liter/ detik		18,75 Liter/ detik	990.060	Menunggu DAK	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan

					Perpipaan					Perpipaan yang dibangun						pelayanan dasar
1	03	03	2.01	0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan					Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkat-kan	27,5 Liter / detik		27,5 Liter / detik	200.000	200.000	
1	03	03	2.01	0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)					Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	15 Lokasi		15 Lokasi	1.260.516	500.000	
1	03	03	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan					Jumlah Sambu-ngan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	700 SR		700 SR	460.000	150.000	
1	**03**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN DANPENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**											
1	**03**	**05**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**											
1	03	05	2.01	0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)			Persentase akses sanitasi atau air limbah	77,5%	Jumlah Masyara-kat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelo-aan Air Limbah Domestik	100 Orang	Persentase penduduk yang terlayani sanitasi/ air limbah yang memadai	77,5%	385.000	385.000	

										(SPALD)						
1	03	05	2.01	0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman					Kapasitas Sistem Pengelo-laan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permuki-man yang dibangun	7,7 MÂ³/ Hari		7,7 MÂ³/ Hari	2.868.612	Menunggu DAK	
1	**04**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**											
1	**04**	**1**			***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA***											
1	**04**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											
1	04	1	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Nilai SAKIP DPKPLH	100%	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Dok	Jumlah dokumen yang disusun	6 Dok	15.000	10.000	
1	04	1	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dok			10.000	5.000	
1	**04**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											
1	04	1	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Nilai IKM DPKPLH	82	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	101 Orang	Persentase tersedianya adminis-trasi keuangan Perangkat Daera	100 %	11.145.439	10.329.529	
1	04	1	2.02	0002	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/	3 Dok		3 Dok	109.915	109.915	

					Keuangan SKPD					Verifikasi Keuangan SKPD						
1	**04**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											
1	04	1	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Jumlah Paket Peralatan dan Perleng-kapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah paket Adminis-trasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket	29968	30.000	
1	04	1	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket		9 Paket	282.003	597.452	
1	**04**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											
1	04	1	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Unit	79.639	79.639	
1	**04**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											
1	04	1	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunika-si, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	Tersedianya jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	36 lap	147.000	147.000	
1	04	1	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan		12 lap	2.508.000	2.509.000	

										yang Disediakan						
1	**04**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											
1	04	1	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	umlah Barang milik daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	23 Unit	1.142.804	2.129.115	
1	04	1	2.09	0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	82.397	82.397	
1	**04**	**02**			***PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN***											
1	**04**	**02**	**2.01**		**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**											
1	04	02	2.01	0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota			Persentase penanganan rumah korban bencana	20%	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	1 Dok	Jumlah dokumen data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten / kota	1 Dok			
1	04	02	2.01	0002	Identifikasi LahanLahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi					Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi	1 Dok		1 Dok	5.565.806	5.131.473	

					Perumahan					Perumahan						
1	04	02	2.01	0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani					Pengumpu-lan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dok					
1	**04**	**02**	**2.02**		**Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**											
1	04	02	2.02	0010	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Pengganti-an Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	100 Orang	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi	100 Orang			
1	**04**	**02**	**2.03**		**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**											
1	04	02	2.03	0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota					Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyara-kat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota	65 Unit		65 unit	832.686	4.239.000	
1	**04**	**02**	**2.06**		**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**											
1	04	02	2.06	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian	1 Lap	Jumlah laporan penerbitan izin pembangunan dan	1 Lap			

					Pengembangan Perumahan					Pembangu-nan dan Pengem-bangan Perumahan		pengembangan perumahan				
1	**04**	**03**			**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**											
1	**04**	**03**	**2.01**		**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**											
1	04	03	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggara-an Kawasan Permukiman			Persen-tase cakupan rumah layak huni	84%	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkroni-sasi Penyelenggaraa n Kawasan Permuki-man	1 Lap	Jumlah izin yang di terbitlkan	1 Lap			
1	**04**	**03**	**2.02**		**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**											
1	02	03	2.02	0008	Penyusunan/ Review /Legalisasi Kebijakan Bidang PKP					Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun /Tereview /Terlegalisasi	1 Dok	Jumlah dokumen penyusunan/ review/ legalisasi kebijakan bidang PKP	1 Dok			
1	**04**	**03**	**2.03**		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**											
1	04	03	2.03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni					Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	50 unit	Jumlah RTLH yang dipugar	50 unit	200.000	750.000	
1	04	03	2.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelengga-raan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkroni-sasi Pengenda- lian Penyelenggaraa n Pemugaran/ Peremaja-an Permuki-man Kumuh	1 Laporan					

1	04	03	2.03	0007	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh					Luas Kawasan Permuki-man Kumuh yang Diremaja-kan	2 Ha		2 Ha	8.901.663	Tidak ada anggaran APBD (menunggu DAK)	
1	04	03	2.03	0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelengga-raan Kawasan Permukiman Kumuh					Jumlah Dokumen Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraa n Kawasan Permukiman Kumuh	1 Dok					
1	**04**	**04**			***PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH***											
1	**04**	**04**	**2.01**		**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**											
1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembang-nya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			Jumlah perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan berkemba-ngnya permuki-man kumuh	5 Unit	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangny a Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	5 unit	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	5 unit	274.380	75.000	
1	**04**	**05**			***PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)***											
1	**04**	**05**	**2.01**		**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**											
1	04	05	2.01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan			Jumlah lokasi perumahan yang disediakan PSU	10 Lokasi	Jumlah Dokumen Perencan-aan Penyediaan PSU Perumahan	1 Dok	Jumlah lokasi perumahan yang disediakan PSU	10 Lokasi	-	-	

1	04	05	2.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian					Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	5 Lokasi		5 Lokasi	2.885.000	1.090.000	
1	04	05	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1 Laporan					
1	04	05	2.01	0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang					Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1 Laporan		1 Laporan	13.148		
1	**04**	**06**			***PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN***											
1	**04**	**06**	**2.01**		**Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil**											
1	04	06	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan			Jumlah laporan pelayanan sertifikasi, kualifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan	1 lap	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi	1 Laporan	Jumlah laporan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan tingkat kemampuan	1 Lap	2.917		

					dengan Kualifikasi Kecil			permuki-man		Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil		kecil					
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**												
2	**11**	**02**			***PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP***												
2	**11**	**02**	**2.01**		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**												
2	11	02	2.01	0006	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/ Kota			Persentase Dokumen Lingkungan Hidup yang tersusun	100%	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/ kota yang berisi arahan/ muatan RPPLH kabupaten/ kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 Dok	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 Dok			
2	11	02	2.01	0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota					Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/ Kota	1 Dok	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/ Kota	1 Dok		100.000	
2	**11**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**												
2	11	02	2.02	0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD					Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD yang disusun	1 Dok	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup yang strategis	1 Dok	150.000		
2	11	02	2.02	0007	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang					Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang	1 Dok		1 Dok			

										Kabupaten/Kota yang Disusun						
2	**11**	**03**			***PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP***											
2	**11**	**03**	**2.01**		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**											
2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			IKLH, IKA, IKU, IKTL	75,95 73,18 86,28 61,59	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksana-kan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dok	Jumlah dokumen pemantauan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	1 Dok	10.000	100.000	
2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dok		1 Dok		63.570	
2	**11**	**04**			***PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)***											
2	**11**	**04**	**2.01**		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**											
2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Persentase luasan RTH yang tertangani	100%	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota	5,7 Ha	Luas ruang terbuka hijau (RTH)	5,7 Ha	324.000	500.000	
2	**11**	**06**			***PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)***											
2	**11**	**06**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH**											

					diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota											
2	11	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH			Persentase ketaatan terhadap ijin lingkungan yang dikeluarkan	100%	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	5 Dok	Persentase ketaatan terhadap ijin lingkungan yang dikeluarkan	5 Dok	107.000	20.000	
2	11	06	2.01	0010	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup					Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	20 BU					
2	**11**	**08**			***PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT***											
2	**11**	**08**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											
2	11	08	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga			Persentase masyarakat yang memiliki kompetensi dalam pengenda-lian lingkungan hidup	70%	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/ Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya	10 Lembaga	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/ komunitas/kelompok masyarakat	10 Lembaga	8.640	10.000	

					pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat					Terkait PPLH		yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH				
2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup					Jumlah pendampi-ngan pembinaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup yang dilaksanakan	1 Dok			31.221	30.000	
2	**11**	**09**			***PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT***											
2	**11**	**09**	**2.01**		**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											
2	11	09	2.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			Persentase masyarakat / lembaga sasaran yang mendapat-kan sosialisasi / pembinaan untuk penghar-gaan lingkungan hidup	80%	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	22 Entitas	Jumlah penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kab/ kota	22 Entitas	59.157	50.000	
2	**11**	**11**			***PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN***											
2	**11**	**11**	**2.01**		**Pengelolaan Sampah**											
2	11	11	2.01	0018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah			Persentase penanganan sampah di wilayah layanan persampahan	73%	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	1 Laporan	Persentase kinerja pengelolaan persampa-han	73%	149.188	575.000	

2	11	11	2.01	0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/ kota atau TPA/TPST Regional					Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrose-san akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kot a atau TPA/TPST Regional	2000 Ton			2.516.941	1.275.000	
2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan					Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelo-laan Sampah Berbasis Masyarakat	20 Kelompok			244.000	106.617	
2	11	11	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkroni-sasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/ Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/	1 Dok			223.564	145.000	

										Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada						
2	11	11	2.01	0005	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota					Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	4 Unit					

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program pada perangkat daerah merupakan program prioritas dalam Renstra 2025-2029. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD selanjutnya dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Pemilihan untuk masing-masing program/ kegiatan di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebagai berikut.

4.1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang adalah sebagai berikut:

1) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan:
    1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
        a. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
        b. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
        c. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
        d. Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
        e. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
        f. Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
2) Program Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah, dengan kegiatan:
    1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:

a. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman
b. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

4.2 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahun 2026 dijabarkan ke dalam semua urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten Banjarnegara. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Pengembangan Perumahan, dengan kegiatan:
   1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
      a. Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
   2. Pembangunan dan rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
      a. Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
2) Program Kawasan Permukuiman
   1. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha, dengan sub kegiatan:
      a. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
      b. Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh
3) Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh, dengan kegiatan:
   1. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota, dengan sub kegiatan:
      a. Perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha

4) Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), dengan kegiatan berikut:
   1. Urusan Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang fungsi hunian, dengan sub kegiatan berikut:
      a. Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian
      b. Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang
5) Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan kegiatan berikut:
   1. Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan utilitas Umum PSU tingkat Kemampuan Kecil, dengan sub kegiatan berikut:
      a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan kualifikasi kecil
8) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota terdiri dari 6 kegiatan yang diarahkan pada :
   1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah , dengan sub kegiatan :
      a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
      b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
      a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
      b. Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD
   3. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan;
      a. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
      b. Penyediaan bahan logistik kantor
   4. Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah
      a. Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya

Terdiri dari pengadaan :

- Pengadaan alat besar
- Pengadaan mebel
- Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
- Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya
- Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah, dengan sub kegiatan :
   a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
   b. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
6. Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah, dengan sub kegiatan :
   a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau laporan
   b. Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

      Terdiri dari:

      - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaaan dan perijinan alat besar
      - Pemeliharaan mebel
      - Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
      - Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya
      - Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya

4.3 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Perencanaan lingkungan hidup, dengan kegiatan berikut:

1. Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan berikut:
   a. Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
2. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten / Kota, dengan sub kegiatan berikut:
   a. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD

2) Program Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dengan kegiatan berikut:
   1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan berikut:
      a. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
      b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
3) Program Pengelolaan Keaekaragaman Hayati (KEHATI), dengan kegiatan berikut:
   1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati kabupaten/kota, dengan sub kegiatan berikut:
      a. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
4) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), dengan kegiatan berikut:
   1. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan berikut:
      a. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
      b. Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
5) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, dengan kegiatan berikut:

1. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan berikut:
    a. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan
    b. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup

6) Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, dengan kegiatan berikut:
    1. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan berikut:
        a. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

7) Program Pengelolaan persampahan, dengan kegiatan berikut:
    1. Pengelolaan Sampah, demgan sub kegiatan berikut:
        a. Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
        b. Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
        c. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
        d. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan transisi dari penjabaran Renstra Tahun 2023-2026 dan pelaksanaan tahun pertama terhadap Renstra Tahun 2025-2029. Renja DPKPLH selanjutnya menjadi platform operasional bagi Perangkat Daerah dalam menjalankan programnya dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka sasaran pembangunan daerah tahun 2026. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja DPKPLH digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026 dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disepakati.
2. Kerangka pendanaan dalam Renja DPKPLH masih bersifat sementara, sehingga masih dimungkinkan terjadi perubahan pagu yang disebabkan oleh pengurangan, penambahan, dan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan maupun antar sub kegiatan dalam kerangka penyusunan anggaran secara terpadu dan berbasis kinerja.
3. Renja DPKPLH menjadi acuan bagi Kepala Perangkat Daerah dan segenap jajarannya serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, serta menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal : 10 Agustus 2025

KEPALA DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANJARNEGARA

DPKPLH

HERRINA INDRIYASTUTI, S.Pt, M.Si
NIP. 197201302003122004

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2026 telah dapat diselesaikan penyusunannya. Rencana Kerja (Renja) mempunyai arti strategis karena didalamnya memuat uraian program dan kegiatan, yang dirumuskan berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis diharapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar sebagai upaya mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan dimana semua kebijakan, program, sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Penyusunan Renja Tahun 2026 merupakan kewajiban bagi setiap Perangkat Daerah. Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, dan strategi seluruh aparat Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Banjarnegara, serta untuk dapat bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara. Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 memuat penjabaran program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pada tahun tersebut.

Berhasil dan tidaknya target yang telah ditentukan dalam Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara tidak terlepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak. Renja yang telah tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2026 untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Selain itu juga dapat berguna bagi peningkatan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara.

Banjarnegara, 10 Agustus 2025

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BANJARNEGARA

dr. AHMAD SETIAWAN,M.PH
Pembina Utama Muda
NIP. 19720918 200501 1 008

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 2
BAB I PENDAHULUAN 5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA SETWAN TAHUN LALU 14
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....49
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....61
BAB V PENUTUP 64

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Setwan) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan Renja Setwan Tahun 2026 sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan yang diatur melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan pembentukan tim

penyusun, penelaahan rancangan awal RKPD, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, hingga pada penyempurnaan berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang RKPD. Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, penyusunan Renja Setwan juga mengacu pada Renja Kementerian/Lembaga terkait, serta Renja Setwan Provinsi terkait. Renja Setwan adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2. Landasan Hukum

Renja Setwan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16

Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 245);
28. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 78);
29. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 14);
30. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-

2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 15);

31. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 Nomor 34).

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Setwan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun dengan maksud untuk:

a. Menjabarkan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 ke dalam rencana program kegiatan prioritas Tahun 2026 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Renja K/L Tahun 2026 dan Renja Setwan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;
b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerapan anggaran berbasis kinerja.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Setwan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

a. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA-DPA dalam Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2026, yang dalam penyusunannya didahului dengan menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026;
b. Sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Tahun 2026;
c. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Setwan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun berdasarkan sistematika yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renja Setwan, serta sistematika dokumen Renja Setwan.

BAB 2 : HASIL EVALUASI RENJA SETWAN TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Setwan tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dan atau pokok-pokok DPRD.

BAB 3 : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Setwan, serta program dan kegiatan tahun 2026.

BAB 4 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran RKPD.

BAB 5 : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA SETWAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Setwan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah meliputi urusan Urusan Pemerintahan.

Renja Setwan Tahun 2024 yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 terdiri dari 2 program, 14 kegiatan, dan 45 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 47.052.648.000,-, dengan fokus utama pada pada Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD. Program/kegiatan/sub kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengatasi tersebut dilaksanakan untuk memfasilitasi tugas DPRD yang meliputi:

1. Penganggaran;
2. Legislasi;
3. Pengawasan.

Dari 2 program, 14 kegiatan, dan 45 sub kegiatan yang dalam Renja Setwan tersebut, program/kegiatan/sub kegiatan yang disetujui untuk dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024 terdiri dari 2 program, 14 kegiatan, dan 45 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 52.478.977.239,-

Pada Perubahan Renja Setwan Tahun Anggaran 2024, terjadi beberapa perubahan yang meliputi penambahan atau pengurangan pagu, penghapusan, penambahan atau pengurangan program/kegiatan/sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, serta perubahan lokasi dan

kelompok sasaran kegiatan. Perubahan tersebut mengubah rincian dalam Renja Setwan menjadi 2 program, 14 kegiatan, dan 45 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 52.928.228.182,- Pada Perubahan Renja Setwan tahun 2024, semua program/kegiatan/subkegiatan mengalami perubahan baik bertambah maupun berkurang meliputi semua program, kegiatan maupun sub kegiatan.

Dinamika yang terjadi selama tahun 2024 turut mempengaruhi keberhasilan pencapaian Renja Setwan. Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2024, tercatat adanya hasil yang baik yang dikarenakan adanya pencapaian maupun pelampauan target maupun yang tidak memenuhi target.

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

   Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaktercapaian tersebut antara lain adalah:

   1. Pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Capaian tidak tercapai karena adanya pegawai yang mutasi dan pensiun.
   2. Pada sub kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD, capaian tidak tercapai karena ada beberapa anggota DPRD yang pada waktu pelaksanaan medical check up DPRD telah melaksanakan pemeriksaan Kesehatan mandiri dan ada yang kondisinya sedang sakit.

b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi semua Program/Kegiatan/Sub Kegiatan selain 2 (dua) Sub Kegiatan tersebut di atas. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Tersedianya anggaran operasional yang cukup;
2. Tersedianya Tata Tertib DPRD berdasarkan Peraturan DPRD tersebut sangat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD;
3. Terjalinnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan DPRD;
4. Optimalisasi sarana dan prasarana yang tersedia.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka apabila terdapat kondisi yang stabil, tidak terjadi perubahan SOTK yang menyebabkan kegiatan kurang optimal, dan koordinasi yang baik dengan pimpinan dan anggota DPRD. Pada tahun perencanaan selanjutnya, perlu diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, diantaranya:

1. Perencanaan yang lebih seksama pada anggaran perubahan, sesuai dengan kondisi yang ada sehingga capaian kinerja dapat maksimal tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.
2. Pengoptimalan dan pengaturan jadwal kegiatan DPRD secara lebih seksama, sehingga semua kegiatan DPRD sesuai tugas pokok dan fungsinya dapat difasilitasi dengan baik dan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan.

3. Menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan anggota DPRD, terkait pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara;
4. Evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sehingga semua program dan kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Setwan dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Setwan dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
s.d. Tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Setwan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
					Target Renja Setwan tahun 2024	Realisasi Renja Setwan tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
4	Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan									
4.02	Sekretariat DPRD									
4.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana	100 %	99,08 %	100 %	99,08 %	99,08 %	100 %	100 %	100 %
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	perangkat daerah yang disusun								
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	18 dokumen	18 dokumen	18 dokumen	18 dokumen	100 %	16 dokumen	16 dokumen	100 %
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22 Laporan	22 Laporan	22 Laporan	22 Laporan	100 %	6 laporan	6 laporan	100 %
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	35 orang/bulan	35 orang/bulan	35 orang/bulan	35 orang/bulan	100 %	39 orang/bulan	39 orang/bulan	100 %
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %

	Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD									
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	13 orang	13orang	13 orang	13 orang	100 %	34 orang	34 orang	100 %
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100 %	2 paket	2 paket	100 %
	Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	18 paket	18 paket	18 paket	18 paket	100 %	22 paket	22paket	100 %
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	0 dokumen	0 dokumen	0 %

	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 %	91,30 %	100 %	91,30 %	91,30 %	100 %	100 %	100 %
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	23 unit	19 unit	23 unit	19 unit	82,61 %	57 unit	57 unit	100 %
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100 %	0 unit	0 unit	100 %
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100 %	12 laporan	12 laporan	100 %
	Sub Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100 %	12 laporan	12 laporan	100 %

		Kantor yang Disediakan								
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100 %	2 unit	2 unit	100 %
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 unit	22 unit	22 unit	22 unit	100 %	22 unit	22 unit	100 %
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	79 unit	79 unit	79 unit	79 unit	100 %	11 unit	11 unit	100 %

	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100 %	1 unit	1 unit	100 %
	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Pemenuhan kebutuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang terpenuhi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50 orang/bulan	50 orang/bulan	50 orang/bulan	50 orang/bulan	100 %	50 orang/bulan	50 orang/bulan	100 %
	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100 %	1 paket	1 paket	100 %
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	100 %	50 orang	50 orang	100 %
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase capaian kinerja program dukungan pelaksanaan	100 %	86,9 %	100 %	100 %	86,9 %	100 %	100 %	100 %

		tugas dan fungsi DPRD								
	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase pemenuhan dokumen pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD yang disusun	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	100 %	10 dokumen	10 dokumen	100 %
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	0 %
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase pemenuhan dokumen pembahasan kebijakan anggaran yang disusun	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

	Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
	Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
	Sub Kegiatan Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
	Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
	Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
	Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase pemenuhan laporan hasil pengawasan penyelenggaraan	100 %	82 %	100 %	82 %	82 %	100 %	100 %	100 %

		pemerintahan yang tersusun								
	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil PengawasanUrusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	5 Laporan	2 Laporan	5 Laporan	2 Laporan	40 %	4 Laporan	4 Laporan	100 %
	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	10 Laporan	9 Laporan	10 Laporan	9 Laporan	90 %	4 Laporan	4 Laporan	100 %
	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	100 %	4 Laporan	4 Laporan	100 %
	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	10 Laporan	8 Laporan	10 Laporan	8 Laporan	80 %	4 Laporan	4 Laporan	100 %
	Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase pemenuhan dokumen peningkatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

		Kapasitas DPRD yang disusun								
	Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100 %	6 Dokumen	6 Dokumen	100 %
	Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi	8 orang	8 orang	8 orang	8 orang	100 %	8 orang	8 orang	100 %
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100 %	6 Dokumen	6 Dokumen	100 %
	Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
	Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	5 Dokumen	5 Dokumen	100 %
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase pemenuhan Dokumen kegiatan penyerapan dan penghimpunan Aspirasi masyarakat yang disusun	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	2 dokumen	2 dokumen	100 %
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase tersusunnya laporan pelaksanaan dan Pengawasan Kode etik DPRD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase pemenuhan Dokumen/Laporan fasilitasi tugas DPRD yang disusun	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %

	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan pelayanannya, Perangkat Daerah mengampu 3 (tiga) Indikator. Dari 3 (tiga) indikator tersebut, 3 (tiga) berstatus tercapai. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian/ ketidaktercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Adanya evaluasi yang dilakukan secara berkala per triwulan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di Sekretariat DPRD selama tahun 2024.
2. Adanya kerjasama antar Kabag, Kasubag dan Pelaksana dalam berkoordinasi dan penyusunan Jadwal pelaksanaan kegiatan yang berpedoman pada jadwal dan rencana kerja serta dokumen RKA Perangkat Daerah.
3. Adanya koordinasi dan Komunikasi antara Sekretaris dan Pimpinan serta anggota DPRD dalam menjalankan semua kegiatannya.

Dalam rangka mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut, telah dilakukan upaya-upaya yang meliputi:

1. Adanya evaluasi yang dilakukan secara berkala per triwulan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di Sekretariat DPRD selama tahun 2024.
2. Lebih mengoptimalkan evaluasi internal dan pengukuran kinerja agar capaian kinerja dapat terukur secara berkala dan mendukung optimalnya pencapaian kinerja organisasi.
3. Adanya kerjasama antar Kabag, Kasubag dan Pelaksana dalam berkoordinasi dan penyusunan Jadwal pelaksanaan kegiatan.
4. Berpedoman pada jadwal dan rencana kerja serta dokumen RKA Perangkat Daerah.
5. Adanya koordinasi dan Komunikasi antara Sekretaris dan Pimpinan serta anggota DPRD dalam menjalankan semua kegiatannya.

6. Melakukan inovasi dan melakukan upaya untuk meningkatkan kompetensi SDM dalam rangka memfasilitasi kegiatan-kegiatan maupun memfasilitasi aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPRD Kabupaten Banjarnegara.

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK LPPD	Target Renstra Setwan				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Indeks Kepuasan Anggota DPRD	-	-	78	79	80	81	79,5	81,30 75	83,056	83,50	
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	83	84	85	86	79,867	83,00 025	83,2115	85,00	
3.	Nilai AKIP Sekretariat DPRD	-	-	72 (BB)	73 (BB)	74 (BB)	75 (BB)	66,25 (B)	71,85 (B)	73,2 (BB)	74 (BB)	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan urusan pemerintahan dalam 1 urusan, yaitu Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan. Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPD Tahun 2023-2026, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD untuk tahun 2026 mencakup 1 (satu) urusan tersebut. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD diantaranya adalah:

1. Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah;
2. Kekurangan SDM karena ASN yang purna tugas dan promosi jabatan tetapi tidak diganti dengan personel yang baru menyebabkan pelaksanaan kegiatan menjadi lebih padat.
3. Adanya power politik dalam memfasilitasi DPRD yang menyebabkan tekanan yang tinggi dalam penyusunan rencana kegiatan dan program Sekretariat DPRD.
4. Jadwal kegiatan yang padat sehingga mempengaruhi tingkat capaian kunjungan lapangan dalam rangka pengawasan.

Permasalahan tersebut, jika tidak diselesaikan dapat menjadi *constraint* dalam pencapaian visi dan misi Bupati maupun capaian indikator lainnya. Beberapa dampak dari adanya permasalahan dan hambatan tersebut meliputi:

1. Terdapatnya pemahaman yang berbeda terhadap interpertasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan

yang berlaku sehingga pelaksanaan kegiatan membutuhkan koordinasi yang optimal antara Sekretariat DPRD dan DPRD.

2. Kompetensi SDM yang ada di Sekretariat DPRD belum dapat mengakomodasi secara optimal fungsi-fungsi yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD (Sebagian besar hanya pada fungsi pengadministrasi).
3. Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia.
4. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan.
5. Belum tersedianya standar/manual/pedoman dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dan dukungan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi, peningkatan kualitas birokrasi, dan meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan pengguna layanan akan meningkatkan kebutuhan akan adanya penyediaan produk layanan yang semakin baik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi-inovasi dalam menunjang peningkatan pelayanan publik secara kontinyu. Beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Sekretariat DPRD, yaitu:

1. Dalam rangka mempercepat fasilitasi tugas DPRD, perlu adanya inovasi misalnya jadwal kegiatan DPRD yang terdigitalisasi, survey kepuasan DPRD yang terdigitalisasi, inovasi layanan dan informasi DPRD.
2. Dalam rangka memfasilitasi aspirasi masyarakat, perlu juga inovasi dalam menyerap aspirasi masyarakat secara cepat dan akurat dan transparan.

Berdasarkan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangn tersebut, dapat diinventarisasi beberapa isu

strategis. Inventarisasi isu-isu strategis tahun 2025 didapatkan dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal Kabupaten Banjarnegara sampai dengan tahun 2025. Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan pembangunan. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD pada tahun 2026, sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas SDM sehingga dapat mengoptimalkan kinerja dalam memfasilitasi semua tugas dan fungsi DPRD.
2. Peningkatan sarana dan prasarana dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD.
3. Inovasi digitalisasi dalam fasilitasi tugas Sekretariat DPRD;
4. Digitalisasi dalam penyerapan aspirasi masyarakat.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Tahun 2026 merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari RPD Tahun 2023-2026. Dalam RPD Tahun 2023-2026, prioritas arah kebijakan sesuai tugas dan fungsi Sekretariat DPRD pada tahun 2026 meliputi:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi kegiatan-kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPRD;
3. Meningkatnya kinerja Sekretariat DPRD.

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 Kabupaten Banjarnegara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota				37.694.119	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota				37.694.119	
1	Kegiatan Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				15.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				15.000	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 dokumen	7.500	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 dokumen	7.500	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	6 laporan	7.500	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan	6 laporan	7.500	

	Realisasi Kinerja SKPD		Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Hasil Koordinasi Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.694.811	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.694.811	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sekretariat DPRD	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 orang	4.632.186	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sekretariat DPRD	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 orang	4.632.186	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	62.625	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	62.625	
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				75.680	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				75.680	
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan	Sekretariat DPRD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22 orang	75.680	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan	Sekretariat DPRD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti	22 orang	75.680	

	Tugas dan Fungsi					Tugas dan Fungsi		Pendidikan dan Pelatihan			
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				326.088	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				326.088	
	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 paket	23.242	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 paket	23.242	
	Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	22 paket	290.519	Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	22 paket	290.519	
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	12.326	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	12.326	
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				157.115	
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sekretariat DPRD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	0 unit	0	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sekretariat DPRD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	21 unit	157.115	

6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				425.049	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				425.049	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	210.348	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	210.348	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	214.701	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	214.701	
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				390.539	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				451.399	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	Sekretariat DPRD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara	2 unit	74.950	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan	Sekretariat DPRD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan	2 unit	84.830	

	Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		dan dibayar pajaknya			Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		yang dipelihara dan dibayar pajaknya			
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sekretariat DPRD	Jumlah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 unit	124.350	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sekretariat DPRD	Jumlah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 unit	175.330	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sekretariat DPRD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 unit	106.239	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sekretariat DPRD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 unit	106.239	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sekretariat DPRD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	85.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sekretariat DPRD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	84.830	
8	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				31.766.950	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				31.766.950	

	Sub Kegiatan Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD	50 orang	31.481.650	Sub Kegiatan Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD	50 orang	31.481.650	
	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	1 paket	250.300	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	1 paket	250.300	
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50 orang	35.000	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50 orang	35.000	
9	Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD				867.525	Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD				869.385	
	Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasn Rancangan Perda	10 dokumen	788.525	Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasn Rancangan Perda	10 dokumen	790.385	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan	0 dokumen	-	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan	0 dokumen	-	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan	1 dokumen	79.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan	1 dokumen	79.000	

	dan/atau Naskah Akademik		dan/atau Naskah Akademik yang difasilitasi			Naskah Akademik		dan/atau Naskah Akademik yang difasilitasi			
10	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran				183.532	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran				183.533	
	Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 dokumen	32.448	Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 dokumen	32.448	
	Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 dokumen	26.400	Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 dokumen	26.400	
	Sub Kegiatan Pembahasan APBD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 dokumen	54.585	Sub Kegiatan Pembahasan APBD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 dokumen	54.585	
	Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1 dokumen	37.262	Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1 dokumen	37.262	
	Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Semester	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan	1 dokumen	2.600	Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Semester	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan	1 dokumen	2.600	

			APBD Per Semester					APBD Per Semester			
	Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 dokumen	30.237	Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 dokumen	30.237	
11	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				522.177	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				522.177	
	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	5 Laporan	35.800	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	5 Laporan	35.800	
	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	5 Laporan	33.250	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	5 Laporan	33.250	
	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang	5 Laporan	37.373	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang	5 Laporan	37.373	

			Kesejahteraan Rakyat					Kesejahteraan Rakyat			
	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	5 Laporan	37.375	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	5 Laporan	37.375	
	Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah	Sekretariat DPRD	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 dokumen	378.377	Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah	Sekretariat DPRD	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 dokumen	378.377	
12	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD				1.909.944	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD				1.714.704	
	Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	2 dokumen	1.413.256	Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	2 dokumen	1.218.016	
	Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Sekretariat DPRD	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 orang	240.000	Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Sekretariat DPRD	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 orang	240.000	
	Sub Kegiatan Penyelenggara	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan	2 Dokumen	78.112	Sub Kegiatan Penyelenggaraan	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraa	2 Dokumen	78.112	

	an Hubungan Masyarakat		Hubungan Masyarakat			Hubungan Masyarakat		n Hubungan Masyarakat			
	Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 dokumen	159.146	Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 dokumen	159.146	
	Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1 Dokumen	19.430	Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1 Dokumen	19.430	
13	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				917.928	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				917.928	
	Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun	1 dokumen	28.648	Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun	1 dokumen	28.648	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 dokumen	889.280	Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 dokumen	889.280	
14	Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD				248.699	Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD				248.699	

	Sub Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	2 Laporan	248.699	Sub Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	2 Laporan	248.699	
15	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD				2.293.945	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD				2.512.328	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4 dokumen	1.714.705	Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4 dokumen	1.955.612	
	Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang disusun	1 Laporan	3.600	Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang disusun	1 Laporan	3.600	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 dokumen	376.416	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 dokumen	356.706	
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	4 dokumen	199.224	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	4 dokumen	196.410	
					44.645.470					44.870.069	

Berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2026, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan yaitu:

1. Pemenuhan kebutuhan anggaran berdasarkan kemampuan keuangan daerah;
2. Program kerja DPRD belum bisa terakomodir dalam RKPD awal Tahun 2026.

2.4.1 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan musrenbang kecamatan dan forum konsultasi publik telah disampaikan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui aplikasi SIPD. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Banjarnegara

No.	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	NIHIL				

2.4.2 Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan hasil reses anggota DPRD, melalui aplikasi SIPD telah disampaikan usulan program dan kegiatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan Pkok-pokok Pikiran
DPRD Tahun 2026 Kabupaten Banjarnegara

No.	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Validasi
	NIHIL				

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional.

Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia; terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari ancaman, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kondisi itu didukung oleh mantapnya kemampuan pertahanan dan keamanan negara yang ditandai oleh terwujudnya TNI yang profesional dengan komponen cadangan dan pendukung pertahanan yang kuat; terwujudnya sinergi kinerja antara POLRI dan partisipasi masyarakat dalam bidang keamanan, intelijen, dan kontra intelijen yang efektif yang disertai kemampuan industri pertahanan yang handal; terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam mendorong supremasi hukum; terwujudnya tata

kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum, serta birokrasi yang profesional dan netral; terwujudnya masyarakat sipil, masyarakat politik, dan masyarakat ekonomi yang mandiri, serta terwujudnya kemandirian nasional dalam konstelasi gobal.

Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat ditunjukkan oleh makin tinggi dan meratanya tingkat pendapatan masyarakat dengan jangkauan lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh; mantapnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, antara lain ditandai oleh meningkat dan meratanya akses, tingkat kualitas, dan relevansi pendidikan seiring dengan makin efisien dan efektifnya manajemen pelayanan pendidikan; meningkatnya kemampuan Iptek; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak; dan terwujudnya kesetaraan gender; bertahannya kondisi dan penduduk tumbuh seimbang. Sejalan dengan tingkat kemajuan bangsa, sumber daya manusia Indonesia diharapkan berkarakter cerdas, tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beragama, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran terhadap keberagaman, bergotong royong, patriotik, dinamis dan berorientasi Iptek. Kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat makin mantap dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan sehingga masyarakat mampu berperan sebagai penggerak bagi konsep pembangunan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.

Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri, pertanian, kelautan dan sumber daya alam, dan sektor jasa. Lembaga dan pranata ekonomi telah tersusun, tertata, serta berfungsi dengan baik. Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan, dan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang efisien dan produktivitas yang tinggi; serta berkembangnya usaha dan investasi dari perusahaan-perusahaan Indonesia di luar negeri termasuk di zona ekonomi eksklusif dan lautan bebas dalam rangka peningkatan perekonomian nasional. Sejalan dengan itu, pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai kesejahteraan setara dengan negara-negara berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin yang makin rendah. Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya jaringan transportasi pos dan telematika yang andal bagi seluruh masyarakat yang menjangkau seluruh wilayah NKRI; tercapainya elektrifikasi perdesaan dan elektrifikasi rumah tangga; serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel sehingga terwujud kota tanpa permukiman kumuh.

Sekretariat DPRD dibentuk untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD provinsi/kab./kota. Sekretariat DPRD bertugas untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dalam rangka

memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Banjarnegara.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Setwan

a. Tujuan

Tujuan merupakan sebuah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan dalam mencapai visi tertentu, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan yang ada, dan menangani isu-isu strategis yang dihadapi Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara. Tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara pada kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis yang kemudian diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang lebih terukur.

Adapun tujuan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut:

"Meningkatkan layanan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD."

b. Sasaran

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran menggambarkan hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan spesifik, terukur, mudah dicapai, rasional, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan

dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator-indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka sasaran yang ingin dicapai adalah:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Sekretariat DPRD.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi kegiatan-kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara.

.

3.3. Program dan Kegiatan

a. Faktor – faktor Rumusan Program dan Kegiatan

Program adalah istrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan atau kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan suatu hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah. Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dalam merealisasikan program. Kegiatan mencerminkan strategi yang konkrit untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

b. Rekapitulasi program dan kegiatan

Sejalan dengan Program prioritas pembangunan tahun 2026 (RKPD) maka Program dan Kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara ada 2 program, 14 Kegiatan dan 43 sub kegiatan, sebagai berikut :

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Capaian kinerja dan Kerangka Pendanaan				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penang gung Jawab
				Target Renja Setwan tahun 2025	Pagu Indikatif (dalam ribuan rupiah)	Lokasi	Sumber Dana	Target Kinerja	Pagu Indikatif (dalam ribuan rupiah)	
4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan									
4.02	Sekretariat DPRD									
4.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota									
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				15.000				16.000	
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 dokumen	16 dokumen	7.500	Kab. Banjarnegara	DAU	16 dokumen	8.000	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 laporan	6 laporan	7.500	Kab. Banjarnegara	DAU	6 laporan	8.000	Sekretariat DPRD

4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.174.958,6				4.370.000	
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 orang	42 orang	4.106.723,6	Kab. Banjarnegara	DAU	45 orang	4.300.000	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	68.235	Kab. Banjarnegara	DAU	12 dokumen	70.000	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				262.265					
4.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	13 orang	22 orang	262.265	Kab. Banjarnegara	DAU	22 orang	230.000	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				394.787,1					
4.02.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket	2 paket	26.844,2	Kab. Banjarnegara	DAU	2 paket	27.000	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	18 paket	22 paket	352.942,9	Kab. Banjarnegara	DAU	22 paket	360.000	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.06.10	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000	Kab. Banjarnegara	-	1 Dokumen	16.000	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				341.615					
4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	19 unit	11 unit	341.615	Kab. Banjarnegara	DAU	11 unit	385.000	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				451.252,4					

4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	12 laporan	169.200	Kab. Banjarnegara	DAU	12 laporan	170.000	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	12 laporan	282.052,4	Kab. Banjarnegara	DAU	12 laporan	285.000	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				675.681,5					
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	2 unit	2 unit	80.780	Kab. Banjarnegara	DAU	2 unit	82.500	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 unit	22 unit	351.500	Kab. Banjarnegara	DAU	22 unit	360.000	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	79 unit	8 unit	133.402,7	Kab. Banjarnegara	DAU	8 unit	110.000	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	1 unit	109.998,8	Kab. Banjarnegara	DAU	1 unit	115.000	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				29.063.194				29.725.000	
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD	50 orang	50 orang	28.554.166	Kab. Banjarnegara	DAU	50 orang	29.000.000	Sekretariat DPRD

4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	1 paket	1 paket	436.500	Kab. Banjarnegara	DAU	1 paket	650.000	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	34 orang	50 orang	72.528	Kab. Banjarnegara	DAU	50 orang	75.000	Sekretariat DPRD
04.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD				17.097.2446,4				21.255.700	
04.02.02.2.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD				2.297.667,2				3.150.000	
04.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasn Rancangan Perda	7 dokumen	10 dokumen	1.823.023,4	Kab. Banjarnegara	DAU	10 dokumen	2.000.000	Sekretariat DPRD
04.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan	1 dokumen	1 dokumen	263.571	Kab. Banjarnegara	DAU	1 dokumen	300.000	Sekretariat DPRD
04.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang difasilitasi	0 dokumen	1 dokumen	211.072,8	Kab. Banjarnegara	DAU	1 dokumen	850.000	Sekretariat DPRD
04.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran				2.467.179,8				2.708.500	
04.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 dokumen	1 dokumen	405.162,6	Kab. Banjarnegara	DAU	1 dokumen	450.000	Sekretariat DPRD
04.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 dokumen	1 dokumen	392.694,6	Kab. Banjarnegara	DAU	1 dokumen	450.000	Sekretariat DPRD
04.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 dokumen	1 dokumen	405.295,1	Kab. Banjarnegara	DAU	1 dokumen	450.000	Sekretariat DPRD

04.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1 dokumen	1 dokumen	394.647,1	Kab. Banjarnegara	DAU	1 dokumen	450.000	Sekretariat DPRD
04.02.02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 dokumen	1 dokumen	8.126,6	Kab. Banjarnegara	DAU	1 dokumen	8.500	Sekretariat DPRD
04.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 dokumen	1 dokumen	861.253,8	Kab. Banjarnegara	DAU	1 dokumen	900.000	Sekretariat DPRD
04.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				644.143				767.000	
04.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	2 Laporan	5 Laporan	47.825	Kab. Banjarnegara	DAU	5 Laporan	97.000	Sekretariat DPRD
04.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	9 Laporan	5 Laporan	48.010	Kab. Banjarnegara	DAU	5 Laporan	65.000	Sekretariat DPRD
04.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	10 Laporan	5 Laporan	47.530	Kab. Banjarnegara	DAU	5 Laporan	65.000	Sekretariat DPRD
04.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	10 Laporan	5 Laporan	51.735	Kab. Banjarnegara	DAU	5 Laporan	65.000	Sekretariat DPRD
04.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 rekomendasi	1 rekomendasi	449.043	Kab. Banjarnegara	DAU	1 rekomendasi	475.000	Sekretariat DPRD
04.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD									

02.2.04.02	Orientasi DPRD	Jumlah Dokument Hasil Penyeleggaraan Orientasi DPRD	-	-	-	Kab. Banjarnegara	-	-	-	Sekretariat DPRD
04.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 dokumen	6 dokumen	1.887.602	Kab. Banjarnegara	DAU	6 dokumen	2.500.000	Sekretariat DPRD
04.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 orang	8 orang	240.200	Kab. Banjarnegara	DAU	8 orang	240.200	Sekretariat DPRD
04.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	5 dokumen	7 dokumen	268.786,1	Kab. Banjarnegara	DAU	7 dokumen	300.000	Sekretariat DPRD
04.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 dokumen	1 dokumen	561.749	Kab. Banjarnegara	DAU	1 dokumen	560.000	Sekretariat DPRD
04.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi DPRD	2 dokumen	5 dokumen	89.575	Kab. Banjarnegara	DAU	5 dokumen	95.000	Sekretariat DPRD
04.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat									
04.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	383.327,5	Kab. Banjarnegara	DAU	1 dokumen	400.000	Sekretariat DPRD
04.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 dokumen	3 dokumen	1.437.494,8	Kab. Banjarnegara	DAU	3 dokumen	1.500.000	Sekretariat DPRD
04.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD									
04.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	2 Dokumen	2 Laporan	523.038,5	Kab. Banjarnegara	DAU	2 Laporan	530.000	Sekretariat DPRD
04.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD									
04.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan	4 dokumen	4 dokumen	4.996.287,5	Kab. Banjarnegara	DAU	4 dokumen	7.000.000	Sekretariat DPRD

		Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD								
04.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	6.000	Kab. Banjarnegara	DAU	1 Laporan	210.000	Sekretariat DPRD
04.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 dokumen	12 dokumen	785.583	Kab. Banjarnegara	DAU	12 dokumen	775.000	Sekretariat DPRD
04.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	4 dokumen	4 dokumen	508.613	Kab. Banjarnegara	DAU	4 dokumen	520.000	Sekretariat DPRD
	Jumlah				52.479.000				57.510.200	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program pada perangkat daerah merupakan program prioritas dalam Renstra 2023-2026. Rencana program priorits beserta indikator keluar program sebagaimana tercantum dalam RPJMD selanjutnya dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Pemilihan untuk masing program/ kegiatan di Sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

   Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 8 Kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD. Dengan 18 Sub Kegiatan yaitu Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, Penyediaan bahan logistik kantor, Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor,

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD, Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD, dan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD.

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD terdiri dari 7 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan, Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD, Pembahasan Kebijakan Anggaran, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, Peningkatan Kapasitas DPRD, Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD dan Fasilitasi Tugas DPRD. Dengan 26 Sub Kegiatan yaitu, Pembahasan Rancangan Perda, Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan, Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik, Pembahasan KUA dan PPAS, Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, Pembahasan APBD, Pembahasan APBD Perubahan, Pembahasan Laporan Semester, Pembahasan Pertanggungjawaban APBD, Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum, Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur, Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat, Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian, Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah, Orientasi DPRD, Pendalaman Tugas DPRD, Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi, Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Penyusunan Program Kerja DPRD, Publikasi dan Dokumentasi

DPRD, Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD, Pelaksanaan Reses, Pengawasan Kode Etik DPRD, Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD, Penyusunan Laporan Kinerja DPRD, Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah dan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD.

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Tahun 2022-2026. Renja Setwan selanjutnya menjadi platform operasional bagi Perangkat Daerah dalam menjalankan programnya dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah tahun 2022-2026. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja Setwan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025 dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 disepakati.
2. Kerangka pendanaan dalam Renja Setwan masih bersifat sementara, sehingga masih dimungkinkan terjadi perubahan pagu yang disebabkan oleh pengurangan, penambahan, dan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan maupun antar sub kegiatan dalam kerangka penyusunan anggaran secara terpadu dan berbasis kinerja.

3. Renja Setwan menjadi acuan bagi Kepala Perangkat Daerah dan segenap jajarannya serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, serta menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 10 Agustus 2025

SEKRETARIS DPRD
KAB. BANJARNEGARA

dr. AHMAD SETIAWAN, M.PH.
Pembina Utama Muda
NIP. 197209182005011008

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan yang diatur melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan pembentukan tim penyusun, penelaahan rancangan awal RKPD, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, hingga pada penyempurnaan berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang RKPD. Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, penyusunan Renja Perangkat Daerah juga mengacu pada Renja Kementerian/Lembaga terkait, serta Renja Perangkat Daerah Provinsi terkait. Renja Perangkat Daerah adalah

dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

2. Landasan Hukum

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. UU Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang Tahun 2005-2025.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 317)
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
27. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 15);
28. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2025 tanggal 5 Juli 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

3. Maksud dan Tujuan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun dengan maksud untuk:

a. Menjabarkan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029 ke dalam rencana program kegiatan prioritas Tahun 2025 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Renja K/L Tahun 2026 dan Renja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;
b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerapan anggaran berbasis kinerja.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

a. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA-DPA dalam Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2026, yang dalam penyusunannya didahului dengan menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026;
b. Sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Tahun 2026;
c. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

4. Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun berdasarkan sistematika yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah.

BAB 2 : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dan atau pokok-pokok DPRD.

BAB 3 : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan tahun 2026.

BAB 4 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran RKPD.

BAB 5 : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah meliputi urusan Pekerjaan Umum

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 terdiri dari 9 program, 18 kegiatan, dan 22 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 113.029.838.966,- dengan fokus utama pada Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah.

Program/kegiatan/sub kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah yang meliputi:

1. Permasalahan terkait aspek geografis dan demografis yaitu Ketaatan Pemanfaatan Ruang Masih Rendah. Kabupaten Banjarnegara masih belum memaksimalkan tata kelola pemanfaatan ruang dengan baik, hal ini dapat dilihat dari persentase pemanfaatan ruang yang baru mencapai 1,01%. Ketidaktaatan terhadap pemanfaatan ruang dalam jangka panjang akan berdampak juga terhadap potensi peningkatan lingkungan kumuh, adanya lingkungan kumuh tentunya dapat mengganggu tata wilayah, selain itu berdampak pada bencana yang mungkin muncul dikemudian hari.
2. Permasalahan terkait aspek daya saing yang meliputi :
   a. Kualitas jalan dan jembatan yang menghubungkan antar desa, dan daerah perkotaan masih rendah. Beberapa kerusakan juga terjadi karena, minimnya pemeliharaan dan ketersediaan drainase, serta diakibatkan oleh perubahan cuaca ekstrim yang terjadi. Selain itu peningkatan ruas jalan tidak disertai

dengan pemenuhan sarana prasarana perlengkapan Jalan, termasuk penerangan jalan umum.

b. Pengembangan jaringan irigasi di Kabupaten Banjarnegara juga perlu ditingkatkan, masih banyak saluran irigasi yang belum memadai dan banyak area sawah yang belum terairi dengan baik, sistem irigasi yang tidak baik berpotensi mengganggu lahan pertanian yang berdampak pada krisis pangan.
c. Masih banyaknya bangunan gedung pemerintah aset daerah yang belum memenuhi standar teknis bangunan (IMB dan SLF).

Pada Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026, terjadi beberapa perubahan yang meliputi tambahan pagu, target kinerja, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Perubahan tersebut mengubah rincian dalam Renja Perangkat Daerah menjadi 9 program, 18 kegiatan, dan 22 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 113.029.838.966,-

Dinamika yang terjadi selama tahun 2024 turut mempengaruhi keberhasilan pencapaian Renja Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024 disajikan dalam tabel 1 berikut :

Tabel 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
Tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026	
				Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)			
1.03	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**								
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP DPUPR	71,21	BB:68	BB:71,05	104,48 %	71,21	71,21	100%
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat DPUPR	81,56	81,50	81,51-	100,01%	81,56	81,56	100%
1 03 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersedianya dokumen Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1 03 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan	9 Laporan	9 Laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
1 03 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	100%	12 Dok	12 Dok	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026	
				Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 03 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN+PPPK	107 orang	107 orang	107 orang	100%	107 orang	107 orang	100%
1 03 01 2.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dok	12 Dok	12 Dok	100%	12 dok	12 dok	100%
1 03 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya paket dokumen logistik, perlengkapan dan peralatan kantor perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1 03 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 Paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
1 03 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	12 Paket	12 Paket	100%	1 paket	1 paket	100%
1 03 01 2.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100%	5 Paket	5 paket	100%	100%	100%	100%
1 03 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 unit	1 Paket	1 paket	100%	1 unit	1 unit	100%
1 03 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026	
				Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Daya Air dan Listrik yang Disediakan							
1 03 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
1 03 01 2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	1 Paket	1 paket	100%	100%	100%	100%
1 03 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 unit	16 unit	16 unit	100%	16 unit	16 unit	100%
1 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang milik daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Barang milik daerah Penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	100%	2 Paket	2 Paket	100%	100%	100%	100%
1 03 01 2.09 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 Unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%
1 03 10	**Program Penyelenggaraan Jalan**	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	-	80,25%	55,27%	68,87%	-	-	
	Penyelenggaraan Jalan Kab. / Kota	Panjang jalan dalam kondisi baik	531,48 km	531,48 Km	489,630 km	64, 80%	531,48 km	531,48 km	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026	
				Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 03 10 2.01 0029	Penyusunan rencana, kebijakan dan strategi Pengembangangan Jaringan Jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Advis dan layanan teknis , kajian kebijakan, bantuan teknis, bimbingan teknis, pengelolaan, pengendalian.	6 dok	8	8	100%	6 dok	6 dok	100%
1 03 10 2.01 0028	Pengelolaan leger jalan	Jumlah dokumen pengelolaan leger jalan	1 dok	6 Dok	6 Dok	100%	1 dok	1 dok	100%
1 03 10 2.01 0043	Survey kondisi jalan dan jembatan	Panjang jalan dan jumlah jembatan yang disurvey kondisinya	885,80 km	885,8 Km	885,8 Km	100%	885,80 km	885,80 km	100%
1 03 10 2.01 0033	Rekonstruksi jalan	Panjang jalan yang direkonstruksi	57,60 km	13,322 Km	13,322 Km	100%	57,60 km	57,60 km	100%
1 03 10 2.01 0039	Rehabilitasi jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi	0,74 km	1,258 Km	1,258 Km	100%	0,74 km	0,74 km	100%
1 03 10 2.01 0034	Pemeliharaan berkala jalan	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara berkala	24,55 km	21,338 Km	21,286 Km	99,76%	24,55 km	24,55 km	100%
1 03 10 2.01 0042	Pemeliharaan berkala jembatan	Jumlah jembatan yang mengalami pemeliharaan secara berkala	-	7 Unit	6 Unit	85,71%	-	-	
1 03 10 2.01 0030	Pengawasan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan	Jumlah pengawasan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan	885,80 km	885,800 km	885,800 km	100%	885,80 km	885,80 km	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026	
				Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 03 02	**Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**	Persentase Luas Areal sawah yang teraliri jaringan irigasi dalam kondisi baik	-	76%	76,27%	100,355 %	-	-	
1 03 02 2.01	Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai (WS) dalam satu daerah kab / kota	Jumlah kelompok P3A yang mengikuti pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%
1 03 02 2.01 0075	Pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan sda kewenangan kab / kota	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan SDA	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	100%	10 lembaga	10 lembaga	100%
1 03 02 2.02 0035	Penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa	Jumlah Dokumen rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi	7 dok	5 Dok	5 Dok	100%	7 dok	7 dok	100%
1 03 02 2.02 0008	Peningkatan Jaringan irigasi permukaan	Panjang jaringan irigasi yang ditingkatkan	-	4,236 km	4,236 km	100%	-	-	
1 03 02 2.02 0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi	6,59 km	0,266 km	0,211 km	79,32%	6,59 km	6,59 km	100%
1 03 02 2.02 0034	Operasional unit pengelola Irigasi	Jumlah paket kegiatan operasional kelembagaan pengelola irigasi yang terlaksana	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026	
				Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 03 08	**Program Penataan Bangunan Gedung**	Persentase bangunan gedung pemerintah aset daerah yang memenuhi standar teknis	18,36%	11,56% %	14,67%	126,90%	18,36%	18,36%	100%
1 03 08 2.01	Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kab / kota, pemberian ijin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung	Jumlah bangunan gedung yang memenuhi standar teknis	5 unit	5 unit	5 unit	100%	5 unit	5 unit	100%
1 03 08 2.01 0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	50 dok	50 Dok	162 Dok	324%	50 dok	50 dok	100%
1 03 08 2.01 0021	Pembangunan, Pemanfaatan,	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan,	3 dok	4 Dok	4 Dok	100%	3 dok	3 dok	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026	
				Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota							
1 03 08 2.01 0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	1 BG	8 Unit	8 Unit	100%	1 BG	1 BG	100%
1 03 08 2.01 0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	1 BG	5 Unit	5 Unit	100%	1 BG	1 BG	100%
1.03.11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan operator dan teknisi atau analis yang mengikuti pelatihan	40 org	40 org	0	0%	40 org	40 org	100%
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan operator dan teknisi atau analis yang mengikuti pelatihan	40 org	40 org	0	0%	40 org	40 org	100%
1 03 12	**Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**	Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen Tata Ruang	92,50%	40%	40%	100%	92,50%	92,50%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026	
				Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 03 12 2.02	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah kabupaten atau kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Penyusunan RRTR	1 dok	2 dok	2 dok	100%	1 dok	1 dok	100%
	Pelaksanaan persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	1 dok	100%
	Sosialisasi Peraturan Perundangan-undangan dan pedoman Bidang Penataan Ruang	Jumlah dokumen Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Pedoman Bidang Penataan Ruang	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	1 dok	100%
1 03 12 2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR	0	2 Dok	2 dok	100%	0	0	
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 dok	2 Dok	5 dok	100%	1 dok	1 dok	100%

2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan pelayanannya, Perangkat Daerah mengampu 51 Indikator. Dari 51 indikator tersebut, hampir semuanya berstatus tercapai hanya sedikit yang tidak tercapai seperti pada kegiatan Penyelenggaraan jalan Kab/Kota. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaktercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Pada tahun 2024 untuk pekerjaan konstruksi terdapat pekerjaan yang secara fisik sudah selesai 100% akan tetapi ada kendala dalam pengajuan administrasi pembayaran yang dibutuhkan adendum kontrak pada akhir tahun 2024 sehingga menyebabkan ada 6 kegiatan Penyelenggaran jalan Kab/Kota terbayarkan di tahun 2025.
2. Lemahknya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan oleh pemegang kegiatan dan konsultan pengawas.
3. Kendala cuaca dan faktor alam yang terjadi saat pelaksanaan kegiatan

Dalam rangka mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut, telah dilakukan upaya-upaya yang meliputi:

1. Meningkatkan pengawasan/monitoring dan evaluasi selama pelaksanaan kegiatan agar kegiatan berjalan sesuai dengan yang direncakan baik kualitas maupun kuantitas

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel 2 berikut ini:

Tabel 2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK LPPD	Target Renstra Perangkat Daerah						Capaian Kinerja Periode 2024
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik		IKK	-	-	-	-	-	-	489,630 km
	Rasio penanganan jalan dalam kondisi sedang, rusak ringan dan rusak berat		IKK	7,21	21,21	21,70	22,22	22,77	23,34	-
2	Persentase bangunan gedung pemerintah aset daerah yang memenuhi standar teknis		IKK	14,96%	18,36%	21,76%	25,17%	28,57%	31,33%	126,90%
3	Persentase Luas Area sawah yang teraliri jaringan irigasi dalan kondisi baik		IKK	-	-	-	-	-	-	100,355%
	Indeks Prasarana Fisik Irigasi Kewenangan Kabupaten		IKK	40,25	41,99	43,72	45,46	47,19	48,92	-
4	Indeks Prasarana Non-Fisik Irigasi Kewenangan Kabupaten		IKK	63,43	63,83	64,23	64,63	65,03	65,43	-
5	Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi		IKK		66,62	74,96	83,31	91,65	100,00	100%
6	Persentase kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang		IKK		92,50%	93,00%	93,50%	94,00%	94,50%	100%
5	Persentase penduduk berakses air minum		IKK	98,70%	98,80%	98,90%	99,00%	99,10%	99,20%	96,86%
	Persentase akses sanitasi atau air limbah aman		IKK	78,25%	78,73%	80,03%	81,28%	82,33%	83,08%	-
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	104,48 %
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan urusan pemerintahan dalam satu urusan, yaitu Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam Renstra Tahun 2025-2029, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk tahun 2026 masih sama dengan tahun 2025 mencakup satu urusan tersebut. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah diantaranya adalah:

1. Permasalahan terkait aspek geografis dan demografis yaitu Ketaatan Pemanfaatan Ruang Masih Rendah. Kabupaten Banjarnegara masih belum memaksimalkan tata kelola pemanfaatan ruang dengan baik, hal ini dapat dilihat dari persentase pemanfaatan ruang yang baru mencapai 1,01%. Ketidaktaatan terhadap pemanfaatan ruang dalam jangka panjang akan berdampak juga terhadap potensi peningkatan lingkungan kumuh, adanya lingkungan kumuh tentunya dapat mengganggu tata wilayah, selain itu berdampak pada bencana yang mungkin muncul dikemudian hari.
2. Permasalahan terkait aspek daya saing yang meliputi :
   a. Kualitas jalan dan jembatan yang menghubungkan antar desa, dan daerah perkotaan masih rendah. Beberapa kerusakan juga terjadi karena, minimnya pemeliharaan dan ketersediaan drainase, serta diakibatkan oleh perubahan cuaca ekstrim yang terjadi. Selain itu peningkatan ruas jalan tidak disertai dengan pemenuhan sarana prasarana perlengkapan jalan, termasuk penerangan jalan umum. Panjang jalan Kabupten Banjarnegara berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 620/1576 Tahun 2023 Tentang Penetapan Nomor dan Nama Ruas Jalan, Panjang jalan Kabupaten Banjarnegara adalah 885,800 Km. Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara tahun 2024 diketahui bahwa kondisi jalan dalam kondisi baik sejumlah 498,630 km, rusak ringan sejumlah 123,850 km, jalan rusak sedang sejumlah 182,180 km, jalan rusak berat sejumlah 90,140 km, sedangkan

untuk kondisi jembatan dalam kondisi mantap sejumlah 578 unit dan kondisi tidak mantap sejumlah 10 unit.

b. Pengembangan jaringan irigasi di Kabupaten Banjarnegara juga perlu ditingkatkan, masih banyak jaringan irigasi yang belum memadai dan banyak areal sawah yang belum teraliri dengan baik, sistem jaringan irigasi yang tidak baik berpotensi mengganggu lahan pertanian yang berdampak pada penurunan atau kegagalan produksi pertanian. Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara tahun 2024 diketahui jumlah panjang saluran 409.766 m2, dengan kondisi baik sejumlah 309.464 m2, Kondisi rusak ringan 59.696 m2, Kondisi rusak berat 40.605 m2.

c. Masih banyaknya bangunan gedung pemerintah aset daerah yang belum memenuhi standar teknis bangunan (PBG dan SLF). Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara tahun 2024 diketahui bangunan gedung pemerintah aset daerah sejumlah 150 bangunan gedung yang memenuhi standar teknis sejumlah 22 bangunan gedung sehingga masih terdapat bangunan gedung yang belum memenuhi standar teknis sejumlah 128.

Permasalahan tersebut, jika tidak diselesaikan dapat menjadi *constraint* dalam pencapaian visi dan misi Bupati maupun capaian indikator lainnya. Beberapa dampak dari adanya permasalahan dan hambatan tersebut meliputi:

1. Ketidaktaatan terhadap pemanfaatan ruang dalam jangka panjang akan berdampak juga terhadap potensi peningkatan lingkungan kumuh, adanya lingkungan kumuh tentunya dapat mengganggu tata wilayah, selain itu berdampak pada bencana yang mungkin muncul dikemudian hari
2. sistem jaringan irigasi yang tidak baik berpotensi mengganggu lahan pertanian yang berdampak pada penurunan atau kegagalan produksi pertanian
3. Kualitas jalan dan jembatan yang menghubungkan antar desa, dan daerah perkotaan masih rendah peningkatan biaya operasional dan kerusakan kendaraan, menghambat efisiensi transportasi dan logistik, menurunkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi,

mengurangi minat investasi, serta menciptakan bahaya kecelakaan bagi pengguna jalan, termasuk kerusakan lingkungan seperti erosi dan polusi air.

4. Masih banyaknya bangunan gedung pemerintah aset daerah yang belum memenuhi standar teknis bangunan (PBG dan SLF) berdampak pada keselamatan (struktur lemah, risiko kebakaran), sanksi administratif seperti denda hingga pembongkaran, masalah legalitas dan nilai aset yang menurun).

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi, peningkatan kualitas birokrasi, dan meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan pengguna layanan akan meningkatkan kebutuhan akan adanya penyediaan produk layanan yang semakin baik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi-inovasi dalam menunjang peningkatan pelayanan publik secara kontinyu. Beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, yaitu:

1. Pengaduan masyarakat mengenai kondisi jalan dan jembatan melalui website OPD dan media sosial lainnya
2. Edukasi terhadap masyarakat agar ikut menjaga infrastruktur
3. Adanya Mall Pelayanan Publik dimana DPUPR ikut berperan dengan membuka layanan IMB, ITR dll kepada masyarakat

Berdasarkan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangn tersebut, dapat diinventarisasi beberapa isu strategis. Inventarisasi isu-isu strategis tahun 2026 didapatkan dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal Kabupaten Banjarnegara sampai dengan tahun 2025. Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan pembangunan. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2026, sebagai berikut:

1. Ketaatan Pemanfaatan ruang masih rendah.
2. Kualitas jalan dan jembatan yang menghubungkan antar desa dan daerah perkotaan masih rendah.
3. Masih banyak saluran irigasi yang belum memadai dan banyak area sawah yang belum terairi dengan baik,
4. Masih banyaknya bangunan gedung pemerintah aset daerah yang belum memenuhi standar teknis bangunan (IMB dan SLF)..

4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun terakhir RPD Tahun 2023-2026. Dalam RPD Tahun 2023-2026, prioritas arah kebijakan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2025 meliputi:

1. Penguatan perekonomian daerah berbasis pertanian yang berkelanjutan, dengan fokus pada:
   a. Meningkatkan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang pro investasi;
   b. Menerapkan inovasi dan teknologi pertanian dan perikanan;
   c. Meningkatkan kualitas sumber daya pertanian dan perikanan;
   d. Mengembangkan atraksi dan even wisata;
   e. Optimalisasi Mal Pelayanan Publik;
   f. Peningkatan jumlah kewirausahaan pemuda;
   g. Meningkatkan kapasitas kelembagaan UKM;
   h. Penguatan sektor industri pengolahan untuk meningkatkan nilai
   i. Peningkatan kualitas ekonomi kreatif;
   j. Pengendalian dampak lingkungan akibat pembangunan.
2. Peningkatan kualitas infrastruktur daerah, dengan fokus pada:
   a. Melaksanakan pembangunan jalan tuntas ruas;
   b. Meningkatkan pengelolaan dan tata guna air irigasi;
   c. Optimalisasi pengelolaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air bersih;
   d. Pengembangan manajemen persampahan;
   e. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung jalan.

Tabel 3
Review terhadap Rancangan RKPD tahun 2026 Kabupaten Banjarnegara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Banjarnegara	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100%	**12.000.878.966**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kab. Banjarnegara	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100%	**12.000.878.966**
			Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100%				Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100%	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah tersedianya dokumen Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		Jumlah tersedianya dokumen Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	**25.000.000**	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	**25.000.000**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase terpenuhinya Administrasi	100%	**10.817.014.616**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	**10.817.014.616**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Keuangan Perangkat Daerah							
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN+PPPK	107 orang/bulan	10.637.014.616	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN+PPPK	107 orang/bulan	10.637.014.616
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	180.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	180.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	**245.000.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	**245.000.000**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	225.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	225.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		prosentase Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100%	**0**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		prosentase Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100%	**0**
	Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	0	Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	0

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	**813.864.350**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	**813.864.350**
	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	160.000.000	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	160.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	653.864.350	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	653.864.350
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	**100.000.00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	**100.000.00**
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 unit	100.000.00	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 unit	100.000.00
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Program Penyelenggaraan Jalan		Rasio penanganan jalan dalam kondisi sedang, rusak ringan dan rusak berat	21,21%	**97.237.160.000**	**Program Penyelenggaraan Jalan**		Rasio penanganan jalan dalam kondisi sedang, rusak ringan dan rusak berat	21,21%	**97.237.160.000**
	Penyelenggaraan Jalan Kab. / Kota		Panjang jalan dalam kondisi baik	531,48 Km		**Penyelenggaraan Jalan Kab. / Kota**		Panjang jalan dalam kondisi baik	531,48 Km	
	Penyusunan rencana, kebijakan dan strategi Pengembangangan Jaringan Jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	8 dok	**2.087.160.000**	Penyusunan rencana, kebijakan dan strategi Pengembangangan Jaringan Jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	8 dok	**2.087.160.000**
	Pengelolaan leger jalan		Jumlah dokumen pengelolaan leger jalan	1 Dok	-	Pengelolaan leger jalan		Jumlah dokumen pengelolaan leger jalan	1 Dok	-
	Survey kondisi jalan dan jembatan		Panjang jalan dan jumlah jembatan yang disurvey kondisinya	885,80 Km	-	Survey kondisi jalan dan jembatan		Panjang jalan dan jumlah jembatan yang disurvey kondisinya	885,80 Km	-
	Penggantian Jembatan			25 m	5.000.000.000	Penggantian Jembatan			25 m	5.000.000.000
	Rekonstruksi jalan		Panjang jalan yang direkonstruksi	17,38 Km	78.650.000.000	Rekonstruksi jalan		Panjang jalan yang direkonstruksi	17,38 Km	78.650.000.000
	Rehabilitasi jalan		Panjang jalan yang direhabilitasi	15 Km	3.500.000.000	Rehabilitasi jalan		Panjang jalan yang direhabilitasi	15 Km	3.500.000.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Pemeliharaan berkala jalan		Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara berkala	24,55 Km	5.800.000.000	Pemeliharaan berkala jalan		Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara berkala	24,55 Km	5.800.000.000
	Rehabilitasi Jembatan		Panjang jembatan yang direhabiltasi	15 m	2.200.000.000	Rehabilitasi Jembatan		Panjang jembatan yang direhabiltasi	15 m	2.200.000.000
	Pengawasan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan		Panjang jalan/jembatan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan yang diawasi	885,80 km	-	Pengawasan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan		Panjang jalan/jembatan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan yang diawasi	885,80 km	-
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)		Indeks Prasarana Fisik Irigasi Kewenangan Kabupaten	41,99	350.000.000	**Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**		Indeks Prasarana Fisik Irigasi Kewenangan Kabupaten	41,99	350.000.000
	Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai (WS) dalam satu daerah kab / kota		Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan	63,83%	-	Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai (WS) dalam satu daerah kab / kota		Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan	63,83%	-
	Pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan sda kewenangan kab / kota		Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	10 lembaga	-	Pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan sda kewenangan kab / kota		Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	10 lembaga	-

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Pengembangan dan pengelolaan sistim irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam satu daerah kab / kota		Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten	12,50%	-	Pengembangan dan pengelolaan sistim irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam satu daerah kab / kota		Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten	12,50%	-
	Sub Kegiatan Penyusunan Dukungan Teknis Bidang Irigasi dan Rawa		Jumlah Dukungan Teknis Bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun	7 Dokumen	350.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan Dukungan Teknis Bidang Irigasi dan Rawa		Jumlah Dukungan Teknis Bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun	7 Dokumen	350.000.000
	Peningkatan Jaringan irigasi permukaan		Panjang jaringan irigasi yang ditingkatkan	-	0	Peningkatan Jaringan irigasi permukaan		Panjang jaringan irigasi yang ditingkatkan	-	0
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan		Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi	6,59 km	-	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan		Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi	6,59 km	-
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	3,29 km	-	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	3,29 km	-
	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi		Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	1 lembaga	-	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi		Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	1 lembaga	-
	Program Penataan Bangunan Gedung		Persentase bangunan gedung pemerintah aset	18,36 %	**1.146.800.000**	**Program Penataan Bangunan Gedung**		Persentase bangunan gedung pemerintah aset	18,36 %	**1.146.800.000**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			daerah yang memenuhi standar teknis					daerah yang memenuhi standar teknis		
	Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kab / kota, pemberian ijin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung		Jumlah bangunan gedung yang memenuhi standar teknis	5 Unit		Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kab / kota, pemberian ijin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung		Jumlah bangunan gedung yang memenuhi standar teknis	5 Unit	
	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG		Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	50 dok	110.800.000	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG		Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	50 dok	110.800.000
	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran		Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan,	3 Dokumen	-	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan		Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan	3 Dokumen	-

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		
	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	1 bagunan gedung	-	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	1 bagunan gedung	-
	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	5 bagunan gedung	1.036.000.000	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	5 bagunan gedung	1.036.000.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKS		**Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi**	**66,62**	30.000.000	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKS**		**Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi**	**66,62**	30.000.000
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		Jumlah penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi	1 keg	30.000.000	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		Jumlah penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi	1 keg	30.000.000
	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis		Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan	40 orang	0	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis		Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan	40 orang	0

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis		Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya	-	0	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis		Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya	-	0
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang		**Persentase kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang**	**92,50 %**	**465.000.000**	**Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**		**Persentase kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang**	**92,50 %**	**465.000.000**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen tata ruang yang ditetapkan	1 Dokumen	420.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen tata ruang yang ditetapkan	1 Dokumen	420.000.000
	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota		Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	410.000.000	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota		Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	410.000.000
	Penyusunan Peta Dasar		Jumlah data SHP Peta Dasar	1 Dokumen	10.000.000	Penyusunan Peta Dasar		Jumlah data SHP Peta Dasar	1 Dokumen	10.000.000
	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota		Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota	0	0	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota		Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota	0	0
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		Jumlah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota yang ditetapkan	1 Dokumen	45.000.000	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		Jumlah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota yang ditetapkan	1 Dokumen	45.000.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota		Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	0	0	Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota		Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	0	0
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	1	0	Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	1	0
	Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang Undangan Bidang Penataan Ruang		Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	1 laporan	45.000.000	Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang Undangan Bidang Penataan Ruang		Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	1 laporan	45.000.000
	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruan		Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	2 Dokumen	126.139.000,00	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruan		Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	2 Dokumen	126.139.000,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1 dok		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1 dok	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang		Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	1 dok		Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang		Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	1 dok	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang		Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1 dok		Sub Kegiatan Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang		Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1 dok	
	Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1 dok		Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1 dok	
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 dok		Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 dok	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Sub Kegiatan Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK		Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	20 dok		Sub Kegiatan Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK		Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	20 dok	
	Penilaian Perwujudan RTR		Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	0		Penilaian Perwujudan RTR		Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	0	

UPTD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	UPTD WILAYAH I				**300.000.000**	**UPTD WILAYAH I**				**300.000.000**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				**265.600.000**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**265.600.000**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**14.286.800**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**14.286.800**
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	14.286.800	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	14.286.800
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana		196.062.700	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana		196.062.700
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	196.062.700	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	196.062.700
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Paket		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Paket	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Barang milik daerah Penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	2 Paket		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Barang milik daerah Penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	2 Paket	
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**				

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**				
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 KM	0	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 KM	0
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				**34.400.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**				**34.400.000**
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				**34.400.000**	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**				**34.400.000**
	Pemeliharaan Rutin Jalan		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	14 KM	34.400.000	Pemeliharaan Rutin Jalan		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	14 KM	34.400.000
	UPTD WILAYAH II				**300.000.000**	**UPTD WILAYAH II**				**300.000.000**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				**265.600.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**				**265.600.000**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**14.286.800**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**14.286.800**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	14.286.800	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	14.286.800
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana		196.062.700	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana		196.062.700
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	196.062.700	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	196.062.700
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Paket belanja Modal yang dilaksankan untuk memenuhi kebutuhan	1 Paket		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Paket belanja Modal yang dilaksankan untuk memenuhi kebutuhan	1 Paket	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Paket Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dilaksanakan	12 paket	55.250.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Paket Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dilaksanakan	12 paket	55.250.500
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				**0**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**				**0**
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang	3 Unit	**0**	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan**		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang	3 Unit	**0**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Dioperasikan dan Dipelihara			**Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		Dioperasikan dan Dipelihara		
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				0	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				0
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				**34.400.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**				**34.400.000**
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	1 KM	**34.400.000**	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	1 KM	**34.400.000**
	Pemeliharaan Rutin Jalan		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	1 KM	34.400.000	Pemeliharaan Rutin Jalan		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	1 KM	34.400.000
	UPTD WILAYAH III				**300.000.000**	**UPTD WILAYAH III**				**300.000.000**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				**265.600.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**				**265.600.000**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**14.286.800**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**14.286.800**
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	14.286.800	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	14.286.800

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana		196.062.700	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana		196.062.700
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	196.062.700	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	196.062.700
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Paket belanja Modal yang dilaksankan untuk memenuhi kebutuhan	1 Paket	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Paket belanja Modal yang dilaksankan untuk memenuhi kebutuhan	1 Paket	0
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Paket Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dilaksanakan	12 paket	55.250.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Paket Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dilaksanakan	12 paket	55.250.500
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				**0**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**				**0**
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				**0**	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**				**0**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	12 KM	0	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	12 KM	0
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				**34.400.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**				**34.400.000**
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				**34.400.000**	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**				**34.400.000**
	Pemeliharaan Rutin Jalan		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	1 KM	34.400.000	Pemeliharaan Rutin Jalan		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	1 KM	34.400.000
	UPTD WILAYAH IV				**300.000.000**	**UPTD WILAYAH IV**				**300.000.000**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				**265.600.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**				**265.600.000**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**14.286.800**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**14.286.800**
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	14.286.800	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	14.286.800
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana		196.062.700	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana		196.062.700

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	196.062.700	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	196.062.700
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Paket belanja Modal yang dilaksankan untuk memenuhi kebutuhan	1 Paket	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Paket belanja Modal yang dilaksankan untuk memenuhi kebutuhan	1 Paket	0
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Paket Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dilaksanakan	12 paket	55.250.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Paket Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dilaksanakan	12 paket	55.250.500
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				-	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**				-
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				-	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**				-
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	12 KM	-	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	12 KM	-

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				**34.400.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**				**34.400.000**
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				**34.400.000**	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**				**34.400.000**
	Pemeliharaan Rutin Jalan		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	1 KM	34.400.000	Pemeliharaan Rutin Jalan		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	1 KM	34.400.000
	UPTD WILAYAH V				**300.000.000**	**UPTD WILAYAH V**				**300.000.000**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				**265.600.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**				**265.600.000**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**14.286.800**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**14.286.800**
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	14.286.800	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	14.286.800
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang tersusun		196.062.700	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang tersusun		196.062.700
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	196.062.700	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	196.062.700
	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya		Jumlah Paket belanja Modal yang dilaksankan	1 Paket	0	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya		Jumlah Paket belanja Modal yang dilaksankan	1 Paket	0

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			untuk memenuhi kebutuhan					untuk memenuhi kebutuhan		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dilaksanakan	12 paket	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dilaksanakan	12 paket	0
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	55.250.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	55.250.500
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				-	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**				-
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				-	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**				-

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	12 KM	-	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	12 KM	-
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				**34.400.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**				**34.400.000**
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				**34.400.000**	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**				**34.400.000**
	Pemeliharaan Rutin Jalan		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	1 KM	34.400.000	Pemeliharaan Rutin Jalan		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	1 KM	34.400.000
	UPTD WILAYAH PERLENGKAPAN DAN PERBENGKELAN				**300.000.000**	**UPTD WILAYAH PERLENGKAPAN DAN PERBENGKELAN**				**300.000.000**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				**300.000.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**				**300.000.000**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**14.286.800**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**14.286.800**
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	14.286.800	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	14.286.800

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang tersusun		14.286.800	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang tersusun		14.286.800
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		14.286.800	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		14.286.800
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Paket Belanja Modal yang dilaksanakan untuk memenihi kebutuhan	12 Paket	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Paket Belanja Modal yang dilaksanakan untuk memenihi kebutuhan	12 Paket	0
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah paket jasa pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dilaksanakan	10 Paket	89.650.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah paket jasa pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dilaksanakan	10 Paket	89.650.500
	penyediaan dan perlengkapan kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	0	penyediaan dan perlengkapan kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	0

5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan musrenbang kecamatan dan forum konsultasi publik telah disampaikan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui aplikasi SIPD. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	**Program Penyelenggaraan Jalan**		Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	60%	
	Penyelenggaraan Jalan Kab/Kota		Panjang jalan dalam kondisi baik	755,61 Km	
	Penyusunan rencana, kebijakan dan strategi Pengembangangan Jaringan Jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan	20 Kecamatan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Advis dan layanan teknis , kajian kebijakan, bantuan teknis, bimbingan teknis, pengelolaan, pengendalian.	6	
	Pengelolaan leger jalan	20 Kecamatan	Jumlah dokumen pengelolaan leger jalan	1 Dokumen	
	Survey kondisi jalan dan jembatan	20 Kecamatan	Panjang jalan dan jumlah jembatan yang disurvey kondisinya	938,65 Km	
		20 Kecamatan		588 Unit	
	Rekonstruksi jalan	20 Kecamatan	Panjang jalan yang direkonstruksi	18,212 Km	
	Rehabilitasi jalan	20 Kecamatan	Panjang jalan yang direhabilitasi	0,456 Km	
	Pemeliharaan berkala jalan	20 Kecamatan	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara berkala	14,489 Km	
	Pemeliharaan berkala jembatan	20 Kecamatan	Jumlah jembatan yang mengalami pemeliharaan secara berkala	3 Unit	
	Pengawasan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan	20 Kecamatan	Jumlah pengawasan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan	15 Dokumen	
2	**Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**		Persentase Luas Areal sawah yang teraliri jaringan irigasi dalam kondisi baik	53	
	Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai (WS) dalam satu daerah kab / kota	20 Kecamatan	Jumlah kelompok P3A yang mengikuti pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA	10 GP3A	
	Pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan sda kewenangan kab / kota	20 Kecamatan	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan SDA	10 GP3A	
	Pengembangan dan pengelolaan sistim irigasi primer dan sekunder	20 Kecamatan	Panjang Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	2036 m	

	pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam satu daerah kab / kota				
	Penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa	20 Kecamatan	Jumlah Dokumen rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi	5 Dokumen	
	Peningkatan Jaringan irigasi permukaan	20 Kecamatan	Panjang jaringan irigasi yang ditingkatkan	-	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	20 Kecamatan	Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi	1263 m	
	Operasional unit pengelola Irigasi	20 Kecamatan	Jumlah paket kegiatan operasional kelembagaan pengelola irigasi yang terlaksana	1 Paket	
	Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	20 Kecamatan	Panjang jaringan irigasi yang dipelihara	773 m	

6. Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan hasil reses anggota DPRD, melalui aplikasi SIPD telah disampaikan usulan program dan kegiatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan tahun 2026 belum bisa diketahui karena APBD belum ditetapkan.

Tabel 4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Validasi

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Agenda Pembangunan RPJMN IV tahun 2025 – 2029 adalah Agenda Pembangunan RPJMN IV tahun 2025–2029 adalah fondasi awal untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 dengan fokus pada delapan prioritas pembangunan nasional. Agenda ini mencakup prioritas untuk memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM, memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara, serta mendorong swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, digital, hijau, dan biru.

Adapun 17 Program Prioritas RPJMN 2025–2029 sebagai berikut :

1. Peningkatan ketahanan keluarga: Fokus pada penguatan institusi keluarga dan pemenuhan hak-hak keluarga.
2. Penyediaan pelayanan kesehatan dasar bagi seluruh rakyat: Meliputi peningkatan BPJS Kesehatan, penyediaan obat, dan revitalisasi fasilitas kesehatan.
3. Reformasi birokrasi, hukum, dan politik: Penyempurnaan sistem pelayanan publik dan penguatan lembaga.
4. Pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan: Upaya penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan.
5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM): Melalui pendidikan, sains, teknologi, dan digitalisasi.
6. Peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan: Meliputi pembangunan hunian layak dan perlindungan sosial.
7. Pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan: Memperkuat UMKM dan pembangunan ekonomi dari desa.
8. Peningkatan swasembada pangan, energi, dan air: Untuk mencapai kemandirian nasional.

9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara: Serta pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif.
10. Peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan kelompok rentan: Termasuk perempuan, anak, dan penyandang disabilitas.
11. Pelestarian lingkungan hidup: Menjamin keberlanjutan lingkungan dan sumber daya alam.
12. Pengembangan infrastruktur dan konektivitas nasional: Terutama di daerah tertinggal dan perbatasan.
13. Pengembangan industri kreatif, inovasi, dan UMKM: Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
14. Pembangunan IKN dan kota-kota mandiri lainnya: Menuju pengembangan perkotaan yang inovatif dan berkarakteristik.
15. Pengembangan agromaritim berbasis industri: Melalui peran aktif koperasi di sentra produksi.
16. Penyediaan lapangan kerja berkualitas: Mendorong kewirausahaan dan industri kreatif.
17. Peningkatan toleransi antarumat beragama: Menciptakan masyarakat yang harmonis.

Peningkatan toleransi antarumat beragama: Menciptakan masyarakat yang harmonis. Telaah terhadap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara meliputi Program pembangunan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) berdasarkan RPJMN 2025-2029 akan fokus pada pencapaian tiga sasaran utama pembangunan nasional, yaitu penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, dan pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Secara spesifik, Kementerian PUPR akan merancang program dan kegiatan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung sasaran-sasaran ini, sesuai dengan strategi, kebijakan umum, dan program kementerian yang tertuang dalam RPJMN.

Visi Kabupaten Banjarnegara “Mewujudkan Banjarnegara yang Maju dan Sejahtera”. Kemudian

dijabarkan dalam pokok visi dan misi yang diampu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 5
Pokok Visi, Misi dan Tujuan DPUPR Tahun 2026

No	Pokok Visi	Misi	Tujuan
1	Mewujudkan Banjarnegara yang Maju dan Sejahtera	Meningkat kan Infrastruk tur dan Pelayanan Publik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung misi ke empat RPJPD Kabupaten Banjarnegara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara antara lain:

a. Tujuan Renja DUPR : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik.
b. Sasaran Renja DPUPR:
    1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik perangkat daerah
    2. Meningkatnya kualitas infrastruktur fisik
    3. Meningkatnya pelayanan dan ketersediaan jaringan irigasi
    4. Meningkatnya penyelenggaraan jasa konstruksi
    5. Meningkatnya ketaatan pelaksanaan penataan ruang

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas pembangunan Tahun 2026 dijabarkan kedalam semua urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten Banjarnegara, berkaitan dengan hal tersebut maka pada Tahun 2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara merencanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut.

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
   1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
      Kegiatan ini didukung oleh 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :
      a. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
   2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      Kegiatan ini didukung oleh 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :
      b. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
      c. Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
   3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
      Kegiatan ini didukung oleh 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :
      a. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
      b. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
   4. Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.
      Kegiatan ini didukung oleh 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :
      a. Sub kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya.
   5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
      Kegiatan ini didukung oleh 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :
      a. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
      b. Sub kegiatan Penyedia jasa pelayanan umum kantor.

6. Kegiatan Pemeliharaaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.

   Kegiatan ini didukung oleh 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :

   a. Sub kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaran dinas jabatan.
   b. Sub Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

II. Program Penyelenggaraan Jalan.

1. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota (Termasuk UPT).
   a. Sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan.
   b. Sub kegiatan Pengelolaan Leger Jalan.
   c. Sub Kegiatan Survei Kondisi Jalan/Jembatan.
   d. Sub Kegiatan Rekonstruksi jalan.
   e. Sub kegiatan Rehabilitasi Jalan.
   f. Sub kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan.
   g. Sub kegiatan Penggantian Jembatan.
   h. Sub kegiatan pemeliharaan berkala Jembatan.
   i. Sub kegiatan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan.

III. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).

1. Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
   a. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota. mempunyai indikator keluaran jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan.
2. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
   a. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa.
   b. Sub kegiatan Peningkatan Jaringan irigasi Permukaan.
   c. Sub kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan.

d. Sub Kegiatan Operasional Unit Pengelola Irigasi.

IV. Program Penataan Bangunan Gedung.

1. Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.
   a. Sub kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG.
   b. Sub Kegiatan Perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pemanfaatan bangunan gedung daerah kab /kota.
   c. Sub Kegiatan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota.
   d. Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.

V. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

1. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
   a. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruks
   b. Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis

VI. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.

1. Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota.
   a. Sub kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota.
   b. Sub kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang undangan Bidang Penataan Ruang.
2. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota.
   a. Sub kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota.
3. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

b. Sub kegiatan Koordinasi pelaksanaan penataan ruang.

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. Renja Perangkat Daerah selanjutnya menjadi *platform* operasional bagi Perangkat Daerah dalam menjalankan programnya dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka sasaran pembangunan daerah tahun 2025. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026 dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disepakati.
2. Kerangka pendanaan dalam Renja Perangkat Daerah masih bersifat sementara, sehingga masih dimungkinkan terjadi perubahan pagu yang disebabkan oleh pengurangan, penambahan, dan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan maupun antar sub kegiatan dalam kerangka penyusunan anggaran secara terpadu dan berbasis kinerja.
3. Renja Perangkat Daerah menjadi acuan bagi Kepala Perangkat Daerah dan segenap jajarannya serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam pel aksanaan pembangunan, serta menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 2025

Kepala Dinas
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Banjarnegara

YUSUF WINARSONO, ST.,MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 197105071988031007

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan yang diatur melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan pembentukan tim penyusun, penelaahan rancangan awal RKPD, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, hingga pada penyempurnaan berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang RKPD. Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, penyusunan Renja Perangkat Daerah juga mengacu pada Renja Kementerian/Lembaga terkait, serta Renja Perangkat Daerah Provinsi terkait. Renja Perangkat Daerah adalah

dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2. Landasan Hukum

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
18. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 107);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015-2030 (Lembaran Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 204);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 32);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Peraturan Daerah Kabupaten Banjarenegara Tahun 2017 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 254);
35. Peraturan Bupati Nomor Banjarnegara Nomor 67 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 67);
36. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 Nomor 27).

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun dengan maksud untuk:

a. Menjabarkan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023–2026 ke dalam rencana program kegiatan prioritas Tahun 2026 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Renja K/L Tahun 2026 dan Renja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;
b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerapan anggaran berbasis kinerja.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

a. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA-DPA dalam Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2026, yang dalam penyusunannya didahului dengan menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026;

b. Sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Tahun 2026;
c. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun berdasarkan sistematika yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah.

BAB 2 : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dan atau pokok-pokok DPRD.

BAB 3 : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan tahun 2026.

BAB 4 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran RKPD.

BAB 5 : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah meliputi **URUSAN PILIHAN PARIWISATA dan URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN**

Pariwisata dan Kebudayaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 terdiri dari 6 program, 29 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 25.663.311.282,- dengan fokus utama pada Meningkatnya kualitas Pariwisata dengan pengembangan pariwisata sebagai sarana dan prasarana pendukung dan menciptakan daya saing,Lestarinya Seni dan Budaya daerah dengan mempertahankan kearifan budaya,kesenian dan adat istiadat asli daerah di Banjarnegara

Program/kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah yang meliputi:

Tabel 2.1 : Program dan Kegiatan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

		Uraian
		3
1		**Program Pengembangan Kebudayaan**
1.1		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**
	1	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
1.2		**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**

	2	Pelindungan,Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
	3	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota
	4	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat
2		**Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya**
2.3		**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**
	5	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya
3		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
3.4		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3.5		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
	7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	8	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3.6		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
3.7		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**
	10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3.8		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
	11	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3.9		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
	12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3.10		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
	14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
4		**Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**
4.11		**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**
	17	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
4.12		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**
	18	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

	19	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
	20	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
	21	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
5		**Program Pemasaran**
5.13		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**
	22	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri
	23	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
	24	Fasilitasi kegiatan Pemasaran Pariwisata baik dalam dan luar negeri Pariwisata Kabupaten Kota
	25	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
6		**Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif**
6.14		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**
	26	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
	27	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI
	28	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata
6.15		**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**
	29	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif

Dari 6 program 29 sub kegiatan yang dalam Renja Perangkat Daerah tersebut, program/kegiatan yang disetujui untuk dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024 terdiri dari 6 program 29 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 25.663.311.282,- Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024, terjadi beberapa perubahan yang meliputi penambahan atau pengurangan pagu, penghapusan, penambahan atau pengurangan program/kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Perubahan tersebut mengubah rincian dalam Renja Perangkat Daerah menjadi 6 program 29 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 25.663.311.282,-. Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2024, program/kegiatan yang bertambah meliputi Pengadaan peralatan gedung kantor.

Keberhasilan peningkatan angka kunjungan menjadi tolok ukur utama keberhasilan atas pencapaian

kinerja tahun 2024 dan namun belum melampaui target yang di tetapkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara, sebagai indikator utama keberhasilan yang di tuangkan dalam indikator kinerja, target dan capaian di tahun 2024. Didukung ketercukupan SDM yang di miliki Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara sebagai pengelola seluruh kegiatan yang dicanangkan dalam RENSTRA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara dan RPJMD Kabupaten Banjarnegara.

Pada tahun 2024 jumlah kunjungan wisatawan mengalami penurunan kunjungan namun untuk pendapatan daerah mengalami kenaikan. Pengembangan Destinasi Pariwisata sebagai sarana dan prasarana pendukung dan menciptakan daya saing baik sebagai pendukung daya tarik wisata di obyek wisata yang di kelola pemda yaitu Dieng dan Curug Pitu, telah di bangunnya sarana dan prasarana sebagai pemenuhan kebutuhan vital wisatawan di saat berkunjung ke obyek yang di kelola Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara.

Gencarnya promosi yang di lakukan oleh Dinas pariwisata dan Kebudayaan adalah merupakan salah satu sarana dan prasarana untuk meningkatkan angka kunjungan. Penyelenggarakan event – event pariwisata yang di laksanakan merupakan ajang sarana promosi dan pengenalan akan khasanah budaya daerah yang ada di Banjarnegara serta mengangkat kearifan budaya lokal untuk di angkat menjadi sebuah daya tarik wisata serta menjaga kelestarian akan budaya tersebut.

Mempertahankan kearifan budaya, Kesenian dan adat istiadat asli daerah merupakan salah satu indikator kegiatan yang di laksanakan oleh Dinas pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara.

Banyaknya desa wisata yang lahir merupakan fenomena yang perlu di sikapi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai Destinasi baru di Banjarnegara ,oleh

karena itu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melalui Bidang Kelembagaan melakukan pembinaan melalui pengelola Desa wisata yang dalam hal ini disebut kelompok sadar wisata (pokdarwis).

Berbagai Desa menampilkan banyak ragam daya tarik baik alam,buatan maupun budayanya,hal ini perlu di tertibkan dengan SOP Desa wisata atau perlu di buat aturan standar Desa wisata atau obyek wisata yang berstandar baik tingkat Kabupaten maupun Tingkat Propinsi.

Sebagai penunjang keberhasilan kepariwisataan di Banjarnegara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melalui Bidang – bidang yang ada di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah melaksanakan berbagai langkah signifikan untuk kemajuan pariwisata dan lebih luas dari pada itu semua adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banjarnegara pada umumnya melalui sektor pariwisata karena pariwisata merupakan peluang bisnis yang menjajikan bagi masyarakat sekitar obyek pariwisata tersebut disamping sebagai penggerak ekonomi yang cepat dalam penyerapan tenaga kerja, penciptaan peluang usaha bagi masyarakat sekitar obyek pada khususnya dan masyarakat Banjarnegara pada umumnya.

a. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi **Program pengembangan destinasi pariwisata.** Secara keseluruhan sasaran strategis 2 dilaksanakan melalui 2 program 6 kegiatan, dengan 6 indikator kegiatan. Indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat, **Program Pengembangan Nilai Budaya** dan **Program Pengelolaan Keragaman Budaya**. Secara keseluruhan sasaran strategis 3 dilaksanakan melalui 2 program 6 kegiatan, dengan 9 indikator kegiatan, dan **Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.** Secara keseluruhan sasaran strategis 4 dilaksanakan melalui 1 program 2

kegiatan, dengan 3 indikator kegiatan. Berdasar realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tersebut di atas, semuanya melebihi target kinerja hasil/keluaran dari yang telah direncanakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Perencanaan dan penganggaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan
2. Koordinasi dengan perangkat desa dalam pengembangan kesenian di masing-masing wilayah
3. Perawatan dan pemeliharaan Benda Cagar Budaya dilaksanakan dengan baik antara pemangku kepentingan
4. Pelayanan kepada wisatawan yang memuaskan

Tabel 2.2 : Indikator kinerja tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Inidkator Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya penghargaan masyarakat terhadap nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal	Berkembangnya seni budaya daerah	Prosentase pemajuan seni budaya daerah	20%	27%	100%
		Lestarinya bangunan cagar budaya	Prosentase benda cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan	17%	17%	100%
2	Meningkatnya daya saing daerah	Berkembangnya destinasi pariwisata	Prosentase pelaksanaan rehabilitasi / pembangunan obyek wisata	25%	42,85%	100%
		Meningkatnya kunjungan pariwisata	Prosentase Peningkatan Kunjungan Wisata	3%	0,53%	100,53%
			Prosentase Peningkatan Lama Tinggal	1.1	1.1	100%
			Prosentase Peningkatan Kapasitas SDM Masyarakat, Pelaku Wisata dan Ekonomi Kreatif	17	23.01	100%
3	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai Sakip	60	68	100%
4	Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik	Meningkatnya nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	82.1 (Nilai)	81,46	100%

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka pada tahun perencanaan selanjutnya perlu ditingkatkan lagi agar lebih efektif dan efisien dari segi anggaran maupun waktu pelaksanaan dan koordinasi antar pemangku kepentingan juga harus lebih ditingkatkan. Pada tahun perencanaan selanjutnya, perlu diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, diantaranya:

1. Frekuensi koordinasi antar pemangku kepentingan perlu ditingkatkan sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar
2. Perencanaan kegiatan dilakukan dengan skala prioritas sehingga indikator kunci dapat diutamakan
3. Masing-masing bidang berkomitmen kuat untuk mewujudkan tercapainya indikator kinerja

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerahtahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2		3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10(5+7+8)	11(10/4)
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	**Urusan Pemerintahan Plihan**									
	Pekerjaan Umum dan	**Pariwisata**									

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerahtahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2		3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10(5+7+8)	11(10/4)
	Penataan Ruang										
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota**									
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerahtahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2		3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10(5+7+8)	11(10/4)
1	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Jumlah rekening dinas yang terbayar	60 rekening	Jumlah rekening dinas yang terbayar	60 rekening	60 rekening	100.00 %	60 rekening	60 rekening	
2	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran (PTT/THL)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah PTT dan THL	26 orang	Jumlah PTT dan THL	26 orang	20 Orang	76.92%	18 orang	26 Orang	
3	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	Jumlah kebutuhan bahan pembersih kantor	6 bulan	Jumlah kebutuhan bahan pembersih kantor	12 bulan	12 Bulan	100.00 %	12 bulan	12 Bulan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerahtahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2		3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10(5+7+8)	11(10/4)
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Personil pengelola keuangan SKPD	144 orang	Jumlah Personil pengelola keuangan SKPD	17 orang	17 Orang	100.00%	17 Orang	144 Orang	
		Administrasi Umum Perangat									

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerahtahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2		3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10(5+7+8)	11(10/4)
		Daerah									
5	Peneydiaan Bahan Logistik Kantor	Peneydiaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah kebutuhan bahan logistik kantor	6 bulan	Jumlah kebutuhan bahan logistik kantor	12 bulan	12 Bulan	100.00%	12 Bulan	12 Bulan	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Pemeliharaan Barang Milik Dareah Peunjang Urusan Pemeritah Daerah**									

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerahtahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2		3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10(5+7+8)	11(10/4)
6	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-	Jumlah perlengkapan gedung kantor baru	2 jenis	Jumlah perlengkapan gedung kantor baru	2 jenis	0 jenis	0.00 %		2 Unit	
7	Pengadaan peralatan gedung kantor	-	Jumlah peralatan gedung kantor baru	2 jenis	Jumlah peralatan gedung kantor baru	0	8 jenis	100%		2 Unit	
8	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Jangka waktu pemeliharaan sarana dan prasarana	6 bulan	Jangka waktu pemeliharaan sarana	6 bulan	0	0.00 %		12 Bulan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerahtahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2		3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10(5+7+8)	11(10/4)
		Bangunan Lainnya	gedung kantor		dan prasarana gedung kantor						
9	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Peneydiaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas dipelihara	2 unit	Jumlah kendaraan dinas dipelihara	5 unit	6 unit	120.00%		5 Unit	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerahtahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2		3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10(5+7+8)	11(10/4)
		Jabatan									
0 1	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan/Rehabiltasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	0 jenis	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	1 tahun	1 tahun	100.00%		5 Unit	
1 1	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	0 jenis	Jumlah peralatan gedung kantor yang	0	0	0.00 %		10 Unit	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerahtahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2		3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10(5+7+8)	11(10/4)
					dipelihara						
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**									
2 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD	2 jenis dokumen	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD	2 jenis dokumen	2 jenis dokumen	100.00%	2 Dokumen	2 Dokumen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerahtahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2		3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10(5+7+8)	11(10/4)
	kinerja SKPD	Ikhtisar Relaisasi Kinerja SKPD									
	Program Bidang Cipta Karya	**Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**						0			
		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten /Kota									

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerahtahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2		3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10(5+7+8)	11(10/4)
1 3	Penyusunan DED Prasarana Wilayah	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen perencanaan destinasi parwisata	1 paket	Jumlah dokumen perencanaan destinasi parwisata	1 paket	1 paket	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata										

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerahtahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2		3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10(5+7+8)	11(10/4)
14	Pengembangan Jenis dan paket wisata unggulan	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	Jumlah penyelenggaraan showbiz dan pekan lebaran	12 hari	Jumlah penyelenggaraan showbiz dan pekan lebaran	7 hari	5 hari	71.43 %		31 Kali	
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten /Kota									

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerahtahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2		3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10(5+7+8)	11(10/4)
5.1	Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan	Pengadaan/ Pemellihara an/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah obyek wisata dibangun / direhabilitasi	3 paket	Jumlah obyek wisata dibangun / direhabilitasi	1 paket	7 paket	700.00%	10 paket	7 Paket	
6.1	Operasional dan Pengembangan UPT KWDT	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan	Jangka waktu operasionalisasi UPT pariwisata	0 tahun	Jangka waktu operasionalisasi UPT	1 tahun	1 tahun	100.00%	12 bulan/tahun	12 Bulan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerahtahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2		3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10(5+7+8)	11(10/4)
		Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota			pariwisata						
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	**Program Pemasaran Pariwisata**									
		Pemasaran pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan									

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerahtahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2		3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10(5+7+8)	11(10/4)
		Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten /Kota									
7 1	Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi pariwisata	Jangka waktu pemeliharaan web site pariwisata	1 tahun	Jangka waktu pemeliharaan web site pariwisata	1 tahun	1 Tahun	100.00%		1 Tahun	
8 1	Pengembangan jaringan kerja sama promosi	-	Jumlah pelaksanaan kerjasama pariwisata	10 kali	Jumlah pelaksanaan kerjasama	8 kali	0 kali	0.00 %		3 Kali	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerahtahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2		3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10(5+7+8)	11(10/4)
	pariwisata				pariwisata						
19	Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah wisatawan obyek wisata pemda ter-asuransi	1 tahun	Jumlah wisatawan obyek wisata pemda ter-asuransi	1 tahun	1 tahun	100.00%		750.000 Wisatawan	
02	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di	Penguatan Promosi melalui Media Cetak,	Jumlah pelaksanaan roadshow / travel dialog / famtrip / iklan	1 tahun	Jumlah pelaksanaan roadshow / travel	1000 Explr	753 banner	75.30%		4 Kali	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerahtahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2		3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10(5+7+8)	11(10/4)
	luar negeri	Elektronik, dan Media Liannya Baik Dalam dan Luar Negeri			dialog / famtrip						
2.1	Pengembangan statistik wisata terpadu	-	Jumlah buku direktori pariwisata	500 buku	Jumlah buku direktori pariwisata	450 buku	0 buku	0.00 %		200 Buku	
2.2	Pemilihan duta wisata	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar	Jumlah peserta pemilihan duta wisata	1 kali	Jumlah peserta pemilihan duta wisata	1 kali	0 kali	0.00 %		30 Orang	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerahtahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2		3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10(5+7+8)	11(10/4)
		Negeri pariwisata Kabupatn/ Kota									
3 2	Pameran Promosi Pariwisata	-	Jumlah pelaksanaan pameran promosi pariwisata	0 kali	Jumlah pelaksanaan pameran promosi pariwisata	2 kali	0 kali	0.00 %		2 Kali	
4 2	Fasilitasi Penyelenggaraan Event Pariwisata	-	Jumlah fasilitasi event pariwisata	3 kegiatan	Jumlah fasilitasi event pariwisata	2 event	1 event	50.00 %		4 Kali	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerahtahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2		3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10(5+7+8)	11(10/4)
5 2	Fasilitasi Forum Pariwisata	-	Jumlah fasilitasi stake holder pariwisata	5 kali	Jumlah fasilitasi stake holder pariwisata	22 Pokdarwis	22 pokdarwis	100.00%		1 Kali	
	Program Pengembangan Kemitraan	**Program Pengembangan Sumber Daya pariwisata dan Ekonomi Kreatif**									

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerahtahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2		3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10(5+7+8)	11(10/4)
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Suber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar									
26	Pengembangan sumber daya manusia dan	Pengembangan Kompetensi SDM	Jumlah pembinaan / pelatihan pariwisata	6 kali	Jumlah pembinaan / pelatihan pariwisata	400 orang	120 orang	30.00 %		5 Kali	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerahtahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2		3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10(5+7+8)	11(10/4)
	profesionalisme bidang pariwisata	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar									
7 2	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Peningkatan Peran Serta Masyyarakat dalam Pengembangan Kmeitraan Pariwisata	Jumlah pelatihan / pembinaan masyarakat desa wisata	6 kali	Jumlah pelatihan / pembinaan masyarakat desa wisata	150 orang	150 orang	100.00%		5 Kali	
		Urusan									

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerahtahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2		3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10(5+7+8)	11(10/4)
		Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkatan Dengan Pelayanan Dasar									
	Kebudayaan	**Kebudayaan**									
	Program Pengembangan Nilai Budaya	**Program Pengembangan Kebudayaan**									

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerahtahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2		3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10(5+7+8)	11(10/4)
		Pelestrian Kesenian Tradisonal Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten /Kota									
8 2	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	-	Jumlah acara dialog Banyumasan	0	Jumlah acara dialog Banyumasan	0	0	0.00%		6 Kali	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerahtahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2		3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10(5+7+8)	11(10/4)
9 2	Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya	Pembinaan Sumber Daya Manusia/ Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah group kesenian penerima bantuan	20 grup	Jumlah group kesenian penerima bantuan	6 grup	4 group	66.67%	16 grup	20 Group	
0 3	Penyelenggaraan Apresiasi Pelajar	-	Jumlah pentas seni budaya pelajar	1 kali	Jumlah pentas seni budaya pelajar	0	0	0.00%		0	
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	**-**									

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerahtahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2		3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10(5+7+8)	11(10/4)
1 3	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	Pemberian Pnghargaan Kepada Pihak Yang berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah pentas seni budaya Banjarnegara di luar daerah	1 kali	Jumlah pentas seni budaya Banjarnegara di luar daerah	1 kali	0 kali	0.00%	3 kali	1 Kali	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerahtahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2		3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10(5+7+8)	11(10/4)
		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Dalam Daerah Kabupaten /Kota									
2 3	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	Perlindungan, Pengembanga, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga	Jumlah fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	8 kegiatan	Jumlah fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan	1 kali	1 Kali	100%	5 Kali	3 Kali	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerahtahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2		3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10(5+7+8)	11(10/4)
		Adat			budaya						
3 3	Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah	-	Jumlah dokumen bidang kebudayaan yang disusun	0 kali	Jumlah dokumen bidang kebudayaan yang disusun	0	0	0.00 %		1 Dokumen	
		Program Pelestrarian dan Pengelolaan Cagar									

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerahtahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2		3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10(5+7+8)	11(10/4)
		Budaya									
		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten /Kota									

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerahtahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2		3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10(5+7+8)	11(10/4)
4.03	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah peninggalan sejarah yang dipelihara	2 unit	Jumlah peninggalan sejarah yang dipelihara	0	0	0.00 %	0	2 Unit	
		Program Pengembangan Kebudayaan									

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerahtahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2		3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10(5+7+8)	11(10/4)
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	**Pelestrian Kesenian Tradisonal Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten /Kota**									
5 3	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Pelidungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan	Jumlah penyelenggaraan pentas seni budaya di Banjarnegara	2 kali	Jumlah penyelenggaraan pentas seni budaya di Banjarnega	1 kali	0 Kali	0.00 %	1 kali	2 Kali	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerahtahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2		3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10(5+7+8)	11(10/4)
		Tradisi Budaya			ra						
6 3	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	-	Jumlah penyelenggaraan pentas seni budaya luar Banjarnegara	2 kali	Jumlah penyelenggaraan pentas seni budaya luar Banjarnegara	2 kali	0 kali	0.00 %	2 kali	4 Kali	
7 3	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya	-	Jumlah fasilitasi festival seni dan budaya	3 kali	Jumlah fasilitasi festival seni dan	3 kali	0 Kali	0.00 %		3 Kali	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerahtahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2		3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10(5+7+8)	11(10/4)
	daerah				budaya						
	Pariwisata										
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-									
8 3	Pendidikan dan pelatihan formal	-	Jumlah peserta pelatihan aparatur	0	Jumlah peserta pelatihan aparatur	0	0	0.00 %		0	
	Keuangan										

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerahtahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2		3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10(5+7+8)	11(10/4)
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	-									
9 3	Pengelolaan Benda Berharga	-	Jangka waktu penyediaan tiket wisatawan di obyek wisata pemda	1 tahun	Jangka waktu penyediaan tiket wisatawan di obyek wisata pemda	800 buku	800 buku	100.00%		1 Tahun	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan pelayanannya, Perangkat Daerah mengampu 8 Indikator. Dari 8 indikator tersebut, 6 berstatus tercapai dan 2 indikator berstatus tidak tercapai. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian/ketidaktercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Perencanaan dan penganggaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan
2. Koordinasi dengan perangkat desa dalam pengembangan kesenian di masing-masing wilayah
3. Perawatan dan pemeliharaan Benda Cagar Budaya dilaksanakan dengan baik antara pemangku kepentingan
4. Pelayanan kepada wisatawan yang memuaskan

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata
Meningkatkan Kualitas Pariwisata	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan	1.858.080	1.070.556	1.219.951	2.028.000		1.669.890
		Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	375,67 %	40,52%	37,97%	66.30%		187,58%
		Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata	13.051.065.000	8.425.693.000	13.864.283.000	20.100.348.000		8.321.121.500
	Berkembangnya destinasi pariwisata	Persentase peningkatan rehabilitasi /pembangunan obyek wisata	4	4	4	9		7
Lestarinya Seni dan Budaya	Berkembangnya seni dan budaya daerah	Persentase kelompok seni budaya yang aktif	60	1675	143	51		71
		Persentase peningkatan event kesenian/budaya	63	1	8	34		117
	Lestarinya bangunan cagar budaya	Persentase benda cagar budaya dalam kondisi baik	18	35	99	99		35
Terwujudnya Pelayanan Prima	Meningkatnya nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	81,26	77,9	79,36	83.64		81,25

*) Kolom 3 diisi berdasarkan IKK outcome dalam lampiran Permendagri 18/2020

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan urusan pemerintahan dalam dua urusan, yaitu Urusan Wajib Kebudayaan dan Urusan Pilihan Pariwisata Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2023-2026, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk tahun 2026 mencakup kedua urusan tersebut. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah diantaranya adalah:

1. Jumlah destinasi wisata yang cukup banyak memerlukan perhatian yang maksimal, terutama dalam hal penambahan fasilitas dan pemeliharaan
2. Peningkatan koordinasi, kesepahaman, sosialisasi dan pembinaan ke desa-desa terutama dengan Kelompok Sadar Wisata sebagai penggerak keberadaan Desa Wisata
3. Kesepahaman akan nilai pentingnya Benda Cagar Budaya dan kesenian tradisional dengan pemerintah desa dan kecamatan, sehingga keberadaannya dapat terpelihara dan lestari.
4. Pentingnya menjalin komunikasi dengan agen-agen pariwisata seperti biro wisata, hotel, restauran, pemandu wisata dan pengelola wisata sehingga terjalin keterpaduan program kegiatan yang nantinya dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Banjarnegara

Permasalahan tersebut, jika tidak diselesaikan dapat menjadi *constraint* dalam pencapaian visi dan misi Bupati maupun capaian indikator lainnya. Beberapa dampak dari adanya permasalahan dan hambatan tersebut meliputi:

1. Penurunan jumah kunjungan wisatawan dan kepuasan masyarakat
2. Ketidaknyamanan wisatawan di destinasi wisata
3. Perkembangan desa wisata kurang pesat
4. Benda Cagar Budaya kurang terpelihara dan kesenian tradisional kurang mendapat pembinaan
5. Potensi Kabupaten kurang dikenal oleh masyarakat

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi, peningkatan kualitas birokrasi, dan meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan pengguna layanan akan meningkatkan kebutuhan akan adanya penyediaan produk layanan yang semakin baik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi-inovasi dalam menunjang peningkatan pelayanan publik secara kontinyu. Beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, yaitu:

1. Sumber daya manusia berperan penting dalam peningkatan pelayanan publik
2. Produk layanan berbasis teknologi sangat memudahkan bagi masyarakat sehingga informasi langsung dapat diterima dan lebih cepat
3. Potensi lokal seperti destinasi baru, produk ekraf dengan adanya teknologi dapat dipasarkan dengan jangkauan lebih luas

Berdasarkan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangn tersebut, dapat diinventarisasi beberapa isu strategis. Inventarisasi isu-isu strategis tahun 2026 didapatkan dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal Kabupaten Banjarnegara sampai dengan tahun 2026. Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan pembangunan. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2026, sebagai berikut:

1. Kebutuhan pembangunan fasilitas sarana dan prasarana di destinasi wisata masih kurang
2. Kurangnya SDM yang profesional dan sumber angaran mengakibatkan perkembangan destinasi wisata kurang adanya inovasi
3. Kebutuhan anggaran yang minim sehingga belum dapat menyelenggarakan pembinaan SDM Pokdarwis dan Desa Wisata
4. Benda Cagar Budaya dan Group Kesenian di Kabupaten Banjarnegara yang belum semua tersentuh anggaran Pemerintah Daerah

5. Seluruh pelaku wisata di Kabupaten Banjarnegara perlu ditingkatkan hubungannya sehingga terwujud tujuan yang sinergis

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Tahun 2026 merupakan pelaksanaan tahun keempat RPJMD Tahun 2023-2026. Dalam RPJMD Tahun 2023-2026, prioritas arah kebijakan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2026 meliputi:

1. Kebutuhan pelaksanaan kegiatan yang didasarkan pada tercapainya indikator kinerja belum didukung dengan anggaran yang cukup, sehingga dalam pelaksanaannya dilakukan skala prioritas berdasar kebutuhan di lapangan
2. Pelaksanaan pembinaan baik pokdarwis atau desa wisata dilakukan secara jemput bola, sehingga dinas mengunjungi satu-per satu pelaku wisata.
3. Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa menggunakan sosial media dan alat komunikasi, sehingga pertemuan tatap muka yang mengharuskan kedatangan peserta dapat di anulir.

Tabel 2.5
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 Kabupaten Banjarnegara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Pengembangan Kebudayaan										
	Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota										
	Sub Kegiatan Pelindungan,Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Kab. Banjarnegara			400,000,000						
	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Kab. Banjarnegara	Jumlah group kesenian penerima bantuan		1,115,391,900						
	Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jawa Tengah			971,175,000						
	Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota										
	Sub Kegiatan Pelindungan,	Kab.			1,500,000,000						

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Banjarnegara									
	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya										
	Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota										
	Sub Kegiatan Penetapan Objek Diduga Cagar Budaya	Kab. Banjarnegara			112,890,000						
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota										
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Banjarnegara			10,000,000						
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Banjarnegara			7,034,570,500						
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Banjarnegara			110,010,000						
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah										
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan	Kab.									

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Logistik Kantor	Banjarnegara			350,000,000						
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Pembelian Lap Top dan Printer)	Kab. Banjarnegara			175,000,000						
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Banjarnegara			84,000,000						
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Banjarnegara			427,516,542						
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Banjarnegara			150,000,000						
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Banjarnegara			100,000,000						

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Banjarnegara			100,000,000						
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata										
	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota										
	Sub Kegiatan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kab. Banjarnegara			60,000,000						
	Sub Kegiatan Pengembanga Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kab Banjarnegara			475,000,000						
	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kab. Banjarnegara			350,000,000						
	Kegiatan Kawasan Strategis Wisata Kabupaten/Kota										
	Sub Kegiatan Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Banjarnegara			400,000,000						
	Sub Kegiatan Pengembanga Kawasa Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Banjarnegar			7,150,000,000						
	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota										
	Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam	Kab. Banjarnegara			1,500,000,000						

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota										
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Banjarnegara			250,000,000						
	Program Pemasaran Pariwisata										
	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota										
	Sub Kegiatan Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				350,000,000						
	Sub Kegiatan Fasilitasi kegiatan Pemasaran Pariwisata baik dalam dan luar negeri Pariwisata Kabupaten Kota				1,260,000,000						
	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Kab. Banjarnegara			60,000,000						
	Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kab. Banjarnegara			130,000,000						
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif										

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar										
	Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kab. Banjarnegara			900,000,000						
	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kab. Banjarnegara			400,000,000						
	Sub Kegiatan Pelatihan,Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Kab. Banjarnegara			500,000,000						
	Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif										
	Sub Keiatan Pelatihan Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Kab. Banjarnegara			100,000,000						
	Sub Kegiatan Pelatihan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekraf Tingkat Dasar	Kab. Banjarnegara			408,000,000						
	JUMLAH TOTAL				26,933,553,942						

Berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2026, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan yaitu:

1. Keterbatasan anggaran pada setiap Bidang.
2. Banyaknya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan
3. Banyaknya indikator kinerja yang tidak akan tercapai

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan musrenbang kecamatan dan forum konsultasi publik telah disampaikan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui aplikasi SIPD. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Banjarnegara

	U r a i a n	Anggaran
		2026
	3	
A	**Program Pengembangan Kebudayaan**	
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
1	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	1,000,000,000
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
2	Pelindungan,Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	500,000,000
3	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	500,000,000
	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	
4	pembinaan Sumber daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	500,000,000
B	**Program Pengelolaan Permuseuman**	

	Pengelolaan Museum Kabupaten Kota	
5	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	50,000,000
C	**Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya**	
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	
6	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	250,000,000
D	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50,000,000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8,038,710,538
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	76,000,000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
10	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	145,000,000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	400,000,000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
12	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50,000,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90,000,000
14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	427,000,000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100,000,000

16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100,000,000
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100,000,000
E	**Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**	
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	
18	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	250,000,000
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
19	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	300,000,000
20	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1,000,000,000
21	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1,700,000,000
22	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	450,000,000
F	**Program Pemasaran**	
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
23	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	250,000,000
24	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	250,000,000
25	Fasilitasi kegiatan Pemasaran Pariwisata baik dalam dan luar negeri Pariwisata Kabupaten Kota	850,000,000
26	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	250,000,000
G	**Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif**	
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	
	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	
27	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	300,000,000
28	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	350,000,000

	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	
29	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	250,000,000
	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	
30	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	350,000,000
	J U M L A H	**18,926,710,538**

2.6. Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan hasil reses anggota DPRD, melalui aplikasi SIPD telah disampaikan usulan program dan kegiatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Tema Pembangunan Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural", dengan prioritas pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan dengan program prioritas sebagai berikut:
   a. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT);
   b. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
   c. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan;
   d. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan;
   e. Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dan koperasi
   f. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil, danindustrialisasi
   g. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN);dan
   h. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saingekonomi.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, dengan prioritas sebagai berikut:
   a. Pembangunan wilayah Pulau Sumatera
   b. Pengembangan wilayah Pulau Jawa-Bali
   c. Pembangunan wilayah Nusa Tenggara
   d. Pembangunan wilayah Kalimantan
   e. Pembangunan wilayah Sulawesi;
   f. Pembangunan wilayah Maluku;
   g. Pengembangan wilayah Papua.
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, dengan program prioritas sebagai berikut:
   a. Perlindungan sosial dan penguatan tata kelola kependudukan;
   b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
   c. Peningkatan akses dan mutu pelayanan Pariwisata dan Kebudayaan;

d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, danpemuda;
f. Pengentasan kemiskinan;dan
g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, dengan program prioritas sebagai berikut:
   a. Revolusi mental dan pembinaan ideologi pancasila;
   b. Meningkatkan pemajuan dan pelestariankebudayaan;
   c. Memperkuat moderasiberagama;
   d. Meningkatkan budaya literasi, inovasi dankreativitas.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, dengan program prioritas sebagaiberikut:
   a. Infrastruktur pelayanandasar;
   b. Infrastruktur ekonomi;
   c. Infrastrukturperkotaan;
   d. Energi dan ketenagalistrikan;
   e. Transformasidigital.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, dengan program prioritas sebagai berikut:
   a. Meningkatan kualitas lingkungan hidup;
   b. Peningkatan ketahann bencana dan iklim;
   c. Pembangunan rendah karbon
7. Memperkuat stabilitas polhukanham dan transformasi pelayanan publik, dengan program prioritas sebagai berikut:
   a. Konsolidasi demokrasi;
   b. Optimalisasi kebijakan luar negeri;
   c. Penegakan hokum nasional;
   d. Reformasi birokrasi dan tata kelola;dan
   e. Menjaga stabilitas keamanan nasional

Telaah terhadap program pembangunan Kementerian Pariwisata yaitu Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024 yakni dalam sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ditargetkan dapat memberi kontribusi dan peran strategis melalui transformasi Pembangunan ekonomi nasional pada lima tahun kedepan. Tranformasi pembangunan ekonomi tersebut difokuskan pada peningkatan nilai devisa pariwisata dan nilai tambah ekonomi kreatif nasional.

Pencapaian pembangunan nasional target sektor pariwisata dan ekonomi kreatif tersebut tentunya diperlukan strategi serta terobosan dalam pelaksanaanya. Terutama dalam menghadapi tantangan-tantangan bencana non alam yang terjadi pada saaat ini diseluruh dunia yaitu adanya *virus corona.* Pendemi covid-19 diyakini menjadi titik balik perubahan pariwisata dan desain model bisnis ekonomi kreatif, termasuk di Indonesia.

Dunia pariwisata Indonesiapun wajib beradaptasi dengan kondisi ***New Normal*** dengan memperhatikan aspek kebersihan, keselamatan, dan keamanan, serta implementasi protokol kesehatan. Pergeseran model bisnis dalam ekonomi kreatif dapat menjadi oportunitas dan peluang dalam kontribusi ekonomi kreatif yang lebih besar.

Merujuk pada Visi Kemenparekraf/Baparekraf ini mengandung 4 (empat) kata kunci utama, yaitu :

1. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang maju;
2. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang berdaya saing;
3. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang berkelanjutan;
4. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang mengedepankan kearifan lokal.

Misi Kemenparekraf/ Baparekraf juga harus selaras dengan Misi Presiden Republik Indonesia, sehingga Misi Kemenparekraf/Baparekraf yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa ;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya ;
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Dalam konteks pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, Kemenparekraf/Baparekraf berkontribusi secara langsung terhadap misi nomor 2, yaitu struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing. Tujuan Kemenparekraf/ Baparekraf tahun 2020-2024 adalah **“Meningkatnya kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional”.** Sasaran strategis Kemenparekraf/Baparekraf merupakan uraian dari tujuan strategis yang sekaligus merupakan pemetaan dari strategi Kemenparekraf/Baparekraf

dalam melaksanakan Misi nomor 2 untuk mewujudkan Visi Presiden tahun 2020-2024. Pada perspektif stakeholders, Kemenparekraf/Baparekraf memiliki 1 (satu) sasaran strategis yaitu: **"Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi".** Pada perspektif customer, Kemenparekraf/Baparekraf memiliki 6 (enam) sasaran strategis yaitu:

1. Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif nasional;
2. Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan;
3. Meningkatnya daya saing destinasi dan industri pariwisata nasional;
4. Tersedianya produk pariwisata sesuai kebutuhan;
5. Bertumbuh nya investasi dan akses pembiayaan serta meningkatnya kemampuan industri sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional;
6. Terlindunginya kekayaan intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pada perspektif internal process, Kemenparekraf/ Baparekraf memiliki 3 (tiga) sasaran strategis yaitu:

1. Terselenggaranya regulasi pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kajian;
2. Tersedianya data dan informasi hasil kajian sesuai kebutuhan pariwisata dan ekonomi kreatif;
3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif.

Merujuk pada visi dan misi dari Kemenparekraf/Baperekraf yang dituangkan pada renja K/L adalah melalui tugas dan fungsi dari Dinas Pariwisata dan Keudayaan dengan Kebijakan daerah yang diprioritaskan dalam Bidang Pariwisata diantaranya peningkatan wisatawan domestik maupun luar negeri, dengan membuat inovasi yang menarik untuk wisatawan dengan menyelenggarakan even-even yang bertajuk olah raga maupun seni budaya serta peningkatan pemasaran wisata dengan adanya insentif dan paket wisata khusus untuk organisasi yang sudah pulih, optimalisasi pameran yang terintegrasi di pasar internasional. Percepatan kesiapan destinasi pariwisata meliputi akselerasi infrastruktur, standar layanan seperti transportasi, makanan minuman, arus wisatawan, kebersihan dan kemanan.

Namun keberhasilan peningkatan angka kunjungan menjadi tolak ukur utama keberhasilan atas pencapaian kinerja di tiap tahunnya dan harapan untuk selalu melampaui target yang di tetapkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara, dengan didukung ketercukupan SDM yang dimiliki Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara.

Gencarnya promosi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah merupakan salah satu sarana dan prasaran untuk meningkatkan angka kunjungan. Penyelenggaraan even-event pariwisata yang dilaksanakan merupakan ajang sarana promosi dan pengenalan akan khasanah budaya daerah yang ada di Banjarnegara serta mengangkat kearifan budaya lokal untuk diangkat menjadi sebuah daya tarik wisata serta menjada kelestarian akan budaya tersebut.

Peningkatan kualitas desa wisata dan pengembangan pada desa lainnya sebagai eco socio torism berbasis masyarakat (local based community) dan lingkungan. Peningkatan prasarana sarana destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif, pengembangan penyelenggaraan event wisata tematik dan promosi dengan meningkatkan kerjasama, partisipasi masyarakat serta pembiayaan kreatif. Mendorong, mendukung dan memadukan pengembangan destinasi prioritas di Jawa Tengah.

Berbagai desa menampilkan banyak ragam daya tarik baik alam, buatan maupun budayanya, hal ini perlu di tertibkan dengan SOP Desa Wisata atau perlu dibuat aturan standar Desa Wisata atau obyek wisata yang berstandar baik tingkat kabupaten maupun Tingkat Propinsi. Sebagai penunjang keberhasilan kepariwisataan di Banjarnegara. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melalui Bidang-bidang yang ada di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah melaksanakan berbagai langkah signifikan untuk kemajuan pariwisata sekaligus meningkatkan kesejahteraaan masyarakat Banjarnegara.

3.2.TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Kabupaten Banjarnegara dengan Visi “BANJARNEGARA MAJU BERBASIS PERTANIAN” dan dengan Misi “ Mewujudkan masyarakat madani yang agamis, dengan menciptakan masyarakat Banjarnegara yang berkualitas, sehat, cerdas, produktif, kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlak mulia, serta menghargai dan menerapkan nilai-nilai luhur agama dan budaya masyarakat “ memuat sasaran Meningkatnya penghargaan masyarakat terhadap nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. (Reff. Lampiran IV Permendagri no 54 tahun 2010).

Tujuan pada merujuk pada pengertian tersebut, maka rumusan tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut:

1. meningkatnya penghargaan masyarakat terhadap nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal / betul
2. meningkatnya daya saing daerah
3. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah
4. Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik

1. Keadaan dan Perkembangan pembangunan Pariwisata

Perkembangan **pembangunan pariwisata** terus meningkat dengan kondisinya pada tahap identifikasi potensi, pengembangan promosi, identifikasi pasar wisatawan, dan pembangunan prasarana dasar. Pengembangan terhadap obyek wisata baru tetap dilakukan pada tahun ini. Sektor pariwisata Banjarnegara masih memiliki peluang menarik wisatawan berkunjung sehingga mampu memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah.

2. Keadaan dan Perkembangan pembangunan Kebudayaan

Perkembangan **pembangunan kebudayaan** bertitik berat pada pelestarian seni budaya dan nilai tradisi yang di apresiasikan guna mendukung industri pariwisata.

RPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 merupakan penjabaran periode keempat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025 yang memiliki visi Banjarnegara Maju Berbasis Pertanian. Dalam tahap keempat ini pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Banjarnegara yang maju berbasis pertanian melalui akselerasi pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur kehidupan sosial budaya dan ekonomi masyarakat Banjarnegara yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Visi pembangunan dalam RPJPD Tahun 2005-2025 adalah: “BANJARNEGARA MAJU BERBASIS PERTANIAN “ Visi Pembangunan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025 ini mengarah pada pencapaian tujuan, cita-cita dan harapan masyarakat Kabupaten Banjarnegara. Visi pembangunan daerah tersebut harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, kesejahteraan, dan kelestarian yang ingin dicapai. Oleh karena itu, perlu kiranya diberikan penjelasan makna visi untuk mendapatkan kesamaan persepsi tentang muatan substansi filosofis

yang terkandung, sehingga segenap pemangku kepentingan secara sinergis dan optimal dapat memberikan kontribusi dalam rangka pencapaiannya. Kabupaten Banjarnegara diartikan sebagai suatu daerah otonom. Daerah otonom (selanjutnya disebut daerah) adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah menunjukkan suatu kesatuan pemerintahan dan kemasyarakatan beserta semua potensi yang dimiliki.

Maju artinya bahwa pelaksanaan pembangunan daerah senantiasa dilandasi dengan keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik secara fisik maupun nonfisik didukung oleh sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi, berperadaban tinggi, profesional serta berwawasan ke depan yang luas. Maju juga diarahkan pada terbentuknya daerah yang mampu mengelola segenap potensinya namun tetap mengedepankan pentingnya kerja sama dan sinergitas. Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran tercapainya kondisi maju adalah tercapainya daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat; terbangunnya jaringan sarana dan prasarana pembangunan, pemerintahan dan pelayanan yang merata yang berdampak pada berkurangnya kesenjangan antarwilayah, pembangunan perdesaan dan daerah terpencil; optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan asetaset daerah dan sumber-sumber keuangan lainnya bagi kepentingan pembangunan; dan meningkatnya investasi dalam pembangunan yang didukung kondusivitas daerah.

Berbasis artinya bahwa pembangunan daerah terkonsentrasi pada salah satu tujuan, sedangkan aspek-aspek yang lain tetap diperhatikan dan dilaksanakan untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut. Pertanian, konsep pertanian dimaksudkan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan daerah, pertanian merupakan konsentrasi selama periode RPJPD.

Pertanian yang dimaksud adalah meliputi pertanian tanaman pangan seperti padi, palawija dan hortikultura yang meliputi sayur mayur dan buah-buahan. Di samping pertanian tanaman pangan juga bidang peternakan, perikanan dan perkebunan, yang kesemuanya diharapkan dapat memberikan kontribusi penuh dan besar yang dapat menopang pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Misi RPJPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025 Misi merupakan pernyataan tentang rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025, terdapat penyederhanaan misi dalam RPJPD Tahun 2005-2025, sehingga misi menjadi sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat madani yang agamis, dengan menciptakan masyarakat Banjarnegara yang berkualitas, sehat, cerdas, produktif, kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlak mulia, serta menghargai dan menerapkan nilai-nilai luhur agama dan budaya masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG), meningkatnya pemerataan pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak, meningkatnya akses, pemerataan, dan mutu pelayanan kesehatan, meningkatnya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, meningkatnya pemenuhan hak-hak dasar bagi penduduk miskin, mantapnya kearifan lokal yang tercermin dalam meningkatnya peradaban, harkat, dan martabat manusia, dan menguatnya jati diri dan kepribadian masyarakat, meningkat dan menguatnya sumber daya manusia dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai bidang, meningkatnya karakter masyarakat yang berbudaya yang mendasarkan pada kearifan lokal dan jati diri, serta meningkatnya kesadaran dan pengamalan agama dalam kehidupan sehari-hari sehingga membentuk karakter masyarakat bermoral dan berakhlak mulia.

2. Mewujudkan perekonomian rakyat yang maju dengan mengembangkan serta memperkuat perekonomian daerah melalui sektor pertanian yang berorientasi pada pasar dengan senantiasa menjaga kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan dalam pengelolaannya melalui regulasi yang tepat dalam mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan damai yang ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan per kapita pada akhir periode pembangunan jangka panjang mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan kabupaten-kabupaten yang maju di Indonesia, meningkatnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif (sektor pertanian, perdagangan, perindustrian, dan pariwisata didukung dengan sektor lain) yang berdaya saing tinggi menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi pertanian yang berkualitas, berdaya saing global, menjadi motor penggerak perekonomian sekaligus mendorong peningkatan sumber-sumber pembiayaan pembangunan, disertai dengan peningkatan kualitas pelayanan lebih bermutu, meningkatnya ketersediaan kebutuhan pokok dan dapat dipertahankan pada tingkat aman melalui swasembada pangan dan disertai dengan tersedianya instrumen jaminan pangan di masyarakat melalui

revitalisasi pertanian dalam arti luas, meningkatnya sektor pertanian ke arah agribisnis dan agroindustri serta agrowisata yang didukung dengan meningkatnya perdagangan dalam usaha untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatnya pemanfaatan aset dan produk daerah yang berdaya saing tinggi sebagai sumber kekayaan daerah, meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi dan seimbang, meningkatnya keterpeliharaan kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing, dan modal pembangunan daerah, meningkatnya kualitas sumber daya air, udara, dan tanah sesuai baku mutu dan terlindunginya kesehatan masyarakat dari dampak akibat pencemaran, meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta mengurangi dampak bencana alam, menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial, tercapainya penduduk tumbuh seimbang, serta berkurangnya tindak kekerasan berbasis gender dan anak tanpa diskriminasi, menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin, meningkatnya upaya perlindungan HAM dan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, meningkatnya kestabilan situasi dan kondisi perikehidupan bermasyarakat yang didukung oleh penegakan HAM dan terwujudnya kesetaraan gender, meningkatnya keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat Kabupaten Banjarnegara, meningkatnya upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga dan memelihara persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat, serta meningkatnya perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat dari segala tindak kejahatan.

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi dan kesadaran politik masyarakat terutama menyangkut hak dan kewajiban warga negara serta institusionalisasi partai politik dalam kegiatan politik, meningkatnya profesionalisme aparatur daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, beretika, dan bertanggung jawab, serta mampu mendukung pembangunan daerah yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat, meningkatnya perkembangan sistem dan iklim demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik yang dapat diukur dengan adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum, birokrasi yang profesional dan

netral, dan masyarakat yang mandiri, Meningkatnya kemampuan dan kemandirian daerah dalam mendukung pembangunan daerah, menguatnya kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah, serta meningkatnya hubungan kerja sama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak pada tingkat lokal, nasional, dan internasional. Mewujudkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar yang ditandai dengan meningkatnya infrastruktur wilayah dan yang andal sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membuka isolasi daerah serta membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru, meningkatnya perumahan rakyat layak huni yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukungnya untuk mewujudkan daerah tanpa permukiman kumuh, meningkatnya keterpenuhan dan pemerataan kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar di seluruh wilayah perdesaan dan perkotaan dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatnya jaringan irigasi, bendung dalam rangka menciptakan ketahanan pangan.

Tujuan dan sasaran dalam RPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 diuraikan sebagai berikut:

Tujuan 1: Meningkatnya kondusivitas wilayah

Sasaran:

1. Tertanganinya kejadian konflik antar kelompok masyarakat, suku dan agama
2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam penanggulangan bencana

Tujuan 2: Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap nilainilai kehidupan bermasyarakat dan berdemokrasi

Sasaran:

1. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat
2. **Meningkatnya penghargaan masyarakat terhadap nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal**
3. Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan dengan memperhatikan hak-hak anak

Tujuan 3: Meningkatnya kinerja perekonomian daerah

Sasaran:

1. Meningkatnya kesempatan lapangan berusaha
2. Meningkatnya kesempatan kerja
3. Meningkatnya pemerataan pembangunan
4. Meningkatnya stabilitas harga

5. **Meningkatnya daya saing daerah**

Tujuan 4: Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan
Sasaran: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang meliputi kualitas udara, kualitas air sungai, dan tutupan lahan

Tujuan 5: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

Sasaran: **Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah**

Tujuan 6: Meningkatnya kualitas layanan publik

Sasaran: **Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik**

Tujuan 7: Meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar yang berkualitas

Sasaran:

a. Meningkatkan penghargaan masyarakat terhadap nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal;
b. Meningkatnya daya saing daerah
c. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah
d. Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara sebagai OPD yang melaksanakan tugas pokok urusan pemerintah daerah di bidang Pariwisata dan Kebudayaan harus mendukung visi dan misi pemerintah Kabupaten terutama pada misi yang **kedua, ketiga, kelima dan keenam**. Dari visi dan misi Banjarnegara tersebut kemudian diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Tujuan

a. Meningkatkan penghargaan masyarakat terhadap nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal;
b. Meningkatnya daya saing daerah
c. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah
d. Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik

2. Sasaran Strategis

e. Berkembangnya seni dan budaya daerah
f. Lestarinya bangunan cagar budaya
g. Berkembangnya destinasi pariwisata
h. Meningkatnya Kunjungan Wisatawan
i. Meningkatnya nilai Survey Kepuasan Masyarakat
j. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah daerah

Perencanaan **pembangunan pariwisata** Kabupaten Banjarnegara akan di titik beratkan kepada peningkatan profesionalisme pengelolaan dan pengembangan KWDT Dieng sebagai wilayah konservasi sejarah dan budaya serta sekaligus sebagai obyek wisata, sehingga pentahapan ulang yang telah dimulai akan tetap dilanjutkan mulai dari identifikasi potensi, pembangunan prasarana dasar, serta promosi. Pada obyek wisata yang lain seperti Curug Pitu akan dilaksanakan rehabilitasi sarana dan prasarana umum serta promosi yang lebih progresif dalam mendukung pengembangan obyek wisata. Dari sisi sumber daya manusia pelaku usaha pariwisata juga semakin ditingkatkan dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi. Tingginya kegiatan yang akan dilakukan ini idealnya diimbangi dengan kenaikan anggaran, harapannya dapat terealisasi dengan baik sehingga sektor pariwisata Kabupaten Banjarnegara lebih berpeluang untuk menarik wisatawan berkunjung agar semakin mampu memberikan kontribusi pemasukan yang lebih besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sedangkan perencanaan **pembangunan kebudayaan** bertitik berat pada pelestarian seni budaya dan nilai tradisi yang di apresiasikan guna mendukung industri pariwisata. Dari sisi pendanaan, nilai anggaran yang disediakan relatif belum signifikan dibandingkan dengan semakin berkembangnya kegiatan kebudayaan dalam mengakomodir kebutuhan masyarakat (pelaku budaya) baik yang berupa bantuan peralatan maupun pendampingan guna meningkatkan kapasitas para pelaku budaya (seniman). Pentas-pentas kesenian daerah seharusnya di akomodir dengan anggaran dari Pemerintah Daerah sehingga kebudayaan daerah semakin dikenal dan lestari

Pencapaian atas Tujuan dan Sasaran dilaksanakan melalui penyusunan Strategi, kebijakan, dan program sebagai berikut :

Dalam rangka perwujudan sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara memiliki tujuan, sasaran, dan program sebagai berikut :

Tabel 3.1 Tujuan, sasaran, dan program

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Program
1	Meningkatnya penghargaan masyarakat terhadap nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal	Berkembangnya seni budaya daerah	Program Pengembangan Kebudayaan
		Lestarinya bangunan cagar budaya	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
			Program Pengelolaan Permuseuman
2	Meningkatnya daya saing daerah	Berkembangnya destinasi pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
		Meningkatnya kunjungan pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
3	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
4	Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik	Meningkatnya nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

B.PENETAPAN KINERJA TAHUN 2026

Tahun 2026 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara telah menetapkan rencana kinerjanya berupa target indikator kinerja sasaran yang akan di capai melalui Penetapan Kinerja strategis sebagai berikut :

1. Berkembangnya seni dan budaya daerah dengan indikator Prosentase pemajuan seni dan budaya daerah 20%
2. Lestarinya bangunan cagar budaya dengan indikator Prosentase benda cagar budaya dipelihara 50% dan Ketersediaan data koleksi museum 60%
3. Berkembangnya destinasi pariwisata dengan indikator Prosentase berkembangnya destinasi pariwisata 25%
4. Meningkatnya Kunjungan Wisatawan dengan indikator Prosentase Peningkatan Kunjungan Wisata 3%,
5. Meningkatnya nilai Survey Kepuasan Masyarakat dengan indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat 81 (Nilai
6. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah daerah dengan indikator Prosentase Capaian Penyelenggaraan Kegiatan 100%

Tabel 3.2 Sasaran, indikator kinerja dan target

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	**Berkembangnya seni dan budaya daerah**	Prosentase pemajuan seni dan budaya daerah	20%
2	**Lestarinya bangunan cagar budaya**	Prosentase benda cagar budaya dipelihara	50%
		Prosentase ketersedian data koleksi museum	60%
3	**Berkembangnya destinasi pariwisata**	Prosentase berkembangnya destinasi pariwisata	25%
4	**Meningkatnya Kunjungan Wisatawan**	Prosentase Peningkatan Kunjungan Wisata	3%
		Prosentase Kemitraan Jasa Usaha Pariwisata	100%
		Prosentase Peningkatan Lama Tinggal	1.1
5	**Meningkatnya nilai Survey Kepuasan Masyarakat**	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	81 (Nilai)
6	**Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah daerah**	Prosentase Capaian Penyelenggaraan Kegiatan	100%

Tabel. 3.3 Tujuan, sasaran, indikator dan kegiatan

No	Tujuan
1	Meningkatnya penghargaan masyarakat terhadap nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal
	a. Berkembangnya seni dan budaya daerah
	Diakomodir oleh program kegiatan sebagai berikut :
	Program Pengembangan Kebudayaan
	KegiatanPelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Pelindungan,Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat
	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
	Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya
2	Meningkatnya daya saing daerah
	Diakomodir oleh program kegiatan sebagai berikut :
	Berkembangnya destinasi pariwisata
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota

	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
	Meningkatnya kunjungan pariwisata
	Diakomodir oleh program kegiatan sebagai berikut :
	Program Pemasaran Pariwisata
	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik,
	dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
	Fasilitasi kegiatan Pemasaran Pariwisata baik dalam dan luar negeri Pariwisata Kabupaten Kota
	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri
	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
3	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
	Diakomodir oleh program kegiatan sebagai berikut :
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
4	Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

3.3.Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berikut matrik program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ter-entry di Sistem Informasi Perangkat Daerah Tahun 2026. Anggaran telah disesuaikan dengan Perangkaan Renja Hasil Desk Tahun 2026.

Tabel. 3.4 Matrik Program Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Th 2025

	U r a i a n	Anggaran
		2026
	3	
A	**Program Pengembangan Kebudayaan**	
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
1	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	1,000,000,000
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
2	Pelindungan,Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	500,000,000
3	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	500,000,000
	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	
4	pembinaan Sumber daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	500,000,000
B	**Program Pengelolaan Permuseuman**	
	Pengelolaan Museum Kabupaten Kota	
5	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	50,000,000
C	**Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya**	
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	
6	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	250,000,000
D	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	

	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50,000,000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8,038,710,538
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	76,000,000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
10	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	145,000,000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	400,000,000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
12	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50,000,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90,000,000
14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	427,000,000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100,000,000
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100,000,000
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100,000,000
E	**Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**	
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	

18	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	250,000,000
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
19	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	300,000,000
20	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1,000,000,000
21	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1,700,000,000
22	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	450,000,000
F	**Program Pemasaran**	
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
23	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	250,000,000
24	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	250,000,000
25	Fasilitasi kegiatan Pemasaran Pariwisata baik dalam dan luar negeri Pariwisata Kabupaten Kota	850,000,000
26	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	250,000,000
G	**Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif**	
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	
	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	
27	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	300,000,000
28	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	350,000,000
	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	
29	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	250,000,000

	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	
30	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	350,000,000
	J U M L A H	**18,926,710,538**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahun 2026 dijabarkan ke dalam semua urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten Banjarnegara.

A. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kebudayaan

Program pengembangan kebudayaan terdiri dari 3 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota; Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota; Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota. Dengan 5 sub kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan; Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya; Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional; Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan; Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat.

Pendanaan kegiatan tersebut di atas bersumber pada Dana Alokasi Umum dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara. Walaupun dalam pelaksanaannya terdapat kegiatan yang pendaannya dilakukan bersama dengan pihak ketiga seperti pada pelaksanaan kegiatan Dieng Culture Festival.

b. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota. Dengan 1 sub kegiatan yaitu Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya. Pendanaan kegiatan tersebut di atas bersumber pada Dana Alokasi Umum dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara.

B. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata terdiri dari 2 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota; Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota. Dengan 4 sub kegiatan yaitu Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota; Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota; Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota; Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota.

Pendanaan kegiatan tersebut di atas bersumber pada Dana Alokasi Umum dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara. Diupayakan juga terdapat Dana Alokasi Khusus yang dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan terutama kegiatan fisik.

b. Program Pemasaran Pariwisata

Program pemasaran pariwisata terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota. Dengan 4 sub kegiatan Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan

Luar Negeri; Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota; Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri; Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri.

Pendanaan kegiatan tersebut di atas bersumber pada Dana Alokasi Umum dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara. Tidak menutup kemungkinan terdapat kegiatan yang dapat di sponsori oleh pihak ketiga seperti pada pelaksanaan Pemilihan Duta Wisata. Diupayakan juga terdapat kegiatan yang diusulkan didanai lewat Dana Alokasi Khusus.

c. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar. Dengan 2 sub kegiatan yaitu Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar; Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata. Pendanaan kegiatan tersebut di atas bersumber pada Dana Alokasi Umum dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara dan Pemerintah Pusat yaitu DAK Non Fisik.

C. RENCANA ANGGARAN PERANGKAT DAERAH

Rencana anggaran dalam pelaksanaan kegiatan perangkat daerah hampir secara keseluruhan dibiaya lewat Dana Alokasi Umum Pemerintah Daerah. Tetapi tidak menutup kemungkinan, OPD berupaya untuk menarik dana dari Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat melalui pembiayaan DAK Fisik maupun DAK Non Fisik. Selain itu kegiatan yang tidak teranggarkan oleh dinas, diupayakan dapat dana dari pihak swasta ataupun BUMN. Upaya mencari dana dari pihak luar Pemerintah Daerah dilakukan agar kinerja perangkat daerah berjalan dengan baik.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Perangkat Daerah Tahun 2023-2026. Renja Perangkat Daerah selanjutnya menjadi platform operasional bagi Perangkat Daerah dalam menjalankan programnya dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah tahun 2023-2026. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026 dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disepakati.
2. Kerangka pendanaan dalam Renja Perangkat Daerah masih bersifat sementara, sehingga masih dimungkinkan terjadi perubahan pagu yang disebabkan oleh pengurangan, penambahan, dan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan maupun antar sub kegiatan dalam kerangka penyusunan anggaran secara terpadu dan berbasis kinerja.
3. Renja Perangkat Daerah menjadi acuan bagi Kepala Perangkat Daerah dan segenap jajarannya serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, serta menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal : Maret 2025

KEPALA DINAS
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KAB.BANJARNEGARA

(TURSIMAN, S.Sos)
NIP.19680316 198803 1 004

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunianya sehingga Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara Tahun 2025 dapat tersusun.

Rancangan Awal Rencana Kerja RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara Tahun 2026 disusun berdasarkan amanat Peraturan Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rancangan Awal Rencana Kerja RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara Tahun 2026 terdiri dari pendahuluan, hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, tujuan dan sasaran RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara, dan Rancangan Akhir Rencana Kerja dan pendanaan serta penutup.

Kami menyadari dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja RSUD Hj. Anna lasmanah Banjarnegara ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja dimaksud.

Banjarnegara, 18 Januari 2025
DIREKTUR
RSUD Hj. ANNA LASMANAH BANJARNEGARA

dr. ERNA ANTUTY
NIP. 19710830 200012 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 3

1.3. Maksud dan Tujuan 8

1.4. Sistematika Penulisan 9

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 10

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 10

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 19

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 22

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 25

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 33

2.6. Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 33

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 35

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 35

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 36

3.1 Program dan Kegiatan 38

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 44

BAB V PENUTUP 45

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan yang diatur melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan pembentukan tim penyusun, penelaahan rancangan awal RKPD, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, hingga pada penyempurnaan berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang RKPD. Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, penyusunan Renja Perangkat Daerah juga mengacu pada Renja

Kementerian/Lembaga terkait, serta Renja Perangkat Daerah Provinsi terkait. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Tugas Pokok dan fungsi RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara No.5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banjarnegara dan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut;

1.1.1 Tugas Pokok

RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifikasi di bidang pelayanan kesehatan.

1.1.2 Fungsi RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara

a. Perumusan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan rujukan;
b. Penetapan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan, keuangan, pelayanan dan penunjang; dan
c. Pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kesehatan rujukan yang meliputi ketatausahaan, keuangan, pelayanan dan penunjang.

1.1.3 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara

a. Direktur

b. Bagian Tata Usaha
   1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
   2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
   3. Sub Bagian Hukum dan Kehumasan
c. Bidang Keuangan
   1. Seksi Anggaran dan Perbendaharaan
   2. Seksi Akuntansi dan Verifikasi
d. Bidang Pelayanan
   1. Seksi Pelayanan Medis
   2. Seksi Keperawatan
e. Bidang Penunjang
   1. Seksi Penunjang Klinik
   2. Seksi Penunjang Non Klinik
f. Kelompok jabatan fungsional

Dalam proses penyusunannya, sebelum ditetapkan menjadi Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rancangan Renja akan diverifikasi kesesuaiannya terhadap RKPD Kabupaten Banjarnegara. Setelah disempurnakan dengan berpedoman pada RKPD Kabupaten Banjarnegara, maka Renja Perangkat Daerah tersebut mendapat pengesahan oleh Bupati Banjarnegara dan selanjutnya ditetapkan menjadi Renja RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara oleh Direktur RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara.

1.2. Landasan Hukum

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Thun 2022;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E; Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kelola Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banjarnegara;
30. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 86 tahun 2016 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara;
31. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan tata Kerja Pada RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara;
32. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun dengan maksud untuk:

a. Menjabarkan RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 ke dalam rencana program kegiatan prioritas Tahun 2026 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Renja K/L Tahun 2026 dan Renja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;
b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerapan anggaran berbasis kinerja.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

a. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA-DPA dalam Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2026, yang dalam penyusunannya didahului dengan menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026;

b. Sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Tahun 2026;

c. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun berdasarkan sistematika yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah.

BAB 2 : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dan atau pokok-pokok DPRD.

BAB 3 : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan tahun 2025.

BAB 4 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran RKPD.

BAB 5 : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah meliputi urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 pada anggaran murni terdiri dari 2 (dua) program, 4 (empat) kegiatan, dan 4 (empat) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 186.884.319.784,- (Seratus Delapan Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah), dan pada Bulan Oktober 2024 ditetapkan perubahan anggaran dengan jumlah program/kegiatan dan sub kegiatan dengan total anggaran Rp. 191.109.685.380,- (Seratus Sembilan Puluh Satu Milyar Seratus Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah) dengan fokus utama pada Pembangunan Manusia melalui peningkatan SDM dan Peningkatan Pelayanan Rujukan yaitu melalui Pendidikan dan pelatihan untuk tenaga medis maupun non medis, penyediaan sarana dan prasarana yang memadahi, penyediaan logistik rumah sakit, dan pembangunan gedung B RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara Tahap 1. Program/kegiatan/sub kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah yang meliputi:

1. Upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien melalui pelayanan kesehatan yang sesuai standar belum sepenuhnya dilaksanakan.
2. Pemenuhan sarana dan sarana penunjang Rumah Sakit untuk meningkatkan Pelayanan kesehatan belum optimal;
3. Pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan profesionalisme melalui pendidikan dan pelatihan serta penambahan SDM belum memadai;

4. Pengembangan pelayanan unggulan Rumah Sakit dan pemanfaatan teknologi kedokteran belum optimal
5. Pengembangan manajemen dan penyempurnaan tata kelola Rumah Sakit masih perlu ditingkatkan.

Dari 2 (dua) program, 4 (Empat) kegiatan, dan 4 (Empat) sub kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah tersebut, program/kegiatan/sub kegiatan yang disetujui untuk dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024 dengan total anggaran sebesar Rp. 191.109.685.380,-

Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024, terjadi beberapa perubahan yang meliputi penambahan atau pengurangan pagu anggaran dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang semula Rp. 25.669.743.624,- menjadi Rp. 25.101.494.783,-
   b. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang semula Rp. 341.956.160,- menjadi Rp. 341.956.160,-
   c. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD, sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD yang semula Rp. 159.372.620.000,- menjadi Rp. 164.166.234.437,-
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
   a. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan alokasi anggaran Rp. 1.500.000.000,-

Dinamika yang terjadi selama tahun 2024 turut mempengaruhi keberhasilan pencapaian Renja Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2024, tercatat adanya hasil yang baik dikarenakan adanya pencapaian maupun pelampauan target maupun yang tidak memenuhi target.

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   a) Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD, sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD dengan realisasi keuangan 99,58%. Capaian realisasi fisik tercapai 100%. Faktor – faktor yang mempengaruhi ketidaktercapaian tersebut adalah :
      1) Kurangnya minat dokter spesialis bekerja di RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara dan belum lengkapnya sarana dan prasarana untuk jenis spesialis baru.
      2) Adanya hutang yang meliputi belanja operasional seperti Obat, BHP dan belanja lainnya sehingga terjadi pergeseran anggaran.
      3) Alat-alat kesehatan yang dibutuhkan merupakan barang import sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses pengirimannya.

b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   a) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan capaian realisasi fisik 100% dan keluaran dengan indikator jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN dengan target 301 orang dan capaian 341 orang dengan tingkat capaian 100% dan indikator Persentase capaian nilai survey kepuasan staf dan karyawan dengan target 76% dan capaian 78,3% dengan tingkat capaian 100%
   b) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan capaian realisasi fisik 100% dan keluaran dengan indikator

jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan dengan target 12 dokumen tercapai 12 dokumen dengan hasil tingkat capaian 100%

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
   a. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan capaian realisasi fisik 100% dan keluaran jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan dengan target 1 paket dan tercapai 1 paket dengan tingkat capaian 100%

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Pelaksanaan pengadaan pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan rencana kerja anggaran yang sudah disusun,
2. Kecepatan tindak lanjut hasil koordinasi berkaitan dengan alat yang sudah tidak tersedia di e-catalog sehingga dilakukan penggantian alat dan alternatif penyedia dengan memperhatikan spesifikasi alat sesuai dengan rencana meski dengan nilai dibawah pagu anggaran.
3. Tertib administrasi dalam pengajuan SPJ.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka untuk mengatasi ketidaktercapaian program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD, sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD. Pada tahun perencanaan selanjutnya, perlu diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, diantaranya:

1. Memastikan bahwa alat kesehatan, obat dan BHP yang dibutuhkan tercantum dalam e-catalog
2. Pengadaan barang/jasa dilaksanakan pada awal tahun anggaran
3. Pelaksanaan kegiatan pengadaan berpedoman kepada Renstra dan Renja

4. Perlu adanya aturan/dasar hukum dalam memfasilitasi kebutuhan belanja modal yang mendesak yang sangat dibutuhkan untuk fasilitas pelayanan.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA									
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayarkan**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	334 orang/bln	-	332 orang/bln	396 orang/bln	119%	334 orang/bln	100%	100%
		Persentase capaian nilai survey kepuasan staf dan pensiunan	78%	78%	78%	76%	98%	78%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Capaian Ketersediaan jasa pelayanan**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Sesuara Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kerangka Kegiatan s/d Triwulan tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Kerja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
					Target Kerja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Kerja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6	(9)	(10=5+7+9	(11=10/8
		umum kantor								
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Jasa pelayanan umum kantor	12 Dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	12 dokumen	100%
	Peningkatan Pelayanan BLUD	**Persentase indikator Standar pelayanan Minimal (SPM)**	**≥ 80%**	-	**≥ 80%**	**85%**	**106%**	**≥ 80%**	**≥ 80%**	**100%**
		Persentase kenyamanan pendapatan memdapai operasional (CMK)	**93%**	**91%**	**91%**	**84%**	**92%**	**91%**	**91%**	**100%**
		Persentase capaian BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Barsama Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Desember tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Bersama Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Bersama Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
					Target Kerja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Fisik Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
		Capaian Nilai Akreditasi	**≥ 80%**	-	**≥ 80%**	**100%**	**100%**	**≥ 80%**	**≥ 80%**	**100%**
		Keseluruhan jenis pelayanan spesialis	**33 jenis**	**16 jenis**	**33 jenis**	**16 jenis**	**70%**	**33 jenis**	**33 jenis**	**100%**
	Pelayanan dan pemantauan pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang melaksanakan pelayanan dan pemantauan pelayanan	1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	100%	1 unit kerja	1 unit kerja	100%
		Rencana Kunjungan Pelayanan Unggulan	2%	2,5%	2%	6%	300%	2%	2%	100%
		Jumlah Dokumen Laporan dan Analisis BPM	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%
		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan OPD dan BLUD termasuk aset tetap	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Melalui Perangkat Daerah/ Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Kerja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Kinerja Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
					Target Kerja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Kerja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6	(9)	(10=5+7+9)	(11=10/4
		Kesesuaian Waktu Tunggu Kompleks	≤ 80%	100%	≤ 80%	100%	100%	≤ 80%	100%	100%
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									
	Pengelolaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Rasio pemenuhan standar kualitas pelayanan Rumah Sakit : BOR, AvLOS, TOI, BTO, GDR, NDR**	**BOR = 62%, AvLOS = 3hari, TOI = 3hari, BTO = 57kali, GDR = <20‰, NDR = ≤18‰**	**BOR = 64%, AvLOS = 3,4 hari, TOI = 2,5 hari, BTO = 72 kali, GDR = 22,42‰, NDR = 9,47‰**	**BOR = 60%, AvLOS = 3 hari, TOI = 3 hari, BTO = 50 kali, GDR = ≤25‰, NDR = ≤18‰**	**BOR = 71,6 %, AvLOS = 3,8 hari, TOI = 1,1 hari, BTO = 98,3 kali, GDR = 18,19‰, NDR = 6,70‰**	100%	**BOR = 64%, AvLOS = 3 hari, TOI = 3 hari, BTO = 55kali, GDR = ≤20‰, NDR = ≤18‰**	**BOR = 64%, AvLOS = 3 hari, TOI = 3kali, BTO = 55kali, GDR = ≤20‰, NDR = ≤18‰**	100%
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase terpenuhinya sarana prasarana Rumah Sakit	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja RSUD Hj. Anna Lasmanah mengacu kepada Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dimana pelaksanaan tahun ketiga dari penjabaran Rencana pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026 yang kemudian dijabarkan kembali secara dinci dalam Renstra RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara tahun 2023-2026.

Sesuai dengan tahapan dan skala prioritas periode keempat (2020-2024) RPJPD tahun 2005-2025 dengan pengertian kebutuhan dasar yang terpenuhi selain dikatakan menjadi sejahtera dapat juga meningkatkan kemartabatan masyarakat. Dengan semakin luasnya cakupan pemenuhan hak dasar masyarakat dapat lebih sejahtera dan bermartabat, maka didapati beberapa tujuan dan sasaran yang terkait dengan bidang kesehatan antar lain :

1. Tujuan 5: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah
2. Sasaran : Meningkatnya kinerja pelayanan pemerintah daerah
   Indikator PD : Survei Kepuasan Masyarakat
3. Tujuan 6 : Meningkatnya kualitas layanan publik
   Sasaran : Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik
   Indikator PD : Nilai SAKIP RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara
4. Tujuan 7 : Meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar yang berkualitas
   Sasaran : meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
   Indikator PD :
   1) Presentase peningkatan kunjungan rumah sakit
   2) Akreditasi Paripurna

Dalam pelaksanaan pelayanannya, rumah sakit mengampu 7 (tujuh) indikator, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.2 Capaian Indikator Urusan Kesehatan
RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara Tahun 2024

No	Indikator	Target RPJMD	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024			Status	PD Penanggung Jawab
					Target 2024	Capaian 2024	Tingkat Capaian RKPD (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	BOR (Bed Occupancy Rate)/ Pemanfaatan tempat tidur rawat inap	60	%	61,33%	62%	73,8%	116%	●	RSUD Hj Lasmanah
2	LOS (Average Length of Stay/Av LOS)/Rata-rata hari perawatan pasien	3	Hari	2,55 hari	3 hari	2,8 hari	106,67%	●	RSUD Hj Lasmanah
3	TOI (Turn Over Interval)/Rata rata tempat tidur tidak digunakan	3	Hari	1,8 hari	3 hari	1,1 hari	163,33%	●	RSUD Hj Lasmanah
4	BTO (Bed Turn Over)/Frekuensi pemakaian tempat tidur	50	Kali	80 kali	55 kali	95,3 kali	167,2%	●	RSUD Hj Lasmanah
5	GDR (Gross Death Rate)/Angka kematian umum tiap-tiap 1000 pasien	25	‰	19,34 ‰	<25‰	18,19‰	139,6%	●	RSUD Hj Lasmanah
6	NDR (Net Death Rate)/Angka kematian setelah perawatan 48 jam per 1000 pasien	15	‰	8,62 ‰	<15‰	8,70‰	155,3%	●	RSUD Hj Lasmanah
7	Persentase penduduk miskin pemerintahan daerah kabupaten yang terlakomo	100	%	100%	100%	100%	100%	●	RSUD Hj Lasmanah

Sumber: RSUD Hj. Anna Lasmanah Kab. Banjarnegara

Keterangan
● : Sesuai target
● : belum sesuai target
▼ : tidak tercapai

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK UPPD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	Terakreditasi	Persentase RS Rujukan Provinsi yang terakreditasi	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	
2	SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)	-	-	84%	84%	86%	86%	84%	87,77%	85%	89%	IKU sesuai target
3	Nilai SAKIP RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara	-	-	68	75,30	75,30	75,30	75,30	75,30	75,30	75,30	IKU sesuai target
4	Persentase peningkatan Kunjungan RS	-	-	5%	5%	5%	5%	6%	7%	7%	7%	IKU sesuai target
5	Status Akreditasi Rumah Sakit	-	-	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	IKU sesuai target

*) Kolom 3 diisi berdasarkan IKK outcome dalam lampiran Permendagri 18/2020

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan urusan pemerintahan dalam urusan bidang kesehatan, yaitu sesuai dengan tujuan ke 7 dalam arah kebijakan RKPD tahun 2022 yaitu "meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar yang berkualitas". Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan berdasarkan hasil evaluasi, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk tahun 2025 mencakup pemenuhan hak dasar khususnya dalam bidang kesehatan. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah diantaranya adalah:

1. Kebutuhan untuk meningkatkan kepuasan pasien melalui layanan yang berkualitas, profesional, dan berbasis teknologi.
2. Sebagian masyarakat masih memiliki kecenderungan berobat ke rumah sakit swasta.
3. Sistem Manajemen Rumah sakit (SIM-RS) masih berbasis desk top belum webebased, pengembangannya dilakukan permodul di lakukan pihak ke III karena *source code* tidak dimasukkan dalam PKS saat Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan.
4. Kurangnya sarana prasarana rumah sakit seperti ruang pelayanan, ruang tunggu pasien dan lahan parkir bagi pengunjung dan karyawan yang sesuai standar.
5. Kelengkapan fasilitas peralatan medis guna menunjang pelayanan sesuai program prioritas nasional KJSU-KIA.
6. Keterbatasan kegiatan pemeliharaan dan penggantian alat medis yang sudah tidak layak fungsi.
7. Kurang efisiennya pelaksanaan tupoksi dan lemahnya koordinasi yang berdampak pada kurang efektifnya pelayanan kesehatan.
8. Fungsi Promosi RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara belum optimal, sehingga masyarakat belum mengetahui secara menyeluruh perkembangan dan kemajuan pelayanan rumah sakit.

9. Terbatasnya ruang atau gedung untuk pelayanan administrasi perkantoran yang terdiri dari ruang kerja dan aula.
10. Kurang ruang pertemuan atau ruang untuk bimbingan peserta didik yang memanfaatkan RSUD sebagai wahana pendidikan.

Permasalahan tersebut, jika tidak diselesaikan dapat menjadi *constraint* dalam pencapaian visi dan misi Bupati maupun capaian indikator lainnya. Beberapa dampak dari adanya permasalahan dan hambatan tersebut meliputi:

1. Tidak terpenuhinya target indikator kelengkapan jenis spesialis
2. Kurang optimalnya mutu pelayanan sesuai dengan standar minimal pelayanan
3. Kurang optimalnya sistem informasi dikarenakan ada beberapa aplikasi yang belum terintegrasi

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi, peningkatan kualitas birokrasi, dan meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan pengguna layanan akan meningkatkan kebutuhan akan adanya penyediaan produk layanan yang semakin baik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi-inovasi dalam menunjang peningkatan pelayanan publik secara kontinyu. Beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, yaitu:

a. Tantangan
   1) Adanya stigma atau pandangan kurang baik terhadap pelayanan Rumah Sakit pemerintah
   2) Bertumbuh dan berkembangnya rumah sakit swasta di wilayah Kabupaten Banjarnegara
   3) Kesadaran dan peran serta sektor lain yang masih kurang dalam penyelesaian masalah yang dihadapi oleh Rumah Sakit, utamanya kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dokter spesialis
   4) Masih ada pemahaman stakeholder yang kurang benar terhadap kebijakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) yang menganggap tingkat kemandirian rumah sakit untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi mampu ditutupi

sendiri oleh rumah sakit, sehingga tidak ada kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran dari dana APBD.

b. Peluang

1) Makin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pelayanan kesehatan
2) Adanya kesempatan dalam melakukan Kerjasama Operasional (KSO) untuk peningkatan pelayanan
3) Kesempatan mengalokasikan dan mengajukan formasi kebutuhan tenaga kesehatan melalui seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Program Pendidikan Dokter / Dokter Gigi Spesialis (PPDS), formasi khusus dokter, dokter gigi dan dokter spesialis untuk daerah terpencil, konflik, tidak diminati dan daerah bencana
4) Terdapat berbagai sumber alokasi anggaran dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan baik dari Pemerintah Kabupaten (APBD II), Provinsi (APBD I) dan Pemerintah Pusat (Dekonsentrasi/Dana Alokasi Khusus).

Berdasarkan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan tersebut, dapat diinventarisasi beberapa isu strategis. Inventarisasi isu-isu strategis tahun 2025 didapatkan dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal Kabupaten Banjarnegara sampai dengan tahun 2025. Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan pembangunan. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2025, sebagai berikut:

1. Manajemen mutu SDM dalam peningkatan mutu pelayanan (kualitas, kuantitas, kompetensi baik tenaga medis, paramedis, dan non-medis) belum optimal,
2. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasional rumah sakit,
3. Kurangnya minat dokter spesialis untuk bergabung dengan RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara,

4. Kurang efisiennya pelaksanaan tupoksi yang berdampak pada kurang efektifnya pelayanan kesehatan,
5. Belum Optimalnya Pemanfaatan Sistem Informasi dan Manjemen Rumah Sakit (SIM-RS) untuk menunjang pelayanan
6. Belum Optimalnya Fungsi Promosi RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Pembangunan yang dilakukan di segala bidang selain membawa pertumbuhan yang cepat juga mengakibatkan terjadinya perubahan pada lingkungan, pola hidup masyarakat dan juga pada pemanfaatan pelayanan kesehatan. Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit meningkat, salah satu faktor pendorongnya adalah adanya jaminan pembiayaan kesehatan di rumah sakit.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka penyediaan pelayanan kesehatan yang merata, bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, namun akses terhadap pelayanan kesehatan belum merata di seluruh wilayah Indonesia.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Bidang Kesehatan Tahun 2020-2025 yakni meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta melalui penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi. Berdasarkan arah pembangunan tersebut, Kementerian Kesehatan telah menetapkan 5 Tujuan Strategis Tahun 2020-2025 dimana pada Tujuan Strategis kedua disebutkan:

Tujuan Strategis	:	Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
Sasaran Strategis	:	Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
Indikator	:	1. Seluruh kecamatan memiliki minimal 1 puskesmas;

2. Persentase kabupaten/kota yang memenuhi rasio TT 1:1.000 sebesar 100%;
3. Persentase FKTP sesuai standar sebesar 100%;
4. Persentase RS terakreditasi sebesar 100%;
5. Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan lain yang memenuhi persyaratan survei akreditasi sebanyak 500 fasyankes.

Kabupaten Banjarnegara memiliki luas wilayah 106.971 hektar, dengan jumlah penduduk hasil sensus tahun 2022 sebanyak 1.068.347 jiwa (BPS, 2024). Terdapat 4 rumah sakit dengan jumlah tempat tidur per 12 Januari 2022 sebanyak 726 TT (Kementerian Kesehatan, 2022), sementara tempat tidur Puskesmas Rawat Inap sebanyak 184 TT (Dinkes Kab. Banjarnegara, 2022) sehingga jumlah tempat tidur yang tersedia seluruhnya berjumlah 910 TT, dengan rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk sebesar 0,89 TT per 1.000 penduduk.

Berdasarkan target indikator sasaran strategis rasio TT yang ditetapkan Kementerian Kesehatan sebesar 1:1.000 maka jumlah tempat tidur yang tersedia untuk pelayanan kesehatan di Kabupaten Banjarnegara masih di bawah target nasional dengan kekurangan sebanyak 108 TT apabila merujuk pada data penduduk 2020.

Dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 yang disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Tahun 2005-2025, dan mengacu pada RPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026. Salah satu prioritas arah kebijakan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara pada tahun 2026 adalah pembangunan gedung B RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara tahap ke-3 berupa pekerjaan lantai 4, Pembangunan Area Parkir, Kantor dan Masjid di Lahan Parkir sebelah barat gedung B, .

Rencana Pembangunan Gedung B tahap-3 RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara disusun berdasarkan latar belakang sebagai berikut:

1. Terbangunnya lantai 4 gedung B RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara pada tahun 2026;

2. Pemberlakukan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) sesuai dengan aturan BPJS, sehingga Rumah Sakit memerlukan ruang rawat inap tambahan;
3. Masukan/saran dari masyarakat atas kurang memadainya ruang poliklinik, ruang tunggu dan lahan parkir, baik yang disampaikan secara langsung, melalui DPRD maupun pada saat survey kepuasan pelanggan.

RKPD Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Tahun 2005-2025 dan mengacu pada RPD Kabupaten Banjarnegara tahun 2023-2026. Berdasarkan hal tersebut, prioritas arah kebijakan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2026 meliputi:

1. Pelaksanaan Survei Verifikasi Akreditasi
2. Pengembangan Pelayanan Unggulan
3. Peningkatan kualitas SDM
4. Penambahan alat-alat Kesehatan
5. Rekruitmen pegawai sesuai kebutuhan
6. Pemantapan kerjasama pihak ke 3 dan KSO Sesuai Kebutuhan
7. Peningkatan kompetensi pegawai
8. Pengembangan SIMRS yang terintegrasi dan berbasis Website
9. Penyempurnaan Laboratorium Information System (LIS)
10. Perubahan tampilan ruang tunggu pasien instalasi radiologi
11. Evaluasi jalur dan rambu – rambu rumah sakit
12. Penambahan titik phenumatic Tube
13. Pengadaan alat penunjang untuk pelayanan Kangker, Jantung, Saraf Urosefro (KJSU) dan KIA
14. Penataan ruang management
15. Pemenuhan ruang binaan untuj menunjang fungsi RS pendidikan.
16. Pengembangan gedung dan parkiran terpadu.

Tabel 2.5
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 Kabupaten Banjarnegara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
	PENDAPATAN	**BBUD**			**184.398.821.000**		**BBUD**			**178.000.000.000**	
a.	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN**										
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**BBUD**	**Tingkatan Akreditasi Rumah Sakit**	**Paripurna**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**BBUD**	**Tingkatan Akreditasi Rumah Sakit**	**Paripurna**		
1	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**BBUD**	**Persentase Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayarkan**	**100%**	**27.772.891.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**BBUD**	**Persentase Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayarkan**	**100%**	**28.003.883.758**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BBUD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	324 orang/ bulan	27.772.891.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BBUD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	328 orang/ bulan	28.003.883.758	
2	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**BBUD**	**Persentase Capaian Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**100%**	**341.858.160**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**BBUD**	**Persentase Capaian Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**100%**	**273.742.476**	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BBUD	Jumlah Layanan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor disediakan	1 layanan	341.858.160	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BBUD	Jumlah Layanan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor disediakan	1 layanan	273.742.476	
3	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**BBUD**	**Persentase Capaian Penyediaan BLUD yang Menyediakan pelayanan dan**	**100%**	**135.858.697.000**	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**BBUD**	**Persentase Capaian Penyediaan BLUD yang Menyediakan pelayanan dan**	**100%**	**180.000.000.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Penunjang Pelayanan					**Penunjang Pelayanan**			
			kelengkapan jenis pelayanan spesialis (%/jenis)	**100% (33 jenis)**				**kelengkapan jenis pelayanan spesialis (%/jenis)**	**100% (33 jenis)**		
			Cost Recovery Ratio (CRR)/ kemampuan pendapatan untuk membiayai operasional	**92%**				**Cost Recovery Ratio (CRR)/kemampuan pendapatan untuk membiayai operasional**	**92%**		
			Persentase Capaian SPM Rumah Sakit Mencapai Target	**≥ 80%**				**Persentase Capaian SPM Rumah Sakit Mencapai Target**	**≥ 80%**		
			Status akreditasi rumah sakit	**Paripurna**				**Status akreditasi rumah sakit**	**Paripurna**		
	Penyediaan dan Penunjang Pelayanan BLUD	BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	**136.088.897.000**	Penyediaan dan Penunjang Pelayanan BLUD	BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	**180.000.000.000**	
			Jumlah Gedung yang Terbangun	1 unit				Jumlah Gedung yang Terbangun	1 unit	**9.323.000**	Belanja Pegawai BLUD
			Dokumen hasil survei kepuasan masyarakat	1 Dok				Dokumen hasil survei kepuasan masyarakat	1 Dok	**141.771.000.000**	Belanja Barang dan Jasa

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebermihan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
			Dokumen hasil survei kepuasan staf dan karyawan	1 Dok				Dokumen hasil survei kepuasan staf dan karyawan	1 Dok	4.000.000.000	Belanja Modal Pengadaan Alat Mesin BLUD
			Jumlah Dokumen laporan dan Analisis SPM	2 Dok				Jumlah Dokumen laporan dan Analisis SPM	2 Dok	25.000.000.000	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD
			Jumlah indikator Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Mencapai Target	108 Indikator				Jumlah Indikator Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Mencapai Target	108 Indikator	5.000.000	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD
			Jumlah laporan yang diseusun (LKJIP, LKPJ/LPPD, PDK,Renja, RKT,Penfil)	8 dok				Jumlah laporan yang diseusun (LKJIP, LKPJ/LPPD, PDK,Renja, RKT,Penfil)	8 dok		
			Jumlah Dokumen RKA,DPA, dan RBA	6 dok				Jumlah Dokumen RKA,DPA, dan RBA	6 dok		
			Jumlah Dokumen Laporan Keuangan OPD dan BLUD tersusun tepat waktu	1 Dokumen				Jumlah Dokumen Laporan Keuangan OPD dan BLUD tersusun tepat waktu	1 dok		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
			Jumlah dokumen surat pertanggungjawaban (SPJ) belanja APBD dan BLUD terverifikasi	1.917 dok				Jumlah dokumen surat pertanggungjawaban (SPJ) belanja APBD dan BLUD terverifikasi	1.917 dok		
			Kenaikan Kunjungan Pelayanan Unggulan	3%				Kenaikan Kunjungan Pelayanan Unggulan	3%		
			Jumlah penderita HIV AIDS mendapatkan pelayanan VCT dan CST	124 pasien				Jumlah penderita HIV AIDS mendapatkan pelayanan VCT dan CST	124 pasien		
			Jumlah kasus gerakan meningkat pelanggaran di Instalasi Rawat Jalan	33.000 kunjungan				Jumlah kasus gerakan meningkat pelanggaran di Instalasi Rawat Jalan	33.000 kunjungan		
			Jumlah kelompok kasus pegawai penderita penyakit degenerasi	4 kel				Jumlah kelompok kasus pegawai penderita penyakit degenerasi	4 kel		
			Jumlah Pokja yang dilakukan Penilaian	16 Pokja				Jumlah Pokja yang dilakukan Penilaian	16 Pokja		
II	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**RSUD**	**Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk : BOR (Bed Occupancy Rate) / Pemanfaatan TT rawat inap (%)**	64%	20.000.000.000	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**RSUD**	**Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk : BOR (Bed Occupancy Rate) / Pemanfaatan TT rawat inap (%)**	64%	10.000.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
			LOS (Average Length of Stay/Av LOS) / Rata-rata hari perawatan pasien (hari).	**3 hari**				**LOS (Average Length of Stay/Av LOS) / Rata-rata hari perawatan pasien (hari)**	**3 hari**		
			TOI (Turn Over Interval) / Rata-rata TT tidak digunakan (hari)	**3 hari**				**TOI (Turn Over Interval) / Rata-rata TT tidak digunakan (hari)**	**3 hari**		
			BTO (Bed Turn Over) / Frekuensi pemakaian TT (kali)	**87 kali**				**BTO (Bed Turn Over) / Frekuensi pemakaian TT (kali)**	**87 kali**		
			GDR (angka kematian untuk tiap-tiap 1000 pasien)	**≤ 25 ‰**				**GDR (angka kematian untuk tiap-tiap 1000 pasien)**	**≤ 25 ‰**		
			NDR (angka kematian setelah perawatan 48 jam per 1000 pasien)	**≤ 15 ‰**				**NDR (angka kematian setelah perawatan 48 jam per 1000 pasien)**	**≤ 15 ‰**		
1	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**RSUD**	**Persentase Ketersediaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan**	**100%**	**38.000,000.000**	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**RSUD**	**Persentase Ketersediaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan**	**100%**	**10.000.000.000**	
	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	RSUD	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang diadakan	1 paket	25.000.000.000	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	RSUD	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang diadakan	1 paket	10.000.000.000	

Berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2026, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan yaitu:

1. Besaran Pagu Indikatif sesuai dengan usulan rencana kegiatan anggaran yang juga tercantum dalam aplikasi SIPD Kabupaten Banjarnegara
2. Pengadaan barang dan jasa sesuai dengan program kegiatan berdasarkan pemenuhan kebutuhan rumah sakit sebagai upaya peningkatan pelayanan di tahun 2026
3. Indikator program dan kegiatan merupakan target dan tolak ukur keberhasilan dimana hasil capaian digunakan dalam pengambilan keputusan/kebijakan ditahun berikutnya

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan musrenbang kecamatan dan forum konsultasi publik telah disampaikan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui aplikasi SIPD. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	NIHIL				

2.6 Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan hasil reses anggota DPRD, melalui aplikasi SIPD telah disampaikan usulan program dan kegiatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.7
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Validasi
	NIHIL				

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara tidak terlepas dari program pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan, utamanya untuk sub bidang upaya kesehatan rujukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit.

Tema Pembangunan Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 adalah "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural", dengan prioritas pembangunan nasional Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, dengan program prioritas Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan.

Telaah terhadap program pembangunan Kementerian Kesehatan yaitu Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Bidang Kesehatan Tahun 2020-2025 yakni meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta melalui penguatan pelayanan kesehatan dasar (*Primary Health Care*) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) juga telah menetapkan lima fokus strategi pembangunan kesehatan untuk 5 tahun ke depan, yaitu kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi, perbaikan gizi masyarakat, pencegahan dan penguatan sistem kesehatan serta pengawasan obat dan makanan.

Ada empat isu kesehatan yang harus diselesaikan Kemenkes RI saat ini yaitu stunting, angka kematian ibu dan angka kematian bayi, perbaikan manajemen jaminan kesehatan nasional, penguatan pelayanan kesehatan, obat serta kemandirian obat dan alat kesehatan.

Selain itu pula akan dilaksanakannya Reformasi Sistem Kesehatan difokuskan pada delapan area reformasi, yaitu pendidikan

dan penempatan tenaga kesehatan, penguatan fasilitas kesehatan tingkat pertama, peningkatan RS dan pelayanan kesehatan di Daerah Terluar, Perbatasan dan Kepulauan Terluar (DTPK), kemandirian farmasi dan alat kesehatan, penguatan keamanan dan ketahanan kesehatan, pengendalian penyakit dan imunisasi, inovasi pembiayaan kesehatan, dan optimalisasi teknologi informasi dan pemberdayaan masyarakat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan serta pedoman penyelenggaraan masa musyawarah perencanaan pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pengembangan dan Penelitian Kabupaten Banjarnegara mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005 – 2025. Dokumen tersebut merupakan penjabaran Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 3 Tahun 2009.

Visi pembangunan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005 – 2025 adalah :

"BANJARNEGARA MAJU BERBASIS PERTANIAN"

Sesuai Tupoksi RSUD maka dari ke 4 misi RPJP Kabupaten Banjarnegara tahun 2005-2025 untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan tetap mendukung misi lainnya.

Misi Ke 4 :

Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih (good government and clean governance) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab yang ditandai dengan semakin meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan didukung dengan peningkatan profesionalisme aparatur daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, pengembangan sistem dan iklim demokrasi, peningkatan kemampuan dan kemandirian daerah dalam

mendukung pembangunan dan peningkatan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak.

Upaya perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Banjarnegara dilaksanakan secara bertahap dalam kerangka pembangunan jangka menengah, yang diukur dengan parameter peningkatan kualitas manusia melalui indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tahapan pembangunan jangka menengah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. RPJM Daerah Pertama (2005 - 2009)
2. RPJM Daerah Kedua (2010 - 2014)
3. RPJM Daerah Ketiga (2015 - 2019)
4. RPJM Daerah Keempat (2020 - 2025)

Untuk rencana kerja tahun 2025 mengacu pada arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Banjarnegara berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026, dengan arah kebijakan **"Pemantapan Kondusivitas Wilayah Untuk Mendukung Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Berbasis Pertanian"** dengan prioritas peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing, dengan berfokus pada peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan.

3.1 Program dan Kegiatan

3.1 Tabel Program dan Kegiatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Catatan Penting	Perubahan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Teknis Ukur	Target	
					UROAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
1	02	01			PROGRAM PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								25.400.626.424					28.003.882.750
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tingkatan Akreditasi Rumah Sakit	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Persentase Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayarkan	Kab. Banjarnegara	Pertama	396 orang /bulan	100 %	25.400.626.424	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		Meningkatnya kapasitas aparatur Pemerintah	100 %	25.400.626.424
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								341.956.150					273.742.476
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tingkatan Akreditasi Rumah Sakit	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor disediakan	Persentase Capaian Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Banjarnegara	Pertama	1 laporan	100 %	341.956.150	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		Meningkatnya kapasitas pegawai	100 %	273.742.476

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Nomor Dasa		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolak Ukur	Target	
1	02	01	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**138.894.789.000**				**180.000.000.000**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang pelayanan BLUD	Tingkatnya Akreditasi Rumah Sakit	Jumlah Dokumen hasil survei kepuasan masyarakat	Persentase indikator standar pelayanan Minimal (SPM) di lingkup Pagun Tata Usaha yang tercapai target	Kab. Banja nnga ra	Persent ase	1 dok	± 80%	138.594.789.000	Pemda paten BLUD		Akredi gitasi ya Pelay anan dan Penu njang Pelay anan BLUD	100%	180.000.000.000
							Jumlah Dokumen hasil survey kepuasan staf dan karyawan				1 dok							
							Jumlah Dokumen laporan penilaian capaian dan analisa SPM				2 dok							
							Jumlah Indikator Standar pelayanan Minimal Rumah Sakit tercapai target				108 Indik ator							
							Jumlah laporan kinerja yang disusun LKIP, LKPJ/LPPD, PDRJ/Renja, IKT, Profil	Hasil (CSR)/kinerja pusat pendapatan untuk kemitraan/ operasional			6 dok	92%						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
			Jumlah Dokumen RKA, DPA, dan RBA	Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan			6 dok							
			Jumlah Dokumen Laporan Keuangan OPD dan BLUD tersusun tepat waktu				1 dok							
			Jumlah dokumen aset pertanggungjawaban belanja APBD dan BLUD terverifikasi				1.017 dok							
			Jumlah kunjungan pelayanan unggulan	Keterlaksanaan jenis pelayanan spesialis	Kab. Banjar rangka	Pengunjung	3%	23 jenis						
			Jumlah penderita HIV AIDS mendapatkan pelayanan VCT dan CST		Kab. Banjar rangka		124 pasien							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Rincian Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi (Output Kegiatan)	Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Rincian Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
			Jumlah kasus gelandangan mendapat penanganan di jalan/area jalan		Kab. Banjarnegara		33.000 kunjungan							
			Jumlah kelompok binaan pagyuban penderita penyakit degeneratif		Kab. Banjarnegara		9 kelompok							
			Jumlah BLUD yang menyelenggarakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Pemantauan Capaian Penyelenggaraan BLUD yang menyelenggarakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kab. Banjarnegara		1 unit kerja	100%						
			Jumlah Gedung yang terbangun				1 unit							
			Jumlah Pelkes yang ditindaklanjuti Pengaduan	Rapat-rapat Akreditasi Rumah Sakit	Kab. Banjarnegara	Pemantauan	16 pelkes	Paripurna						

Kode					Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
3	02	02			PROGRAM PENGENDALIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								25.000.000.000					18.000.000.000
3	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								25.000.000.000					18.000.000.000
3	02	02	2.01	1e	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rasio penyediaan standar kualitas pelayanan Rumah Sakit (Bed Occupancy Rate) / Pengendalian TT rawat inap (%)	Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medis Fasilitas Layanan Kesehatan yang disediakan	Pemenuhan Kelengkapan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Kab. Banjarnegara	64%	1 paket	100%	25.000.000.000			Meningkatnya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan RSUD	100%	18.000.000.000
						LOS (Average Length of Stay/ Av. LOS) / Rata-rata hari perawatan pasien (hari)				3 hari								
						TOI (Turn Over Interval) / Rata-rata TT untuk digunakan (hari)				3 hari								
						BTO (Bed Turn Over) / Frekuensi pemakaian TT (kali)				37 kali								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Kelaun Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
						ODR jangka kematian untuk tiap tiap 1000 penduduk SDR jangka kematian setelah perempuan 49 pasi per 1000 penduduk			Kab. Banja nagara	< 20 ‰ < 15 ‰								

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program pada perangkat daerah merupakan program prioritas dalam Renstra 2023-2026. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPD selanjutnya dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Pemilihan untuk masing-masing program/ kegiatan di

Sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota terdiri dari 3 kegiatan yang diarahkan pada :

   a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
   b. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah;
   c. Peningkatan Pelayanan BLUD;

   Dengan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
   c. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

   Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat terdiri dari 1 (satu) kegiatan yang diarahkan pada :

   a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

      Dengan 1 (satu) sub kegiatan yaitu Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. Renja Perangkat Daerah selanjutnya menjadi platform operasional bagi Perangkat Daerah dalam menjalankan programnya dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka sasaran pembangunan daerah tahun 2025. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026 dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disepakati.
2. Kerangka pendanaan dalam Renja Perangkat Daerah masih bersifat sementara, sehingga masih dimungkinkan terjadi perubahan pagu yang disebabkan oleh pengurangan, penambahan, dan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan maupun antar sub kegiatan dalam kerangka penyusunan anggaran secara terpadu dan berbasis kinerja.
3. Renja Perangkat Daerah menjadi acuan bagi Kepala Perangkat Daerah dan segenap jajarannya serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, serta menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal : Januari 2025

DIREKTUR RSUD Hj. ANNA LASMANAH
BANJARNEGARA

dr. ERNA ASTUTY
NIP. 19710830 200012 2 001

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan yang diatur melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan pembentukan tim

penyusun, penelaahan rancangan awal RKPD, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, hingga pada penyempurnaan berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang RKPD. Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, penyusunan Renja Perangkat Daerah juga mengacu pada Renja Kementerian/Lembaga terkait, serta Renja Perangkat Daerah Provinsi terkait. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2. Landasan Hukum

Renja Inspektorat Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);

25. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 – 2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun dengan maksud untuk:

a. Menjabarkan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029 ke dalam rencana program kegiatan prioritas Tahun 2026 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Renja K/L Tahun 2026 dan Renja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;
b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerapan anggaran berbasis kinerja.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

a. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA-DPA dalam Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2026, yang dalam penyusunannya didahului dengan menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026;
b. Sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Tahun 2026;
c. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun berdasarkan sistematika yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah.

BAB 2 : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dan atau pokok-pokok DPRD.

BAB 3 : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan tahun 2026.

BAB 4 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam

rangka pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran RKPD.

BAB 5 : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 disusun untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara. Urusan yang menjadi kewenangan Inspektorat Kabupaten Banjarnegara yaitu Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan.

Renja Inspektorat Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 terdiri dari 3 program, 10 kegiatan dan 26 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 11.708.050.092,00 dengan fokus utama pada capaian Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Kabupaten, Inspektorat Provinsi dan BPK RI serta Peningkatan Kapabilitas APIP. Program/kegiatan/sub kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pengawasan daerah yang meliputi:

1. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang masih belum terintegrasi dan belum menjadi bagian dalam pelaksanaan tata kelola organisasi perangkat daerah;
2. Cakupan pengawasan yang luas dengan berbagai penugasan mandatori yang memerlukan langkah audit yang tepat dan cepat;
3. Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan;

4. Terbatasnya jumlah SDM pemeriksa dan kurangnya kompetensi SDM pemeriksa;

Dari 3 program, 10 kegiatan, dan 26 sub kegiatan yang dalam Renja Inspektorat tersebut, program/kegiatan/sub kegiatan yang disetujui untuk dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun anggaran 2025 terdiri dari 3 program, 10 kegiatan, dan 26 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 11.015.300.000,00

Renja Inspektorat Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2025, terjadi beberapa perubahan penambahan dan pengurangan anggaran antar sub kegiatan karena adanya penambahan pagu dalam rangka dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan. Perubahan tersebut mengubah rincian dalam Renja Perangkat Daerah menjadi 3 program, 10 kegiatan dan 26 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 11.708.050,00. Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2025, tercatat adanya hasil yang baik yang dikarenakan adanya pencapaian maupun pelampauan target.

Sesuai dengan perhitungan target dan realisasi atas program/kegiatan/sub kegiatan pada tahun 2025 yang direncanakan seluruhnya telah terpenuhi. Adapun realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Penyelenggaraan Pengawasan Internal, Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, Perumusan Kebijakan

Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan, Pendampingan Asistensi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Efisiensi dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan sebagai yang merupakan kegiatan utama pengawasan dan pendukung kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung terlaksananya kepatuhan obyek pengawasan dalam memenuhi tindak lanjut hasil pengawasan;
3. Optimalisasi sumber daya manusia APIP dan sarana prasarana pendukung pada kegiatan pengawasan;
4. Meningkatkan efektivitas dan transparansi layanan publik.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka untuk mengoptimalkan capaian kinerja indikator Inspektorat Kabupaten Banjarnegara diperlukan strategi dan langkah-langkah yang perlu dilaksanakan. Pada tahun 2026 perencanaan selanjutnya, perlu diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, diantaranya:

1. Penyelenggaraan pengawasan intern dalam bentuk *assurance* dan *consulting* yang diselenggarakan secara efektif dan memiliki nilai tambah bagi obyek pengawasan;
2. Mengintensifkan upaya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dalam bentuk pendampingan/fasilitasi/asistensi;
3. Pemantapan sumber daya manusia melalui peningkatan kapasitas APIP yaitu Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi;

4. Menyusun dan menyempurnakan kebijakan, pedoman dan prosedur yang disesuaikan dengan standar audit AAIPI;
5. Menyusun rencana pengembangan sistem pengawasan berbasis teknologi informasi untuk mendukung kegiatan pengawasan;
6. Mengoptimalkan Peran APIP dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan urusan pengawasan.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Inspektorat Kabupaten Banjarnegara sampai dengan Tahun 2025 disajikan pada tabel di bawah ini:

REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN INSPEKTORAT TAHUN 2024

No	Indikator RPJMD	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Program	Indikator Program	Kinerja			Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja			Anggaran		
				Target	Realisasi	Realisasi %			Target	Realisasi	Realisasi %			Target	Realisasi	Realisasi %			Target	Realisasi	Realisasi %	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*	*8*	*9*		*10*	*11*	*12*	*13*		*14*	*15*	*16*	*17*		*18*	*19*	*20*	*21*
1	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Internal maupun Eksternal				Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase hasil pengawasan sesuai dengan bidang pengawasan yang diselesaikan tepat waktu	60%	57%	94,53	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah laporan hasil pengawasan internal	27	27	100%	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	2	2	100%	129.765.000	129.670.000,00	99,93%
			- Inskab	91%	96%	106,35%							Jumlah LHP yang terbit tepat waktu	20	20	100%	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	3	3	100%	105.705.000,00	105.698.000,00	99,99%
			- Insprov	96%	99%	102,92%																		
			- BPK RI	94%	96%	101,59%																		
													Jumlah obyek pemeriksaan yang menindaklanjuti hasil pengawasan	24	24	100%	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Kinerja	15	15	100%	13.110.000,00	13.100.000,00	99,92%
																	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1	1	100%	9.210.000,00	9.200.000,00	99,89%
																	Pengawasan Desa	Jumlah Hasil Laporan Pengawasan Desa	8	8	100%	32.430.000,00	32.400.000,00	99,91%
																	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Kerjasama Pengawasan	1	1	100%	150.000.000,00	143.307.900,00	95,54%
													Jumlah laporan informa	3	3	100%	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Hasil Monev	1	2	200%	266.598.000,00	264.368.337,00	99,16%

No	Indikator RPJMD	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Program	Indikator Program	Kinerja			Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja			Anggaran		
				Target	Realisasi	Realisasi %			Target	Realisasi	Realisasi %			Target	Realisasi	Realisasi %			Target	Realisasi	Realisasi %	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*	*8*	*9*		*10*	*11*	*12*	*13*		*14*	*15*	*16*	*17*		*18*	*19*	*20*	*21*
													si hasil pengawasan				Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan TL hasil pemeriksaan APIP						
												Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	5	5	100%	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	1	6	600%	15.450.000,00	-	0,00%
																	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	3	12	100%	112.110.000,00	111.940.000,00	99,85%
			Level Kapabilitas APIP	3		100%	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh level Maturitas SPIP terdefinisi	33,3%	33,3	10010 %	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah laporan hasil pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah, reformasi birokrasi, penegahan dan pemberantasan korupsi serta penegakan	22	22	100%	Pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi urusan pemerintahaan daerah	5	5	100%	687.870.000,00	679.148.725,00	98,73%
																	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, verifikasi dan	5	5	100%	41.250.000,00	41.165.500,00	99,80%

No	Indikator RPJMD	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Program	Indikator Program	Kinerja			Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja			Anggaran		
				Target	Realisasi	Realisasi %			Target	Realisasi	Realisasi %			Target	Realisasi	Realisasi %			Target	Realisasi	Realisasi %	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*	*8*	*9*		*10*	*11*	*12*	*13*		*14*	*15*	*16*	*17*		*18*	*19*	*20*	*21*
													integritas					Penilaian Reformasi Birokrasi						
																	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1	1	100%	23.594.000,00 -	18.959.400,00	80,36%
																	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan verifikasi Penegakan Integritas	15	15	100%	204.910.200,00	194.928.285,00	95,13%
												Perumusan kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah dokumen kebijakan teknis bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	3	3	100%	Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	1	1	100%	85.055.000,00	74.045.000,00	87,06%

No	Indikator RPJMD	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Program	Indikator Program	Kinerja			Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja			Anggaran		
				Target	Realisasi	Realisasi %			Target	Realisasi	Realisasi %			Target	Realisasi	Realisasi %			Target	Realisasi	Realisasi %	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*	*8*	*9*		*10*	*11*	*12*	*13*		*14*	*15*	*16*	*17*		*18*	*19*	*20*	*21*
							Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	77,5	76,9	99,23	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya informasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	2	2	100%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	100%	6.000.000,00	5.000.000,00	83,33%
																	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laparan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	0	0	#DIV/0!	5.773.600,00	5.773.600,00	100,00 %
												Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	100%	100%	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	9	9	100%	419.880.000,00	409.455.252,00	97,52%
																	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan Perundang-Undangan	0	150	100%	140.000.000,00	138.880.000,00	99,20%

No	Indikator RPJMD	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Program	Indikator Program	Kinerja			Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja			Anggaran		
				Target	Realisasi	Realisasi %			Target	Realisasi	Realisasi %			Target	Realisasi	Realisasi %			Target	Realisasi	Realisasi %	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*	*8*	*9*		*10*	*11*	*12*	*13*		*14*	*15*	*16*	*17*		*18*	*19*	*20*	*21*
																	Bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan Perundang-Undangan	0	38	100%	20.000.000,00	19.756.000,00	98,78%
												Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah	100%	100%	100%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	43	43	100%	6.103.663.532,00	6.067.484.243,00	99,41%
																	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	8	8	100%	48.562.500,00	47.301.250,00	97,40%
																	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	4	4	100%	5.773.600,00	5.661.100,00	98,05%
								Nilai survei kepuasan masyarakat	85	85,17	100,2	Penyediaan jasa penunjang urusan	Persentase terpenuhinya jasa penunjang	100%	100%	100%	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan	3	3	100%	88.800.000,00	68.342.197,00	76,96%

No	Indikator RPJMD	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Program	Indikator Program	Kinerja			Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja			Anggaran		
				Target	Realisasi	Realisasi %			Target	Realisasi	Realisasi %			Target	Realisasi	Realisasi %			Target	Realisasi	Realisasi %	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*	*8*	*9*		*10*	*11*	*12*	*13*		*14*	*15*	*16*	*17*		*18*	*19*	*20*	*21*
												pemerintahan daerah	urusan pemerintahan daerah					listrik yang disediakan						
																	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	3	3	100%	144.622.800,00	132.229.087,00	91,43%
												Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	100%	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	8	8	100%	537.414.800,00	523.968.815,00	97,50%
												Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	Pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	0	0	0%	74.832.000,00	71.910.000,00	96,10%
																	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	0%	310.732.000,00	306.043.000,00	98,49%
																	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	6	6	100%	342.057.000,00	321.050.000,00	93,86%
												Pemeliharaan	Presentase barang	100%	100%	100%	Penyediaan Jasa Pemelihar	Jumlah kendaraan perorangan	1	1	100%	87.400.000,00	78.240.580,00	89,52%

No	Indikator RPJMD	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Program	Indikator Program	Kinerja			Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja			Anggaran		
				Target	Realisasi	Realisasi %			Target	Realisasi	Realisasi %			Target	Realisasi	Realisasi %			Target	Realisasi	Realisasi %	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*	*8*	*9*		*10*	*11*	*12*	*13*		*14*	*15*	*16*	*17*		*18*	*19*	*20*	*21*
												Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara				aan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Peroranga n Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya						
																	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	2	2	100%	116.640.000,00	112.220.810,00	96,21%
																	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	1	100%	229.723.000,00	198.010.776,00	86,20%
																	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2	2	100%	42.051.900,00	40.085.700,00	95,32%

No	Indikator RPJMD	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Program	Indikator Program	Kinerja			Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja			Anggaran		
				Target	Realisasi	Realisasi %			Target	Realisasi	Realisasi %			Target	Realisasi	Realisasi %			Target	Realisasi	Realisasi %	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*	*8*	*9*		*10*	*11*	*12*	*13*		*14*	*15*	*16*	*17*		*18*	*19*	*20*	*21*
																	Bangunan Lainnya							
																	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi.	0	2	100%	190.145.700,00	185.256.167,00	97,43%
																						10.791.129.632	**10.554.599.724**	**97,81%**

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Banjarnegara

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Analisis Ketercapaian*	Solusi**
			Target	Realisasi	Realisasi %		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah	1. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Internal maupun Eksternal				Masih terdapat obyek pemeriksaan yang belum menindaklanjuti rekomendasi temuan hasil pengawasan	Pelaksanaan Rakorwas secara rutin per Triwulan untuk memantau Perkembangan Tindak lanjut dan mengetahui kendala penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan
		- Inskab	90,5%	96,25%	106%		
		- Insprov	96%	98,81%	103%		
		- BPK RI	94%	95,50%	102%		
		2. Level Kapabilitas APIP	3	3	100%	Hasil Kapabilitas APIP dari BPKP diperoleh nilai pada Level 3	Meningkatkan kualitas hasilpada setiap elemen termasuk penyelesaian rekomendasi hasil Kapabilitas APIP sehingga dapat meningkatkan Level Kapabilitas APIP

ANALISIS KETERCAPAIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT

No	Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Analisis Ketercapaian*	Solusi**
			Target	Realisasi	Realisasi %		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP OPD	77,5	76,90	99,23	Terhadap Nilai SAKIP tersebut agar melakukan perbaikan antara lain : 1.Melakukan langkah - langkah belum mencapai nilai optimal pada komponen Perencanaan Kinerja seperti melakukan publikasi dokumen perencanaan secara tepat waktu. 2. Me;akukan Perbaikan pada Komponen Pengukuran Kinerja, seperti mengptimalkan pengukuran Kinerja melalui tehnologi informatika. 3. Melakukan perbaikan pada Komponen Evaluasi Kinerja Internalmelalui tehnologi aplikasi sehingga pelaksanaan evaluasi kinerja dapat dii laksanakan secara efisien.	Hal yang perlu ditingkatkan antara lain : Penyusunan Dokumen Perencanaan yang melibatkan semua Pejabat Setruktural. Menyusun Laporan Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Pengukuran Kinerja, dengan melakukan rapat internel pada tiap triwulan secara berkala dalam rangka evaluasi kinerja .
		Nilai survei kepuasan masyarakat	85	85,17	100,20	Telah dilakukan pengukuran pada TW 3 dengan melakukan survei kepada masyarakat terkait kinerja inspektorat	Melakukan perbaikan atas hasil evaluasi terkait informasi secara menyeluruh guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
II	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	Persentase hasil pengawasan sesuai dengan bidang pengawasan yang diselesaikan tepat waktu	60%	57%	94,53	Terdapat Penugasan Non PKPT yang bersifat mandatory, dengan keterbatasan waktu penugasan	Mengusulkan perubahan PKPT terkait penjadwalan ulang guna pemenuhan pengawasan yang bersifat mandatory
III	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh level Maturitas SPIP terdefinisi	33,3%	33,33	100	Telah dilaksanakan penjaminan kualitas Penyelenggaraan Maturitas SPIP dengan fokus atau sektor Pengujian yaitu Pengentasan Kemiskinan, Percepatan Penurunan Stanting, Pariwasa dan UMKM, Ketahan Pangan, ,dan Pengembangan Kawasan yang didukung oleh 8 Perangkat Daerah.	Hal yang perlu ditingkatkan antara lain : Mengintensifkan Pengawasan Implementasi Mangemen Resiko yang menjangkau seluruh Perangkat Daerah, sesuai denganperan line ketiga.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029

Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	*Base line* 2024	Target Capaian Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Level Kapabilitas APIP	Level	3	3	3	3	3	3	3	
2.	Pesentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan									
	-Inspektorat Kab.	%	96,25	91,00	92,00	92,20	92,30	92,4%	92,50	
	-Inspektorat Prov	%	98,81	97,00	98,00	98,10	98,20	98,30	98,40	
	-BPK	%	95,50	94,50	92,00	92,20	92,30	92,40	92,50	
3.	IEPK	Angka	2,658	2,748	2,838	2,928	3,018	3,108	3,198	
4.	KOD	Angka	3,45	4,50	4,70	4,80	4,90	5,00	5,10	
5.	NILAI SAKIP	Angka	76,9	79,4	77	77,25	77,50	77,75	77,78	
6.	IPP	Angka	3,69	3,7	3,8	3,9	4,0	4,1	4,2	
7.	Indeks Integritas Nasional	%	75,28	75,90	75,96	76,03	77,09	80,00	80,05	

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Inspektorat Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2025 – 2029 mempunyai tujuh indikator kinerja utama yang berasal dari indikator tingkat sasaran. Indikator kinerja utama tersebut mendukung sasaran ke empat pemerintah Kabupaten Banjarnegara yaitu “Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif”.

Selain Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah, Indikator Kinerja Daerah (IKD), juga ditetapkan indikator kinerja kunci (IKK) yang merupakan indikator program sebagai penyelenggaraan bidang urusan masing-masing

perangkat daerah. Indikator kinerja kunci (IKK) ditampilkan dalam tabel. sebagai berikut:

Indikator Kinerja Kunci (IKK)

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	*Baseline* Tahun	Target Capaian Tahun						Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Persentase kesesuaian pengawasan dengan PKPT	%	NA	75	76	77	79	81	83	
2.	Cakupan OPD yang mendapatkan layanan konsulting	%	NA	30	40	50	60	70	80	
3.	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
7.	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Banjarnegara

Inspektorat Kabupaten Banjarnegara dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan urusan pemerintahan dalam 1 urusan, yaitu Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan. Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan berdasarkan hasil evaluasi, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Banjarnegara untuk tahun 2026 mencakup 1 (satu) urusan tersebut. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Banjarnegara diantaranya adalah:

1. Belum maksimalnya pemenuhan level Kapabilitas APIP tertutama dalam pelaksanaan audit kinerja pada OPD yang mendukung capaian visi dan misi kepala daerah;
2. Jumlah penugasan yang semakin meningkat tidak sebanding dengan jumlah aparatur pengawasan yang ada saat ini;
3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) belum dilaksanakan secara memadai oleh Kepala OPD, sehingga menjadi salah satu faktor yang menghambat terwujudnya prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Permasalahan tersebut, jika tidak diselesaikan dapat menjadi *constraint* dalam pencapaian Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Banjarnegara maupun capaian indikator lainnya. Beberapa dampak dari adanya permasalahan dan hambatan tersebut meliputi:

1. Belum optimalnya pencapaian realisasi kesesuaian pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
2. Adanya keterlambatan penyelesaian laporan hasil pengawasan;
3. Terdapat perbedaan persepsi implementasi kebijakan antara aparat pengawas dengan obyek pemeriksaan (obrik).

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi, peningkatan kualitas birokrasi, dan meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan pengguna layanan akan meningkatkan kebutuhan akan adanya penyediaan produk layanan yang semakin baik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi-inovasi dalam menunjang peningkatan pelayanan publik secara berkelanjutan. Beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Inspektorat Kabupaten Banjarnegara, yaitu:

1. APIP yang saat ini dituntut harus mampu berperan sebagai *trusted advisory* yang merupakan implikasi pergeseran peran Inspektorat dari *watchdog* menjadi peran katalis yang harus dapat menjadi penjamin mutu (*quality assurance*) dan konsultan (*consulting partner*);
2. Atas tuntutan tersebut maka diperlukan APIP yang memiliki kompetensi dan sikap professional dalam melaksanakan tugas selain tentunya didukung dengan peningkatan jumlah personil;
3. Tingkat maturitas SPIP dan Level Kapabilitas APIP masih berada pada level 3;
4. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan oleh obyek pemeriksaan harus ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari setelah laporan diterima;
5. Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi;
6. Pengukuran kinerja secara terintegrasi merupakan bagian dalam peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

Berdasarkan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan tersebut, dapat diinventarisasi beberapa isu strategis. Inventarisasi isu-isu strategis tahun 2026 didapatkan dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal Kabupaten Banjarnegara sampai dengan tahun 2025. Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan pembangunan. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas

dan fungsi Inspektorat Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2026, sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan;
2. Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terkendala dengan masih belum tersusun dan terlaksananya Manajemen Risiko Pemerintah Daerah secara memadai;
3. Belum optimalnya peran APIP yang disebabkan kurangnya kompetensi dan terbatasnya jumlah SDM APIP;
4. Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung peningkatan kualitas pengawasan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPD Tahun 2025-2029. Berdasarkan hal tersebut, prioritas arah kebijakan sesuai tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2026 meliputi:

1. Mendorong kepatuhan OPD terhadap penyelesaian tindaklanjut hasil pengawasan;
2. Peningkatan penerapan SPIP;
3. Mewujudkan peran APIP yang efektif;
4. Mengawal peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi;
5. Menyederhanakan prosedur layanan publik, dan meningkatkan pelayanan yang tertib dengan berbasis teknologi informasi.

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Inspektorat Kabupaten Banjarnegara

Rekening					Uraian	Sumber Dana	Tahun 2026	Hasil Analisis Kebutuhan	+/-	Indikator
6					**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**		**9.793.019.603**	**8.188.316.098**	**- 1.604.703.505**	
6	1				INSPEKTORAT DAERAH		9.793.019.603	8.188.316.098	- 1.604.703.505	Nilai maturitas SPIP : 3,09 Level kapabilitas APIP : level 3 % penyelesaian TLHP (Inspek. Kab.92%,Inspek Prov. 98%, BPK 92%) Nilai IEPK: 2,838 (2024 : 2,658) Nilai KOD: 4,2
6	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		418.090.400	335.362.000	- 82.728.400	Persentase kesesuaian pengawasan dengan PKPT 75%
6	1	2	2		Penyelenggaraan Pengawasan Internal		333.060.400	257.357.000	- 75.703.400	Persentase pelaksanaan monev tindak lanjut hasil pengawasan 100% Persentase penyelesaian laporan hasil pengawasan tepat waktu 100%
6	1	2	2	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	77.775.000,00	57.620.000	- 20.155.000	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 42 Laporan
6	1	2	2	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	64.595.000,00	60.015.000	- 4.580.000	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 56 Laporan
6	1	2	2	3	Reviu Laporan Kinerja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.775.000,00	3.450.000	- 325.000	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja 3 Laporan
6	1	2	2	4	Reviu Laporan Keuangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10.560.000,00	6.495.000	- 4.065.000	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 1 Laporan

Rekening					Uraian	Sumber Dana	Tahun 2026	Hasil Analisis Kebutuhan	+/-	Indikator
6	1	2	2	5	Pengawasan Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	39.085.000,00	39.305.000	220.000	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa 27 Laporan
6	1	2	2	6	Kerja Sama Pengawasan Internal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	41.593.400,00	24.618.000	- 16.975.400	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk 3 Kesepakatan
6	1	2	2	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	95.677.000,00	65.854.000	- 29.823.000	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 52 Dokumen
6	1	2	2		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		85.030.000	78.005.000	- 7.025.000	Persentase pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu 100%
6	1	2	2	1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	18.960.000,00	18.960.000	-	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani 2 Laporan
6	1	2	2	2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	66.070.000,00	59.045.000	- 7.025.000	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 19 Laporan
6	1	3			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		345.407.500	163.393.000	- 182.014.500	Cakupan OPD yang mendapatkan layanan consulting 30 %
6	1	3	2		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		21.037.500	4.710.000	- 16.327.500	Persentase perumusan kebijakan teknis pengawasan yang disusun 100 %
6	1	3	2	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12.037.500,00	3.210.000	- 8.827.500	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun 3 Rekomendasi
6	1	3	2	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9.000.000,00	1.500.000	- 7.500.000	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun 39 Rekomendasi
6	1	3	2		Pendampingan dan Asistensi		324.370.000	158.683.000	- 165.687.000	Persentase OPD yang dilakukan pendampingan dan asistensi 100%

Rekening					Uraian	Sumber Dana	Tahun 2026	Hasil Analisis Kebutuhan	+/-	Indikator
6	1	3	2	1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	195.780.000,00	69.758.000	- 126.022.000	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 40 perangkat daerah
6	1	3	2	2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	81.810.000,00	49.730.000	- 32.080.000	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 64 perangkat daerah
6	1	3	2	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	25.000.000,00	23.730.000	- 1.270.000	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 4 kegiatan
6	1	3	2	4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	21.780.000,00	15.465.000	- 6.315.000	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 13 perangkat daerah
6	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		9.029.521.703	7.689.561.098	- 1.339.960.605	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah 100% Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah 100%
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	-	-	
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		-		-	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		-		-	
6	1	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		8.083.221.411	6.906.122.001	- 1.177.099.410	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah 100%
6	1	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.031.786.411,00	6.878.786.001	- 1.153.000.410	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 52 orang

Rekening					Uraian	Sumber Dana	Tahun 2026	Hasil Analisis Kebutuhan	+/-	Indikator
6	1	1	2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	51.435.000,00	27.336.000	- 24.099.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 30 dokumen
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		-		-	
6	1	1	2		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		219.603.000	160.300.000	- 59.303.000	
6	1	1	2	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	153.353.000,00	120.300.000	- 33.053.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 52 orang
6	1	1	2	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	60.000.000,00	40.000.000	- 20.000.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 100 orang
6	1	1	2	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.250.000,00	-	- 6.250.000	
6	1	1	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah		261.460.730,00	274.002.225	12.541.495	
6	1	1	2	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	261.460.730,00	274.002.225	12.541.495	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 17 paket
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	-	-	Persentase terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah 100%
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		-	-	-	

Rekening					Uraian	Sumber Dana	Tahun 2026	Hasil Analisis Kebutuhan	+/-	Indikator
					Pengadaan Mebel		-	-	-	
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		-	-	-	
6	1	1	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		207.956.962	195.529.872	- 12.427.090	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100%
6	1	1	2	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	112.800.000,00	112.800.000	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 laporan
6	1	1	2	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	95.156.962,00	82.729.872	- 12.427.090	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 laporan
6	1	1	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		257.279.600	153.607.000	- 103.672.600	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara 100%
6	1	1	2	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	44.950.000,00	44.950.000	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 unit
6	1	1	2	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	65.200.000,00	41.200.000	- 24.000.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 unit
6	1	1	2	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	36.000.000,00	-	- 36.000.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 unit
6	1	1	2	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	102.482.600,00	58.810.000	- 43.672.600	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 32 unit

Rekening					Uraian	Sumber Dana	Tahun 2026	Hasil Analisis Kebutuhan	+/-	Indikator
6	1	1	2	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.647.000,00	8.647.000	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 unit
Jumlah							**9.793.019.603**	**8.188.316.098**	**-1.604.703.505**	

Berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2026, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan yaitu:

1. Perlunya perumusan dan penyusunan kebijakan pengawasan yang memadai guna menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih serta meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik;
2. Perlunya optimalisasi sumber daya dalam rangka mendukung penyelenggaraan pengawasan intern yang efektif;
3. Perlunya optimalisasi dukungan anggaran dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pengawasan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan musrenbang kecamatan dan forum konsultasi publik telah disampaikan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui aplikasi SIPD. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2026 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	NIHIL				

2.6. Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan hasil reses anggota DPRD, melalui aplikasi SIPD telah disampaikan usulan program dan kegiatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2026 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Validasi
	NIHIL				

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Arah Kebijakan Nasional dan Daerah

Visi RPJMN 2025-2029 mengikuti Visi Presiden dan Wakil Presiden periode 2025-2029, yaitu: Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045". Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi yang kuat, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Visi tersebut dicapai melalui 8 Misi (Asta Cita), 17 Program Prioritas, dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat/PHTC (Quick Wins)

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Tujuan pembangunan Tujuan pembangunan Kabupaten Banjarnegara tahun 2025-2029 adalah mewujudkan Banjarnegara maju dan sejahtera dengan empat sasaran daerah yang akan diwujudkan, yaitu: 1) Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, 2) Meningkatnya perekonomian daerah yang berdaya saing dan berbasis potensi lokal secara berkelanjutan, 3) Meningkatnya infrastruktur yang mendukung perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, dan 4) Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025-2029, dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas dan fokus pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan.

Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut adalah sebagai berikut: "Mewujudkan Banjarnegara yang Maju dan Sejahtera"

Dalam menerjemahkan visi tersebut dilakukan melalui penjelasan tiap-tiap pokok visi yang ada di dalamnya, dimana terdapat 2 (dua) pokok visi yaitu "Maju" dan "Sejahtera". Dalam upaya mewujudkan visi "Mewujudkan Banjarnegara yang Maju dan Sejahtera" akan dilakukan melalui misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Infrastruktur dan Pelayanan Publik
2. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal
3. Meningkatkan Kualitas dan Akses Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan Sosial

4. Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan
5. Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Transparan

Tujuan yang akan diwujudkan selama periode 2025-2029 Sesui dengan Tugas Pokok dan Fungsinya Inspektorat Kabupaten Banjarnegara dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian visi nasional "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045" serta visi Banjarnegara maju dan sejahtera.

Peran APIP yang dikawal oleh BPKP yang merupakan auditor internal adalah mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan. Dalam melaksanakan tugas tersebut indikator capaian yang akan dicapai pada Renstra tahun 2026-2029 yaitu dengan mengawal program prioritas reformasi birokrasi dan tata kelola. Untuk itu peran Inspektorat Kabupaten Banjarnegara dalam rangka mencapai indikator tersebut adalah melakukan kegiatan asistensi dan pendampingan dalam rangka mendukung prioritas Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Banjarnegara mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Inspektorat Kabupaten Banjarnegara mempunyai kompetensi pengawasan atas semua obyek pemeriksaan yang ada di wilayah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, kecuali hal tertentu yang telah diatur oleh ketentuan lain yang mengaturnya.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam upaya mewujudkan visi "Mewujudkan Banjarnegara yang Maju dan Sejahtera", Inspektorat Kabupaten Banjarnegara, akan dilakukan melalui misi ke 5 pemerintah daerah "Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Transparan"dan sasaran RPJMD ke 4 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut:

"Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif."

Maka rumusan tujuan yang akan dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

“Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif melalui peran pengawasan yang efektif.”

Sasaran jangka menengah pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan visi “Mewujudkan Banjarnegara yang Maju dan Sejahtera”, yang selaras dengan dengan tugas pokok dan fungsi adalah “Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Akuntabel, Dan Partisipatif”, maka sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029 adalah :

”**Meningkatnya kualitas pelayanan dan pengendalian internal melalui kapabilitas pengawas intern**”

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 diperlukan rumusan program dan kegiatan. Rumusan program dan kegiatan dengan strategi dan arah kebijakan Inspektorat Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

I **Program Penyelenggaraan Pengawasan**

1 Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
   1) Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
   2) Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
   3) Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja
   4) Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan
   5) Sub Kegiatan Pengawasan Desa
   6) Sub Kegiatan Kerja Sama Pengawasan Internal
2 Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
   1) Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
3 Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
   1) Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
   2) Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

II **Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi**

1 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
   1) Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
   2) Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
2 Kegiatan Pendampingan dan Asistensi
   1) Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

2) Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
3) Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
4) Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

III **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten**

1 Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah
   1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan perengakat Daerah
   2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SPKD
2 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   1) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
   2) Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
   3) Sub Kegiatan Bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan
3 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD
   3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SPKD
4 Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
   1) Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
   2) Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   1) Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor
6 Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah
   1) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
   2) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
   3) Sub Kegiatan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   3) Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
   4) Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
   5) Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Rumusan Rencana Program dan kegiatan Renja Inspektorat Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 yang disertai dengan indikator kegiatan serta sumber pendanaan adalah sebagaimana tabel 3.1.

Tabel 3.1.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Inspektorat			9.793.019.603,00							10.352.488.000,00	
	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			9.793.019.603,00							10.352.488.000,00	
	6	01				INSPEKTORAT DAERAH			9.793.019.603,00							10.352.488.000,00	
1	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Nilai SAKIP	100 % 77 Nilai	9.029.521.703,00						-	9.137.119.000,00	
	6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	8.083.221.411,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah	-	8.164.041.000,00	
	6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/bulan	8.031.786.411,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah		8.112.092.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30 Dokumen	51.435.000,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah		51.949.000,00	INSPEKTORAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
	6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	219.603.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Tersedianya dukungan administrasi kepegawaian aparatur pengawasan	-	221.798.000,00	
	6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	153.353.000,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Tersedianya dukungan administrasi kepegawaian aparatur pengawasan		154.886.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	60.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Tersedianya dukungan administrasi kepegawaian aparatur pengawasan		60.600.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	6.250.000,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Tersedianya dukungan administrasi kepegawaian aparatur pengawasan		6.312.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	100 %	261.460.730,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	-	264.075.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
													transparan, akuntabel, dan partisipatif				
	6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	261.460.730,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah		264.075.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	207.956.962,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	218.108.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
	6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	112.800.000,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah		113.928.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	95.156.962,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah		104.180.000,00	INSPEKTORAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
	6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara	100 %	257.279.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	-	269.097.000,00	
	6	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	44.950.000,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		45.399.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	65.200.000,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		65.852.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	36.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		36.360.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	102.482.600,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		112.753.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.09	001 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	8.647.000,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		8.733.000,00	INSPEKTORAT
2	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase kesesuaian pengawasan dengan PKPT	75 %	418.090.400,00						-	713.854.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
	6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase pelaksanaan monev tindak lanjut hasil pengawasan Persentase penyelesaian laporan hasil pengawasan tepat waktu	100 % 100 %	333.060.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Terselenggarannya pengawasan yang memberikan nilai tambah pada perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan penguatan pengendalian dalam penyelenggaraan pemerintahan	-	575.081.000,00	
	6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah											
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	28 Laporan	77.775.000,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Terselenggarannya pengawasan yang memberikan nilai tambah pada perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan penguatan pengendalian dalam penyelenggaraan pemerintahan		127.320.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	50 Laporan	64.595.000,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Terselenggarannya pengawasan yang memberikan nilai tambah pada perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan penguatan pengendalian dalam penyelenggaraan pemerintahan		125.260.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja											
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2 Laporan	3.775.000,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Terselenggarannya pengawasan yang memberikan nilai tambah pada perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan penguatan pengendalian dalam penyelenggaraan pemerintahan		3.817.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	10.560.000,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Terselenggarannya pengawasan yang memberikan nilai tambah pada perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan penguatan pengendalian dalam penyelenggaraan pemerintahan		10.665.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa											
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	35 Laporan	39.085.000,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Terselenggarannya pengawasan yang memberikan nilai tambah pada perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan penguatan pengendalian dalam penyelenggaraan pemerintahan		95.657.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
							Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	41.593.400,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Terselenggaranya pengawasan yang memberikan nilai tambah pada perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan penguatan pengendalian dalam penyelenggaraan pemerintahan		42.009.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP											
							Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	40 Dokumen	95.677.000,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Terselenggaranya pengawasan yang memberikan nilai tambah pada perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan penguatan pengendalian dalam penyelenggaraan pemerintahan		170.353.000,00	INSPEKTORAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
	6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu	100 %	85.030.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Terselenggaranya pengawasan yang memberikan nilai tambah pada perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan penguatan pengendalian dalam penyelenggaraan pemerintahan	-	138.773.000,00	
	6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah											
							Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	6 Laporan	18.960.000,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Terselenggaranya pengawasan yang memberikan nilai tambah pada perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan penguatan pengendalian dalam penyelenggaraan pemerintahan		19.149.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	16 Laporan	66.070.000,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Terselenggarannya pengawasan yang memberikan nilai tambah pada perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan penguatan pengendalian dalam penyelenggaraan pemerintahan		119.624.000,00	INSPEKTORAT
3	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Cakupan OPD yang mendapatkan layanan consulting	30 %	345.407.500,00						-	501.515.000,00	
	6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase perumusan kebijakan teknis pengawasan yang disusun	100 %	21.037.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Tersusunnya kebijakan teknis dan PPBR	-	21.247.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
	6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan											
							Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	3 Rekomendasi	12.037.500,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Tersusunnya kebijakan teknis dan PPBR		12.157.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	03	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan											
							Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	60 Rekomendasi	9.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Tersusunnya kebijakan teknis dan PPBR		9.090.000,00	INSPEKTORAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
	6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Persentase OPD yang dilakukan pendampingan dan asistensi	100 %	324.370.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Terselenggarannya kegiatan pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah, RB dan penegakan integritas	-	480.268.000,00	
	6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah											
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	44 perangkat daerah	195.780.000,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Terselenggarannya kegiatan pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah, RB dan penegakan integritas		197.737.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	44 perangkat daerah	81.810.000,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Terselenggarannya kegiatan pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah, RB dan penegakan integritas		82.628.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi											
							Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	3 Kegiatan	25.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Terselenggarannya kegiatan pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah, RB dan penegakan integritas		177.906.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	44 perangkat daerah	21.780.000,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Terselenggarannya kegiatan pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah, RB dan penegakan integritas		21.997.000,00	INSPEKTORAT
						JUMLAH			**9.793.019.603,00**							**10.352.488.000,00**	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program pada perangkat daerah merupakan program prioritas dalam Renstra 2025-2029. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam Renstra selanjutnya dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan :
   1.1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal.
   Sub Kegiatan :
   a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;
   b. Pengawasan keuangan Pemerintah Daerah;
   c. Reviu Laporan Kinerja;
   d. Reviu Laporan Keuangan;
   e. Pengawasan Desa;
   f. Kerjasama Pengawasan internal;
   g. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI, dan tindak lanjut pemeriksaan APIP;

   1.2 Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.
   Sub Kegiatan :
   a. Penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah;
   b. Pengawasan dengan tujuan tertentu;

2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi :
   2.1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan.
   Sub Kegiatan :
   a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan;
   b. Perumusan kebijakan teknis di Bidang fasilitasi

pengawasan;

2.2. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi.

Sub Kegiatan :

a. Pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah;
b. Pendampingan asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi;
c. Pendampingan, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi;
d. Pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas;

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:

3.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan :

a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah;
b. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;

3.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN;
b. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi Keuangan SKPD;
c. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD;

3.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan :

a. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi;
b. Sosialisasi peraturan perundang-undangan;

c. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan;

3.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan komponen instalansi listrik/Penerangan bangunan kantor;
b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
c. Penyediaan bahan logistik kantor;
d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
e. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD;

3.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Sub Kegiatan :

a. Pengadaan mebel;
b. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya;
c. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya;

3.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
b. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;
c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor;

3.7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan;
b. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan

pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan;

c. Pemeliharaan mebel;
d. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya;
e. Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya;
f. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya.

Tabel 4.1.

Rencana Kerja dan Pendanaan Inspektorat Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Tahun 2026	Indikator dan Target 2026
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			8.188.316.098	
6	1				INSPEKTORAT DAERAH			8.188.316.098	Nilai maturitas SPIP : 3,09 Level kapabilitas APIP : level 3 % penyelesaian TLHP (Inspek. Kab.92%,Inspek Prov. 98%, BPK 92%) Nilai IEPK: 2,838 (2024 : 2,658) Nilai KOD: 4,2
6	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			335.362.000	Persentase kesesuaian pengawasan dengan PKPT 75%
6	1	2	2		Penyelenggaraan Pengawasan Internal			257.357.000	Persentase pelaksanaan monev tindak lanjut hasil pengawasan 100% Persentase penyelesaian laporan hasil pengawasan tepat waktu 100%
6	1	2	2	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.620.000	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 42 Laporan

6	1	2	2	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.015.000	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 56 Laporan
6	1	2	2	3	Reviu Laporan Kinerja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.450.000	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja 3 Laporan
6	1	2	2	4	Reviu Laporan Keuangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.495.000	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 1 Laporan
6	1	2	2	5	Pengawasan Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.305.000	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa 27 Laporan
6	1	2	2	6	Kerja Sama Pengawasan Internal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.618.000	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk 3 Kesepakatan
6	1	2	2	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.854.000	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 52 Dokumen
6	1	2	2		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			78.005.000	Persentase pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu 100%

6	1	2	2	1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.960.000	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani 2 Laporan
6	1	2	2	2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.045.000	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 19 Laporan
6	1	3			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			163.393.000	Cakupan OPD yang mendapatkan layanan consulting 30 %
6	1	3	2		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			4.710.000	Persentase perumusan kebijakan teknis pengawasan yang disusun 100 %
6	1	3	2	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.210.000	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun 3 Rekomendasi
6	1	3	2	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun 39 Rekomendasi
6	1	3	2		Pendampingan dan Asistensi			158.683.000	Persentase OPD yang dilakukan pendampingan dan asistensi 100%

6	1	3	2	1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69.758.000	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 40 perangkat daerah
6	1	3	2	2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.730.000	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 64 perangkat daerah
6	1	3	2	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.730.000	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 4 kegiatan
6	1	3	2	4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.465.000	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 13 perangkat daerah
6	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			7.689.561.098	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah 100% Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah 100%
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-	
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				

					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
6	1	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6.906.122.001	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah 100%
6	1	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.878.786.001	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 52 orang
6	1	1	2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.336.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 30 dokumen
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				
6	1	1	2		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			160.300.000	
6	1	1	2	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.300.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 52 orang
6	1	1	2	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 100 orang

6	1	1	2	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	
6	1	1	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah			274.002.225	
6	1	1	2	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	274.002.225	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 17 paket
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	Persentase terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah 100%
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			-	
					Pengadaan Mebel			-	
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			-	
6	1	1	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			195.529.872	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100%

6	1	1	2	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	112.800.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 laporan
6	1	1	2	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.729.872	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 laporan
6	1	1	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			153.607.000	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara 100%
6	1	1	2	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.950.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 unit
6	1	1	2	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.200.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 unit
6	1	1	2	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 unit
6	1	1	2	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.810.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 32 unit

6	1	1	2	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.647.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 unit
							Jumlah	**8.188.316.098**	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Renja Perangkat Daerah selanjutnya menjadi platform operasional bagi Perangkat Daerah dalam menjalankan programnya dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah tahun 2025-2029. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja Inspektorat Kabupaten Banjarnegara digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Inspektorat Kabupaten Banjarnegara setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026 dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disepakati.
2. Kerangka pendanaan dalam Renja Inspektorat Kabupaten Banjarnegara masih bersifat sementara, sehingga masih dimungkinkan terjadi perubahan pagu yang disebabkan oleh pengurangan, penambahan, dan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan maupun antar sub kegiatan dalam kerangka penyusunan anggaran secara terpadu dan berbasis kinerja.

3. Renja Inspektorat Kabupaten Banjarnegara menjadi acuan bagi Inspektur Kabupaten Banjarnegara dan segenap jajarannya serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, serta menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal : Oktober 2025

INSPEKTUR
KABUPATEN BANJARNEGARA

Drs. AGUNG YUSIANTO, M.Si.CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19720811 199203 1 002

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan yang diatur melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan pembentukan tim penyusun, penelaahan rancangan awal RKPD, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, hingga pada penyempurnaan berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang RKPD. Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, penyusunan Renja Perangkat Daerah juga mengacu pada Renja Kementerian/Lembaga terkait, serta Renja Perangkat Daerah Provinsi terkait. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan

Anggaran Pendapata dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

1.2 Landasan Hukum

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 238, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6841)
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
26. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
27. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 14);
28. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 15);

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun dengan maksud untuk:

a. Menjabarkan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 ke dalam rencana program kegiatan prioritas Tahun 2026 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Renja K/L Tahun 2026 dan Renja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;
b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerapan anggaran berbasis kinerja.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

a. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA-DPA dalam Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2026, yang dalam penyusunannya didahului dengan menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026;
b. Sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Tahun 2026;
c. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun berdasarkan sistematika yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah.

BAB 2 : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dan atau pokok-pokok DPRD.

BAB 3 : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan tahun 2025.

BAB 4 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran RKPD.

BAB 5 : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah meliputi urusan Wajib Bukan Layanan Dasar

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 terdiri dari 5 program, 14 kegiatan, dan 25 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 8.023.000.000-, dengan fokus utama pada Pelayanan Administrasi Kependudukan yang masuk dalam 3 indikator utama yaitu indikator penerbitan KTP berbasis NIK atau e-KTP, indikator cakupan bayi berakte usia 0-18 tahun dan indikator penerbitan Kartu Identitas Anak. Program/kegiatan/sub kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah yang meliputi:

1. Penggunaan KIA yang masih belum bisa di rasakan manfaatnya oleh penduduk
2. Belum optimalnya proses transfer informasi kepada penduduk tentang arti pentingnya dokumen kependudukan dan akta pencatatan sipil
3. Masih banyak penduduk yang belum mengetahui bahwa pelayanan Administrasi Kependudukan di Banjarnegara sudah sangat mudah, murah dan cepat
4. Kapasitas SDM Petugas Dinas, Kecamatan dan Petugas Desa yang kita miliki masih belum seragam dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
5. Sarana dan prasarana yang serta SDM yang masih terbatas.
6. Belum maksimalnya Pemanfaatan Database Kependudukan

Dari 5 program, 14 kegiatan, dan 25 sub kegiatan yang dalam Renja Perangkat Daerah tersebut, program/kegiatan/sub kegiatan yang disetujui untuk dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024 terdiri dari 5 program, 12 kegiatan, dan 19 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 7.223.134.649,-

Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024, terjadi perubahan pada penambahan pagu dengan total anggaran sebesar Rp 7.490.224.301,- Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2024, program/kegiatan yang bertambah sebesar Rp. 267.089.652,-.

Dinamika yang terjadi selama tahun 2024 turut mempengaruhi keberhasilan pencapaian Renja Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2024, tercatat adanya hasil yang baik yang dikarenakan adanya pencapaian maupun pelampauan target maupun yang tidak memenuhi target.

Secara keseluruhan Realisasi Propgram dan Kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan. Adapun kendala yang dihadapi dalam pencapaian realisasi kinerja diantaranya sebagai berikut:

1. Belum optimalnya Pemanfaatan database Kependudukan oleh sebagian lembaga pengguna. Pemanfaatan database masih belum optimal karena lembaga pengguna apabila akan memanfaatkan data kependudukan harus melalui mekanisme pengajuan pemanfaatan data sampai ke Dirjen Dukcapil Kemendagri dan boleh atau tidaknya pengajuan pemanfaatan data tersebut merupakan keputusan Dirjen Dukcapil Kemendagri.
2. Belum optimalnya pemanfaatan data profil kependudukan oleh OPD pengambil kebijakan sebagai dasar perencanaan dan penganggaran. Data profil kependudukan masih belum optimal pemanfaatannya karena Data Kependudukan Bersih (DKB) menggunakan data dari data statistik semester 2 yang terbit di bulan februari, kemudian dibutuhkan waktu 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan untuk mengolah dan menerbitkan Buku Profil Kependudukan yang dijadikan sebagai dasar perencanaan dan penganggaran.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITA DENGAN PELAYANAN DASAR									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana			100%	100%	100%			

	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100%	100%	100%			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			7 Dokumen	7 Dokumen	100%			
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah DOkumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			17 Laporan	17 Laporan	100%			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah			7 Dokumen	7 Dokumen	100%			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			26 Orang	26 Orang	100%			

	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			7 Dokumen	7 Dokumen	100%			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket dokumen logistik, perlengkapan dan peralatan kantor perangkat daerah			100%	100%	100%			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			10 Paket	10 Paket	100%			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			8 Paket	8 Paket	100%			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1 Laporan	1 Laporan	100%			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit barang milik daerah yang di sediakan			24 Unit	24 Unit	100%			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			24 Unit	24 Unit	100%			

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			24 Laporan	24 Laporan	100%			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	100%			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	100%			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah			93 Unit	93 Unit	100%			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			16 Unit	16 Unit	100%			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	1 Unit	100%			

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			76 Unit	76 Unit	100%			
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Kepemilikan KTP berbasis NIK (KTP-el)			99,3%	99,98%	100,69 %			
		Cakupan KIA			42%	75,42%	179,14 %			
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen/laporan pelayanan pendaftaran penduduk			2 Laporan	2 Laporan	100%			
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk								
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk			2 Laporan	2 Laporan	100%			
	Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen kependudukan selain blanko KTP-el, formulir, dan Buku terkait pendaftaran			1 Dokumen	1 Dokumen	100%			

		penduduk								
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yangTersedia			1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan komunikasi, informasi dan edukasi terkait pendaftaran penduduk								
	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk								
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan kepemilikan Akta kelahiran 0-18 Tahun			97%	99,6%	102,69 %			
		Akta Perkawinan			100%	100%	100%			
		Akta Perceraian			100%	100%	100%			
		Akta Kematian			100%	100%	100%			

	Pelayanan Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil			2 Dokumen	2 Dokoumen	100%			
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting								
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan			6 Layanan	6 Layanan	100%			
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia								
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencatatan sipil								
	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang Telah Dilakukan								
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian	Jumlah Dokumen pemanfaatan dan pengumpulan database								

	Database Kependudukan	kependudukan								
	Pengolahan dan Penyajian data kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan								
	Kerjasama Pemanfaatan data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan								
	PROGRAM PENGELOLAAN INDORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase lembaga yang memanfaatkan informasi kependudukan			100%	100%	100%			
	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan informasi administrasi kependudukan								
	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan								

	Informasi Administrasi Kependudukan	Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun								
	Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan	Jumlah Dokumen pemanfaatan dan pengumpulan database kependudukan			3 Dokumen	3 Dokumen	100%			
	Kerjasama pemanfaatan data kependudukan	Jumlah dokumen kerjasana pemanfaatan data kependudukan			1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan fasilitasi komunikasi, informasi dan edukasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan			6 Laporan	6 Laporan	100%			
	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			4 Laporan	4 Laporan	100%			
	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan								
	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan								

	Masyarakat	Masyarakat								
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan								
	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan								
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase data kependdukan yang ditampilkan dalam profil kependudukan			100%	100%	100%			
	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah dokumen profil data kependudukan			1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain			1 Dokumen	1 Dokumen	100%			

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan pelayanannya, Perangkat Daerah mengampu 4 Indikator Kinerja Kunci Hasil. Dari 4 indikator tersebut, 3 berstatus tercapai dan 1 indikator berstatus tidak tercapai. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian/ketidaktercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Ketercapaian Realisasi kepemilikan KTP-el berbasis NIK yaitu sebesar 99,98% di dorong oleh adanya inovasi Pelayanan Adminduk Minggu Pagi (PELANGI PAGI). Inovasi ini merupakan inovasi pelayanan yang di laksanakan setiap hari minggu pagi tepatnya pada car free day yang bertempat di halaman kantor Setda Kabupaten Banjarnegara. Kegiatan ini melayani semua pelayanan administrasi kependudukan kecuali cetak KTP dan Cetak KIA

   Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan Cakupan kepemilikan KTP berbasis NIK (KTP-El) sebagai berikut :

   1) Melaksanakan pelayanan di Car Free Day (Inovasi Pelangi Pagi)
   2) Melaksanakan pelayanan di Mall Pelayanan Publik
   3) Melaksanakan pelayanan jemput bola untuk perekaman KTP- el ke desa-desa dan sekolah sekolah se Kabupaten Banjarnegara dengan program inovasi yaitu JEMPOL PAKMUL.
   4) Melakukan jemput bola lansia, disabilitas dan penduduk rentan admnistrasi kependudukan dengan prpgram inovasi Pelayanan Dokumen Kependudukan Langsung Dirumah bagi Disabilitas dan Lanjut Usia (PEDULI DILAN).

5) Melakukan koordinasi dengan Camat dalam memberikan himbauan dan sosialisasi kepada warganya yang belum rekam KTP-el dan memenuhi dokumenkependudukan.
6) Melakukan upaya perluasan jangkauan perekaman dengan menginformasikan kepada desa, sekolah, pondok pesantren dll bahwa dinas dukcapil menerima permintaan perekaman apabila terdapat banyak penduduk yang belum rekam akan di datangi.

Untuk melaksanakan kegiatan pencetakan KTP-el melibatkan petugas /tenaga harian lepas serta petugas pelayanan pendaftaran cetak KTP-el (*front office*) karena pencetakan untuk KTP-el hanya dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sedangkan proses pendaftaran pencetakan KTP bisa dilayani dari desa/kelurahan maupun Kecamatan, dengan Alokasi anggaran dari APBD pada tahun 2024 sebesar Rp. 1.106.082.800,- terealisasi Rp. 1.057.864.800,- (95,64%).

Program/kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dapat mengukur kinerja,dan berhasil memenuhi target kinerja. Secara umum program , kegiatan dan Sub kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada program Pendaftaran Penduduk.

2. Ketercapaian Realisasi kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun 2024 mencapai 99,61% di dorong oleh adanya inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dari Desa dan Kelurahan Secara Daring (PANDUSALURING) sehingga memberikan kemudahan bagi penduduk dalam mengurus akte kelahiran. Pemohon tidak perlu lagi datang ke Dindukcapil tapi cukup datang ke kantor Desa atau Kelurahan setempat untuk mendaftarkan dan mendapatkan akta kelahiran.

Adapun Upaya yang dilakukan Upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk meningkatkan cakupan penerbitan Akte Kelahiran 0-18 Tahun adalah sebagai berikut:

1) Adanya program pendampingan kepada Petugas Pelayanan Desa maupun Petugas Pelayanan Kelurahan untuk menyelaraskan pemahaman akan regulasi dan system yang terus mengalami perubahan.
2) Melakukan sosialisasi kepada penduduk baik melalui media cetak spanduk yang dipasang di desa dan kelurahan maupun media social Instagram.
3) Secara berkelanjutan merevie kebijakan-kebijakan yang akan mengarah kepada semakin memudahkan pelayanan administrasi kependudukan

Langkah-langkah yang mendorong dalam mencapai target tahun 2024 diantaranya dengan melakukan Kerjasama adanya inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dari Desa dan Kelurahan Secara Daring (PANDUSALURING) sehingga memberikan kemudahan bagi penduduk dalam mengurus akte kelahiran. Pemohon tidak perlu lagi datang ke Dindukcapil tapi cukup datang ke kantor Desa atau Kelurahan setempat untuk mendaftarkan dan mendapatkan akta kelahiran

Meskipun demikian, terdapat hambatan dalam pencapaian kinerja indikator ini dikarenakan antara lain ;

1) Terkendala gangguan pada jaringan dan system PANDUSALIRING.

2) Adanya *pending* dokumen kepengurusan akta karena persyaratan pemohon tidak lengkap dan atau data meragukan sehingga tidak dapat diproses lebih lanjut.

3) Anggapan bahwa akta kelahiran bisa dibuat kapan saja. Sebagian Masyaraka masih menunda pengurusan akta kelahiran karena merasa tidak mendesak

4) Kurangnya informasi kepada penduduk tentang persyaratan pembuatan akta kelahiran yang masih dianggap sulit, padahal pada kenyataannya sudah sangat mudah, murah dan cepat.

3. Target penerbitan KIA usia 0-17 tahun kurang satu hari

Pada Tahun 2024 Cakupan Kepemilikan KIA telah mencapai target yaitu sebesar 75,24 % dari target sebesar 42%. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan capaian kepemilikan KIA yaitu dengan melakukan sosialisasi dan edukasi secara intensif menggunakan media social serta membuka loket pendaftaran KIA pada 278 desa/kelurahan se Kabupaten Banjarnegara.

Meskipun demikian, Cakupan kepemilikan KIA masih terdapat kendala yaitu manfaat adanya Kartu Identitas Anak (KIA) selain untuk identitas resmi belum dirasakan secara nyata oleh penduduk sehingga masih banyak penduduk yang belum mau mengurus dokumen KIA secara mandiri.

Dalam rangka untuk tetap mempertahankan serta meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta upaya mengatasi faktor-faktor penghambat, perlu tetap dilakukan beberapa hal yang meliputi:

1) Sosialisasi/pertemuan dengan Kecamatan, petugas pelayanan kecamatan dan petugas pelayanan desa.
2) Sosialisasi kepada penduduk secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran mereka akan arti pentingnya dokumen kependudukan. Banyak penduduk dalam

pengurusan dokumen Kependudukan saat ini masih belum serta merta mengikuti peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang terjadi. Masih ada dari penduduk yang mengurus dokumen hanya pada saat mereka membutuhkannya saja.

3) Meningkatkan nilai lebih dari Kartu Identitas Anak (KIA) agar penduduk atau anak pemilik KIA bisa semakin merasakan kemanfaatan dari Kartu Identitas Anak (KIA) tersebut.
4) Meningkatkan peran serta pejabat Kecamatan khususnya Camat dalam memberikan himbaun dan sosialisasi kepada warga yang belum memiliki dokumen kependudukan dan akta-akta pencatatan sipil dengan mengadakan rakor kependudukan tingkat kabupaten.
5) Mendorong program layanan pendaftaran Dokumen Kependudukan dari desa/kelurahan dan kecamatan dengan jargon pengurusan dokumen kependudukan dan akta akta pencatatan sipil " CEPAT, MUDAH DAN GRATIS".
6) Memaksimalkan inovasi "PANDUSALURING" dengan memaksimalkan pelayanan di desa/kelurahan dan kecamatan dengan terus mengembangakan aplikasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pelayanan dokumen kependudukan yang cepat, mudah dan gratis.
7) Meningkatkan kapasitas sumberdaya petugas Kabupaten, kecamatan dan petugas desa dalam melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat.
8) Pendampingan petugas di kecamatan dan desa terus dilakukan dengan harapan petugas desa dan kecamatan

tersebut semakin hari semakin menguasai permasalah terkait administrasi kependudukan

9) Memperbanyak Kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah dan Instansi Lainnya

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK LPPD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indek Kepuasan Masyarakat Dindukcapil	-	-	83,56	84	85	86	83,17	90,72	85		
2	Nilai SAKIP OPD			B (66,5)	B (68)	B (69,5)	BB (71)	BB (71,35)	BB (72,00)	BB (72)		
3	Persentase Penyelesaian Administrasi Kependudukan (Adminduk)			89,55 %	89,72 %	89,88 %	90,50 %	92,62 %	95,81 %	95,05%		
	-Cakupan Penerbitan KTP			99,3 %	99,3 %	99,3 %	99,3%	98,34 %	99,98 %	99,4 %		

	berbasis NIK (E-KTP)											
	-Cakupan Kepemilikan akta kelahiran 0-18 tahun			97%	97%	97%	97%	98,68 %	99,61 %	97%		
	-Cakupan penerbitan kartu identitas anak (KIA)			41%	42%	43%	44%	58,73 %	75,24 %	62%		
	- Akta Perkawinan			100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100 %		
	- Akta Perceraian			100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100 %		
	- Akta Kematian			100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100 %		

4	Persentase lembaga yang memanfaatkan informasi kependudukan			100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100 %		
5	Persentase data kependudukan yang bisa di akses masyarakat			100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100 %		

*) Kolom 3 diisi berdasarkan IKK outcome dalam lampiran Permendagri 18/2020

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan satu urusan pemerintahan, yaitu Urusan Administrasi Kependudukan Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan, hasil evaluasi, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk tahun 2026 yang mencakup satu urusan tersebut. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah diantaranya adalah:

1. Penggunaan Penggunaan KIA yang masih belum bisa di rasakan manfaatnya oleh penduduk
2. Belum optimalnya proses transfer informasi kepada penduduk tentang arti pentingnya dokumen kependudukan dan akta pencatatan sipil
3. Masih banyak penduduk yang belum mengetahui bahwa pelayanan Administrasi Kependudukan di Banjarnegara sudah sangat mudah, murah dan cepat
4. Kapasitas SDM Petugas Dinas, Kecamatan dan Petugas Desa yang kita miliki
5. Masih belum seragam dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
6. Sarana dan prasarana yang serta SDM yang masih terbatas.
7. Belum maksimalnya Pemanfaatan Database Kependudukan.

Permasalahan tersebut, jika tidak diselesaikan dapat menjadi penghambat dalam pencapaian visi dan misi Bupati maupun capaian indikator lainnya. Beberapa dampak dari adanya permasalahan dan hambatan tersebut meliputi:

1. Rendahnya pengurusan dokumen kependudukan dan Akta pencatatan Sipil
2. Pelaksanan pelayanan Administrasi kependudukan di tingkat Kecamatan dan Pelayanan di tingkat Desa masih berbeda beda
3. Penduduk masih enggan untuk memproses dokumennya pada saat belum membutuhkan, azaz peran aktif dari penduduk tidak bisa berfungsi maksimal
4. Dengan sarpras yang kurang memadai pelayanan terhambat dan jaringan sering mengalami *down,* berakibat sering terhentinya pelayanan di kecamatan dan desa/kelurahan.
5. Kondisi gedung yang mengalami kerusakan di banyak tempat menjadikan tidak nyaman. Ketidaknyamanan ini secara tidak langsung berakibat pada kinerja pegawainya menjadi terganggu.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi, peningkatan kualitas birokrasi dan meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan pengguna layanan akan meningkatkan kebutuhan akan adanya penyediaan produk layanan yang semakin baik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi-inovasi dalam menunjang peningkatan pelayanan publik secara kontinyu. Beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, yaitu:

1. Meningkatkan pemahaman penduduk akan arti pentingnya dokumen kependudukan dan akta-akta pencatatan sipil.
2. Meningkatkan cakupan kepemilikan KIA dan mempertahanan cakupan KTP elektronik serta cakupan akta kelahiran usia dibawah 0-18 tahun.
3. Meningkatkan kapasitas SDM adminduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Petugas pelayanan Kecamatan dan petugas pelayanan adminduk diDesa.

4. Peningkatan atau pembaruan sarpras penunjang pelayanan SIAK terpusat. Hal ini menjadi penting dikarenakan semua pelayanan administrasi kependudukan menggunakan SIAK terpusat.
5. Menyederhanakan proses layanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pada tingkat Dinas, kecamatan dan tingkat Desa, agar pengurusan dokumen lebih cepat, mudah dan gratis serta bisa di pertanggungjawabkan produk-produknya.
6. Perlu adanya inovasi-inovasi dalam pelayanan administrasi kependudukan

Berdasarkan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan tersebut, dapat diinventarisasi beberapa isu strategis. Inventarisasi isu-isu strategis tahun 2026 didapatkan dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal Kabupaten Banjarnegara sampai dengan tahun 2025. Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan pembangunan. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2026, sebagai berikut:

1. Rendahnya cakupan bayi berakte kelahiran
2. Belum maksimalnya cakupan kepemilikan KTP bagi wajib KTP
3. Masih rendahnya cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)
4. Belum optimalnya system informasi administrasi kependudukan
5. Belum optimalnya pemanfaatan database kependudukan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Tahun 2005-2025 dan RPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026. Berdasarkan hal tersebut, prioritas arah kebijakan sesuai tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2025.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan pubik dan pembangunan sektor lain. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, Pencatatan atas pelaporan peristiwa Kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen kependudukan berupa kartu Identitas atau surat keterangan kependudkan. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga. Kartu Tanda Penduduk dan/ atau surat keterangan kependudukan lainya meliputi pindah datang,perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap sedangkan Pencatatan Sipil adalah Pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana meliputi

kelahiran,kematian,lahir mati,perkawinan,perceraian,pengakuan anak,pengesahan anak, pengangkatan anak,perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Administrasi Kependudukan sebagai suatu system yang dibangun untuk mempermudah proses pelayanan Administrasi Kependudukan. Bagi Penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan Dokumen Kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pelayanan tentang Administrasi Kependudukan terdiri dari pendaftaran dan pencatatan. Pendaftaran penduduk merupakan serangkaian kerja atas administrasi kependudukan oleh pemerintah yang terdiri dari : pemberian Nomor Induk Kependudukan, Pengkoordinasian Pendaftaran dan penerbitan KTP, Pencatatan mutasi penduduk, Pengelolaan data penduduk, sedangkan Pencatatan merupakan bagian dari usaha Pemerintah dalam rangka menyelenggarakan administrasi kependudukan berupa pelayanan pemerintah yang menyangkut kedudukan hukum seseorang dimana pada suatu saat tertentu dapat digunakan sebagai bukti autentik bagi yang bersangkutan maupun pihak ke tiga. Pencatatan di bidang kependudukan tersebut meliputi peristiwa pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengesahan anak, pengakuan anak, pengangkatan anak yang merupakan bagian *public regulations.*

Penerapan KTP-el yang saat ini dilaksanakan merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat serta mendukung akurasi terbangunnya database Kependudukan di Kabupaten/Kota, Provinsi maupun database Kependudukan secara Nasional. Dengan penerapan KTP-el maka setiap Penduduk tidak dimungkinkan lagi dapat memiliki KTP-el lebih dari satu dan/atau dipalsukan KTP-elnya, mengingat dalam KTP-el tersebut telah memuat kode keamanan dan rekaman elektronik data penduduk yang antara lain berupa iris mata maupun sidik jari Penduduk.

Mengacu pada pentingnya pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Peraturan Bupati Banjarnegara 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 215) diharapkan dapat mendukung Visi Kabupaten Banjarnegara guna peningkatan pengabdian dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok fungsi Dinas dalam rangka mewujudkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Kabupaten Banjarnegara melalui pelayanan yang memuaskan dan menguntungkan masyarakat Banjarnegara, yang diwujudkan dengan perencanaan yang matang agar pembangunan daerah untuk lima tahun kedepan dapat berhasil guna sesuai cita-cita bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1. Tugas Pokok Dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara berdasar pada Peraturan Bupati Kabupaten Banjarnegara Nomor: 36 tahun 2022 sebagai berikut:

a. TUGAS POKOK

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan daerah dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah.

b. FUNGSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1. Perumusan kebijakan Teknis dan perencanaan program bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Pengkoordinasian dan fasilitasi bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. Pengarahan dan pemberian petunjuk teknis bidang Kependudukan dan Pencatatan sipil;
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
5. Pelaksanan tugas dibidang Kependudukan dan Pencatatan sipil ,meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil Pengelolaan informasi adminstrasi kependudukan,perkembangan kependudukan dan perencanaan kependudukan;
6. Pengelolaan kesekretariatan Dinas
7. Penginventarisasian permasalahan dan pelaporan pelaksanaan tugas Daerah;
8. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Selain tugas pokok tersebut diatas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga melaksanakan tugas-tugas lain yang merupakan pokok kebijakan baik dari Pemerintah Pusat melalui Kemendagri khususnya yang ditangani oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 Kabupaten Banjarnegara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Persentase Tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100%	**6.487.603.842**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN**		Persentase Tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100%	**6.108.62.252**	
			Persentase Tingkat pelayanan umum, kepegawaianm dan keuangan perangkat daerah	100%				Persentase Tingkat pelayanan umum, kepegawaianm dan keuangan perangkat daerah	100%		

	Perencanaan, Penganggara, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				**15.000.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**15.000.000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	7 Dokumen	5.442.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	7 Dokumen	5.442.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun	17 Laporan	9.558.000			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun	17 Laporan	9.558.000	

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**4.409.885.822**					**4.409.885.822**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayarka	26 Orang/bulan	4.370.483.322			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayarkan	26 Orang/bulan	4.370.483.322	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7 Dokumen	39.402.500			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7 Dokumen	39.402.500	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				**651.762.700**					**418.608.500**	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	10 Paket	19.908.600			Paket Peralatan dan Perlengkapa	10 Paket	19.908.600	

			Disediakan					n Kantor yang Disediakan			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	506.433.900			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	348.279.700	
	Penyelengraraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	125.420.200			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	50.420.200	
	Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah				**179.554.000**					**179.554.000**	
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	10 Unit	179.554.000			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	10 Unit	179.554.000	

			Disediakan					Lainnya yang Disediakan			
	Penyedia jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**869.187.520**					**869.187.520**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	370.800.000			Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	370.800.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	498.387.520			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	498.387.520	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**362.213.800**					**362.213.800**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas Operasional atau kendaraan dinas jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit	65.800.000			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit	65.800.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	250.000.000			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	250.000.000	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	76 Unit	46.413.800			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	76 Unit	46.413.800	
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		Rasio kepemilikan kartu keluarga	99,5%	**981.138.000**			Rasio kepemilikan kartu keluarga	99,6%	**881.125.200**	
	Pelayanan Pendafataran Penduduk				**212.938.000**					**162.925.200**	
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan		Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	40 Dokumen	32.031.000			Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	40 Dokumen	15.220.200	

	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	200 Orang	19.950.000			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	200 Orang	17.705.000	
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2 Laporan	160.957.000			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2 Laporan	130.000.000	
	Penataan Pendaftaraan penduduk				**668.200.000**					**668.200.000**	
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan		Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	1 Laporan	668.200.000			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai	1 Laporan	668.200.000	

	Kebutuhan							dengan Kebutuhan yang Tersedia			
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				**100.000.000**					**50.000.000**	
	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk		Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	100.000.000			Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	50.000.000	
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		Rasio Penduduk ber Akte Kelahiran	60%	**143.222.900**			Rasio Penduduk ber Akte Kelahiran	61%	**139.222.900**	
			Rasio Penerbitan Akta Kematian	100%				Rasio Penerbitan Akta Kematian	100%		

	Pelayanan Pencatatan Sipil				**100.722.900**					**96.722.900**	
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil		Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	6 Layanan	100.722.900			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	6 Layanan	96.722.900	
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				**42.5000.000**					42.500.0000	
	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	4 Laporan	42.500.000			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/ Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan		42.500.000	

								Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam			
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		Rasio data kependudukan yang dimutakhirkan	100%	**516.762.400**			Rasio data kependudukan yang dimutakhirkan	100%	**270.759.160**	
	Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan pemyajian database kependudukan				**9.549.700**					**9.549.700**	
	Kerjasama pemanfaatan data kependudukan		Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	1 Dokumen	9.549.700			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	1 Dokumen	9.549.700	

	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi administarsi kependudukan				**507.212.700**					**261.209.460**	
	Fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4 Laporan	457.212.700			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4 Laporan	236.209.460	
	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat			1 Laporan	50.000.000				1 Laporan	25.000.000	

Berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2026, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan penting yaitu:

1. Belum maksimalnya penyebaran informasi terkait administrasi kependudukan kepada penduduk, sosialisasi perlu di optimalkan sampai dan merata diterima oleh penduduk.
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia bagi petugas di desa, kecamatan dan Dinas masih perlu di tingkatkan kembali untuk menuju pelayanan publik yang prima
3. Pengadaan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) serta peralatan IT pendukung seperti perangkat jaringan yang sudah perlu di tingkatkan.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan musrenbang kecamatan dan forum konsultasi publik telah disampaikan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui aplikasi SIPD. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2026 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	NIHIL				

2.5 Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan hasil reses anggota DPRD, melalui aplikasi SIPD telah disampaikan usulan program dan kegiatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut

Tabel 1.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2026 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Validasi
	NIHIL				

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Kebijakan Nasional

Sesuai dengan arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 adalah tema "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", dengan prioritas pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas Dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik

Telaah terhadap kebijakan Nasional tentang Administrasi Kependudukan diatur dalam Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006, Undang – Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang – Undang nomor 23 tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2007, tentang pelaksanaan Undang – Undang nomor 23 tahun 2006 dan diperkuat dengan Permendagri nomor 62 tahun 2008 yang diperbaharui dengan Permendagri nomor 69 tahun 2012

tentang standar pelayanan dokumen kependudukan dan indikatornya adalah cakupan penerbitan kartu keluarga ,kartu tanda penduduk, akte kelahiran ,akte kematian dan kartu identitas anak menerbitkan administrasi kependudukan,agar setiap penduduk terjamin hak-haknya sebagai penduduk dalam bentuk legalitas dan identitas sebagai penduduk di wilayah Negara Republik Indonesia.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Visi Pembangunan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025 adalah ***"BANJARNEGARA MAJU BERBASIS PERTANIAN"*** mengarah pada pencapaian tujuan, cita-cita dan harapan masyarakat Kabupaten Banjarnegara. Visi pembangunan daerah tersebut harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, kesejahteraan, dan kelestarian yang ingin dicapai. Oleh karena itu, perlu kiranya diberikan penjelasan makna visi untuk mendapatkan kesamaan persepsi tentang muatan substansi filosofis yang terkandung, sehingga segenap pemangku kepentingan secara sinergis dan optimal dapat memberikan kontribusi dalam rangka pencapaiannya.

Tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005-2025 adalah mewujudkan masyarakat Banjarnegara yang maju berbasis pertanian sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sebagai ukuran tercapainya Kabupaten Banjarnegara yang maju berbasis pertanian, pembangunan Kabupaten Banjarnegara dalam kurun 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran pokok sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat madani yang agamis, dengan menciptakan masyarakat Banjarnegara yang berkualitas,

sehat, cerdas, produktif, kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlak mulia, serta menghargai dan menerapkan nilai-nilai luhur budaya masyarakat.

2. Mewujudkan perekonomian rakyat yang maju dengan mengembangkan dan memperkuat perekonomian lokal khususnya pertanian.
3. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya dalam menopang kehidupan.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good government and clean governance*) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab.
5. Mewujudkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar.
6. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, aman dan damai.

Dalam rangka mendukung RPJPD 2005-2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara mendukung pada misi keempat yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih *(good government and clean governance)* dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab”

Tujuan yang akan dicapai dalam ini ini adalah Meningkatkan Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Kependudukan dengan sasaran Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan Meningkatkan kualitas kinerja dan efektivitas pelayanan publik.

Adapun tujuan dan sasaran dalam misi ini meliputi:

Tujuan :

1. Meningkatkan Jaminan Pemenuhan Hak-hak Kependudukan

Sasaran:

1. Meningkatnya tertib admiistrasi kependudukan dengan indikator: Cakupan Kepemilikan KTP elektronik, Cakupan Kepemilikan KIA, Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun, Persentase ketersediaan update data kependudukan
2. Meningkatnya kualitas kinerja dan efektivitas pelayanan public dengan indikator: Nilai SAKIP OPD, dan Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan diformulasikannya tujuan strategis ini dalam mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur.

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Banjarnegara Tahun Anggaran 2026	

Organisasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipi

Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil														
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
2	**12**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**									
2	**12**	**02**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**				**Rp. 582.938.000,00**	**Rp. 0,00**	**Rp. 0,00**	**Rp. 0,00**	**Rp. 582.938.000,00**	**Rp. 0,00**
2	**12**	**02**	**2.01**		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**				**Rp. 212.938.000,00**	**Rp. 0,00**	**Rp. 0,00**	**Rp. 0,00**	**Rp. 212.938.000,00**	**Rp. 0,00**
2	**12**	**02**	**2.01**	**0001**	**Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**		**Rp. 32.031.000,00**	**Rp. 0**	**Rp. 0**	**Rp. 0**	**Rp. 32.031.000,00**	**Rp. 0**

2	12	02	2.01	0003	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 19.950.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 19.950.000,00	Rp. 0
2	12	02	2.01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 160.957.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 160.957.000,00	Rp. 0
2	12	02	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk				Rp. 300.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 300.000.000,00	Rp. 0,00
2	12	02	2.02	0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 300.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 300.000.000,00	Rp. 0
2	12	02	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				Rp. 70.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 70.000.000,00	Rp. 0,00
2	12	02	2.04	0003	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 70.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 70.000.000,00	Rp. 0
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL				Rp. 102.500.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 102.500.000,00	Rp. 0,00
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil				Rp. 90.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 90.000.000,00	Rp. 0,00
2	12	03	2.01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 90.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 90.000.000,00	Rp. 0
2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				Rp. 12.500.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 12.500.000,00	Rp. 0,00
2	12	03	2.02	0001	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 12.500.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 12.500.000,00	Rp. 0
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				Rp. 116.360.900,00	Rp. 11.760.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 128.120.900,00	Rp. 0,00

2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan				Rp. 28.120.900,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 28.120.900,00	Rp. 0,00
2	12	04	2.01	0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 18.571.200,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 18.571.200,00	Rp. 0
2	12	04	2.01	0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 9.549.700,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 9.549.700,00	Rp. 0
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				Rp. 88.240.000,00	Rp. 11.760.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 100.000.000,00	Rp. 0,00
2	12	04	2.03	0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 38.240.000,00	Rp. 11.760.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 50.000.000,00	Rp. 0
2	12	04	2.03	0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 50.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 50.000.000,00	Rp. 0
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp. 5.524.610.059,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 5.524.610.059,00	Rp. 0,00
2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp. 9.025.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 9.025.000,00	Rp. 0,00
2	12	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 4.025.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 4.025.000,00	Rp. 0
2	12	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 5.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 5.000.000,00	Rp. 0

2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp. 4.489.844.236,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 4.489.844.236,00	Rp. 0,00
2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 4.450.441.736,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 4.450.441.736,00	Rp. 0
2	12	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 39.402.500,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 39.402.500,00	Rp. 0
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp. 366.658.600,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 366.658.600,00	Rp. 0,00
2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 19.908.600,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 19.908.600,00	Rp. 0
2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 311.750.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 311.750.000,00	Rp. 0
2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 35.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 35.000.000,00	Rp. 0
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 485.882.223,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 485.882.223,00	Rp. 0,00
2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 262.800.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 262.800.000,00	Rp. 0
2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banjarnegara, Semua		Rp. 223.082.223,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 223.082.223,00	Rp. 0

							Kel/Desa							
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 173.200.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 173.200.000,00	Rp. 0,00
2	12	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 83.200.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 83.200.000,00	Rp. 0
2	12	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 50.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 50.000.000,00	Rp. 0
2	12	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 40.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 40.000.000,00	Rp. 0
							Jumlah		Rp. 6.326.408.959,00	Rp. 11.760.000,00			Rp. 6.338.168.959,00	

Kab. Banjarnegara,.....
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

TIEN SUMARWATI, S.Sos, MM NIP.
196803221988032002

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD selanjutnya dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Rencana program , kegiatan dan Sub kegiatan prioritas pembangunan tahun 2026 dijabarkan ke dalam semua urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten Banjarnegara, berkaitan dengan hal tersebut maka pada tahun 2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merencanakan 4 program 14 kegiatan dan 24 sub kegiatan yang berkaitan dengan bidang kependudukan dan pencatatan sipil yaitu

4.1 Urusan Pemerintah Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

   Rencana program dan kegiatan yang akan di laksanakan adalah sebagai berikut:

   a. Program penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

      i. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
         - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
         - Koordinasi dan Penyusunan Laporan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

      ii. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
         - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
         - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengajuan/ Verifikasi Keuangan SKPD

      iii. Administrasi Umum Perangkat Daerah
         - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
         - Penyediaan bahan Logistik kantor
         - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

iv. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

v. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik
- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

vi. Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
- Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

b. Program Pendaftaran Penduduk

i. Pelayanan Pendafataran Penduduk
- Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
- Penyelesaian masalah pendaftaran penduduk

ii. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendafataran Penduduk
- Bimbingan Teknis terkait pendaftaran penduduk

iii. Penataan Pendaftaraan penduduk
- Pengadaan Dokumen kependudukan selain blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan.

c. Program Pencatatan Sipil

i. Pelayanan Pencatatan Sipil
- Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil

ii. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
- Koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Agama

Kabupaten/Kota dan pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah,Talak,cerai,dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam

d. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

i. Pengumpulan data kependudkan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan

- Kerja sama pemanfaatan data kependudukan

ii. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

- Fasilitasi terkait pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan
- Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada pemangku Kepentingan dan Masyarakat

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Renja Perangkat Daerah selanjutnya menjadi platform operasional bagi Perangkat Daerah dalam menjalankan programnya dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka sasaran pembangunan daerah tahun 2025-2029. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026 dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disepakati.
2. Kerangka pendanaan dalam Renja Perangkat Daerah masih bersifat sementara, sehingga masih dimungkinkan terjadi perubahan pagu yang disebabkan oleh pengurangan, penambahan, dan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan maupun antar sub kegiatan dalam kerangka penyusunan anggaran secara terpadu dan berbasis kinerja.
3. Renja Perangkat Daerah menjadi acuan bagi Kepala Perangkat Daerah dan segenap jajarannya serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, serta menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal : 2025
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Kabupaten Banjarnegara

TIEN SUMARWATI,S.Sos.MM
Pembina Utama Muda
NIP.19680322 198803 2 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah Nya, sehingga kita dapat menyusun Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dispermades PPKB Tahun 2026. Renja ini merupakan penjabaran dari Renstra Dispermades PPKB Tahun 2025-2029 dan disusun dalam mendukung visi dalam RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029 yaitu :

"MEWUJUDKAN BANJARNEGARA MAJU DAN SEJAHTERA"

Pembangunan desa sebagai salah satu wilayah terpencil masyarakat memiliki peran strategis sebagai daya ungkit kemandirian dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pembangunan kemandirian masyarakat desa sekaligus pondasi bagi kemandirian masyarakat/daerah secara keseluruhan.

Disisi lain, pembangunan keluarga merupakan pembangunan pada tingkat dasar satuan masyarakat. Mewujudkan Keluarga Berkualitas dengan diibangi pertumbuhan penduduk yang seimbang dan berkualitas akan menjadi landasan yang kuat bagi pembangunan masyarakat pada seluruh aspek.

Penyusunan Renja Dispermades PPKB Tahun 2026 ini diharapkan mampu mewujudkan akuntabilitas yang dimulai dari perencanaan kinerja serta menunjang tercapainya kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Kami mengharapkan dukungan dari stakeholder, jajaran pemerintahan kecamatan sampai dengan desa agar target Rencana Kerja Tahun 2026 bisa tercapai dengan optimal.

Banjarnegara, 29 September 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Banjarnegara,

Hendro Cahyono, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681130 199703 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL..... iii
BAB I. PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang..... 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan..... 6
1.4. Sistematika Penulisan..... 6

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU..... 10
2. 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Capaian Renstra DispermadesPPKB Tahun 2023-2026..... 10
2. 2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara 33
2. 3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DispermadesPPKB..... 38
2. 4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Banjarnegara 41
2. 5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 64

BAB III.TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..... 65
3. 1. Tujuan dan Sasaran Renja DispermadesPPKB KabupatenBanjarnegara 65

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 69

BAB V. PENUTUP 75
5.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Renja 75
5.2. Kaidah – Kaidah Pelaksanaan 76
5.3. Rencana Tindak Lanjut 76

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sampai dengan Tahun 2026 ...	16
Tabel.2.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara 2026	34
Tabel 3.	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	38
Tabel 4.	Reviu terhadap Rancangan awal RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026	42
Tabel 5.	Usulan Program dan Kegiatan para pemangku kepentingan Tahun 2026 (Aspirasi Masyarakat)	64
Tabel 6.	Usulan Program dan Kegiatan para pemangku kepentingan Tahun 2026 (Pokok Pikiran)	64
Tabel 7.	Tujuan dan sasaran jangka menengah Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara beserta indikator kinerja Tahun 2026	68

BAB I
PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan secara terpadu sesuai dengan kewenangannya. Renja SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerinta Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun Lalu, dan hasil ealuasi hasil renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Berpedoman pada Renstra Perangkat daerah bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan,

kelompok sasaran serta perkiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat daerah dengan renstra Perangkat Daerah. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat daerah Tahun Lalu dan tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian ssaran Renstra Perangkat daerah.

1. 2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 202 3 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
8. Undang-Undang Nomor Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Nomor 19 Tahun 2025);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 Nomor 5 Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 309);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelolaan Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Bersama;
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
23. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Provinsi Jawa Tengah;
24. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa Provinsi Jawa Tengah;

25. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 Nomor 28).

1. 3. Maksud dan Tujuan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun dengan maksud untuk Menjabarkan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 ke dalam rencana program kegiatan prioritas Tahun 2026.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

a. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA-DPA dalam Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2026;
b. Sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Tahun 2026;
c. Mendokumentasikan rencana kerja yang terukur beserta pendanannya
d. Mewujudkan akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1. 4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Perencanaan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Sistematika Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026, sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas tentang pengertian renja, keterkaitan renja dengan dokumen perencanaan sebelumnya serta arti strategis renja dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan Pemerintah Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya dan landasan hukum lainnya yang dijadikan sebagai dasar dan pedoman penyusunan dokumen Renja Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara Tahun Angaran 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat tentang penjelasan maksud dan tujuan penyusunan Renja Dispermades PPKB Tahun Anggaran 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Memuat gambaran pokok dan garis besar dokumen Renja Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2026.

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Hasil Evaluasi Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun

berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja sudah disahkan;

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan tentang tingkat kinerja pelayanan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2026.

2.4. Reviu terhadap rancangan awal RKPD

Berisikan telaah Rancangan Awal RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 dan kebutuhan anggaran program dan kegiatan Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026.

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Berisikan uraian mengenai hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah lainnya yang langsung ditujukan kepada Dispermades PPKB maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Dispermades PPKB dari penelitian lapangan

dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah terhadap kebjakan Nasional

Berisi penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berisi perumusan tujuan dan saasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra Dispermades PPKB dalam mendukung visi misi Kepala Daerah.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi program dan kegiatan serta anggaran dalam rangka menunjang tercapainya kinerja Perangkat Daerah pada Tahun 2026.

BAB V. PENUTUP

Berisi hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pencapaian target kinerja perangkat daerah, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah meliputi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 terdiri dari 8 program, 18 kegiatan, dan 42 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp19.162.439.973,00 dengan fokus utama pada Meningkatnya kemandirian desa serta pengendalian pendudukan yang berkulitas. serta Meningkatnya akses pembangunan manusia.

Program/kegiatan/sub kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah yang meliputi :

1. Tata Kelola Pemerintahan Desa belum optimal
2. Pengelolaan sumberdaya ekonomi perdesaan masih rendah
3. Belum oprimalnya pembangunan kependudukan dan keluarga berencana;
4. Kinerja Perangkat Daerah belum optimal.

Penyusunan Renja 2026 juga berdasarkan hasil evaluasi tahun lalu (n-2) dan capaian tahun berjalan (n-1_. Dukungan anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 tanggal 20 Desember 2023 adalah sebesar Rp25.291.060.645,00. Kemudian anggaran

Dispermades PPKB mengalami satu kali perubahan anggaran Tahun 2024. Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA P) tanggal 13 September 2024, anggaran menurun menjadi Rp25.293.932.869,00 atau naik sebesar Rp2.872.244,00.

Berdasarkan sumber dana, anggaran Dispermades PPKB TA 2024 terdiri dari APBD Kabupaten dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang KB. Anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten sebesar Rp13.677.212.869,00 dan DAK Sub Bidang KB sebesar Rp11.616.720.000.

Anggaran yang bersumber dana dari DAK Sub Bidang KB menurun dari Rp12.013.537.000 menjadi Rp11.616.720.000. Rincian DAK Sub Bidang KB Tahun 2024 yaitu DAK Non Fisik (BOKB) sebesar 11.216.670.000,00 sedangkan dari DAK Fisik sebesar Rp399.990.000,00. Secara keseluruhan anggaran DAK mengalami penurunan sebesar Rp316.817.000,00.

Adapun realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp24.420.970.389,00 (96,55%) yang terdiri dari APBD Kabupaten sebesar Rp13.471.679.344,00, DAK Non Fisik sebesar Rp10.637.019.622,00, DAK Fisik Penugasan sebesar Rp311.644.423,00.

Secara umum pengelolaan anggaran Tahun 2024 telah terlaksana dengan sangat baikbaik. Pada tahun 2024, dari Pagu Anggaran Rp25.293.932.869,00 realisasi belanja sebesar Rp24.420.343.389,00 atau (96,55%), sehingga terdapat efisensi belanja sebesar Rp873.589.480,00,00 (3,45%). Secara persentase, realisasi tahun 2024 (96,55%) meningkat dari tahun 2023 (94,47), dengan kenaikan sebesar 1,85 persen. Dengan rincian sisa anggaran sebagai berikut :

1. Sisa belanja anggaran APBD II sebesar Rp205.593.525,00. Sebagian besar karena sisa anggaran pada gaji ASN sebesar Rp 108.965.862,00, Penyediaan Jasa Umum Pelayanan Kantor sebesar Rp31.737.877,00, dan Penyediaan Bahan Logistik Kantor sebesar Rp26.223.274,00;
2. Sisa belanja pengadaan DAK Non Fisik Sub Bidang KB sebesar Rp579.650.378,00. Sebagian besar sisanya

merupakan sisa anggaran pada menu operasional pelayanan KB khususnya pelayanan KB MKJP sebesar Rp228.439.696,00. Sisa anggaran pada pelayanan KB MKJP karena dari 6.414 akseptor yang dianggarkan hanya terserap 6.204 akseptor. Serta operasional pendampingan TPK sebesar Rp170.520.000,00;

Sisa belanja pengadaan DAK Fisik pembangunan Gudang alat dan obat kontrasepsi sebesar Rp88.345.577,00.

Dinamika yang terjadi selama tahun 2024 turut mempengaruhi keberhasilan pencapaian Renja Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2024, tercatat adanya hasil yang baik yang dikarenakan adanya pencapaian maupun pelampauan target maupun yang tidak memenuhi target.

a. Realisasi kinerja yang memenuhi target

1. Jumlah Desa berstatus mandiri;

   Pemutakhiran IDM Tahun 2024 yang ditetapkan berkasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 400 Tahun 2024 tanggal 01 Agustus 2024 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2024. Realisasi Jumlah Desa Berstatus Mandiri sebanyak 13 Desa dari Target 6 Desa dengan capaian Sangat Baik (217 persen).

2. Angka Kelahiran Total (TFR)

   Realisasi Angka Kelahiran Total (TFR) sebesar 1,38 dari target 2,06 dengan capaian Sangat Baik (133,01 persen). Capaian indikator Angka Kelahiran Total merupakan capian negative dimana semakin kecil artinya semakin baik.

3. Angka Kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)

   Realisasi Angka Kelahiran Total (TFR) sebesar 1,38 dari target 2,06 dengan capaian Sangat Baik (133,01 persen). Capaian indikator Angka Kelahiran Total merupakan capian negative dimana semakin kecil artinya semakin baik.

4. Indeks Kepuasan Masyarakat

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 84,57 telah mencapai target 84 dengan kategori **Sangat Tinggi** serta capaian sebesar 100,68 persen.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian :

1) Meningkatnya sarana dan prasarana sosial dasar seperti poskamling, pusat pelayanan kesehatan desa, akses sekolah formal, meningkatnya toleransi di lingkungan masyarakat serta kualitas lingkungan yang lebih baik;
2) Meningkatnya keberagaman ekonomi masyarakat, lembaga keuangan serta akses permodalan lebih mudah;
3) Capaian angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun sangat baik. Hal ini dapat mengatur jarak kelahiran serta mencegah kehamilan tidak direncanakan;
4) Kerjasama dengan berbagai dinas/inatansi serta mitra kerja yang luas sehingga jangkauan sasaran kegiatan lebih mudah;

Upaya yang dilakukan dalam pencapaian tujuan :

1) Meningkatnya komitmen kepada Pemerintahan Desa, aparatur kecamatan maupun pendamping desa dalam upaya peningkatan status perkembangan desa;
2) Pendampingan dan pembinaan administrasi pemerintahan desa kepada 266 desa di Kabupaten Banjarnegara;
3) Promosi, sosialisasi dan edukasi Program Bangga Kencana baik media cetak, elektronik maupun tradisional budaya lokal.

b. Realisasi kinerja yang tidak memenuhi target

1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Berdasarkan Surat Inspektur Kabupaten Banjarnegara Nomor : 700/65/LHE/2024 tanggal 25 Juni 2024 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023. Berdasarkan evaluasi internal Inspektorat Daerah Kabupaten Banjarnegara, nilai akuntabilitas Dispermades PPKB Tahun 2023 sebesar **73,95** dengan kategori BB "Sangat Baik". Realisasi Nilai tersebut tidak memenuhi target sebesar 77,50 dengan persentase capaian 95,42 persen. Beberapa faktor yang mempengaruhi sebagai berikut :

Penentuan target kinerja adalah berdasarkan metode penilaian untuk periode 2019 s/d 2022 yaitu berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 12 Tahun 2015 dimana komponen penilaian meliputi 5 unsur (Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Pencapaian Kinerja). Sedangkan penilaian SAKIP mulai tahun 2023 menggunakan Permenpan dan RB Nomor 88 Tahun 2021 dimana komponen penilaian meliputi 4 unsur yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja. Sehingga dasar penentuan target kurang tepat dijadikan sebagai dasar penentuan target kinerja.

Upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian sasaran :

1. Melaksanakan penyelarasan sasaran dan indikator pada dokumen perencanaan berdasarkan berita acara hasil reviu penyelarasan dokumen perencanaan;
2. Meningkatkan pemahaman dan komitmen seluruh jajaran apparat Dispermades PPKB dalam budaya berorientasi kinerja;
3. Melaksanakan monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran secara berkala dan lebih tepat waktu;

4. Memanfaatkan teknologi infomasi dalam proses akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
5. Melaksanakan rekomendasi hasil evaluasi dan perbaikan manajemen kinerja yang berkelanjutan;

Hambatan dan Tantangan dalam pencapaian sasaran :

1. Dalam penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran, tepada aplikasi SIPD terkadang terdapat kendala antara lain dalam pengisian indikator maupun dalam implementasi perencanaan dan penatausahaan keuangan yang tidak bisa berjalan bersamaan. Pada saat pergeseran anggaran, maka menu penatausahaan keuangan tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya, sehingga menghambat penyerapan anggaran;
2. Pada awal tahun, penatausahaan keuangan SIPD belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Hal ini karena adanya transisi penatausahaan keuangan dari aplikasi SIMDA ke apliakasi SIPD;
3. Terdapat regulasi-regulasi baru yang berkaitan dengan implementasi perencanaan anggaran, sehingga perlu kecekatan dan gerak cepat agar proses penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran bisa berjalan selaras;
4. Pelaksanaan implementasi SAKIP belum secara optimal berbasis aplikasi dan teknologi informasi.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2026 disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
2.13.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketercapaian target kinerja perangkat daerah	100%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	75%
		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	100%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	75%
2.13.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 Dokumen	34 Dokumen	17 Dokumen	17 Dokumen	100%	17 Dokumen	51 Dokumen	75%
2.13.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	17 Dokumen	34 Dokumen	17 Dokumen	17 Dokumen	100%	17 Dokumen	51 Dokumen	75%
2.13.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlayaninya administrasi keuangan Perangkat daerah	100%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	75%
2.13.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/Bulan (26 PNS + 15 PPPK)	41 Orang/Bulan (26	41 Orang/Bulan (26 PNS + 15 PPPK)	41 Orang/Bulan (26 PNS + 15 PPPK)	100%	41 Orang/Bulan (26 PNS + 15 PPPK)	41 Orang/Bulan (26 PNS + 15 PPPK)	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
				PNS + 15 PPPK)						
2.13.01.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	-	-	-
2.13.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah	100%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	75%
2.13.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Paket	24 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	36 Paket	75%
2.13.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 Paket	24 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	36 Paket	75%
2.13.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah yang dipenuhi	100%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	75%
2.13.01.2.07.10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	34 Unit	24 Bulan	34 Unit	34 Unit	100%	14 Unit	100%	75%
2.13.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	75%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
2.13.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	75%
2.13.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan (14 THL, 20 Kebersihan Balai, 3 Keamanan)	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	75%
2.13.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	75%
2.13.01.2.09.002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	11 Kendaraan	22 Unit	11 Unit	11 Unit	100%	11 Unit	33 Unit	75
2.13.01.2.09.09	Sub Kegatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	23 Unit	46 Unit	23 Unit	23 Unit	100%	23 Unit	69 Unit	75%
2.13.01.2.09.11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau	23 Unit	46 Unit	23 Unit	23 Unit	100%	23 Unit	69 Unit	75%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi								
2.13.01.2	Program Penataan Desa	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	38.50%	37,02%	38,50%	38,65%	103,07%	38,67%	38,67%	99,92%
2.13.01.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi penataan desa	6 Desa	12 Desa	6 Desa	6 Desa	100%	6 Desa	18 Desa	75%
2.13.01.2.01.06	Sub Kegiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah sarana dan prasarana desa	6 Unit (4 TMMD, 2 Karya Bhakti)	12 Unit	6 Unit	6 Unit	100%	6 Unit	18 Unit	75%
2-13.03	Program Peningkatan Kerjasama Antar Desa	Persentase kerjasama antar desa	25,19%	16,92%	25,19%	25,19%	100%	31,20%	31,20%	100%
	Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah Desa yang melaksanakan kerjasama antar desa	22 Desa	45 Desa	22 Desa	22 Desa	100%	16 Desa	83 Desa	75%
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	1 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	6 Dokumen	100%
2-13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang terfasilitasi pembinaan pengelolaan administrasi desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
		Persentase desa yang terfasilitasi penetapan dan penegasan batas desa	67,29%	56,39%	67,29%	67,29%	100%	84,59%	84,59%	84,59%
		Jumlah BUMDes yang berkembang	45 BUMDesa	18 BUMDesa	6 BUMDesa	45 BUMDesa	750%	46 BUMDesa	46 BUMDesa	195%
2-13.04.2.01	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan administrasi desa	266 Desa	48 Bulan	266 Desa	266 Desa	100%	-	-	-
		Jumlah Desa yang memiliki batas desa	179 Desa	150 Desa	179 Desa	179 Desa	100%	225 Desa	225 Desa	84,59%
		Jumlah Desa yang memiliki BUMDes aktif	132 Desa	124 Desa	125 Desa	127 Desa	101,6%	128 Desa	128 Desa	102,34%
2-13.04.2.01.004	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah dokumen pengelolaan keuangan desa	266 Desa	266 Desa	266 Desa	266 Desa	100%	266 Desa	266 Desa	75%
2-13.04.2.01.005	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	266 Orang	266 Orang	110 Orang	110 Orang	100%	51 Orang	-	-
2-13.04.2.01.008	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan lembaga kerjasama antar desa	20 Dokumen	52 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	100%	4 Dokumen	74 Dokumen	91%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
2-13.04.2.01.011	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah dokumen profil desa	100 Dokumen	-	100 Dokumen	100 Dokumen	100%	100 Dokumen	200 Dokumen	75%
2-13.04.2.01.013	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan aset desa	5 Dokumen	6 Desa	5 Desa	6 Desa	120%	5 Desa	17 Dokumen	85%
2-13.04.2.01.014	Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah anggota BPD yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	266 Orang	266 Orang	266 Desa	266 Desa	100%	100 Orang	632 Orang	60%
2-13.04.2.01.015	Sub Kegiatan Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penetapan dan penegasan batas desa	29 Desa	150 Desa	29 Desa	29 Desa	100%	46 Desa	225 Desa	84,59%
2-13.04.2.01.018	Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan esa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	3 Dokumen	6 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	9 Dokumen	75%
2-13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan. Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi aktif dalam program pemberdayaan masyarakat	100%	45%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase pengembangan ekonomi desa	-	10%	-	-	-	15%	15%	133,33%
		Persentase desa yang memanfaatkan karya Teknologi Tepat Guna	3%	2,63%	3%	3,38%	122,67%	4%	4%	80%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
2-13.05.2.01	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi aktif dalam program pemberdayaan masyarakat	100%	45%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase peningkatan usaha ekonomi perdesaan	-	10%	-	-	-	15%	15%	133,33%
		Jumlah karya yang memenuhi kriteria Teknologi Tepat Guna	5 Karya	4 Karya	5 Karya	5 Karya	100%	3 Karya	12 Karya	75%
2-13.05.2.01.002	Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK< Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah dokumen hasil penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyaratan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	6 Dokumen	9 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	8 Dokumen	23 Dokumen	76,67%
2-13.05.2.01.003	Sub Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga	Jumlah Lembaga Kemasyaratan Desa/Kelurahan	19 Lembaga	65 Lembaga	19 Lembaga	19 Lembaga	100%	62 Lembaga	146 Lembaga	87,95%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK< Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	(RT,RW,PKK,Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya								
2-13.05.2.01.005	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	-	36 Dokumen	-	-	-	4 Dokumen	40 Dokumen	88,88%
2-13.05.2.01.006	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah laporan hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	4 Laporan	9 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	13 laporan	87%
2-13.05.2.01.009	Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan MAyaraakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan MAyaraakat dan Kesejahteraan Keluarga	36 Dokumen	36 Dokumen	36 Dokumen	36 Dokumen	100%	36 Dokumen	108 Dokumen	75%
	Urusan pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,06	1,65	2,06	1,38	133,01%	1,43	1,43	141,26%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
2-14.02	Program Pengendalian Penduduk	Persentase kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	1,5%	0,75%	1,5%	1,5%	100%	2,26%	2,26%	75%
		Cakupan penyediaan data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%
2-14.02.2.01	Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijaka pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kualitas Penduduk	Jumlah sektor/instansi yang terlibat dalam Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	15 Dokumen	75%
2-14.02.2.01.010	Sub Kegiatan Kerjasama pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah dokumen Kerjasama pelaksanaan Pendidikan kependudukan jalur pendidkan formal	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	75%
2-14.02.2..02	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk	Jumlah dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	36 Dokumen	75%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								
2-14.02.2..02.001	Sub Kegiatan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sistem informasi keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan sistem informasi keluarga	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	75%
2-14.02.2..02.011	Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan data Keluarga	Jumlah laporan pencatatan dan pengumpulan data keluarga	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	75%
2-14.02.2..02.013	Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengenda;ian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah dokumen pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	75%
2-14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	76,75%	81,24%	77,09%	76,75%	99,56%	77,59%	77,59%	99,36%
		Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	6,94%	6,37%	6,94%	3,64%	190,66%	6,92%	6,92%	99,71%
2-14.03.02.01	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan	Cakupan wilayah yang terinterfensi program bangga kencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	KB sesuai Kearifan Budaya Lokal									
2-14.03.02.01.001	Sub Kegiatan Advokasi Program Bangga Kencana kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	9 Organisasi (Aisyiyah, SI, Muslimat IBI, Juang Kencana, Genre, PPKBD, Sub PPKBD, IPeKB)	9 Organisasi (Aisyiyah, SI, Muslimat IBI, Juang Kencana, Genre, PPKBD, Sub PPKBD, IPeKB)	9 Organisasi (Aisyiyah, SI, Muslimat IBI, Juang Kencana, Genre, PPKBD, Sub PPKBD, IPeKB)	9 Organisasi (Aisyiyah, SI, Muslimat IBI, Juang Kencana, Genre, PPKBD, Sub PPKBD, IPeKB)	9 Organisasi (Aisyiyah, SI, Muslimat IBI, Juang Kencana, Genre, PPKBD, Sub PPKBD, IPeKB)	9 Organisasi (Aisyiyah, SI, Muslimat IBI, Juang Kencana, Genre, PPKBD, Sub PPKBD, IPeKB)	9 Organisasi (Aisyiyah, SI, Muslimat IBI, Juang Kencana, Genre, PPKBD, Sub PPKBD, IPeKB)	75%
2-14.03.02.01.002	Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah dokumen KIE program Bangga Kencana sesuai kearifan budaya lokal	16 Dokumen	-	16 Dokumen	16 Dokumen	100%	2 Dokumen	18 Dokumem	90%
2-14.03.02.01.004	Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program Bangga Kencana melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	8 Dokumen	-	8 Dokumen	8 Dokumen	100%	7 Dokumen	15 Dokumen	75%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
2-14.03.02.01.006	Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	200 Laporan	200 Laporan	200 Laporan	200 Laporan	100%	200 Laporan	600 Laporan	75%
2-14.03.02.01.007	Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	200 Laporan	200 Laporan	200 Laporan	200 Laporan	100%	200 Laporan	600 Laporan	75%
2-14.03.2.02	Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB?PLKB)	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%
2-14.03.2.02.004	Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Penggerakan Masyarakat (IMP)	Jumlah Kader yang mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	100%	20 Laporan	80 Laporan	75%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
2-14.03.2.03	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%
		Prsentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	33,08%	35,10%	33,08%	35,94%	108,65%	33,58%	33,58%	98,53%
		Jumlah PUS peserta KB MKJP	6.429 PUS	5.204 PUS	6.429 PUS	6.204 PUS	96,50%	6.524 PUS	17.932 PUS	74,72%
2-14.03.2.03.001	Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alatdan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	48 Laporan	75%
2-14.03.2.03.003	Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah orang yang mengikuti peningkatan kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	6.429 PUS	5.204 PUS	6.429 PUS	6.204 PUS	96,50%	6.524 PUS	17.932 PUS	74,72%
2-14.03.2.03.004	Sub Kegiatan Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	6 Laporan	2 Laporan	6 Laporan	2 Laporan	100%	4 Laporan	8 Laporan	80%
2-14.03.2.03.008	Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	75%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya								
2-14.03.2.03.012	Sub Kegiatan Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	75%
2-14.03.2.04	Kegiatan Pemberdayaan dan peningkatan Peran Serta Organisasi Kemsyarakatan Tingkat Daerah Kbaupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	5 Organisasi	5 Organisasi	5 Organisasi	5 Organisasi	100%	5 Organisasi	15 Organisasi	75%
2-14.03.2.04.003	Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung KB yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	100%	20 Laporan	80 Laporan	75%
2-14.04	Program Pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	76,03%	85,58%	76,01%	96,53%	239,92%	76,03%	96,53%	239,92%
		Cakupan anggota Bina Kelurga Remaja (BKR) ber-KB	61,54%	82,17%	61,52%	92,39%	150,18%	61,54%	92,39%	150,18%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
		Cakupan anggota Bina Kelurga Lansia (BKL) ber-KB	36,74%	84,10%	36,72%	88,10%	239,92%	36,74%	88,10%	239,92%
		Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	50,74%	50,74%	50,75%	90,08%	177,53%	50,75%	90,08%	177,53%
		Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa	15%	20%	15%	20%	100%	20%	20%	100%
2-14.04.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan	62 Kelompok	62 Kelompok	62 Kelompok	62 Kelompok	100%	62 Kelompok	62 Kelompok	75%
2-14.04.2.01002	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Jumlah unit sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	32 Unit	30 Unit	32 Unit	32 Unit	100%	25 Unit	87	87%
2-14.04.2.01003	Sub Kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraaan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan	Jumlah laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS,	-	3 Laporan	-	-	-	5 Laporan	8 Laporan	53,33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)								
2-14.04.2.01006	Sub Kegiatan Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	48 Laporan	48 Laporan	48 Laporan	48 Laporan	100%	48 Laporan	48 Laporan	75%
2-14.04.2.01007	Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	12 Laporan	4 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	7 Laporan	23 Laporan	76,67%
2-14.04.2.01008	Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	12 Laporan	1 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	10 Laporan	23 Laporan	76,67%
2.14.04.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi**	**Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang berperan serta**	**784 Organisasi**	**784 Organisasi**	**784 Organisasi**	**784 Organisasi**	**100%**	**784 Organisasi**	**784 Organisasi**	**75%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	**dalam Pembangunan keluarga**								
2.14.04.2.02.001	Sub Kegiatan Pemantauan data dan informasi keluarga beresiko stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	Cakupan Pemantauan data dan informasi keluarga beresiko stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	10 Bulan	10 Bulan	10 Bulan	10 Bulan	100%	10 Bulan	10 Bulan	75%
2.14.04.2.02.002	Sub Kegiatan Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	Jumlah Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita) yang mendapat pendampingan	40.000 Laporan	-	40.000 Laporan	43.293 Laporan	108,23%	25.000 Laporan	68.293 Laporan	85,37%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan pelayanannya, Perangkat Daerah mengampu 4 (empat) sasaran yang diukur dengan 5 (lima) Indikator. Berdasarkan skala pengukuran kinerja maka capaian kinerja dari 5 (lima) indikator kinerja yaitu 4 (empat) indikator kinerja melebihi 100 persen (sangat baik), 1 (satu) indikator dalam skala 75 - 100 persen (baik). Rincian capaian kinerja berdasarkan skala pengukuran kinerja sebagai berikut :

1. Kategori sangat baik yaitu : 1). Jumlah Desa berstatus mandiri, 2). Angka Kelahiran Total (TFR), 3). Angka Kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19), 4). Indeks Kepuasan Masyarakat;
2. Kategori baik yaitu : 1). Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian :

1. Meningkatnya sarana dan prasarana sosial dasar seperti poskamling, pusat pelayanan kesehatan desa, akses sekolah formal, meningkatnya toleransi di lingkungan masyarakat serta kualitas lingkungan yang lebih baik;
2. Meningkatnya keberagaman ekonomi masyarakat, lembaga keuangan serta akses permodalan lebih mudah;
3. Capaian angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun sangat baik. Hal ini dapat mengatur jarak kelahiran serta mencegah kehamilan tidak direncanakan;
4. Kerjasama dengan berbagai dinas/inatansi serta mitra kerja yang luas sehingga jangkauan sasaran kegiatan lebih mudah;

Secara umum, kinerja Dispermades PPKB Tahun 2026 telah berhasil dengan baik, namun demikian perlu untuk terus melaksanakan peningkatan kinerja agar semakin bisa bermanfaat untuk pembangunan dan kesejahteraann masyarakat Banjarnegara. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK LPPD / IKU	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)
I.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	IKU	Angka	77	77,5	78	78,5	73,45	73,95	75,45	75,75	
1.	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja	-	IKU	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
II.	Jumlah Desa Berstatus Mandiri	-	IKU	Desa	3	6	7	8	6	13	31	33	
	Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan Masyarakat	-	IKK	%	37	37,5	38	38,5	36,95	38,65	38,65	38,65	
	Jumlah kerjasama antar desa	-	IKK	MoU	4	5	6	7	4	5	6	7	
	Persentase desa yang terfasilitasi pembinaan pengelolaan administrasi desa	-	IKK	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase desa yang terfasilitasi penetapan dan penegasan batas desa	-	IKK	%	50	65	85	100	56,39	67,29	84,59	93,98	
	Jumlah BUMDes yang berkembang	-	IKK	BUMDes	6	7	8	9	18	45	46	47	
	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi aktif dalam	-	IKK	%	45	50	55	60	100	100	100	100	

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK LPPD / IKU	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)
	program pemberdayaan Masyarakat												
	Persentase pengembangan ekonomi desa	-	IKK	%	5	10	15	20	-	-	10	10	
	Persentase desa yang memanfaatkan karya Teknologi Tepat Guna	-	IKK	%	2	3	4	5	2,63	3,38	4,14	4,51	
III.	Angka kelahiran Total (TFR)	-	IKU	Angka	2,08	2,06	2,04	2,02	165	1,38	1,43	1,43	
	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	-	IKK	Dokumen	2	2	2	2	-	2	3	4	
	Cakupan penyediaan data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan	-	IKK	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49	-	IKK	%	76,59	77,09	77,59	78,09	81,24	76,75	77,59	78,09	
	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	-	IKK	%	15	14	12	10	4,88	4,55	4,55	4,55	
	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk	-	IKK	%	100	100	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK LPPD / IKU	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)
	memenuhi permintaan Masyarakat												
	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	-	IKK	%	32,58	33,08	33,58	34,08	35,10	35,94	35,94	35,94	
	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*unmet need*)	-	IKK	%	6,96	6,94	6,92	6,9	6,37	4,55	4,55	4,55	
IV.	Angka kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	-	IKU		22,36	11,52	11,51	11,50	11,52	9,51	9,51	9,51	
	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	-	IKK	%	75,99	76,01	76,03	76,05	86,58	96,53	96,53	96,53	
	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	-	IKK	%	61,5	61,52	61,54	61,56	82,17	92,39	92,39	92,39	
	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	-	IKK	%	36,7	36,72	36,74	36,76	84,10	88,10	88,10	88,10	
	Cakupan PUS Peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga	-	IKK	%	50,72	50,74	50,76	50,78	88,92	90,08	90,08	90,08	

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK LPPD / IKU	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)
	Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Mandiri												
	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	-	IKK	%	10	20	30	40	25,12	20	20	20	
V.	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	IKU		83	84	85	86	83,53	84,57	85	86	
	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerrah yang dipenuhi	-	IKK		100	100	100	100	100	100	100	100	

*) Kolom 3 diisi berdasarkan IKK outcome dalam lampiran Permendagri 18/2020

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5589), serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, memberikan kewenangan kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2018, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara, Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 pada BAB III menyebutkan bahwa DISPERMADES PPKB mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Permasalahan merupakan kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Didalam menjalankan tugasnya DISPERMADES PPKB Kabupaten Banjarnegara menemui berbagai permasalahan sebagai berikut :

Tabel 3. Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)
1. Tata Kelola Pemerintahan Desa belum optimal	1. Katerbatasan akses internet dan infrastruktur digital	1. Jasa layanan jaringan internet belum menjangkau seluruh desa; 2. Kualitas layanan jaringan internet belum baik;
	2. Kemiskinan masih tinggi	1. Pemetaan sasaran penangan kemiskinan belum tepat; 2. Rendahnya pengelolaan informasi desa;

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)
		3. Pengelolaan Dana Desa tidak tepat sasaran; 4. Semakin menurunnya semangat kegotong-royongan; 5. Masih rendahnya jumlah kepemilikan dan produksi aset desa; 6. Kurangnya pemahaman Perangkat desa dan anggota BPD akan tugas pokok dan fungsi; 7. Program penanganan kemiskinan tidak tertuang dalam musrenbangdes; 8. Kurangnya akses dan partisipasi masyarakat desa dalam mengikuti Musyawarah Desa; 9. Kurang tertibnya administrasi desa; 10. Kurang optimlanya peran Lembaga kemsayarakatan desa;
	3. Ketaatan Pemanfaatan Ruang Masih kecil	1. Masih adanya permasalahan tanah kas desa; 2. Belum seluruh desa memiliki batas desa berdasarkan metode kartometrik;
2. Pengelolaan sumberdaya ekonomi perdesaan masih rendah	1. Pertumbuhan Kewirausahaan/UMKM yang masih rendah	1. Pengelolaan manajemen BUMDesa belum optimal; 2. Rendahnya kompetensi sumberdaya manusia pengelola BUMDesa; 3. Kurangnya kemandirian pembentukan kawasan perdesaan; 4. Pengelolaan pasar desa belum optimal; 5. Masih rendahnya pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.
3. Belum oprimalnya pembangunan kependudukan dan keluarga berencana	1. Kualitas sumber daya manusia yang masih rendah;	1. Belum adanya pemanfaatan dokumen kependudukan; 2. Kurangnya pemahaman masyarakat akan pembangunan keluarga dan Keluarga Berkualitas; 3. Terbatasnya Kerjasama Pendidikan kependudukan dengan sekolah-sekolah.
	2. Layanan Kesehatan yang belum sepenuhnya baik	1. Keterbatasan akses pelayanan KB; 2. Keterbatasan akses pembinaan kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKA, PIK-R; 3. Kurangnya Pendidikan Kesehatan Reproduksi remaja; 4. Pendampingan keluarga berisiko stunting belum optimal.
	3. Permasalahan akses pangan yang bergizi bahan pangan juga berpengaruh terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia	1. Masih banyak kelompok sasaran yang belum terjangkau edukasi gizi secara intensif; 2. Kurangnya pembiasaan pemberian konsumsi makanan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)
		bergizi terutama bagi ibu hamil dan baduta; 3. Masih terjadi pola asuh bayi, baduta dan balita yang tidak tepat; 4. Masih tingginya balita gagal tumbuh (*stunting*); 5. Kurangnya kesadaran keluarga berkualitas.
	4. Bonus Demografi yang belum termanfaatkan dengan baik	1. Kurang optimalnya pembinaan generasi berkualitas; 2. Katerbatasan jangkauan sasaran pembinaan remaja 3. Masih adanya pernikahan dini;
4. Kinerja Perangkat Daerah belum optimal	5. Implementasi reformasi birokrasi yang belum terlaksana dengan baik	Akuntabilitas kinerja perangkat daerah masih memerlukan perbaikan/penyempurnaan;
	6. Pelayanan publik yang masih kurang berkualitas. Hal ini dipengaruhi oleh kuantitas dan kualitas ASN yang belum memadai	Kualiatas Pelayanan Publik Perangkat Daerah masih perlu peningkatan;

Berdasarkan hasil analisis permasalahan, isu-isu strategis di Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara, maka dapat ditetapkan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Masih tingginya angka kemiskinan dan belum meratanya ditribusi kesehajteraan;
2. Peningkatan intesitas bencana dan perubahan iklim;
3. Belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal dan industri berkelanjutan;
4. Kualitas dan daya saing manusia yang masih rendah;
5. Belum optimalnya tata Kelola pemerintahan, keuangan, dan kondusivitas serta stabilitas wilayah.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Tahun 2026 merupakan pelaksanaan tahun pertama RPJMD Tahun 2025-2029. Dalam RPD Tahun 2023-2026, prioritas arah kebijakan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2026 meliputi :

1. Terwujudnya pengendalian penduduk dan peningkatan kualitas keluarga;
2. Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik perangkat daerah.

Tabel 4. Revieu terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 Kabupaten Banjarnegara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Dispermades PPKB				**26.086.358.330**					**19.162.439.973**	
1.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kabupaten Banjarnegara**	**Persentase ketercapaian target kinerja perangkat daerah**	**100%**	**6.652.678.330**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kabupaten Banjarnegara**	**Persentase ketercapaian target kinerja perangkat daerah**	**100%**	**6.758.479.973**	
			Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	**100%**				**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi**	**100%**		
1.1	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Ealuasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kabupaten Banjarnegara**	**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Ealuasi Kinerja Perangkat Daerah**	**17 Dokumen**	**10.000.000**	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Ealuasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kabupaten Banjarnegara**	**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Ealuasi Kinerja Perangkat Daerah**	**17 Dokumen**	**15.000.000**	
1)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Banjarnegara	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	17 Dokumen	10.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Banjarnegara	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	17 Dokumen	15.000.000	
1.2	**Kegiatan Adminstrasi Keuangan perangkat Daerah**	**Kab. Banjarnegara**	**Persentase terlayaninya administrasi**	**100%**	**5.216.546.339**	**Kegiatan Adminstrasi Keuangan perangkat Daerah**	**Kab. Banjarnegara**	**Persentase terlayaninya administrasi**	**100%**	**5.290.849.189**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			keuangan perangkat daerah					**keuangan perangkat daerah**			
1)	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Kab. Banjarnegara	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/Bulan (26 PNS + 15 PPPK)	5.155.841.339	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Kab. Banjarnegara	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/Bulan (26 PNS + 15 PPPK)	5.247.625.189	
2)	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Banjarnegara	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	60.705.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Banjarnegara	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	43.224.000	
1.3	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Banjarnegara**	**Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**561.928.900**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Banjarnegara**	**Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**435.297.000**	
1)	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Banjarnegara	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Paket	10.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Banjarnegara	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Paket	24.495.000	
2)	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Banjarnegara	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 Paket	551.928.900	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Banjarnegara	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 Paket	410.802.000	
1.4	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Kab. Banjarnegara**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi**	**-**	**-**	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Banjarnegara**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi**	**-**	**-**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemerintah Daerah										
1)	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Banjarnegara	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	-	-	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Banjarnegara	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	-	-	
1.5	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Banjarnegara**	**Prsentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**684.203.091**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah**	**Kab. Banjarnegara**	**Prsentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**897.333.784**	
1)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Banjarnegara	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	99.600.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kab. Banjarnegara	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik	12 Laporan	176.400.000	
2)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Banjarnegara	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan (14 THL, 20 kebersihan Balai, 3 Keamanan)	584.603.091	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Banjarnegara	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan (14 THL, 20 Kebersihan Balai, 3 Keamanan)	720.933.784	
1.6	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Kab. Banjarnegara**	**Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara**	**100%**	**180.000.000**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Banjarnegara**	**Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara**	**100%**	**120.000.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemerintahan Daerah										
1)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Banjarnegara	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	11 Kendaraan	110.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Banjarnegara	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinan	11 Kendaraan	92.000.000	
2)	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Banjarnegara	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	23 Unit	50.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Banjarnegara	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	23 Unit	22.400.000	
3)	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Banjranegara	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	23 Unit	20.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Saana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Banjranegara	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	23 Unit	5.600.000	
					4.879.000.000					**4.151.110.000**	
2.	**Program Penataan Desa**	**Kab. Banjarnegara**	**Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat**	**38.50%**	**90.000.000**	**Program Penataan Desa**	**Kab. Banjarnegara**	**Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan Masyarakat**	**38.50%**	**66.000.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.1	**Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa**	**Kab. Banjarnegara**	**Jumlah desa yang terfasilitasi penataan desa**	**6 desa**	**90.000.000**	**Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa**	**Kab. Banjarnegara**	**Jumlah desa yang terfasilitasi penataan desa**	**6 Desa**	**66.000.000**	
1)	Sub Kegiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Kab. Banjarnegara	Jumlah sarana dan prasarana desa	6 unit (4 TMMD, 2 karya Bhakti)	90.000.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Kab. Banjarnegara	Jumlah sarana dan prasarana desa	6 unit (4 TMMD, 2 Karya Bhakti)	66.000.000	
3.	**Program Peningkatan Kerjasama Desa**	**Kab. Banjarnegara**	**Presentase kerjasama antar desa**	**15.41%**	**10.000.000**	**Program Peningkatan Kerjasama Desa**	**Kab. Banjarnegara**	**Persentase kerjasama anatar desa**	**15,41%**	**7.500.000**	
3.1	**Kegiatan Fasilitasi Kerjasama antar Desa**	**Kab. Banjarnegara**	**Jumlah desa yang melaksanakan kerjasama antar desa**	**27 Desa**	**10.000.000**	**Kegiatan Fasilitasi Kerjasama antar Desa**	**Kab. Banjarnegara**	**Jumlah desa yang melaksanakan Kerjasama antar desa**	**27 Desa**	**7.500.000**	
1)	Sub Kegiatan fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Banjarnegara	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	2 Dokumen	10.000.000	Sub Kegiatan fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Banjarnegara	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	2 Dokumen	7.500.000	
4.	**Program Administrasi Pemerintahan Desa**	**Kab. Banjarnegara**	**Persentase desa yang terfasilitasi pembinaan pengelolaan administrasi desa**	**100%**	**4.599.000.000**	**Program Administrasi Pemerintahan Desa**	**Kab. Banjarnegara**	**Persentase desa yang terfasilitasi pembinaan pengelolaan administrasi desa**	**100%**	**3.935.110.000**	
			Persentase desa yang terfasilitasi penetapan dan penegasan batas desa	**90.98%**				**Persentase desa yang terfasilitasi penetapan dan penegasan batas desa**	**90.98%**		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Jumlah BUMDes yang berkembang	**19.01%**				**Jumlah BUMDes yang berkembang**	**19,01%**		
4.1	**Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Kab. Banjarnegara**	**Jumlah desa yang difasiltasi pengelolaan administrasi desa**	**266 Desa**	**4.599.000.000**	**Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Kab. Banjarnegara**	**Jumlah desa yang difasiltasi pengelolaan administrasi desa**	**266 Desa**	**3.935.110.000**	
			Jumlah Desa yang memiliki batas desa	**242 Desa**				**Jumlah Desa yang memiliki batas desa**	**242 Desa**		
			Jumlah Desa yang memiliki BUMDes Aktif	**132 Desa**				**Jumlah Desa yang memiliki BUMDes Aktif**	**132 Desa**		
1)	Sub Kegiatan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Banjarnegara	Jumlah dokumen pengelolaan keuangan desa	801 Dokumen	3.850.000.000	Sub Kegiatan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Banjarnegara	Jumlah dokumen pengelolaan keuangan desa	801 Dokumen	3.841.610.000	
2)	Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kab. Banjarnegara	Jumlah aparatur pemerintah desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	266 Orang	250.000.000	Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kab. Banjarnegara	Jumlah apaatur pemerintah desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	-	-	
3)	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan lembaga Kerjasama antar Desa	Kab. Banjarnegara	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan lembaga kerjasama antar desa	2 Dokumen	25.000.000	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan lembaga Kerjasama antar Desa	Kab. Banjarnegara	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan lembaga kerjasama antar desa	2 Dokumen	22.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4)	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kab. banjarnegara	Jumlah Dokumen Profil Desa	10 Dokumen	10.000.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kab. Banjarnegara	Jumlah Dokumen Profil Desa	10 Dokumen	5.000.000	
5)	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset desa	Kab, Banjarnegara	Jumlah dokumen hasil pengelolaan aset desa	5 Dokumen	9.000.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset desa	Kab, Banjarnegara	Jumlah dokumen hasil pengelolaan aset desa	5 Dokumen	9.000.000	
6)	Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan kapasitas Anggota BPD	Kab. Banjarnegara	Jumlah anggota BPD yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	266 Orang	10.000.000	Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan kapasitas Anggota BPD	Kab. Banjarnegara	Jumlah anggota BPD yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	266 Orang	6.000.000	
7)	Sub kegiatan fasilitasi Penataan dan Penegasan Batas desa	Kab. Banjarnegara	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penetapan dan penegasan batas desa	46 Desa (Kec. Pejawaran, Batur dan Kalibening)	70.000.000	Sub kegiatan fasilitasi Penataan dan Penegasan Batas desa	Kab. Banjarnegara	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penetapan dan penegasan batas desa	25 Desa (Kec. Pejawaran dan Batur)	51.500.000	
8)	Sub Kegiatan fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan kelurahan	Kab. Banjarnegara	Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	3 Dokumen	375.000.000	Sub Kegiatan fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan kelurahan	Kab. Banjarnegara	Jumlah dokumen gasil evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	-	-	
5.	**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**	**Kab. Banjarnegara**	**Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi aktif dalam program pemberdayaan Masyarakat**	**100%**	**180.000.000**	**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**	**Kab. Banjarnegara**	**Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi aktif dalam program**	**100%**	**142.500.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								pemberdayaan Masyarakat			
			Persentase pengembangan ekonomi desa	**16,22%**				**Persentase pengembangan ekonomi desa**	**16,22%**		
			Presentase desa yang memanfaatkan karya Teknologi Tepat Guna	**4,14%**				**Presentase desa yang memanfaatkan karya Teknologi Tepat Guna**	**4,14%**		
5.1	**Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyrakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan lembaga Adat tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah**	**Kab. Banjarnegara**	**Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi aktif dalam program pemberdayaan masyarakat**	**100%**	**180.000.000**	**Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyrakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan lembaga Adat tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah**	**Kab. Banjarnegara**	**Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi aktif dalam perencanaan desa**	**100%**	**142.500.000**	
			Presentase peningkatan usaha ekonomi perdesaan	**5.00%**				**Persentase peningkatan usaha ekonomi perdesaan**	**5,00%**		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Jumlah karya yang memenuhi kriteria Teknologi Tepat Guna	**3 Dokumen**				**Jumlah karya yang memenuhi kriteria Teknologi Tepat Guna**	**3 Dokumen**		
1)	Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lmebaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Banjarnegara	Jumlah dokumen hasil Penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	3 Dokumen	20.000.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lmebaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Banjarnegara	Jumlah dokumen hasil Penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lmebaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	3 Dokumen	15.000.000	
2)	Sub Kegiatan fasilitasi Peningkatan Kapsitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lmebaga Adat Desa/Kelurahan	Kab. Banjarnegara	Jumlah lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lmebaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya	4 Dokumen	20.000.000	Sub Kegiatan fasilitasi Peningkatan Kapsitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lmebaga Adat Desa/Kelurahan	Kab. Banjarnegara	Jumlah lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lmebaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya	4 Dokumen	15.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	dan Masyarakat Hukum Adat					dan Masyarakat Hukum Adat					
3)	Sub Kegiatan fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab. Banjarnegara	Jumlah dokumen hasil fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	1 Dokumen	15.000.000	Sub Kegiatan fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab. Banjarnegara	Jumlah dokumen hasil fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	-	-	
4)	Sub Kegiatan fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Banjarnegara	Jumlah laporan hasil fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	25.000.000	Sub Kegiatan fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Banjarnegara	Jumlah laporan hasil fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	12.500.000	
5)	Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan gerkan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Banjarnegara	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	36 Dokumen	100.000.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Banjarnegara	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	36 Dokumen	100.000.000	
	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	**Kab. Banjarnegara**	**Angka Kelahiran Total (TFR)**	**1,43**	**14.554.680.000**	**URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	**Kab. Banjarnegara**	**Angka Kelahiran Total (TFR)**	**1,43**	**8.252.850.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6.	**Program Pengendalian Penduduk**	**Kab. Banjarnegara**	**Presentase kerjasama penyelenggaraan pendidikan fomal, non formal dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan**	**2,26%**	**473.200.000**	**Program Pengendalian Penduduk**	**Kab. Banjarnegara**	**Persentase kerjasama penyelenggaraan pendidikan fomal, non formal dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan**	**2,26%**	**258.400.000**	
			Cakupan penyediaan data mikro keluarga di setiap desa/ kelurahan	**100%**				**Cakupan penyediaan data mikro keluarga di setiap desa/ kelurahan**	**100%**		
6.1	**Kegiatan Pemaduan dan Sinkrpnisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan pemerintah Daerah kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**Kab. Banjarnegara**	**Jumlah sektor/instansi yang terlibat dalam Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**2 Dokumen**	**10.000.000**	**Kegiatan Pemaduan dan Sinkrpnisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan pemerintah Daerah kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**Kab. Banjarnegara**	**Jumlah sektor/instansi yang terlibat dalam Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**2 Dokumen**	**10.000.000**	
1)	Sub Kegiatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan	Kab. Banjarnegara	Jumlah dokumen Kerjasama pelaksanaan Pendidikan	2 Dokumen	10.000.000	Sub Kegiatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan	Kab. Banjarnegara	Jumlah dokumen Kerjasama pelaksanaan Pendidikan	-	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kependudukan Jalur Pendidikan Formal		kependudukan jalur Pendidikan formal			Kependudukan Jalur Pendidikan Formal		Kependudukan jalur Pendidikan formal			
2)	Sub Kegiatan Advokasi,Sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal di satuan pendidikan jenjang SD/Mi dan SLTP/MTS, serta jalur nor formal dan informal	Kab. Banjarnegara	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai PeringatanDini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	-	-	Sub Kegiatan Advokasi,Sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal di satuan pendidikan jenjang SD/Mi dan SLTP/MTS, serta jalur nor formal dan informal	Kab. Banjarnegara	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai PeringatanDini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	2 Dokumen	10.000.000	
6.2	**Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Banjarnegara**	**Jumlah dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota**	**12 Dokumen**	**463.200.000**	**Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Banjarnegara**	**Jumlah dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota**	**12 Dokumen**	**248.400.000**	
1)	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Kab. Banjarnegara	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	12 Laporan	60.000.000	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Kab. Banjarnegara	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	-	-	
2)	Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kab. Banjarnegara	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	20 Laporan	235.200.000	Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kab. Banjarnegara	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	20 Laporan	166.800.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3)	Sub Kegiatan Pengolahan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kab. Banjarnegara	Jumlah data dan informasi keluarga yang tersedianya	-	-	Sub Kegiatan Pengolahan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kab. Banjarnegara	Jumlah data dan informasi keluarga yang tersedianya	960 Laporan (80 Faske x 12 bulan)	81.600.000	
4)	Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kab. Banjarnegara	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	480 Dokumen (Internet: 20 x 12 Operasional pengolahan data : 20 x 12)	168.000.000	Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kab. Banjarnegara	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	-	-	
7	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Kab. Banjarnegara**	**Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49**	**77,79%**	**8.617.480.000**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Kab. Banjarnegara**	**Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49**	**77,79%**	**2.658.800.000**	
			Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	**6,74%**				**Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)**	**6,74%**		
7.1	**Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Kab. Banjarnegara**	**Cakupan wilayah yang terinterfensi program bangga kencana**	**100%**	**1.337.070.000**	**Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Kab. Banjarnegara**	**Cakupan wilayah yang terinterfensi program bangga kencana**	**100%**	**350.000.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1)	Sub Kegiatan Advokasi Program Bangga Kencana kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kab. Banjarnegara	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	9 Organisasi (Aisyiyah, SI, Muslimat, IBI, Juang Kencana, Genre, PPKBD, Sub PPKBD, IPeKB)	114.070.000	Sub Kegiatan Advokasi Program Bangga Kencana kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kab. Banjarnegara	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	9 Organisasi (Aisyiyah, SI, Muslimat, IBI, Juang Kencana, Genre, PPKBD, Sub PPKBD, IPeKB)	40.000.000	
2)	Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	Kab. Banjarnegara	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	6 Dokumen (2 APBD + 4 DAK)	10.000.000	Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	Kab. Banjarnegara	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	5 Dokumen (1 APBD + 4 DAK)	10.000.000	
3)	Sub Kegiatan KIE Program Bangga Kencana sesuai kearifan budaya lokal	Kab. Banjarnegara	Jumlah Dokumen KIE Program Bangga Kencana sesuai kearifan budaya lokal	5 Dokumen	10.000.000	Sub Kegiatan KIE Program Bangga Kencana sesuai kearifan budaya lokal	Kab. Banjarnegara	Jumlah Dokumen KIE Program Bangga Kencana sesuai kearifan budaya lokal	-	-	
4)	Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional	Kab. Banjarnegara	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat	200 Laporan	369.000.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional	Kab. Banjarnegara	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program KKBPK	-	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)			Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)			
5)	Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Kab. Banjarnegara	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	200 Laporan	834.000.000	Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Kab. Banjarnegara	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	200 Laporan	300.000.000	
7.2	**Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Kab. Banjarnegara**	**Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk**	**100%**	**2.675.487.880**	**Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Kab. Banjarnegara**	**Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk**	**100%**	**121.772.000**	
1)	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan	Kab. Banjarnegara	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan	15 Laporan	2.111.487.880	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan	Kab. Banjarnegara	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan	-	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)		Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)			Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)		Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)			
2)	Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kab. Banjarnegara	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	180 Orang	564.000.000	Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kab. Banjarnegara	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	2.265 (180 APBD, 2085 BOKB)	121.772.000	
7.3	**Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Banjarnegara**	**Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat**	**100%**	**4.422.252.120**	**Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Banjarnegara**	**Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan Masyarakat**	**100%**	**2.059.528.000**	
			Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	**35,65%**				**Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)**	**35,65%**		
1)	Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan	Kab. Banjarnegara	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana	12 Laporan	42.000.000	Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan	Kab. Banjarnegara	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan	12 Laporan	61.200.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			
2)	Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kab. Banjarnegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	5.795 Orang	4.273.142.120	Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kab. Banjarnegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	5.873 Orang (56 Orang - APBD + 5.817 Orang DAK)	1.933.328.000	
3)	Sub Kegiatan Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Kab. Banjarnegara	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	8 Laporan (6 jasa ayoman + 2 rapat)	25.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Kab. Banjarnegara	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	6 Laporan (4 jasa ayoman + 2 rapat)	20.000.000	
4)	Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Banjarnegara	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	37 Laporan (4 APBD, 33 DAK)	57.110.000	Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Banjarnegara	Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	5 Laporan (4 pertemuan dan 1 lomba faskes swasta)	25.000.000	
5)	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Kab. Banjarnegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Promosi dan Konseling KB	149 Orang	25.000.000	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Kab. Banjarnegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Promosi dan Konseling KB	125 Orang	20.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran					Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran			
7.4	**Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**Kab. Banjarnegara**	**Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**5 Organisasi**	**182.670.000**	**Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**Kab. Banjarnegara**	**Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**5 Organisasi**	**127.500.000**	
1)	Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Kab. Banjarnegara	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	219 Kampung KB (330 Pertemuan)	182.670.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Kab. Banjarnegara	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	-	-	
2)	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung	Kab. Banjarnegara	Jumlah DASHAT di Kampung KB	-	-	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Kab. Banjarnegara	Jumlah DASHAT di Kampung KB	17 Kampung KB	127.500.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Keluarga Berkualitas										
8	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Kab. Banjarnegara**	**Cakupan anggota Kelompok Tribina (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia) yang ber-KB**	**58,65%**	**5.464.000.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Kab. Banjarnegara**	**Cakupan anggota Kelompok Tribina (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia) yang ber-KB**	**58,65%**	**5.335.650.000**	
			Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	**20%**				**Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa**	**20%**		
8.1	**Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Kab. Banjarnegara**	**Jumlah kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan**	**62 Kelompok**	**407.200.000**	**Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Kab. Banjarnegara**	**Jumlah kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan**	**62 Kelompok**	**161.250.000**	
			Jumlah Remaja yang mengikuti Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa	**6.71**				**Jumlah Remaja yang mengikuti Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa**	**704**		
1)	Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan	Kab. Banjarnegara	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi	3 Laporan	25.000.000	Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan	Kab. Banjarnegara	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan	-	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)		Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)			Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)		Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)			
2)	Sub Kegiatan Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Kab. Banjarnegara	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	48 Laporan	37.200.000	Sub Kegiatan Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Kab. Banjarnegara	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)			
3)	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Kab. Banjarnegara	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	25 Unit	300.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Kab. Banjarnegara	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			
4)	Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan	Kab. Banjarnegara	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)		25.000.000	Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan	Kab. Banjarnegara	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan	8 laporan (6 saka +2 genre)	37.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)					Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)		Ekonomi Keluarga (UPPKS)			
5)	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS).	Kab. Banjarnegara	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	3 Laporan	20.000.000	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Banjarnegara	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	3 Laporan	20.000.000	
6)	Penyediaan Biaya Operasional bagi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Kab. Banjarnegara	Jumlah kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang mendapatkan operasional kegiatan	-	-	Penyediaan Biaya Operasional bagi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Kab. Banjarnegara	Jumlah kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang mendapatkan operasional kegiatan	80 Laporan (4 Poktan x 20 kecamatan)	104.250.000	
8.2	**Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan**	**Kab. Banjarnegara**	**Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang berperan serta dalam Pembangunan keluarga**	**784 Organisasi**	**5.056.800.000**	**Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui**	**Kab. Banjarnegara**	**Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang berperan serta dalam Pembangunan keluarga**	**784 Organisasi**	**5.174.400.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					**Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**					
1)	Sub Kegiatan Pemantauan data dan informasi keluarga beresiko stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	Kab. Banjarnegara	Cakupan Pemantauan data dan informasi keluarga beresiko stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	10 Bulan	2.234.400.000	Sub Kegiatan Pemantauan data dan informasi keluarga beresiko stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	Kab. Banjarnegara	Cakupan Pemantauan data dan informasi keluarga beresiko stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	10 Bulan	2.252.000.000	
2)	Sub Kegiatan Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	Kab. Banjarnegara	Jumlah Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita) yang mendapat pendampingan	38.000 Laporan	2.822.400.000	Sub Kegiatan Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	Kab. Banjarnegara	Jumlah Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita) yang mendapat pendampingan	20.000 Laporan	2.822.400.000	

Berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2026, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan yaitu :

1. Evaluasi perkembangan desa berdasarkan IDM untuk dilaksanakan pendampingan dan pengawalan agar peningatan strata desa bisa maksimal;
2. Penyusunan secara bertahap untuk difasilitasi agar nantinya seluruh desa memiliki informasi batas desa geospasial;
3. Pernikahan remaja dan angka kelahiran remaja masihbterjadi sehingga untuk menjadi salah satu prioritas yaitu pendidikan kesehatan reproduksi remaja;
4. Angka stunting atau gagal tumbuh masih terjadi sehingga pendampingan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) kepada keluarga berisiko stunting mulai dari calon pengantin, ibu hamil, pasca melahirkan sampi dengan baduta untuk menjadi perhatian dan makasimal.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan musrenbang kecamatan dan forum konsultasi publik telah disampaikan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui aplikasi SIPD. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 5. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Banjarnegara

No	Pengusul	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Permasalahan	Lokasi
1	2	3	4	5
1.	-	-	-	-
2.				
3.				
4.				

2.6. Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan hasil reses anggota DPRD, melalui aplikasi SIPD telah disampaikan usulan program dan kegiatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 6. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Banjarnegara

No	Pengusul	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Permasalahan	Lokasi
1	2	3	4	5
1.	-	-	-	-
2.				

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Visi pemvangunan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029 yaitu "***Mewujudkan Banjarnegara yang Maju dan Sejahtera***". Dalam upaya mewujudkan misi tersebut dilakukan melalui misi sebagai berikut :

1. **Meningkatkan Infrastruktur dan Pelayanan Publik**

   Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata menjadi salah satu faktor utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas serta kualitas hidup masyarakat sebagai bagian dari pelayanan publik.

2. **Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal**

   Pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan. Oleh karena itu, diperlukan penguat sektor-sektor ekonomi unggulan daerah, menciptakan peluang usaha serta meningkatkan daya saing produk lokal agar mampu berkembang dan bersaing.

3. **Meningkatkan Kualitas dan Akses Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial**

   Pendidikan, Kesehatan dan kesejahteraan sosial merupakan pilar utama dalam pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu imi ini berfokus pada peningkatan mutu layanan, pemerataan aksee, serta penguatan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

4. **Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan;**

   Seiring semakin tertekannya daya dukung dan daya tamping lingkunga krema pertumbuhan penduduk, perubahan iklim, pemanfaatan sumberdaya alam maupun aktivitas perekonomian lainnya maka diperlukan konsep pembangunan yang memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat.

5. **Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Transparan**

   Peningkatan kemandirian desa serta terciptanya keluarga yang berkualitas di Kabupaten Banjarnegara masih dihadapkan dengan

sejumlah permasalahan. Dispermades PPKB berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi dan pelayanan agar pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana bisa tercapai secara optimal.

Tujuan Pemerintah daerah yang akan diwujudkan selama periode 2025-2029 adalah "Terwujudnya Banjarnegara Maju dan Sejahtera". Dalam mencapai tujuan tersebut, sasaran strategis yang diambil sebagai berikut :

1. **Meningkatnya kualitas hidup masyarakat**

   Sasaran strategis "*Meningkatnya kualitas hidup masyarakat*" bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang sehat, sejahtera dan berdaya bagi seluruh lapisan masyarakat. Kualitas hidup yang baik mencakup berbagai aspek seperti akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, pendidikan yang merata, layanan sosial yang baik serta lingkungan yang aman dan kondusif.

2. **Meningkatnya perekonomian daerah yang berdaya saing dan berbasis potensi lokal berkelanjutan**

   Sasaran yang ingin dicapai adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif dan berbasis keunggulan lokal. Sasaran ini diwujudkan melalui berbagai langkah strategis yang berorientasi pada pemanfaatan sumber daya alam, sektor unggulan, serta peningkatan daya saing usaha loal di pasar.

3. **Meningkatnya infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi kesejahteraan masyarakat**

   Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan infrastruktur yang memadai dan berorientasi pada kebutuhan masa depan. Sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas, tetapi juga mempercepat distribusi barang dan jasa, menciptakan peluang investasi, serta meningatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

4. **Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan,**

akuntabel dan partisipatif.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada pelayanan publik, diperlukan sistem tata Kelola yang transparan, akuntabel, dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini dilakukan guna mendukung pembangunan yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

3.1. Tujuan Jangka Menengah Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara

Tujuan Jangka Menengah Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara periode 2025-2029 yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;

   Tujuan ini mendukung tujuan RPJMD ke empat yaitu Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif.

b. Mewujudkan keluarga yang berkualitas dengan pengendalian jumlah penduduk;

   Tujuan ini mendukung tujuan RPJMD ke satu yaitu Meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

c. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

3.2. Sasaran Jangka Menengah Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakanya. Sasaran Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2025 - 2029 sebagai berikut:

a. Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
b. Terwujudnya pengendalian penduduk dan peningkatan kualitas keluarga;
c. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel sebagaimana berikut ini.

Tabel 7. Tujuan dan sasaran jangka menengah Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara beserta indikator kinerja Tahun 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(5)*
1)	Mewujudkan keluarga yang berkualitas dengan pengendalian jumlah penduduk	Terwujudnya pengendalian penduduk dan peningkatan kualitas keluarga	Angka Kelahiran Total	Rata-Rata anak per wanita	1,43
			Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15-19 Tahun	Rata-Rata anak per wanita usia 15-19 Tahun	9,51
2)	Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan desa	Jumlah desa berstatus mandiri	Desa	33
3)	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	BB (76,50)
			Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,10

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara merupakan program prioritas dalam Renstra Tahun 2023-2026. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD selanjutnya dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan.

Pagu tahun anggaran 2026 sebesar Rp19.162.439.973,00 yang terbagi dalam 8 program, 18 kegiatan dan 42 sub kegiatan. Pilihan untuk masing-masing program / kegiatan sebagai berikut :

1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

   Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

   a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang terbagi dalam 5 kegiatan sebagai berikut :

      1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari satu sub kegiatan yaitu :

         a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;

      2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari 2 sub kegiatan :

         a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
         b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

      3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari 2 sub kegiatan :

         a) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
         b) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

      4) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 2 sub kegiatan :

a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

5) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 3 sub kegiatan:
a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
b) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
c) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

b. Program Penataan Desa, terdiri dari satu kegiatan :
1) Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa, terdiri dari satu sub kegiatan :
a) Sub Kegiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa

c. Program Peningkatan Kerjasama Desa, terdiri dari satu kegiatan :
1) Kegiatan Fasilitasi Kerjasama antar Desa, terdiri dari satu sub kegiatan :
a) Sub Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

d. Program Administrasi Pemerintahan Desa
Program administrasi pemerintahan desa terdiri dari 1 kegiatan :
1) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa. Terbagi dalam 8 sub kegiatan sebagai berikut :
a) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa;
b) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa;
c) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa;
d) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa;
e) Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas

Anggota BPD;

f) Sub Kegiatan Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

e. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan :

1) Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan sebagai berikut :

a) Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

b) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;

c) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;

d) Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.

2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengendalian Penduduk, terbagi dalam dua kegiatan

1. Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk, terdiri dari satu sub kegiatan :

a) Sub Kegiatan Advokasi,Sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal di satuan pendidikan jenjang SD/Mi dan SLTP/MTS, serta jalur nor formal dan informal;

2. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari empat sub kegiatan :

a) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga;

b) Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga;

c) Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB;

b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program pembinaan keluarga berencana (KB) terdiri dari tiga kegiatan yang diarahkan pada :

1) Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal

a) Sub Kegiatan Advokasi Program Bangga Kencana kepada Stakeholders dan Mitra Kerja;

b) Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang;

c) Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK;

2) Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)

a) Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP);

3) Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di

Daerah Kabupaten/Kota. Dengan didukung 5 (lima) sub kegiatan sebagai berikut :

a) Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya ;
b) Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
c) Sub Kegiatan Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP;
d) Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya;
e) Sub Kegiatan Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan;

4) Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakata Tingkat Daerah Kabupaten /Kota dalam pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB terdiri dari satu sub kegiatan :
   a) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas;

c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS), terdiri dari 2 Kegiatan :
   1) Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, didukung dengan 5 sub kegiatan :
      a) Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS);
      b) Sub Kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS);
      c) Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))

2) Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, yang terdiri dari dua sub kegiatan:
   a) Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita);
   b) Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita;

BAB V
PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dispermades PPKB sebagai dokumen perencanaan yang disusun sesuai kebutuhan dan sebagai panduan dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk urusan pemberdayaan masyarakat dan desa serta urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana selama jangka waktu Tahun Anggaran 2026. Rancangan Renja ini menjadi pedoman bagi seluruh pimpinan manajamen dan staf di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara guna mendukung pencapaian sasaran.

Rancangan Renja SKPD disusun mengacu pada Renstra Dispermades PPKB Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Banjarnegara 2025-2029. Renja disusun untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai posisi, tugas pokok, fungsi dan peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara dalam pelaksanaan pembangunan, yang nantinya terangkum dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026.

5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahun 2026. Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Dinas harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah. Selain itu, pengelolaan dan optimalisai pemanfaatan sumberdaya yang tersedia sangatlah penting dalam pencapaian target dengan segala keterbatasan sumberdaya yang ada.

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi Jawa Tengah, maupun APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen - dokumen perencanaan yang ada di atasnya.
2. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

1. Melaksanakan efisiensi dan optimalisasi penggunaan sumber daya yang tersedia baik sumberdaya manusia maupun anggaran dalam rangka optialisasi pencapaian target kinerja;
2. Dalam rangka sinergitas perencanaan, koordinasi dengan Perangkat Daerah harus dilaksanakan lebih intensif, agar proses pembangunan yang dilaksanakan berdaya guna dan berhasil guna.
3. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku.

Selanjutnya kami menyadari bahwa Dokumen Renja Dispermades PPKB Tahun 2026 yang kami susun ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu kami mohon saran dan masukan dari berbagai pihak demi penyempurnaan di masa-masa yang akan datang.

Semoga Dokumen Rencana Kerja Awal Tahun 2026 Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara bermanfaat sebagai pedoman kerja dan bisa dilaksanakan dengan baik sebagaimana mestinya.

Banjarnegara, 29 September 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara,

Hendro Cahyono, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681130 199703 1 007

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan yang diatur melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan pembentukan tim penyusun, penelaahan rancangan awal RKPD, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, hingga pada penyempurnaan berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang RKPD. Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, penyusunan Renja Perangkat Daerah juga mengacu pada Renja Kementerian/Lembaga terkait, serta Renja Perangkat Daerah Provinsi terkait. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2. Landasan Hukum

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri `Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang pedoman Penyusunan Renvana Kerja Pemerintah Dearah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
28. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 14);
29. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023- 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 15);

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun dengan maksud untuk:

a. Menjabarkan RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 ke dalam rencana program kegiatan prioritas Tahun 2026 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Renja K/L Tahun 2026 dan Renja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;
b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerapan anggaran berbasis kinerja.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

a. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA-DPA dalam Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2026, yang dalam penyusunannya didahului dengan menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026;
b. Sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Tahun 2026;
c. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun berdasarkan sistematika yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah.

BAB 2 : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dan atau pokok-pokok DPRD.

BAB 3 : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan tahun 2026.

BAB 4 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran RKPD.

BAB 5 : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah meliputi Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah, Urusan Pemerintahan Pilihan Perdagangan , Urusan Pemerintahan Pilihan Perindustrian

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 terdiri dari 14 program, 21 kegiatan, dan 32 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.23.972.424.750

Program/kegiatan/sub kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah yang meliputi:

a. Koperasi, usaha kecil, dan menengah

- Masih belum optimalnya kontribusi UKM dalam struktur perekonomian daerah.
- Terbatasnya kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya koperasi dan UMKM.
- Masih rendahnya kemampuan UMKM untuk mengakses permodalan
- Rendahnya tanggung jawab pengurus dan pengawas sebagian koperasi untuk mematuhi ketentuan sehingga tidak melaksanakan RAT
- Minimnya koperasi yang melaksanakan kaderisasi pengurus, pengawas dan pengelola sehingga peserta yang diikutkan pelatihan orangnya yang pernah ikut pelatihan sebelumnya
- Prosedur pembubaran koperasi terlalu rumit dan membutuhkan jangka waktu yang panjang

b. Perdagangan

- Masih banyaknya pelaku usaha yang belum memiliki ijin usaha Dengan memiliki izin usaha pelaku usaha akan mendapatkan jaminan dari badan hukum yang berwenang baik dari segi bisnis ataupun aturan perundang-undangan selain itu juga akan meningkatkan kredibilitas perusahaan termasuk dalam pelaksanaan ekspor
- Kurangnya pemahaman dan pengenalan terkait nformasi pasar non-tradisional
- Birokrasi yang terlalu panjang

  Peliknya sistem birokrasi yang terlalu panjang maka semakin meperlama waktu yang diperlukan untuk melakukan kegiatan ekspor dan impor dan hal tersebut akan berdampak pada high cost bagi negara yang melakukan transaksi perdagangan. Efeknya, kepercayaan antara penjual dan pembeli akan makin menurun hingga mengurangi manfaat perdagangan internasional
- Kondisi bangunan pasar pada sebagian besar pasar rakyat perlu direvitalisasi agar tercipta pasar yang nyaman , aman dan bersih
- Status kepemilikan tanah di sebagian pasar berstatus milik Desa
- Keterbatasan anggaran untuk pemeliharaan gedung pasar

c. Perindustrian

- Kurangnya minat masyarakat untuk menjadi pelaku IKM, padahal pontensi SDA melimpah
- Tingkat SDM IKM yang masih rendah dan kurangnya penguasaan terkait penggunaan teknologi.
- Kurangnya fasilitasi untuk peningkatan pertumbuhan sector industry
- Menurunnya daya beli konsumen terhadap produk IKM, sehingga berpengaruh terhadap kontinuitas produksi.

Dari 14 program, 21 kegiatan, dan 32 sub kegiatan yang dalam Renja Perangkat Daerah tersebut, program/kegiatan/sub kegiatan yang disetujui untuk dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024 terdiri dari 14 program,21 kegiatan, dan 32 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.24.705.627.376,-

Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024, terjadi beberapa perubahan yang meliputi penambahan atau pengurangan pagu, penghapusan, penambahan atau pengurangan program/kegiatan/sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Perubahan tersebut mengubah rincian dalam Renja Perangkat Daerah menjadi 14 program, 21 kegiatan, dan 34 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.24.629.941997,- Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2024, program/kegiatan/sub kegiatan yang bertambah meliputi :

1.Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

2. Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi legal

Dinamika yang terjadi selama tahun 2024 turut mempengaruhi keberhasilan pencapaian Renja Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2024, tercatat adanya hasil yang baik yang dikarenakan adanya pencapaian maupun pelampauan target maupun yang tidak memenuhi target.

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi 2 sub kegiatan :

1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
2. Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian
3. Program Pemberdayaan dan perlindungan koperasi
4. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro
   - Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
   - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
6. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaktercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

   Indikator Prosentase koperasi aktif , target 39,59 reralisai 39,05% dengan kinerja tercapai 98.64% hal ini disebabkan karena 173 koperasi aktif dari 443 koperasi,

2. Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian

   Indikator Prosentase jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan latihan perkoperasian , target 38,1% realisasi 37,57% dengan capaian 98,60 % hal ini disebabkan karena al ini disebabkan karena adanya 65 koperasi yang mengikuti pelatihan dari 171 koperasi aktif , namun demikian ada penambahan 3 koperasi baru (Koperasi konsumen Mitra Sejahteran dan Koperasi Konsumen Tani Berkah , Koperasi Produsen Abadi Suryajati Sejahtera ,serta satu koperasi beralih menjadi koperasi sekunder ,sehingga jumlah koperasi aktif menjadi 173 dan sebagai pembagi

3.Program Pemberdayaan dan perlindungan koperasi

   Indikator Prosentase pemberdayaan dan perlindungan koperasi, target 38,58% realisasi 79,19% dengan capaian kinerja 98,27% hal ini disebabkan hal ini disebabkan 137 Koperasi dilakukan Pemberdayaan dalam Harkop dari 171 Koperasi aktif , namun demikian ada penambahan 3 koperasi baru (Koperasi konsumen Mitra SEjahteran dan Koperasi Konsumen Tani Berkah , Koperasi Produsen Abadi Suryajati Sejahtera ,serta 1 koperasi beralih menjadi koperasi sekunder ,sehingga jumlah koperasi aktif menjadi 173 dan sebagai pembagi

4.Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro

   a. Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro,

      Indikator Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha mikro, target 50 orang realisasi 0 hal di sebabkan karena alokasi anggaran rencananya digunakan untuk memilih konsultan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) secara mandiri , namun setelah melakukan study tiru di Kabupaten yang PLUTnya sudah berjalan bahwa dalam memilih Konsultan PLUT

mengunakan panitia seleksi, sehingga kegiatan yang sudah teranggarkan tidak dilaksanakan .

5. Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   a. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

      Indikator Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan target 3 orang realisasi 0 hal ini sebabkan karena biaya operasional untuk pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan formal digunakan untuk kepentingan lain yang lebih mendesak.

6. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

   Indikator Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku, targret 88% realisasi 68,33% dengan capaian kinerja 77,68% hal ini disebabkan kurangnya anggaran operasional untuk pelaksanaan tera yang dilakukan secara jemput bola karena kesadaran masyarakat untuk melakukan tera maupun tera ulang masih kurang dari target 3.575 tercapai 2.656

b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

   Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri, Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Program Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok barang penting, Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Peningkatan pendapatan asli daerah), sedangkan realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah… Program pengelolaan sistem informasi industry, Pengembangan Expor, Program Penilaian Kesehatan Koperasi

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Pembinaan yang dilakukan Dinas Perindustrian,Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banjarnegara kepada Pelaku IKM , UKM .
2. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah serta stakhorder lainnya

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka (*jelaskan implikasi dari poin di atas*). Pada tahun perencanaan selanjutnya, perlu diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, diantaranya:

1. Peningkatan Pembinaan terhadap pelaku IKM , UKM maupun koperasi
2. Melakukan tera ulang terhadap Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) di pasar yang ada di Kabupaten Banjarnegara
3. Memfasilitasi UKM / IKM untuk mengikuti pameran dalam rangka peningkatan jaringan pemasaran
4. Rehabilitasi Gedung Pasar / Pemeliharaan Gedung pasar.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2....
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
s.d. Tahun 2024* Kabupaten Banjarnegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Urusan Koperasi Usaha Kecil Menengah									
1.	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Prosentase koperasi aktif	48.21%	39,59%	39,59%	39,05%	98.64	39,05%	39,05%	80.99
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT		131 Koperasi	130 Koperasi	135 Koperasi	103,8	130 Koperasi	130 Koperasi	
	Pelaksanaan proses pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	95 Unit	-	25 Unit	25 Unit	100	75 Unit	75 Unit	78.94

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Program penilaian kesehatan ksp/usp koperasi	Prosentase koperasi (ksp / usp) penkesnya bernilai cukup	19.55%	0	44,1%	60%	136,05	51.20%	51.20%	110
	Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi yang dapat menilai kesehatan KSP/USPnya serta untuk mengetahui kategori sehat atau tidak sehat	30 Unit	0	**30 Koperasi**	**30 Koperasi**	100	120 Koperasi	120 Koperasi	110
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	134 Unit	0	75 Unit	75 Unit	100	60 Unit	130 Unit	97
	Program pendidikan dan latihan perkoperasian	Prosentase pengurus dan karyawan koperasi yang mengikuti pelatihan	7.45%	26,85%	38,10%	37.57%	98.60	38.61%	38.61%	110
	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mengikuti Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	30 Unit	120 Unit	**65 koperasi**	**65 koperasi**	100	85 Koperasi	1	110
	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta kapasitas dan kopentesi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	30 Unit	120 Unit	65 Unit	65 Unit	100	85 Unit	85 Unit	110

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Program Pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Prosentase pemberdayaan dan perlindungan koperasi	8.5%	6,74%	80,58%	79,19%	98.27	34,68%	34.68%	110
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang berpartisipasi aktif dalam peringatan Harkop	30 Unit	120 Unit	**137 koperasi**	**137 koperasi**	100	60 Koperasi	60 Unit	110
	Peningkatan produktivitas , nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, ,penataan manajemen, standarisasi dan restrukturiosasi usaha	Jumlah unit usaha yang produktif ,bernilai tambah,memiliki aksses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen , standarisasi & restrukturisasi usaha	90 Unit	120 Unit	**137 Unit**	**137 Unit**	100	60 Unit	137 Unit	110
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	Meningkatnya wirausaha yang mandiri	89.74%	89,81%	90.01%	90.03%	100,02	'89.66%	89.66%	99.91
	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para pemangku Kepentingan	Prosentase jumlah UMKM yang mendapat fasilitas hak produk	3.39%	2,78%	4.97%	3.39%	68,2	'2.19	3,39%	100

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Pemberdayaan Melalui kemitraan usaha mikro	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	120 Unit	-	140 Unit	140 Unit	100	65 Unit	205 Unit	110
	Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang telah mendapatkan perizinan	40 Unit	-	-	-	-			
	Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro	70 Unit	114 Unit	50 Unit	0	0	20 Unit	134 Unit	110
	Program pengembangan umkm	Peningkatan kapasitas sumberdaya ukm	99.22%	99,20%	99.22%	99.22%	100	99,21%	99.21%	99,98
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yan mengikuti pelatihan	156 Unit		-	-	-	145 Unit	145 Unit	92.9
	Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain Dan Teknologi	Jumlah UMKM yang mengikuti Pelatihan	410 Unit	400 Unit	-	-	-	-	400 Unit	97.56

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah yang difasilitasi	340 Unit	-	-	-	-	145 Unit	145 Unit	42,64
	Urusan Pilihan Perdagangan									
	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Prosentase pasar dalam kondisi baik	24%	10%	16%	16%	100	20%	20%	83.33
	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Prosentase jumlah pasar yang direhab	4%	4%	4%	4%	100	4%	4%	100
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	10 Unit	7 Unit	5 Unit	12 Unit	240	1 Unit	12 Unit	110
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	23 Unit	23 Unit	23 Unit	23 Unit	100	23 Unit	23 Unit	100
	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase jumlah Pedagang kaki lima yang terbina	100%	80%	80%	80%	100	100%	80%	80
	Kegiatan Pembinaan terhadap pengeloal sarana distribusi perdagangan masayarakt di wilayah kerjanya	Jumlah pembinaan terhadap pedagang kaki lima	60 PKL	75 PKL	36 PKL	36 PKL	100	50 PKL	161 PKL	110
		Persentase Jumlah Pengelola Pasar yang terbina	28%	-	-	-	-	-	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Pembinaan dan Pengendalian pengeloa sarana distribusi perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	2 Dokumen	1 Dokumen	100
	Pemberdayaan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan n	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase jumlah komoditi barang kebutuhan pokok dan barang penting yang tersedia	100%	80%	80%	80%	100	100%	80%	80
	Kegiatan Pengendalian harga dan stock barang kebutuhan pokok dan penting ditimgkat pasar Kabupaten / Kota	Jumlah komoditi barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terpantau	37 Jenis	31 Jenis	37 Jenis	37 Jenis	100	41 Jenis	41 Jenis	100
	Pemantauan harga dan stock barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
		pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota								
	Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan yang dilksanakan	12 kali	3 kali	12 kali	12 kali	100	-	12 kali	100
	Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	12 Laporan	1 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	-	12 laporan	100
	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	94%	79,51%	88%	68,33%	77,64	92%	92%	97.87
	Kegiatan Pelaksanaan metrologi legal berupa tera. Tera ulang , dan pengawasan	Prosentase alat UTTP yang ditera ,tera ulang dan pengawasan	94%	79,51%	88%	68,33%	77,64	92%	12 laporan	100

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Pelaksanaan metrologi legal berupa , tera , tera ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	1000 UTTP	2.783. UTTP	3.575 UTTP	**2656 UTTP**	74,29	3575 UTTP		
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang dibina	300 Orang	-	300 orang	300 orang	100	300 orang	300 orang	100
	Program Penggunaan dan Pemasaran produk dalam negeri	Persentase penyelenggaraan promosi perdagangan	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
	Kegiatan Pelaksanaan promosi , pemasaran, peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Jumlah UKM yang melaksanakan promosi , kemitraan pemasaran dan penggunaan produk dalam negeri di tingkat Kabupaten/Kota	100 UKM	100 UKM	**25 UKM**	**25 UKM**	100	100 UKM	100 UKM	100
	Sub Kegiatan Pelaksanaan promosi , pemasaran, peningkatan penggunaan produk dalam negeri di Tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi promosi penggunaan produk dalam negeri di Tingkat Kabupaten Kota	50 UKM	100 UKM	**100 UKM**	**100 UKM**	100	50 UKM	50 UKM	100

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Sub Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, mark,etpalve , perhotelan dan jasa akomodasi	100	-	-	-	-	-	-	-
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Peningkatan pendapatan asli daerah	5%	5%	5%	5%	100	5%	5%	100
	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Pendapatan Retribusi Pasar	5.9M	5.429.720 353	5.9M	5.968.377.780	101,15	5.9M	5.900.000.000	100
	Kegiatan Analisa dan pengembangan retribusi daerah , serta penyusunan kenijakan retribusi daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	Program Pengembangan Eksport	Persentase tingkat pertumbuhan nilai ekspor bersih perdagangan	5%	-	5%	5,05%	101	5%	5%	100%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Kegiatan Penyelengggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk eksport unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Derah Kabupaten / Kota	Jumlah UKM yang mampu mengembangkan usaha ekspor unggulan yang terdapat dalam satu (1) Daerah Kabupaten/Kota	25 UKM	-	25 UKM	25 UKM	100	30 UKM	30 UKM	120
	Peningkatan Citra Produk Ekport	Jumlah Produk Unggulan Eksport Derah yang disusun materi promosi	25 Produk	-	25 Produk	25 Produk	100	30 Produk	25 Produk	100
	Urusan Perindustrian									
	Penunjang Uruasan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Prosentase penyusunan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	12 Dokumen	100
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase penyusunan administrasi kepegawaian daerah	100%	-	100%	0	0	100%	-	-
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang	-	100%	0	0	7 orang	-	-
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	100	2 paket	2 paket	100
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang yang disediakan	10 paket	10 paket	10 paket	10 paket	100	10 paket	10 paket	100
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	100	3 paket	3 paket	100

100

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase tercukupinya barang milik pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 paket	-	-	-	-	10 Paket	10 Paket	66,6
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	13 Unit	10 Unit	13 Unit	13 Unit	100	40 Unit	13 Unit	100
	Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersediakan	1 Unit	-	1 Unit	1 Unit	100	-	1 Unit	100
	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung kantor bangunan lainnya yang disediakan	1	-	18 Unit	18 Unit	100	-	18 Unit	100

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase tercukupinya barang milik pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusab pemerintah daerah	Prosentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Kendaraan	10 Kendaraan	10 Kendaraan	10 Kendaraan	100	10 Kendaraan	10 Kendaraan	100

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Gedung	1 Gedung	1 Gedung	1 Gedung	100	1 Gedung	1 Gedung	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	25 Unit	20 Unit	20 Unit	100	20 Unit	20 Unit	80
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase penyusunan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	12 Dokumen	19 Dokumen	-	-	-	-	19 Dokumen	110
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21 Laporan	25 Dokumen	21 laporan	26 laporan	123,8	21 Laporan	21 Laporan	100

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Prosentase meningkatnya kemampuan sumber daya manusia wirausaha dan tenaga kerja industri kecil menengah tentang IPTEK sistem produksi	4.40%	3.13	4.07%	4.07%	100	4.2%	4.2%	95,45464
	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang dibina melalui Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kota	107 IKM	158 IKM	275 IKM	275 IKM	100	31 IKM	464 IKM	110
	Koordinasi , Sinkronisasi dan pelaksanaan Kebijakan percepatan pengembangan,penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Koordinasi , Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	-	1 Dokumen	100
	Koordinasi , Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dolumen	100
	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1000.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Program pegendalian izin usaha Industrri	Prosentase Peningkatan kemampuan industri kecil menengah tentang penguasaan dan pemanfaatan alih teknologi	0.66%	0.15%	-	-	-	0.53%	0.53%	80.30
	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi izin industri kecil dan menengah	155 Rekomendasi	35 rekomendasi	-	-	-	124 Rekomendasi	159 Rekomemdasi	110
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Berusaha Sektor perindustrian yang menjkadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan PerizinanBerusaha Industri dengan skala usaha industri kecil dan industri menengah yang berlokasi di satu Kabupaten/Kota sepanjang merupakan penanaman modal Dalam Negeri dan bidang usaha selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	3 dokumen	-	-	-	1 dokumen	1 Dokumen	100

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Program Pengelolaam Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya informasi secara lengkap dan terkini	95	95	95	100	105,26	95	95	100
	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	Jumlah informasi industri untuk IUI,IPUI,IUKI dan IPKI	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	1 Paket	100
	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten / Kota melalui SIINas	1 Dokumen	1 paket	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan pelayanannya, Perangkat Daerah mengampu 10 Indikator. Indikator tersebut merupakan indikator kinerja kunci dalam Laporan Pemerintah daerah dan tidak masuk dalan Renstra Perangkat Daerah , sehingga data yang tersaji merupakan realisai pelayanan Disperindagkop UKM Kabupaten Banjarnegara.

Dalam rangka pelaksanaan pelayanan ada faktor-faktor penghambat tersebut, telah dilakukan upaya-upaya yang meliputi:

1. Pembinaan dengan peningkatan kapasitas Pelaku Usaha Industri Kecil Menengah (IKM) maupun Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
2. Memfasilitasi UMKM maupun IKM dalam pameran untuk peningkatan jaringan pemasaran
3. Rehabilitasi / Pemeliharaan Gedung pasar

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK LPPD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	-	v	PM	PM	PM	PM	36,25	11.56	NA	NA	
2.	Meningjatnya Usaha Kecil yang menjadi Wirausaha	-	v	PM	PM	PM	PM	98.34	91.56	NA	NA	
3.	Bertambahnya jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten	-	v	PM	PM	PM	PM	0.20	41,67	NA	NA	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK LPPD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.	Persentase Pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk tutrunan indikator Pembangunan dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional yang ditetapkan dalam RIPIK	-	v	PM	PM	PM	PM	42,97	105,2	NA	NA	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK LPPD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	(Rencana Pembangunan Industri Kabupaten)	-	v	PM	PM	PM	PM			NA	NA	
5.	Prosentase Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah yang dikeluarkan	-	v	PM	PM	PM	PM	100	-	NA	NA	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK LPPD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
6.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	-	v	PM	PM	PM	PM	0	-	NA	NA	Surat Keterangan yang menyatakan bahwa di Banjarnegara tidak ada yang mengajukan perluasan

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK LPPD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Indusri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabipaten	-	v	PM	PM	PM	PM	0	-	NA	NA	Industri sehingga tidak dilaksanakan pemantauan

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK LPPD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
8.	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	-	v	PM	PM	PM	PM	100	105	NA	NA	
9.	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	-	v	PM	PM	PM	PM	100	100	NA	NA	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK LPPD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
10	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	-	v	PM	PM	PM	PM	71,59	68,3	NA	NA	

*) Kolom 3 diisi berdasarkan IKK outcome dalam lampiran Permendagri 18/2020

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Perindustrian Perdagangan ,Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banjarnegara dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan urusan pemerintahan dalam 3 urusan, yaitu Urusab Pemerintahan Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan berdasarkan hasil evaluasi, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk tahun 2024 mencakup 3 urusan tersebut. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah diantaranya adalah:

a. Koperasi, usaha kecil, dan menengah
    1. Kualitas SDM KUMKM yang rendah, dengan latar belakang pendidikan dan pengetahuan yang sangat terbatas dan kurang berpengalaman;
    2. Pengelolaan Manajemen KUMKM yang lemah ;
    3. Produktivitas usaha rendah;
    4. Akses terhadap usaha produktif lemah yaitu : Informasi, tekhnologi, pasar dan pembiayaan/modal;.
    5. Keterbatasan jumlah aparatur serta kurangnya Kompetensi dari aparatur Pembina KUMKM;
    6. Rendahmya jiwa dan semangat kewirausahaan;
    7. Belum tersedia data base UMKM;
b. Perdagangan
    1. Belum optimalnya perkembangan sektor perdagangan.
    2. Masih banyaknya lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang belum terbina.
    3. Penataan Sistem dan Sarana Distribusi Perdagangan
    4. Efektivitas Pengawasan Barang
    5. Pengaturan E-Commerce
    6. Tantangan dalam Peningkatan Ekspor
    7. Diversifikasi Produk Ekspor
    8. Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor Perdagangan
    9. Integrasi Data mengenai Perdagangan

c. Perindustrian

1. Pertumbuhan industri kecil dan menengah (IKM) yang lambat dan daya saing IKM yang masih rendah.
2. Rendahnya omset penjualan produk IKM disebabkan promosi dan pemasaran produk IKM dengan memanfaatkan teknologi informasi masih kurang, serta terbatasnya fasilitasi IKM mengikuti kegiatan promosi dan pameran produk karena keterbatasan anggaran.
3. Masih banyaknya pelaku usaha yang belum memiliki kemampuan tentang penguasaan dan pemanfatan alih teknologi.
4. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membeli produk IKM.

Permasalahan tersebut, jika tidak diselesaikan dapat menjadi *constraint* dalam pencapaian visi dan misi Bupati maupun capaian indikator lainnya. Beberapa dampak dari adanya permasalahan dan hambatan tersebut meliputi:

1. Target Kinerja pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang diampu tidak tercapai
2. Kurang Daya saing Produk UKM , IKM dan serta koperasi sehingga pendapatannya berkurang

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi, peningkatan kualitas birokrasi, dan meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan pengguna layanan akan meningkatkan kebutuhan akan adanya penyediaan produk layanan yang semakin baik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi-inovasi dalam menunjang peningkatan pelayanan publik secara kontinyu. Beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, yaitu:

a. Tantangan

- Urusan Koperasi UKM

1. Koperasi dan UMKM berada di lingkungan yang terus berubah. Para pelaku KUMKM di Kabupaten Banjarnegara harus mampu mengelola perubahan itu untuk eksistensi dalam jangka panjang;
2. Peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM, sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar dalam rangka untuk mendukung kemandirian perekonomian nasional;

3. Persoalan teknis seperti Sumber Daya Manusia, pembiayaan, pemasaran, teknologi produksi, dan kelembagaan KUMKM sangat tergantung pada kemampuan manajemen dalam membaca dan menyikapi perubahan variabel eksternal startegis yang diduga;
4. Persaingan usaha yang makin ketat dan kompetitif, sehingga dibutuhkan kreatifitas, inovasi, dan pengembangan diversifikasi produk.

❖ Urusan Perindustrian

1. Keterbatasan SDM pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Banjarnegara, sehingga diperlukan pola pembinaan berjenjang, bertahap dan berkelanjutan;
2. Keterbatasan peralatan dan bahan baku dari Industri Kecil dan Menengah;
3. Keterbatasan narasumber yang dapat memacu iklim pertumbuhan ekonomi terutama bagi Industri Kecil Menengah;
4. Kurangnya minat masyarakat terhadap produk IKM sehingga membuat perputaran modal lambat dan kesempatan IKM memperbaiki produk sedikit;
5. Sulitnya hasil produk IKM untuk dipasarkan melalui pameran atau melalui penjualan dengan system kemitraan, sehingga diperlukan inovasi untuk memasarkan produk dengan memanfaatkan teknologi informatika;
6. Terbatasnya Akses IKM untuk mencari bahan penunjang produksi dan mencari informasi terkait pengembangan produk sehingga diperlukan pemahaman pemanfaatan teknologi dan perbaikan akses transportasi;

❖ Urusan Perdagangan

- Pelaku usaha kurang memahami regulasi tentang import dan eksport yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Persaingan pemasaran produk di era pasar bebas
- Pemanfaatan Gudang SRG yang belum optimal karena faktor

manajemen dan masih banyak petani yang belum mau menyimpan padi/memanfaatkan gudang tersebut.

- Kurangnya koordinasi antara provinsi dan daerah.
- Sebagian besar kondisi bangunan pasar kurang representative dimana setiap tahunnya terjadi penurunan kualitas bangunan serta kurang tertatanya pasar berakibat pada kekurangnyamanan aktivitas pasar;
- Belum memadainya pengelola pasar dalam pengurusan pasar serta belum tersedianya perangkat komputer/jaringan WiFi di masing-masing pasar sehingga berakibat kurang maksimalnya pelayanan pasar.
- Prilaku pedagang pasar yang masih kurang memahami peraturan/regulasi dan K3 (Keselamatan, Kesehatan dan Kenyamanan), yang berakibat pada minimnya kedisiplinan para pedagang dalam melaksanakan kewajiban dan menata pasar ;
- Pertumbuhan ekonomi yang sangat ceoat (seperti tumbuhnya pasar swalayan sampai ke desa-desa dan digitalisasi jual beli) belum bisa diimbangi dengan dinamika di pasar rakyat

b. Peluang

❖ Urusan Koperasi UKM

1. Masih banyaknya sektor usaha yang bisa digarap oleh Koperasi seperti (sektor pertanian, sektor industri) dan UMKM ;
2. Masih banyaknya sektor usaha yang bisa digarap oleh UMKM.
3. Potensi sumber daya alam dan SDM bagi KUKM belum terserap secara optimal;
4. Banyaknya promosi melalui pameran bagi KUKM;
5. Terjalinnya kemitraan dalam rangka penguatan permodalan antara BUMN dan KUKM

❖ Urusan Perindustrian

1. Keterbatasan SDM IKM merupakan peluang bagi Bidang Perindustrian untuk membina IKM secara bertahap, berjenjang dan berkelanjutan;

2. Kerjasama dengan berbagai pihak (Swasta, Akademisi) untuk membina IKM terutama bantuan alat produksi dan bahan baku;
3. Pemanfaatan bahan baku lokal dan limbah untuk produk IKM yang berdaya saing;
4. Tingginya keinginan IKM untuk mengembangkan produk dan memasarkan produk.
5.

❖ Urusan Perdagangan

1. Banyaknya promosi melalui pameran bagi KUKM
2. Banyaknya potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia bagi pengembangan KUKM yang belum tergarap secara optimal.
3. Potensi investasi yang belum terekspose melalui kegiatan Dinas Perindagkop UKM.
4. Kemitraan dengan BUMN untuk penguatan modal bagi IKM,UKM serta Koperasi
5. Tingginya keinginan masyarakat untuk berusaha
6. Merencanakan dan mengudulkan anggaran / proposal untuk kegiatan pemeliharaan / rehabilitasi serta pemenuhan sarana prasarana bangunan pasar
7. Melaksanakan pembinaan kepada pengelola pasar dan pedagang sesuai tugas pokok dan fungsi serta meningkatkan SDM pengelola pasar melalui diklat
8. Mendorong pelaksanaan program digitalisasi di pasar rakyat.

Berdasarkan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan tersebut, dapat diinventarisasi beberapa isu strategis. Inventarisasi isu-isu strategis tahun 2026 didapatkan dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal Kabupaten Banjarnegara sampai dengan tahun 2026. Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan pembangunan. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2026, sebagai berikut:

1. Urusan Koperasi dan UKM.
   a. Kualitas SDM KUMKM yang rendah, dengan latar belakang pendidikan dan pengetahuan yang sangat terbatas dan kurang berpengalaman;
   b. Pengelolaan manajemen KUMKM yang lemah;
   c. Produktivitas usaha rendah;
   d. Akses terhadap sumber daya produktif lemah yaitu : informasi, teknologi, pasar dan pembiayaan / modal;
   e. Keterbatasan jumlah aparatur serta kurangnya kompetensi dari aparatur Pembina KUMKM;
   f. Rendahnya jiwa dan semangat kewirausahaan.

2. Urusan Perindustrian
   a. Diberlakukannya pasar bebas menuntut produk lebih bardaya saing
   b. Membuat data yang valid mengenai jumlah IKM di Kabupaten Banjarnegara memerlukan biaya yang tidak sedikit dan SDM yang bisa mengelola data;
   c. Terbatasnya SDM Apatur Sipil Negara sehingga pembinaan IKM kurang maksimal;
   d. Terbatasnya anggaran baik dari APBD Kabupaten maupun dari APBD Propinsi untuk pembinaan IKM sehingga tidak semua IKM terfasilitasi;
   e. Minimnya akses informasi maupun kegiatan dari pemerintah pusat dalam hal pembinaan IKM di Banjarnegara

3. Urusan Perdagangan
   a. Sebagian besar pasar tradisional belum memenuhi standar kesehatan dan kenyamanan pasar.
   b. Masih banyaknya lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang belum tertata.
   c. Pelaksanaan metrologi legal di daerah masih terdapat banyak kendala, antara keterbatasan SDM bidang kemetrologian yang kompeten, belum tersedianya sarana prasarana gedung dan peralatan.
   d. Kondisi bangunan pasar yang ada di Banjarnegara kurang memadai /representative
   e. Perilaku pedagang pasar yang masih kuran memperhatikan K3 (Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban Pasar

f. Belum memadaianya Sumber Daya Manusia pengelola pasar
g. Belum adanya regulasi lengkap yang mengatur pengelolaan pasar
h. Tumbuhnya toko swalayan dengan cepat yang bisa mematikan pasar rakyat
i. Database pedagangan pasar belum akurat
j. Belum adanya fasilitas laptop/computer dan jaringan wi-fi disetiap pasar untuk mendukung kegiatan pengelolaan pasar

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Tahun merupakan pelaksanaan Tahun awal RPD Tahun 2023 - 2026 , prioritas arah kebijakan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2025 meliputi:

1. Peningkatan Kapasitas bagi Pengelola Koperasi, Pelaku UMKM, Pelaku Industri melalui Pelatihan , magang untuk meningkatkan daya saing produk
2. Peningkatan Peningkatan Jaringan Pemasaran melalui fasilitasi Pelaku UMKM / IKM dalam pameran
3. Rehabilitasi / Pemeliharaan gedung pasar
4. Digitalisasi data Pelaku Usaha

Tabel 2
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 Kabupaten Banjarnegara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota**	Kab.Banjarnegara		100%	**15.480.988.550,**	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota**	Kab.Banjarnegara		100%	**15.480.988.550**	
	Kegiatan Perenca naan, Penganggar an, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Banjarnegara		100%	20.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggar an, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Banjarnegara		100%	20.000	
	Sub Kegiatan Penyusunan Doku men Perencanaan PerangkatDaerah	Kab.Banjarnegara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		-	Sub Kegiatan Penyusunan Doku men Perencanaan PerangkatDaerah	Kab.Banjarnegara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Banjarnegara	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Dokumen	30.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Banjarnegara	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Dokumen	30.000	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Banjarnegara	**Prosentase penyusunan administrasi keuangan perangkat daerah**	100%	**10.946.825.525**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kab.Banjarnegara	**Prosentase penyusunan administrasi keuangan perangkat daerah**	100%	**10.946.825.525**	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Banjarnegara	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	10.863.588.025	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Banjarnegara	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	10.863.588.025	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verfikasi Keuang an SKPD	Kab.Banjarnegara	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SK	12 Dokumen	83.2375	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verfikasi Keuang an SKPD	Kab.Banjarnegara	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SK	12 Dokumen	83.2375	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kegiatan Administrasi Kepegawai an Perangkat Daerah	Kab.Banjarnegara	**Prosentase penyusunan administrasi kepegawaian daerah**	100%	**35.100,5**	**Kegiatan Administrasi Kepegawai an Perangkat Daerah**	Kab.Banjarnegara	**Prosentase penyusunan administrasi kepegawaian daerah**	100%	**35.100,5**	
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab.Banjarnegara	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 orang	35.100.5	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab.Banjarnegara	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 orang	35.100.5	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Banjarnegara	**Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**707.496,7**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kab.Banjarnegara	**Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**707.496,7**	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Banjarnegara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	27.600	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Banjarnegara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	27.600	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab.Banjarnegara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	10 paket	581.396,7	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab.Banjarnegara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	10 paket	581.396,7	
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab.Banjarnegara	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang disediakan	3 paket	98.500	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab.Banjarnegara	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang disediakan	3 paket	98.500	
	Prosentase tercukupinya barang milik pemerintah daerah	Kab.Banjarnegara	Prosentase tercukupinya barang milik pemerintah daerah	100%	457.616	Prosentase tercukupinya barang milik pemerintah daerah	Kab.Banjarnegara	Prosentase tercukupinya barang milik pemerintah daerah	100%	457.616	
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Kab.Banjarnegara	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		212.616	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Kab.Banjarnegara	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		212.616	
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Banjarnegara	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan		245.000	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Banjarnegara	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan		245.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Banjarnegara	**Prosentase tercukupinya jasa prenunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**2.912.289.825**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab.Banjarnegara	**Prosentase tercukupinya jasa prenunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**2.912.289.825**	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Banjarnegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	1.100,67	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Banjarnegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	1.100,67	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Banjarnegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang di sediakan	12 laporan	1.811.619.825	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Banjarnegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang di sediakan	12 laporan	1.811.619.825	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusab Pemerintah Daerah	Kab.Banjarnegara	Prosentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	401.660	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusab Pemerintah Daerah	Kab.Banjarnegara	Prosentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	401.660	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab.Banjarnegara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayar pajaknya	10 Kendaraan	330.660.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab.Banjarnegara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayar pajaknya	10 Kendaraan	330.660	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab.Banjarnegara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lain nya yang dipelihara / rehabilitasi pelihara/ Direhabilitasi	1 Gedung	50.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab.Banjarnegara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lain nya yang dipelihara / rehabilitasi pelihara/ Direhabilitasi	1 Gedung	50.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kab Banjarnegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	20 Kendaraan	21.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kab Banjarnegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	20 Kendaraan	21.000	
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Kab.Banjarnegara	**Prosentase meningkatnya kemampuan sumber daya manusia wirausaha dan tenaga kerja industri kecil menengah ten tang IPTEK sis tem produksi**	**4,40%**	**125.000.**	**Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri**	Kab.Banjarnegara	**Prosentase meningkatnya kemampuan sumber daya manusia wirausaha dan tenaga kerja industri kecil menengah ten tang IPTEK sis tem produksi**	**4,40%**	**125.000.**	
	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kab.Banjarnegara	*Jumlah IKM yang dibina melalui Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kota*	107	125.000.	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kab.Banjarnegara	*Jumlah IKM yang dibina melalui Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kota*	107	125.000.	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi , Sinkronisasi dan pelaksanaan Kebijakan percepatan pengembangan, penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kab.Banjarnegara	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri*	1 Dokumen	35.000	Koordinasi , Sinkronisasi dan pelaksanaan Kebijakan percepatan pengembangan, penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kab.Banjarnegara	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri*	1 Dokumen	35.000	
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab.Banjarnegara	Jumlah Doku men Hasil Koor dinasi, Sinkroni sasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Pra sarana Industri	1 Dokumen	50.000	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab.Banjarnegara	Jumlah Doku men Hasil Koor dinasi, Sinkroni sasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Pra sarana Industri	1 Dokumen	50.000	
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan	Kab. Banjarnegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksana an Pemberdaya an	1 Dokumen	40.000	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan	Kab. Banjarnegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksana an Pemberdaya an	1 Dokumen	40.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Industri dan Peran Serta Masyarakat			Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Industri dan Peran Serta Masyarakat			
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Kab.Banjarnegara	Prosentase peningkatan kemampuan industri kecil menengah tentang penguasaan dan peman faatan alih teknologi	**0,66%**	**90.000**	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Kab.Banjarnegara	Prosentase peningkatan kemampuan industri kecil menengah tentang penguasaan dan peman faatan alih teknologi	**0,66%**	**90.000**	
	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan	Kab.Banjarnegara	Jumlah rekomendasi izin industri kecil dan menengah	155 rekomendasi	90.000	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan	Kab.Banjarnegara	Jumlah rekomendasi izin industri kecil dan menengah	155 rekomendasi	90.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawas an Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota					Industri (IUKI) / Kota dan Izin Perluasan Kawas an Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten					
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penga wasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewe nangan Kabupa ten/ Kota	Kab.B najar negar a	Jumlah Doku men Hasil Koordinasi dan Sinkro nisasi Peng awasan Perizinan di Bidang In dustri dalam lingkup perizinan usaha industri Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawa san Industri dan Perizinan Perluasan Kawa san Industri Kewenangan Ka bupaten/Kota	1 Dokume n	90.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penga wasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewe nangan Kabupa ten/ Kota	Kab.B najarn egara	Jumlah Doku men Hasil Koordinasi dan Sinkro nisasi Peng awasan Perizinan di Bidang In dustri dalam lingkup perizinan usaha industri Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawa san Industri dan Perizinan Perluasan Kawa san Industri Kewenangan Ka bupaten/Kota	1 Dokume n	90.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional		**Tersedianya informasi secara lengkap dan terkini**	**95%**	**30.000**	**Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional**		**Tersedianya informasi secara lengkap dan terkini**	**95%**	**30.000**	
	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Tersedianya informasi industri untuk IUI,IUI,IUKI dan IPKI	1 paket	30.000	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Tersedianya informasi industri untuk IUI,IUI,IUKI dan IPKI	1 paket	30.000	
	Sub Kegiatan Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas		Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 dokumen	30.000	Sub Kegiatan Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas		Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 dokumen	30.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Pening katan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab.Banjarnegara	Prosentase Pasar dalam kondisi Baik	**24%**	40.941.200	Program Pening katan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab.Banjarnegara	Prosentase Pasar dalam kondisi Baik	**24%**	40.941.200	
	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab.Banjarnegara	**Prosentase jumlah pasar yang direhab**	**4%**	40.630.000	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab.Banjarnegara	**Prosentase jumlah pasar yang direhab**	**4%**	40.630.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Banjarnegara	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	23 Pasar	40.130.000	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	23 Pasar	40.130.000	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Banjarnegara	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	23 Fasilitasi	500.000.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Banjarnegara	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	23 Fasilitasi	500.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab.Banjarnegara	**Prosentase Jumlah Pedagang Kaki Lima yang terbina**			**Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**	Kab.Banjarnegara	**Prosentase Jumlah Pedagang Kaki Lima yang terbina**			
	Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Kab.Banjarnegara	Jumlah pembinaan terhadap pedagang kaki lima	100 pkl	311.200.	Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Kab.Banjarnegara	Jumlah pembinaan terhadap pedagang kaki lima	100 pkl	311.200.	
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab.Banjarnegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 dokumen	161.200	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab.Banjarnegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 dokumen	161.200	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab.Banjarnegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian ke pada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	125 Orang	150.000	Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab.Banjarnegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian ke pada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	125 Orang	150.000	
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	**Kab.Banjarnegara**	**Persentase jum lah komoditi barang kebutu han pokok dan barang penting yang tersedia**	**100%**	**74.000**	**Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting**	**Kab.Banjarnegara**	**Persentase jum lah komoditi barang kebutu han pokok dan barang penting yang tersedia**	**100%**	**74.000**	
	Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutu han Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Banjarnegara	Jumlah komoditi barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terpantau	37 Jenis	65.000	Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutu han Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Banjarnegara	Jumlah komoditi barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terpantau	37 Jenis	65.000	
	Sub Kegiatan Pemantauan	Kab.Banjarnegara	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok	12 laporan	65.000	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang	Kab.Banjarnegara	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan	12 laporan	65.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1(Satu) Kabupaten/ Kota			Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1(Satu) Kabupaten/ Kota			
	Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Banjarnegara			9.000	Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Banjarnegara			9.000	
	Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kab.Banjarnegara	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida	24 laporan	9.000	Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kab.Banjarnegara	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida	24 laporan	9.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%					Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%			
	Program Pengembangan Ekspor	Kab.Banjarnegara	**Prosentase tingkat pertumbuhan nilai eksport bersih perdagangan**	5%	**140.000**	**Program Pengembangan Ekspor**	Kab.Banjarnegara	**Prosentase tingkat pertumbuhan nilai eksport bersih perdagangan**	5%	**140.000**	
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu)Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Banjarnegara	Jumlah UKM yang mampu mengembangkan usaha ekspor unggulan yang terdapat dalam satu (1) Daerah Kabupaten/Kota	30 UKM	140.000	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu)Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Banjarnegara	Jumlah UKM yang mampu mengembangkan usaha ekspor unggulan yang terdapat dalam satu (1) Daerah Kabupaten/Kota	30 UKM	140.000	
	Peningkatan citra produk ekspor	Kab.Banjarnegara	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	25 produk	140.000.	Peningkatan citra produk ekspor	Kab.Banjarnegara	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	25 produk	140.000.	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	Kab.Banjarnegara	**Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengka pannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku**	94%	85.000	**Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen**	Kab.Banjarnegara	**Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengka pannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku**	94%	85.000	
	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera,Tera Ulang dan Pengawasan	Kab.Banjarnegara	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku		85.000	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera,Tera Ulang dan Pengawasan	Kab.Banjarnegara	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku		85.000	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kab.Banjarnegara	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengka pan Ditera Ulang	3500 UTTP	70.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kab.Banjarnegara	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengka pan Ditera Ulang	3500 UTTP	70.000	
	Sub Kegiatan Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal	Kab.Banjarnegara	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	300 Orang	15.000	Sub Kegiatan Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal	Kab.Banjarnegara	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	300 Orang	15.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Kab.Banjarnegara	**Prosentase penyelenggara an promosi perdagangan**	100%	685.000	**Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri**	Kab.Banjarnegara	**Prosentase penyelenggara an promosi perdagangan**	100%	685.000	
	Kegiatan Pelaksa naan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Kab.Banjarnegara	Jumlah UKM yang melaksanakan promosi , kemitraan pemasaran dan penggunaan produk dalam negeri di tingkat Kabupaten/Kota	100 UKM	685.000.000,00	Kegiatan Pelaksa naan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Kab.Banjarnegara	Jumlah UKM yang melaksanakan promosi , kemitraan pemasaran dan penggunaan produk dalam negeri di tingkat Kabupaten/Kota	100 UKM	685.000.000,00	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab.Banjarnegara	Jumlah UMKM yang Melaksana kan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupa ten /Kota	100 UKM	685.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab.Banjarnegara	Jumlah UMKM yang Melaksana kan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupa ten /Kota	100 UKM	685.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sub Kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Peng gunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Market place, Perhotelan dan Jasa Akomodasi			Sub Kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Peng gunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Market place, Perhotelan dan Jasa Akomodasi			
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab.Banjarnegara	**Peningkatan pendapatan asli daerah**	**5%**	725.000	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota**	Kab.Banjarnegara	**Peningkatan pendapatan asli daerah**	**5%**	725.000	
	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah	Kab.Banjarnegara	Jumlah Pendapatan Retribusi Pasar	5.900.000.000	**725.000**	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah	Kab.Banjarnegara	Jumlah Pendapatan Retribusi Pasar	5.900.000.000	**725.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sub Kegiatan Analisa Pengembangan Retribusi Daerah serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Kab.Banjarnegara	Jumlah Dokumen Hasil Analilsis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	700.000	Sub Kegiatan Analisa Pengembangan Retribusi Daerah serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Kab.Banjarnegara	Jumlah Dokumen Hasil Analilsis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	700.000	
	Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi	Kab.Banjarnegara	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	25.000	Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi	Kab.Banjarnegara	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	25.000	
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Kab.Banjarnegara	**Prosentase Koperasi Aktif**	39,05%	**35.000.000**	**Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**	Kab.Banjarnegara	**Prosentase Koperasi Aktif**	39,05%	**35.000.000**	
	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi,	Kab.Banjarnegara	Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT	130 Koperasi	35.000.000,00	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan	Kab.Banjarnegara	Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT	130 Koperasi	35.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota					Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota					
	Pelaksanaan proses pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya daerah kabupaten/kota	Kab.Banjarnegara	Jumlah koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	60 koperasi	35.000.000,00	Pelaksanaan proses pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya daerah kabupaten/kota	Kab.Banjarnegara	Jumlah koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	60 koperasi	35.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Penilai an Kesehatan KSP/USP Koperasi	Kab.Ba njarneg ara	**Prosentase Koperasi yang bisa menilai kesehatanya**	51,2 %	**70.000**	**Program Penilai an Kesehatan KSP/USP Koperasi**	Kab.B anjarn egara	**Prosentase Koperasi yang bisa menilai kesehatanya**	51,2 %	**70.000**	
	Kegiatan Penilai an Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan pinjam koperasi yang wilayah keangota annya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	Kab.Ba njarneg ara	Jumlah Koperasi yang dapat menilai kesehatan KSP/USPnya serta untuk mengetahui kategori sehat atau tidak sehat	120 Koperas i	70.000	Kegiatan Penilai an Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan pinjam koperasi yang wilayah keangota annya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	Kab.B anjarn egara	Jumlah Koperasi yang dapat menilai kesehatan KSP/USPnya serta untuk mengetahui kategori sehat atau tidak sehat	120 Koperas i	70.000	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Ba njarneg ara	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	60 Unit	70.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.B anjarn egara	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	60 Unit	70.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Kab.Banjarnegara	**Prosentase jumlah koperasi yang mengikuti Pendidikan dan Latihan Perkoperasian**	38,61 %	**216.000**	**Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian**	Kab.Banjarnegara	**Prosentase jumlah koperasi yang mengikuti Pendidikan dan Latihan Perkoperasian**	38,61 %	**216.000**	
	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkope rasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan daerah Kabupateb /Kota	Kab.Banjarnegara	Jumlah koperasi yang mengikuti Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	120 koperasi	216.000	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkope rasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan daerah Kabupateb /Kota	Kab.Banjarnegara	Jumlah koperasi yang mengikuti Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	120 koperasi	216.000	
	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kab.Banjarnegara	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	180 koperasi	216.000.	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kab.Banjarnegara	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	180 koperasi	216.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Kab.Banjarnegara	**Prosentase Pemberdayaan dan Perlindu ngan Koperasi**	34,68 %	**166.000**	**Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi**	Kab.Banjarnegara	**Prosentase Pemberdayaan dan Perlindu ngan Koperasi**	34,68 %	**166.000**	
	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Banjarnegara	Jumlah Koperasi yang berpartisipasi aktif dalam peringatan Harkop	137 Koperasi	166.000	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Banjarnegara	Jumlah Koperasi yang berpartisipasi aktif dalam peringatan Harkop	137 Koperasi		
	Peningkatan produktivitas ,nilai tambah ,akses pasar, akses pembiayaan,penguatan kelembagaan,penataan manajemen,	Kab.Banjarnegara	Jumlah unit usaha yang produktif,bernilai tambah, memiliki akses pasar,akses pembiayaan,penguatan kelembagaan , penataan manajemen ,	137 Koperasi	166.000.	Peningkatan produktivitas ,nilai tambah ,akses pasar, akses pembiayaan,penguatan kelembagaan,penataan manajemen,	Kab.Banjarnegara	Jumlah unit usaha yang produktif,bernilai tambah, memiliki akses pasar,akses pembiayaan,penguatan kelembagaan , restrukturisasi usaha	137 Koperasi	166.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	standarisasi,dan restrukturisasi usaha		standarisasi dan restrukturisasi usaha			standarisasi,dan restrukturisasi usaha		penataan manajemen ,stamdarisasi			
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Kab.Banjarnegara	**Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha**	**89,74%**	**1.203.000.**	**Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)**	Kab.Banjarnegara	**Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha**	**89,74%**	**1.203.000.000,00**	
	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi	Kab.Banjarnegara	Prosentase jumlah UMKM yang mendapat fasilitas hak produk	3,39%	1.203.000	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi	Kab.Banjarnegara	Prosentase jumlah UMKM yang mendapat fasilitas hak produk	3,39%	1.203.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	dengan Para Pemangku Kepentingan					dengan Para Pemangku Kepentingan					
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab.Banjarnegara	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	65 unit	217.800.	Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	65 unit	217.800	
	Sub Kegia tan Pem berdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kab.Banjarnegara	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	60 unit	985.200.	Sub Kegia tan Pem berdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kab.Banjarnegara	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	60 unit	985.200.	
	Program Pengembangan Umkm	Kab.Banjarnegara	Presentase Usaha Mikro dan Kecil	99,22	280.000	Program Pengembangan Umkm	Kab.Banjarnegara	Presentase Usaha Mikro dan Kecil	99,22	280.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	Kab.Banjarnegara	Prosentase peningkatan jumlah UMKM	2,25%	280.000	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	Kab.Banjarnegara	Prosentase peningkatan jumlah UMKM	2,25%	280.000	
	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Kab.Banjarnegara	Jumlah yang difasilitasi	165	280.000	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Kab.Banjarnegara	Jumlah yang difasilitasi	165	280.000	
	Jumlah Total				60.426.188.550	Jumlah Total				60.426.188.550	

Berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2026, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan yaitu:

1. Sarana dan Prasarana Dinas dan Pasar memerlukan pengadaan / pemeliharaan
2. Keterbatasan Sumber daya manusia
3. Pembinaan terhadap pelaku UKM / IKM dan koperasi perlu ditingkatkan
4. Pelaku UMKM / IKM membutuhkan fasilitasi jaringan pemasaran .

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan musrenbang kecamatan dan forum konsultasi publik telah disampaikan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui aplikasi SIPD. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2……..
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan

2.6. Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan hasil reses anggota DPRD, melalui aplikasi SIPD telah disampaikan usulan program dan kegiatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2……..
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 20236
Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Validasi

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tema RKP 2026 adalah "……

Sesuai dengan tema RKP 2026 maka arah dan kebijakan RKP 2026 akan fokus pada ketiga isu prioritas sebagai beri**kut**

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Kabupaten Banjarnegara

1. Meningkatnya kesempatan lapangan berusaha
2. Meningkatnya Stabilitas Harga
3. Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik
4. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, maka sasaran Rencana Kerja (Renja) Disperindagkop UKM Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1). Terwujudnya Industri Berbahan Baku Dan Sumber Daya Lokal, Mandiri, Berdaya Saing, Maju Dan Industri Hijau
2). Terwujudnya iklim perdagangan yang sehat dan berdaya saing
3). Terwujudnya pengelolaan koperasi yang lebih baik
4). Terwujudnya UMKM yang mandiri dan berdaya saing
5). Meningkatnya Nilai Survey kepuasan masyarakat
6). Meningkatnya Nilai Evaluasi Sakip

3.3. Program dan Kegiatan

(Sajikan matriks yang berasal dari SIPD)

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Banjarnegara

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencanaan Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
I	**Urusan Perindustrian**				15.725.988.550,00				
A.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota**	*Kab. Banjarnegara*	**100%**	15.480.988.550,00	APBD		100%	
	Kegiatan Perencanaan Pengagaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase penyusunan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	*Kab. Banjarnegara*	**100%**	20.000.000,00	APBD		100%	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Kab. Banjarnegara*	12 dokumen	0	APBD		12 dokumen	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Kab. Banjarnegara*	21 Dokumen	20.000.000	APBD		21 Dokumen	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Prosentase penyusunan administrasi keuangan perangkat daerah**	***Kab. Banjarnegara***	**100%**	**10.946.815.525**	APBD		**100%**	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	*Kab. Banjarnegara*	*12 Bulan*	10.863.588.025	APBD		*12 Bulan*	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verfikasi Keuang an SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SK	*Kab. Banjarnegara*	*12 Dokumen*	83.237.500	APBD		*12 Dokumen*	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencanaan Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Kegiatan Adminis trasi Kepegawai an Perangkat Daerah	**Prosentase penyusunan administrasi kepegawaian daerah**	Kabupaten Banjarnegara	100%	**35.100.500,00**	APBD		100%	
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kabupaten Banjarnegara	5 orang	35.100.500,00	APBD		5 orang	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kabupaten Banjarnegara	100%	**707.496.700,00**	APBD		100%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Pera latan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Banjarnegara	2 paket	27.600.000,00	APBD		2 paket	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kabupaten Banjarnegara	10 paket	581.396.700,00	APBD		10 paket	
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang disediakan	Kabupaten Banjarnegara	3 paket	98.500.000,00	APBD		3 paket	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinrah Daerah	**Prosentase tercukupinya barang milik pemerintah daerah**	Kabupaten Banjarnegara	100%	**457.616.000,00**	APBD		100%	
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kabupaten Banjarnegara	50 paket	212. 616 .000	APBD			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencanaan Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Kabupaten Banjarnegara	23 Unit	245.000.000	APBD			
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Prosentase tercukupinya jasa prenunjang urusan pemerintah daerah**	Kabupaten Banjarnegara	100%	**2.912.289.825**	APBD		100%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kabupaten Banjarnegara	12 laporan	1.100.670.000	APBD		12 laporan	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang di sediakan	Kabupaten Banjarnegara	12 Laporan	1.811.619.825	APBD		12 Laporan	
	Kegiatan Pemeli haraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusab Pemerintah Daerah	**Prosentase pemeliharaan barang milik daerah**	Kabupaten Banjarnegara	100%	**401.660.000**	APBD		100%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemelihara an, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayar pajaknya	Kabupaten Banjarnegara	10 Kendaraan	330.660.000	APBD		10 Kendaraan	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lain nya yang dipelihara / rehabilitasi pelihara/ Direhabilitasi	Kabupaten Banjarnegara	1 Unit	50.000.000	APBD			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencanaan Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Kabupaten Banjarnegara	10 Sarpras	21.000.000	APBD			
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	**Prosentase meningkatnya kemampuan sumber daya manusia wirausaha dan tenaga kerja industri kecil menengah ten tang IPTEK sis tem produksi**	Kabupaten Banjarnegara	**4,40%**	**125.000.000,00**	APBD			
	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	*Jumlah IKM yang dibina melalui Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kota*	Kabupaten Banjarnegara	107	125.000.000,00	APBD			
	Koordinasi , Sinkronisasi dan pelaksanaan Kebijakan percepatan pengembangan,penyebaran dan Perwilayahan Industri	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri*	Kabupaten Banjarnegara	1 Dokumen	35.000.000,00	APBD			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencanaan Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koor dinasi, Sinkroni sasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kabupaten Banjarnegara	1 Dokumen	50.000.000,00	APBD			
	Sub Kegiatan Koor dinasi, Sin kronisasi, dan Pelak sanaan Pembangunan Sara na dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koor dinasi, Sin kronisasi, dan Pelak sanaan Pem bangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kabupaten Banjarnegara						
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksana an Pemberdaya an Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kabupaten Banjarnegara	1 Dokumen	40.000.000,00	APBD			
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupa ten/Kota	**Prosentase peningkatan kemampuan industri kecil menengah tentang penguasaan dan peman faatan alih teknologi**	Kabupaten Banjarnegara	**0,66%**	90.000.000	APBD			
	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan	Jumlah rekomendasi izin industri kecil dan menengah	Kabupaten Banjarnegara	155 Rekomendasi	90.000.000	APBD			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencanaan Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawas an Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota								
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penga wasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewe nangan Kabupa ten/ Kota	Jumlah Doku men Hasil Koordinasi dan Sinkro nisasi Peng awasan Perizinan di Bidang In dustri dalam lingkup perizinan usaha industri Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawa san Industri dan Perizinan Perluasan Kawa san Industri Kewenangan Ka bupaten/Kota	Kabupaten Banjarnegara	1 Dokumen	90.000.000	APBD			
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	**Tersedianya informasi secara lengkap dan terkini**	Kabupaten Banjarnegara	95	**30.000.000,00**	APBD			
	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya informasi industri untuk IUI,IUI,IUKI dan IPKI	Kabupaten Banjarnegara	1 Paket	30.000.000,00	APBD			
	Sub Kegiatan Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data	Kabupaten Banjarnegara	1 Dokumen	30.000.000,00	APBD			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencanaan Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas							
	Urusan Perdagangan								
	Program Pening katan Sarana Distribusi Perdagangan	**Prosentase Pasar dalam kondisi Baik**	Kabupaten Banjarnegara	**24%**	40.941.200.000	APBD			
	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	**Prosentase jumlah pasar yang direhab**	Kabupaten Banjarnegara	**4%**	40.630.000.000	APBD			
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Kabupaten Banjarnegara	23 Pasar	40.130.000.000	APBD			
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kabupaten Banjarnegara	23 Fasilitasi	500.000.000	APBD			
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	**Prosentase Jumlah Pedagang Kaki Lima yang terbina**	Kabupaten Banjarnegara	**80%**		APBD			
	Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah pembinaan terhadap pedagang kaki lima	Kabupaten Banjarnegara	100 pkl	311.200.000,00	APBD			
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Doku men Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kabupaten Banjarnegara	1 dokumen	161.200.000,00	APBD			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencanaan Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian ke pada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kabupaten Banjarnegara	125 Orang	150.000.000,00	APBD			
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	**Persentase jum lah komoditi barang kebutu han pokok dan barang penting yang tersedia**	Kabupaten Banjarnegara		74.000.000,00	APBD			
	Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutu han Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah komoditi barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terpantau	Kabupaten Banjarnegara	37 Jenis	65.000.000,00	APBD			
	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1(Satu) Kabupaten/ Kota	Kabupaten Banjarnegara	12 laporan	65.000.000,00	APBD			
	Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Kabupaten Banjarnegara		9.000.000,00	APBD			
	Sub Kegiatan Pengawasan	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk	Kabupaten Banjarnegara	24 laporan	9.000.000,00	APBD			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencanaan Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%							
	Program Pengembangan Ekspor	**Prosentase tingkat pertumbuhan nilai eksport bersih perdagangan**	Kabupaten Banjarnegara		**140.000.000**	APBD			
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu)Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKM yang mampu mengembangkan usaha ekspor unggulan yang terdapat dalam satu (1) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Banjarnegara	30 UKM	140.000.000	APBD			
	Peningkatan citra produk ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	Kabupaten Banjarnegara	25 produk	140.000.000	APBD			
	Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	**Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengka pannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku**	Kabupaten Banjarnegara	94%	85.000.000,00	APBD			
	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera,Tera Ulang dan Pengawasan	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Kabupaten Banjarnegara		85.000.000,00	APBD			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencanaan Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengka pan Ditera Ulang	Kabupaten Banjarnegara	3500 UTTP	70.000.000,00	APBD			
	Sub Kegiatan Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Kabupaten Banjarnegara	300 Orang	15.000.000,00	APBD			
	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	**Prosentase penyelenggara an promosi perdagangan**	Kabupaten Banjarnegara		685.000.000,00	APBD			
	Kegiatan Pelaksa naan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UKM yang melaksanakan promosi , kemitraan pemasaran dan penggunaan produk dalam negeri di tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Banjarnegara		685.000.000,00	APBD			
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksana kan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupa ten /Kota	Kabupaten Banjarnegara	100 orang	685.000.000,00	APBD			
	Sub Kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Peng gunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Market place, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Kabupaten Banjarnegara	100 orang	685.000.000,00	APBD			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencanaan Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Sub Kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Peng gunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Market place, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Kabupaten Banjarnegara						
	Sub Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Kabupaten Banjarnegara						
	Program Penun jang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	**Peningkatan pendapatan asli daerah**	Kabupaten Banjarnegara	**5%**	725.000.000,00	APBD			
	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah	Jumlah Pendapatan Retribusi Pasar	Kabupaten Banjarnegara	5.900.000.000	725.000.000,00	APBD			
	Sub Kegiatan Analisa Pengembangan Retribusi Daerah serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analilsis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Kabupaten Banjarnegara	1 Dokumen	700.000.000,00	APBD			
	Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kabupaten Banjarnegara	1 Dokumen	25.000.000,00	APBD			
	URUSAN KOPERASI UKM	URUSAN KOPERASI UKM							
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	**Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**	Kabupaten Banjarnegara	39.05%		APBD			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencanaan Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT	Kabupaten Banjarnegara	130 Koperasi	35.000.000,00	APBD			
	Sub Kegiatan Pelaksanaan proses pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	Kabupaten Banjarnegara	60 koperasi	35.000.000,00	APBD			
	Program Penilai an Kesehatan KSP/USP Koperasi	**Prosentase Koperasi yang bisa menilai kesehatanya**	Kabupaten Banjarnegara	51,2 %	**70.000.000**				
	Kegiatan Penilai an Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan pinjam koperasi yang wilayah keangota annya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	Jumlah Koperasi yang dapat menilai kesehatan KSP/USPnya serta untuk mengetahui kategori sehat atau tidak sehat	Kabupaten Banjarnegara	120 Koperasi	70.000.000	APBD			
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Kabupaten Banjarnegara	60 koperasi	70.000.000	APBD			
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	**Prosentase jumlah koperasi yang mengikuti**	Kabupaten Banjarnegara	38,61 %	216.000.000,00	APBD			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencanaan Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian							
	Kegiatan Pendidi kan dan Latihan Perkope rasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan daerah Kabupateb /Kota	Jumlah koperasi yang mengikuti Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Kabupaten Banjarnegara	120 koperasi	216.000.000,00	APBD			
	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Kabupaten Banjarnegara	180 koperasi	216.000.000,00	APBD			
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	**Prosentase Pemberdayaan dan Perlindu ngan Koperasi**	Kabupaten Banjarnegara	34,68 %	**166.000.000,00**				
	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang berpartisipasi aktif dalam peringatan Harkop	Kabupaten Banjarnegara	137 Koperasi	166.000.000,00	APBD			
	Peningkatan produktivitas ,nilai tambah ,akses pasar, akses pembiayaan,penguatan kelembagaan,penataan manajemen, standarisasi,dan restrukturisasi usaha	Jumlah unit usaha yang produktif,bernilai tambah, memiliki akses pasar,akses pembiayaan,penguatan kelembagaan , penataan manajemen ,stamdarisasi dan restrukturisasi usaha	Kabupaten Banjarnegara	137 Koperasi	166.000.000,00	APBD			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencanaan Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	**Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha**	Kabupaten Banjarnegara	**89,74%**	**1.203.000.000,00**	APBD			
	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Prosentase jumlah UMKM yang mendapat fasilitas hak produk	Kabupaten Banjarnegara	3,39%	1.203.000.000,00	APBD			
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Kabupaten Banjarnegara	65 unit	217.800.000	APBD			
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Kabupaten Banjarnegara						
	Sub Kegia tan Pem berdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Kabupaten Banjarnegara	60 unit	985.200.000	APBD			
	Program Pengembangan Umkm	**Presentase Usaha Mikro dan Kecil**	Kabupaten Banjarnegara	**99,22**	**280.000.000,00**	APBD			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencanaan Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	Prosentase peningkatan jumlah UMKM	Kabupaten Banjarnegara	2,25%	280.000.000,00	APBD			
	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah yang difasilitasi	Kabupaten Banjarnegara	165	280.000.000	APBD			
	Jumlah Total				60.426.188.550				

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program pada perangkat daerah merupakan program prioritas dalam Renstra 2017-2022. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD selanjutnya dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Pemilihan untuk masing-masing program/ kegiatan di

Sebagai berikut

(*mengacu pada bab 5 RKPD)*

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
Kabupaten Banjarnegara

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
I	**Urusan Perindustrian**				15.725.988.550,00		
A.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota**	*Kab. Banjarnegara*	**100%**	15.480.988.550,00	APBD	
	Kegiatan Perencanaan Pengagaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase penyusunan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	*Kab. Banjarnegara*	**100%**	20.000.000,00	APBD	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Kab. Banjarnegara*	12 dokumen	0	APBD	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Kab. Banjarnegara*	21 Dokumen	20.000.000	APBD	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Prosentase penyusunan administrasi keuangan perangkat daerah**	***Kab. Banjarnegara***	**100%**	**10.946.815.525**	APBD	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	*Kab. Banjarnegara*	*12 Bulan*	10.863.588.025	APBD	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verfikasi Keuang an SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SK	*Kab. Banjarnegara*	*12 Dokumen*	83.237.500	APBD	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
	Kegiatan Adminis trasi Kepegawai an Perangkat Daerah	**Prosentase penyusunan administrasi kepegawaian daerah**	Kabupaten Banjarnegara	100%	**35.100.500,00**	APBD	
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kabupaten Banjarnegara	5 orang	35.100.500,00	APBD	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kabupaten Banjarnegara	100%	**707.496.700,00**	APBD	
	Sub Kegiatan Penyediaan Pera latan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Banjarnegara	2 paket	27.600.000,00	APBD	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kabupaten Banjarnegara	10 paket	581.396.700,00	APBD	
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang disediakan	Kabupaten Banjarnegara	3 paket	98.500.000,00	APBD	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinrah Daerah	**Prosentase tercukupinya barang milik pemerintah daerah**	Kabupaten Banjarnegara	100%	**457.616.000,00**	APBD	
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kabupaten Banjarnegara	50 paket	212. 616 .000	APBD	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Kabupaten Banjarnegara	23 Unit	245.000.000	APBD	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Prosentase tercukupinya jasa prenunjang urusan pemerintah daerah**	Kabupaten Banjarnegara	100%	**2.912.289.825**	APBD	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kabupaten Banjarnegara	12 laporan	1.100.670.000	APBD	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang di sediakan	Kabupaten Banjarnegara	12 Laporan	1.811.619.825	APBD	
	Kegiatan Pemeli haraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusab Pemerintah Daerah	**Prosentase pemeliharaan barang milik daerah**	Kabupaten Banjarnegara	100%	**401.660.000**	APBD	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayar pajaknya	Kabupaten Banjarnegara	10 Kendaraan	330.660.000	APBD	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lain nya yang dipelihara / rehabilitasi pelihara/ Direhabilitasi	Kabupaten Banjarnegara	1 Unit	50.000.000	APBD	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Kabupaten Banjarnegara	10 Sarpras	21.000.000	APBD	
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	**Prosentase meningkatnya kemampuan sumber daya manusia wirausaha dan tenaga kerja industri kecil menengah ten tang IPTEK sis tem produksi**	Kabupaten Banjarnegara	**4,40%**	**125.000.000,00**	APBD	
	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	*Jumlah IKM yang dibina melalui Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kota*	Kabupaten Banjarnegara	107	125.000.000,00	APBD	
	Koordinasi , Sinkronisasi dan pelaksanaan Kebijakan percepatan pengembangan,penyebaran dan Perwilayahan Industri	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri*	Kabupaten Banjarnegara	1 Dokumen	35.000.000,00	APBD	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koor dinasi, Sinkroni sasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kabupaten Banjarnegara	1 Dokumen	50.000.000,00	APBD	
	Sub Kegiatan Koor dinasi, Sin kronisasi, dan Pelak sanaan Pembangunan Sara na dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koor dinasi, Sin kronisasi, dan Pelak sanaan Pem bangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kabupaten Banjarnegara				
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksana an Pemberdaya an Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kabupaten Banjarnegara	1 Dokumen	40.000.000,00	APBD	
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupa ten/Kota	**Prosentase peningkatan kemampuan industri kecil menengah tentang penguasaan dan peman faatan alih teknologi**	Kabupaten Banjarnegara	**0,66%**	90.000.000	APBD	
	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan	Jumlah rekomendasi izin industri kecil dan menengah	Kabupaten Banjarnegara	155 Rekomendasi	90.000.000	APBD	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
	Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawas an Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota						
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penga wasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewe nangan Kabupa ten/ Kota	Jumlah Doku men Hasil Koordinasi dan Sinkro nisasi Peng awasan Perizinan di Bidang In dustri dalam lingkup perizinan usaha industri Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawa san Industri dan Perizinan Perluasan Kawa san Industri Kewenangan Ka bupaten/Kota	Kabupaten Banjarnegara	1 Dokumen	90.000.000	APBD	
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	**Tersedianya informasi secara lengkap dan terkini**	Kabupaten Banjarnegara	95	**30.000.000,00**	APBD	
	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya informasi industri untuk IUI,IUI,IUKI dan IPKI	Kabupaten Banjarnegara	1 Paket	30.000.000,00	APBD	
	Sub Kegiatan Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data	Kabupaten Banjarnegara	1 Dokumen	30.000.000,00	APBD	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
	Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas					
	Urusan Perdagangan						
	Program Pening katan Sarana Distribusi Perdagangan	**Prosentase Pasar dalam kondisi Baik**	Kabupaten Banjarnegara	**24%**	40.941.200.000	APBD	
	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	**Prosentase jumlah pasar yang direhab**	Kabupaten Banjarnegara	**4%**	40.630.000.000	APBD	
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Kabupaten Banjarnegara	23 Pasar	40.130.000.000	APBD	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kabupaten Banjarnegara	23 Fasilitasi	500.000.000	APBD	
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	**Prosentase Jumlah Pedagang Kaki Lima yang terbina**	Kabupaten Banjarnegara	**80%**		APBD	
	Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah pembinaan terhadap pedagang kaki lima	Kabupaten Banjarnegara	100 pkl	311.200.000,00	APBD	
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Doku men Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kabupaten Banjarnegara	1 dokumen	161.200.000,00	APBD	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian ke pada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kabupaten Banjarnegara	125 Orang	150.000.000,00	APBD	
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	**Persentase jum lah komoditi barang kebutu han pokok dan barang penting yang tersedia**	Kabupaten Banjarnegara	100%	74.000.000,00	APBD	
	Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutu han Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah komoditi barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terpantau	Kabupaten Banjarnegara	37 Jenis	65.000.000,00	APBD	
	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1(Satu) Kabupaten/ Kota	Kabupaten Banjarnegara	12 laporan	65.000.000,00	APBD	
	Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Kabupaten Banjarnegara		9.000.000,00	APBD	
	Sub Kegiatan Pengawasan	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk	Kabupaten Banjarnegara	24 laporan	9.000.000,00	APBD	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
	Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%					
	Program Pengembangan Ekspor	**Prosentase tingkat pertumbuhan nilai eksport bersih perdagangan**	Kabupaten Banjarnegara	5%	**140.000.000**	APBD	
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu)Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKM yang mampu mengembangkan usaha ekspor unggulan yang terdapat dalam satu (1) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Banjarnegara	30 UKM	140.000.000	APBD	
	Peningkatan citra produk ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	Kabupaten Banjarnegara	25 produk	140.000.000	APBD	
	Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	**Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengka pannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku**	Kabupaten Banjarnegara	94%	85.000.000,00	APBD	
	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera,Tera Ulang dan Pengawasan	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Kabupaten Banjarnegara		85.000.000,00	APBD	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengka pan Ditera Ulang	Kabupaten Banjarnegara	3500 UTTP	70.000.000,00	APBD	
	Sub Kegiatan Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Kabupaten Banjarnegara	300 Orang	15.000.000,00	APBD	
	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	**Prosentase penyelenggara an promosi perdagangan**	Kabupaten Banjarnegara		685.000.000,00	APBD	
	Kegiatan Pelaksa naan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UKM yang melaksanakan promosi , kemitraan pemasaran dan penggunaan produk dalam negeri di tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Banjarnegara		685.000.000,00	APBD	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksana kan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupa ten /Kota	Kabupaten Banjarnegara	100 orang	685.000.000,00	APBD	
	Sub Kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Peng gunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Market place, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Kabupaten Banjarnegara	100 orang	685.000.000,00	APBD	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
	Sub Kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Peng gunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Market place, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Kabupaten Banjarnegara				
	Sub Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Kabupaten Banjarnegara				
	Program Penun jang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	**Peningkatan pendapatan asli daerah**	Kabupaten Banjarnegara	**5%**	725.000.000,00	APBD	
	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah	Jumlah Pendapatan Retribusi Pasar	Kabupaten Banjarnegara	5.900.000.000	725.000.000,00	APBD	
	Sub Kegiatan Analisa Pengembangan Retribusi Daerah serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analilsis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Kabupaten Banjarnegara	1 Dokumen	700.000.000,00	APBD	
	Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kabupaten Banjarnegara	1 Dokumen	25.000.000,00	APBD	
	URUSAN KOPERASI UKM	URUSAN KOPERASI UKM					
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	**Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**	Kabupaten Banjarnegara	39.05%		APBD	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT	Kabupaten Banjarnegara	130 Koperasi	35.000.000,00	APBD	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan proses pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	Kabupaten Banjarnegara	60 koperasi	35.000.000,00	APBD	
	Program Penilai an Kesehatan KSP/USP Koperasi	**Prosentase Koperasi yang bisa menilai kesehatanya**	Kabupaten Banjarnegara	51,2 %	**70.000.000**		
	Kegiatan Penilai an Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan pinjam koperasi yang wilayah keangota annya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	Jumlah Koperasi yang dapat menilai kesehatan KSP/USPnya serta untuk mengetahui kategori sehat atau tidak sehat	Kabupaten Banjarnegara	120 Koperasi	70.000.000	APBD	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Kabupaten Banjarnegara	60 koperasi	70.000.000	APBD	
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	**Prosentase jumlah koperasi yang mengikuti**	Kabupaten Banjarnegara	38,61 %	216.000.000,00	APBD	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian					
	Kegiatan Pendidi kan dan Latihan Perkope rasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan daerah Kabupateb /Kota	Jumlah koperasi yang mengikuti Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Kabupaten Banjarnegara	120 koperasi	216.000.000,00	APBD	
	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Kabupaten Banjarnegara	180 koperasi	216.000.000,00	APBD	
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	**Prosentase Pemberdayaan dan Perlindu ngan Koperasi**	Kabupaten Banjarnegara	34,68 %	**166.000.000,00**		
	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang berpartisipasi aktif dalam peringatan Harkop	Kabupaten Banjarnegara	137 Koperasi	166.000.000,00	APBD	
	Peningkatan produktivitas ,nilai tambah ,akses pasar, akses pembiayaan,penguatan kelembagaan,penataan manajemen, standarisasi,dan restrukturisasi usaha	Jumlah unit usaha yang produktif,bernilai tambah, memiliki akses pasar,akses pembiayaan,penguatan kelembagaan , penataan manajemen ,stamdarisasi dan restrukturisasi usaha	Kabupaten Banjarnegara	137 Koperasi	166.000.000,00	APBD	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	**Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha**	Kabupaten Banjarnegara	**89,74%**	**1.203.000.000,00**	APBD	
	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Prosentase jumlah UMKM yang mendapat fasilitas hak produk	Kabupaten Banjarnegara	3,39%	1.203.000.000,00	APBD	
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Kabupaten Banjarnegara	65 unit	217.800.000	APBD	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Kabupaten Banjarnegara				
	Sub Kegia tan Pem berdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Kabupaten Banjarnegara	60 unit	985.200.000	APBD	
	Program Pengembangan Umkm	**Presentase Usaha Mikro dan Kecil**	Kabupaten Banjarnegara	**99,22**	**280.000.000,00**	APBD	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	Prosentase peningkatan jumlah UMKM	Kabupaten Banjarnegara	2,25%	280.000.000,00	APBD	
	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah yang difasilitasi	Kabupaten Banjarnegara	165	280.000.000	APBD	
	Jumlah Total				60.426.188.550		

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. Renja Perangkat Daerah selanjutnya menjadi platform operasional bagi Perangkat Daerah dalam menjalankan programnya dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka sasaran pembangunan daerah tahun 2026. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026 dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disepakati.
2. Kerangka pendanaan dalam Renja Perangkat Daerah masih bersifat sementara, sehingga masih dimungkinkan terjadi perubahan pagu yang disebabkan oleh pengurangan, penambahan, dan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan maupun antar sub kegiatan dalam kerangka penyusunan anggaran secara terpadu dan berbasis kinerja.
3. Renja Perangkat Daerah menjadi acuan bagi Kepala Perangkat Daerah dan segenap jajarannya serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, serta menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal : 20 Agutus 2025

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN,PERDAGANGAN,
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BANJARNEGARA

Drs. ADI CAHYONO PURWO SAPUTRO, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19690406 198803 2 001

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan yang diatur melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan pembentukan tim penyusun, penelaahan rancangan awal RKPD, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, hingga pada penyempurnaan berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang RKPD. Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, penyusunan Renja Perangkat Daerah juga mengacu pada Renja Kementerian/Lembaga terkait, serta Renja Perangkat Daerah Provinsi terkait. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2. Landasan Hukum

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
8. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
10. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
11. Undang-Udang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8,Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah : B-278/2024);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: (9-221/2024);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2023 -2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 Nomor 6, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah (5-184/2023)
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);

30. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 14);
31. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 15);
32. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 Nomor 34).

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun dengan maksud untuk:

a. Menjabarkan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029 ke dalam rencana program kegiatan prioritas Tahun 2026 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Renja K/L Tahun 2026 dan Renja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;
b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerapan anggaran berbasis kinerja.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

a. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA-DPA dalam Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2026, yang dalam penyusunannya didahului dengan menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026;
b. Sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Tahun 2025;
c. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 disusun berdasarkan sistematika yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah.

BAB 2 : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dan atau pokok-pokok DPRD.

BAB 3 : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan tahun 2024.

BAB 4 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran RKPD.

BAB 5 : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah meliputi urusan pangan, pertanian dan perikanan.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 terdiri dari 12 program, 24 kegiatan, dan 35 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar 57.960.103.556-, dengan fokus utama pada Percepatan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan:

a. Meningkatkan produksi dan produktivitas pangan daerah.
b. Menerapkan inovasi dan teknologi pertanian dan perikanan.
c. Meningkatkan kualitas sumber daya pertanian dan perikanan.
d. Meningkatkan mutu pangan segar

Program/kegiatan/sub kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah yang meliputi:

a. Pangan
    - Ketersediaan cadangan pangan yang dilaksanakan oleh Kabupaten Banjarnegara belum sesuai ketentuan yang ada.
    - Belum tersedianya anggaran untuk sosialisasi pendaftaran pangan segar asal tumbuhan produksi dalam negeri usaha kecil (PSAT PD-UK) sesuai dengan Permentan Nomor 53 Tahun 2018 serta keterbatasan personil yang menguasai keamanan pangan .
    - Keterbatasan cadangan pangan daerah sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan dari desa yang terkena dampak kemiskinan, kekeringan dan bencana alam lainnya seperti tanah longsor, tanah bergerak, banjir dan lain-lain.
b. Kelautan dan Perikanan

- Harga jual komoditas ikan khususnya ikan konsumsi tidak dapat mengikuti peningkatan nilai harga beli pakan ikan.
- Pembenihan ikan merupakan salah satu andalan pelaku usaha perikanan di Banjarnegara di samping produksi ikan konsumsi. Permasalahan utama dalam produksi benih ikan adalah dibutuhkannya induk yang berkualitas dan secara periodik harus dilakukan regenerasi indukannya, sehingga diharapkan dari induk yang berkualitas tadi dihasilkan benih yang berkualitas
- Perikanan, dibutuhkan aturan pemanfaatan yang jelas dalam pemanfaatan air irigasi tersebut karena di wilayah potensi perikanan masih banyak yang mengandalkan menggunakan air irigasi dalam proses usaha perikanan.

c. Pertanian

- Permasalahan ketersediaan pupuk, dengan masih lambatnya ketersediaan kartu tani menyebabkan penebusan pupuk terhambat serta kuota subsidi pupuk tidak sesuai RDKK sehingga terjadi kekurangan pupuk oleh petani.
- Permasalahan produksi beberapa wilayah kecamatan masih menggunakan benih tidak bersertifikat/lokal sehingga produksi masih rendah.
- Masih banyaknya jaringan irigasi tersier yang masih rusak/belum di rehabilitasi.
- Permasalahan sarana alat mesin pertanian (alsintan) dengan Belum optimalnya pemanfaatan alsintan pasca panen kurangnya tenaga operator alsintan sehinga banyak alsintan yang tidak optimal pemanfaatnya.
- Masih tidak stabilnya harga produk sayur-sayuran dan buah-buahan.

Dari 12 program, 24 kegiatan, dan 35 sub kegiatan yang dalam Renja Perangkat Daerah tersebut, program/kegiatan/sub kegiatan yang disetujui untuk dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024 terdiri dari 12 program, 24 kegiatan, dan 35 sub kegiatan kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 57.960103.556,-

Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 terjadi beberapa perubahan yang meliputi penambahan atau pengurangan pagu, penghapusan, penambahan atau pengurangan program/kegiatan/sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Perubahan tersebut mengubah rincian dalam Renja Perangkat Daerah menjadi 12 program, 24 kegiatan, dan 35 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.55.710.219.376,-

Dinamika yang terjadi selama tahun 2024 turut mempengaruhi keberhasilan pencapaian Renja Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2024, tercatat adanya hasil yang baik yang dikarenakan adanya pencapaian maupun pelampauan target maupun yang tidak memenuhi target.

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi 2 program kegiatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaktercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
   - Kegiatan Perencanaan, Penganggaraan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah realisasi fisik sebesar 50 %
   - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah realisasi fisik sebesar 94,50 %
   - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah realisasi fisik sebesar 100 %
   - Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan realisasi fisik sebesar 77,50%
   - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan realisasi fisik sebesar 91%
2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
   - Kegiatan Pemberdayaan Pembudi daya ikan kecil, dengan realisasi fisik sebesar 90%.

- Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, dengan realisasi fisik sebesar 100%

b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi 10 program , sedangkan realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah 100 %. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Pelaksanan kegiatan tepat waktu sesuai dengan yang direncanakan.
2. Adanya dukungan anggaran dari APBN, APBD Prov dan anggaran hibah dari luar negeri.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perlu dilaksanakan lebih baik dan efektif. Pada tahun perencanaan selanjutnya, perlu diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, diantaranya:

1. perlu meningkatkan kembali ketercapaian kinerja program agar lebih optimal dengan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan.
2. Perlu meningkatkan koordinasi dengan kementerian, provinsi dan antar opd di lingkup kabupaten banjanegara

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
s.d. Tahun 2024* Kabupaten Banjarnegara

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA TAHUN 2024	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2024	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RENJA SKPD TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN 2025	
					TARGET RENJA TAHUN 2024	REALISASI RENJA TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN									
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Infrastruktur dalam Mendukung Kemandirian Pangan	100%	100	100%	100	100	100	100	100

	Penyediaan Infrastruktur dan Sebarah Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Infrastruktur dan Sebarah Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %						
	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	1 unit	1 unit	3 unit	3 unit	100%	4 unit	2 unit	100 %
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Prosentase cadangan pangan	100 %							
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	tersedianya cadangan pangan di daerah/kabupaten	100%							
	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	tersedianya cadangan pangan di daerah/kabupaten	37.500 kg	14.500 kg	37.500 kg	14.500 kg	67%	40.000 kg	42.100 kg	100
	Pelaksanaan Pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai	persentase Pelaksanaan Pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun								

	dengan angka kecukupan gizi	sesuai dengan angka kecukupan gizi								
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah kelompok yang mendapat bantuan pemanfaatan pekarangan	20 kelompok	-	20 kelompok	22 kelompok	100%	20 kelompok	20 kelompok	100
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Presentase Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %						
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	100%							
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana dan prasana pengujian mutu dan keamanan PSAT (sampel diuji)	20	-	20	50	250	20	20	100
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									

	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Presentase terpenuhinya fasilitas pengelolaan perikanan budidaya	100 %	-		38,117		40,023	40,023	100%
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Presentase pemberdayaan pembudi daya ikan kecil	100 %							
	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	10 kelompok	17 kelompok	10	10	100	10	10	100
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan									
	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	100	2 paket	2 paket	100 %
	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100 %	1 laporan	1 laporan	100 %
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA	prosentase pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	100 %	-	100 %	100 %	68%	100 %	100 %	100% ton

	KELAUTAN DAN PERIKANAN									
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Dimanfaatkan Dalam Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan perengkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat dimanfaatkan dalam daerah/kabupaten	100 %	-	100 %	100 %	68%	100%	1dokumen	100 %
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Dimanfaatkan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Dimanfaatkan dalamKabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	68%	100%	1dokumen	100 %
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Presentase pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran hasil	100%		100%	100%		100%	100%	100%
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	100%		100%	100%		100%	100%	100%

	Peningkatan Koordinasi Kecamatan Untuk Kesesuaian dan Usaha Pengelolaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Koordinasi Kecamatan dan untuk Kesesuaian dan Usaha Pengelolaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	27,45%	27,45%	27,45%	27,45%	100%	27,45%	27,45%	100%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dok		7 dok	8 dok	114%	7 dok	7 dok	100 %
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang tersedia	100%							

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	206		206	206	100%	206	206	100%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 bulan		12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	100 %							
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jenis-sebuah peralatan kebersihan kantor	1 paket		1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100 %
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket		1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia								

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan		12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100 %
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan		12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana								
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 unit		10 unit	10 unit	100%	10 unit bulan	10 unit	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	32 unit		32 unit	32 unit	100%	12 bulan	32 unit	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Prosentase Penggunaan Sarana pertanian bidang hortikultura dan perkebunan, bidang tanaman pangan, bidang peternakan	00 %					1 paket	1 paket	100 %
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian	100 %		100 %	).95	95 %	1 paket	1 paket	100 %
	Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Perakitung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	0 kelompok	21 kelompok	10 kelompok	21 kelompok	210%	2 paket	2 paket	100 %
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan sumber daya genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan mikro organisme kewenangan kabupaten	2100 %							

	Pemanfaatan SDG Hewan/tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	6 kelompok	5 Kelompok	6 kelompok	5 Kelompok	83%	10 kelompok	10 kelompok	100 %
	peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah kabupaten/kota	Persentase peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit serta dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah kabupaten	100 %							
	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Hijau Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Sehat Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	35 kelompok	41 kelompok	35 kelompok	41 kelompok	117%	35 kelompok	40 RTM	100 %
	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100 %	1 paket		100 %
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Prosentase Penggunaan Prasarana pertanian tidang budidaya dan perkebunan, tidang tanaman pangan dan tidang peternakan	100 %							

	Pengembangan Prasarana Pertanian	Fasilitasi pengembangan prasarana pertanian	100 %							
	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	90 %	2 kegiatan		
	Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase pembangunan prasarana pertanian	100 %					Tersedia infrastruktur pertanian yang baik		
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Pertanian	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	4.400	18135	4.400	18135	41 %		4.400 M	100 %
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	5 6 KM	10,56 km	5 6 KM	10,56 km	192%	6 km	6 km	100 %
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	terlaksana pelaksana RPH	1 unit		1 unit	1 unit	100 %	7 unit	0 unit	

	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Dam Parit	Jumlah Dam Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%			
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	12 unit	12 unit	12 unit	12 unit	100 %			
	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten	100%					meningkatkan kesejahteraan petani daerah atas		
	Fasilitasi dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak Populasi Kambing/Domba	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Difasilitasi dan Dimanfaatkan	4 kecamatan	4 kecamatan	4 kecamatan	4 kecamatan daerah atas	100 %	8 kecamatan	8kecamatan	100 %
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	prosentase pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner								

	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten	100%							
	Pemeliharaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan jasa medik veteriner	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	98 %	1 paket	1 paket	100 %
	Penerapan dan Pengawasan Pemenuhan Tahun Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan								
	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	20 tempat	20 tempat	20 tempat	20 tempat	100%	20 tempat	20 tempat	
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase pengendalian Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan penanggulan bencana pertanian	100 %							

	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten	100 %					tersedianya stok obatobatan		
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	3 paket		3 paket	3 paket	100 %	3 paket	3 paket	100 %
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Prosentase pembinaan kelembagaan kelompok tani	100%							
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase pelaksanaan penyuluhan pertanian	100%					Penyusunan programa		
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	20 BPP		20 Bpp	20 BPP	100 %	20 Bpp	20 BPP	100 %
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Ketani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	20 BPP		20 BPP	20 BPP	100 %	20 BPP	20 BPP	100 %

	[illegible]	[illegible]	7 BPP	7 BPP	7 BPP	7 BPP	7 BPP	7 BPP	7 BPP	100 %

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan pelayanannya, Perangkat Daerah mengampu 5 Indikator Kinerja Utama yaitu sebagai berikut:

a) Persentase peningkatan ketersediaan, produktivitas pangan strategis, produksi ikan dan populasi ternak kenaikan rata-rata sebesar 1,25%. Untuk realisasi tercapai 102,33%
b) persentase keamanan dan mutu pangan dengan target 100 %, untuk realisasi tercapai 96,76%
c) Peningkatan daya saing komoditas pertanian dengan target kenaikan sebesar 1 %dengan realisasi sebesar 103,11
d) Meningkatnya efektivitas dan transparansi pelayanan public dengan target nilai survey kepuasan Masyarakat sebesar 81,27, untuk realisasi sebesar 81,71
e) Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan target 70,36 tidak tercapai dengan realisasi sebesar 64,55

Dari 35 indikator Kinerja program indikator tersebut, 28 berstatus tercapai dan 7 indikator berstatus tidak tercapai. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian / ketidaktercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Adanya perubahan musim yaitu tahun 2024 merupakan kemarau basah dimana sepanjang tahun hujan.
2. Banyaknya serangan hama dan penyakit.
3. Bantuan pemerintah khususnya anggaran APBN mengalami penurunan.
4. Perlu kerjasama baik pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten serta lintas sektoral dalam meningkatkan kesejahteraan petani.

Dalam rangka mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut, telah dilakukan upaya-upaya yang meliputi:

1. Pelaksanaan pertemuan, penyuluhan dan pelaksanaan sekolah lapang dengan memenuhi protokol kesehatan.
2. Perlu dukungan kebijakan dalam meningkatkan produktivitas komoditas pertanian.

3. Perlu kerjasama baik pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten serta lintas sektoral dalam meningkatkan kesejahteraan petani.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK LPPD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase cadangan pangan		√	35	35	35	35	43,60	17	35	35	
2	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten di wilayah kabupaten		√	40.050,18	40.550,93	40.550,93	41.057,94	41.843,26	40.962,139	40.550,93	41.057,94	
3	Produktivitas pertanian per hektar per tahun (Padi)		√	6,61	6,68	6,74	6,81	6,736	6,89	6,68	6,74	

4	Persentase Perkembangan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular		√		0	0	0	0		0		

*) Kolom 3 dapat berdasarkan SK gubernur dalam lampiran Permendagri 18/2020

2.3.Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan urusan pemerintahan dalam 3 urusan, yaitu pangan, perikanan dan kelautan, serta pertanian. Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan berdasarkan hasil evaluasi, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk tahun 2024 mencakup 3 urusan tersebut. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah diantaranya adalah:

1. Urusan Pangan
    - Ketersediaan cadangan pangan yang dilaksanakan oleh Kabupaten Banjarnegara belum sesuai ketentuan yang ada.
    - Belum tersedianya anggaran untuk sosialisasi pendaftaran pangan segar asal tumbuhan produksi dalam negeri usaha kecil (PSAT PD-UK) sesuai dengan Permentan Nomor 53 Tahun 2018 serta keterbatasan personil yang menguasai keamanan pangan .
    - Konsumsi masyarakat sangat terpengaruh oleh kondisi sosial ekonomi. Pada tahun 2024 untuk Skor Pola Pangan Harapan kabupaten Banjarnegara sebesar 93,86 blm memenuhi target yaitu 95.
    - Keterbatasan cadangan pangan daerah sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan dari desa yang terkena dampak kemiskinan, kekeringan dan bencana alam lainnya seperti tanah longsor, tanah bergerak, banjir dan lain-lain.
2. Kelautan dan Perikanan
    - Harga jual komoditas ikan khususnya ikan konsumsi tidak dapat mengikuti peningkatan nilai harga beli pakan ikan.

- Pembenihan ikan merupakan salah satu andalan pelaku usaha perikanan di Banjarnegara di samping produksi ikan konsumsi. Permasalahan utama dalam produksi benih ikan adalah dibutuhkannya induk yang berkualitas dan secara periodik harus dilakukan regenerasi indukannya, sehingga diharapkan dari induk yang berkualitas tadi dihasilkan benih yang berkualitas
- Perikanan, dibutuhkan aturan pemanfaatan yang jelas dalam pemanfaatan air irigasi tersebut karena di wilayah potensi perikanan masih banyak yang mengandalkan menggunakan air irigasi dalam proses usaha perikanan.
- Produksi perikanan tangkap yang turun tahun 2024 mengalami penurunan dan tidak mencapai target yaitu 804,51 ton dengan realisasi 575,565 ton

3. Pertanian
   - Permasalahan ketersediaan pupuk, dengan masih lambatnya ketersediaan kartu tani menyebabkan penebusan pupuk terhambat serta kuota subsidi pupuk tidak sesuai RDKK sehingga terjadi kekurangan pupuk oleh petani.
   - Permasalahan produksi beberapa wilayah kecamatan masih menggunakan benih tidak bersertifikat/lokal sehingga produksi masih rendah.
   - Kendala pemasaran waktu panen raya rendahnya harga gabah
   - Masih banyaknya jaringan irigasi tersier yang masuk rusak/belum di rehabilitasi.
   - Permasalahan sarana alat mesin pertanian (alsintan) dengan Belum optimalnya pemanfaatan alsintan pasca panen kurangnya tenaga operator alsintan sehinga banyak alsintan yang tidak optimal pemanfaatnya.

- Masih tidak stabilnya harga produk sayur-sayuran.

Permasalahan tersebut, jika tidak diselesaikan dapat menjadi constraint dalam pencapaian visi dan misi Bupati maupun capaian indikator lainnya. Beberapa dampak dari adanya permasalahan dan hambatan tersebut meliputi:

1. Menurunnya tingkat kesejahteraan petani;
2. Menurunnya produksi, produktifitas komoditas;
3. Tidak tersedianya cadangan pangan yang memadai;

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi, peningkatan kualitas birokrasi, dan meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan pengguna layanan akan meningkatkan kebutuhan akan adanya penyediaan produk layanan yang semakin baik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi-inovasi dalam menunjang peningkatan pelayanan publik secara kontinyu. Beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, yaitu:

1. Meningkatkan teknologi pertanian yang presisi atau pertanian yang digabung dengan teknologi tinggi .
2. Melakukan penyuluhanan kepada petani milineal.
3. Melakukan beberapa inovasi-inovasi terkait dengan meningkatkan kualitas produksi, meningkatkan produktifitas dan meningkatkan pemasaran

Berdasarkan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan tersebut, dapat diinventarisasi beberapa isu strategis. Inventarisasi isu-isu strategis tahun 2024 didapatkan dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal Kabupaten Banjarnegara sampai dengan tahun 2023. Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan pembangunan. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2025, sebagai berikut:

1. Meningkatnya ketahanan pangan

2. Meningkatkan Nilai Tukar Petani
3. Meningkatkan Produksi , Produktifitas komoditas pertanian dan perikanan sebesar 1,25%%

2.4.Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan RPJMN tahun 2020 - 2024 juga berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Tahun 2005-2025 dan mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Berdasarkan hal tersebut, prioritas arah kebijakan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2025 meliputi:

1. Peningkatan penyelenggaraan infrastruktur daerah untuk menghubungkan antar wilayah potensi, dan memberikan nilai tambah pada ekonomi rakyat, serta membuka akses lapangan kerja baru dengan prioritas:
    - Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi wewenang Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan ;
2. Penguatan percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
    a. Meningkatkan kualitas kelembagaan pertanian dan perikanan;
    b. Meningkatkan penanganan panen dan pasca panen pertanian dan perikanan;
    c. Penguatan manajemen cadangan pangan;
    d. Fasilitasi proses pemberdayaan masyarakat.

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Kabupaten Banjarnegara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	PANGAN					PANGAN					
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DATA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN		Persentase Infrastruktur Pendukung Ketersediaan Pangan yang Tersedia			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN			**100%**	**2.813.250.000**	

	Penyediaan Infrastruktur dan Sarana Penduking Kewenangan Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Terbangunnya Penyediaan Infrastruktur dan Sarana Penduking Kewenangan Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten			Penyediaan Infrastruktur dan Sarana Penduking Kewenangan Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			**100%**	**2.813.250.000**	
	Penyediaan Infrastruktur dan Sarana Penduking Kewenangan Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Terbangunnya Penyediaan Infrastruktur dan Sarana Penduking Kewenangan Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten			Penyediaan Infrastruktur dan Sarana Penduking Kewenangan Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			3 unit	1.331.000.000	
	Penyediaan infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	4 unit	150,000,000	Penyediaan Infrastruktur dan Sarana Penduking Kewenangan Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			5 unit	998.250.000	

	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		Prosentase terlaksananya diversifikasi dan ketahanan pangan			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			**100%**	**1.603.250.000**	
	Penyelenggaraan Penyuluhan Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Terlaksananya Penyelenggaraan Penyuluhan Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			Penyelenggaraan Penyuluhan Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			100%	694.575.000	
						Penyelenggaraan Informasi Harga dan Neraca Bahan Makanan		Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan	1 dokumen	121.000.000	
						Penyelenggaraan Pangan Berbasis		Pangan Berbasis Sumber	80 orang	199.650.000	

						Sumber Daya Lokal		Daya Lokal yang			
						Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan		Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	1 dokumen	66,550.000	
	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota				75,000,000	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota					
	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota		Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi		150,000,000	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota		Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi	4 kegiatan	399.300.000	
	Pengelolaan dan Ketersediaan Cadangan Pangan Kabupaten/kota		Terlaksananya Pengelolaan dan Ketersediaan Cadangan Pangan Kabupaten			Pengelolaan dan Ketersediaan Cadangan Pangan Kabupaten/kota		**Terlaksananya Pengelolaan dan Ketersediaan Cadangan Pangan Kabupaten**	100%	484.000.000	
	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/kota		Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah		474,225,300	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/kota		Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah	40.000 kg	484.000.000	

	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		Terlaksanaanya Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		Terlaksanaanya **Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	100 %	232.750.000	
						Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun		Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 dokumen	133.100.000	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengembangan Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		1,282,000,000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			20 kelompok	199.650.000	

	PROGRAM PERAMALAN KERAWANAN PANGAN		Prosentase penanganan kerawanan pangan			PROGRAM PERAMALAN KERAWANAN PANGAN			1 dokumen	133.100.000	
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		Terlaksanany a Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten			Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota			100%	133.100.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/ Kota		110.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota			4 kali	133.100.000	
	Pelaksanaan Intervensi Diversifikasi Pangan dan Gizi				125,000,000				100 %	99.825.000	
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		prosentase pelaksanaan pengawasan keamanan pangan			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			**85%**	**339.405.000**	
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar		Terlaksanany a Pelaksanaan Pengawasan			Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar			**85%**	**339.405.000**	

	Daerah Kabupaten/Kota		Komisioner Pengelola Sigap Daerah Kabupaten			Daerah Kabupaten/Kota					
	Penyelenggaraan Bantuan dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Sigap Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Bantuan dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Sigap Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			Penyelenggaraan Bantuan dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Sigap Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			60 orang	66.550.000	
	Pembinaan Keamanan Pangan bagi Pelaku Usaha Kecil dan Mikro		Terlaksananya Pembinaan Keamanan Pangan bagi Pelaku Usaha Kecil dan Mikro						20 buah	73.205.000	
	Pembinaan keamanan pangan bagi pelaku usaha kecil dan mikro				98,000,000				22 paket	199.650.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					

	KELAUTAN DAN PERIKANAN					KELAUTAN DAN PERIKANAN					
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap		Prosentase produksi perikanan tangkap			**Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**		Presentase produksi perikanan tangkap	100%	1.175.000.000	
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota					**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota**					
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap		Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap		100,000,000	**Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap**		Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	5 unit	550.000.000	
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap		Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang		10,000,000	**Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap**		Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang	21 paket	625.000.000	

	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		presentase terpenuhinya fasilitas pengelolaan perikanan budidaya			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		**presentase terpenuhinya fasilitas pengelolaan perikanan budidaya**	**100%**	1.300.000.00	
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		Terlaksananya Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil			Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		**Terlaksananya Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**			
	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil		Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang		300.000.000	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil		Jumlah kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang	10 RTM	600.000.000	
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		terlaksananya**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		terlaksananya**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**100%**	700.000.000	
	Penyelasaian Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		75,000,000	Penyelasaian Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1 dok	130.000.000	

	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang		200,000,000	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang	4 unit	329.725.000	
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1		100,000,000	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1	23 paket	150.000.000	
	Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota		Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Tertib Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan		40,000,000	Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota		Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Tertib Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan		968.000.000	
	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan					Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan		Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan	17 paket	199.650.000	

	Pemeliharaan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat					Pemeliharaan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat		dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		Prosentase pembinaan dan pengawasan sumber daya perikanan			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		Prosentase pembinaan dan pengawasan sumber daya perikanan	**100%**	665.500.000	
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Cekungan Air Lainnya yang Dapat Dimanfaatkan Dalam Kabupaten/ Kota		Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Cekungan Air Lainnya yang dapat Dimanfaatkan Dalam Kabupaten/ Kota			Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Cekungan Air Lainnya yang Dapat Dimanfaatkan Dalam Kabupaten/ Kota		Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Cekungan Air Lainnya yang dapat Dimanfaatkan Dalam Kabupaten/ Kota	100%	133.100.000	
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan		25,000,000	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai,		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan	1 dokumen	**332.750.000**	

	Wilayah Perairan Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/ Kota		Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam			Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/ Kota		Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Perairan Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam		
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		Prosentase pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran hasil			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		Prosentase pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran hasil		332.750.000
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Wilayah Kabupaten/Kota		Terlaksanaanya Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu)			Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 Wilayah Kabupaten/Kota		Terlaksanaanya Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu)	**100%**	332.750.000

			Daerah Kabupaten					Daerah Kabupaten			
	Peningkatan Keterediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Peningkatan Keterediaan Ikan untuk		200,000,000	Peningkatan Keterediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Peningkatan Keterediaan Ikan untuk	27,45%	332,750,000	
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran skala Mikro dan Kecil		Terlaksananya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran skala Mikro dan Kecil								
	Pelaksanaan Sertifikasi dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran				50,000,000						

	skala Mikro dan Kecil									
	PERTANIAN					**PERTANIAN**				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Prasarana pendidikan tinggi/balai pelatihan/balai penyuluhan pertanian			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Prosentase terlaksana kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah**		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksanaya kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Terlaksanaya kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja**	**100%**	**46.585.000**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	7 dok	155,914,984	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	7 dok	19.965.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	3 dok	15,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	3 Dok	26.620.000

			Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksanan ya administrasi keuangan perangkat daerah			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Terlaksanaya administrasi keuangan perangkat daerah**	**100%**	**26.329.600.000**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	206	19,722,476,459	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan tunjangan ASN	206	28.616.500.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dok	153,345,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dok	332.750.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	36 laporan	15,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	36 laporan	13.310.000	

	Triwulanan/ Semesteran SKPD		Semesteran SKPD dan Laporan Kuantitas Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Triwulanan/ Semesteran SKPD		Semesteran SKPD dan Laporan Kuantitas Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terlaksananya administrasi (kartal) pada perangkat daerah			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Terlaksananya administrasi (lik daerah pada perangkat daerah**	**100%**	**66.550.000**	
	Penatausaan, Pengurusan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Hasil Penatausaan, Pengurusan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	75,000,000	Penatausaan, Pengurusan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Hasil Penatausaan, Pengurusan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	66.550.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya administrasi umum			Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Terlaksananya administrasi umum**	**100%**	**931.700.000**	

			perangkat daerah					**perangkat daerah**			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan -	1 paket	100,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	199.650.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan -	1 paket	551,417,900	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 paket	732.050.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 layanan	542,976,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0	

			yang Disediakan								
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan .	12 laporan	1.217.600,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			**100%**	**2.728.550.000**	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			12 laporan	598.950.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diperlukan			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	2.129.600.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		**Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang**	**100%**	**465.850.000**	

	Pemerintah Daerah		pemerintah daerah			Pemerintah Daerah		**urusan pemerintah daerah**			
	Pengadaan Jasa Penelitiaan, Biaya Penelitiaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan yang terfasilitasi pengadaan dan pembayaran pajaknya	10 unit	150,000,000	Pengadaan Jasa Penelitiaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	133.100.000	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	32 unit	200,000,000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	32 unit	332.750.000	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Presentase Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Presentase Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	**100%**	**4.352.370.000**	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		Terlaksananya pengawasan penggunaan	95,5%		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		Terlaksananya pengawasan penggunaan	**95,50%**	**2.129.600.000**	

			sarana pertanian					sarana pertanian			
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	2 paket	3,600,000,000	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	2 paket	1.996.500.000	2 paket
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana pendukung pertanian		500.000.000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana pendukung pertanian	2 kelompok	133.100.000	2 kelompok
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		Terlaksananya sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme kewenangan kabupaten			Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		Terlaksananya sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme kewenangan kabupaten	**100%**	**665.500.000**	**100%**
	Peningkatan Kualitas SDG		Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas	10 kelompok	500.000.000	Peningkatan Kualitas SDG		Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas	10 kelompok	332.750.000	10 kelompok

	Hewan/Tanaman		SDG hewan/tanaman			Hewan/Tanaman		SDG hewan/tanaman			
	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman		Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	10 kelompok	150,000,000	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman		Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	10 kelompok	332,750.000	10 kelompok
	Peningkatan Mutu dan Pemuliaan Bibit/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Peningkatan Mutu dan Pemuliaan Bibit/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten	100%		Peningkatan Mutu dan Pemuliaan Bibit/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Peningkatan Mutu dan Pemuliaan Bibit/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten	**100 %**	**532.400.000**	**100 %**
	Pengawasan Mutu Bibit/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/ Tanaman Skala Kecil		Jumlah Pengawasan Mutu Bibit/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil		25,000,000	Pengawasan Mutu Bibit/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil		Jumlah Pengawasan Mutu Bibit/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	40 kelompok	532,400.000	40 kelompok
	Pengawasan obat hewan di		Terlaksananya pengawasa obat hewan			Pengawasan obat hewan di tingkat pengece		Terlaksananya pengawasa obat hewan	**100%**	**26.620.000**	**100%**

	tingkat pengecer		di tingkat pengecer					di tingkat pengecer			
	Pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan peredaran obat hewan		Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan keamanan obat hewan yang beredar		25,000,000	Pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan peredaran obat hewan		Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan keamanan obat hewan yang beredar	1paket	26.620.000	
	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan Peredaran Bibit/Benih Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten			Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten	**100%**	**665.500.000**	
	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak		Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan ternak yang tersedia		200,000,000	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak		Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan ternak yang tersedia	1 paket	665.500.000	

	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Prasarana Penggunaan prasarana Pendukung Pertanian			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Terlaksanaanya Penyediaan benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Bumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	**100%**	**10.209.375.000**	
	Pengembangan Prasarana Pertanian		Terlaksanaanya pengembangan prasarana pertanian			Pengembangan Prasarana Pertanian		Jumlah benih/Bibit Ternak yang Bumbernya dari Daerah Kabupaten/ kota Lain	**100 %**	**998.250.000**	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana pendukung pertanian lainnya		350,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya		Prasarana Penggunaan prasarana Pendukung Pertanian	2 kegiatan	998.250.000	
	Pembangunan Prasarana Pertanian		Terlaksanaanya pembangunan prasarana pertanian			Pembangunan Prasarana Pertanian		Terlaksanaanya pengembangan prasarana pertanian	**100%**	**9.211.125.000**	**100%**

	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani		Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara		2,400,000,000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani		Jumlah Koordinasi dan Sosialisasi Prasarana pendukung pertanian lainnya	4800 m	1.331.000.000	4800 m
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan embung		Jumlah Embung Pemanen yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan embung		Terlaksananya pembangunan prasarana pertanian	3 unit	665.500.000	3 unit
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan dipelihara		2,000,000,000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	6 km	3.327.500.000	6 km

	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai pelih		Jumlah DAM Para yang Dibangun, Direhabilitasi, dan dipelihara			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan dam parit		Jumlah Bahang Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	7 unit	998.250.000	7 unit
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan		Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun,Direhabilitasi dan Dipelihara		100,000,000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan		Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan dipelihara	1	266.200.000	1
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di kecamatan serta Sarana Pendukungnya		Jumlah Balai Penyuluh di kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya		Jumlah DAM Para yang Dibangun, Direhabilitasi dan dipelihara		2.662.000.000	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Perikanan Lainnya		Jumlah Prasarana Perikanan Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi		2,500,000,000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Perikanan Lainnya		Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun,Direhabilitasi dan Dipelihara		399.300.000	

			i dan Dipelihara								
	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya engelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten			Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Penyuluhanya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	**0**	**0**	**0**
	Pemanfaatan dan Pengembangan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak		Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan dimanfaatkan		17,818,500,000	Pemanfaatan dan Pengembangan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak		Jumlah Prasarana Peternak Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0	0	0
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		prosentase pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		Terlaksananya Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam	**100%**	**514.250.000**	**100%**

								Daerah Kabupaten			
	Pengaturan Kesehatan Hewan, Penyidikan dan Pembuktian Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksanany a Pengaturan Kesehatan Hewan, Penyidikan dan Pembuktian Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten			Penjaminan Kesehatan Hewan, Penyidikan dan Pembuktian Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah kabupaten/kota		Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dikonservasi dan dikembangka n	**100%**	**90.750.000**	**100%**
	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosa		Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosa		100,000,000	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosa		pelaksanaan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	1 paket	90.750.000	1 paket
	Pengawasan Pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan daerah kabupaten/kota		Terlaksanany a Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan			Pengawasan Pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan daerah kabupaten/kota		Terlaksanany a Pengaturan kesehatan Hewan, Penyidikan dan Pembuktian Daerah Wabah	**100 %**	**181.500.000**	**100 %**

			Daerah Kabupaten					Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten			
	Pengawasan atas pemenuhan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan dan produk hewan		Jumlah Pengawasan atas Pemenuhan Persyaratan Teknis untuk Memasukkan dan/atau Mengeluarkan Hewan dan Produk Hewan			Pengawasan atas pemenuhan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan dan produk hewan		Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	100 orang	181.500.000	100 orang
	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten			Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten	**100 %**	**121.000.000**	**100 %**
	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner		Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner		100,000,000	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner		Jumlah Pengawasan atas Pemenuhan Persyaratan	1 paket	121.000.000	1 paket

			Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan		125,000,000			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	20 tempat	90.750.000	20 tempat
			Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan					Terlaksanaanya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	1 paket	30.250.000	1 paket

	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		Presentase pengendalian Serangan Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan	**100%**	**550.000.000**	**100%**
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten			Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan	**100%**	**550.000.000**	**100%**
	Pengendalian Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan		200,000,000	Pengendalian Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		Prosentase pengendalian Serangan Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	3 paket	400.000.000	3 paket
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Prosentase Kenaikan Jumlah Kelembagaa			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Terlaksananya Pengendalian dan	**100%**	**847.000.000**	1 laporan

			a. Penyuluhan Pertanian dan Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya					Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten			
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		Terlaksananya pelaksanaan penyuluhan			Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan	**100%**	**847.000.000**	**100%**
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa		Jumlah kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya		544,000,000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa		Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	20 kec.	242.000.000	**100%**
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di		Jumlah Sarana dan Prasarana		50,000,000	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di		Prosentase Kenaikan Jumlah Kelembagaan	9 kec.	605.000.000	20 kec.

	Kecamatan dan Desa		Penyuluhan pertanian			Kecamatan dan Desa		[illegible]			
	[illegible]					[illegible]		Terlaksananya pelaksanaan penyuluhan			9 kec.
	[illegible]				456,000,000	[illegible]		Jumlah [illegible] Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	9 kec.	605.000.000	

Berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 202, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan yaitu:

1. Dalam Penyusunan Renja Tahun 2026 berdasarkan dari Renstra yang disusun pada tahun 2025
2. Dalam penyusunan Renstra berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah yaitu 2025 sampai 2029.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan musrenbang kecamatan dan forum konsultasi publik telah disampaikan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui aplikasi SIPD. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel. 2.5. Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan (aspirasi Masyarakat) Tahun 2026 Kabupaten Banjarnegara

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR
1	1968260	21-01-2025	Suratno	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kondisi lahan pada saat ini masih berupa tanah sehingga akses menuju lahan pertanian sulit dan licin ketika hujan	Tempuran RT 01 RW 02, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
2	1976852	21-01-2025	Muhtar	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kondisi saluran irigasi di dusun puntheli RT 05 RW 01 masih berupa saluran irigasi tanah dan belum adanya bangunan saluran irigasi permanen	Dawuhan RT 06 RW 01, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
3	1977026	21-01-2025	Muhtar	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Saluran irigasi di dusun Dawuhan Tengah RT 01 RW 02 belum ada bangunan permanen	Dawuhan RT 01 RW 01, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
4	1978458	21-01-2025	Muhtar	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Saluran irigasi di dusun bilengen RT 04 dan RT 05 RW 01 belum dibangun secara permanen	Dawuhan RT 04 dan RT 05 RW 01, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
5	1982904	21-01-2025	Muhtar	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Saluran irigasi di dusun Tasaba RT 01 RW 01 belum ada bangunan permanen sehingga perlu dibangun saluran irigasi yg permanen	Dawuhan RT 01 RW 01, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan

									Ketahanan Pangan
6	1995938	22-01-2025	KARYAWAN TEGUH HUDIONO, SH.	Peningkatan Ternak Berbasis Masyarakat	Banyak peternak Etawa sehingga perlu pelatihan peningkatan kapasitas petani dalam pemeliharaan kambing etawa	Desa Ardisaya, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
7	2000513	22-01-2025	NUR MUBIN	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Perlunya jalan yang baik untuk mengangkut hasil panen petani	Dusun Lembenggan Desa Gembongan, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	-
8	2013626	22-01-2025	SAFRUDIN	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kurangnya alat pertanian yang memadai untuk meningkatkan hasil produksi pertanian	[illegible] pagentan, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
9	2048550	24-01-2025	NISLAM SUHARNO	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jalan Utama Tani Cendoni Dusun Jojogan rusak karena tanah longsor	Dusun Jojogan, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
10	2049109	24-01-2025	[illegible]	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Bantuan pembangunan talud beton jalan utama tani (jlok kanci) sitenggong karangtengah supaya meningkatkan produksi pertanian	Sitenggong karangtengah rt 07 rw 03 , Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	-
11	2066909	25-01-2025	[illegible]	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	masih ada jalan pertanian yang kondisi jalannya masih jalan tanah dan menjadi kurang lancar bagi para petani	Dusun Kalimendong Wetan, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan

12	2066973	25-01-2025	TITON SUNANDAR	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kurangnya Pemberdayaan untuk memanfaatkan sumber daya lokal yang ada di lingkungan masyarakat.	Dusun Pulasari,Dusun Dawaraja,Dusun, Kalimendong Wetan, Dusun Kalimendong, Dusun Kalimendong Kulon, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
13	2067000	25-01-2025	TITON SUNANDAR	Peningkatan Perikanan Berbasis Masyarakat	banyak potensi di desa namun pengelolaan dan manajemen belum tertata dengan baik	Dusun Pulasari,Dusun Dawaraja,Dusun, Kalimendong Wetan,Dusun Kalimendong, Dusun Kalimendong Kulon, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
14	2075152	26-01-2025	HARTININGSIH	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Masih adanya jalan usaha tani yang rusak dan belum di perbaiki	RT 03 RW 05 Dusun Penusupan dan RT 01 RW 04 Dusun Bojongsari, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
15	2083725	27-01-2025	SARYO	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Banyak Jalan Usaha Tani yang masih tanah dan makadam jalan sehingga perlu pembangunan Rabat Beton untuk mempermudah sarana transportasi untuk mengangkut hasil pertanian	Desa Parakan, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
16	2083800	27-01-2025	SARYO	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Masih banyak lahan pertanian yang belum tersentuh saluran irigasi dikarenakan jaur	Dusun Bleber Desa Parakan, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan	Dinas Pertanian Perikanan

				Prasarana Pertanian Lainnya	dan jalur tersier sehingga diperlukan pipanisasi untuk irigasi pertanian warga			Ketahanan Pangan	dan Ketahanan Pangan
17	2083953	27-01-2025	KUN PANGESTI	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jalan saluran irigasi makadamnya sudah rusak berat	Blok Sirata kebo - Kesangembe arah Desa Peraksari, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	-
18	2083985	27-01-2025	KUN PANGESTI	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jalan usaha Tani belum memenuhi kebutuhan sebagai jalur transportasi karena lanjut jalan setapak	Blok Kenangan-Kenyem, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	-
19	2084329	27-01-2025	KUN PANGESTI	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Saluran irigasi masih tanah, sehingga airnya kurang lancar	Blok balong, Kab Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	-
20	2104056	30-01-2025	TITON SUNANDAR	Peningkatan Ternak Berbasis Masyarakat	Keterbatasan solusi masalah lingkungan, masalah ekonomi, dan masalah ketersediaan sarana dan prasarana	Dusun Pidasari,Dusun Danareja,Dusun Kalimendong Wetan,Dusun Kalimendong, Dusun Kalimendong Kulon, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
21	2104083	30-01-2025	TITON SUNANDAR	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kurangnya edukasi pembudidaya, Kurangnya akses petani terhadap teknologi, Kurangnya akses petani terhadap alat pertanian, Kurangnya akses petani terhadap infrastruktur pembudidaya	Dusun Pidasari,Dusun Danareja,Dusun Kalimendong Wetan,Dusun Kalimendong, Dusun Kalimendong Kulon, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan

22	2121611	30-01-2025	ERRY TRI HERTANTO	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan Makadam Jalan Usaha Tani Buaran	Dusun Tegalsari RT 02 RW 04, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
23	2122145	30-01-2025	ERRY TRI HERTANTO	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan Jalan Usaha Tani Buaran	Dusun Tegalsari RT 02 RW 04, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
24	2122674	30-01-2025	Hery Setyo Pranadi, SE	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1.jalan tidak termasuk 2. terbitnya jalan yang membuat semakin sempit 3. petani kesulitan dalam mengangkut hasil panen	RT005 RW001 Desa Pekambakan, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
25	2122856	30-01-2025	Hery Setyo Pranadi, SE	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1. Jalan tidak memadai 2. jalan masih berupa tanah	RT005 RW001, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
26	2122905	30-01-2025	Hery Setyo Pranadi, SE	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1. [illegible] yang menyempit akibat tidak [illegible]	RT005 RW001, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
27	2122986	30-01-2025	Hery Setyo Pranadi, SE	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1. Jalan masih berupa tanah 2. jalan kurang memadai	RT005 RW001, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan

									Ketahanan Pangan
28	2123779	30-01-2025	SUPRIYANTO	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	perlu pengembangan pertanian seperti kopi, alpukat, , serai lemon dll, karena desa ambal cocok untuk tanaman tersebut	Desa Ambal, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
29	2125717	30-01-2025	Sodikin, A. Ma. Pd	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Akses Jalan Usaha Tani belum bisa di lalui kendaraan	Dusun Pungangan RT.02/Rw 07 Desa Madukara,Kec.Ma dukara,Kab Banjarnegara, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
30	2125797	30-01-2025	Sodikin, A. Ma. Pd	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jalan Usaha Tani belum bisa di lewati kendaraan	Dusun Bogares,RT.01/Rw 05,Desa Madukara,Kec.Ma dukara,Kab.Banjar negara, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
31	2129973	30-01-2025	WARSO	Peningkatan Ternak Berbasis Masyarakat	Peternak mengalami kesulitan dalam mendapatkan bibit ternak yang unggul dan sehat, sehingga produktivitas dan kualitas hasil ternak belum optimal dan tidak memiliki cukup modal untuk membeli ternak, sehingga kapasitas usaha mereka masih terbatas dan sulit berkembang.	Desa Danakerta, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
32	2130256	30-01-2025	WARSO	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Sebagian besar jalan usaha tani masih berupa jalan tanah atau berbatu yang sulit dilalui, terutama saat musim hujan karena menjadi licin dan berlumpur, sehingga menghambat mobilitas petani dan kendaraan pengangkut hasil pertanian.	Desa Danakerta, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan

33	2137917	31-01-2025	SISWANTO	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Masih banyaknya jalan usaha tani yang butuh peningkatan	Desa Sambong, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
34	2138886	31-01-2025	Pujianto	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Belum dibangunya Jalan Usaha Tani	Desa Lumbangan RW 3 Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
35	2141215	31-01-2025	SANGKUN	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Komunitas Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Minta bantuan bibit tanaman Durian/Alpukat	Dusun Menggoro Desa Sidarata, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
36	2167113	01-02-2025	April Kurnianto	Pemanfaatan Pekarangan	harga pangan yang mahal membuat pendapatan masyarakat mengalami penurunan secara nilai (inflasi). Dengan adanya program pemanfaatan pekarangan untuk ditanami tanaman pangan diharapkan mampu salah satu solusi untuk mengurangi pengeluaran rumah tangga.	Desa Sawangan, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
37	2172761	03-02-2025	HARDIYANTO S	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	ada jalan Usaha tani yang kondisinya masih Tanah sehingga perlu adanya pembangunan guna memperlancar akses ekonomi bagi para petani	Desa Bedana, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
38	2173064	03-02-2025	SISWANTO	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kurangnya Sarana dan Prasarana Pertanian yang Memadai untuk Kelompok Tani	Kelompok Tani Gemilang Tani, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan

									Ketahanan Pangan
39	2173167	03-02-2025	WANTI	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jalan Usaha Tani diwilayah kupreg Dusun Mangawan masih berupa jalan tanah dan sempit, yang menyulitkan masyarakat dalam membawa hasil pertanian	Dusun Mangawan, Desa Kalitidenreng, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
40	2173328	03-02-2025	MUSTOFA	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	masih terdapat beberapa jalan usaha tani yang masih susah dilalui	Dusun Kampung Desa Majalengeg , Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
41	2173419	03-02-2025	ERRY TRI HERTANTO	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan Jalan Usaha Tani Winong (Rabat Beton)	Dusun Pampol RT. 01 RW. 02, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
42	2173470	03-02-2025	ERRY TRI HERTANTO	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan Jalan Lingkungan untuk peningkatan ekonomi, pertanian, kesehatan dan pendidikan	Dusun Mertana RT. 03 RW. 03, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
43	2173864	03-02-2025	Sutrisno	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Prasarana perftanian yang sangat kurang	Desa Sitinggil, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
44	2174690	03-02-2025	Yuanita Dyah Ratnawati	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan	jalan menuju pertanian masih setapak, dan sangat sulit untuk mengangkut hasil pertanian	Dusun Krajan, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan	Dinas Pertanian Perikanan

				Prasarana Pertanian Lainnya				Ketahanan Pangan	dan Ketahanan Pangan
45	2180254	03-02-2025	ADHITYA YOGA P	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Belum ada saluran irigasi yang memadai	Desa Setiawas RT 05 RW 01, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
46	2181600	03-02-2025	ADHITYA YOGA P	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jalan Usaha Tani Belum memadai	Dusun Sambawa RT 04 RW 01, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
47	2186610	03-02-2025	Pranyoto	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jalan Usaha Tani yang sangat dibutuhkan oleh Petani kondisinya tidak layak dan menghambat distribusi hasil pertanian	Dusun Binangun RW 03 , Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	-
48	2186672	03-02-2025	Pranyoto	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Area persawahan di blok gebangan belum memiliki saluran irigasi yang memadai sehingga petani sering mengalami kekeringan air saat mengolah sawahnya	Blok Gebangan Desa Jenggawur, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
49	2186979	03-02-2025	Pranyoto	Peningkatan Perikanan Berbasis Masyarakat	Program intervensi terhadap penurunan stunting tingkat desa dianfaranya dengan PMT protein ikan, tetapi sumber desa yang ada belum memenuhi	Desa Jenggawur, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
50	2192308	04-02-2025	Jasman, S.Pd.I	Peningkatan Perikanan Berbasis Masyarakat	Belum Optimalnya Hasil Perikanan Di Desa Kasilib dengan potensi Sumber Daya lokal yang sangat mendukung	Desa Kasilib, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan

									Ketahanan Pangan
51	2193657	04-02-2025	Hery Setyo Pranadi, SE	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1. kondisi jalan yang masih berupa tanah 2. kondisi jalan tidak mendatar 3. petani dan pekebun kesulitan mengangkut hasil panen	RTDAK RW/DUS: Dusun Pesarean Desa Pelaihbaken, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
52	2202750	04-02-2025	Sukar	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Petani di Dusun 1 mengalami kesulitan dalam kegiatan pertanian (membawa hasil pertanian) dikarenakan akses jalan yang kondisinya masih tanah dan sangat licin ketika musim hujan	RW 1 Dusun 1 Blok Lapangan - Serangkeno Des Serangkemon, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
53	2203873	04-02-2025	S.MUDJIONO	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	JUT Sawah Blok 7 masih makadam dan mengakibatkan jalan menjadi licin dan tidak bisa dilewati saat masa pengolahan lahan tanam dan panen	SAWAH BLOK 7 DESA KAJUARTJAK, Kab Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
54	2203911	04-02-2025	S.MUDJIONO	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	JUT sawah blok 6 sawah masih makadam dan mengakibatkan petani sulit melewati JUT tersebut ketika hujan,dan saat panen jut tersebut susah dilewati dan mengakibatkan petani sulit mengakut hasil panen	SAWAH BLOK 6 DESA KAJUARTJAK, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
55	2204867	04-02-2025	Agus Tiyono	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kekurangan air untuk Pertanian dan tidak sumber air	Desa Penerusan Watas RT. 003 RW. 003 dan RT 005 RW. 003, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
56	2205637	04-02-2025	Sukirman	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan	(Pembangunan Pompanisasi air untuk lahan pertanian) Pda lahan sawah yang rawan	Dusun Blarak Desa Dermasari , Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan	Dinas Pertanian Perikanan

				Prasarana Pertanian Lainnya	kekeringan karena tidak terjangkau air dari saluran irigasi teknis			Ketahanan Pangan	dan Ketahanan Pangan
57	2205789	04-02-2025	Suhono	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Petani bipa Wiradi membutuhkan IUT untuk mobilisasi dan kemudahan pengangkutan hasil pertanian	Blok Wiradi (lokasi Karangamboh), Desa Kandangwangi, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
58	2205806	04-02-2025	Suwarto	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kondisi jalan usaha tani blok pit modyo desa karangsalam saat ini kondisinya sudah rusak (evaluasi di waktu musim penghujan karena jalan menjadi becek dan licin sehingga hasil pertanian susah untuk dibawa	Blok sdt Modyo Dusun 3 Desa Karangsalam, Kab. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
59	2211090	05-02-2025	Sutrisno	Peningkatan Penyuluh Berbasis Masyarakat	budidaya ikan yang masih kurang pengetahuan sehingga sering gagal panen karena serangan penyakit	Desa Situwangi, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
60	2211093	05-02-2025	Sutrisno	Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kewenangan	irigasi yang pada rusak	Desa Situwangi, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
61	2211422	05-02-2025	Paryan Nurcahyono	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	KURANGNYA ANGGARAN	DUSUN KRAJAN BRENGKOK SUBUHAN, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
62	2211429	05-02-2025	Paryan Nurcahyono	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan	TIDAK ADA ANGGARAN	DUSUN KRAJAN BRENGKOK	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan	Dinas Pertanian Perikanan

				Prasarana Pertanian Lainnya		SUSUKAN, Kab. Banjarnegara		Ketahanan Pangan	dan Ketahanan Pangan
63	2214428	05-02-2025	Slamtoo Wulan Sari	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Merupakan Akses Utama Jalan Usaha Tani.	RT 05 RW 01, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
64	2214892	05-02-2025	Mardika Wulan Sari	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Merupakan Jalur Utama Jalan Usaha Tani	BLOK TANJANG, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
65	2234580	07-02-2025	SLAMET SANTOSO	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	rusaknya jalan usaha tani yang ada di desa sawal sehingga dianggap perlu diangun jalan usaha tani di desa sawal	kadus 2, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
66	2234631	07-02-2025	SLAMET SANTOSO	Peningkatan Ternak Berbasis Masyarakat	desa sawal adalah desa berbasis pertanian sehingga dianggap perlu adanay bantuan ternak kambing	Desa Sawal, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
67	2248859	08-02-2025	Adhi Setiawan, S.Pd	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jalan Usaha Tani di Blok Pegi Sari : kini saat ini kondisinya masih jalan tanah dan sempit sehingga menghambat akses perekonomian warga	RT 003 / RW 001, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan

68	2248888	08-02-2025	Ratu Setiawan, S.Pd	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jalan Usaha Tani di Blok Mudal - Rata Purung, saat ini kondisinya sebagian masih makadam dan sebagian besar masih jalan tanah	RT 002 / RW 003, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
69	2248901	08-02-2025	Adhi Setiawan, S.Pd.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jalan Usaha Tani di Blok Sidingan - Dukuh Aren saat ini masih jalan tanah dan sempit sehingga perlu untuk dipelebar dan cor Rabat Beton	RT 001 / RW 001, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
70	2266329	10-02-2025	Prasetyo, S.E.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	BENDUNGAN IRIGASI JEBOL	Desa Pasurenan , Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
71	2266443	10-02-2025	Prasetyo, S.E.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Ketahanan pangan perbenihan Holtikultura	Desa Gembol Blok krajan, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
72	2266687	10-02-2025	Prasetyo, S.E.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	PEMBUAT JARINGAN IRIGASI DAN PENYAMBUNG JALAN USAHATANI MASIH TANAH, DIPERLUKAN PLAT BETON/SOLING/ GORONG	DESA GEMBOL, BLOK KADANPAS, BLOK PAGODONGAN, BLOK KALI DOLOG, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
73	2267472	10-02-2025	Gawat Setiono	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jalan Usaha Tani masih tanah, sehingga akses petani sulit	Dusun Lagik, Blok Cangkring, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan

									Ketahanan Pangan
74	2272426	10-02-2025	Wahyono	Peningkatan Perikanan Berbasis Masyarakat	Pasar ikan merupakan pasar yang digunakan untuk memasarkan ikan dan produk ikan. Di pasar ikan ini proses pengelolaan dan transaksi jual beli selalu terjadi setiap hari, dan hampir mayoritas warga bekerja dibidang perikanan, sehingga perlu adanya pasar ikan	ADIPASIR RT 01 RW 01, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
75	2274195	10-02-2025	Wahyono	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kondisi jalan menuju area pertanian rusak berat sehingga perlu dibangun JUT Cangkring Dusun 2	Adipasir RT 07 RW 02, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
76	2274331	10-02-2025	Wahyono	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jalan menuju area pertanian sangat belum memadai, sehingga perlu Pembangunan,Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Dusun 4	ADIPASIR RT 4 DUSUN 4, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
77	2274467	10-02-2025	Wahyono	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Irigasi rusak sehingga perlu Pembangunan,Rehabilitasi Irigasi Pertanian Dusun 3 & 4	DUSUN 3 DAN 4, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
78	2274505	10-02-2025	Wahyono	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangagamian Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Perlu adanya Kegiatan pelatihan tentang Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	Adipasir, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan

79	2280426	10-02-2025	Pranyoto	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jalan Usaha Tani yang sangat dibutuhkan oleh Petani kondisinya tidak layak dan menghambat distribusi hasil pertanian	RW 03 Desa Penunggalan, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
80	2283432	10-02-2025	Lismadi	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Volume air habis pada musim kemarau, belum tersedia saluran air pengisi embung	Dusun 1, Kab Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
81	2288442	10-02-2025	Lismadi	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pada musim kemarau tidak ada sumber air pengisi embung sehingga sawah tidak dapat berbudidaya dengan optimal	Dusun 1, Desa Kutayasa, Kab Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
82	2291593	11-02-2025	YULIANTIN [redacted]	Peningkatan Ternak Berbasis Masyarakat	Kelompok Tani belum mempunyai cukup bibit ternak untuk di kelola bersama	Desa Gumelegah Dusun Depok, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
83	2294251	11-02-2025	Sukirman	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan Pompa Air Tenaga Surya karena ketidaktersediaannya air untuk pengairan sawah di musim kemarau Dusun Blarak Desa Gemuruh, Kab. Banjarnegara Jumlah Anggaran Rp. 200.000.000,	Dusun Blarak, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
84	2297761	11-02-2025	Mokhamad Soleh	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Pembangunan Bendung dan Irigasi Kali Gumelem anggaran 1.200.000.000 Wilayah Kec Susukan merupakan area persawahan tadah hujan sehingga untuk memaksimalkan	Desa Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan

					pengairan sawah warga dibutuhkan bangunan bendung Type Long Storage	Jawa Tengah 53471, Kab. Banjarnegara			Ketahanan Pangan
85	2298931	11-02-2025	INDARTO ISHAQ,S.P.d. I	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI UNTUK MENGURANG DISTRIBUSI HASIL PERTANIAN	PANUTAN RT 3 RW 4 DESA TWELAGIRI, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
86	2299469	11-02-2025	INDARTO ISHAQ,S.P.d. I	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	BANTUAN MODAL KEPADA KELOMPOK TANI TANGI SUDAH BERBADAN HUKUM	DESA TWELAGIRI, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
87	2303289	11-02-2025	SUJARWO	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Wilayah desa kitsubkhipunya sangat membutuhkan bantuan bibit untuk mengisi lahan warga yang kebanyakan kosong/tumpang sari yang kurang bermanfaat	Desa, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
88	2306274	11-02-2025	Suyono	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Petani di Desa Sijenggung mengalami kesulitan mengangkut hasil panen karena akses ke lahan pertanian terhambat oleh kondisi jembatan yang memadai. Selama ini, mereka harus melewati akses sungai atau jalan memutar yang membutuhkan waktu lebih lama dan meningkatkan biaya transportasi. Oleh karena itu, pembangunan JUT sangat dibutuhkan untuk mendukung kelancaran aktivitas pertanian dan meningkatkan hasil perekonomian warga	JUT Pintu Desa Sijenggung, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
89	2306277	11-02-2025	Akhmad Subandi	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Jalan belum layak	Dukug sigeblog rt 04 rw 04 desa	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan	Dinas Pertanian Perikanan

				Prasarana Pertanian: Lainnya		sigeblog, Kab. Banjarnegara		Ketahanan Pangan	dan Ketahanan Pangan
90	2306294	11-02-2025	Nurul Hilal Eka Pragitno	Pelatihan Administrasi Manajemen BUMDes	Pengurus bumdes belum memahami tugas dan kewenangannya	Desa Banjarmangu, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-
91	2306306	11-02-2025	Suyono	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Petani di Desa Sijenggung mengalami kendala mengangkut hasil panen karena akses ke lahan pertanian terhambat oleh keberadaan pintalan yang memadai. Selama ini, mereka harus melewati aliran sungai atau jalan memutar yang membutuhkan waktu lebih lama dan meningkatkan biaya transportasi. Oleh karena itu, pembangunan JUT sangat dibutuhkan untuk mendukung kelancaran aktivitas pertanian dan meningkatkan hasil perekonomian warga	Dusun Tempuran JUT Arah Bengkok Kadus , Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
92	2306313	11-02-2025	Akhmad Subandi	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga kerja sama antar Desa	SDM BUMDes belum memadai	Desa Sigeblog, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-
93	2306325	11-02-2025	Suyono	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Petani di Desa Sijenggung mengalami kendala mengangkut hasil panen karena akses ke lahan pertanian terhambat oleh keberadaan pintalan yang memadai. Selama ini, mereka harus melewati aliran sungai atau	Dusun Tempuran area arah bengkok kadus, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan

					jalan memutar yang membutuhkan waktu lebih lama dan meningkatkan biaya transportasi. Oleh karena itu, pembangunan JUT sangat dibutuhkan untuk mendukung kelancaran aktivitas pertanian dan meningkatkan hasil perekonomian warga				Ketahanan Pangan
94	2306330	11-02-2025	Nurul Hilal Eko Prayitno	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jalan menuju sawah yang belum layak sehingga menghambat pengangkutan hasil pertanian	Dukuh Kuncen Desa Banjarmangu, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
95	2306336	11-02-2025	Suyono	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Petani di Desa Sijenggung mengalami kesulitan mengangkut hasil panen karena akses ke lahan pertanian terhambat oleh ketiadaan jembatan yang memadai. Selama ini, mereka harus melewati aliran sungai atau jalan memutar yang membutuhkan waktu lebih lama dan meningkatkan biaya transportasi. Oleh karena itu, pembangunan JUT sangat dibutuhkan untuk mendukung kelancaran aktivitas pertanian dan meningkatkan hasil perekonomian warga	Dusun Tempuran JUT Blok Kidang, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
96	2306355	11-02-2025	Suyono	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Petani di Desa Sijenggung mengalami kesulitan mengangkut hasil panen karena akses ke lahan pertanian terhambat oleh ketiadaan jembatan yang memadai. Selama ini, mereka harus melewati aliran sungai atau jalan memutar yang membutuhkan waktu lebih lama dan meningkatkan biaya transportasi. Oleh karena itu, pembangunan JUT sangat dibutuhkan untuk mendukung kelancaran aktivitas pertanian dan meningkatkan hasil perekonomian warga	Dusun 1 Blok Branangka, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan

97	2306366	11-02-2025	Suyono	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Petani di Desa Sipenggung mengalami kesulitan mengangkut hasil panen karena akses ke lahan pertanian terhambat oleh ketiadaan jembatan yang memadai. Selama ini, mereka harus melewati aliran sungai atau jalan memutar yang membutuhkan waktu lebih lama dan meningkatkan biaya transportasi. Oleh karena itu, pembangunan JUT sangat dibutuhkan untuk mendukung kelancaran aktivitas pertanian dan meningkatkan hasil perekonomian warga	Dusun 1 JUT blok suhunan, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
98	2306421	11-02-2025	Suyono	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Petani di Desa Sipenggung mengalami kesulitan mengangkut hasil panen karena akses ke lahan pertanian terhambat oleh ketiadaan jembatan yang memadai. Selama ini, mereka harus melewati aliran sungai atau jalan memutar yang membutuhkan waktu lebih lama dan meningkatkan biaya transportasi. Oleh karena itu, pembangunan JUT sangat dibutuhkan untuk mendukung kelancaran aktivitas pertanian dan meningkatkan hasil perekonomian warga	Dusun 1 JUT Blok Jongget, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
99	2308375	11-02-2025	Sugeng	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jalan Usaha Tani belum layak	Dusun 1 Grigit RT 003 RW 003 Desa Grigit, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
100	2308403	11-02-2025	Sugeng	Bantuan Keuangan kepada Desa Pagu melalui Kewilayahan (PK) Kecamatan	Jalan Penghubung menuju Desa Kesenet dan Desa Sigeblog Rusak Berat	Dusun Grajimang RT 002 RW 03 Desa Grigit, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah

101	2312354	12-02-2025	Makhadi	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Rehabilitasi Pasar Ikan	Desa Lengkong, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
102	2312985	12-02-2025	Wahyono	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	jalan sdt dusun 5 rusak, sehingga perlu adanya perbaikan jalan usaha tani	adipasir rt 01 rw 05, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
103	2313549	12-02-2025	Kusnan	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	masih sulitnya akses jalan usaha tani	Simprutu Kadus 1, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
104	2315410	12-02-2025	MISROD	Pengelolaan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	belum ada irigasi	Desa Pandanarum, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
105	2315681	12-02-2025	Suwito	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kondisi JUT masih rusak belum diperbaiki	Desa Paigil, Kec. Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
106	2317009	12-02-2025	DAHYO	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Buat jalan penghubung 3 dusun Lawen - wangi - Langgar rusak parah sehingga menghambat mobilitas kesehatan, pendidikan dan perekonomian masyarakat	Desa Lawen, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan

									Ketahanan Pangan
107	2317125	12-02-2025	Lismadi	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jalan rusak berat karena baru beberapa yang makdam	Desa Kutayasa Blok Pusung, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
108	2319110	12-02-2025	Wahyono	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	jalan usaha tani rusak, sehingga perlu adanya pembangunan jut dusun 4 tembus bandingan	adipasir dusun 4, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
109	2319150	12-02-2025	Wahyono	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	dam sebalah lapangan rusak, sehingga perlu adanya pembangunan/perbaikan dam	dusun 5, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
110	2328430	12-02-2025	Suyono	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Petani di Desa Sijenggung mengalami kesulitan mengangkut hasil panen karena akses ke lahan pertanian terhambat oleh ketiadaan jembatan yang memadai. Selama ini, mereka harus melewati aliran sungai atau jalan memutar yang memburuhkan waktu lebih lama dan meningkatkan biaya transportasi. Oleh karena itu, pembangunan JUT sangat dibutuhkan untuk mendukung kelancaran aktivitas pertanian dan meningkatkan hasil perekonomian warga	Dusun 2 Semurup, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
111	2328680	12-02-2025	Suyono	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Petani di Desa Sijenggung mengalami kesulitan mengangkut hasil panen karena akses ke lahan pertanian terhambat oleh ketiadaan jembatan yang memadai. Selama	Dusun 3 JUT Blok Kades, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan

					ini, mereka harus melewati aliran sungai atau jalan memutar yang membutuhkan waktu lebih lama dan meningkatkan biaya transportasi. Oleh karena itu, pembangunan JUT sangat dibutuhkan untuk mendukung kelancaran aktivitas pertanian dan meningkatkan hasil perekonomian warga.				Ketahanan Pangan
112	2328686	12-02-2025	Suyono	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Petani di Desa Sijenggung mengalami kesulitan mengangkut hasil panen karena akses ke lahan pertanian terhambat oleh ketiadaan jembatan yang memadai. Selama ini, mereka harus melewati aliran sungai atau jalan memutar yang membutuhkan waktu lebih lama dan meningkatkan biaya transportasi. Oleh karena itu, pembangunan JUT sangat dibutuhkan untuk mendukung kelancaran aktivitas pertanian dan meningkatkan hasil perekonomian warga.	Dusun 3 JUT Blok Kepyar, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
113	2328694	12-02-2025	Suyono	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Petani di Desa Sijenggung mengalami kesulitan mengangkut hasil panen karena akses ke lahan pertanian terhambat oleh ketiadaan jembatan yang memadai. Selama ini, mereka harus melewati aliran sungai atau jalan memutar yang membutuhkan waktu lebih lama dan meningkatkan biaya transportasi. Oleh karena itu, pembangunan JUT sangat dibutuhkan untuk mendukung kelancaran aktivitas pertanian dan meningkatkan hasil perekonomian warga.	Dusun 3 JUT Blok Sirangkik, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
114	2328698	12-02-2025	Suyono	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Petani di Desa Sijenggung mengalami kesulitan mengangkut hasil panen karena akses ke lahan pertanian terhambat oleh ketiadaan jembatan yang memadai. Selama ini, mereka harus melewati aliran sungai atau jalan memutar yang membutuhkan waktu	Dusun 3 JUT Blok Kali Wates, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan

					lebih lama dan meningkatkan biaya transportasi. Oleh karena itu, pembangunan JUT sangat dibutuhkan untuk mendukung kelancaran aktivitas pertanian dan meningkatkan hasil perekonomian warga.				
115	2328735	12-02-2025	Suyono	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Petani di Desa Sijenggung mengalami kesulitan mengangkut hasil panen karena akses ke lahan pertanian terhambat oleh keberadaan jembatan yang memadai. Selama ini, mereka harus melewati aliran sungai atau jalan memutar yang membutuhkan waktu lebih lama dan meningkatkan biaya transportasi. Oleh karena itu, pembangunan JUT sangat dibutuhkan untuk mendukung kelancaran aktivitas pertanian dan meningkatkan hasil perekonomian warga.	Dusun 3 JUT Blok Tuntang, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
116	2328743	12-02-2025	Suyono	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Petani di Desa Sijenggung mengalami kesulitan mengangkut hasil panen karena akses ke lahan pertanian terhambat oleh keberadaan jembatan yang memadai. Selama ini, mereka harus melewati aliran sungai atau jalan memutar yang membutuhkan waktu lebih lama dan meningkatkan biaya transportasi. Oleh karena itu, pembangunan JUT sangat dibutuhkan untuk mendukung kelancaran aktivitas pertanian dan meningkatkan hasil perekonomian warga.	Dusun 3 Blok Kalen Bening, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
117	2328747	12-02-2025	Suyono	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Petani di Desa Sijenggung mengalami kesulitan mengangkut hasil panen karena akses ke lahan pertanian terhambat oleh keberadaan jembatan yang memadai. Selama ini, mereka harus melewati aliran sungai atau jalan memutar yang membutuhkan waktu lebih lama dan meningkatkan biaya transportasi. Oleh karena itu, pembangunan	Dusun 3 JUT Blok Penyitan, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan

					JUT sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran aktivitas pertanian dan meningkatkan hasil perekonomian warga.				
118	2328769	12-02-2025	Suyono	Peningkatan Ternak Berbasis Masyarakat	Sebagian warga Desa Sijenggung memiliki potensi beternak tetapi terkendala keterbatasan modal untuk membeli hewan ternak. Akibatnya, mereka sulit mengembangkan usaha peternakan yang dapat meningkatkan perekonomian keluarga. Oleh karena itu, diperlukan bantuan hewan ternak sebagai stimulus bagi warga untuk meningkatkan kesejahteraan melalui sektor peternakan.	Dusun 3 Sijenggung, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
119	2330625	13-02-2025	Kusnan	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	masih kurangnya akses jalan pertanian di wilayah kadus 3	Kadus 3 Kepoyan, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
120	2335303	13-02-2025	SUBADRIN	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jalan usaha tani perlu dilakukan pengerasan	Depok RT 04 RW 02, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
121	2336153	13-02-2025	Anugrah Elan Septian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Akses jalan sulit untuk dilalui guna membawa hasil pertanian	Blok Kampunglor RW 1 Dusun I Desa Mlaliyan, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
122	2340563	13-02-2025	Kusnan	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	akses jalan pertanian masih rusak di wilayah kadus 1 (gGTNGAMO-GARUNG)	KADUS 1, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan

									Ketahanan Pangan
123	2340589	13-02-2025	Kusnan	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	masih rusaknya akses jalan ke lahan pertanian di wilayah Kadus I (Gondang-Krakal)	Kadus I, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
124	2341637	13-02-2025	Anugrah Elan Septian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Petani Kesulitan untuk mengangkut hasil pertanian	Blok Kubang Dusun Bandingan Desa Medayu RT 3 RW 3 Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
125	2346672	14-02-2025	Lis nadi	Peningkatan Ternak Berbasis Masyarakat	Masyarakat Desa Kutayasa selain mayoritas perkerjaannya petani ada juga yang rata-rata pekerjaannya berternak, terutama pada kelompok tani Ngudi Lestari yang semua anggotanya berternak.	Desa Kutayasa RT 03 RW 03, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
126	2346719	14-02-2025	Mulyono	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jalan Usaha Tani Blok Sedadap menuju Sejepet yang saat ini sudah di buka dengan lebar 3 meter belum dibangun dan kondisinya sangat memperihatinkan, sehingga akses pertanian masyarakat terganggu	Desa tlahab Kadus 1, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
127	2346778	14-02-2025	Lismadi	Peningkatan Ternak Berbasis Masyarakat	Belum adanya hewan untuk diternakan untuk klompok tani Ngudi Lestari	Desa Kutayasa, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan

128	2347024	14-02-2025	Mulyono	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jalan Usaha Tani Blok Lempong yang kondisinya rusak parah sehingga perlu dilakukan pembangunan	Desa Tlahab kadus 1, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
129	2349345	14-02-2025	HERMANTO	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jalan usaha tani dengan panjang 500m lebar 2,5m masih berupa tanah sehingga susah di lalui transportasi di bidang pertanian maupun pendagangan hasil pertanian	Kadus II, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
130	2349456	14-02-2025	HERMANTO	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jalan usaha tani yang masih berupa tanah sepanjang 300m lebar 2m sehingga mempersulit akses di jalur pertanian	Dusun III blok Tlatah Desa Sampang , Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
131	2350646	14-02-2025	HERMANTO	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jalan Usaha tani yang masih berupa tanah sehingga sulit untuk di lalui para petani baik itu penggunna sepeda motor maupun pejalan kaki.	Kadus I Blok Cilong, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
132	2351536	14-02-2025	ANITA DWI SETYOWATI, SKM	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Talud Pengaman Jalan Rencanan, saluran yg sangat dibutuhkan oleh petani [vital]	RT 1 RW 11, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
133	2352306	14-02-2025	GALIH PURWANDARU	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jalan Usaha Tani penghubung Desa Bawang dengan Desa Montrasan, jalan masih kondisi tanah dan akses jalan petani merasa kesulitan	Blok Gilar, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan

									Ketahanan Pangan
134	2352322	14-02-2025	GALIH PURWANDARU	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jalan Usaha Tani penghubung Desa Rawang dengan Desa sebu, jalan masih kondisi tanah dan akses jalan petani merasa kesulitan	Blok Sirawa, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
135	2352463	14-02-2025	GALIH PURWANDARU	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kondisi jalan menuju desa mantrianom masih tanah sehingga Petani kesulitan untuk akses jalan menuju Lahan Pertanian	Blok gligir, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
136	2352498	14-02-2025	GALIH PURWANDARU	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kondisi jalan pertanian menuju desa jalur masih tanah sehingga Petani kesulitan untuk akses jalan menuju Lahan Pertanian	Blok sirawa, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
137	2355219	14-02-2025	Nyana	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	jalan menuju sawah yang belum layak sehingga menenggangi pengangkutan hasil pertanian	Desa Beji, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
138	2357839	14-02-2025	Mukhlas	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Diperlukan akses jalan Pertanian sehingga diperlukan Rabat Jalan Usaha Tani (JUT) Blok Tandon	Blok Tandon Desa Kebakalan, Kab Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
139	2357969	14-02-2025	Mukhlas	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Kondisi saluran irigasi Blok Teru kurang memadai	Desa Kebakalan Blok PW, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan	Dinas Pertanian Perikanan

				Prasarana Pertanian Lainnya				Ketahanan Pangan	Dan Ketahanan Pangan
140	2358007	14-02-2025	Sunaryo, S.Pd.I	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Talud yang ada kurang memadai sehingga diperlukan pembangunan Talud di dusun II	Desa Kebanaran, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
141	2358065	14-02-2025	Waris	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Banyak jalan usaha tani yang belum terbangun	Desa Paseh, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	-
142	2358233	14-02-2025	Nasro	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	diPerlukannya JUT untuk kemudahan bagi Petani	Desa Kalamanta Rt/ Rw 001/ 002, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
143	2358256	14-02-2025	Sugeng, S.Pd.MM	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jalan Usaha Tani di dusun Dasih sudah rusak parah	Desa Penggisikan Dusun Dasih, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	-
144	2358282	14-02-2025	Satim	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Sender Talud Irigasi Mengalami Kerusakan	Kadus 2 Desa Sembang, Kab. Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	-
145	2566236	14-05-2025	Ibrahim	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Belum Adanya Kandang Untuk kelompok Ternak Sapi Lestari	Dusun Selang Kelompok Ternak Sapi Lestari Desa Sumberejo, Kab Banjarnegara	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan

2.6 Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan hasil reses anggota DPRD, melalui aplikasi SIPD telah disampaikan usulan program dan kegiatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan (Pokok-pokok pikiran) Tahun 2026 Kabupaten Banjarnegara

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN
1	1172948	14-02-2025	Ana Susanto	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kurangnya pemodalan anggota kelompok tani ternak	Untuk kepada Kelompok Tani Ternak Untuk Perkuh Desa Gentasuh Kecamatan Rawang, Kab Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
2	1192316	17-02-2025	Ana Susanto	Pengawasan Penggunaan Sarana Peralatan Pertanian sesuai dengan Rekomendasi Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kurangnya alsintan yang memadai	Mohon pengadaan alsintan kepada Kelompok Tani Tirta Jaya Desa Pucang Rw. 06 Kecamatan Rawang , Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
3	1203381	18-02-2025	Purwono	Pengawasan Mutu benih/bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kurangnya Anggaran untuk Pengembangan Kelompok Tani	Bantuan untuk Pengadaan Bibit Ternak Kambing Kelompok Tani BERKAH TANI Desa Kertek Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
4	1204232	18-02-2025	Hj. Dyah Catur Srinumaeni	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kurangnya Anggaran untuk Pengembangan Kelompok Tani	Bantuan kepada Kelompok Tani untuk Pengadaan Bibit Ternak Kambing, kelompok Tani TUNAS REJEKI Desa Pingit Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-

5	1204302	18-02-2025	Hj. Dyah Catur Srinurnaeni	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kurangnya Anggaran untuk Pengembangan Kelompok Tani	Bantuan kepada kelompok Tani untuk Pengadaan Bibit Ternak Kambing Kelompok Tani TARUNA BAKTA Desa Bandingan Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
6	1206415	19-02-2025	Ibrahim	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kurangnya permodalan kelompok tani	Hibah green house pembelian kambing kepada kelompok Tani Berkah Bersama Desa Gembol Kecamatan Pejawaran , Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
7	1206418	19-02-2025	Ibrahim	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kurangnya permodalan kelompok tani	Hibah bibit domba batur kepada Kelompok Tani Karya Tani Mudo Desa Pekasiran Kecamatan Batur , Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
8	1222030	20-02-2025	Ibrahim	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kurangnya permodalan kelompok tani	Hibah domba batur kepada Kelompok Tani Bumi Lestari Desa Sumberejo Kecamatan Batur , Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
9	1222572	20-02-2025	Sri Rahayu, SH. MM. MH.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Pembangunan Prasarana Pertanian)	Jalan sudah rusak dan butuh perbaikan	Kelompok Tani Makmur Desa Bengkah Kecamatan Sukasari , Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-

10	1235601	21-02-2025	Hj. Dyah Catur Srinurnaeni	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kurangnya Anggaran untuk Pengembangan Kelompok Tani	Bantuan untuk Pengadaan Bibit Ternak Kambing Kelompok Tani AMANG SUMBER Desa Tanjungsari Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
11	1235756	21-02-2025	Anwar, ST.	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kurangnya Anggaran untuk Pengembangan Kelompok Tani	Bantuan untuk Pengadaan Bibit Ternak Ayam Petelur, GAPOKTAN TAMUNA TANI Desa Sirukan Kecamatan Sirukan Kabupaten Banjarnegara, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
12	1237041	21-02-2025	Purwono	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kurangnya Anggaran untuk Pengembangan Kelompok Tani	Bantuan untuk Pengadaan Bibit Ternak Kambing Kelompok Tani TETAP USAHA 2, RT 03 RW 02 Desa Grogol Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
13	1237076	21-02-2025	Purwono	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kurangnya Anggaran untuk Pengembangan Kelompok Tani	Bantuan untuk Pengadaan Bibit Ternak Kambing Kelompok Tani ANUGERAH 2, Desa Sidengok Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
14	1237095	21-02-2025	Purwono	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai	Kurangnya Anggaran untuk	Bantuan untuk Pengadaan Lanjutan Alat Pertanian Kelompok Tani	Dinas Pertanian Perikanan	Dinas Pertanian Perikanan	Verifikasi Perangkat Daerah	-

				dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Peningkatan Kelompoktk Tani	TUNAS BERSEMI Desa Sidengok Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara, Kab. Banjarnegara	dan Ketahanan Pangan	dan Ketahanan Pangan		
15	1237101	21-02-2025	Purwono	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kurangnya Anggaran untuk Peningkatan Kelompok Tani	Bantuan untuk Pengadaan Sarpras Alat Pertanian Kelompok Tani TUNAS JAYA Desa Sidengok Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
16	1243765	22-02-2025	Arya Achmad Zakaria, S.H., M.H	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kurangnya Anggaran untuk Peningkatan kelompok	Bantuan untuk Pengadaan Bibit Ternak Kambing Kelompok Tani DAWUNG SARI Desa Pekandangan Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
17	1243801	22-02-2025	Arya Achmad Zakaria, S.H., M.H	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kurangnya Anggaran untuk Peningkatan Kelompok Tani	Bantuan untuk Sarana dan Prasarana Kepada Kelompok Budidaya Ikan (POKDAKTAN) TRI/BU/I JAYA ABADI, Desa Sigaluh Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
18	1257666	24-02-2025	Anwar, ST.	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kurangnya Anggaran untuk Peningkatan Kelompok	Bantuan Pengadaan Bibit Ternak Ayam Petelur Kelompok Tani MAKMUR Kadus 1 Desa Glempang	Dinas Pertanian Perikanan dan	Dinas Pertanian dan	Verifikasi Perangkat Daerah	-

						Kecamatan Mandiraja , Kab. Banjarnegara	Ketahanan Pangan	Ketahanan Pangan		
19	1260726	25-02-2025	Ryan Aditya Wahyu P, S.Km	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Sarana dan Prasarana budidaya ayam Petelur Kelompok Tani Arjuna Gemilang Desa Matukare , masih belum terpenuhi.	Hibah keuangan kepada kelompok Peternak Ayam Petelur " Arjuna Gemilang Sejahtera" Desa Matukara Kec. Mandiraja, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
20	1289553	27-02-2025	Marno	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kurangnya Anggaran untuk Peningkatan kelompok	Bantuan untuk Pengadaan Bibit Ternak Kambing kelompok Tani TRESNA MEKAR Dusun Jambu Desa Sidakangen Kecamatan Kalibening, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
21	1290237	27-02-2025	Panggalih Resian Febrianto	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Pengembangan usaha ternak kambing kelompok Tani Wana Lestari Desa Sidadhatar, masih mengalami kendala permodalan	Hibah Keuangan kpd Kelompok Tani Wana Lestari Desa Sidadhatar Kec. Punggelan , untuk pengadaan bibit kambing, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
22	1290606	27-02-2025	Purwono	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kurangnya Anggaran untuk Peningkatan kelompok	Bantuan untuk Pengadaan Bibit Ternak Kambing kelompok Tani CIPTA MANDIRI Desa Pejawaran Kecamatan Pejawaran, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
23	1290618	27-02-2025	Purwono	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kurangnya Anggaran untuk	Bantuan untuk Pengadaan Bibit Ternak Kambing kelompok Tani	Dinas Pertanian Perikanan	Dinas Pertanian Perikanan	Verifikasi Perangkat Daerah	-

					Peningkatan Kelompok	SRIKANDI Desa Pejawaran Kecamatan Pejawaran, Kab. Banjarnegara	dan Ketahanan Pangan	dan Ketahanan Pangan		
24	1290634	27-02-2025	Purwono	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kurangnya Anggaran untuk Peningkatan Kelompok	Bantuan untuk Pengadaan Bibit Ternak Kambing Kelompok Tani TUNAS JAYA Desa Pejawaran Kecamatan Pejawaran, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
25	1290653	27-02-2025	Purwono	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kurangnya Anggaran untuk Peningkatan Kelompok	Bantuan untuk Pengadaan Bibit Ternak Kambing Kelompok Tani TUNAS JAYA Desa Sidengok Kecamatan Pejawaran, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
26	1290657	27-02-2025	Purwono	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kurangnya Anggaran untuk Peningkatan Kelompok	Bantuan untuk Pengadaan Bibit Ternak Kambing, Kelompok Wanita Tani BHAKTI LESTARI Desa Pejawaran Kecamatan Pejawaran, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
27	1304873	01-03-2025	Mochammad Rachmanuddin	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kurangnya permodalan	Pelatih pengadaan bibit ternak sapi kepada Kelompok Tani Loh Jinawi Desa Kesenet Kecamatan Banjarmangu Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
28	1304945	01-03-2025	Slamet	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa (Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian)	Belum adanya pelatihan untuk kelompok tani untuk meningkatkan	Pengadaan pelatihan Kelompok Tani Desa Beji Kecamatan Pandanarum Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan	Dinas Pertanian Perikanan dan	Verifikasi Perangkat Daerah	-

					kapasitas para petani		Ketahanan Pangan	Ketahanan Pangan		
29	1304971	01-03-2025	Slamet	Pentingnya Penggunaan Sarana Pembubung Pertanian	Kurangnya sarpras	Hibah pengadaan hand tractor roda 2 kepada Kelompok Tani Ngudi Mulyo II Desa Majapengah Kecamatan Kalibening , Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
30	1310556	02-03-2025	Hj. Ernawati Lathifah, S.H	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak (Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten)	Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kelompok Ternak Sri Lestari Aji Dusun Pringamba RT 01 RW 01 Desa Ardisaya kec. Pagentan untuk pengadaan bantuan ternak sapi	Dusun Pringamba RT 01 RW 01 Desa Ardisaya kec. Pagentan , Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
31	1310583	02-03-2025	Hj. Ernawati Lathifah, S.H	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak (Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten)	Pemberdayaan ekonomi kelompok Tani Ternak SUBO MAKMUR Dusun Sido Mulyo RT 05 RW 05 Desa Pekasiran Kec. Batur, melalui ternak Domba Batur	Dusun Sido Mulyo RT 05 RW 05 Desa Pekasiran Kec. Batur, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
32	1319391	03-03-2025	H. Achmad Salabi	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Dibutuhkan bantuan hibah bibit ternak untuk peningkatan kesejahteraan petani	Bantuan hibah bibit kambing untuk kelompok Tani Karya Utama 1 Desa Penusupan Kecamatan Pejawaran, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-

33	1320458	03-03-2025	Aditya Prasetya Utama	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa (Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian)	Perlu adanya Peningkatan kapasitas bagi anggota kelompok Tani Hijau Lestari Gentansari RT 04 RW 03 Desa Gentansari Kec. Pagedongan	Gentansari RT 04 RW 03 Desa Gentansari Kec Pagedongan, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
34	1320675	03-03-2025	Aditya Prasetya Utama	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	pemberdayaan Kelompok Tani ternak kambing "Minda Dadi" Desa Watuuruji Kec. Bawang	Desa Watuuruji Kec. Bawang, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
35	1320759	03-03-2025	Aditya Prasetya Utama	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Pemberdayaan kelompok Tani Ternak Domba "Jati Mulya" Desa Watuuruji Kec. Bawang	Dusun Jati Mulya Desa Watuuruji Kec. Bawang, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
36	1320823	03-03-2025	Aditya Prasetya Utama	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Konservasi, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kelompok Tani Tani Maju 3 Desa Majalengka Kec. Bawang	Desa Majalengka Kec. Bawang, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
37	1320960	03-03-2025	Aditya Prasetya Utama	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Konservasi, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kelompok Wanita Tani Sinar Tani Dusun Majalangu Desa Majalengka Kec. Bawang membutuhkan alat alat pertanian kendalanya roda 3	Dusun Majalangu Desa Majalengka Kec. Bawang , Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-

38	1323323	03-03-2025	Purwono	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kurangnya Anggaran Untuk Pemberdayaan Kelompok Tani	Bantuan Untuk Pengadaan Bibit Ternak Kambing, Kelompok TANI HARAPAN Desa Kayuares Kecamatan Pagentan, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
39	1323351	03-03-2025	Purwono	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kurangnya Anggaran Untuk Pemberdayaan Kelompok Tani	Bantuan Untuk Pengadaan Bibit Ternak Kambing, Kelompok Tani KEMUNING Desa Pejawaran Kecamatan Pejawaran, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
40	1323363	03-03-2025	Purwono	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kurangnya Anggaran Untuk Pemberdayaan Kelompok Tani	Bantuan Untuk Pengadaan Bibit Ternak Kambing, Kelompok TANI UTUN Desa Darmasaba Kecamatan Pejawaran, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
41	1323388	03-03-2025	Purwono	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Pembangunan Prasarana Pertanian)	Kurangnya Anggaran Untuk Pemberdayaan Kelompok Tani	Bantuan untuk Pembangunan talan Usaha Tani, Kelompok Tani SAKOMUKTI Desa Sarwadadi Kecamatan Pejawaran, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
42	1323541	03-03-2025	Purwono	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak (dan Rumpun/Galur Ternak (Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten)	Kurangnya Anggaran Untuk Pemberdayaan Kelompok	Hibah Untuk Sarana dan Prasarana Kepada Perkumpulan Pelestari Lebah Madu Nusantara (LEBAHNARA) Desa Kaliwiuh Kecamatan Pagentan, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-

43	1323765	03-03-2025	Hj. Dyah Catur Srinurnaeni	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Pembangunan Prasarana Pertanian)	Kurangnya Anggaran Untuk Pemberdayaan Kelompok Tani	Bantuan untuk Pembangunan Jalan Usaha Tani Kelompok Tani UTAMA Desa Tlenggung Kecamatan Mandiraja, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
44	1323860	03-03-2025	WAHIU EIATMNA (k. B)	Pembangunan, Rehab-Rtasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Pembangunan Prasarana Pertanian)	Kurangnya Anggaran Untuk Pemberdayaan Kelompok Tani	Bantuan Untuk Pembangunan Jalan Usaha Tani RT 05 RW 01 Desa Pringamba Kecamatan Pagedongan, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
45	1324034	03-03-2025	H. Edy Purwanto	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Balai Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kurangnya Anggaran Untuk Pemberdayaan Kelompok Tani	Bantuan Untuk Pengadaan Bibit Ternak Kambing, Kelompok Ternak Kambing SARIKAH Desa Kalipelus Kecamatan Purwanegara, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
46	1324039	03-03-2025	H. Edy Purwanto	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Balai Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kurangnya Anggaran Untuk Pemberdayaan Kelompok Tani	Bantuan Untuk Pengadaan Bibit Ternak Kambing, Kelompok Ternak Kambing LESTARI Dusun Pemotogan Desa Kalipelus Kecamatan Purwanegara, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
47	1324075	03-03-2025	H. Edy Purwanto	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Pembangunan Prasarana Pertanian)	Sarpras Tidak Memadai dan Kekurangan Anggaran untuk Pembangunan	Bantuan untuk Pembangunan Rabat Beton Jalan Usaha Tani Blok Watuarca Desa Majalengka Kecamatan Bawang, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-

48	1324085	03-03-2025	H. Edy Purwanto	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Pembangunan Prasarana Pertanian)	Sarpras Tidak Memadai dan Kekurangan Anggaran untuk Pembangunan	Bantuan untuk Pengaspalan Jalan Usaha Tani Blok Wadas Tumpang Desa Majalengka Kecamatan Bawang, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
49	1324162	03-03-2025	H. Edy Purwanto	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kurangnya Anggaran Untuk Pemberdayaan Kelompok Tani	Hibah Kepada Kelompo Wanita Tani MEKAR SARI Dusun Penusupan Desa Kalipelus Kecamatan Purwanegara, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
50	1324175	03-03-2025	H. Edy Purwanto	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kurangnya Anggaran Untuk Pemberdayaan Kelompok Tani	Hibah Kepada Kelompo Wanita Tani NGUDI RAHAYU Dusun Bojongsari Desa Kalipelus Kecamatan Purwanegara, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
51	1324267	03-03-2025	Arya Achmad Zakaria, S.H., M.H	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Pembangunan Prasarana Pertanian)	Sarpras Tidak Memadai dan Kekurangan Anggaran untuk Pembangunan	Bantuan untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Jalan Usaha Tani Blok Jepet Kadus 4 Desa Kalijunjar Kecamatan Banjarmangu, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
52	1324273	03-03-2025	Arya Achmad Zakaria, S.H., M.H	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Pembangunan Prasarana Pertanian)	Sarpras Tidak Memadai dan Kekurangan Anggaran untuk Pembangunan	Bantuan untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Jalan Usaha Tani Blok Srengkeng Kadus 4 Desa Kalijunjar Kecamatan Banjarmangu, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-

53	1324281	03-03-2025	Arya Achmad Zakaria, S.H., M.H	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Pembangunan Prasarana Pertanian)	Sarpras Tidak Memadai dan Kekurangan Anggaran untuk Pembangunan	Bantuan untuk Pembangunan Jalan Usaha Tani RW 1 di Desa Pekandangan Kecamatan Banjarmangu, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
54	1333318	04-03-2025	RCH HAMDANI RAHMI AL TIMIMO	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Pembangunan Prasarana Pertanian)	membutuhkan Penanganan jalan usaha Tani dengan rabat beton khususnya Dusun Karangmenjangan desa Sawangan Kec. Punggelan	Dusun Karangmenjangan desa Sawangan Kec. Punggelan, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
55	1345213	05-03-2025	Hj. Siti Rohaniati	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Pembangunan Prasarana Pertanian)	Jalan Usaha Tani	RT 4 RW 1 Desa Sipedang Kecamatan Banjarmangu Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	-	Disetujui	-
56	1346247	05-03-2025	Hj. Ernawati Lathifah, S.H	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Pembangunan Prasarana Pertanian)	Pembangunan Jalan Usaha Tani kelompok Tani Sari Mulya Desa Kali Tlaga Kec. Pagentan	Dsn Kalitlaga RT 03 RW 04 Desa Kalitlaga Kec. Pagentan, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
57	1348576	05-03-2025	H. Bambang Suparno	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak (Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten)	Pembesaran Ikan Lele POKLIS(KASIS "PENGGIN MULYA" RT 03 RW 04 Desa Kutawaluh	RT 03 RW 04 Desa Kutawaluh Kec. Purwanegara, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
58	1348717	05-03-2025	H. Bambang Suparno	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Permohonan Bantuan Pembesaran Ikan	RT 03 RW 01 Desa Kutawaluh Kecamatan	Dinas Pertanian Perikanan	Dinas Pertanian Perikanan	Verifikasi Perangkat Daerah	-

				(Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten)	Gelo POKDAKAN "Jaya Makmur" RT 03 RW 01 Desa Rotaseluh Kecamatan Purwanegara	Purwanegara, Kab. Banjarnegara	dan Ketahanan Pangan	dan Ketahanan Pangan		
59	1349233	05-03-2025	Marno	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Pembangunan Prasarana Pertanian)	Sarana Tidak Bermanfaat dan Kekurangan Anggaran untuk Pembangunan	Pembangunan Jalan Usaha Tani Bakalan Pereng Desa Kertosari Kecamatan Kalibening, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
60	1349250	05-03-2025	Marno	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Pembangunan Prasarana Pertanian)	Sarana Tidak Bermanfaat dan Kekurangan Anggaran untuk Pembangunan	Bantuan untuk Pembangunan Jalan Usaha Tani Dusun Plana Lor Desa Sidakangen Kecamatan Kalibening, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
61	1349463	05-03-2025	Purwono	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kurangnya Anggaran untuk Pemberdayaan Kelompok Tani	Bantuan Untuk Pengadaan Bibit Ternak Kambing, Kelompok Tani MARGI ASRAYU Desa Bagaspati Kecamatan Pagentan, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
62	1358721	06-03-2025	Edi Santosa	Pendampingan Penggunaan Lahan Pendukung Pertanian	Kelompok tani mengusulkan bantuan berupa mesin pompa air	Bantuan Tabuh pompa air untuk Kelompok Tani Maju Makmur Desa Badamita Kecamatan Rakit, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
63	1359795	06-03-2025	H. Rokhman Supriyadi	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Diperlukan bantuan tabuh ternak kambing untuk	tabuh ternak kambing untuk kelompok Tani Dewi Sri II Desa Meriboni	Dinas Pertanian Perikanan dan	Dinas Pertanian Perikanan dan	Verifikasi Perangkat Daerah	-

					peningkatan ekonomi petani	Kecamatan Purwanegara, Kab. Banjarnegara	Ketahanan Pangan	Ketahanan Pangan		
64	1361791	06-03-2025	Udani Puji Lestari, S. Farm, Apt	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Pembangunan Prasarana Pertanian)	jalan masih tanah	Peningkatan Jalan Usaha Tani Susuk RT 003 RW 001 Desa Pekasiran, Kec Madukara , Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
65	1366345	06-03-2025	WAHJU DJATMIKA AL. BS	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di kecamatan dan Desa (Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian)	Dibutuhkan peningkatan kapasitas Pada Kelompok Wanita Tani	Peningkatan Kapasitas Kelompok Wanita Tani MEKAR KAHARU Desa Susukan Kecamatan Susukan , Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
66	1378500	07-03-2025	Panggalih Resian Febrianto	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	kelompok Tani Subur Alami Desa Mertasari Kec Wanadadi masih kekurangan dana untuk pengembangan ternak kambing	Hibah keuangan untuk Kelompok Tani Subur Alami Desa Mertasari Kec Wanadadi, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
67	1379098	07-03-2025	Slamet	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Pembangunan Prasarana Pertanian)	Jalan sudah rusak dan butuh perbaikan	Pembangunan Jalan Usaha Tani Krakalan - Sebomeng Desa Gumelargi Kecamatan Kalibening , Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	verifikasi Perangkat Daerah	-
68	1379110	07-03-2025	Slamet	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Pembangunan Prasarana Pertanian)	Jalan sudah rusak dan butuh perbaikan	Pembangunan Jalan Usaha Tani Kelompok Tani Subur Desa Slatri Kecamatan Karangkobar , Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	verifikasi Perangkat Daerah	-

69	1379113	07-03-2025	Slamet	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Pembangunan Prasarana Pertanian)	Jalan sudah rusak dan butuh perbaikan	Pembangunan JUT Ngepoman - Karanggandul Desa Ingkang Kecamatan Karangkobar , Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	-	Dibatalkan	Desanya tidak sesuai dengan permohonan
70	1379116	07-03-2025	Slamet	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Pembangunan Prasarana Pertanian)	Jalan sudah rusak dan butuh perbaikan	Pembangunan JUT Lapangan - Sikelir Desa Ingkang Kecamatan Karangkobar , Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	-	Dibatalkan	Desa pada alamat lokasi tidak sesuai dengan permohonan
71	1379119	07-03-2025	Slamet	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Pembangunan Prasarana Pertanian)	Jalan sudah rusak dan butuh perbaikan	Pembangunan JUT Jalukan Ngepoh Ongleng Desa Ingkang Kecamatan Karangkobar , Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	-	Dibatalkan	Desa pada alamat lokasi tidak sesuai dengan permohonan
72	1379124	07-03-2025	Slamet	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Pembangunan Prasarana Pertanian)	Jalan sudah rusak dan butuh perbaikan	Pembangunan JUT Kalibening - Limbangan Desa Ingkang Kecamatan Karangkobar , Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	-	Dikembalikan	Nama desa di Alamat Lokasi tidak sama dengan di Permohonan
73	1379127	07-03-2025	Slamet	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Pembangunan Prasarana Pertanian)	Dibutuhkan pembangunan talud untuk mencegah longsor	Pembangunan talud penahan JUT Gardan Dusun Kalibening 2 Rt. 02 Rw. 03 Desa Kalibening Kecamatan Kalibening , Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
74	1379135	07-03-2025	Slamet	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Pembangunan Prasarana Pertanian)	Jalan sudah rusak dan butuh perbaikan	Pembangunan JUT Kadus 3 Blok Cilong Desa Lampang Kecamatan Karangkobar , Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan	Dinas Pertanian Perikanan dan	Verifikasi Perangkat Daerah	-

							Ketahanan Pangan	Ketahanan Pangan		
75	1379138	07-03-2025	Slamet	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Pembangunan Prasarana Pertanian)	Jalan sudah rusak dan butuh perbaikan	Pembangunan JUT Kadus II Desa Sampang Kecamatan Karanglebar , Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
76	1379141	07-03-2025	Slamet	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Pembangunan Prasarana Pertanian)	Jalan sudah rusak dan butuh perbaikan	Pembangunan JUT Kadus III Blok Tlatah Desa Sampang Kecamatan Karanglebar , Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
77	1379146	07-03-2025	Slamet	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Pembangunan Prasarana Pertanian)	Jalan sudah rusak dan butuh perbaikan	Rabat beton JUT RT. 03 Rw. 03 Desa Karangtengah Kecamatan Wanayasa , Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
78	1379152	07-03-2025	Slamet	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Pembangunan Prasarana Pertanian)	Jalan sudah rusak dan butuh perbaikan	Pembangunan JUT Dusun Sembawa Desa Sembawa Kecamatan Kalibening , Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
79	1379160	07-03-2025	Slamet	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Pembangunan Prasarana Pertanian)	Jalan sudah rusak dan butuh perbaikan	Penyingkatan Jalan Usaha Tani Kelompok Tani Ternak Langgeng Dusun Sawangan Desa Serang Kecamatan Pandanarum , Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
80	1379164	07-03-2025	Slamet	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Belum terbangunnya rigen yang memadai	Peningkatan rigen Kelompok Tani Ternak Langgeng Dusun	Dinas Pertanian Perikanan	Dinas Pertanian Perikanan	Verifikasi Perangkat Daerah	-

				(Pembangunan Prasarana Pertanian)		Sawangan Desa Sidangan Kecamatan Pemenang , Kab. Banjarnegara	dan Ketahanan Pangan	dan Ketahanan Pangan		
81	1379170	07-03-2025	Slamet	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Pembangunan Prasarana Pertanian)	Jalan sudah rusak dan butuh perbaikan	Pembangunan H/T Blok Rawa Dusun Nangsit Desa Pulang kecamatan Wanayasa , Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
82	1379174	07-03-2025	Slamet	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Pembangunan Prasarana Pertanian)	Jalan sudah rusak dan butuh perbaikan	Pembangunan H/T Desa Karanggondang kecamatan Karangkobar , Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
83	1379178	07-03-2025	Slamet	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Pembangunan Prasarana Pertanian)	Jalan sudah rusak dan butuh perbaikan	Pembangunan H/T Petung - Tenmu Desa Jegong kecamatan Karangkobar , Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
84	1379180	07-03-2025	Slamet	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Pembangunan Prasarana Pertanian)	Jalan sudah rusak dan butuh perbaikan	Pembangunan H/T Sukuh - Ngalo Desa Jegong kecamatan Karangkobar , Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
85	1379185	07-03-2025	Slamet	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Pembangunan Prasarana Pertanian)	Jalan sudah rusak dan butuh perbaikan	Pembangunan H/T Dusun 1 Desa Karangkobar kecamatan Karangkobar , Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-

86	1379190	07-03-2025	Slamet	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Pembangunan Prasarana Pertanian)	Jalan sudah rusak dan butuh perbaikan	Pembangunan JUT Kelompok Tani Sida Dadi 2 Desa Bedana Kecamatan Kalibening , Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
87	1379196	07-03-2025	Slamet	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Pembangunan Prasarana Pertanian)	Jalan sudah rusak dan butuh perbaikan	Pembangunan JUT Dukuh Galaran Desa Beji Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Pandanarum , Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
88	1379205	07-03-2025	Slamet	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Pembangunan Prasarana Pertanian)	Jalan sudah rusak dan butuh perbaikan	JUT Kelompok Tani Karya Tani Desa Pandanarum Kecamatan Pandanarum , Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
89	1379211	07-03-2025	Slamet	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Pembangunan Prasarana Pertanian)	Jalan sudah rusak dan butuh perbaikan	Betonisasi JUT Blok Kali Gamblok KWT Puspitasari Desa Tempuran Kecamatan Wanayasa , Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
90	1379216	07-03-2025	Slamet	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Pembangunan Prasarana Pertanian)	Jalan sudah rusak dan butuh perbaikan	Betonisasi JUT ruas jalan Rt. 02 Rw. 02 sampai Blok Kali tengah Kelompok Tani Barokah Desa Tempuran Kecamatan Wanayasa , Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
91	1379221	07-03-2025	Slamet	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Pembangunan Prasarana Pertanian)	Jalan sudah rusak dan butuh perbaikan	JUT Kelompok Tani Wana Lestari Desa Kalisatkidul Kecamatan Kalibening , Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan	Dinas Pertanian Perikanan dan	Verifikasi Perangkat Daerah	-

							Ketahanan Pangan	Ketahanan Pangan		
92	1379231	07-03-2025	Slamet	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Pembangunan Prasarana Pertanian)	Jalan sudah rusak dan butuh perbaikan	Pembangunan Jalan Usaha Tani Kelompok Tani Tegalsari Tani Desa Pandansari Kecamatan Pandansari , Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
93	1379238	07-03-2025	Slamet	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Pembangunan Prasarana Pertanian)	Dibutuhkan irigasi yang memadai	Pembangunan Irigasi Kelompok Tani Mulyo Tani Desa Pandansari Kecamatan Pandansari , Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
94	1379355	07-03-2025	Ibrahim	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Pembangunan Prasarana Pertanian)	Jalan rusak dan butuh perbaikan	Betonisasi Jalan Usaha Tani Blok Cooor Isoning Desa Condongcampur Kecamatan Pejawaran , Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
95	1379359	07-03-2025	Ibrahim	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Pembangunan Prasarana Pertanian)	Jalan rusak dan butuh perbaikan	JUT rusa jalan Desa Pasuruhan Kecamatan Batur , Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
96	1379361	07-03-2025	Ibrahim	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Pembangunan Prasarana Pertanian)	Jalan rusak dan butuh perbaikan	JUT Kelompok Tani Anugrah 2 Desa Sidengok RT. 03 RW. 07 Kecamatan Pejawaran , Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
97	1379362	07-03-2025	Ibrahim	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan rusak dan butuh perbaikan	JUT KT Berkah Bersama Desa Gembol RT. 03 RW	Dinas Pertanian Perikanan	Dinas Pertanian Perikanan	Verifikasi Perangkat Daerah	-

				(Pembangunan Prasarana Pertanian)		02 Kecamatan Pejawaran , Kab. Banjarnegara	dan Ketahanan Pangan	dan Ketahanan Pangan		
98	1379715	07-03-2025	Guruh Tri Adi Putra, S. Akun	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Pembangunan Prasarana Pertanian)	Jalan sudah rusak dan butuh perbaikan	Pembangunan Jalan Usaha Tani Kelompok Tani Nguli Makmur Blok 13 Pisangan Desa Rakit Kecamatan Rakit , Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
99	1379716	07-03-2025	Guruh Tri Adi Putra, S. Akun	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Pembangunan Prasarana Pertanian)	Jalan sudah rusak dan butuh perbaikan	Pembangunan Jalan Usaha Tani Kelompok Tani Budi Mulya Blok 11 Pasa Desa Rakit Kecamatan Rakit , Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
100	1379735	07-03-2025	Guruh Tri Adi Putra, S. Akun	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Pembangunan Prasarana Pertanian)	Jalan sudah rusak dan butuh perbaikan	Peningkatan Jalan Usaha Tani Kelompok Tani Rukun Lestari Desa Randingan Kecamatan Rakit , Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
101	1379964	07-03-2025	Marno	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Keterbatasnya Anggaran Untuk Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani	Bantuan Untuk Pengadaan Bibit Ternak Ayam Petelur, Kelompok Wanita Tani PUTRI MANDIRI Desa Kutasaba Kecamatan Madukara, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
102	1382957	08-03-2025	Guruh Tri Adi Putra, S. Akun	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Pembangunan Prasarana Pertanian)	Jalan sudah rusak dan butuh perbaikan	Peningkatan JUT berupa cor beton, talud dan rabatase serta saluran irigasi Kelompok Tani Sedya Usaha Desa Kasiib Kecamatan Wanadadi , Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-

103	1382959	08-03-2025	Guruh Tri Adi Putra. S. Akun	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Pembangunan Prasarana Pertanian)	Jalan sudah rusak dan butuh perbaikan	Rabat beton dan pembuatan JUT Kelompok Tani Gunung 1 Rukun Desa Kasilih Kecamatan Wanadadi , Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
104	1382960	08-03-2025	Guruh Tri Adi Putra. S. Akun	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Pembangunan Prasarana Pertanian)	Jalan sudah rusak dan butuh perbaikan	Rabat beton dan talud JUT Kelompok Tani Barokah Desa Kasilih Kecamatan Wanadadi , Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
105	1382961	08-03-2025	Guruh Tri Adi Putra. S. Akun	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Pembangunan Prasarana Pertanian)	Jalan sudah rusak dan butuh perbaikan	Rabat beton, drainase dan talud JUT Kelompok Tani Rukun Jenep (1) Desa Kasilih Kecamatan Wanadadi , Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
106	1383035	08-03-2025	Guruh Tri Adi Putra. S. Akun	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Pembangunan Prasarana Pertanian)	Jalan sudah rusak dan butuh perbaikan	Pembangunan JUT Kelompok Tani Krida Manjani 1 Blok Bakar Pt. 01 Rw. 02 Dusun Dogleg Desa Penggisikan Kecamatan Madukara , Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
107	1384937	08-03-2025	Marno	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kurangnya Anggaran Untuk Pemberdayaan Kelompok Tani	Bantuan Untuk Pengadaan Bibit Ternak Kambing, Kelompok Tani SARI ASIH Dusun Tirebarig Desa Kasiyoman Kecamatan Kalibening, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
108	1384942	08-03-2025	Marno	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kurangnya Anggaran Untuk	Bantuan Untuk Pengadaan Bibit Ternak Kambing, Kelompok Tani	Dinas Pertanian Perikanan	Dinas Pertanian Perikanan	Verifikasi Perangkat Daerah	-

					Pemberdayaan Kelompok Tani	SUWA Desa Kasomalan Kecamatan Kalibening, Kab. Banjarnegara	dan Ketahanan Pangan	dan Ketahanan Pangan		
109	1391326	09-03-2025	Aditya Prasetya Utama	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak (Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten)	permohonan bantuan ternak kambing untuk kelompok Tani Langgeng Jaya Desa Majalengka kec. Bawang	Desa Majalengka kec. Bawang, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
110	1391387	09-03-2025	Aditya Prasetya Utama	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak (Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten)	Permohonan Bantuan Bench Rain Wir untuk PEKEMAAN MINA TANI Desa Majalengka Kec. Bawang	Desa Majalengka kecamatan Bawang, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
111	1392715	09-03-2025	Mudakir	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak (Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten)	Pengadaan bibit tanaman, pupuk dan peralatan pertanian bagi KWT Mawar Desa Kincang	Kincang RT 02 RW 03 Desa Kincang Kec. Rakit, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
112	1397716	09-03-2025	H. Achmad Salabi	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Butuh bantuan bibit ternak kambing untuk peningkatan kesejahteraan petani	Bantuan hibah ternak untuk Kelompok Tani Tani Muda RT 04 RW 03 Desa Penusupan Kecamatan Pejawaran, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
113	1402171	10-03-2025	H. Dedi Suromli, S.Pd	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten	Kelompok budidaya ikan membutuhkan bantuan hibah keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan	Bantuan hibah keuangan untuk kelompok Budidaya Ikan Mina Lan Sejahtera RT 04 RW 01 Desa Candi Wulan	Dinas Pertanian Perikanan dan ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-

						Kecamatan Mandiraja , Kab. Banjarnegara				
114	1413864	10-03-2025	H. Dedi Suromli, S.Pd	Pembangunan Sarana Pertanian	Kelompok tani membutuhkan alat bantu untuk pengolahan lahan pertanian	Bantuan keuangan untuk pembelian alat pertanian sosial ekonomi kepada kelompok tani Sidji Tani RT 04 RW 01 Desa Tambakan Kecamatan Wanayasa, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
115	1417131	11-03-2025	Anas Hidayat, SE	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Pembangunan Prasarana Pertanian)	Jalan sudah rusak dan butuh perbaikan	Peningkatan Jalan Usaha Tani Rt. 03 Rw. 05 Dusun Wiragunan Desa Gemuruh Kecamatan Banjarnegara , Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
116	1417138	11-03-2025	Anas Hidayat, SE	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Pembangunan Prasarana Pertanian)	Jalan sudah rusak dan butuh perbaikan	Peningkatan Jalan Usaha Tani Kelompok Tani Subadah Dusun Guruh Desa Kawarigan Kecamatan Punggelan , Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
117	1417141	11-03-2025	Anas Hidayat, SE	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Pembangunan Prasarana Pertanian)	Jalan sudah rusak dan butuh perbaikan	Peningkatan Jalan Usaha Tani Blok Sawarak Dusun Gumingsir Rw. 02 Desa Gumingsir Kecamatan Wanadadi , Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
118	1417149	11-03-2025	Anas Hidayat, SE	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Pembangunan Prasarana Pertanian)	Jalan sudah rusak dan butuh perbaikan	Pembangunan jembatan dan Jalan Usaha Tani Kadus 3 Kelompok Tani Handayani desa Jembatjaya Rt. 04 Rw. 01 Kecamatan Wanadadi , Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-

119	1417157	11-03-2025	Anas Hidayat, SE	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Pembangunan Prasarana Pertanian)	Jalan sudah rusak dan butuh perbaikan	Jalan Usaha Tani RT. 01 Dusun 02 Desa Pringli Kecamatan Rakit , Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
120	1417164	11-03-2025	Anas Hidayat, SE	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Pembangunan Prasarana Pertanian)	Jalan sudah rusak dan butuh perbaikan	JUT Dukuh Gedangan RT. 03 Rw. 02 Desa Purwasana Kecamatan Punggelan , Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
121	1417165	11-03-2025	Anas Hidayat, SE	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Pembangunan Prasarana Pertanian)	Jalan sudah rusak dan butuh perbaikan	Makadam JUT Dusun Sigedung RT. 02 Rw. 04 Desa Purwasana Kecamatan Punggelan , Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
122	1417168	11-03-2025	Anas Hidayat, SE	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Pembangunan Prasarana Pertanian)	Jalan sudah rusak dan butuh perbaikan	Rabat beton JUT Dukuh Sigem Rt. 03 Rw. 03 ke sawah tengong Desa Purwasana Kecamatan Punggelan , Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
123	1417214	11-03-2025	H. Rokhman Supriyadi	Pembangunan Sarana Pertanian	Diperlukan bantuan tobek untuk peningkatan kesejahteraan petani	Bantuan keuangan untuk pembuatan rumah tobik Kelompok Tani Wadhasmalang Nomor 47 RW 08 Desa Merden Kecamatan Purwanegara, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
124	1425132	11-03-2025	Purwono	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Kurangnya Anggaran Untuk	Bantuan Untuk Pembangunan Jalan Usaha Tani, Kelompok	Dinas Pertanian Perikanan	Dinas Pertanian Perikanan	Verifikasi Perangkat Daerah	-

				(Pembangunan Prasarana Pertanian)	Pembangunan Sarpras Pertanian	Tani SRI REJEKI Desa [illegible] Kecamatan Pejawaran, Kab. Banjarnegara	dan Ketahanan Pangan	dan Ketahanan Pangan		
125	1425147	11-03-2025	Purwono	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kurangnya Anggaran Untuk Pemberdayaan Kelompok Tani	Bantuan Untuk Pengadaan Bibit Ternak Kambing, Kelompok Tani TUNAS HARAPAN Desa Penusupan Kecamatan Pejawaran, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
126	1425626	11-03-2025	H. Edy Purwanto	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kurangnya Anggaran Untuk Pemberdayaan Kelompok Tani	Bantuan Untuk Pengadaan Bibit Ternak Kambing, Kelompok Tani SUMBER REJEKI Kurang Tengah RT 02 RW 05 Desa Pagedongan Kecamatan Pagedongan, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
127	1426036	11-03-2025	Purwono	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Pembangunan Prasarana Pertanian)	Swadaya Masyarakat Tidak Mencukupi untuk Pembangunan/Rehabilitasi	Bantuan Untuk Pembangunan Rabat Beton Jalan Usaha Tani Blok Cocor Gerung Desa Condongcampur Kecamatan Pejawaran, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
128	1431861	12-03-2025	Mochammad Rachmanuddin	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kurangnya sarpras yang memadai	Ubah kepada Kelompok Tani Ngudi Tani 3 Desa Limbangan Kecamatan Madukara , Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
129	1432007	12-03-2025	DJARKASI, S.Th.I	Pembangunan Sarana Pertanian	Kurangnya alat pertanian	Ubah kepada Kelompok Tani Sri Watu II Desa Kutawaluh Kec.	Dinas Pertanian Perikanan	Dinas Pertanian Perikanan	Verifikasi Perangkat Daerah	-

						Purwanegara, Kab Banjarnegara	dan Ketahanan Pangan	dan Ketahanan Pangan		
130	1433615	12-03-2025	Anas Hidayat, SE	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Pembangunan Prasarana Pertanian)	Jalan sudah rusak dan butuh perbaikan	JUT Kelompok Tani Margi Tani 2 Kalijati Desa Purwasaba Kecamatan Mandiraja , Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
131	1433643	12-03-2025	Anas Hidayat, SE	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Pembangunan Prasarana Pertanian)	Jalan sudah rusak dan butuh perbaikan	JUT Kelompok Tani Margi Tani 2 Dusun Bawagondu Desa Purwasaba Kecamatan Mandiraja , Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
132	1433709	12-03-2025	Anas Hidayat, SE	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Pembangunan Prasarana Pertanian)	perlu adanya rehab saluran	RJT Kadus 4 Kelompok Tani Margi Tani 2 Desa Purwasaba Kecamatan Mandiraja , Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
133	1433737	12-03-2025	Anas Hidayat, SE	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Pembangunan Prasarana Pertanian)	perlu adanya rehab saluran	Rehabilitasi jaringan irigasi tingkat usaha tani / jaringan irigasi tingkat desa Kelompok Tani Lestari Dusun Segong Desa Purwasaba Kecamatan Mandiraja , Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
134	1433764	12-03-2025	Anas Hidayat, SE	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Pembangunan Prasarana Pertanian)	Jalan sudah rusak dan butuh perbaikan	JUT Kelompok Tani Lestari Kadus 5 Rakawati Desa Purwasaba Kecamatan Mandiraja , Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-

135	1436957	12-03-2025	Anas Hidayat, SE	Pembangunan Sarana Pertanian	Belum adanya jaringan irigasi yang memadai	Pembangunan jaringan irigasi Kelompok Tani Main Makmur Desa Baranta Kecamatan Rakit _Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
136	1437248	12-03-2025	Anwar, ST.	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kurangnya Anggaran Untuk Pemberdayaan Kelompok Tani	Bantuan Untuk Pengadaan Bibit Ternak Kambing, Kelompok Tani MENTEGING TANI 3 Desa Kalikonglo Kecamatan Mandiraja, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
137	1439502	12-03-2025	Anwar, ST.	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kurangnya Anggaran Untuk Pemberdayaan Kelompok Tani	Bantuan Untuk Pengadaan Bibit Ternak Kambing, Kelompok Tani ADIBHUWA Kadus 4 Desa Glempang Kecamatan Mandiraja, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
138	1444137	13-03-2025	Sugijen, A.Ma	Pembangunan Sarana Pertanian	Kurangnya sarana prasarana pertanian	Hibah kepada Kelompok Wanita Tani (untuk Pengadaan Green House) Desa Wanasaya Kec. Wanayasa. Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
139	1444331	13-03-2025	Sugijen, A.Ma	Penetapan dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak (Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten)	Kurangnya bibit ternak untuk ketahanan pangan	Hibah kepada Kelompok Tani Gondo Arum (Pengadaan Ternak Kambing) Desa Binangun Kec. Karangkobar. Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
140	1444654	13-03-2025	Sugijen, A.Ma	Penetapan dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Kurangnya bibit ternak untuk ketahanan pangan	Hibah Kepada Kelompok Wanita Tani Bunga Lestari (Ternak Kambing) Desa	Dinas Pertanian Perikanan	Dinas Pertanian Perikanan	Verifikasi Perangkat Daerah	-

				(Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumput/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten)		Pagerpelah Kec. Karangkobar, Kab. Banjarnegara	dan Ketahanan Pangan	dan Ketahanan Pangan		
141	1444709	13-03-2025	Sugijen, A.Ma	Penetapan dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumput/Galur Ternak (Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumput/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten)	kurangnya bibit ternak untuk ketahanan pangan	Hibah kepada kelompok Tani "Cipoletan Mumbul" Desa Pagerpelah Kec. Karangkobar , Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
142	1445214	13-03-2025	Sugijen, A.Ma	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Pembangunan Prasarana Pertanian)	Kurangnya jalan akses petani	Pembangunan Jalan Usaha Tani Blok Ngaosan Dusun Kutang RT. 06 RW. 03 Desa Kubang Kec. Wanayasa, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
143	1445427	13-03-2025	Sugijen, A.Ma	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Pembangunan Prasarana Pertanian)	kurangnya sarana akses jalan petani	Pembangunan Jalan Usaha Tani Gunung Garung Desa Pakelen Kec. Madukara , Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
144	1445650	13-03-2025	Sugijen, A.Ma	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Pembangunan Prasarana Pertanian)	Kurangnya jalan akses petani	Pembangunan JUT Blok Sembonggan Desa Kasimpar Kec. Wanayasa, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
145	1445848	13-03-2025	Sugijen, A.Ma	Pembangunan Sarana Pertanian	Kurangnya sarana prasarana petani	Hibah kepada kelompok Tani Tunas Harapan Desa Kasimpar Kec. Wanayasa, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-

146	1445876	13-03-2025	Sugijen, A.Ma	Pembangunan Sarana Pertanian	Kurangnya sarana prasarana pertanian	Hibah kepada kelompok Tani Unggul Abadi Desa Kasimpar Kec. Wanaraya, Kab. Barito Barat	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
147	1445955	13-03-2025	Sugijen, A.Ma	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak (Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten)	kurangnya bibit ternak di tingkat kelompok	Hibah kepada Kelompok Tani Harapan Baru Desa Pegerungsing Kec. Wanaraya, Kab. Barito Barat	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
148	1446600	13-03-2025	Marno	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kurangnya Anggaran Untuk Pemberdayaan Kelompok Tani	Bantuan Untuk Pengadaan Bibit Ternak Kambing, Kelompok Tani SARI BUANA Desa Tridusana Kecamatan Punggelan, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
149	1447016	13-03-2025	H. Edy Purwanto	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kurangnya Anggaran Untuk Pemberdayaan Kelompok Tani	Bantuan Untuk Pengadaan Bibit Ternak Kambing, kelompok Tani MENDO BAROKAH Desa Pucang Kecamatan Bawang, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
150	1451156	13-03-2025	Edi Santosa	Pembangunan Sarana Pertanian	Kelompok tani membutuhkan pompa untuk penyiapan lahan	Bantuan hibah keuangan untuk pembelian pompa air Kelompok Tani Maju Makmur Desa Badanata Kecamatan Rakit, Kab. Banjarnegara , Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-

151	1451560	13-03-2025	Edi Santosa	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Dimanfaatkan dalam Kabupaten	Kelompok tani perikanan membutuhkan bantuan hibah untuk budidaya ikan nila	Bantuan hibah keuangan untuk benih ikan nila kepada Poktakan Berkah Mandiri Desa Sihiwangi Kecamatan Rakit, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
152	1451621	13-03-2025	Edi Santosa	Pembangunan Sarana Pertanian	Kelompok tani membutuhkan bantuan hewan ternak	Bantuan hibah keuangan untuk pembelian kambing kepada kelompok tani Karya Agung Desa Pingit Kecamatan Rakit, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
153	1451647	13-03-2025	Edi Santosa	Pembangunan Sarana Pertanian	Kelompok tani membutuhkan bantuan hibah ternak kambing	Bantuan hibah keuangan untuk pembelian kambing kepada kelompok tani Krida Utama Makmur RT 01 RW 03 Desa Adipasir Kecamatan Rakit, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
154	1451684	13-03-2025	Edi Santosa	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Dimanfaatkan dalam Kabupaten	Kelompok perikanan membutuhkan bantuan hibah benih ikan untuk budidaya nila	Bantuan hibah keuangan untuk benih nila kepada Poktakan Mina Tirta Sejahtera RT 03 RW 01 Desa Adipasir Kecamatan Rakit, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
155	1453191	14-03-2025	Panggalih Resian Febrianto	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Obat Hewan	Kelompok Tani Sido Mumpuni Dukuh Cibungur Desa Danakerta Ket: Penggunaan: Kekurangan Modal untuk pengembangan ternak kambing.	Hibah keuangan kepada Kelompok Tani Sido Mumpuni Dukuh Cibungur Desa Danakerta Ket: Penggunaan: untuk pengembangan ternak kambing , Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-

156	1453216	14-03-2025	Ana Susanto	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kurangnya permodalan anggota kelompok tani	Hibah modal pemberdayaan kepada Kelompok Tani Cendra Sri Wijaya Dusun Mirambu Desa Gentansari Kecamatan Pagentungan , Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
157	1453305	14-03-2025	Panggah Resian Febrianto	Pembangunan Sarana Pertanian	Fluktuasi Harga Tani Argayoka Kec. Banjarnegara belum memiliki sarpras pendukung kegiatan	Hibah keuangan kepada Gapoktan Harga Tani Argayoka Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
158	1457969	14-03-2025	Marno	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kurangnya Anggaran Untuk Pemberdayaan Kelompok Tani	Bantuan Untuk Pengadaan Bibit Ternak Kambing Kelompok Wanita Tani TERATAI Desa Danarejo Kecamatan Purwanegara, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
159	1458182	14-03-2025	Hj. Dyah Catur Srinurnaeni	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Pembangunan Prasarana Pertanian)	Swadaya Masyarakat Tidak Mencukupi untuk Pembangunan Jalan	Bantuan Untuk Pembangunan Jalan Usaha Tani Blok Cocor Bebek Desa Pekandangan Kecamatan Banjarmangu Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
160	1458273	14-03-2025	Purwono	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kurangnya Anggaran Untuk Pemberdayaan Kelompok Tani	Bantuan Untuk Pengadaan Bibit Ternak Kambing, Kelompok Tani SIDO MULYO Desa Tegalsetra Kecamatan Pagentan, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-

161	1458768	14-03-2025	Hj. Erawati Lathifah, S.H	Peternakan dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumput/Gabah Ternak [Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumput/Gabah Ternak dalam Daerah Kabupaten]	permohonan Bantuan Ternak kandang POKTAN PANJITANTANI MELIKAN	Dukuh Melikan Desa Jintaka Kec. Pejawaran, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
162	1458795	14-03-2025	Hj. Erawati Lathifah, S.H	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	pengaliran air/irigasi bagi kelompok Tani Makar Tani Pasurenan	Dukuh Wanasaba Desa Pasurenan Kec. Batur, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
163	1460222	14-03-2025	Arya Achmad Zakaria, S.H., M.H	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Pembangunan Prasarana Pertanian)	Sekedaya Masyarakat Tidak Menciptagi Untuk Pembangunan	Bantuan Untuk Pembangunan Rabat Beton Jalan Usaha Tani Tandon - Lanangan Desa Bantarsaka Kecamatan Madukara Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
164	1462376	15-03-2025	NURUL IPTAK	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Pembangunan Prasarana Pertanian)	jalan masih berupa tanah dan batu	Pembangunan Jalan Usaha Tani Poktan Dusun Klesem Desa Ambal Kecamatan Karangkobar Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
165	1462384	15-03-2025	NURUL IPTAK	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Pembangunan Prasarana Pertanian)	jalan licin masih berupa jalan setapak	Pembangunan Rabat Beton Jalan Usaha Tani RT 04 RW 03 Dusun Alian Desa Ambal Kecamatan Karangkobar Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
166	1463817	15-03-2025	Sugijen, A.Ma	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Pembangunan Prasarana Pertanian)	Belum adanya akses jalan petani	Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Blok Kabang Desa Tekamanbat	Dinas Pertanian Perikanan dan	Dinas Pertanian Perikanan dan	Verifikasi Perangkat Daerah	-

						Kec. Martapura, Kab. Banjarnegara	Ketahanan Pangan	Ketahanan Pangan		
167	1463860	15-03-2025	Sugijen, A.Ma	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak (Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten)	Kurangnya bibit ternak untuk ketahanan pangan	Hibah kepada kelompok Tani "Hamparan Rizq" Desa Pagerpelung Kec. Wanayasa, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
168	1465616	15-03-2025	Udani Puji Lestari, S. Farm, Apt	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Pembangunan Prasarana Pertanian)	jalan usaha tani licin	Pengerpalan Jalan Usaha Tani Tawah Gunung Desa Pagelak Kecamatan Madukara, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
169	1465649	15-03-2025	Udani Puji Lestari, S. Farm, Apt	Peleriharan dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak (Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten)	kurangnya bibit ternak unggul	Pengadaan bibit ternak kambing untuk kelompok Tani Ijeba Jaya Dukuh Glendol Kalibo II Desa Ampelsari Kecamatan Banjarnegara, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
170	1468584	15-03-2025	Udani Puji Lestari, S. Farm, Apt	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Pembangunan Prasarana Pertanian)	jalan licin	Pembangunan Jalan Usaha Tani Wangan Gede Desa Karanganyar Kecamatan Madukara, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
171	1470571	16-03-2025	Anas Hidayat, SE	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kurangnya permodalan	Hibah kepada Kelompok Tani Ngudi Mulyo Desa Lengkong Rt. 01 Rw. 03 Kecamatan Rakit , Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-

172	1470782	16-03-2025	Ana Susanto	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kurangnya pemerataan anggota kelompok tani	Hibah kepada Kelompok Tani Ngudi Rahayu Dukuh Bánaran Rt. 01 Rw. 03 Desa Dukuh Kecamatan Pagentongan , Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
173	1472821	16-03-2025	M GURUH DA PAMUJI	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Pembangunan Prasarana Pertanian)	Belum adanya jalan akses petani	Pembangunan Jalan Usaha Tani Blok Silebuh Desa Bantarwaru Kec. Madukara, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
174	1472834	16-03-2025	M GURUH DA PAMUJI	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Pembangunan Prasarana Pertanian)	Belum adanya jalan akses petani	Pembangunan Rabat Beton Jalan Usaha Tani Blok Dukuh Lurung Tengah Desa Bantarwaru Kec. Madukara, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
175	1472838	16-03-2025	M GURUH DA PAMUJI	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Pembangunan Prasarana Pertanian)	Belum adanya akses jalan untuk petani	Pembangunan rabat beton jalan Usaha Tani (JUT) Dusun Kesepit Desa Bantarwaru Kec. Madukara, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
176	1474270	16-03-2025	Edi Santosa	Pengawasan Usaha Perbenihan Tanaman di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Cekungan Air Lainnya yang Dapat Dimanfaatkan dalam Kabupaten	Kelompok tani ikan membutuhkan bantuan untuk pengembangan usaha	Bantuan keuangan untuk pengembangan usaha perbenihan tanaman pangan Kelompok Tani Desa Tanjunganom Kecamatan Rakit, Kab Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
177	1474285	16-03-2025	Edi Santosa	Pengawasan Usaha Perbenihan Tanaman di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Cekungan Air Lainnya yang Dapat Dimanfaatkan dalam Kabupaten	Kelompok tani ikan membutuhkan bantuan hibah untuk	Bantuan keuangan untuk pembelian pengembangan usaha kepada Pokdakan Mina Sejahtera Dusun III Desa	Dinas Pertanian Perikanan dan	Dinas Pertanian Perikanan dan	Verifikasi Perangkat Daerah	-

					pengembangan usaha	Tanjungsonde Kecamatan Rakit , Kab. Banjarnegara	Ketahanan Pangan	Ketahanan Pangan		
178	1474306	16-03-2025	Edi Santosa	Pembangunan Sarana Pertanian	Kelompok tani membutuhkan bantuan kbuk untuk pengembangan usaha	Bantuan kibuh kandangan untuk pengembangan peternakan kepada kelompok tani Sekar Tanjung RT 04 RW 03 Desa Tanjungsonde Kecamatan Rakit, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
179	1479246	17-03-2025	Lutfi Hidayat SH MM	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Pembangunan Prasarana Pertanian)	Belum adanya jalan untuk akses petani	Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Watu Kawuk RT. 04 RW. 04 Dukuh Wirosaeng Desa Kasenet Kec. Banjarmangu, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
180	1479288	17-03-2025	Mochammad Rachmanuddin	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Pembangunan Prasarana Pertanian)	Jalan sudah rusak dan butuh perbaikan	Rabat beton JUT Rw. 02 Desa Sawuhan Kecamatan Madukara , Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
181	1479403	17-03-2025	Hj. Sri Rusupiati	Pembangunan Sarana Pertanian	Perlunya pengetahuan dan penerapan pertanian hidroponik bagi generasi muda di Kabupaten Banjarnegara	Kabupaten Banjarnegara, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
182	1479686	17-03-2025	Guruh Tri Adi Putra. S. Akun	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kurangnya permodalan	Hibah kepada KWT Mekarsari Desa Sidarata Rt. 3 Rw. 1 Kecamatan	Dinas Pertanian Perikanan	Dinas Pertanian Perikanan	Verifikasi Perangkat Daerah	-

						Punggelan , Kab. Banjarnegara	dan Ketahanan Pangan	dan Ketahanan Pangan		
183	1480015	17-03-2025	Lutfi Hidayat SH MM	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Pembangunan Prasarana Pertanian)	Kurangnya jalan akses petani	Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Kelompok Tani Berkah Jaya Grouji Desa Beji Kec. Bawanmangu , Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
184	1480687	17-03-2025	Purwono	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kurangnya Anggaran Untuk Pemberdayaan Kelompok Tani	Bantuan Untuk Pengadaan Bibit Ternak Kambing Kelompok Tani PUSPA MANDIRI Desa Tlahab Kecamatan Pejawaran, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
185	1480746	17-03-2025	NURUL IPTAK	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Pembangunan Prasarana Pertanian)	jalan tani masih berupa jalan tanah	Pembangunan Jalan Usaha Tani Kelompok Tani Giyuh Rukun Bibit Jaten Dusun Sroni Desa Pesantren Kecamatan Wanayasa, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
186	1480772	17-03-2025	Purwono	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kurangnya Anggaran Untuk Pemberdayaan Kelompok Tani	Bantuan Untuk Pengadaan Bibit Ternak Kambing Kelompok Tani PARI/TANI TANI Desa Gintera Kecamatan Pejawaran, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
187	1483966	17-03-2025	Marno	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kurangnya Anggaran Untuk Pemberdayaan Kelompok Tani	Bantuan Untuk Pengadaan Bibit Ternak Kambing, Kelompok Tani SUKA TANI Dusun Pona Lor Desa Tolokwagen	Dinas Pertanian Perikanan dan	Dinas Pertanian Perikanan dan	Verifikasi Perangkat Daerah	-

						Kecamatan Kalibening, Kab. Banjarnegara	Ketahanan Pangan	Ketahanan Pangan		
188	1485031	18-03-2025	Ryan Aditya Wahyu P, S.Km	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kelompok Tani Berkah Kelurahan Kutabanjarnegara, kec Banjarnegara masih kekurangan modal untuk pengembangan ternak kambing	Untuk kesangan untuk Kelompok Tani Berkah Kelurahan Kutabanjarnegara kec Banjarnegara , Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
189	1485071	18-03-2025	Bambang Purnomo Adi	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Pembangunan Prasarana Pertanian)	jalan masih berupa jalan tanah	Pembangunan Jalan Usaha Tani Kelompok Tani Sri Makarti Lowung Blok Tigalap Desa Lowung, Kecamatan Rakit , Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
190	1485073	18-03-2025	Bambang Purnomo Adi	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Kumpun/Galur Ternak (Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten)	Kurangnya modal untuk pembelian kambing	Pengadaan Ternak Kambing untuk Kelompok Tani Surya Tani Desa Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
191	1485692	18-03-2025	Achmad Sriyadi	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	KURANGNYA FASILITASI/BI KELOMPOK TANI	HIBAH KEPADA KELOMPOK TANI SIDA MAJU RT 03 RW 03 DES ARIBAYA KECAMATAN PAGENTAN , KAB. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
192	1485930	18-03-2025	DJARKASI, S.Th.I	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Kumpun/Galur Ternak (Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten)	Kurangnya bibit ternak untuk kelompok tani	Hibah kepada Kelompok Tani Peternak Kambing Ngudi Rahayu II Desa Kutawaskita Kec. Purwanegara Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-

193	1485954	18-03-2025	DJARKASI, S.Th.I	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak (Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten)	Kurangnya bibit ternak bagi kelompok tani Jamali	Hibah kepada Kelompok Peternak Mandiri Jaya Desa Cemansari Kec. Pagelaran, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
194	1486737	18-03-2025	Hj. Sri Rusupiati	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak (Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten)	masih perlunya bantuan ternak kambing untuk kelompok Tani ENGGAL SEMI Desa Sipedang Kecamatan Banjarmangu	Desa Sipedang Kecamatan Banjarmangu, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
195	1486902	18-03-2025	Agus Junaidi, S.Sos, MM	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak (Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten)	Kurangnya bibit ternak domba Garut	Hibah kepada Kelompok Tani Sri Makarti Desa Lawang Kec. Rakit, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
196	1486914	18-03-2025	Panggalih Resian Febrianto	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kelompok Tani Rukun Makmur Desa Karangkonsri Kec. Wanadadi masih kekurangan modal untuk pengembangan ternak kambing	Hibah keuangan kepada kelompok Tani Rukun Makmur Desa Karangkonsri Kec. Wanadadi , Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
197	1486950	18-03-2025	Agus Junaidi, S.Sos, MM	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Dimanfaatkan dalam Kabupaten	Kurangnya bibit ikan untuk kelompok	Hibah kepada Kelompok Pembudidaya Ikan Mina Karya Gumilang Desa Lawang Kec. Rakit , Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-

198	1487924	18-03-2025	Panggalih Resian Febrianto	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kelompok Peternak "MITAYANI" Desa Wanadadi Kec. Wanadadi masih kekurangan dana untuk pengembangan usaha ternaknya	Hibah keuangan untuk kelompok Peternak "MITAYANI" Desa Wanadadi Kec. Wanadadi, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
199	1489203	18-03-2025	Ismawan Setya Handoko, M	Pembangunan Sarana Pertanian	Kurangnya Anggaran Untuk Pembangunan Gudang Pertanian	Bantuan Untuk Pembangunan Gudang Beras dan Gabah Hasil Pertanian Desa Binangun Kecamatan Banjarmangu, Kab Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
200	1489355	18-03-2025	Marno	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kurangnya Anggaran Untuk Pemberdayaan Kelompok Tani	Bantuan Untuk Pengadaan Bibit Ternak Kambing, Kelompok Wanita Tani PUSPASARI II RT 01 RW 04 Kelurahan Wanyon Kecamatan Banjarnegara, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
201	1489363	18-03-2025	Marno	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kurangnya Anggaran Untuk Pemberdayaan Kelompok	Bantuan Untuk Pengadaan Bibit Ternak Kambing, Kelompok Usaha Bersama Titi Mulyo RT 01 RW 06 Kelurahan Wanyon Kecamatan Banjarnegara, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
202	1489643	18-03-2025	Endi Haryanto, SE	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Pembangunan Prasarana Pertanian)	Bantuan Pembangunan Jalan Usaha Tani Blok	Dusun Gandulekor, Desa Penggisikan RT 01 RW 03, Kec. Mandiraja, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan	Dinas Pertanian Perikanan dan	Verifikasi Perangkat Daerah	-

					Warga Desa Panggisari		Ketahanan Pangan	Ketahanan Pangan		
203	1489684	18-03-2025	Endi Haryanto, SE	Pembangunan Sarana Pertanian	Pengembangan Kelompok Perikanan Sumber Rejeki Desa Panggisari	Desa Panggisari, Kec. Mandiraja, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
204	1490047	18-03-2025	Panggalih Reslan Febrianto	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kelompok Tani WIJAYA MULYA II, Desa Medayu Kec. Wanadadi masih kurang pendanaan untuk pengembangan ternak kambing	Hibah keuangan untuk kelompok Tani WIJAYA MULYA II, Desa Medayu Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
205	1490082	18-03-2025	Endi Haryanto, SE	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Pembangunan Prasarana Pertanian)	Pembangunan Talud Jalan Usaha Tani Petrol ke Utara Desa Panggisari	Dusun Dawit, Desa Panggisari, Kec. Mandiraja, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
206	1490150	18-03-2025	Endi Haryanto, SE	Pembangunan Sarana Pertanian	Bantuan Alat Mesin Pertanian Kelompok Tani Hidayah Insani Desa Glempang	Desa Glempang RT 03 RW 03, Kec. Mandiraja, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
207	1491451	18-03-2025	Edi Santosa	Penggunaan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Kewenangan Ini Lainnya yang Dapat Dimanfaatkan dalam Kabupaten	Kelompok tani dan membutuhkan Bantuan hibah untuk pengembangan usaha	Bantuan keuangan untuk pengembangan perikanan Pokdakan Mina Sejahtera RT 02 RW 03 Desa Tunjungsari Kecamatan Rakit, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-

208	1493759	19-03-2025	dr. Dwi Haryani	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Pembangunan Prasarana Pertanian)	Kurangnya jalan akses petani	Pembangunan jalan Usaha Tani Blok 7 Desa Kalibenda Sel. Purwareja Klampok, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
209	1493781	19-03-2025	dr. Dwi Haryani	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Pembangunan Prasarana Pertanian)	Belum ada jalan akses petani	Pembangunan jalan usaha tani (JUT) Blok 6 Desa Kalibenda kec. Purwareja Klampok, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
210	1494718	19-03-2025	Revi Tenel Lia	Pembangunan Sarana Pertanian	Bantuan Hibah untuk Peningkatan Modal Usaha Ekonomi Produktif Melalui UMKM KWT Karya Lestari	Desa Kalipakis RT 03 RW 03, Kec. Purwanegara, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
211	1494750	19-03-2025	Revi Tenel Lia	Pembangunan Sarana Pertanian	Bantuan Hibah untuk Mengembangkan Pemanfaatan Lahan Pekarangan dan Lumbung Pangan KWT Agro Rancana Desa Purwanegoro	Dusun Bayangan, Desa Purwanegoro RW 01, Kec. Purwonegara, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
212	1494781	19-03-2025	Revi Tenel Lia	Pembangunan Sarana Pertanian	Bantuan Hibah untuk Pengembangan Cadangan Pangan Lokal KWT Mentha Wangi Desa Purwonegoro	Desa Purwonegoro RT 02 RW 01, Kec. Purwonegoro, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-

213	1496682	19-03-2025	Marno	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kurangnya Anggaran Untuk Pemberdayaan Kelompok Tani	Bantuan Untuk Pengadaan Bibit Ternak Kandang Kelompok Tani, TANI MAKMUR RT 03 RW 02 Kepatihan Argasoka Kecamatan Banjarnegara Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
214	1497112	19-03-2025	Edi Santosa	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Dimanfaatkan dalam Kabupaten	Jumlah populasi ikan di alam semakin menurun, ekosistem terancam	Pemberian benih ikan di sungai melalui Dinas Pertanian Peternakan Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
215	1499718	20-03-2025	Anwar, ST.	Pembangunan/ Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Pembangunan Prasarana Pertanian)	Swadaya Masyarakat Tidak Mencukupi Untuk Pembangunan Jalan Usaha Tani	Bantuan Untuk Pembangunan Rabat Beton Jalan Usaha Tani Dusun Sidusk RT 06 RW 02 Desa Pagedil Kecamatan Madukara, Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
216	1502332	20-03-2025	Panggalih Resian Febrianto	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kelompok Ternak KAMPTIL Desa Karangkemiri Kec. Wanadadi, masih kekurangan dana untuk pengembangan ternak kambing	Hibah keuangan kepada Kelompok Ternak KAMPTIL Desa Karangkemiri Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-
217	1505648	20-03-2025	Marno	Pembangunan Sarana Pertanian	Kekurangan Anggaran untuk Pembangunan Sarana Pertanian	Bantuan Untuk Pembangunan Saluran Irigasi Pertanian Lenjotan Blok Jeruk RT 04 RW 03 Dusun Dogleg Desa Panggisari Kecamatan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-

						Mandiraja , Kab. Banjarnegara					

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TUJUAN PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam RPJMD Tahun 2025 - 2029 memiliki tujuan "Terwujudnya Banjarnegara yang Maju dan Sejahtera". Tujuan tersebut akan dicapai melalui 4 (empat) sasaran. Distankan dan KP Kabupaten Banjarnegara mendukung pencapaian Sasaran 2 (dua) yaitu meningkatnya perekonomian daerah yang berdaya saing dan berbasis potensi lokal yang berkelanjutan dan sasaran 4 (empat) yaitu meningkatnya tata kelola pemerintah yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok Sesuai mandatnya, Distankan dan KP memiliki peran sentral dalam membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di tiga sektor vital: Urusan Pangan, Urusan Pertanian (mencakup subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan), serta Urusan Perikanan tentu mempunyai fungsi strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah, karena sebagian besar. Tujuan Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya daya saing dan perekonomian sektor pertanian dan perikanan berbasis potensi lokal yang berkelanjutan untuk meningkatkan Ketahanan Pangan
2. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik

3.2 SASARAN PERANGKAT DAERAH

Sasaran merupakan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan yang

diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program. Sasaran yang ingin dicapai Distankan dan KP Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Ketersediaan, Keterjangkauan, Akses, Pemanfaatan dan Stabilitas Pangan;
2. Meningkatnya Produksi Komoditas Pertanian dan Perikanan;
3. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, evaluasi, dan pelaporan serta pelayanan kepada masyarakat.

3.3 Program dan Kegiatan

Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian, perikanan dan ketahanan pangan yang menjadi kewenangan daerah.

Apabila dikaitkan dengan Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2025- 2029 yaitu Mewujudkan Banjarnegara yang Maju dan Sejahtera yang dalam menerjemahkan visi tersebut dilakukan melalui beberapa misi. Maka misi "Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal " adalah misi yang didukung oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara. Misi ini bertujuan meningkatkan kinerja perekonomian daerah dengan sasaran meningkatnya kinerja sektor pertanian dan perikanan.

Kebijakan Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara yang mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran dalam RPJMD yang tercantum dalam rencana strategis Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan

Pangan adalah Meningkatnya Ketersediaan, Keterjangkauan, Akses, Pemanfaatan dan Stabilitas Pangan, meningkatkan produksi komoditas pertanian dan perikanan dan meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan, maka Program dan Kegiatan yang dirancang Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Tahun 2026 seperti tabel di bawah ini :

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB. BANJARNEGARA
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AWAL PERIODE RENSTRA (OPD)	REALISASI CAPAIAN RENJA (RPJ) TAHUN 2024	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN REALISASI RENJA OPD TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PROGRAM KAB.			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											KABUPATEN	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN						53.000.000.000,00							48.875.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.834.325.390,00							3.375.000.000,00	
	2.09	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PANGAN						2.834.325.390,00							3.375.000.000,00	
1	2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	1			1	150.000.000,00						1	200.000.000,00	
	2.09.02.2.01	Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Stok Pangan Pokok Strategis Kabupaten/Kota	1	1			1	150.000.000,00			1	Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Stok Pangan Pokok Strategis Kabupaten/Kota	1	1	200.000.000,00	DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Stok Pangan Pokok Strategis Kabupaten/Kota														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Pangan yang Tersedia				21ton	150.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Stok Pangan Pokok Strategis Kabupaten/Kota	-		200.000.000,00	DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.	2.36.33	PENGELOLAAN PANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	1			1	2.199.225.390,00						1	2.900.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AWAL PERIODE RENSTRA (5 TAHUN)	REALISASI CAPAIAN PERIODE LALU (3 TAHUN LALU)	PENGHARGAAN CAPAIAN TARGET PERIODE LALU (3 TAHUN LALU)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN BESARAN BIAYA PERIODE TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET (RP)	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											KABUPATEN	KAWASAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Produksi dan Pengolahan Hasil Perikanan Budidaya Kewenangan Kabupaten/Kota (Termasuk Pengembangan Kawasan Minapolitan dan Industrialisasi Perikanan)		-			-	220.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digitalisasi	-	-	400.000.000,00	DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0010	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan, Pangkalan Pendaratan Ikan, Tempat Pelelangan Ikan dan Tempat Pengolahan Ikan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Pelabuhan Perikanan, Pangkalan Pendaratan Ikan, Tempat Pelelangan Ikan dan Tempat Pengolahan Ikan Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Buah	10.000.000,00	Kab. Bangkalan, Kab. Sampang, Kab. Pamekasan, Kab. Sumenep	APBD KAB. / KOTA, APBD PROV. JATIM, APBN, CSR, DLL	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digitalisasi, Pengembangan Ekonomi Kerakyatan, Pengembangan Ekonomi Kerakyatan	-	-	300.000.000,00	DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Perikanan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	474.225.300,00	-	-	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digitalisasi, Pengembangan Ekonomi Kerakyatan, Pengembangan Ekonomi Kerakyatan	-	-	500.000.000,00	DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02.0006	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET AKHIR RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara				50 Ton	474.225.300,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berbasis potensi lokal secara berkelanjutan	-		500.000.000,00	DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	-	-			-	1.500.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-	-	2.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	[illegible]	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 Laporan	1.500.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA NON FISIK-D KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	-	Penguatan Landasan Tata Kelola pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		2.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	-	-			-	**125.000.000,00**						-	**175.000.000,00**	
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	125.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-	-	175.000.000,00	DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	[illegible]	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi														
			Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi				1 Dokumen	125.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		175.000.000,00	DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
4.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	-	-			-	**50.000.000,00**						-	**100.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	50.000.000,00			-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan Meningkatkan kualitas hidup masyarakat	-	-	100.000.000,00	DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan														
			Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan Meningkatkan kualitas hidup masyarakat	-		100.000.000,00	DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**28.863.029.900,00**							**20.848.004.900,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**1.075.000.000,00**							**1.350.000.000,00**	
1.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	-	-			-	**110.000.000,00**						-	**150.000.000,00**	
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	110.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berbasis potensi lokal secara berkelanjutan	-	-	150.000.000,00	DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.03.2.02.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil														

NO	KODE	[illegible]	[illegible]	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	[illegible]	[illegible]	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	[illegible]		[illegible]
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	[illegible]	PENGERTIAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											ANGGARAN	GABUNGAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			[illegible]				4 Unit	110.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[illegible]	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Hak Dan Dinamis	-		[illegible]	[illegible]
2.	3.25.04	[illegible]	-	-			-	715.000.000,00						-	[illegible]	
	3.25.04.2.02	Penyelenggaraan Pertanian Yang Maju,	-	-			-	300.000.000,00			-	-	-	-	[illegible]	[illegible]
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kawasan Pertanian Pangan Lahan Kering														
			Jumlah Kelompok Pertanian Yang Mendapatkan Pembinaan				65 Kelompok	[illegible]	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[illegible]	-	-	-		300.000.000,00	DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-	-			-	[illegible]			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Hak Dan Dinamis	-	-	600.000.000,00	DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.04.2.04.0001	Pengadaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Tahun 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Data dan Informasi Perikanan Budidaya yang Tersedia				4 Dokumen	[illegible]	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[illegible]	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Hak Dan Dinamis	-		[illegible]	[illegible]
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Tahun 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan yang Tersedia				2 Unit	200.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[illegible]	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Hak Dan Dinamis	-		300.000.000,00	DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	[illegible]	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan				38 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		50.000.000,00	DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	[illegible]	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Unit	100.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		50.000.000,00	DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	-	-			-	**25.000.000,00**						-	**50.000.000,00**	
	[illegible]	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Dimanfaatkan Dalam Kabupaten/Kota	-	-			-	25.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian masyarakat sembada, bahari, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Jumlah pokmaswas (kelompok masyarakat pengawas) yang di berdayakan	-	50.000.000,00	DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	[illegible]	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota														
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota				[illegible] Usaha	[illegible]	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan negara dan mendorong kemandirian masyarakat sembada, bahari, energi, air ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Jumlah pokmaswas (kelompok masyarakat pengawas) yang di berdayakan		50.000.000,00	DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	-	-			-	**225.000.000,00**						-	**250.000.000,00**	
	[illegible]	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	225.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dinas Dan Menerapkan ekonomi daerah yang berdaya saing dan berbasis potensi lokal secara berkelanjutan	-	-	250.000.000,00	DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				49 Pelaku Usaha	225.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dinas Dan Menerapkan ekonomi daerah yang berdaya saing dan berbasis potensi lokal secara berkelanjutan	-		250.000.000,00	DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**27.788.029.900,00**							**19.498.004.900,00**	
1.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	-	-			-	**4.088.324.900,00**						-	**4.148.324.900,00**	
	[illegible]	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-	-			-	3.188.324.900,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-	-	3.188.324.900,00	DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				1 Laporan	3.188.324.900,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		3.188.324.900,00	DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	650.000.000,00			-	-	-	-	700.000.000,00	DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman														
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				2 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		550.000.000,00	DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman														
			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				2 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman, Pakan Ternak serta Pakan Ikan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	25.000.000,00			-	-	-	-	30.000.000,00	DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil														
			Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil				3 Laporan	25.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	-	-			-	25.000.000,00			-	-	-	-	30.000.000,00	DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.2.04.0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan														
			Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar				1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	200.000.000,00			-	-	-	-	200.000.000,00	DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.2.05.0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak				1 Ton	200.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	-	-			-	**16.788.500.000,00**						-	**7.600.000.000,00**	
	[illegible]	Pengembangan Prasarana Pertanian	-	-			-	350.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Meningkatkan Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berbasis potensi lokal secara berkelanjutan	-	-	400.000.000,00	DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya														
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				3 Laporan	350.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Meningkatkan Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berbasis potensi lokal secara berkelanjutan	-		400.000.000,00	DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	[illegible]		[illegible]
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	[illegible]	INDIKATOR			TARGET	[illegible]	
											[illegible]	[illegible]				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.03.2.02	[illegible]					-	600.000.000,00				[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]
	3.27.03.2.02.0003	[illegible]														
			[illegible]				30 Unit	0,00	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-		3.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.02.0006	[illegible]														
			[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-		550.000.000,00	DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.02.0009	[illegible]														
			[illegible]				20 Unit	0,00	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-		3.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.02.0010	[illegible]														

NO	KODE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						KELOMPOK SASARAN	[illegible]		[illegible]
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	INDIKATIF			Tahun 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											RSUD(Rp.)	DAERah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			[illegible]				[illegible]	0,00	Kota Banjarnegara Seluruh Kecamatan Semua Kelurahan	[illegible]		[illegible]	-		[illegible]	[illegible]
	3.27.03.2.02.0015	Pengembangan Perkebunan Pemberdayaan dan peningkatan sarana Kunci Potong Hewan														
			[illegible]				2 Unit	[illegible]	Kab. Banjarnegara Seluruh Kecamatan Semua Kelurahan	[illegible]	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Tanaman Budidaya/Daya Tanaman dalam Daerah Kabupaten/ Kota					[illegible]	[illegible]			-	[illegible]	-	-	0,00	DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.03.0001	Pengelolaan dan Pemeliharaan Wilayah Sumber Bibit Tanaman dan Budidaya Daya Tanaman														
			[illegible]				[illegible]	[illegible]	Kab. Banjarnegara Seluruh Kecamatan Semua Kelurahan	[illegible]	-	[illegible]	-		0,00	DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	3.27.04	[illegible]	-	-			-	[illegible]						-	950.000.000,00	
	3.27.04.2.01	Pengelolaan Kesehatan Hewan, Pengobatan dan Pencegahan Penyakit Hewan, Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Hewan, Pengawasan Obat Hewan, Peredaran dan Keamanan Pangan					-	100.000.000,00			-	-	-	-	[illegible]	[illegible]
	3.27.04.2.01.0005	Pelaksanaan Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Hewan														
			[illegible]				[illegible]	[illegible]	Kab. Banjarnegara Seluruh Kecamatan Semua Kelurahan	[illegible]	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	[illegible]	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota		-			-	683.200.000,00			-	-	-	-	650.000.000,00	DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	[illegible]	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner														
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				3 Laporan	683.200.000,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN-PERTANIAN	-	-	-		650.000.000,00	DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	[illegible]	Penerapan Persyaratan Pengawasan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	-	-			-	125.000.000,00			-	-	-	-	150.000.000,00	DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan														
			Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				20 Laporan	125.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
4.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	-	-			-	**200.000.000,00**						-	**250.000.000,00**	
	[illegible]	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	-	-			-	200.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-	-	250.000.000,00	DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	[illegible]	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				100 Ha	200.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		250.000.000,00	DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
5.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	-	-			-	**5.803.005.000,00**						-	**6.549.680.000,00**	

NG	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-	-			-	5.803.005.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-	-	6.549.680.000,00	DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa														
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				20 Unit	5.297.005.000,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PANGAN PERTANIAN-PANGAN-TEMATIK KAWASAN PRIORITAS PANGAN NASIONAL	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		6.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa														
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Unit	50.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		80.000.000,00	DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian														
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya				100 Orang	456.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL PENYULUH PERTANIAN	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		469.680.000,00	DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	X	**NON URUSAN**						**22.222.005.559,00**							**24.718.361.224,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**22.222.005.559,00**							**24.718.361.224,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-		-	-	**22.222.005.559,00**						-	**24.718.361.224,00**	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	100.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-	-	500.000.000,00	DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		100.000.000,00	DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	X.XX.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	0,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		400.000.000,00	DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-			-	19.890.835.509,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-	-	21.270.804.544,00	DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				211 Orang/bulan	19.722.476.459,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		21.075.804.544,00	DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	X.XX.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	153.345.000,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		175.000.000,00	DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	X.XX.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	5.014.050,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		20.000.000,00	DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	50.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-	-	75.000.000,00	DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	X.XX.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		75.000.000,00	DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	486.417.900,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-	-	630.000.000,00	DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	35.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		50.000.000,00	DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	451.417.900,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		580.000.000,00	DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.344.752.150,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-	-	1.767.556.680,00	DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	[illegible]		[illegible]
							TARGET 2026	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
											[illegible]	[illegible]				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			[illegible]				12 Laporan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-		[illegible]	[illegible]
	X.XX.01.2.05.0004	[illegible]														
			[illegible]				12 Laporan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-		1.217.504.640,00	DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	X.XX.01.2.09	[illegible]					-	350.000.000,00			-	[illegible]	-	-	475.000.000,00	DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	X.XX.01.2.05.0002	[illegible] Dinas Operasional atau Lapangan														
			[illegible]				6 Unit	150.000.000,00	[illegible]	[illegible]	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berkeberlanjutan Dan Dinamis	-		175.000.000,00	DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	X.XX.01.2.05.0003	[illegible]														
			[illegible]				4 Unit	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berkeberlanjutan Dan Dinamis	-		300.000.000,00	DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	[illegible]							53.009.260.759,00							48.941.366.134,00	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program pada perangkat daerah merupakan program prioritas dalam Renstra 2025 – 2029. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD selanjutnya dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Pemilihan untuk masing-masing program/ kegiatan di Sebagai berikut

1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

   Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

   a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan. Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Dengan 1 sub kegiatan yaitu Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya.

   b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

      Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat terdiri dari 3 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan; Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota; Pelaksanaan Pencapaian Target

Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi. Dengan 5 sub kegiatan yaitu Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal; Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan; Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota; Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

c. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program penanganan kerawanan pangan terdiri dari kegiatan yang diarahkan pada Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota. Dengan 1 sub kegiatan yaitu Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota.

d. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program pengawasan keamanan pangan terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota. Dengan 1 sub kegiatan yaitu Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota.

2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program pengelolaan perikanan tangkap terdiri dari 1kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa,

dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota. Dengan 1 sub kegiatan yaitu Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap

b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program pengelolaan perikanan budidaya terdiri dari 2 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil; Pengelolaan Pembudidayaan Ikan. Dengan 5 sub kegiatan yaitu Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil; Penyediaan Data dan Informas Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota; Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota; Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota; Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat; Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.

b. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota. Dengan 1 sub kegiatan yaitu Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota.

c. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota. Dengan 1 sub

kegiatan yaitu Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

3. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian terdiri dari 5 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian; Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota; Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota; Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer; Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota. Dengan 7 sub kegiatan yaitu Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi; Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman; Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman; Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil; Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan; Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak.

b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian terdiri dari 3 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian; Pembangunan Prasarana Pertanian; Pengelolaan Wilayah

Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota. Dengan 8 sub kegiatan yaitu Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya; Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani; Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani; Pembangunan, Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan embung , Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan dam parit, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamataan serta Sarana Pendukung, Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan; Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya; Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak.

c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner terdiri dari 4 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota; Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota; Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota; Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner. Dengan 4 sub kegiatan yaitu Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis; Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan; Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner; Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan;

d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota. Dengan 1 sub kegiatan yaitu Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.

e. Program Penyuluhan Pertanian

Program penyuluhan pertanian terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian. Dengan 3 sub kegiatan yaitu Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa; Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa.

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 6 kegiatan yaitu

- Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan 2 sub kegiatan yaitu penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah; Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan 3 sub kegiatan yaitu Penyediaan gaji dan tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /verifikasi keuangan SKPD; Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD.
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan 1 sub kegiatan yaitu Pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada

SKPD

- Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan 2 sub kegiatan yaitu penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor; penyediaan bahan logistik kantor
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan dengan 2 sub kegiatan yaitu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; penyediaan jasa pelayanan umum kantor.
- Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan 2 sub kegiatan yaitu penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaran perorangan dinas atau kendaran dinas jabatan; pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya.

Dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam urusan bidang pangan,urusan bidang perikanan dan urusan bidang pertanian tahun anggaran 2026, Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan mengusulkan anggaran sebesar Rp. 53.609.260.759,-

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Renja Perangkat Daerah selanjutnya menjadi platform operasional bagi Perangkat Daerah dalam menjalankan programnya dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah tahun 2025-2029. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026 dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disepakati.
2. Kerangka pendanaan dalam Renja Perangkat Daerah masih bersifat sementara, sehingga masih dimungkinkan terjadi perubahan pagu yang disebabkan oleh pengurangan, penambahan, dan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan maupun antar sub kegiatan dalam kerangka penyusunan anggaran secara terpadu dan berbasis kinerja.
3. Renja Perangkat Daerah menjadi acuan bagi Kepala Perangkat Daerah dan segenap jajarannya serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, serta menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal : 22 Agustus 2025

KEPALA DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANJARNEGARA

FIRMANSYAH PUTRA ADY, S.Pt
Pembina Tk I/ IV b
NIP. 197308071 199903 1 005

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik dan hidayahNya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan acuan perencanaan kegiatan SKPD selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan semua kebijakan, program dan sasaran serta kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan.

Renja juga dimaksudkan sebagai tolak ukur Bupati dalam mengevaluasi Pertanggung jawaban Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 dan hendaknya didukung oleh semua pihak pada tataran formulasi maupun implementasinya.

Kami menyadari dalam penyusunan rencana kerja ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan rencana kerja dimaksud untuk masa mendatang.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANJARNEGARA

MOHAMAD IQBAL, S.E.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681113 199503 1 003

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan yang diatur melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan pembentukan tim penyusun, penelaahan rancangan awal RKPD, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, hingga pada penyempurnaan berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang RKPD. Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, penyusunan Renja Perangkat

Daerah juga mengacu pada Renja Kementerian/Lembaga terkait, serta Renja Perangkat Daerah Provinsi terkait. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2. Landasan Hukum

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 disusun berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52

Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 531);
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
28. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 14);
29. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun dengan maksud untuk:

a. Menjabarkan RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 ke dalam rencana program kegiatan prioritas Tahun 2026 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Renja K/L Tahun 2026 dan Renja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;
b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerapan anggaran berbasis kinerja.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

a. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA-DPA dalam Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2026, yang dalam penyusunannya didahului dengan menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026;
b. Sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Tahun 2026;
c. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun berdasarkan sistematika yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah.

BAB 2 : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dan atau pokok-pokok DPRD.

BAB 3 : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan tahun 2026.

BAB 4 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran RKPD.

BAB 5 : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah meliputi urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 terdiri dari 2 program, 12 kegiatan, dan 25 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.13.522.887.512,00 dengan fokus utama pada Pemenuhan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan. Adapun terkait Sepanjang tahun 2024, telah dilakukan penambahan perlengkapan jalan berupa: (1) 541 unit Penerangan Jalan Umum; (2) 36 unit rambu rambu lalu lintas; dan (3) 22 unit Guardrill. Selain itu, pemeliharaan perlengkapan jalan masih difokuskan pada perawatan rutin pada perlengkapan jalan berupa perawatan Lampu Penerangan Jalan Umum sebanyak 900 unit sepanjang tahun 2024 serta pemelihataan halte. Program/kegiatan/sub kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah yang meliputi:

1. Masih rendahnya Layangan Penerangan Jalan Umum yang memadai di beberapa ruas jalan.
2. Kurangnya rambu-rambu lalu lintas (suar dan non suar) dan pengaman jalan yang mencukupi.
3. Adanya aksi vandalisme di beberapa sarana keselamatan jalan.

Dari 2 program, 12 kegiatan, dan 25 sub kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah tersebut. Program/kegiatan/sub kegiatan yang disetujui untuk dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024 terdiri dari 2 program, 12 kegiatan, dan 25 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.13.522.887.512,00

Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024, terjadi beberapa perubahan yang meliputi penambahan atau pengurangan pagu, penghapusan, penambahan program/kegiatan/sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Adapun Sub kegiatan dengan anggaran yang bertambah meliputi Sub kegiatan:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
7. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
8. Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
9. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
10. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
11. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
12. Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota

Sedangkan sub kegiatan dengan anggaran yang berkurang meliputi Sub kegiatan:

1. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KantorPenyediaan bahan logistik
2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang
3. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan PerolehanIzin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
4. Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
5. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Dinamika yang terjadi selama tahun 2024 turut mempengaruhi keberhasilan pencapaian Renja Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2024, tercatat adanya hasil yang baik dikarenakan adanya pencapaian dan pelampauan target serta ada yang tidak memenuhi target.

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

   Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi :

   Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yaitu pada:

   a) Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Indikator pada Sub Kegiatan tersebut adalah Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
   b) Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia.

   Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaktercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Banyaknya kendaraan yang melakukan mutasi serta kurangnya kesadaran masayarakat akan pentingnya uji kelayakan kendaraan bermotor.
2. Menurunnya jumlah pengguna angkutan umum dikarenakan adanya kemudahan proses kepemilikan kendaraan pribadi.
3. Perlunya peningkatan keamanan dan kenyamanaan moda transportasi umum.
4. Sarpras pendukung pemeliharaan perlengkapan jalan berupa mobil crane yang sudah tidak layak
5. Cuaca yang kurang mendukung dalam pemeliharaan terminal dan anggaran yang telah ditetapkan

b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi :

i) Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota pada Sub Kegiatan sebagai berikut :
   (1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   (2) Penyediaan Bahan Logistik kantor;
   (3) Penyediaan jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik;
   (4) Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor;
   (5) Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
   (6) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
   (7) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
   (8) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
   (9) Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;

(10) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
(11) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
(12) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD;

1) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) pada Sub Kegiatan sebagai berikut :
   (1) Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota;
   (2) Penyediaan Perlengkapan Jalan dijalan Kabupaten/Kota
   (3) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
   (4) Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota
   (5) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
   (6) Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan bermotor
   (7) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan bermotor
   (8) Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secala Elektronik
   (9) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota

c. Sedangkan realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan dijalan Kabupaten/Kota

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Penguatan koordinasi dengan Kementerian ESDM terkait adanya hibah PJU, berkoordinasi dengan Kementrerian Perhubungan, BPTD Kelas II Provinsi Jawa Tengah, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah tentang pengadaan PJU dan perlengkapan jalan lainnya
2. Penguatan koordinasi dengan berbagai pihak (paguyuban angkutan, pengelola parkir, OPD lain yang terkait)
3. Optimalisasi penggunaan sarana pendukung pemeliharaan perlengkapan jalan dan sarana perhubungan dan pemeliharaan sarpras keselamatan jalan secara masif dan berkala
4. pengelola perparkiran serta pengguna layanan perparkiran yang kooperatif
5. Adanya sosialisasi yang kita laksanakan melalui Media Online , Media Suara, broadcast WA gateway dan penghapusan biaya uji kendaraan.
6. Pelaksanaan survei monitoring dan evaluasi jalur trayek angkutan pedesaan
7. Peningkatan kualitas sarana prasarana perhubungan yang terintegrasi dalam sistim jaringan transportasi;
8. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dibidang Perhubungan, termasuk kemampuan memegemen dan operasional untuk menigkatkan level kompetensi melalui sosialisasi, pelatihan serta penyelenggaraan kompetisi.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, mempertimbangkan masih perlunya pemenuhan sarpras perhubungan serta peningkatan kualitas layanan transportasi, maka pada tahun perencanaan selanjutnya, perlu diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, diantaranya:

1. Ketersediaan Sarana prasarana dan kelengkapan jalan yang sejak Tahun 2019 tidak dapat dilaksanakan karena gagal lelang (pada tahun 2019 dan *Refocusing* karena Pandemi Covid 19 masih melanda).

2. Pembangunan Terminal Tipe C di Kecamatan Karangkobar, yang sampai dengan tahun saat ini belum direalisasikan ditambah adanya musibah kebakaran di Pasar KarangKobar menambah terhambatnya proses pembangunan terminal.
3. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan berupa Crane untuk mendukung Perawatan sarana prasarana kelengkapan Jalan (Berupa Lampu Penerangan Jalan, *Flashing Lamp*, Rambu-rambu Lalu Lintas dan APILL)
4. Pengadaan PJU di area yang belum terlayani penerangan jalan

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2025 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
s.d. Tahun 2025 Kabupaten Banjarnegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Urusan Perhubungan									
	Perhubungan									
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-	100%	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	10 dokumen	50 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	100%	10 dokumen	10 dokumen	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi yang tersusun	20 laporan	100 dokumen	20 dokumen	20 dokumen	100%	20 dokumen	20 dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji ASN yang terbayarkan	51 orang/ bulan	51 orang/ bulan	51 orang/ bulan	51 orang / bulan	100%	51 orang / bulan	51 orang / bulan	100%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah jasa administrasi keuangan yang terbayarkan	18 orang/ bulan	18 orang/ bulan	18 orang/ bulan	18 orang/ bulan	100%	18 orang/ bulan	18 orang/ bulan	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang tersusun	18 Laporan	164 dokumen	44 dokumen	44 dokumen	100%	18 dokumen	18 dokumen	100%
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas	1 paket	5 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 Paket	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah									
	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 paket	9 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1paket	100%
	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13 paket	65 paket	13 paket	13 paket	100%	13 paket	13 paket	100%
	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	13.400 buku	3.350 buku	3.350 buku	100%	-	-	-
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
	Sub Kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit mesin dan peralatan lainnya yang disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terpenuhi	4 laporan	120 paket	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	36 laporan	36 laporan	36 laporan	36 laporan	100%	36 laporan	36 laporan	100%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	26 kendaraan	21 kendaraan	21 kendaraan	21 kendaraan	100%	26 kendaraan	26 kendaraan	100%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang terpelihara	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100%	2 unit	2 unit	100%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Jumlah sarana dan prasarana perlengkapan	4 unit	16 unit	4 unit	4 unit	100%	4 unit	4 unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara								
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase terpenuhinya sarana keselamatan pengguna jalan	-	82,89%	-	-	-	-	-	-
		Persentase sarana prasarana keselamatan jalan yang tersedia	-	27%	-	-	-	-	-	-
		Persentase Terpeliharanya Prasarana dan Fasilitas LLAJ; Jumlah LPJU dalam keadaan baik	-	100%	-	-	-	-	-	-
		Terpenuhinya jumlah prasarana dan fasilitas perhubungan	-	7 Lokasi	-	-	-	-	-	-
		Persentase prasarana dan fasilitas perhubungan dalam kondisi baik	-	100%	-	-	-	-	-	-
		Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan	-	36 unit	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
		Persentase sarana dan prasarana angkutan yang tesedia	-	100%	-	-	-	-	-	-
		Persentase unit pengujian kendaraan bermotor dalam kondisi baik	-	100%	-	-	-	-	-	-
		Persentase jumlah kendaraan yang melakukan uji kendaraan bermotor	-	97,81%	-	-	-	-	-	-
		Bertambahnya jumlah jalur angkutan	-	46 jalur	-	-	-	-	-	-
		Persentase jumlah rekomendasi izin penyelenggaraan angkutan	-	78,29%	-	-	-	-	-	-
		Persentase jumlah rekomendasi hasil andalalin	-	100%	-	-	-	-	-	-
		Persentase Cakupan Pelayanan Perparkiran	86%	90%	82%	90%	111%	84%	90%	105,83%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana jalan di jalan kabupaten	40%	-	39%	40,01%	102,59%	39,5%	40,01%	100,02%
		Persentase pertumbuhan jalur trayek	1%	-	1%	1%	100%	1%	1%	100%
		Persentase Kelayakan kendaraan bermotor	88,9%	-	88,7%	88,37%	99,66%	88,8%	88,37%	99,40%
	Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota									
	Sub Kegiatan Pelaksanaan penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	1005
	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	-	15 kegiatan rapat	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pengawasan, pengamanan, pengaturan, penerbitan dan pengendalian lalu lintas	-	5 paket	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	7 laporan	-	7 laporan	7 Laporan	100%	7 laporan	7 laporan	100%
	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota									
	Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	-	36 unit	-	-	-	-	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	3.792 unit	4.423 unit	3718 unit	4.618 unit	124,21%	3755 unit	4.618 unit	121,78%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	33 unit	-	33 unit	33 unit	100%	33 unit	33 unit	100%
	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	3.681 unit	1900 titik	3.681 unit	3.681 titik	100 %	3681 unit	3681 unit	100%
	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C									
	Sub Kegiatan Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	-	4 unit	-	-	-	-	-	-
	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	100%	4 unit	4 unit	100%
	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir									
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas	Jumlah lokasi parkir; Persentase pemungutan retribusi parkir	-	57 lokasi; 99,9%	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik									
		Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4 dokumen	-	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	4 dokumen	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penertiban penyelenggaraan perparkiran	-	5 paket	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas	2 laporan	-	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan	2 laporan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
		Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota								
	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	9 unit	1 Paket	9 unit	9 unit	100%	9 unit	9 unit	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	9.110 unit	9.274 unit	9.100 unit	8.196 unit	97,81%	9.105 unit	8196 unit	89,96%
	Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5 laporan	4 paket	5 laporan	5 laporan	100%	5 laporan	5 laporan	100%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 unit	9 unit	9 unit	9 unit	100%	9 unit	9 unit	100%
	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu									

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota									
	Sub Kegiatan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	-	1 Paket	=	=	-	-	-	-
		Jumlah dokumen pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3 dokumen	100%
	Sub Kegiatan Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas	Jumlah Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas	1 unit	-	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%
	Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan									

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 Laporan	100%	2 laporan	2 laporan	100%
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	2 laporan	-	2 laporan	2 Laporan	100%	2 laporan	2 laporan	100%
	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									
	Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal	-	3 paket	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu)	488 unit	-	484 unit	482 unit	99,59%	486 unit	484 unit	99,18%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
		Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia								
	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5 laporan	5 Paket	5 laporan	5 Laporan	100%	5 Laporan	5 laporan	100%
	Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									
	Sub Kegiatan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 dokumen	5 paket	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%
	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas									

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	1 laporan	5 dokumen	1 laporan	1 Laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan pelayanannya, Perangkat Daerah mengampu 6 Indikator. 4 indikator melampaui target, 1 indikator mencapai target sedangkan 1 indikator tidak mencapai target.

- 4 (empat) indikator yang melampaui target sebagai berikut:
  1) Nilai IKM

     Pelaksanaan Survei Indeks Kepuasaan Masyarakat tahun 2023 mencapai 84,19. nilai ini meningkat dari tahun sebelumnya senilai 81
  2) Nilai SAKIP

     Target Nilai SAKIP B dengan nilai 61 telah diupayakan melalui pemenuhan dokumen dasar dan pendukung dalam pelaksanaan evaluasi SAKIP OPD dengan realisasi nilai SAKIP adalah 71,2.
  3) Persentase pemenuhan sarpras jalan di jalan kabupaten

     Persentase pemenuhan sarpras jalan di jalan kabupaten, telah dilakukan *recount* data perlengkapan jalan secara internal serta adanya peningkatan jumlah perlengkapan jalan sepanjang tahun 2023 yaitu hibah PJU Tenaga Surya oleh Kementerian ESDM sebanyak 180 unit dan 5 unit Hibah Perorangan serta 12 unit pengadaan PJU sendiri oleh Dinas Perhubungan.
  4) Persentase cakupan pelayanan perparkiran
  5) Cakupan pelayanan perparkiran telah terlayani di 18 kecamatan dari 20 kecamatan dengan jumlah titik parkir adalah sebanyak 232 titik.

- 1 (satu) indikator mencapai target sebagai berikut:
  1) Persentase pertumbuhan jalur trayek

     Adapun terkait jumlah jalur trayek yaitu 46 jalur trayek, dimana langkah pertama peningkatan jalur trayek yaitu dengan Keputusan Bupati tentang Jalur Trayek Angkutan Perdesaan di Kabupaten Banjarnegara.

- 1 (satu) indikator belum mencapai target sebagai berikut:
  1) persentase kelayakan kendaraan bermotor

     Terkait persentase kelayakan kendaraan bermotor belum memenuhi target 88,7% yaitu 88,37% dikarenakan banyaknya kendaraan yang mutasi serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya uji berkala kendaraan bermotor sehingga perlu dilakukannya sosialisasi secara masif melalui berbagai platform digital Dinas Perhubungan.

2.2.1. Faktor - faktor yang mempengaruhi ketercapaian/ ketidaktercapaian tersebut antara lain adalah:

2.2.1.1. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah:

(a) Ketercapaian Nilai SAKIP yang melampaui target sehingga berdampak pada peningkatan nilai SAKIP

(b) Koordinasi yang baik antar pihak terkait serta kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga fasilitas publik keselamatan jalan

(c) Antusiasme masyarakat pada pelaksanaan survei IKM dan peningkatan pelayanan Dinas Perhubungan. Selain itu penggunaan digitalisasi mendukung masifnya pelaksanaan survei IKM

(d) Pemenuhan dokumen standar dan pendukung evaluasi SAKIP OPD serta peningkatan manajemen kinerja

(e) Optimalisasi penggunaan sarana pendukung pemeliharaan perlengkapan jalan dan sarana perhubungan dan pemeliharaan sarpras keselamatan jalan secara masif dan berkala.

(f) Paguyuban angkutan yang kooperatif serta koordinasi yang baik antar pihak terkait

(g) Pengelola perparkiran dan pengguna layanan perparkiran yang kooperatif

2.2.1.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaktercapaian tersebut antara lain adalah:

a. Terdapat beberapa sub kegiatan yang mengalami *refocusing*
b. Rekomendasi atas dokumen LHE tahun 2021 belum dapat dipenuhi secara maksimal.
c. Masih perlunya peningkatan manajemen pemeliharaan sarana perhubungan.
d. Kendala informasi terkait data kinerja yang disususn dinilai berlum optimal serta evaluasi internal dan kegiatan monev yang dilakukan secara berkala belum maksimal
e. Beberapa sarana pendukung yang ada sudah melewati masa pakai sehingga kegiatan pemeliharaan sarpras jalan belum maksimal
f. Masih perlu adanya keandalan informasi mengenai database perparkiran
g. Belum adanya audit dan inspeksi terkait odol secara masif
h. Belum optimalnya database yang dimiliki bidang angkutan sehingga masih diperlukannya update data untuk mendukung upaya pelaksanaan program
i. Kurangnya SDM yang memadai khususnya yang memiliki keahlian pada analisis dampak lalu lintas serta teknisi khusus kelistrikan
j. Banyaknya jalur trayek yang sudah terisi, namun sepi penumpang, karena banyaknya ojek dan kendaraan pribadi.

Dalam rangka mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut, telah dilakukan upaya-upaya yang meliputi:

1. Memanfaatkan alternatif bahan sederhana untuk membuat rambu rambu non suar dengan menggunakan alat sederhana berupa banner;

2. Memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada serta SDM yang ada;
3. Melakukan sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Kendaraan Bermotor melalui Radio, Media Sosial dan Paguyuban Pengusaha angkutan;
4. Melakukan sosialisasi kebijakan kepada para pemilik kendaraan maupun melalui paguyuban angkutan;
5. Mengusulkan dan koordinasi dengan aparat Kepolisian untuk mengadakan inspeksi angkutan jalan;
6. Melakukan sosialisasi kebijakan kepada para pemilik kendaraan maupun melalui paguyuban angkutan;
7. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin/berkala kepada perseorangan maupun paguyuban angkutan
8. Pengembangan/upgrade dan pemeliharaan software e-parkir yang telah diusulkan pada tahun 2024.

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK LPPD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2024	2025	2025	2026	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Persentase sarana prasarana keselamatan jalan yang tersedia		-	-		-	-	50%	-	-	-	-
2.	Persentase sarana perhubungan dalam kondisi baik		-	-		-	-	90%	-	-	-	-
3.	Persentase sarana prasarana perhubungan yang tersedia		-	-		-	-	24%	-	-	-	-
4.	Persentase angkutan umum yang melayani jaringan jalan		-			-	-	46%	-	-	-	-
5.	**Cakupan Pelayanan Perparkiran***		-	82%	84%	86%	88%	90%	90%	95%	100%	-
6.	Kepemilikan KIR angkutan umum		-	-	-	-	-	88,64%	-	-	-	-
7.	**Nilai IKM***		-	80	82	83	84	81,19	84,19	84,3	84,5	-
8.	**Nilai SAKIP***		-	61	61	62	63	59,91	71,2	71,3	71,4	-

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK LPPD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2024	2025	2025	2026	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
9.	Rasio Konektivitas Jalan Kabupaten		√	0,2%	-	-	-	0,46 smp	0,284 smp	0,27	0,26	
10	**Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana jalan di Jalan Kabupaten***		-	-	39%	39,5%	40%	27%	40,01 %	40.03 %	40,05 %	
11	**Persentase Pertumbuhan Jalur Trayek***		-	-	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	
12	**Persentase Kelayakan Kendaraan Bermotor***		--	-	88,7%	88,8%	88,9%	97,81%	88,37 %	88,70 %	88,80 %	

*) Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2023-2026

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan urusan pemerintahan dalam satu urusan, yaitu Urusan Wajib yang bukan berkaitan dengan pelayanan Dasar Perhubungan. Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk tahun 2025 mencakup satu urusan tersebut. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah diantaranya adalah:

1. Kurangnya SDM dengan keahlian khusus (teknis maupun administrasi) urusan perhubungan dengan kompetensi yang mumpuni.
2. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan urusan perhubungan seperti crane yang sudah usang dan perlengkapan pendukung tugas lapangan.
3. Prasarana dan sarana terminal belum memenuhi standar dengan kondisi bangunan kios yang mulai mengalami kerusakan.
4. Kesadaran masyrakat akan pentingnya uji kelayakan kendaraan bermotor menurun.
5. Belum optimalnya pengelolaan perparkiran.

Permasalahan tersebut, jika tidak diselesaikan dapat menjadi *constraint* dalam pencapaian visi dan misi Bupati maupun capaian indikator lainnya. Beberapa dampak dari adanya permasalahan dan hambatan tersebut meliputi:

1. Pelayanan masyarakat belum dapat dilakukan secara optimal terutama terkait pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana keselamatan jalan kurang maksimal sehingga menimbulkan jumlah laka lantas meningkat akibat kurang maksimalnya pemenuhan sarpras keselamatan jalan.

2. Terkendalanya aktivitas di terminal diakibatkan oleh adanya tingkat kebersihan terminal yang kurang terjaga serta sarana dan prasarana yang belum sesuai dengan standar terminal Tipe C.
3. Penyalahgunaan sarana perhubungan memeberikan dampak terhadap terganggunya ketertiban umum pada sarana perhubungan sehingga menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat;
4. Meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh kendaraan yang *over dimensi* dan *over load*. Sehingga, diperlukan upaya peningkatan kendaraan yang melakukan KIR dengan mengusulkan dan koordinasi dengan aparat Kepolisian untuk mengadakan inspeksi angkutan jalan serta Melakukan sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Kendaraan Bermotor melalui Radio, Media Sosial dan Paguyuban Pengusaha angkutan guna menurunkan kecelakaan lalu-lintas;
5. Potensi terjadinya perparkiran liar yang tidak dikelola secara optimal.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi, peningkatan kualitas birokrasi, dan meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan pengguna layanan akan meningkatkan kebutuhan adanya penyediaan produk layanan yang semakin baik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi-inovasi dalam menunjang peningkatan pelayanan publik secara kontinyu. Beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, yaitu:

1. Tantangan.

   Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan dalam melaksanakan Tugas Pokok dan fungsinya yaitu :

   a. Adanya penyempurnaan aplikasi e-parkir.
   b. Pelayanan angkutan izin terpadu bekerjasama dengan Dinas Perijinan melalui OSS *(Online Single Submission*).
   c. Adanya kebutuhan jumlah sarana dan prasarana keselamatan jalan yang meningkat.
   d. Ketentuan baru mengenai standarisasi spesifikasi angkutan orang dan/atau barang.

e. Masih perlunya monitoring pemanfaatan sarana perhubungan.
f. Masih perlunya upaya mengatasi penyalahgunaan pemanfaatan sarana dan prasarana perhubungan.

2. Peluang.

Peluang yang dihadapi Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam pengembangan pelayanan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu :

a. Melakukan sosialisasi kebijakan kepada para pemilik kendaraan maupun melalui paguyuban angkutan
b. Adanya kegiatan operasi gabungan dengan stakeholder terkait
c. Memaksimalkan perparkiran di event-event insidentil
d. Posisi geografis Kabupaten Banjarnegara sebagai lintasan yang tidak hanya dua arah tapi empat arah yaitu dibukanya akses Jalan Antar Kabupaten Batang Pekalongan, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten Purbalingga sebagai jalur perekonomian yang sangat ramai baik angkutan barang maupun angkutan penumpang;
e. Tumbuh berkembangnya jalur wisata baik alam maupun kuliner sampai dengan pelosok Pedesaan sehingga diperlukan terminal maupun jalur dengan moda transportasi sekaligus sebagai pengungkit ekonomi disekitarnya;
f. Dukungan kebijakan maupun pendanaan kegiatan baik dari Pemerintah Pusat maupun pemerintah Provinsi sebagai faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara;
g. Pemanfaatan teknologi Informasi dalam peningkatan pelayanan dibidang Perhubungan.

Berdasarkan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan tersebut, dapat diinventarisasi beberapa isu strategis. Inventarisasi isu-isu strategis tahun 2024 didapatkan dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal Kabupaten Banjarnegara sampai dengan tahun 2023. Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan pembangunan. Isu-isu penting

dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2024, sebagai berikut:

1. Dengan meningkatnya kualitas ruas jalan kabupaten sangat dibutuhkan sarana dan prasarana jalan di jalan Kabupaten/Kota berupa Lampu Peneranan Jalan umum (LPJU) beserta sarana pendukung Mobil *Crane*, Rambu-rambu lalu lintas (baik suar maupun non suar) dan pagar pengaman jalan.
2. Makin maraknya penggunaan kendaraan yang *over dimensi* dan *over load (ODOL)* sebagai pemicu terjadinya kecelakaan lalu lintas.
3. Masih kurang tersedianya bangunan halte bus;
4. Belum ada Zona Aman Sekolah (ZOSS);
5. Belum adanya terminal angkutan barang;
6. Masih kurangnya sarana dan prasarana standar terminal tipe C;
7. Belum tersedianya area/ruang parkir yang memadai sehingga masih banyak kendaraan yang parkir dibahu jalan;

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program/kegiatan/sub kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Perangkat Daerah dan Pagu indikatif yang disediakan untuk setiap Perangkat daerah berdasarkan rancangan awal RKPD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

RKPD Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Tahun 2005-2025 dan mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2026. Berdasarkan hal tersebut, prioritas arah kebijakan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2024 secara rinci disajikan dalam tabel 2.3.

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Kabupaten Banjarnegara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.)**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	**Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara**	**1. Nilai IKM** **2. Nilai SAKIP**	**1. 83** **2. 62**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara**	**1. Nilai IKM** **2. Nilai SAKIP**	**1. 82** **2. 62**	**13.522.887.512**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara**	**Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia**	**30 Dokumen**	**7.2.600.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara**	**jumlah Perencanaan, Penganggaran ,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia**	**30 Dokumen**	**6.000.000**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	3.630.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	3.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	20 Laporan	3.630.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 Laporan	3.000.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.)**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara**	**jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**60 Laporan**	**5.176.437.585**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Banjarnegara**	**jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**60 dokumen**	**5.682.362,492**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 orang/ bulan	5.011.605.585	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 orang/ bulan	5.641.012.492
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	18 Dokumen	161.202.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	18 Dokumen	38.550.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	3.630.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Se mesteran SKPD	Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	2.800.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara**	**Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia**	**1 dokumen**	**60.500.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara**	**Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia**	**1 dokumen**	**0**
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	60.500.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara**	**Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat**	**18 Dokumen**	**412.869.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara**	**Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat**	**18 Dokumen**	**386.379.900**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.)**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**
			Daerah yang tersedia					**Daerah yang tersedia**		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.100.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	13 Paket	360.519.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	13 Paket	376.379.900
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3.350 Buku	40.250.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0	0
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara**	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1 unit**	82.500.000	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara**	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**0**	**0**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.)**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara**	**Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**40 laporan**	1.128.550.000	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara**	**Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**40 laporan**	**1.063.498.120**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	157.300.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	126.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	971.250.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	937.498.120

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.)**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara**	**jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**26 Laporan**	641.300.000	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara**	**jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**26 Laporan**	**118.3883.120**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	90.750.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	83.383.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	514.250.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	10.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	4 Unit	36.300.000	Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung	Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	4 Unit	25.000.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Dipelihara/Direhabilitasi			Kantor atau Bangunan Lainnya		Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara	**1. Persentase pemenuhan sarana prasarana jalan di jalan Kabupaten/Kota;** **2. Perdsentase Cakupan Pelayanan Perparkiran;** **3. Persentase peningkatan kelayakan kendaraan bermotor;** **4. Persentase pertumbuhan jalur trayek**	**1. 39,5%;** **2. 84%;** **3. 88,8%;** **4. 1%**	11.770.307.000	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara	**1. Persentase pemenuhan sarana prasarana jalan di jalan Kabupaten/ Kota;** **2. Perdsentase Cakupan Pelayanan Perparkiran;** **3. Persentase peningkatan kelayakan kendaraan bermotor;** **4. Persentase pertumbuhan jalur trayek**	**1. 39,5%;** **2. 84%;** **3. 88,8%;** **4. 1%**	
	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	**Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara**	**jumlah dokumen Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	**1 dokumen**	853.050.000	**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	**Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara**	**Tersusunnya dokumen rencana induk jaringan LLAJ Kabuupaten/ Kota**	**1 dokumen**	**135.000.000**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.)**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**
	Pelaksanaan Penyusunan Rencanan Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	605.000.000	Pelaksanaan Penyusunan Rencanan Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0
	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokuman	6.050.000	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokuman	0
	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	7 Laporan	242.000.000	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara	Jumlah Laporan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	7 Laporan	135.000.000
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	**Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara**	**Persentase peningkatan penyediaan perlengkapan**	**1 %**	6.261.750.000	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara**	**Persentase peningkatan penyediaan perlengkapan**	**1 %**	**5.230.000.000**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			jalan di jalan Kabupaten					**jalan di jalan Kabupaten**		
	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	8 unit	272.250.000	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	8 unit	0
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	3.755 Unit	3.993.000.000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	3.755 Unit	4.258.600.000
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	100 Unit	1.452.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	100 Unit	25.000.000
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	3.681 Unit	544.500.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	3.681 Unit	946.400.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	**Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara**	**Persentase terminal penumpang tipe c yang dikelola**	**100%**	15.000.000	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara**	**Persentase terminal penumpang tipe c yang dikelola**	**100%**	**220.000.000**
	Pembangunan Gedung Terminal	Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	1 Unit	-	Pembangunan Gedung Terminal	Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	0	0
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	4 Unit	15.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	4 Unit	220.000.000
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	**Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara**	**jumlah izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir yang diterbitkan**	**4 dokumen**	331.750.000	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	**Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara**	**jumlah izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir yang diterbitkan**	**4 dokumen**	**330.378.000**
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir	4 dokumen	211.750.000	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan	4 dokumen	286.130.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.)**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**
	Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	120.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	44.248.000
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	**Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara**	**Jumlah kendaraan bermotor wajib uji yang melakukan uji**	**9.105 unit**	626.700.000	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara**	**Jumlah kendaraan bermotor wajib uji yang melakukan uji**	**9.105 unit**	**119.886.000**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	9 Unit	90.750.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	9 Unit	15.000.000
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	9.105 Dokumen	275.000.000	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	9.105 Dokumen	25.000.000
	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara	Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5 Laporan	25.000.000	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5 Laporan	1.000.000
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 Unit	235.950.000	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan	9 Unit	119.886.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.)**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**
								Bermotor yang Terpelihara		
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	**Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara**	**Jumlah dokumen pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**10 dokumen**	100.000.000	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara**	**Jumlah dokumen pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**0**	**0**
	Penataan manajemen rekayasa lalu lintas Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara	Jumlah laporan Penataan manajemen rekayasa lalu lintas Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 laporan	10.000.000	Penataan manajemen rekayasa lalu lintas Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara	Jumlah laporan Penataan manajemen rekayasa lalu lintas Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	0	0
	Pengadaan, Pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan Perlengkapan Jalan Dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa lalulintas	Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	2 Unit	60.000.000	Pengadaan, Pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan Perlengkapan Jalan Dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa lalulintas	Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen	0	0

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.)**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**
								dan Rekayasa Lalu Lintas		
	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Dokuman	25.000.000	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	0	0
	Pengawasan dan pengendalian efektifitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kab/kota	Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara	Jumlah laporan Pengawasan dan pengendalian efektifitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kab/kota	1 laporan	10.000.000	Pengawasan dan pengendalian efektifitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kab/kota	Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara	Jumlah laporan Pengawasan dan pengendalian efektifitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kab/kota	0	0
	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalulintas (Andalalin Untuk	**Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara**	**Jumlah dokumen Andalalin yang disetujui**	**4 dokumen**	100.000.000	**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalulintas (Andalalin Untuk Jalan Kabupaten/Kota**	**Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara**	**Jumlah dokumen Andalalin yang disetujui**	**0**	**0**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.)**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**
	Jalan Kabupaten/Kota									
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	1 Dokuman	20.000.000	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	0	0
	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara	Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Orang	25.000.000	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara	Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0	0
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	6 Laporan	30.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	0	0
	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	6 Laporan	25.000.000	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	0	0
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	**Dinas Perhubungan**	**Jumlah laporan Audit dan Inspeksi**	**2 laporan**	**40.000.000**	**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	**Dinas Perhubungan**	**Jumlah laporan Audit dan Inspeksi**	**0**	**0**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Kab. Banjarnegara	**Keselamatan LLAJ di Jalan**				**Kab. Banjarnegara**	**Keselamatan LLAJ di Jalan**		
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	2 Laporan	25.000.000	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	0	0
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sitem Manjemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	2 Laporan	15.000.000	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sitem Manjemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	0	0
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara**	**Persentase jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah**	**66,9%**	**90.000.000**	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara**	**Persentase jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar**	**66,9%**	**295.000.000**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.)**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**
			Kabupaten/Kota yang tersedia					**Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang tersedia**		
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	486 Unit	70.000.000	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	486 Unit	0
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5 Laporan	20.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu)	5 Laporan	175.000.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
								Kabupaten/Kota		
	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara**	**Jumlah rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan**	**2 dokumen**	**15.000.000**	**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara**	**Jumlah rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan**	**2 dokumen**	**25.000.000**
	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	15.000.000	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	15.000.000
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah	**Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara**	**Jumlah dokumen wahana tata nugraha**	**253 dokumen**	**15.000.000**	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah**	**Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara**	**Jumlah Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas**	**253 dokumen**	**0**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.)**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**
	Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					**Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	15.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	0

Berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2024, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan yaitu:

1. Untuk mendukung kenyamanan pegawai dan melakukan pemeliharaan sarana gedung yang sudah memerlukan perbaikan direncanakan akan dilakukan pengaspalan di halaman depan kantor dinas perhubungan guna meminimalisir terjadinya kecelakaan kendaraan bermotor. Selain itu, rehabilitasi atap gedung kantor juga diperlukan dikarenakan atap gedung yang mulai mengalami kebocoran di banyak titik.
2. Mendukung peningkatan pelayanan masyarakat mengenai pemeliharaan LPJU, pengadaan crane diperlukan mengingat kondisi mobil crane sudah mulai mengalami kerusakan. Hal ini diperlukan koordinasi lebih lanjut dengan BPPKA.
3. Penyusunan dokumen rencana induk jaringan LLAJ dinilai penting bagi kebutuhan pelayanan masyarakat mengenai manajemen rekayasa lalu lintas.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan Musrenbang Kecamatan dan Forum Konsultasi Publik telah disampaikan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui aplikasi SIPD. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Adapun total pagu yang dapat diakomoadir adalah pembangunan penerangan jalan dengan Total Rp850.000.000,- dan pemasangan cermin cembung di Kecamatan madukara 2 buah dengan pagu Rp22.000.000,- . Usulan program dan kegiatan secara rinci adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara yang disetujui

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	STATUS	REKOMENDASI SKPD
1	Penanganan Traffick Light dan Rambu-Rambu Lalu Lintas	Kurangnya rambu-rambu lalu lintas di jalan tikungan seperti spion cembung. Hal ini mengakibatkan sering terjadi laka lantas di jalan tersebut	Madukara	Usulan disetujui	Kurangnya rambu-rambu lalu lintas di jalan tikungan seperti spion cembung. Hal ini mengakibatkan sering terjadi laka lantas di jalan tersebut
2	Pembangunan atau Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan	Kurangnya penerangan di jalan Pemukiman Desa	Madukara	Usulan disetujui	Belum adanya penerangan di ruas jalan talunamba Madukara , sering terjadi kecelakaan, kondisi jalan naik turun dan berkelok
3	Pembangunan atau Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan	Jalan Kabupaten ruas Aribaya-Kayuares dan Clapar-Nagasari minim penerangan jalan	Pagentan	Usulan disetujui	Belum adanya penerangan di ruas jalan clapar-nagasari , sering terjadi kecelakaan, kondisi jalan naik turun dan berkelok
4	Pembangunan atau Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan	Jalan di Wilayah Desa Ambal masih minim Penerangan menimbulkan tempat-tempat gelap dan sepi digunakan untuk kegiatan yang tidak menyenangkan	Karangkobar	Usulan disetujui	Jalan di Wilayah Desa Ambal masih minim Penerangan menimbulkan tempat-tempat gelap dan sepi digunakan untuk kegiatan yang tidak menyenangkan

5	Pembangunan atau Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan	Minimnya Penerangan Jalan di Sepanjang Jalan Kabupaten antara Desa Gripit hingga Desa Pekandangan	Banjarmangu	Usulan disetujui	Minimnya Penerangan Jalan di Sepanjang Jalan Kabupaten antara Desa Gripit hingga Desa Pekandangan

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan kementerian perhubungan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 80 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan tahun 2020-2024. Adapun sasaran strategis dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Konektivitas Nasional

   Untuk mewujudkan tujuan : Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi
2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi

   Untuk mewujudkan tujuan :
   a) Meningkatnya layanan transportasi yang diindikasikan dengan capaian on time performance dan penurunan emisi gas rumah kaca serta indeks kepuasan masyakarat terhadap pelayanan publik sektor transportasi;
   b) Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di kementerian Perhubungan yang diindikasikan dengan meningkatnya akuntabilitasi Kementerian Perhubungan, meningkatnya tata kelola pelayanan publik, meningkatnya tata kelola kebijakan, regulasi, dan hukum, dan meningkatnyta tata kelola organisasi;
   c) Terwujudnya penggunaan Teknologi Transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan dalam layanan transportasi
3. Meningkatnya Keselamatan Transportasi

   Untuk mewujudkan tujuan : meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi.

Hubungan liniear antara isu strategis dan sasaran pembangunan transportasi ke depan dapat terarah dan sejalan dengan agenda prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, sehingga sasaran Kementerian Perhubungan memiliki interkoneksi secara langsung dengan 9 agenda prioritas nasional

(Nawa Cita). Pendekatan isu strategis transportasi dalam perumusan sasaran pembangunan Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 menjadi penting untuk lebih menata dan mengelola transportasi dengan baik melalui:

a) Meningkatkan pelayanan transportasi dengan meningkatkan kecepatan, ketepatan dan kecermatan melalui digitalisasi yang mulai berkembang.
b) Mendukung peningkatan keselamatan trasportasi melalui pemerataan pemenuhan sarana dan prasarana keselamatan jalan serta pemeliharaan perlengkapan jalan secara masif.
c) Meningkatkan akses transportasi masyarakat melalui manajemen rencana umum jaringan trayek angkutan.
d) Mewujudkan penanganan permasalahan transportasi secara lebih komprehensif dengan membawa perubahan pada karakteristik masyarakat dalam menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana transportasi.

a. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara merumuskan Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah sebagai berikut :

Tujuan :

1. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Perhubungan
2. Meningkatnya kualitas infrastruktur kelengkapan jalan di jalan kabupaten

Sasaran :

1. Meningkatnya Survey kepuasan masyarakat
2. Meningkatnya Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
3. Terpenuhinya Sarana dan Prasarana jalan di jalan kabupaten
4. Meningkatnya cakupan pelayanan perparkiran
5. Bertambahnya jumlah jalur trayek
6. Persentase kelayakan kendaraan bermotor

3.2. Program dan Kegiatan

Rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota
    a. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
    b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
    c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
    d. Administrasi umum perangkat Daerah;
    e. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah;
    f. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah;
    g. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
    a. Penetapan Rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/kota;
    b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/kota;
    c. Pengelolaan terminal penumpang Tipe C;
    d. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
    e. Pengujian berkala kendaraan bermotor;
    f. Pelaksanaan menejemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota;
    g. Persetujuan hasil analisis dampak lalulintas (Andalalin) untuk jalan Kabupaten/Kota;
    h. Audit dan inspeksi untuk keselamatan LLAJ di jalan ;
    i. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota;
    j. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota; dan
    k. Penerbitan izin penyelenggaran angkutan orang dalam trayek lintas daerah Kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program pada perangkat daerah merupakan program prioritas dalam Renstra 2023-2026. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJPD selanjutnya dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Pemilihan untuk masing-masing program/ kegiatan sebagai berikut :

Tabel 4.1

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting
					Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.15	**Perhubungan**								**22.104.605.441**		**Perkiraan Kemampuan Belanja 2024; Rp. 9.491.000.000; Gaji Rp. 5.419.972.845; Non Gaji Rp. 4.071.027.155)**
2.15 . 01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**								**10.334.298.441**		
2.15 . 01 . 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**9.000.000**		
2.15 . 01 . 2.01 . 01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Terlaksnanya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen	6.000.000	APBD	Koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan (makanan dan minuman rapat)
2.15 . 01 . 2.01 . 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian	Terlaksnanya Program Penunjang Urusan	Tersedianya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian	Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran,	Dinas Perhubungan	Program Penunjang Urusan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	20 Laporan	3.000.000	APBD	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting
					Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemerintahan Daerah	Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Pemerintahan Daerah	Realisasi Kinerja SKPD				(makanan dan minuman rapat)
2.15 . 01 . 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**5.638.918.777**		
2.15 . 01 . 2.02 . 01	Penyediaan gaji dan tunjangan	Terlaksnanya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah	Dinas Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	51 orang/ bulan	5.550.258.777	APBD	Pembayaran gaji 51 orang ASN dalam satu tahun
2.15 . 01 . 2.02 . 03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Terlaksnanya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah	Dinas Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	18 dokumen	85.660.000	APBD	Pembayaran honorarium pengelola keuangan dalam satu tahun
2.15 . 01 . 2.02 . 07	Koordinasi dan penyusunan laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	Terlaksnanya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah	Dinas Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	18 laporan	3.000.000	APBD	Penguatan Sistem Pelayanan dan pemungutan Retribusi Daerah (monitoring dan evaluasi), penyusunan laporan

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting
					Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Semesteran SKPD		Semesteran SKPD				Semesteran SKPD				keuangan bulanan (makanan dan minuman rapat)
2.15 . 01 . 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**90.000.000**		
2.15 . 01 . 2.05 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta atrubut/kelengkapannya	Terlaksnanya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut/kelengkapannya	Tersedianya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Dinas Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	1 paket	90.000.000	APBD	Pengadaan perlengkapan pakaian dinas lapangan 70jt dan Rompi 20jt; 2023 -> 33 juta
2.15 . 01 . 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**486.399.900**		
2.15 . 01 . 2.06 . 02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksnanya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	Dinas Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket	10.000.000	APBD	Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih kantor dalam satu tahun
2.15 . 01 . 2.06 . 04	Penyediaan bahan logistik kantor	Terlaksnanya Program Penunjang Urusan	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	Dinas Perhubungan	Program Penunjang Urusan	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	13 paket	458.769.900	APBD	Belanja alat tulis kantor, alat listrik, cetak, fotokopi, materai/ benda pos, pengisian tabung

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting
					Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Pemerintahan Daerah				Pemerintahan Daerah					gas dan tabung pemadam kebakaran, belanja makanan dan minuman rapat, belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah
2.15 . 01 . 2.06 . 05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksnanya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	Dinas Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan	3350 paket	17.630.000	APBD	Penyediaan cetak karcis retribusi di terminal, kios, TPR
2.15 . 01 . 2.06	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1.375.000.000**		
2.15 . 01 . 2.06.02	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksnanya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1 unit	1.375.000.000	APBD	Pengadaan 1 unit Crane Merk Hino 130 PS (6 Ban) untuk operasional Perbaikan Lampu PJU, yang ada sudah tidak layak (koordinasikan ke BPPKAD)

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting
					Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.15 . 01 . 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1.060.229.764**		
2.15 . 01 . 2.08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksnanya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Dinas Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 laporan	124.800.000	APBD	Pembayaran tagihan listrik, telepon, air, sewa domain server SIM Pengujian kendaraan bermotor
2.15 . 01 . 2.08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksnanya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	36 laporan	935.429.764	APBD	Pembayaran PTT (13) dan THL (23) dlm satu tahun
2.15 . 01 . 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1.674.750.000**		
2.15 . 01 . 2.09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Terlaksnanya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipeliahra dan dibayarkan pajak dan perizinannya	21 unit	75.000.000	APBD	Belanja pemeliharaan 21 kendaraan dinas dalam satu tahun; sama tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting
					Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Operasional atau Lapangan		Operasional atau Lapangan								
2.15 . 01 . 2.09 . 09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksnanya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	1.569.750.000	APBD	Belanja pemeliharaan gedung kantor Dinas Perhubungan dan gedung UPT Pengujian Kendaraan Bermotor dalam satu tahun; 800jt untuk pengaspalan halaman kantor (spesifikasi aspal 1 butuh 1,5 M); 500 juta untuk penggantian atap gedung utama dan UPT Pengujian, eksisting pakai Asbes sebagian

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting
					Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											bocor; 100 jt garasi bus (sekolah); **Kamar Mandi Lantai 1 Gedung Utama** 50 jt**.**
2.15 . 01 . 2.09 . 10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksnanya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	4 unit	30.000.000	APBD	Belanja pemeliharaan komputer, AC, peralatan jaringan, meubelair, dan perlengkapan kantor lainnya dalam satu tahun
2.15 . 02	**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)**								**11.770.307.000**		
2.15 . 02 . 2.01	**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**								**515.000.000**		
2.15 . 02 . 2.01 . 01	Pelaksanaan penyusunan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Terlaksananya Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Terlaksannya penyusunan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Terlaksananya penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Jumlah dokumen penyusunan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 dokumen	300.000.000	APBD	Kabupaten Banjarnegara Tidak memiliki Rencana Induk Transportasi Daerah sebagai dasar atau panduan pelaksanaan urusan bidang pembangunan (Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting
					Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											dianggarkan 250 jt terkena dampak refocusing). Sekalian menunggu Perda RTRW, Rekomendasi BPK Tahun 2019. Usulan 500jt
2.15 . 02 . 2.01 . 02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Terlaksananya Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Ditetapkannya kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Terlaksananya penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Jumlah dokumen penetapan kebijakan dan sosialiasasi rencana induk jaringan LLAJ Kab/Kota	1 Dokumen	15.000.000	APBD	Forum lalu lintas (rutin tiap tahun) koordinasi rutin dengan stakeholder perhubungan (makanan dan minuman rapat), minimal 6X rutin
2.15 . 02 . 2.01 . 03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Terlaksananya Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Terkendalinya pelaksanan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/kota	Terlaksananya penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	7 laporan	200.000.000	APBD	Pengamanan Hari jadi Banjarnegara, TMMD, Hari Jadi Banjarnegara, Hari Kemerdekaan RI, Haji, Nataru, CFD, DCF, dan kegiatan insidental lainnya. (2023-200jt)

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting
					Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.15 . 02 . 2.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**								**5.065.663.000**		
2.15 . 02 . 2.02 . 01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Terlaksananya Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Jumlah prasarana jalan di jalan Kabupaten/ Kota yang terbangun	8 unit	2.181.200.000	APBD	Pembangunan dan pemasangan 8 trafict light (50jt per lokasi); pembangunan dan pemasangan pengaman jalan; pembangunan dan pemasangan RPPJ @22,5jt (jalan baru, Tapen) dan Cermin Cembung; Marka Jalan 250ribu per meter (Banjarmangu-Wanadadi); 100 titik LPJU @17jt per titik (Banjarmangu-Situwangi, Rejasa Madukara, Madukara-Pagentan, Wanayasa-Batur, titik rawan kecelakaan, kriminalitas, penunjang

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting
					Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											ekonomi); Zebra Cross.
2.15 . 02 . 2.02 . 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Tersedianya perelengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Jumlah perlengkapan jalan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang tersedia	3755 unit	440.120.000	APBD	Pembuatan ZOSS (SMPN Wanadadi, MTs, Lengkong; SMP Rakit; SDN Banjarmangu; SDN Pagelak Madukoro); **Diprioritaskan untuk Dalam Kota untuk mendukung Kota Layak Anak** (dikaji bisa tidaknya masuk ke urusan pendidikan)
2.15 . 02 . 2.02 . 03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Terlaksananya Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Jumlah prasarana jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	100 unit	1.722.000.000	APBD	Penggantian Tiang dan Lampu PJU Jalur Kalibenda - Semampir dan dalam kota
2.15 . 02 . 2.02 . 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Terlaksananya Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan	Jumlah perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kot	3681 unit	722.343.000	APBD	Belanja pemeliharaan jaringan listrik PJU (material lampu jalan, APILL, WL, dll)

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting
					Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perlengkapan Jalan	Angkutan Jalan (LLAJ)	Perlengkapan Jalan			Angkutan Jalan (LLAJ)	a yang terpelihara				wilayah se-Kabupaten
2.15 . 02 . 2.03	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**								**5.005.000.000**		
2.15 . 02 . 2.03 . 02	Pembangunan Gedung Terminal	Terlaksananya Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Terbangunnya Gedung terminal	Terkelolanya terminal penumpang Tipe C	Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ	Jumlah gedung terminal yang terbangun	1 unit	5.000.000.000		Belanja Pembangunan Terminal Karangkobar yang sudah tidak layak
2.15 . 02 . 2.03 . 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Terlaksananya Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Terkelolanya terminal penumpang Tipe C	Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ	Jumlah terminal penumpang Tipe C yang dipelihara	4 Unit	5.000.000	APBD	Pelaksanaan tiap tahun (rehab/pemeliharaan/perlengkapan 4 terminal/ TPR)
2.15 . 02 . 2.04	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**								**400.000.000**		
2.15 . 02 . 2.04 . 01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin	Terlaksananya Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan	Terfasilitasinya Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan	Terfasilitasinya Penerbitan Izin Penyelenggaraan	Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan lalu lintas	Jumlah dokumen pemenuhan Perolehan Izin	4 dokumen	200.000.000	APBD	Fasilitasi juru parkir 460 orang dan pengelola parkir di 85 lokasi parkir;

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting
					Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Angkutan Jalan (LLAJ)	dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	dan Pembangunan Fasilitas Parkir		dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				untuk lampu dan payung 80 unit untuk lokasi rawan kalibening, wanayasa; pembinaan dan edukasi kpd juru parkir 200 orang melibatkan kepolisian dan TNI, Babinsa Babinkamtibmas output optimaslisasi retribusi parkir; belum termasuk usulan pemungutan parkir per bulan di 18 lokasi/ Kecamatan (2 kecamatan 1 trip), survei lokasi parkir untuk menentukan target potensi PAD dari Parkir

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting
					Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.15 . 02 . 2.04 . 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Terlaksannya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Jumlah laporan koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota	2 laporan	200.000.000	APBD	Masih sangat kurang marka parkir yang sangat berguna untuk kelancaran arus lalu lintas **pengecatan marka parkir 100jt**; Database parkir belum lengkap dan aplikasi parkir belum sempurna **upgrade aplikasi parkir.onlink.id 50jt**; Banyaknya pengelola dan juru parkir dan luasnya wilayah pengelolaan parkir output **Pembinaan Keamanan dan Keselamatan dalam Perparkiran 50jt**.
2.15 . 02 . 2.05	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**								**275.144.000**		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting
					Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.15 . 02 . 2.05 . 01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya uji berkala kendaraan bermotor	Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang tersedia	9 unit	**15.000.000**	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Pengadaan toolkit set/ peralatan bengkel kecil
2.15 . 02 . 2.05 . 04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Tersedianya Bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor	Terlaksananya uji berkala kendaraan bermotor	Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Jumlah dokumen Bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor	9.105 dokumen	**75.000.000**	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Belanja pengadaan smart card/ bukti lulus uji kendaraan bermotor @25rb target 1 tahun 9.000 uji, realisasi Th 2022 9.274; realisasi 2021 9.482
2.15 . 02 . 2.05 . 05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Tersosialisasinya sstandar operasional prosedur Pengujian Kendaraan Bermotor	Terlaksananya uji berkala kendaraan bermotor	Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Jumlah laporan Sosialisasi standar operasional prosedur Pengujian Kendaraan Bermotor	5 laporan	**5.000.000**	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Sosialisasi prosedur pengujian kendaraan bermotor (makanan dan minuman rapat) ; radio 2jt, WA/SMS (telkomsel) sejumlah 1jt untuk 5.555 SMS, spanduk dan iklan layanan melalui instagram 2jt. Untuk mendukung

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting
					Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											kepatuhan uji KIR kerja sama operasi dengan Bidang LL)
2.15 . 02 . 2.05 . 07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya uji berkala kendaraan bermotor	Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang terpelihara	9 unit	**180.144.000**	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Belanja pemeliharaan alat uji kendaraan bermotor, peralatan jaringan pengujian kendaraan bermotor, belanja kalibrasi, memperkuat akreditasi alat uji; terdapat 14 alat uji perawatan awal tahun dan pertengahan tahun bersamaan dg kalibrasi oleh lisensinya PT. MAYINDO Alat IASAKA; akreditasi th 2025 (tiap 5 tahun); overhaul untuk spedo dan rem (2023-> 75jt)

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting
					Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.15 . 02 . 2.06	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**								**100.000.000**		
2.15 . 02 . 2.06 . 01	Penataan Manajemen Rekayasa Lalulintas Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Terlaksananya penataan Manajemen Rekayasa Lalulintas Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Jumlah laporan penataan Manajemen Rekayasa Lalulintas Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	1 laporan	10.000.000	APBD	Belum pernah ada kegiatan untuk pencatatan lalulintas harian rata-rata (LHR) **usulan baru** (Prioritas jalan Kabupaten) - Penghitungan rekayasa lalulintas
2.15 . 02 . 2.06 . 02	Pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan Dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalulintas	Terlaksananya Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Terlaksananya pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan Dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalulintas	Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Jumlah perelengkapan jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan pemasangan, perbaikan dan pemeliharan	2 Unit	50.000.000	APBD	Pengadaan dan perbaikan perlengkapan jalan yang sudah rusak (Barikade portabel) Traffic cone - anggaran bisa diadakan sekolah

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting
					Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.15 . 02 . 2.06 . 03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Terlaksananya Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Jumlah dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	30.000.000	APBD	Sosialisasi dan seleksi untuk pelajar pelopor keselamatan lalu lintas (SLTA) dan dikirim sampai tingkat Provinsi (kegiatan rutin)
2.15 . 02 . 2.06 . 04	Pengawasan dan pengendalian Efektifitas Pelaksanaan kebijakan untuk jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Terlaksananya Pengawasan dan pengendalian Efektifitas Pelaksanaan kebijakan untuk jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Jumlah laporan Pengawasan dan pengendalian Efektifitas Pelaksanaan kebijakan untuk jalan Kabupaten/ Kota	1 Laporan	10.000.000	APBD	Selama ini Dinhub tidak ada anggaran untuk melaksanakan patroli di jalan Kabupaten (**Usulan baru)**, Penertiban parkir, mengurai kemacetan, monev jalur rawan bencana
2.15 . 02 . 2.06 . 05	Forum lalu lintas dan angkutan jalan untuk jaringan jalan	Terlaksananya Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Terlaksananya Forum lalu lintas dan angkutan jalan untuk jaringan jalan	Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Jumlah laporan Forum lalu lintas dan angkutan jalan untuk jaringan jalan	6 Laporam	-	APBD	Forum Lalu lintas (rutin tiap tahun) koordinasi rutin dengan steakholder perhubungan (**usulan baru menyesuaikan**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting
					Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kabupaten/ Kota		Kabupaten/ Kota				Kabupaten/ Kota				**nomenklatur)** masuk kegiatan Forum LL di atas
2.15 . 02 . 2.07	**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalulintas (Andalalin) Untuk Jalan Kabnupaten/Kota**								**65.000.000**		
2.15 . 02 . 2.07.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Terlaksananya Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Tersusunnya Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalulintas (Andalalin) Untuk Jalan Kabnupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang ditetapkan	1 Dokumen	25.000.000	APBD	Penyusunan **Naskah Akademik** (draft perda) tentang penyelenggaraan Andalalin (usulan baru)
2.15 . 02 . 2.07.02	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Terlaksananya Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Meningkatnya Kapasitas Penilai Andalalin	Tersusunnya Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalulintas (Andalalin) Untuk Jalan Kabnupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Jumlah Penilai Andalalin yang ditingkatkan kapasitasnya	2 Orang	25.000.000	APBD	Dishub Belum mempunyai SDM yang memiliki Sertifikat Penilai Andalalin, Target 2 Orang (Diklat); **disinkronkan kegiatan BKD**
2.15 . 02 . 2.07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Terlaksananya Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Tersusunnya Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalulintas (Andalalin) Untuk	Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin	6 laporan	10.000.000	APBD	Banyaknya Perusahaan atau Kantor yang belum memiliki Dokumen

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting
					Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Angkutan Jalan (LLAJ)		Jalan Kabnupaten/Kota							Andalalin **(Sidang Andalalin)**
2.15 . 02 . 2.07.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Terlaksananya Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Terawasinya Pelaksanaan Rekomendasi andalalin	Tersusunnya Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalulintas (Andalalin) Untuk Jalan Kabnupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Jumlah laporan rekomendasi andalalin yang terawasi	6 laporan	5.000.000	APBD	Mengevaluasi Rekomendasi Andalalin, sudah dilaksanakan apa belum (cek lokasi, setelah rekomendasi andalalin)
2.15 . 02 . 2.08	**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**								**17.500.000**		
2.15 . 02 . 2.08.02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya audit dan inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	2 Laporan	10.000.000	APBD	Operasi ODOL (over dimensi, over load) Dan Banyak angkutan umum yang belum memiliki Uji Berkala Kendaraan Bermotor (KIR), **lokus utama di Terminal** operasi bersama uji KIR.

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting
					Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.15 . 02 . 2.08 . 05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Terlaksananya Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Terlaksananya audit dan inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	2 Laporan	7.500.000	APBD	Operasi kelengkapan surat-surat kendaraan, ijin trayek dll. Keselamatan berkendara
2.15 . 02 . 2.09	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**								**295.000.000**		
2.15 . 02 . 2.09 . 01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang tersedia	486 Unit	150.000.000	APBD	Sewa Bus Mudik Gratis @12,250 jt 2023 8 bus; Koordinasi dan Jasa pengamanan lebaran, Tenda Pos lebarang, Honor, Mamin Jaga Pos

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting
					Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.15 . 02 . 2.09 . 02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Terkendalinya dan terawasinya Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Jumlah laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	5 laporan	145.000.000	APBD	Pengoperasian Bus Sekolah (BBM, biaya servis kendaraan) 2 Bus BBM dexlite 32,640 jt per bulan 2,7 jt melayani 2 kali sehari Sigaluh-Klampok; service 36 jt; Pajak tahunan 5 jt (bus tanggung); biaya administrasi TNKB (elf) 70 jt;
2.15 . 02 . 2.12	**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**								**25.000.000**		
2.15 . 02 . 2.12 . 02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan	Terlaksananya Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Tersosialisasi dan terlaksananya Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan	Terlaksananya Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Jumlah dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan	2 Dokumen	25.000.000	APBD	Seleksi (ujian tertulis) dan Pemilihan sopir/ juru mudi teladan (anggota paguyuban) untuk dikirim ke tingkat Provinsi **5 orang**; (inisiatif Provinsi). Sosialisasi, pembinaan ada dari

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting
					Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kabupaten/Kota		Kewenangan Kabupaten/kota				Kabupaten/Kota				kegiatan Paguyuban.
2.15 . 02 . 2.14	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**								**7.000.000**		
2.15 . 02 . 2.14 . 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 laporan	7.000.000	APBD	Program kementerian (penilaian bidang perhubungan dengan penyusunan dokumen wahana tata nugraha), penilaian/ pemantauan langsung dari kementerian perhubungan ke Kabupaten (Inisiatif Kementerian)

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas pembangunan Tahun 2024 dijabarkan kedalam semua urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten Banjarnegara, berkaitan dengan hal tersebut maka pada Tahun 2024 Dinas Perhubungan merencanakan 2 Program 18 Kegiatan dan 44 Sub kegiatan yang berkaitan dengan bidang Perhubungan yaitu :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 6 Kegiatan yang diarahkan pada:

1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
3) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangang ASN;
4) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD;
6) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;
7) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
8) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
9) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
10) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
11) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
12) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
13) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
14) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;

15) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

B. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) terdiri dari 11 Kegiatan yang diarahkan pada:

1) Sub Kegiatan Pelaksanaa Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Kota;
2) Sub Kegiatan Penetapan kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota;
3) Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota;
4) Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota;
5) Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota;
6) Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan;
7) Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan;
8) Sub Kegiatan Pembangunan Gedung Terminal
9) Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (fasilitas utama dan pendukung);
10) Sub Kegiatan Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parker kewenangan Kabupaten/Kota dalam System Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
11) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan Kabupaten/Kota;
12) Sub Kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor;
13) Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
14) Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;

15) Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
16) Sub Kegiatan Penataan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas jaringan Jalan Kb/Kota;
17) Sub Kegiatan Pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan Rekayasa Lalulintas;
18) Sub Kegiatan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota;
19) Sub Kegiatan Pengawasan dan pengendalian efektifitas pelaksaan kebijakan untuk jaringan jalan Kab/Kota;
20) Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin;
21) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin;
22) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi penilaian hasil Andalalin;
23) Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin;
24) Sub Kegiatan Pelaksanaan inspeksi, Audit dan pemantauan unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
25) Sub Kegiatan Pelaksanaan inspeksi, Audit dan pemantauan Sistem manajemen keselamatan perusahaan Angkutan Umum;
26) Sub Kegiatan Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
27) Sub Kegiatan Pengendalian dan pengawasan ketersediaan Angkutan Umum untuk jasa Angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota;
28) Sub Kegiatan Sosialisasi dan Uji coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota;
29) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan Kabupaten/Kota

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. Renja Perangkat Daerah selanjutnya menjadi *platform* operasional bagi Perangkat Daerah dalam menjalankan programnya dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka sasaran pembangunan daerah tahun 2024. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026 dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disepakati.
2. Kerangka pendanaan dalam Renja Perangkat Daerah masih bersifat sementara, sehingga masih dimungkinkan terjadi perubahan pagu yang disebabkan oleh pengurangan, penambahan, dan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan maupun antar sub kegiatan dalam kerangka penyusunan anggaran secara terpadu dan berbasis kinerja.
3. Renja Perangkat Daerah menjadi acuan bagi Kepala Perangkat Daerah dan segenap jajarannya serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, serta menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada : Januari 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANJARNEGARA

(MOHAMAD IQBAL, S.E)

KATA PENGANTAR

Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026, disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026, terdiri dari pendahuluan, hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara, dan rencana kerja dan pendanaan serta penutup. Penyusunan Rancangan Awal Renja tersebut berpedoman pada RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029, Renstra Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029, Hasil Review Renstra Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 dan RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025.

Kami menyadari dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya, untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja dimaksud.

Banjarnegara, Oktober 2025

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANJARNEGARA

Ir. ABDUL SUHENDI
Pembina Utama Muda
NIP. 19670929 199803 1 010

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan Rancangan Renja Awal Perangkat Daerah Tahun 2026 dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan yang diatur melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan Pembentukan Tim Penyusun, penelaahan Rancangan Awal RKPD, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, hingga pada penyempurnaan berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang RKPD. Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, penyusunan Rancanganga Awal Renja Perangkat Daerah juga mengacu pada Renja Kementerian/Lembaga terkait, serta Renja Perangkat Daerah Provinsi terkait. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2. Landasan Hukum

Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun dengan berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52

Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja
18. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi;;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah ProvinsiJawa Tengah Nomor 121);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);

32. Peraturan Bupati Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 98 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara
33. Peraturan Daerah No 14 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025(lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 nomor 14);
34. Peraturan Bupati No 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025, (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara tahun 2024 Nomor 49)

1.3. Maksud dan Tujuan

Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun dengan maksud untuk :

a. Menjabarkan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 ke dalam rencana program kegiatan prioritas tahun 2026 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Renja K/L Tahun 2026 dan Renja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;
b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumberdaya daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerapan anggaran berbasis kinerja.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

a. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA-DPA dalam Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun

Anggaran 2026, yang dalam penyusunannya didahului dengan menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026;

b. Sebagai instrument evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan tahun 2026;
c. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Rancangan Awal Renja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun berdasarkan sistematika yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah, serta sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah.

BAB 2 : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berjalan dan capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dan atau pokok-pokok DPRD.

BAB 3 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran RKPD.

BAB 4 : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan (Renja) Perubahan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025, disusun untuk menjawab permasalahan dan isu isu strategis Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan Urusan yang menjadi kewenangan Perangkat daerah meliputi urusan Tenaga Kerja Penanaman Modal Dan Transmigrasi.

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 yang tercantum dalam RKPD kabupatenn Banjarnegara Tahun 2025 terdiri dari 11 Program 18 Kegiatan dan 33 Sub Kegiatan dengan total anggaran RP 8.687.308.759,- dengan fokus utama pada pemantapan system dan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang evektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip Good Gowernance melalui peningkatan akuntabilitas ,transparansi dan keadilan serta partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah.

Program /Kegiatan/Sub kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan Pembangunan Daerah meliputi :

a. Meningkatnya Layanan Administrasi Perkantoran, dengan sasaran terwujudnya tertib administrasi perkantoran.

b. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif; dengan sasaran terwujudnya pelayanan perizinan yang

berkualitas yaitu murah, mudah, cepat dan akurat berdasar sistem pelayanan terpadu satu pintu;

c. Meningkatkan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja untuk memasuki pasar kerja, dengan sasaran meningkatknya kompetensi tenaga kerja;

d. Menekan angka pengangguran, setengah pengangguran dan masyarakat miskin, dengan sasaran yang akan dicapai :
   - Menurunnya tingkat pengangguran terbuka.
   - Meningkatnya kesempatan angkatan kerja.

e. Meningkatkan perlindungan tenaga kerja meliputi keselamatan dan kesehatan, jaminan sosial tenaga kerja serta peningkatan kesejahteraan tenaga kerja lainnya, dengan sasaran yang akan dicapai :
   - Meningkatnya pekerja yang mendapatkan jaminan ketenagakerjaan.
   - Menurunnya perselisihan pekerja dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah.

f. Meningkatnya pelayanan masyarakat, sasaran untuk meningkatknya Nilai Indek Pelayanan Publik (IPP)

g. Meningkatnya kinerja instansi.

Dari 11 program, 18 kegiatan, dan 33 sub kegiatan yang ada dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 tersebut, program/kegiatan/sub kegiatan yang disetujui untuk dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2026 terdiri dari 18 program,18 kegiatan, dan 33 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 8.687.308.759,- Pada Rancangan renja Tahun 2026 terjadi beberapa perubahan yang meliputi penambahan atau pengurangan pagu,

penghapusan, penambahan dan pengurangan program/kegiatan/sub Kegiatan, penambahan atau pengurangan target inerja, serta perubahan Lokasi dan kelompok sasaran kegiatan, perubahan tersebut mengubah. Rincian dalam renja perangkat daerah menjadi 11 program 18 kegiatan dan 33 Sub Kegiatan dengan total Anggaran sebesar RP.8.687.308.759,-

Dinamika yang terjadi selama tahun 2025 turut mempengaruhi keberhasilan pencapaian renja Perangkat daerah sampai dengan semester II tahun 2025 disajikan table seperti dibawah ini :

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENTRA SAMPAI SEMESTER II THN 2025 belum di emek selasa 21 ok

Program	Indikator Kinerja Program (outcame)Kegiatan (Output)	Target Realisasi Kinerja Program dan Kinerja Tahun 2025 Semester II		
		Target Kinerja	Realisasi Kineraja Smtr II	Capaian Kinerja realisasi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		100%		25%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Rencana Aksi Renstra KAK RKT DPA RKA IKK dan Renja	9 Dokumen	8 Dokumen	89%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		12 Dokumen	9 Dokumen	75%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			

Administrasi Umum Perangkat Daerah		12 Dokumen	9 Dokumen	75%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Unit	4 unit	100%
Pengadaan peralatan dan mesin lainya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 Laporan	9 Laporan	75%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		24 Unit	24 Unit	100%

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		100%	0	0
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Presentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada rencana tenaga kerja	1 Dokumen	60	60
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro			
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		100%	0	0
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Presentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	200 Orang	133	%

Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n			
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Presentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	100%	0	0
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		2000 Orang	815 0rang	58,75%
Job Fair / Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan melalui Job Fair/Bursa Kerja			
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Presentase Perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB LKS Bipartit struktur skala upah dan BPJS Ketenagakerjaan)	72%	83,99%	83,99%
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di LKP Online			
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Perusahaan mengikuti klarifikasi dan verivikasi sarana hubungan industrial	72%	82%	116%

Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		40 Orang	0	0
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak di 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pelatihan	100%	100%	100%
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak di 1 (satu) Kabupaten/Kota	Presentase Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	80 Orang	80orang	100%
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi			
Pengesahan Peraturan Perusahaan	1. Rekomendasi Upah Minimum			

bagi Perusahaan	Kabupaten 2. Jumlah peserta pembinaan system pengupahan			
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Diterbitkannya dokumen perijinan	375 Dokumen	454 Dokumen	121%
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		375 Dokumen	454 Dokumen	121,07%
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha melalui system perizinan berusaha berbasis risiki terintegrasi secara elektronik			
Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			
PROGRAM PENGENDALIAN	Presentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku	100%(61PU/KU	19,67%(61PU/KU	19,67%(61PU/KU

PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	usaha dalam membuka usaha	: penyelesaian permasalahan 8 kegiatan usaha; bimtek 25 PU pengawasan 21 kegiatan usaha)	: penyelesaian permasalahan 0 kegiatan usaha; bimtek 25 PU pengawasan 12 kegiatan usaha)	: penyelesaian permasalahan 0 kegiatan usaha; bimtek 25 PU pengawasan 12 kegiatan usaha)
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		100%(61PU/KU : penyelesaian permasalahan 8 kegiatan usaha; bimtek 25 PU pengawasan 21 kegiatan usaha)	19,67%(61PU/KU : penyelesaian permasalahan 0 kegiatan usaha; bimtek 25 PU pengawasan 12 kegiatan usaha)	19,67%(61PU/KU : penyelesaian permasalahan 0 kegiatan usaha; bimtek 25 PU pengawasan 12 kegiatan usaha)
Penyelesaian Permasalahan dan	Jumlah kegiatan usaha/pelaku usaha yang mengikuti kegiatan Fasilitasi			

Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan usahanya	Penyelesaian permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya			
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Presentase tranmigran terdaftar yang diberangkatkan	100%	100%	100%
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		1 Dokumen	0	0
	Jumlah			

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Dalam pelaksanaan pelayanannya, Perangkat Daerah mengampu 25 Indikator Sub Kegiatan . Dari 25 Sub Indikator tersebut, Sub Kegiatan berstatus tercapai yang ditargetkan. …. sub kegiatan yang tidak tercapai dikarenakan pelaksanaannya di triwulan ke 3 dan 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian/ ketidaktercapaian tersebut adalah :

1. Upaya yang dilakukan Disnaker PMPTSP Kab.Banjarnegara untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat;
2. Mengoptimalisasi pemantauan, dan pengawasan kepada pelaku usaha;

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah disajikan dalam table 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK LPPD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Rasio Capaian		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2024	2025	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Prosentase pencari kerja yang ditempatkan			5,85	5,84	5,83	5,82	55,95				
2	Prosentase pencari kerja yang mendapat pelatihan			69,70	69,71	69,72	69,72	14,6				
3	Prsontase Peningkatan Nilai Investasi Bersekala Nasional			300	320	340	360	48,04				
4	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal			1.000	1.000	1.000	1.000	2.094				
5	Prosentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola yang layak (PP,PKB,LKS			58	63	67	71	73,34				

	Bipartit,Struktur Skala Upah,BPJS TK)											
6	Prosentase tenaga kerja yang mendapatkan perlindungan tenaga kerja			61	63	65	67	66,67				

*) Kolom 3 diisi berdasarkan IKK *outcome* dalam Lampiran Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan urusan pemerintahan dalam 3 urusan, yaitu Urusan Bidang Tenaga Kerja dan Urusan Penanaman Modal dan Urusan Bidang Transmigrasi, Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan berdasarkan hasil evaluasi, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk tahun 2023 sampai 2024 mencakup 3 urusan tersebut. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah diantaranya adalah :

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

1. Permasalahan terkait Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

    a. Kurangnya ketersediaan aparatur dalam penyusunan program/kegiatan, kurangnya pemahaman aparatur dalam penyusunan perencanaan program/kegiatan dan penganggaran,

    b. Mutasi Pejabat/Pegawai yang cepat dan terbatasnya SDM.

    c. Sarana prasarana gedung, perlengkapan kantor, dan kendaraan operasional belum representatif sesuai dengan tuntutan kinerja kompleksitas tinggi.

    d. Belum optimalnya akses kesempatan mengikuti pendidikan pelatihan teknis dalam peingkatan kapasitas pegawai.

Urusan Bidang Tenaga Kerja :

2. Permasalahan terkait dengan Urusan Bidang Tenaga Kerja :

   a. Permasalahan Pemberdayaan Tenaga Kerja belum tersedianya tenaga instruktur pendidikan pelatihan dan motivator ketenagakerjaan.

   b. Terbatasnya fasilitasi pelatihan yang tidak seimbang dengan animo pelatihan yang diinginkan bagi para pencari kerja.

   c. Masih rendahnya akses data ketenagakerjaan dan lembaga pelatihan kerja PTKIS, BKK sebagai bahan perencanaan dan penanganan ketenagakerjaan.

   d. Belum sinerginya angkatan kerja yang ada dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh dunia kerja.

3. Permasalahan terkait Program Hubungan Industrial

   a. Masih kurangnya kesadaran perusahaan dalam memenuhi wajib lapor .

   b. Masih banyaknya perusahaan yang tidak membayar upah sesuai UMK yang tidak mengajukan penangguhan.

   c. Masih terdapatnya tenaga kerja yang belum mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan.

   d. Masih banyaknya penduduk usia anak yang bekerja terutama sektor informal.

   Pemasalahan terkait dengan Urusan Bidang Penanaman Modal :

4. Permasalahan terkait Program Penanaman Modal:

   a. Kebijakan yang sering berubah (tidak konsisten dan tidak selaras),

b. Iklim investasi yang kurang kondusif (tidak tersedia lahan yang cukup / mahal, fasilitas yang kurang memadai, relatif tinggi beban biaya),

c. Masih adanya tidak sinkronnya perijinan daerah-daerah dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

5. Permasalahan terkait Bidang Pelayanan Perizinan dan Pengaduan :

a. Masih banyak masyarakat yang belum sadar izin.

b. Pelayanan perijinan online belum optimal.

Permasalahan terkait dengan Urusan Bidang Transmigrasi :

a. KSAD yang disepakati kedua belah pihak sering tidak sesuai dalam pelaksanaannya, khususnya pada hak perolehan tanah usaha 1 dan usaha 2.

b. Animo masyarakat untuk bertransmigrasi tinggi namun tidak sebanding dengan kuota penempatan transmigrasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

c. Rendahnya keterampilan calon transmigran perempuan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan di atas dapat diidentifikasi beberapa isu strategis sebagai berikut :

a. Kurangnya SDM, baik kuantitas dan kualitas di Disnaker PMPTSP.

b. Belum optimalnya pembangunan SIMPATU (Sistem Pelayanan Terpadu).

c. Masih rendahnya partisipasi perusahaan dalam melakukan kegiatan magang untuk para peserta pelatihan rekruitmen tenaga kerja di Disnaker.

d. Belum optimalnya penempatan transmigrasi oleh pemerintah pusat karena kuota yang ada tidak sebanding dengan tingginya animo masyarakat untuk bertransmigrasi.

Permasalahan tersebut, jika tidak diselesaikan dapat menjadi *constraint* dalam pencapaian visi dan misi Bupati maupun capaian indicator lainnya. Beberapa dampak dari adanya permasalahan dan hambatan tersebut meliputi :

1. Keterbatasan kompetensi SDM terkait dengan penyelenggaraan pelatihan.
2. Kompetensi dan daya saing tenaga kerja belum terpenuhi.
3. Kurangnya kesadaran pengusaha tentang perlindungan tenaga kerja melalui program jaminan sosial.
4. Masih kurangnya kesadaraan ketaatan pengusaha untuk mentaaati peraturan UMK.
5. Kurang tersedianya tenaga mediator.
6. Pegawai yang pensiun tidak segera mendapatkan ganti, karena pengangkatan ASN sangat terbatas.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi, peningkatan kualitas birokrasi, dan meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan pengguna layanan meningkatkan kebutuhan akan adanya penyediaan produk layanan yang semakin baik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi-inovasi dalam menunjang peningkatan pelayanan publik secara kontinyu. Beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, yaitu :

1. Dengan adanya Layanan Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan secara Online (JITU)
2. Dengan adanya Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara Online (OSS RBA).

3. Dengan adanya Pelayanan AK .1 (Kartu Kuning) secara Online.
4. Dengan adanya Tanda Tangan Elektronik.
5. Dengan berdirinya MPP.

Berdasarkan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan tersebut, dapat diinventarisasi beberapa isu strategis. Inventarisasi isu-isu strategis tahun 2026 didapatkan dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal Kabupaten Banjarnegara sampai dengan tahun 2025. Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan pembangunan di Kabupaten Banjarnegara.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Tahun 2005-2025 dan mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2026. Berdasarkan hal tersebut, prioritas arah kebijakan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2026 meliputi:

1. Urusan Bidang Tenaga Kerja.
2. Urusan Bidang Penanaman Modal,
3. Urusan Bidang Transmigrasi.

Rumusan Rencana Awal Program dan Kegiatan Tahun 2026 digambarkan dalam Table berikut di bawah ini, Table 2.4

Tabel 2.4
REVIEW RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026 KABUPATEN BANJARNEGARA

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	PaguIndikatif (Rp.)belum disesuiakanndt	Program RKPD/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	PaguIndikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					
	Urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja					**Urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja**					
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	**Kab. Banjarnegara, semua kelurahan**	**Jumlah dokumen pelaporan kinerja yang disusun**	**15 dokumen 100%**	6.646.813.589	***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota***	**Kab. Banjarnegara, semua kelurahan**	**Jumlah dokumen pelaporan kinerja yang disusun**	**15 dokumen 100%**	6.186.436380,-	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6.232.500,-	*Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				*3.702.000,-*	

	Sub Kegiatan *Evaluasi* Kinerja Perangkat Daerah	Disnaker pmptsp	Prosentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang terlaksana	16 dokumen	6.232.500-	Sub Kegiatan *Evaluasi* Kinerja Perangkat Daerah	Disnaker pmptsp	Prosentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang terlaksana	16 dokumen	*3.702.000,-*	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.361.020.600-	*Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				5.288.622.314,-	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Disnaker pmptsp	Prosentase gaji dan jasa administrasi keuangan yg terpenuhi	41 Orang	5.520.669.989	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Disnaker pmptsp	Prosentase gaji dan jasa administrasi keuangan yg terpenuhi	41 Orang	5.255.424.314.-	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Disnaker Pmptsp		12 orang	41.420.000,-	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Disnaker Pmptsp		12 orang	33.198.000,-	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				502.434.900,-	*Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				235.431.158,-	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disnaker pmptsp	Prosentase pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	15 paket	19.993.500,-	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disnaker pmptsp	Prosentase pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	15 paket	18.740.730,-	

	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Disnaker pmptsp	Jumlah bahan logistik kantor	11 Paket	482.441.400,-	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Disnaker pmptsp	Jumlah bahan logistik kantor	11 Paket	216.690.428,-	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				38.062.000-	*Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*					
	Sub Kegiatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				38.062.000	Sub Kegiatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
	Kegiatan penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah				507.16.000	*Kegiatan penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah*					
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik	Disnaker pmptsp	Prosentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	4 paket	90.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik	Disnaker pmptsp	Prosentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	4 paket		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Disnaker pmptsp	Jumlah honor ptt thl d lingkungan opd yang terbayar	14 Orang	417.816.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Disnaker pmptsp	Jumlah honor ptt thl d lingkungan opd yang terbayar	14 Orang		
	Kegiatan				61.240.000	Kegiatan				98.346.120,-	

	pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah					pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah					
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Disnaker pmptsp	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi dan terpelihara	6 unit	43.562.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Disnaker pmptsp	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi dan terpelihara	6 unit	46.562.000,-	
	Sub Kegiata Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Disnaker pmptsp	Jmlh Gedung kantor yg terpelihara	2 unit	7.000.000	Sub Kegiata Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Disnaker pmptsp	Jmlh Gedung kantor yg terpelihara	2 unit	18.712.000,-	
	Sub Kegiata Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Disnaker pmptsp	Jmlh perlengkapan Gedung kantor yang terpelihara	3 Paket	17.678.200	Sub Kegiata Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Disnaker pmptsp	Jmlh perlengkapan Gedung kantor yang terpelihara	3 Paket	33.072.100,-	
	Program Perencanaan Tenaga Kerja		Prosentase serapan anggaran	100%	**4.225.000-**	**Program Perencanaan Tenaga Kerja**		Prosentase serapan anggaran	100%	2.460.000,-	
	Kegiatan Penyusuna Rencana Tenaga Kerja (RTK)				4.225.000,-	Kegiatan Penyusuna Rencana Tenaga Kerja (RTK)				2.460.000,-	
	Sub Kegiatan Penyusunan Tenaga Kerja Makro	Disnaker pmptsp		1 dokumen	**4.225.000**	Sub Kegiatan Penyusunan Tenaga Kerja Makro	Disnaker pmptsp		1 dokumen	2.460.000,-	

		p									
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja		**Prosentase pencari kerja /penganggur yang mendapatkan pelatihan.**		**676.000.000,-**	***Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja***		**Prosentase pencari kerja /penganggur yang mendapatkan pelatihan.**		***770.839.843,-***	
	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi				**676.000.000,-**	***Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi***				***770.839.843,-***	
	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah tenaga kerja yang kompeten siap bekerja di sektor formal.		600.000.000	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah tenaga kerja yang kompeten siap bekerja di sektor formal.		***770.839.843,-***	
	Sub kegiatan Koordinasi lintas Lembaga dan Kerjasama dengan sektor swasta untuk penyediaan infrastruktur serta sarana dan prasaran					Sub kegiatan Koordinasi lintas Lembaga dan Kerjasama dengan sektor swasta untuk penyediaan infrastruktur serta sarana dan prasaran				0	
	Sub kegiatan sarana dan prasarana pelatihan				76.000.000,-	***Sub kegiatan sarana dan prasarana pelatihan***				0	

	Pembinaan Lembaga pelatihan kerja					***Pembinaan Lembaga pelatihan kerja***				0	
	Sub kegiatan pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta			36 lembaga		***Sub kegiatan pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta***			36 lembaga	0	
	Kegiatan **Konsultasi pada perusahaan**	**Disnaker pmptsp**	**Presentase pencari kerja/penganggur yang mendapatkan pelatihan**			***Kegiatan*** **Konsultasi pada Perusahaan**	**Disnaker pmptsp**	**Presentase pencari kerja/penganggur yang mendapatkan pelatihan**		0	
	Sub Kegiatan konsultasi pada perusahaan kecil	Disnaker pmptsp	Jumlah perusahaan kecil yang mengikuti konsultasi produktifitasw	30 orang		Sub Kegiatan konsultasi pada perusahaan kecil	Disnaker pmptsp	Jumlah perusahaan kecil yang mengikuti konsultasi produktifitasw	30 orang	0	
	Program Penempatan Tenaga Kerja		**Presentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan**			***Program Penempatan Tenaga Kerja***		**Presentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan**		38.134.600,-	
	Kegiatan antar kerja di dearth kab/kota					***Kegiatan antar kerja di dearth kab/kota***				0	
	Sub.keg.penyediaan sumber daya					***Sub.keg.penyediaan sumber daya***				0	

	pelayanan antar kerja(bintek petugas bkk)					***pelayanan antar kerja(bintek petugas bkk)***					
	Penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi penari kerja					***Penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi penari kerja***				0	
	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja					*Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja*				38.134.600,-	
	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	5 titik eks kawedanan (20 kecamatan)	Jumlah pencari kerja/pengangguran yang mendapatkan informasi lowongan kerja			Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	5 titik eks kawedanan (20 kecamatan)	Jumlah pencari kerja/pengangguran yang mendapatkan informasi lowongan kerja		0	
	Bursa Kerja (Job Fair)	Banjarnegara	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan layanan kesempatan/lowongan kerja melalui bursa kerja (job fair)		83.616.000	Bursa Kerja (Job Fair)	Banjarnegara	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan layanan kesempatan/lowongan kerja melalui bursa kerja (job fair)		**38.134.600,-**	
	Padat Karya	4 Lokasi/desa	Jumlah pengangguran dan setengah			Padat Karya	4 Lokasi/desa	Jumlah pengangguran dan setengah penganggur		0	

			penganggur yang mendapatkan pekerjaan sementara melalui kegiatan padat karya					yang mendapatkan pekerjaan sementara melalui kegiatan padat karya			
	Peningkatan perlindungan dan kompetensi calon pekerja migran Indonesia (CPMI)	Banjar negara	Jumlah cpmi yang mengikuti pelatihan pembekalaan bekerja ke luar negri		,-	Peningkatan perlindungan dan kompetensi calon pekerja migran Indonesia (CPMI)	Banjarnegara	Jumlah cpmi yang mengikuti pelatihan pembekalaan bekerja ke luar negri		0	
	Program Pembangunan Kawasan transmigrasi					Program Pembangunan Kawasan transmigrasi				0	
	Keg.pendataan persebaran penduduk yg berasal dari 1 daerah kabupaten kota					Keg.pendataan persebaran penduduk yg berasal dari 1 daerah kabupaten kota				0	
	Koordinasi dan sinkronisasi Kerjasama Pembangunan transmigrasi yg berasal dari 1 kabupaten kota				295.000	Koordinasi dan sinkronisasi Kerjasama Pembangunan transmigrasi yg berasal dari 1 kabupaten kota				0	
	Program Hubungan Industrial				***476.00.000***--	***Program Hubungan***				456.553.200,-	

						Industrial					
	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	***Kab, Banjarnegara***	***Prosentase pekerja buruh yang menjadi peserta jaminan sosial ketenaga kerjaan***	***78%***	424.657.500-	***Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota***	***Kab, Banjarnegara***	***Prosentase pekerja buruh yang menjadi peserta jaminan sosial ketenaga kerjaan***	***78%***	420.585.700,-	
	Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kab, Banjarnegara	Prosentase perusahaan menerapkan norma ketenaga kerjaan		,-	Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kab, Banjarnegara	Prosentase perusahaan menerapkan norma ketenaga kerjaan		0	
	Sub Kegiatan Pendaftaran Perjanjian Kerja sama bagi Perusahaan	Kab, Banjarnegara	Prosentase pelaksanaan hubin di Perusahaan		-	Sub Kegiatan Pendaftaran Perjanjian Kerja sama bagi Perusahaan	Kab, Banjarnegara	Prosentase pelaksanaan hubin di perusahaan		***0***	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerjaserta Pengupahan	Kab, Banjarnegara	Terlaksanamya sosialisasi dan pendataan tenaga kerja informal di kecamatan		424.657.500,-	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerjaserta Pengupahan	Kab, Banjarnegara	Terlaksanamya sosialisasi dan pendataan tenaga kerja informal di kecamatan		420.585.700,-	
	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan		Prosentase penyelesaian	100%	***51.342.500.-***	*Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian*		Prosentase penyelesaian perselesihan	100%	***5.967.500,-***	

	Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		perselesihan hubungan industrial			*Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota*		hubungan industrial			
	Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Banjarnegara	Tersedianya data base ketenagakerjaan		20.895.000,-	Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Banjarnegara	Tersedianya data base ketenagakerjaan		16.799.000,-	
	Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Banjarnegara	Prosentase penyelesaian perselisihan di perusahaan	100%	10.447.500,-	Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Banjarnegara	Prosentase penyelesaian perselisihan di perusahaan	100%	6.268.500,-	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan	Kab. Banjar	Tersediany a dokumen		20.000.000,-	Sub Kegiatan Penyelenggaraan	Kab. Banjarneg	Tersedianya dokumen		12.900.000,-	

	Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	negara	organisasi pengusaha dan serikat pekerja			Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	ara	organisasi pengusaha dan serikat pekerja			
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Banjar negara	Peningkatan kinerja tripartit d Banjarnegara			Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Banjarnegara	Peningkatan kinerja tripartit d Banjarnegara		0	
	Penanaman Modal					**Penanaman Modal**					
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal					***Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal***				0	
	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota					*Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota*				0	
	Penyediaan Peta potensi dan peluang usaha Kabupaten/Kota	Kab. Banjar negara	Dokumen profil investasi berskala nasional			Penyediaan Peta potensi dan peluang usaha Kabupaten/Kota	Kab. Banjarnegara	Dokumen profil investasi berskala nasional		0	
	Program Promosi Penanaman Modal					***Program Promosi Penanaman Modal***					
	Kegiatan penyelenggaraan					Kegiatan penyelenggaraan				0	

	promosi penanaman modal					promosi penanaman modal					
	Sub Kegiatan Penyusunan Strategi promosi penanaman modal	Kab. Banjar negara	Tersusunya Perda yang mengatur Promosi Penanaman modal kewenagan Kabupaten /kota			Sub Kegiatan Penyusunan Strategi promosi penanaman modal	Kab. Banjarnegara	Tersusunya Perda yang mengatur Promosi Penanaman modal kewenagan Kabupaten/kota		0	Penyusunan Perda tentang perubahan fasilitasi /insentif dan kemudahan Penanaman Modal
	Sub Kegiatan Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal	Kab. Banjar negara	Tersusunya Dokumen sebaran usaha di kab.banjar negara			Sub Kegiatan Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal	Kab. Banjarnegara	Tersusunya Dokumen sebaran usaha di kab.banjarnegara		0	
	Program Pelayanan Penanaman Modal				164.654.000,-	***Program Pelayanan Penanaman Modal***				60.498.500,-	
	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secaraTerpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				164.654.000	*Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secaraTerpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota*				60.498.500,-	
	Sub Kegiatan	Kab.	Penyebaran		92.479.000,-	Sub Kegiatan	Kab.	Penyebaran		48.235.000,-	

	informasi dan pengelolaanpengaduan masyarakt terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan	Banjarnegara	informasi perizinan dan pemahaman masyarakat terkait perizinan berusaha meningkat			informasi dan pengelolaanpengaduan masyarakt terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan	Banjarnegara	informasi perizinan dan pemahaman masyarakat terkait perizinan berusaha meningkat			
	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Banjarnegara	Prosentase izin yang diterbitkan		72.175.000,-	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Banjarnegara	Prosentase izin yang diterbitkan		60.498.500,-	
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal				40.525.800,-	***Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal***				27.796.500,-	
	Kegiatan Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				40.525.800	***Kegiatan Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota***				27.796.500,-	
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan	Kab. Banjarnegara			20.525.800	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan	Kab. Banjarnegara			12.335.300,-	

	Kegiatan usahanya					Kegiatan usahanya					
	Bimbingan teknis kepad pelaku usaha	Kab. Banjar negara			20.000.000,-	Bimbingan teknis kepad pelaku usaha	Kab. Banjarnegara			14.721.200,-,-	
	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi					Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi				0	
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi				295.000,-	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi				177.000	
	Kegiatan Penataan dan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota				295.000,-	Kegiatan Penataan dan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota				177.000	
	Koordinasi dan sinkronisasi kerja sama pembangunan transmigrasi yang berasal dari 1 Kabupaten /Kota	2 Kabupaten Daerah Penempatan Tranmigrasi	Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi kerja sama pembangunan transmigrasi yang berasal dari 1 Kabupaten /Kota		**295.000,-**	Koordinasi dan sinkronisasi kerja sama pembangunan transmigrasi yang berasal dari 1 Kabupaten /Kota	2 Kabupaten Daerah Penempatan Tranmigrasi	Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi kerja sama pembangunan transmigrasi yang berasal dari 1 Kabupaten /Kota		177.000	
	Pemindahan dan	5 KK	Terlaksana			Pemindahan dan	5 KK (1	Terlaksananya		0	

	Penempatan Transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaen Kota	(1 Lokasi) pemukiman daerah transmigrasi	nya pemindahan dan penempatan trasmigrasi yang berasal dari 1 daerah kabupaten Kota			Penempatan Transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaen Kota	Lokasi) pemukiman daerah transmigrasi	pemindahan dan penempatan trasmigrasi yang berasal dari 1 daerah kabupaten Kota			
					8.064.972.975,-					**7.899.892.703,-**	

Berdasarkan Rumusan Rancangan RKPD Tahun 2026 terdapat beberapa hal yang menjadi catatan yaitu :

1. Pecahnya menjadi 2 dinas di DIsnaker PMPTSP
2. Penyusunan Dokumen RTKD Kabupaten Banjarngara yang disusun masa periode Tahun 2025 -2029;

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan Musrenbang Kecamatan dan Forum Konsultasi Publik telah disampaikan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui aplikasi SIPD. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 202 Kabupaten Banjarnegara.

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Validasi

2.6. Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan hasil reses Anggota DPRD, melalui aplikasi SIPD telah disampaikan usulan program dan kegiatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan / sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Validasi

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program pada perangkat daerah merupakan prioritas dalam rencana strategis perangkat daerah tahun 2023-2026 anggaran mengacu pada RPD tahun 2023-2026.rencana program prioritas beserta indicator keluaran pada program sebagaimana tercantum dalam rencana strategis perangkat daerha selanjutnya dijabarkan kedala program,kegiatan,dan sub kegiatan.

Pagu yang tersedia untuk tahun Anggaran 2026 yang akan digunakan untuk membiayai 8 program 14 kegiatan dan 25 sub kegiatan.pemilihan untuk masing-masing program/kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah

  Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah ini terdiri dari 6 kegiatan yang diarhakan pada kegiatan :

  1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terdiri dari 1 Kub Keg yaitu :
     - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu:
     - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
     - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
  3. Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu:
     - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
     - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu:
     - Pengadaan peralatan dan mesin lainya
  5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu:
     - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
     - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  6

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu:

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

- Program Perencanaan Tenaga Kerja

  Program Perencanaan Tenaga Kerja ini terdiri dari 1 kegiatan yang diarhakan pada kegiatan :

  1 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu:
    - Penyususnan Rencana Tenaga Kerja makro

- Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga

  Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja ini terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan :

  1 Pelaksanaan Pelatihan kerja dan produktiitas tenaga kerja yang terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu:
    - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi

- Program Penempatan Tenaga Kerja

  Program PenempatanTenaga Kerja ini terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan :

  1 Pengelolaan Inormasi pasar Kerja yang terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu:
    - Job Fair / Bursa Kerja

- Program Hubungan Industrial

  Program hubungan Industrial ini terdiri dari 2 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan :

1 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu:

- Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga

2 Kerja serta Pengupahan

Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 4 sub kegiatan yaitu :

- Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak di 1 (satu) Kabupaten/Kota*
- Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak di 1 (satu) Kabupaten/Kota
- Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi
- Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan

- Program Pelayanan Penanaman Modal

  Program Pelayanan Penanaman Modal ini terdiri dari 1 kegiatan yang diarhakan pada kegiatan :

  1 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu:

  - Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
  - Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko

- Program Pengendalian Pelaksanaan penanaman Modal

  Program Pengendalian penanaman Modal terdiri dari 1 kegiatan yaitu :

  1 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri 2 sub kegiatan yaitu :

- Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan usahanya
- Bimbingan teknis kepada pelaku usaha

- Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

  Program Pengembangan penanaman Modal terdiri dari 1 kegiatan yaitu :

  1 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri 1 sub kegiatan yaitu :
    - Koodinasi dan singkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang berasal dari 1 daerah kabupaten/kota

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan penjabaran Rencana Strategis (rentra) Perangkat daerah Tahun 2023-2026, Renja Perangkat Kerja selanjutnya menjadi *platform* operasional bagi Perangkat Daerah dalam menjalankan programnya dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi pembanguna daerah tahun 2023-2026. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Renja Perubahan Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman Dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025 dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 disepakati.
2. Kerangka pendanaan dalam Renja Perangkat Daerah masih bersifat sementara, sehingga masih dimungkinkan terjadi perubahan pagu yang disebabkan oleh pengurangan, penambahan, dan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan maupun antar sub kegiatan dalam kerangka penyusunan anggaran secara terpadu dan berbasis kinerja.
3. Renja Perangkat Daerah menjadi acuan bagi Kepala Perangkat Daerah dan segenap jajarannya serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, serta menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal : 15 Juli 2024

KEPALA DINAS TENAGA KERJA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN,TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANJARNEGARA

Ir.ABDUL SUHENDI
Pembina Utama Muda
NIP.19670929 199803 1 010

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan yang diatur melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan pembentukan tim penyusun, penelaahan rancangan awal RKPD, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, hingga pada penyempurnaan berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang RKPD. Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, penyusunan Renja Perangkat Daerah juga mengacu pada Renja Kementerian/Lembaga terkait, serta Renja Perangkat Daerah Provinsi terkait. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan

pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2. Landasan Hukum

Renja Peringkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Thun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698)
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 266);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
10. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 Nomor 14);
11. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2026-2030 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 Nomor 15);
12. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 Nomor 35).

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun dengan maksud untuk:

a. Menjabarkan Renstra Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 – 2029 ke dalam rencana program kegiatan prioritas Tahun 2026 yang dielaraskan dengan sasaran dan program Renja K/L Tahun 2026 dan Renja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;
b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerapan anggaran berbasis kinerja.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

a. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA-DPA dalam Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2026, yang dalam penyusunannya didahului dengan menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026;
b. Sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Tahun 2026;
c. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun berdasarkan sistematika yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah.

BAB 2 : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dan atau pokok-pokok DPRD.

BAB 3 : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan tahun 2026.

BAB 4 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran RKPD.

BAB 5 : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah meliputi urusan Pemerintahan fungsi penunjang kewilayahan.

Renja Kecamatan Banjarmangu Tahun 2024 yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 terdiri dari 4 program, 9 kegiatan, dan 18 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar *Rp. 2.831.256.820,- (Dua milyar delapan ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah)* dengan fokus utama pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dimana kecamatan berfungsi ganda selain untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada warga di wilayahnya juga menjadi kepanjangan tangan pemerintah pusat dimana sebagian urusan pemerintahan kewenangannya dilimpahkan kepada camat serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa. Program/kegiatan/sub kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah yang meliputi:

1. Belum Optimalnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Non Usaha, Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga masyarakat baru mengurus surat – surat hanya saat dibutuhkan saja bukan sebagai dokumen pribadi.
2. Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia di Kecamatan Banjarmangu dalam rangka menunjang Tugas dan fungsi kecamatan sebagai unit kerja yang secara langsung melayani masyarakat dan tugas – tugas dalam urusan pemerintahan lainnya.
3. Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia aparatur perangkat desa dalam pertanggungjawaban keuangan terkait dengan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;

4. Tata kelola pemerintahan desa yang belum Optimal, mengakibatkan pengerjaan buku – buku administrasi desa tidak atau belum sesuai juknis yang ada, pelaksanaan implementasi program – program peningkatan kesejahteraan masyarakat (penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, dan keagamaan) juga tidak atau belum sesuai juknis yang ada.

Dari 4 program, 9 kegiatan, dan 18 sub kegiatan yang dalam Renja Perangkat Daerah tersebut, program/kegiatan/sub kegiatan yang disetujui untuk dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2023 terdiri dari 4 program, 9 kegiatan, dan 18 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar *Rp. 2.150.555.414,- (Dua miliar seratus lima puluh juta empat ratus empat belas rupiah)* Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024, terjadi beberapa perubahan yang meliputi penambahan atau pengurangan pagu, penghapusan, penambahan atau pengurangan program / kegiatan / sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Perubahan tersebut mengubah rincian dalam Renja Perangkat Daerah menjadi 4 program, 9 kegiatan, dan 18 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar *Rp. 2.017.842.920,- (dua miliar tujuh belas juta delapan ratus empat puluh dua ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah)*

Anggaran Perubahan program/kegiatan/sub kegiatan yang berkurang atau bertambah ditahun 2024, meliputi :

1. Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota mengalami penambahan anggaran, sedangkan
2. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa berkurang anggarannya.

Dinamika yang terjadi selama tahun 2024 turut mempengaruhi keberhasilan pencapaian Renja Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2024, tercatat adanya hasil yang baik dikarenakan adanya pencapaian maupun pelampauan target. Meskipun demikian, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian agar hasil yang sudah tercapai dapat bertahan atau mungkin lebih baik lagi ke di tahun – tahun berikutnya. Di antaranya :

1. Memberikan informasi atau sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan pentingnya dokumen kependudukan.
2. Meningkatkan kualitas SDM Kecamatan dengan mengikuti bintek yang diselenggarakan oleh pemerintah atau mengikuti webinar yang dilakukan secara online / offline.
3. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aparatur desa, juga memberikan informasi terkait dengan tata kelola pemerintahan desa.

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi semua program yang diampu oleh Kecamatan Banjarmangu yaitu Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Perencanaan yang matang dengan koordinasi internal yang baik dengan pejabat struktural maupun staf di kecamatan.
2. Pelaksanaan kegiatan dilakukan sebaik mungkin sesuai dengan kerangka acuan kerja yang sudah dibuat.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala agar jika terjadi permasalahan bisa diatasi sedini mungkin.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka perencanaan pada tahun selanjutnya, perlu diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, diantaranya:

1. Meningkatkan koordinasi internal antara Kasi dan Kasubag terkait permasalahan di wilayah. Mengingat para kasi yang lebih memahami dengan kondisi wilayah, sehingga perencanaan dan penganggaran lebih tepat sasaran.
2. SOP yang jelas sebagai dasar Pelaksanaan Kegiatan

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Per Daerah sampai dengan Tahun 2024 disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
s.d Tahun 2024* Kabupaten Banjarnegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja/program kegiatan/sub kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026	
					Target Kerja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Kerja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Kerja Perangkat Daerah tahun 2026	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6 x 100	9	10=5+7+9	11=10/4 x 100
A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Kabupaten Kota**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
1	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	100%	7 dokumen	7 dokumen	100%
2	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	100%	7 dokumen	7 dokumen	100%
B	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 orang/bulan	33 orang/bulan	33 orang/bulan	33 orang/bulan	100%	33 orang/bulan	33 orang/bulan	100%
2	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%

Kode	Uraian/Nilang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja/program kegiatan/sub kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Hasil) Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026	
					Target Kinerja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Kinerja Perangkat Daerah tahun 2026	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=6+7+9	11=10/4
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keluaran Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keluaran Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan koordinasi Penyusunan keluaran Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 laporan	6 laporan	6 laporan	6 laporan	100%	6 laporan	6 laporan	100%
III	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	100%	3 paket	3 paket	100%
2	Penyedia bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	6 Paket	6 Paket	11 Paket	11 Paket	100%	11 Paket	11 Paket	100%
3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
IV	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	5 unit	8 unit	5 unit	8 unit	100%	5 unit	8 unit	100%
V	**Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

Kode	Uraian/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja (program kegiatan/sub kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kebijakan Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Renja Perangkat Daerah tahun 2026	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7:6	9	10=5+7+9	11=10:4
I	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 layanan	12 layanan	12 layanan	12 layanan	100%	12 layanan	12 layanan	100%
2	Penyedia jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 layanan	12 layanan	12 layanan	12 layanan	100%	12 layanan	12 layanan	100%
VI	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau unsur jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 unit	11 unit	11 unit	11 unit	100%	11 unit	11 unit	100%
2	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana prasarana gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	100%	3 unit	3 unit	100%
3	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	100%	3 unit	3 unit	100%
B	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
1	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**Persentase terselenggaranya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**100%**	-	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja/program kegiatan/sub kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kelluaran Kegiatan s/d (bulan) tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026	
					Target Kerja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Kerja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Kerja Perangkat Daerah tahun 2026	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+9	11=10/4
1	Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
U	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah dokumen Perizinan Non Usaha yang di Laksanakan	1.600 dokumen	2150 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	12 dokumen	100%
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	1.963 laporan	1887 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
3	Pelaksanaan Urusan yang terkait dengan Ketentraman Lain yang di Limpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Ketentraman Lain yang di limpahkan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
D	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase penanganan konflik di wilayah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
1	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah yang terlaksana**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100%	6 dokumen	6 dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program kegiatan /sub kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Peningkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kiltsanan Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan	Perbitraan Realisasi Capaian Target Renstra Peningkat Daerah s/d tahun 2026	
					Target Kinerja Peningkat Daerah tahun 2024	Realisasi Kinerja Peningkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Kinerja Peningkat Daerah) tahun 2026	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7:6	9	10=4+7+9	11=10:4
E	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTARAN DESA**	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
1	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
1	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	17 dokumen	17 dokumen	34 dokumen	34 dokumen	100%	34 dokumen	34 dokumen	100%
2	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	17 dokumen	17 dokumen	17 dokumen	17 dokumen	100%	17 dok	17 dok	100%
3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	17 dokumen	17 dokumen	34 dokumen	34 dokumen	100%	34 dokumen	34 dokumen	100%
4	Fasilitasi Musrenbang Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen yang di fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
6	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	17 dokumen	17 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100%	6 dokumen	6 dokumen	100%
8	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	17 dokumen	17 dokumen	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan pelayanannya, Perangkat Daerah mengampu 1 Indikator dan berstatus tercapai. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Perencanaan yang matang dengan koordinasi internal yang baik dengan pejabat struktural maupun staf di kecamatan.
2. Pelaksanaan kegiatan dilakukan sebaik mungkin sesuai dengan kerangka acuan kerja yang sudah dibuat.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala agar jika terjadi permasalahan bisa diatasi sedini mungkin.

Meskipun status indikator sudah tercapai, namun ada beberapa faktor yang masih perlu dipacu untuk perbaikan ke depan.

1. Belum Optimalnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Non Usaha, Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga masyarakat baru mengurus surat – surat hanya saat dibutuhkan saja bukan sebagai dokumen pribadi.

Dalam rangka mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut, telah dilakukan upaya-upaya yang meliputi:

1. Memberikan informasi atau sosialisasi kepada masyarakat, berkaitan dengan pentingnya dokumen kependudukan.

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK LPPD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai SAKIP Kecamatan	-	-	CC (56)	B (69,60)	B (70,35)	B (70,35)	B (69,38)	BB (79,58)	B (70,35)	B (70,35)	
2	Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan	-	-	85,50	85,50	85,60	85,00	83,87	84,42	85,60	85,00	

*) Kolom 3 diisi berdasarkan IKK outcome dalam lampiran Permendagri 18/2020

2.1. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Kewilayahan Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJPD Tahun 2005 – 2025, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk tahun 2026 mencakup urusan tersebut. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah diantaranya adalah:

1. Pelayanan administrasi kependudukan masih belum optimal dan belum sepenuhnya berbasis digital
2. Usulan kelurahan / desa dalam forum musrenbang kecamatan masih dominan berkaitan dengan pembangunan internal kelurahan / desa, belum diarahkan pada usulan yang bersifat komprehensif dan mendukung prioritas pembangunan tingkat kabupaten
3. Kerentanan terhadap bencana masih tinggi dan kesiapsiagaan wilayah belum optimal.
4. Pelayanan publik belum sepenuhnya cepat, efektif, dan berbasis digital, sehingga masih terdapat keluhan masyarakat terkait waktu dan kualitas layanan.

Permasalahan tersebut, jika tidak diselesaikan dapat menjadi constraint dalam pencapaian visi dan misi Bupati maupun capaian indikator lainnya. Beberapa dampak dari adanya permasalahan dan hambatan tersebut meliputi:

1. Pelayanan administrasi kependudukan yang belum optimal dan belum berbasis digital menyebabkan efisiensi rendah, akses terbatas, dan kualitas pelayanan publik yang buruk. Digitalisasi

dan optimalisasi sistem sangat penting untuk meningkatkan kecepatan, akurasi, dan transparansi pelayanan, serta membangun pemerintahan yang responsif dan berbasis data.

2. Hasil musrenbang belum banyak yang diakomodir oleh OPD teknis.
3. Permasalahan tingginya kerentanan terhadap bencana serta belum optimalnya kesiapsiagaan wilayah berimplikasi pada meningkatnya potensi kerugian jiwa dan harta, melemahnya ketahanan sosial-ekonomi masyarakat, serta terganggunya stabilitas dan keberlanjutan pembangunan daerah
4. Permasalahan pelayanan publik yang belum sepenuhnya cepat, efektif, dan berbasis digital mengakibatkan menurunnya kepuasan masyarakat serta meningkatnya keluhan terhadap waktu tunggu dan kualitas layanan yang diberikan. Ketidakefisienan dalam proses pelayanan memperlambat kinerja birokrasi, membuka peluang terjadinya praktik yang tidak transparan, serta menghambat upaya transformasi menuju tata kelola pemerintahan berbasis digital. Selain itu, keterbatasan akses layanan yang merata, khususnya di wilayah terpencil, turut memperlebar kesenjangan pelayanan antar daerah. Kondisi ini secara keseluruhan berdampak negatif terhadap kepercayaan publik, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, dan daya saing daerah dalam mendorong investasi serta pembangunan berkelanjutan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi, peningkatan kualitas birokrasi, dan meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan pengguna layanan akan meningkatkan kebutuhan akan adanya penyedinan produk layanan yang semakin baik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi – inovasi dalam menunjang peningkatan pelayanan publik secara berkelanjutan. Tantangan dan peluang dari Kecamatan Banjarmangu dalam

meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, dapat diurai dalam analisis SWOT yaitu:

- FAKTOR PENDORONG

  Peran ganda kecamatan selain sebagai OPD juga ujung tombak pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Banjarmangu
- FAKTOR PENGHAMBAT

  Belum didukung oleh SDM yang memadai.
- PELUANG

  Dalam pelaksanaan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Kecamatan merupakan lokus yang paling dekat dengan pengguna layanan sehingga menjadi peluang sebagai kepanjangan tangan dari instansi induknya dalam pemberian layanan langsung kepada masyarakat.
- ANCAMAN

  Perubahan kebijakan dan perkembangan teknologi yg cepat

Berdasarkan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan tersebut, dapat diinventarisasi beberapa isu strategis. Inventarisasi isu – isu strategis tahun 2026 didapatkan dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal Kabupaten Banjarnegara sampai dengan tahun 2025. Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan pembangunan.

2.2. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Tahun 2005 – 2025 dan mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023. Berdasarkan hal tersebut, prioritas arah kebijakan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2026 meliputi:

1. Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi serta Tata Kerja, Kecamatan memiliki tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggarasan Pemerintahan
2. Pelayanan Publik
3. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan tugas yang di limpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 Kabupaten Banjarnegara

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Catatan Penting
	Unsur Kewilayahan			**2.988.194.860**	**Unsur Kewilayahan**			**3.381.136.927**	
A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketercapaian target kinerja perangkat daerah**	**100%**	**2.844.509.860**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketercapaian target kinerja perangkat daerah**	**100%**	**3.338.461.927**	
1	**Kegiatan Perencanaan, Pengenggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Pengenggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun**	**100%**	**3.200.000**	**Kegiatan Perencanaan, Pengenggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Pengenggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun**	**100%**	**3.000.000**	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 dok	1.600.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 dok	1.400.000	
2	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 dok	1.600.000	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 dok	1.600.000	
B	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi keuangan perangkat daerah yang terfasilitasi	**100%**	**1.665.825.860**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**1.941.887.927**	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 org/ bln	1.630.617.860	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 org/ bln	1.908.577.927	
2	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	35.208.000	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	33.310.000	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Catatan Penting
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan koordinasi Penyusunan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 laporan	1.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan koordinasi Penyusunan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 laporan	1.500.000	
III	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana**	**100%**	**140.000.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana**	**100%**	**100.000.000**	
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	3 paket	12.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	10.000.000	
2	Penyedia bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket	100.000.000	Penyedia bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket	90.000.000	
3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	8.000.000					
IV	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia**	**100%**	**60.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia**	**100%**	**48.000.000**	
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit	8.000.000	
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 unit	60.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di sediakan	5 unit	40.000.000	
V	**Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana**	**100%**	**77.084.000**	**Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**77.184.000**	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Catatan Pecling
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	20.900.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	21.000.000	
2	Penyedia jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	56.184.000	Penyedia jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	56.184.000	
VI	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**898.400.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**68.400.000**	
1	Penyedian jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 unit	39.400.000	Penyedian jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 unit	39.400.000	
2	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	850.000.000	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana prasarana gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	20.000.000	
3	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 unit	9.000.000	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	10 unit	9.000.000	
B	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan**	**100%**	**88.125.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan**	**100%**	**87.209.000**	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Catatan Penting
I	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**Persentase terselenggaranya pemeliharaan sarana dan prasaran pelayanan umum**	**100%**	**5.000.000**	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**Persentase Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum**	**100%**	**5.000,000**	
1	Koordinasi / Sinerg dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi / Sinerg dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	5.000.000	Koordinasi / Sinerg dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	5.000.000	
II	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana**	**100%**	**83.125.000**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana**	**100%**	**82.200.000**	
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah dokumen Perijinan Non Usaha yang di Laksanakan.	12 dokumen	8.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah dokumen Perijinan Non Usaha yang di Laksanakan.	12 dokumen	3.600.000	
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan.	12 laporan	3.600.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan.	12 laporan	3.600.000	
3	Pelaksanaan Urusan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang di Limpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan	1 laporan	74.525.000	Pelaksanaan Urusan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang di Limpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan	1 laporan	75.000.000	
C	**Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**Persentase lembaga desa/kelurahan di kecamatan yang terfasilitasi**	100%		**Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**Persentase lembaga desa/kelurahan di kecamatan yang terfasilitasi**	100%	**7.200.000**	
	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	**Persentase Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang terlaksana**	100%		**Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa**	**Persentase Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang terlaksana**	100%	**3.600.000**	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Catatan Penting
	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	1 laporan		Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	1 laporan	3.600.000	
	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan	**Persentase Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan**	65%		**Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan**	**Persentase Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan**	65%	**3.600.000**	
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	2 lembaga kemasyarakatan		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	2 lembaga kemasyarakatan	3.600.000	
D	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase penanganan konflik di wilayah**	**100%**	**13.860.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana**	**100%**	**13.860.000**	
1	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang terlaksana	**100%**	**13.860.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan**	**100%**	**13.860.000**	
1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dok	13.860.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6 dok	13.860.000	
E	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa yang tertib administrasi desa**	**100%**	**41.700.000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana**	**100%**	**34.425.000**	
1	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana**	**100%**	**41.700.000**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana**	**100%**	**34.425.000**	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	34 dokumen	5.200.000	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	34 dok	5.000.000	
2	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	17 dokumen	5.000.000	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	17 dok	5.000.000	
3	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		0	
4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	34 dokumen	5.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	34 dokumen	2.400.000	
5	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	7.300.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 dok	6.000.000	
6	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	6 dokumen	6.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	6 dokumen	4.400.000	
7	Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	17 dok	6.000.000					
8	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 laporan	7.000.000	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 laporan	12.625.000	

Berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2026, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan yaitu : Kecamatan Banjarmangu memberi prioritas terhadap pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui Program baru yang diampu yang masuk dalam Renstra Kecamatan tahun 2025 – 2029.

2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan musrenbang kecamatan dan forum konsultasi publik telah disampaikan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui aplikasi SIPD. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.....
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan / sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan

2.4. Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan hasil reses anggota DPRD, melalui aplikasi SIPD telah disampaikan usulan program dan kegiatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.....
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan / sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Validasi

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Kabupaten Banjarnegara dalam melaksanakan program pembangunan daerah mempunyai Visi "Mewujudkan Banjarnegara Maju dan Sejahtera" dengan 4 Sasaran daerah yang akan diwujudkan yaitu :

1. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat;
2. Meningkatnya perekonomian daerah yang berdaya saing dan berbasis potensi local secara berkelanjutan;
3. Meningkatnya infrastruktur yang mendukung perekonomian dan kesejahteraan masyarakat;
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif.

Dari 4 Sasaran tersebut, Kecamatan Banjarmangu mendukung Sasaran keempat yaitu **Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif.**

Untuk mendukung Sasaran tersebut, Kecamatan Banjarmangu didukung 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran yaitu :

TUJUAN :

"Meningkatnya aksesibilitas layanan pemerintah dalam urusan kewilayahan di Kecamatan Banjarmangu".

SASARAN :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah urusan kewilayahan.
2. Terwujudnya koordinasi dan Fasilitasi pemberdayaan Desa/Kelurahan.

Kecamatan Banjarmangu menetapkan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Banjarmangu dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2025 – 2029.

Reformasi pada sektor aparatur daerah pada hakekatnya merupakan tindakan atau kegiatan pembaharuan secara konsepsional, sistematis, dan berkelanjutan. Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi **visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program** yang ingin diwujudkan

3.2 Program dan Kegiatan

Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahun 2026 dijabarkan ke dalam semua urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten Banjarnegara, untuk kecamatan adalah :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 6 Kegiatan dan 14 sub kegiatan.
b. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terdiri dari 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan.
c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdiri dari 2 kegiatan dengan 2 sub kegiatan.
d. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum terdiri dari 1 kegiatan dengan 1 sub kegiatan.
e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terdiri dari 1 kegiatan, dengan 6 sub kegiatan.

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN BANJARMANGU KAB. BANJARNEGARA
Tahun 2026

NO.	KODE	URAIAN / Sasaran / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KAPASITAS PENDUDUK (JIWA)	KEBUTUHAN TARGET KAPASITAS RUANG (M2)	PRIORITAS DAERAH (TARGET RUANG YANG DIBUTUHKAN)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN BELUM RENCANA (Tahun 2027)		PENANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN (Unit)
							TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	KINERJA	DATA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN BANJARMANGU						2.435.000.000,00							0,00	
	1	[illegible]						2.435.000.000,00							0,00	
	1.01	[illegible]						2.435.000.000,00							0,00	
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur				100 %	2.435.000.000,00							0,00	
	1.01.01.01	Penyediaan Perlengkapan Pengelolaan Tata Usaha Dinas Pendidikan Daerah	Persentase Perlengkapan Pengelolaan tata Kantor Dinas Pendidikan daerah yang tersedia				100 %	0.000.000,00				Pengelolaan Kantor, Tata Usaha Perkantoran, Kearsipan, Data Base, Dokumen, Monografi, Barang Milik Negara yang dipergunakan untuk Kantor yang Dikelola oleh Dinas Pendidikan			0,00	[illegible]
	1.01.01.01.0001	Penyediaan Kebutuhan Perlengkapan Pengelola Operasi														
			[illegible] Kebutuhan Perlengkapan Pengelola Operasi				12 Bulanan	0.000.000,00	Kec. Banjarmangu, Banjarmangu, Banjarmangu	Dana Kelurahan dan Lain-lain (DAK)		Pengelolaan Kantor, Tata Usaha Perkantoran, Kearsipan, Data Base, Dokumen, Monografi, Barang Milik Negara yang dipergunakan untuk Kantor yang Dikelola oleh Dinas Pendidikan			0,00	[illegible]
	1.01.01.01.0002	Penyediaan Alat Pendukung Operasi Lapangan Kecamatan (Kantor Camat)														

No	Kode	Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Awal Periode Renstra OPD	Target Akhir Periode Renstra OPD	Kondisi Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Hasil dan Target Program					Kelompok Sasaran	Prakiraan Beli Sebelum Tahun Ini		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target Tahun	Target Setelah Thn. Ini	Lokasi	Waktu Kinerja	Indikator		Target	Biaya (Rp.)	
											Kuantitas	Deskripsi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]													
		[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]			[illegible]			[illegible]
[illegible]														

No.	Kode	Uraian Sasaran, Indikator Kinerja, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target akhir periode renstra OPD	Kondisi akhir periode renstra OPD	Program OPD yang mendukung capaian target Sasaran OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Perkiraan Biaya Kegiatan Tahun 2025		Penanggung Jawab Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
							Target Akhir	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Koordinator	Uraian				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program dan Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Output Program dan Kegiatan Sub Kegiatan	Kelompok Sasaran Program dan Kegiatan	Perkiraan Biaya Program dan Kegiatan Tahun 2027	Capaian Kinerja dan Anggaran (Komulatif)						Kelompok Sasaran	Perkiraan Biaya Program dan Kegiatan Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Ya/Tidak	Alasan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

NO	KODE	URAIAN KEGIATAN, OUTPUT, HASIL KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN / SUB KEGIATAN	REALISASI KINERJA KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA KEGIATAN / SUB KEGIATAN (%)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET RP	PAGU ANGGARAN (Rp)	LOKASI	KELOMPOK SASARAN	PENDANAAN			TARGET	PAGU ANGGARAN (Rp)	
											KEMANDIRI	HIBAH/DAK				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

NO	KODE	URUSAN, BIDANG URUSAN / PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKUN PENDUDUK MENETAPKAN	Kinerja sebelum Perubahan	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET SEBELUM PERUBAHAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	Perubahan Kinerja Setelah Perubahan		KETERANGAN (PENANGGUNG JAWAB)
							TARGET	Kinerja sebelumnya (Rp)	Lokasi	SUMBER DANA	PRAKIRAAN				
											PERUBAHAN	SEBELUM			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]				[illegible]			[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]														
			[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]				[illegible]			[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]														

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

NO	KODE	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN PERUBAHAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAHUN AWAL PERUBAHAN	TAHUN AKHIR PERUBAHAN	PENCAPAIAN SEBELUM TAHUN PERUBAHAN	CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PERUBAHAN						KELOMPOK SASARAN	PROGRAM BLUD BERSIFAT Tahun 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	RASIO SETIAP TW (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRAKIRAAN			TARGET	RASIO SETIAP TW (Rp)	
											RASIONAL	HARIAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program pada perangkat daerah merupakan program prioritas dalam Renstra 2025 – 2029. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPD selanjutnya dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Pemilihan untuk masing – masing program / kegiatan dijabarkan sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dengan dengan 6 Kegiatan, antara lain :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan dua sub kegiatan yaitu :
   - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Koordinasi dan
   - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan tiga sub Kegiatan antara lain :
   - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD
   - Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran;
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan 2 Sub Kegiatan antara lain :
   - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   - Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan 2 sub kegiatan antara lain :

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

5. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 2 Sub Kegiatan antara lain :
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik
   - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 3 Sub Kegiatan antara lain
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   - Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
   - Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan dua Kegiatan yaitu :
   1. Koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum dengan satu sub kegiatan antara lain :
      - Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
   2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dengan 3 Sub Kegiatan antara lain :
      - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
      - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Non Perizinan

- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan yang lain yang di Limpahkan.

III. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan satu Kegiatan yaitu :

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan satu Sub Kegiatan antara lain :
   - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

IV. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dengan 2 kegiatan yaitu :

1. Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa
   - Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
2. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan
   - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

V. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan satu kegiatan yaitu :

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan 8 sub kegitan yaitu antara lain :
   - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa Dan Peraturan Kepala Desa
   - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
   - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
   - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

- Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa
- Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum
- Koordinasi Pendampingan Desa Di Wilayahnya

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Banjarmangu Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Banjarmangu Tahun 2025 – 2029. Renja Perangkat Daerah selanjutnya menjadi platform operasional bagi Perangkat Daerah dalam menjalankan programnya dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah tahun 2025 – 2029. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, perlu ditetapkan kaiduh – kaiduh pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026 dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disepakati.
2. Kerangka pendanaan dalam Renja Perangkat Daerah masih bersifat sementara, sehingga masih dimungkinkan terjadi perubahan pagu yang disebabkan oleh pengurangan, penambahan, dan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan maupun antar sub kegiatan dalam kerangka penyusunan anggaran secara terpadu dan berbasis kinerja.
3. Renja Perangkat Daerah menjadi acuan bagi Kepala Perangkat Daerah dan segenap jajarannya serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, serta menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Banjarmangu, 6 Agustus 2025

CAMAT BANJARMANGU

[illegible]

NIP. [illegible] 200604 1 010

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan yang diatur melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan pembentukan tim penyusun, penelaahan rancangan awal RKPD, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, hingga pada penyempurnaan berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang RKPD. Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, penyusunan Renja Perangkat Daerah juga mengacu pada Renja Kementerian/Lembaga terkait, serta Renja Perangkat Daerah Provinsi terkait. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2. Landasan Hukum

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten

Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
26. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 14);
27. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 15);
28. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor Tahun 2025 Tanggal tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Kecamatan Banjarnegara Tahun 2026 disusun dengan maksud untuk:

a. Menjabarkan Renstra Kecamatan Banjarnegara Tahun 2025-2029 ke dalam rencana program kegiatan prioritas Tahun 2026 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Renja K/L Tahun 2026 dan Renja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;
b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerapan anggaran berbasis kinerja.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Banjarnegara Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

a. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA-DPA dalam Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2026, yang dalam penyusunannya didahului dengan menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026;
b. Sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Tahun 2026;
c. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun berdasarkan sistematika yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah.

BAB 2 : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja

pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dan atau pokok-pokok DPRD.

BAB 3 : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan tahun 2025.

BAB 4 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran RKPD.

BAB 5 : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN BANJARNEGARA TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Banjarnegara Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kecamatan Banjarnegara

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah meliputi urusan pemerintahan unsur Kewilayahan Bidang Urusan Kecamatan.

Renja Kecamatan Banjarnegara Tahun 2024 yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 terdiri dari 5 program, 11 kegiatan, dan 29 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 17.656.981.150,- dengan fokus utama pada mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good government) dalam kehidupan berpolitik yang demokratis dan bertanggung jawab. Program/kegiatan/sub kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung tujuan daerah (Berdasarkan Berita Acara reviu penyelarasan perencanaan tanggal 2 Januari 2024) yang meliputi:

1. **Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah**
2. **Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik.**

Dari 5 program, 11 kegiatan, dan 29 sub kegiatan yang dalam Renja Perangkat Daerah tersebut, program/kegiatan/sub kegiatan yang disetujui untuk dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024 terdiri dari 4 program, 10 kegiatan, dan 18 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 14.306.714.609,-

Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024, terjadi beberapa perubahan yang meliputi penambahan atau pengurangan pagu, penghapusan, penambahan atau pengurangan program/kegiatan/sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Perubahan tersebut mengubah rincian dalam Renja Perangkat Daerah menjadi 5 program, 11 kegiatan, dan 18 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 13.559.901.360,-.

Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2024, dari 5 Program semua anggarannya berkurang. Pada Renja Kecamatan tahun 2024, Program/Kegiatan/Subkegaitan yang berkurang, meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
    a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
        1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
        2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
    b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
        1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
        2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
        3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
    c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
        1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
        2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
        1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
    e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
        1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
        2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
    f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
        1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
        2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
        3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
    a. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
        1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
    b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
        1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
        2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
        3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
    a. Pemberdayaan Kelurahan
        1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
        2. Pemberdayaan Masyarakat
        3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat (Musrenbang)
        4. Evaluasi kelurahan
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
    a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
        1. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
    a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
        1. Fasilitasi Penyusunan Program dan pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
        2. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
        3. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
        4. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

5. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
6 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

Dinamika yang terjadi selama tahun 2024 turut mempengaruhi keberhasilan pencapaian Renja Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2024, tercatat adanya hasil yang baik karena semua target tercapai. Indikator Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja 71,00 terealisasi 72,40 dengan tingkat capaian kinerja 101,97%. Indikator Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan dengan target kinerja 83,4 terealisasi sebesar 84,5 dengan tingkat capaian kinerja 101,31%. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya komitmen dan integritas yang tinggi dari para aparatur pemerintah kecamatan.

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada, semua program/kegiatan/sub kegiatan sesuai target.

b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik. Berdasarkan hasil evaluasi, Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian kinerja antara lain adalah:

1. Adanya perencanaan, pelaksanaan, monitoring yang baik.
2. Menyelaraskan hal-hal yang akan dikerjakan dengan target kinerja
3. Menyelaraskan apa yang dianggarkan dengan apa yang akan dikerjakan

4. Mengerjakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja
5. Melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, pada tahun 2024 keseluruhan pencapaian kinerja telah tercapai sesuai target. Pada tahun perencanaan selanjutnya, perlu diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk pencapaian target kinerja ,diantaranya:

1. Koordinasi antar Kasi dan Sub Bagian
2. Prioritas Perencanaan yang tepat sasaran, agar kegiatan bisa berjalan sesuai perencanaan

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah

s.d. Tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

Indikator Kinerja	Kinerja		Program	Indikator Program	Kinerja		Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja		Anggaran		
	Target	Realisasi %			Target	Realisasi %			Target	Realisasi %			Target	Realisasi %	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	*2*	3	*4*	*5*	6	7	*8*	*9*	10	11	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	17	18
Nilai SAKIP Kecamatan	71,00	72,40	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana	100 %	100 %	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana	100 %	100 %	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4 Dok	4 Dok	0	0	0
											Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dok	1 Dok	29.955.300	25.479.250	85,06%

Indikator Kinerja	Kinerja		Program	Indikator Program	Kinerja		Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja		Anggaran		
	Target	Realisasi %			Target	Realisasi %			Target	Realisasi %			Target	Realisasi %	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
											Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 dok	4 dok	0	0	0
											Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang di falsilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4 dok	4 dok	0	0	0
											Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen yang diFasilitasi dalam rangka Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4 dok	4 dok	0	0	0

Indikator Kinerja	Kinerja		Program	Indikator Program	Kinerja		Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja		Anggaran		
	Target	Realisasi %			Target	Realisasi %			Target	Realisasi %			Target	Realisasi %	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
											Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 dok	4 dok	0	0	0
											Fasilitasi Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah dokumen Fasilitasi Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	4 dok	4 dok	0	0	0

Indikator Kinerja	Kinerja		Program	Indikator Program	Kinerja		Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja		Anggaran		
	Target	Realisasi %			Target	Realisasi %			Target	Realisasi %			Target	Realisasi %	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang terlaksana	100%	100%	Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan kelurahan yang terlaksana	100%	100%	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang berpartisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	10 Pokmas	10 Pokmas	0	0	0
											Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun	5 unit	5 unit	1.826.514.976	1.610.332.696	88,16%
											Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat	10 Pokmas	10 Pokmas	1.449.808.400	1.285.376.100	88,66%
											Evaluasi Kelurahan	Jumlah laporan Evaluasi Kelurahan yang dilaksanakan	9 Laporan	9 Laporan	0	0	0

Indikator Kinerja	Kinerja		Program	Indikator Program	Kinerja		Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja		Anggaran		
	Target	Realisasi %			Target	Realisasi %			Target	Realisasi %			Target	Realisasi %	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana	100%	100%	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah	Prosentase Penyelenggaraan Pemerintah sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah yang terlaksana	100 %	100%	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dok	12 Dok	10.800.000	10.800.000	100%
Nilai SKM	83,4	84,5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/ Kota	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana	100%	100%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Persngkat Daerah yang terlaksana	100%	100%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang mnerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang	75 Orang	8.259.673.514	8.041.254.790	97,36
											Pelaksanaan Penataan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	115.845.000	115.215.000	99,46

Indikator Kinerja	Kinerja		Program	Indikator Program	Kinerja		Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja		Anggaran		
	Target	Realisasi %			Target	Realisasi %			Target	Realisasi %			Target	Realisasi %	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
											Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 laporan	14 Laporan	9.000.000	7.680.000	85,33
							Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100 %	100%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dok	8 dok	2.420.000	2.420.000	100%
											Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kineja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	5 Laporan	0	0	0

Indikator Kinerja	Kinerja		Program	Indikator Program	Kinerja		Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja		Anggaran		
	Target	Realisasi %			Target	Realisasi %			Target	Realisasi %			Target	Realisasi %	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	100%	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	2 paket	70.269.200	70.231.500	99,95%
											Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 paket	15 paket	442.718.300	442.361.915	99,92
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksna	100%	100%	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	19 laporan	19 Laporan	698.442.000	533.924.587	76,45%
											Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	3 laporan	76.600.000	52.449.590	68,47

Indikator Kinerja	Kinerja		Program	Indikator Program	Kinerja		Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja		Anggaran		
	Target	Realisasi %			Target	Realisasi %			Target	Realisasi %			Target	Realisasi %	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daaerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daaerah yang terlaksana	100 %	100%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 unit	9 unit	49.489.900	45.904.000	92,75%
											Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	2 unit	74.268.970	60.855.270	81,94%
											Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	2 unit	38.951.900	38.632.200	99,18%

Indikator Kinerja		Kinerja		Program	Indikator Program	Kinerja		Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja		Anggaran		
		Target	Realisasi %			Target	Realisasi %			Target	Realisasi %			Target	Realisasi %	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
												Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	2 unit	2 unit	118.227.200	93.960.800	79,49
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana	100%	100%	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Non Perijinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Terkait dengan Non Perijinan	3.930 Laporan	3.580 Laporan	3.600.000	3.600.000	100%
												Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perijinan Non Usaha	Jumlah dokumen Pelayanan Non Perijinan Usaha yang di Laksanakan.	1.875 dokumentasi	1.894 dokumen	0	0	0
												Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan	1 laporan	1 Laporan	283.316.700	283.245.150	99,97%

Indikator Kinerja		Kinerja		Program	Indikator Program	Kinerja		Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja		Anggaran		
		Target	Realisasi %			Target	Realisasi %			Target	Realisasi %			Target	Realisasi %	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
								Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum	Persentase Terselenggaranya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum yang terlaksana	100%	100%	Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemelihahaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Banjarnegara

Dalam pelaksanaan pelayanannya, Kecamatan Banjarnegara mengampu 2 Indikator Kinerja Utama. Dari 2 indikator Kinerja Utama tersebut berstatus tercapai dan melebihi target yaitu Indikator Nilai SAKIP Kecamatan target pada tahun 2024 71,00 tercapai 72,40 tingkat capaian kinerja atau 101,97% dan Indikator Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan dari target 83,4 tercapai 84,5 atau 101,31%. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Konsistensi kebijakan Pemerintah Daerah dalam peningkatan pelayanan publik.
2. Penerapan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang mulai berkembang.
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan layanan administrasi sesuai prosedur.
4. Adanya komitmen aparatur kecamatan dalam menjaga kualitas pelayanan publik.
5. Koordinasi Pemerintah Kecamatan dan Desa yang telah berjalan dengan baik;
6. Komitmen dari para aparatur kecamatan untuk memberikan pelayanan yang prima sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

Dalam rangka pencapaian target kinerja tahun berikutnya, beberapa hal yang harus diupayakan meliputi:

1. Memperkuat efektivitas koordinasi antar perangkat daerah untuk mendukung kelancaran pelayanan.
2. Melakukan penyederhanaan prosedur pelayanan agar lebih cepat, mudah, dan transparan.
3. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai tata cara pelayanan administrasi.
4. Mengembangkan inovasi layanan berbasis digital untuk menjawab dinamika kebutuhan masyarakat.
5. Menyusun standar pelayanan yang lebih adaptif terhadap perubahan kebutuhan dan tuntutan masyarakat.

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara (Setelah penyelarasan)

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK LPPD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Nilai SAKIP Kecamatan			71,00	71,25	73,50	73,60	72,40	73,05	73,50	73,60	
2.	Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan		-	83,4	83,5	-	-	86,13	84,5	86,66	-	
3.	Indeks Desa di Wilayah Kecamatan			-	-	68,15	68.22			68,20	68,30	

*) Kolom 3 diisi berdasarkan IKK outcome dalam lampiran Permendagri 18/2021

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Banjarnegara.

Kecamatan Banjarnegara dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan urusan pemerintahan dalam 1 urusan, yaitu Urusan Kewilayahan. Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Banjarnegara 2025-2029, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk tahun 2026 mencakup 1 urusan tersebut. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Banjarnegara diantaranya adalah:

1. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik belum merata di semua jenis layanan.
2. Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pelayanan masih beragam, menimbulkan persepsi layanan lambat/rumit.
3. Dinamika kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks belum sepenuhnya diimbangi kapasitas kecamatan.
4. Pembinaan dan pengawasan terhadap desa belum sepenuhnya konsisten dan berkesinambungan.
5. Sarana dan prasarana pelayanan di kantor kecamatan masih terbatas.

Permasalahan tersebut, jika tidak diselesaikan dapat menjadi *constraint* dalam pencapaian visi dan misi Bupati maupun capaian indikator lainnya. Beberapa dampak dari adanya permasalahan dan hambatan tersebut meliputi:

1. Sebagian masyarakat belum menikmati layanan digital secara maksimal..
2. Terjadi miskomunikasi dan persepsi negatif terhadap pelayanan.
3. Kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dengan kapasitas kecamatan.
4. Tata kelola pemerintahan desa tidak seragam dan kurang optimal.
5. Layanan dirasakan kurang nyaman dan cepat.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi, peningkatan kualitas birokrasi, dan meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan pengguna layanan akan meningkatkan kebutuhan akan adanya penyediaan produk layanan yang semakin baik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi-inovasi dalam menunjang peningkatan pelayanan publik secara berkelanjutan.

Beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Banjarnegara, yaitu:

1. Pemerataan akses TI sejalan dengan digitalisasi pelayanan publik..
2. Edukasi layanan yang lebih intensif sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat.
3. Adaptasi pelayanan melalui inovasi berbasis teknologi informasi.
4. Penguatan fungsi pembinaan didukung dengan perhatian Pemkab pada akuntabilitas desa.
5. Peningkatan sarpras menjadi prioritas pembangunan pelayanan publik.
6. Adanya dukungan koordinasi lintas sektor di wilayah kecamatan yang mendukung tercapainya sinkronisasi dan integrasi kegiatan lingkup kecamatan antara lain kegiatan Konferensi dinas/rapat koordinasi Forkompinca, UPT/Instansi dan Kepala Desa secara rutin di tingkat Kecamatan.

Berdasarkan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan tersebut, dapat diinventarisasi beberapa isu strategis. Inventarisasi isu-isu strategis tahun 2026 didapatkan dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal Kabupaten Banjarnegara sampai dengan tahun 2024. Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan pembangunan. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Banjarnegara pada tahun 2024, sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Non Usaha , Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Belum Optimalnya pemahaman dan kesadaran dalam meningkatkan Kualitan Pelayanan Publik (baru sesuai cascading)
3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam rangka menunjang Tugas dan fungsi kecamatan sebagai unit kerja perekam data administrasi kependudukan yang secara langsung melayani masyarakat, dan tugas – tugas lain yang terkait Tugas dan Fungsi Kecamatan.
4. Keterbatasan Kemampuan aparatur kelurahan dan perangkat desa dalam penatausahaan keuangan terkait dengan implementasi DAU Tambahan Kelurahan, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;

5. Belum Optimalnya kesadaran aparatur pemerintah Desa dalam mengerjakan buku-buku Administrasi Desa (tidak sesuai Juknis).
6. Belum Optimalnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam merencanakan pembangunan di kelurahan dan desa masing-masing.
7. Belum Optimalnya kesadaran aparatur pemerintahan desa dalam melakukan implementasi (tidak sesuai dengan juknis) program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat (penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, dan keagamaan)

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Tahun 2026 merupakan pelaksanaan tahun pertama dalam Renstra Tahun 2025-2029. Dalam Renstra Tahun 2025-2029, prioritas arah kebijakan sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Banjarnegara pada tahun 2026 meliputi:

1. Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP.
2. Optimalisasi pelaksanaan pelayanan publik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Optimalisasi fungsi koordinasi kecamatan dengan perangkat desa, OPD, dan stakeholder lain.
4. Optimalisasi Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan secara berkelanjutan, melalui fasilitasi partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat, serta penguatan ekonomi lokal.

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 Kabupaten Banjarnegara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	**Tujuan : Meningkatnya aksesibilitas layanan pemerintah dalam urusan kewilayahan di Kecamatan Banjarnegara**	**Kab. Banjarnegara**	**Indeks Pelayanan Publik**	**50,50**	**14.944.489.546**	**Tujuan : Meningkatnya aksesibilitas layanan pemerintah dalam urusan kewilayahan di Kecamatan Banjarnegara**	**Kab. Banjarnegara**	**Indeks Pelayanan Publik**	**50,50**	**14.656.214.146**	
I	**Sasaran Strategis : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah urusan kewilayahan**	**Kec. Banjarnegara**	**Nilai SAKIP Kecamatan**	**BB (73,50)**	**11.139.691.740**	**Sasaran Strategis : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah urusan kewilayahan**	**Kec. Banjarnegara**	**Nilai SAKIP Kecamatan**	**BB (73,50)**	**10.841.558.942**	
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kec. Banjarnegara**	**Persentase tingkat ketercapaian kinerja**	**100%**	**10.884.212.140**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Kec. Banjarnegara**	**Persentase tingkat ketercapaian kinerja**	**100%**	**10.586.127.589**	

			perangkat daerah **Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah**	**100%**		**KABUPATEN/ KOTA**		**perangkat daerah** **Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah**	**100%**		
1.	**Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat daerah**	**Kec. Banjarnegara**	**Persentase Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun**	**100%**	**2.420.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat daerah**	**Kec. Banjarnegara**	**Persentase Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun**	**100%**	**2.420.000**	
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Banjarnegara	Jumlah Dokumen perencan	14 dokumen	2.420.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Kec. Banjarnegara	Jumlah Dokumen perencan	14 dokumen	2.420.000	

			aan perangkat daerah			Perangkat Daerah		aan perangkat daerah			
b.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kineja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Banjarnegara	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 laporan	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kineja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Banjarnegara	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 laporan	0	
2.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**kec banjarnegara**	**Persentase Administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana**	**100%**	**9.289.710.370**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**kec banjarnegara**	**Persentase Administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana**	**100%**	**9.291.582.302**	
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	kec banjarnegara	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	67 orang/bulan	9.165.612.190	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	kec banjarnegara	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	67 orang/bulan	9.167.475.302	

b	Pelaksanaan Penataan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	kec banjarnegara	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 dokumen	115.107.000	Pelaksanaan Penataan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	kec banjarnegara	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 dokumen	115.107.000	
c.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	kec banjarnegara	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	9.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	kec banjarnegara	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	9.000.000	

3.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**kec banjarnegara**	**Persentase Administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana**	**100%**	**346.083.180**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kec banjarnegara**	**Persentase Administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana**	**100%**	**344.468.153**	
a.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec banjarnegara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 paket	51.498.480	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec banjarnegara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 paket	51.765.463	
b.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec banjarnegara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	87 paket	294.584.700	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec banjarnegara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	87 paket	292.702.690	
4.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**kec banjarnegara**	**Persentase Pengadaan barang milik daerah**	**100%**	**290.275.400**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**kec banjarnegara**	**Persentase Pengadaan barang milik daerah**	**100%**	**0**	

			penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia					**penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia**			
a.	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	kec banjarnegara	Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	30 unit	290.275.400	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	kec banjarnegara	Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	30 unit	0	
5.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**kec banjarnegara**	**Persentase Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang**	**100%**	**628.745.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**kec banjarnegara**	**Persentase Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang**	**100%**	**628.744.024**	

			terlaksana					**terlaksana**			
a.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	kec banjarnegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	78.200.000	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	kec banjarnegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	78.200.000	
b.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	kec banjarnegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	550.545.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	kec banjarnegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	550.544.024	
6.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daaerah**	**Kec banjarnegara**	**Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan**	**100%**	**326.969.370**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daaerah**	**Kec banjarnegara**	**Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan**	**100%**	**318.913.110**	

			pemerintah daerah					**pemerintah daerah**			
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec banjarnegara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	39 Unit	93.150.600	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec banjarnegara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	39 Unit	85.338.100	
b.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	kec banjarnegara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	21 Unit	178.973.070	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	kec banjarnegara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	21 Unit	178.925.560	
c.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec banjarnegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	135 unit	54.845.700	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	kec banjarnegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	135 unit	54.649.450	

			atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			Bangunan Lainnya		atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
II	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kec banjarnegara**	**Persentase layanan yang sesuai dengan standar pelayanan**	**100%**	**255.479.600**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kec banjarnegara**	**Persentase layanan yang sesuai dengan standar pelayanan**	**100%**	**255.431.353**	
1.	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**kec banjarnegara**	**Persentase terselenggaraanya pemeliharaan sarana dan prasaran pelayanan umum**	**100%**	**0**	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**kec banjarnegara**	**Persentase terselenggaraanya pemeliharaan sarana dan prasaran pelayanan umum**	**100%**	**0**	
a.	Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana	Kec banjarnegara	Jumlah Dokumen Koordinasi sinergitas dengan	1 dokumen	0	Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang	Kec banjarnegara	Jumlah Dokumen Koordinasi sinergitas dengan	1 dokumen	0	

	dan Prasarana Pelayanan Umum		Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			
2.	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**kec banjarnegara**	**Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**100%**	**255.479.600**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**kec banjarnegara**	**Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**100%**	**255.431.353**	
a.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Non Perizinan	kec banjarnegara	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada	12 laporan	3.600.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan	kec banjarnegara	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada	12 laporan	3.600.000	

			Urusan Pemerintahan			Pelayanan Non Perizinan		Urusan Pemerintahan			
b.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perijinan Non Usaha	kec banjarengara	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 dokumen	0	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perijinan Non Usaha	kec banjarnegara	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 dokumen	0	
c.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	kec banjarnegara	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 laporan	251.879.600	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	kec banjarnegara	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 laporan	251.831.353	
2.	**Sasaran Strategis : Meningkatnya Efektivitas koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan desa/kelurahan**	**Kec Banjarnegara**	**Indeks Desa di Wilayah Kecamatan**		**3.804.797.806**	**Sasaran Strategis : Meningkatnya Efektivitas koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan desa/kelurahan**	**Kec banjarnegara**	**Indeks Desa di Wilayah Kecamatan**		**3.814.655.204**	

I	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kec banjarnegara**	**Persentase lembaga desa/kelurahan di kecamatan yang terfasilitasi**	**100%**	**3.687.372.806**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kec banjarnegara**	**Persentase lembaga desa/kelurahan di kecamatan yang terfasilitasi**	**100%**	**3.689.507.704**	
1.	**Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa**	**Kec banjarnegara**	**Persentase Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang terlaksana**	**100%**	**0**	**Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa**	**Kec Banjarnegara**	**Persentase Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang terlaksana**	**100%**	**0**	
a.	Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan	Kec banjarnegara	Jumlah laporan Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	1 laporan	0	Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan	Kec banjarenegara	Jumlah laporan Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	1 laporan	0	

2.	**Pemberdayaan Lembaga KemasyarakatanTingkat Kecamatan**	**Kec banjarnegara**	**Persentase Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan**	**100%**	**0**	**Pemberdayaan Lembaga KemasyarakatanTingkat Kecamatan**	**Kec banjarnegara**	**Persentase Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan**	**100%**	**0**	
a.	Peningkatan Kapasitas lembaga kemasyarakatan	Kec banjarnegara	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	2 lembaga kemasyarakatan	0	Peningkatan Kapasitas lembaga kemasyarakatan	Kec banjarnegara	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	2 lembaga kemasyarakatan	0	
3.	**Pemberdayaan Kelurahan**	**Kec banjarnegara**	**Persentase pemberdayaan keluraha n**	**100%**	**3.687.372.806**	**Pemberdayaan Kelurahan**	**Kec banjarnegara**	**Persentase pemberdayaan keluraha n**	**100%**	**3.689.507.704**	
a.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec banjarnegara	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawa	81 Lembaga Kemasyarakatan	3.080.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec banjarnegara	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawa	81 Lembaga Kemasyarakatan	4.997.500	

			rah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					rah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
b.	Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan	Kec banjarnegara	Jumlah Sarana dan Prasarana kelurahan yang terbangun	45 unit	2.334.484.106	Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan	Kec banjarnegara	Jumlah Sarana dan Prasarana kelurahan yang terbangun	45 unit	2.334.843.800	
c.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec banjarnegara	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	81 pokmas	1.349.808.700	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec banjarnegara	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	81 pokmas	1.349.666.404	
d.	Evaluasi Kelurahan	Kec banjarnegara	Jumlah laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	9 laporan	0	Evaluasi Kelurahan	Kec banjarnegara	Jumlah laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	9 laporan	0	

II	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**kec banjarnegara**	**Persentase penanganan konflik di wilayah**	**100%**	**10.800.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kec banjarnegara**	**Persentase penanganan konflik di wilayah**	**100%**	**10.800.000**	
1.	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah**	**kec banjarnegara**	**Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang terlaksana**	**100%**	**10.800.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah**	**Kec banjarnegara**	**Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang terlaksana**	**100%**	**10.800.000**	
a.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	kec banjarnegara	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6 Dokumen	10.800.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	kec banjarengara	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6 Dokumen	10.800.000	

III	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**kec banjarnegara**	**Persentase desa yang tertib administrasi desa**	**100%**	**106.625.000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**kec banjarengara**	**Persentase desa yang tertib administrasi desa**	**100%**	**114.347.500**	
1.	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**kec banjarnegara**	**Persentase Fasilitasi,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana**	**100%**	**106.625.000**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kec banjarnegara**	**Persentase Fasilitasi,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana**	**100%**	**114.347.500**	
a.	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan kepala desa	kec banjarengara	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan	8 dokmen	0	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan kepala desa	kec banjarengara	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan	8 dokmen	0	

			Peraturan Kepala Desa					Peraturan Kepala Desa			
b.	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	kec banjarenegara	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen	20.000.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	kec banjarengara	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen	20.000.000	
c.	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	kec banjarenegara	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-	-	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	kec banjarengara	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-	-	
d.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	kec banjarnegara	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan	8 dokumen	0	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	kec banjarnegara	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan	8 dokumen	20.100.000	

			Pendayagunaan Aset Desa					Pendayagunaan Aset Desa			
e.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	kec banjarnegara	Jumlah dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 dokumen	15.000.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	kec banjarnegara	Jumlah dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 dokumen	25.997.500	
f.	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	kec banjarnegara	Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6 dokumen	15.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	kec banjarnegara	Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6 dokumen	15.000.000	
g	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec Banjarnegara	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan	12 laporan	41.625.000	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec banjarnegara	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan	12 laporan	33.250.000	

			Desa di Wilayahnya					Desa di Wilayahnya			
h.	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec Banjarnegara	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	4 dokumen	15.000.000	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec Banjarnegara	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	4 dokumen	0	

Berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2026, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan yaitu:

1. Memprioritaskan kegiatan yang belum terlaksana di tahun 2024.
2. Memprioritaskan pelaksanaan kegiatan yang manfaatnya langsung dirasakan oleh Masyarakat.
3. Mempedomani prinsip efisiensi dengan memprioritaskan kegiatan yang menjadi kegiatan wajib dan kegiatan pokok.
4. Melanjutkan kegiatan yang sudah ada di tahun 2024

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan musrenbang kecamatan dan forum konsultasi publik telah disampaikan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui aplikasi SIPD. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.3
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	NIHIL				

2.6. Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan hasil reses anggota DPRD, melalui aplikasi SIPD telah disampaikan usulan program dan kegiatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Validasi
	NIHIL				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN BANJARNEGARA

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi, maka Kecamatan Bajarnegara melaksanakan kebijakan daerah yang sinergis dengan kebijakan Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat. Kegiatan yang akan dilakukan oleh Kecamatan Banjarnegara diharapkan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan di atasnya, mempunyai rasa keadilan, pemerataan dan diarahkan agar implementasinya akan dapat berdampak pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Banjarnegara. Renja yang disusun perangkat daerah berpedoman pada RKPD dan RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029 dengan Visi "**Banjarnegara Maju dan Sejahtera**" yang akan diwujudkan melalui 5 (lima) Misi yang merupakan turunan dari pokok-pokok visi yang telah didentifikasi sebelumnya yaitu :

1. Meningkatkan Infrastruktur dan Pelayanan Publik
2. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal
3. Meningkatkan Kualitas dan Akses Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan Sosial.
4. Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.
5. Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Transparan.

Dalam mencapai Visi Kabupaten Banjarnegara, maka Kecamatan Banjarnegara mempunyai peran dan fungsi menggerakan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah dalam menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan. Terutama dikaitkan dengan pelaksanaan pelimpahan kewenangan yang secara mutlak harus didukung oleh sumberdaya manusia aparatur yang mampu mengelola tugas-tugas pelayanan secara optimal, efektif dan efisien, serta mampu merumuskan kebijakan-kebijakan yang implementatif yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, yang pada muaranya mewujudkan Visi Kabupaten Banjarnegara.

Tujuan yang akan diwujudkan selama periode 2025-2029 adalah "Terwujudnya Banjarnegara maju dan sejahtera" yang diukur melalui indikator PDRB per kapita dan angka kemiskinan yang akan ditempuh melalui 4 sasaran strategis, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat
2. Meningkatnya perekonomian daerah yang berdaya saing dan berbasis potensi lokal secara berkelanjutan
3. Meningkatnya infrastruktur yang mendukung perekonomian dan kesejahteraan Masyarakat
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif

Adapun sasaran strategis yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam pencapaian visi misi Kepala Daerah sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Banjaregara sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara dari 4 (empat) sasaran strategis tersebut adalah Sasaran Strategis ke-4 yaitu :

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif dengan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi.

Meningkatnya profesionalisme aparatur daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, beretika, dan bertanggung jawab, serta mampu mendukung pembangunan daerah yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Banjarnegara

Tujuan Renja Kecamatan Banjarnegara merupakan arah yang hendak dicapai dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Banjarnegara sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023–2026, yaitu "Mewujudkan Banjarnegara Maju dan Sejahtera". Sejalan dengan visi tersebut, Kecamatan Banjarnegara memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta mendorong pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Berdasarkan evaluasi kinerja tahun sebelumnya serta telaahan terhadap kebijakan nasional, provinsi, dan kabupaten, maka tujuan Renja Kecamatan Banjarnegara Tahun 2025 difokuskan pada peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pemerintahan kewilayahan, peningkatan efektivitas koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, serta penguatan kapasitas kelembagaan kecamatan dalam mendukung pembangunan daerah. Dengan kata lain tujuan dan sasaran merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Rumusan tujuan yang akan dicapai oleh Kecamatan Banjarnegara dalam mendukung RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatnya aksesibilitas layanan pemerintah dalam urusan kewilayahan di Kecamatan Banjarnegara.

Sasaran dari tujuan ini adalah terwujudnya peningkatan akses dan kemudahan masyarakat dalam memperoleh layanan pemerintahan di wilayah Kecamatan Banjarnegara, yang diformulasikan secara terukur, spesifik, realistis, dan rasional sesuai dengan kebutuhan serta kondisi kewilayahan.

Sasaran Strategis yang akan dicapai oleh Kecamatan Banjarnegara yaitu:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah urusan kewilayahan
2. Meningkatnya Efektivitas koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan desa/kelurahan

Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Banjarnegara beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel sebagaimana berikut ini :

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				2026	2027	2028	2029	2030
I.	Meningkatnya aksesibilitas layanan pemerintah dalam urusan kewilayahan di Kecamatan Banjarnegara		Indeks Pelayanan Publik	50,50	51,50	52,50	53,50	54,50
1.		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah urusan kewilayahan	Nilai SAKIP Kecamatan	BB (73,50)	BB (73,60)	BB (73,70)	BB (73,80)	BB (73,90)

2		Meningkatnya Efektivitas koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan desa/kelurahan	Indeks Desa di Wilayah Kecamatan	68,05	68,22	68,23	68,24	68,25

3.3. Program dan Kegiatan

(Sajikan matriks yang berasal dari SIPD)

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN BANJARNEGARA KAB. BANJARNEGARA
TAHUN 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Kecamatan Banjarnegara			14.944.489.546					15.125.442.940	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			14.944.489.546					15.125.442.940	
	7	01				KECAMATAN			14.944.489.546					15.125.442.940	
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	-	-	10.884.212.140				-	10.960.212.140	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.420.000			Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan	-	2.420.000	

												tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif			
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Dokumen	2.420.000	Kab. Banjarnegara, banjarnegara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif		2.420.000	KECAMATAN BANJARNEGARA
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan	13 Laporan	0	Kab. Banjarnegara, Banjarnegara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan		0	KECAMATAN BANJARNEGARA

							Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif			
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	9.289.710.370			Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	-	9.365.710.370	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									

							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	67 Orang/bulan	9.165.612.190	Kab. Banjarnegara, Banjarnegara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif		9.241.603.370	KECAMATAN BANJARNEGARA
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	115.107.000	Kab. Banjarnegara, banjarnegara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif		115.107.000	KECAMATAN BANJARNEGARA
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									

							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	9.000.000	Kab. Banjarnegara, banjarnegara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif		9.000.000	KECAMATAN BANJARNEGARA
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	346.083.180			Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	-	346.083.180	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									

							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	51.498.480	Kab. Banjarnegara, banjarnegara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif		51.498.480	KECAMATAN BANJARNEGARA
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	87 Paket	294.584.700	Kab. Banjarnegara, Banjarnegara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif		294.584.700	KECAMATAN BANJARNEGARA

	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	290.275.400			Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	-	290.275.400	
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	30 Unit	290.275.400	Kab. Banjarnegara, Banjarnegara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif		290.275.400	KECAMATAN BANJARNEGARA

	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	628.745.000			Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	-	628.745.000	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	78.200.000	Kab. Banjarnegara, Banjarnegara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif		78.200.000	KECAMATAN BANJARNEGARA

	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	550.545.000	Kab. Banjarnegara, Banjarnegara Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif		550.545.000	KECAMATAN BANJARNEGARA
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	326.969.370			Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	-	326.969.370	

	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	39 Unit	93.150.600	Kab. Banjarnegara, banjarnegara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif		93.150.600	KECAMATAN BANJARNEGARA
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	21 Unit	178.973.070	Kab. Banjarnegara, banjarnegara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif		178.973.070	KECAMATAN BANJARNEGARA

	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	135 Unit	54.845.700	Kab. Banjarnegara, Pagentan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif		54.845.700	KECAMATAN BANJARNEGARA
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	255.479.600				-	288.703.600	
	7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-	0			Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang	-	0	

												transparan, akuntabel, dan partisipatif			
	7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum									
							Jumlah Dokumen Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	0	Kab. Banjarnegara, banjarnegara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif		0	KECAMATAN BANJARNEGARA

	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	255.479.600			Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	-	288.703.600	
	7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha									
							Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	0	Kab. Banjarnegara, banjarnegara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif		0	KECAMATAN BANJARNEGARA

	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan									
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	3.600.000	Kab. Banjarnegara, Banjarnegara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif		3.600.000	KECAMATAN BANJARNEGARA
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan									
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	251.879.600	Kab. Banjarnegara, Banjarnegara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif		285.103.600	KECAMATAN BANJARNEGARA

3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.687.372.806				-	3.688.272.800	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	-			Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	-	0	
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	0	Kab. Banjarnegara, Banjarnegara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan,		0	KECAMATAN BANJARNEGARA

												akuntabel, dan partisipatif			
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	0			Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	-	0	
	7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan									
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lembaga Kemasyarakatan	0	Kab. Banjarnegara, Banjarnegara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan		0	KECAMATAN BANJARNEGARA

												yang transparan, akuntabel, dan partisipatif			
	7	01	03	2.02		Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.687.372.806			Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif		3.688.272.800	
	7	01	03	2.03	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana kelurahan yang terbangun	45 Unit	2.334.484.106	Kab. Banjarnegara, Banjarnegara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang		2.335.484.100	KECAMATAN BANJARNEGARA

												transparan, akuntabel, dan partisipatif			
	7	01	03	2.03	0002	Pemberdayaan masyarakat	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	81 Pokmas	1.349.808.700	Kab. Banjarnegara, Banjarnegara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif		1.349.808.700	KECAMATAN BANJARNEGARA
						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	81 Lembaga Kemasyarakatan	3.080.000	Kab. Banjarnegara, Banjarnegara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang		3.080.000	KECAMATAN BANJARNEGARA

							Pembangunan di Kelurahan					transparan, akuntabel, dan partisipatif			
						Evaluasi Kelurahan	Jumlah laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	9 laporan	0	Kab. Banjarnegara, Banjarnegara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif		0	KECAMATAN BANJARNEGARA
4	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	10.800.000				-	11.800.000	

	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	10.800.000			Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	-	11.800.000	
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6 Dokumen	10.800.000	Kab. Banjarnegara, Banjarnegara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif		11.800.000	KECAMATAN BANJARNEGARA

5	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	106.625.000				-	208.577.500	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	106.625.000			Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	-	208.577.500	
	7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa									
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan	8 Dokumen	0	Kab. Banjarnegara, Banjarnegara Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola		0	KECAMATAN BANJARNEGARA

							Peraturan Kepala Desa					pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif			
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa									
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen	20.000.000	Kab. Banjarnegara, Banjarnegara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif		20.000.000	KECAMATAN BANJARNEGARA

	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa									
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8 Dokumen	0	Kab. Banjarnegara, Banjarnegara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif		0	KECAMATAN BANJARNEGARA
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa									
							Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	15.000.000	Kab. Banjarnegara, Banjarnegara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif		15.000.000	KECAMATAN BANJARNEGARA

	7	01	06	2.01	0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum									
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6 Dokumen	15.000.000	Kab. Banjarnegara, Banjarnegara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif		15.000.000	KECAMATAN BANJARNEGARA
	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya									
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 Laporan	41.625.000	Kab. Banjarnegara, Banjarnegara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif		41.625.000	KECAMATAN BANJARNEGARA

						Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	4 dokumen	15.000.000	Kab. Banjarnegara, Banjarnegara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif		0	KECAMATAN BANJARNEGARA
						Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	O dokumen	0	Kab. Banjarnegara, Banjarnegara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif		101.952.500	KECAMATAN BANJARNEGARA
	J U M L A H								**14.944.489.546**					**15.125.442.940**	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN BANJARNEGARA

Program pada Kecamatan Banjarnegara merupakan program prioritas dalam Renstra 2025-2029. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Banjarnegara selanjutnya dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Pemilihan untuk masing-masing program/kegiatan/sub kegiatan di Kecamatan Banjarnegara sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan 6 (enam) kegiatan yakni :
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      Terdiri dari 2 (dua) sub Kegiatan :
      a.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      a.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      Terdiri dari 3 (tiga) sub Kegiatan :
      b.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      b.2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
      b.3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran
   c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
      Terdiri dari 2 (dua) sub Kegiatan :
      c.1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      c.2. Penyedia bahan logistik kantor
   d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,
      Terdiri dari 1 (satu) sub Kegiatan :
      d.1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
   e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      Terdiri dari 2 (dua) sub Kegiatan :
      e.1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
      e.2. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Terdiri dari 3 (tiga) sub Kegiatan :

f.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

f.2. Pemeliharaan/rehabilittasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya

f.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, 2 (dua) kegiatan yakni :

a. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

Terdiri dari 1 (satu) sub Kegiatan :

a.1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang di Limpahkan Kepada Camat

Terdiri dari 3 (tiga) sub Kegiatan :

b.1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan perizinan non usaha

b.2. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan

b.3. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarahan, dengan 1 (satu) kegiatan :

a. Pemberdayaan kelurahan, terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan :

a.1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

a.2. Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan

a.3. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

a.4. Evaluasi Kelurahan

4. Program Urusan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan 1 (satu) kegiatan :
   a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala DaerahTerdiri dari 1 (satu) sub Kegiatan :
      a.1. Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di wilayah kecamatan
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Desa, dengan dengan 1 (satu) kegiatan yakni :
   a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Terdiri dari 7 (tujuh) sub Kegiatan :
      a.1. Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa
      a.2. Fasilitasi administrasi pemerintahan desa
      a.3. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
      a.4. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
      a.5. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa
      a.6. Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan keteriban umum
      a.7. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Banjarnegara Tahun 2025-2029. Renja Kecamatan Banjarnegara selanjutnya menjadi platform operasional bagi Kecamatan Banjarnegara dalam menjalankan programnya dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah tahun 2025-2029. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja Kecamatan Banjarnegara digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026 dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disepakati.
2. Kerangka pendanaan dalam Renja Kecamatan Banjarnegara masih bersifat sementara, sehingga masih dimungkinkan terjadi perubahan pagu yang disebabkan oleh pengurangan, penambahan, dan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan maupun antar sub kegiatan dalam kerangka penyusunan anggaran secara terpadu dan berbasis kinerja.
3. Renja Kecamatan Banjarnegara menjadi acuan bagi Camat dan segenap jajarannya serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, serta menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Banjarnegara, 07 Agustus 2025
Plt. CAMAT BANJARNEGARA

PENI HARININGSIH, S.Kom
Pembina
NIP. 19690302 199903 2 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rakhmat dan Karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Karangkobar Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026.

Rancangan Awal Renja Kecamatan Karangkobar Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rancangan Awal Renja Kecamatan Karangkobar Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 terdiri dari pendahuluan, hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, tujuan dan sasaran Kecamatan Karangkobar Kabupaten Banjarnegara, dan rencana kerja dan pendanaan serta penutup. Penyusunan Rancangan Awal Renja tersebut berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Tahun 2005-2025 dan mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2029 dan memperhatikan RPJMN 2020-2024 dan mengacu pada Renstra Kecamatan karangkobar Tahun 2023-2026.

Kami menyadari dalam penyusunan Rancangan Renja ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan rancangan rencana kerja dimaksud.

Banjarnegara , 2025

CAMAT KARANGKOBAR
KABUPATEN BANJARNEGARA

PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KECAMATAN KARANGKOBAR

MOKHAMAD SANTIAJI, S.E
Pembina Tk. I
NIP. 19700625 199803 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 6
1.4. Sistematika Penulisan 6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Karangkobar Tahun 2026 dan Capaian Renstra Kecamatan Karangkobar Tahun 2023-2026 8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Karangkobar Kabupaten Banjarnegara 19
2.3. Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Karangkobar 21
2.4. Review Terhadap RKPD 22
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. 30
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....
3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional 31
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Karangkobar Kabupaten Banjarnegara 31
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 32
BAB V PENUTUP 34

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Karangkobar Kabupaten Banjarnegara dan Pencapaian Renstra Kecamatan Karangkobar Kabupaten Banjarnegara s/d Tahun 2023 11

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Karangkobar Kabupaten Banjarnegara.....20

Tabel 2.4 Review Terhadap RKPD Tahun 2026 23

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 30

Tabel 2.6 Usulan Program dan Kegiatan dari pokok-pokok Pikiran DPRD Kepentingan Tahun 2026.....31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan yang diatur melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan pembentukan tim penyusun, penelaahan rancangan awal RKPD, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, hingga pada penyempurnaan berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang RKPD. Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, penyusunan Renja Perangkat Daerah juga mengacu pada Renja Kementerian/Lembaga terkait, serta Renja Perangkat Daerah

Provinsi terkait. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2. Landasan Hukum

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022.
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun

2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233).
26. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 84).
27. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk :

a. Sebagai upaya kongkrit menindaklanjuti Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara 2023 – 2026, terutama dalam rangka mewujudkan Kecamatan Karangkobar agar menjadi institusi yang bermutu untuk mewujudkan kemandirian masyarakat.
b. Mengoptimalkan peran Kecamatan Karangkobar dalam melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat.
c. Meningkatkan dan mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam rangka mewujudkan good and clean governance.
d. Sebagai kerangka serta arah pembangunan untuk tahun 2025 dalam pencapaian Tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, Program serta sebagai tolak ukur pertanggungjawaban Kecamatan Karangkobar pada akhir tahun anggaran.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

a. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA-DPA dalam Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2026, yang dalam penyusunannya didahului dengan menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026;

b. Sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Tahun 2026;
c. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 disusun berdasarkan sistematika yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah.

BAB 2 : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dan atau pokok-pokok DPRD.

BAB 3 : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan tahun 2026.

BAB 4 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam

rangka pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran RKPD.

BAB 5 : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah meliputi urusan pemerintahan fungsi penunjang kewilayahan.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 terdiri dari 4 program, 10 kegiatan, dan 27 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 2.238.966.090,-, (Dua milyar dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu sembilan puluh rupiah). dengan fokus utama sesuai Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, Kecamatan memiliki tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Program/kegiatan/sub kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah yang meliputi:

1. Masih lemahnya pemahaman aparatur terhadap tupoksi dan koordinasi antar seksi dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
2. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan PATEN, dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
3. Kurang dan masih terbatasnya kemampuan SDM Perangkat Desa dalam penyelenggaraan tertib administrasi desa;

4. Masih kurangnya kesadaran aparatur pemerintah desa dalam memenuhi kewajiban terkait pelunasan PBB;
5. Adanya apatisme, rendahnya partisipasi, belum terpenuhinya keterwakilan perempuan dan terbatasnya pemahaman tentang isu sosial ekonomi dalam musrenbang;

Dari 4 program, 10 kegiatan, dan 27 sub kegiatan yang dalam Renja Perangkat Daerah tersebut, program/kegiatan/sub kegiatan yang disetujui untuk dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2025 terdiri dari 4 program, 10 kegiatan, dan 27 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 2.194.182.090,- (Dua milyar seratus sembilan puluh empat juta seratus delapan puluh dua ribu sembilan puluh rupiah)

Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023, terjadi beberapa perubahan yang meliputi penambahan atau pengurangan pagu, penghapusan, penambahan atau pengurangan program/kegiatan/sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Perubahan tersebut mengubah rincian dalam Renja Perangkat Daerah menjadi 4 program, 10 kegiatan, dan 24 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 2.268.012.980,-.

Dinamika yang terjadi selama tahun 2023 turut mempengaruhi keberhasilan pencapaian Renja Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2023, tercatat adanya hasil yang baik yang dikarenakan adanya pencapaian maupun pelampauan target. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, meliputi; Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Perencanaan dan penyelarasan target kinerja dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang baik;

2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya.
3. Koordinasi Pemerintah Kecamatan dan Desa yang telah berjalan dengan baik;
4. Kekompakan Tim Pemungut Pajak dalam pelaksanaan tugas;
5. Mengerjakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka pada dasarnya semua program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2023 sudah berjalan sesuai dengan ketentuan akan tetapi masih banyak yang harus diperhatikan dan ditingkatkan kinerjanya agar sesuai dengan indikator kinerja

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2023 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
s.d. Tahun 2023* Kabupaten Banjarnegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	UNSUR KEWILAYAHAN									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Nilai SAKIP Kecamatan**	CC	CC	CC	B		CC	CC	CC
	Perencanaan, Penganggaran daen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Prosentase ketepatan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	7 dok	7 dok	7 dok	7 dok	100%	7 dok	7 dok	100%
	Koordinasi dan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	100%	2 dok	2 dok	100%
	Administrasi Keuangan perangkat Daerah	**Prosentase Ketepatan Penyusunan Pelaporan Keuangan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan dan semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	100%	5 laporan	5 laporan	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	13 orang	13 orang	13 orang	13 orang	100%	13 orang	13 orang	100%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah dokumen	45 dok	45 dok	45 dok	45 dok	100%	45 dok	45 dok	100%

	Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	penatausahaan dan pengujian.verifikasi keuangan SKPD								
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
	Penyediaan Bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik yang disediakan	9 paket	9 paket	9 paket	9 paket	90%	9 paket	9 paket	100%
	Penyediaan komponen instalasi listrik	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainya	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana pendukung	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100 %	4 unit	2 unit	100%

		gedung kantor atau bangunan lainnya								
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase **penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya Air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 laporan	13 laporan	13 laporan	13 laporan	100%	13 laporan	13 laporan	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Prosentase Penyediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan peroranagn dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan perizinanya	7 unit	7 unit	7 unit	7 unit	100%	7 unit	7 unit	100%
	Pemeliharaan/rehab sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainya	Jumlah gedung kanto dan bangunan lainnya yang	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	-	1 unit	100%

		dipelihara/direhabilitasi								
	Pemeliharaan/rehab sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainya	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang terpelihara	14 Unit	14 Unit	14 Unit	14 Unit	100%	13 Unit	14 Unit	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Prosentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada urusan pemerintahan	1.000 laporan	1.000 laporan	1.000 laporan	909 laporan	91 %	1.000 laporan	909 laporan	91%
	Pelaksanan Urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	**Prosentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

	UMUM	**Umum**								
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepada Daerah	**Prosentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen tugas forum kordinasi pimpinan dikecamatan	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	12 dokumen	100%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase tertib administrasi Pemerintahan Desa**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	13 dokumen	13 dokumen	0	0	0%	0	0	0
	Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan	Jumlah dokumen fasilitasi dalam	13 dokumen	13 desa	2 dokumen	2 dokumen	100%	0	2 dokumen	100%

	ketertiban umum	rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum								
	fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi pemerintahan desa	13 dokumen	13 desa	13 dokumen	13 dokumen	100%	0	13 dokumen	100%
	Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	13 dokumen	13 desa	13 dokumen	13 dokumen	100%	0	13 dokumen	100%
	Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Jumlah laporan hasil koordinasi pendampingan desa diwilayahnya	13 laporan	13 desa	13 laporan	13 laporan	100%	0	13 laporan	100%
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	13 dokumen	0	0	0	-	5 dokumen	0	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan pelayanannya, Perangkat Daerah mengampu 2 Indikator. Dari 2 indikator tersebut, keduannya berstatus tercapai. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah :

1. Perencanaan dan penyelarasan target kinerja dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang baik;
2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya.
3. Koordinasi Pemerintah Kecamatan dan Desa yang telah berjalan dengan baik;
4. Kekompakan Tim Pemungut Pajak dalam pelaksanaan tugas;

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK LPPD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	-	-	82	83	84	84	82,83	-	-	83	85	
1.	Indeks Penilaian SAKIP	-	-	CC	CC	CC	CC	B	-	-	CC	CC	

*) Kolom 3 diisi berdasarkan IKK outcome dalam lampiran Permendagri 18/2020

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan urusan pemerintahan dalam urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Kewilayahan Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk tahun 2026 mencakup urusan tersebut. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah diantaranya adalah:

1. Belum optimalnya etos kerja, budaya kerja dan disiplin kerja pegawai;
2. Masih kurangnya dukungan data informasi dari masyarakat , peraturan yang valid, akurat dan terintegrasi sebagai pedoman dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat;
3. Masih rendahnya keselarasan dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang ada;
4. Apatisme masyarakat dalam mengikuti musrenbang;
5. Masih kurangnya pemahaman masyarakat maupun aparatur desa tentang hakekat pembangunan nasional;
6. Masih terbatasnya kapasitas aparatur desa dalam melaksanakan tertib administrasi pemerintahan desa;
7. Masih kurangnya keseriusan masyarakat dan petugas pemungut dalam pelunasan PBB lebih awal;
8. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan siskamling dan rendahnya kesadaran aparatur Pemerintah Desa dalam menumbuhkembangkan Linmas.

Permasalahan tersebut, jika tidak diselesaikan dapat menjadi *constraint* dalam pencapaian visi dan misi Bupati maupun capaian indikator lainnya. Beberapa dampak dari adanya permasalahan dan hambatan tersebut meliputi:

1. Kurang tercapainya suatu kegiatan sesuai indikator kinerja
2. Tidak tercapainya sasaran kerja
3. Belum optimalnya hasil pekerjaan

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi, peningkatan kualitas birokrasi, dan meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan pengguna layanan akan meningkatkan kebutuhan akan adanya penyediaan produk layanan yang semakin baik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi-inovasi dalam menunjang peningkatan pelayanan publik secara kontinyu. Beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, yaitu:

1. Upaya peningkatan budaya kerja dan disiplin kerja pegawai.
2. Masih kurangnya jumlah Aparatur Kecamatan yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai dalam rangka mendukung optimalisasi pelayanan kapada masyarakat
3. Masih kurangnya sumber dana pendukung kerja
4. Peningkatan peran dan fasilitasi kecamatan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah, pelayanan sarana dan prasarana umum serta pencapaian standar pelayanan minimal.

Berdasarkan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan tersebut, dapat diinventarisasi beberapa isu strategis. Inventarisasi isu-isu strategis tahun 2026 didapatkan dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal Kabupaten Banjarnegara sampai dengan tahun 2025. Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan pembangunan. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2026, sebagai berikut:

1. Masih terbatas dan kurangnya kapasitas serta kompetensi perangkat desa
2. Fasilitas pelayanan publik serta sarana dan prasarana pendukung yang masih kurang memadai.
3. Masih adanya desa dengan angka stunting tinggi di wilayah Kecamatan Karangkobar.
4. Daerah rawan bencana dengan intensitas kejadian yang cukup tinggi.

5. Sarana prasarana kewilayahan yang mangkrak dan belum dibangun/ direhabiltasi (rencana pembangunan terminal di eks Puskesmas Karangkobar).
6. Belum adanya lokasi tempat pembuangan sampah akhir sehingga sampag dari karangkobar dibuang ke TPA Kabupaten yang cukup jauh.
7. Penataan pasar yang masih semrawut sehingga trotoar dijadikan lapak pedagang.

2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

RKPD Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Tahun 2005-2025 dan mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2026 dan mengacu pada Renstra Kecamatan Karangkobar Tahun 2023-2026. Berdasarkan hal tersebut, prioritas arah kebijakan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2026 meliputi :

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Akhir RKPD tahun 2025 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil		
	UNSUR KEWILAYAHAN									
	KECAMATAN								**2.194.182.090**	
1)	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terlaksananya Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten**	**Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana**	**100%**	**Kec.Karangkobar**	**Terlaksananya Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten**	**Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana**	**100%**	**2.076.726.090**	**DAU**
	Perencanaan, Penganggaran daen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen dan laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**100%**	**Kec.Karangkobar**	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen dan laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**100%**	**8.779.000**	**DAU**
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	Kec Karangkobar	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	4.386.000	DAU
2)	Koordinasi dan laporan capaian kinerja dan ikhtisar	Tersedianya Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	2 laporan	Kec Karangkobar	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	2 laporan	4.393.000	DAU

	realisasi kinerja SKPD	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
	Administrasi Keuangan perangkat Daerah	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**Kec Karangkobar**	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**1.764.879.990**	**DAU**
1)	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan dan semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 laporan	Kec Karangkobar	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 laporan	2.700.000	DAU

2)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 orang	Kec Karangkobar	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 orang	1.740.519.990	DAU
3)	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	Kec Karangkobar	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	21.660.000	DAU
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**Kec Karangkobar**	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**103.293.000**	**DAU**
1)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket	Kec Karangkobar	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket	8.619.100	DAU
2)	Penyediaan Bahan logistik kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	9 paket	Kec Karangkobar	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	9 paket	92.662.400	DAU
3)	Penyediaan komponen instalasi listrik	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang disediakan	1 paket	Kec Karangkobar	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang disediakan	1 paket	2.011.500	DAU

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**Kec Karangkobar**	**Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**18.000.000**	**DAU**
1)	Pengadaan Peralatan dan mesin lainya	tersedianya Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan mesin Lainnya Lainnya yang Disediakan	2 unit	Kec Karangkobar	tersedianya Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan mesin Lainnya Lainnya yang Disediakan	2 unit	18.000.000	DAU
2)	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	1 paket	Kec Karangkobar	Tersedianya mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	1 paket	0	DAU
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**Kec Karangkobar**	**Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**80.271.300**	**DAU**
1)	Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya Air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya Air dan listrik yang disediakan	12 laporan	Kec.Karangkobar	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya Air dan listrik yang disediakan	12 laporan	6.000.000	DAU
2)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	Kec. Karangkobar	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	13 laporan	74.271.300	DAU

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**Kec. Karangkobar**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**101.502.800**	**DAU**
1)	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainya yang dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	Kec. Karangkobar	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainya yang dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	41.001.000	DAU
2)	Penyediaan jasa Pemeliharaan Biaya pemelihaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 unit	Kec. Karangkobar	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 unit	50.600.000	DAU
3)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 unit	Kec. Karangkobar	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Banunan Lainya	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi /Direhabilitasi	13 unit	9.901.800	DAU

		atau Banunan Lainya	/Direhabilitasi							
2)	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**Prosentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**100%**	**Kec. Karangkobar**	**Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**Prosentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**100%**	**61.426.800**	**DAU**
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	**Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**Prosentase koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum**	**100%**	**Kec.Karangkobar**	**Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**Prosentase koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum**	**100%**	**15.000.200**	**DAU**
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 dokumen	Kec.Karangkobar	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 dokumen	15.000.200	DAU
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	**Terlaksananya Pelaksanaan**	**Prosentase pelaksanaan urusan**	**100%**	**Kec.Karangkobar**	**Terlaksananya Pelaksanaan Urusan**	**Prosentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**100%**	**46.426.600**	**DAU**

	Dilimpahkan kepada Camat	**Urusan Pemerintahan Yang di Limpahkan Kepada Camat**	**pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**			**Pemerintahan Yang di Limpahkan Kepada Camat**				
1)	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan perijinan non usaha	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah dokumen perizinan non usaha yang dilaksanakan	1.250 dok	Kec.Karangkobar	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah dokumen perizinan non usaha yang dilaksanakan	1.250 dok	0	DAU
2)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait jumlah dengan Nonperizinan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	200 laporan	Kec.Karangkobar	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	200 laporan	3.621.600	DAU
3)	Pelaksanan Urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Jumlah SPPT PBB yang tersalurkan)	1 laporan	Kec.Karangkobar	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Jumlah SPPT PBB yang tersalurkan)	1 laporan	42.805.000	DAU
3)	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Terlaksananya program penyelenggaraan pemerintahan umum	**Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**100%**	**Kec.Karangkobar**	Terlaksananya program penyelenggaraan pemerintahan umum	**Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**100%**	**13.500.000**	**DAU**

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepada Daerah	**Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Prosentasepenyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah**	**100%**	**Kec.Karangkobar**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Prosentasepenyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah**	**100%**	**13.500.000**	**DAU**
1)	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen Forkompinca yang dilaksanakan	12 dokumen	Kec.Karangkobar	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen Forkompinca yang dilaksanakan	12 dokumen	13.500.000	DAU
4)	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Terlaksanaya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**Prosentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	**Kec. Karangkobar**	**Terlaksanaya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**Prosentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	**42.529.200**	**DAU**
	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Prosentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**100%**	**Kec. Karangkobar**	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Prosentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**100%**	**42.529.200**	**DAU**
1)	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	13 dokumen	Kec. Karangkobar	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	13 dokumen	2.419.800	DAU

2)	Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraa n Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 dokumen	Kec. Karangkobar	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 dokumen	14.800.000	DAU
3)	fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6 dokumen	Kec. Karangkobar	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6 dokumen	5.400.000	DAU
4)	Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2 dokumen	Kec. Karangkobar	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	13 dokumen	5.400.000	DAU
5)	Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	3 dokumen	Kec. Karangkobar	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	3 dokumen	10.000.000	DAU
6)	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	1 dokumen	Kec. Karangkobar	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 dokumen	4.509.400	DAU

		Daerah dengan Pembangunan Desa	Daerah dengan Pembangunan Desa			Daerah dengan Pembangunan Desa				
7)	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	8 dok	Kec. Karangkobar	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	8 dok	0	DAU

Berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2026, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan yaitu:

1. Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor masih sangat minim dan usianya sudah tua sehingga sering mengalami kerusakan;
2. Bangunan gedung kantor banyak yang sudah mengalami kerusakan;
3. Kapasitas dan Kompetensi perangkat Desa masih rendah.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan musrenbang kecamatan dan forum konsultasi publik telah disampaikan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui aplikasi SIPD. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2026 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	NIHIL				

2.6. Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan hasil reses anggota DPRD, melalui aplikasi SIPD telah disampaikan usulan program dan kegiatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Pokok-Pokok Pikiran DPRD

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Validasi
	NIHIL				

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

1.1. 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Karangkobar tahun 2026 disusun dengan memperhatikan penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Selain itu, pengembangan isu-isu strategis daerah juga disusun dengan melakukan penelaahan terhadap isu-isu strategis nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 maupun kebijakan strategis nasional lainnya.

Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahun 2026 dijabarkan ke dalam semua urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten Banjarnegara, adalah :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 6 Kegiatan dan 15 sub kegiatan.
b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

   Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terdiri dari 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan.
c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

   Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan
d. Program Pembinaan dan Pengawasan dan Pemerintah Desa yang terdiri dari 1(satu) Kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan yaitu Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang diarahkan pada sub kegiatan Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa,Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa, Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan

pemberdayaan masyarakat desa dan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

1.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagai bagian dari tahapan pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025, maka Renja Perangkat Daerah mempedomani Renstra PD Tahun 2023-2026 RPJPD Tahun 2005-2025, Untuk itu diperlukan pemahaman mengenai visi RPJPD Tahun 2005-2025. Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.

Visi pembangunan dalam RPJPD Tahun 2005-2025 adalah:

BANJARNEGARA MAJU BERBASIS PERTANIAN

Visi Pembangunan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025 ini mengarah pada pencapaian tujuan, cita-cita dan harapan masyarakat Kabupaten Banjarnegara. Visi pembangunan daerah tersebut harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, kesejahteraan, dan kelestarian yang ingin dicapai. Oleh karena itu, perlu kiranya diberikan penjelasan makna visi untuk mendapatkan kesamaan persepsi tentang muatan substansi filosofis yang terkandung, sehingga segenap pemangku kepentingan secara sinergis dan optimal dapat memberikan kontribusi dalam rangka pencapaiannya.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan, sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Dengan kata lain tujuan dan sasaran merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Tujuan dan sasaran dalam

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Karangkobar Tahun 2024-2026 diuraikan sebagai berikut:

a. Tujuan yang ke-5 adalah Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

   Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

b. Tujuan yang Ke 6 adalah Meningkatnya Kualitas Layanan Publik

   Sasaran:

   Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program pada Renja Perangkat Daerah merupakan program prioritas dalam Renstra 2023-2026. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam Renja Perangkat Daerah selanjutnya dijabarkan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Pemilihan untuk masing-masing program/ kegiatan dijabarkan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan 6 (enam) kegiatan yakni :
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      Terdiri dari 2 (dua) sub Kegiatan :
      a.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      a.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      Terdiri dari 3 (tiga) sub Kegiatan :
      b.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      b.2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
      b.3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran
   c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
      Terdiri dari 3 (Tiga) sub Kegiatan :
      c.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      c.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      c.3. Penyedia bahan logistik kantor
   d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Terdiri dari 1 (satu) sub Kegiatan :
      d.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Terdiri dari 2 (dua) sub Kegiatan :

e.1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

e.2. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Terdiri dari 3 (tiga) sub Kegiatan :

f.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

f.2. Pemeliharaan/rehabilitatasi sarana prasarana gedung

f.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerntahan dan Pelayanan Publik, 2 (dua) kegiatan yakni :

a. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

Terdiri dari 1 (satu) sub Kegiatan :

a.1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang di Limpahkan Kepada Camat

Terdiri dari 3 (tiga) sub Kegiatan :

b.1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan perijinan non usaha

b.2. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perijinan

b.3. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan

3. Program Urusan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan dengan 1 (satu) kegiatan yakni :

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala DaerahTerdiri dari 1 (satu) sub Kegiatan:

a.1. Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di wilayah kecamatan

4. Program Pembinaan dan Pengawasan Desa, dengan dengan 1 (satu) kegiatan yakni :
   a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Terdiri dari 7 (tujuh) sub Kegiatan :
      a.1. Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa
      a.2. Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa
      a.3. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
      a.4. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa
      a.5. Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan keteriban umum
      a.6. Fasilitasi penyusunan program pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa
      a.7. Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. Renja Perangkat Daerah selanjutnya menjadi platform operasional bagi Perangkat Daerah dalam menjalankan programnya dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka sasaran pembangunan daerah tahun 2026. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026 dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disepakati.
2. Kerangka pendanaan dalam Renja Perangkat Daerah masih bersifat sementara, sehingga masih dimungkinkan terjadi perubahan pagu yang disebabkan oleh pengurangan, penambahan, dan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan maupun antar sub kegiatan dalam kerangka penyusunan anggaran secara terpadu dan berbasis kinerja.
3. Renja Perangkat Daerah menjadi acuan bagi Kepala Perangkat Daerah dan segenap jajarannya serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, serta menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal : 2025

Camat Karangkobar,

PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KECAMATAN KARANGKOBAR

MOKHAMAD SANTIAJI, S.E
Pembina Tk. I
NIP. 19700625 199803 1 007

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan yang diatur melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan pembentukan tim penyusun, penelaahan rancangan awal RKPD, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, hingga pada penyempurnaan berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang RKPD. Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, penyusunan Renja Perangkat Daerah juga mengacu pada Renja Kementerian/Lembaga terkait, serta Renja Perangkat Daerah Provinsi terkait. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2. Landasan Hukum

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012

Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
26. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 14);
27. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 15);
28. Peraturan Bupati Banjarnegara **Nomor Tahun 2025 Tanggal tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026**

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Kecamatan Pagenta Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun dengan maksud untuk:

a. Menjabarkan Renstra Kecamatan Pagentan Tahun 2025-2029 ke dalam rencana program kegiatan prioritas Tahun 2026 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Renja K/L Tahun 2026 dan Renja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;
b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerapan anggaran berbasis kinerja.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Pagentan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

a. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA-DPA dalam Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2026, yang dalam penyusunannya didahului dengan menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026;
b. Sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Tahun 2026;
c. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 disusun berdasarkan sistematika yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah.

BAB 2 : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dan atau pokok-pokok DPRD.

BAB 3 : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan tahun 2025.

BAB 4 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran RKPD.

BAB 5 : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN PAGENTAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pagentan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Pagentan

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah meliputi urusan pemerintahan unsur Kewilayahan Bidang Urusan Kecamatan.

Renja Kecamatan Pagentan Tahun 2024 yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 terdiri dari 5 program, 11 kegiatan, dan 26 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 2.756.000.000,- dengan fokus utama pada mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good government) dalam kehidupan berpolitik yang demokratis dan bertanggung jawab. Program/kegiatan/sub kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung tujuan daerah (Berdasarkan Berita Acara reviu penyelarasan perencanaan tanggal 2 Januari 2024) yang meliputi:

1. **Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah**
2. **Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik.**

Dari 5 program, 11 kegiatan, dan 26 sub kegiatan yang dalam Renja Perangkat Daerah tersebut, program/kegiatan/sub kegiatan yang disetujui untuk dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024 terdiri dari 4 program, 10 kegiatan, dan 25 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 2.147.196.947.

Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024, terjadi beberapa perubahan yang meliputi penambahan atau pengurangan pagu, penghapusan, penambahan atau pengurangan program/kegiatan/sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Perubahan tersebut mengubah rincian dalam Renja Perangkat Daerah menjadi 4 program, 10 kegiatan, dan 25 sub kegiatan dengan total

anggaran sebesar Rp 2.152.112.540,-. Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2024, ada 1 program yang bertambah anggarannya yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dari Rp 1.990.096.947,- menjadi Rp 1.997.512.540,-, sedangkan Program/kegiatan/subkegiatan yang bekurang yaitu Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebelum perubahan Rp Rp 75.000.000,00 dan anggaran setelah perubahan Rp 72.500.000,00.

Pada Renja Kecamatan tahun 2024, Program/Kegiatan/Subkegaitan yang bertambah/berkurang, meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
    a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
        1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
        2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
    b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
        1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
        2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
        3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
    c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
        1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
        2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
        1. Pengadaan Mebel
        2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
    e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
        1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
        2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

a. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

a. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

1. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

1. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
2. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
3. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
4. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
5. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
6 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Dinamika yang terjadi selama tahun 2024 turut mempengaruhi keberhasilan pencapaian Renja Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2024, tercatat adanya hasil yang baik karena semua target tercapai. Indikator Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja 63,20 terealisasi 72,10 dengan tingkat capaian kinerja 114,08%. Indikator Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan dengan target kinerja 85,05 terealisasi sebesar 85,11 dengan tingkat capaian kinerja 100,07%. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya komitmen dan integritas yang tinggi dari para aparatur pemerintah kecamatan.

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada, semua program/kegiatan/sub kegiatan sesuai target.

b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik. Berdasarkan hasil evaluasi, Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian kinerja antara lain adalah:

1. Adanya perencanaan, pelaksanaan, monitoring yang baik.
2. Menyelaraskan hal-hal yang akan dikerjakan dengan target kinerja
3. Menyelaraskan apa yang dianggarkan dengan apa yang akan dikerjakan
4. Mengerjakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja
5. Melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, pada tahun 2024 keseluruhan pencapaian kinerja telah tercapai sesuai target. Pada tahun perencanaan selanjutnya, perlu diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk pencapaian target kinerja ,diantaranya:

1. Koordinasi antar Kasi dan Sub Bagian
2. Prioritas Perencanaan yang tepat sasaran, agar kegiatan bisa berjalan sesuai perencanaan

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2024* Kabupaten Banjarnegara (sesuai berita acara penyelarasan tanggal 2 Januari 2024)

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR KEWILAYAHAN									
	Tujuan: Meningkatnya aksesibilitas layanan pemerintah dalam urusan kewilayahan di Kecamatan Pagentan	**Indeks Pelayanan Publik**	58,50	-	-	-	-			
	Tujuan : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	**Nilai SAKIP**								

	Sasaran Strategis : Meningkatnya Efektivitas koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan desa/kelurahan	**Indeks Desa di Wilayah Kecamatan**	**73,000**							
	Sasaran Strategis : Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	**Nilai SAKIP Kecamatan**		**63,20**	**63,20**	**72,10**	**114,08%**	**72,10**	**72,50**	100%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	**Prosentase Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana** **Persentase desa yang tertib administrasi desa**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	32 dokumen	32 dokumen	32 dokumen	32 dokumen	0	32	32	0
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	16 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	0	16	16	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 dokumen	0	3 dokumen	3 dokumen	100%	13 dokumen	0	

	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	32 dok	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	100%	17 dok	17 dok	100%
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	100%	16 dokumen	16 dokumen	100%
	Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Jumlah Laporan hasil koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	12 laporan	0	0	0	0	16 laporan	16 laporan	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana** **Persentase penanganan konflik di wilayah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah	**Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang terlaksana**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	4 dok	1 dok	100%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN	**persentase terlaksananya program**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**pemberdayaan masyarakat dan desa** **Persentase lembaga desa/kelurahan di kecamatan yang terfasilitasi**	**100**							
	koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	**Persentase Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang terlaksana**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	1 laporan	2 laporan	0 laporan	0 laporan	0%	2 laporan	0 laporan	0
	Pemberdayaan Lembaga KemasyarakatanTingkat Kecamatan	**Persentase lembaga kemaasyarakatan tingkat kecamatan** **Persentase Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Peningkatan Kapasitas lembaga kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	2 lembaga kemasyarakatan	1 lembaga kemasyarakatan	1 lembaga kemasyarakatan	1 lembaga kemasyarakatan	100%	1 lembaga kemasyarakatan	1 lembaga kemasyarakatan	100%
	Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	**Nilai IKM**								
	Sasaran Strategis : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah urusan kewilayahan	**Nilai SAKIP Kecamatan**	BB (72,50)							

	SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Efektivitas dan Transparasi Layanan Publik	**Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan**		**85,05**	**85,05**	**85,11**	**100,07%**	**85,90**	**85,92**	**100,4%**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten /kota yang terlaksana** **Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah** **Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah**	**100** **100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Perencanaan, Penganggaran daen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Pelaporan yang tersusun Persentase Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	14 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	100%	8 dokumen	8 dokumen	100%
	Koordinasi dan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	100%	5 laporan	5 laporan	100%

	Administrasi Keuangan perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Persngkat Daerah yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 orang/bulan	12 orang/bulan	12 orang/bulan	11 orang/bulan	91,67%	13 orang/bulan	11 orang/bulan	100%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	12 dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	14 Laporan	14 Laporan	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang tersedia	2 paket	3 paket	1 paket	1 paket	100%	5 paket	5 paket	100%
	Penyediaan Bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	7 paket	7 paket	8 paket	8 paket	100%	7 paket	7 paket	100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 unit	3 unit	4 unit	4 unit	100 %	4 unit	4 unit	100%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	4 unit	4 unit	50 unit	50 unit	100%	4 unit	4 unit	100%

		Lainnya yang disediakan								
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0	1 unit	0 unit	0
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit							
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya Air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan peroranagn dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 unit	8 unit	8 unit	8 unit	100%	9 unit	9 unit	100%
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	4 unit	2 unit	2 unit	100%	3 unit	3 unit	100%

	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	100%	12 unit	12 unit	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik** **Persentase layanan yang sesuai dengan standar pelayanan**	**100**	**106,75**	**100**	**100**	**106,75%**	**100**	**100**	**100%**
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	106,75%	100%	100%	100%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Non Perijinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perijinan Non Usaha	Jumlah dokumen Non Perijinan Usaha yang di Laksanakan.	12 dokumen	254 dokumen	150 dokumen	155 dokumen	103%	150 dokumen	150 dokumen	100%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
	Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum	Persentase terselenggaraanya pemeliharaan sarana dan prasaran pelayanan umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau	Jumlah Dokumen Koordinasi sinergitas dengan Perangkat								

	Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemelihahaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 dok	6 dok	6 dok	6 dok	100%	6 dok	6 dok	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pagentan

Dalam pelaksanaan pelayanannya, Kecamatan Pagentan mengampu 2 Indikator Kinerja Utama. Dari 2 indikator Kinerja Utama tersebut berstatus tercapai dan melebihi target yaitu Indikator Nilai SAKIP Kecamatan target pada tahun 2024 63,20 tercapai 72,10 tingkat capaian kinerja atau 114,08% dan Indikator Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan dari target 85,05 tercapai 85,11 atau 100,07%. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Merencanakan target kinerja;
2. Menyelaraskan dokumen perencanaan sehingga data yang disajikan merupakan data yang akuntabel;
3. Koordinasi internal perangkat daerah dengan maksimal sehingga kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan perencanaan yang ada.
4. Koordinasi Pemerintah Kecamatan dan Desa yang telah berjalan dengan baik;
5. Kekompakan Tim Pemungut Pajak dalam pelaksanaan tugas;
6. Komitmen dari para aparatur kecamatan untuk memberikan pelayanan yang prima sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

Dalam rangka pencapaian target kinerja tahun berikutnya, beberapa hal yang harus diupayakan meliputi:

1. Mengevaluasi, menelaah, menyelaraskan dokumen perencanaan agar tercapai target kinerja;
2. Mengevaluasi dan memperbaiki komunikasi serta koordinasi internal perangkat daerah sehingga kegiatan dapat berjalan selaras dengan perencanaan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah baik.

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara (Setelah penyelarasan)

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK LPPD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Nilai SAKIP Kecamatan			63,2	72,10	72,50	72,60	63,20	72,10	72,50	72,60	
2.	Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan		-	85,05	85,90	-	-	85,05	85,11	85,92	-	
3.	Indeks Desa di Wilayah Kecamatan			-	-	73,000	73,450			73,000	73,450	

*) Kolom 3 diisi berdasarkan IKK outcome dalam lampiran Permendagri 18/2021

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pagentan

Kecamatan Pagentan dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan urusan pemerintahan dalam 1 urusan, yaitu Urusan Kewilayahan. Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Banjarnegara 2025-2029, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk tahun 2026 mencakup 1 urusan tersebut. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pagentan diantaranya adalah:

1. Belum optimalnya pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan kepada camat
2. Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
3. Masih kurangnya dukungan data informasi dari masyarakat, peraturan yang valid, akurat dan terintegrasi sebagai pedoman dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat;
4. Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang ada;
5. Masih rendahnya pemahaman masyarakat maupun aparatur desa tentang hakekat pembangunan nasional;
6. Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan administrasi desa;
7. Masih kurangnya keseriusan masyarakat dan petugas pemungut dalam pelunasan PBB lebih awal;
8. Masih kurangnya sarana dan prasarana.

Permasalahan tersebut, jika tidak diselesaikan dapat menjadi *constraint* dalam pencapaian visi dan misi Bupati maupun capaian indikator lainnya. Beberapa dampak dari adanya permasalahan dan hambatan tersebut meliputi:

1. Kurang tercapainya suatu kegiatan sesuai indikator kinerja
2. Tidak tercapainya sasaran kerja
3. Belum optimalnya hasil pekerjaan

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi, peningkatan kualitas birokrasi, dan meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan pengguna layanan akan meningkatkan kebutuhan akan adanya penyediaan produk layanan yang semakin baik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi-inovasi dalam menunjang peningkatan pelayanan publik secara berkelanjutan. Beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Pagentan, yaitu:

1. Kondisi geografis wilayah kecamatan yang berbukit-bukit dan tanah yang labil/ mudah bergerak mengakibatkan kerusakan infrastruktur transportasi dan bencana alam tanah longsor kerap kali terjadi sehingga menghambat mobilitas ekonomi dan sosial masyarakat
2. Tuntutan masyarakat semakin beragam untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas.
3. Masih adanya aparat pemerintahan dan kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipasif.
4. Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.
5. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan.
6. Melimpahnya potensi sumberdaya alam yang dapat dikelola untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
7. Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mempermudah upaya meningkatkan profesionalisme.
8. Adanya dukungan koordinasi lintas sektor di wilayah kecamatan yang mendukung tercapainya sinkronisasi dan integrasi kegiatan lingkup kecamatan antara lain kegiatan Konferensi dinas/rapat koordinasi Forkompinca, UPT/Instansi dan Kepala Desa secara rutin di tingkat Kecamatan.

Berdasarkan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan tersebut, dapat diinventarisasi beberapa isu strategis. Inventarisasi isu-isu strategis tahun 2026 didapatkan dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal Kabupaten Banjarnegara sampai dengan tahun 2024. Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan-

permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan pembangunan. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pagentan pada tahun 2024, sebagai berikut:

1. Masih belum optimalnya penerapan Sistem akuntabilitas kinerja Instansi PEmerintah.
2. Pelayanan publik kurang optimal.
3. Kurang optimalnya pembinaan ke desa.
4. Masih tingginya angka stunting yaitu 21,22%.
5. Masih tingginya angka kemiskinan, ditandai dengan masih adanya 4 desa yang masuk dalam kategori Desa miskin ekstrem yaitu Metawana, Kayuares, Gumingsir, dan Karekan.
6. Kurang cepatnya penanganan permasalahan di desa.
7. Bangunan Gedung kantor yang sudah tua dan belum sesuai dengan standar Gedung untuk pelayanan publik, sehingga pelayanan publik belum maksimal.
8. Rawan bencana alam tanah longsor.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Tahun 2026 merupakan pelaksanaan tahun pertama dalam RenstraTahun 2025-2029. Dalam Renstra Tahun 2025-2029, prioritas arah kebijakan sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Pagentan pada tahun 2026 meliputi:

1. Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP.
2. Optimalisasi pelaksanaan pelayanan publik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Optimalisasi fungsi koordinasi kecamatan dengan perangkat desa, OPD, dan stakeholder lain.

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 Kabupaten Banjarnegara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	**Tujuan : Meningkatnya aksesibilitas layanan pemerintah dalam urusan kewilayahan di Kecamatan Pagentan**	**Kab. Banjarnegara**	**Indeks Pelayanan Publik**	**58,50**	**2.311.989.588**	**Tujuan : Meningkatnya aksesibilitas layanan pemerintah dalam urusan kewilayahan di Kecamatan Pagentan**	**Kab. Banjarnegara**	**Indeks Pelayanan Publik**	**58,50**	**2.231.582.376**	
I	**Sasaran Strategis : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah urusan kewilayahan**	**kec pagentan**	**Nilai SAKIP Kecamatan**	**BB (72,50)**	**2.200.364.588**	**Sasaran Strategis : Meningkatnya akuntabilitas kinerja**	**kec pagentan**	**Nilai SAKIP Kecamatan**	**BB (72,50)**	2.119.957.376	

						perangkat daerah urusan kewilayahan					
IV	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	kec pagentan	**Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah** **Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah**	**100%** **100%**	2.114.364.588	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	kec pagentan	**Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah** **Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah**	**100%** **100%**	2.033.957.376	
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat daerah	kec pagentan	terpenuhinya perencanaan pengang	100%	6.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja	kec pagentan	terpenuhinya perencanaan pengang	100%	6.000.000	

			garan dan evaluasi kinerja kecamat an pagentan			Perangkat daerah		garan dan evaluasi kinerja kecamat an pagentan			
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	kec pagentan	Jumlah Dokume n perencan aan perangka t daerah	14 dokume n	3.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	kec pagen tan	Jumlah Dokume n perencan aan perangka t daerah	14 dokume n	3.000.000	
b.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kineja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	kec pagentan	Jumlah Koordina si dan Penyusu nan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 laporan	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kineja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	kec pagen tan	Jumlah Koordina si dan Penyusu nan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 laporan	3.000.000	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	kec pagentan	Terselen ggaranya Administ rasi Keuanga n	100%	1.615.058. 588	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	kec pagen tan	Terselen ggaranya Administ rasi Keuanga n	100%	1.615.058. 588	

			Persngkat Daerah					Persngkat Daerah			
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	kec pagentan	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 orang/bulan	1.590.398.588	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	kec pagentan	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 orang/bulan	1.590.398.588	
b	Pelaksanaan Penataan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	kec pagentan	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 dokumen	21.660.000	Pelaksanaan Penataan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	kec pagentan	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 dokumen	21.660.000	
c.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	kec pagentan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan	16 Laporan	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	kec pagentan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan	16 Laporan	3.000.000	

			Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD					Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD			
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	kec pagentan	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100%	145.720.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	kec pagentan	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100%	126.698.788	
a.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	kec pagentan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	35.720.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	kec pagentan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	35.720.000	

b.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	kec pagentan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 paket	110.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	kec pagentan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 paket	90.978.788	
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kec pagentan	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	72.886.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kec pagentan	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	11.500.000	
a.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	kec pagentan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	4 unit	38.500.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	kec pagentan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	4 unit	-	

b.	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	kec pagentan	Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	4 unit	34.386.000	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	kec pagentan	Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	4 unit	11.500.000	
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kec pagentan	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan	100%	38.700.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kec pagentan	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan	100%	38.700.000	
a.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	kec pagentan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunik	12 laporan	6.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	kec pagentan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunik	12 laporan	6.000.000	

			asi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					asi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
b.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	kec pagentan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	32.700.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	kec pagentan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	32.700.000	
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daaerah	kec pagentan	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daaerah sesuai ketentuan	100%	236.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daaerah	kec pagentan	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daaerah sesuai ketentuan	100%	236.000.000	

a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	kec pagentan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	40.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	kec pagentan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	40.000.000	
b.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	kec pagentan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	190.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	kec pagentan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	190.000.000	
c.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	kec pagentan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung	10 unit	6.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	kec pagentan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung	10 unit	6.000.000	

			Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipeliharaa/Direhabilitasi			Bangunan Lainnya		Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipeliharaa/Direhabilitasi			
V	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	kec pagentan	**Persentase layanan yang sesuai dengan standar pelayanan**	**100%**	86.000.000	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	kec pagentan	**Persentase layanan yang sesuai dengan standar pelayanan**	**100%**	86.000.000	
1.	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	kec pagentan	Persentase terselenggaraanya pemeliharaan sarana dan prasaran pelayanan umum	100%	10.000.000	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	kec pagentan	Persentase terselenggaraanya pemeliharaan sarana dan prasaran pelayanan umum	100%	10.000.000	
a.	Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang	kec pagentan	Jumlah Dokumen Koordina	1 dokumen	10.000.000	Koordinasi sinergitas dengan Perangkat	kec pagentan	Jumlah Dokumen Koordina	1 dokumen	10.000.000	

	terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		si sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		si sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			
2.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	kec pagentan	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	76.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	kec pagentan	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	76.000.000	

a.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Non Perizinan	kec pagentan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 laporan	6.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Non Perizinan	kec pagentan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 laporan	6.000.000	
b.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perijinan Non Usaha	kec pagentan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 dokumen	5.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perijinan Non Usaha	kec pagentan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 dokumen	5.000.000	
c.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	kec pagentan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 laporan	65.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	kec pagentan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 laporan	65.000.000	
2.	**Sasaran Strategis : Meningkatnya Efektivitas koordinasi dan fasilitasi**	**Kec Pagentan**	**Indeks Desa di Wilayah Kecamatan**	**73,000**	**111.625.000**	**Sasaran Strategis : Meningkatnya Efektivitas**	**Kec Pagentan**	**Indeks Desa di Wilayah Kecamatan**	**73,000**	**111.625.000**	

	pemberdayaan desa/kelurahan					**koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan desa/kelurahan**					
I	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	kec pagentan	**Persentase lembaga desa/kelurahan di kecamatan yang terfasilitasi**	**100%**	25.000.000	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	kec pagentan	**Persentase lembaga desa/kelurahan di kecamatan yang terfasilitasi**	**100%**	25.000.000	
1.	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Kec Pagentan	Persentase Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang terlaksana	100%	10.000.000	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Kec Pagentan	Persentase Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang terlaksana	100%	10.000.000	
a.	Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan	Kec Pagentan	Jumlah laporan Peningkatan	1 laporan	10.000.000	Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan	Kec Pagentan	Jumlah laporan Peningkatan	1 laporan	10.000.000	

	Masyarakat di wilayah kecamatan		efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan			Masyarakat di wilayah kecamatan		efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan			
1.	Pemberdayaan Lembaga KemasyarakatanTingkat Kecamatan	kec pagentan	Persentase Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan	65%	15.000.000	Pemberdayaan Lembaga KemasyarakatanTingkat Kecamatan	kec pagentan	Persentase Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan	65%	15.000.000	
a.	Peningkatan Kapasitas lembaga kemasyarakatan	kec pagentan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	2 lembaga kemasyarakatan	15.000.000	Peningkatan Kapasitas lembaga kemasyarakatan	kec pagentan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	2 lembaga kemasyarakatan	15.000.000	
II	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN**	kec pagentan	**Persentase penanganan**	**100%**	15.000.000	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN**	kec pagentan	**Persentase penanganan**	**100%**	15.000.000	

	PEMERINTAHAN UMUM		**konflik di wilayah**			**PEMERINTAHAN UMUM**		**konflik di wilayah**			
1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah	kec pagentan	Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang terlaksana	100%	15.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah	kec pagentan	Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang terlaksana	100%	15.000.000	
a.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	kec pagentan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6 Dokumen	15.000.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	kec pagentan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6 Dokumen	15.000.000	
III	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**	kec pagentan	**Persentase desa yang tertib**	**100%**	71.625.000	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**	kec pagentan	**Persentase desa yang tertib**	**100%**	71.625.000	

	PEMERINTAHAN DESA		**administrasi desa**			**PEMERINTAHAN DESA**		**administrasi desa**			
1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	kec pagentan	Persentase Fasilitasi ,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana	100%	71.625.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	kec pagentan	Persentase Fasilitasi ,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana	100%	71.625.000	
a.	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan kepala desa	kec pagentan	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peratura	32 dokmen	10.000.000	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan kepala desa	kec pagentan	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peratura	32 dokmen	10.000.000	

			n Kepala Desa					n Kepala Desa			
1.b.	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	kec pagentan	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	16 Dokumen	10.000.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	kec pagentan	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	16 Dokumen	10.000.000	
c.	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	kec pagentan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-	-	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	kec pagentan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-	-	
d.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	kec pagentan	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuanga	32 dokumen	15.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	kec pagentan	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuanga	32 dokumen	15.000.000	

			n Desa dan Pendaya gunaan Aset Desa					n Desa dan Pendaya gunaan Aset Desa			
e.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	kec pagentan	Jumlah dokumen Sinkroni sasi Perencan aan Pembang unan Daerah dengan Pembang unan Desa	1 dokume n	10.000.00 0	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	kec pagen tan	Jumlah dokumen Sinkroni sasi Perencan aan Pembang unan Daerah dengan Pembang unan Desa	1 dokume n	10.000.00 0	
f.	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	kec pagentan	Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelen ggaraan Ketenter aman dan Ketertiba n Umum	6 dokume n	10.000.00 0	Fasilitasi Penyelenggara an Ketenteraman dan Ketertiban Umum	kec pagen tan	Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelen ggaraan Ketenter aman dan Ketertiba n Umum	6 dokume n	10.000.00 0	

g	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec Pagentan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 laporan	16.625.000	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec Pagentan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 laporan	16.625.000	

Berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2026, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan yaitu:

1. Memprioritaskan kegiatan yang belum terlaksana di tahun 2024.
2. Memprioritaskan pelaksanaan kegiatan yang manfaatnya langsung dirasakan oleh Masyarakat.
3. Mempedomani prinsip efisiensi dengan memprioritaskan kegiatan yang menjadi kegiatan wajib dan kegiatan pokok.
4. Melanjutkan kegiatan yang sudah ada di tahun 2024

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan musrenbang kecamatan dan forum konsultasi publik telah disampaikan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui aplikasi SIPD. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.3
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	NIHIL				

2.6. Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan hasil reses anggota DPRD, melalui aplikasi SIPD telah disampaikan usulan program dan kegiatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Validasi
	NIHIL				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PAGENTAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi, maka Kecamatan Pagentan melaksanakan kebijakan daerah yang sinergis dengan kebijakan Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat. Kegiatan yang akan dilakukan oleh Kecamatan Pagentan diharapkan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan di atasnya, mempunyai rasa keadilan, pemerataan dan diarahkan agar implementasinya akan dapat berdampak pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Pagentan. Renja yang disusun perangkat daerah berpedoman pada RKPD dan RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029 dengan Visi "**Banjarnegara Maju dan Sejahtera**" yang akan diwujudkan melalui 5 (lima) Misi yang merupakan turunan dari pokok-pokok visi yang telah didentifikasi sebelumnya yaitu :

1. Meningkatkan Infrastruktur dan Pelayanan Publik
2. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal
3. Meningkatkan Kualitas dan Akses Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan Sosial.
4. Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.
5. Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Transparan.

Dalam mencapai Visi Kabupaten Banjarnegara, maka Kecamatan Pagentan mempunyai peran dan fungsi menggerakan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah dalam menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan. Terutama dikaitkan dengan pelaksanaan pelimpahan kewenangan yang secara mutlak harus didukung oleh sumberdaya manusia aparatur yang mampu mengelola tugas-tugas pelayanan secara optimal, efektif dan efisien, serta mampu merumuskan kebijakan-kebijakan yang implementatif yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, yang pada muaranya mewujudkan Visi Kabupaten Banjarnegara.

Tujuan yang akan diwujudkan selama periode 2025-2029 adalah “Terwujudnya Banjarnegara maju dan sejahtera” yang diukur melalui indikator PDRB per kapita dan angka kemiskinan yang akan ditempuh melalui 4 sasaran strategis, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat
2. Meningkatnya perekonomian daerah yang berdaya saing dan berbasis potensi lokal secara berkelanjutan
3. Meningkatnya infrastruktur yang mendukung perekonomian dan kesejahteraan Masyarakat
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif

Adapun sasaran strategis yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam pencapaian visi misi Kepala Daerah sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Pagentan sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara dari 4 (empat) sasaran strategis tersebut adalah Sasaran Strategis ke-4 yaitu :

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif dengan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi.

   Meningkatnya profesionalisme aparatur daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, beretika, dan bertanggung jawab, serta mampu mendukung pembangunan daerah yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Pagentan

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan, sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Dengan kata lain tujuan dan sasaran merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Rumusan tujuan

yang akan dicapai oleh Kecamatan Pagentan dalam mendukung RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatnya aksesibilitas layanan pemerintah dalam urusan kewilayahan di Kecamatan Pagentan.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional.

Sasaran Strategis yang akan dicapai oleh Kecamatan Pagentan yaitu :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah urusan kewilayahan
2. Meningkatnya Efektivitas koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan desa/kelurahan

Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Pagentan beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel sebagaimana berikut ini :

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				2026	2027	2028	2029	2030
I.	Meningkatnya aksesibilitas layanan pemerintah dalam urusan kewilayah		Indeks Pelayanan Publik	58,50	59,50	60,50	61,00	61,50

	an di Kecamatan Pagentan							
1.		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah urusan kewilayahan	Nilai SAKIP Kecamatan	BB (72,50)	BB (72,60)	BB (72,70)	BB (72,80)	BB (73,00)
2		Meningkatnya Efektivitas koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan desa/kelurahan	Indeks Desa di Wilayah Kecamatan	73,000	73,450	73,750	74,000	74,400

3.3. Program dan Kegiatan

(Sajikan matriks yang berasal dari SIPD)

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN PAGENTANKAB. BANJARNEGARA
TAHUN 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Kecamatan Pagentan			2.311.989.588,00					2.358.193.447,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.311.989.588,00					2.358.193.447,00	
	7	01				KECAMATAN			2.311.989.588,00					2.358.193.447,00	
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	-	-	2.114.364.588,00				-	2.145.818.447,00	

	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	6.000.000,00			Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	-	7.000.000,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Pagentan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif		3.500.000,00	KECAMATAN PAGENTAN

	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	3.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Pagentan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif		3.500.000,00	KECAMATAN PAGENTAN
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.615.058.588,00			Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan,	-	1.774.598.447,00	

												akuntabel, dan partisipatif			
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	1.590.398.588,00	Kab. Banjarnegara, Pagentan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif		1.749.438.447,00	KECAMATAN PAGENTAN
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									

							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	21.660.000,00	Kab. Banjarnegara, Pagentan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif		21.660.000,00	KECAMATAN PAGENTAN
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	3.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Pagentan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif		3.500.000,00	KECAMATAN PAGENTAN

	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	145.720.000,00			Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	-	148.500.000,00	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	35.720.000,00	Kab. Banjarnegara, Pagentan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif		36.000.000,00	KECAMATAN PAGENTAN

	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	110.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Pagentan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif		112.500.000,00	KECAMATAN PAGENTAN
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	72.886.000,00			Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	-	76.000.000,00	

	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	38.500.000,00	Kab. Banjarnegara, Pagentan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif		40.000.000,00	KECAMATAN PAGENTAN
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	34.386.000,00	Kab. Banjarnegara, Pagentan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel,		36.000.000,00	KECAMATAN PAGENTAN

												dan partisipatif			
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	38.700.000,00			Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	-	42.470.000,00	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	6.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Pagentan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif		6.500.000,00	KECAMATAN PAGENTAN
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	32.700.000,00	Kab. Banjarnegara, Pagentan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif		35.970.000,00	KECAMATAN PAGENTAN

	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	236.000.000,00			Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	-	97.250.000,00	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	40.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Pagentan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif		41.000.000,00	KECAMATAN PAGENTAN

	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	190.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Pagentan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif		50.000.000,00	KECAMATAN PAGENTAN
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	10 Unit	6.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Pagentan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel,		6.250.000,00	KECAMATAN PAGENTAN

												dan partisipatif			
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	86.000.000,00				-	91.750.000,00	
	7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-	10.000.000,00			Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	-	11.000.000,00	
	7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum									

							Jumlah Dokumen Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Pagentan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif		11.000.000,00	KECAMATAN PAGENTAN
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	76.000.000,00			Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel,	-	80.750.000,00	

												dan partisipatif			
	7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha									
							Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Pagentan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif		6.000.000,00	KECAMATAN PAGENTAN
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan									

							Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	6.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Pagentan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif		6.500.000,00	KECAMATAN PAGENTAN
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan									
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	65.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Pagentan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif		68.250.000,00	KECAMATAN PAGENTAN

3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	25.000.000,00				-	27.000.000,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	10.000.000,00			Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	-	11.000.000,00	
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Pagentan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan		11.000.000,00	KECAMATAN PAGENTAN

												yang transparan, akuntabel, dan partisipatif			
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	15.000.000,00			Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	-	16.000.000,00	
	7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan									

							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Pagentan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif		16.000.000,00	KECAMATAN PAGENTAN
4	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	15.000.000,00				-	16.000.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	15.000.000,00			Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang	-	16.000.000,00	

												transparan, akuntabel, dan partisipatif			
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Pagentan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif		16.000.000,00	KECAMATAN PAGENTAN
5	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	71.625.000,00				-	77.625.000,00	

	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	71.625.000,00			Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	-	77.625.000,00	
	7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa									
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	32 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Pagentan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel,		11.000.000,00	KECAMATAN PAGENTAN

												dan partisipatif			
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa									
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	16 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Pagentan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif		11.000.000,00	KECAMATAN PAGENTAN
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa									

							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	32 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Pagentan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif		16.000.000,00	KECAMATAN PAGENTAN
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa									
							Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Pagentan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif		11.000.000,00	KECAMATAN PAGENTAN

	7	01	06	2.01	0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum									
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Pagentan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif		11.000.000,00	KECAMATAN PAGENTAN
	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya									
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 Laporan	16.625.000,00	Kab. Banjarnegara, Pagentan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel,		17.625.000,00	KECAMATAN PAGENTAN

													dan partisipatif			
	J U M L A H								**2.311.989.588,00**					**2.358.193.447,00**	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PAGENTAN

Program pada Kecamatan Pagentan merupakan program prioritas dalam Renstra 2025-2029. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Banjarnegara selanjutnya dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Pemilihan untuk masing-masing program/kegiatan/sub kegiatan di Kecamatan Pagentan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan 6 (enam) kegiatan yakni :
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      Terdiri dari 2 (dua) sub Kegiatan :
      a.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      a.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      Terdiri dari 3 (tiga) sub Kegiatan :
      b.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      b.2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
      b.3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran
   c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
      Terdiri dari 2 (dua) sub Kegiatan :
      c.1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      c.2. Penyedia bahan logistik kantor
   d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Terdiri dari 3 (tiga) sub Kegiatan :
      d.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
      d.2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Terdiri dari 2 (dua) sub Kegiatan :

e.1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

e.2. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Terdiri dari 3 (tiga) sub Kegiatan :

f.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

f.2. Pemeliharaan/rehabilittasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya

f.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, 2 (dua) kegiatan yakni :

a. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

Terdiri dari 1 (satu) sub Kegiatan :

a.1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang di Limpahkan Kepada Camat

Terdiri dari 3 (tiga) sub Kegiatan :

b.1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan perizinan non usaha

b.2. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan

b.3. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarahan, dengan 2 (dua) kegiatan :

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan :

a.1. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan

b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan, terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan

b.1. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

4. Program Urusan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan 1 (satu) kegiatan :

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala DaerahTerdiri dari 1 (satu) sub Kegiatan :

a.1. Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di wilayah kecamatan

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Desa, dengan dengan 1 (satu) kegiatan yakni :

a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Terdiri dari 7 (tujuh) sub Kegiatan :

a.1. Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa

a.2. Fasilitasi administrasi pemerintahan desa

a.3. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

a.4. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa

a.5. Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan keteriban umum

a.6. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pagentan Tahun 2025-2029. Renja Kecamatan Pagentan selanjutnya menjadi platform operasional bagi Kecamatan Pagentan dalam menjalankan programnya dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah tahun 2025-2029. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja Kecamatan Pagentan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026 dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disepakati.
2. Kerangka pendanaan dalam Renja Kecamatan Pagentan masih bersifat sementara, sehingga masih dimungkinkan terjadi perubahan pagu yang disebabkan oleh pengurangan, penambahan, dan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan maupun antar sub kegiatan dalam kerangka penyusunan anggaran secara terpadu dan berbasis kinerja.
3. Renja Kecamatan Pagentan menjadi acuan bagi Camat dan segenap jajarannya serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, serta menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 10 Agustus 2025
CAMAT PAGENTAN

HARI ARUMBINUKO, SP, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 196901181996031004

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan yang diatur melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan pembentukan tim penyusun, penelaahan rancangan awal RKPD, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah,

hingga pada penyempurnaan berdasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2009 tentang RPJP. Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, penyusunan Renja Perangkat Daerah juga mengacu pada Renja Kementerian/Lembaga terkait, serta Renja Perangkat Daerah Provinsi terkait. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2. Landasan Hukum

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berrita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);

25. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 14);
26. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 15);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 Nomor 14)
28. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 nomor 49)

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun dengan maksud untuk:

a. Menjabarkan RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 ke dalam rencana program kegiatan prioritas Tahun 2026 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Renja K/L Tahun 2026 dan Renja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;
b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerapan anggaran berbasis kinerja.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

a. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA-DPA dalam Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2026, yang dalam

penyusunannya didahului dengan menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026;

b. Sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Tahun 2026;
c. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun berdasarkan sistematika yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah.

BAB 2 : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dan atau pokok-pokok DPRD.

BAB 3 : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan tahun 2026

BAB 4 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran RKPD.

BAB 5 : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah meliputi urusan Pemerintahan Penunjang Fungsi Kewilayahan.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 terdiri dari 4 (empat) program, 9 (sembilan) kegiatan, dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 2.474.000 (Satu milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) dengan fokus utama pada bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Pada Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa serta tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Purwanegara selalu memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan secara terus menerus

mengambil langkah – langkah perbaikan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik dan optimal, bersih serta akuntabel sehingga mampu menciptakan pelayanan prima yang memenuhi standar pelayanan terhadap permintaan masyarakat. Program/kegiatan/sub kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah yang meliputi:

1. Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan Pelayanan Terpadu yang ada di Kecamatan, Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dengan tepat waktu tanpa didasari paksaan serta penyelewengan yang dilakukan oleh petugas pungut pajak.
3. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana baik secara kualitas maupun kwantitas (belum semua pelaksana dan pejabat struktural terpenuhi fasilitas laptop dan printer)

Dari 4 program, 9 kegiatan, dan 29 sub kegiatan yang dalam Renja Perangkat Daerah tersebut, program/kegiatan/sub kegiatan yang disetujui untuk dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024 terdiri dari 4 program, 9 kegiatan, dan 20 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 1.947.011.752,-

Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024, terjadi beberapa perubahan yang meliputi penambahan atau pengurangan pagu, penghapusan, penambahan atau pengurangan program/kegiatan/sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Perubahan tersebut mengubah rincian dalam Renja Perangkat Daerah menjadi 4 program, 9 kegiatan, dan 19 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 1.782.400.533,-. Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2024, program/kegiatan/sub kegiatan yang

berkurang meliputi Penyedian Gaji dan Tunjangna ASN, Penyediaan Bahan logistik kantor, Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya. Anggaran Sub kegiatan pengadaan gedung dan bangunan lainya dipindahkan ke Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

Dinamika yang terjadi selama tahun 2024 turut mempengaruhi keberhasilan pencapaian Renja Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2022, tercatat adanya hasil yang baik yang dikarenakan adanya pencapaian maupun pelampauan target maupun yang tidak memenuhi target.

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi Penyediaan gaji dan tunjangan ASN, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaktercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Terbatasnya sarana dan prasarana aparatur yang ada di Kecamatan (Fasilitasi laptop untuk pelaksana administrasi dan Pejabat struktural belum merata/masih kurang).
2. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan.
3. Kurangnya ketertiban administrasi di kecamatan yang menyebabkan adanya dokumen/STNK yang hilang sehingga tidak bisa dibayarkan pajak kendaraan dinas tersebut.
4. Adanya ASN yang pensiun atau mutasi sehingga anggaran gaji dan tunjangan ASN tidak semuanya terserap.

b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, pengadaan sarana dan prasara pendukung Gedung kantor, penyediaan jasa pelayanan umum kantor, pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya, penyediaan jasa pemeliharaan, pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan non perizinan, pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan, pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan, sedangkan realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah tidak ada.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Adanya perencanaan, pelaksanaan dan monoring yang baik.
2. Komitmen pimpinan dan pegawai untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya masing – masing yang didukung dengan anggaran yang cukup memadai.
3. Menyelaraskan apa yang akan dianggarkan dengan apa yang akan dikerjakan.
4. Melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya.
5. Menyelaraskan hal – hal yang akan dikerjakan sesuai dengan target kinerja.
6. Mengerjakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja.

7. Melaksanakan evaluasi internal secara berkala.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka pada tahun 2024 perencanaan selanjutnya, perlu diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor – aktor penyebab tersebut, diantaranya : Semua Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada tahun 2024 sudah berjalan sesuai dengan ketentuan, akan tetapi masih banyak yang harus diperhatikan dan di tingkatkan kinerjanya agar sesuai dengan harapan kita, indikator kinerjanya. Pada tahun perencanaan selanjutnya, perlu diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, diantaranya:

1. Meningkatnya kinerja pelayanan terhadap masyarakat.
2. Menemukan dan mengenali kelemahan atau kekurangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik untuk kemudian di tindak lanjuti dengan upaya – upaya perbaikan.
3. Mendapatkan informasi kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
s.d. Tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMEINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SKM	84,50	83,35	84,50	84,85	100	84,50	253,85	63,46
		Nilai SAKIP	67	62,70	67	63,65	95	67	193,2	48,3
	Perencanaan, Penganggaran dan	**Prosentase keselarasan**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**100 %**

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**dokumen perencanaan**								
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen pelaporan yang disusun	7 dok	7 dok	7 dok	7 dok	7 dok	7 dok	7 dok	7 dok
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Prosentase ketepatan penyusunan dokumen pelaporan keuangan**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**
	Penyedia gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan	15 ASN	8 ASN	15 ASN	8 ASN	8 ASN	14 ASN	14 ASN	14 ASN
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Laporann pengelola keuangan yang terbayarkan	8 orang	6 orang	6 orang	6 orang	6 orang	6 orang	6 orang	6 orang
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	Jumlah laporan keuangan yang disusun	8 dok	8 dok	8 dok	8 dok	8 dok	8 dok	8 dok	8 dok

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Prosentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan dan Perlengkapan Kantor yang terpenuhi	1 paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
	Penyedia bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang terpenuhi	8 paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket
	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel	9 unit		9 unit	9 unit	9 unit	9 unit	9 unit	9 uit

	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	2 unit		2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	9 unit	9 unit
	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Prosentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerinta h daerah**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**
	Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah penyedia jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terpenuhi	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun
	Penyedia jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan administrasi perkantoran yang terbayarkan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**

	Penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	9 unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit		9 Unit	9 Unit	9 Unit
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor, rumah dinas dan uala yang terpelihara	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit		2 unit	2 unit	2 unit
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang terpelihara	13 unit	13 unit	13 unit	13 unit		13 unit	13 unit	13 unit
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Prosentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100 %**

	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Peizinan Non Usaha	Jumlah Pelayanan Peizinan Non Usaha yang terlayani	2700	3400	2000	2000	100%	2000		
	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Peizinan	Jumlah pengelola operator siak yang terbayarkan	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang
	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah pengelola SPPT PBB tersalurkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM									
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Prosentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100 %**
	Pelaksanaan tugas forum koordinasi	Jumlah pelaksanaan	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun

	pimpinan di Kecamatan	tugas forkompimca								
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA									
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Prosentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**
	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	13 desa	13 desa	13 desa	13 desa	100 %	13 desa	13 desa	13 desa
	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam penyusunan	13 desa	3 desa	10 desa	10 desa	100 %	13 desa	13 desa	13 desa

		administrasi Tata Pemerintahan Desa								
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa	4 desa	4 desa	4 desa	4 desa	100 %	4 desa	0	0
	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam fangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	13 dok	13 dok	13 dok	13 dok	100 %	13 dok	13 dok	13 dok
	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	13 dok	13 dok	13 dok	13 dok	100 %	13 dok	13 dok	13 dok
	Fasilitasi penyelenggaraan	Jumlah dokumen fasilitasi	13 dok	13 dok	13 dok	13 dok	100 %	13 dok	13 dok	13 dok

	ketentraman dan ketertiban umum	dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum								
	Fasilitasi penyusunan program pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka penyusunan program pelaksanaan PMD	13 dok	13 dok	13 dok	13 dok	100 %	13 dok	13 dok	13 dok
	Koordinasi pendampingan desa diwilayahnya	Jumlah laporan hasil koordinasi pendampingan desa diwilayahnya	13 dok	13 dok	13 dok	13 dok	100 %	13 dok	13 dok	13 dok

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan pelayanannya, Perangkat Daerah mengampu 2 Indikator. Dari 2 indikator tersebut, 2 berstatus tercapai yaitu nilai SKM dan SAKIP walaupun pada prakteknya masih perlu ditingkatkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian/ketidaktercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Mewujudkan transparasi instansi pemerintah.
2. Diperlukan perbaikan dan peningkatan kinerja serta pendisiplinan jam kerja sehingga bisa menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, dapat beroperasi secara efisien, efektif, responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan wilayah kerja sesuai tugas, pokok dan fungsi masing – masing Aparatur Sipil Negara.
3. Dengan telah diberlakukannya e presensi bagi semua ASN akan meningkatkan kedisiplinan jam kerja ASN dan diharapkan akan menghasilkan kinerja yang lebih berkualitas.
4. Diperlukannya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
5. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah khususnya di wilayah Kecamatan Purwanegara, dalam hal ini meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.

Dalam rangka mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut, telah dilakukan upaya-upaya yang meliputi:

1. Diadakannya pembinaan dan pendampingan administrasi ke desa – desa yang dilakukan oleh Tim Kecamatan sesuai jadwal yang dtentukan, minimalnya 2 kali dalam 1 tahun.
2. Himbauan dari atasan kepada ASN yang ada untuk lebih meningkatkan kualitas kinerjanya berdasarkan tupoksinya dan meminimalisir indisipliner.
3. Melakukan himbauan di setiap kegiatan, rapat, upacara untuk mendukung dan berpartisipasi aktif terhadap rencana kerja Kecamatan seperti pelunasan PBB secara tepat waktu tanpa adanya penyelewengan dari petugas pungut pajak dan mempedomani 12 etika budaya malu aparatur pemerintah desa sehingga aparatur pemerintah desa akan lebih loyal dalam bekerja sesuai tupoksinya dan tertib administrasi pemerintahan desa dan meningkatkan kedisiplinan jam kerja.

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK LPPD	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
1.	Nilai SAKIP Kecamatan			65	66	67	67	68	62,70 (B)	63,50 (B)	67 (B)	68	
2.	Nilai SKM Kecamatan			82,40	83.35	84.35	84,50	85	82,40	84,85	84,85	85	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan urusan pemerintahan dalam 3 urusan, yaitu membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa serta tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan berdasarkan hasil evaluasi, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk tahun 2024 mencakup 4 urusan tersebut. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah diantaranya adalah:

1. Kurangnya etos kerja dan kesadaran dari diri sendiri tentang kedisiplinan jam kerja serta dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai aparatur pemerintah
2. Terbatasnya sarana dan prasarana aparatur yang ada di Kecamatan sehingga menghambat pelaksanaan tata pemerintahan yang baik di Kecamatan. (Belum meratanya fasilitas laptop untuk pejabat struktural dan staf di Kecamatan Purwanegara sehingga menghambat penyetoran yang sesuai dengan deadline yang ditentukan)
3. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan, melaksanakan kewajiban membayar pajak dengan tepat waktu serta adanya penyelewengan dari petugas pungut pajak yang tidak langsung menyetorkannya ke bank, apatisme dalam mengikuti musrenbang yang dilaksanakan baik di desa maupun tingkat Kecamatan.

Permasalahan tersebut, jika tidak diselesaikan dapat menjadi *constraint* dalam pencapaian visi dan misi Bupati maupun capaian indikator lainnya. Beberapa dampak dari adanya permasalahan dan hambatan tersebut meliputi:

1. Sumber Daya Manusia yang ada tidak semua memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan sehingga dalam pelaksanaan tugas,

pokok dan fungsi tidak relevan dengan uraian tugas dan menghambat tercapainya indikator kerja.

2. Beberapa sarana dan prasarana kelembagaan tidak dapat digunakan karena rusak ataupun karena belum memadai, dan banyak pelaksana serta pejabat struktural yang belum mendapatkan fasilitas laptop sehingga menghambat ketepatan penyetoran data maupun laporan.
3. Kurangnya keberhasilan dalam pencapaian sasaran pelayanan terhadap masyarakat serta kurang disiplinnya dalam penerapan jam kerja sehingga pelayanan langsung terhadap masyarakat secara umum belum optimal.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi, peningkatan kualitas birokrasi, dan meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan pengguna layanan akan meningkatkan kebutuhan akan adanya penyediaan produk layanan yang semakin baik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi-inovasi dalam menunjang peningkatan pelayanan publik secara kontinyu. Beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, yaitu:

1. Meningkatkan mutu pelayanan dan mendisiplinkan jam kerja ASN dengan aplikasi e-presensi dan e- kinerja sehingga pelayanan langsung terhadap masyarakat umum akan lebih optimal.
2. Menambah sarana dan prasarana yang memadai untuk fasilitasi pelaksana dan pejabat struktural yang ada di Kecamatan Purwanegara sehingga ketepatan penyetoran data dan laporan akan lebih terwujud.
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan tertib administrasi desa dengan cara pengawasan dan pendampingan langsung ke desa - desa di seluruh wilayah Kecamatan Purwanegara oleh tim kecamatan dengan anggaran yang sesuai kebutuhan.
4. Mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta meningkatkan nilai survey kepuasan masyarakat serta meningkatkan pelayanan prima tentunya dengan ramah dan sopan.

5. Tersedianya anggaran yang cukup di tahun berjalan tanpa adanya refocusing ataupun rasionalisasi sehingga semua program kegiatan yang sudah di targetkan akan tercapai 100%.

Berdasarkan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan tersebut, dapat diinventarisasi beberapa isu strategis. Inventarisasi isu-isu strategis tahun 2026 didapatkan dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal Kabupaten Banjarnegara sampai dengan tahun 2026. Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan pembangunan. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 202, sebagai berikut:

1. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana baik secara kualitas maupun kwantitas, belum meratanya fasilitas laptop bagi pejabat struktural maupun staf.
2. Belum tersedianya lemari file, LCD, AC dan CCTV.
3. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan dengan tepat waktu serta tidak adanya penyelewengan dari petugas pungut pajak yang tidak langsung menyetorkan pembayaran pajak dari masyarakat ke bank.
4. Masih terbatasnya kualitas dan kwantitas pegawai yang ada di Kecamatan Purwanegara sehingga pengoptimalan tugas dan fungsi aparatur pemerintah kurang bisa tercapai sehingga menyebabkan kelambanan birokrasi.
5. Kurangnya pagu anggaran di tahun berjalan sehingga tidak semua program kegiatan bisa dilaksanakan secara 100% dan target yang ditentukan juga tidak tercapai 100%.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Tahun 2005-2025 dan mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Berdasarkan hal tersebut, prioritas arah kebijakan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2024 meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggeraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
4. Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024, anggaran belanja yang dialokasikan untuk Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara diusulkan sebesar Rp 2.474.000.000,- yang terbagi dalam 5 program 11 kegiatan dan 30 sub kegiatan. Hanya saja sudah direfocusing 2 kali menjadi Rp. 1.852.328.239 Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang oleh Pemerintah Kaupaten Banjarnegara dilaksanakan mulai Tahun 2024. Secara rinci analisis kebutuhan anggaran belanja program kegiatan dan sub kegiatan terhadap Rancangan Awal RKPD tersaji pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 Kabupaten Banjarnegara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp. 000)**	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp. 000)**	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	UNSUR KEWILAYAHAN				2.078.986.022						
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Purwanegara	Persentase desa yang tertib administrasi desa	100%	59.137.500		Kec. Purwanegara	Persentase desa yang tertib administrasi desa	100%	66.500.000	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Purwanegara	Persentase penanganan konflik diwilayah	100%	16.200.000		Kec. Purwanegara	Persentase penanganan konflik diwilayah	100%	16.200.000	
	Program Penunjang Urusan	Kecamatan	Persentase tingkat ketercapa	100%	1.837.816.022		Kec. Purw	Persentase tingkat	100%	1.912.703.890	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp. 000)**	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp. 000)**	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Purwanegara	ian kinerja perangkat daerah				anegara	ketercapaian kinerja perangkat daerah			
	Program Pemberdayaan Masyarat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Purwanegara	Persentase Lembaga Desa/ Kelurahan di Kecamatan yang Terfasilitasi	100%	3.937.500		Kecamatan Purwanegara	Persentase Lembaga Desa/ Kelurahan di Kecamatan yang Terfasilitasi	100%	3.937.500	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan	Kecamatan Purwanegara	Persentase layanan yang sesuai	100%	125.859.000		Kec. Purwanegara	Persentase layanan yang	100%	127.200.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp. 000)**	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp. 000)**	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	dan Pelayanan Publik		dengan standar pelayanan					sesuai dengan standar pelayanan			

2.3 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2026

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Purwanegara

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Purwanegara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Hasil RKPD SIPD			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**1**				**KECAMATAN**													
7	1	06			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**													
7	1	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa													
7	1	06	2.01	02	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Persentase desa yang tertib administrasi desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan perturan desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan perturan desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Purwanegara	100 %	32 dok		9.600.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	9.600.000

7	1	06	2.01	09	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib administrasi desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa	Kecamatan Purwanegara	100 %	16 dok		9.600.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	9.600.000
7	1	06	201		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Persentase desa yang tertib administrasi desa	Jumlah dokumen fasilitsi dalam rangka pemilihan kepala desa	Jumlah dokumen fasilitsi dalam rangka pemilihan kepala desa	Kecamatan Purwanegara		0 desa		-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			-
7	01	06	201	03	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa	Persentase desa yang tertib administrasi desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa	Kec. Purwanegara		32 dok		7.300.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			7.300.000

7	01	06	201	11	Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase desa yang tertib administrasi desa umum	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kec. purwanegara		6 dok		10.000.000		Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum			10.000.000
7	1	06	2.01	11	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase desa yang tertib administrasi desa umum	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Purwanegara		1 dok		10.000.000		Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		100 %	10.000.000
7	1	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Persentase desa yang tertib administrasi desa umum	Jumlah Laporan hasil Koordinasi Pendampingan desa di wilayahnya	Jumlah Laporan hasil Koordinasi Pendampingan desa di wilayahnya	Kecamatan Purwanegara		12 lap		10.000.000		Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		100 %	10.000.000
7	**1**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**													
7	**1**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**													

7	1	05	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase penangan konflik diwilayah	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Kec. purwanegara		6 dok	1 th	16.200.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	16.200.000
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**													
7	**1**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Pengganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**													
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah	Kec Purwanegara	100%	14 dokumen	1 Tahun	3.300.200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tersusunnya dokumen perencanaan	100 %	3.300.200
7	1	1	2.01	6	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Kecamatan Purwanegara	100%	13 dokumen	1 tahun	4.100.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	4.100.000
7	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**													
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase tingkat ketercapaian kinerja	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kecamatan Purwanegara		13 orang/ bulan	1 tahun	1.350.696.890		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	1.350.696.890

						perangkat daerah												
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Purwanegara		12 dok		24.146.200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	24.146.200
7	1	1	2.02	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Smesteran SKPD	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	Kecamatan Purwanegara		16 dok		2.500.200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	2.500.200
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi umum Perangkat Daerah**													
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Kecamatan Purwanegara		1 paket		8.001.300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	8.001.300

7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Purwanegara		7 paket		72.968.500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	72.968.500
7	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**													
7	1	1	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Purwanegara		4 unit		68.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 unit(3 laptop 1 genset)	68.000.000
7	1	1	207	11	Pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	Jumlah unit Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Jumlah unit Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Kec. Purwanegara		-		-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umu			-
7	1	01	207	11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor dan bangunan lainnya	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya	Kec. Purwanegara		4 unit		26.500.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umu			26.500.000
7	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**													
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, listrik yang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Purwanegara		12 paket		16.800.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	16.800.000

						terpenuhi												
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan dan Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah laporan penyediaan dan Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Purwanegara		12 lap		124.441.200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			124.441.200
7	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**													
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kecamatan Purwanegara		8 unit		42.249.400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	42.249.400
7	1	1	2.09	09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Kecamatan Purwanegara		3 unit		125.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	125.000.000s
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Layanan yang Sesuai dengan Standar Pelayanan	Jumlah Sarana dbn Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Jumlah Sarana dbn Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Kecamatan Purwanegara		10 unit		10.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	10.000.000

					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK													
7	**1**	**2**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**													
7	1	2	2.3	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Persentase Layanan yang Sesuai dengan Standar Pelayanan	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Kecamatan Purwanegara		1 lap				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanana perizinan Non-usaha	Persentase Layanan yang Sesuai dengan Standar Pelayanan	Jumlah Dokumen Non-Perjanjian usaha yang Dilaksanakan	Jumlah Dokumen Non-Perjanjian usaha yang Dilaksanakan	Kecamatan Purwanegara		12 dok		3.600.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	3.600.000
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Non perijinan	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non-Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non-Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Kecamatan Purwanegara		12 dok		3.600.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	8.550.000
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Purwanegara		1 lap		120.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	120.000.000
7	01	03			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**													

7	01	03	2	01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**													
7.01.03.2.01.0003					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Diwilayah Kecamatan	Persentase Lembaga Desa/ Kelurahan di Kecamatan yang Terfasilitasi	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat DiWilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat DiWilayah Kecamatan	Kecamatan Purwanegara	100%	1 lap						100%	
					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Lembaga Desa/ Kelurahan di Kecamatan yang Terfasilitasi	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Purwanegara	100%								
7	01	03	2	02	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**													
7.01.03.2.03.0002					Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Lembaga Desa/ Kelurahan DiKecamatan yang Terfasilitasi	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kecamatan Purwanegara	100%	2 lembaga						100%	
												TOTAL	**2.130.603.890**					**2.130.603.890**

Berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2026, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan yaitu:

1. Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor masih sangat minim dan usianya sudah tua sehingga sering mengalami kerusakan;
2. Bangunan gedung kantor banyak yang sudah mengalami kerusakan;
3. Kapasitas dan Kompetensi perangkat Desa masih rendah.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan musrenbang kecamatan dan forum konsultasi publik telah disampaikan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui aplikasi SIPD. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1.	Pembangunan Jalan Dusun Kalimendong	Desa Danaraja	Prosentase pelaksanaan perbaikan jalan rusak	200.000.000	BanProv Bankeu
2.	Pembangunan Jalan Dusun Winong	Desa Karanganyar	Prosentase pelaksanaan perbaikan jalan rusak	200.000.000	
3	Pembangunan Jalan Dusun Purbasana Kalisawah	Desa Parakan	Prosentase pelaksanaan perbaikan jalan rusak	200.000.000	
4.	Pembangunan Jalan Dusun Penusupan Desa Kalipelus	Desa Kalipelus	Prosentase pelaksanaan perbaikan jalan rusak	200.000.000	
5.	Pembangunan Jalan Desa Merden-Kalitengah	Desa Merden-Kalitengah	Prosentase pelaksanaan perbaikan jalan rusak	10.000.000 000	
6.	Pembangunan Jalan Petir Krinjing	Desa Petir	Prosentase pelaksanaan	3.000.000.0 00	

			perbaikan jalan rusak		
7	Pembangunan Jalan Pucungbedug	Desa Pucungbedug	Prosentase pelaksanaan perbaikan jalan rusak	3.000.000.000	
8	Pembangunan Jalan Desa Gumiwang	Desa Gumiwang	Prosentase pelaksanaan perbaikan jalan rusak	200.000.000	
9	Pembangunan Jalan Wiradipa-Bulukuning	Desa Kaliajir	Prosentase pelaksanaan perbaikan jalan rusak	900.000.000	
10	Pembangunan Jalan Rabat Beton Kemojing-Lemah	Desa Petir	Prosentase pelaksanaan perbaikan jalan rusak	200.000.000	
11	Pembangunan Jalan Perlimaan-Kalisalak	Desa Mertasari	Prosentase pelaksanaan perbaikan jalan rusak	200.000.000	
12	Pembangunan Jalan Perlimaan-Kalisalak	Desa Mertasari	Prosentase pelaksanaan perbaikan jalan rusak	200.000.000	
13	Pembangunan Jalan Desa Purwonegoro Kulon	Desa Purwonogoro	Prosentase pelaksanaan perbaikan jalan rusak	200.000.000	
14	Pembangunan Jalan Desa Kutawuluh	Desa Kutawuluh	Prosentase pelaksanaan perbaikan jalan rusak	200.000.000	

2.6 Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan hasil reses anggota DPRD, melalui aplikasi SIPD telah disampaikan usulan program dan kegiatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.6

Usulan Program dan Kegiatan dari Pokok-Pokok Pikiran DPRD

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	NIHIL				

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tema Pembangunan Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” dengan prioritas pembangunan nasional sebagai berikut :

1 Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, dengan program prioritas sebagai berikut :
   a. Perlindungan sosial dan penguatan tata kelola kependudukan;
   b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
   c. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kependudukan;
   d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
   e. Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda;
   f. Pengentasan kemiskinan; dan
   g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.
2 Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, dengan program prioritas sebagai berikut :
   a. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
   b. Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
   c. Memperkuat moderasi beragama;
   d. Meningkatkan budaya literasi, inovasi dan kreativitas.
3 Memperkuat stabilitas polhukanham dan transformasi pelayanan publik, dengan program prioritas sebagai berikut :
   a. Konsolidasi Demokrasi;
   b. Optimalisasi kebijakan luar negeri;
   c. Penegakannhukum nasional;
   d. Reformasi birokrasi dan tata kelola; dan
   e. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Purwanegara tahun 2026 disusun dengan memperhatikan penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Selain itu, pengembangan isu-isu strategis daerah juga disusun dengan

melakukan penelaahan terhadap isu-isu strategis nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 maupun kebijakan strategis nasional lainnya. Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahun 2026 dijabarkan ke dalam semua urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten Banjarnegara, adalah :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 6 Kegiatan dan 15 sub kegiatan.
b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayan Publik
   Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terdiri dari 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan.
c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
   Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan
d. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
   Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdiri dari 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan.
e. Program Pembinaan dan Pengawasan dan Pemerintah Desa yang terdiri dari 1(satu) Kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan yaitu Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang diarahkan pada sub kegiatan Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa,Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa, Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

3.3 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagai bagian dari tahapan pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005- 2025, maka Renja Perangkat Daerah mempedomani Renstra PD Tahun 2023-2026 RPJPD Tahun 2005-2025, Untuk itu diperlukan pemahaman mengenai visi RPJPD Tahun 2005- 2025. Visi merupakan rumusan

umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah. Visi pembangunan dalam RPJPD Tahun 2005-2025 adalah :

BANJARNEGARA MAJU BERBASIS PERTANIAN

Visi Pembangunan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005- 2025 ini mengarah pada pencapaian tujuan, cita-cita dan harapan masyarakat Kabupaten Banjarnegara. Visi pembangunan daerah tersebut harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, kesejahteraan, dan kelestarian yang ingin dicapai. Oleh karena itu, perlu kiranya diberikan penjelasan makna visi untuk mendapatkan kesamaan persepsi tentang muatan substansi filosofis yang terkandung, sehingga segenap pemangku kepentingan secara sinergis dan optimal dapat memberikan kontribusi dalam rangka pencapaiannya.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan, sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Dengan kata lain tujuan dan sasaran merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Tujuan dan sasaran dalam Renja Perangkat Daerah Kecamatan Purwanegara Tahun 2023-2026 diuraikan sebagai berikut:

a. Tujuan yang ke-5 adalah Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
b. Tujuan yang Ke 6 adalah Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Sasaran: Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program pada perangkat daerah merupakan program prioritas dalam Renstra 2023-2026. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPD selanjutnya dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Pemilihan untuk masing-masing program/ kegiatan di Kecamatan Purwanegara adalah Rencana Program dan kegiatan prioritas pembangunan tahun 2024 dijabarkan ke dalam semua urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten Banjarnegara yaitu sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 5 kegiatan yang diarahkan pada :
   a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   e. Pengadaan Gedung kantor atau Bangunan Lainnya
   f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik terdiri dari 2 kegiatan yaitu :
   a. Koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum.
   b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat.
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum terdiri dari 1 kegiatan yaitu Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan 1 sub kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdiri dari 2 kegiatan yaitu :
   a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa
   b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan 1 kegiatan yaitu Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa dengan 6 sub kegiatan yaitu :
   a. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
   b. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa.
   c. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
   d. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa.
   e. Fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan pembangunan desa.
   f. Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
   g. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
   h. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Renja Perangkat Daerah selanjutnya menjadi platform operasional bagi Perangkat Daerah dalam menjalankan programnya dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka sasaran pembangunan daerah tahun 2024. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026 dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disepakati.
2. Kerangka pendanaan dalam Renja Perangkat Daerah masih bersifat sementara, sehingga masih dimungkinkan terjadi perubahan pagu yang disebabkan oleh pengurangan, penambahan, dan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan maupun antar sub kegiatan dalam kerangka penyusunan anggaran secara terpadu dan berbasis kinerja.
3. Renja Perangkat Daerah menjadi acuan bagi Kepala Perangkat Daerah dan segenap jajarannya serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, serta menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal : 8 Agustus 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan yang diatur melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan pembentukan tim penyusun, penelaahan rancangan awal RKPD, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, hingga pada penyempurnaan berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang RKPD. Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, penyusunan Renja Perangkat Daerah juga mengacu pada Renja Kementerian/Lembaga terkait, serta Renja Perangkat Daerah Provinsi terkait. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2. Landasan Hukum

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (lembaran Negara tahun 2014 nomor 244)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);

26. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 14);
27. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 15);

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun dengan maksud untuk:

a. Menjabarkan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026-2030 ke dalam rencana program kegiatan prioritas Tahun 2026 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Renja K/L Tahun 2026 dan Renja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;
b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerapan anggaran berbasis kinerja.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

a. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA-DPA dalam Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2026, yang dalam penyusunannya didahului dengan menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026;
b. Sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Tahun 2026;
c. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun berdasarkan sistematika yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah.

BAB 2 : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dan atau pokok-pokok DPRD.

BAB 3 : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan tahun 2026.

BAB 4 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran RKPD.

BAB 5 : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah meliputi urusan pemerintahan unsur Kewilayahan Bidang Urusan Kecamatan.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 terdiri dari 4 program, 10 kegiatan, dan 22 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 2,211,708,820,00 dengan fokus utama pada mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good government) dalam kehidupan berpolitik yang demokratis dan bertanggung jawab. Program/kegiatan/sub kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung tujuan daerah (sebelum adanya penyelarasan tanggal 2 Januari 2024) yang meliputi:

1. **Meningkatnya kualitas layanan publik**.
2. **Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;**

Dari 5 program, 10 kegiatan, dan 22 sub kegiatan yang dalam Renja Perangkat Daerah tersebut, program/kegiatan/sub kegiatan yang disetujui untuk dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024 terdiri dari 4 program, 10 kegiatan, dan 22 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 1.883.816.574.

Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024, terjadi beberapa perubahan yang meliputi penambahan atau pengurangan pagu, penghapusan, penambahan atau pengurangan program/kegiatan/sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Perubahan tersebut mengubah rincian dalam Renja Perangkat Daerah menjadi 4 program, 10 kegiatan, dan 22 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 1.705.071.344,00. Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2024, program kegiatan/subkegiatan yang bertambah anggarannya adalah Penyediaan Bahan Logistik Kantor bertambah

sebesar Rp 2.500.000,00, sedangkan Program/kegiatan/subkegiatan yang bekurang meliputi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah anggaran sebelum perubahan Rp 1.730.566.574,00 dan anggaran setelah perubahan Rp 1.554.321.344,00 yang terdiri dari Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah anggaran sebelum perubahan Rp 1.432.408.674,00 dan anggaran setelah perubahan Rp 1.1.253.665.814,00 dari Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Daerah anggaran sebelum perubahan Rp 1.403.717.874,00 dan anggaran setelah perubahan Rp 1. .224.975.014,00. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah anggaran sebelum perubahan Rp 41.079.100,00 dan anggaran setelah perubahan Rp 41.076.730,00, terdiri dari Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran sebelum perubahan Rp 18.097.500,00 dan anggaran setelah perubahan Rp 19.095.130,00.

Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan anggaran sebelum perubahan Rp 50.000.000,00 dan anggaran setelah perubahan Rp 47.500.000,00 meliputi Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Pilkades sebelum perubahan Rp 50.000.000,00 dan anggaran setelah perubahan Rp 47.500.000,00.

Dinamika yang terjadi selama tahun 2024 turut mempengaruhi keberhasilan pencapaian Renja Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2024, tercatat adanya hasil yang baik karena semua target tercapai bahkan ada yang pencapaian melampaui target, hal tersebut dikarenakan adanya komitmen dan integritas yang tinggi dari para aparatur pemerintah kecamatan.

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada, semua program/kegiatan/sub kegiatan sesuai target.

b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi Program

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dan Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Adanya perencanaan, pelaksanaan, monitoring yang baik.
2. Menyelaraskan hal-hal yang akan dikerjakan dengan target kinerja
3. Menyelaraskan apa yang dianggarkan dengan apa yang akan dikerjakan
4. Mengerjakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja
5. Melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, pada tahun 2024 keseluruhan pencapaian kinerja telah tercapai sesuai target. Pada tahun perencanaan selanjutnya, perlu diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk pencapaian target kinerja ,diantaranya:

1. Koordinasi antar Kasi dan Sub Bagian
2. Prioritas Perencanaan yang tepat sasaran, agar kegiatan bisa berjalan sesuai perencanaan

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
s.d. Tahun 2024* Kabupaten Banjarnegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR KEWILAYAHAN									
	Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	**Nilai IKM**								
	SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Efektivitas dan Transparasi Layanan Publik	**Survey Masyarakat Kecamatan**	**86,83**	**85,22**	**85,50**	**86,83**	**102%**	**86,83**	**86,83**	**100%**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten /kota yang terlaksana**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

	Perencanaan, Penganggaran daen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Pelaporan yang tersusun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	100%	8 dokumen	8 dokumen	
	Koordinasi dan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	5 laporan	7 dokumen	5 laporan	5 laporan	100%	5 laporan	5 laporan	
	Administrasi Keuangan perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Persngkat Daerah yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji ASN yang terbayarkan	13 orang	13 orang	13 orang	13 orang	100%	13 orang	13 orang	100%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	50 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	12 dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	100%	14 Laporan	14 Laporan	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
	Penyediaan Bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	10 paket	10 paket	10 paket	10 paket	100%	10 paket	10 paket	100%

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 unit	0 unit	1 unit	1 unit	100 %	0 unit	0 unit	100%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1 unit	2 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	1 unit	0	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	2 unit	0	0	0	0	2 unit	2 unit	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 unit	2 unit	4 unit	4 unit	100%	5 unit	5 unit	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 unit	1 unit	3 unit	3 unit	100%	1 unit	1 unit	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlakasana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya Air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	2 orang	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daaerah yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan peroranagn dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang diperlihara dan dibayarkan pajaknya.	9 unit	9 unit	9 unit	9 unit	100%	9 unit	9 unit	100%
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	100%	4 unit	4 unit	100%
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya	Pemeliharaan/rehab sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainya	15 unit	15 unit	15 unit	15 unit	100%	15 unit	15 unit	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**100**	**93,98**	**100**	**106,75**	**100%**	**100**	**100**	**100%**
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Non Perijinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Terkait dengan Non Perijinan	12 laporan	2000 dok	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perijinan Non Usaha	Jumlah dokumen Pelayanan Perijinan Non Usaha yang di Laksanakan.	162 dokumen	162 dokumen	162 dokumen	164 dokumen	101%	162 dokumen	162 dokumen	100%

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan	1 laporan	4 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
	Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum	Persentase Terselenggaranya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemelihahaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 dokumen	8 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Tujuan : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	**Nilai SAKIP**								
	Sasaran Strategis : Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	**Nilai SAKIP Kecamatan**	**71,35**	**67,95**	**68,00**	**71,35**	**105%**	**71,35**	**71,35**	100%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	**Prosentase Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	34 dokumen	34 dokumen	34 dokumen	34 dokumen	100%	34 dokumen	34 dokumen	100%
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	17 dokumen	17 dokumen	17 dokumen	17 dokumen	100%	17 dokumen	17 dokumen	100%
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	17 dokumen	17 dokumen	17 dokumen	17 dokumen	100%	17 dokumen	17 dokumen	100%
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 dokumen	0 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	0	0	0
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	17 dokumen	2 dokumen	17 dokumen	17 dokumen	100%	17 dokumen	17 dokumen	100%
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah dokumen yang di fasilitasi dalam rangka Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	17 dokumen	17 dokumen	17 dokumen	17 dokumen	100%	17 dokumen	17 dokumen	100%
	Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Jumlah Laporan hasil koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan	17 laporan	17 laporan	17 laporan	17 laporan	100%	17 laporan	17 laporan	100%

		pedesaan di wilayah kecamatan								
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah	**Persentas e Penyeleng garaan Pemerinta h sesuai Pelaksana an Tugas Kepala Daerah yang terlaksana**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen	10 dokmen	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	4 dokumen	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan pelayanannya, Perangkat Daerah mengampu 2 Indikator. Dari 2 indikator tersebut berstatus tercapai dan melebihi target yaitu Indikator Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan pada tahun 2024 tercapai 86,83 atau 102% dari target dan Indikator Nilai SAKIP Kecamatan tercapai nilai 71,35 atau 104,93%. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Merencanakan target kinerja;
2. Menyelaraskan dokumen perencanaan sehingga data yang disajikan merupakan data yang akuntabel;
3. Koordinasi internal perangkat daerah dengan maksimal sehingga kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan perencanaan yang ada.
4. Koordinasi Pemerintah Kecamatan dan Desa, Forkompinca dan Linsek yang telah berjalan dengan baik;
5. Komitmen Tim Pemungut Pajak dalam pelaksanaan tugas;
6. Komitmen dari para aparatur kecamatan untuk memberikan pelayanan yang prima sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

Dalam rangka pencapaian target kinerja tahun berikutnya, beberapa hal yang harus diupayakan meliputi:

1. Mengevaluasi, menelaah, menyelaraskan dokumen perencanaan agar tercapai target kinerja;
2. Mengevaluasi dan memperbaiki komunikasi serta koordinasi internal maupun eksternal perangkat daerah sehingga kegiatan dapat berjalan selaras dengan perencanaan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah baik.

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara (Setelah penyelarasan)

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK LPPD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Nilai SAKIP Kecamatan			65,01	68,00	71,35	71,35	67,95	71,35	71,35	72,00	
2.	Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan		-	85,20	85,50	85,75	86	85,22	86,83	86,83	87	

*) Kolom 3 diisi berdasarkan IKK outcome dalam lampiran Permendagri 18/20

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan urusan pemerintahan dalam 1(satu) urusan, yaitu Urusan Kewilayahan. Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPD Tahun 2023-2026, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk tahun 2026 mencakup 1 (satu) urusan tersebut. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah diantaranya adalah:

1. Pelayanan administrasi kependudukan masih belum optimal dan belum sepenuhnya berbasis digital
2. Koordinasi pembangunan antar-OPD dan antar-kelurahan/ desa belum berjalan efektif.
3. Usulan kelurahan/ desa dalam forum musrenbang kecamatan masih dominan berkaitan dengan pembangunan internal kelurahan/ desa, belum diarahkan pada usulan yang bersifat komprehensif dan mendukung proiritas pembangunan tingkat kabupaten
4. Kerentanan terhadap bencana masih tinggi dan kesiapsiagaan wilayah belum optimal.
5. Pelayanan publik belum sepenuhnya cepat, efektif, dan berbasis digital, sehingga masih terdapat keluhan masyarakat terkait waktu dan kualitas layanan.

Permasalahan tersebut, jika tidak diselesaikan dapat menjadi *constraint* dalam pencapaian visi dan misi Bupati maupun capaian indikator lainnya. Beberapa dampak dari adanya permasalahan dan hambatan tersebut meliputi:

1. Kurang tercapainya suatu kegiatan sesuai indikator kinerja
2. Tidak tercapainya sasaran kerja
3. Belum optimalnya hasil pekerjaan

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi, peningkatan kualitas birokrasi, dan meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan pengguna layanan akan meningkatkan kebutuhan akan adanya penyediaan produk layanan yang semakin baik. Oleh karena itu,

diperlukan inovasi-inovasi dalam menunjang peningkatan pelayanan publik secara kontinyu. Beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, yaitu:

1. Kondisi geografis wilayah kecamatan yang berbukit-bukit dan tanah yang labil/ mudah bergerak mengakibatkan kerusakan infrastruktur transportasi dan bencana alam tanah longsor kerap kali terjadi sehingga menghambat mobilitas ekonomi dan sosial masyarakat
2. Tuntutan masyarakat semakin beragam untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas
3. Masih adanya aparat pemerintahan dan kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipasif.
4. Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan terhadap masyarakat
5. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
6. Melimpahnya potensi sumberdaya alam yang dapat dikelola untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
7. Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mempermudah upaya meningkatkan profesionalisme.
8. Adanya dukungan koordinasi lintas sektor di wilayah kecamatan yang mendukung tercapainya sinkronisasi dan integrasi kegiatan lingkup kecamatan antara lain kegiatan Konferensi dinas/rapat koordinasi Forkompinca, UPT/Instansi dan Kepala Desa secara rutin di tingkat Kecamatan.

Berdasarkan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan tersebut, dapat diinventarisasi beberapa isu strategis. Inventarisasi isu-isu strategis tahun 2026 didapatkan dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal Kabupaten Banjarnegara sampai dengan tahun 2025. Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan pembangunan. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2026, sebagai berikut:

1. Pelayanan publik kurang optimal

2. Kurang optimalnya pembinaan ke Kelurahan/desa
3. Kurang cepatnya penanganan permasalahan di Kelurahan/desa
4. Belum optimalnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Tahun 2026 merupakan pelaksanaan tahun kesatu RPD Tahun 2026-2030. Dalam RPD Tahun 2026-2030, prioritas arah kebijakan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2026 meliputi:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah urusan kewilayahan
2. Meningkatnya efektivitas koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan desa/kelurahan

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 Kabupaten Banjarnegara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	**Tujuan : Meningkatnya aksesibilitas layanan pemerintah dalam urusan kewilayahan di Kecamatan Wanayasa**	**Kecamatan Wanayasa**	**IPP**	**51,00**		**Tujuan : Meningkatnya aksesibilitas layanan pemerintah dalam urusan kewilayahan di Kecamatan Wanayasa**	**Kecamatan Wanayasa**	**IPP**	**51,00**		
1.1	**Sasaran Strategis : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah urusan kewilayahan**	**Kec Wanayasa**	**Nilai SAKIP Kecamatan**	**BB (72,40)**		**Sasaran Strategis : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah urusan kewilayahan**	**Kec Wanayasa**	**Nilai SAKIP Kecamatan**	**BB (72,40)**		
1.1.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	kec Wanayasa	**Persentase Penunjang Urusan Pemeritnahan Daerah Kabupaten yang terlaksana**	**100%**	**2.172.431.288**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	kec Wanayasa	**Persentase Penunjang Urusan Pemeritnahan Daerah Kabupaten yang terlaksana**	**100%**	**1.684.977.660**	
1.1.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat daerah	kec Wanayasa	terpenuhinya perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja kecamatan Wanayasa	100%	4.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat daerah	kec Wanayasa	terpenuhinya perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja	100%	3..517.400	

								kecamatan Wanayasa			
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	kec Wanayasa	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	8 dokumen	2.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	kec Wanayasa	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	8 dokumen	1.317.400	
b.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kineja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	kec Wanayasa	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kineja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	kec Wanayasa	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	2.200.000	
1.1.1.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	kec Wanayasa	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Persngkat Daerah	100%	1.879.712.800	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	kec Wanayasa	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Persngkat Daerah	100%	1.478.041.682	
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	kec Wanayasa	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 orang	1.851.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	kec Wanayasa	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 orang	1.451.890.782	
B	Pelaksanaan Penataan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	kec Wanayasa	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 dokumen	24.700.000	Pelaksanaan Penataan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	kec Wanayasa	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 dokumen	23.761.900	
c.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	kec Wanayasa	Jumlah Laporan	14 Laporan	4.012.800	Koordinasi dan Penyusunan	kec Wanayasa	Jumlah Laporan	14 Laporan	2.389.000	

	Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD		Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD		Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
1.1.1.3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	kec Wanayasa	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100%	130.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	kec Wanayasa	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100%	78.227.000	
a.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	kec Wanayasa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	10.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	kec Wanayasa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	5.000.000	
b.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	kec Wanayasa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 paket	120.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	kec Wanayasa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 paket	73.227.000	
1.1.1.4.	Pengadaan Barang Milik Daerah	kec Wanayasa	Tersedianya Pengadaan Barang Milik	100%	145.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	kec Wanayasa	Tersedianya Pengadaan Barang Milik	100%	11.600.000	

	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Pemerintahan Daerah		Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
a.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	kec Wanayasa	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang Disediakan	1 unit	20.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	kec Wanayasa	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang Disediakan	2 unit	111.600.000	
b.	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya	kec Wanayasa	Jumlah paket sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya	2 unit	25.000.000	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya	kec Wanayasa	Jumlah paket sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya	0 unit	0	
c.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec Wanayasa	Jumlah Unit Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	0 unit	0	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec Wanayasa	Jumlah Unit Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	0 unit	0	
1.1.1.5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kec Wanayasa	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan	100%	57.793.368	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kec Wanayasa	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan	100%	57.767.628	
a.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	kec Wanayasa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	12 laporan	13.200.000	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	kec Wanayasa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	12 laporan	13.200.000	

			Air dan Listrik yang Disediakan					Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
b.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	kec Wanayasa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	44.593.368	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	kec Wanayasa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	44.567.628	
1.1.1.6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daaerah	kec Wanayasa	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daaerah sesuai ketentuan	100%	55.925.120	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daaerah	kec Wanayasa	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daaerah sesuai ketentuan	100%	55.823.950	
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	kec Wanayasa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	47.050.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	kec Wanayasa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	47.049.950	
b.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	kec Wanayasa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	4 Unit	4.074.920	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	kec Wanayasa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	4 Unit	4.074.000	

			Dipelihara/Direhabilitasi					Dipelihara/Direhabilitasi			
c.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	kec Wanayasa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 unit	4.800.200	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	kec Wanayasa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 unit	4.700.000	
1.1.2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	kec Wanayasa	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**100%**	87.917.100	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	kec Wanayasa	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**100%**	**87.917.200**	
1.1.2.1	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	kec Wanayasa	Terselenggaranya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum	100%	1.000.000	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	kec Wanayasa	Terselenggaranya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum	100%	1.000.000	
a.	Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	kec Wanayasa	Jumlah Dokumen Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemelihahaan Sarana dan Prasarana	1 dokumen	1.000.000	Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	kec Wanayasa	Jumlah Dokumen Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemelihahaan Sarana dan Prasarana	1 dokumen	1.000.000	

			Pelayanan Umum					Pelayanan Umum			
1.1.2.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	kec Wanayasa	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	86.917.100	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	kec Wanayasa	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	86.917.200	
a.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perijinan Non Usaha	kec Wanayasa	Jumlah dokumen Pelayanan Non Perijinan Usaha yang di Laksanakan.	12 dokumen	2.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perijinan Non Usaha	kec Wanayasa	Jumlah dokumen Pelayanan Non Perijinan Usaha yang di Laksanakan.	12 dokumen	2.000.000	
b.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Non Perijinan	kec Wanayasa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Terkait dengan Non Perijinan	12 laporan	3.600.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Non Perijinan	kec Wanayasa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Terkait dengan Non Perijinan	12 laporan	3.600.000	
c.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	kec Wanayasa	Jumlah dokumen Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan	1 Dokumen	81.317.100	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	kec Wanayasa	Jumlah dokumen Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan	1 Dokumen	81.317.200	
1.2	**Meningkatnya Efektivitas koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan desa/kelurahan**	**Kec Wanayasa**	**Indeks Desa di Wilayah Kecamatan**	**73,66**		**Meningkatnya Efektivitas koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan desa/kelurahan**	**Kec Wanayasa**	**Indeks Desa di Wilayah Kecamatan**	**73,66**		

1.2.1	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	kec Wanayasa	**persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat dan desa**	**100%**	9.500.000	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	kec Wanayasa	**persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat dan desa**	**100%**	9.500.000	
1.2.1.1.	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Kec Wanayasa	Persentase terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat desa	100%	2.000.000	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Kec Wanayasa	Persentase terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat desa	100%	2.000.000	
a.	Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan	Kec Wanayasa	Jumlah laporan Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	1 laporan	2.000.000	Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan	Kec Wanayasa	Jumlah laporan Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	1 laporan	2.000.000	
1.2.1.2.	Pemberdayaan Lembaga KemasyarakatanTingkat Kecamatan	kec Wanayasa	terselenggaranya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	100%	7.500.000	Pemberdayaan Lembaga KemasyarakatanTingkat Kecamatan	kec Wanayasa	terselenggaranya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	100%	7.500.000	
a.	Peningkatan Kapasitas lembaga kemasyarakatan	kec Wanayasa	Jumlah Laporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	2 lembaga kemasyarakatan	7.500.000	Peningkatan Kapasitas lembaga kemasyarakatan	kec Wanayasa	Jumlah Laporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	2 lembaga kemasyarakatan	7.500.000	

1.2.2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	kec Wanayasa	**persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**100%**	14.200.000	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	kec Wanayasa	**persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**100%**	14.200.100	
1.2.1.1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah	kec Wanayasa	Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah sesuai ketentuan	100%	14.200.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah	kec Wanayasa	Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah sesuai ketentuan	100%	14.200.100	
a.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	kec Wanayasa	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6 Dokumen	14.200.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	kec Wanayasa	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6 Dokumen	14.200.100	
1.2.3	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	kec Wanayasa	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	8.500.000	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	kec Wanayasa	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	9.500.000	
1.2.3.1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	kec Wanayasa	Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	100%	8.500.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	kec Wanayasa	Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan	100%	9.500.000	

			Pengawasan Pemerintahan Desa					dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
a.	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan kepala desa	Kec Wanayasa	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyusunan peraturan desa dan kepala desa	34 dokmen	1.000.000	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan kepala desa	Kec Wanayasa	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyusunan peraturan desa dan kepala desa	34 dokmen	1.000.000	
b.	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec Wanayasa	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	17 Dokumen	1.000.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec Wanayasa	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	17 Dokumen	1.000.000	
c.	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec Wanayasa	Jumlah dokumen yang di fasilitasi dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desa	0 desa	0	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec Wanayasa	Jumlah dokumen yang di fasilitasi dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desa	0 desa	0	
d.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec Wanayasa	Jumlah Dokumen yang di fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan	34 dokumen	1.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec Wanayasa	Jumlah Dokumen yang di fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan	34 dokumen	1.000.000	

			Pendayagunaan Aset Desa					Pendayagunaan Aset Desa			
e.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	kec Wanayasa	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 dokumen	3.500.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	kec Wanayasa	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 dokumen	3.500.000	
f.	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec Wanayasa	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6 dokumen	0	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	kec Wanayasa	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6 dokumen	1.000.000	
g.	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec Wanayasa	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	17 dokumen	1.000.000	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec Wanayasa	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	17 dokumen	1.000.000	

h.	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec Wanayasa	Jumlah Dokumen fasilitasi koordinasi pendampinga n desa di wilayahnya	17 dokumen	1.000.000	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec Wanayasa	Jumlah Dokumen fasilitasi koordinasi pendamping an desa di wilayahnya	17 dokumen	1.000.000	

Berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2026, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan yaitu:

1. Memprioritaskan kegiatan yang belum terlaksana di tahun 2025
2. Melanjutkan kegiatan yang sudah ada di tahun 2025

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan musrenbang kecamatan dan forum konsultasi publik telah disampaikan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui aplikasi SIPD. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.3
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1.	Pelebaran Jalan	Desa Pandansari	Pembangunan jalan		
2.	Pembangunan Rehabilitasi	Desa Pandansari	Perbaikan Jembatan		
3.	Bantuan Keuangan	Desa Bantar	Pembangunan rabat beton jalan		
4.	Bantuan Keuangan	Desa Suwidak	Pembangunan jalan penghubung antar desa		
5.	Pemeliharaan jalan kabupaten	Desa Suwidak	Pembangunan jalan kabupaten		
6.	Bantuan Keuangan khusus	Desa Balun RT 16 RW 03	Pembangunan gedung		
7.	Bantuan keuangan khusus	Desa Balun RT 21 RW 04	Pembangunan akses jalan		
8.	Bantuan keuangan khusus	Desa wanaraja	Drainase jalan penghubung dusun		

9.	Bantuan keuangan khusus	Desa Susukan	Jalur pipa untuk akses air minum		
10.	Bantuan keuangan khusus	Desa Wanaraja	Akses jalan lingkungan gang		
11.	Bantuan keuangan khusus	Desa Wanaraja	Drainase jalan daerah		
12.	Bantuan keuangan khusus	Desa Susukan Dsn Kasimpar	Pengerasan jalan desa		
13.	Rekontruksi ruas jalan kabupaten	Desa Susukan	Pemeliharaan jalan		
14.	Bantuan keuangan khusus	Desa Wanaraja	Jambanisasi		
15.	Bantuan keuangan khusus	Desa Balun	Peningkatan fasilitas pengelolaan sampah desa		
16.	Bantuan keuangan khusus	Dusun Kuningan	Pembangunan jalan usaha tani		
17.	Bantuan keuangan khusus	Desa Susukan	Drainase jalan desa		
18.	Bantuan keuangan khusus	Dusun Tegalsari	Penanggulangan bencana alam		
19.	Bantuan keuangan khusus	Blok.kalibangun Desa Balun	Pemeliharaan prasarana milik desa		
20.	Bantuan keuangan khusus	Desa Balun dsn tegalsari	Penanggulangan bencana alam		

21.	Bantuan keuangan khusus	Desa Legoksaye m	Pembangu nan jalan		
22.	Bantuan keuangan khusus	Desa Suwidak	Pembangu nan jembatan		
23.	Bantuan keuangan khusus	Desa Wanayasa	Perbaikan rumah tidak layak huni		
24.	Pemeliharaan jalan kabupaten	Desa Dawuhan	Perbaikan jalan kabupaten		
25.	Bantuan sosial penanganan RTLH	Desa Dawuhan	Perbaikan rumah tidak layak huni		
26.	Bantuan keuangan khusus	Desa Wanayasa	Pembangu nan rehabilitas i		
27.	Pemeliharaan jalan kabupaten	Desa Wanayasa	Perbaikan jalan alternative penghubu ng dukuh		
28.	Bantuan keuangan khusus	Desa Kubang	Perbaikan sebagian jalan yang masih belum terbangun		
29.	Bantuan keuangan khusus	Desa Kubang	Peningkata nDD		
30.	Bantuan keuangan khusus	Desa Kubang dsn jomblang	Pengerasa n jalan desa		
31.	Bantuan keuangan khusus	Dsn jomblang Desa kubang	Pembangu nan talud jalan		
32.	Bantuan keuangan khusus	Dsn jomblang Desa kubang	Pembangu nan jembatan antara		

			desa kubang dan desa purwodadi		
33.	Bantuan keuangan khusus	Dsn jomblang Desa kubang	Pembangunan bronjong		
34.	Pemeliharaan jalan kabupaten	Dsn Kalikuning Desa Tempuran	Perbaikan gorong gorong		
35.	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaaan Prasarana Pertanian Lainnya	Desa Tempuran	Pembangunan prasarana pertanian		
36.	Bantuan keuangan khusus	Jl.Raya Jatilawang-Gumelem,Petungkriyono	Pembangunan jalan		
37.	Bantuan keuangan khusus	Jl.Raya Wanayasa-Batur,Jatilawang	Peningkatan sarana dan prasarana		
38.	Bantuan keuangan khusus	Desa Legoksayem	Pembangunan talud		
39.	Bantuan keuangan khusus	Desa Kasimpar	Pemeliharaan prasarana milik desa		
40.	Pemeliharaan jalan kabupaten	Desa Kasimpar	Pemeliharaan jalan kabupaten		
41.	Bantuan keuangan khusus	Desa Bantar	Jambanisasi		
42.	Pemeliharaan jalan kabupaten	Dsn Baniara – Sruni Desa Pesantren	Pemeliharaan jalan kabupaten		
43.	Rekonstruksi ruas jalan kabupaten	Desa Bantar	Pelebaran jalan		

44.	Bantuan keuangan khusus	Desa Pesantren	Pembangunan jalan		
45.	Pemeliharaan jalan kabupaten	Desa Batar	Pemeliharaan jalan kabupaten		
46.	Bantan keuangan khusus	Dsn Silengkong Desa Karangtengah	Drainase		
47.	Bantuan keuangan khusus	Dsn Silengkong Desa Karangtengan	Pengerasan prasarana jalan desa		
48.	Pembangunan rehabilitasi prasarana pertanian lainnya	Dsn Silengkong Desa Karangtengah	Pembangunan prasarana pertanian		
49.	Bantuan keuangan khusus	Dsn silengkong Desa Karangtengah	Drainase		
50.	Bantuan keuangan khusus	Dsn Silengkong Desa Karangtengah	Pembangunan jalan aspal		
51.	Bantuan keuangan khusus	Dsn Silengkong Desa Karangtengah	Pembangunan jalan usaha tani		
52.	Bantuan keuangan khusus	Dsn Silengkong Desa Karangtengah	Pembngunan talud dan bronjong		
53.	Bantuan Keuangan khusus	Dsn Silengkong Desa Karangtengah	Peningkatan jalan aspal		

54.	Bantuan keuangan khusus	Dsn Silengkong Desa Karangtengah	Pembangunan jalan usaha tani		
55.	Bantuan keuangan khusus	Dsn Silengkong Desa Karangtengah	Pembangunan talud		
56.	Bantuan keuangan khusus	Desa Pagergunung	Drainase		
57.	Bantuan keuangan khusus	Desa Pagergunung	Drainase		
58.	Bantuan keuangan khusus	Desa Pagergunung	Pembangunan talud		
59.	Batuan keuangan khusus	Desa Pagergunug	Pembangunan talud		
60.	Bantuan keuangan khusus	Desa Pagergunung	Pembuatan talud		
61.	Bantuan keuangan khusus	Desa Penanggungan	Jalan usaha tani		
62.	Bantuan keuangan khusus	Desa Peanggungan	Pembangunan jalan penghubung		
63.	Rekonstruksi ruas jalan kabupaten	Ruas jalan kasimpar penanggungan	Peningkatan jalan		
64.	Pemeliharaan jalan kabupaten	Ruas jalan tlagabang pesayangan	Pemeliharaan jalan kabupaten		
65.	Bantuan keuangan khusus	Desa Penanggungan	Prasarana jalan		

66.	Bantuan keuangan khusus	Desa Penanggungan	Pembangunan jalan		
67.	Bantuan keuangan kepada desa PIK	Desa Penanggungan	Pembangunan jalan		
68.	Bantuan keuangan khusus	Desa Penanggungan	Prasarana jalan		
69.	Bantuan keuangan khusus	Desa Penanggungan	Pembangunan jalan		
70.	Bantuan keuangan khusus	Desa Penanggungan	Pemeliharaan jembatan		
71.	Bantuan keuangan khusus	Dsn Pencil Desa Karangtengah	Pembangunan talud		
72.	Bantuan keuangan khusus	Desa Bantar	Peningkatan aspal jalan lingkungan		
73.	Bantuan keuangan khusus	Desa Bantar	Pembangun talud		
74.	Bantuan keuangan khusus	Desa Legoksayem	Pembangunan jalan		
75.	Bantuan keuangan khusus	Desa Legoksayem	Pembangunan talud		
76.	Bantuan keuangan khusus	Desa Legoksayem	Pembangunan talud		
77.	Bantuan keuangan khusus	Desa Balun	Prasarana jalan		

78.	Bantuan keuangan khusus	Desa Balun	Prasarana jalan		
79.	Bantuan keuangan khusus	Desa Balun	Pembangunan jalan		
80.	Bantuan keuangan khusus	Dsn Sikenong Desa BantarP	Pembangunan sanitasi air limbah		
81.	Bantuan keuangan khusus	Desa Bantar	Pembangunan jalan		
82.	Bantuan keuangan khusus	Desa Bantar	Prasarana pos pelayanan terpadu		
83.	Bantuan keuangan khusus	Desa Bantar	Prasarana pos pelayanan terpadu		
84.	Bantuan keuangan khusus	Desa Legoksaye m	Pembangunan talud		
85.	Bantuan keuangan khusus	Desa Legoksaye m	Pembangunan rabat beton		
86.	Bantuan keuangan khusus	Desa Legoksaye m	Penampungan bank sampah		
87.	Bantuan keuangan khusus	Desa Suwidak	Pembangunan jalan rusak		
88.	Bantuan keuangan khusus	Desa Suwidak	Pembangunan jalan rusak		
89.	Bantuan keuangan khusus	Desa Suwidak	Pemeliharaan prasarana jalan milik desa		

90.	Bantuan keuangan khusus	Desa Kasimpar	Pemeliharaan prasarana jalan		
91.	Rekonstruksi ruas jalan kabupaten	Desa Pesantren	Peningkatan jalan		
92.	Bantuan keuangan khusus	Desa Jatilawang	Pembangunan rumah tidak layak huni		
93.	Bantuan keuangan khusus	Desa Jatilawang	Jambanisasi		
94.	Bantuan keuangan khusus	Desa Jatilawang	Pembangunan infrastruktur desa		
95.	Bantuan keuangan khusus	Desa Jatilawang	Pembangunan infrastruktur desa		
96.	Bantuan keuangan khusus	Dsn Wotgalar Desa Jatilawang	Pembangunan infrastruktur jalan		
97.	Bantuan keuangan khusus	Dsn Kalideres Desa Jatilawang	Pembangunan infrastruktur jalan		
98.	Bantuan keuangan khusus	Desa Jatilawang	Pembangunan jalan desa		
99.	Bantuan keuangan khusus	Desa Jatilawang	Pembangunan jalan		
100.	Bantuan keuangan khusus	Dsn Wotgalar Desa Jatilawang	Pembangunan jalan		
101.	Bantuan keuangan khusus	Dsn Jatilawang Blok. Krandegan Desa Jatilawang	Pembangunan jalan		

102.	Bantuan keuangan khusus	Dsn Karangmalang Desa Jatilawang	Pembngunan jalan		
103.	Bantuan keuangan khusus	Dsn Pringgondani Desa Jatilawang	Pembangunan jalan		
104.	Bantuan keuangan khusus	Dsn Priggondani Desa Jatilawang	Pembangunan jalan		
105.	Bantuan keuangan khusus	Dsn Wadas putih Desa Jatilawang	Pembangunan jalan		
106.	Bantuan sosial penanganan RTLH	Desa Karangtengah	Pembangunan rumah yang tidak layak huni		
107.	Bantuan keuangan khusus	Desa Karangtengah	Pemeliharaan jalan milik desa		
108.	Bantuan keuangan khusus	Desa Karangtengah	Pemeliharaan sarana dan prasarana TPQ		
109.	Bantuan keuangan khusus	Desa Karangtengah	Pemeliharaan prasarana jalan milik desa		
110.	Bantuan keuangan khusus	Desa Karangtengah	Pembangunan jalan		
111.	Bantuan keuangan khusus	Desa Karangtengah	Pemeliharaan prasarana jalan milik desa		
112.	Bantuan keuangan kepada desa (PIK)	Dsn Pramen – Dsn Sikenong Desa bantar	Pembangunan rabat beton jalan anatar desa		

113.	Bantuan keuangan kepada desa (PIK)	Dsn Buana Desa Suwidak	Pembangunan jalan penghubung antar desa		

2.6. Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan hasil reses anggota DPRD, melalui aplikasi SIPD telah disampaikan usulan program dan kegiatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Validasi
	NIHIL				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tema Pembangunan Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 adalah "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", dengan prioritas pembangunan nasional sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa;
b. Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah;
c. Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan

Telaahan terhadap kebijakan nasional yang dimaksud adalah penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Hal tersebut seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional yang mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional

Dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi, maka Kecamatan Wanayasa melaksanakan kebijakan daerah yang sinergis dengan kebijakan Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat. Kegiatan yang akan dilakukan oleh Kecamatan Wanayasa diharapkan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan di atasnya, mempunyai rasa keadilan, pemerataan dan diarahkan agar implementasinya akan dapat berdampak pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan

Wanayasa. Renja yang disusun perangkat daerah berpedoman pada RKPD dan RPJPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029 dengan Visi "Mewujudkan Banjarnegara Maju dan Sejahtera", yang akan diwujudkan melalui 5 (lima) Misi yang merupakan turunan dari pokok-pokok visi yang telah didentifikasi sebelumnya yaitu :

1. Meningkatkan Infrastruktur dan Pelayanan Publik
2. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal
3. Meningkatkan Kualitas dan Akses Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan Sosial.
4. Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.
5. Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Transparan

Dalam mencapai Visi Kabupaten Banjarnegara, maka Kecamatan Pagentan mempunyai peran dan fungsi menggerakan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah dalam menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan. Terutama dikaitkan dengan pelaksanaan pelimpahan kewenangan yang secara mutlak harus didukung oleh sumberdaya manusia aparatur yang mampu mengelola tugas-tugas pelayanan secara optimal, efektif dan efisien, serta mampu merumuskan kebijakan-kebijakan yang implementatif yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, yang pada muaranya mewujudkan Visi Kabupaten Banjarnegara.

Tujuan yang akan diwujudkan selama periode 2025-2029 adalah "Terwujudnya Banjarnegara maju dan sejahtera" yang diukur melalui indikator PDRB per kapita dan angka kemiskinan yang akan ditempuh melalui 4 sasaran strategis, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat
2. Meningkatnya perekonomian daerah yang berdaya saing dan berbasis potensi lokal secara berkelanjutan

3. Meningkatnya infrastruktur yang mendukung perekonomian dan kesejahteraan Masyarakat
4. Meningkatnya tata kelolapemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif

Adapun sasaran strategis yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam pencapaian visi misi Kepala Daerah sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Pagentan sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara dari 4 (empat) sasaran strategis tersebut adalah Sasaran Strategis ke-4 yaitu:

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif dengan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi.

Meningkatnya profesionalisme aparatur daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, beretika, dan bertanggung jawab, serta mampu mendukung pembangunan daerah yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan Masyarakat

2.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan, sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Dengan kata lain tujuan dan sasaran merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Tujuan dan sasaran dalam Renstra yang mendukung RPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029 diuraikan sebagai berikut:

Tujuan :

Mewujudkan Banjarnegara Maju dan Sejahtera.

Sasaran:

Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif

Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Wanayasa beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel sebagaimana berikut ini :

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatnya aksesibilitas layanan pemerintah dalam urusan kewilayahan di Kecamatan Wanayasa		Indeks Pelayanan Publik	51,00	53,00	55,00	57,00	60,05
1.1		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah urusan kewilayahan	Nilai SAKIP Kecamatan	BB (72,40)	BB (72,45)	BB (72,50)	BB (72,55)	BB (72,60)
1.2		Meningkatnya Efektivitas koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan desa/kelurahan	Indeks Desa di Wilayah Kecamatan	73,66	73,67	73,68	73,69	73,70

2.3. Program dan Kegiatan

(Sajikan matriks yang berasal dari SIPD)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN WANAYASA						**1.806.094.960,00**							**2.101.913.340,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.806.094.960,00**							**2.101.913.340,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.806.094.960,00**							**2.101.913.340,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.684.977.660,00**						**-**	**1.969.296.240,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun*	-			100 %	3.517.400,00			Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Sekretariat Kecamatan Wanayasa	-	4.000.000,00	KECAMATAN WANAYASA
	7.01.01.2.01.0 001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				14 Dokumen	1.317.400,00	Kab. Banjarnegara, Wanayasa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Sekretariat Kecamatan Wanayasa		1.500.000,00	KECAMATAN WANAYASA
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				13 Laporan	2.200.000,00	Kab. Banjarnegara, Wanayasa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Sekretariat Kecamatan Wanayasa		2.500.000,00	KECAMATAN WANAYASA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana*	-			100 %	1.478.041.682,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Sekretariat Kecamatan Wanayasa	-	1.678.152.672,00	KECAMATAN WANAYASA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 Orang/bulan	1.451.890.782,00	Kab. Banjarnegara, Wanayasa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Sekretariat Kecamatan Wanayasa		1.651.890.772,00	KECAMATAN WANAYASA
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	23.761.900,00	Kab. Banjarnegara, Wanayasa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Sekretariat Kecamatan Wanayasa		23.761.900,00	KECAMATAN WANAYASA

	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD															
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				16 Laporan	2.389.000,00	Kab. Banjarnegara, Wanayasa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Sekretariat Kecamatan Wanayasa		2.500.000,00	KECAMATAN WANAYASA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana*	-			100 %	78.227.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Sekretariat Kecamatan Wanayasa	-	87.500.000,00	KECAMATAN WANAYASA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	5.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Wanayasa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Sekretariat Kecamatan Wanayasa		7.500.000,00	KECAMATAN WANAYASA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	73.227.000,00	Kab. Banjarnegara, Wanayasa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Sekretariat Kecamatan Wanayasa		80.000.000,00	KECAMATAN WANAYASA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia*	-			100 %	11.600.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Sekretariat Kecamatan Wanayasa	-	85.000.000,00	KECAMATAN WANAYASA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	11.600.000,00	Kab. Banjarnegara, Wanayasa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Sekretariat Kecamatan Wanayasa		5.000.000,00	KECAMATAN WANAYASA
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Banjarnegara, Wanayasa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Sekretariat Kecamatan Wanayasa		80.000.000,00	KECAMATAN WANAYASA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana*	-			100 %	57.767.628,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Desa di Wilayah Kecamatan Wanayasa	-	57.793.368,00	KECAMATAN WANAYASA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	13.200.000,00	Kab. Banjarnegara, Wanayasa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Desa di Wilayah Kecamatan Wanayasa		13.200.000,00	KECAMATAN WANAYASA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	44.567.628,00	Kab. Banjarnegara, Wanayasa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Desa di Wilayah Kecamatan Wanayasa		44.593.368,00	KECAMATAN WANAYASA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*	-			100 %	55.823.950,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Sekretariat Kecamatan Wanayasa	-	56.850.200,00	KECAMATAN WANAYASA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	47.049.950,00	Kab. Banjarnegara, Wanayasa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Sekretariat Kecamatan Wanayasa		47.050.000,00	KECAMATAN WANAYASA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	4.074.000,00	Kab. Banjarnegara, Wanayasa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Sekretariat Kecamatan Wanayasa		5.000.000,00	KECAMATAN WANAYASA
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	4.700.000,00	Kab. Banjarnegara, Wanayasa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Sekretariat Kecamatan Wanayasa		4.800.200,00	KECAMATAN WANAYASA
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**87.917.200,00**						**-**	**90.917.100,00**	
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*Persentase terselenggaraanya koordinasi pemeliharaan Prasarana dan sarana pelayanan umum*	-			100 %	1.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Kecamatan Wanayasa	-	1.500.000,00	KECAMATAN WANAYASA
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Wanayasa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Kecamatan Wanayasa		1.500.000,00	KECAMATAN WANAYASA
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang terlaksana*	-			100 %	86.917.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Desa di Wilayah Kecamatan Wanayasa	-	89.417.100,00	KECAMATAN WANAYASA
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Wanayasa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Desa di Wilayah Kecamatan Wanayasa		2.500.000,00	KECAMATAN WANAYASA
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	3.600.000,00	Kab. Banjarnegara, Wanayasa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Desa di Wilayah Kecamatan Wanayasa		3.600.000,00	KECAMATAN WANAYASA
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	81.317.200,00	Kab. Banjarnegara, Wanayasa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Desa di Wilayah Kecamatan Wanayasa		83.317.100,00	KECAMATAN WANAYASA
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**9.500.000,00**						**-**	**13.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang terlaksana*	-			100 %	2.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Desa di Wilayah Kecamatan Wanayasa	-	3.000.000,00	KECAMATAN WANAYASA
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	2.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Wanayasa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Desa di Wilayah Kecamatan Wanayasa		3.000.000,00	KECAMATAN WANAYASA
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Persentase Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan*	-			65 %	7.500.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Desa di Wilayah Kecamatan Wanayasa	-	10.000.000,00	KECAMATAN WANAYASA
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				2 Lembaga Kemasyarakatan	7.500.000,00	Kab. Banjarnegara, Wanayasa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Desa di Wilayah Kecamatan Wanayasa		10.000.000,00	KECAMATAN WANAYASA
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**14.200.100,00**						**-**	**14.200.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang terlaksana*	-			100 %	14.200.100,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Desa di Wilayah Kecamatan Wanayasa	-	14.200.000,00	KECAMATAN WANAYASA
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				6 Dokumen	14.200.100,00	Kab. Banjarnegara, Wanayasa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Desa di Wilayah Kecamatan Wanayasa		14.200.000,00	KECAMATAN WANAYASA
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**9.500.000,00**						**-**	**14.500.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase Fasilitasi,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana*	-			100 %	9.500.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Desa di Wilayah Kecamatan Wanayasa	-	14.500.000,00	KECAMATAN WANAYASA
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				34 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Wanayasa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Desa di Wilayah Kecamatan Wanayasa		2.000.000,00	KECAMATAN WANAYASA
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				17 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Wanayasa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Desa di Wilayah Kecamatan Wanayasa		1.000.000,00	KECAMATAN WANAYASA
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				34 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Wanayasa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Desa di Wilayah Kecamatan Wanayasa		2.000.000,00	KECAMATAN WANAYASA
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	3.500.000,00	Kab. Banjarnegara, Wanayasa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Desa di Wilayah Kecamatan Wanayasa		3.500.000,00	KECAMATAN WANAYASA
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				17 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Wanayasa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Desa di Wilayah Kecamatan Wanayasa		2.000.000,00	KECAMATAN WANAYASA
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				17 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Wanayasa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Desa di Wilayah Kecamatan Wanayasa		2.000.000,00	KECAMATAN WANAYASA
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				12 Laporan	1.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Wanayasa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Desa di Wilayah Kecamatan Wanayasa		2.000.000,00	KECAMATAN WANAYASA
	J U M L A H							**1.806.094.960,00**							**2.101.913.340,00**	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program pada perangkat daerah merupakan program prioritas dalam Renstra 2026-2030. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPD selanjutnya dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Pemilihan untuk masing-masing program/ kegiatan di Kecamatan Wanayasa sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan 6 (enam) kegiatan yakni :
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      Terdiri dari 2 (dua) sub Kegiatan :
      a.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      a.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      Terdiri dari 3 (tiga) sub Kegiatan :
      b.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      b.2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
      b.3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran
   c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
      Terdiri dari 2 (dua) sub Kegiatan :
      c.1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      c.2. Penyedia bahan logistik kantor
   d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Terdiri dari 3 (tiga) sub Kegiatan :
      d.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
      d.2. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

d.3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Terdiri dari 2 (dua) sub Kegiatan :

e.1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

e.2. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Terdiri dari 3 (tiga) sub Kegiatan :

f.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

f.2. Pemeliharaan/rehabilittasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya

f.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, 2 (dua) kegiatan yakni :

a. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

Terdiri dari 1 (satu) sub Kegiatan :

a.1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang di Limpahkan Kepada Camat

Terdiri dari 3 (tiga) sub Kegiatan :

b.1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan perijinan non usaha

b.2. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perijinan

b.3. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan 2 (dua) kegiatan :
   a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan :
      a.1. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
   b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan, terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan
      b.1. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
4. Program Urusan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan 1 (satu) kegiatan :
   a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala DaerahTerdiri dari 1 (satu) sub Kegiatan :
      a.1. Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di wilayah kecamatan
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Desa, dengan dengan 1 (satu) kegiatan yakni :
   a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Terdiri dari 6 (enam) sub Kegiatan:
      a.1. Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa
      a.2. Fasilitasi administrasi pemerintahan desa
      a.3. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
      a.4. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa
      a.5. Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan keteriban umum
      a.6. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2023-2026. Renja Perangkat Daerah selanjutnya menjadi platform operasional bagi Perangkat Daerah dalam menjalankan programnya dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta tujuan pembangunan daerah tahun 2025-2029. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026 dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disepakati.
2. Kerangka pendanaan dalam Renja Perangkat Daerah masih bersifat sementara, sehingga masih dimungkinkan terjadi perubahan pagu yang disebabkan oleh pengurangan, penambahan, dan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan maupun antar sub kegiatan dalam kerangka penyusunan anggaran secara terpadu dan berbasis kinerja.
3. Renja Perangkat Daerah menjadi acuan bagi Kepala Perangkat Daerah dan segenap jajarannya serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, serta menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal Agustus 2025
CAMAT WANAYASA

SRI WAHJUNI, S.E
Pembina
NIP. 19710217 200212 2 006

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rakhmat dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026.

Renja Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembanguman Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 terdiri dari pendahuluan, hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, tujuan dan sasaran Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara, dan rencana kerja dan pendanaan serta penutup. Penyusunan Renja tersebut berpedoman pada RPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029, Renstra Kecamatan Pejawaran Tahun 2025-2029, dan RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024.

Kami menyadari dalam penyusunan Renja ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan rancangan rencana kerja dimaksud.

Banjarnegara, Agustus 2025

CAMAT PEJAWARAN

SETIYADI, S.STP
Pembina
NIP. 19810615 200112 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 6
1.4. Sistematika Penulisan 7

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 8

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pejawaran Tahun 2023 dan Capaian Renstra Kecamatan Pejawaran Tahun 2023-2026 ... 8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara 23
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pejawaran 25
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 29
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat 42

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 44

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 44
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara 45

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 63

BAB V PENUTUP 66

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara dan Pencapaian Renstra Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara s/d Tahun 2023 11

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara 18

Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara 22

Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 29

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 36

Tabel 2.6 Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Program dan Kegiatan Tahun 2023 Kabupaten Banjarnegara 25

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan DaerahTentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminology Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsisetiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan yang diatur melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan pembentukan tim penyusun, penelaahan rancangan awal RPD, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, hingga pada penyempurnaan berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang RPD. Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RPD, penyusunan Renja Perangkat Daerah juga mengacu pada Renja Kementerian/Lembaga terkait, serta Renja Perangkat Daerah Provinsi

terkait. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan danpengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2. Landasan Hukum

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-UndangNomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. UU tentang Penyelenggaraan urusan yang diampu
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor3 Tahun2008 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentangRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah ProvinsiJawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah ProvinsiJawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
17. Peraturan Daerah ProvinsiJawa Tengah Nomor5 Tahun2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
18. Peraturan Daerah KabupatenBanjarnegaraNomor3Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah KabupatenBanjarnegaraNomor 145);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara

Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 32);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun

2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);

27. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 14).
28. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 15).
29. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun dengan maksud untuk:

a. Menjabarkan Renstra Kecamatan pejawaran Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025–2029 ke dalam rencana program kegiatan prioritas Tahun 2026 yang di selaraskan dengan sasaran dan program Renja K/L Tahun 2026 dan Renja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;
b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerapan anggaran berbasis kinerja.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

a. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA-DPA dalam Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2026, yang dalam penyusunannya didahului dengan menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026;
b. Sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Tahun 2026;
c. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun berdasarkan sistematika yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah.

BAB 2 : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan RenjaPerangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dan atau pokok-pokok DPRD.

BAB3 : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan tahun 2025.

BAB 4 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran RKPD.

BAB 5 : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah meliputi Urusan Pemerintahan fungsi penunjang kewilayahan.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 terdiri dari 5 program, 11 kegiatan, dan 27 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 2.619.000.000,- dengan fokus utama pada mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik (good) dalam kehidupan berpolitik yang demokratis dan bertanggungjawab. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung tujuan daerah (Berdasarkan Berita Acara Reviu penyelarasan perencanaan tanggal 2 Januari 2024) yang meliputi:

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
2. Meningkatnya efektifitas dan transparansi layanan publik

Dari 4 program, 10 kegiatan, dan 24 sub kegiatan yang dalam Renja Perangkat Daerah tersebut, program/kegiatan/sub kegiatan yang disetujui untuk dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2023 terdiri dari 4 program, 8 kegiatan, dan 20 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 2.246.052.343,-

Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024, terjadi beberapa perubahan yang meliputi penambahan atau pengurangan pagu, penghapusan, penambahan atau pengurangan program/kegiatan/sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Perubahan tersebut mengubah rincian dalam Renja Perangkat Daerah menjadi 4 program, 8 kegiatan, dan 20 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp Rp 2.246.052.343,- Pada

Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2024, program/kegiatan/sub kegiatan yang berkurang meliputi,

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang meliputi 5 Kegiatan dan 12 Sub Kegiatan.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, yang meliputi 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, yang meliputi 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, yang meliputi 1 Kegiatan dan 5 Sub Kegiatan

Pada Renja Kecamatan Pejawaran Tahun 2024, Program/Kegiatan/SubKegiatan yang bertambah/berkurang meliputi:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
   a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      a.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      a.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      b.1 Penyenyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      b.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
      b.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
   c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
      c.1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      c.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
      d.1 Pengadaan Mebel
      d.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   e.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   e.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   f.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   f.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana
   f.3 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.
   a.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Non Perijinan
   a.2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perijinan Non Usaha
   a.3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
b. Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum.
   b.1 Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

3. Program Koordinaasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

a. Koordinasi Upaya Penyelanggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
   a.1 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

4. **Program Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**
   a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah.
      a.2 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

5. **Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**
   a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
      a.1 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
      a.2 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
      a.3 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
      a.4 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
      a.5 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
      a.6 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
      a.7 Fasilitasi Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.

Dinamika yang terjadi selama tahun 2024 turut mempengaruhi keberhasilan pencapaian Renja Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2024, tercatat adanya hasil yang baik yang dikarenakan adanya pencapaian maupun pelampauan target maupun yang tidak memenuhi target. Dalam pelaksanaan pelayanannya, Perangkat Daerah mengampu 2 Indikator. Dari 2 indikator tersebut, berstatus ada yang sudah tercapai dan ada yang belum tercapai. Indikator Nilai SAKIP Kecamatan pada tahun 2024 tercapai 69,65 dari target 69,00 atau sekitar 100,94%. Dari Indikator Survey Kepuasan Masyarakat pada tahun 2024 tercapai 86,30 dari target 85,55 atau sekitar 99,13%.

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada, semua program/kegiatan/sub kegiatan sesuai target.

b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah :

1. Adanya perencanaan, pelaksanaan dan monitoring yang baik.
2. Menyelaraskan hal-hal yang akan dikerjakan dengan target kinerja.
3. Menyelaraskan apa yang dianggarkan dengan apa yang akan dikerjakan.
4. Mengerjakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja
5. Melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, pada tahun 2023 keseluruhan pencapaian kinerja telah tercapai sesuai target. Pada tahun perencanaan selanjutnya, perlu diambil kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran untuk pencapaian target kinerja, diantaranya :

1. Koordinasi antar Kasi dan Sub Bagian
2. Prioritas Perencanaan yang tepat sasaran, agar kegiatan bisa berjalan sesuai perencanaan.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2023 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara dan Pencapaian Renstra Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara s/d Tahun 2024 (sebelum adanya penyelarasan tanggal 2 Januari 2024)

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR KEWILAYAHAN									
	Tujuan : Meningkatnya aksesbilitas layanan pemerintah dalam urusan kewilayahan di Kecamatan Pejawaran	Indeks Pelayanan Publik	58,50							
	Tujuan : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP								
	Sasaran Strategis : Meningkatnya Efektivitas Koordinasi dan	Indeks Desa di Wilayah Kecamatan	70,00							

	Fasilitasi Pemberdayaan Desa / Kelurahan									
	Sasaran Strategis : Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	**Nilai SAKIP Kecamatan**	70,20	68,45	69,00	69,65	100,94%	69,70	70,15	100,64%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana**	100	100	100	100	100	100	100	100
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana**	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	17 dokumen	17 dokumen	17 dokumen	17 dokumen	100 %	17 dokumen	17 dokumen	100%
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang di fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	34 dokumen	17 dokumen	17 dokumen	17 dokumen	100 %	17 dokumen	17 dokumen	100%

	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 dokumen	0 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	100 %	11 dokumen	0 dokumen	100%
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen yang diFasilitasi dalam rangka Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	17 dokumen	17 dokumen	17 dokumen	17 dokumen	100 %	1 dokumen	17 dokumen	100%
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	17 dokumen	17 dokumen	17 dokumen	17 dokumen	100 %	1 dokumen	17 dokumen	100%
	Fasilitasi Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah dokumen Fasilitasi Koordinasi Pendampingan Desa di	17 dokumen	17 dokumen	17 dokumen	17 dokumen	100 %	1 dokumen	17 dokumen	100%

		Wilayahnya								
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	**persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	100%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah	**Prosentase Penyelenggaraan Pemerintah sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah yang terlaksana**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100 %**	**100%**	**100%**	**100%**
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6 dokumen	10 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	100%	6 dokumen	6 dokumen	100%
	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	**Persentase lembaga desa/kelurahan di kecamatan yang terfasilitasi**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100%**
	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Persentase Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang terlaksana	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100 %**	**100%**	**100%**	100%
	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di	1 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	100%	0 Laporan	0 Laporan	100%

		wilayah kecamatan								
	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan	**Persentase Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100 %**	**100%**	**100%**	**100%**
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	1 Lembaga	0 Lembaga	0 Lembaga	0 Lembaga	100%	0 Lembaga	0 Lembaga	100%
	Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	**Nilai IKM**								
	Sasaran Strategis : Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik	**Nilai IKM Kecamatan**	**86,75**	**85,70**	**86,30**	**85,55**	**99,13%**	**86,50**	**86,55**	**100%**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100%**
7.01.01.2.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Prosentase dokumen pelaporan yang tersusun**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun	14 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	100%	8 dokumen	8 dokumen	100%

7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang tersusun	13 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	5 laporan	5 laporan	100%
7.01.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayarkan	16 orang	15 orang/bulan	15 orang/bulan	15 orang/bulan	100%	15 orang	15 orang	100%
7.01.01.2.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD	16Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bln/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bln/Semesteran SKPD	14 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 paket	2 paket	2 paket	2 paket	100%	2 paket	2 paket	100%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	10 paket	10 paket	10 paket	10 paket	100%	10 paket	10 paket	100%

7.01.01.2.07	**Kegiatan Pengadaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase pengadaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah unit Mebel yang disediakan	4 Unit	16 unit	2 unit	2 unit	100%	3 unit	3 unit	100%
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah unit yang disediakan	2 Unit	16 unit	2 unit	2 unit	100%	3 unit	3 unit	100%
7.01.01.2.08	**KegiatanPenyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Lapoiran	12 Laporan	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100%
7.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

7.01.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya perseliharaan, pajak, dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional/lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	9 unit	9 unit	9 unit	9 unit	100%	9 unit	9 unit	100%
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor dan bangunan lainya yang terpelihara	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 paket	2 Unit	100%
7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Prosentase Penyelenggran Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100 %**	**100%**	**100%**	**100%**
7.01.02.2.04	**Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kpd Camat**	**Prosentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kpd Camat yang terfaksana**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100 %**	**100%**	**100%**	**100%**
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Non Perijinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Terkait dengan Non Perijinan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perijinan Non Usaha	Jumlah dokumen Pelayanan Non Perijinan Usaha yang di Laksanakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	Jumlah Laporan Pelaksanaan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	

	Terkait dengan Kewenangan Lain yang Ditinggalkan	Kewenangan Lain yang di tinggalkan								
	Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum	**Persentase Terselenggaran ya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum yang terlaksana**	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%
	Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 dokumen					1 dokumen	1 dokumen	

2.1. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan pelayanannya, Perangkat Daerah mengampu 2 Indikator. Dari 2 indikator tersebut, Berstatus ada yang tercapai dan ada yang tidak tercapai. Indikator Nilai SAKIP Kecamatan pada tahun 2024 tercapai 69,65 dari target 69,00 atau sekitar 100,94%. Dari Indikator Survey Kepuasan Masyarakat pada tahun 2024 tercapai 86,30 dari target 85,55 atau sekitar 99,13%. Adapun faktor yang mempengaruhi tercapainya tersebut anatara lain:

1. Merencanakan target kinerja;
2. Menyelaraskan dokumen perencanaan sehingga data yang disajikan merupakan data yang akuntable;
3. Menyelaraskan apa yang dianggarkan dengan apa yang akan dikerjakan;
4. Koordinasi internal perangkat daerah dengan maksimal schingga kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang ada;
5. Melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya.
6. Komitmen yang tinggi dari aparatur Kecamatan Pejawaran untuk memberikan pelayanan yang prima sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

Dalam rangka pencapaian target kinerja tahun sebelumnya, beberapa hal yang harus diupayakan meliputi :

1. Mengevaluasi, menelaah dan menyelaraskan dokumen perencanaan agar tercapai target kinerja.
2. Mengevaluasi dan memperbaiki koordinasi internal perangkat daerah schingga seluruh kegiatan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menjadi lebih baik.

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat DaerahKabupatenBanjarnegara

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK LPPD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai SAKIP Kecamatan			69,00	69,70	70,20	70,25	68,45	69,65	70,15	70,20	
2	Survey Kepuasan Masyarakat			86,30	86,50	86,75	86,80	85,70	85,55	86,55	86,75	
3	Indeks Desa Wilayah Kecamatan					70,00	70,25			70,00	70,25	

) Kolom 3 diisi berdasarkan IKK outcome dalam lampiran Permendagri 18/2020

2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan urusan pemerintahan dalam urusan, Pemerintah Fungsi Penunjang Kewilayahan Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPD Tahun 2025-2029, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk tahun 2026 mencakup urusan tersebut. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah diantaranya adalah:

1. Belum optimalnya etos kerja, budaya kerja dan disiplin kerja pegawai;
2. Masih kurangnya dukungan data informasi dari masyarakat, peraturan yang valid, akurat dan terintegrasi sebagai pedoman dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat;
3. Masih rendahnya keselarasan dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang ada;
4. Apatisme masyarakat dalam mengikuti musrenbang;
5. Masih rendahnya pemahaman masyarakat maupun aparatur desa tentang hakekat pembangunan nasional;
6. Masih rendahnya kapasitas aparatur desa dalam melaksanakan tertib administrasi pemerintahan desa;
7. Masih kurangnya keseriusan masyarakat dan petugas pemungut dalam pelunasan PBB lebih awal;

Permasalahan tersebut, jika tidak di selesaikan dapat menjadi *constraint* dalam pencapaian visi dan misi Bupati maupun capaian indikator lainnya. Beberapa dampak dari adanya permasalahan dan hambatan tersebut meliputi:

1. Kurang tercapainya suatu kegiatan sesuai indikator kinerja
2. Tidak tercapainya sasaran kerja
3. Belum optimalnya hasil pekerjaan

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi, peningkatan kualitas birokrasi, dan meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan pengguna layanan akan meningkatkan kebutuhan akan adanya penyediaan produk layanan yang semakin baik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi-inovasi dalam menunjang peningkatan pelayanan publik secara kontinyu. Beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, yaitu:

1. Kondisi geografis wilayah kecamatan yang merupakan daerah rawan bencana mengakibatkan kerusakan infrastruktur terutama jalan penghubung ke kabupatenbsehingga menghambat mobilitas ekonomi dan sosial masyarakat.
2. Tuntutan masyarakat yang semakin beragam untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas.
3. Masih terdapat aparat pemerintah dan kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif.
4. Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.
5. Melimpahnya potensi sumber daya alam yang dapat dikelola untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
6. Mudahnya mengakses informasi sehingga mempermudah Upaya peningkatan profesionalisme.
7. Adanya dukungan lintas sectoral di wilayah kecamatan yang mendukung tercapainya sinkronisasi secara rutin di Tingkat kecamatan.

Berdasarkan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan tersebut, dapat diinventarisasi beberapa isu strategis. Inventarisasi isu-isu strategis tahun 2026 didapatkan dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal Kabupaten Banjarnegara sampai dengan tahun 2024. Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan pembangunan. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Masih belum optimalnya penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Pelayanan publik yang belum optimal
3. Kurang optimalnya pembinaan ke desa
4. Masih tingginya angka stunting. Kecamatan Pejawaran ada di peringkat ke 2 dari bawah setelah Kecamatan Batur
5. Masih tingginya kemiskinan dan pengangguran. Di kecamatan pejawaran masih terdapat beberapa desa yang termasuk dalam desa miskin ekstrim.
6. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana Gedung kantor baik secara kualitas maupun kunatitas.
7. Merupakan daerah rawan bencana alam.

1.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Tahun 2026 merupakan pelaksanan tahun ketiga RPD Tahun 2025-2029. Dalam RPD Tahun 2025-2029, prioritas arah kebijakan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2026 meliputi :

1. Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP
2. Optimalisasi pelaksanaan pelayanan public dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan public
3. Optimalisasi fungsi koordinasi kecamatan dengan perangkat Desa, OPD yang ada di Kecamtan maupun stake holder yang lain.

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 Kabupaten Banjarnegara

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Tujuan : Meningkatnya aksesibilitas layanan pemerintah dalam urusan kewilayahan di Kecamatan Pejawaran	Kab. Banjarnegara	Indeks Pelayanan Publik	58,50	2.517.299.580	Tujuan : Meningkatnya aksesibiltas layanan pemerintah dalam urusan kewilayahan di Kecamatan Pejawaran	Kab. Banjarnegara	Indeks Pelayanan Publik	58,50	2.517.299.580	
	Sasaran Strategis : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah urusan kewilayahan	Kec. Pejawaran	Nilai SAKIP Kecamatan	BB (70,20)	2.517.299.580	Sasaran Strategis : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah urusan kewilayahan	Kec. Pejawaran	Nilai SAKIP Kecamatan	BB (70,20)	2.517.299.580	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / KABUPATEN / KOTA	Kec. Pejawaran	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian,	100%	2.334.820.280	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / KABUPATEN / KOTA	Kec. Pejawaran	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian,	100%	2.334.820.280	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			dan keuangan perangkat daerah					dan keuangan perangkat daerah			
1.	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kec. Pejawaran**	**Terpenuhinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Kec. Pejawaran**	100%	16.394.500	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kec. Pejawaran**	**Terpenuhinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Kec. Pejawaran**	100%	16.394.500	
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Pejawaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Dokumen	6.553.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Pejawaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Dokumen	6.553.500	
b.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Pejawaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	9.841.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Pejawaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	9.841.000	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kec. Pejawaran**	**Terselenggaranya Administrasi Keuangan**	100%	2.026.738.000	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kec. Pejawaran**	**Terselenggaranya Administrasi Keuangan**	100%	2.026.738.000	
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Pejawaran	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/ bulan	2.000.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Pejawaran	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/ bulan	2.000.000.000	
b.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Pejawaran	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	21.840.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Pejawaran	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	21.840.000	
c.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran SKPD	Kec. Pejawaran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	4.898.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran SKPD	Kec. Pejawaran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	4.898.000	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ca Ta tan
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kec. Pejawaran**	**Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan**	100%	92.376.380	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kec. Pejawaran**	**Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan**	100%	92.376.380	
a.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Pejawaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	3 Paket	11.479.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Pejawaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	3 Paket	11.479.000	
b.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Pejawaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	80.900.380	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Pejawaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	80.900.380	
4.	**Kegiatan Pengadaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kec. Pejawaran**	**Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100%	11.500.000	**Kegiatan Pengadaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kec. Pejawaran**	**Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100%	11.500.000	
a.	Pengadaan Mebel	Kec. Pejawaran	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	2 paket	11.500.000	Pengadaan Mebel	Kec. Pejawaran	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	2 paket	11.500.000	
	Pengadaan Gedung Kantor	Kec. Pejawaran	Jumlah Unit Gedung Kantor yang	2 paket	0	Pengadaan Gedung Kantor	Kec. Pejawaran	Jumlah Unit Gedung Kantor yang	2 paket	0	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Disediakan					Disediakan			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Pejawaran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 paket	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Pejawaran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 paket	0	
5.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kec. Pejawaran**	**Terselenggaranya penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan**	100%	85.200.000	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kec. Pejawaran**	**Terselenggaranya penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan**	100%	85.200.000	
a.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Kec. Pejawaran	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	13.200.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Kec. Pejawaran	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	13.200.000	
b.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Pejawaran	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	12 Laporan	72.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Pejawaran	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	12 Laporan	72.000.000	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ca Ta tan
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			disediakan					disediakan			
6.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kec. Pejawaran**	**Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan**		102.611.400	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kec. Pejawaran**	**Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan**		102.611.400	
a.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional/lapangan	Kec. Pejawaran	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	9 Unit	42.611.400	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional/lapangan	Kec. Pejawaran	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	9 Unit	42.611.400	
b.	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Kec. Pejawaran	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	2 Unit	50.000.000	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Kec. Pejawaran	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	2 Unit	50.000.000	
c.	Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung kantor dan bangunan lainnya	Kec. Pejawaran	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor dan bangunan lainnya yang	10 Unit	10.000.000	Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung kantor dan bangunan	Kec. Pejawaran	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor dan bangunan lainnya yang	10 Unit	10.000.000	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			terpelihara			lainnya		terpelihara			
II	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kec. Pejawaran**	**Prosentase layanan yang sesuai dengan standart pelayanan**	100 %	10.875.000	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kec. Pejawaran**	**Prosentase layanan yang sesuai dengan standart pelayanan**	100 %	10.875.000	
1.	**Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum**	**Kec. Pejawaran**	**Terselenggaranya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum yang terlaksana**	100%	10.875.000	**Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum**	**Kec. Pejawaran**	**Terselenggaranya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum yang terlaksana**	100%	10.875.000	
a.	Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec. Pejawaran	Jumlah Dokumen Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemelihaharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan	1 Dokumen	10.875.000	Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec. Pejawaran	Jumlah Dokumen Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemelihaharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan	1 Dokumen	10.875.000	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Umum					Umum			
2.	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kpd Camat**	**Kec. Pejawaran**	**Prosentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kpd Camat yang terlaksana**	100%	**98.822.300**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kpd Camat**	**Kec. Pejawaran**	**Prosentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kpd Camat yang terlaksana**	100%	**98.822.300**	
a.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Non Perijinan	Kec. Pejawaran	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Terkait dengan Non Perijinan	12 Laporan	5.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Non Perijinan	Kec. Pejawaran	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Terkait dengan Non Perijinan	12 Laporan	5.000.000	
b.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perijinan Non Usaha	Kec. Pejawaran	Jumlah dokumen Pelayanan Non Perijinan Usaha yang di Laksanakan	12 Dokumen	13.822.300	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perijinan Non Usaha	Kec. Pejawaran	Jumlah dokumen Pelayanan Non Perijinan Usaha yang di Laksanakan.	12 Dokumen	13.822.300	
c.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Pejawaran	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan	1 Laporan	80.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Pejawaran	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan	1 Laporan	80.000.000	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sasaran Strategis : **Meningkatnya Efektivitas Koordinasi dan Fasilitasi**	Kec. Pejawaran	Indeks Desa di Wilayah Kecamatan	70,00		Sasaran Strategis : **Meningkatnya Efektivitas Koordinasi dan Fasilitasi**	Kec. Pejawaran	Indeks Desa di Wilayah Kecamatan	70,00		
III	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Kec. Pejawaran	Persentase lembaga desa/kelurahan di kecamatan yang terfasilitasi	100%	13.350.000	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Kec. Pejawaran	Persentase lembaga desa/kelurahan di kecamatan yang terfasilitasi	100%	13.350.000	
1	**Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa**	Kec. Pejawaran	Persentase Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang terlaksana	100%	9.600.000	**Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa**	Kec. Pejawaran	Persentase Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang terlaksana	100%	9.600.000	
a	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kec. Pejawaran	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	1 Laporan	9.600.000	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kec. Pejawaran	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	1 Laporan	9.600.000	
2	**Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan**	Kec. Pejawaran	Persentase Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan	100%	3.750.000	**Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan**	Kec. Pejawaran	Persentase Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan	100%	3.750.000	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Pejawaran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan	3.750.000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Pejawaran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan	3.750.000	
IV	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kec. Pejawaran**	**Persentase penanganan konflik di wilayah**	100%	**3.750.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kec. Pejawaran**	**Persentase penanganan konflik di wilayah**	100%	**3.750.000**	
1.	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah**	**Kec. Pejawaran**	**PersentasePenyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah yang terlaksana**	100%	**3.750.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah**	**Kec. Pejawaran**	**PersentasePenyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah yang terlaksana**	100%	**3.750.000**	
a	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Pejawaran	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6Dokumen	**3.750.000**	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Pejawaran	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6Dokumen	**3.750.000**	
II.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA**	**Kec. Pejawaran**	**Persentase Desa yang tertib Administrasi Desa**	100%	**38.882.000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA**	**Kec. Pejawaran**	**Persentase Desa yang tertib Administrasi Desa**	100%	**38.882.000**	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kec. Pejawaran**	**Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana**	100%	38.882.000	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kec. Pejawaran**	**Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana**	100%	38.882.000	
a	Fasilitasi Penyusunan Perdes dan Perkades	Kec. Pejawaran	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Perdes dan Perkades	34 Dokumen	4.500.000	Fasilitasi Penyusunan Perdes dan Perkades	Kec. Pejawaran	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Perdes dan Perkades	34 Dokumen	4.500.000	
b	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Pejawaran	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	17 Dokumen	4.500.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Pejawaran	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	17 Dokumen	4.500.000	
c	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Pejawaran	Jumlah Dokumen yang di falsilitasi dalam rangka Pengelolaan Keungan	34 Dokumen	2.250.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Pejawaran	Jumlah Dokumen yang di falsilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan	34 Dokumen	2.250.000	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			
d	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec. Pejawaran	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		0	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec. Pejawaran	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-	0	
e	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Pejawaran	Jumlah dokumen yang diFasilitasi dalam rangka Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	14.132.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Pejawaran	Jumlah dokumen yang diFasilitasi dalam rangka Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	14.132.000	
f	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Pejawaran	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6 Dokumen	4.500.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Pejawaran	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6 Dokumen	4.500.000	
g	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan	Kec. Pejawaran	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka	17 Dokumen	0	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan	Kec. Pejawaran	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka	17 Dokumen	0	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Masyarakat Desa		Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa			Pemberdayaan Masyarakat Desa		Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa			
h	Fasilitasi Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Pejawaran	Jumlah dokumen Fasilitasi koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 Laporan	9.000.000	Fasilitasi koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Pejawaran	Jumlah dokumen Fasilitasi Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 Laporan	9.000.000	

Berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2026, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan yaitu :

1. Memprioritaskan kegiatan yang belum terlaksana di tahun 2024
2. Memprioritaskan pelaksanaan kegiatan yang manfaatnya langsung dirasakan oleh Masyarakat
3. Mempedomani prinsip efisiensi dengan memprioritaskan kegiatan yang menjadi kegiatan wajib dan kegiatan pokok.
4. Melanjutkan kegiatan yang sudah ada di tahun 2024.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan musrenbang kecamatan dan forum konsultasi publik telah disampaikan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui aplikasi SIPD. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Untuk tahun 2024 tidak ada usulan program, kegiatan dan sub kegiatan masyarakat yang diterima oleh Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara seperti yang diterlihat pada tabel 2.4:

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2026 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	NIHIL				

2.6. Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan hasil reses anggota DPRD, melalui aplikasi SIPD telah disampaikan usulan program dan kegiatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Untuk tahun ini tidak ada usulan program, kegiatan dan sub kegiatan usulan pokok-pokok pikiran yang diterima oleh Kecamatan

Pejawaran Kabupaten Banjarnegara seperti yang diterlihat pada tabel 2.5 :

Tabel 2.5

Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Program dan Kegiatan

Tahun 2026 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Validasi
	NIHIL				

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam Upaya melaksanakan tugas dan fungsi, maka Kecamatan Pejawaran melaksanakan kebijakan daerah yang sinergis dengan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun pemerintah Pusat. Kegiatan yang akan dilakukan oleh Kecamatan pejawaran diharapkan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan diatasnya, mempunyai rasa keadilan, pemerataan dan diarahkan agar implementasi akan dapat berdampak pada kemajuan dan kesejahteran masyarakat di wilayah kecamatan pejawaran. Renja yang disusun perangkat daerah pedoman pada RKPD dan RPJPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 – 2029 dengan Visi **"Banjarnegara Maju dan Sejahtera"**. Yang akan diwujudkan melalui 5 (lima) misi yang merupakan turunan dari pokok-pokok visi yang telah diidentifikasi sebelumnya, yaitu :

1. Meningkatkan Infrastruktur dan Pelayanan Publik
2. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal
3. Meningkatkan Kualitas dan Akses Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan Sosial.
4. Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.
5. Mewujudkan Pemerintahan yang baik dan transparan.

Dalam mencapai Visi Kabupaten Banjarnegara, Kecamatan Pejawaran mempunyai peran dan fungsi menggerakan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah dalam menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan. Terutama di kaitkan dengan pelaksanaan pelimpahan kewenangan yang secara mutlak harus didukung oleh sumber daya manusia aparatur yang mampu mengelola tugas-tugas pelayanan secara optimal, efektif dan efisien, serta mampu merumusakan kebijakan-kebijakan yang implementatif yang di tunjukan untuk kesejahteraan masyarakat, yang pada muaranya mewujudkan Visi Kabupaten Banjarnegara.

Tujuan yang akan diwujudkan selama periode 2025 – 2029 adalah "Terwujudnya Banjarnegara maju dan Sejahtera" yang diukur melalui indikator PDRB per kapita dan angka kemiskinan yang akan di tempuh melalui 4 sasaran strategis, yaitu:

1. Meningkatkanya kualitas hidup Masyarakat
2. Meningkatkanya perekonomioan daerah yang berdaya saing dan berbasis potensi local secara berkelanjutan
3. Meningkatkanya infrastruktur yang mendukung perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat
4. Meningkatkanya tata Kelola pemerintah yang transparan, akuntabel, dan partisipatif

Adapun sasaran strategis yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam pencapaian visi misi Kepala Daerah sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Pejawaran sebagai salah satu perangkat daerah Kabupaten Banjarnegara dari 4 (empat) sasaran strategis tersebut adalah sasran Strategis ke-4 yaitu:

1. Meningkatkanya tata kelolapemerintah yang transparan, akuntabel dan partisipatif dengan indikator kinerja indeks Reformasi Birokrasi. Meningkatkan profesionalisme aparatur daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, beretika dan bertanggung jawab, serta mampu mendukung Pembangunan daerah yang bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (KKN), meningkatkanya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan Masyarakat

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Pejawaran

Tujuan Adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan, sedangkan sasaran Adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapaianya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapain outcome program Perangkat Daerah. Dengan kata lain tujuan dan sasaran merupakan dampak (impact) keberhasilan Pembangunan daerah yang diperoleh dari

pencapaian berbagai program prioritas terkait. Rumusan tujuan yang akan dicapai oleh Kecamatan Pejawaran dalam mendukung RPJNB Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

Tujuan adalah Meningkatkanya aksesibilitas layanan pemerintah dalam urusan kewilayahan di Kecamatan Pejawaran.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional.

Sasaran strategis yang akan dicapai oleh Kecamatan Pejawaran yaitu:

1. Meningkatkanya akuntabilitas kinerja perangkat daerah urusan daerah kewilayahan
2. Meningkatkanya Efektivitas koordinasi dan failitas pemberdayaan desa/kelurahan

Tujuan dan saasaran jangka menengah Kecamatan Pejawaran beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel sebagaimana berikut ini:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target				
				2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkanya aksesibilitas layanan pemerintah dalam urusan kewilayahan di Kecamatan Pejawaran		Indeks Pelayanan Publik	86,75	86,80	86,85	86,90	86,95
1.		Meningkatkanya akuntabilitas kinerja perangkat daerah urusan daerah kewilayahan	Nilai SAKIP Kecamatan	BB 70,20	BB 70,25	BB 70,30	BB 70,35	BB 70,40
2		Meningkatkanya Efektivitas koordinasi dan failitas pemberdayaan desa/kelurahan	Indeks Desa di Wilayah Kecamatan	70,00	70,25	70,50	70,75	71,00

3.3. Program dan Kegiatan

(Sajikan Matriks yang berasal dari SIPD)

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN PEJAWARAN KAB. BANJARNEGARA
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	RENLEKAS CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN PEJAWARAN						2.517.289.589,00							227.887.715.700,00	
	1	URUSAN WAJIB ATAUPUN						2.517.289.589,00							227.887.715.700,00	
	1.01	KECAMATAN						2.517.289.589,00							227.887.715.700,00	
1	1.01.01	PROGRAM PEMENUHAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.314.820.289,00							9.999.239.900,00	
	1.01.01.2.01	Pelayanan Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Tahunan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran						15.289.320,00				Pengadaan Langganan Daya Listrik Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Tahunan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran			15.297.320,00	KECAMATAN PEJAWARAN
	1.01.01.2.01.0001	Penyediaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				14 Dokumen	9.500.000,00	Kab. Banjarnegara, Pejawaran, Seluruh Kab/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengadaan Langganan Daya Listrik Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Tahunan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran			9.500.000,00	KECAMATAN PEJAWARAN
	1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koreksi Hasil Evaluasi Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				13 Laporan	9.500.000,00	Kab. Banjarnegara, Pejawaran, Seluruh Kab/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Menanggulangi bila terjadi pemadaman/ yang mengakibatkan gangguan pada			13.000.000,00	KECAMATAN PEJAWARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN RENJA PERUBAHAN TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PROVINSI			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.226.734.000,00				Penyusunan Laporan Hasil Kerja Pemerintah an Bernilai, Hasil Dan Dokumentasi Meningkatkan Nilai Hasil yang Transparan dan Akuntabel dan Terlaporkan			2.226.000.000,00	KESEKRETARIS PEJABARAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				72 Orang/Bulan	2.226.734.000,00	Kab. Banjarnegara, Pagerwangi, Sumur Kodi/Desa	Dalam ACUN dan LAIN (DAU)		Penyusunan Laporan Hasil Kerja Pemerintah an Bernilai, Hasil Dan Dokumentasi Meningkatkan Nilai Hasil yang Transparan dan Akuntabel dan Terlaporkan			2.226.000.000,00	KESEKRETARIS PEJABARAN
	7.01.01.2.02.0002	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	21.844.000,00	Kab. Banjarnegara, Pagerwangi, Sumur Kodi/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penyusunan Laporan Hasil Kerja Pemerintah an Bernilai, Hasil Dan Dokumentasi Meningkatkan Nilai Hasil yang Transparan dan Akuntabel dan Terlaporkan			22.000.000,00	KESEKRETARIS PEJABARAN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran, SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU BERCAPAI TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran, DHTC dan Laporan Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran (BKPD				18 Laporan		Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengusaha Lembaga Tata Kelola Pemerintah an Berorientasi Non Dan Dinamisasi Meningkatkan Mitra kerja dan/ atau yang mewakilinya dan/ atau kepuasan				
		Administrasi Umum Perangkat Daerah														
		Penyelesaian Perabotan dan Pemeliharaan Kantor														
			Jumlah Paket Pengadaan dan Pemeliharaan Kantor yang Disediakan				2 Paket		Kab. Banyumas, Pagerwangi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengusaha Lembaga Tata Kelola Pemerintah an Berorientasi Non Dan Dinamisasi Meningkatkan Mitra kerja dan/ atau yang mewakilinya dan/ atau kepuasan				
		Pengadaan Barang Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NAMA/TOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA (SPM)	REALISASI CAPAIAN AKHIR TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET AKHIR TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN BAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKUS	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pajak Alkohol Logistik Kantor yang Diverifikasi				11 Paket	80.000.000,00	Kab. Banyumegara Pegawainan Semua Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengadaan Lanskapan Tata Kelola Pemerintah an Barang Hasi Dan Dicatatkan Meningkatkan tata kelola yang an hukum yang menyatakan ak-undang dan perlakuan			120.645.290,00	KEC.BANYUMEGARA PEJANGKAN
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						17.500.000,00							110.000.000,00	KEC.BANYUMEGARA PEJANGKAN
	2.01.01.2.01.0005	Pengadaan Mobil														
			Jumlah Pajak Mobil yang Diinstalasi				30 Unit	17.500.000,00	Kab. Banyumegara Pegawainan Semua Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengadaan Lanskapan Tata Kelola Pemerintah an Barang Hasi Dan Dicatatkan Meningkatkan tata kelola yang an hukum yang menyatakan ak-undang dan perlakuan			70.000.000,00	KEC.BANYUMEGARA PEJANGKAN
	1.01.01.2.01.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA (OPD)	REALISASI CAPAIAN KINERJA (OPD) TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET KINERJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Banjarnegara Pagelaran Sumur Kidul Desa	PENDAPATAN HIBAH DAERAH (PHD)		Pengadaan Kendaraan Tidak Khusus Pemerintah an Bermotor Roda Dua Untuk Operasional Menunjukk an Satu kendaraan roda dua (1 Unit) Kompresor ak Universal dan sarananya				KECAMATAN PEJAWARAN
	7.01.01.3.07.0008	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Banjarnegara Pagelaran Sumur Kidul Desa	PENDAPATAN HIBAH DAERAH (PHD)		Pengadaan Kendaraan Tidak Khusus Pemerintah an Bermotor Roda Dua Untuk Operasional Menunjukk an Satu kendaraan roda dua (1 Unit) Kompresor ak Universal dan sarananya				KECAMATAN PEJAWARAN
	7.01.01.3.08	Pemeliharaan Jalan Penyiapan Jaringan Pemeliharaan Operasi						80.251.000,00				Pengadaan Kendaraan Tidak Khusus Pemerintah an Bermotor Roda Dua Untuk Operasional Menunjukk an Satu kendaraan roda dua (1 Unit) Kompresor ak Universal dan sarananya			80.251.000,00	KECAMATAN PEJAWARAN
	7.01.01.3.08.0003	Pemeliharaan Jalan Kampung Sumber Daya Air dan Lahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET MUSRI PERKIRAAN RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERAN PERANG
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Jumlah Laporan Pendidikan Jasa Konsultasi, Sumber Daya Air dan Lahan yang Disediakan				12 Laporan		Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana ALOKASI UMUM (DAU)		Pengusaha Lembaga Tata Kelola Pemerintah an Bentang Alam Dan Ekosistem Meningkat an tata kelola pem an daerah yang berkelanjutan ekonomi, dan ya berpihak				
	7.01.01.2.06.0808	Pengelolaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Pendidikan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan		Kab. Banjarnegara, Pelayanan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengusaha Lembaga Tata Kelola Pemerintah an Bentang Alam Dan Ekosistem Meningkat an tata kelola pem an daerah yang berkelanjutan ekonomi, dan ya berpihak				
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
	7.01.01.2.09.0502	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA PERUBAHAN RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan dan dikelola Pada Dan Perlengkapan				4 Unit	424.811.400,00	Kab. Banyuwangi, Prabowono, Pojawangi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berbasis Nilai Dan Orientasi Meningkatkan tata kelola pem erintahan yang Kompeten dan inovatif dan profesional			424.811.400,00	KELEMBAGAAN PEJAWANAN
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan/Perbaikan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	80.000.000,00	Kab. Banyuwangi, Prabowono, Pojawangi, Sarnus Kab/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berbasis Nilai Dan Orientasi Meningkatkan tata kelola pem erintahan yang Kompeten dan inovatif dan profesional			80.000.000,00	KELEMBAGAAN PEJAWANAN
	1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Perbaikan Gedung dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	19.811.000,00	Kab. Banyuwangi, Prabowono, Pojawangi, Sarnus Kab/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berbasis Nilai Dan Orientasi Meningkatkan tata kelola pem erintahan yang Kompeten dan inovatif dan profesional			19.811.000,00	KELEMBAGAAN PEJAWANAN
7	1.01.03	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					1	458.997.349,00						1	123.997.349,04	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Izin Penyimpan Limbah yang Diterbitkan				12 Dokumen	9.000.000.00	Kab. Banyuasagka, Pegawasan Semua Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengawasan Lapangan Tata Kelola Pertambangan di Sentang Hilir Dan Dinamakan Meningkatkan tata kelola pertambangan di lahan yang terhamparan akumulasi dari pertambangan			9.000.000.00	KEGIATAN PELAKSANAAN
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kehutanan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengawasan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	11.822.000.00	Kab. Banyuasagka, Pegawasan Semua Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengawasan Lapangan Tata Kelola Pertambangan di Sentang Hilir Dan Dinamakan Meningkatkan tata kelola pertambangan di lahan yang terhamparan akumulasi dari pertambangan			14.822.000.00	KEGIATAN PELAKSANAAN
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Tumah Tangga Kawasan Lain yang Ditetapkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kawasanpasi Lain yang Ditetapkan				1 Laporan	40.000.000.00	Kab. Banyuasagka, Pegawasan Semua Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengawasan Lapangan Tata Kelola Pertambangan di Sentang Hilir Dan Dinamakan Meningkatkan tata kelola pertambangan di lahan yang terhamparan akumulasi dari pertambangan	-		40.000.000.00	KEGIATAN PELAKSANAAN
2	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	-	-			-	**13.133.000.00**						-	**19.133.000.00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN NILAI PERCAPAIAN TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET (RP)	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.20.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa										Pengadaan Lahan Untuk Kepentingan Umum Yang Berhak Atas Ganti Kerugian Dan Diselesaikan Dengan Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah				
	7.01.20.2.01.0003	Peningkatan Kapabilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Kapabilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan		Kab. Banyuwangi, Pegawai di Semua Kecamatan	PENGAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengadaan Lahan Untuk Kepentingan Umum Yang Berhak Atas Ganti Kerugian Dan Diselesaikan Dengan Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah				
	7.01.20.2.02	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan										Pengadaan Lahan Untuk Kepentingan Umum Yang Berhak Atas Ganti Kerugian Dan Diselesaikan Dengan Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah				
	7.01.20.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN KINERJA OPD TAHUN 2024	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET KINERJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Dibinakan Kejaksaannya				2 Lembaga	3.750.000.00	Kab. Banyuwangi, Pagowaras, Glenmore Kalibaru	PENERIMAAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengaturan Lembaran Tata Kelola Pemerintah an Bentang Nus Dan Cinanndd Meningkatkan fata serta peri ormanc yang kompeten an profesi dan terdaptf			3.750.000.00	KEJAKSAAN PELAKSANAAN
1	7.01.99	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					-	3.750.000.00						-	11.250.000.00	
	7.01.06.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum						3.750.000.00				Pengaturan Lembaran Tata Kelola Pemerintah an Bentang Nus Dan Cinanndd Meningkatkan fata serta peri ormanc yang kompeten an profesi dan terdaptf			11.250.000.00	KEJAMAAN PELAKSANAAN
	7.01.04.2.01.9901	Sinergitas dengan Kejaksaan Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kejaksaan Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia				1 Laporan	3.750.000.00	Kab. Banyuwangi, Pagowaras, Glenmore Kalibaru	PENERIMAAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengaturan Lembaran Tata Kelola Pemerintah an Bentang Nus Dan Cinanndd Meningkatkan fata serta peri ormanc yang kompeten an profesi dan terdaptf			7.500.000.00	KEJAMAAN PELAKSANAAN
	7.01.04.2.01.9903	Harmonisasi Kultur dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI/KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENTARA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemrosesan Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				5 Laporan	1.00	Kab, Kecamatan Pagowahar, Daerah Kab/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengadaan Lembaran Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Universitas Meningkatkan tata kelola pem erintahan yang berkualitas dan terbuka			3.750.000.00	KETUMANTAN PEMANGKAN
2	7.01.00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						19.800.000.00							17.850.000.00	
	7.01.00.2.21	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Selain Pertugasan Kepala Daerah						19.80.1.000.00				Pengadaan Lembaran Tata kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Universitas Meningkatkan tata kelola pem erintahan yang berkualitas dan terbuka			17.850.000.00	KECAMATAN PEJAWARAN
	7.01.00.2.21.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				5 Dokumen	19.80.1.000.00	Kab, Kecamatan Pagowahar, Daerah Kab/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengadaan Lembaran Tata kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Universitas Meningkatkan tata kelola pem erintahan yang berkualitas dan terbuka			17.850.000.00	KECAMATAN PEJAWARAN
3	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						19.800.000.00							225.000.000.00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN KINERJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET KINERJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.06.2.01	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa										Pengaturan Lembaran Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Hak Dan Tanggungjawab Menanggulangi Isu kerentanan yang mempengaruhi kinerja pemerintah				
	1.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pemusyawarat Pemerintah Desa dan Pemerintah Pelosok Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Perkumpul Kepala Desa				34 Dokumen	4.000.000.000	Kab. Banyuwangi, Pesanggaran, Sarnya Kab/Kota	PERATURAN PRESIDEN (PERPRES)		Pengaturan Lembaran Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Hak Dan Tanggungjawab Menanggulangi isu kerentanan yang mempengaruhi kinerja pemerintah			3.800.000.00	
	1.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				7 Dokumen	4.500.000.00	Kab. Banyuwangi, Sarnya Kecamatan Sarnya Kab/Kota	PERATURAN PRESIDEN (PERPRES)		Pengaturan Lembaran Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Hak Dan Tanggungjawab Menanggulangi isu kerentanan yang mempengaruhi kinerja pemerintah			5.500.000.00	
	1.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN KINERJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN BELUJ RENCANA Tahun 2021		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET RPJPD	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen yang Dibuatkan dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendapatan Asli Desa				14 Dokumen	2.250.000.00	Kab. Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Lembaga Tata Kelola Pemerintah an Berbasis Hak Dan Gravitasi Meningkatn ya tata kelola pem erintah yang kompeten dan profesi onal			2.250.000,00	KECAMATAN PESANGGARAN
	1.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa														
			Jumlah Dokumen Dasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				7 Dokumen	7.000.000.00	Kab. Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Lembaga Tata Kelola Pemerintah an Berbasis Hak Dan Gravitasi Meningkatn ya tata kelola pem erintah yang kompeten dan profesi onal			7.000.000.000,00	KECAMATAN PESANGGARAN
	1.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														
			Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintahan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				7 Dokumen	18.132.000.00	Kab. Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Lembaga Tata Kelola Pemerintah an Berbasis Hak Dan Gravitasi Meningkatn ya tata kelola pem erintah yang kompeten dan profesi onal			18.132.000,00	KECAMATAN PESANGGARAN
	1.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama Desa Kawasan Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	KELUARAN CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan/ Pelaksanaan/ Pengendalian/ Pelaporan dan Kunsultasi Umum				5 Dokumen	4.560.000,00	Kab Banjarnegara Pegawai ke Semua Kec/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengadaan Lavalitasi Tata Kelola Pemerintah an Bantreg dan Dan Kewenangan Meningkatkan ide kreatif yang ke daerah yang kompetensi dan kreatif dan pelayanan			5.560.000,00	KOTAMANTAN PELAKSANAAN
	7.01.06.2.01.0010	Fasilitasi Perumusan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				30 Dokumen	0,00	Kab Banjarnegara Pegawai ke Semua Kec/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengadaan Lavalitasi Tata Kelola Pemerintah an Bantreg dan Dan Kewenangan Meningkatkan ide kreatif yang ke daerah yang kompetensi dan kreatif dan pelayanan			1.750.000,00	KOTAMANTAN PELAKSANAAN
	7.01.06.2.01.0011	Koordinasi Pembangunan Desa & Masyarakat														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pembangunan Desa di Wilayahnya				12 Laporan	9.000.000,00	Kab Banjarnegara Pegawai ke Semua Kec/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengadaan Lavalitasi Tata Kelola Pemerintah an Bantreg dan Dan Kewenangan Meningkatkan ide kreatif yang ke daerah yang kompetensi dan kreatif dan pelayanan			10.000.000,00	KOTAMANTAN PELAKSANAAN
	JUMLAH							1.917.250.000,00							237.697.713.700,00	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program pada perangkat daerah merupakan program prioritas dalam Renstra 2023-2026. Rencana program prioritas beserta indicator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD selanjutnya dijabarkan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Pemilihan untuk masing-masing program/ kegiatan di Kecamatan Pejawaran dijabarkan sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

   Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 6 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan :

   a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b. Dengan 2 sub kegiatan yaitu Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
   c. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   d. Dengan 3 sub kegiatan yaitu Penyenyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
   e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   f. Dengan 2 sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
   g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   h. Dengan 1 sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

i. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
j. Dengan 2 sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
k. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
l. Dengan 3 sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terdiri dari 2 kegiatan yang diarahkan, yaitu :

a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.

   Dengan 3 sub kegiatan yaitu Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Non Perijinan, Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perijinan Non Usaha dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.

b. Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum.

   Dengan 1 sub kegiatan yaitu Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum.

3. **Program Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan, yaitu :

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah. Dengan 1 sub kegiatan yaitu Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

4. **Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan, yaitu :

a. Koordinasi Upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Dengan 1 sub kegiatan yaitu Sinergitas dengan Kepolisian dan TNI

5. **Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terdiri dari 1 kegiatan yaitu :

a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Dengan 7 sub kegiatan yaitu Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa, Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa, Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa, Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Fasilitasi Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 merupakan rencana kerja tahunan yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarengara Tahun 2025-2029. Renja Perangkat Daerah selanjutnya menjadi platform operasional bagi Perangkat Daerah dalam menjalankan programnya untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi Pembangunan daerah tahun 2025-2029. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026 dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disepakati.
2. Kerangka pendanaan dalam Renja Perangkat Daerah masih bersifat sementara, sehingga masih dimungkinkan terjadi perubahan pagu yang disebabkan oleh pengurangan, penambahan, dan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan maupun antar sub kegiatan dalam kerangka penyusunan anggaran secara terpadu dan berbasis kinerja.
3. Renja Perangkat Daerah menjadi acuan bagi Kepala Perangkat Daerah dan segenap jajarannya serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan Pembangunan, serta menjaadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan Pembangunan daerah.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal : Agustus 2025

CAMAT PEJAWARAN

SETIYADI, S.STP
Pembina
NIP. 19810615 200112 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rakhmat dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Awal Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026.

Rancangan Awal Renja Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rancangan Awal Renja Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 terdiri dari pendahuluan, hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, tujuan dan sasaran Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara, dan rencana kerja dan pendanaan serta penutup. Penyusunan Rancangan Awal Renja tersebut berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 dan mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan memperhatikan RPJMN 2025-2029 dan mengacu pada Renstra Kecamatan Batur Tahun 2025-2030.

Kami menyadari dalam penyusunan Rancangan Awal Renja ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan rancangan rencana kerja dimaksud.

Banjarnegara, Agustus 2025

Plt. CAMAT BATUR

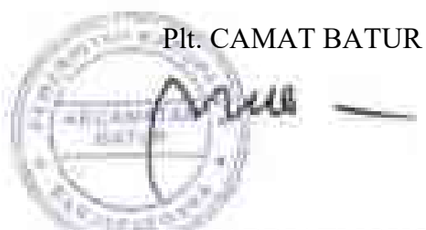

SLAMET MARDIATMOKO,S.Sos
Pembina
NIP. 19671125 199103 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ……..…….……. i

DAFTAR ISI ……..……... ii

DAFTAR TABEL ……..…….. iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang..... 1

1.2. Landasan Hukum..... 2

1.3. Maksud dan Tujuan …….…… 7

1.4. Sistematika Penulisan..... 7

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH 9

TAHUN LALU **Error! Bookmark not defined.**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 9

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 22

2.3. Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah... 24

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ……..…….. 29

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat. 38

2.6. Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Program dan Kegiatan Tahun 2026 Kabupaten Banjarnegara……..…….……...…….. 38

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 39

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... 39

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah..... 40

3.3 Matrik Program dan Kegiatan Tahun 2026 …….……...…….. 42

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH……43

BAB V PENUTUP…… 46

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Kabupaten Banjarnegara ……..…..13

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara 23

Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 29

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 ……...……..38

Tabel 2.5. Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Program dan Kegiatan Tahun 2026 Kabupaten Banjarnegara ……..…..…… 38

Tabel 3.3. Matrik Program dan Kegiatan Tahun 2026 ……..…… 43

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan yang diatur melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan pembentukan tim penyusun, penelaahan rancangan awal RKPD, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, hingga pada penyempurnaan berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang RKPD. Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, penyusunan Renja Perangkat Daerah juga mengacu pada Renja Kementerian/Lembaga terkait, serta Renja Perangkat Daerah Provinsi terkait. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2. Landasan Hukum

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 050-5889 Tahun 2021
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
26. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 14);
27. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 15);
28. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 Nomor 22).

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun dengan maksud untuk:

a. Sebagai upaya kongkrit menindaklanjuti Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara 2025 – 2030, terutama dalam rangka mewujudkan Kecamatan Batur agar menjadi institusi yang bermutu untuk mewujudkan kemandirian masyarakat.
b. Mengoptimalkan peran Kecamatan Batur dalam melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat.
c. Meningkatkan dan mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam rangka mewujudkan good and clean governance.
d. Sebagai kerangka serta arah pembangunan untuk tahun 2026 dalam pencapaian Tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, Program serta sebagai tolok ukur pertanggungjawaban Kecamatan Batur pada akhir tahun anggaran.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

a. Menjadi pedoman dalam menyusun RKAP-DPPA dalam Rancangan APBD Perubahan Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2026, yang dalam penyusunannya didahului dengan menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026;
b. Sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Tahun 2026;
c. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun berdasarkan sistematika yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah.

BAB 2 : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dan atau pokok-pokok DPRD.

BAB 3 : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan tahun 2026.

BAB 4 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran RKPD.

BAB 5 : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah meliputi urusan kewilayahan.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 terdiri dari 4 program, 10 kegiatan, dan 24 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 2.508.744.077,- (Dua Milyar Lima Ratus Delapan Juta Tujuh Ratus Empatpulu Empat Tujuhpuluh Tujun Tupiah) dengan fokus utama pada mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa (*uraikan prioritas daerah tahun 2026 yang didukung oleh Perangkat Daerah*). Program/kegiatan/sub kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah yang meliputi:

1. Masih rendahnya keselarasan dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang ada.
2. Administrasi desa tentang pengelolaan surat, pengelolaan arsip dan pengelolaan asset desa belm tertib.
3. Kinerja Lembaga-lembaga desa belum berfungsi maksimal
4. Administrasi keuangan desa yang belum tertib.
5. Administrasi pengadaan barang dan jasa di desa belum maksimal.
6. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pelunasan PBB.
7. Masih kurangnya pemahanan masyarakat terkait persyaratan administrsasi pengurusan dokumen.

Dari 4 program, 10 kegiatan, dan 24 sub kegiatan yang dalam Renja Perangkat Daerah tersebut, program/kegiatan/sub kegiatan yang disetujui untuk dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2026 terdiri dari 4 program, 10 kegiatan, dan 24 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 2.508.744.077,- (Dua Milyar Lima Ratus Delapan Juta Tujuh Ratus Empatpulu Empat Tujuhpuluh Tujun Tupiah)

Dinamika yang terjadi selama tahun 2025 turut mempengaruhi keberhasilan pencapaian Renja Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2025, tercatat adanya hasil yang baik yang dikarenakan adanya pencapaian maupun pelampauan target maupun yang tidak memenuhi target.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaktercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Menunggu hasil refocusing dan pengurangan anggaran

2. Penghapusan anggaran subkegiatan

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Adanya koordinasi yang baik dari Camat sampai ke staf kecamatan dan desa dalam menjalankan tugas dan fungsi di Kecamatan Batur.
2. Merencanakan program kerja, target kinerja dan dituangkan dalam anggaran.
3. Melaksanakan dan melaporkan program kerja, target kinerja yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka dapat disimpulkan semua program bisa dilaksanakan dengan baik hanya perlu ditingkatkan di tahun yang akan datang. Pada tahun perencanaan selanjutnya, perlu diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk meningkatkan kinerja capaian tersebut, diantaranya:

1. Menyelenggarakan bimbingan teknis tentang administrasi keuangan desa dan pengadaan barang dan jasa.
2. Menyelenggarakan bimbingan teknis administrasi perkantoran dan inventaris asset desa.
3. Menyelenggarakan bimbingan teknis Lembaga-lembaga desa

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2025 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
s.d. Tahun 2025 Semester 1* Kabupaten Banjarnegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
7.01.	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan**									

7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Nilai SKM**	83,71	83,05	83,71	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja**	**Prosentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	100%	100%	100%
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokmen	8 dokumen	8 dokmen	7 dokumen	100%	8 dokumen	8 dokumen	100
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terpenuhinya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100%	5 dokumen	5 dokumen	100
7.01.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**100%**	**100%**	100%	100%	**100%**	**100%**	100
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	16 orang	16 orang	16 orang	16 orang	100%	16 orang	16 orang	
7.01.01.2.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	26 dokumen	20 dokumen	20 dokumen	20 dokumen	100%	20 dokumen	26 dokumen	

7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bln/Semesteran SKPD	Terpenuhinya Laporan Keuangan Bln/Semesteran SKPD	6 laporan	6 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	2 lapoaran	10 laporan	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	100%	100%	**100%**	**100%**	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		3 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	5 paket	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistic kantor		18 paket	6 paket	4 paket	100%	6 paket	30 paket	
7.01.01.2.07	**Kegiatan Pengadaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase Tersedianya barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**100%**	**100%**	100%	100%	100%		
7.01.01.2.07.11	Pengadaan sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tercukupinya sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 unit	16 unit	2 unit	0 unit	0%	-unit	18 unit	
7.01.01.2.08	**KegiatanPenyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan**		**100%**	**100%**	100%	100%			

		Pemerintah Daerah								
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air da Listrik	Terbayarkannya jasa rekening listrik	12 laporan	3 laporan	12 laporan	6 laporan	50%	1 paket	5 paket	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbabyarkanya honor PTT dan THL	12 laporan	12 laporan	12 laporan	6 laporan	50 %	4 orang	20 orang	
7.01.01.2.09	**Kegiatan Pemeilharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**100%**	**100%**	100%	100%	**100%**	**100%**	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeilharaan, pajak, dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Terpeliharanya dan terbayarkanya pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan	7 unit	9 unit	7 unit	4 unit	100%	7 unit	20 paket	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Terpeliharanya Gedung kantor dan bangunan lainya	2 unit	12 unit	4 unit	0 unit	0%	4 unit	16 unit	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung	Terpeliharanya sarana dan prasarana Gedung kantor dan bangunan lainya	3 unit	6 paket	2 paket	1 paket	50%	2 paket	9 paket	

	kantor dan bangunan lainnya									
7.01.02	**Program Penyelnggran Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Prosentase Penyelnggran Pemerintahan dan Pelayanan Publik**		**100%**	**100%**	100%	100%	100%	**100%**	
	Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum	**Persentase Terselenggaranya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum**	**100%**	**100 %**	**100%**	100%	100%	100%		
	Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 dok	0 dok	1 dok	0 dok	0%			
7.01.02.2 .04	**Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kpd Camat**	**Prosentase Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kpd Camat**		**100%**	**100%**	100%	100%	**100%**	**100%**	

7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yg terkait dengan Nonperijinan	Terlayaninya Pelayanan Masyarakat dalam Pelayanan KTP dan KK	12 laporan	24.000 pemohon	12 laporan	6 laporan	100%	100%	38.625 pemohon	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan urusan pemerintahan yg terkait dgn kewenangan lainnya yg dilimpahkan	Jumlah pelunasan PBB	1 laporan	1 Laporan	1 laporan	0 laporan	100%	100%	100%	
7.01.05	**Program Penyelenggaraan urusan pemerintaha umum**	**Prosentase Penyelenggaraan urusan pemerintaha umum**		**100%**	**100%**	100%	100%	**100%**	**100%**	
7.01.05.2.01	**Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah**	**Prosentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah**		**100%**	**100%**	100%	100%	**100%**	**100%**	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi pimpinan di kecamatan	jumlah laporan koordinasi pimpinan di kecamatan	1 laporan	36 laporan	1 laporan	0 laporan	100%	1 laporan	37 laporan	37
7.01.06	**Prog Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Prosentase Pembinaan dan**		**100%**	**100%**	100%	100%	**100%**	**100%**	

		Pengawasan Pemerintahan Desa								
7.01.06.2.01	**Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**Prosentase Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**		**100%**	**100%**	100%	100%	**100%**	**100%**	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kades	jumlah desa tertib administrasi dan peraturan kepala desa yang sesuai ketentuan	48 dokumen	8 desa	48 dokumen	38 dokumen	100%	8 desa	8 desa	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi adm Tata Pemerintah Desa	Jumlah desa tertib administrasi umum	32 dokumen	8 desa	32 dokumen	28 dokumen	100%	8 desa	5 desa	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi pengelolaan Keuangan desa dan Pendayagunaan asset desa	Jumlah desa tertib administrasi Keuangan desa dan Pendayagunaan asset desa	56 dokumen	24 desa	56 dokumen	32 dokumen	100%	8 desa	5 desa	
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah pemilihan kepala desa yang terfasilitasi	0 dokumen		0 dokumen	0 dokumen	100%	- desa	- desa	
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dgn Pembangunan dsa	Jumlah desa tertib administrasi pembangunan	1 dokumen	8 desa	1 dokumen	1 dokumen	100%	8 desa	8 desa	

7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan ketemtraman dan ketertiban umum	Terlaksananya ketentraman dan ketertiban umum	2 dokumen	1 pengaduan	2 dokumen	1 dokumen	100%	1 pengaduan	- pengaduan	
7.01.06.2.01.16	Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah desa tertib administrasi lainnya	2 dokumen	8 desa	2 dokumen	1 dokumen	100%	8 desa	6 desa	
7.01.06.2.01.17	Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Jumlah koordinasi pendampingan desa yang menjadi kewenangan kecamatan	3 Laporan	8 desa	3 Laporan	2 Laporan	100%	8 desa	8 desa	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka mencapai target Kinerja Organisasi pada tahun 2025 ini Kecamatan Batur mempunyai 2 Indikator Sasaran Strategis sebagai berikut :

Sasaran Strategis Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik yang diukur melalui indikator Nilai IKM dengan target sebesar 83,05 pada tahun 2024,pada table 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2025 Semester I belum dapat dinilai karena proses Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dilaksanakan pada semester 2.

Sasaran Strategis ini didukung 2 Program Kegiatan yaitu

1.1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
1.2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Adapun analisis Kinerja dari ke 2 program tersebut diatas sampai dengan triwulan II tahun 2025 dapat disampaikan sebagai berikut:

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang didikung oleh 2 indikator kegiatan dan 3 indikator sub kegiatan, sampai dengan triwulan II ini indikator program yang dicapai sebesar 2,92 % dari target 100% pada ahir tahun 2025
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, didukung 6 indikator kegiatan dan 13 indikoator sub kegiatan, sampai dengan triwulan II ini indikator program yang dicapai sebesar 70,46 % dari target 100% pada ahir tahun 2025.

1. Sasaran Stategis yang ke dua yaitu Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan indicator Nilai AKIP OPD didukung oleh 2 Program Kegiatan sebagai berikut:
   1.1. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa didukung 1 (satu) Kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan, capaian kinerja Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa hingga triwulan II ini sebesar 61,90 % dari target diakhir tahun sebesar 100%
   1.2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang didukung oleh 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan, capaian kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sampai dengan triwulan ini sebesar 0% dari target 100% diahkir tahun 2025

Dalam pelaksanaan pelayanannya, Perangkat Daerah mengampu 3 Indikator. Dari 3 indikator tersebut, Nilai IKM dan Nilai SAKIP berstatus tercapai dan prosentase pelunasan PBB indikator berstatus tidak tercapai. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain :

1. Adanya koordinasi yang baik dari Camat sampai ke staf kecamatan dan desa dalam menjalan tugas dan fungsi di Kecamatan Batur.
2. Merencanakan program kerja, target kinerja dan dituangkan dalam anggaran.
3. Melaksanakan dan melaporkan program kerja, target kinerja yang telah dilaksanakan.
4. Meningkatnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang tinggi bahkan mencapai lebih 100% untuk beberapa wajib pajak.

Dalam rangka mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut, telah dilakukan upaya-upaya yang meliputi:

1. Perencanaan dan penyelarasan target kinerja dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang baik;
2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya.
3. Koordinasi Pemerintah Kecamatan dan Desa yang telah berjalan dengan baik;
4. Kekompakan Tim Pemungut Pajak dalam pelaksanaan tugas;

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK LPPD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	-	-	81,125	81,2	81,25	81,5	-	83,05	-	83,71	83,71	
2.	Indeks Penilaian SAKIP	-	-	65	65,80	65,80	65,80	B	65,60	67,30	65	65,80	

*) Kolom 3 diisi berdasarkan IKK outcome dalam lampiran Permendagri 18/202

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan urusan pemerintahan dalam urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Kewilayahan. Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPD Tahun 2026-2030, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk tahun 2026 mencakup urusan tersebut. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah diantaranya adalah:

1. Belum optimalnya etos kerja, budaya kerja dan disiplin kerja pegawai;
2. Masih kurangnya pemahanan masyarakat terkait persyaratan administrsasi pengurusan dokumen;
3. Masih rendahnya keselarasan dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang ada;
4. Apatisme masyarakat dalam mengikuti musrenbang;
5. Masih rendahnya pemahaman masyarakat maupun aparatur desa tentang hakekat pembangunan nasional;
6. Masih rendahnya kapasitas aparatur desa dalam melaksanakan tertib administrasi pemerintahan desa;
7. Masih kurangnya keseriusan masyarakat dan petugas pemungut dalam pelunasan PBB lebih awal;
8. Masih rendahnya kesadaran warga akan kebersihan dan tidak adanya Tempat Pembuangan Sampah Akhir di Kecamatan Batur;

Permasalahan tersebut, jika tidak diselesaikan dapat menjadi *constraint* dalam pencapaian visi dan misi Bupati maupun capaian indikator lainnya. Beberapa dampak dari adanya permasalahan dan hambatan tersebut meliputi:

1. Kurang tercapainya suatu kegiatan sesuai indikator kinerja
2. Tidak tercapainya sasaran kerja
3. Belum optimalnya hasil pekerjaan
4. Kurangnya bintek kepada perangkat desa tentang adminstrasi keuangan dan administrasi tata pemerintahan desa

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi, peningkatan kualitas birokrasi, dan meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan pengguna layanan akan meningkatkan kebutuhan akan adanya penyediaan produk layanan yang semakin baik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi-inovasi dalam menunjang peningkatan pelayanan publik secara kontinyu. Beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, yaitu:

1. Masih adanya aparat pemerintahan dan kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif.
2. Masih kurangnya jumlah Aparatur Kecamatan yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai dalam rangka mendukung optimalisasi pelayanan kapada masyarakat
3. Masih kurangnya sumber dana pendukung kerja
4. Peningkatan peran dan fasilitasi kecamatan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah, pelayanan sarana dan prasarana umum serta pencapaian standar pelayanan minimal.

Berdasarkan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangn tersebut, dapat diinventarisasi beberapa isu strategis. Inventarisasi isu-isu strategis tahun 2026 didapatkan dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal Kabupaten Banjarnegara sampai dengan tahun 2025. Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan pembangunan. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2026, sebagai berikut:

1. Masih terbatas dan kurangnya kapasitas serta kompetensi perangkat desa
2. Fasilitas pelayanan publik serta sarana dan prasarana pendukung yang masih kurang memadai.
3. Masih adanya desa dengan angka stunting tinggi di wilayah Kecamatan Karangkobar.
4. Daerah rawan bencana dengan intensitas kejadian yang cukup tinggi.
5. Sarana prasarana kewilayahan yang mangkrak dan belum dibangun/ direhabiltasi (rencana pembangunan terminal di eks Puskesmas Karangkobar).
6. Belum adanya lokasi tempat pembuangan sampah akhir sehingga sampag dari karangkobar dibuang ke TPA Kabupaten yang cukup jauh.
7. Penataan pasar yang masih semrawut sehingga trotoar dijadikan lapak pedagang.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Tahun 2026 merupakan pelaksanaan tahun terakhir RPD Tahun 2023-2026. Dalam RPD Tahun 2023-2026, prioritas arah kebijakan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2026 meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota mempunyai 6 (enam) Kegiatan yaitu :
    1) Perencanaan, Pengganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah mempunyai 2 (dua) sub kegiatan yaitu :
        1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
        2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
    2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah mempunyai 3 (tiga) sub Kegiatan yaitu :
        1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
        2. Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian/Verivikasi Keuangan SKPD
        3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
    3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah mempunyai 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :
        1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
        2. Bahan Logistik Kantor
    4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah mempunyai 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu :
        1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya
    5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mempunyai 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :
        1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, Listrik.
        2. Penyedia Jasa Pelayanan umum Kantor
    6) Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah, Penunjang Urusan Pemerintah Daerah mempunyai 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :
        1. Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
        2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainanya
        3. Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan 1 Kegiatan antara lain :
    i. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dengan 2 (dua) sub Kegiatan antara lain:

1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan.
2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan yang lain yang dilimpahkan.

3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan 1 (satu) Kegiatan yaitu
    1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Sub Kegiatan :
        1. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di kecamatan.

2. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan satu kegiatan yaitu :
    1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terdir
        1. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
        2. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
        3. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Penggunaan Aset Desa
        4. Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa
        5. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
        6. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
        7. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
        8. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 Kabupaten Banjarnegara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Urusan Kewilayahan	Kec. Batur				**Urusan Kewilayahan**	Kec. Batur				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Batur	**Nilai SKM**		2.419.562.077	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Kec. Batur	**Nilai SKM**		2.419.562.077	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Kec. Batur	Prosentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100 %	1.500.000	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja**	Kec. Batur	Prosentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100 %	1.500.000	

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Batur	Terpenuhinya Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	1.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Batur	Terpenuhinya Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	1.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Batur	Terpenuhinya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Batur	Terpenuhinya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	0	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Batur	Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.180.739.099	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kec. Batur	Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.180.739.099	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Batur	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 OB	2.164.269.099	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Batur	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	16 OB	2.164.269.099	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Batur	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	72 dokumen	16.470.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Batur	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	72 dokumen	16.470.000	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bln/Semesteran SKPD	Kec. Batur	Jumlah Laporan Keuangan Bln/Semesteran SKPD	8 laporan	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bln/Semesteran SKPD	Kec. Batur	Jumlah Laporan Keuangan Bln/Semesteran SKPD	8 laporan	0	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kec. Batur**	**Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	55.036.378,38	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Batur	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	55.036.378,38	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Batur	Jumlah paketperalatan dan perlengkapan kantor	1 paket	9.500.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Batur	Jumlah paketperalatan dan perlengkapan kantor	1 paket	9.500.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Batur	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	12 paket	45.536.378	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Batur	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	12 paket	45.536.378	
	Kegiatan Pengadaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kec. Batur**	**Prosentase Tersedianya barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**0**	**Kegiatan Pengadaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kec. Batur	Prosentase Tersedianya barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	**0**	
	Pengadaan sarana dan prasarana Pendukung	Kec. Batur	Jumlah unit pengadaan sarana dan	0 unit	0	Pengadaan sarana dan prasarana	Kec. Batur	Jumlah unit pengadaan sarana dan	0 unit	0	

	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
	KegiatanPenyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Batur	Prosentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	111.386.600	**KegiatanPenyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kec. Batur	Prosentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	111.386.600	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air da Listrik	Kec. Batur	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air da Listrik yang disediakan	12 laporan	15.600.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air da Listrik	Kec. Batur	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air da Listrik yang disediakan	12 laporan	15.600.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Batur	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	13 laporan	95.786.600	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Batur	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	13 laporan	95.786.600	
	Kegiatan Pemeilharaan	Kec. Batur	Prosentase Terpeliharanya		70.900.000	**Kegiatan Pemeilharaan**	Kec. Batur	Prosentase Terpeliharany		70.900.000	

	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			**Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		a Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeilharaan, pajak, dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Kec. Batur	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	6 unit	41.500.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeilharaan, pajak, dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Kec. Batur	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	6 unit	41.500.000	
	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Kec. Batur	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	19.400.000	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Kec. Batur	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	19.400.000	
	Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung kantor dan bangunan lainnya	Kec. Batur	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	10.000.000	Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung kantor dan bangunan lainnya	Kec. Batur	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	10.000.000	

	Program Penyelnggran Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec. Batur	Prosentase Penyelnggran Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	61.857.000	**Program Penyelnggran Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	Kec. Batur	Prosentase Penyelnggran Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	61.857.000	
	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan Umum	Kec. Batur	Prosentase Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan Umum	100 %	0	**Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan Umum**	Kec. Batur	Prosentase Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan Umum	100 %	0	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec. Batur	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 dokumen	0	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec. Batur	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 dokumen	0	
	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Kec. Batur	Prosentase Kegiatan Pelaksanaan Urusan	100 %	61.857.000	**Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan**	Kec. Batur	Prosentase Kegiatan Pelaksanaan Urusan	100 %	61.857.000	

	yang Dilimpahkan kpd Camat		Pemerintahan yang Dilimpahkan kpd Camat			**yang Dilimpahkan kpd Camat**		Pemerintahan yang Dilimpahkan kpd Camat			
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Batur	Jumlah laporan Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 laporan	6.222.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Batur	Jumlah laporan Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 laporan	6.222.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yg terkait dengan Nonperijinan	Kec. Batur	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	0 laporan	0	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yg terkait dengan Nonperijinan	Kec. Batur	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 laporan	0	
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yg terkait dgn kewenangan lainnya yg dilimpahkan	Kec. Batur	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 laporan	55.635.000	Pelaksanaan urusan pemerintahan yg terkait dgn kewenangan lainnya yg dilimpahkan	Kec. Batur	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 laporan	55.635.000	
	Program Penyelenggaraan urusan pemerintaha umum	Kec. Batur	Prosentase Penyelenggaraan urusan pemerintaha umum		12.990.000	**Program Penyelenggaraan urusan pemerintaha umum**	Kec. Batur	Prosentase Penyelenggaraan urusan pemerintaha umum		12.990.000	

	Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kec. Batur	Prosentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah		12.990.000	**Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah**	Kec. Batur	Prosentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah		12.990.000	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi pimpinan di kecamatan	Kec. Batur	jumlah dokumen koordinasi pimpinan di kecamatan	1 dokumen	12.990.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi pimpinan di kecamatan	Kec. Batur	jumlah dokumenkoordinasi pimpinan di kecamatan	1 dokumen	12.990.000	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Batur	Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		14.335.000	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Kec. Batur	Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		14.335.000	
	Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kec. Batur	Prosentase Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		14.335.000	**Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	Kec. Batur	Prosentase Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		14.335.000	

	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kades	Kec. Batur	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	16 Dokumen	0	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kades	Kec. Batur	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	48 Dokumen	0	
	Fasilitasi adm Tata Pemerintah Desa	Kec. Batur	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6 Dokumen	1.475.000	Fasilitasi adm Tata Pemerintah Desa	Kec. Batur	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	32 Dokumen	1.475.000	
	Fasilitasi pengelolaan Keuangan desa dan Pendayagunaan asset desa	Kec. Batur	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10 Dokumen	1.475.000	Fasilitasi pengelolaan Keuangan desa dan Pendayagunaan asset desa	Kec. Batur	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan	56 Dokumen	1.475.000	

								Pendayagunaan Aset Desa			
	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dgn Pembangunan dsa	Kec. Batur	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	2.085.000	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dgn Pembangunan dsa	Kec. Batur	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerahdengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	2.085.000	
	Fasilitasi Penyelenggaraan ketemtraman dan ketertiban umum	Kec. Batur	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Dokumen	1.475.000	Fasilitasi Penyelenggaraan ketemtraman dan ketertiban umum	Kec. Batur	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Dokumen	1.475.000	
	Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Kec. Batur	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2 Dokumen	1.475.000	Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Kec. Batur	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaa	2 Dokumen	1.475.000	

								n Masyarakat Desa			
	Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Kec. Batur	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	3 Laporan	6.350.000	Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Kec. Batur	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	3 Laporan	6.350.000	
			TOTAL		**2.508.744.077**				**TOTAL**	**2.508.744.077**	

Berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2026, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan yaitu:

1. Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor masih sangat minim dan usianya sudah tua sehingga sering mengalami kerusakan;
2. Bangunan gedung kantor banyak yang sudah mengalami kerusakan;
3. Kapasitas dan Kompetensi perangkat Desa masih rendah.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan musrenbang kecamatan dan forum konsultasi publik telah disampaikan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui aplikasi SIPD. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	NIHIL				

2.6. Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan hasil reses anggota DPRD, melalui aplikasi SIPD telah disampaikan usulan program dan kegiatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.6

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Validasi
	NIHIL				

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Batur tahun 2026 disusun dengan memperhatikan penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029. Selain itu, pengembangan isu-isu strategis daerah juga disusun dengan melakukan penelaahan terhadap isu-isu strategis nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 maupun kebijakan strategis nasional lainnya.

Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahun 2026 dijabarkan ke dalam semua urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten Banjarnegara, adalah :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 6 Kegiatan dan 12 sub kegiatan.
b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
   Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terdiri dari 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan.
c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
   Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan
d. Program Pembinaan dan Pengawasan dan Pemerintah Desa yang terdiri dari 1(satu) Kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan yaitu Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang diarahkan pada sub kegiatan Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa,Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa, Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan aparatur pemerintah Kecamatan Batur telah menetapkan rencana strategis Kecamatan Batur Tahun 2026-2030 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Batur guna pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2026-2030.

Rencana strategis Kecamatan Batur tahun 2026 – 2030 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui Program Pelayanan Administrasi perkantoran, Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur, program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, program Penataan Administrasi kependudukan, program Peningkatan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. Dan Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Batur selalu memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan secara terus menerus mengambil langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik, bersih dan akuntabel sehingga mampu menciptakan pelayanan prima yang memenuhi standar pelayanan terhadap permintaan masyarakat.

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan. VISI berdasarkan RPD 2023-2026 sebagai berikut :

“ Banjarnegara Maju Berbasis Pertanian“

Pada RPD 2023-2026 terdapat empat Misi dan 7 Tujuan yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam pencapaian visi misi RPD 2023-2024 sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Batur sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara dari tujuh Tujuan tersebut adalah Tujuan Kelima dan Keenam yaitu:

1. **Tujuan Kelima**

   Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2. **Tujuan Keenam**

   Meningkatnya Kualitas Layanan Publik dengan Sasaran Meningkatnya Efektifitas dan Transparasi Layanan Publik.

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi seperti yang dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi.

Perumusan tujuan strategis memungkinkan Kecamatan Batur untuk mengukur sejauh mana kinerja PD dalam membantu tercapainya visi misi Kepala Daerah. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang terukur.

Rumusan tujuan dan sasaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatnya nilai survey kepuasan Masyarakat
2. Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel
3. Meningkatnya PAD

Ketiga tujuan dan sasaran strategis tersebut mempunyai keterkaitan yang sangat erat, Tujuan akhir dari Kecamatan Batur adalah menerapkan prinsip *good governance* di lingkungan Kecamatan Batur. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka harus ditopang dengan Sumber Daya Manusia yang trampil, pintar, profesional, berprestasi tinggi adalah dambaan bagi setiap lembaga/organisasi baik di sektor pemerintah maupun di dunia swasta, serta adanya dukungan dari sarana prasarana pada Kecamatan Batur yang memadai.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program pada perangkat daerah merupakan program prioritas dalam Renstra 2026-2030. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPD selanjutnya dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Pemilihan untuk masing-masing program/ kegiatan

Sebagai berikut

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.**

   Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota terdiri dari 6 (enam) kegiatan yaitu

   a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu
      - Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Koordinasi
      - Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

   b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu
      - Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN,
      - Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
      - Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran,

   c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu
      - Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      - Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

   d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah mempunyai 1 (satu) sub kegiatan yaitu Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan gedung lainnya.

   e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu
      - Sub kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
      - Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor.

f. Kegiatan Pemeliharaan Barang milik Daearah Penunjang urusan pemerintahan Daerah terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan yaitu
   - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   - Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
   - Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
   - Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Meubelair

2. **Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik** terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu
   a. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum, yang terdiri dari 1 (satu) subkegiatan, yaitu:
      - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

   b. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu
      - Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
      - Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
      - Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

3. **Program Penyelenggaraan urusan Pemerintah Umum** terdiri dari 1 (satu) Kegiatan yaitu Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

4. **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahanan Desa** terdiri dari satu kegiatan, yaitu ; Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terdiri dari 8 (delapan) sub kegiatan yaitu

- Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
- Sub kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
- Sub kegiatan Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa
- Sub kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
- Sub kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Sub kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2026-2030. Renja Perangkat Daerah selanjutnya menjadi platform operasional bagi Perangkat Daerah dalam menjalankan programnya dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah tahun 2025-2029. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026 dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disepakati.
2. Kerangka pendanaan dalam Renja Perangkat Daerah masih bersifat sementara, sehingga masih dimungkinkan terjadi perubahan pagu yang disebabkan oleh pengurangan, penambahan, dan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan maupun antar sub kegiatan dalam kerangka penyusunan anggaran secara terpadu dan berbasis kinerja.
3. Renja Perangkat Daerah menjadi acuan bagi Kepala Perangkat Daerah dan segenap jajarannya serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, serta menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Banjarnegara, Agustus 2025

Plt. CAMAT BATUR,

SLAMET MARDIATMOKO,S.Sos
Pembina
NIP. 19671125 199103 1 006

BAB I

PENDAHULAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan yang diatur melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan pembentukan tim penyusun, penelaahan rancangan awal RKPD, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, hingga pada penyempurnaan berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang RKPD. Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, penyusunan Renja Perangkat Daerah juga mengacu pada Renja Kementerian/Lembaga terkait, serta Renja Perangkat Daerah Provinsi terkait. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2. Landasan Hukum

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698)
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara RI tahun 2021 Nomor 496);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Kecamatan Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara. (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
10. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026
11. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2026 – 2030 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 Nomor 15);
12. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 Nomor 35).

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun dengan maksud:

a. Sebagai upaya konkrit menjabarkan Renstra Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 – 2029, ke dalam rencana program kegiatan prioritas tahun 2026.
b. Sebagai kerangka serta arah pembangunan untuk tahun 2026 dalam pencapaian Tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, Program serta sebagai tolok ukur pertanggungjawaban Kecamatan Bawang pada akhir tahun anggaran.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

a. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA-DPA dalam Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2026, yang dalam penyusunannya didahului dengan menyusun Kebijakan Umum Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026;

b. Sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Tahun 2026;

c. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun berdasarkan sistematika yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah.

BAB 2 : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dan atau pokok-pokok DPRD.

BAB 3 : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan tahun 2025.

BAB 4 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran RKPD.

BAB 5 : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kecamatan Bawang.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah meliputi urusan pemerintahan unsur Kewilayahan Bidang Urusan Kecamatan.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 terdiri dari 4 program, 9 kegiatan, dan 24 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 2.127.975.826,- dengan fokus utama pada :

1. Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layananan Publik
2. Meningktkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Program/kegiatan/sub kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah yang meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan 6 (enam) kegiatan yakni :
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      Terdiri dari 2 (dua) sub Kegiatan :
      a. 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      a. 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      Terdiri dari 3 (tiga) sub Kegiatan :
      b. 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      b. 2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
      b 3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulanan /semesteran
   c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
      Terdiri dari 2 (dua) sub Kegiatan :
      c.1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      c.2. Penyedia bahan logistik kantor
   d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Terdiri dari 1 (satu) sub Kegiatan :

d.1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Terdiri dari 2 (dua) sub Kegiatan :

e.1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

e.2. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Terdiri dari 3 (tiga) sub Kegiatan :

f.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

f.2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

f.3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, terdiri dari 1 (satu) kegiatan yakni :

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang di Limpahkan Kepada Camat

Terdiri dari 3 (tiga) sub Kegiatan :

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan perijinan non usaha
2. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perijinan
3. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan

3. Program Urusan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan dengan 1 (satu) kegiatan yakni :

- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, terdiri dari 1 (satu) sub Kegiatan :

1. Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan.

4. Program Pembinaan dan Pengawasan Desa, dengan 1 (satu) kegiatan yakni :

- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Terdiri dari 7 (tujuh) sub Kegiatan :

1. Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa
2. Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa
3. Fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa

4. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa
5. Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan keteriban umum
6. Fasilitasi penyusunan program pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa
7. Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya

Dinamika yang terjadi selama tahun 2024 turut mempengaruhi keberhasilan pencapaian Renja Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2024, tercatat adanya hasil yang baik yang dikarenakan adanya pencapaian target maupun yang tidak memenuhi target.

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu : Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa alokasi anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp.121.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 87.639.900,- atau 72,43%. Hal tersebut dipengaruhi adanya instruksi penundaan pelaksanaan Pilkades pada awal masa sosialisasi pilkades walaupun pada akhirnya Pilkades tetap dilaksanakan, sehingga terbatasnya waktu untuk melaksanakan sosilisasi dan koordinasi yang mengakibatkan anggaran jamuan rapat serta honor kepanitiaan tidak terserap maksimal.

Program ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja program yaitu Persentase program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana, dengan 1 (satu) kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan, dari tujuh sub kegiatan hanya sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang dapat alokasi anggaran sebesar Rp 121.000.000,- sedangkan enam sub kegiatan yang lainnya Rp 0,- anggaran, dengan target 100% terealisasi 100%.

Manfaat dari program ini adalah tersusunnya dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, administrasi tata pemerintahan desa, fasilitasi pemilihan kepala desa, sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa, penyelenggaraan trantibum, penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dan koordinasi pendampingan desa diwilayahnya.

b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Nilai SAKIP OPD sebesar 70,10 atau (BB) dan IKM dengan nilai 88,83 sedangkan realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan ke Camat, sub kegiatan Pelaksanaan Urusan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang di limpahkan jumlah penyaluran SPPT PBB

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Faktor SDM yang mendukung;
2. Faktor Anggaran yang memadai;
3. Koordinasi Internal yang mendukung.
4. Kesadaran Masyarakat terhadap Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka Pada tahun perencanaan selanjutnya, perlu diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, diantaranya:

1. Koordinasi masing – masing Kasi dan Kasubag
2. Prioritas Perencanaan yang tepat sasaran, agar kegiatan bisa berjalan sesuai perencanaan
3. Anggaran belanja yang dapat mendukung semua Program, Kegiatan, Sub Kegaitan yang direncanakan secara maksimal

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2023 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kehiaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
A	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA**	**Prosentase Pemantauan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana** **Prosentase desa yang tertib administrasi desa**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Pasilitasi, Koordinasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase Pasilitasi, Koordinasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen hasilkan dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	36 dokumen	36 dokumen	36 dokumen	36 dokumen	0	36 dokumen	36 dokumen	0
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen hasilkan dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	18 dokumen	18 dokumen	18 dokumen	18 dokumen	0	18 dokumen	18 dokumen	
	Pasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Pasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 dokumen	0	5 dokumen	5 dokumen	100%	0	0	0
	Pasilitasi Pengelolaan	Jumlah Dokumen hasilkan dalam rangka Pengelolaan	36 dok	36 dokumen	36 dokumen	36 dokumen	100%	36 dok	36 dok	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Koordinasi Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Koordinasi Desa dan Pendayagunaan Aset Desa								
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100%	6 dokumen	6 dokumen	100%
	Koordinasi pembangunan desa di kabupaten	Jumlah Laporan hasil koordinasi pembangunan desa di wilayahnya	12 laporan	0	0	0	0	12 laporan	12 laporan	100%
B	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terfasilitasi**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
		Persentase penanganan konflik di wilayah	**100**							
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah	**Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang terlaksana**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	6 dok	6 dok	100%
C	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat dan desa** **Persentase lembaga desa/kelurahan di kecamatan yang terfasilitasi**						**100**	**100**	**100**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	**Persentase Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang terlaksana**						**100%**	**100%**	**100**
	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan						1 laporan	1 laporan	100
	Pemberdayaan Lembaga KemasyarakatanTingkat Kecamatan	**Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan** **Persentase Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan**						**100%**	**100%**	**100**
	Peningkatan Kapasitas lembaga kemasyarakatan	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya				1		2 lembaga kemasyarakatan	2 lembaga kemasyarakatan	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
D	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten /kota yang terlaksana** **Persentase tingkat keberangsian kinerja perangkat daerah** **Persentase tingkat pelayanan sarana, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pelaporan yang tersusun Persentase Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kelusaan Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Pngrsm dan Kegiatan Tahun 2024			Target progra m dan kegiat an Renja Perang kat Daera h tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tinglat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	8 dokumen	5 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	100%	14 dokumen	14 dokumen	100%
	Koordinasi dan laporan capaian kinerja dan dokumen realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Evaluasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	100%	19 laporan	19 laporan	100%
	Administrasi Keuangan perangkat Daerah	Penentuan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 orang/bulan	12 orang/bulan	13 orang/bulan	13 orang/bulan	100%	14 orang/bulan	14 orang/bulan	100%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	40 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	12 dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang & Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	100%	10 Laporan	10 Laporan	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang tersedia	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
	Pengadaan Bahan bakar kantor	Jumlah Paket Bahan Bakar Kantor yang Disediakan	10 paket	10 paket	10 paket	10 paket	100%	12 paket	12 paket	100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Perpustakaan Daerah									
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Perpustakaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	2 unit	0 unit	2 unit	2 unit	100%	0 unit	0 unit	0
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0	0 unit	0 unit	0
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan						1 unit	1 unit	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya Air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kehasran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 Laporan	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perasuransiya	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit	100%	6 unit	6 unit	100%
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit /*	100%	3 unit	3 unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Kerja Perangkat Daerah tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026	
					Target Kerja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Kerja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Barang dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	100%	10 unit	10 unit	100%
II	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik** **Persentase laporan yang sesuai dengan standar pelayanan**	100	100	100	100	100	100	100	100%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terealisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perumusan pada Urusan Pemerintahan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kelauaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Targrt Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Terkait dengan Pelayanan Non Perizinan									
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah dokumen Non Perizinan Usaha yang di Laksanakan	250 dokumen	250 dokumen	250 dokumen	250 dokumen	100%	12 dokumen	12 dokumen	100%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan kewenangan Lain yang di limpahkan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
	Koordinasi Pendidikan Dasar dan Program Pelayanan Umum	Persentase ketepatanwaktu pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Koordinasi strategis dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Barang dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen koordinasi strategis dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Barang dan Prasarana Pelayanan Umum	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	1 dok	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan pelayanannya, Kecamatan Bawang mengampu 2 Indikator Kinerja Utama. Dari 2 indikator Kinerja Utama tersebut berstatus tercapai dan melebihi target yaitu Indikator Nilai SAKIP Kecamatan target pada tahun 2024 adalah 70,31 tercapai 70,10 tingkat capaian kinerja atau 99,70 % dan Indikator Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan dari target 83,40 tercapai 88,83 atau 106%. Faktor faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Merencanakan target kinerja;
2. Menyelaraskan dokumen perencanaan sehingga data yang disajikan merupakan data yang akuntabel;
3. Koordinasi internal perangkat daerah dengan maksimal sehingga kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan perencanaan yang ada.
4. Koordinasi Pemerintah Kecamatan dan Desa yang telah berjalan dengan baik;
5. Kekompakan Tim Pemungut Pajak dalam pelaksanaan tugas;
6. Komitmen dari para aparatur kecamatan untuk memberikan pelayanan yang prima sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

Dalam rangka pencapaian target kinerja tahun berikutnya, beberapa hal yang harus diupayakan meliputi:

1. Mengevaluasi, mencatat, menyelaraskan dokumen perencanaan agar tercapai target kinerja;
2. Mengevaluasi dan memperbaiki komunikasi serta koordinasi internal perangkat daerah sehingga kegiatan dapat berjalan selaras dengan perencanaan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah baik.

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara

No	Indikator	RPJMD/Standar Nasional	IKK (SPPD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Nilai SAKIP Kecamatan				70,32	70,53	72,60	70,31	70,18	70,32	70,33	
2.	Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan		-	83,4	88,84	88,85	88,86	85,05	85,11	85,92	-	
3.	Indeks Desa di Wilayah Kecamatan			-	-	74,25	74,30			74,25	74,30	

*) Kolom 3 diisi berdasarkan IKK outcome dalam lampiran Permendagri 18/2021

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kecamatan Bawang dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan urusan pemerintahan dalam 1 urusan, yaitu Urusan Kewilayahan. Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Banjarnegara 2025-2029, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk tahun 2026 mencakup 1 urusan tersebut. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pagentan diantaranya adalah:

1. Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan dan belum sepenuhnya berbasis digital;
2. Usulan desa dalam forum musrenbangkec masih dominan berkaitan dengan pembangunan internal desa, belum diarahkan pada usulan yang bersifat komprehensif dan mendukung prioritas pembangunan tingkat kabupaten;
3. Kerentanan terhadap bencana masih tinggi dan kesiapsiagaan wilayah belum optimal;
4. Masih kurangnya kesertaan masyarakat dan petugas pemungut dalam pelunasan PBB lebih awal;
5. Masih kurangnya sarana dan prasarana.

Permasalahan tersebut, jika tidak diselesaikan dapat menjadi *constraint* dalam pencapaian visi dan misi Bupati maupun capaian indikator lainnya. Beberapa dampak dari adanya permasalahan dan hambatan tersebut meliputi:

1. Pelayanan administrasi kependudukan yang belum optimal dan belum berbasisi digital menyebabkan kurang efisien, akses terbatas dan kualitas pelayanan publik yang buruk, akurasi dan transparansi pelayanan kurang bisa diakses.
2. Hasil musrenbangkec belum sepenuhnya diakomodir oleh OPD teknis.
3. Belum optimalnya kesiapsiagaan wilayah terhadap bencana berimbas pada meningkatnya potensi kerugian jiwa dan harta benda dan melemahnya ketahanan social ekonomi masyarakat.

4. Kurangnya kesadaran masyarakatan membayar PBB tepat waktu bisa mengakibatkan pembangunan fasum akan terganggu dan subsidi kebutuhan dasar masyarakat bisa saja dicabut. Situasi ini tentu akan menimbulkan keresahan, baik bagi pemerintah maupun masyarakat.
5. Khususnya Kecamatan Bawang yang sarana dan prasarannya masih kurang memadai berdampak negative terhadap efriktivitas pelayanan terhadap masyarakat.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi, peningkatan kualitas birokrasi, dan meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan pengguna layanan akan meningkatkan kebutuhan akan adanya penyediaan produk layanan yang semakin baik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi-inovasi dalam menunjang peningkatan pelayanan publik secara berkelanjutan. Beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Bawang, dapat diuraikan dalam Analisa SWOT yaitu:

1. FAKTOR PENDUKUNG
   Peran ganda kecamatan selain sebagai OPD juga ujung tombak pelayanan masyarakat di wilayah Kecamata Bawang.
2. FAKTOR PENGHAMBAT
   Belum didukung oleh SDM yang memadai.
3. PELUANG
   Dalam pelaksanaan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, kecamatan merupakan lokus yang paling dekat dengan pengguna layanan sehingga menjadi peluang sebagai kepanjangan tangan dari instansi induknya dalam pemberian layanan langsung kepada masyarakat.
4. ANCAMAN
   Perubahan kebijakan dan perkembangan teknologi yang cepat.

Berdasarkan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan tersebut, dapat diinventarisasi beberapa isu strategis. Inventarisasi isu-isu strategis tahun 2026 didapatkan dari hasil

analisis kondisi internal dan eksternal Kabupaten Banjarnegara sampai dengan tahun 2025. Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan pembangunan.

2.1. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RPJMD Propinsi Jateng Tahun 2018 – 2023. Berdasarkan hal tersebut prioritas arah kebijakan sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Bawang pada tahun 2026 meliputi:

1. Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP.
2. Optimalisasi pelaksanaan pelayanan publik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Optimalisasi fungsi koordinasi kecamatan dengan perangkat desa, OPD, dan stakeholder lain.

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 Kabupaten Banjarnegara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	Tujuan : Meningkatnya aksesibilitas layanan pemerintah dalam urusan kewilayahan di Kecamatan Bawang	Kab. Banjarnegara	Indeks Pelayanan Publik	III		Tujuan : Meningkatnya aksesibilitas layanan pemerintah dalam urusan kewilayahan di Kecamatan Bawang	Kab. Banjarnegara	Indeks Pelayanan Publik	III		
I	Sasaran Strategis : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah urusan kewilayahan	Kec Bawang	Nilai SAKIP Kecamatan	BB (76,61)		Sasaran Strategis : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah urusan kewilayahan	Kec Bawang	Nilai SAKIP Kecamatan	BB (76,61)		
IV	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec Bawang	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100% 100%	1.888.524.520	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec Bawang	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100% 100%	2.090.697.870	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	**Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat daerah**	Kec. Sawang	terpenuhinya perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja kecamatan pagentas	100%	**5.997.400**	**Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat daerah**	kec Sawang	terpenuhinya perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja kecamatan pagentan	100%	**5.630.300**	
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	kec Sawang	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	14 dokumen	2.497.400	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	kec Sawang	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	14 dokumen	2.093.300	
b.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	kec Sawang	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 laporan	2.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	kec Sawang	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 laporan	3.537.000	
2.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	kec Sawang	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	**1.773.264.188**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	kec Sawang	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	**1.774.584.019**	
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	kec Sawang	Jumlah orang yang menerima Gaji	14 orang/bulan	1.750.832.588	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	kec Sawang	Jumlah orang yang menerima	14 orang/bulan	1.750.832.588	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Rekonsiliasi					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			dan Tunjangan ASN					Gaji dan Tunjangan ASN			
b	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /verifikasi Keuangan SKPD	Kec Sawang	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 dokumen	20.580.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /verifikasi Keuangan SKPD	kec sawang	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 dokumen	22.373.200	
c	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	kec sawang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	1.815.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	kec sawang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	1.458.200	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	kec bawang	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100%	**85.718.500**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	kec bawang	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100%	**118.663.000**	
a.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	kec bawang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	2.518.500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	kec bawang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	2.734.300	
b.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	kec bawang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	83.400.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	kec bawang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	108.999.300	
4.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	kec bawang	Terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	**41.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	kec bawang	Terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	41.500.000	
a.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	kec bawang	Jumlah unit peralatan dan	2 unit	25.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	kec bawang	Jumlah unit peralatan dan	2 unit	16.500.000	

RU	Rancangan Awal RKPD					Hasil Ayatan Sebelumnya					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			mana lainnya yang disediakan					mana lainnya yang disediakan			
h.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	kec bawang	Jumlah unit Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	0 unit	0	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	kec bawang	Jumlah unit Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	0 unit	0	
i.	Pengelolaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	kec bawang	Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	2 unit	10.000.000	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	kec bawang	Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	2 unit	25.000.000	
j.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	kec bawang	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan	100%	65.212.320	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	kec bawang	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan	100%	61.000.000	
k.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	kec bawang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	16.800.000	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	kec bawang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	15.600.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
b.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	kec kawang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	48.812.930	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	kec kawang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	45.406.380	
6.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah**	kec kawang	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah sesuai ketentuan	100%	**53.948.000**	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah	kec kawang	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah sesuai ketentuan	100%	48.334.000	
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendalaan Dinas Jabatan	kec kawang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	39.451.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	kec kawang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	36.858.000	
b.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	kec kawang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	6 Unit	13.640.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	kec kawang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6 Unit	29.026.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Dipelihara/Direhabilitasi					yang Dipelihara/Direhabilitasi			
3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	kec bawang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	4.859.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	kec bawang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	4.859.000	
U	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	kec pagerton	**Persentase layanan yang sesuai dengan standar pelayanan**	**100%**	**188.190.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	kec pagerun	**Persentase layanan yang sesuai dengan standar pelayanan**	**100%**	**128.865.000**	
1.	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	kec bawang	Persentase terselenggaranya pemeliharaan sarana dan prasaran pelayanan umum	100%	**3.700.000**	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	kec bawang	Persentase terselenggaranya pemeliharaan sarana dan prasaran pelayanan umum	100%	**15.000.000**	
a.	Koordinasi strategis dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana	kec bawang	Jumlah Dokumen Koordinasi strategis dengan Perangkat Daerah	3 dokumen	2.700.000	Koordinasi strategis dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana	kec bawang	Jumlah Dokumen Koordinasi strategis	3 dokumen	15.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								yang Dilaksanakan			
c.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	kec bawang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 laporan	103.850.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	kec bawang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 laporan	107.850.000	
2.	Sasaran Strategis : Meningkatnya Efektifitas koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan desa/kelurahan	Kec Pagentan	Indeks Desa di Wilayah Kecamatan	73,000		Sasaran Strategis : Meningkatnya Efektifitas koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan desa/kelurahan	Kec Pagentan	Indeks Desa di Wilayah Kecamatan	73,000		
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	kec bawang	Persentase lembaga desa/kelurahan di kecamatan yang terfasilitasi	100%	9.500.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	kec bawang	Persentase lembaga desa/kelurahan di kecamatan yang terfasilitasi	0	0	
a.	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	kec bawang	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang terlaksana	100%	2.000.000	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	kec bawang	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang terlaksana	0	0	
a.	Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan	kec bawang	Jumlah laporan Peningkatan efektifitas kegiatan	1 laporan	2.000.000	Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan	kec bawang	Jumlah laporan Peningkatan efektifitas	0	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Masyarakat di wilayah kecamatan		pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan			Masyarakat di wilayah kecamatan		kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan			
1.	**Pemberdayaan Lembaga KemasyarakatanTingkat Kecamatan**	kec bawang	Persentase Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	85%	7,000,000	Pemberdayaan Lembaga KemasyarakatanTingkat Kecamatan	kec bawang	Persentase Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	0	0	
a.	Peningkatan Kapasitas lembaga kemasyarakatan	kec bawang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	2 lembaga kemasyarakatan	3,500,000	Peningkatan Kapasitas lembaga kemasyarakatan	kec bawang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	0	0	
II	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	kec bawang	**Persentase penanganan konflik di wilayah**	**100%**	18,700,000	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	kec bawang	**Persentase penanganan konflik di wilayah**	100%	18,700,000	
1.	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah**	kec bawang	Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang terlaksana	100%	18,700,000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah	kec bawang	Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang terlaksana	100%	18,700,000	

No	Rancangan Awal/ RKPD					Hasil Analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(3)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
a.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	kec bawang	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6 Dokumen	13.700.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	kec bawang	Jumlah Dokumen Tugas Forum koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6 Dokumen	13.700.000	
III	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	kec bawang	**Persentase desa yang tertib administrasi desa**	100%	22.125.000	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	kec bawang	**Persentase desa yang tertib administrasi desa**	100%	38.575.000	
1.	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	kec bawang	Persentase fasilitasi,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana	100%	22.125.000	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	kec bawang	Persentase Fasilitasi,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana	100%	38.575.000	
a.	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan kepala desa	kec bawang	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	30 dokmen	900.000	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan kepala desa	kec bawang	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	30 dokmen	3.300.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
ii.	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	kec bawang	jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	18 Dokumen	5.575.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	kec bawang	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	18 Dokume n	6.850.000	
x.	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	kec bawang	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-	-	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	kec bawang	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-	0	
ii.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	kec bawang	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	36 dokumen	1.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	kec bawang	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	36 dokume n	9.000.000	
x.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	kec bawang	Jumlah dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan	1 dokumen	9.550.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	kec bawang	Jumlah dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	1 dokume n	13.375.00 0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Pembangunan Desa					Desa di dengan Pembangunan Desa			
6.	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec Sawang	Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	6 dokumen	1.500.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec Sawang	Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	6 dokumen	5.950.000	
8.	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec Sawang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 laporan	7.000.000	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec Sawang	Jumlah Laporan Hasil koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 laporan	8.700.000	

Berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2026, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan yaitu memberi prioritas terhadap pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui program baru yang masuk dalam Renstra Kecamatan tahun 2025 – 2029.

2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan musrenbang kecamatan dan forum konsultasi publik telah disampaikan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui aplikasi SIPD. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.3
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2026 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	NIHIL				

2.4. Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan hasil reses anggota DPRD, melalui aplikasi SIPD telah disampaikan usulan program dan kegiatan. Usulan program/ kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2026 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Validasi
	NIHIL				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Bawang

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan, sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Dengan kata lain tujuan dan sasaran merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Kabupaten Banjarnegara dalam melaksanakan program pembangunan daerah mempunyai Visi "Mewujudkan Banjarnegara Maju dan Sejahtera" dengan 4 Sasaran daerah yang akan diwujudkan yaitu :

1. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat;
2. Meningkatnya pereleonomian daerah yang berdaya saing dan berbasis potensi lokal secara berkelanjutan;
3. Meningkatnya infrastruktur yang mendukung pereleonomian dan kesejahteraan masyarakat;
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif.

Dari 4 Sasaran tersebut, Kecamatan Bawang mendukung Sasaran keempat yaitu **Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif.**

Untuk mendukung Sasaran tersebut, Kecamatan Bawang didukung 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran yaitu :

TUJUAN :

"Meningkatnya aksesibilitas layanan pemerintah dalam urusan kewilayahan di Kecamatan Banjarmangu".

SASARAN :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah urusan kewilayahan.
2. Meningkatnya efektivitas koordinasi dan Fasilitasi pemberdayaan desa/kelurahan.

Kecamatan Bawang menetapkan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja

dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Bawang dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2025 – 2029.

Reformasi pada sektor aparatur daerah pada hakekatnya merupakan tindakan atau kegiatan pembaharuan secara konsepsional, sistematis, dan berkelanjutan. Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi **visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program** yang ingin diwujudkan

Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Bawang beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel sebagaimana berikut ini :

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				2026	2027	2028	2029	2030
1.	Meningkatnya aksesibilitas layanan pemerintah dalam urusan kewilayahan di Kecamatan Pagerlan		Indeks Pelayanan Publik	50,00	50,10	50,20	50,30	50,40
2.		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah urusan kewilayahan	Nilai SAKIP Kecamatan	BB (70,01)	BB (70,02)	BB (70,03)	BB (70,04)	BB (70,05)
3		Meningkatnya Efektivitas kemitraan dan fasilitasi pemberdayaan desa/kelurahan	Indeks Desa di Wilayah Kecamatan	74,25	74,30	74,35	74,40	74,44

3.2. Program dan Kegiatan

Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahun 2026 dijabarkan ke daam semua urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten Banjarnegara pada kecamata adalah :

a. Program penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota yang terdiri dari 6 Kegiatan dan 14 sub kegiatan
b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang terdiri dari 2 Kegiatan dan 4 sub kegiatan.
c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang terdiri dari 2 Kegiatan dan 2 sub Kegiatan.
d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 sub kegiatan.
e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terdiri dari 1 Kegiatan dan 6 sub kegiatan.

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN BAWANG KAB. BANJARNEGARA
TAHUN 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9		10	11	12
						Kecamatan Pagentan			2.175.655.330,00						2.456.125.000,00	
	7					UMUR KEWILAYAHAN			2.175.655.330,00						2.456.125.000,00	
	7	01				KECAMATAN			2.175.655.330,00						2.456.125.000,00	
1.	7	01.	01.			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	100%	2.072.240.330,00					100 %	2.035.000.000,00	
	7	01.	01.	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	100%	3.997.400,00			Penguatan tata kelola pemerintahan dinyatakan sangat lebih adaptif dan kolaboratif. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif		100 %	6.000.000,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										

							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19 Dok	1.497.400,00	Kab. Banjarnegara, Kec. Bawang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	19 dok	1.100.000,00	Kec. Bawang
	7	01	04	2.03	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19 Laporan	2.500.000,00	Kab. Banjarnegara, Kec. Bawang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	19 Sap	2.500.000,00	Kec. Bawang
	7	01	04	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100%	1.773.264.110,00			Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	100 %	1.774.598.447,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									

							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang /bulan	1.710.432.510,00	Kab. Banjarnegara, Bawang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Pengaturan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	14 n/a	1.711.500.000,00	Kec. Bawang
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	20.580.000,00	Kab. Banjarnegara, Bawang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Pengaturan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif		21.000.000,00	Kec. Bawang
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10 Laporan	1.851.900,00	Kab. Banjarnegara, Bawang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Pengaturan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	10 lap	2.000.000,00	Kec. Bawang

	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100%	86.750.500,00			Pengaturan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	100 %	86.500.000,00	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.318.100,00	Kab. Banjarnegara, Bawang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Pengaturan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	1 Paket	2.300.000,00	Kec. Bawang
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	83.400.000,00	Kab. Banjarnegara, Bawang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Pengaturan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	12 paket	84.000.000,00	Kec. Bawang

						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Lih. Dok.	3.487.400,00	Kab. Banjarnegara, Kec. Bawang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	14 dok	1.500.000,00	Kec. Bawang
	7	01	01	2.01	0076	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	2.500.000,00	Kab. Banjarnegara, Kec. Bawang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	13 lap	2.500.000,00	Kec. Bawang
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100%	1.771.264.210,00			Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	100 %	1.774.598.447,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								

							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan 80%	14 Orang /Bulan	1.750.852.110,00	Kab. Banjarnegara, Bawang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	14 o/b	1.751.500.000,00	Kec. Bawang
	7	01	01	3.03	0003	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
							Jumlah Dokumen Pemeriksaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	29.580.000,00	Kab. Banjarnegara, Bawang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif		21.000.000,00	Kec. Bawang
	7	01	01	3.03	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	36 Laporan	1.855.600,00	Kab. Banjarnegara, Bawang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	36 lap	2.700.000,00	Kec. Bawang

	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100%	85.318.500,00			Penguatan tata kelola pemerintahan dearah yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	100 %	86.500.000,00	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.318.500,00	Kab. Banjarnegara, Bawang, semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dearah yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	1 Paket	2.500.000,00	Kec. Bawang
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	83.400.000,00	Kab. Banjarnegara, Bawang, semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dearah yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	12 paket	84.000.000,00	Kec. Bawang

	3	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100%	41.000.000,00			Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	100 %	41.000.000,00		
	7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan	2 Unit	30.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Bawang, Semua Gol/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	2 unit	25.000.000,00	Kec. Bawang	
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan	2 Unit	25.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Bawang, Semua Gol/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	2 unit	30.000.000,00	Kec. Bawang	

	7	01	01	2.08		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	-	100%	65.313.430.00			Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	100 %	65.500.000.00	
	7	01	02	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
	7	01	02	2.08	0002		Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Layanan	18.800.000.00	Kab. Banjarnegara, Rawang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	12 lap	17.000.000.00	Kec. Rawang
	7	03	03	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
	7	03	03	2.08	0004		Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Layanan	48.413.510.00	Kab Banjarnegara, Rawang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	12 lap	48.500.000.00	Kec. Rawang

	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100%	50.588.900,00			Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	100 %	50.500.000,00	
	7	01	01	2.09	0002	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	36.450.000,00	Kab. Banjarnegara, Bawang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	6 Unit	36.500.000,00	Kec. Bawang
	7	01	01	2.09	0004	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	13.640.000,00	Kab. Banjarnegara, Bawang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	3 unit	13.600.000,00	Kec. Bawang
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									

							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Operasional/Berfungsi	10 Unit	6.858.000,00	Kab Bekasi, Kec. Bekasi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	10 unit	5.000.000,00	Kec. Bekasi
2	7	66	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	100%	168.190.000,00					100 %	110.000.000,00	
	7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	100%	2.700.000,00			Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	100 %	3.000.000,00	
	7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum										
							Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	2.700.000,00	Kab. Bekasi, Kec. Bekasi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	1 dok	3.000.000,00	Kec. Bekasi

	7	03	03	3.09		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	100%	105.486.000,00			Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	100 %	107.000.000,00	
	7	03	03	3.09	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha									
							Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Bawang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	12 dok	2.000.000,00	Kec. Bawang
	7	03	03	3.09	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Komperindag									
							Jumlah laporan Pelaksanaan Komperindag pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	3.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Bawang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	12 dok	3.000.000,00	Kec. Bawang
	7	03	03	3.09	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan									

							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Diinyahkan	1 Laporan	102.090.000,00	Kab. Banjarnegara, Rawang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Pengujian tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	1 lap	102.000.000,00	Kec. Rawang
3	7	01.	03.			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	100%	9.500.000,00				100 %	10.000.000,00	
	7	01.	03.	2.03.		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	100%	3.000.000,00			Pengujian tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	100 %	3.000.000,00	
	7	01	03	2.03	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	3.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Rawang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Pengujian tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	1 lap	3.000.000,00	Kec. Rawang

	7	03	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	100%	7.500.000,00			Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	100 %	7.500.000,00		
	7	03	03	2.03	9002	Peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan										
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lap	7.500.000,00	Kab Bangkaran gara, Bawang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	1 Lap	7.500.000,00	Kec. Bawang	
4	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	100%	18.700.000,00				100 %	18.000.000,00		
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	100%	18.700.000,00			Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	100 %	18.000.000,00		
	7	01	05	2.01	9008	Pelaksanaan Tugas Fungsi Koordinasi Pengkecan di Kecamatan										

							Jumlah Dokumen Tugas Pimpin Koordinasi Pengawas di Kecamatan	6 Dokumen	13.200.000,00	kab. Banjarnegara, Bawang, lainnya kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Pengaturan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	6 dok	18.000.000,00	Kec. Bawang
5	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	100%	22.525.000,00				100 %	297.125.000,00	
	7 .	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	100%	22.525.000,00			Pengaturan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	100 %	297.125.000,00	
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa									
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	38 Dokumen	900.000,00	kab. Banjarnegara, Bawang, lainnya kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Pengaturan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	38 dok	2.000.000,00	Kec. Bawang
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa									

							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10 Dokumen	3.575.000,00	Kab. Banjarnegara, Bawang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	10 dok	2.000.000,00	Kec. Bawang
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa									
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	36 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Bawang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	36 dok	2.000.000,00	Kec. Bawang
	7	01	06	2.01	0010	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa									
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka pemilihan kepala Desa	0 Dokumen	0	Kab. Banjarnegara, Bawang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	11 dok	275.000.000,00	Kec. Bawang
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa									

							Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	850.000,00	Kab. Belitung, Belitung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Pengelolaan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	1 dok	12.175.000,00	Kec. Belinyu
	7	03	06.	2.03	0017	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Administrasi dan Kependudukan	5 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Belitung, Belitung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Pengelolaan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	6 dok	2.000.000,00	Kec. Belinyu
	7	03	06.	2.03	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya								
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 Laporan	7.600.000,00	Kab. Belitung, Belitung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Pengelolaan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	12 dok	2.000.000,00	Kec. Belinyu
									JUMLAH	**2.175.655.830,00**				**1.958.193.447,00**	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program pada Renja Perangkat Daerah merupakan program prioritas dalam Renstra 2023-2026. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam Renja Perangkat Daerah selanjutnya dijabarkan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Pemilihan untuk masing-masing program/ kegiatan dijabarkan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan 6 (enam) kegiatan yakni :
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      Terdiri dari 2 (dua) sub Kegiatan :
      a.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      a.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      Terdiri dari 3 (tiga) sub Kegiatan :
      b.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      b.2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
      b.3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran
   c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
      Terdiri dari 2 (dua) sub Kegiatan :
      c.1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      c.2. Penyedia bahan logistik kantor
   d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Terdiri dari 3 (tiga) sub Kegiatan :
      d.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
      d.2. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
      d.3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Terdiri dari 2 (dua) sub Kegiatan :

e.1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

e.2. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Terdiri dari 3 (tiga) sub Kegiatan :

f.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

f.2. Pemeliharaan/rehabilitatasi sarana prasarana gedung

f.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, 2 (dua) kegiatan yakni :

a. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Saranan Pelayanan Umum

Terdiri dari 1 (satu) sub Kegiatan :

a.1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang di Limpahkan Kepada Camat

Terdiri dari 3 (tiga) sub Kegiatan :

b.1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan perijinan non usaha

b.2. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perijinan

b.3. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan

3. Program Urusan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan dengan 1 (satu) kegiatan yakni :

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala DaerahTerdiri dari 1 (satu) sub Kegiatan:

a.1. Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di wilayah kecamatan

4. Program Pembinaan dan Pengawasan Desa, dengan 1 (satu) kegiatan yakni :

a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Terdiri dari 7 (tujuh) sub Kegiatan :

a.1. Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa

a.2. Fasilitasi administrasi pemerintahan desa

a.3. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

a.4.Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa

a.5. Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan keteriban umum

a.6. Fasilitasi penyusunan program pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa

a.7. Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan yang diatur melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan pembentukan tim penyusun, penelaahan rancangan awal RKPD, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, hingga pada penyempurnaan berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang RKPD. Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, penyusunan Renja Perangkat Daerah juga mengacu pada

Renja Kementerian/Lembaga terkait, serta Renja Perangkat Daerah Provinsi terkait. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2. Landasan Hukum

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3

Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496)
26. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 14);
27. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 15);
28. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun dengan maksud untuk:

a. Menjabarkan Renstra Kecamatan Madukara Tahun 2025-2029 kedalam rencana Program kegiatan prioritas Tahun 2026 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Renja K/L Tahun 2026 dan Renja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;
b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerapan anggaran berbasis kinerja.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Madukara Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

a. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA-DPA dalam Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2026, yang dalam penyusunannya didahului dengan menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026;
b. Sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Tahun 2026;
c. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun berdasarkan sistematika yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah.

BAB 2 : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dan atau pokok-pokok DPRD.

BAB 3 : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan tahun 2026.

BAB 4 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran RKPD.

BAB 5 : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah meliputi urusan Pemerintahan fungsi penunjang kewilayahan

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 terdiri dari 5 program, 10 kegiatan, dan 27 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 4.701.765.475-, dengan fokus utama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good government) dalam kehidupan berpolitik yang demokratis dan bertanggung jawab .Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung tujuan daerah (Berdasarkan Berita Acara reviu penyelarasan perencanaan tanggal 2 Januari 2024) yang meliputi :

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
2. Meningkatnya efektifitas dan transparansi layanan publik.

Dari 5 Program ,10 kegiatan dan 27 sub kegiatan yang dalam Renja Perangkat Daerah tersebut , program/kegiatan/ sub kegiatan yang di setujui untuk dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024 terdiri dari 5 program ,10 kegiatan ,dan 27 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar 4.574.794.677.

Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024, terjadi perubahan yaitu Penambahan pagu anggaran program/kegiatan/sub kegiatan, pada saat Perencanaan itu sampai ke pada DPPKAD terjadi perubahan yaitu berdasarkan KUA PPAS anggaran Kecamatan Madukara menjadi 5.372.527.274. Pada perubahan Pagu Anggaran tersebut di berdasarkan Petunjuk dari

Bapak Bupati terkait urusan wajib yang menjadi prioritas , yang akhirnya pada urusan wajib Kecamatan Madukara mendapat Tambahan Anggaran untuk memenuhi kebutuhan pokok OPD antara lain meliputi : Gaji, Air, Listrik , Telpon.

Dinamika yang terjadi selama tahun 2024 turut mempengaruhi keberhasilan pencapaian Renja Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2024, tercatat adanya hasil yang baik yang dikarenakan adanya pencapaian yang sesuai target maupun yang melebihi target. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu Indikator Kinerja Sasaran Kepala Perangkat Daerah meliputi , (1) Tersalu (1) , Nilai SAKIP. Dengan nilai BB atau (71,35), dari target BB atau (70) , (3) SKM, dengan nilai 88,44 dari target 87,57, Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Faktor SDM yang mendukung
2. Faktor Anggaran yang memadahi
3. Koordinasi Internal yang mendukung

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka (*jelaskan implikasi dari poin di atas*). Pada tahun perencanaan selanjutnya, perlu diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran dalam rangka mempertahan capaian kinerja yang sudah baik dan untuk mendukung kinerja para penanggku kegiatan agar lebih baik lagi, dengan memperhatikan beberapa faktor , diantaranya:

1. Koordinasi masing – masing Kasi dan Kasubag
2. Prioritas Perencanaan yang tepat sasaran, agar kegiatan bisa berjalan sesuai perencanaan
3. Anggaran yang mendukung kegiatan
4. Regulasi yang jelas sebagai dasar Pelaksanaan Kegiatan

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024 disajikan pada tabel di buwah ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2024* Kabupaten Banjarnegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kehuaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR KEWILAYAHAN									
	Tujuan : Meningkatnya akseptibilitas layanan pemerintah dalam urusan kewilayahan di Kecamatan Madukara	**Indeks Pelayanan Publik**	**80,78**							
	Tujuan : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	**Nilai SAKIP**								

	Sasaran Strategi : Meningkatnya Efektivitas koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan desa/kelurahan	**Indeks Desa di Wilayah Kecamatan**	**77,471**							
	Sasaran Strategi : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	**Nilai SAKIP Kecamatan Madukara**	**71,40 (BB)**	**69,95 (B)**	**70(BB)**	**71,20(BB)**	**101,93**	**71,35(BB)**	**213,68**	**3,07**
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	**KUALITAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	100%	**100%**	**100%**	**100%**	1	**100%**	300	3
	Perencanaan, Pengunggan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kualitas Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	100%	**100%**	**100%**	**100%**	1	**100%**	300	3
	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang di susun	14 Dokumen	9 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	1 dokumen	9 dokumen	24 dokumen	1.71
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar yang di susun	12 Laporan	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	1 dokumen	7 dokumen	21 dokumen	1.61
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**100%**	**100%**	**100%**	1	**100%**	300	3
	Penyedia gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terhapatkan gaji dan tunjangan	32 orang/bulan	28 ASN	28 ASN	28 ASN	1	28 ASN	84 ASN	78,5
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah UP/GU/LS/TUP yang diuji dan diverifikasi	12 Dok	37 dok	41 Dok	85 dok	1,38	41 Dok	109	9,08
	Koordinasi dan penyusunan laporan bulanan/triwulanan/semesteran	Jumlah LK Bulanan/Triwulanan/Semesteran dan dinamis	10 laporan	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	1 dokumen	10 Dok	94	3,378

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah**	100%	**100%**	**100%**	**100%**	**1**	**100%**	300	3
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	1	3 Paket	9 Paket	3
	Penyedia bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	12 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	1	3 Paket	9 Paket	0.75
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kualitas Pengadaan Pengadaan Peralatan dan mesin lainya**	100%	**100%**	**100%**	**100%**	**1**	**100%**	300	3
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainya yang tersedia	4 unit	3 unit	3 unit	3 unit	0.66	3 unit	9	2
	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kualitas Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	**100%**	**100%**	**100%**	**1**	**100%**	300	3
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang tersedia	12 Laporan	12 bulan	12 Lap	12 Lap	1	12 lap	36	3
	Penyedia jasa pelayanan umum kantor	Jumlah jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia	12 Laporan	12 bulan	12 Lap	12 Lap	1	12 lap	36	3
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kualitas Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak penerangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	100%	**100%**	**100%**	**100%**	**3**	**100%**	300	3
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak penerangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak penerangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	16 unit	4 paket	16 unit	16 unit	1	16 unit	36	2.187
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainya	Jumlah Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainya	7 unit	3 paket	3 unit	3 unit	1	3 unit	9	1.285

	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung Kantor dan bangunan lainnya	10 unit	3 paket	3 unit	3 unit	1	3 unit	9 Paket	0,9
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga desa/kelurahan di kecamatan yang terfasilitasi	100%	100%	**100%**	**100%**	100%	**100%**	100%	100%
	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Persentase Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang terlaksana	100%							
	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	1 Laporan							
	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan	60%							
	Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan	Peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan							
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Kualitas Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Pembangunan di Kelurahan**	100%	100%	**100%**	100%	100%	**100%**	100%	100%

	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunana di kelurahan	Jumlah Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunana di Kelurahan	18 lembaga kemasyarakatan	2 paket	9 lembaga kemasyarakatan	9 lembaga kemasyarakatan	1	9 lembaga Kemasyarakatan	20 lembaga kemasyarakatan	1.11
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terlaksana	14 unit	2 paket	5 unit	5 unit	1	9 unit	12	0.857
	Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	18 pekerjaan/termasuk	2 paket	9 pekerjaan/termasuk	9 pekerjaan/termasuk	1	9 pekerjaan/termasuk	20	1.11
	Kegiatan Evaluasi kelurahan	Jumlah Evaluasi Kelurahan	2 laporan	2 paket	2 Lap	2 Lap	1	2 lap	6	3
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Kualitas Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa**	100%	**100%**	**100%**	**100%**	1	**100%**	300	3
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Kualitas Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	100%	**100%**	**100%**	**100%**	1	**100%**	300	3
	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	36 dokumen							
	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Administrasi Pemerintahan	18 dokumen	18 desa	18 desa	18 desa	1	18 desa	54 desa	3
	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	36 dokumen							

	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pilkades			6 desa	6 desa	100 %		1	0
	Fasilitasi Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah angkatan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pembangunan Desa	1 dokumen	18 Desa + 2 kel	20 desa / kel	20 desa / kel	1	18 Desa + 2 kel	60 desa	60
	Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah angkatan penyelenggaraan trantibum yang terfasilitasi	6 dokumen	18 desa	18 Desa + 2 kel	18 Desa + 2 kel	1	18 Desa + 2 kel	58	9,6
	Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah angkatan penyusunan program dan Pemberdayaan yang terfasilitasi	18 dokumen	18 desa	18 desa	18 desa	1	18 Desa	54	3
	Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Jumlah rapat koordinasi kegiatan pendampingan Desa	12 kegiatan	18 desa	18 desa	18 desa	1	18 Desa	54	4,5
	Tujuan : Meningkatnya Efektifitas dan Transparansi Layanan Publik	**Nilai SKM**								
	Sasaran Strategis : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah urusan kewilayahan	**Nilai SAKIP Kewamatan**	**88 (71,40)**							
	Sasaran Strategis: Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik	**Nilai SKM**		**87,55**	87,55	88,44	**100,00**	**88,44**	**264,44**	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase penanganan konflik di wilayah**	100%	**100%**	**100%**	**100%**	1	**100%**	300	3
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Prosentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan**	100%	**100%**	**100%**	**100%**	3	**100%**	300	3

	Pelaksanaan tugas lurah kordinasi pimpinan di Kecamatan	Jumlah kordinasi/kegiatan Forkompimca yang dilaksanakan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1	12 dokumen	36	3
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Kualitas Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan**	100%	**100%**	**100%**	**100%**	**1**	**100%**	300	3
	Koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Persentase terselenggaranya pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	100%							
	Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen							
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Kualitas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan 1.**	100%	**100%**	**100%**	**100%**	**1**	**100%**	300	3
	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah SPPT PBB terselesaikan	1 lap	1 lap	1 lap (30.309)	1 lap (30.309)	1	1 lap	3	1
	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Pendaftaran Non Usaha	Jumlah Pelayanan Pendaftaran Non Usaha yang terlayani	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1	12 dokumen	36	3
	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Pemanfaatan	Jumlah pengelola operator aset yang terlayanikan	12 bulan	2 orang	12 bulan	12 bulan	1	12 dokumen	20	3,160

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan pelayanannya, Perangkat Daerah mengampu tiga. Indikator. Dari tiga indikator tersebut, satuberstatus tercapai dan dua indikator berstatus tidak tercapai. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian/ketidaktercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Merencanakan target kinerja
2. Menyelaraskan hal-hal yang akan dikerjakan dengan target kinerja
3. Menyelaraskan apa yang dianggarkan dengan apa yang akan dikerjakan.
4. Mengerjakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja
5. Melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya.

Dalam rangka mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut, telah dilakukan upaya-upaya yang meliputi:

1. Melakukan Koordinasi Internal di tingkat OPD
2. Evaluasi terhadap hasil kinerja
3. Optimalisasi Kinerja dan pendampingan terhadap agar tercapai tarjet kinerja.

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikutini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK LPPD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Nilai SAKIP kecamatan Madukara			70	71,35	71,40	71,45	69,95	71,35	71,35	71,40	
2.	Survay Kepuasan Masyarakat Kecamatan		-	87,57	88,44			87,56	88,44	88,44		
3.	Indek Desa di Wilayah Kecamatan Madukara					77,471	77,490			77,462	77,490	

*) Kolom 3 diisi berdasarkan IKK outcome dalam lampiran Permendagri 18/2021

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kecamatan Madukara dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan urusan Pemerintah dalam 1 urusan, yaitu urusan Kewilayahan . Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2025-2029, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk tahun 2026 mencakup 1 urusan tersebut. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Madukara diantaranya adalah:

1. Belum Optimalnya pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan kepada camat .
2. Belum optimalnya kapasitas,kualitas,kuantitas,kualitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi
3. Masih kurangya dukungan data informasi dari masyarakat,peraturan yang valid,akurat dan terintegrasi sebagai pedoman dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat .
4. Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan ,keuangan dan pelaporan yang ada
5. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam rangka menunjang Tugas dan fungsi kecamatan sebagai unit kerja perekam data administrasi kependudukan yang secara langsung melayani masyarakat, dan tugas – tugas lain yang terkait Tugas dan Fungsi Kecamatan
6. Keterbatasan Kemampuan aparatur keluruhan dan perangkat desa dalam penatausahaan keuangan terkait dengan implementasi DAU Tambahan Kelurahan, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
7 .Belum Optimalnya kesadaran aparatur pemerintah Desa dalam mengerjakan buku-buku Administrasi Desa (tidak sesuai Juknis).

8. Belum Optimalnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam merencanakan pembangunan di kelurahan dan desa masing-masing.
9. Belum Optimalnya kesadaran aparatur pemerintahan desa dalam melakukan implementasi (tidak sesuai dengan juknis) program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat (penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, dan kesganasan)

Permasalahan tersebut, jika tidak diselesaikan dapat menjadi *constraint* dalam pencapaian visi dan misi Bupati maupun capaian indikator lainnya. Beberapa dampak dari adanya permasalahan dan hambatan tersebut meliputi:

1. Rendahnya Mutu Pelayanan Publik
2. Rendahnya Tata Kelola Administrasi
3. Belum optimalnya Pendampingan Desa

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi, peningkatan kualitas birokrasi, dan meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan pengguna layanan akan meningkatkan kebutuhan akan adanya penyediaan produk layanan yang semakin baik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi-inovasi dalam menunjang peningkatan pelayanan publik secara kontinyu. Beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, yaitu:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetenai sehingga pelayanan kepada Masyarakat belum Optimal ,
2. Fasilitas yang belum terpenuhi diantaranya anggaran yang mendukung suatu kegiatan
3. Regulasi yang jelas sebagai dasar atau payung hukum sehingga suatu kegiatan dapat di laksanakan.
4. Kebijakan – kebijakan yang bersifat mendesak yang mengakibatkan peralihan anggaran ,sehingga rencana kerja tidak dapat tercapai sesuai ketentuan.

Berdasarkan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan tersebut, dapat diinventarisasi beberapa isu strategis. Inventarisasi isu-isu strategis tahun 2024 didapatkan dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal Kabupaten Banjarnegara sampai dengan tahun 2023. Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan pembangunan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Tahun 2026 merupakan pelaksanaan tahun pertama dalam Renstra Tahun 2025-2029.Dalam Renstra Tahun 2025-2029, prioritas arah kebijakan sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Madukara pada tahun 2026 meliputi :

1. Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP
2. Optimalnya Pelaksanaan Pelayanan Publik dalam rangka peningkatan kualitas pelayan publik
3. Optimalnya fungsi koordinasi Kecamatan dengan perangkat desa ,OPD ,dan stakeholder lain

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 Kabupaten Banjarnegara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Tujuan : Meningkatnya efektifitas layanan pemerintah dalam urusan kewilayahan di Kecamatan Madukara	Kab. Banjarnegara	Indek Pelayanan Publik	80,78		Tujuan : Meningkatnya efektifitas layanan pemerintah dalam urusan kewilayahan di Kecamatan Madukara	Kab. Banjarnegara	Indek Pelayanan Publik			
	Sasaran Strategi: Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah urusan kewilayahan	Kec. Madukara	Nilai SAKIP Kecamatan Madukara	BB (71,40)		Sasaran Strategi: Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah urusan kewilayahan	Kec. Madukara	Nilai SAKIP Kecamatan Madukara	BB (71,40)		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Madukara	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100%	3.601.494.262	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Madukara	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100%	3.601.494.262	
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Madukara	Persentase Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	100%	6.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Madukara	Persentase Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun		6.000.000	
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Madukara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Dokumen	3.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Madukara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Dokumen	3.000.000	

b.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Madukara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 laporan	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Madukara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 laporan	3.000.000	
2.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kec. Madukara	Terselesaikannya administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana	100%	**8.207.170.152**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kec. Madukara	Terselesaikannya Administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana	100%	**8.207.170.152**	
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Madukara	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	8.154.217.052	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Madukara	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	12 Orang/bulan	8.154.217.052	
b.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Madukara	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	49.333.091	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Madukara	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	49.333.091	
c.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kec. Madukara	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	16 laporan	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kec. Madukara	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	16 laporan	3.000.000	
3.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kec. Madukara**	**Persentase Administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana**	**100%**	**123.119.169**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kec. Madukara**	**Persentase Administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana**	**100%**	**123.119.169**	
a.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Madukara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	2 paket	12.747.700	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Madukara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	2 paket	12.747.700	

3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Madukara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	110.381.809	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Madukara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	110.381.809	
4.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kec. Madukara	**Persentase Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia**	100%	**14.028.250**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kec. Madukara	**Persentase Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia**	100%	**14.028.250**	
4.	Pengadaan Perlengkapan dan Meja Lainnya	Kec. Madukara	Jumlah unit Perlengkapan dan Meja Lainnya yang Disediakan	4 unit	14.028.250	Pengadaan Perlengkapan dan Meja Lainnya	Kec. Madukara	Jumlah unit Perlengkapan dan Meja Lainnya yang Disediakan	4 unit	14.028.250	
5.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec Madukara**	**Persentase Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana**	**100%**	**124.600.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec Madukara**	**Persentase Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana**	**100%**	**124.600.000**	
a.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Madukara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	24.600.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	**Kec. Madukara**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	24.600.000	
b.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Madukara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	100.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Madukara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	100.000.000	
5.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kec. Madukara	**Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**126.470.350**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kec. Madukara	**Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**126.470.350**	

a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Madukara	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	32 unit	51.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Madukara	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	32 unit	51.000.000	
b.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec Madukara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 unit	44.976.350	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec Madukara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 unit	44.976.350	
c.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Madukara	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 unit	24.500.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Madukara	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 unit	24.500.000	
2.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kec. Madukara**	**Persentase layanan yang sesuai dengan standar pelayanan**	**100%**	**90.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kec. Madukara**	**Persentase layanan yang sesuai dengan standar pelayanan**	**100%**	**90.000.000**	
1.	Koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Kec. Madukara	Persentase terselenggaranya pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	100%	10.000.000	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan UMUM	Kec. Madukara	Persentase terselenggaranya pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	100%	10.000.000	

a.	Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec. Mallokaro	Jumlah Dokumen Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 dokumen	10.000.000	Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec. Madukara	Jumlah Dokumen Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 dokumen	10.000.000	
f.	**Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat**	**Kec. Madukara**	**Persentase Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang terfasilitasi**	**100%**	**85.000.000**	**Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat**	**Kec. Madukara**	**Persentase Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang terfasilitasi**	**100%**	**85.000.000**	
g.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Penjiman Non Perizinan	Kec. Madukara	Jumlah dokumen Non Perijinan Usaha yang di Laksanakan	12 dokumen	5.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Penjiman Non Usaha	Kec. Madukara	Jumlah dokumen Non Perijinan Usaha yang di Laksanakan	12 dokumen	5.000.000	
h.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Non Perizinan	Kec. Madukara	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 laporan	5.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Non Perizinan	Kec. Madukara	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 laporan	5.000.000	
i.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Ditetapkan	Kec. Madukara	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di Imyahkan	1 laporan	70.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Ditetapkan	Kec. Madukara	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di Imyahkan	1 laporan	70.000.000	
j.	**Sasaran Strategis: Meningkatnya Efektivitas koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan desa/kelurahan**	**Kec. Madukara**	**Indeks Desa di Wilayah Kecamatan Madukara**	**77,473**		**Sasaran Strategis: Meningkatnya efektivitas koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan desa/kelurahan**	**Kec. Madukara**	**Indeks Desa di Wilayah Kecamatan Madukara**	**77,473**		
2.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kec. Madukara**	**Persentase lembaga desa/kelurahan di kecamatan yang terfasilitasi**	**100%**	**830.478.100**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kec. Madukara**	**Persentase lembaga desa/kelurahan di kecamatan yang terfasilitasi**	**100%**	**830.478.100**	

Berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2026, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan yaitu:

1. Memprioritaskan Kegiatan yang belum terlaksana di tahun 2024
2. Memprioritaskan pelaksanaan kegiatan yang manfaatnya langsung dirasakan Masyarakat
3. Mempedomani prinsip efisiensi dengan memprioritaskan kegiatan yang menjadi kegiatan wajib dan kegiatan pokok
4. Melanjutkan kegiatan yang sudah ada di tahun 2024

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan musrenbang kecamatan dan forum konsultasi publik telah disampaikan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui aplikasi SIPD. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Banjarnegara

DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN PRIORITAS KELURAHAN DAN DESA DI KECAMATAN MADUKARA

DATA SEBAGAIMANA TERLAMPIR

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	PAGU	DESA / KELURAHAN	USULAN KE	PERANGKAT DAERAH TUJUAN
1	Muhtar	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan desa)	Kondisi jalan Lingkungan desa dawuhan sudah rusak berat sehingga perlu dibangun paving/aci jalan lingkungan	Desa Dawuhan	500 m	Rp200.000.000	Dawuhan	APBD Kabupaten / Kota	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
2	Muhtar	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan sarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lainnya)	Kondisi drainase jalan lingkungan desa dawuhan sudah rusak berat	Desa Dawuhan	500 m	Rp200.000.000	Dawuhan	APBD Kabupaten / Kota	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah

3	Suntoro	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan sarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, box/slab curvert, drainase, prasarana jalan lainnya)	jalan Terlalu sempit Perlu pelebaran	Jln Raya Kutayasa - Limbangan , Kab. Banjarnegara	86 m	Rp150.000.000	Talunamba	APBD Kabupaten / Kota	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
4	Suntoro	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pemeliharaan prasarana jalan milik desa (gorong-gorong, selokan, box/slab curvert, drainase, prasarana jalan lainnya)	Minimnya Rambu - rambu Lalu Lintas membahayakan pengguna jalan	Jln Raya Madukara - Pagentan Desa Talunamba, Kab. Banjarnegara	10 unit	Rp30.000.000	Talunamba	APBD Kabupaten / Kota	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
5	Prayitno	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan desa)	Tanah rawan Longsor	Desa Penawangan RT 07 RW 02, Kab. Banjarnegara	90m	Rp200.000.000	Penawangan	Kabupaten / Kota	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
6	Prayitno	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Kawasan Permukiman: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan fasilitas pengelolaan sampah desa/ permukiman (penampungan, bank sampah, dan lain-lain))	Belum tersedianya tempat pengelolaan sampah	Desa Penawangan Kec. Madukara , Kab. Banjarnegara	96m	Rp500.000.000	Penawangan	Kabupaten / Kota	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah

7	Taufikuddin	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pemeliharaan prasarana jalan milik desa (gorong gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lainnya)	Terdapatnya saluran/drainase jalan yang perlu untuk ditangani agar air tidak tumpah kejalan raya sehingga menghambat pengguna jalan terutama ketika musim hujan jalan sering tergenang air	Depan Alfamart Kal.Kenteng (Jalan Bantarwaru-Madukara), Kab. Banjarnegara	1 x 150 M	Rp300.000.000	Bantarwaru	Kabupaten / Kota	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
8	Taufikuddin	Pembangunan Puskesmas	Lokasi/Lahan Bangunan Puskesmas yang tersedia kurang memadai untuk pelayanan masyarakat	Kelurahan Kenteng	1 Unit	Rp5.000.000.000	Bantarwaru	Kabupaten / Kota	DINKES
9	Surjanto Harso Tjahyadi	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pemeliharaan jalan desa)	Masih terdapat jalan desa yang kurang memadahi	RW 03, Kab. Banjarnegara	450 M3	Rp450.000.000	Kutayasa	Kabupaten / Kota	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah

10	Surjanto Harso Tjahyadi	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jembatan desa)	Jembatan penghubung wilayah kadus 1 dan 2 yang mengalami degradasi fondasi dan lebar jembatan yang kurang	RW 01 dan RW 02	350 M	Rp400.000.000	Kutuyasa	Kabupaten / Kota	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
11	Somad	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan sarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, box/slab curvert, drainase, prasarana jalan lainnya)	Kondisi jln desa sudah rusak dan kondisi jembatan sempit dan rapuh sehingga membahayakan pengguna jalan	Desa Clapar RW 01, Kab. Banjarnegara	300 Meter 4 x 3	Rp200.000.000	Clapar	Kabupaten/Kota	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
12	Somad	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pemeliharaan prasarana jalan milik desa (gorong-gorong, selokan, box/slab curvert, drainase, prasarana jalan lainnya)	Kondisi talud pengaman di RW 03 yang rusak dan membahayakan pemukiman yang ada di sekitar	RW 03 Dukuh Kaltengah Desa Clapar, Kab. Banjarnegara	150 X 10 m	Rp150.000.000	Clapar	Kabupaten/Kota	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
13	Radi	Bantuan Keuangan kepada Desa-Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) Kecamatan	Jalan Penghubung Kalurip – Karang Anyar Rusak Parah	Dusun Pramen Rt 03 Rw 03 Desa Kalurip, Kab. Banjarnegara	225x3000 cm	Rp150.000.000	Kalurip	Kabupaten / Kota	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah

14	RADI	Pembangunan Jalan Penghubung Kallurip Pakalen	Rusak berat, jalur ekstrim dan akses vital petani	Simangu, Kallurip RT 003/ 001, Kec. Madukara	225x7500 cm	Rp300.000.000	Kallurip	APBD Kabupaten	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
15	RADI	Pembangunan Jalan Penghubung Kallurip Karanganyar	Rusak berat, jalur ekstrim dan akses vital petani	Pramen, Kallurip RT 003/ 003, Kec. Madukara	225x3000 cm	Rp150.000.000	Kallurip	APBD Kabupaten	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
16	Hery Setyo Pranadi, SE	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1. Kondisi jalan yang menyempit akibat tidak adanya talud jalan 2. Jalan masih berupa tanah	RT 05 RW 01, Kab. Banjarnegara	300 m	Rp200.000.000	Petambakan	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
17	Hery Setyo Pranadi, SE	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1. Jalan masih berupa tanah 2. jalan kurang memadai	RT 05 RW 01, Kab. Banjarnegara	300 m	Rp200.000.000	Petambakan	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
18	Sodikin A,Ma .Pd.	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/ pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana alam)	Perlunya Talud Pengaman Tebing sekitar pemukiman	Dusun Bagaraji Rt.02/Rw.05, Desa Madukara, Kec.Madukara, kab Banjarnegara		Rp200.000.000	Madukara	Kabupaten/Kota	BPPKAD

19	Sodikin A,Ma .Pd	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pemeliharaan jalan desa)	Aspal jalan Desa rusak membahayakan Pengguna Jalan	Dusun Sipete Rt.02/Rw.06 Desa Madukara,Kec.Madukara,Kab Banjarnegara, Kab. Banjarnegara		Rp100.000.000	Madukara	Kabupaten/Kota	BPPKAD
20	Kusnan, S.IP	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/ pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana alam)	Perlunya Talud Pengaman Tebing sekitar pemukiman	Dusun Sela, Desa Pakelen, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara		Rp200.000.000	PAKELEN	Kabupaten / Kota	BPPKAD
21	Kusnan, S.IP	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	Masih kurangnya sarana prasarana jalan usaha tani sehingga menghalbatkan petani kesulitan mengambil hasil pertaniannya	Simpratu, Kadus 1, Desa Pakelen, Kec. madukara, Kab. Banjarnegara		Rp200.000.000	PAKELEN	Kabupaten / Kota	BPPKAD
22	Pujianto	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan desa)	Jalan kurang lebar dan banyak berlubang	Desa Limbangan Kecamatan Madukara, Kab. Banjarnegara		Rp1.000.000.000	Limbangan	Kabupaten / Kota	DPUPR
23	Pujianto	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pemeliharaan prasarana jalan milik desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lainnya)	Belum adanya penerangan jalan	Desa Limbangan Kecamatan Madukara , Kab. Banjarnegara		Rp50.000.000	Limbangan	Kabupaten / Kotu	DISHUB

24	Marsono	Pembangunan Jambanisasi Desa Pagelak	Banyak rumah yang belum mempunyai jamban sehat	Desa Pagelak Kecamatan Madukara, Kab. Banjarnegara	50 unit	Rp125.000.000	Pagelak	APBD Kabupaten	Dinas Kesehatan
25	Marsono	Pembangunan Drainase Jalan Kabupaten Sebelah Timur Jembatan Kali Taging	Drainase belum dibangun dan air sering meluap ke jalan raya	Desa Pagelak Kecamatan Madukara, Kab. Banjarnegara	235 m	Rp200.000.000	Pagelak	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
26	Jatmiko	Pembangunan/Pengadaan Trafick Ligt dan Rambu-rambu Lalu lintas	Antisipasi kecelakaan lalu lintas pada saat jam masuk sekolah / kantor	Depan SDN Pekauman, Depan PAUD SHAMILA, Pertigaan Lapangan Desa Pekauman (Akses masuk MIN 3 Banjarnegara)	3 Titik	Rp100.000.000	Pekauman	APBD Kabupaten	DISHUB
27	Jatmiko	Pembangunan Talud Saluran Irigasi Sekunder Desa Pekauman RW. 02	Kondisi Talud rusak berat sehingga terjadi kebocoran air ke Jalan Desa	Desa Pekauman RW. 02	500 m	Rp200.000.000	Pekauman	APBD Kabupaten	Dintankanak
28	NISRAN	Pembangunan Gedung Kesenian	Belum mempunyaiGedung Kesenian yang menunjang Desa Rakitan Sebagai Desa Wisata di Kecamatan Madukara	Rakitan RT 03 RW 03 Kec. Madukara	35 m x 25 m	1.200.000,00,-	Rakitan	APBD Kabupaten	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
29	NISRAN	Revitalisasi Lapangan Desa Rakitan	Lapangan Belum Standar dan belum rata	Rakitan RT 03 RW 03 Kec. Madukara	120 m x 80 m	Rp200.000.000	Rakitan	APBD Kabupaten	Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olah Raga

30	Heny Setyawan Indarto, SE	Pembangunan Gedung Serbaguna Kelurahan Rejasa	Kondisi saat ini Kelurahan belum memiliki gedung serbaguna, sementara kegiatan masyarakat membutuhkan fasilitas untuk mendukung kegiatan indoor	Kelurahan Rejasa	1 paket	Rp1.500.000.000	Rejasa	APBD Kabupaten	DPUPR
31	Heny Setyawan Indarto, SE	- Revitalisasi lapangan sepak bola	untuk fasilitas sarana prasarana olahraga	Kelurahan Rejasa	1 paket	Rp300.000.000	Rejasa	APBD Kabupaten	DPUPR
32	SUBALYO	Pengaman Jalan (Guardrail)	Jalan sangat mepet dengan tebing jurang	Jalan Blitar - Kenteng	70 M	100.000.000	Blitar	APBD Kabupaten	DPUPR
33	SUBALYO	Pembuatan Tepat Pembuangan Sampah	Tidak adanya TPS Desa dan Pembuangan Sampah masih banyak yg di sungai	Desa Blitar	0 Ls	500.000.000	Blitar	APBD Kabupaten	DPKPLH
34	SUBALYO	PIK (Pelebaran Jembatan Blitar Kenteng, Perbaikan Drainase dan pembuatan drainase Jalan Blitar - Kenteng)	Jalan yang sangat sempit dan drainase yg belum memadahi	Jalan Blitar - Kenteng	1 Ls	500.000.000	Blitar	APBD Kabupaten	BPPKAD
35	TUJONO, S.IP	Pembangunan Aula Kelurahan Kenteng	Sudah tidak layak dan dari awal berdirinya kelurahan belum pernah direhab	Kelurahan Kenteng	1 paket	Rp1.560.184.000	KENTENG	APBD Kabupaten	DPUPR

36	TUJUNO, S.IP	Rehab Pasar	Sudah tidak layak, bangunan lama dan butuh perbaikan	Rt 02 Rw 03 (Perempatan Kenteng menuju Blitar)	1 paket	Rp1.133.489.000	KENTENG	APBD Kabupaten	Disperindag kop UMKM
37	TARSO	Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa(Sub Bidang Pendidikan : Pembangunan pagar sekolah)	Pagar SD belum ada sehingga untuk keamanan dan kenyamanan dalam proses pembelajaran sangat terganggu	SDN Karanganyar RT 01 RW 02	40 m	Rp150.000.000	Karanganyar	Kabupaten / Kota	Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olah Raga
38	TARSO	Bantuan Keuangan Khutus kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang : Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan jalan Desa (Pengaspalan jalan penghubung ke Kecamatan)	Kondisi jalan ekonomi dan sekaligus akses jalan menuju ke kecamatan dan juga sebagai penggerak perekonomian warga masyarakat desa yang rusak parah sehingga menyebabkan sulit dilalui kendaraan dalam mengangkut hasil panen atau aktivitas lainnya	Desa Karanganyar	748 m	Rp250.000.000	Karanganyar	Kabupaten / Kota	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah

			sehingga diperlukan pembangunan jalan aspal untuk mempermudah aksebilitas perekonomian						
39	Yuanita Dyah Ratnawati	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa (PK)	Pembangunan Jalan Desa Dusun 1 (Pengaspalan)	Dusun 1, Desa Sered	0 Paket	Rp104.216.000	SERED	Kabupaten/Kota	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
40	Yuanita Dyah Ratnawati	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pemeliharaan prasarana jalan milik desa (gorong-gorong, selokan, box/slab curvert, drainase, prasarana jalan lainnya)	Jalan milik kabupaten yang berada didesa sered, belum ada drainasenya	Dusun Krajan RW 02, Kab. Banjarnegara	1 Paket	Rp 150.000.000	SERED	Kabupaten/Kota	DPUPR
41	Yuanita Dyah Ratnawati	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jembatan desa)	Jalan penghubung antar dusun belum ada jembatan, sehingga warga harus muter melewati desa lain.	Desa Sered, Kab. Banjarnegara	1 Paket	Rp 1.000.000.000	SERED	Kabupaten/Kota	BPPKAD

42	Kadi. SE	Peningkatan prasarana jalan daerah berupa drainase ruas jalan Madukara-Pakelen dan rambu-rambu jalan	Kurangnya rambu jalan dan kurangnya prasarana jalan lain dan drainase yang fungsinya kurangb maksimal dan banjir ke jalan ketika hujan deras	Ruas jalan Madukara-Pakelen	1 keg	Rp. 300.000.000	Gununggl ana	Kabupaten	DPUPR
43	Kadi. SE	Lampu penerangan jalan Gununggiana-Pakelen	Kurangnya penerangan sepanjang jalan Gununggiana-Pakelen	Jalan Gununggiana-Pakelen	1 keg	Rp. 400.000.000	Gununggl ana	Kabupaten	DISHUB

2.6. Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan hasil reses anggota DPRD, melalui aplikasi SIPD telah disampaikan usulan program dan kegiatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Validasi
	NIHIL				

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi, maka Kecamatan Madukara melaksanakan kebijakan daerah yang sinergis dengan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Kegiatan yang akan dilaksukan oleh Kecamatan Madukara diharapkan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan diatasnya, mempunyai rasa keadilan, pemerataan dan diarahkan agar implementasinya akan dapat berdampak pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Wilayah Kecamatan Madukara. Renja yang disusun perangkat daerah berpedoman pada RKPD dan RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029 dengan Visi " **Banjarnegara Maju dan Sejahtera** " yang akan diwujudkan melalui 5 (lima) Misi yang merupakan turunan dari pokok-pokok visi yang telah diidentifikasi sebelumnya yaitu:

1. Meningkatnya Infrastruktur dan Pelayanan Publik.
2. Mendorong pertumbuhan Ekonomi Lokal.
3. Meningkatkan Kualitas dan Akses Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan Sosial.
4. Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.
5. Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Transparan .

Dalam mencapai Visi Kabupaten Banjarnegara ,maka Kecamatan Madukara mempunyai peran dan fungsi menggerakkan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah dalam menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan. Terutama diksitkan dengan pelaksanaan pelimpahan kewenangan yang secara mutlak harus didukung oleh sumberdaya manusia aparatur yang mampu mengelola tugas-tugas pelayanan secara optimal, efektif dan efisien, serta mampu merumuskan kebijakan-kebijakan yang implementatif yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, yang pada muaranya mewujudkan Visi Kabupaten Banjarnegara.

Tujuan yang akan diwujudkan selama periode 2025-2029 adalah "Terwujudnya Banjarnegara Maju dan Sejahtera" yang diukur melalui indikator PDRB per kapita dan angka kemiskinan yang akan ditempuh melalui 4 sasaran strategis yaitu :

1. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
2. Meningkatnya perekonomian daerah yang berdaya saing dan berbasis potensi lokal secara berkelanjutan.
3. Meningkatkan infrastruktur yang mendukung perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel ,dan partisipatif.

Adapun sasaran strategis yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam pencapaian Visi Misi Kepala Daerah sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Madukara sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara dari 4 (empat) sasaran strategis tersebut adalah Sasaran Strategis ke-4 yaitu :

1. Meningkatnya tata kelola Pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif dengan indikator kinerja Indek Reformasi Birokrasi. Meningkatnya profesionalisme aparatur daerah untuk mewujudkan tata Pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, beretika, dan bertanggung jawab, serta mampu mendukung pembangunan daerah yang berbasis dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) , meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat .

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Madukara

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan, sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome Program Perangkat Daerah. Dengan kata lain tujuan dan sasaran merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diproleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Rumusan tujuan yang akan dicapai Kecamatan Madukara dalam mendukung RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatkam aksebilitas layanan pemerintah dalam urusan kewilayahan di Kecamatan Madukara

Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara struktur, spesifik, mudah dicapai dan rasional.

Sasaran Strategis yang akan dicapai oleh Kecamatan Madukara yaitu:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah urusan kewilayahan.
2. Meningkatnya efektivitas koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan desa/kelurahan .

Tujuan dan Sasaran jangka menegah Kecamatan Madukara beserta indicator kinerjanya disajikan dalam table sebagaimana berikut ini :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2026	2027	2028	2029	2030
	Meningkatnya aksesbilitas layanan pemerintah dalam urusan kewilayahan di Kecamatan Madukara		Indeks Pelayanan Publik	50,78	50,79	50,80	50,81	50,82
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah urusan kewilayahan	Nilai SAKIP Kecamatan Madukara	71,40	71,45	71,50	71,55	71,60
		Meningkatnya efektivitas koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan desa/kelurahan	Indeks Desa di Wilayah Kecamatan Madukara	77,471	77,490	77,507	77,520	77,531

Berikut ini Usulan Kegiatan Tahun 2026 dan Prediksi Tahun 2026 Kecamatan dan Kelurahan Madukara .

NO	LOKASI	ANGGARAN TAHUN 2026	
1	KECAMATAN MADUKARA	Rp	3.674.114.862,00
2	KELURAHAN REJASA	Rp	466.100.550,00
3	KELURAHAN KENTENG	Rp	492.148.060,00
	TOTAL ANGGARAN	**Rp**	**4.632.363.362,00**

Format rincian terlampir

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

KECAMATAN MAJALAKA KAB.BANJARNEGARA

Tahun 2026

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target akhir Tahun e Renstra (RPJ	Nomor / Capaian RENJA (RPJ Tahun 2025	Prakiraan / Capaian Target RENJA (RPJ Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Indikat	Sumber Dana	Prakiraan			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Kecamatan Majalaka						3.679.318.862,00							3.952.719.862,00	
	1	URUSAN WAJIB PEMERINTAH						3.679.318.862,00							3.952.719.862,00	
	1.07	KECAMATAN						3.679.318.862,00							3.952.719.862,00	
1	1.07.01	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3.493.818.862,00							3.679.818.862,00	
	1.07.01.05	Penyusunan, Pengelolaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			-		4.000.000,00			Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan profesionalisme aparatur kepegawaian, monitoring, keamanan, mengembangkan inovasi, kreativitas, mengembangkan agroindustri, mampu menyelesaikan masalah secara objektif, kejujuran	Pengukuran terhadap: Tata kerja Pemerintah a. Meningkatkan Diri Insanmulf Meningkatkan tata kerja pemerintah yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Terselenggaranya urusan pemerintah daerah		5.000.000,00	
	1.07.01.05.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

							Jumlah Dokumen Pemenangan Penegakan Disiplin				9 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Banjarnegara , Madukoro, Semua Hal/Desa	PENGAWAS AN ASN/ DAERAH (PAD)	Melaporkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan layanan kerja yang berkualitas, monitoring ketersediaan, mengembangka n industri kreatif serta mengembangka n agroindustri di sentra produksi melalui peran aktif investasi	Pengadaan Jaringan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik Meningkatka n tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Terselenggaranya urusan pemerintah daerah		9.000.000,00	KECAMATAN BADEGANNA
	7	0 1	0 1	2 0 1	0 0 0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Evaluasi/Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Banjarnegara , Madukoro, Semua Hal/Desa	PENGAWAS AN ASN/ DAERAH (PAD)	Melaporkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan layanan kerja yang berkualitas, monitoring ketersediaan, mengembangka n industri kreatif serta mengembangka n agroindustri di sentra produksi melalui peran aktif investasi	Pengadaan Jaringan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik Meningkatka n tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Terselenggaranya urusan pemerintah daerah		3.000.000,00	KECAMATAN BADEGANNA

	1	0 1	0 1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.206.249.075,0 0			Melaksanakan pengkoordinasian kebijakan dan mengkoordinasikan kegiatan kerja yang berkualitas, melaksanakan pengendalian, mengevaluasikan, mengevaluasikan dan mengevaluasikan laporan hasil kerja produktif, melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan	Terpenuhinya Dokumen Tata kelola Pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Terselenggaranya urusan pemerintah daerah		5.206.249.075,0 0		
	1	0 1	0 1	2.0 2	0001	Perumahan Rakyat dan Tunjangan Anak																			
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Anak				24 Orang/Bulan	5.206.249.075,0 0	Anak Berjenjang a. Berjenjang a. Semua kelolOlesa	PEMERINTAH KABUPATEN LAMURI (DALL	Melaksanakan pengkoordinasian kebijakan dan mengkoordinasikan kegiatan kerja yang berkualitas, melaksanakan pengendalian, mengevaluasikan, mengevaluasikan dan mengevaluasikan laporan hasil kerja produktif, melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan	Terpenuhinya Dokumen Tata kelola Pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Terselenggaranya urusan pemerintah daerah		5.206.249.075,0 0		
	1	0 1	0 1	2.0 2	0001	Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan (UP2)																			

							Contoh: Dokumen Pendaftaran/Izin dan Pengajuan/Verifikasi Keuangan (GRK)				91 Dokumen	85.111.000,00	Kab. Banjarnegara, Madukara, Banjar Mati'Desa	PENGENTA N KLU SADAH (PNS)	Melaksanakan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan kapangan kerja yang berkualitas, monitoring kewirausahaan mengembangkan inovasi serta mengembangkan agroindustri masyarakat pemuda mampu bersaing	Pengatur Lendasan Tata Kelola Pemerintah Berorganisasi Dan Disentralisasi Meningkatkan tata kelola pemerintah yang Transparan, akuntabel, dan partisipatif	Terselenggaranya urusan pemerintah daerah		85.111.000,00	6G0000748 G6GDJKAAA
	1	01	01	2.22	4843	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Pemerintah Daerah															
							Contoh: Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran/ SAKD dan Laporan Konsolidasi Pemerintah Daerah/Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					40 Laporan	11.800.000,00	Kab. Banjarnegara, Madukara, Banjar Mati'Desa	PENGENTA N KLU SADAH (PNS)	Melaksanakan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan kapangan kerja yang berkualitas, monitoring kewirausahaan mengembangkan inovasi serta mengembangkan agroindustri masyarakat pemuda mampu bersaing	Pengatur Lendasan Tata Kelola Pemerintah Berorganisasi Dan Disentralisasi Meningkatkan tata kelola pemerintah yang Transparan, akuntabel, dan partisipatif	Terselenggaranya urusan pemerintah pemerintah daerah		3.688.000,00	6G0000748 G6GDJKAAA

	7	01	01	2.01		Administrasi Umum Perangkat Daerah							99.851.711,00			Melaksanakan pengantaran surat-surat dan meningkatkan sarana kerja yang memadai, monitoring kendaraan dinas, mengantarkan surat-surat ke instansi terkait, mengembangkan administrasi kantor produktif, melaksanakan administrasi perkantoran	Pengadaan Layanan Tata Kelola Pemerintahan Berorientasi Dan Dinamis Meningkatkan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Terselenggaranya urusan pemerintah daerah		85.000.000,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Contoh: Paket Penyediaan dan Pemeliharaan Komputer yang Mendukung				1 Paket	12.767.700,00	Kab. Banyuwangi - Kecamatan, Semua Kecamatan	PENGADAAN, PEMELIHARAAN	Melaksanakan pengantaran surat-surat dan meningkatkan sarana kerja yang memadai, monitoring kendaraan dinas, mengembangkan administrasi kantor produktif, melaksanakan administrasi perkantoran	Pengadaan Layanan Tata Kelola Pemerintahan Berorientasi Dan Dinamis Meningkatkan Tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Terselenggaranya urusan pemerintah daerah		33.000.000,00	KECAMATAN KABUPATEN
	7	01	01	2.01	0002	Pemeliharaan Barang Logistik Kantor																	

							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	15.758.333,00	Tata Usaha Pimpinan	PENGAWAS PEMILU DAERAH (PPD)	Melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana kantor meningkatkan layanan kerja yang berkualitas, memantau ketersediaan, mengembangkan sistem kerja, mengkoordinasikan aktivitas sesuai dengan prosedur melalui jenis alat seperti:	Pengadaan Lembaran Tata Kelola Pemerintahan Berenggitan Dan Sosialisasi Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipasi	Terselenggaranya urusan pemerintah daerah		80.000.000,00	4.01.000.19 - HASIL_BARA
	1	0 6	0 1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	2.000.000,00				Melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana kantor dan meningkatkan layanan kerja yang berkualitas, memantau ketersediaan, mengembangkan sistem kerja, mengkoordinasikan aktivitas sesuai dengan prosedur melalui jenis alat seperti:	Pengadaan Lembaran Tata Kelola Pemerintahan Berenggitan Dan Sosialisasi Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipasi	Terselenggaranya urusan pemerintah daerah		80.000.000,00	
	1	0 6	0 1	2.0 7	00 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																

| | | |

								Jumlah Laporan Pemantauan dan Pemulihan, Nutrition Dan air dan Jumlah yang Disebarkan				12 Laporan	13.000.000,00	Kab. Banjarnegara (Kabupaten) Semua Kec(Desa	PENGAWASAN, PENGENDALIAN (PWS)	Menyusunkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan ekonomi digital di semua provinsi untuk peran aktif ekonomi.	Pengadaan Jaringan Tata kelola Pemerintahan Berenggitas Dan Akuntabel Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Terselenggaranya sistem pemerintah yang pemerintah daerah		13.000.000,00	6216464769 NADIUSARA
	1	0 1	0 1	0 1 0	0 0 0 A	Penyediaan Jasa Komunikasi Internal Kantor																	
								Jumlah Laporan Pemantauan dan Pemulihan Umum Kantor yang Terakreditasi				17 Laporan	Rp 729.871.00	Kab. Banjarnegara (Kabupaten) Semua Kec(Desa	PENGAWASAN (PWS)	Menyusunkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan ekonomi digital di semua provinsi untuk peran aktif ekonomi.	Pengadaan Jaringan Tata kelola Pemerintahan Berenggitas Dan Akuntabel Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Terselenggaranya sistem pemerintah yang pemerintah daerah		500.000.000,00	6216464769 NADIUSARA

	7	0 1	0 1	2 0		Penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Rp. 320.000,00				Meningkatkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan kapasitas kerja yang berkualitas, menerima kesesuaian pengembangan wilayah, mengembangkan wilayah kreatif serta menggembangkan agroindustri berbasis produksi menjaga pelestarian alam	Pengadaan Peralatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Terselenggaranya urusan pemerintah daerah		Rp.320.000,00		
	7	0 1	0 1	2 0	000 1	Pemeliharaan Gaji Pokok/Honor, Biaya Kemahfiatan, dan Pajak Pendapan Perangkat Desa atau Pendapan Desa lainnya																	
							Jumlah Honorarium Perangkat Desa atau Pendapan Desa jabatan yang Digaji/Upah dan Honorarium Pegawai				12 Org	Rp. 1.920.000,00	Satu Bantuan Negara - Kabupaten, Tertuju Kecamatan/Desa	Rp.160.000,00 x 12 Org x 1 Kali (Setahun (PAK))	Meningkatkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan kapasitas kerja yang berkualitas, menerima kesesuaian pengembangan wilayah, mengembangkan wilayah kreatif serta menggembangkan agroindustri berbasis produksi menjaga pelestarian alam	Pengadaan Peralatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Terselenggaranya urusan pemerintah daerah		Rp.1.920.000,00	KECAMATAN MADUKARA
	7	0 1	0 1	2 0	000 8	Pemeliharaan/Kesehatan Gedung Kantor dan Bangunan lainnya																	

							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	20.000.000,00	Kab. Banjarnegara , Wilayahnya, bantuan kota/Desa	PENGAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan tenaga kerja yang berkualitas, monitoring kesehatan, mengembangkan kualitas serta mengembangkan agroindustri sekitar di semua produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengadaan Landasan Tata kelola Pemerintahan Berorientasi Dan Ekonomi Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Terselenggaranya urusan pemerintah daerah		80.000.000,00	KECAMATAN SUKOJARAN
	4	0 1	0 1	1 0	005	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
						Jumlah Gedung dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	12.000.000,00	Kab. Banjarnegara , Wilayahnya, bantuan kota/Desa	PENGAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan tenaga kerja yang berkualitas, monitoring kesehatan, mengembangkan kualitas serta mengembangkan agroindustri di semua produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengadaan Landasan Tata kelola Pemerintahan Berorientasi Dan Ekonomi Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Terselenggaranya urusan pemerintah daerah		68.000.000,00	KECAMATAN SUKOJARAN
2	1	0 1	0 1			PROGRAM PENGEMBANGAN PERSEKONOMIAN PELAYANAN PUBLIK																

	7	0 1	0 1	2 0 8		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-			-	32.000.000,00			Meningkatnya dan terlaksananya pengelolaan dan pemeliharaan prasarana, pemeliharaan ekosistem dan pemberantasan kemiskinan	Pengadaan Landscape Tata Kelola Pemerintahan Bersinggungan Dan Dinamisnya Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Terselenggaranya layanan umum dan urusan pemerintah yang diimplikasi	-	32.000.000,00		
	7	0 1	0 1	2 0 8	007 1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																	
							Contoh Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Jalanan dan Prasarana Pelayanan Umum				1 Dokumen	32.000.000,00	Adb. Banyaknya Jalan/Jembatan	PENGEMBALIAN KELEBIHAN PAJAK	Meningkatnya dan terlaksananya pengelolaan dan pemeliharaan prasarana, pemeliharaan ekosistem dan pemberantasan kemiskinan	Pengadaan Landscape Tata Kelola Pemerintahan Bersinggungan Dan Dinamisnya Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Terselenggaranya layanan umum dan urusan pemerintah yang diimplikasi		32.000.000,00	KEGIATAN LAINNYA
	7	0 1	0 1	2 0 8		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Menghasilkan Pelayanan Dasar	-	-			-	81.200.000,00			Meningkatnya pengembangan infrastruktur dan meningkatnya lapangan kerja yang berkualitas, menurunnya kesenjangan pengembangan industri kuadrant serta meningkatnya pengembangan agglomeration industri di	Pengadaan Landscape Tata Kelola Pemerintahan Bersinggungan Dan Dinamisnya Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Terselenggaranya layanan umum dan urusan pemerintah yang diimplikasi	-	80.000.000,00		

| | | |

																		kreatif serta mengakibatkan agrowisata-kuliner di setiap produksi makan pesan oleh konsumen	kompetensi, akuntabel, dan partisipatif				
	1	0 1	0 6	2 2	0 0 A	Peningkatan Tugas Pokok Koordinasi Pelayanan di Kecamatan																	
							Jumlah Dokumen Tugas Pokok Koordinasi Pelayanan di Kecamatan				4 Dokumen	22.000.000,00	Kab. Banjarnegara , Mahasiswa, Semua Kalangan	Hindi Zahrotul A.Md. (NIDN: 0407044 (PBG)	Memberikan pengembangan dan meningkatkan tugas kerja yang berkualitas, monitoring kesesuaian, mengembangkan kreatif serta mengakibatkan agrowisata-kuliner di setiap produksi makan pesan oleh konsumen	Pengadaan Lanskap Tata Kelola Pemerintahan Berkeseimbangan Dan Efisiensi Meningkatkan cara pelayanan yang kompeten, akuntabel, dan partisipatif	Terselenggaranya arsip gambar kesehatan umum		22.000.000,00	07/A/0007/0
5	7	0 1	0 6			PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN PERKANTORAN DESA						15.000.000,00											
	7	0 2	0 6	2 2	1	Koordinasi, Rekomendasi dan Konsultasi Terfasilitasi dan Pelaporan Pemerintahan Desa						15.000.000,00			Memberikan pengembangan efektivitas dan meningkatkan tugas kerja yang berkualitas, monitoring kesesuaian, mengembangkan kreatif	Pengadaan Lanskap Tata Kelola Pemerintahan Berkeseimbangan Dan Efisiensi Meningkatkan cara pelayanan yang	Terselenggaranya fasilitasi dan evaluasi pemerintah desa		100.000.000,00	

	7	0 1	0 1	0 0		Administrasi Umum Perangkat Daerah						(-) 364.800,00			Melaksanakan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan sarana kerja yang berkualitas, memotong emisi/asuransi, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agroindustri berbasis produksi untuk produk unggulan	Pengurus Lapangan Tata Kelola Pemerintahan Berorientasi Strategis Meningkatkan nilai-nilai pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Terselenggaranya urusan pemerintahan pemerintah daerah		40.000.000,00	
	7	0 1	0 1	0 0	080 0	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							contoh Alat Pelayanan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	1.00	Kab. Banyumegara Wahyukara Nusara	1916/DISPERINDAG/2021	Melaksanakan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan sarana kerja yang berkualitas, memotong emisi/asuransi, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agroindustri berbasis produksi untuk produk unggulan	Pengurus Lapangan Tata Kelola Pemerintahan Berorientasi Strategis Meningkatkan nilai-nilai pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Terselenggaranya urusan pemerintahan pemerintah daerah		32.000.000,00	40.0.0.0414.0.851814
	7	0 1	0 1	0 0	080 0	Pemeliharaan Alat-alat Laptop Kantor																	

								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Terdistribusi				5 Paket	11.364.800,00	Ajib Banjarnegara _ Kabupaten Negara	Pimpinan Tinggi Pratama	Melaksanakan pengembangan ultra-efektif dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, memonitoring kesekretariatan, mengelilingi a- efektif serta mengembangkan a- agunamentro endustri di serta pimpinan melalui peran-pelif kepemim-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintaha n Berinteg rasi dan Inovasi Meningkatka n tata kelola pemerintaha n yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Terselenggaranya sistem pemerintah elektro		50.000.000,00	47.... MENK A' RIJADI
	7	0 1	0 1	2.0 7		Pengadaan barang MMK Sesuai Perencang ol kasi Pemerintah Daerah	-	-			2.046.700,00			Melaksanakan pengembangan ultra-efektif dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, memonitoring kesekretariatan, mengelilingi a- efektif, kreatif serta mengembangkan a- agunamentro endustri di serta pimpinan melalui peran-pelif kepemim-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintaha n Berinteg rasi dan Inovasi Meningkatka n tata kelola pemerintaha n yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Terselenggaranya sistem pemerintah daerah	-	10.000.000,00	
	7	0 1	0 4	2.0 4	000 5	Pengadaan Perlengkapan dan Mesin Lainnya																	

								(contoh: DAK Pendidikan dan Modal Lainnya yang Dialokasikan)				1 Unit	2.000.000,00	Kab. Banjarnegara _Rincian Belanja	PENGHAPUSAN ASET (BARANG PADA	Melaksanakan pengoperasian infrastruktur dan meningkatkan layanan kerja yang berkualitas, memantau, mengembangkan inovasi serta mengembangkan agroindustri berbasis produk unggulan melalui pelatihan	Pengadaan Layanan Tata kelola Pemerintahan Berorientasi Pada Masyarakat Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Terselenggaranya sistem pemerintah daerah		20.000.000,00	40. Jaringan Irigasi
	7	0 1	0 1	0 0			Penyelidikan dan Penindakan untuk Penyelenggaraan Operasi						4.000.000,00				Pengadaan Layanan Tata kelola Pemerintahan Berorientasi Pada Masyarakat Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Terselenggaranya sistem pemerintah daerah		4.000.000,00	
	7	0 1	0 1	0 0	0 0 1	Penyelidikan dan Pemeriksaan Tertib Operasi dan Lain-Lain																

								Kontrak Layanan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Sumber Daya dan Alat Lokal yang Disediakan				12 Laporan	Rp000.000,00	Kab. Banyuwangi Wilayah Utara Timur	PENYEDIA Rp XXX.000.000,00 (PKS)	Melaksanakan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan layanan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan UMKM, investasi serta mengembangkan aglomerasi industri di wilayah produksi melalui peran aktif koperasi	Pengadaan Layanan Tata Kelola Pemerintahan Berorientasi Pada Output Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Terselenggaranya urusan pemerintah daerah		Rp XXX.000.00	Rp XXX.000.00
	7	0 1	0 1	2.0 1		Penyelidikan Bahaya Alam Studi/DED Pekerjaan urusan Pemerintahan Daerah						22.976.430,00			Melaksanakan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan layanan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan UMKM, investasi serta mengembangkan aglomerasi industri di wilayah produksi melalui peran aktif koperasi	Pengadaan Layanan Tata Kelola Pemerintahan Berorientasi Pada Output Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, Akuntabel, dan partisipatif	Terselenggaranya urusan pemerintah daerah		22.000.000,00	
	7	0 1	0 1	2.0 1	000 1	Penyelidikan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Asr Tanah Kecil/Lain Kerangan Dinas atau Kendaraan Dinas Lokasi																

							Jumlah Akreditasi Perangkat Dinas/Aset Sekretariat Dinas, Aset/Barang yang Dipelihara dan dikalibrasi Kegiatan				36 Unit	6.000.000,00	Kab. Banjarnegara , Madukara, Wanadadi	PENGHEMATAN UTILITAS DAERAH (PHU)	Meningkatkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, menciptakan kesejahteraan, mengembangkan wisata/ ekonomi kreatif serta mengembangkan agroindustri dan industri di semua produksi nyata/ jasa (agrasi)	Pengurusan Lanjutan Tata kelola Pemerintahan Baik (Good Governance) Meningkatkan pelayanan pemerintah yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Terselenggaranya urusan pemerintah pemerintah daerah		6.000.000,00	6/12/2024 6:53:43
	T	0	0	2.0	00.	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	5.970.250,00	Kab. Banjarnegara , Madukara, Wanadadi	PENGHEMATAN UTILITAS DAERAH (PHU)	Meningkatkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, menciptakan kesejahteraan, mengembangkan wisata/ ekonomi kreatif serta mengembangkan agroindustri dan industri di semua produksi nyata/ jasa (agrasi)	Pengurusan Lanjutan Tata kelola Pemerintahan Baik (Good Governance) Meningkatkan pelayanan pemerintah yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Terselenggaranya urusan pemerintah pemerintah daerah		59.800.000,00	6/12/2024 6:53:43
	T	0	0	2.0	00.	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																

							Jumlah Sasaran Program Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten				1 Unit	4.000.000,00	Adb, Kementerian Pendidikan Nasional	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Menyusunkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan layanan kerja yang berkualitas, monitoring keberkualitasan, mengembangkan inovasi kreatif serta mengembangkan kemitraan industri di sektor produksi melalui pelatihan pelatihan	Pengurusan Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang Partisipasi, Akuntabel, dan partisipatif	Terselenggaranya urusan pemerintah daerah		4.000.000,00	KEJAHERAN WILAYA
4	1	0 1	0 1			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA YANG KEJAHERAN						803.731.100,00								1.270.000.000,00	
	1	0 1	0 6	0 3		Kegiatan Pendidikkapan Kebudahan						803.731.100,00			Melaksanakan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan kapangan kerja yang berkualitas, monitoring keberkualitasan, mengembangkan inovasi kreatif serta mengembangkan kemitraan industri di sektor produksi melalui pelatihan pelatihan	Pengurusan Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang Partisipasi, Akuntabel, dan partisipatif	Terselenggaranya pemberdayaan masyarakat desa kemitraan di kebudahan		1.270.000.000,00	
	1	0 1	0 6	0 3	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kebudahan																	

							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Direnovasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan				2 Lembaga Pemasyarakatan	6.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Jawa Barat, Papua	PENGADAAN JASA KONSTRUKSI	Melaksanakan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, memperkuat kelembagaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agroindustri, industri & variasi produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengadaan Layanan Tata Kelola Pemerintahan Berorientasi Dan Akuntabel Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Terselenggaranya pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga		500.000.000,00	KELUARAN KEGIATAN
	7	0 1	0 3	1 2	1 2 1	080 3	Pembinaan Kesadaran Masyarakat di Kecamatan															
							Jumlah Lembaga dan Pesantren Kemasan yang Terbangun				1 Unit	280.000.700,00	Kab. Banjarnegara, Maluku, Papua	PENGADAAN KONSTRUKSI PEKERJAAN PERSIAPAN PEMBANGUNAN KEAGAMAAN	Melaksanakan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, memperkuat kelembagaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agroindustri, industri & variasi produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengadaan Layanan Tata Kelola Pemerintahan Berorientasi Dan Akuntabel Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Terselenggaranya pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga		850.000.000,00	KELUARAN KEGIATAN
	7	0 1	0 3	1 2	080 3	Pembinaan Kesadaran Masyarakat di Kecamatan																

							Jumlah Pelanggan dan Dimana yang Melakukannya Kembali/Berjalan Menggunakan Kendaraan				2 Pelanggan / Dimana	137.138.640,00	Kab. Banjarnegara , Wadaburu, Rejasa	KONDARA (KAL) DAERAH (PAD)	Melaksanakan pengembangan infrastruktur dan pengelolaan, Upaya kerja yang berkualitas, memotong keterampilan mengembangkan aplikasi kerja mengembangkan agar memberi industri di sering produksi melalui pelan alat kapasitas	Pengukur Layanan Tata kelola Pemerintahan Berkeinginan Dan Dinamisme Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan akuntabel, dan partisipatif	Terselenggaranya pembelajaran masyarakat dan kembaga di kelurahan		841.000.000,00	43.114.000,00
	1	0 1	0 1	0.07 0	1001 0	Evaluasi kelurahan																
						Jumlah Layanan Hasil Evaluasi kelurahan					2 Layanan	8.000.000,00	Kab. Banjarnegara , Wadaburu, Rejasa	KONDARA (KAL) DAERAH (PAD)	Melaksanakan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan layanan kerja yang berkualitas, memotong keterampilan mengembangkan industri Aksen aplikasi mengembangkan aggunakan industri di sering produksi melalui pelan alat kapasitas	Pengukur Layanan Tata Kelola Pemerintahan Berkeinginan Dan Dinamisme Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang Terpercaya, Akuntabel, dan partisipatif	Terselenggaranya pembelajaran masyarakat dan kembaga di kelurahan		43.000.000,00	43.114.000,00
						Kelurahan Kemang						482.148.350,00								1.344.938.000,00	
	1					UNGUR SEBELAHAN						482.148.350,00								1.344.938.000,00	
		0 1				KECAMATAN						482.148.350,00								1.241.938.000,00	
0	1	0 1	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan						43.465.000,00								96.500.000,00	

						DINAS KOMUNITER/KOTT.																
	1	1.1.	1.1.1	1.1.1.6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	11.000.000,00			Meningkatkan efektivitas dan pengembangan sistem berbasis sumber daya aktif untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Pengadaan Langganan Tata Kelola Pemerintah a Berenggitan Dan Ekonomi Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Terlaksanggannya urusan pemerintah daerah	-	11.000.000,00	
	1	1.1.	1.1.1	1.1.1.6	1.01.2.22.0.01.0001	Penyediaan kendaraan dan kelengkapan kantor																
							Jumlah Fasilitas Penyakan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				1 Paket	0,00	Kab. Banyuwangi Mendukung Kantor	PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI (SIM)	Meningkatkan efektivitas dan pengembangan sistem berbasis sumber daya aktif untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Pengadaan Langganan Tata Kelola Pemerintah a Berenggitan Dan Ekonomi Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Terlaksanggannya urusan pemerintah daerah		11.000.000,00	22.000.000,00
	1	1.1.	1.1.1	1.1.1.6	1.01.2.22.0.01.0002	Penyediaan bahan logistik kantor																
							Jumlah ATAM Bahan logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	21.000.000,00	Kab. Banyuwangi Mendukung Kantor	PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI (SIM)	Meningkatkan efektivitas dan pengembangan sistem berbasis sumber daya aktif untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Pengadaan Langganan Tata Kelola Pemerintah a Berenggitan Dan Ekonomi Meningkatkan tata kelola	Terlaksanggannya urusan pemerintah daerah		10.500.000,00	42.000.000,00

| | | |

	7	01	01	2.01		Pencatatan Jasa Pemrosesan Limbah Pengembalian Daerah	-				-	1.400.000,00			Melaksanakan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan layanan kota yang berkualitas, memiliki keseimbangan ekosistem, mengembangkan industri ecocity serta mengembangkan agroindustri berbasis masyarakat dan partisipasi	Pengaturan Landasan Tata kelola Pemerintahan Berinteg rasi Dan Otonomi Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Terselenggaranya sistem pemrosesan limbah pemerintah daerah		4.500.000,00		
	7	01	01	2.01	0001	Pemrosesan Jasa Pemrosesan Limbah Pengembalian Daerah																	
							Jumlah sampah hasil pengolahan jasa komunitas, Sumber Daya Air dan Limbah yang Dimanfaatkan					12 Laporan	1.400.000,00	Kab. Banjarnegara - Madukoro Kendeng	PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL)	Melaksanakan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan layanan kota yang berkualitas, memiliki keseimbangan ekosistem, mengembangkan industri ecocity serta mengembangkan agroindustri berbasis masyarakat dan partisipasi	Pengaturan Landasan Tata kelola Pemerintahan Berinteg rasi Dan Otonomi Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Terselenggaranya sistem pemrosesan limbah pemerintah daerah		4.500.000,00		KELUARAN PENTING

	1	0 1	0 1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						10.000.000,00			Meningkatkan pengoptimalkan aktivitas dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, memotong kemiskinan, mengembangkan sistem manajemen dan pengembangan produk serta produk lainnya jenis alat kesehatan	Pengguna Layanan Fpta Kelola Pemerintahan Bermingtas Dan Organisasi Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif	Terselenggaranya urusan pemerintah pemerintah daerah	-	10.000.000,00		
	1	0 1	0 1	2.0 9	005	Penyediaan sara Pengelihaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional																	
							pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang Disediakan dan dimanfaatkan Pejabat				10 Unit	6.000.000,00	Kab. Banjarnegara / Masyarakat Kantong	KEKUATAN YANG DIGUNAKAN (FAO)	Meningkatkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, memotong kemiskinan, mengembangkan sistem manajemen dan pengembangan produk serta produk lainnya jenis alat kesehat	Pengguna Layanan Fpta Kelola Pemerintahan Bermingtas Dan Organisasi Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif	Terselenggaranya urusan pemerintah pemerintah daerah		6.000.000,00	60 Lokasi 6.000.000
	1	0 1	0 1	2.0 9	005	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	

							contoh: Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 unit	10.000.000,00	kab. Banjarnegara , Wadaslaya, Kemang	PENGANTAR KKU (UNTUK PAS)	Melaksanakan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, memotong kesenjangan mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agroindustri industri di sektor produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengadaan Landasan Tpcc Kabita Pemerintahan Bantenginan Dan Organisasi Meningkatkan r'ata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Terselenggaranya urusan pemerintah daerah		10.000.000,00	02.11.0004.0 10.0070.0
	1	0 1	0 1	1.0 4	001 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Kantor dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
							contoh: kantor dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 unit	6.000.000,00	kab. Banjarnegara , Wadaslaya, Kemang	PENGANTAR KKU (UNTUK PAS)	Melaksanakan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, memotong kesenjangan mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agroindustri industri di sektor produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengadaan Landasan Tpcc Kabita Pemerintahan Bantenginan Dan Organisasi Meningkatkan r'ata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Terselenggaranya urusan pemerintah daerah		6.000.000,00	02.11.0004.0 10.0070.0
6	1	0 1	0 1			PAKET KAMI PEMERINTAHAN MEDIA KANAT DESA DAN KELURAHAN						329.180.910,00								2.11.01.001.00.1 0	

	1	0 1	0 6	0 6 . 0 1		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							429.740.000,00			Terlaksananya pengembangan ide pendidik dan meningkatkan kepangan kerja yang berkualitas, monitoring kesesuaian dan mengembangkan kapasitas SDM yang mengembangkan agrowisata di kelurahan kedaton berbasis potensi	Pengadaan Lembaga Pelatihan Pemberdaya Berorientasi Dan Inovasi Meningkatkan tata kelola pemerintah yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Terselenggaranya pemberdayaan masyarakat dan lembaga di kelurahan		1.171.000.000,00		
	1	0 1	0 6	0 6 . 0 2	600 0	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
							Jumlah cendekiawan kelurahan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan				1 cendekiawan kelurahan	8.000.000,00	Kota Bandarlampung Tahun Anggaran 2025	PENGAMPU KEBIJAKAN (PKD)	Meningkatkan pengembangan urbanisasi dan meningkatkan kepangan kerja yang berkualitas, monitoring kesesuaian dan mengembangkan kapasitas SDM yang mengembangkan agrowisata di kelurahan kedaton berbasis potensi	Pengadaan Lembaga Pelatihan Pemberdaya Berorientasi Dan Inovasi Meningkatkan tata kelola pemerintah yang Partisipatif, akuntabel, dan partisipatif	Terselenggaranya pemberdayaan masyarakat dan lembaga di kelurahan		32.000.000,00	80 LAPAN 9 SEPTEMBER
	1	0 1	0 6	0 6 . 0 3	600 0	Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan																	

							Jumlah Sarana dan Prasarana Kebudayan yang Terdengar				2 Unit	385.000.000,00	Kab. Banjarnegara , Kabupaten, Banteng	KEMENTERIAN KAJU DAERAH (PRD), DAN PANANGAN PUNGUNGAN PENGANGAN KELUARAN	Mengumpulkan pengembangan infrastruktur dan mengutamakan tenaga kerja yang berkualitas, mengurangi kesenjangan ekonomi, mengembangkan ekonomi kreatif serta mengembangkan agroindustri di sentra produksi melalui peran serta koperasi.	Pengusaha Lembaga Tata Kelola Pemerintahan Barenegara Dan Ekonomi Mengakibatkan tata kelola pemerintahan yang Transparan, akuntabel, dan partisipatif	Terselenggaranya pendidikan masyarakat dan lembaga di kebudayan		825.000.000,00	42112A0A0 9 0000TM0
	T	0 1	0 3	2.2 2	0000 0	Pendidikan Masyarakat di Kebudayan																
							Jumlah Pelatihan dan Diklat yang Diselenggarakan Pendidikanan Masyarakat di Kebudayan				2 Pelatihan / Kelas	127.500.000,00	Kab. Banjarnegara , Kabupaten Banteng	KEMENTERIAN KAJU DAERAH (PRD)	Mengembangkan pengembangan infrastruktur dan mengutamakan tenaga kerja yang berkualitas, mengurangi kesenjangan ekonomi, mengembangkan ekonomi kreatif serta mengembangkan agroindustri di sentra produksi melalui peran serta koperasi.	Pengusaha Lembaga Tata Kelola Pemerintahan Barenegara Dan Ekonomi Mengakibatkan tata kelola pemerintahan yang Transparan, akuntabel, dan partisipatif	Terselenggaranya pendidikan masyarakat dan lembaga di kebudayan		300.000.000,00	42112A0A0 9 0000TM0
	T	0 1	0 3	2.2 2	0000 0	Tradisi Kebudayan																

| | | |

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program pada Kecamatan Madukara merupakan program prioritas dalam Renstra 2026-2030. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Banjarnegara selanjutnya dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Pemilihan untuk masing-masing program/ kegiatan / sub kegiatan di Kecamatan madukara sebagai Berikut

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 6 (enam) kegiatan yaitu:
   a. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan:
      a.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
      a.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
   b. Administrasi keuangan perangkat daerah terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan :
      b.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN .
      b.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD.
      b.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD.
   c. Administrasi umum perangkat daerah terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan:
      c.1 Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor.
      c.2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
   d. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan :
      d.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
   e . Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerahterdiri dari 2 (dua) sub kegiatan :
      e.1 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.
      e.2.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
   f. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan :

f.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

f.2 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

f.3 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terdiri dari 2 kegiatan yaitu :

   a. Kordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan

      a.1 Kordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum.

   b. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan :

      b.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perijinan Non Usaha.

      b.2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Non Perizinan.

      b.3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.

3. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terdiri dari 3 kegiatan yaitu :

   a. Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan :

      a.1 Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.

   b. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan :

      b.1 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan.

   c. Pemberdayaan Kelurahan terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan :

      c.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan.

      c.2 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan.

      c.3 Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan.

c.4 Evaluasi Kelurahan.

4. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum terdiri dari 1 (satu) kegiatan :

a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah terdiri dari 1(satu) sub kegiatan :

a.1 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

5. Program pembinaan dan pengawasan pemerintah desa terdiri dari 1 (satu) kegiatan :

a. Fasilitasi,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terdiri dari 8 (delapan) sub kegiatan :

a.1 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.

a.2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa.

a.3 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa.

a.4 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

a.5 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa.

a.6 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

a.7 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

a.8 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran Rencana Setrategis (Renstra) Kecamatan madukara Tahun 2025-2029 . Renja Kecamatan Madukara selanjutnya menjadi platform operasional bagi Perangkat Daerah dalam menjalankan programnya dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka sasaran pembangunan daerah tahun 2025. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja Kecamatan Madukara digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026 dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disepakati.
2. Kerangka pendanaan dalam Renja Kecamatan Madukara masih bersifat sementara, sehingga masih dimungkinkan terjadi perubahan pagu yang disebabkan oleh pengurangan, penambahan, dan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan maupun antar sub kegiatan dalam kerangka penyusunan anggaran secara terpadu dan berbasis kinerja.
3. Renja Kecamatan Madukara menjadi acuan bagi Camat dan segenap jajarannya serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, serta menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal : 08 Agustus 2025

Plt. CAMAT MADUKARA

HADI ARUMBUDUKO, SP. MSi
Pembina Tk I
NIP. 19690118 199603 1 004

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan yang diatur melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan pembentukan tim penyusun, penelaahan rancangan awal RKPD, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, hingga pada penyempurnaan berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang RKPD. Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, penyusunan Renja Perangkat Daerah juga mengacu pada Renja Kementerian/Lembaga terkait, serta Renja Perangkat Daerah Provinsi terkait. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan

yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2. Landasan Hukum

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah

2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
26. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 14);
27. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 15);
28. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 22 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026

29. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 30 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecaatan

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun dengan maksud untuk:

a. Sebagai upaya kongkrit menjabarkan Renstra Kecamatan Mandiraja Tahun 2025-2029 ke dalam rencana program kegiatan prioritas Tahun 2026 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Renja K/L Tahun 2026 dan Renja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;
b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerapan anggaran berbasis kinerja.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Mandiraja Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

a. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA-DPA dalam Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2026, yang dalam penyusunannya didahului dengan menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026;
b. Sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Tahun 2026;
c. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun berdasarkan sistematika yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah.

BAB 2 : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dan atau pokok- pokok DPRD.

BAB 3 : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan tahun 2025.

BAB 4 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran RKPD.

BAB 5 : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN MANDIRAJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Mandiraja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Mandiraja

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah meliputi urusan pemerintahan unsur Kewilayahan Bidang Urusan Kecamatan.

Renja Kecamatan Mandiraja Tahun 2024 yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 terdiri dari 5 program, 11 kegiatan, dan 30 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 2.538.580.436,- dengan fokus utama pada mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good government) dalam kehidupan berpolitik yang demokratis dan bertanggung jawab. Program/kegiatan/sub kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung tujuan daerah (Berdasarkan Berita Acara reviu penyelarasan perencanaan tanggal 2 Januari 2024) yang meliputi:

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
2. Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik.

Dari 5 program, 11 kegiatan, dan 30 sub kegiatan yang dalam Renja Perangkat Daerah tersebut, program/kegiatan/sub kegiatan yang disetujui untuk dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024 terdiri dari 5 program, 11 kegiatan, dan 30 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 2.290.113.566,-.

Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024, terjadi beberapa perubahan yang meliputi penambahan atau pengurangan pagu, penghapusan, penambahan atau pengurangan program/kegiatan/sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Perubahan tersebut mengubah

rincian dalam Renja Perangkat Daerah menjadi 4 program, 8 kegiatan, dan 16 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 2.213.515.792,-. Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2024, ada 1 program yang berkurang anggarannya yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dari Rp 1.744.003.096,- menjadi Rp 1.697.405.322,-, pada sub kegiatan peenyediaan gaji dan Tunjangan ASN Rp. 76.597.774,-.

Pada Renja Kecamatan Mandiraja tahun 2024, Program/Kegiatan/Sub kegiatan yang bertambah/berkurang, meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

      1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
      3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

   c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

      1. Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
      2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

   d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
      2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

   e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

2. Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
   a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
      1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
      2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenanganlain yang dilimpahkan
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
   a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
      1. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
4. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
   a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
      1. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Dinamika yang terjadi selama tahun 2024 turut mempengaruhi keberhasilan pencapaian Renja Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2024, tercatat adanya hasil yang baik karena semua target tercapai. Indikator Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja 68,00 terealisasi 69,05 dengan tingkat capaian kinerja 102 %. Indikator Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan dengan target kinerja 84,35 terealisasi sebesar 84,58 dengan tingkat capaian kinerja 100,26 %. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya komitmen dan integritas yang tinggi dari para aparatur pemerintah kecamatan.

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada, semua program/kegiatan/sub kegiatan sesuai target.
b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik. Berdasarkan hasil evaluasi, Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian kinerja antara lain adalah:

1. Adanya perencanaan, pelaksanaan, monitoring yang baik.
2. Menyelaraskan hal-hal yang akan dikerjakan dengan target kinerja.
3. Menyelaraskan apa yang dianggarkan dengan apa yang akan dikerjakan.
4. Mengerjakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja.
5. Melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, pada tahun 2024 keseluruhan pencapaian kinerja telah tercapai sesuai target. Pada tahun perencanaan selanjutnya, perlu diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk pencapaian target kinerja ,diantaranya:

1. Koordinasi antar Kasi dan Sub Bagian yang mendukung.
2. Prioritas Perencanaan yang tepat sasaran, agar kegiatan bisa berjalan sesuai perencanaan.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024 disajikan pada tabel di bawah ini

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiata n/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiat an Renja Perang kat Daera h tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realis asi Capai an Progra m dan Kegiat an s/d tahun 2025	Tingka t Capaia n Realis asi Target Renstr a (%)
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	(8)=7/6	-9	(10)=5 +7+9	(11)=1 0/4
	URUSAN PEMERINTAHAN									
	UNSUR KEWILAYAHAN									
	Tujuan: Meningkatnya aksesibilitas layanan pemerintah dalam urusan kewilayahan di Kecamatan Mandiraja	Indeks Pelayanan Publik	2,08	-	-	-	-			
	Tujuan : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP								
	Sasaran Strategis : Meningkatnya Efektivitas koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan desa/kelurahan	Indeks Desa di Wilayah Kecamatan	77,32							

	Sasaran Strategis : Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	69,05	69,05	68	69,05	102%	69,05	69,05	100%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Prosentase Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa yang terlaksana		100	100	100	100	100	100	100
		Persentase desa yang tertib administrasi desa	100							
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	16 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	0	16	16	100%
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	16 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	0	16	16	100%
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 dokumen	0	3 dokumen	3 dokumen	100%	12 dokumen	0	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	16 dok	16 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	100%	16 dok	16 dok	100%

	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	16 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	100%	16 dokumen	16 dokumen	100%
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan hasil koordinasi pendampingan di wilayahnya	16 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Terlaksana		100	100	100	100	100	100	100
		Persentase Penanganan Konflik di Wilayah	100							
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang terlaksana	100	100	100	100	100	100	100	100
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6 dok	12 dok	12 dok	12 dok	100%	12 dok	12 dok	100%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat desa	100	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase lembaga desa/kelurahan di kecamatan yang terfasilitasi								
	koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Persentase Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	1 laporan	2 laporan	0 laporan	0 laporan	0%	2 laporan	0 laporan	0
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	100%							
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	2 lembaga kemasyarakatan	- lembaga kemasyarakatan	- lembaga kemasyarakatan	- lembaga kemasyarakatan	100%	- lembaga kemasyarakatan	- lembaga kemasyarakatan	
	Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM								
	Sasaran Strategis : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah urusan kewilayahan	Nilai SAKIP Kecamatan	B (69,25)							
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Efektivitas dan Transparasi Layanan Publik	Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan		85,05	85,05	85,11	100,07%	85,9	85,92	100,40 %
		Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana		100	100	100	100	100	100	100
	PROGRAM	Persentase tingkat	100							

	DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100							
		Prosentase Dokumen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 orang/bulan	14 orang/bulan	14 orang/bulan	14 orang/bulan	100%	14 orang/bulan	14 orang /bulan	100%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikassi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	12 dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	14 Laporan	14 Laporan	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Peralatan	Jumlah Paket yang tersedia	2 paket	3 paket	1 paket	1 paket	100%	5 paket	5 paket	100%

	Penyediaan Bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 paket	7 paket	8 paket	13 paket	100%	13 paket	7 paket	100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 unit	3 unit	3 unit	3 unit	100%	4 unit	4 unit	100%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	4 unit	4 unit	50 unit	50 unit	100%	4 unit	4 unit	100%
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0	1 unit	0 unit	0
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit							
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12	12 laporan	100%

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinatah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjangn Urusan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	100%	10 unit	10 unit	100%
	Pemeliharaan/rehabilit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	4 unit	2 unit	2 unit	100%	3 unit	3 unit	100%
	Pemeliharaan/rehabilitasi sasaran dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	100%	12 unit	12 unit	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik Presentase layanan yang sesuai dengan standar pelayanan	100	100	100	100	100%	100	100	100%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Non Perijinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintah	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perijinan Non Usaha	Jumlah dokumen Non Perijinan Usaha yang di Laksanakan.	12 dokumen	254 dokumen	150 dokumen	155 dokumen	103%	150 dokumen	150 dokumen	100%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang dilimpahkan Presentase terselenggarakannya	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
	Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Persentase terselenggaranya pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Koordinasi sinergitas dengan perangkat Daerah atau Intansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi Sinergi dengan perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 dok	6 dok	6 dok	6 dok	100%	6 dok	6 dok	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Mandiraja

Dalam pelaksanaan pelayanannya, Kecamatan Mandiraja mengampu 2 Indikator Kinerja Utama. Dari 2 indikator Kinerja Utama tersebut berstatus tercapai dan melebihi target yaitu Indikator Nilai SAKIP Kecamatan target pada tahun 2024 68,00 tercapai 69,05 tingkat capaian kinerja atau 102% dan Indikator Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan dari target 84,35 tercapai 84,58 atau 100,26 %. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain Adalah :

1. Merencanakan target kinerja;
2. Menyelaraskan dokumen perencanaan sehingga data yang disajikan merupakan data yang akuntabel;
3. Koordinasi internal perangkat daerah dengan maksimal sehingga kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan perencanaan yang ada.
4. Koordinasi Pemerintah Kecamatan dan Desa yang telah berjalan dengan baik;
5. Komitmen dari para aparatur kecamatan untuk memberikan pelayanan yang prima sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

Dalam rangka pencapaian target kinerja tahun berikutnya, beberapa hal yang harus diupayakan meliputi:

1. Mengevaluasi, menelaah, menyelaraskan dokumen perencanaan agar tercapai target kinerja;
2. Mengevaluasi dan memperbaiki komunikasi serta koordinasi internal perangkat daerah sehingga kegiatan dapat berjalan selaras dengan perencanaan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah baik.

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara (Setelah penyelarasan)

No	Indikator	SPM/Standar	IKK LPPD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan
		Nasional		2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	Analisis
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
1	Nilai SAKIP Kecamatan Mandiraja			66	69,05	69,15	69,25	69,05	69,25	69,30	69,35	
2	Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan		-	84,36	84,37	-	-	84,47	84,58	-	-	
3	Indeks Desa di Wilayah Kecamatan			-	-	77,32	77,37			77,32	77,32	

*) Kolom 3 diisi berdasarkan IKK outcome dalam lampiran Permendagri 18/2021

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Mandiraja

Kecamatan Mandiraja dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan urusan pemerintahan dalam 1 urusan, yaitu Urusan Kewilayahan. Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Banjarnegara

2025-2029, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk tahun 2026 mencakup 1 urusan tersebut. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Mandiraja diantaranya adalah:

1. Belum optimalnya pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat;
2. Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
3. Masih kurangnya dukungan data informasi dari masyarakat, peraturan yang valid, akurat dan terintegrasi sebagai pedoman dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat;
4. Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang ada;
5. Masih rendahnya pemahaman masyarakat maupun aparatur desa tentang hakekat pembangunan nasional;
6. Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan administrasi desa;
7. Masih kurangnya keseriusan masyarakat dan petugas pemungut dalam pelunasan PBB lebih awal;
8. Masih kurangnya sarana dan prasarana.

Permasalahan tersebut, jika tidak diselesaikan dapat menjadi *constraint* dalam pencapaian visi dan misi Bupati maupun capaian indikator lainnya. Beberapa dampak dari adanya permasalahan dan hambatan tersebut meliputi:

1. Kurang tercapainya suatu kegiatan sesuai indikator kinerja
2. Tidak tercapainya sasaran kerja
3. Belum optimalnya hasil pekerjaan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi, peningkatan kualitas birokrasi, dan meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan pengguna layanan akan meningkatkan kebutuhan akan adanya penyediaan produk layanan yang semakin baik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi-inovasi dalam menunjang peningkatan pelayanan publik secara berkelanjutan. Beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Mandiraja, yaitu:

1. Kondisi geografis beberapa desa di wilayah kecamatan Mandiraja dengan kondisi permukaan tanahnya perbukitan, yang rawan longsor dan tanah yang labil/ mudah bergerak mengakibatkan kerusakan infrastruktur transportasi dan bencana alam tanah longsor kerap kali terjadi sehingga menghambat mobilitas ekonomi dan sosial masyarakat
2. Tuntutan masyarakat semakin beragam untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas.
3. Masih adanya aparat pemerintahan dan kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipasif.
4. Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.
5. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan.
6. Melimpahnya potensi sumberdaya alam yang dapat dikelola untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
7. Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mempermudah upaya meningkatkan profesionalisme.
8. Adanya dukungan koordinasi lintas sektor di wilayah kecamatan yang mendukung tercapainya sinkronisasi dan integrasi kegiatan lingkup kecamatan antara lain kegiatan Konferensi dinas/rapat koordinasi Forkompinca, UPT/Instansi dan Kepala Desa secara rutin di tingkat Kecamatan.

Berdasarkan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan tersebut, dapat diinventarisasi beberapa isu strategis. Inventarisasi isu-isu strategis tahun 2026 didapatkan dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal Kabupaten Banjarnegara sampai dengan tahun 2024. Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan pembangunan. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Mandiraja pada tahun 2024, sebagai berikut:

1. Masih belum optimalnya penerapan Sistem akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah.
2. Pelayanan publik kurang optimal.
3. Kurang optimalnya pembinaan ke desa.
4. Masih tingginya angka stunting
5. Masih tingginya angka kemiskinan, ditandai dengan masih adanya 2 desa yang masuk dalam kategori Desa miskin ekstrem yaitu Desa Salamerta dan Desa Jalatunda
6. Kurang cepatnya penanganan permasalahan di desa.
7. Rawan bencana alam tanah longsor antra lain desa Jalatunda, Somawangi, Kebanaran, Glempang, dan Salamerta dan rawan kekeringan dan krisis air bersih untuk desa somawangi dan desa Jalatunda.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Tahun 2026 merupakan pelaksanaan tahun pertama dalam Renstra Tahun 2025-2029. Dalam Renstra Tahun 2025-2029, prioritas arah kebijakan sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Mandiraja pada tahun 2026 meliputi:

1. Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP.
2. Optimalisasi pelaksanaan pelayanan publik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Optimalisasi fungsi koordinasi kecamatan dengan perangkat desa, OPD, dan stakeholder lain.

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 Kabupaten Banjarnegara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikato Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
I	Tujuan : Meningkatnya aksesibilitas layanan pemerintah dalam urusan kewilayahan di Kecamatan Mandiraja	Kab. Banjarnegara	Indeks Pelayanan Publik	2,08		Tujuan : Meningkatnya aksesibilitas layanan pemerintah dalam urusan kewilayahan di Kecamatan Mandiraja	Kab. Banjarnegara	Indeks Pelayanan Publik	2,08		
II	Sasaran Strategis : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah urusan kewilayahan	Kec. Mandiraja	Nilai SAKIP Kecamatan	B (69,15)	2.665.720.200	Sasaran Strategis : Meningkatn ya akuntabilitas kinerja perangkat daerah urusan kewilayahan	Kec. Mandiraja	Nilai SAKIP Kecamatan	B (69,15)	2.574.864 .970	
III	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Mandiraja	Presentase tingkat ketercap aian kinerja perangkat daerah	100%	2.411.790.500	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Mandiraja	Presentase tingkat ketercap aian kinerja perangkat daerah	100%	2.356.94 4.570	

1.	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Kec. Mandiraja	terpenuhinya perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja kecamatan mandiraja	100%	5.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja	Kec. Mandiraja	terpenuhinya perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja kecamatan mandiraja	100%	3.151.700	
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Mandiraja	Jumlah	14 dokumen	2.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Mandiraja	Jumlah	14 dokume n	1.676.100	
b.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kineja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Mandiraja	Koordina si dan Penyusu nan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 laporan	2.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kineja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Mandiraja	Koordina si dan Penyusu nan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 laporan	1.475.000	

2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Mandiraja	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	1.790.159.560	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Mandiraja	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	1.835.951.822	
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Mandiraja		14 orang/bulan	1..744.903.560	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			15 orang/bulan	1..818.341.822	
b.	Pelaksanaan Penataan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Mandiraja	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semester an SKPD dan Laporan	12 dokumen	42.756.000	Pelaksanaan Penataan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Mandiraja	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semester an SKPD dan Laporan	12 dokumen	21.480.000	
c.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kec. Mandiraja	Koordinasi Penyusu nan Laporan Keuanga n Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	2.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kec. Mandiraja	Koordinasi Penyusu nan Laporan Keuanga n Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	1.500.000	
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100%	139.222.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100%	137.199.550	

a.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Mandiraja	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	6.591.200	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Mandiraja	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	9.500.000	
b.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunja ng Urusan Pemerintahan Daerah	12 paket	130.053.300	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunja ng Urusan Pemerintaha n Daerah	12 paket	130.608.350	
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Mandiraja	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	75.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Mandiraja	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	100%	60.000.000	
a.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Mandiraja	Jumlah unit peralata n dan mesin lainnya yang disediak an	4 unit	75.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Mandiraja	unit peralatan dan mesin lainnya yang disediak an	3 unit	60.000.000	

b.	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Kec. Mandiraja	Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	4 unit	-	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Kec. Mandiraja	Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	4 unit	-	
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Mandiraja	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan	100%	109.753.540	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Mandiraja	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan	100%	109.753.540	
a.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Mandiraja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	18.600.000	Penyedia Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Mandiraja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunik	12 laporan	18.600.000	

b.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Mandiraja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	91.153.540	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Mandiraja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	91.153.540	
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daaerah	Kec. Mandiraja	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunja ng Urusan Daaerah sesuai ketentua n	100%	292.655.400	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daaerah	Kec. Mandiraja	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunja ng Urusan Daaerah sesuai ketentua n	100%	278.956.200	
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Mandiraja	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayark an Pajaknya	10 Unit	38.956.200	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Mandiraja	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayark an Pajaknya	8 Unit	38.956.200	
b.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Gedung Kantor	Kec. Mandiraja	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	3 Unit	200.000.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Gedung Kantor dan Bangunan	Kec. Mandiraja	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	3 Unit	215.000.000	

	dan Bangunan Lainnya		Dipelihara/Direhabilitasi					Dipelihara/Direhabilitasi			
	Pemeliharaan/ Rehabi litasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Mandiraja	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	10 unit	53.699.200	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Kec. Mandirajatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	10 unit	25.000.000 3.699.200	
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Mandiraja	Presentase layanan yang sesuai dengan standar pelayana n	100%	162.529.700	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Mandirajatan	Presentase layanan yang sesuai dengan standar pelayana n	100%	139.660.000	
1.	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kec. Mandiraja	Persenta se terseleng garaanya pemeliha raan sarana dan prasaran pelayana n umum	100%	34.500.000	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kec. Mandiraja	Persenta se terseleng garaanya pemeliha raan sarana dan prasaran pelayana n umum	100%	-	

a.	Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec. Mandiraja	Jumlah Dokumen Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan Presentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1 dokumen	34.500.000-	Koordinasi sinergitas	Kec. Mandiraja	Jumlah	1 dokumen		
2.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Mandiraja	Jumlah	100%	128.029.700	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Mandiraja		100%	124.660.000 108.075.000	
a.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Non Perizinan	Kec. Mandiraja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 laporan	10.869.700	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Non Perizinan	Kec. Mandiraja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 laporan	7.500.000	
b.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perijinan Non Usaha	Kec. Mandiraja	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 dokumen	-	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perijinan Non Usaha	Kec. Mandiraja	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 dokumen	-	

c.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Mandiraja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenan gan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	117.160.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Mandiraja	Laporan Pelaksan aan Kewenan gan Lain yang Dilimpah kan	1 Laporan	117.160.000	
2.	Sasaran Strategis : Meningkatnya Efektivitas koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan desa/keluraha n	Kec. Mandiraja	Indeks Desa di Wilayah Kecamatan	77,32		Sasaran Strategis : Meningkatnya Efektivitas koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan desa/kelurahan	Kec. Mandiraja	Indeks Desa di Wilayah Kecamatan	77,32		
I	PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Mandiraja	Presentase lembaga desa/kelurahan di kecamatan yang terfasilitasi	100%	4.800.000	PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Mandiraja	Presentase lembaga desa/kelurah an di kecamatan yang terfasilitasi	100%	3.750.000	
1.	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Kec. Mandiraja	Persenta se Koordina si kegiatan pemberd ayaan desa yang terlaksana	100%	4.800.000	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Kec. Mandiraja	Persenta se Koordina si kegiatan pemberd ayaan desa yang terlaksana	100%	3.750.000	

a.	Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Mandiraja	efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	1 laporan	4.800.000	Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Mandirajatan	efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	1 laporan	3.750.000	
1.	Pemberdayaan Lembaga KemasyarakatanTing kat Kecamatan	Kec. Mandiraja	Persenta se Pemberd ayaan lembaga kemasya rakatan tingkat Kecamat an	65%	4.800.000	Pemberdayaan Lembaga KemasyarakatanTingkat Kecamatan	Kec. Mandiraja	Persenta se Pemberd ayaan lembaga kemasya rakatan tingkat Kecamat an	65%	3.750.000	
a.	Peningkatan Kapasitas lembaga kemasyarakatan	Kec. Mandiraja	Jumlah Lembaga Kemasya rakatan yang ditingkat kan kapasita snya	2 lembaga kemasy arakatan	4.800.000	Peningkatan Kapasitas lembaga kemasyarakatan	Kec. Mandiraja	Jumlah Lembaga Kemasya rakatan yang ditingkat kan kapasita snya	2 lembaga kemasy arakatan	3.750.000	
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Mandiraja	Presentase penanganan konflik di wilayah	100%	18.600.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Mandiraja	Presentase penanganan konflik di wilayah	100%	17.700.000	
1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah	Kec. Mandiraja	Presentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah terlaksana	100%	18.600.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah	Kec. Mandiraja	Presentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala	100%	17.700.000	

								Daerah terlaksana			
a.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Mandiraja	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6 Dokumen	18.600.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Mandiraja	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6 Dokumen	17.700.000	
III	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Kec. Mandiraja	Presentase Desa yang tertib administrasi desa	100%	68.600.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Kec. Mandiraja	Presentase Desa yang tertib administrasi desa	100%	56.810.000	
1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Mandiraja	Persentase Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa yang terlaksana	100%	68.600.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Mandiraja	Persentase Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa yang terlaksana	100%	56.810.000	

a.	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan kepala desa	Kec. Mandiraja	Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	32 dokmen	10.000.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Mandiraja	Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	32 dokmen	2.675.000	
b.	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Mandiraja	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	16 Dokumen	4.000.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Mandiraja	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	16 Dokumen	4.000.000	
c.	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec. Mandiraja	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-	4.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec. Mandiraja	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-	-	
d.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Mandiraja	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	32 dokumen	-	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Mandirajatan	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	32 dokumen	3.000.000	

e.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Mandiraja	Jumlah dokumen Sinkroni sasi Perencan aan Pembang unan Daerah dengan Pembang unan Desa	1 dokumen	4.000.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Mandiraja	Jumlah dokumen Sinkroni sasi Perencan aan Pembang unan Daerah dengan Pembang unan Desa	1 dokum en	4.000.000	
f.	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec. Mandiraja	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	16 dokumen	10.000.000	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec. Mandiraja	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaa n Masyarakat Desa	16 dokum en	3.810.000	
g.	Fasilitasi Penyelenggara an Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Mandiraja	Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggara an Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6 dokumen	4.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraa n Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Mandiraja	dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelen ggaraan Ketenter aman	6 dokum en	9.000.000	
h	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Mandiraja	Jumlah Laporan Hasil Koordina si Pendamp ingan Desa di Wilayahn ya	12 laporan	32.000.000	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Mandiraja	Jumlah Laporan Hasil Koordina si Pendamp ingan Desa di Wilayahn ya	12 laporan	27.500.00 0	

Berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2026, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan yaitu:

1. Memprioritaskan kegiatan yang belum terlaksana di tahun 2025.
2. Memprioritaskan pelaksanaan kegiatan yang manfaatnya langsung dirasakan oleh Masyarakat.
3. Mempedomani prinsip efisiensi dengan memprioritaskan kegiatan yang menjadi kegiatan wajib dan kegiatan pokok.
4. Melanjutkan kegiatan yang sudah ada di tahun 2025.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan musrenbang kecamatan dan forum konsultasi publik telah disampaikan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui aplikasi SIPD. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.3

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	NIHIL				

2.6. Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan hasil reses anggota DPRD, melalui aplikasi SIPD telah disampaikan usulan program dan kegiatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Validasi
	NIHIL				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN MANDIRAJA

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi, maka Kecamatan Mandiraja melaksanakan kebijakan daerah yang sinergis dengan kebijakan Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat. Kegiatan yang akan dilakukan oleh Kecamatan Mandiraja diharapkan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan di atasnya, mempunyai rasa keadilan, pemerataan dan diarahkan agar implementasinya akan dapat berdampak pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Mandiraja. Renja yang disusun perangkat daerah berpedoman pada RKPD dan RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029 dengan Visi "Banjarnegara Maju dan Sejahtera" yang akan diwujudkan melalui 5 (lima) Misi yang merupakan turunan dari pokok-pokok visi yang telah didentifikasi sebelumnya yaitu :

1. Meningkatkan Infrastruktur dan Pelayanan Publik
2. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal
3. Meningkatkan Kualitas dan Akses Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan Sosial.
4. Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.
5. Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Transparan.

Dalam mencapai Visi Kabupaten Banjarnegara, maka Kecamatan Mandiraja mempunyai peran dan fungsi menggerakan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah dalam menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan. Terutama dikaitkan dengan pelaksanaan pelimpahan kewenangan yang secara mutlak harus didukung oleh sumberdaya manusia aparatur yang mampu mengelola tugas-tugas pelayanan secara optimal, efektif dan efisien, serta mampu merumuskan kebijakan-kebijakan yang implementatif yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, yang pada muaranya mewujudkan Visi Kabupaten Banjarnegara.

Tujuan yang akan diwujudkan selama periode 2025-2029 adalah "Terwujudnya Banjarnegara maju dan sejahtera" yang diukur melalui indikator

PDRB per kapita dan angka kemiskinan yang akan ditempuh melalui 4 sasaran strategis, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat
2. Meningkatnya perekonomian daerah yang berdaya saing dan berbasis potensi lokal secara berkelanjutan
3. Meningkatnya infrastruktur yang mendukung perekonomian dan kesejahteraan Masyarakat
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif

Adapun sasaran strategis yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam pencapaian visi misi Kepala Daerah sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Mandiraja sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara dari 4 (empat) sasaran strategis tersebut adalah Sasaran Strategis ke-4 yaitu :

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif dengan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi.
2. Meningkatnya profesionalisme aparatur daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, beretika, dan bertanggung jawab, serta mampu mendukung pembangunan daerah yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN),
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat

Dari 4 Sasaran tersebut, Kecamatan Mandiraja mendukung Sasaran keempat yaitu **Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif.**

Untuk mendukung Sasaran tersebut, Kecamatan Mandiraja didukung 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran yaitu :

TUJUAN :

“Meningkatnya aksesibilitas layanan pemerintah dalam urusan kewilayahan di Kecamatan Banjarmangu”.

SASARAN :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah urusan kewilayahan.
2. Meningkatnya efektivitas koordinasi dan Fasilitasi pemberdayaan desa/kelurahan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Mandiraja

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan, sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Dengan kata lain tujuan dan sasaran merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Rumusan tujuan yang akan dicapai oleh Kecamatan Mandiraja dalam mendukung RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatnya aksesibilitas layanan pemerintah dalam urusan kewilayahan di Kecamatan Mandiraja. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional.

Sasaran Strategis yang akan dicapai oleh Kecamatan Mandiraja yaitu :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah urusan kewilayahan
2. Meningkatnya Efektivitas koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan desa/kelurahan

Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Mandiraja beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel sebagaimana berikut ini :

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
				2026	2027	2028	2029	2030
I.	Meningkatnya aksesibilitas layanan pemerintahan dalam urusan kewilayahan di Kecamatan Mandiraja		Indeks Pelayanan Publik	2,08	2,10	2,12	2,14	2,16

1.		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah urusan kewilayahan	Nilai SAKIP Kecamatan	B (69,15)	B (69,25)	B (69,35)	B (69,40)	B (69, 45)
2.		Meningkatnya Efejtivitas Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Desa/Kelurah an	Indeks desa di wilayah Kecamatan Mandiraja	77,32	77,34	77,36	77,38	77,4

3.3. Program dan Kegiatan

(Sajikan matriks yang berasal dari SIPD

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) KECAMATAN MANDIRAJA KAB. BANJARNEGARA

TAHUN 2026

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
														Nasional	Daerah				
2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Kecamatan Mandiraja						2.539.864.970,00							2.685.682.970,00	
7					UNSUR KEWILAYAHAN						2.539.864.970,00							2.685.682.970,00	
7	01				KECAMATAN						2.539.864.970,00							2.685.682.970,00	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	-	-			-	2.321.944.570,00						-	2.455.482.970,00	

					KABUPATEN/KOTA														
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	3.151.700,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	-	-	4.000.000,00	
7	01	01	2.01	00001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				14 Dokumen	1.676.100,00	Kab. Banjarnegara, Mandiraja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	-		2.000.000,00	KECAMATAN MANDIRAJA
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				13 Laporan	1.475.600,00	Kab. Banjarnegara, Mandiraja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	-		2.000.000,00	KECAMATAN MANDIRAJA

7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.767.883.580,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	-	-	1.868.383.580,00	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															

						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	1.744.903.580,00	Kab. Banjarnegara, Mandiraja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	-		1.844.903.580,00	KECAMATAN MANDIRAJA
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	21.480.000,00	Kab. Banjarnegara, Mandiraja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	-		21.480.000,00	KECAMATAN MANDIRAJA
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				16 Laporan	1.500.000,00	Kab. Banjarnegara, Mandiraja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	-		2.000.000,00	KECAMATAN MANDIRAJA

7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	137.199.550,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	-	-	138.945.850,00	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															

						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.162.500,00	Kab. Banjarnegara, Mandiraja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	-		3.000.000,00	KECAMATAN MANDIRAJA
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	6.591.200,00	Kab. Banjarnegara, Mandiraja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	-		7.500.000,00	KECAMATAN MANDIRAJA
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	128.445.850,00	Kab. Banjarnegara, Mandiraja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	-		128.445.850,00	KECAMATAN MANDIRAJA

7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	25.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	-	-	40.000.000,00	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	25.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Mandiraja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	-		40.000.000,00	KECAMATAN MANDIRAJA
7	01	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
						Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Banjarnegara, Mandiraja,	DANA ALOKASI	-	-	-		0,00	KECAMATAN

												Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)						MANDIRAJA
7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	0,00	Kab. Banjarnegara, Mandiraja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN MANDIRAJA
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	0,00	Kab. Banjarnegara, Mandiraja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN MANDIRAJA
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	0,00	Kab. Banjarnegara, Mandiraja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN MANDIRAJA
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	109.753.540,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	-	-	110.153.540,00	

7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	18.600.000,00	Kab. Banjarnegara, Mandiraja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	-		19.000.000,00	KECAMATAN MANDIRAJA
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	91.153.540,00	Kab. Banjarnegara, Mandiraja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	-		91.153.540,00	KECAMATAN MANDIRAJA

7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	278.956.200,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	-	-	294.000.000,00	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															

						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	38.956.200,00	Kab. Banjarnegara, Mandiraja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	-		39.000.000,00	KECAMATAN MANDIRAJA
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	215.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Mandiraja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	-		220.000.000,00	KECAMATAN MANDIRAJA
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	25.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Mandiraja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	-		35.000.000,00	KECAMATAN MANDIRAJA
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	139.660.000,00						-	142.500.000,00	

7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-			-	15.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	-	-	16.000.000,00	
7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum														

						Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Mandiraja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	-		16.000.000,00	KECAMATAN MANDIRAJA

7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	124.660.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	-	-	126.500.000,00	
7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan														

						Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	7.500.000,00	Kab. Banjarnegara, Mandiraja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	-		8.500.000,00	KECAMATAN MANDIRAJA
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														

						Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	117.160.000,00	Kab. Banjarnegara, Mandiraja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	-		118.000.000,00	KECAMATAN MANDIRAJA
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	3.750.000,00						-	4.000.000,00	

7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	3.750.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	-	-	4.000.000,00	
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														

						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				1 Lembaga Kemasyarakatan	3.750.000,00	Kab. Banjarnegara, Mandiraja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	-		4.000.000,00	KECAMATAN MANDIRAJA
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	17.700.000,00						-	17.700.000,00	

7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	17.700.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	-	-	17.700.000,00		
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan															

						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				6 Dokumen	17.700.000,00	Kab. Banjarnegara, Mandiraja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	-		17.700.000,00	KECAMATAN MANDIRAJA
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	56.810.400,00						-	66.000.000,00	

7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	56.810.400,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	-	-	66.000.000,00	
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														

						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				32 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Mandiraja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	-		7.500.000,00	KECAMATAN MANDIRAJA
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														

						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				16 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Mandiraja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	-		7.500.000,00	KECAMATAN MANDIRAJA
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														

						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				32 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Mandiraja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	-		4.000.000,00	KECAMATAN MANDIRAJA
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														

						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Mandiraja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	-		5.000.000,00	KECAMATAN MANDIRAJA
7	01	06	2.01	0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum														

						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				6 Dokumen	9.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Mandiraja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	-		10.000.000,00	KECAMATAN MANDIRAJA
7	01	06	2.01	0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa														

						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				16 Dokumen	3.810.400,00	Kab. Banjarnegara, Mandiraja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	-		4.500.000,00	KECAMATAN MANDIRAJA
7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														

						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				12 Laporan	27.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Mandiraja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	-		27.500.000,00	KECAMATAN MANDIRAJA
JUMLAH											**2.539.864.970,00**							**2.685.682.970,00**	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN MANDIRAJA

Program pada Kecamatan Mandiraja merupakan program prioritas dalam Renstra 2025-2029. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Banjarnegara selanjutnya dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Pemilihan untuk masing-masing program/kegiatan/sub kegiatan di Kecamatan Mandiraja sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan 6 (enam) kegiatan yakni :
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      Terdiri dari 2 (dua) sub Kegiatan :
      a.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      a.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      Terdiri dari 3 (tiga) sub Kegiatan :
      b.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      b.2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
      b.3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran
   c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
      Terdiri dari 2 (dua) sub Kegiatan :
      c.1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      c.2. Penyedia bahan logistik kantor
   d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,
      Terdiri dari 3 (tiga) sub Kegiatan :
      d.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
      d.2. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

d.3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Terdiri dari 2 (dua) sub Kegiatan :
e.1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
e.2. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Terdiri dari 3 (tiga) sub Kegiatan :
f.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
f.2. Pemeliharaan/rehabilitatasi sarana prasarana gedung
f.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerntahan dan Pelayanan Publik, 2 (dua) kegiatan yakni :
a. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
Terdiri dari 1 (satu) sub Kegiatan :
a.1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang di Limpahkan Kepada Camat
Terdiri dari 3 (tiga) sub Kegiatan :
b.1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan perijinan non usaha
b.2. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perijinan
b.3. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan

3. Program Urusan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan dengan 1 (satu) kegiatan yakni :
a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala DaerahTerdiri dari 1 (satu) sub Kegiatan:
a.1. Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di wilayah kecamatan

4. Program Pembinaan dan Pengawasan Desa, dengan 1 (satu) kegiatan yakni :
a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Terdiri dari 7 (tujuh) sub Kegiatan :

a.1. Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa

a.2. Fasilitasi administrasi pemerintahan desa

a.3. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

a.4.Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa

a.5. Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan keteriban umum

a.6. Fasilitasi penyusunan program pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa

a.7. Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mandiraja Tahun 2025-2029. Renja Kecamatan Mandiraja selanjutnya menjadi platform operasional bagi Kecamatan Mandiraja dalam menjalankan programnya dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah tahun 2025-2029. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja Kecamatan Mandiraja digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026 dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disepakati.
2. Kerangka pendanaan dalam Renja Kecamatan Mandiraja masih bersifat sementara, sehingga masih dimungkinkan terjadi perubahan pagu yang disebabkan oleh pengurangan, penambahan, dan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan maupun antar sub kegiatan dalam kerangka penyusunan anggaran secara terpadu dan berbasis kinerja.
3. Renja Kecamatan Mandiraja menjadi acuan bagi Camat dan segenap jajarannya serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, serta menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Banjarnegara, 24 Agustus 2025

Plt. Camat Mandiraja

Drs. S U S A N T O
Pembina Tk. I
NIP. 19731219 199302 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya sehingga Rencana Kerja Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2026 telah dapat diselesaikan penyusunannya. Rencana Kerja (Renja) mempunyai arti strategis karena didalamnya memuat uraian program dan kegiatan, yang dirumuskan berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis diharapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pagedongan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Pagedongan yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Kecamatan Pagedongan. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar sebagai upaya mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan dimana semua kebijakan, program, sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Penyusunan Renja Tahun 2026 merupakan kewajiban bagi setiap Perangkat Daerah. Renja Kecamatan Pagedongan disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, dan strategi seluruh aparat Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara dalam membina, melayani dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Kecamatan Pagedongan. Renja Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 memuat penjabaran program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Pagedongan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pada tahun tersebut.

Rancangan Akhir Renja Kecamatan Pagedongan Tahun 2026 berhasil dan tidaknya target yang telah ditentukan dalam Renja

Kecamatan Pagedongan tidak terlepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat. Renja yang telah tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2026 untuk mencapai kinerja yang diharapkan.

Selain itu juga dapat berguna bagi peningkatan kinerja Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara.

Banjarnegara, 10 Agustus 2025

MAT PAGEDONGAN

ANTO, SE, M.Si

bina Tingkat I

IP. 196903201995031004

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan 2

1.3 Maksud dan Tujuan 6

1.4 Sistematika Penulisan 7

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pagedongan Tahun lalu 9

2.2 Analisis Kinerja Kecamatan Pagedongan 19

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi 21

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 22

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 33

2.6 Penelaahan Usulan Pokok-pokok Pikiran 37

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PAGEDONGAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 38

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Pagedongan 39

3.3 Program dan Kegiatan 40

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PAGEDONGAN 49

BAB V ; PENUTUP 52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan Renja Kecamatan Pagedongan Tahun 2026 sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan yang diatur melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan pembentukan tim penyusun, penelaahan rancangan awal RKPD, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, hingga pada penyempurnaan berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang RKPD. Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, penyusunan Renja Perangkat Daerah juga mengacu pada Renja

Kementerian/Lembaga terkait, serta Renja Perangkat Daerah Provinsi terkait. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2. Landasan Hukum

Renja Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
25. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 14);
26. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 15);
27. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun dengan maksud untuk:

a. Menjabarkan Renstra Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 ke dalam rencana program kegiatan prioritas Tahun 2026 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Renja K/L Tahun 2026 dan Renja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;
b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerapan anggaran berbasis kinerja.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

a. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA-DPA dalam Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2026, yang dalam penyusunannya didahului dengan menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026;

b. Sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Tahun 2026;

c. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun berdasarkan sistematika yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 : **PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah.

BAB 2 : **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dan atau pokok-pokok DPRD.

BAB3 : **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan tahun 2026.

BAB 4 : **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam

rangka pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran RKPD.

BAB 5 : **PENUTUP**

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN PAGEDONGAN TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pagedongan Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kecamatan Pagedongan

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pagedongan. Urusan yang menjadi kewenangan Kecamatan Pagedongan meliputi urusan Pemerintahan fungsi penunjang kewilayahan.

Renja Kecamatan Pagedongan Tahun 2024 yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 terdiri dari 4 Program, 10 kegiatan, dan 28 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 2.543.500.000,-, (*Dua Milyar Lima ratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) dengan fokus utama Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dimana kecamatan mempunyai fungsi ganda selain untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada warga diwilayahnya juga menjadi kepanjangan tangan pemerintah pusat dimana sebagian urusan pemerintahan kewenangannya dilimpahkan kepada Camar serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa. Program/kegiatan/subkegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah antara lain :

1. Belum optimalnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan non usaha, dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sehingga masyarakat baru mengurus surat-surat hanya saat dibutuhkan saja bukan sebagi dokumen pribadi;
2. Kurangnya sumber daya manusia di Kecamatan Pagedongan dalam rangka menunjang tugas dan fungi kecamatan sebagai unit kerja yang secara langsung melayani

masyarakat dan tugas-tugas dalam urusan pemrintahan lainnya;

3. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia perangkat desa dalam penatausahaan keuangan terkait dengan dana desa dan alokasi dana desa.
4. Tata kelola pemerintahan desa yang belum optimal mengakibatkan pengerjaan buku-buku administrasi desa tidak atau belum sesuai juknis, dan juga pelaksanaan program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat (penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, sosial budaya dan keagamaan) juga belum sesuai dengan ketentuan yang ada.

Dari 4 program, 10 kegiatan, dan 28 sub kegiatan yang dalam Renja Kecamatan Pagedongan tersebut, program/kegiatan/sub kegiatan yang disetujui untuk dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024 terdiri dari 4 program, 9 kegiatan, dan 17 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 2.254.749.722,- (*Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Rupiah*).

Pada Perubahan Renja Kecamatan Pagedongan Tahun Anggaran 2024, pada akhir tahun anggaran terdapat penambahan anggaran pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dari Rp. 1.842.980.496,- menjadi Rp. 1.858.964.582,- .

Dinamika yang terjadi selama tahun 2024 turut mempengaruhi keberhasilan pencapaian Renja Kecamatan Pagedongan. Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2024, tercatat adanya hasil yang baik yang dikarenakan adanya pencapaian maupun pelampauan target. Meskipun demikian ada beberapa hal perlu mendapat perhatian agar hasil yang sudah tercapai dapat bertahan atau mungkin lebih baik lagi ditahun-tahun berikutnya. Adapun usaha perbaikan yang harus dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut ;

1. Memberikan informasi atau sosialisasi kepada masyarakat, berkaitan dengan pentingnya dokumen kependudukan;

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia kecamatan dengan mengikuti bintek yang diselenggarakan oleh pemerintah atau mengikuti webinar yang dilakukan secara online/offline;
3. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap aparatur desa, juga memberikan informasi terkait dengan tata kelola pemerintahan desa.

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi semua program yang diampu oleh Kecamatan Pagedongan adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Smesteran SKPD targetnya melampaui, dan 2 (dua) sub kegiatan melebihi target;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik , dengan Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat, dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang terkait dengan Non Perijinan dengan indikator sub kegiatan Jumlah Pelayanan KTP, Pelayanan KK dan Pelayanan lainnya sesuai ketentuan dengan capaian melebihi target , Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan dengan indicator Jumlah SPPT PBB yang tersalurkan ke Wajib Pajak itu jg melebihi target.

Faktor factor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah :

1. Perencanaan yang matang dan baik dengan saling berkoordinasi antara pejabat structural maupun staf dikecamatan;
2. Pelaksanaan kegiatan dilakukan sebaik mungkin sesuai dengan kerangka acuan kerja yang sudah dibuat;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala agar jika terjadi permasalahan bisa diatasi sedini mungkin.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut pada tahun perencanaan selanjutnya, perlu diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk pencapaian target kinerja, diantaranya:

1. Meningkatkan koordinasi internal antara seluruh kepala seksi dan kepala sub abgian terkait permaslahan diwilayah. Mengingat para kepala seksi yang lebih memahami dengan kondisi wilayah, sehingga perencanaan dan penganggaran lebih tepat sasaran.
2. SOP yang jelas sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Pagedongan dan Pencapaian Renstra Kecamatan Pagedongan sampai dengan Tahun 2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Pagedongan
dan Pencapaian Renstra Kecamatan Pagedongan
s.d. Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10	(11)
	Urusan Kewilayahan	Nilai SKM	84,50	84,688	84,30	87,14	100%	100	100	100%
	Bidang Kecamatan	Nilai SAKIP	(CC)	56,11(CC)	CC	70,45	100	100	100	100
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Perencanaan, Penganggaran ,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Terpenuhinya Perencanaan pengganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	9 dokumen	100%	100%	100%	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasul Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan	14 dokumen	12 Laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	15 orang	15 orang	100%	15 orang	100%	15 orang	15 orang	100%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	9 orang/12 dokumen	9 orang	9 orang/12 dokumen	9 orang/12 dokumen	100%	9 orang/ 12 dokumen	9 orang/ 12 dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ triwulanan Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/ Triwulanan/semesteran SKPD	12 laporan	7 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1paket	1paket	100%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	8 paket	8 paket	8 paket	8 paket	100%	8 paket	8 paket	100%

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Terpenuhinya Barang Milik Penunjang urusan Pemerintah Daerah	-	100%	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1unit		-	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase sarana dan prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa listrik yang disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	12 dokumen	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan, perorangan Dinas, atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	8 unit	7 unit	8 unit	8unit	100%	8unit	8unit	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2unit	2unit	2 unit	2unit	100%	2unit	2unit	100%

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	20 unit	20 unit	20 unit	20 unit	100%	20 unit	20 unit	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	1 unit	-	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase penyelenggaraaan pemerintahan dan pelayanan Publik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Prosentase Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	-	-		-	-	-	-	-
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	-	-		-	-	-	-	-
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan	Jumlah Dokumen Non Perijinan Usaha yang dilaksanakan	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	10 Dokumen	100%	10 dokumen	10 Dokumen	100%

	Pelayanan Perijinan Non Usaha									
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non-perizinan	Jumlah laporan pelaksanaan non perijinan pada urusan pemerintahan	3400 laporan	4644 pemohon	3400 laporan	6695 laporan	100%	3400 laporan	6695 laporan	100%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	32.650 laporan	32.928 laporan	32.650 laporan	33.096 laporan	100%	32.650 laporan	33.096 laporan	100%
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase penyelenggaraan pemerintahan umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	9 dokumen	1tahun	9 dokumen	9 dokumen	100%	9 dokumen	9 dokumen	100%
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka	9 dokumen	9 desa	7 dokumen	9 dokumen	100%	7 dokumen	9 dokumen	100%

		penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa								
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa	9 dokumen	9 desa	7 dokumen	9 dokumen	100%	7 dokumen	9 dokumen	100%
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaankeuangan desa dan Pendayagunaan asset desa	8 dokumen	8 desa	7 dokumen	8 dokumen	100%	7 dokumen	8 dokumen	100%
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 dokumen	-	-	-	-	-	1 dokumen	-
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	9 dokumen	9 desa	9 dokumen	9 dokumen	100%	9 dokumen	9 dokumen	100%
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangkaPenyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	9 dokumen	9 desa	9 dokumen	9 dokumen	100%	9 dokumen	9 dokumen	100%
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	9 dokumen	9 desa	7 dokumen	9 dokumen	100%	7 dokumen	9 dokumen	100%
	Koordinasi Pendampingan Desa diWilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa diwilayahnya	9 Laporan	9 desa	9 laporan	9 laporan	100%	9 laporan	9 laporan	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pagedongan

Dalam pelaksanaan pelayanannya, Kecamatan Pagedongan mengampu 1 indikator dan berstatus tercapai. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Perencanaan yang matang dengan saling koordinasi yang baik dengan pejabat structural maupun staf dikecamatan;
2. Pelaksanaan kekgiatan dilakukan sebaik mungkin sesuai dengan kerangka acuan kerja yang sudah dibuat;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala agar jika terjadi permasalahan bisa diatasi sedini mungkin.

Meskipun status indikator sudah tercapai, namun ada beberapa factor yang masih perlu dilakukan untuk perbaikan yaitu :

- Belum optimalnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pelakksanaan urusan pemerintahan yang terkait pelayanan non usaha, dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sehingga masyarakat baru mengurus surat-surat hanya saat dibutuhkan saja bukan sebagai dokumen pribadi.

Dalam rangka mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut, telah dilakukan upaya-upaya diantaranya memberikan informasi atau sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan pentingnya dokumen kependudukan.

Kinerja pelayanan Kecamatan Pagedongan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK LPPD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Nilai survey kepuasan masyarakat			84,30	84,35	84,50	84,60	84,514	87,14	84,75	85	
2	Indeks penilaian SAKIP			CC	CC	B	B	CC	BB	B	B	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pagedongan

Kecamatan Pagedongan dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan urusan pemerintahan dalam urusan Kewilayahan , yaitu Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJPD Tahun 2023-2026, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pagedongan untuk tahun 2026 mencakup urusan tersebut. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah diantaranya adalah:

1. Pelayanan administrasi kependudukan masih belum optimal dan belum sepenuhnya berbasis digital;
2. Usulan desa dalam forum musrenbang kecamatan masih dominan berkaitan dengan pembangunan internal desa belum diarahkan pada usulan yang bersifat komprehensif dan mendukung prioritas pembangunan tingkat kabupaten;
3. Kerentanan terhadap bencana masih tinggi dan kesiapsiagaan bencana wilayah belum optimal;
4. Pelayanan public belum sepenuhnya cepat, efektif dan berbasis digital sehingga terdapat keluahan masyarakat terkait waktu dan kualitas pelayanan.

Permasalahan tersebut, jika tidak diselesaikan dapat menjadi *constraint* dalam pencapaian visi dan misi Bupati maupun capaian indikator lainnya. Beberapa dampak dari adanya permasalahan dan hambatan tersebut meliputi:

1. Pelayanan administrasi kependudukan yang belum optimal;
2. Hasil musrenbang belum banyak yang diakomodir oleh OPD Teknis;
3. Tingginya kerentanan terhadap bencana serta belum optimalnya kesiapsiagaan diwilayah;

4. Pelayanan public yang belum sepenuhnya cepat, tepat dan efektif.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi, peningkatan kualitas birokrasi, dan meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan pengguna layanan akan meningkatkan kebutuhan akan adanya penyediaan produk layanan yang semakin baik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi-inovasi dalam menunjang peningkatan pelayanan publik secara kontinyu. Beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, yaitu:

1. Masih adanya aparat pemerintahan dan kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif;
2. Masih kurangnya jumlah Aparatur Kecamatan yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai dalam rangka mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat;
3. Masih kurangnya dukungan anggaran serta sarana prasarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi diwilayah Kecamatan;
4. Peningkatan peran dan fasilitasi kecamatan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pencapaian standar pelayanan minimal.

Berdasarkan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan tersebut, dapat diinventarisasi beberapa isu strategis. Inventarisasi isu-isu strategis tahun 2026 didapatkan dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal Kabupaten Banjarnegara sampai dengan tahun 2025. Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan pembangunan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada RKP Tahun 2026 dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah

Pusat serta RKPD Propinsi Tahun 2026. Prioritas arah kebijakan sesuai tugas dan fungsi Kecamatan pada tahun 2025 yang meliputi : membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan serta tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Tabel 2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 Kabupaten Banjarnegara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12
I	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahanderah Kabupaten yang terlaksana	100%	2.766.880.000	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten yang terlaksana	100%	2.766.880.000	
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100%	12.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100%	12.000.000	
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Pagedongan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	6.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Pagedongan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	6.000.000	
02	Koordinasi dan PenyusunanLaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Pagedongan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	12 dokumen	6.000.000	Koordinasi dan PenyusunanLaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Pagedongan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	12 dokumen	6.000.000	

			Realisasi Kinerja SKPD					Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
B	Administrasi KeuanganPerangkat Daerah			100%	2.332.380.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%	2.332.380.000	
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Pagedongan	Jumlah Orangyg Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 orang	2.250.000.000	Penyediaan GajidanTunjangan ASN	Kec. Pagedongan	Jumlah Orangyg Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 orang	2.250.000.000	
02	Pelaksanaan Penatausahaan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Pagedongan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	76.380.000	Pelaksanaan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Pagedongan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	76.380.000	
03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec. Pagedongan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 dokumen	6,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec. Pagedongan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 dokumen	6,000,000	
C	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%	107.500.000	AdministrasiUmum Perangkat Daerah			100%	107.500.000	

01	PenyediaanPeralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Pagedongan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1paket	17.500,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Pagedongan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1paket	17.500,000	
02	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Pagedongan	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang Disediakan	8paket	90,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Pagedongan	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang Disediakan	8paket	90,000,000	
D	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PemerintahDaerah			100%	50,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PemerintahDaerah			100%	50,000,000	
	Pengadaan Mebelair	Kec. Pagedongan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 unit Meja Rapat	25.000.000	Pengadaan Mebelair		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 unit Meja Rapat	25.000.000	
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit Laptop	25,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit Laptop	25,000,000	
E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	190.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	190.000.000	

01	Penyediaan JasaKomunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Pagedongan	Jumlah Laporan Penyediaan Listrik yang disediakan	12 laporan	15,000,000	Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Pagedongan	Jumlah Laporan Penyediaan Listrik yang disediakan	12 laporan	15,000,000	
02	PenyediaanJasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Pagedongan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	175,000,000	PenyediaanJasa pelayananUmum Kantor	Kec. Pagedongan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	175,000,000	
F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	75.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PemerintahanDaerah	Kec. Pagedongan		100%	75.000.000	
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Pagedongan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	8unit	25.000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Pagedongan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	8unit	25.000,000	
02	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Pagedongan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	30.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Pagedongan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	30.000.000	

03	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Pagedongan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	20 unit	20.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Pagedongan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	20 unit	20.000.000	
04	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Pagedongan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	-	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Pagedongan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	-	-	
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	85.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Prosentase PenyelenggaraanPemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	85.000.000	
A	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kec. Pagedongan		100%	10.000.000	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kec. Pagedongan		100%	10.000.000	
01	Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait	Kec. Pagedongan	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergidengan Perangkat Daerah dan/atau	9 Dokumen	10,000,000	Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait	Kec. Pagedongan	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergidengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam	9 Dokumen	10,000,000	

	dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			
B	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkankepada Camat			100%	75.000,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkankepada Camat	Kec. Pagedongan		100%	75.000,000	
01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan perizinan non usaha	Kec. Pagedongan	Jumlah Dokumen Non Perijinan Usaha yang dilaksanakan	12 laporan	7,500,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan perizinan non usaha	Kec. Pagedongan	Jumlah Dokumen Non Perijinan Usaha yang dilaksanakan	12 laporan	7,500,000	
02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non-perizinan	Kec. Pagedongan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perijinan pada urusan Pemerintahan	3500 dokumen	7,500,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non-perizinan	Kec. Pagedongan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perijinan pada urusan Pemerintahan	3500 dokumen	7,500,000	
03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Kec. Pagedongan	Jumlah SPPT yang disalurkan / Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di impahkan	10 laporan/ 32600SPPT	60,000,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Kec. Pagedongan	Jumlah SPPT yang disalurkan / Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di impahkan	10 laporan /32600 SPPT	60,000,000	

III	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHANUMUM		Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	17.500,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHANUMUM		Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	17.500,000	
A	Penyelenggaraan Urusan PemerintahanUmum sesuai Penugasan Kepala Daerah			100%	17.500,000	Penyelenggaraan Urusan PemerintahanUmum sesuai Penugasan Kepala Daerah			100%	17.500,000	
01	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinandi Kecamatan	Kec. Pagedongan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan diKecamatan	4 dokumen	17.500,000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinandi Kecamatan	Kec. Pagedongan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan diKecamatan	4 dokumen	17.500,000	
IV	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASANPEMERINTAHAN DESA		Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	313.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASANPEMERINTAHAN DESA		Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	313.000.000	
A	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Pagedongan		100%	313.000.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Pagedongan		100%	313.000.000	
01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec. Pagedongan Pagedongan	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa	9 dokumen	6.000.000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec. Pagedongan Pagedongan	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa	9 dokumen	6.000.000	

			dan Peraturan Kepala Desa					dan Peraturan Kepala Desa			
02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Pagedongan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9 dokumen	7,500,000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Pagedongan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9 dokumen	7,500,000	
03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Pagedongan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9 dokumen	12,500,000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Pagedongan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9 dokumen	12,500,000	
04	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec. Pagedongan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka pelaksanaan Pemilihan kepala desa	8 dokumen	240.000.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan PembangunanDaerah dengan PembangunanDesa	Kec. Pagedongan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	8 dokumen	240.000.000	
05	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan PembangunanDaerah dengan PembangunanDesa	Kec. Pagedongan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	9 dokumen	17.500.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan PembangunanDaerah dengan PembangunanDesa	Kec. Pagedongan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	9 dokumen	17.500.000	

06	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Pagedongan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9 dokumen	6.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Pagedongan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka PenyelenggaraanKetenteraman dan Ketertiban Umum	9 dokumen	6.000.000	
07	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec. Pagedongan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Program Dan pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	9 dokumen	6,000,000	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec. Pagedongan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Program Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	9 dokumen	6,000,000	
08	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Pagedongan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa diWilayahnya	9 laporan	17,500,000	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Pagedongan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa d diwilayahnya	9 laporan	17,500,000	
	Jumlah				3.182.380.000					2.554.300.000	

Berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2026, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan yaitu:

1. Mengevaluasi seluruh usulan kegiatan;
2. Memprioritaskan Kegiatan yang belum terlaksana ditahun 2024.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Berdasarkan musrenbang kecamatan dan forum konsultasi publik telah disampaikan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui aplikasi SIPD. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pagedongan.Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Perbaikan Jembatan Watubelah Desa Pagedongan Jalan Raya Watubelah - Desa Pesangkalan	Dukuh Pamurian RT 3. RW 1 Desa Pagedongan		4 x 5 m	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Pengaspalan Jalan Dukuh Pamurian RT 03. RW 01 - Desa Gunungjati	Dukuh Pamurian RT 3. RW 1 Desa Pagedongan		800 x 2,5 m	BPPKAD (PIK)
3	Pembangunan Drainase Jalan Raya Pagedongan Dukuh Ponjen - Pamurian	Dukuh Ponjen RT 4. RW 1 Desa Pagedongan		500 m	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Pembangunan Talud Jalan Dukuh Miriamba Jalan Raya Watubelah - Desa Pesangkalan	Dukuh Watubelah RT 3. RW 5 Desa Pagedongan		100 x 4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Rekonstruksi Ruas Jalan Kabupaten (Peningkatan Jalan, Pelebaran Jalan)	Dukuh Jagangsari Desa Pagedongan		800 x 2 m	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

6	Peningkatan Jalan Gunungjati - Pagedongan	Kadus 1 (Depok)		1.000 M	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7	Jembatan Jalan Raya Gunungjati	Kadus 3 (Sitawun)		3 X 6 M	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8	Jembatan Kalidondong-Kebutuh Duwur	Kadus 4 (Bilungan)		8 X 10 M	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9	Jembatan Jalan Raya Gunungjati	Kadus 4 (Kamal)		8 X 15 M	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10	Jembatan Jalan Raya Gunungjati	Kadus 2 (Gunungjati Tengah)		3 X 6 M	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11	Pembangunan Talud Jalan Dusun Sayangan pengaman jalan Raya Pagedongan - Twelagiri	RT 01 RW 03 Dusun Sayangan Desa Twelagiri		200 x 4 m	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
12	Rekonstruksi Ruas Jalan Kabupaten (Peningkatan Jalan, Pelebaran Jalan) - jalan penghubung antar Kecamatan	Dusun Sayangan - Dusun Wanatawang - Dusun Sikele Desa Twelagiri		4000 x 2 m	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
13	Rehab Jembatan Jalan Propinsi di jalan Raya Pagedongan - Twelagiri	RT 03 RW 01 Dusun Gunungalang Desa Twelagiri		1 Ls	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
14	Pembangunan Talud Pengaman Jalan dan Jembatan	RT 03 RW 01 Dusun Gunungalang Desa Twelagiri		40 x 1 x 6 m	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
15	Pembangunan Jalan Penghubung Pagedongan - Twelagiri via Buyung	Dusun Pagutan RT 1. RW 4 Desa Twelagiri		2000 x 2 m	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
16	Rehab jalan aspal Dusun 4 Kembaran	Desa Kebutuhduwur		2. 331 m^2	BPPKAD (PIK)
17	Pembangunan Jalan Rabat Beton Ruas Jalan Desa Kebutuhduwur-Desa Lebakwangi	Desa Kebutuhduwur		3750 m^2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
18	Pembangunan Jalan Rabat Beton Ruas Jalan Dusun Kutasari Ke Dusun Wanarasa	Desa Kebutuhduwur		1.250 m^2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
19	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Desa Kebutuhduwur		2.500 m^2	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan

20	Pembuatan Sumur Bor Air Dalam	Desa Kebutuhduwur		1 Unit	DPKPLH
21	Pembangunan Sumur Dalam (BOR)	Desa Kebutuhjurang		2 Unit	DPKPLH
22	Pemugaran RTLH	Desa Kebutuhjurang		30 Unit	DPKPLH
23	Pembangunan Ruas Jalan Kebutuhjurang-Kebutuhduwur-Pesangkalan	Dusun Maron, Kadus 1 Desa Kebutuhjurang		2.000 x 2,7M	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
24	Pembangunan Ruas Jalan Kebutuhjurang-Lebakwangi	Dusun Belokan, Kadus 3 Desa Kebutuhjurang		800m x 2,7 m	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
25	Bantuan kelompok Tani/bibit tanaman	Kelompok Tani Sadar Usaha Desa Kebutuhjurang		300 hektar	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
26	pelebaran jalan kabupaten ruas jalan pesangkalan	Dusun Banjaran-Dusun Jatisari Desa Pesangkalan		1500 x 4 m	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
27	Pengadaan Jaringan Internet/Tower Sinyal Seluler	Desa Pesangkalan		2 Titik	Dinas Komunikasi dan Informatika
28	Pembangunan Jalan Lokasi Wisata Tegal Raja Resort	Desa Pesangkalan		500x3x0,20 M	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pariwisata Desa: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana pariwisata desa)
29	Pembuatan sarana olahraga mini socer	Desa Pesangkalan		30 x 60 m	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
30	Peralatan Pendukung Penangana Kebencanaan	Desa Pesangkalan		Ls	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
31	Pembangunan Rabat Beton JUT Dukuh Kalipetung	Duren		1.200x3x0,15m	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
32	Pembangunan Rabat Beton JUT Dukuh Beji	Duren		1.400x3x0,15m	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan

33	Pembangunan Talud JUT Dusun Kemputan	Duren		350x3m	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
34	Pembangunan Jalan Rabat Beton Kadus Jolang	Duren		1.800x2,5x0,15m	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
35	Pembangunan Jembatan Duren-Lebakwangi	Duren		14x3m	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
36	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Aspal Dusun Silegi RT 01 RW 03 - Dusun Limbangan RT 01 RW 05	Lebakwangi Dusun Silegi RT 01 RW 03		P 350 M, L 2.5 M, T 0.04 M	Dinas Pekerjaan Umum
37	Pelebaran Jalan Kabupaten Dari Desa Gunungjati-Lebakwangi-Majalengka	Ruas Jalan Kabupaten		P 3000 M, L 3 M	Dinas Pekerjaan Umum
38	Pelebaran Jalan Desa Lebakwangi - Desa Duren	Jalan Desa Lebakwangi - Desa Duren		P 2000 M, L 3 M	Dinas Pekerjaan Umum
39	Pembangunan Gedung PAUD Adinda	Dusun Siwaru		1 Unit	Dindikpora
40	Dam pengendali sungai	Dusun Sudimara		P 700 M	Dinas Pekerjaan Umum
41	Jembatan Penghubung antar Dusun	Desa Lebakwangi		1 Paket	Dinas Pekerjaan Umum
42	Sarana Air Bersih	Desa Lebakwangi		1 Paket	DPKPLH
43	Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih	Gentansari		8 KM	DPKPLH
44	Jambanisasi	Gentansari		20 Unit	Dinas Kesehatan
45	Pemugaran RTLH	Gentansari		20 Unit	DPKPLH
46	Pembangunan Drainase Jalan Raya Gentansari-Masaran	Gentansari		500 meter	Dinas Pekerjaan Umum
47	Pembangunan Jides	Gentansari		500 meter	Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pertanian

2.6 Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan hasil reses anggota DPRD, melalui aplikasi SIPD telah disampaikan usulan program dan kegiatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.6

Usulan Program dan Kegiatan
dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Validasi
	N I H I L				

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi, maka Kecamatan Pagedongan melaksanakan kebijakan daerah yang sinergis dengan kebijakan Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat.

Kegiatan yang akan dilakukan oleh Kecamatan Pagedongan diharapkan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan di atasnya, mempunyai rasa keadilan, pemerataan dan diarahkan agar implementasinya akan dapat berdampak pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Pagedongan. Renja yang disusun perangkat daerah berpedoman pada RKPD dan RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029 dengan Visi "**Banjarnegara Maju dan Sejahtera**" yang akan diwujudkan melalui 5 (lima) Misi yang merupakan turunan dari pokok-pokok visi yang telah didentifikasi sebelumnya yaitu :

1. Meningkatkan Infrastruktur dan Pelayanan Publik
2. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal
3. Meningkatkan Kualitas dan Akses Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan Sosial.
4. Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.
5. Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Transparan.

Dalam mencapai Visi Kabupaten Banjarnegara, maka Kecamatan Pagedongan mempunyai peran dan fungsi menggerakan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah dalam menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan. Terutama dikaitkan dengan pelaksanaan pelimpahan kewenangan yang secara mutlak harus didukung oleh sumberdaya manusia aparatur yang mampu mengelola tugas-tugas pelayanan secara optimal, efektif dan efisien, serta mampu merumuskan kebijakan-kebijakan yang implementatif yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, yang pada muaranya mewujudkan Visi Kabupaten Banjarnegara.

Tujuan yang akan diwujudkan selama periode 2025-2029 adalah "Terwujudnya Banjarnegara maju dan sejahtera" yang diukur melalui

indikator PDRB per kapita dan angka kemiskinan yang akan ditempuh melalui 4 sasaran strategis, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat
2. Meningkatnya perekonomian daerah yang berdaya saing dan berbasis potensi lokal secara berkelanjutan
3. Meningkatnya infrastruktur yang mendukung perekonomian dan kesejahteraan Masyarakat
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif

Adapun sasaran strategis yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam pencapaian visi misi Kepala Daerah sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Pagedongan sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara dari 4 (empat) sasaran strategis tersebut adalah Sasaran Strategis ke-4 yaitu : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif dengan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi.

Meningkatnya profesionalisme aparatur daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, beretika, dan bertanggung jawab, serta mampu mendukung pembangunan daerah yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Pagedongan.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan, sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Dengan kata lain tujuan dan sasaran merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Rumusan tujuan yang akan dicapai oleh Kecamatan Pagedongan dalam mendukung RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tujuan *: Meningkatnya aksesibilitas layanan pemerintah dalam Urusan kewilayahan di Kecamatan Pagedongan.*

Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional. Sasaran Strategis yang akan dicapai oleh Kecamatan Pagedongan yaitu :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah urusan kewilayahan
2. Meningkatnya Efektivitas koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan desa.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Pagedongan beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel sebagaimana berikut ini :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE -				
				2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatnya aksesibilitas layanan pemerintah dalam urusan kewilayahan di Kecamatan Pagedongan		Indeks Pelayanan Publik	3,18	3,20	3 ,22	3,25	3,30
2		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah urusan kewilayahan	Nilai SAKIP Kecamatan Pagedongan	72,10	72,15	72,20	72,25	72,30
3		Meningkatnya efektivitas koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan desa/kelurahan	Indeks Desa di Wilayah Kecamatan Pagedongan	77,00	77,50	78,00	78,50	79,00

3.3 Program dan Kegiatan

Program, Kegiatan dan Subkegiatan Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 kami sajikan sebagai berikut :

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN KECAMATAN PAGEDONGAN
TAHUN 2026

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**1**				**KECAMATAN**								**2.543.500.000**					
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								2.378.000.000					**2.602.000.000**
7	**1**	**1**	**2.01**		**Perencanaan,Pengganggaran,dan EvaluasiKinerjaPerangkatDaerah**								12.000.000					**15.000.000**
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Pagedongan	100%	8 Dokumen		6.000.000		Dana Alokasi Umum (DAU)		8 Dokumen	7.500.000
7	1	1	2.01	6	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian KinerjadanIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD danLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Pagedongan	100%	12 dokumen		6.000.000		Dana Alokasi Umum (DAU)		12 dokumen	7.500.000

7	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								*2.332.380.000*					**2.587.000.000**
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Pagedongan	100%	15 orang		2.250..000.000		Dana Alokasi Umum (DAU)		15 orang	2.500.000.000
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Pagedongan	100%	12 Dokumen		76.380.000		Dana Alokasi Umum (DAU)		12 Dokumen	80.000.000
7	1	1	2.02	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Smesteran SKPD	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	Kec. Pagedongan	100%	12 dokumen		6.000.000		Dana Alokasi Umum (DAU)		12 dokumen	7.000.000
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi umum Perangkat Daerah**								*107.500.000*					**115.000.000**
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana	JumlahPaketPeralatandanPerlengkapanKantor yangDisediakan	TersedianyaPeralatan danPerlengkapanKantor	Kec. Pagedongan	100%	1 paket		17.500.000		Dana Alokasi Umum (DAU)		1 paket	20.000.000

7	1	1	2.06	4	Penyediaa nBahan Logistik Kantor	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tersediany a Bahan Logistik Kantor	Kec. Paged ongan	100%	8 paket		90.000.000		Dana Alokasi Umum (DAU)		8 paket	95.000.000
	1	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								50.000.000					50.000.000
7	1	1	2.07		Pengadaan Mebelair	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Tersedianya Paket Mebelair	Kec. Paged ongan	100%	10 unit Meja Rapat		25.000.000				1paket (25 unit kursi)	25.000.000
					Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Kec. Paged ongan	100%	2 paket Laptop		25.000.000				2 paket Laptop	25.000.000
7	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								190.000.000					192.500.000
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Paged ongan	100%	12 laporan		15,000,000		Dana Alokasi Umum (DAU)		12 laporan	17.500.000
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Paged ongan	100%	12 laporan		175.000.000		Dana Alokasi Umum (DAU)		12 laporan	175.000.000
7	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**75.000.000**					**85.000.000**

7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemel, Biaya Pemel, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Pagedongan	100%	8unit		25.000.000		Dana Alokasi Umum (DAU)		8unit	30.000.000
7	1	1	2.09	09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Terlaksananya pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Pagedongan	100%	2unit		30.000,000		Dana Alokasi Umum (DAU)		2 unit	30.000.000
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau BangunanLainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Terlaksanaanya Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Pagedongan	100%	20unit		20.000,000		Dana Alokasi Umum (DAU)		20 unit	25.000.000
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK													
7	**01**	**02**	**2'03**		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum								85.000.000					85.000.000

7	01	02	2.'03	01	Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/ atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam PemeliharaanSarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Prosentase Terlaksananny a Penyelenggara an Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergidengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Terlaksananya Koordinasi/Sinergidengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec. Pagedongan	100%	1 dokumen		10.000,000		Dana Alokasi Umum (DAU)		9 dokumen	10.000.000
7	**1**	**2**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								**75.000.000**					80.000.000
7	1	2	2.04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perijinan Non Usaha	Persentase penyelenggaraanpemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Pagedongan		3500 dokumen		7,500,000		Dana Alokasi Umum (DAU)		3500 dokumen	7.500.000
7	1	02	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Terlaksanan yaUrusan Pemerintah an yang Terkait dengan Non Perizinan	Kec. Pagedongan		12 laporan		7,500,000		Dana Alokasi Umum (DAU)		12 laporan	7.500.000

7	1	02	2.04	3	PelaksanaanUrusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase penyelenggaraanpemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Jumlah SPPT PBB yang tersalurkan)	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Tersalurkannya SPPT PBB kewajib Pajak)	Kec. Pagedongan		10 laporan/32650 SPPT		60,000,000		Dana Alokasi Umum (DAU)		10 laporan/32600 SPPT	65.000.000
7	**1**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								17.500.000					17.500.000
7	**1**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**								17.500.000					17.500.000
7	1	05	2.01	8	Pelaksanaan Tugas forum Koordinasi Pimpinan diKecamatan	Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordina si Pimpinan di Kecamatan	Kec. Pagedongan		4 dokumen		17.500.000		Dana Alokasi Umum (DAU)		4 dokumen	17.500.000
7	1	06			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								**73,000,000**					77.000.000
7	1	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendas i dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								**73,000,000**					77.000.000
7	1	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Persentasepembinaandan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Keca Kec. Pagedongan		9 dokumen		6,000,000		Dana Alokas Umum (DAU)		9 dokumen	7.000.000

7	1	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase pembinaandan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Pagedongan		9 dokumen		7,500,000		Dana Alokasi Umum (DAU)		9 dokumen	8.500.000
7	1	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Desa dan Pendayagunaan Aset desa	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Pagedongan		9 dokumen		12,500,000		Dana Alokasi Umum (DAU)		9 dokumen	12.500.000
7	1	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec. Pagedongan		8 dokumen		240.000.000		Dana Alokasi Umum (DAU)			
7	1	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Pagedongan		9 dokumen		17.500,000		Dana Alokasi Umum (DAU)		9 dokumen	17.500.000
7	1	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase hasil Pembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka PenyelenggaraanKetenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Pagedongan		9 dokumen		6.000,000		Dana Alokasi Umum (DAU)		9 dokumen	7.000.000
					Fasilitasi Penyusunan Programdan	Prosentase hasil Pembinaan	Jumlah Dokumen Fasilitasidalam	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan	Kec. Pagedongan		9 dokumen		6,000,000		Dana Alokasi Umum		9 dokumen	7.000.000

7	1	06	2.01	16	Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pagedongan						(DAU)			
7	1	06	2.01	17	Fasilitasi Pendampingan Desa diWilayahnya	Prosentase hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Pagedongan		9 laporan		17,500,000		Dana Alokasi Umum (DAU)		9 laporan	17.500.000
											TOTAL		3.182.380.000					2.543.500.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program pada Kecamatan Pagedongan merupakan program prioritas dalam Renstra 2025-2029. Rencana program prioritas beserta indicator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Banjarnegara selanjutnya dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan subkegiatan. Pemilihan untuk masing-masing program/kegiatan/subkegiatan di Kecamatan Pagedongan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota terdiri dari 6 (enam) kegiatan yaitu :

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu
   - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
   - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu
   - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN,
   - Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
   - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran,

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu :
   - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   - Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah mempunyai 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

- Pengadaan Mebelair
- Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya.

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu
   - Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
   - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor.

f. Kegiatan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan Daerah terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan yaitu
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu :

a. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan sarana Pelayanan Umum yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu :
   - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

b. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu ;
   - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
   - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan
   - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

3. **Program Penyelenggaraan urusan Pemerintah Umum**

terdiri dari 1 (satu) Kegiatan yaitu Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, yang terdiri dari 1(satu) sub kegiatan yaitu :

- Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan diKecamatan.

4. **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahanan Desa** terdiri dari satu kegiatan, yaitu Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan yaitu ;

- Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
- Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa.
- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa.
- Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
- Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa.
- Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- Fasilitasi Penyusunan Program Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pagedongan Tahun 2026 merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pagedongan Tahun 2022-2026. Renja Kecamatan Pagedongan selanjutnya menjadi platform operasional bagi Kecamatan Pagedongan dalam menjalankan program, tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah tahun 2025-2029. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Kecamatan Pagedongan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Pagedongan setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026 dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disepakati.
2. Kerangka pendanaan dalam Renja Kecamatan Pagedongan masih bersifat sementara, sehingga masih dimungkinkan terjadi perubahan pagu yang disebabkan oleh pengurangan, penambahan, dan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan maupun antar sub kegiatan dalam kerangka penyusunan anggaran secara terpadu dan berbasis kinerja.
3. Renja Kecamatan Pagedongan menjadi acuan bagi Camat Pagedongan dan segenap jajarannya serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, serta menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Ditetapkan di Pagedongan
pada tanggal : 10 Agustus 2025

T PAGEDONGAN

ITO, SE, M.Si
Tk.I
9690320 199503 1 004

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan Karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026.

Rancangan Awal Renja Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rancangan Awal Renja Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 terdiri dari pendahuluan, hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, tujuan dan sasaran Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara, dan rencana kerja dan pendanaan serta penutup. Penyusunan Rancangan Awal Renja tersebut berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Tahun 2005-2025 dan mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2029 dan memperhatikan RPJMN 2020-2024 dan mengacu pada Renstra Kecamatan Punggelan Tahun 2025-2029.

Kami menyadari dalam penyusunan Rancangan Renja ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan rancangan rencana kerja dimaksud.

Banjarnegara , 10 Juli 2025

CAMAT PUNGGELAN
KABUPATEN BANJARNEGARA

MOH JULIANTO,SE.M.Si
Pembina Tk.I
NIP.19720718199031003

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan yang diatur melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan pembentukan tim penyusun, penelaahan rancangan awal RKPD, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, hingga pada penyempurnaan berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang RKPD. Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, penyusunan Renja Perangkat Daerah juga mengacu pada Renja Kementerian/Lembaga terkait, serta Renja Perangkat Daerah Provinsi terkait. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2. Landasan Hukum

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (lembaran Negara tahun 2014 nomor 244)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);

26. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 14);
27. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 15);

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun dengan maksud untuk:

a. Menjabarkan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026-2029 ke dalam rencana program kegiatan prioritas Tahun 2026 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Renja K/L Tahun 2026 dan Renja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;
b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerapan anggaran berbasis kinerja.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

a. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA-DPA dalam Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2026, yang dalam penyusunannya didahului dengan menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026;
b. Sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Tahun 2026;
c. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun berdasarkan sistematika yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah.

BAB 2 : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dan atau pokok-pokok DPRD.

BAB 3 : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan tahun 2026.

BAB 4 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran RKPD.

BAB 5 : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah meliputi urusan pemerintahan unsur Kewilayahan Bidang Urusan Kecamatan.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 terdiri dari 4 program, 10 kegiatan, dan 22 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 2.261.007.130,-. (Dua milyar dua ratus enam puluh satu juta tujuh ribu seratus tiga puluh rupiah dengan fokus utama pada mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good government) dalam kehidupan berpolitik yang demokratis dan bertanggung jawab. Program/kegiatan/sub kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung tujuan daerah (sebelum adanya penyelarasan tanggal 2 Januari 2024) yang meliputi:

1. **Meningkatnya kualitas layanan publik**.
2. **Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;**

Dari 5 program, 10 kegiatan, dan 22 sub kegiatan yang dalam Renja Perangkat Daerah tersebut, program/kegiatan/sub kegiatan yang disetujui untuk dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024 terdiri dari 4 program, 10 kegiatan, dan 22 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 2.261.007.130

Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024, terjadi beberapa perubahan yang meliputi penambahan atau pengurangan pagu, penghapusan, penambahan atau pengurangan program/kegiatan/sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Perubahan tersebut mengubah rincian dalam Renja Perangkat Daerah menjadi 4 program, 10 kegiatan, dan 22 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 2.168.562.567. Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2024, program kegiatan/subkegiatan yang bertambah anggarannya adalah Penyediaan Bahan Logistik Kantor bertambah

sebesar Rp 2.500.000,00, sedangkan Program/kegiatan/subkegiatan yang berkurang meliputi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah anggaran sebelum perubahan Rp 2.088.102.134 dan anggaran setelah perubahan Rp 2.832.757.567,00 yang terdiri dari Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah anggaran sebelum perubahan Rp1.934.480.734,00 dan anggaran setelah perubahan Rp 1.876.636.167,00 dari Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Daerah anggaran sebelum perubahan Rp 1.914.920.734,00 dan anggaran setelah perubahan Rp 1.857.076.167,00. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah anggaran sebelum perubahan Rp 14.121.900,00 dan anggaran setelah perubahan Rp 14.121.900,00 terdiri dari Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dengan anggaran sebelum perubahan Rp 14.121.900,00 dan anggaran setelah perubahan Rp 14.121.900,00.

Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan anggaran sebelum perubahan Rp 25.000,000,00 dan anggaran setelah perubahan Rp 22.500,000,00 meliputi Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Pilkades sebelum perubahan Rp 25.000.000,00 dan anggaran setelah perubahan Rp 22.500.000,00.

Dinamika yang terjadi selama tahun 2024 turut mempengaruhi keberhasilan pencapaian Renja Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2024, tercatat adanya hasil yang baik karena semua target tercapai bahkan ada yang pencapaian melampaui target, hal tersebut dikarenakan adanya komitmen dan integritas yang tinggi dari para aparatur pemerintah kecamatan.

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada, semua program/kegiatan/sub kegiatan sesuai target.

b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi Program

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dan Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Adanya perencanaan, pelaksanaan, monitoring yang baik.
2. Menyelaraskan hal-hal yang akan dikerjakan dengan target kinerja
3. Menyelaraskan apa yang dianggarkan dengan apa yang akan dikerjakan
4. Mengerjakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja
5. Melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, pada tahun 2024 keseluruhan pencapaian kinerja telah tercapai sesuai target. Pada tahun perencanaan selanjutnya, perlu diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk pencapaian target kinerja ,diantaranya:

1. Koordinasi antar Kasi dan Sub Bagian.
2. Prioritas Perencanaan yang tepat sasaran, agar kegiatan bisa berjalan sesuai perencanaan

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2024* Kabupaten Banjarnegara

Urusan/Bidang Urusan dan rogram/Kegiata /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
BIDAN EMERINTAHAN NSUM EWILAYAHAN									
upuan : heningkatnya ualitas Pelayanan ublik	**NILAI IKM**								
ASARAN STRATEGIS Meningkatnya fektivitas dan ransparansi Layanan ublik	**Survey Masyarakat Kesantelm**	**82,50**	**81,86**	**83,50**	**82,26**	**100%**	**82,50**	**82,50**	**100%**
ROGRAM ENGNGANG URUSAN EMERINTAHAN AERAH ABUPATEN/KOTA	**Persentase penurunan urusan pemerintahan daerah kabupaten /kota yang terlaksana**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pelaporan yang tersusun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	100%	8 dokumen	8 dokumen	100%
Laporan dan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	5 laporan	7 dokumen	5 laporan	5 laporan	100%	5 laporan	5 laporan	100%
Administrasi Keuangan perangkat daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji ASN yang terbayarkan	13 orang	13 orang	13 orang	13 orang	100%	13 orang	13 orang	100%
Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	10 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	12 dokumen	100%
Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / triwulanan / semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	100%	14 Laporan	14 Laporan	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
Penyediaan Bahan-bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	10 paket	10 paket	10 paket	10 paket	100%	10 paket	10 paket	100%

engadaan Barang Milik Daerah enunjang Urusan emerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terealisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
engadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Diadakan	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	100 %	0 unit	0 unit	100%
engadaan Peralatan n Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	1 unit	2 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%
engadaan Aset Tetap lainya	Jumlah unit aset tetap lainya yang diadakan	1 unit	0	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%
engadaan Gedung antor atau Bangunan lainya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau bangunan lainya yang diadakan	0	0	0	0	0	0	0	
engadaan Sarana dan rasarana Gedung antor atau Bangunan lainya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan	3 unit	2 unit	3 unit	3unit	100%	3 unit	3 unit	100%
engadaan Sarana dan rasarana Pendukung edung Kantor atau angunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%
enyediaan Jasa enunjang Urusan emerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
enyediaan Jasa emunikasi Sumber aya Air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
enyediaan Jasa ebersihan Umum antor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kebersihan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	2 orang	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%

emiliharaan Barang Milik Daerah enanjang Urusan emerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
enyediaan jasa emeliharaan, biaya easuransian, dan ajak kendaraan enyenangi dinas atau erdinas dinas dalam	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan fungsi jabatan yang dipertiharu dan dikuasakan pejabatnya	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	100%	10 unit	10 unit	100%
emeliharaan/rehabilit n gedung kantor dan angunan lainya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	100%	3 unit	3 unit	100%
emeliharaan/rehabili si sarana dan ranana gedung antor atau bangunan inga	Pemeliharaan/rehab salana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainya	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	100%	5 unit	5 unit	100%
ROGRAM ENYELENGGARAAN EMERINTAHAN DAN ELAYANAN PUBLIK	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**100**	**93,98**	**100**	**106,75**	**100%**	**100**	**100**	**100%**
elaksanaan Urusan emerintahan yang ilimpahkan kepada ansi	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
elaksanaan Urusan emerintahan yang erkait dengan ekanaan Non erjanan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Terkait dengan Non Perjanan	12 laporan	1860 dok	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
elaksanaan Urusan emerintahan yang erkait dengan elayanan Perizinan an Usaha	Jumlah dokumen Pelayanan Perijinan Non Usaha yang di fasilitasikan	300 dokumen	300 dokumen	300 dokumen	300 dokumen	100%	250 dokumen	250 dokumen	100%

elaksanaan Urusan emerintahan yang erkait dengan ewenangan Lain yang ilengalikan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Di laksanakan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
ini dinasi emeliharaan Sarana an Prasana elayanan Umum	Persentase Terselenggaranya Distribusi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
oordinasi sinergitas engan Perangkat erah dan atau stansi Vertikal yang erkait dalam emeliharaan Sarana an Prasarana elayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 dokumen	6 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
ngkatnya ualitas enyelenggaraan emerintah Daerah	**Nilai SAKIP**								
asaran Strategis: leningkatnya inerja enyelenggaraan emerintahan Daerah	**Nilai SAKIP Kecamatan**	**62,10**	**60,00**	**60,00**	**62,10**	**103,5%**	**65,45**	**65,45**	**109%**
BIDANG EMBINAAN DAN ENGAWASAN EMERINTAH DESA	**Presentase Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
sistasi, ekomendasi dan oordinasi embinaan dan engawasan emerintahan Desa	**Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

asilitasi Penyusunan raturan Desa dan raturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	34 dokumen	34 dokumen	34 dokumen	34 dokumen	100%	34 dokumen	34 dokumen	100%
asilitasi Administrasi ala Pemerintahan esa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	17 dokumen	17 dokumen	17 dokumen	17 dokumen	100%	17 dokumen	17 dokumen	100%
asilitasi Pengelolaan uangan Desa dan silangsungan Aset esa	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	17 dokumen	17 dokumen	17 dokumen	17 dokumen	100%	17 dokumen	17 dokumen	100%
asilitasi Pelaksanaan emilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 dokumen	0 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	0	0	0
asilitasi Sinkronisasi rencanaan embangunan Daerah engan Pembangunan esa	Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
asilitasi penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman Umum	Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	17 dokumen	2 dokumen	17 dokumen	17 dokumen	100%	17 dokumen	17 dokumen	100%
asilitasi Penyusunan rogram dan elaksanaan emberdayaan asyarakat desa Desa	Jumlah dokumen yang di fasilitasi dalam rangka Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat desa Desa	17 dokumen	17 dokumen	17 dokumen	17 dokumen	100%	17 dokumen	17 dokumen	100%
nitorasi erdayagunaan desa di ecamatan	Jumlah Laporan hasil kunjungan pelaksanaan pemberdayaan kecamat	17 laporan	17 laporan	17 laporan	17 laporan	100%	17 laporan	17 laporan	100%

	perkesan di wilayah kecamatan								
RUGRAM ENYELENGGARAAN RUSAN EMERINTAHAN MUM	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
enyelenggaraan rusan Pemerintahan um sesuai elaksanaan Tugas epala Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintah n sesuai Pelaksana an Tugas Kepala Daerah yang terlaksana**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
elaksanaan Tugas erah Koordinasi mpinan di ecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	4 dokumen	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan pelayanannya, Perangkat Daerah menggampu 2 Indikator. Dari 2 indikator tersebut berstatus tercapai dan melebihi target yaitu Indikator Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan pada tahun 2024 tercapai 82,26 atau 100,93% dari target dan Indikator Nilai SAKIP Kecamatan tercapai nilai 62,10 atau 103,35%. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Merencanakan target kinerja dengan pelaksanaan anggaran dan kegiatan dengan baik;
2. Menyelaraskan dokumen perencanaan sehingga data yang disajikan merupakan data yang akuntabel;
3. Koordinasi internal perangkat daerah dengan maksimal sehingga kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan perencanaan yang ada.
4. Koordinasi Pemerintah Kecamatan dan Desa, Forkompinca dan Linsek yang telah berjalan dengan baik;
5. Komitmen Tim Pemungut Pajak dalam pelaksanaan tugas;
6. Komitmen dari para aparatur kecamatan untuk memberikan pelayanan yang prima sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan;
7. Kekompakan tim pemungut pajak dalam pelaksanaan tugas.

Dalam rangka pencapaian target kinerja tahun berikutnya, beberapa hal yang harus diupayakan meliputi:

1. Mengevaluasi, menelaah, menyelaraskan dokumen perencanaan agar tercapai target kinerja;
2. Mengevaluasi dan memperbaiki komunikasi serta koordinasi internal maupun eksternal perangkat daerah sehingga kegiatan dapat berjalan selaras dengan perencanaan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah baik.

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara (Setelah penyelarasan)

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK LPPD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Nilai SAKIP Kecamatan			34,80	60,80	65,45	70,50	58,80	65,45	70,00	72,50	
2.	Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan		-	81,50	81,50	82,50	83,50	81,86	82,26	84,00	85,00	
3.	Indeks desa di wilayah Kecamatan					67,00	67,50			67,00	67,50	

*) Kolom 3 diisi berdasarkan IKK outcome dalam lampiran Permendagri 10/20

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan urusan pemerintahan dalam 1(satu) urusan, yaitu Urusan Kewilayahan. Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPD Tahun 2023-2026, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk tahun 2026 mencakup 1 (satu) urusan tersebut. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah diantaranya adalah:

1. Pelayanan administrasi kependudukan masih belum optimal dan belum sepenuhnya berbasis digital
2. Koordinasi pembangunan antar-OPD dan antar-kelurahan/ desa belum berjalan efektif.
3. Kerentanan terhadap bencana masih tinggi dan kesiapsiagaan wilayah belum optimal;
4. Masih terbatasnya kapasitas aparatur desa dalam melaksanakan tertib administrasi pemerintahan desa;
5. Usulan kelurahan/ desa dalam forum musrenbang kecamatan masih dominan berkaitan dengan pembangunan internal kelurahan/ desa, belum diarahkan pada usulan yang bersifat komprehensif dan mendukung prioritas pembangunan tingkat kabupaten;
6. Masih kurangnya kesertaan masyarakat dan petugas pemungut dalam pelunasan PBB lebih awal;
7. Pelayanan publik belum sepenuhnya cepat, efektif, dan berbasis digital, sehingga masih terdapat keluhan masyarakat terkait waktu dan kualitas layanan.
8. Masih kurangnya dukungan data informasi dari masyarakat , peraturan yang valid, akurat dan terintegrasi sebagai pedoman dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Permasalahan tersebut, jika tidak diselesaikan dapat menjadi constraint dalam pencapaian visi dan misi (hipotesis) maupun capaian indikator lainnya. Beberapa dampak dari adanya permasalahan dan hambatan tersebut meliputi:

1. Kurang tercapainya suatu kegiatan sesuai indikator kinerja;
2. Tidak tercapainya sasaran kerja;
3. Belum optimalnya hasil pelaksanaan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi, peningkatan kualitas birokrasi, dan meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan penyelenggara layanan akan meningkatkan kebutuhan akan adanya penyediaan produk layanan yang semakin baik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi-inovasi dalam menunjang peningkatan pelayanan publik secara kontinyu. Beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, yaitu:

1. Peningkatan peran dan fasilitasi kecamatan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah, pelayanan sarana dan prasarana umum serta pencapaian standar pelayanan minimal;
2. Kondisi geografis wilayah kecamatan yang berbukit-bukit dan tanah yang labil/ mudah bergerak mengakibatkan kerusakan infrastruktur transportasi dan bencana alam tanah longsor kerap kali terjadi sehingga menghambat mobilitas ekonomi dan sosial masyarakat;
3. Tuntutan masyarakat semakin beragam untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas;
4. Masih adanya aparat pemerintahan dan kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif;
5. Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan terhadap masyarakat;
6. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
7. Melimpahnya potensi sumberdaya alam yang dapat dikelola untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
8. Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mempermudah upaya meningkatkan profesionalisme;

9. Adanya dukungan koordinasi lintas sektor di wilayah kecamatan yang mendukung tercapainya sinkronisasi dan integrasi kegiatan lingkup kecamatan antara lain kegiatan Konferensi dinas/rapat koordinasi Forkompenca, UPT/Instansi dan Kepala Desa secara rutin di tingkat Kecamatan;

Berdasarkan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan tersebut, dapat diinventarisasi beberapa isu strategis. Inventarisasi isu-isu strategis tahun 2026 didapatkan dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal Kabupaten Banjarnegara sampai dengan tahun 2025. Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan pembangunan. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2026, sebagai berikut:

1. Masih terbatas dan kurangnya kapasitas serta kompetensi perangkat desa;
2. Masih adanya desa dengan angka stunting tinggi di wilayah Kecamatan Punggelan;
3. Kurang optimalnya pembinaan ke Kelurahan/desa
4. Kurang cepatnya penanganan permasalahan di Kelurahan/desa
5. Daerah rawan bencana dengan intensitas kejadian yang cukup tinggi

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Tahun 2026 merupakan pelaksanaan tahun kesatu RPD Tahun 2026-2030. Dalam RPD Tahun 2026-2030, prioritas arah kebijakan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2026 meliputi:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah urusan kewilayahan
2. Meningkatnya efektivitas koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan desa/kelurahan

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 Kabupaten Banjarnegara

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
ogram/ atan/ Sub egiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
: kanya ilitas layanan ntah dalam kewilayahan mutan lan	Kec. Punggelan	IPP	59,60		Tujuan : Meningkatnya aksesibilitas layanan pemerintah dalam urusan kewilayahan di Kecamatan Punggelan	Kec. Punggelan	IPP	59,50		
: Strategis : kinerja nilitas kinerja kat daerah kewilayahan	Kec. Punggelan	Nilai SAKIP Kecamatan	BB (70,50)		Secara Strategis : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah urusan kewilayahan	Kec. Punggelan	Nilai SAKIP Kecamatan	BB (70,50)		
AM JANG N ENTAHAN H	Kec. Punggelan	Persentase Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah Kabupaten yang terlaksana	100%	2.184.227.138	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH	Kec. Punggelan	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Kabupaten yang terlaksana	100%	2.163.261.338	
ntuan, ggaran, dan i Kinerja kat daerah	Kec. Punggelan	terpenuhinya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja kecamatan Wanareja	100%	5.250.000	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Kec. Punggelan	terpenuhinya perencanaan (penganggaran dan evaluasi kinerja	100%	5.250.000	

							kawasan Wisayasa			
ami an aan at Daerah	Kec. Panggelan	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	8 dokumen	2.600.000	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Panggelan	jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	8 dokumen	2.600.000	
saan dan anan Laporan Kinerja dan Realisasi SKPD	Kec. Panggelan	jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	2.630000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Panggelan	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	2.630.000	
rasi an Perangkat	Kec. Panggelan	Terselenggara nya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	1.991.904.130	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Panggelan	Terselenggar anya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	1.992.904.130	
laan Gaji dan gan ASN	Kec. Panggelan	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 orang	1.971.926,130	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Panggelan	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 orang	1.971.926.130	
aan an dan an /Verifikasi an SKPD	Kec. Panggelan	Jumlah dokumen penatausahaa n dan pengujian/ver ifikasi keuangan SKPD	12 dokumen	19.560.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Panggelan	Jumlah dokumen penatausaha an dan pengujian/ve rifikasi keuangan SKPD	12 dokumen	19.560.000	
asi dan unan Laporan	Kec. Panggelan	Jumlah Laporan	24 Laporan	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan	Kec. Panggelan	Jumlah Laporan	11 Laporan	3.000.000	

ian Bulanan / rimik / unan SKPD		Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD		Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
ministrasi Umum ah Daerah	Kec. Penggelan	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100%	194.592.900	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Penggelan	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100%	50.667.200	
nggaraan ordinasi dan asi SKPD	Kec. Penggelan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Laporan	5.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Penggelan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	7.500.000	
laan Bahan n Kantor	Kec. Penggelan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 paket	66.435.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Penggelan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 paket	63.067.200	
laan Barang ersih	Kec. Penggelan	Terselenggara Pengadaan Barang Milik	100%	60.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Kec. Penggelan	Terselenggara Pengadaan Barang Milik	100%	13.499.200	

ung Urusan rahan Daerah		Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Pemerintahan Daerah		Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
an Perahuan an Lainnya	Kec. Punggelan	Jumlah perahuan dan mesin lainnya yang Disediakan	1 unit	80.000.000	Pengadaan Perahuan dan Mesin Lainnya	Kec. Punggelan	Jumlah perahuan dan mesin lainnya yang Disediakan	0 unit	0	
an sarana sarana Bangunan	Kec. Punggelan	Jumlah paket sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya	2 unit	0	Penggadaan sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya	Kec. Punggelan	Jumlah paket sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya	1 unit	11.499.200	
an Gedung atau an Lainnya	Kec. Punggelan	Jumlah Unit Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	0 unit	0	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Punggelan	Jumlah Unit Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	0 unit	0	
luan Jasa ang Urusan rahan Daerah	Kec. Punggelan	Terselenggaranya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan	100%	24.820.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Punggelan	Terselenggaranya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan	100%	27.000.000	
luan Jasa Hasil Sumber r dan Listrik	Kec. Punggelan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	12 laporan	9.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Punggelan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	12 laporan	9.000.000	

		Air dan Listrik yang Dipelihara					Biaya Air dan Listrik yang Dipelihara			
Jasa lan Umum	Kec. Penggelan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	15.820.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Penggelan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12.000.000	
layan Barang ilayah ang Urusan h	Kec. Penggelan	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah sesuai kebutuhan	100%	98.637.100	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah	Kec. Penggelan	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah sesuai kebutuhan	100%	93.821.950	
Jasa lan Jasa Sewaan, Biaya Sewaan, Pajak, risiasi 'aan Dinas ional atau an	Kec. Penggelan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	40.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Penggelan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	39.940.000	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung g Kantor dan nan Lainnya	Kec. Penggelan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	1 Unit	10.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Penggelan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	8 Unit	72.320.000	

		Dipelihara/Direhabilitasi					Dipelihara/Direhabilitasi			
saran/Prasarana dan ya Gedung dan Bangunan a	Kec. Penggelan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	8.637.300	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Penggelan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit		
AM ENGGARAAN INTAHAN ELAYANAN K	Kec. Penggelan	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**100%**	116.100.000	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Kec. Penggelan	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**100%**	**67.917.200**	
nan kasan ana dan Sarana um Umum	Kec. Penggelan	Terselenggaranya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum	100%	7.500.000	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kec. Penggelan	Terselenggaranya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum	100%	7.500.000	
naan sinergitas i Perangkat dan atau a Vertikal yang dalam haan Sarana asilitas um Umum	Kec. Penggelan	Jumlah Dokumen Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	1 dokumen	7.500.000	Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec. Penggelan	Jumlah Dokumen Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	8 dokumen		

		Pelayanan Umum					Pelayanan Umum			
ssaan Urusan ntahan yang ntikan kepada	Kec. Panggelan	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100.680.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Kec. Panggelan	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100.680.000	
saan Urusan ntahan yang dengan san Perjanan aka	Kec. Panggelan	Jumlah dokumen Pelayanan Non Perijinan Usaha yang di Laksanakan	12 dokumen	6.060.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perijinan Non Usaha	Kec. Panggelan	Jumlah dokumen Pelayanan Non Perijinan Usaha yang di Laksanakan	6 dokumen	3.000.000	
ssaan Urusan ntahan yang dengan san Non ijinan	Kec. Panggelan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Terkait dengan Non Perijinan	12 laporan	4.500.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Non Perijinan	Kec. Panggelan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Terkait dengan Non Perijinan	12 laporan	4.500.000	
ssaan Urusan ntahan yang dengan ngan Lain dilimpahkan	Kec. Panggelan	Jumlah dokumen Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan	1 Dokumen	99.180.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Kec. Panggelan	Jumlah dokumen Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan	17 Dokumen	99.180.000	
gkatnya dan nasi dan si rdayaan eburahan	Kec. Panggelan	Indeks Desa di Wilayah Kecamatan	67,00		Meningkatnya efektifitas koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan desa/kelurahan	Kec. Panggelan	Indeks Desa di Wilayah Kecamatan	67,00		

AM BRDAYAAN ARAKAT IDESA ELURAHAN	**Kec. Punggelas**	**persentase terlaksanany a program pemberdayaa n masyarakat dan desa**	**100%**	10.000.000	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kec. Punggelas**	**persentase terlaksanan ya program pemberdaya an masyarakat dan desa**	**100%**	9.500.000	
nasi kegiatan rdayaan desa	**Kec. Punggelas**	Persentase terlaksanannya Program Pemberdayaa n Masyarakat desa	100%	5.000.000	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	**Kec. Punggelas**	Persentase terlaksanany a Program Pemberdayaa n Masyarakat desa	100%	2.000.000	
katan asi kegiatan yilayaan rakat di wilayah tkan	**Kec. Punggelas**	Jumlah laporan Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaa n masyarakat di wilayah kecamatan	3 Laporan	5.000.000	Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan	**Kec. Punggelas**	Jumlah laporan Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaa n masyarakat di wilayah kecamatan	3 laporan	2.000.000	
rdayaan ga yarakatanTingk imatan	**Kec. Punggelas**	terselenggara nya pemberdayaa n lembaga kemasyarakat an tingkat kecamatan	100%	5.000.000	Pemberdayaan Lembaga KemasyarakatanTing kat Kecamatan	**Kec. Punggelas**	terselenggara nya pemberdayaa n lembaga kemasyaraka tan tingkat kecamatan	100%	7.500.000	
tukan tas lembaga nerakatan	**Kec. Punggelas**	jumlah Laporan pemberdayaa n lembaga kemasyarakat an	2 lembaga kemasyar akatan	5.000.000	Peningkatan Kapasitas lembaga kemasyarakatan	**Kec. Punggelas**	Jumlah Laporan pemberdayaa n lembaga kemasyaraka tan	2 lembaga kemasyar akatan	7.500.000	

AN LENGGARAAN N INTAHAN		**persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**100%**	13.500.000	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kec. Panggelan**	**persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**100%**	13.500.000	
nggaraan Pemerintahan sesuai ketam Tugas Daerah	**Kec. Panggelan**	Terselenggara nya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah sesuai ketentuan	100%	13.500.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah	**Kec. Panggelan**	Terselenggar anya Penyelenggar aan Urusan Pemerintaha n Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah sesuai ketentuan	100%	13.500.000	
naan Tugas Koordinasi an di kan	**Kec. Panggelan**	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	8 Dokumen	13.500.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	**Kec. Panggelan**	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	8 Dokumen	13.500.000	
AM SAAN DAN WASAN INTAHAN	**Kec. Panggelan**	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	8.500.000	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kec. Panggelan**	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	42.500.000	
n, ngkat dan sasi aan dan aban mahan Desa	**Kec. Panggelan**	Terselenggara nya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	100%	8.500.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	kec Wonayasa	Terselenggar anya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan	100%	42.500.000	

		Pengawasan Pemerintahan Desa					dan Pengawasan Pemerintaha n Desa			
i) penyusunan desa dan Desa	Kec. Punggelan	jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyusunan peraturan desa dan kepala desa	34 dokumen	1.000.000	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan kepala desa	Kec. Punggelan	jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyusunan peraturan desa dan kepala desa	34 dokumen	6.700.000	
ii) Administrasi pemerintahan	Kec. Punggelan	jumlah dokumen yang di Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	17 Dokumen	1.000.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Punggelan	jumlah dokumen yang di Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintaha n Desa	17 Dokumen	7.500.000	
ii) Pelaksanaan Kepala	Kec. Punggelan	jumlah dokumen yang di fasilitasi dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desa	0 desa	0	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec. Punggelan	jumlah dokumen yang di fasilitasi dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desa	0 desa	0	
i Pengelolaan ni Desa dan pasaran Aset	Kec. Punggelan	jumlah Dokumen yang di fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan	34 dokumen	1.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaksanaan Aset Desa	Kec. Punggelan	jumlah Dokumen yang di fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan	34 dokumen	1.000.000	

		Pembayaguna an Aset Desa					Pembayaguna an Aset Desa			
si Pemkomnas inasi ngunan Daerah Pembangunan	Kec. Punggelan	jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 dokumen	3.500.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Punggelan	jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 dokumen	6.500.000	
si Penggunaan nasyan dan san Desa	Kec. Punggelan	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	6 dokumen	0	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Punggelan	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	6 dokumen	6.500.000	
si Penyusunan n dan saan dayaan akat Desa	Kec. Punggelan	jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	17 dokumen	1.000.000	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec. Punggelan	jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	17 dokumen	6.500.000	

aksi igringan Desa natanya	**Kec. Panggelan**	Jumlah Dokumen fasilitasi koordinasi pendampinga n desa di wilayahnya	17 dokumen	1.000.000	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	**Kec. Panggelan**	Jumlah Dokumen fasilitasi koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	17 dokumen	= 1.000.000	

Berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2026, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan yaitu:

1. Memprioritaskan kegiatan yang belum terlaksana di tahun 2025
2. Melanjutkan kegiatan yang sudah ada di tahun 2025

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan musrenbang kecamatan dan forum konsultasi publik telah disampaikan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui aplikasi SIPD. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.3
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan

2.6. Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan hasil reses anggota DPRD, melalui aplikasi SIPD telah disampaikan usulan program dan kegiatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Validasi
	NIHIL				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tema Pembangunan Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 adalah "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", dengan prioritas pembangunan nasional sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa;
b. Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah;
c. Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan

Telaahan terhadap kebijakan nasional yang dimaksud adalah penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Hal tersebut seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional yang mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional

Dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi, maka Kecamatan Punggelan melaksanakan kebijakan daerah yang sinergis dengan kebijakan Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat. Kegiatan yang akan dilakukan oleh Kecamatan Punggelan diharapkan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan di atasnya, mempunyai rasa keadilan, pemerataan dan diarahkan agar implementasinya akan dapat berdampak pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan

Wanayasa. Renja yang disusun perangkat daerah berpedoman pada RKPD dan RPJPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029 dengan Visi "Mewujudkan Banjarnegara Maju dan Sejahtera", yang akan diwujudkan melalui 5 (lima) Misi yang merupakan turunan dari pokok-pokok visi yang telah diidentifikasi sebelumnya yaitu :

1. Meningkatkan Infrastruktur dan Pelayanan Publik
2. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal
3. Meningkatkan Kualitas dan Akses Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan Sosial.
4. Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.
5. Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Transparan

Dalam mencapai Visi Kabupaten Banjarnegara, maka Kecamatan Punggelan mempunyai peran dan fungsi menggerakan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah dalam menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan. Terutama dikaitkan dengan pelaksanaan pelimpahan kewenangan yang secara mutlak harus didukung oleh sumberdaya manusia aparatur yang mampu mengelola tugas-tugas pelayanan secara optimal, efektif dan efisien, serta mampu merumuskan kebijakan-kebijakan yang implementatif yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, yang pada muaranya merwujudkan Visi Kabupaten Banjarnegara.

Tujuan yang akan diwujudkan selama periode 2025-2029 adalah "Terwujudnya Banjarnegara maju dan sejahtera" yang diukur melalui indikator PDRB per kapita dan angka kemiskinan yang akan ditempuh melalui 4 sasaran strategis, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat
2. Meningkatnya perekonomian daerah yang berdaya saing dan berbasis potensi lokal secara berkelanjutan

3. Meningkatnya infrastruktur yang mendukung perekonomian dan kesejahteraan Masyarakat
4. Meningkatnya tata kelolapemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif

Adapun sasaran strategis yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam pencapaian visi misi Kepala Daerah sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Punggelan sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara dari 4 (empat) sasaran strategis tersebut adalah Sasaran Strategis ke-4 yaitu:

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif dengan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi.

Meningkatnya profesionalisme aparatur daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, berwibawa, bersih, dan bertanggung jawab, serta mampu mendukung pembangunan daerah yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan Masyarakat

2.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan, sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Dengan kata lain tujuan dan sasaran merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Tujuan dan sasaran dalam Renstra yang mendukung RPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029 diuraikan sebagai berikut:

Tujuan :

Mewujudkan Banjarnegara Maju dan Sejahtera.

Sasaran:

Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif

Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Punggelan beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel sebagaimana berikut ini :

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatnya aksesibilitas layanan pemerintah dalam urusan kewilayahan di Kecamatan Punggelan		Indeks Pelayanan Publik	59,50	60,00	61,20	62,50	63,50
1.1		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah urusan kewilayahan	Nilai SAKIP Kecamatan	BB (70,50)	BB (71,50)	BB (72,50)	BB (73,50)	BB (74,50)
1.2		Meningkatnya Efektivitas koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan desa/kelurahan	Indeks Desa di Wilayah Kecamatan	67,50	68,00	68,50	69,00	69,50

2.3. Program dan Kegiatan

(Sajikan matriks yang berasal dari SIPD)

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN PUNGGELAN KAB. BANJARNEGARA
TAHUN 2026

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA (5TH)	REALISASI CAPAIAN SEBELUM TAHUN BERJALAN (5TH)	PENCAPAIAN TARGET AKHIR RENSTRA (5TH) TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PAGU ANGGARAN	PERKIRAAN BELUM TERSERAP TAHUN 2027		PERKIRAAN SISA LANJUTAN PROGRAM/KEG. BERAKHIR
					TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	KELOMPOK SASARAN	PENDANAAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									PERANGKAT DAERAH	LAINNYA				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	contoh: Pasut Dahlia Lapindo Nama Lengkap Operator				97 Unit	23.987.000,00	Kab. Bandaringara, Kecamatan Taman Indrawati	PENGGUNA JASA / UMUM (PUBLIC)		Pengadaan peralatan dan fasilitas Pemadaman Listrik dan Gas Dalam Gedung/ruang, di rekomendasikan untuk melindungi pemakai dari dan dari sisi aplikasi dan Instrumen			24.000.000,00	24 Unit/Set Pemadam, dst
Pemeliharaan / Kajian Kendaraan dan Komunikasi (KOT)														
	contoh: Laporan Pemeliharaan Hasil Inventaris Tim Komunikasi Utama				12 Laporan	17.000.000,00	Kab. Bandaringara, Kecamatan Taman Indrawati	PENGGUNA JASA / UMUM (PUBLIC)		Pengadaan peralatan dan fasilitas Pemadaman Listrik dan Gas Dalam Gedung/ruang, di rekomendasikan untuk melindungi pemakai dari dan dari sisi aplikasi dan Instrumen			3.000.000,00	1 Unit/Set Pemadam, dst
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						11.000.000,00				Pengadaan peralatan dan fasilitas Pemadaman Listrik dan Gas Dalam Gedung/ruang, di rekomendasikan untuk melindungi pemakai dari dan dari sisi aplikasi dan Instrumen			55.000.000,00	55 Unit/Set Pemadam, dst
Pemadam Kebakar dan Tabung Gedung Kantor dan Pengaman Lainnya														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

(KEGIATAN / SUBKEGIATAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN)	INDIKATOR KEGIATAN / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN (SPK)	REALISASI CAPAIAN KINERJA (SPK) TAHUN 2024	PERMASALAHAN DAN/ATAU TINDAK PENGENDALIAN YANG DILAKUKAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERUBAHAN KE-1 (PERUBAHAN KEDUA)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	INDIKATOR			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

(KODE) / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AWAL PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI SAMPAI DENGAN BERJALAN OPD PADA AWAL TAHUN	PROYEKSI PADA AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PAGU ANGGARAN (RP)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2025	KINERJA (OUTPUT) (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	INDIKATIF	DEFINITIF		TARGET	KINERJA (OUTPUT) (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

(URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD	KEADAAN AWAL CAPAIAN PERIODE RPJMD	PENURUNAN CAPAIAN TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN NILAI PENDANAAN TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RPJMD	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									MANDATORI	LAINNYA				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PROGRAM														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

| | | |

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program pada perangkat daerah merupakan program prioritas dalam Renstra 2026-2030. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPD selanjutnya dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Pemilihan untuk masing-masing program/ kegiatan di Kecamatan Panggelan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan 6 (enam) kegiatan yakni :
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      Terdiri dari 2 (dua) sub Kegiatan :
      a.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      a.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      Terdiri dari 3 (tiga) sub Kegiatan :
      b.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      b.2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
      b.3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran
   c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
      Terdiri dari 2 (dua) sub Kegiatan :
      c.1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      c.2. Penyedia bahan logistik kantor
   d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Terdiri dari 3 (tiga) sub Kegiatan :
      d.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
      d.2. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

d.3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

e. Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Terdiri dari 2 (dua) sub Kegiatan :

e.1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

e.2. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Terdiri dari 3 (tiga) sub Kegiatan :

f.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

f.2. Pemeliharaan/rehabilittasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya

f.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, 2 (dua) kegiatan yakni :

a. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

Terdiri dari 1 (satu) sub Kegiatan :

a.1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang di Limpahkan Kepada Camat

Terdiri dari 3 (tiga) sub Kegiatan :

b.1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan perijinan non usaha

b.2. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perijinan

b.3. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan 2 (dua) kegiatan :
   a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan :
      a.1. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
   b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan, terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan
      b.1. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
4. Program Urusan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan 1 (satu) kegiatan :
   a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala DaerahTerdiri dari 1 (satu) sub Kegiatan :
      a.1. Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di wilayah kecamatan
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Desa, dengan dengan 1 (satu) kegiatan yakni :
   a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Terdiri dari 6 (enam) sub Kegiatan:
      a.1. Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa
      a.2. Fasilitasi administrasi pemerintahan desa
      a.3. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
      a.4. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa
      a.5. Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
      a.6. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2023-2026. Renja Perangkat Daerah selanjutnya menjadi platform operasional bagi Perangkat Daerah dalam menjalankan programnya dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta tujuan pembangunan daerah tahun 2025-2029. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026 dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disepakati.
2. Kerangka pendanaan dalam Renja Perangkat Daerah masih bersifat sementara, sehingga masih dimungkinkan terjadi perubahan pagu yang disebabkan oleh pengurangan, penambahan, dan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan maupun antar sub kegiatan dalam kerangka penyusunan anggaran secara terpadu dan berbasis kinerja.
3. Renja Perangkat Daerah menjadi acuan bagi Kepala Perangkat Daerah dan segenap jajarannya serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, serta menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

CAMAT SIJUNGGELAN
KABUPATEN BANJARNEGARA

AGUS [illegible] SANTOSO,SE,M.Si
Pembina Tk.I
NIP.197207141990031003

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD .

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan yang diatur melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan pembentukan tim penyusun, penelaahan rancangan awal RKPD, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, hingga pada penyempurnaan berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang RKPD. Selain

berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, penyusunan Renja Awal Perangkat Daerah juga mengacu pada Renja Kementerian/Lembaga terkait, serta Renja Perangkat Daerah Provinsi terkait. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2. Landasan Hukum

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Tahun 2025-2029
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor

16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
26. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 14);

27. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 15);

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun dengan maksud untuk:

a. Menjabarkan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029 ke dalam rencana program kegiatan prioritas Tahun 2025 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Renja K/L Tahun 2026 dan Renja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerapan anggaran berbasis kinerja.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Awal Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

a. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA-DPA dalam Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2026, yang dalam penyusunannya didahului dengan menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026;
b. Sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Tahun 2026;
c. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun berdasarkan sistematika yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta sistematika dokumen Renja Perubahan Perangkat Daerah.

BAB 2 : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan review terhadap rancangan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dan atau pokok-pokok DPRD.

BAB 3 : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perubahan Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan tahun 2026.

BAB 4 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran RKPD.

BAB 5 : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah meliputi urusan Pemerintahan fungsi penunjang kewilayahan.

Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2026 yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 terdiri dari 5 program, 10 kegiatan, dan 27 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. **2.317.861.760**, dengan fokus utama pada membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Program/kegiatan/sub kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah yang meliputi:

a. Belum optimalnya etos kerja, budaya kerja dan disiplin kerja pegawai;
b. Belum optimalnya dukungan data informasi dari masyarakat , peraturan yang valid, akurat dan terintegrasi sebagai pedoman dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat;
c. Tidak optimalnya masyarakat dalam mengikuti musrenbang;
d. Masih rendahnya pemahaman masyarakat maupun aparatur desa tentang hakekat pembangunan nasional;

e. Masih rendahnya kapasitas aparatur desa dalam melaksanakan tertib administrasi pemerintahan desa;
f. Masih kurangnya keseriusan masyarakat dan petugas pemungut dalam pelunasan PBB lebih awal;

Dari 4 program, 9 kegiatan, dan 22 sub kegiatan yang ada dalam Renja Perangkat Daerah tersebut, program/kegiatan/sub kegiatan yang disetujui untuk dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024 dengan total anggaran sebesar Rp. 2.368.755.823,-

Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026, terjadi beberapa perubahan yang meliputi penambahan atau pengurangan pagu, penghapusan, penambahan atau pengurangan program/kegiatan/sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Perubahan tersebut mengubah rincian dalam Renja Perangkat Daerah menjadi 5 program, 10 kegiatan, dan 27 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 2.317.861.760,-
Pada Renja Perangkat Daerah tahun 2026, program/kegiatan/subkegiatan yang berkurang, 1 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 1 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa serta Sub Kegiatan 1 yaitu :

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Program Pembinaan dan Pengawasan 6 Sub kegiatan Yaitu ;

1. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa,
2. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
3. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
4. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
5. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
6. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

Dan berkurang 1 Sub Kegiatan Fasilitasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa .

Dinamika yang terjadi selama tahun 2026 turut mempengaruhi keberhasilan pencapaian Renja Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2026 tercatat adanya hasil yang baik yang dikarenakan adanya pencapaian maupun pelampauan target maupun yang tidak memenuhi target.

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

   Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada.

b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

   Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sedangkan realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Sub Kegiatan

Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah :

1. Perencanaan target kinerja yang sesuai;
2. Penyelarasan hal-hal yang akan dikerjakan dengan target kinerja;
3. Penyelarasan apa yang dianggarkan dengan apa yang akan dikerjakan;
4. Pengerjaan kegiatan sesuai dengan rencana kerja;
5. Pelaporan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka masih banyak yang harus di perhatikan dan ditingkatkan kinerjanya agar sesuai dengan indikator kinerja.

Pada tahun perencanaan selanjutnya, perlu diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, diantaranya:

1. Koordinasi yang baik antara masing – masing Kasi dan Kasubag
2. Prioritas Perencanaan yang tepat sasaran, agar kegiatan bisa berjalan sesuai perencanaan
3. Adanya anggaran yang mendukung kegiatan

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kewilayahan									
	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	Nilai SAKIP	BB (72,20)	BB (72,10)	BB (71,20)	BB (72,10)	101 %	BB (71,20)	BB (72,20)	BB 100%
		Nilai SKM	86,30	86,30	84,35	86.30	102%	84.35	86,30	103%

	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA									
4.11.4.11.05.01.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Prosentase keselarasan dokumen perencanaan**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**
4.11.4.11.05.01.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	14 dokumen	8 Dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 Dokumen	8 dokumen	14 dokumen	100%
4.11.4.11.05.01.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	13 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	13 laporan	**100 %**

	SKPD									
4.11.4.11.05.01.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Prosentase ketepatan penyusunan dokumen pelaporan keuangan**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**
4.11.4.11.05.01.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	10 Orang/bulan	10 Orang/bulan	10 Orang/bulan	10 Orang/bulan	10 Orang/bulan	12 Orang/bulan	**100 %**
4.11.4.11.05.01.02.03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuanga	28 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	28 dokumen	**100 %**

		n SKPD								
4.11.4.11.05.01.02.06	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	40 Lapor An	12 Laporan	12 laporan	12 laporan	12 Laporan	12 laporan	40 laporan	**100 %**
4.11.4.11.05.01.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase pemenuhan kebutuh**	**100 %**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100%**	**100%**	**100 %**	**100 %**

		an pelayanan administrasi umum perangkat daerah								
4.11.4.11.05.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 Paket	1 paket	1 paket	1 Paket	1 paket	1 paket	**100 %**
4.11.4.11.05.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	4 Paket	**100 %**

4.11.4.11.05.01.06.04	Penyedia bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	13 Paket	13 Paket	13 Paket	13 Paket	13 Paket	13 Paket	13 Paket	**100 %**
	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Prosentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**
	Penyedian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	**100 %**

	Penyedia jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100 %
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan	0 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	0 unit	**100 %**

		Lainnya yang Disediakan								
	Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	100 %
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	3 unit	100 %
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**
	Penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasio	18 unit (motor 16, mobil 2)	18 unit	18 unit	18 unit	18 unit	18 unit	18 unit	**100 %**

	n, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	nal atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya								
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	**100 %**
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	**100 %**

		Dipelihara/Direhabilitasi								
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Prosentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait	Jumlah Dokumen Non Perizinan	55 dokumen (rekomendasi dan dispersasi	55 dokumen (rekomendasi dan dispersasi	45 dokumen (rekomendasi dan dispersas	55 dokumen (rekomendasi dan dispersasi	100 %	45 dokumen (rekomendasi dan dispersas	55 dokumen (rekomendasi dan dispersasi	**100%**

	dengan pelayanan Perizinan Non Usaha	Usaha yang Dilaksanakan	nikah)	nikah)	i nikah)	nikah)		i nikah)	nikah)	
	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Peizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	1 laporan (1.000 pemohon KK 1.000 pemohon KTP)	1 Laporan (KTP 121,15%, 2.423 pemohon), (KK 185,5% 3.710 pemohon)	1 laporan (2.000 pemohon KK 2.000 pemohon KTP)	1 Laporan (KTP 121,15%, 2.423 pemohon), (KK 185,5% 3.710 pemohon)	100 %	1 laporan 1.000 pemohon KK 1.000 pemohon KTP)	1 laporan	100 %
	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (jumlah SPPT yang tersalurkan ke WP)	1.Laporan sejumlah 25.341 SPPT sudah terdistribusi 100 % kepada Wajib Pajak	1. Laporan realisasi sejumlah 24.752 SPPT sudah terdistribusi 100 % kepada Wajib Pajak.	1.Laporan sejumlah 24.752 SPPT sudah terdistribusi 100 % kepada Wajib Pajak.	1.Laporan realisasi sejumlah 24.752 SPPT sudah terdistribusi 100 % kepada Wajib Pajak.	100%	1 laporan (Jumlah SPPT yang tersalurkan ke WP 100%)	1. Laporan sejumlah 25.341 SPPT sudah terdistribusi 100 % kepada Wajib Pajak	100%

	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	100%
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Prosentase Kegiatan koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi	10 lembaga kemasyarakatan	10 lembaga kemasyarakatan	10 lembaga kemasyarakatan	10 lembaga kemasyarakatan	100%	10 lembaga kemasyarakatan	10 lembaga kemasyarakatan	100%

	Pembangunan di Desa	dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa								
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pelaksanaan program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Prosentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**

		Daerah yang dilaksanakan								
	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	12 dokumen	100%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase pelaksanaan program pembinaan dan pengawasa pemerintahan desa**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasa	**Prosentase fasilitasi, rekomendasi dan**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**

	n Pemerintahan Desa	**koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**								
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	100%	8 dokumen	8 dokumen	100 %
	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	100 %

		Tata Pemerintahan Desa								
	Fasilitasi pengelola keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	100 %
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Fasilitasi Terlaksanakannya Pilkades	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	-	-	-
	Fasilitasi Singkronisasi Perencanaan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	100%	8 dokumen	8 dokumen	100%

	Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa								
	Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	100%	8 dokumen	8 dokumen	100%
	Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat	Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksa	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	100%	8 dokumen	8 dokumen	100%

	desa	naan Pemberdayaan Masyarakat Desa								
	Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	8 laporan	8 laporan	8 laporan	8 laporan	100%	8 laporan	8 laporan	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan pelayanannya, Perangkat Daerah mengampu 2 Indikator. Dari 2 indikator tersebut, 2 berstatus tercapai dan 0 indikator berstatus tidak tercapai. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah :

1. Merencanakan target kinerja;
2. Menyelaraskan hal-hal yang akan dikerjakan dengan target kinerja;
3. Menyelaraskan apa yang dianggarkan dengan apa yang akan dikerjakan;
4. Mengerjakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja;
5. Melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya.

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK LPPD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2024	2025	2026	2027	2024	2026	2024	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai SAKIP	-	-	BB (71,20)	BB (71,25)	BB (72,20)	BB (72,20)	BB (72,10)	BB (72,20)	BB (72,10)	BB (72,20)	tercapai
2	Nilai IKM	-	-	84,35	84,36	86,30	86,30	86,50	86,30	86,69	84,36	Tercapai

*) Kolom 3 diisi berdasarkan IKK outcome dalam lampiran Permendagri 18/202

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan urusan pemerintahan dalam 1 urusan, yaitu Pemerintah Fungsi Penunjang Kewilayahan. Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPD Tahun 2025-2029, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk tahun 2026 mencakup 1 urusan tersebut. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah diantaranya adalah:

1. Belum seluruh desa terlayani oleh kecamatan karena keterbatasan SDM;
2. Rendahnya Kemampuan aparat desa dan belum tertib administrasi pemerintahan desa;
3. Rendahnya Sarana untuk Fasilitasi Pendampingan desa yang belum tertib administrasi;
4. Keterbatasan Tenaga atau SDM yang menjadi pendamping desa , sehingga masih adanya desa yang belum terdampingi;
5. Belum semua masyarakat terlayani dengan cepat karena keterbatasan pegawai;
6. Rendahnya pelayanan publik di kecamatan;
7. Rendahnya pelayanan non perizinan dan perizinan non usaha;
8. Masih adanya KTP, KK, REKOMENDASI, SKCK, MUTASI, LEGALISASI, ANDON NIKAH yang belum terbit yang di sebabkan oleh kurang cepat di proses;
9. Masih adanya ijin Hajatan dan Ijin Keramaian yang belum di terbitkan.

Permasalahan tersebut, jika tidak diselesaikan dapat menjadi *constraint* dalam pencapaian visi dan misi Bupati maupun

capaian indikator lainnya. Beberapa dampak dari adanya permasalahan dan hambatan tersebut meliputi:

1. Kurang tercapainya suatu kegiatan sesuai indikator kinerja
2. Tidak tercapainya sasaran kerja
3. Tidak optimalnya hasil pekerjaan

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi, peningkatan kualitas birokrasi, dan meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan pengguna layanan akan meningkatkan kebutuhan akan adanya penyediaan produk layanan yang semakin baik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi-inovasi dalam menunjang peningkatan pelayanan publik secara kontinyu. Beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, yaitu:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi sehingga pelayanan kepada Masyarakat belum Optimal
2. Fasilitas yang belum terpenuhi diantaranya anggaran yang mendukung suatu kegiatan
3. Regulasi yang jelas sebagai dasar atau payung hukum sehingga suatu kegiatan dapat di laksanakan.
4. Kebijakan – kebijakan yang bersifat mendesak yang mengakibatkan peralihan anggaran ,sehingga rencana kerja tidak dapat tercapai sesuai ketentuan.

Berdasarkan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan tersebut, dapat diinventarisasi beberapa isu strategis. Inventarisasi isu-isu strategis tahun 2026 didapatkan dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal Kabupaten Banjarnegara sampai dengan tahun 2024. Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan pembangunan. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2026, sebagai berikut:

1. Masih lemahnya pemahaman aparatur terhadap tupoksi dan koordinasi antar seksi dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
2. Masih Terbatasnya kualitas dan kuantitas pegawai di kecamatan.
3. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana baik secara kualitas maupun kuantitas.
4. Belum optimalnya kemampuan SDM perangkat desa dalam penyelenggaraan tertib administrasi desa.
5. Belum optimalnya kesadaran aparatur pemerintah desa dalam memenuhi kewajiban terkait pelunasan PBB.
6. Belum optimalnya kemampuan perangkat desa dalam penatausahaan keuangan desa terkait dengan implementasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.
7. Belum optimalnya kesadaran aparatur pemerintahan desa dalam melakukan implementasi (tidak sesuai dengan juknis)

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam RPD Tahun 2025-2029, prioritas arah kebijakan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2026 meliputi:

1. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan
2. Mengkoordinasikan pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
3. Mengkoordinasikan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daera

Tabel 2.3
Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 Kabupaten Banjarnegara

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Purwareja Klampok

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	**KECAMATAN**				**2.317.861.760**	**KECAMATAN**				**2.317.861.760**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Kec. Purwareja Klampok**	**Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**100%**	**2.175.971.760**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Kec. Purwareja Klampok**	**Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**100%**	**2.175.971.760**	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	**Kec. Purwareja Klampok**	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**100%**	**3.000.000**	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**Kec. Purwareja Klampok**	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**100%**	**3.000.000**	
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kec. Purwareja Klampok	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	1.500.000	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kec. Purwareja Klampok	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	1.500.000	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Purwareja Klampok	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 dokumen	1.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Purwareja Klampok	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 dokumen	1.500.000	
7.01.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kec. Purwareja Klampok	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	**1.820.868.412**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**1.820.868.412**	
7.01.01.2.02.01	Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Purwareja Klampok	Jumlah ASN yang terbayar gajinya	16 ASN	1.802.868.412	Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Purwareja Klampok	Jumlah ASN yang terbayar gajinya	18 ASN	1.802.868.412	

7.01.01.2.02.03	Sub. Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Purwareja Klampok	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPDumum	12 dokumen	17.580.000	Sub. Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Purwareja Klampok	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPDumum	12 dokumen	17.580.000	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Kec. Purwareja Klampok	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 laporan	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	12 laporan	1.000.000	
7.01.01.2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kec. Purwareja Klampok**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang**	**100%**	**148.273.460**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kec. Purwareja Klampok**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang**	**100%**	**148.273.460**	

			terlaksana					**terlaksana**			
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Purwareja Klampok	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	3.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Purwareja Klampok	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	3.000.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Purwareja Klampok	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 paket	6.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Purwareja Klampok	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 paket	6.000.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Purwareja Klampok	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	5 paket	139.273.460	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Purwareja Klampok	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	5 paket	139.273.460	
7.01.2.07	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kec. Purwareja Klampok**	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**	**100%**	**30.835.000**	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kec. Purwareja Klampok**	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**	**100%**	**30.835.000**	

			Daerah					**Daerah**			
7.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Kec. Purwareja Klampok	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 unit	10.500.000	Pengadaan Mebel	Kec. Purwareja Klampok	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 unit	10.500.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Purwareja Klampok	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	9.5000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Purwareja Klampok	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	9.5000.000	
7.01.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kec. Purwareja Klampok	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	-	-	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kec. Purwareja Klampok	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	-	-	
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Purwareja Klampok	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	0	Pengadaan Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Purwareja Klampok	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	0	

7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Purwareja Klampok	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 unit	10.835.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Purwareja Klampok	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 unit	10.835.000	
7.01.01.2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kec. Purwareja Klampok**	**Terlaksanaanya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah**	**100%**	**77.581.200**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kec. Purwareja Klampok**	**Terlaksanaanya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah**	**100%**	**77.581.200**	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Purwareja Klampok	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	15.600.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Purwareja Klampok	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	15.600.000	

7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Purwareja Klampok	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	61.981.200	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Purwareja Klampok	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	61.981.200	
7.01.01.2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kec. Purwareja Klampok**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**95.413.638**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kec. Purwareja Klampok**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**95.413.638**	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Purwareja Klampok	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 unit	25.554.700	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Purwareja Klampok	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	25.554.700	

7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Purwareja Klampok	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit	49.819.588	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Purwareja Klampok	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit	49.819.588	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Purwareja Klampok	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 paket	20.039.400	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Purwareja Klampok	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 paket	20.039.400	
7.01.02	**Program Penyelenggara Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Kec. Purwareja Klampok**	**Persentase terlaksananya program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**100%**	**110.690.000**	**Program Penyelenggara Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Kec. Purwareja Klampok**	**Persentase terlaksananya program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**100%**	**110.690.000**	
7.01.02.2.04	**Kegiatan Pelaksana Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Kec. Purwareja Klampok**	**Terlaksanannya Pelaksanaan**	**100%**	**110.690.000**	**Kegiatan Pelaksana Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Kec. Purwareja Klampok**	**Terlaksanannya Pelaksanaan**	**100%**	**110.690.000**	

			Urusan Pemerintahan Yang di Limpahkan Kepada Camat					**Urusan Pemerintahan Yang di Limpahkan Kepada Camat**			
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Purwareja Klampok	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	1 laporan	3.600.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Purwareja Klampok	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	1 laporan	3.600.000	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan perijinan non usaha	Kec. Purwareja Klampok	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	1.000 dokumen	0	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan perijinan non usaha	Kec. Purwareja Klampok	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	1.000 dokumen	0	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Purwareja Klampok	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 laporan	105.590.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Purwareja Klampok	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 laporan	105.590.000	

	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	**Kec. Purwareja Klampok**	**Prosentase terlaksana Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**100%**	**3.700.000**	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Kec. Purwareja Klampok**	**terlaksana Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**100%**	**3.700.000**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Kec. Purwareja Klampok**	**Prosentase terlaksana Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**100%**	**3,7000.000**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kec. Purwareja Klampok**	**terlaksana Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**100%**	**3,7000.000**	
	Penigkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Kec. Purwareja Klampok	Jumlah Dokumen	10 Lembaga Masyarakat	3.700.000	Penigkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Kec. Purwareja Klampok	Jumlah Dokumen	10 Lembaga Masyarakat	3.700.000	
7.01.05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Kec. Purwareja Klampok**	**Persentase terlaksananya program penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100%**	**14.6000.000**	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Kec. Purwareja Klampok**	**Persentase terlaksananya program penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100%**	**14.6000.000**	
7.01.05.2.01	**Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kec. Purwareja Klampok**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintaha**	**100%**	**14.600.000**	**Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kec. Purwareja Klampok**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintaha**	**100%**	**14.600.000**	

			n Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					**n Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**			
7.01.05.2.01.08	Sub. Kegiatan Pelaksanaan Tugas ForumKoordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Purwareja Klampok	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 dokumen	14.600.000	Sub. Kegiatan Pelaksanaan Tugas ForumKoordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Purwareja Klampok	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 dokumen	14.600.000	
7.01.06	**Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kec. Purwareja Klampok**	**Persentase terlaksananya program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**100%**	**12.900.000**	**Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kec. Purwareja Klampok**	**Persentase terlaksananya program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**100%**	**12.900.000**	
7.01.06.2.01	**Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kec. Purwareja Klampok**	**Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	**12.900.000**	**Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kec. Purwareja Klampok**	**Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	**12.900.000**	

7.01.06.2.01.01	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Kec. Purwareja Klampok	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	48 dokumen	0	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Kec. Purwareja Klampok	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4 dokumen	0	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Kec. Purwareja Klampok	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 dokumen	1.500.000	Fasilitasi administrasi pemerintahan desa	Kec. Purwareja Klampok	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 dokumen	1.500.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Kec. Purwareja Klampok	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8 dokumen	0	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Kec. Purwareja Klampok	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 dokumen	0	

7.01.06.2.01.04	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec. Purwareja Klampok	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka pemilihan kepala desa	1 dokumen	0	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec. Purwareja Klampok	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka pemilihan kepala desa	1 dokumen	0	
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Kec. Purwareja Klampok	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	8 dokumen	0	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Kec. Purwareja Klampok	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 dokumen	0	
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan keteriban umum	Kec. Purwareja Klampok	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8 dokumen	4.800.000	Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan keteriban umum	Kec. Purwareja Klampok	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8 dokumen	4.800.000	
7.01.06.2.01.16	Fasilitasi penyusunan program pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Kec. Purwareja Klampok	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan	8 dokumen	6.600.000	Fasilitasi penyusunan program pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Kec. Purwareja Klampok	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan	8 dokumen	6.600.000	

			Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa					Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa			

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan musrenbang kecamatan dan forum konsultasi publik telah disampaikan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui aplikasi SIPD. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2026 Kabupaten Banjarnegara

No	**Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi (Desa/Kelurahan)**	**Volume**	**Pagu**	**Perangkat Daerah Tujuan**
	NIHIL				

2.6. Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan hasil reses anggota DPRD, melalui aplikasi SIPD telah disampaikan usulan program dan kegiatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2026 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Validasi
	NIHIL				

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

1. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, dengan program prioritas sebagai berikut :
   a. Perlindungan sosial dan penguatan tata kelola kependudukan;
   b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
   c. Peningkatan produktivitas dan daya saing.
2. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, dengan program prioritas sebagai berikut :
   a. Revolusi mental dan pembinaan ideologi pancasila;
   b. Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
   c. Memperkuat moderasi beragama;
   d. Meningkatkan budaya literasi, inovasi dankreativitas.
3. Memperkuat stabilitas polhukanham dan transformasi pelayanan publik, dengan program prioritas sebagai berikut :
   a. Konsolidasi demokrasi;
   b. Penegakan hukum nasional;
   c. Reformasi birokrasi dan tata kelola;dan
   d. Menjaga stabilitas keamanan nasional

Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahun 2026 dijabarkan ke dalam semua urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten Banjarnegara, untuk kecamatan adalah :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 6 Kegiatan dan 17 sub kegiatan.

1. Kegiatan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 (Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capainan Kinerja dan Iktisar Realisasi)
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah 3 Sub Kegiatan (Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/verifikasi keuangan SKPD, Koordinasi dan penyusunan Laporan Keungan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD)
3. Kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah 3 Sub Kegiatan (Penyediaan Kompenen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor, Penyediaan Bahan Logisti Kantor)
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3 Sub Kegiatan (Pengadaan Mebel - Pengadaan Mesin Alat Lainnya - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya)
5. Kegiatan Penyedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2 Sub Kegiatan (Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Listrik - Penyediaan Jasa Umum Kantor)
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3 Sub Kegiatan (Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya)

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 2 sub kegiatan (Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perijinan - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan)

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdiri dari 1 Kegiatan Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa 1 Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah. Dengan 1 sub kegiatan yaitu Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terdiri dari 1 Kegiatan yang diarahkan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Dengan Sub Kegiatan 7 yaitu ;

1. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
2. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
3. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
4. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
5. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

6. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
7. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan dokumen RPD Kabupaten Banjarnegara 2025-2029, Visi yang diusung adalah Kabupaten Banjarnegara Maju Berbasis Pertanan dan Misi dalam RPJPD Tahun 2005-2029 yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam pencapaian visi misi Kepala Dearah sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Purwareja Klampok sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara dari lima misi tersebut adalah **Misi Ketiga** yaitu : **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab** yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi dan kesadaran politik masyarakat terutama menyangkut hak dan kewajiban warga negara serta institusionalisasi partai politik dalam kegiatan politik, meningkatnya profesionalisme aparatur daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, beretika, dan bertanggung jawab, serta mampu mendukung pembangunan daerah yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat, meningkatnya perkembangan sistem dan iklim demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik yang dapat diukur dengan adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum, birokrasi yang profesional dan netral, dan masyarakat yang mandiri, Meningkatnya kemampuan dan kemandirian daerah dalam mendukung pembangunan daerah, menguatnya kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan

daerah, serta meningkatnya hubungan kerja sama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan aparatur pemerintah yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2025-2029 dan RENSTRA Kecamatan Purwareja Klampok Tahun 2025-2029. Kecamatan Purwareja Klampok menetapkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Purwareja Klampok dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2025-2029.

Reformasi pada sektor aparatur daerah pada hakekatnya merupakan tindakan atau kegiatan pembaharuan secara konsepsional, sistematis, dan berkelanjutan. Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi **visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program** yang ingin diwujudkan.

3.2. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Terlampir

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program pada perangkat daerah merupakan program prioritas dalam Renstra 2025-2029. Rencana program prioritas beserta indicator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPD selanjutnya dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Pemilihan untuk masing-masing program/ kegiatan
Sebagai berikut :

Pertama Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dengan dengan 6 Kegiatan: antara lain 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah 2 (dua) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capainan Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja 2)Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan tiga sub Kegiatan antara lain Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD; 3)Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan 3 Sub Kegiatan 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 2 Sub Kegiatan 5)Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan 4 Sub Kegiatan 6)Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 3 Sub Kegiatan. Kedua Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan 1 (satu) Kegiatan yaitu Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dengan 2 Sub Kegiatan. Ketiga Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan satu Kegiatan yaitu Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan 1 Sub Kegiatan. Keempat Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan 1 Kegiatan yaitu Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan 2 Sub Kegiatan.

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Renja Perangkat Daerah selanjutnya menjadi platform operasional bagi Perangkat Daerah dalam menjalankan programnya dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah tahun 2025-2029. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026 dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disepakati.
2. Kerangka pendanaan dalam Renja Perangkat Daerah masih bersifat sementara, sehingga masih dimungkinkan terjadi perubahan pagu yang disebabkan oleh pengurangan, penambahan, dan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan maupun antar sub kegiatan dalam kerangka penyusunan anggaran secara terpadu dan berbasis kinerja.

3. Renja Perangkat Daerah menjadi acuan bagi Kepala Perangkat Daerah dan segenap jajarannya serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, serta menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Ditetapkan di : Banjarnegara
pada tanggal : September 2025
CAMAT PURWAREJA KLAMPOK

Drs. SUSANTO
Pembina Tk.I
NIP. 19731219 199302 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rakhmat dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026.

Renja Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahaan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 terdiri dari pendahuluan, hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, tujuan dan sasaran Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara, dan rencana kerja dan pendanaan serta penutup. Penyusunan Renja tersebut berpedoman pada RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026, Renstra Kecamatan Rakit Tahun 2023-2026, dan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026.

Kami menyadari dalam penyusunan Renja ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan rancangan rencana kerja dimaksud.

Banjarnegara, Agustus 2025

CAMAT RAKIT

KABUPATEN BANJARNEGARA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL 1

KATA PENGANTAR 2

DAFTAR ISI 3

DAFTAR TABEL 4

BAB I PENDAHULUAN 5

1.1. Latar Belakang 5

1.2. Landasan Hukum 6

1.3. Maksud dan Tujuan 10

1.4. Sistematatika Penulisan 10

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN RAKIT TAHUN LALU 12

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Rakit Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Rakit 12

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Rakit 28

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Rakit..... 31

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 33

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. 51

2.6. Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD..... 53

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 54

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 54

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Rakit 55

3.3. Program dan Kegiatan 58

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 80

BAB V PENUTUP 83

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Rakit dan Pencapaian Renstra Kecamatan Rakit s.d. Tahun 2023 Kabupaten Banjarnegara	18
Tabel 2.2.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara	29
Tabel 2.4.	Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 Kabupaten Banjarnegara.....	26
Tabel 2.5.	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Banjarnegara	51
Tabel 2.6.	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Banjarnegara	51
Tabel 3.3.	Program dan Kegiatan.....	58

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan yang diatur melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan pembentukan tim penyusun, penelaahan rancangan awal RKPD, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, hingga pada penyempurnaan berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang RKPD. Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, penyusunan Renja Perangkat Daerah juga mengacu pada Renja Kementerian/Lembaga terkait, serta Renja Perangkat Daerah Provinsi terkait. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan

tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2. Landasan Hukum

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
26. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 14);
27. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 15);

28. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 22 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun dengan maksud untuk:

a. Menjabarkan Renstra Kecamatan Rakit Tahun 2025 - 2029 ke dalam rencana program kegiatan prioritas Tahun 2026 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Renja K/L Tahun 2026 dan Renja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;
b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerapan anggaran berbasis kinerja.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

a. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA-DPA dalam Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2026, yang dalam penyusunannya didahului dengan menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026;
b. Sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Tahun 2026;
c. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun berdasarkan sistematika yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah.

BAB 2 : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dan atau pokok-pokok DPRD.

BAB 3 : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan tahun 2026.

BAB 4 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran RKPD.

BAB 5 : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah meliputi urusan Pemerintahan fungsi Penunjang Kewilayahan.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 terdiri dari 4 program, 9 kegiatan, dan 19 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar **Rp. 1.931.898.736,-,** dengan fokus utama pada mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good government) dalam kehidupan berpolitik yang demokratis dan bertanggung jawab Program/kegiatan/sub kegiatan tersebut dilaksanakan tujuan daerah (Berdasarkan Berita Acara reviu penyelarasan perencanaan tanggal 2 Januari 2024) yang meliputi:

1. **Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah**
2. **Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik.**

Belum optimalnya etos kerja, budaya kerja dan disiplin kerja pegawai;

a. Masih kurangnya dukungan data informasi dari masyarakat, peraturan yang valid, akurat dan terintegrasi sebagai pedoman dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat;
b. Masih rendahnya keselarasan dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang ada;
c. Belum optimalnya pemahaman masyarakat maupun aparatur desa tentang hakekat pembangunan nasional;
d. Masih terbatasnya kapasitas aparatur desa dalam melaksanakan tertib administrasi pemerintahan desa;
e. Masih kurangnya keseriusan masyarakat dan petugas pemungut dalam pelunasan PBB lebih awal;

Dari 4 program, 9 kegiatan, dan 19 sub kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah tersebut, program/kegiatan/sub kegiatan yang disetujui untuk dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024 terdiri dari 4 program, 9 kegiatan, dan 19 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 1.931.898.736 ,-

Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024, terjadi beberapa perubahan yang meliputi penambahan atau pengurangan pagu, penghapusan, penambahan atau pengurangan program/kegiatan/sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Perubahan tersebut mengubah rincian dalam Renja Perangkat Daerah menjadi 4 program, 9 kegiatan, dan 1 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 1.899.888.058,- Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 program/kegiatan/sub kegiatan tidak berkurang akan tetapi ada beberapa kegiatan yang anggaranya berkurang dan bertambah seperti sub kegiatan penyediaan bahan logistic kantor dari anggaran sebesar Rp. 61.384.100 bertambah menjadi sebesar Rp. 63.884.100 dan sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN dari anggaran sebesar Rp. 1.678.392.136 berkurang menjadi sebesar Rp. 1.623.821.458 pengurangan anggran langsung dari dinas yang mengampu keuangan daerah.

Pada Renja Kecamatan tahun 2024, Program/Kegiatan/Subkegaitan yang bertambah/berkurang, meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
    a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
        1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
        2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
    b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
        1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1. Pengadaan Mebel
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

a. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
    1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
    2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
    3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
    a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
        1. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
    a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
        1. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
        2. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
        3. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
        4. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
        5. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
        6 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Dinamika yang terjadi selama tahun 2024 turut mempengaruhi keberhasilan pencapaian Renja Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2024, tercatat adanya hasil yang baik yang dikarenakan adanya pencapaian maupun pelampauan target maupun yang tidak memenuhi target. Nilai Sakip Kecamatan dengan target kinerja 68.00 terealisasi 67,55 dengan Tingkat capaian kinerja 99,85%. Indikator Survey Kepuasan Masyarakat dengan target

kinerja 83,9 terealisasi 83,16 Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya komitmen dan integritas yang tinggi dari para aparatur pemerintah kecamatan.

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada, semua program/kegiatan/sub kegiatan sesuai target.

b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/ kegiatan telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan. Program kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Faktor - faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Perencanaan dan penyelarasan target kinerja dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang baik;
2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya.
3. Komitmen pimpinan dan pegawai untuk melaksnakan tugas sesuai dengan tupoksinya masing -masing yang didukung dengan anggran yang cukup memadai.
4. Mengerjakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja.
5. Melaksanakan evaluasi internal secara berkala.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, pada dasarnya semua program dan kegiatan pada tahun 2024 sudah berjalan sesuai dengan ketentuan, akan tetapi masih banyak yang harus di perhatikan dan ditingkatkan kinerjanya agar sesuai dengan indikator kinerja. Pada tahun perencanaan selanjutnya, perlu diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk pencapaian target kinerja ,diantaranya:

1. Koordinasi antar Kasi dan Sub Bagian

2. Prioritas Perencanaan yang tepat sasaran, agar kegiatan bisa berjalan sesuai perencanaan

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024 disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
s.d. Tahun 2024* Kabupaten Banjarnegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN KEWILAYAHAN									
	Tujuan : Meningkatnyakinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	**Nilai SAKIP**	B/68	B/63	B/68	B/67,55	99,33	B/69	67,90	98,40
	Sasaran : Meningkatnya efektivitas dan transparasi layanan	**Nilai Sakip Kecamatan**								

	publik untuk urusan kewilayahan									
A	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA**	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana**	100	100	100	100	100	100	100	100
1	**Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Kecamatan Rakit)[i]**	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	11 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	100	11 dokumen	11 dokumen	100
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Kecamatan Rakit)	ah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	100	11 dokumen	11 dokumen	100
	Fasilitasi pengelola keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	-	100

		dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa								
	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Jumlah dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan daerah dengan Pembangunan Desa	11 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	100	11 dokumen	11 dokumen	100
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kecamatan Rakit)	Jumlah dokuman fasilitas penyelenggaraa n ketenteraman dan ketertiban umum	11 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	100	11 dokumen	11 dokumen	100
	Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	11 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	100	11 dokumen	11 dokumen	100
	Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Jumlah laporan hasil koordinasi pendampingan desa di Wilayahnya	11 Laporan	11 Laporan	11 laporan	11 laporan	100	11 laporan	11 laporan	100

B	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana**	100	100	100	100	100	100	100	100
1	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah**	100	100	100	100	100	100	100	100
	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	6 dokumen	6 dokumen	100
	Sasaran Meningkatnya efektifitas dan transparasi layanan publik untuk urusan kewilayahan	**Survey kepuasan masyarakat**								
	Tujuan Meningkatnya efektivitas dan transparasi layanan publik	**Tujuan Meningkatnya efektivitas dan transparasi layanan publik**	83,09	82,45	83,09	83,16	100	84,95	83,27	100
C	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN**	**Persentase penunjang**	100	100	100	100	100	100	100	100

	PEMEINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	**urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota yang terlaksana**								
1.	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun**	100	100	100	100	100	100	100	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Kecamatan Rakit)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	100	10 dokumen	10 dokumen	100
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 laporan	6 laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
2.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Presentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	100	100	100	100	100	100	100	100

	Penyedia gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	12 ASN	15 ASN	12 ASN	12 ASN	100	13 ASN	13 ASN	100
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 laporan	7 Orang	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 dokumen	100
3.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase Administrasi Umum perangkat daerah yang terlaksana**	100	100	100	100	100	100	100	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	100	2 paket	2 paket	100
	Penyedia bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik	8 paket	8 paket	8 paket	8 paket	100	8 paket	8 paket	100

		kantor yang disediakan								
4.	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah yang tersedia**	100	100	100	100	100	100	100	100
	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	**Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	100	100	100	100	100	100	100	100
	Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	2 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
	Penyedia jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralayanan	12 laporan	12 bulan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100

		umum kantor yang disediakan								
6.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaanBarang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100	100	100	100	100	100	100	100
	Penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perizinanya	6 unit	8 unit	8 unit	6 unit	100	6 unit	6 unit	100
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	100	4 Unit	4 unit	100
D	**PROGRAM PENYELENGGARAAN**	**Persentase penyelenggaraan**	100	100	100	100	100	100	100	100

	PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**pemerintahan dan peleyanan public**								
1.	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	100	100	100	100	100	100	100	100
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahaan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah laporan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	3.448 laporan	3.448 laporan	3.448 laporan	3.500 laporan	100	4.448 laporan	4.448 laporan	100
	Sub Kegiatan Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	39.800 sppt	39.773 sppt	39.800 sppt	39.800 sppt	100	39.800 sppt	39.800 sppt	100
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	**Presentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	100	100	100	100	100	100	100	100
	Koordinasi/sinergi dengan Perangkat	Jumlah dokumen	-	1 dokumen	-	-	100	-	-	-

	Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum								

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Rakit

Dalam pelaksanaan pelayanannya, Perangkat Daerah mengampu 2 Indikator Kinerja Utama. Dari 2 indikator Kinerja Utama tersebut berstatus tercapai. Faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Merencanakan target kinerja;
2. Menyelaraskan dokumen perencanaan sehingga data yang disajikan merupakan data yang akuntabel;
3. Koordinasi internal perangkat daerah dengan maksimal sehingga kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan perencanaan yang ada.
4. Koordinasi Pemerintah Kecamatan dan Desa yang telah berjalan dengan baik;
5. Kekompakan Tim Pemungut Pajak dalam pelaksanaan tugas;
6. Komitmen dari para aparatur kecamatan untuk memberikan pelayanan yang prima sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

Dalam rangka pencapaian target kinerja tahun berikutnya, beberapa hal yang harus diupayakan meliputi:

1. Mengevaluasi, menelaah, menyelaraskan dokumen perencanaan agar tercapai target kinerja;
2. Mengevaluasi dan memperbaiki komunikasi serta koordinasi internal perangkat daerah sehingga kegiatan dapat berjalan selaras dengan perencanaan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah baik.

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK LPPD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Nilai SAKIP	-	-	B/63,00	B/68,00	B/69,00	B/67,90	B/62,70	B/67,55	B/67,90	B/68,00	
	Nilai SKM	-	-	82,45	83,90	84,95	-	82,44	83,16	83,27	-	

Catatan :

Pada target Nilai Sakip Tahun 2024–2025 mengacu pada dokumen penyelarasan Renstra Tahun 2023-2026 sedangkan pada periode Tahun 2025-2029 target Nilai Sakip untuk Tahun 2026 menurun hal ini mengacu pada hasil pencapaian Nilai Sakip pada Tahun 2025

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Rakit

Kecamatan Rakit dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan urusan pemerintahan dalam 1 urusan, yaitu Urusan Kewilayahan. Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Banjarnegara 2025-2029,. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk tahun 2026 mencakup1 urusan tersebut. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Rakit diantaranya adalah:

1. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung yang memadai
2. Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
3. Masih kurangnya peraturan yang valid, akurat dan terintegrasi sebagai pedoman dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat;
4. Masih rendahnya pemahaman masyarakat maupun aparatur desa tentang hakekat pembangunan nasional;
5. Masih rendahnya kapasitas aparatur desa dalam melaksanakan tertib administrasi pemerintahan desa;
6. Masih kurangnya keseriusan masyarakat dan petugas pemungut dalam pelunasan PBB lebih awal;
7. Angka stunting sudah menurun dibawah rata – rata Kabupaten
8. Akses layanan sanitasi yang sudah memadai
9. Masih adanya salah satu desa yang masuk dalam kemiskinan ekstrim yaitu Desa Bandingan

Permasalahan tersebut, jika tidak diselesaikan dapat menjadi *constraint* dalam pencapaian visi dan misi Bupati maupun capaian indikator lainnya. Beberapa dampak dari adanya permasalahan dan hambatan tersebut meliputi:

1. Kurang tercapainya suatu kegiatan sesuai indikator kinerja;

2. Tidak tercapainya sasaran kerja;
3. Belum optimalnya hasil pekerjaan, khususnya dalam pencapaian sasaran pelayanan terhadap masyarakat.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi, peningkatan kualitas birokrasi, dan meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan pengguna layanan akan meningkatkan kebutuhan akan adanya penyediaan produk layanan yang semakin baik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi-inovasi dalam menunjang peningkatan pelayanan publik secara kontinyu. Beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Rakit , yaitu:

1. Tuntutan masyarakat semakin beragam untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas.
2. Masih adanya aparat pemerintahan dan kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipasif.
3. Mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta meningkatkan nilai survey kepuasan masyarakat dan meningkatkan pelayanan prima tentunya dengan ramah dan sopan.
4. Peningkatan peran dan fasilitasi kecamatan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pencapaian standar pelayanan minimal.
5. Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mempermudah upaya meningkatkan profesionalisme.
6. Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.
7. Adanya dukungan koordinasi lintas sektor di wilayah kecamatan yang mendukung tercapainya sinkronisasi dan integrasi kegiatan lingkup kecamatan antara lain kegiatan Konferensi dinas/rapat koordinasi Forkompinca, UPT/Instansi dan Kepala Desa secara rutin di tingkat Kecamatan.

Berdasarkan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan tersebut, dapat diinventarisasi beberapa isu strategis.

Inventarisasi isu-isu strategis tahun 2026 didapatkan dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal Kabupaten Banjarnegara sampai dengan tahun 2024. Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan pembangunan. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Rakit pada tahun 2024,sebagai berikut :

1. Masih belum optimalnya penerapan Sistem akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah.
2. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan dengan tepat waktu serta tidak adanya penyelewengan dari petugas pungut pajak yang tidak langsung menyetorkan pembayaran pajak dari masyarakat ke bank.
3. Masih terbatasnya kualitas dan kwantitas pegawai yang ada di Kecamatan Rakit sehingga pengoptimalan tugas dan fungsi aparatur pemerintah kurang bisa tercapai sehingga menyebabkan kelambanan birokrasi.
4. Kurang cepatnya penanganan permasalahan di desa.
5. Bangunan Gedung kantor yang sudah tua dan belum sesuai dengan standar Gedung untuk pelayanan publik, sehingga pelayanan publik belum maksimal.
6. Masih tingginya angka kemiskinan, ditandai dengan masih adanya 1 desa yang masuk dalam kategori Desa miskin ekstrem yaitu Desa Bandingan .
7. Kurang optimalnya pembinaan ke desa.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok Renstra 2025–2029. Dalam Renstra Tahun 2025-2029, prioritas arah kebijakan sesuai tugas dan fungsi kecamatan Rakit pada tahun 2026 meliputi:

1. Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP.

2. Optimalisasi pelaksanaan pelayanan publik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Optimalisasi fungsi koordinasi kecamatan dengan perangkat desa, OPD, dan stakeholder lain.

Pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026, anggaran belanja yang dialokasikan untuk Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara diusulkan sebesar Rp 2.160.955.676,- yang terbagi dalam 4 program 10 kegiatan dan 27 sub kegiatan. Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang oleh Pemerintah Kaupaten Banjarnegara dilaksanakan mulai Tahun 2026. Secara rinci analisis kebutuhan anggaran belanja program kegiatan dan sub kegiatan terhadap Rancangan Awal RKPD tersaji pada Tabel 2.4.

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 Kabupaten Banjarnegara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kecamatan Rakit				**2.160.955.676**					**2.134.455.676**	
I	**Tujuan : Meningkatnya aksesibilitas layanan pemerintah dalam urusan kewilayahan di Kecamatan Rakit**	**Kab. Banjarnegara**	**Indeks Pelayanan Publik**	**2,72**	**2.160.955.676**	**Tujuan : Meningkatnya aksesibilitas layanan pemerintah dalam urusan kewilayahan di Kecamatan Rakit**	**Kab. Banjarnegara**	**Indeks Pelayanan Publik**	**2,72**	**2.134.455.676**	
I	**Sasaran Strategis : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat**	**Kec. Rakit**	**Nilai SAKIP Kecamatan Rakit**	**B (67,90)**	**2.098.955.676**	**Sasaran Strategis : Meningkatnya akuntabilitas**	**Kec. Rakit**	**Nilai SAKIP Kecamatan Rakit**	**B (67,90)**	**2.073.728.976**	

	daerah urusan kewilayahan					**kinerja perangkat daerah urusan kewilayahan**					
C.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMEINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kec. Rakit**	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang Terlaksana	100 %	2.003.771.576	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMEINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kec. Rakit**	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota yang Terlaksana	100%	1.978.544.876	
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec.Rakit	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat daerah yang disusun	100 %	7.000.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kec. Rakit**	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat daerah yang disusun	100%	6.999.800	
a.	Penyusunan dokumen perencanaa perangkat daerah	Kec.Rakit	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	10 Dokumen	4.000.000	Penyusunan dokumen perencanaa perangkat daerah	Kec.Rakit	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	10 Dokumen	3.999.800	

b.	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 Laporan	3.000.000	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kec.Rakit	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 Laporan	3.000.000	
2.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kec. Rakit	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	100	1.733.310.776	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kec. Rakit	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	100	1.733.311.688	
a.	Penyedia gaji dan tunjangan ASN	Kec.Rakit	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	13 ASN	1.709.250.776	Penyedia gaji dan tunjangan ASN	Kec.Rakit	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	13 ASN	1.733.311.688	

b.	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kec.Rakit	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 dokumen	22.560.000	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kec.Rakit	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 dokumen	22.560.000	
c.	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	Kec.Rakit	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	12 laporan	1.500.000	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	Kec.Rakit	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	12 laporan	1.500.000	
3.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kec.Rakit	**Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana**	100	95.600.000	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kec.Rakit	**Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana**	100	95.710.917	
a.	Penyediaan Peralatan dan	Kec.Rakit	Jumlah paket peralatan	2 Paket	6.000.000	Penyediaan Peralatan	Kec.Rakit	Jumlah paket peralatan	2 Paket	6.007.601	

	Perlengkapan Kantor		dan perlengkapan kantor yang disediakan			dan Perlengkapan Kantor		dan perlengkapan kantor yang disediakan			
b.	Penyedia Bahan Logistik Kantor	Kec.Rakit	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	8 Paket	86.600.000	Penyedia bahan logistik kantor	Kec.Rakit	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	8 Paket	86.653.316	
4.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kec.Rakit	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100	28.500.000	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kec.Rakit	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100	3.200.000	
a.	Pengadaan Mebel	Kec.Rakit	Jumlah paket mebel yang disediakan	1 Paket	18.000.000	Pengadaan Mebel	Kec.Rakit	Jumlah paket mebel yang disediakan	-	-	
b.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec.Rakit	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1 Unit	10.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec.Rakit	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	4 Unit	-	
5.	**Penyedia Jasa Penunjang Urusan**	Kec.Rakit	**Persentase Peyediaan Jasa**	100	39.860.800	**Penyedia Jasa Penunjan**	Kec.Rakit	**Persentase Peyediaan Jasa**	100	39.682.468	

	Pemerintahan Daerah		**Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**g Urusan Pemerintahan Daerah**		**Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			
a.	Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec.Rakit	Jumlah laporan penyedia jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	7.000.000	Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec.Rakit	Jumlah laporan penyedia jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	7.000.000	
b.	Penyedia jasa pelayanan umum kantor	Kec.Rakit	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	32.860.800	Penyedia jasa pelayanan umum kantor	Kec.Rakit	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	32.682.468	
6.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kec.Rakit	**Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan daerah**	100	99.500.000	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kec.Rakit	**Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan daerah**	100	99.640.000	
a.	Penyedia jasa pemeliharaan,	Kec.Rakit	Jumlah kendaraan	6 Unit	45.000.000	Penyedia jasa	Kec.Rakit	Jumlah kendaraan	6 Unit	45.140.000	

	biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan		dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinanya			pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan		dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinanya			
b.	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kec.Rakit	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi.	1 Unit	50.000.000	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kec.Rakit	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi.	1 Unit	50.000.000	
c.	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Kec.Rakit	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	6 Unit	4.500.000	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Kec.Rakit	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	6 Unit	4.500.000	
D.	**PROGRAM PENYELENGGAR**	**Kec.Rakit**	**Persentase Penyelengga**	100	95.184.100	**PROGRAM**	**Kec.Rakit**	**Persentase Penyelengg**	100	95.184.100	

	AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		**raan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**			**PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**araan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**			
1.	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**Kec.Rakit**	**Persentase terselenggaranya koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum**	100	15.000.000	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**Kec.Rakit**	**Persentase terselenggaranya koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum**	100	15.000.000	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		Jumlah dokumen koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	1 Dokumen	15.000.000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana		Jumlah dokumen koordinasi/ sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana	1 Dokumen	15.000.000	

			Pelayanan Umum			dan Prasarana Pelayanan Umum		dan Prasarana Pelayanan Umum			
1.	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Kec. Rakit	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100	80.184.100	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Kec. Rakit	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100	80.184.100	
a.	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec.Rakit	Jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan	60 Dokumen	3.600.000	Terlaksanaya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec.Rakit	Jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan	60 Dokumen	3.600.000	
b.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Kec.Rakit	Jumlah laporan pelaksanaan non perizinan pada urusan Pemerintahan	12 laporan	3.600.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Kec.Rakit	Jumlah laporan pelaksanaan non perizinan pada urusan Pemerintahan	12 laporan	3.600.000	
c.	Pelaksanaan urusan	Kec.Rakit	Jumlah laporan	1 Laporan	72.984.100	Pelaksanaan urusan	Kec.Rakit	Jumlah laporan	1 Laporan	72.984.100	

	Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan		pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan			Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan		pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan			
2.	**Sasaran Strategis : Meningkatnya Efektivitas koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan desa/kelurahan**	**Kec Rakit**	**Indeks Desa di Wilayah Kecamatan Rakit**	**73,00**	**62.000.000**	**Sasaran Strategis : Meningkatnya Efektivitas koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan desa/kelurahan**	**Kec Rakit**	**Indeks Desa di Wilayah Kecamatan Rakit**	**73,00**	**60.726.700**	
I	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	kec Rakit	**Persentase lembaga desa/kelurahan di kecamatan yang terfasilitasi**	**100%**	25.000.000	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN**	kec Rakit	**Persentase lembaga desa/kelurahan di kecamatan yang terfasilitasi**	**100%**	25.000.000	

						KELURAHAN					
1.	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Kec Rakit	Persentase Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang terlaksana	100%	10.000.000	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Kec Rakit	Persentase Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang terlaksana	100%	10.000.000	
a.	Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan	Kec Rakit	Jumlah laporan Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	1 laporan	10.000.000	Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan	Kec Rakit	Jumlah laporan Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	1 laporan	10.000.000	
1.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	kec rakit	Persentase Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan	65%	15.000.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	kec rakit	Persentase Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan	65%	15.000.000	
a.	Peningkatan Kapasitas lembaga kemasyarakatan	kec Rakit	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	2 lembaga kemasyarakatan	15.000.000	Peningkatan Kapasitas lembaga kemasyarakatan	kec Rakit	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan	2 lembaga kemasyarakatan	15.000.000	

								kapasitasnya			
A.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Kec. Rakit	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	100	13.500.000	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Kec. Rakit	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	100	13.500.000	
1.	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Kec. Rakit	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100	13.500.000	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Kec. Rakit	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100	13.500.000	
a.	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan	Kec.Rakit	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan	6 Dokumen	13.500.000	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan	Kec.Rakit	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan 4 Kali	6 Dokumen	13.500.000	
B.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**		**Persentase fasilitasi, rekomendasi dan**	100	48.500.000	**PROGRAM PEMBINAAN DAN**		**Persentase fasilitasi, rekomendasi dan**	100	47.226.700	

	PEMERINTAHAN DESA		**koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana**			**PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana**			
1.	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Kec.Rakit	Persentase fasilitasi rekomendasi dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana	100	48.500.000	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Kec.Rakit	Persentase fasilitasi rekomendasi dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana	100	47.226.700	
a.	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Kecamatan Rakit)[ii]	Kec.Rakit	Jumlah dokumen yang di fasilitasi dalam rangka penyusunan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa	11 Dokumen	5.000.000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Kecamatan Rakit)	Kec.Rakit	Jumlah dokumen yang di fasilitasi dalam rangka penyusunan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa	11 Dokumen	5.175.000	

b.	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Kecamatan Rakit)	Kec.Rakit	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa	11 Dokumen	5.000.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Kecamatan Rakit)	Kec.Rakit	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa	11 Dokumen	5.070.000	
c.	Fasilitasi pengelola keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Kec.Rakit	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa	Dokumen	-	Fasilitasi pengelola keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Kec.rakit	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan penfdayagunaan asset desa	Dokumen	-	
d.	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilhan Kepala Desa	Kec.Rakit	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	-	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilhan Kepala Desa	Kec.Rakit	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	-	

e.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa	1 Dokumen	6.000.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec.Rakit	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa	11 Dokumen	5.246.800	
f.	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kecamatan Rakit)	Kec.Rakit	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	11 Dokumen	12.500.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kecamatan Rakit)	Kec.Rakit	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	11 Dokumen	12.480.000	
g.	Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Kec.Rakit	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	11 Dokumen	5.000.000	Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Kec.Rakit	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan	11 Dokumen	4.687.500	

								masyarakat desa			
h.	Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Kec.Rakit	Jumlah laporan hasil koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	11 Laporan	15.000.000	Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Kec.Rakit	Jumlah laporan hasil koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	11 Laporan	14.567.400	

Berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2026, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan yaitu:

1. Memprioritaskan kegiatan yang belum terlaksana di tahun 2024.
2. Memprioritaskan pelaksanaan kegiatan yang manfaatnya langsung dirasakan oleh Masyarakat.
3. Mempedomani prinsip efisiensi dengan memprioritaskan kegiatan yang menjadi kegiatan wajib dan kegiatan pokok.
4. Melanjutkan kegiatan yang sudah ada di tahun 2024

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan musrenbang kecamatan dan forum konsultasi publik telah disampaikan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui aplikasi SIPD. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2026 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1.	Peningkatan jalan dan jembatan	Desa Bandingan	Jalan rusak	4 km	Dinas Pekerjaan Umum
2.	Rehabilitasi jalan kabupaten	Desa Kincang	Jalan rusak	1200 m	Dinas Pekerjaan Umum
3.	Pembangunan pasar ikan desa	Desa Luwung – Tj.Anom	Jalan kabupaten rusak berat	2 km	Dinas Pekerjaan Umum
4.	Peningkatan jalan kabupaten Tapen – Tanjung Anom	Desa Luwung	Jalan rusak	2400x4 ,5 m	Dinas Pekerjaan Umum
5.	Pengaspalan ruas jalan Pingit - Situwangi	Desa Pingit	Jalan rusak	3000 m	Dinas Pekerjaan Umum

6.	Peningkatan jalan penghubung antar desa Lengkong – Tanjung Anom talud drainase dan aspal lapen/sheet	Desa Lengkong	Jalan rusak	500 m	Dinas Pekerjaan Umum
7.	Lampu jalan desa dan jalan provinsi	Desa Gelang	Banyak lampu penerang jalan yang mati dan masih kurang disepanjang jalan	1 paket	Dinas Perhubungan
8.	Pembangunan prasarana jalan di jalan kabupaten kota	Desa Adipasir	Belum ada trotoar dan saluran drainase	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum
9.	Pembangunan saluran drainase	Desa Rakit	Saluran drainase yang ada sudah rusak	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum
10.	Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Desa Badamita	Pembangunan sarana air bersih SAB	1 unit	DPKPLH
11.	Perbaikan jalan	Desa Situwangi	Jalan rusak	1 kegiatan	DPU
12.	Rehab aula gedung TK Pertiwi Desa Tj. Anom	Desa Tanjung Anom	Pembelajaran kurang nyaman	1 paket	DPU
13.	Pembangunan Turap/ Talud bronjong	Desa Badamita	Talud yang ada sudah rusak	1 kegiatan	DPU
14	Pembangunan saluran drainase	Desa Rakit	Air meluap		DPU
15	Pembangunan Turap/ Talud bronjong	Desa Adi Pasir	Resiko longsor		DPU
16	Pembangunan drainase jalan raya	Desa Gelang	Tidak adanya drainase saat air hujan naik ke jalan raya		DPU

17	Peningkatan jalan penghubung antar Desa Lengkong – Badamita talud dan lapen/sheet	Desa Lengkong	Resiko longsor	250 m	DPU
18	Pembangunan saluran irigasi pertanian	Desa Pingit	Adanya kebocoran air	300 m	Dians Pertanian
19	Peningkatan saluran irigasi	Desa Luwung	Mengurangi kebocoran air	600x0, 9x0,6	Dinas Pertanian
20	Jambanisasi	Desa Kincang	Jamban Sebagian belum terpenuhi	200 unit	Dinas Ke Sehatan
21	Pembangunan Turap/ Talud bronjong	Desa Bandingan	Jika hujan membahaya kan/ longsor	200 m	DPU
22	Sarpras Jalan	Desa Situwangi	Beresiko terjadinya kecelakaan	1 paket	DPU

2.6. Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan hasil reses anggota DPRD, melalui aplikasi SIPD telah disampaikan usulan program dan kegiatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2026 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Validasi
	NIHIL				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi, maka Kecamatan Rakit melaksanakan kebijakan daerah yang sinergis dengan kebijakan Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat. Kegiatan yang akan dilakukan oleh Kecamatan Rakit diharapkan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan di atasnya, mempunyai rasa keadilan, pemerataan dan diarahkan agar implementasinya akan dapat berdampak pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Rakit. Renja yang disusun perangkat daerah berpedoman pada RKPD dan RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029 dengan Visi "**Banjarnegara Maju dan Sejahtera**" yang akan diwujudkan melalui 5 (lima) Misi yang merupakan turunan dari pokok-pokok visi yang telah didentifikasi sebelumnya yaitu :

1. Meningkatkan Infrastruktur dan Pelayanan Publik
2. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal
3. Meningkatkan Kualitas dan Akses Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan Sosial.
4. Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.
5. Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Transparan.

Dalam mencapai Visi Kabupaten Banjarnegara, maka Kecamatan Rakit mempunyai peran dan fungsi menggerakan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah dalam menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan. Terutama dikaitkan dengan pelaksanaan pelimpahan kewenangan yang secara mutlak harus didukung oleh sumberdaya manusia aparatur yang mampu mengelola tugas-tugas pelayanan secara optimal, efektif dan efisien, serta mampu merumuskan kebijakan-kebijakan yang implementatif yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, yang pada muaranya mewujudkan Visi Kabupaten Banjarnegara.

Tujuan yang akan diwujudkan selama periode 2025-2029 adalah “Terwujudnya Banjarnegara maju dan sejahtera” yang diukur melalui indikator PDRB per kapita dan angka kemiskinan yang akan ditempuh melalui 4 sasaran strategis, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat
2. Meningkatnya perekonomian daerah yang berdaya saing dan berbasis potensi lokal secara berkelanjutan
3. Meningkatnya infrastruktur yang mendukung perekonomian dan kesejahteraan Masyarakat
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif

Adapun sasaran strategis yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam pencapaian visi misi Kepala Daerah sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Rakit sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara dari 4 (empat) sasaran strategis tersebut adalah Sasaran Strategis ke-4 yaitu :

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif dengan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi.

   Meningkatnya profesionalisme aparatur daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, beretika, dan bertanggung jawab, serta mampu mendukung pembangunan daerah yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Rakit

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan, sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Dengan kata lain tujuan dan sasaran merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Rumusan tujuan yang akan dicapai oleh Kecamatan

Rakit dalam mendukung RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut

Tujuan : Meningkatnya aksesibilitas layanan pemerintah dalam urusan kewilayahan di Kecamatan Rakit.

Sasaran Strategis yang akan dicapai oleh Kecamatan Rakit yaitu :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah urusan kewilayahan
2. Meningkatnya Efektivitas koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan desa/kelurahan

Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Rakit beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel sebagaimana berikut ini :

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				2026	2027	2028	2029	2030
I.	Meningkatnya aksesibilitas layanan pemerintah dalam urusan kewilayahan di Kecamatan Rakit		Indeks Pelayanan Publik	2,72	2,74	2,76	2,78	3.00
1.		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah urusan	Nila Nilai SAKIP Kecamatan Rakit	B (67,90)	B (68,00)	B (68,10)	B (68,20)	B (68,50)

		kewilayah an						
2		Meningkat nya Efektivitas koordinasi dan fasilitasi pemberda yaan desa/kelu rahan	Indeks Desa di Wilayah Kecamatan Rakit	73,00	73,35	73,65	73,95	74,25

3.2 Program dan Kegiatan

4 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2026

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Rakit

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Rakit

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		KECAMATAN RAKIT			**2.134.455.676,00**						**2.243.065.804,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**2.134.455.676,00**						**2.243.065.804,00**	
	7.01	**KECAMATAN**			**2.134.455.676,00**						**2.243.065.804,00**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.978.544.876,00**					**-**	**2.077.155.004,00**	

	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	6.999.803,00	Kab. Banjarnegara, Rakit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	-	8.000.000,00	KECAMATAN RAKIT
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Dokumen	3.999.800,00	Kab. Banjarnegara, Rakit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	14 Dokumen	4.500.000,00	KECAMATAN RAKIT
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										

			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	3.000.003,00	Kab. Banjarnegara, Rakit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	13 Laporan	3.500.000,00	KECAMATAN RAKIT
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.733.311.688,00	Kab. Banjarnegara, Rakit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	-	1.833.311.688,00	KECAMATAN RAKIT
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										

			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/bulan	1.709.251.688,00	Kab. Banjarnegara, Rakit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	13 Orang/bulan	1.809.251.688,00	KECAMATAN RAKIT
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	22.560.000,00	Kab. Banjarnegara, Rakit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	12 Dokumen	22.560.000,00	KECAMATAN RAKIT
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										

			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	1.500.000,00	Kab. Banjarnegara, Rakit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	16 Laporan	1.500.000,00	KECAMATAN RAKIT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	95.710.917,00	Kab. Banjarnegara, Rakit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	-	97.203.316,00	KECAMATAN RAKIT
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										

			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.050.000,00	Kab. Banjarnegara, Rakit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	1 Paket	3.050.000,00	KECAMATAN RAKIT
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	6.007.601,00	Kab. Banjarnegara, Rakit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	2 Paket	6.500.000,00	KECAMATAN RAKIT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										

			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	86.653.316,00	Kab. Banjarnegara, Rakit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	8 Paket	87.653.316,00	KECAMATAN RAKIT
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	3.200.000,00	Kab. Banjarnegara, Rakit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	2 unit	20.000.000,00	KECAMATAN RAKIT
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel										

			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	3.200.000,00	Kab. Banjarnegara, Rakit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	-	-	KECAMATAN RAKIT
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0,00	Kab. Banjarnegara, Rakit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	2 Unit	20.000.000,00	KECAMATAN RAKIT

	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	39.682.468,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	-	19.000.000,00	KECAMATAN RAKIT
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	7.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Rakit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	12 Laporan	7.000.000,00	KECAMATAN RAKIT
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	32.682.468,00	Kab. Banjarnegara, Rakit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	12 Laporan	12.000.000,00	KECAMATAN RAKIT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	99.640.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	-	99.640.000,00	KECAMATAN RAKIT
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										

			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	45.140.000,00	Kab. Banjarnegara, Rakit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	6 Unit	45.140.000,00	KECAMATAN RAKIT
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Rakit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	1 Unit	50.000.000,00	KECAMATAN RAKIT
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										

			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	4.500.000,00	Kab. Banjarnegara, Rakit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	10 Unit	4.500.000,00	KECAMATAN RAKIT
2,	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**95.184.100,00**					**-**	**85.184.100,00**	
	7.01.02 .2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-	15.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Rakit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	-	5.000.000,00	KECAMATAN RAKIT
	7.01.02 .2.03.0 001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum										

			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Rakit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	1 Dokumen	5.000.000,00	KECAMATAN RAKIT
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	80.184.100,00	Kab. Banjarnegara, Rakit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	-	80.184.100,00	KECAMATAN RAKIT
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha										

			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	60 Dokumen	3.600.000,00	Kab. Banjarnegara, Rakit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	60 Dokumen	3.600.000,00	KECAMATAN RAKIT
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan										
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	3.600.000,00	Kab. Banjarnegara, Rakit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	12 Laporan	3.600.000,00	KECAMATAN RAKIT
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan										

			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	72.984.100,00	Kab. Banjarnegara, Rakit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif		0,00	KECAMATAN RAKIT
3,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**0,00**					**-**	**20.000.000,00**	
	7.01.03 .2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	0,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	1 Laporan	10.000.000,00	KECAMATAN RAKIT
	7.01.03 .2.01.0 003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan										

			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	0,00	Kab. Banjarnegara, Rakit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	1 Laporan	10.000.000,00	KECAMATAN RAKIT
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	0,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	2 Lembaga	10.000.000,00	KECAMATAN RAKIT
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan										

			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	Kab. Banjarnegara, Rakit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	2 Lembaga	10.000.000,00	KECAMATAN RAKIT
4,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**13.500.000,00**					**-**	**13.500.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	13.500.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	-	13.500.000,00	KECAMATAN RAKIT
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan										

			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6 Dokumen	13.500.000,00	Kab. Banjarnegara, Rakit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	6 Dokumen	13.500.000,00	KECAMATAN RAKIT
5,	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**47.226.700,00**					**-**	**47.226.700,00**	
	7.01.06 .2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	47.226.700,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	-	47.226.700,00	KECAMATAN RAKIT
	7.01.06 .2.01.0 001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa										

			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	22 Dokumen	5.175.000,00	Kab. Banjarnegara, Rakit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	22 Dokumen	5.175.000,00	KECAMATAN RAKIT
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa										
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11 Dokumen	5.070.000,00	Kab. Banjarnegara, Rakit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	11 Dokumen	5.070.000,00	KECAMATAN RAKIT
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa										

			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	22 Dokumen	0,00	Kab. Banjarnegara, Rakit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	22 Dokumen	0,00	KECAMATAN RAKIT
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa										
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	5.246.800,00	Kab. Banjarnegara, Rakit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	1 Dokumen	5.246.800,00	KECAMATAN RAKIT
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum										

			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6 Dokumen	12.480.000,00	Kab. Banjarnegara, Rakit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	6 Dokumen	12.480.000,00	KECAMATAN RAKIT
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa										
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 Dokumen	4.687.500,00	Kab. Banjarnegara, Rakit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	1 Dokumen	4.687.500,00	KECAMATAN RAKIT
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya										

			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 Laporan	14.567.400,00	Kab. Banjarnegara, Rakit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	12 Laporan	14.567.400,00	KECAMATAN RAKIT
	J U M L A H				**2.134.455.676,00**						**2.243.065.804,00**	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN RAKIT

Program pada Kecamatan Rakit merupakan program prioritas dalam Renstra 2025-2029. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Banjarnegara selanjutnya dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Pemilihan untuk masing-masing program/kegiatan/sub kegiatan di Kecamatan Rakit sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan 6 (enam) kegiatan yakni :
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

      Terdiri dari 2 (dua) sub Kegiatan :

      a.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

      a.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

      Terdiri dari 3 (tiga) sub Kegiatan :

      b.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

      b.2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD

      b.3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran

   c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

   Terdiri dari 3 (tiga) sub Kegiatan :

      c.1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

      c.2. Penyedia bahan logistik kantor

      c.3.Penyediaan komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

   d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Terdiri dari 3 (tiga) sub Kegiatan :

   d.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya

      d.2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Terdiri dari 2 (dua) sub Kegiatan :

e.1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

e.2. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Terdiri dari 3 (tiga) sub Kegiatan :

f.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

f.2. Pemeliharaan/rehabilittasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya

f.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, 2 (dua) kegiatan yakni :

a. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

Terdiri dari 1 (satu) sub Kegiatan :

a.1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang di Limpahkan Kepada Camat

Terdiri dari 3 (tiga) sub Kegiatan :

b.1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan perizinan non usaha

b.2. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan

b.3. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarahan, dengan 2 (dua) kegiatan :

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan :

a.1. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan

b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan, terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan

b.1. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

4. Program Urusan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan 1 (satu) kegiatan :

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala DaerahTerdiri dari 1 (satu) sub Kegiatan :

a.1. Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di wilayah kecamatan

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Desa, dengan dengan 1 (satu) kegiatan yakni :

a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Terdiri dari 7 (tujuh) sub Kegiatan :

a.1. Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa

a.2. Fasilitasi administrasi pemerintahan desa

a.3. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

a.4. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa

a.5. Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan keteriban umum

a.6. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. Renja Perangkat Daerah selanjutnya menjadi platfom operasional bagi Perangkat Daerah dalam menjalankan programnya dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka sasaran pembangunan daerah tahun 2026. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026 dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disepakati.
2. Kerangka pendanaan dalam Renja Perangkat Daerah masih bersifat sementara, sehingga masih dimungkinkan terjadi perubahan pagu yang disebabkan oleh pengurangan, penambahan, dan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan maupun antar sub kegiatan dalam kerangka penyusunan anggaran secara terpadu dan berbasis kinerja.
3. Renja Perangkat Daerah menjadi acuan bagi Kepala Perangkat Daerah dan segenap jajarannya serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, serta menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal : Agustus 2025

CAMAT RAKIT

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sigaluh Tahun 2026 disusun sebagai wujud penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 Kabupaten Banjarnegara dalam program dan kegiatan sesuai bidang kewenangan dan alokasi pembiayaan. Penyusunan Renja ini berdasar Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Renja Kecamatan Sigaluh Tahun 2026 menjadi gambaran bagi seluruh aparatur kecamatan dalam melaksanakan tugas/kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dan sebagai pedoman dalam evaluasi kinerjanya.

Sigaluh, September 2025

CAMAT SIGALUH

DAMPAK FIRMANSYAH, S.STP

Pembina

NIP. 198304282001121004

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 3
BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN SIGALUH TAHUN LALU 9
BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SIGALUH 40
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SIGALUH
BAB V PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan Renja Kecamatan Sigaluh Tahun 2026 sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan yang diatur melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan pembentukan tim penyusun, penelaahan rancangan awal RKPD, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, hingga pada penyempurnaan

berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang RKPD. Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, penyusunan Renja Kecamatan Sigaluh juga mengacu pada Renja Kementerian/Lembaga terkait, serta Renja Perangkat Daerah Provinsi terkait. Renja Kecamatan Sigaluh adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2. Landasan Hukum

Renja Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjarnegara 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 309);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 317);
7. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 37 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Jabatan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 30 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;

9. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun dengan maksud untuk:

a. Menjabarkan Renstra Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029 ke dalam rencana program kegiatan prioritas Tahun 2026;
b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerapan anggaran berbasis kinerja.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

a. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA-DPA dalam Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2026, yang dalam penyusunannya didahului dengan menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026;
b. Sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Tahun 2026;
c. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 disusun berdasarkan sistematika yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renja Kecamatan Sigaluh, serta sistematika dokumen Renja Kecamatan Sigaluh.

BAB 2 : HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN SIGALUH TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Sigaluh tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Sigaluh, analisis kinerja pelayanan Kecamatan Sigaluh, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sigaluh, dan review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dan atau pokok-pokok DPRD.

BAB 3 : TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SIGALUH

Membuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Sigaluh, serta program dan kegiatan tahun 2025.

BAB 4 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SIGALUH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Kecamatan Sigaluh yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Kecamatan Sigaluh dan sasaran RKPD.

BAB 5 : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN SIGALUH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Sigaluh Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Sigaluh

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sigaluh. Urusan yang menjadi kewenangan Kecamatan Sigaluh meliputi Urusan Pemerintahan Unsur Kewilayahan Bidang Urusan Kecamatan.

Renja Kecamatan Sigaluh Tahun 2024 yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 terdiri dari 5 program, 10 kegiatan, dan 23 sub kegiatan dengan fokus utama sesuai Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, Kecamatan memiliki tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.. Program/kegiatan/sub kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah yang meliputi:

a. Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
b. Masih terbatasnya kemampuan SDM perangkat desa dalam penyelenggaraan tertib administrasi desa;
c. Masih lemahnya peran pemerintah desa dalam memberdayakan BUMDes;

d. Masih kurangnya kesadaran aparatur pemerintah desa dalam memenuhi kewajiban perpajakan;
e. Belum terpenuhinya keterwakilan partisipasi perempuan dalam pembangunan;

Belum optimalnya kesadaran pemerintah desa dan masyarakat dalam melaksanakan program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat (penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, keagamaan, dan ketertiban/keamanan);

Dari 5 program, 9 kegiatan, dan 22 sub kegiatan yang dalam Renja Kecamatan Sigaluh tersebut, program/kegiatan/sub kegiatan yang disetujui untuk dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024 terdiri dari 5 program, 9 kegiatan, dan 22 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. **Rp3.723.300.023,**-

Pada Perubahan Renja Kecamatan Sigaluh Tahun Anggaran 2024, terjadi beberapa perubahan yang meliputi penambahan atau pengurangan pagu, penghapusan, penambahan atau pengurangan program/kegiatan/sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Perubahan tersebut mengubah rincian dalam Renja Kecamatan Sigaluh menjadi 5 program, 9 kegiatan, dan 22 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. **Rp3.334.414.684,-** Pada Perubahan Renja Kecamatan Sigaluh tahun 2023, program/kegiatan/sub kegiatan tidak bertambah.

Dinamika yang terjadi selama tahun 2024 turut mempengaruhi keberhasilan pencapaian Renja Kecamatan Sigaluh. Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2024, tercatat adanya hasil yang baik yang dikarenakan adanya pencapaian maupun pelampauan target maupun yang tidak memenuhi target.

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan, Penyediaan Jasa Sumber Daya Air dan Listrik, Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa dan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaktercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Semua Beban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2024 dapat diselesaikan tepat waktu, sehingga tidak dikenakan denda.
2. Jaringan Komunikasi Internet dan biaya penggunaan air tahun 2024 tidak ada.
3. Pejabat yang bertugas melakukan fasilitasi, lebih sering turun langsung ke desa-desa. Sehingga biaya rapat tidak digunakan secara maksimal.

b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan, Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di

Kecamatan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa dan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa, sedangkan realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Kegiatan -kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang bersifat wajib dan rutin;
2. Kesesuaian antara jumlah anggaran dan target kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka (*jelaskan implikasi dari poin di atas*). Pada tahun perencanaan selanjutnya, perlu diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, diantaranya:

1. Merencanakan target kinerja;
2. Menyelaraskan hal-hal yang akan dikerjakan dengan target kinerja;
3. Menyelaraskan apa yang dianggarkan dengan apa yang akan dikerjakan;
4. Mengerjakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja;
5. Melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Sigaluh dan Pencapaian Renstra Kecamatan Sigaluh sampai dengan Tahun 2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Sigaluh dan Pencapaian Renstra Kecamatan Sigaluh s.d. Tahun 2024 * Kabupaten Banjarnegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program/ kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**									
7-01	**KECAMATAN**									
7-01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terselenggaranya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**								
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Kecamatan Sigaluh**	**Terlaksananya Prosentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Pelaksanaan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**								

7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	100%	8 dokumen	8 dokumen	100%
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	16 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	100%	16 dokumen	16 dokumen	100%
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	22 org	22 org	22 org	22 org	100%	22 org	22 org	100%
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah UP/GU/LS/TUP yang diuji dan diverifikasi	40 dokumen	40 dokumen	40 dokumen	40 dokumen	100%	40 dokumen	40 dokumen	100%
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang disusun	18 dokumen	18 dokumen	18 dokumen	18 dokumen	100%	18 dokumen	18 dokumen	100%
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Kecamatan Sigaluh**	**Terlaksananya Administrasi Umum Kec. Sigaluh**								
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	5 paket	5 paket	5 paket	5 paket	100%	5 paket	5 paket	100%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia	13 paket	13 paket	13 paket	13 paket	100%	13 paket	13 paket	100%
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terbayarkan	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	12 dokumen	100%

7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terbayarkan	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	12 dokumen	100%
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional /Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional /Lapangan yang dibayarkan	9 unit	9 unit	9 unit	9 unit	100%	9 unit	9 unit	100%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	100%	2 paket	2 paket	100%
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		6 paket	6 paket	6 paket	6 paket	100%	6 paket	6 paket	100%
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Terselenggaranya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**								
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah kegiatan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%

7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**								
7.01..03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**								
7.01.03.2.02.02	Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100%	12 paket	12 paket	100%
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Terselenggaranya Kualitas Urusan Pemerintahan Umum**								
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**								
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan	Jumlah tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan yang dilaksanakan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								

7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	14 desa	14 desa	14 desa	14 desa	100%	14 desa	14 desa	100%
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	14 desa	14 desa	14 desa	14 desa	100%	14 desa	14 desa	100%
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	14 desa	14 desa	14 desa	14 desa	100%	14 desa	14 desa	100%
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	14 desa 1 kelurahan	14 desa 1 kelurahan	14 desa 1 kelurahan	14 desa 1 kelurahan	100%	14 desa 1 kelurahan	14 desa 1 kelurahan	100%
7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	14 desa	14 desa	14 desa	14 desa	100%	14 desa	14 desa	100%
7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	14 desa	14 desa	14 desa	14 desa	100%	14 desa	14 desa	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sigaluh

Dalam pelaksanaan, faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian/ketidaktercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Perencanaan dan penyelarasan target kinerja dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang baik;
2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya.
3. Kinerja petugas kecamatan yang baik dalam mendukung pencapaian target kinerja pelunasan PBB.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Nilai IKM, antara lain :

1. Belum lengkapnya fasilitas pelayanan publik di kantor kecamatan;
2. Kelengkapan administrasi dan informasi belum terpenuhi sesuai Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
3. Adanya penambahan jumlah responden survey IKM;
4. Kurangnya pemahaman SDM tentang SOP pelayanan publik.

Sedangkan faktor yang mempengaruhi ketercapaian Nilai SAKIP, antara lain :

1. Terpenuhinya materi dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai ketentuan;
2. Sosialisasi dan pendampingan dalam penilaian SAKIP yang sudah dilaksanakan oleh instansi pengampu.
3. Kapasitas SDM dalam pemahaman penyusunan dokumen Kecamatan Sigaluh.

Dalam rangka mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut, telah dilakukan upaya-upaya yang meliputi:

1. Merencanakan target kinerja;
2. Menyelaraskan hal-hal yang akan dikerjakan dengan target kinerja;
3. Menyelaraskan apa yang dianggarkan dengan apa yang akan dikerjakan;
4. Mengerjakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja;
5. Melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya.

Kinerja pelayanan Kecamatan Sigaluh disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sigaluh Tahun 2020-2024

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2020-2024 Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 Rasio antara Realisasi dan Target tahun ke-				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya Kualitas layanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	85,2 85,2 100%	85,2 83,11 97%	85,2 83,9 83,9%		
2.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	Nilai	CC CC	B CC (50,25)	CC B (62.10)		
3.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk urusan kewilayahan	Nilai SAKIP	Nilai				56 61,5 110%	63,2 63,65 101%
4.	Meningkatnya efektifitas dan transparansi layanan public untuk urusan kewilayahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai				83,2 84,03 101%	85,05 85,94 101%

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Sigaluh

Kecamatan Sigaluh dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan urusan pemerintahan dalam 1 (satu) urusan, yaitu Pelayanan Publik. Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPD Tahun 2023-2026, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sigaluh untuk tahun 2025 mencakup 1 (satu) urusan tersebut. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sigaluh diantaranya adalah:

1. Belum optimalnya kemampuan SDM perangkat desa dalam penyelenggaraan tertib administrasi desa.
2. Belum optimalnya peran pemerintah desa dalam memberdayakan BUMDes
3. Belum optimalnya kesadaran aparatur pemerintah desa dan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan tepat waktu.
4. Belum terpenuhinya keterwakilan partisipasi perempuan dalam, pembangunan.
5. Belum optimalnya kemampuan perangkat desa dalam penatausahaan keuangan desa terkait dengan implementasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.
6. Belum optimalnya kesadaran pemerintah desa dan masyarakat dalam melaksanakan program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat (pemeliharaan jalan desa, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, keagamaan, dan ketertiban/ keamanan);
7. Jumlah SDM kecamatan yang terbatas kurang memadai dalam memberikan pelayanan publik yang optimal;

Permasalahan tersebut, jika tidak diselesaikan dapat menjadi *constraint* dalam pencapaian visi dan misi Bupati maupun capaian indikator lainnya. Beberapa dampak dari adanya permasalahan dan hambatan tersebut meliputi:

1. Kurang tercapainya suatu kegiatan sesuai indikator kinerja
2. Tidak tercapainya sasaran kinerja
3. Belum optimalnya perencanaan kinerja

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi, peningkatan kualitas birokrasi, dan meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan pengguna layanan akan meningkatkan kebutuhan akan adanya penyediaan produk layanan yang semakin baik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi-inovasi dalam menunjang peningkatan pelayanan publik secara kontinyu. Beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Sigaluh, yaitu:

1. Belum optimalnya budaya kerja dan disiplin kerja pegawai.
2. Masih kurangnya jumlah Aparatur Kecamatan yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai dalam rangka mendukung optimalisasi pelayanan kapada masyarakat;
3. Masih kurangnya sumber dana pendukung kerja
4. Peningkatan peran dan fasilitasi kecamatan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah, pelayanan sarana dan prasarana umum serta pencapaian standar pelayanan minimal.

Berdasarkan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan tersebut, dapat diinventarisasi beberapa isu strategis. Inventarisasi isu-isu strategis tahun 2025 didapatkan dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal Kabupaten

Banjarnegara sampai dengan tahun 2026. Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan pembangunan. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sigaluh pada tahun 2025, sebagai berikut:

1. Merencanakan target kinerja;
2. Menyelaraskan hal-hal yang akan dikerjakan dengan target kinerja;
3. Menyelaraskan apa yang dianggarkan dengan apa yang akan dikerjakan;
4. Mengerjakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja;
5. Melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya.

2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Tahun 2025 merupakan pelaksanaan RPD Tahun 2023-2026. Dalam RPD Tahun 2023-2026, prioritas arah kebijakan sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Sigaluh pada tahun 2025 meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi 6 (enam) kegiatan yaitu Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang meliputi 1 (satu) kegiatan yaitu Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;

3. Program pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang meliputi 2 (dua) kegiatan yaitu Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan;
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang meliputi 1 (satu) kegiatan yaitu Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah;
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang meliputi 1 (satu) kegiatan yaitu Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Tabel 2
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 Kabupaten Banjarnegara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
1	**Tujuan : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**Kab. Banjarnegara**	**Nilai SAKIP**	**B**		**Tujuan : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**Kab. Banjarnegara**	**Nilai SAKIP**	**B**		
1	**Sasaran Strategis : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk urusan kewilayahan**	**Kec. Sigaluh**	**Nilai SAKIP Kecamatan**	**B (65,20)**		**Sasaran Strategis : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk urusan kewilayahan**	**Kec. Sigaluh**	**Nilai SAKIP Kecamatan**	**B (65,20)**		
I	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kec. Sigaluh**	**Prosentase terlaksanannya program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**100 %**	**722.346**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kec. Sigaluh**	**Prosentase terlaksanannya program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**100 %**	**614.229**	
1.	*Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa*	*Kec. Sigaluh*	*Prosentase Terlaksanannya Pemberdayaan*	*100%*	*11.600*	*Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa*	*Kec. Sigaluh*	*Prosentase Terlaksanannya Pemberdayaan*	*100%*	*11.600*	

			Masyarakat Desa					*Masyarakat Desa*			
a.	Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan	Kec. Sigaluh	Jumlah laporan Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan yang terlaksana	4 lap	11.600	Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan	Kec. Sigaluh	Jumlah laporan Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan yang terlaksana	4 lap	11.600	
2.	*Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	*Kelurahan Kalibenda*	*Prosentase Terlaksanannya Pemberdayaan Kelurahan*	*100%*	*710.746*	*Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	*Kelurahan Kalibenda*	*Prosentase Terlaksanannya Pemberdayaan Kelurahan*	*100%*	*602.629*	
a.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kalibenda	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan	10 paket	552.416	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kalibenda	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan	10 paket	444.298	
b.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kalibenda	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 dok	158.330	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kalibenda	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 dok	158.330	
II	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kec. Sigaluh**	**Prosentase penyelenggaraan Urusan Pemerintah**	**100 %**	**14.750**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kec. Sigaluh**	**Prosentase penyelenggaraan Urusan Pemerintah**	**100 %**	**14.750**	

			an Umum yang terlaksana					**an Umum yang terlaksana**			
1.	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*	*Kec. Sigaluh*	*Prosentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan*	*100%*	*14.750*	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*	*Kec. Sigaluh*	*Prosentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan*	*100%*	*14.750*	
a.	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan	Kec. Sigaluh	Jumlah dokumen pelaksanaan tugas forkompimca yang dilaksanakan	4 dok	14.750	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan	Kec. Sigaluh	Jumlah dokumen pelaksanaan tugas forkompimca yang dilaksanakan	4 dok	14.750	
III	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kec. Sigaluh**	**Prosentase program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana**	**100 %**	**69.600**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kec. Sigaluh**	**Prosentase program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana**	**100 %**	**69.600**	

1.	*Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	*Kec. Sigaluh*	*Prosentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana*	*100%*	*69.600*	*Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	*Kec. Sigaluh*	*Prosentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana*	*100%*	*69.600*	
a.	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Kec. Sigaluh	Jumlah dokumen fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	28 dok	11.600	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Kec. Sigaluh	Jumlah dokumen fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	28 dok	11.600	
b.	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Kec. Sigaluh	Jumlah dokumen fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	14 dok	11.600	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Kec. Sigaluh	Jumlah dokumen fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	14 dok	11.600	
c.	Fasilitasi pengelola keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Kec. Sigaluh	Jumlah dokumen fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	14 dok	11.600	Fasilitasi pengelola keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Kec. Sigaluh	Jumlah dokumen fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	14 dok	11.600	

d.	Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kec. Sigaluh	Jumlah dokumen fasilitasi pembinaan trantibum yang terlaksana	15 dok	11.600	Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kec. Sigaluh	Jumlah dokumen fasilitasi pembinaan trantibum yang terlaksana	15 dok	11.600	
e.	Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Kec. Sigaluh	Jumlah dokumen fasilitasi penyusunan program PMD yang terlaksana	14 dok	11.600	Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Kec. Sigaluh	Jumlah dokumen fasilitasi penyusunan program PMD yang terlaksana	14 dok	11.600	
f.	Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Kec. Sigaluh	Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi pendampingan desa	14 dok	11.600	Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Kec. Sigaluh	Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi pendampingan desa	14 dok	11.600	
2	**Meningkatnya Efektivitas dan Transparasi Layanan Publik**	**Kab. Banjarnegara**	**Survey Kepuasan Masyarakat**	**85,34**		**Meningkatnya Efektivitas dan Transparasi Layanan Publik**	**Kab. Banjarnegara**	**Survey Kepuasan Masyarakat**	**85,34**		
2	**Meningkatnya Efektivitas dan Transparasi Layanan Publik untuk Urusan Kewilayahan**	**Kec. Sigaluh**	**Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan**	**85,9**		**Meningkatnya Efektivitas dan Transparasi Layanan Publik untuk Urusan Kewilayahan**	**Kec. Sigaluh**	**Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan**	**85,9**		
IV	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMEINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kec. Sigaluh**	**Prosentase Penunjang Urusan Pemeritnahan Daerah Kabupaten yang terlaksana**	**100 %**	**2.663.111**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMEINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kec. Sigaluh**	**Prosentase Penunjang Urusan Pemeritnahan Daerah Kabupaten yang terlaksana**	**100 %**	**2.861.927**	

1.	*Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Kec. Sigaluh*	*Prosentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terlaksana*	*100%*	*3.000*	*Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Kec. Sigaluh*	*Prosentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terlaksana*	*100%*	*3.000*	
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Sigaluh	Jumlah dokumen perencanaan, renstra dan renja yang disusun	8 dok	1.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Sigaluh	Jumlah dokumen perencanaan, renstra dan renja yang disusun	8 dok	1.500	
b.	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kec. Sigaluh	Jumlah dokumen pelaporan yang disusun	4 dok	1.500	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kec. Sigaluh	Jumlah dokumen pelaporan yang disusun	4 dok	1.500	
2.	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Kec. Sigaluh*	*Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana*	*100%*	*2.344.935*	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Kec. Sigaluh*	*Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana*	*100%*	*2.555.299*	
a.	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kec. Sigaluh	Jumlah ASN yang terbayarkan	22 ASN	2.303.175	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kec. Sigaluh	Jumlah ASN yang terbayarkan	22 ASN	2.513.539	
b.	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kec. Sigaluh	Jumlah Dokumen UP/GU/LS/ TUP yang	40 dok	40.160	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kec. Sigaluh	Jumlah Dokumen UP/GU/LS/ TUP yang	40 dok	40.160	

			diuji dan diverifikasi					diuji dan diverifikasi			
c.	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran	Kec. Sigaluh	Jumlah laporan keuangan yang disusun	16 dok	1.600	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran	Kec. Sigaluh	Jumlah laporan keuangan yang disusun	16 dok	1.600	
3.	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Kec. Sigaluh*	*Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi*	*100%*	*122.983*	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Kec. Sigaluh*	*Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi*	*100%*	*111.434*	
a.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Sigaluh	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	3 paket	7.500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Sigaluh	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	3 paket	7.500	
b.	Penyedia bahan logistik kantor	Kec. Sigaluh	Jumlah bahan logistik kantor yang terpenuhi	7 paket	115.483	Penyedia bahan logistik kantor	Kec. Sigaluh	Jumlah bahan logistik kantor yang terpenuhi	7 paket	103.934	
4.	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Kec. Sigaluh*	*Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang terlaksana*		-	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Kec. Sigaluh*	*Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang terlaksana*	*100%*	*14.160*	
a.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Sigaluh	Jumlah Pengadaan Barang		-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Sigaluh	Jumlah Pengadaan Barang	1 unit	14.160	

			yang terlaksana					yang terlaksana			
5.	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Kec. Sigaluh*	*Prosentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi*	*100%*	*130.287*	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Kec. Sigaluh*	*Prosentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi*	*100%*	*130.287*	
a.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Sigaluh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terpenuhi	12 lap	18.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Sigaluh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terpenuhi	12 lap	18.000	
b.	Penyedia jasa pelayanan umum kantor	Kec. Sigaluh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terpenuhi	12 lap	112.287	Penyedia jasa pelayanan umum kantor	Kec. Sigaluh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terpenuhi	12 lap	112.287	
6.	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Kec. Sigaluh*	*Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah yang terpenuhi*	*100%*	*61.907*	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Kec. Sigaluh*	*Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah yang terpenuhi*	*100%*	*47.747*	

a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Sigaluh	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	23.290	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Sigaluh	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	23.290	
b.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Sigaluh	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara	2 Unit	10.185	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Sigaluh	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara	2 Unit	10.185	
c.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Sigaluh	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara	6 Unit	28.432	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Sigaluh	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara	6 Unit	14.272	
V	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**KEC. SIGALUH**	**Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang terlaksana**	**100 %**	**71.028**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**KEC. SIGALUH**	**Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang terlaksana**	**100 %**	**71.028**	

1.	*Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum*	*Kec. Sigaluh*	*Prosentase Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum yang terlaksana*	*100%*	-	*Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum*	*Kec. Sigaluh*	*Prosentase Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum yang terlaksana*	*100%*	-	
a.	Koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec. Sigaluh	Jumlah Dokumen Koordinasi/ sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemelihahaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	4 dok	-	Koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec. Sigaluh	Jumlah Dokumen Koordinasi/ sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemelihahaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	4 dok	-	
2.	*Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*	*Kec. Sigaluh*	*Prosentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana*	*100%*	*71.028*	*Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*	*Kec. Sigaluh*	*Prosentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana*	*100%*	*71.028*	

a.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Sigaluh	Jumlah Laporan Perizinan Non Usaha yang terlayani	12 lap	4.150	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Sigaluh	Jumlah Laporan Perizinan Non Usaha yang terlayani	12 lap	4.150	
b.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Kec. Sigaluh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan yang terlayani	12 lap	-	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Kec. Sigaluh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan yang terlayani	12 lap	-	
c.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Kec. Sigaluh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang dilimpahkan yang terlaksana	1 lap	66.878	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Kec. Sigaluh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang dilimpahkan yang terlaksana	1 lap	66.878	

Berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2026, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan yaitu:

1. Mengoptimalkan Rencana Target Kinerja
2. Menyelaraskan target kinerja dengan anggaran kinerja
3. Melaksanakan kegiatan sesuai rencana kinerja

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan musrenbang kecamatan dan forum konsultasi publik telah disampaikan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui aplikasi SIPD. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sigaluh. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Banjarnegara

NO	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	Bantuan Keuangan kepada Desa Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) Kecamatan	PRINGAMBA	Terlaksananya kegiatan pembangunan akses jalan dari Desa Pringamba menuju Desa Prigi		Validasi Baperlitbang
2	Rekonstruksi Ruas Jalan Kabupaten (Peningkatan dan Pelebaran Jalan)	PRINGAMBA	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan dan Pelebaran Jalan Pringamba menuju Desa Lain		Validasi Baperlitbang
3	Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong jalan kabupaten	PRINGAMBA	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong jalan kabupaten		Validasi Baperlitbang
4	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas SD	PRINGAMBA	Terlaksananya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas SD		Validasi Baperlitbang
5	Peningkatan Ternak Berbasis Masyarakat	PRINGAMBA	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Ternak Berbasis Masyarakat		Validasi Baperlitbang
6	Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Pemeliharaan Jalan Desa	WANACIPTA	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan jalan desa		Validasi Baperlitbang
7	Pengadaan meubelair SD	WANACIPTA	Terlaksananya kegiatan Pengadaan meubelair SD		Validasi Baperlitbang

8	Pelatihan Perempuan di pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif	WANACIPTA	Terlaksananya kegiatan Pelatihan Perempuan di pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif		Validasi Baperlitbang
9	Pelatihan Pengolahan Makanan Ringan	WANACIPTA	Terlaksananya kegiatan Pelatihan Pengolahan Makanan Ringan		Validasi Baperlitbang
10	Peningkatan Ternak Berbasis Masyarakat	WANACIPTA	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Ternak Berbasis Masyarakat		Validasi Baperlitbang
11	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas SD	WANACIPTA	Terlaksananya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas SD		Validasi Baperlitbang
12	Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa, Sub Bidang Kesehatan	TUNGGARA	Terlaksananya kegiatan Pembangunan Posyandu		Validasi Baperlitbang
13	Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong jalan kabupaten	TUNGGARA	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong jalan kabupaten		Validasi Baperlitbang
14	Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa, Sub Bidang Pendidikan	TUNGGARA	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Gedung TK		Validasi Baperlitbang
15	Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa, Sub Bidang Pariwisata	SINGAMERTA	Terlaksananya kegiatan pengembangan sarana dan Prasarana Pariwisata		Pengajuan Usulan
16	Pelatihan Ketrampilan Manajemen BUMDes	SINGAMERTA	Terlaksananya kegiatan pelatihan ketrampilan manajemen BUMDes		Pengajuan Usulan
17	Pelatihan Manajemen Usaha Kecil (MUK)	SINGAMERTA	Terlaksananya kegiatan pelatihan menajemen usaha kecil untuk mengembangkan ekonomi masyarakat		Pengajuan Usulan
18	Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa, Sub Bidang Pekerjaan Umum	SIGALUH	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan jalan desa		Validasi Baperlitbang
19	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	SIGALUH	Terlaksananya pembuatan akses jalan ke kawasan pertanian		Validasi Baperlitbang
20	Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa, Sub Bidang Kesehatan	SAWAL	Terlaksananya kegiatan pengadaan jamban sehat untuk warga desa		Validasi Baperlitbang
21	Penanganan rumah terdampak bencana	SAWAL	Terlaksananya rehabilitasi rumah yang terdampak bencana		Validasi Baperlitbang
22	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	SAWAL	Terlaksananya pembuatan akses jalan ke kawasan pertanian		Validasi Baperlitbang
23	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	SAWAL	Terlaksananya kegiatan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat		Validasi Baperlitbang
24	Rehabilitasi pembangunan Gedung Pemerintah Desa	SAWAL	Terlaksananya kegiatan rehabilitasi pembangunan dan pemeliharaan Gedung pemerintah desa		Validasi Baperlitbang

25	Pengembangan Kapasitas Budidaya Ikan	SAWAL	Terlaksananya kegiatan pengembangan kapasitas budidaya ikan di desa		Validasi Baperlitbang
26	Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa, Sub Bidang Pekerjaan Umum	RANDEGAN	Terlaksananya kegiatan pembangunan jalan desa Randegan Penawaren		Validasi Baperlitbang
27	Pelatihan Perempuan di Pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif	RANDEGAN	Pelatihan Perempuan di Pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif		Validasi Baperlitbang
28	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	RANDEGAN	Terlaksananya kegiatan pembangunan Gedung serbaguna untuk kegiatan di desa		Validasi Baperlitbang
29	Pembangunan Jembatan pada ruas jalan Kabupaten	RANDEGAN	Terlaksananya pembangunan jembatan penghubung Randegan Bojanegara yang sempit dan berongga		Validasi Baperlitbang
30	Pembangunan turap/talud/ bronjong jalan kabupaten	KARANGMANGU	Terlaksananya kegiatan pembangunan talud pengaman di lingkungan desa		Validasi Baperlitbang
31	Rehabilitasi/Pembangunan Gedung Pemerintah	KARANGMANGU	Terlaksananya pembangunan Gedung TK dan Kesenian		Validasi Baperlitbang
32	Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa, Sub Bidang Pekerjaan Umum	KALIBENDA	Terlaksananya kegiatan rehabilitasi/pembangunan jalan desa yang sudah rusak berat		Pengajuan Usulan
33	Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa, Sub Bidang Pekerjaan Umum	KALIBENDA	Terlaksananya kegiatan rehabilitasi/pembangunan PAUD/TK/TPQ yang sudah rusak berat		Pengajuan Usulan
34	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	KALIBENDA	Terlaksananya kegiatan pelatihan budidaya perikanan		Pengajuan Usulan
35	Pelatihan Manajemen Usaha Kecil (MUK)	GEMBONGAN	Terlaksananya kegiatan pelatihan usaha kecil (batik) yang belum maksimal		Validasi Baperlitbang
36	Pelatihan Pengolahan Makanan Ringan	GEMBONGAN	Terlaksananya kegiatan pelatihan pengolahan makanan ringan di desa		Validasi Baperlitbang
37	Pelatihan Ketrampilan Manajemen BUMDes	GEMBONGAN	Terlaksananya kegiatan pelatihan ketrampilan manajemen BUMDes		Validasi Baperlitbang
38	Fasilitasi Tim Penggerak dalam penyelenggaraan Gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	BOJANEGARA	Terlaksananya kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak dalam penyelenggaraan Gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga		Validasi Baperlitbang
39	Pelatihan Ketrampilan Manajemen BUMDes	BOJANEGARA	Terlaksananya kegiatan pelatihan ketrampilan manajemen BUMDes		Validasi Baperlitbang
40	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan PAD	BOJANEGARA	Terlaksananya kegiatan pembinaan BUMDes di unit usaha produksi dan pemasaran		Validasi Baperlitbang

41	Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa, Sub Bidang Pekerjaan Umum	KEMIRI	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan jalan desa yang rusak dan jalan usaha pariwisata curug pitu yang belum memadai		Pengajuan Usulan
42	Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa, Sub Bidang Pekerjaan Umum	PANAWAREN	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan jalan desa yang belum memadai		Validasi Baperlitbang
43	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	PANAWAREN	Terlaksananya pembuatan akses jalan ke kawasan pertanian		Validasi Baperlitbang
44	Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa, Sub Bidang Pekerjaan Umum	PRIGI	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan jalan desa yang rusak dan jalan usaha tani yang belum memadai		Validasi Baperlitbang
45	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	PRIGI	Terlaksananya kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kesenian		Validasi Baperlitbang
46	Rekonstruksi Ruas Jalan Kabupaten	PRIGI	Terlaksananya kegiatan rehabilitasi jalan kabupaten yang rusak dan kurang lebar		Validasi Baperlitbang
47	Pemeliharaan Jalan Kabupaten	PRIGI	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan jalan kabupaten yang rusak		Validasi Baperlitbang
48	Pelatihan Manajemen Usaha Kecil (MUK)	PRIGI	Terlaksananya kegiatan pelatihan menajemen usaha kecil untuk mengembangkan ekonomi masyarakat		Validasi Baperlitbang
48	Peningkatan Pengaspalan Jalan Kabupaten di Lingkungan Kelurahan	KALIBENDA	Terlaksananya Peningkatan Pengaspalan Jalan Kabupaten di Lingkungan Kelurahan		Validasi Baperlitbang
48	Pembangunan Rabat Beton Jalan Usaha Tani RW 1	KALIBENDA	Terlaksananya Pembangunan Rabat Beton Jalan Usaha Tani RW 1		Validasi Baperlitbang
48	Pembangunan Rabat Beton Jalan Usaha Tani RW 3	KALIBENDA	Terlaksananya Pembangunan Rabat Beton Jalan Usaha Tani RW 3		Validasi Baperlitbang
48	Pelatihan Budi Daya Perikanan	KALIBENDA	Terlaksananya Pelatihan Budi Daya Perikanan		Validasi Baperlitbang
48	Rehab Kios Sebelah Barat SPBU HIU	KALIBENDA	Terlaksananya Rehab Kios Sebelah Barat SPBU HIU		Validasi Baperlitbang

2.5. Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan hasil reses anggota DPRD, melalui aplikasi SIPD telah disampaikan usulan program dan kegiatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sigaluh. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Validasi
	NIHIL				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SIGALUH

3.1. Telaahan Terhadap Arah Kebijakan Nasional dan Daerah

Visi RPJMN 2025-2029 mengikuti Visi Presiden dan Wakil Presiden periode 2025-2029, yaitu: Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045". Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi yang kuat, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Visi tersebut dicapai melalui 8 Misi (Asta Cita), 17 Program Prioritas, dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat/PHTC (Quick Wins).

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.

Tujuan pembangunan Kabupaten Banjarnegara tahun 2025-2029 adalah mewujudkan Banjarnegara maju dan sejahtera dengan empat sasaran daerah yang akan diwujudkan, yaitu: 1) Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, 2) Meningkatnya perekonomian daerah yang berdaya saing dan berbasis potensi lokal secara berkelanjutan, 3) Meningkatnya infrastruktur yang mendukung perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, dan 4) Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025- 2029, dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas dan fokus pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan.

Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut adalah sebagai berikut: “Mewujudkan Banjarnegara yang Maju dan Sejahtera”

Dalam menerjemahkan visi tersebut dilakukan melalui penjelasan tiap-tiap pokok visi yang ada di dalamnya, dimana terdapat 2 (dua) pokok visi yaitu “Maju” dan “Sejahtera”. Dalam upaya mewujudkan visi “Mewujudkan Banjarnegara yang Maju dan Sejahtera” akan dilakukan melalui misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Infrastruktur dan Pelayanan Publik
2. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal
3. Meningkatkan Kualitas dan Akses Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan Sosial
4. Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan
5. Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Transparan

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya Kecamatan Sigaluh dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian visi nasional “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” serta visi Banjarnegara maju dan sejahtera. Untuk memudahkan pelaksanaan tugas Kecamatan Sigaluh maka dirumuskan tujuan dan sasaran Renja Tahun 2026 yang menjadi tugas Kecamatan Sigaluh membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan tugas yang

dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Sigaluh

Rumusan dan tujuan pada Renja Kecamatan Sigaluh Tahun 2026 Renstra Kecamatan Sigaluh Tahun 2025 – 2029.

3.1.1 Tujuan Renja

Tujuan merupakan kondisi yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Sigaluh Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

"Meningkatnya aksesibilitas layanan pemerintah dalam urusan kewilayahan di Kecamatan Sigaluh".

Indikator tujuan: Indeks Pelayanan Publik (IPP).

3.1.2 Sasaran Renja

Sasaran merupakan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program. Sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Sigaluh adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah urusan kewilayahan.
   Indikator sasaran: Nilai SAKIP Kecamatan Sigaluh.
2. Meningkatnya efektivitas koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan desa/ kelurahan.
   Indikator sasaran: Indeks Desa di Wilayah Kecamatan Sigaluh.

Pernyataan sasaran Renja Kecamatan Sigaluh beserta indikator kinerjanya sebagaimana berikut ini:

Tabel

Tujuan dan Sasaran Renja Pelayanan Kecamatan Sigaluh

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun		Ket
			Base line 2024	Target 2026	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(11)
Meningkatnya aksesibilitas layanan pemerintah dalam urusan kewilayahan di Kecamatan Sigaluh		Indeks Pelayanan Publik (IPP)	2,43	2,46	
	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah urusan kewilayahan	Nilai SAKIP Kecamatan Sigaluh	63,65	64,50	
	2. Meningkatnya efektivitas koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan desa/kelurahan	Indeks Desa di Wilayah Kecamatan Sigaluh	71	73	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SIGALUH

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026 pada Kecamatan Sigaluh merupakan program prioritas dalam Renstra 2025-2029. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPD selanjutnya dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Pemilihan untuk masing-masing program/ kegiatan sebagai berikut :

Tabel

Rencana Program /Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

Kecamatan Sigaluh Tahun 2026

Bidang urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
			Tahun 2026		Prakiraan maju Tahun 2027		Sumber
			Target	Pagu	Target	Pagu	Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(14)
KEWILAYAHAN KECAMATAN							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	2.772.174.310	100 %	2.910.783.000	Kec Sigaluh
	- Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %	100 %		100 %		Kec Sigaluh
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	100 %	100 %	8.000.000	100 %	8.400.000	Kec Sigaluh

Bidang urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
			Tahun 2026		Prakiraan maju Tahun 2027		Sumber
			Target	Pagu	Target	Pagu	Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(14)
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	14	3.000.000	14	3.150.000	Kec Sigaluh
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Lap. Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16	13	5.000.000	13	5.250.000	Kec Sigaluh
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi keuangan perangkat daerah terlaksana	100 %	100 %	2.417.291.411	100 %	2.538.156.606	Kec Sigaluh
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23	22	2.366.159.411	22	2.484.468.606	DAU
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	49.932.000	12	52.428.000	Kec Sigaluh
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16	16	1.200.000	16	1.260.000	Kec Sigaluh
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	100 %	100 %	120.000.000	100 %	126.000.000	Kec Sigaluh

Bidang urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
			Tahun 2026		Prakiraan maju Tahun 2027		Sumber
			Target	Pagu	Target	Pagu	Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(14)
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3	3	20.000.000	3	21.000.000	Kec Sigaluh
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	7	7	100.000.000	7	105.000.000	Kec Sigaluh
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	100 %	100 %	40.000.000	100 %	42.000.000	Kec Sigaluh
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	4	40.000.000	4	42.000.000	Kec Sigaluh
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana	100 %	100 %	94.429.899	100 %	99.151.394	Kec Sigaluh
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	18.200.000	12	19.110.000	DAU
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	76.229.899	12	80.041.394	Kec Sigaluh
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	92.453.000	100 %	97.075.000	Kec Sigaluh
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	11	14	57.000.000	14	59.850.000	Kec Sigaluh

Bidang urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
			Tahun 2026		Prakiraan maju Tahun 2027		Sumber
			Target	Pagu	Target	Pagu	Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(14)
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	dan dibayarkan pajaknya.						
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	4	17.453.000	4	18.325.000	
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kan-tor/Bangun-an Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	6	18.000.000	6	18.900.000	Kec Sigaluh
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan yang sesuai dengan standar pelayanan	100 %	100 %	58.965.000	100 %	61.913.000	Kec Sigaluh
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase terselenggaranya koordinasi pemeliharaan Prasarana dan sarana pelayanan umum	100 %	100 %	0	100 %	0	Kec Sigaluh
Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah dan / atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	0	0	0	0	0	Kec Sigaluh
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Persentase Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang terlaksana	100 %	100 %	58.965.000	100 %	61.913.000	Kec Sigaluh

Bidang urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
			Tahun 2026		Prakiraan maju Tahun 2027		Sumber
			Target	Pagu	Target	Pagu	Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(14)
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah dokumen Non Perijinan Usaha yang dilaksanakan.	12	0	0	0	0	Kec Sigaluh
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12	12	4.000.000	12	4.200.000	Kec Sigaluh
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	1	1	54.965.000	1	57.713.000	Kec Sigaluh
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga desa/kelurahan di kecamatan yang terfasilitasi	100 %	100 %	4.800.000	100 %	5.040.000	Kec Sigaluh
Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Persentase Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang terlaksana	0	100 %	800.000	100 %	840.000	Kec Sigaluh
Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	0	1	800.000	1	840.000	Kec Sigaluh
Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan	100	100 %	1.000.000	100 %	1.050.000	Kec Sigaluh
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	0	1	1.000.000	1	1.050.000	Kec Sigaluh
Pemberdayaan Kelurahan	Persentase pemberdayaan kelurahan	100 %	100 %	3.000.000	100 %	3.150.000	Kec Sigaluh

Bidang urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
			Tahun 2026		Prakiraan maju Tahun 2027		Sumber
			Target	Pagu	Target	Pagu	Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(14)
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0	9	750.000	9	787.500	Kec Sigaluh
Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana kelurahan yang terbangun	10	10	750.000	10	787.500	Kec Sigaluh
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	9	750.000	9	787.500	Kec Sigaluh
Evaluasi Kelurahan	Jumlah laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	0	1	750.000	1	787.500	Kec Sigaluh
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan konflik di wilayah	I00 %	100 %	12.900.000	100 %	13.545.000	Kec Sigaluh
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang terlaksana	100 %	100 %	12.900.000	100 %	13.545.000	Kec Sigaluh
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6	5	12.900.000	5	13.545.000	Kec Sigaluh
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib administrasi desa	100 %	100 %	40.300.000	100 %	42.315.000	Kec Sigaluh

Bidang urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
			Tahun 2026		Prakiraan maju Tahun 2027		Sumber
			Target	Pagu	Target	Pagu	Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(14)
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana	100 %	100 %	40.300.000	100 %	42.315.000	Kec Sigaluh
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	28	28	5.000.000	28	5.250.000	Kec Sigaluh
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	14	14	5.000.000	14	5.250.000	Kec Sigaluh
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	14	14	5.000.000	14	5.250.000	Kec Sigaluh
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	4	0	0	0	0	Kec Sigaluh
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	0	1	1.300.000	1	1.365.000	Kec Sigaluh
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	15	6	8.000.000	6	8.400.000	Kec Sigaluh

Bidang urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
			Tahun 2026		Prakiraan maju Tahun 2027		Sumber
			Target	Pagu	Target	Pagu	Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(14)
Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah dokumen yang terfasilitasi dalam Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	0	12	8.000.000	12	8.400.000	Kec Sigaluh
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	0	12	8.000.000	12	8.400.000	Kec Sigaluh
	JUMLAH			2.889.139.310		3.033.596.000	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sigaluh Tahun 2026 merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sigaluh Tahun 2025-2029. Renja Kecamatan Sigaluh selanjutnya menjadi platform operasional bagi Kecamatan Sigaluh dalam menjalankan programnya dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah tahun 2025-2029. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja Kecamatan Sigaluh digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Sigaluh setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026 dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disepakati.
2. Kerangka pendanaan dalam Renja Kecamatan Sigaluh masih bersifat sementara, sehingga masih dimungkinkan terjadi perubahan pagu yang disebabkan oleh pengurangan, penambahan, dan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan maupun antar sub kegiatan dalam kerangka penyusunan anggaran secara terpadu dan berbasis kinerja.
3. Renja Kecamatan Sigaluh menjadi acuan bagi Camat Sigaluh dan segenap jajarannya serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, serta menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rakhmat dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026.

Rancangan Awal Renja Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahaan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daetah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rancangan Awal Renja Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 terdiri dari pendahuluan, hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, tujuan dan sasaran rencana kerja dan Anggaran/pendanaan serta penutup. Penyusunan Rancangan Awal Renja ini berpedoman pada RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029, Renstra Kecamatan Wanadadi Tahun 2025-2029, dan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026.

Kami menyadari dalam penyusunan Rancangan Awal Renja ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan rancangan rencana kerja ini sehingga rencana kerja ini dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan Program dan kegiatan pada tahun 2026 dan kami dapat mencapai target kinerja yang sudah ditentukan.

Banjarnegara, 10 Agustus 2025

CAMAT WANADADI,

SAPTO AJI, SH, M.Si

NIP. 19690929 199403 1 010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL 1

KATA PENGANTAR 2

DAFTAR ISI 3

DAFTAR TABEL 4

BAB I PENDAHULUAN 5

1.1. Latar Belakang 5

1.2. Landasan Hukum 6

1.3. Maksud dan Tujuan 10

1.4. Sistematika Penulisan 10

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN WANADADI TAHUN SEBELUMNYA 12

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Wanadadi Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kecamatan Wanadadi 12

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Wanadadi 31

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 34

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 37

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. 58

2.6 Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 61

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN WANADADI... 62

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 62

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Wanadadi..... 63

3.3. Program dan Kegiatan 67

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN WANADADI 88

BAB V PENUTUP 92

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Wanadadi dan Pencapaian Renstra Kecamatan Wanadadi s.d. Tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara 18

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara..... 33

Tabel 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 Kabupaten Banjarnegara 39

Tabel 2.5. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Banjarnegara 58

Tabel 2.6. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Banjarnegara 61

Tabel 3.3. Program dan Kegiatan Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara 68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan yang diatur melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan pembentukan tim penyusun, penelaahan rancangan awal RKPD, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, hingga pada penyempurnaan berdasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2009 tentang RPJP. Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, penyusunan Renja Perangkat Daerah juga mengacu pada Renja Kementerian/Lembaga terkait, serta Renja Perangkat Daerah Provinsi terkait. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin

keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2. Landasan Hukum

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
26. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 14);
27. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 15);

28. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja perangkat daerah;
29. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 22 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun dengan maksud untuk:

a. Menjabarkan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029 ke dalam rencana program kegiatan prioritas Tahun 2026 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Renja K/L Tahun 2026 dan Renja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;
b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerapan anggaran berbasis kinerja.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

a. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA-DPA dalam Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2026, yang dalam penyusunannya didahului dengan menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026;
b. Sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Tahun 2026; dan
c. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Kecamatan Wanadadi Tahun 2026 disusun berdasarkan sistematika yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi Rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang

daerah dan rencana pembangunan jangka menengah serta tata cara perubahan RPJMD dan RKPJ, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah.

BAB 2 : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dan atau pokok-pokok DPRD.

BAB 3 : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan tahun 2026.

BAB 4 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran RKPD.

BAB 5 : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN WANADADI TAHUN SEBELUMNYA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Wanadadi Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah meliputi urusan Pemerintahan penunjang fungsi kewilayahan.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 terdiri dari 4 program, 10 kegiatan, dan 25 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 2.268.000.000,-, dengan fokus utama pada bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran sesuai dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa serta tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Wanadadi selalu memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan secara terus menerus mengambil langkah – langkah perbaikan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik dan optimal, bersih serta akuntabel sehingga mampu menciptakan pelayanan prima yang memenuhi standar pelayanan terhadap permintaan masyarakat.

Program/kegiatan/sub kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah yang meliputi:

1. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan Pelayanan Terpadu yang ada di Kecamatan, Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana baik secara kualitas maupun kwantitas (belum semua pelaksana dan pejabat struktural terpenuhi fasilitas laptop dan printer) sebagai penunjang pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah.
3. Masih perlunya pendampingan bagi aparatur pemerintahan Desa dalam mengerjakan buku-buku administrasi desa dan Produk Hukum .

Dari 4 program, 10 kegiatan, dan 25 sub kegiatan yang ada dalam Renja Perangkat Daerah tersebut, program/kegiatan/ sub kegiatan yang disetujui untuk dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024 terdiri dari 4 program, 9 kegiatan, dan 18 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.2.055.452.696,-

Program/kegiatan/sub kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah yang meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan 6 (enam) kegiatan yakni :
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

      Terdiri dari 2 (Dua) sub Kegiatan :

      a.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;

      a.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

      Terdiri dari 3 (Tiga) sub Kegiatan :

      b.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

      b.2.Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD

      b.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD
   c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

      Terdiri dari 2 (dua) sub Kegiatan :

c.1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

c.2. Penyedia bahan logistik kantor

d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

d.1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Terdiri dari 2 (dua) sub Kegiatan :

e.1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

e.2. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Terdiri dari 3 (tiga) sub Kegiatan :

f.1.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

f.2.Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

f.3 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasara Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, terdiri dari 1 (satu) kegiatan yakni :

a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang di Limpahkan Kepada Camat

Terdiri dari 2 (dua) sub Kegiatan :

a.1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perijinan**;**

a.2. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan

3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan dengan 1 (satu) kegiatan yakni :

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, Terdiri dari 1(satu) sub Kegiatan :

a.1. Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan

4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan dengan 1 (satu) kegiatan yakni :

a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
   Terdiri dari 1 (satu) sub Kegiatan :
   a.1. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024, terjadi beberapa perubahan yang meliputi penambahan atau pengurangan pagu. Perubahan tersebut tidak merubah rincian program kegiatan dan sub kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah yaitu 4 program, 10 kegiatan, dan 18 sub kegiatan , namun hanya merubah anggaran sebesar Rp 2.055.452.696,00 menjadi Rp. 1.889.467.783,00.

Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2024, anggaran yang yang berkurang terdapat pada Program/Kegiatan/Subkegaitan berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan :
   2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dan sub Kegiatan
      1.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
2. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
   Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Pengurangan anggaran ini selain untuk efisiensi sebagian di alihkan untuk kegiatan lain yang membutuhkan anggaran lebih besar. Adapun Anggaran yang mengalami peningkatan pada perubahan anggaran tahun 2024 ini adalah pada anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor.

Dinamika yang terjadi selama tahun 2024 turut mempengaruhi keberhasilan pencapaian Renja Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2024, tercatat adanya hasil yang baik yang dikarenakan

adanya pencapaian maupun pelampauan target kinerja yang telah ditentukan..

Pencapaian Nilai SAKIP Kecamatan Wanadadi pada Tahun 2024 adalah 67,55 /B ini melebihi target yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu 63,00/CC dengan demikian capaian kinerja Kecamatan Wanadadi untuk Nilai SAKIP adalah 107%. Target IKM untuk tahun 2024 adalah 88,20 meningkat hingga 100% dengan mencapai nilai 88,25. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan ke Camat, sub kegiatan Pelaksanaan Urusan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang di limpahkan jumlah penyaluran SPPT PBB mencapai 100% pada triwulan kedua dan menjadi peringkat 1 pelunasan PBB tercepat se Kabupaten Banjarnegara.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Faktor SDM yang mendukung dalam melaksanakan komitmen untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya;
2. Faktor Anggaran yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing.;
3. Koordinasi Internal yang mendukung.
4. Melakukan himbauan secara intensif di setiap kegiatan, rapat, upacara untuk mendukung dan berpartisipasi aktif terhadap rencana kerja Kecamatan seperti pelunasan PBB secara tepat waktu tanpa adanya penyelewengan dari petugas pungut pajak.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka Pada tahun perencanaan selanjutnya, perlu diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mempertahankan atau meningkatkan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja Kecamatan Wanadadi, diantaranya:

1. Monitoring dan Koordinasi internal yang intensif dalam upaya meningkatkan Kinerja pegawai dan pelayanan terhadap masyarakat.
2. Prioritas Perencanaan yang tepat sasaran, dan pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan agar kegiatan bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

3. Anggaran belanja yang dapat mendukung semua Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang direncanakan secara maksimal

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
s.d. Tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
					Target Renja Perang kat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)	(11)=10/4
I	**Urusan Kewilayahan**									
	Bidang Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	63.00/ CC	62.70 / C	63.00 / C	67.55/B	107%	67.55/ B	67.70/B	100%
		Nilai SKM Kecamatan	88,20	88,01	88,20	88,25	100%	88.30	88.05	99.72%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)	(11)=10/4
I	**PROGRAM PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota yang terlaksana**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
1	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100%**	**100%**
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18 Dok	18 Dok	18 Dok	18 Dok	100%	18 Dok	18 Dok	100%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)	(11)=10/4
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	31 Lap	31 dok	31 Lap	31 Lap	100%	31 Lap	31 Lap	100%
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100%**	**100%**
2.1	Penyedia gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 o/b	13 Orang	15 o/b	12 o/b	100%	13 o/b	13 o/b	100%
2.2	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	60 Dok	60 Dok	60 Dok	60 Dok	100%	60 Dok	60 Dok	100%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)	(11)=10/4
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	38 Lap	38 Lap	38 Lap	38 Lap	100%	38 Lap	38 Lap	100%
3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
3.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
3.2	Penyedia bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 paket	11 paket	11 paket	11 paket	100%	12 paket	12 paket	100%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)	(11)=10/4
4	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	100%	100%
4.1	Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	-	-	-	-	-	9 Unit	9 Unit	100%
4.2	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	-	1 Unit	-	-	-	-	-	-
4.3	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	2 Unit	0 Unit	2 Unit	2 Unit	**100%**	2 Unit	2 Unit	100%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)	(11)=10/4
5	**Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
5.1	Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	100%	12 Lap	12 Lap	100%
5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	100%	12 Lap	12 Lap	100%
6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)	(11)=10/4
6.1	Penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	7 Unit	8 Unit	8 Unit	100%	8 Unit	8 Unit	100%
6.2	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	-	3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	3 Unit	100%
6.3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	6 Unit	100%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)	(11)=10/4
6.4	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 Unit	-	4 Unit	4 Unit	100%	4 Unit	4 Unit	100%
II	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	-	**100%**	-	-	-	**100%**	**100%**	**100%**
7	**Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum**	**Persentase Terselengga ranya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum yang terlaksana**	-	**100%**	-	-	-	**100%**	**100%**	**100%**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)	(11)=10/4
7.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	-	1 Dok	-	-	-	1 Dok	1 Dok	100%
8	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
8.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perijinan Non Usaha	Jumlah dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan	100 Dok	61 Dok	100 Dok	115 Dok	115 %	100	100 Dok	100%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)	(11)=10/4
8.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	2040 Lap	2286 Lap	1700 lap	2040 Lap	100%	1750 lap	1750 lap	100%
8.3	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	20772 Lap	20772 Lap	20772 Lap	20772 Lap	100%	20772 Lap	20772 Lap	100%
III	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100%**	**100%**
9	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Prosentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100%**	**100%**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)	(11)=10/4
9.1	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6 dok	4 dok	6 dok	+	100%	6 dok	6 dok	100%
IV	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**100 %**
10.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah dokumen yang di fasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	22 Dok	22 Dok	22 Dok	22 Dok	100	22 Dok	22 Dok	100%
10.2	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11 Dok	11 Dok	11 Dok	11 Dok	100%	22 Dok	22 Dok	100%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)	(11)=10/4
10.3	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang di fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2	-	1	2	200%	-	-	-
10.4	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-	-	-	-	-	1 dok	1 dok	100%
10.5	Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan keteriban umum	Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	19 Dok	19 Dok	19 Dok	19 Dok	100%	19 Dok	19 Dok	100%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)	(11)=10/4
	Fasilitasi penyusunan program pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah dokumen Fasilitasi dalam Penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa	11 Dok	11 Dok	11 Dok	11 Dok	100%	22 Dok	22 Dok	100%
10.8	Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 Lap	11 Lap	12 Lap	12 Lap	100%	12 Lap	12 Lap	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan pelayanannya, Kecamatan Wanadadi mengampu 2 Indikator. Yaitu Indikator Nilai SAKIP Kecamatan dan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat. Dari 2 indikator tersebut, keduanya berstatus tercapai yaitu Nilai SAKIP , dimana target nilai 63.00/C mampu mencapai Nilai 67.55/ B dan indikator yang lain yaitu. nilai SKM dengan Target nilai 88.20 mencapai nilai 88,25
Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian Target Nilai tersebut antara lain adalah:

1. Telah tersedianya Standar Operasional Pelayanan dan maklumat Pelayanan;
2. Petugas pelayanan telah memahami syarat dan prosedur dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.;
3. Memaksimalkan sarana dan prasarana yang tersedia dalam memberikan pelayanan;
4. Komunikasi dan sosialisasi yang baik dengan petugas pelayanan yang ada di desa;
5. Melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya kepada atasan.
6. Monitoring dan evaluasi yang intensif dalam upaya meningkatkan kinerja serta pendisiplinan jam kerja sehingga bisa menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, dapat beroperasi secara efisien, efektif, responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan wilayah kerja sesuai tugas, pokok dan fungsi masing – masing Aparatur Sipil Negara.
7. Melakukan himbauan di setiap kegiatan, didesa untuk mendukung dan berpartisipasi aktif terhadap rencana kerja Kecamatan seperti percepatan pelunasan PBB .
8. Monitoring dan evaluasi yang intensif pada petugas pemungut Pajak guna menghindari penyelewengan dan keterlambatan dalam penyetoran Pajak tersebut.

Terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah khususnya di wilayah Kecamatan Wanadadi menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.

Adapun upaya-upaya dilakukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat meliputi:

1. Diadakannya pembinaan dan pendampingan administrasi ke desa – desa yang dilakukan oleh Tim Kecamatan sesuai jadwal yang dtentukan, minimalnya 2 kali dalam 1 tahun.
2. Himbauan dari atasan kepada ASN yang ada untuk lebih meningkatkan kualitas kinerjanya berdasarkan tupoksinya dan meminimalisir indisipliner.
3. Melakukan himbauan di setiap kegiatan untuk mendukung dan berpartisipasi aktif terhadap rencana kerja Kecamatan seperti percepatan pelunasan PBB secara tepat waktu tanpa adanya penyelewengan dari petugas pungut pajak dan mempedomani 12 etika budaya malu aparatur pemerintah desa sehingga aparatur pemerintah desa akan lebih loyal dalam bekerja sesuai tupoksinya dan tertib administrasi pemerintahan desa dan meningkatkan kedisiplinan jam kerja.

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK LPPD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Nilai SAKIP Kecamatan	-	-	62.70	63,00/B	67.55/B	67.70	62.70	67.55	67.70/B	67.80/B	Nilai SAKIP
	Nilai SKM Kecamatan	-	-	88,01	88,20	88,30	88.10	88.10	88.25	88,05	88,10	Nilai IKM

Pada target kinerja tahun 2025 dan 2026 ada ketidak sesuaian dengan Dokumen Renstra Tahun 2023-2026, pada Dokumen Renstra Tahun 2023-2026 tercantum sebagai berikut :

No	Indikator	Target Nilai	
		Tahun 2025	Tahun 2026
1	Nilai SAKIP Kecamatan	64.50	70.00
2	Nilai SKM Kecamatan	88.30	88.40

Perubahan target kinerja untuk tahun 2025 dan 2026 dilakukan karena menyesuaikan capaian kinerja pada tahun 2025.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Wanadadi

Kecamatan Wanbadadi dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan urusan pemerintahan dalam 3 urusan, yaitu membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa serta tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan berdasarkan hasil evaluasi, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk tahun 2025 mencakup 4 urusan tersebut. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah diantaranya adalah:

1. Tidak semua karyawan/karyawati dapat memanfaatkan / mengoperasikan sarana/prasarana yang berupa teknologi informasi. Dalam hal ini Kapasitas, kualitas dan kuantitas SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi belum optimal.
2. Terbatasnya sarana dan prasarana aparatur yang ada di Kecamatan Wanadadi ;
3. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur pengurusan dokumen kependudukan dan Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan.

Permasalahan tersebut, jika tidak diselesaikan dapat menjadi *constraint* dalam pencapaian visi dan misi Bupati maupun capaian indikator lainnya. Beberapa dampak dari adanya permasalahan dan hambatan tersebut meliputi:

1. Sumber Daya Manusia yang ada tidak semua memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan sehingga dalam pelaksanaan tugas,

pokok dan fungsi tidak relevan dengan uraian tugas dan menghambat tercapainya indikator kerja karena harus ada karyawan/karyawati yang harus mengoperasikan atau melaksanakan tugas di luar tugas utamanya;

2. Keterbatasan sarana dan prasarana menyebabkan kecepatan dan ketepatan penyetoran data maupun laporan menjadi lebih lambat;
3. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur pengurusan dokumen pribadi sehingga butuh waktu lebih banyak untuk menyelesaikan pelayanan untuk memberikan penjelasan atau pengertian kepada masyarakat

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi, peningkatan kualitas birokrasi, dan meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan pengguna layanan akan meningkatkan kebutuhan akan adanya penyediaan produk layanan yang semakin baik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi-inovasi dalam menunjang peningkatan pelayanan publik secara berkesinambungan.

Beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, yaitu:

1. Meningkatkan mutu pelayanan dengan meningkatkan kemampuan petugas pelayanan sehingga pelayanan langsung terhadap masyarakat umum akan lebih optimal.
2. Menambah sarana dan prasarana yang memadai untuk memfasilitasi pelayanan dan kinerja Pegawai di Kecamatan Wanadadi.
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan tertib administrasi desa dengan cara pengawasan dan pendampingan langsung ke desa-desa di seluruh wilayah Kecamatan Wanadadi oleh tim Kecamatan.

4. Meningkatkan koordinasi lintas sektor guna meningkatnya sinkronisasi dan integrasi kegiatan diwilayah kecamatan Wanadadi
5. Mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta meningkatkan nilai survey kepuasan masyarakat dan meningkatkan pelayanan prima.
6. Memanfaat anggaran yang terbatas dengan sebaik mungkin untuk mencapai target program/kegiatan yang sudah disepakati bersama.

Berdasarkan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan tersebut, dapat diinventarisasi beberapa isu strategis. Inventarisasi isu-isu strategis tahun 2026 didapatkan dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal Kabupaten Banjarnegara sampai dengan tahun 2026. Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan pembangunan. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2024, sebagai berikut:

1. Masih terbatasnya kualitas dan kwantitas pegawai yang ada di Kecamatan Wanadadi sehingga tugas dan fungsi aparatur pemerintah kurang optimal;
2. Masih terbatasnya sarana dan prasarana baik secara kualitas maupun kuantitas .
3. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
4. Perlunya pendampingan dan pembinaan bagi perangkat desa dalam melaksanakan tertib administrasi di Desa.

2.4 Review..

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Tahun 2005-2029.

Berdasarkan Renstra Tahun 2005-2029, prioritas arah kebijakan sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Wanadadi pada tahun 2026 meliputi:

1. Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP.
2. Optimalisasi pelaksanaan pelayanan publik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Optimalisasi fungsi koordinasi kecamatan dengan perangkat desa, OPD, dan stakeholder lain.

Adapun Program yang dilaksanakan di Kecamatan Wanadadi pada tahun 2006 adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggeraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026, anggaran belanja yang dialokasikan untuk Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara diusulkan sebesar Rp 2.003.166.230,- yang terbagi dalam 5 program 12 kegiatan dan 28 sub kegiatan. Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dilaksanakan mulai Tahun 2024. Secara rinci analisis kebutuhan

anggaran belanja program kegiatan dan sub kegiatan terhadap Rancangan Awal RKPD tersaji pada Tabel 2.4.

'Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Tujuan : Meningkatnya aksesibilitas layanan pemerintah dalam urusan	Kab. Banjarnegara	**Indeks Pelayanan Publik**	**64,70**	**2.003.166.230**	**Tujuan : Meningkatnya aksesibilitas layanan pemerintah dalam urusan**	Kab. Banjarnegara	**Indeks Pelayanan Publik**	**64,70**	**1.967.718.950**	
	Sasaran Strategis : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah urusan kewilayahan	Kec. Wanadadi	**Nilai SAKIP Kecamatan**	**B (67,70)**	**1.935.278.730**	**Sasaran Strategis : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah urusan kewilayahan**	Kec. Wanadadi	**Nilai SAKIP Kecamatan**	**B (67,70)**	**1.899.831.450**	
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	Kec. Wanadadi	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah	100%	**1.873.338.730**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	Kec. Wanadadi	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah	100%	**1.837.891.450**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	DAERAH KABUPATEN/KOTA		kabupaten/ Kota yang terlaksana			**DAERAH KABUPATEN/KOTA**		kabupaten/ Kota yang terlaksana			
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kec. Wana dadi	Presentase Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang	100%	**4.800.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kec. Wana dadi	Presentase Perencanaan pengang garan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang	100%	**4.800.000**	
1. 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec . Wana dadi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14	2.240.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec . Wana dadi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14	2.240.000	
1. 2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Kec . Wana dadi	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	13	2.560.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Kec . Wana dadi	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	13	2.560.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Realisasi Kinerja					Realisasi Kinerja			
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kec . Wana dadi	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	**1.597.083.390**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kec . Wana dadi	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	**1.597.083.485**	
2.1	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Kec . Wana dadi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	1.572.343.390	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Kec . Wana dadi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	1.572.343.485	
2.1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec . Wana dadi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujia/Verifikasi Keuangan SKPD	12	23.460.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec . Wana dadi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	23.460.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kec . Wanadadi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16	1.280.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec . Wanadadi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	16	1.280.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kec . Wana dadi	Persentase administrrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	**106.538.760**	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec Wana dadi	Persentase administrrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	**106.538.765**	
3.1	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Kec . Wana dadi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	7.013.500	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Kec Wana dadi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	7.013.505	
3.2	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Kec . Wana dadi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15	99.525.260	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Kec Wana dadi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15	99.525.260	
4	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang**	Kec . Wana dadi	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	**51.087.480**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang**	Kec Wana dadi	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	**15.640.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Urusan Pemerintah Daerah		Penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia			**Urusan Pemerintah Daerah**		Penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia			
4.1	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Kec . Wana dadi	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan Lainnya yang Disediakan	4	46.947.480	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Kec Wana dadi	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan Lainnya yang Disediakan	4	11.500.000	
4.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan lainnya	Kec . Wana dadi	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau bangunan Lainnya yang Disediakan	5	4.140.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan lainnya	Kec Wana dadi	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau bangunan Lainnya yang Disediakan	5	4.140.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kec . Wana dadi	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100%	**41.320.600**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kec Wana dadi	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100%	**41.320.800**	
5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec . Wana dadi	Jumah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terbayarkan	12	6.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec Wana dadi	Jumah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terbayarkan	12	6.000.000	
5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec . Wana dadi	Jumlah Laporan Penyediaan jasa administrasi perkantoran	12	35.320.600	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec Wana dadi	Jumlah Laporan Penyediaan jasa administrasi perkantoran	12	35.320.600	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			yang disediakan					yang disediakan			
6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kec . Wana dadi	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Daerah yang terlaksana	100%	**72.508.500**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kec Wana dadi	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Daerah yang terlaksana	100%	**72.508.400**	
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec . Wana dadi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9	45.614.800	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec Wana dadi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9	45.614.800	
6.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Kec. Wana dadi	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang	4	23.955.600	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Wana dadi	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang	4	23.955.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Bangunan Lainnya		dipelihara / direhabilitasi					dipelihara / direhabilitasi			
6.3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Wanadadi	Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana dan Prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	6	2.938.100	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Wanadadi	Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana dan Prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	6	2.938.100	
II	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Kec . Wanadadi	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terlaksana	Nilai SKM	**61.940.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Kec . Wanadadi	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terlaksana	Nilai IKM	**61.940.000**	
7	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana**	Kec . Wanadadi	Persentase terselenggaranya koordinasi Pemeliharaan	100%	**3.000.000**	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana**	Kec . Wanadadi	Persentase terselenggaranya koordinasi	100%	**3.000.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelayanan Umum		Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum yang terlaksana			**Pelayanan Umum**		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum yang terlaksana			
7.1	Koordinasi/Sinergitas dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec . Wanadadi	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergitas dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1	3.000.000	Koordinasi/Sinergitas dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec . Wanadadi	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergitas dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1	3.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
8	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Kec . Wana dadi	Persentase pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada camat yang terlaksana	100%	**58.940.000**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Kec . Wana dadi	Persentase pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada camat yang terlaksana	100%	**58.940.000**	
8.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec . Wana dadi	Jumlah Dokumen pelayanan Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12	-	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec . Wana dadi	Jumlah Dokumen pelayanan Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12	-	
8.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait	Kec . Wana dadi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12	3.600.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait	Kec . Wana dadi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12	3.600.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	dengan Nonperijinan		terkait dengan non perijinan			dengan Nonperijinan		terkait dengan non perijinan			
8.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec . Wana dadi	Jumlah Laporan Pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	1	55.340.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang D?ilimpahkan	Kec . Wana dadi	Jumlah Laporan Pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	1	55.340.000	
2	**Sasaran Strategis : Meningkatnya Efektivitas koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan desa/kelurahan**	Kec . Wana dadi	**Indeks Desa di Wilayah Kecamatan**	**64,70**	**67.887.500**	**Sasaran Strategis : Meningkatnya Efektivitas koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan desa/kelurahan**	Kec . Wana dadi	**Indeks Desa di Wilayah Kecamatan**	**64,70**	**67.887.500**	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		Persentase lembaga desa/kelurahan	100%	**17.450.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**		Persentase lembaga desa/kelurahan di kecamatan	100%	**17.450.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	DESA DAN KELURAHAN		di kecamatan yang terfasilitasi			**DESA DAN KELURAHAN**		yang terfasilitasi			
	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa		Persentase Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang terlaksana	100%	**5.700.000**	**Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa**		Persentase Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang terlaksana	100%	**5.700.000**	
	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan		Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	1 Dokumen	5.700.000	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan		Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	1 Dokumen	5.700.000	
	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan		Persentase Pemberdayaan lembaga kemasyarakat	100%	**11.750.000**	**Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan**		Persentase Pemberdayaan lembaga kemasyarakat	100%	**11.750.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			an tingkat Kecamatan					an tingkat Kecamatan			
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	2 lembaga	11.750.000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	2 lembaga	11.750.000	
III	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Kec . Wanadadi	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terlaksana	Nilai SAKIP	**13.500.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Kec . Wanadadi	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terlaksana	Nilai SAKIP	**13.500.000**	
9	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Kec . Wanadadi	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai pelaksanaan	100%	**13.500.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Kec . Wanadadi	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai pelaksanaan	100%	**13.500.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Tugas kepala Daerah yang terlaksana					Tugas kepala Daerah yang terlaksana			
9.1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec . Wana dadi	Jumlah Dokumen tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6	13.500.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec . Wana dadi	Jumlah Dokumen tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6	13.500.000	
IV	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Kec . Wana dadi	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa yang Terlaksana	100%	**36.937.500**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Kec . Wana dadi	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa yang Terlaksana	100%	**36.937.500**	
10	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan**	Kec . Wana dadi	Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi	100%	**36.937.500**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan**	Kec . Wana dadi	Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi	100%	**36.937.500**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana			**Pemerintahan Desa**		Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana			
10.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec . Wana dadi	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	22	4.100.000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec . Wana dadi	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	22	4.100.000	
10.2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec . Wana dadi	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	11	3.200.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec . Wana dadi	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pelaksanaan	11	3.200.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								emilihan Kepala Desa			
10.3	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec . Wanadadi	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelengaraan ketentraman dan ketertiban umum	-	-	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec . Wanadadi	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelengaraan ketentraman dan ketertiban umum	-	-	
10.4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	22	3.600.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	22	3.600.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
10.5	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec . Wanadadi	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dok	5.400.000	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec . Wanadadi	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dok	5.400.000	
10.6	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec . Wanadadi	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelengaraan ketentraman dan ketertiban umum	6	2.700.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec . Wanadadi	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelengaraan ketentraman dan ketertiban umum	6	2.700.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
10.7	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec . Wana dadi	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	22	2.400.000	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec . Wana dadi	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	22	2.400.000	
10.8	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec . Wana dadi	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam pendampingan desa di wilayahnya	12	15.537.500	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec . Wana dadi	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam pendampingan desa di wilayahnya	12	15.537.500	
			Jumlah		**2.003.166.230**			**Jumlah**		**1.967.718.950**	

Berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2025, tidak ada hal yang menjadi catatan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan musrenbang kecamatan dan forum konsultasi publik telah disampaikan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui aplikasi SIPD. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2026 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Permasalahan	Besaran/ Volume	Catatan
1	Bantuan Keuangan kepada Desa-Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) Kecamatan	Tapen	Jalan rusak	1 Paket	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
2	Bantuan Keuangan kepada Desa-Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) Kecamatan	Kasilib	Jalan rusak	1 Paket	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
3	Peningkatan jalan Kabupaten Wanakarsa - Karangkemiri	Desa Wanakarsa	Jalan sudah rusak	2000 x 4 m	DPUPR
4	Penerangan Jalan Umum	Desa Gumingsir-Linggasari	Jalan Kabupaten Gelap	10 titik	Dinas Perhubungan

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Permasalahan	Besaran/ Volume	Catatan
5	Penerangan Jalan Umum	Desa Medayu	Penerangan Jalan Umum	20 titik	Dinas Perhubungan
6	Penerangan Jalan Desa	Desa Kandangwangi	Penerangan Jalan Desa	20 titik	Dinas Perhubungan
7	Pavingisasi jalan tengah dan drainase pasar desa	Pasar Wanadadi	Pavingisasi jalan tengah dan drainase pasar desa	147 x 3,5	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
8	Pembangunan drainase jalan kabupaten	jalan raya Tapen Wanadadi	Pembangunan drainase jalan kabupaten	800 m	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
9	Pembangunan Talud dan drainase jalan kabupaten	Kasilib	Drainase jalan wilayah dusun Semampir sampai Kasilib terjadi banjir	1000	DPUPR
10	Peningkatan jalan sipedang-wanakarsa(Jembatan kadus 3 dan 4, pengaspalan jalan kadus 3s.d Karabaok)	Lemahjaya	Jembatan sempit	6 x8 , 6 x8	DPUPR
11	Peningkatan Jalan Karangjambe Sawangan	Karangjambe	Jalan Ablas		DPUPR
12	IPAL Komunal	Karangkemiri RW 03	Masih banyak warga yang belum memiliki Jamban Sehat	2 unit	DPKPLH
13	Peningkatan Jaringan irigasi Kabupaten	Blok Kamalan Linggasari	Saluran irigasi blok kamalan yang merupakan irigasi	225 m	DPUPR

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Permasalahan	Besaran/ Volume	Catatan
			kewenangan kabupaten rusak parah.		
14	Pembangunan RTLH	Wanakarsa	Terdapat Rumah yang sudah tidak layak huni	1 paket	DPUPR
15	Peningkatan Irigasi Clangap lewat Desa Gumingsir	Gumingsir	Irigasi rusak banyak air yang terbuang percuma	4 paket	Dishub
16	Rehabilitasi Jalan Kabupaten (Medayu- Paseh) melalui Kletak	Medayu	Jalan Rusak	2 paket	Dinas Perhubungan
17	Pengaspalan Jalan Desa	Kandangwangi	Jalan desa banyak yang sudah rusak	1 paket	DPUPR
18	Pembangunan Jembatan JUT Desa Wanadadi	Wanadadi	Belum adanya Jembatan permanen	5 x 5	Bankeu
19	Peningkatan Sarpras Pariwisata	Tapen	Lokasi wisata kurang lampu penerangan	12 titik	Bankeu
20	Pelatihan Peternakan, perikanan, pertanian dan ekonomi kreatif serta digital	Kasilib	Kapasitas SDM Petani, peternak dan warga secara umum masih kurang	5 keg	Dintankan
21	Talud jalan raya Sipedang Wanakarsa	Lemahjaya	Jalan sudah terkikis	17 x5	DPUPR
22	Pembangunan JUT dan irigasi blok Liangan kiri	Karangjambe	Belum adanya JUT		DPUPR

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Permasalahan	Besaran/ Volume	Catatan
23	Pengaspalan ruas jalan lingkar Karangkemiri-Wanakarsa	Karangkemiri	Jalan rusak	1 km	DPUPR
24	Peningkatan Jaringan irigasi Kabupaten	Linggasari	Saluran irigasi blok talukunting s.d Ngranti, Linggamerta sering kekurangan air	175 m	DPUPR

2.6. Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan hasil reses anggota DPRD, melalui aplikasi SIPD telah disampaikan usulan program dan kegiatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.6

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2026 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Validasi
	Nihil				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN WANADADI

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tema pembangunan nasional untuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 adalah "Kedaulatan Pangan, Energi, serta Ekonomi yang Produktif serta Inklusif". Tema ini menjadi dasar prioritas pembangunan nasional yang meliputi dua klaster utama: kedaulatan pangan dan energi, serta ekonomi yang produktif dan inklusif, sesuai dengan RPJMN 2025-2029 dan visi-misi presiden terpilih.

Tema ini dirancang untuk mengarahkan program prioritas nasional dan memandu penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026.

Dua Klaster Utama Pembangunan

1. Kedaulatan Pangan dan Energi:
   Klaster ini memfokuskan pada penguatan ketahanan pangan dan kemandirian energi di Indonesia.
2. Ekonomi yang Produktif dan Inklusif:
   Klaster ini bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang mampu melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan berbagai sektor, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih luas.

Tema ini menjadi landasan bagi seluruh instansi pemerintah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahun 2026, yang harus selaras dengan prioritas nasional tersebut.

Adapun Tujuan pembangunan nasional pada tahun 2026 adalah untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera, dengan fokus pada kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi. Ini mencakup prioritas seperti penguatan SDM dan daya saing, reformasi birokrasi digital, pertumbuhan

ekonomi hijau, pengembangan wilayah yang merata, serta peningkatan ketahanan nasional terhadap guncangan global. .

Sesuai dengan Perbup Banjarnegara No. 36 Tahun 2022 Pasal 738 yang menyatakan bahwa Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, maka Kecamatan Wanadadi berusaha untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik demi mendukung Program Pemerintah yang telah ditetapkan dan mendukung terwujudnya tujuan yang telah ditetapkan

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Guna Mendukung pencapaian tujuan pembangunan Nasional di tahun 2026 Pemerintah kabupaten Banjarnegara telah merumuskan visi Misi Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Banjarnegara 2025-2029, Visi dan Misi yang tercantum dalam RKPD dan RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029 .

Visi yang akan dicapai adalah "**Banjarnegara Maju dan Sejahtera**" . Adapun Misi yang merupakan turunan dari pokok-pokok visi yang telah didentifikasi sebelumnya akan dilaksanakan melalui 5 (lima) Misi yaitu :

1. Meningkatkan Infrastruktur dan Pelayanan Publik
2. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal
3. Meningkatkan Kualitas dan Akses Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan Sosial.
4. Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.
5. Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Transparan.

Tujuan yang akan diwujudkan selama periode 2025-2029 adalah “Terwujudnya Banjarnegara maju dan sejahtera” yang diukur melalui indikator PDRB per kapita dan angka kemiskinan yang akan ditempuh melalui 4 sasaran strategis, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat
2. Meningkatnya perekonomian daerah yang berdaya saing dan berbasis potensi lokal secara berkelanjutan
3. Meningkatnya infrastruktur yang mendukung perekonomian dan kesejahteraan Masyarakat
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif

Adapun sasaran strategis yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam pencapaian visi misi Kepala Daerah sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Pagentan sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara dari 4 (empat) sasaran strategis tersebut adalah Sasaran Strategis ke-4 yaitu :

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif dengan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi.

   Meningkatnya profesionalisme aparatur daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, beretika, dan bertanggung jawab, serta mampu mendukung pembangunan daerah yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat

Bertitik tolak dari kewenangan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu, dalam mencapai Visi Kabupaten Banjarengara, maka Kecamatan Wanadadi mempunyai peran dan fungsi menggerakan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah dalam menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan. Terutama dikaitkan dengan pelaksanaan pelimpahan kewenangan yang secara mutlak harus didukung oleh sumberdaya manusia aparatur yang mampu mengelola tugas-tugas pelayanan secara optimal, efektif dan efisien, serta mampu merumuskan kebijakan-kebijakan yang implementatif yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, yang pada muaranya mewujudkan Visi Kabupaten Banjarnegara.

Adapun Misi yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam pencapaian visi misi Kepala Daerah sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Wanadadi sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara tersebut adalah Misi Kelima yaitu :

Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Transparan.

dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab ;

Meningkatnya partisipasi dan kesadaran politik masyarakat terutama menyangkut hak dan kewajiban warga negara serta institusionalisasi partai politik dalam kegiatan politik, meningkatnya profesionalisme aparatur daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, beretika, dan bertanggung jawab, serta mampu mendukung pembangunan daerah yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat, meningkatnya perkembangan sistem dan iklim demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik yang dapat diukur dengan adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum,

birokrasi yang profesional dan netral, dan masyarakat yang mandiri, Meningkatnya kemampuan dan kemandirian daerah dalam mendukung pembangunan daerah, menguatnya kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah, serta meningkatnya hubungan kerja sama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Wanadadi selalu memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat secara terus menerus mengambil langkah – langkah perbaikan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik, bersih dan akuntabel sehingga mampu menciptakan pelayanan prima yang memenuhi standar pelayanan terhadap permintaan masyarakat yang tentunya di dukung dengan fasilitasi sarana dan prasarana yang memadai sehingga akan terwujud tata kelola pemerintahan yang baik di Kecamatan Wanadadi.

Dalam Upaya pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2025-2029 dan memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan aparatur pemerintah yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dan RENSTRA Kecamatan Wanadadi Tahun 2025-2029 Kecamatan Wanadadi menetapkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaannya.

Rencana Strategis Peralihan tahun 2025-2029 pada hakikatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terealisasinya program secara otomatis untuk perkantoran. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, Program

peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, Program penataan administrasi kependudukan, program peningkatan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dan program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa.

Sasaran strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai 3 tahun. Untuk mencapai tujuan Kecamatan Wanadadi memformulasikan sasaran strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya manusia aparatur serta dengan terfasilitasinya sarana dan prasarana yang dibutuhkan sehingga dapat tercapai target kinerja 100%. Penambahan bahan logistik kantor untuk pemenuhan kebutuhan logistik kantor selama 1 tahun berjalan dan didukung sarana dan prasarana yang memadai yang akan berpengaruh terhadap kinerja aparatur serta kelancaran birokrasi ataupun tata kelola pemerintahan yang baik tentunya di Kecamatan Wanadadi.

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Wanadadi selalu memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan secara terus menerus mengambil langkah – langkah perbaikan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik dan optimal, bersih serta akuntabel sehingga mampu menciptakan pelayanan prima yang memenuhi standar pelayanan terhadap permintaan masyarakat.

Upaya dalam pencapaian visi misi Kepala Daerah sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Wanadadi Program/kegiatan/sub kegiatan Kecamatan Wanadadi yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.3

RENCANA KERJA ORGANISASI KECAMATAN WANADADI

KECAMATAN WANADADI

TAHUN 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						KECAMATAN WANADADI									
	7					**UNSUR KEWILAYAHAN**									
	7	**01**				**KECAMATAN**			1.967.718.950					2.039.621.890.	
1	**7**	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketercapaian target kinerja perangkat daerah	100%					100%		
	7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-Persentase Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	100%				Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan,	100%		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
												akuntabel, dan partisipatif			
	7	**01**	**01**	**2.01**	**0001**	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Dokumen	2.240.000	Kab. Banjarnegara, Wanadadi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	14 Dokumen	6.000.000	Kecamatan Wanadadi
	7	**01**	**01**	**2.01**	**0006**	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	2.560.000	Kab. Banjarnegara, Wanadadi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	13 Laporan	4.000.000	Kecamatan Wanadadi

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-Persentase Administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana	100%				Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	100%		
	7	**01**	**01**	**2.02**	**0001**	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/bulan	1.572.343.485	Kab. Banjarnegara, Wanadadi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	13 Orang/bulan	1.572.343.390	Kecamatan Wanadadi
	7	**01**	**01**	**2.02**	**0003**	**Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	23.460.000	Kab. Banjarnegara, Wanadadi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	12 Dokumen	23.460.000	Kecamatan Wanadadi
	7	**01**	**01**	**2.02**	**0007**	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD**									
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	1.280.000	Kab. Banjarnegara, Wanadadi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	16 Laporan	2.000.000	Kecamatan Wanadadi
	7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-Persentase Administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	100%				Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif	100%-		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
												dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif			
	7	**01**	**01**	**2.06**	**0002**	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.013.505	Kab. Banjarnegara, Wanadadi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	1 Paket	10.000.000	Kecamatan Wanadadi
	7	**01**	**01**	**2.06**	**0004**	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	99.525.260	Kab. Banjarnegara, Wanadadi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan	15 Paket	120.000.000	Kecamatan Wanadadi

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
												tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif			
	7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-Persentase Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	-100%				Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	-100%		
	7	**01**	**01**	**2.07**	**0006**	**Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	11.500.000	Kab. Banjarnegara, Wanadadi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan,	2 Unit	50.000.000	Kecamatan Wanadadi

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
												akuntabel, dan partisipatif			
	7	**01**	**01**	**2.07**	**0010**	**Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**									
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	4.140.000	Kab. Banjarnegara, Wanadadi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	4 Unit	5.000.000	Kecamatan Wanadadi
	7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-Persentase Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana	100%				Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	100%-		
	7	**01**	**01**	**2.08**	**0002**	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	6.000.000	Kab. Banjarnegara, Wanadadi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	12 Laporan	6.000.000	Kecamatan Wanadadi
	7	**01**	**01**	**2.08**	**0004**	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	35.320.800	Kab. Banjarnegara, Wanadadi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	12 Laporan	35.320.600	Kecamatan Wanadadi
	7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	-Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang	100%-				Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif	100%-		Kecamatan Wanadadi

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pemerintahan Daerah	urusan pemerintah daerah					dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif			
	7	**01**	**01**	**2.09**	**0001**	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	45.614.800	Kab. Banjarnegara, Wanadadi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	9 Unit	45.614.800	Kecamatan Wanadadi
	7	**01**	**01**	**2.09**	**0009**	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	23.955.500	Kab. Banjarnegara, Wanadadi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan	4 Unit	23.955.600	Kecamatan Wanadadi

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
												tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif			
	7	**01**	**01**	**2.09**	**0010**	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	2.938.100	Kab. Banjarnegara, Wanadadi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	4 Unit	4.000.000	Kecamatan Wanadadi
2	**7**	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase layanan yang sesuai dengan standar pelayanan**	**100%**					**100%**		
	7	**01**	**02**	**2.03**		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	-Persentase terselenggaraanya pemeliharaan sarana dan prasaran pelayanan umum	**100%**				Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan	**100%**		Kecamatan Wanadadi

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
												tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif			
	7	**01**	**02**	**2.03**	**0001**	**Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum**									
							Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	3.000.000	Kab. Banjarnegara, Wanadadi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	1 Dokumen	3.000.000	Kecamatan Wanadadi
	7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	-Persentase Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang terlaksana	100%				Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan,	100%-		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
												akuntabel, dan partisipatif			
	7	**01**	**02**	**2.04**	**0001**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha**									
							Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen		Kab. Banjarnegara, Wanadadi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif			Kecamatan Wanadadi
	7	**01**	**02**	**2.04**	**0002**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan**									
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	3.600.000	Kab. Banjarnegara, Wanadadi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	12 Laporan	3.600.000	Kecamatan Wanadadi

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	**01**	**02**	**2.04**	**0003**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan**									
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	55.340.000	Kab. Banjarnegara, Wanadadi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	1 Laporan	55.340.000	Kecamatan Wanadadi
3	**7**	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase lembaga desa/kelurahan di kecamatan yang terfasilitasi**	**100%**					**100%**		
	7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Persentase Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang terlaksana	100%				Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	100%		Kecamatan Wanadadi

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	**01**	**03**	**2.01**	**0003**	**Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan**									
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	5.700.000	Kab. Banjarnegara, Wanadadi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	1 Laporan	5.700.000	Kecamatan Wanadadi
	7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Persentase Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan	100%				Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	100%		
	7	**01**	**03**	**2.03**	**0002**	**Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan**									
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga	11.750.000	Kab. Banjarne	DANA ALOK	Penguatan tata kelola	2 Lembag	11.750.000	Kecamatan Wanadadi

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kemasyarakatan		gara, Wanadadi, Semua Kel/Desa	ASI UMUM (DAU)	pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	a Kemasyarakatan		
4	**7**	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase penanganan konflik di wilayah**	**100%**					**100%**		
	7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang terlaksana	100%				Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	100%		
	7	**01**	**05**	**2.01**	**0008**	**Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan**									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6 Dokumen	13.500.000	Kab. Banjarnegara, Wanadadi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	6 Dokumen	13.500.000	Kecamatan Wanadadi
5	**7**	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa yang tertib administrasi desa**	**100%**					**100%**		
	7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Persentase Fasilitasi,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana	100%				Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	100%		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	**01**	**06**	**2.01**	**0001**	**Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa**									
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	22 Dokumen	4.100.000	Kab. Banjarnegara, Wanadadi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	22 Dokumen	5.000.000	Kecamatan Wanadadi
	7	**01**	**06**	**2.01**	**0002**	**Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa**									
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	22 Dokumen	3.200.000	Kab. Banjarnegara, Wanadadi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	22 Dokumen	4.000.000	Kecamatan Wanadadi

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	**01**	**06**	**2.01**	**0003**	**Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa**									
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	22 Dokumen	3.600.000	Kab. Banjarnegara, Wanadadi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	22 Dokumen	4.000.000	Kecamatan Wanadadi
	7	**01**	**06**	**2.01**	**0009**	**Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa**									
							Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	5.400.000	Kab. Banjarnegara, Wanadadi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	1 Dokumen	5.400.000	Kecamatan Wanadadi

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	**01**	**06**	**2.01**	**0011**	**Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**									
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	19 Dokumen	2.700.000	Kab. Banjarnegara, Wanadadi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	19 Dokumen	2.700.00	Kecamatan Wanadadi
	7	**01**	**06**	**2.01**	**0016**	**Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa**									
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	22 Dokumen	2.400.000		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	22 Dokumen	2.400.000	
	7	**01**	**06**	**2.01**	**0017**	**Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya**									
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 Laporan	15.537.500	Kab. Banjarnegara, Wanadadi,	DANA ALOKASI UMU	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif	12 Laporan	15.537.500	Kecamatan Wanadadi

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										Semua Kel/Desa	M (DAU)	dan kolaboratif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif			
						Jumlah Pagu			**1.967.718.950**					**2.039.621.890**	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN WANADADI

Program pada Kecamatan Wanadadi merupakan program prioritas dalam Renstra 2025-2029. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPD selanjutnya dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Pemilihan untuk masing-masing program/ kegiatan di Kecamatan Wanadadi adalah Rencana Program dan kegiatan prioritas pembangunan tahun 2026 dijabarkan ke dalam semua urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten Banjarnegara yaitu sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 6 kegiatan yang diarahkan pada :
   1.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   Terdiri dari 2 (dua) sub Kegiatan :
   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   Terdiri dari 3 (tiga) sub Kegiatan :
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
   c. Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
   1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah
   Terdiri dari 2 (dua) sub Kegiatan :
   a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

b. Penyedia bahan logistik kantor

1.4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Terdiri dari 2 (dua) sub Kegiatan :

a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya

1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Terdiri dari 2 (dua) sub Kegiatan :

a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

b. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Terdiri dari 3 (tiga) sub Kegiatan :

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

b. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu :

2.1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan dengan 1 (satu) sub kegiatan :

a. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

.

2.2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat. Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) Sub kegiatan yaitu :

a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan Non Usaha.
b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan non Perijinan.
c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan 2 (dua) kegiatan :

3.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan :

a. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan

3.3 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan, terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan

a. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu

4.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan

a. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan 1 (satu) kegiatan yaitu :

5.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa dengan 7 (tujuh) sub kegiatan yaitu :

a. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.

b. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa;
c. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
d. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
e. Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
f. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
g. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Wanadadi Tahun 2026 merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Wanadadi Tahun 2025-2025. Renja Kecamatan Wanadadi ini selanjutnya menjadi platform operasional bagi Kecamatan Wanadadi dalam menjalankan programnya dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah tahun 2025-2025. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja Kecamatan Wanadadi digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Wanadadi setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026 dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disepakati.
2. Kerangka pendanaan dalam Renja Kecamatan Wanadadi ini masih bersifat sementara, sehingga masih dimungkinkan terjadi perubahan pagu yang disebabkan oleh pengurangan, penambahan, dan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan maupun antar sub kegiatan dalam kerangka penyusunan anggaran secara terpadu dan berbasis kinerja.
3. Renja Kecamatan Wanadadi ini menjadi acuan bagi Camat dan segenap jajarannya serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, serta menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Ditetapkan di Banjarnegara

Wanadadi, 10 Agustus 2025

CAMAT WANADADI,

SAPTO ARI, SH, M.Si

NIP. 19680129 199403 1 010

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan yang diatur melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan pembentukan tim penyusun, penelaahan rancangan awal RKPD, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, hingga pada penyempurnaan berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang RKPD. Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, penyusunan Renja Perangkat Daerah juga mengacu pada Renja Kementerian/Lembaga terkait, serta Renja Perangkat Daerah

Provinsi terkait. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renja Kecamatan Susukan Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
   tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
    Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Tahun 2025-2029
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun

2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
26. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 14);
27. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 15);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun dengan maksud untuk :

Menjabarkan RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 ke dalam rencana program kegiatan prioritas Tahun 2026 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Renja K/L Tahun 2026 dan Renja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;

1. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerapan anggaran berbasis kinerja.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pedoman penyusunan RKA-DPA dalam Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2026;
2. Instrumen evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Tahun 2026;
3. Media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Susukan Tahun 2026 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah.

BAB 2 : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dan atau pokok-pokok DPRD.

BAB 3 :TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan tahun 2026.

BAB 4 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran RKPD.

BAB 5 :PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Susukan Tahun 2026 disusun untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis, berkaitan dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Urusan yang menjadi kewenangan Kecamatan Susukan meliputi urusan Pemerintahan fungsi penunjang kewilayahan.

Renja Kecamatan Susukan Tahun 2026 yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 terdiri dari 4 program, 9 kegiatan, dan 24 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.2.137.507.235 dengan fokus utama mendukung sasaran pemerintah daerah sebagaimana sudah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029.

Tahun 2025 merupakan tahun pertama periode Renstra Kecamatan Susukan Tahun 2025-2029 dan mendasarkan hasil evaluasi RKPD tahun 2024 yang telah dilaksanakan, Kecamatan Susukan sudah melaksanakan seluruh program dan kegiatan dengan baik.

Secara umum realisasi capaian program dan kegiatan telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Tidak terdapat realisasi capaian Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
2. Tidak terdapat Program/Kegiatan yang melebihi target yang telah ditetapkan
3. Realisasi Program/Kegiatan yang sesuai target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain :

1. Komitmen dari pimpinan dalam melaksanakan tupoksi cukup tinggi
2. Perencanaan kinerja yang tepat sasaran
3. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan output yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Program/kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah yang meliputi :

1. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat
2. Kurangnya pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap proses perencanaan pembangunan daerah
3. Terbatasnya kapasitas aparatur desa dalam melaksanakan tertib administrasi pemerintahan desa
4. Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan belum sesuai dengan target yang sudah ditetapkan
5. Belum optimalnya koordinasi lintas sektoral antara pemangku

Kebijakan Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, beberapahal yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan pada tahun perencanaan selanjutnya antara lain :

1. Konsistensi pimpinan dalam melaksanakan tupoksi secara optimal
2. Meningkatkan kapasitas SDM dalam menghadapi tantangan dinamika pembangunan yang sangat dinamis sehingga diperlukan inovasi dan kreatifitas yang lebih tinggi dalam peningkatan efektifitas kinerja
3. Meningkatkan kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai dokumen kendali dalam pelaksanaan program dan kegiatan

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024 disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Akhir Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah/kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	100%	8 dokumen	8 dokumen	100%
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	5 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	100%	7 dokumen	7 dokumen	100%

		Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Akhir Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 orang/bulan	13 orang/bulan	13 orang/bulan	100%	13 orang/bulan	11 orang/bulan	85%
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50 dokumen	50 dokumen	50 dokumen	100%	50 dokumen	50 dokumen	100%
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Seme steran SKPD	7 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	4 dokumen	100%
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 paket	2 paket	2 paket	100%	1 paket	1 paket	100%

		yang Disediakan							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Akhir Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 paket	13 Paket	11 Paket	85%	11 paket	11 paket	100%
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 unit	6 unit	6 unit	100%	1 unit	1 unit	100%
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/rehabili tasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si	2 unit	1 unit	1 unit	100%	-	-	100%

7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si	3 paket	2 paket	2 paket	100%	2 paket	2 paket	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Akhir Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%		100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 laporan	3 laporan	3 laporan	100%	3 laporan	3 laporan	100%
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan	2 laporan	100%
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang di Limpahkan Kepada Camat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Perizinan non Usaha yang Dilaksanakan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	-	-	100%

7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Akhir Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Akhir Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 dokumen	15 dokumen	15 dokumen	100%	-	-	100%
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-	-	-	-	2 dokumen	2 dokumen	100%
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 dokumen	15 dokumen	15 dokumen	100%	-	-	100%

7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 dokumen	15 dokumen	15 dokumen	100%	-	-	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Akhir Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	3 dokumen	15 dokumen	15 dokumen	100%	-	-	100%
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya							

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam pelaksanaan tupoksi Kecamatan Susukan sebagai upaya mendukung indikator kinerja sasaran pemerintah daerah yaitu Nilai IKM dan Nilai SAKIP, pada tahun 2024 kedua indikator tersebut telah berhasil tercapai sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah :

1. Pelaksanaan tugas dan layanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosuder (SOP) yang sudah ditetapkan
2. Perencanaan kinerja disusun secara cermat
3. Program dan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan dan berorientasi pada keluaran dan hasil
4. Keselarasan antar dokumen perencanaan

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2023-2026

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK LPPD	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Tahun 2024	Proyeksi Capaian Tahun 2025	Catatan Analisis
				2024	2025			
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	-	-	86,00	90.17	89.35	90.17	tercapai
2	Nilai SAKIP	-	-	B	B	B	B	tercapai

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Susukan dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu melaksanakan pelayanan urusan kewilayahan berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya antara lain adalah :

1. Belum seluruh desa terlayani oleh kecamatan karena keterbatasan SDM;
2. Rendahnya Kemampuan aparat desa dan belum tertib administrasi pemerintahan desa;
3. Rendahnya Sarana untuk Fasilitasi Pendampingan desa yang belum tertib administrasi;
4. Keterbatasan Tenaga atau SDM yang menjadi pendamping desa , sehingga masih adanya desa yang belum terdampingi;
5. Belum semua masyarakat terlayani dengan cepat karena keterbatasan pegawai;

Permasalahan tersebut, jika tidak diselesaikan dapat menjadi salah satu kendala dalam pencapaian visi dan misi Bupati maupun capaian indikator lainnya. Beberapa dampak dari adanya permasalahan dan hambatan tersebut meliputi :

1. Tidak selarasnya kebijakan antara pemerintah daerah dan desa, sehingga berimbas pada pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak mengerucut pada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah
2. Layanan kepada masyarakat kurang optimal
3. Kurang meratanya pembangunan di wilayah desa

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi dan efektifitas birokrasi menjadi tuntutan terhadap penyediaan produk layanan yang semakin baik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi-inovasi dalam menunjang peningkatan pelayanan publik secara berkelanjutan. Beberapa tantangan dan peluang sebagai upaya peningkatan layanan Perangkat Daerah, yaitu :

1. Tuntutan masyarakat dalam pelayanan yang cepat dan prima dan menuju professionalisme kerja ASN / Perangkat desa
2. Wacana kemandirian desa dan tuntutan adanya inovasi dan sistem aplikasi program dan kegiatan di desa
3. Adanya tenaga pendampingan di desa – desa guna mencapai pembengunan desa yang lebih baik
4. Peningkatan peran dan fasilitasi kecamatan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah, pelayanan sarana dan prasarana umum serta pencapaian standar pelayanan minimal

Berdasarkan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan tersebut, dapat diinventarisasi beberapa isu strategis. Inventarisasi isu-isu strategis tahun 2026 didapatkan dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal sampai dengan tahun 2024. Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan pembangunan. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2026, sebagai berikut:

1. Kebijakan fiskal pemerintah daerah yang dinamis sebagai imbas dari kebijakan pemerintah pusat, sehingga perlu adanya penyesuaian target indikator kinerja
2. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang layanan
3. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
4. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan tepat waktu
5. Terbatasnya ketersediaan anggaran dalam peningkatan kapasitas kompetensi aparatur sehingga layanan birokrasi belum berjalan secara optimal

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

RKPD Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 dan mengacu pada RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 serta memperhatikan RPJMN 2025-2029. Berdasarkan hal tersebut, prioritas kebijakan program sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2026 meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggeraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Pada Rancangan RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026, anggaran belanja yang dialokasikan untuk Kecamatan Susukan diusulkan sebesar Rp 2.137.507.235 yang terbagi dalam 4 program 9 kegiatan dan 24 sub kegiatan.

Secara rinci analisis kebutuhan anggaran belanja program kegiatan dan sub kegiatan terhadap Rancangan RKPD tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 Kabupaten Banjarnegara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (000)
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**2.000.516.635**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**2.000.516.635**
2	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**4.510,00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**4.510,00**
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Susukan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daera	14 Dokumen	3.250,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Susukan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daera	14 Dokumen	3.250,00
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Susukan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	1.260,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Susukan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	1.260,00
5	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**1.781.604.935**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**1.781.604.935**
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Susukan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	1.757.690.635	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Susukan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	1.757.690.635
7	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Susukan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	21.335.300	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Susukan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	21.335.300

8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kec. Susukan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	2.579.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kec. Susukan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	2.579.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (000)
9	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**80.279.300**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**80.279.300**
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Susukan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	8.825.200	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Susukan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	8.825.200
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Susukan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket	71.454.100	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Susukan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket	71.454.100
12	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**37.730.300**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**37.730.300**
13	Pengadaan Mebel	Kec. Susukan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	22.730.300	Pengadaan Mebel	Kec. Susukan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	22.730.300
14	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Susukan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	15.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Susukan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	15.000.000
15	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**43.720.800**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**43.720.800**
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Susukan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	8.400,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Susukan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	8.400,00
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Susukan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	35.320.800	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Susukan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	35.320.800
18	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**52.671.300**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**52.671.300**

19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Susukan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	36.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Susukan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	36.500.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (000)
20	Pemeliharaan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Susukan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	10 Unit	16.171.300	Pemeliharaan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Susukan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	10 Unit	16.171.300
21	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**102.240.600**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**102.240.600**
22	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**				**102.240.600**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**				**102.240.600**
23	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Susukan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	7.670.600	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Susukan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	7.670.600
24	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Susukan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	3.600,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Susukan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	3.600,00
25	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Susukan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	90.970.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Susukan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	90.970.000
26	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**				**13.750.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**				**13.750.000**
27	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**				**13.750.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**				**13.750.000**

28	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Susukan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5 Dokumen	13.750.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Susukan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5 Dokumen	13.750.000
29	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**				**21.000.000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**				**21.000.000**
30	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				**21.000.000**	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				**21.000.000**
31	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec. Susukan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desadan Peraturan Kepala Desa	45 Dokumen	2.000.000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec. Susukan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desadan Peraturan Kepala Desa	45 Dokumen	2.000.000
32	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Susukan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	15 Dokumen	2.500.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Susukan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	15 Dokumen	2.500.000
33	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Susukan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	30 Dokumen	2.500.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Susukan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	30 Dokumen	2.500.000
34	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Susukan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	2.000.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Susukan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	2.000.000
35	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Susukan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Dokumen	2.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Susukan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Dokumen	2.000.000

36	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec. Susukan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	15 Dokumen	2.000.000	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec. Susukan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	15 Dokumen	2.000.000
37	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Susukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 Laporan	8.000.000	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Susukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 Laporan	8.000.000

Berdasarkan rancangan RKPD Tahun 2026, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan yaitu :

1. Beberapa program tidak terakomodir dalam rancangan RKPD sehingga perlu penajaman prioritas dan evaluasi terhadap target indikator dalam RENSTRA
2. Program yang tidak terbiayai dimana sifatnya wajib dilaksanakan dialihkan ke program yang tersedia dengan mengefisiensikan kembali sumber daya yang tersedia

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	NIHIL				

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. Renja Perangkat Daerah selanjutnya menjadi petunjuk operasional bagi Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai arah kebijakan prioritas pembangunan pada RPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023- 2026.

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

1. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, dengan program prioritas sebagai berikut :
   a. Perlindungan sosial dan penguatan tata kelola kependudukan
   b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial
   c. Peningkatan produktivitas dan daya saing
2. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, dengan program prioritas sebagai berikut :
   a. Revolusi mental dan pembinaan ideologi pancasila
   b. Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan
   c. Memperkuat moderasi beragama
   d. Meningkatkan budaya literasi, inovasi dankreativitas
3. Memperkuat stabilitas polhukanham dan transformasi pelayanan publik, dengan program prioritas sebagai berikut :
   a. Konsolidasi demokrasi
   b. Penegakan hukum nasional
   c. Reformasi birokrasi dan tata kelola
   d. Menjaga stabilitas keamanan nasional

Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahun 2026 dijabarkan ke dalam semua urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten, untuk kecamatan adalah :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Terdiri dari 6 Kegiatan dan 13 sub kegiatan yang diarahkan sebagai penunjang operasional perangkat daerah.
b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan yang diarahkan untuk pelayanan kependudukan dan instensifikasi pemungutan PBB.
c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yang diarahkan untuk koordinasi lintas sektoral di wilayah kecamatan.
d. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terdiri dari 1 Kegiatan dan 7 sub kegiatam yang diarahkan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Visi dan Misi Pembangunan berdasarkan dokumen RPJPD Kabupaten Banjarnegara 2005-2029 adalah :

"*BANJARNEGARA MAJU BERBASIS PERTANIAN*"

Misi yang akan dilaksanakan sebagai turunan dari pokok-pokok visi yang telah dijabarkan adalah :

1. Mewujudkan masyarakat madani yang agamis, dengan menciptakan masyarakat Banjarnegara yang berkualitas, sehat, cerdas, produktif, kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlak mulia, serta menghargai dan menerapkan nilai-nilai luhur agama dan budaya Masyarakat

2. Mewujudkan perekonomian rakyat yang maju dengan mengembangkan serta memperkuat perekonomian daerah melalui sektor pertanian yang berorientasi pada pasar dengan senantiasa menjaga kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan dalam pengelolaannya melalui regulasi yang tepat dalam mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman dan damai
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab
4. Mewujudkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar

Bertitik tolak dari kewenangan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, dalam mencapai Visi Kabupaten Banjarnegara, maka Kecamatan Susukan mempunyai peran dan fungsi menggerakan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah dalam menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan. Terutama dikaitkan dengan pelaksanaan pelimpahan kewenangan yang secara mutlak harus didukung oleh sumberdaya manusia aparatur yang mampu mengelola tugas-tugas pelayanan secara optimal, efektif dan efisien, serta mampu merumuskan kebijakan-kebijakan yang implementatif yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, yang pada muaranya mewujudkan Visi Kabupaten Banjarnegara.

Adapun Misi tersebut dijabarkan kembali dalam tujuan dan sasaran yang dilaksanakan di tingakt kecamatan yaitu :

1. Tujuan : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Sasaran : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Memperkuat komitmen untuk menciptakan good and clean government dimana fokus utamanya adalah meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahanyang diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat.
2. Tujuan : Meningkatnya kualitas layanan publik
   Sasaran : Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik Memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat yang diharapkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat lebih dekat dan transparan.

Reformasi pada sektor aparatur daerah pada hakekatnya merupakan tindakan atau kegiatan pembaharuan secara konsepsional, sistematis, dan berkelanjutan. Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang ingin diwujudkan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditentukan dalam RENSTRA Kecamatan Susukan Tahun 2025-2029, dilakukan penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan disertai indikator kinerja program dan kegiatan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut per tahunnya.

4.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2026

Rumusan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dijabarkan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
   a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
   a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
4. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
   a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN SUSUKAN KAB. BANJARNEGARA
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN SUSUKAN						**2.137.507.235,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.137.507.235,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.137.507.235,00**							**0,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.000.516.635,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	4.510.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	-	-	0,00	KECAMATAN SUSUKAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				14 Dokumen	3.250.000,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	-		0,00	KECAMATAN SUSUKAN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				13 Laporan	1.260.000,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	-		0,00	KECAMATAN SUSUKAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.781.604.935,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	-	-	0,00	KECAMATAN SUSUKAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	1.757.690.635,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	-		0,00	KECAMATAN SUSUKAN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	21.335.300,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	-		0,00	KECAMATAN SUSUKAN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				16 Laporan	2.579.000,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	-		0,00	KECAMATAN SUSUKAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	80.279.300,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	-	-	0,00	KECAMATAN SUSUKAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	8.825.200,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	-		0,00	KECAMATAN SUSUKAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				11 Paket	71.454.100,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	-		0,00	KECAMATAN SUSUKAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	37.730.300,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	-	-	0,00	KECAMATAN SUSUKAN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	22.730.300,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	-		0,00	KECAMATAN SUSUKAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	15.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	-		0,00	KECAMATAN SUSUKAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	43.720.800,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	-	-	0,00	KECAMATAN SUSUKAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	8.400.000,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	-		0,00	KECAMATAN SUSUKAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	35.320.800,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	-		0,00	KECAMATAN SUSUKAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	52.671.300,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	-	-	0,00	KECAMATAN SUSUKAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	36.500.000,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	-		0,00	KECAMATAN SUSUKAN
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	16.171.300,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	-		0,00	KECAMATAN SUSUKAN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**102.240.600,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	102.240.600,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	-	-	0,00	KECAMATAN SUSUKAN
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	7.670.600,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	-		0,00	KECAMATAN SUSUKAN
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	3.600.000,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	-		0,00	KECAMATAN SUSUKAN
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	90.970.000,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	-		0,00	KECAMATAN SUSUKAN
3.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**13.750.000,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	13.750.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	-	-	0,00	KECAMATAN SUSUKAN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				5 Dokumen	13.750.000,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	-		0,00	KECAMATAN SUSUKAN
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**21.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	21.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	-	-	0,00	KECAMATAN SUSUKAN
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				45 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	-		0,00	KECAMATAN SUSUKAN
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				15 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	-		0,00	KECAMATAN SUSUKAN
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				30 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	-		0,00	KECAMATAN SUSUKAN
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	-		0,00	KECAMATAN SUSUKAN
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				4 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	-		0,00	KECAMATAN SUSUKAN
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				15 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	-		0,00	KECAMATAN SUSUKAN
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				12 Laporan	8.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	-		0,00	KECAMATAN SUSUKAN
	J U M L A H							**2.137.507.235,00**							**0,00**	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Renja Perangkat Daerah selanjutnya menjadi platform operasional bagi Perangkat Daerah dalam menjalankan programnya dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah tahun 2025-2029. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026 dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disepakati.
2. Kerangka pendanaan dalam Renja Perangkat Daerah masih bersifat sementara, sehingga masih dimungkinkan terjadi perubahan pagu yang disebabkan oleh pengurangan, penambahan, dan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan maupun antar sub kegiatan dalam kerangka penyusunan anggaran secara terpadu dan berbasis kinerja.
3. Renja Perangkat Daerah menjadi acuan bagi Kepala Perangkat Daerah dan segenap jajarannya serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, serta menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Ditetapkan di : Banjarnegara
pada tanggal : September 2025
CAMAT SUSUKAN

SUROSO, S.STP, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 198409042003121001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan yang diatur melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan pembentukan tim penyusun, penelaahan rancangan awal RKPD, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, hingga pada penyempurnaan berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang RKPD. Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, penyusunan Renja Perangkat Daerah juga mengacu pada Renja Kementerian/Lembaga terkait, serta Renja Perangkat Daerah

Provinsi terkait. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2. Landasan Hukum

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022.
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun

2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233).
26. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 84).
27. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun dengan maksud untuk :

a. Sebagai upaya kongkrit menindaklanjuti Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara 2023 – 2026, terutama dalam rangka mewujudkan Kecamatan Kalibening agar menjadi institusi yang bermutu untuk mewujudkan kemandirian masyarakat.
b. Mengoptimalkan peran Kecamatan Kalibening dalam melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat.
c. Meningkatkan dan mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam rangka mewujudkan good and clean governance.
d. Sebagai kerangka serta arah pembangunan untuk tahun 2026 dalam pencapaian Tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, Program serta sebagai tolok ukur pertanggungjawaban Kecamatan Kalibening pada akhir tahun anggaran.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

a. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA-DPA dalam Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2026, yang dalam penyusunannya didahului dengan menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026;

b. Sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Tahun 2026;
c. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun berdasarkan sistematika yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah.

BAB 2 : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dan atau pokok-pokok DPRD.

BAB 3 : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan tahun 2026.

BAB 4 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam

rangka pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran RKPD.

BAB 5 : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah meliputi urusan pemerintahan fungsi penunjang kewilayahan.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 terdiri dari 5 program, 11 kegiatan, dan 18 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar **Rp 2.174.022.349,-** (Dua Milyar Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) dengan fokus utama sesuai Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, Kecamatan memiliki tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Program/kegiatan/sub kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah yang meliputi:

1. Masih lemahnya pemahaman aparatur terhadap tupoksi dan koordinasi antar seksi dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
2. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan PATEN, dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
3. Kurang dan masih terbatasnya kemampuan SDM Perangkat Desa dalam penyelenggaraan tertib administrasi desa;

4. Masih kurangnya kesadaran aparatur pemerintah desa dalam memenuhi kewajiban terkait pelunasan PBB;
5. Adanya apatisme, rendahnya partisipasi, belum terpenuhinya keterwakilan perempuan dan terbatasnya pemahaman tentang isu sosial ekonomi dalam musrenbang;

Dari 6 program, 12 kegiatan, dan 29 sub kegiatan yang dalam Renja Perangkat Daerah tersebut, program/kegiatan/sub kegiatan yang disetujui untuk dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2026 terdiri dari 5 program, 11 kegiatan, dan 18 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar **Rp 2.174.022.349,-** (Dua Milyar Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah).

Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026, terjadi beberapa perubahan yang meliputi penambahan atau pengurangan pagu, penghapusan, penambahan atau pengurangan program/kegiatan/sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Perubahan tersebut **mengubah rincian dalam Renja Perangkat Daerah menjadi 5 program, 11, dan 18 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 2.174.022.349,-**.

Dinamika yang terjadi selama tahun 2026 turut mempengaruhi keberhasilan pencapaian Renja Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2026, tercatat adanya hasil yang baik yang dikarenakan adanya pencapaian maupun pelampauan target. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, meliputi; Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Perencanaan dan penyelarasan target kinerja dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang baik;

2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya.
3. Koordinasi Pemerintah Kecamatan dan Desa yang telah berjalan dengan baik;
4. Kekompakan Tim Pemungut Pajak dalam pelaksanaan tugas;
5. Mengerjakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka pada dasarnya semua program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2026 sudah berjalan sesuai dengan ketentuan akan tetapi masih banyak yang harus diperhatikan dan ditingkatkan kinerjanya agar sesuai dengan indikator kinerja

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2026 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
s.d. Tahun 2026* Kabupaten Banjarnegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2026			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2026	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2026	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Urusan Perencanaan	Nilai SKM	85,17	100	85,17	85,17	100	85,17	100	100
		Nilai SAKIP	B (62,55)	B (62,55)	B (62,55)	B (62,55)	B (62,55)	B (62,55)	B (62,55)	
		Posentase PBB Yg tersalurkan ke wajib pajak	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Prosentase keselarasan dokumen perencanaan**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	100%	100%	
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya kebutuhan kantor						7 dok	7dok	
	Koordinasi dan penyusunan laporan	Jumlah dokumen	12 dokunen	12 dokunen	12 dokunen	12	12 dokunen	12 dokunen	12 dokunen	

	capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	pelaporan yang disusun				dokunen				
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Prosentase ketepatan penyusunan dokumen pelaporan keuangan**	**100 %**	**100 %**						
		Jumlah ASN yang terbayarkan	12 asn	12 asn	12 asn	12 asn	12 asn	12 asn	12 asn	
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah pengelola keuangan yang terbayarkan	6 orang	6 orang	6 orang	6 orang	100			
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	Jumlah laporan keuangan yang disusun	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Prosentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi umum perangkat daerah**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100**			
	Penyedia bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang terpenuhi	11 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100 Paket	100		
	Penyedia Jasa Penunjang Urusan	**Prosentase ketersediaa**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**			

	Pemerintahan Daerah	**n jasa penunjang urusan pemerintah daerah**								
	Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah penyedia jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terpenuhi	21 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100	2 paket		
	Penyedia jasa pelayanan umum kantor	Jumlah tenaga administrasi perkantoran yang terbayarkan	3 orang	3 orang	3 orang	3 orang	100	3 org		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**		
	Penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	9 Unit	9 Unit	9 unit	9 unit	100	9 unit	9 unit	
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor, rumah dinas dan uala yang	2 Unit	2 Unit	2 unit	2 unit	100	2 unit	2unit	

		terpelihara								
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang terpelihara	3 unit	3unit	3 unit	3 unit	100	3 unit	3 unit	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									
	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Peizinan Non Usaha	Jumlah Pelayanan Peizinan Non Usaha yang terlayani	100%							
	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Peizinan	Jumlah pengelola operator siak yang terbayarkan	100%							
	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah pengelola SPPT PBB tersalurkan	100%							
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM									
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Prosentase penyelenggaraan Urusan Pemerintah**								

		an Umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan								
	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan	Jumlah pelaksanaan tugas forkompimca	100%							
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Prosentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**								
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah pemb peny.Peraturan Desa	16 desa							
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah pembinaan administrasi pemerintahan desa	16 Des							
	Fasilitasi pengelola keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah pembinaan pengelolaan keuangan desa dan	16 Des							

		pendayagunaan aset desa								
	Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah pembinaan trantibum	16 Des							
	Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah pembinaan penyusunan program PMD	16 Des							
	Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Jumlah koordinasi pendampingan desa								

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
s.d. Tahun 2026* Kabupaten Banjarnegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2026			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2026	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2026	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	UNSUR KEWILAYAHAN									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	**Nilai SAKIP**	62,55	62,55	B	B		B		

	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
	Administrasi Keuangan perangkat Daerah									
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji ASN yang terbayarkan		12	12 orang	12 orang	100%	12 orang	36 orang	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah jasa administrasi keuangan yang terbayarkan		6	6 orang	6 orang	100%	6 orang	18 orang	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi			1 paket	1 paket	100%	1 paket	3 paket	
	Penyediaan Bahan logistik kantor	Jumlah logistic yang terpenuhi			12 paket	12 paket	90%	12 paket	36 paket	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
	Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya Air dan listrik	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi			1 paket	1 paket	100%	1 paket	3 paket	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor				3 orang	3 orang	100%	3 orang	9 orang	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan									

	Pemerintahan Daerah									
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan peroranagn dinas atau kendaraan dinas jabatan				9 unit	9 unit	100%	9 unit	9 unit	
	Pemeliharaan/rehab gedung kantor dan bangunan lainya				0 paket	0 paket	0%	1 paket		
	Pemeliharaan/rehab sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya				2 paket	2 paket	100%	2 paket	6 paket	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat									
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait Nonperizinan				5 dok	5 dok	100%	5 dok	12 dok	
	Pelaksanan Urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan				16 desa	16 desa	100%	16 desa	16 desa	
	PBB									
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM									

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepada Daerah									
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terciptanya kondisi yang baik			12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA									
	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa									
	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Tersusunya peraturan desa yang bagus			16 desa	16 desa	100%	16 desa	16 desa	
	Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah fasilitasi ketertiban dan ketentraman desa			16 desa	16 desa	100%	16 desa	16 desa	
	fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah fasilitasi tata pemerintahan			16 desa	16 desa	100%	16 desa	16 desa	
	Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah pemberdayaan desa			16 desa	16 desa	100%	16 desa	16 desa	
	Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Jumlah desa yang mendapatkan pendampingan			16 desa	16 desa	100%	16 desa	16 desa	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan pelayanannya, Perangkat Daerah mengampu 2 Indikator. Dari 2 indikator tersebut, keduannya berstatus tercapai. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah :

1. Perencanaan dan penyelarasan target kinerja dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang baik;
2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya.
3. Koordinasi Pemerintah Kecamatan dan Desa yang telah berjalan dengan baik;
4. Kekompakan Tim Pemungut Pajak dalam pelaksanaan tugas;

Indikator yang tidak tercapai adalah Nilai IKM dan Nilai SAKIP. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaktercapaian Nilai IKM, antara lain :

1. Kecepatan pelayanan publik di kecamatan sering terganggu karena jaringan internet yang tidak stabil;
2. Fasilitas pelayanan publik di kantor kecamatan masih kurang;

Sedangkan faktor yang mempengaruhi ketidaktercapaian Nilai SAKIP, antara lain :

1. Belum terpenuhinya materi dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai ketentuan;
2. Sosialisasi dan pendampingan dalam penilaian SAKIP yang masih kurang dari instansi pengampu.
3. Kapasitas SDM yang masih terbatas dalam penyusunan dokumen perangkat daerah.

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK LPPD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2026	2026	2022	2026	2026	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	-	-	84	85	85	-	84,53	85,17	85,17	85,17	
2.	Indeks Penilaian SAKIP	-	-	C	B	B	B	B	B	B	B	
3.	Prosentase Pelunasan PBB	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

*) Kolom 3 diisi berdasarkan IKK outcome dalam lampiran Permendagri 18/2020

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan urusan pemerintahan dalam urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Kewilayahan Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk tahun 2026 mencakup urusan tersebut. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah diantaranya adalah:

1. Belum optimalnya etos kerja, budaya kerja dan disiplin kerja pegawai;
2. Masih kurangnya dukungan data informasi dari masyarakat , peraturan yang valid, akurat dan terintegrasi sebagai pedoman dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat;
3. Masih rendahnya keselarasan dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang ada;
4. Apatisme masyarakat dalam mengikuti musrenbang;
5. Masih kurangnya pemahaman masyarakat maupun aparatur desa tentang hakekat pembangunan nasional;
6. Masih terbatasnya kapasitas aparatur desa dalam melaksanakan tertib administrasi pemerintahan desa;
7. Masih kurangnya keseriusan masyarakat dan petugas pemungut dalam pelunasan PBB lebih awal;
8. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan siskamling dan rendahnya kesadaran aparatur Pemerintah Desa dalam menumbuh kembangkan Linmas.

Permasalahan tersebut, jika tidak diselesaikan dapat menjadi *constraint* dalam pencapaian visi dan misi Bupati maupun capaian indikator lainnya. Beberapa dampak dari adanya permasalahan dan hambatan tersebut meliputi:

1. Kurang tercapainya suatu kegiatan sesuai indikator kinerja
2. Tidak tercapainya sasaran kerja
3. Belum optimalnya hasil pekerjaan

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi, peningkatan kualitas birokrasi, dan meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan pengguna layanan akan meningkatkan kebutuhan akan adanya penyediaan produk layanan yang semakin baik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi-inovasi dalam menunjang peningkatan pelayanan publik secara kontinyu. Beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, yaitu:

1. Upaya peningkatan budaya kerja dan disiplin kerja pegawai.
2. Masih kurangnya jumlah Aparatur Kecamatan yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai dalam rangka mendukung optimalisasi pelayanan kapada masyarakat
3. Masih kurangnya sumber dana pendukung kerja
4. Peningkatan peran dan fasilitasi kecamatan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah, pelayanan sarana dan prasarana umum serta pencapaian standar pelayanan minimal.

Berdasarkan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan tersebut, dapat diinventarisasi beberapa isu strategis. Inventarisasi isu-isu strategis tahun 2026 didapatkan dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal Kabupaten Banjarnegara sampai dengan tahun 2026. Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan pembangunan. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2026, sebagai berikut:

1. Masih terbatas dan kurangnya kapasitas serta kompetensi perangkat desa
2. Fasilitas pelayanan publik serta sarana dan prasarana pendukung yang masih kurang memadai.
3. Masih adanya desa dengan angka stunting tinggi di wilayah Kecamatan Pandanarum
4. Daerah rawan bencana dengan intensitas kejadian yang cukup tinggi.

2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

RKPD Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Tahun 2005-2026 dan mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2026 dan mengacu pada Renstra Kecamatan Pandanarum Tahun 2023-2026. Berdasarkan hal tersebut, prioritas arah kebijakan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2026 meliputi :

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Akhir RKPD tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	UNSUR KEWILAYAHAN					**UNSUR KEWILAYAHAN**					
1)	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec Kalibening	Terpenuhinya dokumen perencanaan	100%	2.500.000	Pelaksanaan Perencanaan Perangkat Daerah	Kec Kalibening	Terpenuhinya dokumen perencanaan	100%	2.500.000	Kebutuhan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Kec Kalibening	Terpenuhinya penyusunan laporan pengelola keuangan	100%	2.500.000	Pelaksanaan Penyusunan laporan Kinerja Ikhtisar	Kec Kalibening	Terpenuhinya penyusunan laporan pengelola keuangan	100%	5.000.000	Kebutuhan

	SKPD										
	Administrasi Keuangan perangkat Daerah										
1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec Kalibening	Terpenuhinya gaji ASN	100%	1.724.755.412	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec Kalibening	Terpenuhinya gaji ASN	100%	2.020.000.000	Kebutuhan
2)	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Kec Kalibening	Terpenuhinya honor penanggungjawab pengelola keuangan	100%	21.660.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Kec Kalibening	Terpenuhinya honor penanggungjawab pengelola keuangan	100%	90.000.000	Kebutuhan
3)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kec Kalibening	Terpenuhinya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100%	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kec Kalibening	TerpenuhinyaLaporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100%	5000.000	Kebutuhan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah										
1)	Penyediaan Komponen	Kec Kalibenin	Jumlah instalasi	1 tahun	6.000.000	Penyediaan Peralatan dan	Kec Kalibening	Jumlah Peralatan	1 tahun	9.000.000	Kebutuhan

	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	g	listrik yang terpenuhi			Perlengkapan Kantor		dan Perlengkapan yang terpenuhi			
2)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec Kalibening	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang terpenuhi	1 tahun	9.652.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec Kalibening	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang terpenuhi	1 tahun	16.000.000	Kebutuhan
2)	Penyediaan Bahan logistik kantor	Kec Kalibening	Jumlah bahan logistik Kantor yang terpenuhi	1 tahun	53,636.600	Penyediaan Bahan logistik kantor	Kec Kalibening	Jumlah bahan logistik Kantor yang terpenuhi	1 tahun	210.000.000	Kebutuhan
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec Kalibening	Jumlah Peralatan dan mesin yang terpenuhi	1 tahun	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec Kalibening	Jumlah Peralatan dan mesin yang terpenuhi	1 tahun	60.000.000	Kebutuhan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
1)	Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya		Terpenuhinya pembayaran telepon/intern	1 tahun	13.200.000	Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya Air	Kec Kalibening	Terpenuhinya pembayara	1 tahun	15.000.000	kebutuhan

	Air dan listrik		et, listrk dan air			dan listrik		n telepon/internet, listrk dan air			
2)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor		Jumlah jasa administrasi kantor yang terpenuhi	1 tahun	61.981.200	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Kec Kalibening	Jumlah jasa administrasi kantor yang terpenuhi	1 tahun	65.000.000	kebutuhan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
1)	Penyediaan jasa Pemeliharaan Biaya pemelihaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec Kalibening	Terpeliharanya kendaraan dinas	1 tahun	45.300.000	Penyediaan jasa Pemeliharaan Biaya pemelihaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec Kalibening	Terpeliharanya kendaraan dinas	1 tahun	40.000.000	Kebutuhan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Kec Kalibening	Terpeliharanya peralatan kantor/komputer/printer	1 tahun	6.900.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, komputer dan printer	Kec Kalibenin	terpeliharanya Personal komputer dan printer	1 tahun	12.000.000	Kebutuhan
2)	**PROGRAM PENYELENGGARAAN**										

	PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum										
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec Kalibening	Terlaksananya Kordinasi vertikal terkait	1 tahun	-	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec Kalibening	Terlaksananya Kordinasi vertikal terkait	1 tahun	12.000.000	Kebutuhan
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat										
1)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec Kalibening	Terlayaninya permohonan perizinan non usaha	1 tahun	-	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec Kalibening	Terlayaninya permohonan perizinan non usaha	1 tahun	4.000.000	Kebutuhan

2)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait jumlah dengan Nonperizinan	Kec Kalibening	Terlayaninya permohonan KTP dan KK	1 tahun	3.600.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait jumlah dengan Nonperizinan	Kec Kalibening	Terlayaninya permohonan KTP dan KK	1 tahun	7.500.000	Kebtutuhan
2)	Pelaksanan Urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Kec Kalibening	Prosentase penyaluran sppt PBB	1 tahun	-	Pelaksanan Urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Kec Kalibening	Tersalurkannya SPPT PBB	1 tahun	62.000.000	Kebutuhan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa										
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec Kalibening	Terlaksananya musrenbangcam	1 tahun	-	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec Kalibening	Terlaksananya musrenbangcam	1 tahun	6.000.000	Tetap
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN										

	UMUM										
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan KetertibanUmum										
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec Kalibening	Terlaksananya koordinasi hubungan Tokoh agama	1 tahun	-	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec Kalibening	Terlaksananya koordinasi hubungan Tokoh agama	1 tahun	6.000.000	Kebutuhan
3)	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**										
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepada Daerah										
1)	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec Kalibening	Terciptanya kondisi yang baik	1 tahun	-	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec Kalibening	Terciptanya kondisi yang baik	1 tahun	21.000.000	Kebutuhan
4)	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**										

	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa										
1)	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec. Kalibening	Tersusunnya peraturan desa yang bagus	1 tahun	-	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Kec. Kalibening	Tersusunnya peraturan desa yang bagus	1 tahun	9.000.000	Kebutuhan
2)	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Kalibening	Jumlah Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 tahun	-	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Kalibening	Jumlah Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 tahun	6.000.000	Kebutuhan
2)	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Kalibening	Jumlah Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 tahun	-	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Kalibening	Jumlah Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 tahun	16.000.000	Kebutuhan
4)	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Kalibening	Jumlah Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 tahun	-	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Kalibening	Jumlah Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 tahun	5.000.000	Kebutuhan
5)	Fasilitasi Penyelenggaraa	Kec. Kalibenin	Jumlah Penyelenggara	1 tahun	9.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan	Kec. Kalibening	Jumlah Penyelengg	1 tahun	6.000.000	Kebutuhan

	n Ketenteraman dan Ketertiban Umum	g	an Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Ketenteraman dan Ketertiban Umum		araan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
6)	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec. Kalibening	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3 Desa	-	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec. Kalibening	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3 Desa	90.000.000	Kebutuhan
7)	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec. Kalibening	Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 tahun	-	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec. Kalibening	Jumlah Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 tahun	27.000.000	Kebutuhan
8)	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Kalibening	Terlaksanany a Koordinasi Pendampinga n Desa di Wilayahnya	1 tahun	-	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Kalibening	Terlaksanany a Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 tahun	12.000.000	Kebutuhan

Berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2026, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan yaitu:

1. Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor masih sangat minim dan usianya sudah tua sehingga sering mengalami kerusakan;
2. Bangunan gedung kantor banyak yang sudah mengalami kerusakan;
3. Kapasitas dan Kompetensi perangkat Desa masih rendah.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan musrenbang kecamatan dan forum konsultasi publik telah disampaikan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui aplikasi SIPD. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2026 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	NIHIL				

2.6. Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan hasil reses anggota DPRD, melalui aplikasi SIPD telah disampaikan usulan program dan kegiatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Pokok-Pokok Pikiran DPRD

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Validasi
1	Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah	Kec. Kali Bening		1 Paket	usulan
2	Penanggulangan Banjir Kec. Kalibening	Kec. Kali Bening		1 Paket	usulan

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Pandanarum tahun 2026 disusun dengan memperhatikan penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Selain itu, pengembangan isu-isu strategis daerah juga disusun dengan melakukan penelaahan terhadap isu-isu strategis nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 maupun kebijakan strategis nasional lainnya.

Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahun 2026 dijabarkan ke dalam semua urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten Banjarnegara, adalah :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 6 Kegiatan dan 12 sub kegiatan.
b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

   Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terdiri dari 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan.
c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

   Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan
d. Program Pembinaan dan Pengawasan dan Pemerintah Desa yang terdiri dari 1(satu) Kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan yaitu Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang diarahkan pada sub kegiatan Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa,Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa, Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagai bagian dari tahapan pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2026, maka Renja Perangkat Daerah mempedomani Renstra PD Tahun 2023-2026 RPJPD Tahun 2005-2026, Untuk itu diperlukan pemahaman mengenai visi RPJPD Tahun 2005-2026. Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.

Visi pembangunan dalam RPJPD Tahun 2005-2026 adalah:

BANJARNEGARA MAJU BERBASIS PERTANIAN

Visi Pembangunan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2026 ini mengarah pada pencapaian tujuan, cita-cita dan harapan masyarakat Kabupaten Banjarnegara. Visi pembangunan daerah tersebut harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, kesejahteraan, dan kelestarian yang ingin dicapai. Oleh karena itu, perlu kiranya diberikan penjelasan makna visi untuk mendapatkan kesamaan persepsi tentang muatan substansi filosofis yang terkandung, sehingga segenap pemangku kepentingan secara sinergis dan optimal dapat memberikan kontribusi dalam rangka pencapaiannya.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan, sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Dengan kata lain tujuan dan sasaran merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Tujuan dan sasaran dalam Renja Perangkat Daerah Kecamatan Pandanarum Tahun 2024-2026 diuraikan sebagai berikut:

a. Tujuan yang ke-5 adalah Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

b. Tujuan yang Ke 6 adalah Meningkatnya Kualitas Layanan Publik

   Sasaran:

   Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program pada Renja Perangkat Daerah merupakan program prioritas dalam Renstra 2023-2026. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam Renja Perangkat Daerah selanjutnya dijabarkan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Pemilihan untuk masing-masing program/ kegiatan dijabarkan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan 6 (enam) kegiatan yakni :
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      Terdiri dari 2 (dua) sub Kegiatan :
      a.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      a.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      Terdiri dari 3 (tiga) sub Kegiatan :
      b.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      b.2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
      b.3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran
   c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
      Terdiri dari 1 (satu) sub Kegiatan :
      c.1. Penyedia bahan logistik kantor
   d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Terdiri dari 1 (satu) sub Kegiatan :
      d.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      Terdiri dari 2 (dua) sub Kegiatan :
      e.1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
      e.2. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Terdiri dari 3 (tiga) sub Kegiatan :

f.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

f.2. Pemeliharaan/rehabilitatasi sarana prasarana gedung

f.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerntahan dan Pelayanan Publik, 2 (dua) kegiatan yakni :

a. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

Terdiri dari 1 (satu) sub Kegiatan :

a.1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang di Limpahkan Kepada Camat

Terdiri dari 3 (tiga) sub Kegiatan :

b.1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan perijinan non usaha

b.2. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perijinan

b.3. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan

3. Program Urusan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan dengan 1 (satu) kegiatan yakni :

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Terdiri dari 1 (satu) sub Kegiatan:

a.1. Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di wilayah kecamatan

4. Program Pembinaan dan Pengawasan Desa, dengan dengan 1 (satu) kegiatan yakni :

a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Terdiri dari 6 (enam) sub Kegiatan :

a.1. Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa

a.2. Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa

a.3. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

a.4. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa

a.5. Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan keteriban umum

a.6. Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. Renja Perangkat Daerah selanjutnya menjadi platform operasional bagi Perangkat Daerah dalam menjalankan programnya dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka sasaran pembangunan daerah tahun 2026. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026 dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disepakati.
2. Kerangka pendanaan dalam Renja Perangkat Daerah masih bersifat sementara, sehingga masih dimungkinkan terjadi perubahan pagu yang disebabkan oleh pengurangan, penambahan, dan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan maupun antar sub kegiatan dalam kerangka penyusunan anggaran secara terpadu dan berbasis kinerja.
3. Renja Perangkat Daerah menjadi acuan bagi Kepala Perangkat Daerah dan segenap jajarannya serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, serta menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal : Agustus 2024

Plt. Camat Kalibening,

CHASANUDIN, SE
Pembina
NIP. 196712261993031005

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rakhmat dan Karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026.

Rancangan Awal Renja Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rancangan Awal Renja Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 terdiri dari pendahuluan, hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, tujuan dan sasaran Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara, dan rencana kerja dan pendanaan serta penutup. Penyusunan Rancangan Awal Renja tersebut berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Tahun 2005-2026 dan mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2029 dan memperhatikan RPJMN 2020-2024 dan mengacu pada Renstra Kecamatan Pandanarum Tahun 2023-2026.

Kami menyadari dalam penyusunan Rancangan Renja ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan rancangan rencana kerja dimaksud.

Banjarnegara , 10 Agustus 2025

Plt. CAMAT PANDANARUM
KABUPATEN BANJARNEGARA

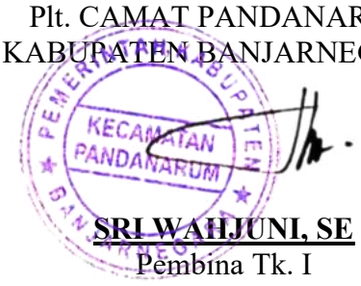

SRI WAHJUNI, SE
Pembina Tk. I
NIP. 197102172002122006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 6
1.4. Sistematika Penulisan 6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pandanarum Tahun 2023 dan Capaian Renstra Kecamatan Pandanarum Tahun 2023-2026 8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara 19
2.3. Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pandanarum 21
2.4. Review Terhadap RKPD 22
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. 30
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....
3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional 31
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara 31
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 32
BAB V PENUTUP 34

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara dan Pencapaian Renstra Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara s/d Tahun 2026 11

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Padanarum Kabupaten Banjarnegara 20

Tabel 2.4 Review Terhadap RKPD Tahun 2026 23

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 30

Tabel 2.6 Usulan Program dan Kegiatan dari pokok-pokok Pikiran DPRD Kepentingan Tahun 2026.....31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan yang diatur melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan pembentukan tim penyusun, penelaahan rancangan awal RKPD, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, hingga pada penyempurnaan berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang RKPD. Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, penyusunan Renja Perangkat Daerah juga mengacu pada Renja Kementerian/Lembaga terkait, serta Renja Perangkat Daerah

Provinsi terkait. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2. Landasan Hukum

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022.
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun

2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233).
26. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 84).
27. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun dengan maksud untuk :

a. Sebagai upaya kongkrit menindaklanjuti Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara 2023 – 2026, terutama dalam rangka mewujudkan Kecamatan Karangkobar agar menjadi institusi yang bermutu untuk mewujudkan kemandirian masyarakat.
b. Mengoptimalkan peran Kecamatan Pandanarum dalam melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat.
c. Meningkatkan dan mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam rangka mewujudkan good and clean governance.
d. Sebagai kerangka serta arah pembangunan untuk tahun 2026 dalam pencapaian Tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, Program serta sebagai tolok ukur pertanggungjawaban Kecamatan Pandanarum pada akhir tahun anggaran.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

a. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA-DPA dalam Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2026, yang dalam penyusunannya didahului dengan menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026;

b. Sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Tahun 2026;
c. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun berdasarkan sistematika yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah.

BAB 2 : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dan atau pokok-pokok DPRD.

BAB 3 : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan tahun 2026.

BAB 4 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam

rangka pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran RKPD.

BAB 5 : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disusun untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah meliputi urusan pemerintahan fungsi penunjang kewilayahan.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 terdiri dari 5 program, 12 kegiatan, dan 24 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 2.352.130.356,- (Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus lima Puluh Enam Rupiah) dengan fokus utama sesuai Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, Kecamatan memiliki tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Program/kegiatan/sub kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah yang meliputi:

1. Masih lemahnya pemahaman aparatur terhadap tupoksi dan koordinasi antar seksi dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
2. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan PATEN, dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
3. Kurang dan masih terbatasnya kemampuan SDM Perangkat Desa dalam penyelenggaraan tertib administrasi desa;

4. Masih kurangnya kesadaran aparatur pemerintah desa dalam memenuhi kewajiban terkait pelunasan PBB;
5. Adanya apatisme, rendahnya partisipasi, belum terpenuhinya keterwakilan perempuan dan terbatasnya pemahaman tentang isu sosial ekonomi dalam musrenbang;

Dari 4 program, 8 kegiatan, dan 17 sub kegiatan yang dalam Renja Perangkat Daerah tersebut, program/kegiatan/sub kegiatan yang disetujui untuk dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2026 terdiri dari 4 program, 8 kegiatan, dan 17 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 2.352.130.356,- (Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus lima Puluh Enam Rupiah)

Dinamika yang terjadi selama tahun 2026 turut mempengaruhi keberhasilan pencapaian Renja Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2026, tercatat adanya hasil yang baik yang dikarenakan adanya pencapaian maupun pelampauan target. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, meliputi; Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Perencanaan dan penyelarasan target kinerja dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang baik;
2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya.
3. Koordinasi Pemerintah Kecamatan dan Desa yang telah berjalan dengan baik;
4. Kekompakan Tim Pemungut Pajak dalam pelaksanaan tugas;
5. Mengerjakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka pada dasarnya semua program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2025

sudah berjalan sesuai dengan ketentuan akan tetapi masih banyak yang harus diperhatikan dan ditingkatkan kinerjanya agar sesuai dengan indikator kinerja

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2025 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
s.d. Tahun 2023* Kabupaten Banjarnegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	UNSUR KEWILAYAHAN									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Nilai SAKIP Kecamatan**	B	C	B	B		CC	C	CC
	Perencanaan, Penganggaran daen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Prosentase ketepatan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	7 dok	7 dok	7 dok	7 dok	100%	7 dok	7 dok	100%
	Koordinasi dan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	1 dok	100%
	Administrasi Keuangan perangkat Daerah	**Prosentase Ketepatan Penyusunan Pelaporan Keuangan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan dan semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	6 laporan	6 laporan	6 laporan	6 laporan	100%	6 laporan	6 laporan	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	15 orang	15 orang	15 orang	15 orang	15 orang	15 orang	15 orang	100%
			45 dok	45 dok	45 dok	45 dok	100%	45 dok	45 dok	100%

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Penyediaan Bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik yang disediakan	11 paket	11 paket	11 paket	11 paket	90%	11 paket	11 paket	100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100 %	2 unit	2 unit	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase **penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya Air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 laporan	13 laporan	13 laporan	13 laporan	100%	13 laporan	13 laporan	100%

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Prosentase Penyediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan peroranagn dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan perizinanya	12 unit	12 unit	12 unit	12 unit	100%	12 unit	12 unit	100%
	Pemeliharaan/rehab sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainya	Jumlah gedung kanto dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	2 unit	1 unit	100%
	Pemeliharaan/rehab sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainya	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang terpelihara	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	100%	6 Unit	6 Unit	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Prosentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada	**Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

	Camat	**yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana**								
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Jumlah laporan pelaksanaan perzinan non usaha	-	-	-	-	-	-	-	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada urusan pemerintahan	1.000 laporan	1.000 laporan	1.000 laporan	909 laporan	91 %	1.000 laporan	909 laporan	91%
	Pelaksanan Urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Prosentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepada Daerah	**Prosentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen tugas forum	12 dokumen	12 dokumen	6 kegiatan	6 kegiatan	100%	6 kegiatan	6 kegiatan	100%

		kordinasi pimpinan dikecamatan								
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase pemberdayaan masyarakat desa kelurahan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah dokumen lembaga kemasyarakatan								
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase tertib administrasi Pemerintahan Desa**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan ketentraman	8 dokumen	8 desa	1 dokumen	1 dokumen	100%	**100%**	1 dokumen	100%

		dan ketertiban umum								
	Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Jumlah laporan hasil koordinasi pendampingan desa diwilayahnya	8 laporan	8 desa	8 laporan	8 laporan	100%	0	8 laporan	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan pelayanannya, Perangkat Daerah mengampu 2 Indikator. Dari 2 indikator tersebut, keduannya berstatus tercapai. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah :

1. Perencanaan dan penyelarasan target kinerja dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang baik;
2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya.
3. Koordinasi Pemerintah Kecamatan dan Desa yang telah berjalan dengan baik;
4. Kekompakan Tim Pemungut Pajak dalam pelaksanaan tugas;

Indikator yang tidak tercapai adalah Nilai IKM dan Nilai SAKIP. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaktercapaian Nilai IKM, antara lain :

1. Kecepatan pelayanan publik di kecamatan sering terganggu karena jaringan internet yang tidak stabil;
2. Fasilitas pelayanan publik di kantor kecamatan masih kurang;

Sedangkan faktor yang mempengaruhi ketidaktercapaian Nilai SAKIP, antara lain :

1. Belum terpenuhinya materi dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai ketentuan;
2. Sosialisasi dan pendampingan dalam penilaian SAKIP yang masih kurang dari instansi pengampu.
3. Kapasitas SDM yang masih terbatas dalam penyusunan dokumen perangkat daerah.

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK LPPD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2026	2026	2023	2024	2026	2024	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	-	-	82	83	84	84	82,83	-	-	83	85	
1.	Indeks Penilaian SAKIP	-	-	CC	CC	CC	CC	B	-	-	CC	CC	

*) Kolom 3 diisi berdasarkan IKK outcome dalam lampiran Permendagri 18/2020

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan urusan pemerintahan dalam urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Kewilayahan Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk tahun 2026 mencakup urusan tersebut. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah diantaranya adalah:

1. Belum optimalnya etos kerja, budaya kerja dan disiplin kerja pegawai;
2. Masih kurangnya dukungan data informasi dari masyarakat , peraturan yang valid, akurat dan terintegrasi sebagai pedoman dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat;
3. Masih rendahnya keselarasan dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang ada;
4. Apatisme masyarakat dalam mengikuti musrenbang;
5. Masih kurangnya pemahaman masyarakat maupun aparatur desa tentang hakekat pembangunan nasional;
6. Masih terbatasnya kapasitas aparatur desa dalam melaksanakan tertib administrasi pemerintahan desa;
7. Masih kurangnya keseriusan masyarakat dan petugas pemungut dalam pelunasan PBB lebih awal;
8. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan siskamling dan rendahnya kesadaran aparatur Pemerintah Desa dalam menumbuh kembangkan Linmas.

Permasalahan tersebut, jika tidak diselesaikan dapat menjadi *constraint* dalam pencapaian visi dan misi Bupati maupun capaian indikator lainnya. Beberapa dampak dari adanya permasalahan dan hambatan tersebut meliputi:

1. Kurang tercapainya suatu kegiatan sesuai indikator kinerja
2. Tidak tercapainya sasaran kerja
3. Belum optimalnya hasil pekerjaan

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi, peningkatan kualitas birokrasi, dan meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan pengguna layanan akan meningkatkan kebutuhan akan adanya penyediaan produk layanan yang semakin baik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi-inovasi dalam menunjang peningkatan pelayanan publik secara kontinyu. Beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, yaitu:

1. Upaya peningkatan budaya kerja dan disiplin kerja pegawai.
2. Masih kurangnya jumlah Aparatur Kecamatan yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai dalam rangka mendukung optimalisasi pelayanan kapada masyarakat
3. Masih kurangnya sumber dana pendukung kerja
4. Peningkatan peran dan fasilitasi kecamatan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah, pelayanan sarana dan prasarana umum serta pencapaian standar pelayanan minimal.

Berdasarkan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan tersebut, dapat diinventarisasi beberapa isu strategis. Inventarisasi isu-isu strategis tahun 2026 didapatkan dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal Kabupaten Banjarnegara sampai dengan tahun 2024. Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan pembangunan. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2026, sebagai berikut:

1. Masih terbatas dan kurangnya kapasitas serta kompetensi perangkat desa
2. Fasilitas pelayanan publik serta sarana dan prasarana pendukung yang masih kurang memadai.
3. Masih adanya desa dengan angka stunting tinggi di wilayah Kecamatan Pandanarum
4. Daerah rawan bencana dengan intensitas kejadian yang cukup tinggi.

2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

RKPD Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Tahun 2005-2026 dan mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2026 dan mengacu pada Renstra Kecamatan Pandanarum Tahun 2023-2026. Berdasarkan hal tersebut, prioritas arah kebijakan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2026 meliputi :

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Akhir RKPD tahun 2025 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil		
	UNSUR KEWILAYAHAN									
	KECAMATAN								**2.236.848.093**	
1)	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terlaksananya Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten**	**Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana**	**100%**	**Kec. Pandanarum**	**Terlaksananya Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten**	**Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana**	**100%**	**2.145.780.993**	**DAU**
	Perencanaan, Penganggaran daen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen dan laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**100%**	**Kec. Pandanarum**	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen dan laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**100%**	**3.925.900**	**DAU**
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	**Kec. Pandanarum**	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	2.239.300	DAU
2)	Koordinasi dan laporan capaian kinerja dan ikhtisar	Tersedianya Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	2 laporan	**Kec. Pandanarum**	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	2 laporan	1.686.600	DAU

	realisasi kinerja SKPD	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
	Administrasi Keuangan perangkat Daerah	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**Kec. Pandanarum**	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**1.920.739.493**	**DAU**
1)	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan dan semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 laporan	**Kec. Pandanarum**	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 laporan	2.275.000	DAU

2)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 orang	**Kec. Pandanarum**	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 orang	1.894.079.493	DAU
3)	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	**Kec. Pandanarum**	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	24.385.000	DAU
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**Kec. Pandanarum**	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**61.697.500**	**DAU**
1)	Penyediaan Bahan logistik kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	11 paket	**Kec. Pandanarum**	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	9 paket	61.697.500	DAU
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**Kec. Pandanarum**	**Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**41.372.900**	**DAU**
1)	Pengadaan Peralatan dan mesin lainya	tersedianya Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan mesin Lainnya Lainnya yang Disediakan	3 unit	**Kec. Pandanarum**	tersedianya Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan mesin Lainnya Lainnya yang Disediakan	3 unit	25.079.300	DAU

	Pengadaan Mebel	tersedianya Mebel	Jumlah Unit mebel yang Disediakan	16 unit	**Kec. Pandanarum**	tersedianya Mebel	Jumlah Unit mebel yang Disediakan	16 unit	16.293.600	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**Kec. Pandanarum**	**Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**69.181.200**	**DAU**
1)	Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya Air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya Air dan listrik yang disediakan	12 laporan	**Kec. Pandanarum**	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya Air dan listrik yang disediakan	12 laporan	7.200.000	DAU
2)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	**Kec. Pandanarum**	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	61.981.200	DAU
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**Kec. Pandanarum**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**48.864.000**	**DAU**
1)	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainya yang dipelihara/Direha	1 unit	**Kec. Pandanarum**	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainya yang dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	0	DAU

		atau Bangunan Lainnya	bilitasi			Lainnya				
2)	Penyediaan jasa Pemeliharaan Biaya pemelihaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 unit	**Kec. Pandanarum**	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 unit	45.400.000	DAU
3)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainya	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi /Direhabilitasi	5 unit	**Kec. Pandanarum**	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Banunan Lainya	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi /Direhabilitasi	5 unit	3.464.000	DAU
2)	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**Prosentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**100%**	**Kec. Pandanarum**	**Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**Prosentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**100%**	**47.832.100**	**DAU**
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	**Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan**	**Prosentase koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan**	**100%**	**Kec. Pandanarum**	**Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan**	**Prosentase koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum**	**100%**	**47.832.100**	**DAU**

		Sarana Pelayanan Umum	**umum**			**Sarana Pelayanan Umum**				
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 dokumen	**Kec. Pandanarum**	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 dokumen	4.177.500	DAU
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang di Limpahkan Kepada Camat**	**Prosentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**100%**	**Kec. Pandanarum**	**Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang di Limpahkan Kepada Camat**	**Prosentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**100%**	**43.654.600**	**DAU**
1)	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan perijinan non usaha	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah dokumen perizinan non usaha yang dilaksanakan	1.250 dok	**Kec. Pandanarum**	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah dokumen perizinan non usaha yang dilaksanakan	1.250 dok	0	DAU

2)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait jumlah dengan Nonperizinan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	200 laporan	**Kec. Pandanarum**	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	200 laporan	3.780.000	DAU
3)	Pelaksanan Urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Jumlah SPPT PBB yang tersalurkan)	1 laporan	**Kec. Pandanarum**	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Jumlah SPPT PBB yang tersalurkan)	1 laporan	39.874.600	DAU
3)	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Terlaksananya program penyelenggaraan pemerintahan umum	**Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**100%**	**Kec. Pandanarum**	Terlaksananya program penyelenggaraan pemerintahan umum	**Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**100%**	**13.685.000**	**DAU**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepada Daerah	**Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Prosentasepenyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah**	**100%**	**Kec. Pandanarum**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Prosentasepenyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah**	**100%**	**13.685.000**	**DAU**
1)	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen Forkompinca yang dilaksanakan	12 dokumen	**Kec. Pandanarum**	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen Forkompinca yang dilaksanakan	12 dokumen	13.685.000	DAU
4)	**PROGRAM**	**Terlaksanaya**	**Prosentase**	**100%**	**Kec.**	**Terlaksanaya**	**Prosentase Program Pembinaan dan**	**100%**	**29.550.000**	**DAU**

	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Pandanarum**	**pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**Pengawasan Pemerintahan Desa**		
	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Prosentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**100%**	**Kec. Pandanarum**	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Prosentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**100%**	**29.550.000**	**DAU**
1)	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8 dokumen	**Kec. Pandanarum**	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	13 dokumen	5.712.500	DAU
2)	Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 dokumen	**Kec. Pandanarum**	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 dokumen	4.900.000	DAU
3)	fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6 dokumen	**Kec. Pandanarum**	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6 dokumen	3.150.000	DAU
4)	Koordinasi	Terlaksananya	Jumlah Laporan	3	**Kec.**	Terlaksananya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi	3 dokumen	3.000.000	DAU

	pendampingan desa di wilayahnya	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	dokumen	**Pandanarum**	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Pendampingan Desa di Wilayahnya			
5)	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 dokumen	**Kec. Pandanarum**	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 dokumen	12.787.500	DAU
6)	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	8 dok	**Kec. Pandanarum**	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	8 dok	0	DAU

Berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2026, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan yaitu:

1. Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor masih sangat minim dan usianya sudah tua sehingga sering mengalami kerusakan;
2. Bangunan gedung kantor banyak yang sudah mengalami kerusakan;
3. Kapasitas dan Kompetensi perangkat Desa masih rendah.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan musrenbang kecamatan dan forum konsultasi publik telah disampaikan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui aplikasi SIPD. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2026 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	NIHIL				

2.6. Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan hasil reses anggota DPRD, melalui aplikasi SIPD telah disampaikan usulan program dan kegiatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Pokok-Pokok Pikiran DPRD

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Validasi
	NIHIL				

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

1.1. 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Pandanarum tahun 2026 disusun dengan memperhatikan penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Selain itu, pengembangan isu-isu strategis daerah juga disusun dengan melakukan penelaahan terhadap isu-isu strategis nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 maupun kebijakan strategis nasional lainnya.

Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahun 2026 dijabarkan ke dalam semua urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten Banjarnegara, adalah :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 6 Kegiatan dan 12 sub kegiatan.
b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

   Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terdiri dari 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan.
c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

   Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan
d. Program Pembinaan dan Pengawasan dan Pemerintah Desa yang terdiri dari 1(satu) Kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan yaitu Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang diarahkan pada sub kegiatan Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa,Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa, Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

1.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagai bagian dari tahapan pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2026, maka Renja Perangkat Daerah mempedomani Renstra PD Tahun 2023-2026 RPJPD Tahun 2005-2026, Untuk itu diperlukan pemahaman mengenai visi RPJPD Tahun 2005-2026. Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.

Visi pembangunan dalam RPJPD Tahun 2005-2026 adalah:

BANJARNEGARA MAJU BERBASIS PERTANIAN

Visi Pembangunan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2026 ini mengarah pada pencapaian tujuan, cita-cita dan harapan masyarakat Kabupaten Banjarnegara. Visi pembangunan daerah tersebut harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, kesejahteraan, dan kelestarian yang ingin dicapai. Oleh karena itu, perlu kiranya diberikan penjelasan makna visi untuk mendapatkan kesamaan persepsi tentang muatan substansi filosofis yang terkandung, sehingga segenap pemangku kepentingan secara sinergis dan optimal dapat memberikan kontribusi dalam rangka pencapaiannya.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan, sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Dengan kata lain tujuan dan sasaran merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Tujuan dan sasaran dalam Renja Perangkat Daerah Kecamatan Pandanarum Tahun 2024-2026 diuraikan sebagai berikut:

a. Tujuan yang ke-5 adalah Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

   Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

b. Tujuan yang Ke 6 adalah Meningkatnya Kualitas Layanan Publik

   Sasaran:

   Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program pada Renja Perangkat Daerah merupakan program prioritas dalam Renstra 2023-2026. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam Renja Perangkat Daerah selanjutnya dijabarkan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Pemilihan untuk masing-masing program/ kegiatan dijabarkan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan 6 (enam) kegiatan yakni :
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      Terdiri dari 2 (dua) sub Kegiatan :
      a.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      a.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      Terdiri dari 3 (tiga) sub Kegiatan :
      b.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      b.2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
      b.3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran
   c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
      Terdiri dari 1 (satu) sub Kegiatan :
      c.1. Penyedia bahan logistik kantor
   d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Terdiri dari 1 (satu) sub Kegiatan :
      d.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      Terdiri dari 2 (dua) sub Kegiatan :
      e.1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
      e.2. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Terdiri dari 3 (tiga) sub Kegiatan :

f.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

f.2. Pemeliharaan/rehabilitatasi sarana prasarana gedung

f.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerntahan dan Pelayanan Publik, 2 (dua) kegiatan yakni :

a. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

Terdiri dari 1 (satu) sub Kegiatan :

a.1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang di Limpahkan Kepada Camat

Terdiri dari 3 (tiga) sub Kegiatan :

b.1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan perijinan non usaha

b.2. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perijinan

b.3. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan

3. Program Urusan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan dengan 1 (satu) kegiatan yakni :

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Terdiri dari 1 (satu) sub Kegiatan:

a.1. Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di wilayah kecamatan

4. Program Pembinaan dan Pengawasan Desa, dengan dengan 1 (satu) kegiatan yakni :

a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Terdiri dari 6 (enam) sub Kegiatan :

a.1. Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa

a.2. Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa

a.3. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

a.4. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa

a.5. Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan keteriban umum

a.6. Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. Renja Perangkat Daerah selanjutnya menjadi platform operasional bagi Perangkat Daerah dalam menjalankan programnya dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka sasaran pembangunan daerah tahun 2026. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026 dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 disepakati.
2. Kerangka pendanaan dalam Renja Perangkat Daerah masih bersifat sementara, sehingga masih dimungkinkan terjadi perubahan pagu yang disebabkan oleh pengurangan, penambahan, dan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan maupun antar sub kegiatan dalam kerangka penyusunan anggaran secara terpadu dan berbasis kinerja.
3. Renja Perangkat Daerah menjadi acuan bagi Kepala Perangkat Daerah dan segenap jajarannya serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, serta menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal : 2025

Plt. Camat Pandanarum,
KECAMATAN PANDANARUM

SRI WAHJUNI, SE
Pembina Tk. I
NIP. 197102172002122006